Laporan Tahunan
2020
Annual Report

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id
www.indonesiaeximbank.go.id

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Laporan Tahunan **2020** Annual Report

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Menjadi Penggerak Pembangunan di Masa Pandemi & Beraspirasi menuju Resiliensi dengan *Agility*

Propelling the Nation during the Pandemic & Aspires toward **Resilience** with **Agility**

Laporan Tahunan
Annual Report | **2020**

Menjadi Penggerak Pembangunan di Masa Pandemi & Beraspirasi menuju Resiliensi dengan *Agility*

Propelling the Nation during the Pandemic & Aspires toward **Resilience** with **Agility**

Tahun 2020 tercatat menjadi salah satu tahun krisis multidimensi dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh dunia. Indonesia pun tak luput harus menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank yang mengimbanginya melalui penguatan fondasi dengan fokus misi "*Regain Our Footing*". Tujuannya agar LPEI tetap menjadi penggerak pembangunan di masa pandemi.

LPEI juga berupaya menjadi Lembaga yang penuh aspirasi menuju resiliensi dengan ketangkasan. Oleh karenanya di tahun 2020, LPEI memfokuskan pada tiga aspek agar mampu cepat beradaptasi dan tetap tangkas dalam situasi sulit. Ketiga aspek tersebut yaitu melakukan restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa Konsultasi, dan penguatan proses Internal. Ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama, serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020.

The global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused a multidimensional crisis throughout the year. The pandemic also affected Indonesia,including Indonesia Eximbank that navigated the situation by strengthening its foundation through its "Regain Our Footing" mission in order to continue propelling the nation during the pandemic.

Indonesia Eximbank also aspires toward resilience with agility. In 2020 Indonesia Eximbank focused on three improvement areas that would accelerate its capability to adapt and remain agile amid a difficult situation. These areas were restructuring and efficiency, selective exercise of mandate and business activities including the Advisory Services, and internal process strengthening. These aspects were translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

KEBERLANJUTAN TEMA

CONTINUITY OF THEMES

2015

Presenting Indonesia at the Global Stage

Sepanjang tahun 2015, Indonesia Eximbank terus berkiprah untuk membawa Indonesia mendunia. Sebagai sebuah Lembaga Pembiayaan Ekspor, Indonesia Eximbank memiliki kekhususan lembaga dalam penyediaan fasilitas Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, maupun layanan Jasa Konsultasi untuk mendukung ekspor dan kegiatan penunjang ekspor. Produk dan layanan kami dirancang khusus agar mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing komoditas dan produk ekspor Indonesia di pasar dunia.

Throughout 2015, Indonesia Eximbank played its role to bring Indonesia to the global stage. Indonesia Eximbank performs its mandate through providing financing, Guarantee, Insurance, and Advisory Services to support export-oriented sector. Our products and services are designed to improve the export competitiveness of Indonesian commodities and products to the global market.

2016

Creating Competitive Advantage

Gejolak perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir ini berdampak pada stagnasi dan bahkan pelemahan kinerja ekspor Indonesia yang merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini semakin menggarisbawahi pentingnya penguatan peran Indonesia Eximbank, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang diberi mandat untuk mensukseskan program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

The volatility in global economies during the recent years had impacted on the stagnation and even the weakening of Indonesia's exports, as one the mainstays of national economic growth. This serves to highlight the importance of a strengthened Indonesia Eximbank as an extension of the Government with a mandate to promote the national export program through the provision of financing, guarantee and insurance products.

2017

Our Vision to Strengthen Capabilities

Indonesia Eximbank tetap fokus pada upaya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global dan terus memperluas negara tujuan ekspor non tradisional. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia Eximbank menerapkan tiga lembaga strategi yaitu menjaga kualitas produk dan jasa; memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi untuk para eksportir; serta memberikan pelayanan prima (*service excellence*).

Indonesia Eximbank continued to focus on driving Indonesia's export competitiveness in the global market and expanding the destinations of non-traditional exports. To achieve its goals, Indonesia Eximbank applies three prong strategies, namely maintaining product and service quality, providing financing, guarantee, insurance, and advisory services for exporters, and providing service excellence.

2018

Unlocking Developmental Potential, Expanding Export Boundaries

Pengembangan ekosistem ekspor merupakan salah satu pilar utama dari strategi akselerasi peningkatan ekspor nasional Indonesia. Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjadi katalis ekspor Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melakukan upaya-upaya berkesinambungan untuk memperkokoh posisinya dalam ekosistem ekspor nasional. Upaya-upaya tersebut mencakup peningkatan fokus pembiayaan ke sejumlah lembaga komoditi unggulan pemerintah, penetrasi ke pasar ekspor non-tradisional, mendorong UKM berorientasi ekspor, serta melaksanakan penugasan khusus bersinergi dengan beberapa BUMN. Kesemua upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan LPEI terhadap pengembangan ekspor nasional.

Development of export ecosystem represents one of the core pillars of the strategies for acceleration of Indonesia's national exports. As the institution with the mandate to be a catalyst for Indonesian export, Indonesia Eximbank engages in continuing efforts to solidify its position within the national export ecosystem. These efforts include increased focus on financing a number of governments designated leading export commodities, penetration to non-traditional export markets, encouraging growth of export-oriented MSMEs, and the implementation of special-assignment export projects in synergy with a number of other SOEs. In these ways, Indonesia Eximbank is optimizing support to the development of Indonesia's national export.

KEBERLANJUTAN TEMA
CONTINUITY OF THEMES

2019

Revitalizing Our Foundation in Foresting Our Role and Mandate

LPEI terus berupaya mengoptimalkan perannya menjadi lembaga yang berstatus *sui generis* mampu berkontribusi besar bagi peningkatan ekspor nasional dengan tetap mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta manajemen risiko yang baik dan kehati-hatian guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dukungan LPEI terhadap peningkatan ekspor nasional selama tahun 2019, dilakukan melalui penyaluran fasilitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi; penyediaan tingkat suku bunga yang terjangkau bagi eksportir terutama untuk segmen UKM berorientasi ekspor (UKME); pembiayaan kepada komoditi ekspor potensial dan jasa; serta penambahan jumlah eksportir baru (UKME) melalui program *Coaching Program For New Exporters* dari kegiatan jasa konsultasi. LPEI juga memberikan catatan positif, khususnya dalam hal dampak ekonomi dan sosial (*developmental impacts*) yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran dampak ekonomi dan sosial (*developmental impacts*), fasilitas pembiayaan yang disalurkan LPEI dapat berkontribusi terhadap kenaikan ekspor sebesar 3,6 kali Pembiayaan dan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,7 kali Pembiayaan.

Indonesia Eximbank continued to optimize its role as an institution sui generis that is able to contribute to the sustainable growth of national exports while upholding the principles of good governance, rigorous risk management, and prudence. The Company's support in enhancing national export during 2019 is manifested through financing, guaranteeing, and insurance facilities, provided competitive interest rate to exporters particularly in the export-oriented SMEs segment, financing to potential export commodities and services, and contributed in increasing the number of new exporters by holding a coaching program as part of Indonesia Eximbank's advisory segment. Indonesia Eximbank also delivered positive outcome, specifically in terms of developmental impacts in both economy and social aspects. Based on the measurement of developmental impacts, Indonesia Eximbank was able to contribute through financing facility an increase of export by 3.6 times Financing and an increase of Gross Domestic Product (GDP) by 2.7 times Financing.

2020

Propelling the Nation during the Pandemic & Aspires toward Resilience with Agility

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengimbangi masa pandemi di tahun 2020 melalui penguatan fondasi dengan misi "*Regain Our Footing*". Tujuannya agar LPEI tetap menjadi penggerak pembangunan di masa pandemi. LPEI juga berupaya menjadi Lembaga yang penuh aspirasi menuju resiliensi dengan ketangkasan. Oleh karenanya di tahun 2020, LPEI memfokuskan pada tiga aspek agar mampu cepat beradaptasi dan tetap tangkas dalam situasi sulit. Ketiga aspek tersebut yaitu melakukan restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa Konsultasi, dan penguatan proses Internal. Ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama, serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020.

Indonesia Eximbank navigated the crisis in 2020 by strengthening its foundation through its "Regain Our Footing" mission in order to continue propelling the nation during the pandemic. Indonesia Eximbank also aspires toward resilience with agility. To that end, in 2020 Indonesia Eximbank focused on three improvement areas that would accelerate its capability to adapt and staying agile amid a difficult situation. These areas were restructuring and efficiency, selective exercise of mandate and business activities including the Advisory Services, and internal process strengthening. These aspects have been translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

2 KEBERLANJUTAN TEMA
CONTINUITY OF THEMES
4 DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

12
IKHTISAR UTAMA 2020
Highlights 2020

14 RINGKASAN KINERJA 2020
PERFORMANCE SUMMARY 2020
18 IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS
20 IKHTISAR OBLIGASI
BONDS HIGHLIGHTS
23 PERISTIWA PENTING 2020
2020 EVENTS HIGHLIGHTS

28
LAPORAN MANAJEMEN
Management Reports

31 LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT
44 DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS
46 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT
62 DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS
64 LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
REPORT FROM THE SHARIA SUPERVISORY BOARD
68 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2020 OLEH DEWAN DIREKTUR
STATEMENTS OF ACCOUNTABILITY OF 2020 ANNUAL REPORT BY THE BOARD OF DIRECTORS
69 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2020 OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
STATEMENTS OF ACCOUNTABILITY OF 2020 ANNUAL REPORT BY THE EXECUTIVE DIRECTORS & MANAGING DIRECTORS

70
PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

72 IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY
73 SEKILAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
INDONESIA EXIMBANK AT A GLANCE
77 PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES
79 JEJAK LANGKAH
MILESTONES
84 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE
86 VISI & MISI
VISION & MISSION
87 BUDAYA KERJA LEMBAGA
CORPORATE CULTURE
88 PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE
94 PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE
99 MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT
108 DEMOGRAFI PEGAWAI
EMPLOYEES DEMOGRAPHY
110 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TAHUN 2020
HR COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT IN 2020
112 INFORMASI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS INFORMATION
112 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION
113 ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI
SUBSIDIARIES & ASSOCIATES
113 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
COMPANY GROUP STRUCTURE
114 KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN
OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY
118 LEMBAGA PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS
120 ALAMAT KANTOR
OFFICE ADDRESS
121 PENGHARGAAN
AWARDS
122 INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN
INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

124
ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

126 TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW
146 TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW
161 TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT
161 PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT
170 PEMBIAYAAN
FINANCING
186 PENJAMINAN
GUARANTEE
196 ASURANSI
INSURANCE
203 JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES
216 PENGELOLAAN TRESURI
TREASURY MANAGEMENT
221 TRADE FINANCE
TRADE FINANCE
227 TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW
258 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
273 TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

280
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

291 RAPAT PENGESAHAN
RATIFICATION MEETINGS
294 DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS
300 DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR
307 RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS
333 INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI
INFORMATION ON ULTIMATE AND CONTROLLING SHAREHOLDERS
334 KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA
POLICY ON THE DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR, AND MANAGING DIRECTOR
335 HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA
FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTORS
336 PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA
GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR-MANAGING DIRECTORS
339 REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS
348 DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD
354 ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR
354 KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
372 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE
379 KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE
387 ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF
EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS
395 SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR
SECRETARY TO THE BOARD OF DIRECTORS
397 SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY
409 UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT
423 AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT
425 FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION
434 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT
460 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM
462 PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI
LITIGATION
464 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
INFORMATION ACCESS AND COMPANY DATA
465 KODE ETIK
CODE OF CONDUCT
469 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM
475 PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION
481 PENILAIAN GCG
GCG ASSESSMENT
483 PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS & SERVICES PROCUREMENT
487 PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)
491 TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA
TRANSPARENCY OF INSTITUTION FINANCIAL AND NON-FINANCIAL
495 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES
501 BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI
SHARE BUY BACK AND BOND BUY BACK
501 RENCANA STRATEGIS LEMBAGA TAHUN 2020
COMPANY STRATEGIC PLAN IN 2020
502 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR
DISTRIBUTION OF FUND TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURES
502 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN POLITIK
FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES AND POLITICAL INTERESTS

504
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

509 TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
511 TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL & KEMASYARAKATAN
RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL & COMMUNITIES DEVELOPMENT
515 TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
RESPONSIBILITY TOWARDS EMPLOYMENT & OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
525 TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS CUSTOMERS

528
LAPORAN PROGRES KEBERLANJUTAN LPEI 2020
Indonesia Eximbank Sustainability Progress Report 2020

546
LAPORAN KEUANGAN 2020
Financial Statements 2020

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

LPEI KEMBANGKAN DESA DEVISA, RAIH PENGHARGAAN GLOBAL CSR AWARD

INDONESIA EXIMBANK'S DESA DEVISA RECEIVED GLOBAL CSR AWARD

LPEI atau Indonesia Eximbank meluncurkan *pilot project* berupa program Desa Devisa di Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir tahun 2019 yang lalu. Program ini merupakan pengembangan dari kegiatan komunitas petani penghasil kakao. Program ini dinilai berhasil di mata internasional. Melibatkan 600 petani kakao yang lebih dari separuhnya kaum perempuan, program ini dianugerahi penghargaan Global CSR Award untuk kategori "*Empowerment of Women*" pada 15 September 2020.

Indonesia Eximbank launched "Desa Devisa" pilot project in Jembrana Regency, Bali, in 2019. The program, which focused on fostering a cacao farming community, has been recognized internationally for its success. Involving 600 cacao farmers with more than half are women, the program received an award in the Global CSR Award for "Empowerment of Women" category on 15 September 2020.

LPEI dinilai memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan prinsip keberlanjutan usaha dan menerapkan tanggung jawab sosial lembaga yang memberi dampak nyata. Para juri juga mengapresiasi program yang menerapkan standar dan target bisnis sambil menggunakan prinsip dampak sosial dan lingkungan. Keberhasilan LPEI meraih penghargaan, merupakan bukti nyata bahwa program Desa Devisa di Bali, telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong para petani semakin mampu melahirkan berbagai produk yang inovatif, hingga menembus pasar global.

Indonesia Eximbank was awarded for its outstanding commitment to business sustainability and social responsibility, which was translated into tangible impacts. The judges also appreciated the program's business vision whilst observing social and environmental sustainability principles. The award evidenced how "Desa Devisa" in Bali has generated concrete benefits for the people and encouraged farmers to produce innovative products that are competitive for the global market.

"LPEI juga menaruh perhatian tidak hanya terhadap pelaku UKM berorientasi ekspor, namun juga kepada pemasok dari eksportir yang membutuhkan pendanaan melalui skema *Supply Chain Financing*, dimana produknya akan diekspor melalui perusahaan lain yang lebih besar."

"Indonesia Eximbank focuses on not only export-oriented SMEs, but also suppliers of exporters who need financing support by offering Supply Chain Financing scheme, where their products will be exported by a larger enterprise."

LPEI BERI FASILITAS PEMBIAYAAN BAGI UMKM BERORIENTASI EKSPOR

INDONESIA EXIMBANK OFFERS FINANCING FOR EXPORT-ORIENTED MSMEs

LPEI atau Indonesia Eximbank kembali mendapat mandat untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor (PKE UKM).

Program Penugasan Khusus Ekspor kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilakukan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan sehingga dapat mengakomodir hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha UKM dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan komersial. Program ini diberikan sebagai bentuk stimulus kepada pelaku UKM beriorentasi ekspor yang terdampak Covid-19. Pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah Usaha Kecil dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 yang berorientasi ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung (tier 1). Program ini juga menjadi bukti bahwa LPEI memberi dukungan penuh kepada sektor UMKM.

LPEI juga menaruh perhatian tidak hanya terhadap pelaku UKM berorientasi ekspor, namun juga kepada pemasok dari eksportir yang membutuhkan pendanaan melalui skema *Supply Chain Financing*, dimana produknya akan diekspor melalui perusahaan lain yang lebih besar. Dengan demikian terjadi sinergi dan saling dukung antar rantai pasok ekspor, sehingga produk Indonesia diharapkan benar-benar mampu memenuhi permintaan pasar ekspor.

Indonesia Eximbank has also been mandated to support the acceleration of national economic recovery, according to Finance Minister Decree 372/KMK.08/2020 on National Interest Account of Indonesia Eximbank to Support Export-oriented Small and Medium Enterprises.

The National Interest Account (NIA) Program for SMEs provides financing facility that will help business owners overcome their challenges in obtaining the facility from commercial banks. The program serves as stimulus for export-oriented SMEs that are affected by the Covid-19 pandemic. This program targets SMEs with direct or indirect export orientation (tier 1 SMEs) according to Law No. 20 of 2008 and shows Indonesia Eximbank's full support to the MSME sector.

Moreover, Indonesia Eximbank also focuses on suppliers of exporters who need financing support, which will be offered under Supply Chain Financing scheme, where their products will be exported by a larger enterprise. This scheme promotes synergy and collaboration in export supply chains, which will enable Indonesia to meet export demands.

KEWENANGAN LPEI DIPERLUAS MENJADI PENJAMIN KREDIT KORPORASI

INDONESIA EXIMBANK'S MANDATE EXPANDED TO CORPORATE CREDIT GUARANTEE

Kebijakan Terbaru Pemerintah dalam Program PEN untuk Dukung Korporasi

The Government Announces Latest Policy in PEN to Support Corporations

Sesuai dengan mandat dari Kementerian Keuangan, LPEI dirancang untuk memberikan fasilitas kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor, namun mengingat kondisi saat ini, perannya diperluas untuk industri substitusi impor yang bisa memberikan dampak yang positif. Hal ini merupakan sesuatu yang membuat *Special Mission Vehicle* (SMV) nya Kementerian Keuangan semakin memiliki kemampuan menjawab tantangan yang ada. LPEI akan berkontribusi dalam skema penjaminan atas pemberian modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha korporasi padat karya. Kapasitas LPEI adalah sebagai lembaga penjamin yang memiliki jenis penjaminan *sovereign guarantee,* yang didukung oleh penyertaan modal negara (PMN).

Based on its mandate from the Finance Ministry, Indonesia Eximbank is designed to facilitate export-oriented businesses. Due to current situation, however, its role has been expanded to also support import substitute industries that can drive positive impacts. This will also enable Indonesia Eximbank to carry out its mandate as the Special Mission Vehicle of the Finance Ministry to grow its capability to address challenges. Indonesia Eximbank will now contribute in providing guarantee for working capital loan from banks to labour intensive corporations. Indonesia Eximbank has a capacity as a sovereign guarantee provider that is backed with state equity participation (SEP).

IKHTISAR UTAMA 2020

Highlights 2020

LPEI mampu menguatkan

Capital Adequacy Ratio (CAR)

menjadi **28,1%**

di tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebesar 17,3%.

Indonesia Eximbank was able to strengthen its Capital Adequacy Ratio (CAR) to 28.1% in 2020 compared to 17.3% in 2019.

RINGKASAN KINERJA 2020

PERFORMANCE SUMMARY 2020

MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DAN EFISIENSI

RESTRUCTURING AND EFFICIENCY

- Pengelolaan & Perbaikan Kualitas Pembiayaan
- Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan terdampak COVID-19
- Pengelolaan Likuiditas LPEI yang *Sustainable* dan Efisien
- Penerapan *Cost Efficiency* secara Optimal

- Management & Improvement of financing quality
- Financing Relaxation for Covid-19 affected business
- Sustainable and Efficient Liquidity Management
- Optimal Cost Efficiency

Inisiatif Strategis 2020

Strategic Initiatives in 2020

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berupaya mengoptimalkan proses restrukturisasi, dan *recovery* dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan.
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melaksanakan relaksasi pembiayaan atas debitur-debitur yang terdampak COVID-19 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senantiasa menjaga kondisi likuiditas yang dilakukan melalui pendanaan USD dan Rupiah, serta perolehan pinjaman bilateral untuk mendukung terjaganya likuiditas. LPEI juga bekerjasama dengan multilateral *agency*/Eximbank negara lain dalam mengelola likuiditas yang efisien. LPEI juga melakukan oprtimalisasi manajemen likuiditas untuk dapat menurunkan biaya dana.
- Efisiensi biaya operasional dilakukan melalui optimalisasi penggunaan *fixed asset*/ruang kantor, pengelolaan konsultan secara selektif, dan penyempunaan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga senantiasa membangun budaya *cost efficiency* secara berkesinambungan dalam melakukan aktifitasnya.

- Indonesia Eximbank sought to optimize restructuring, and recovery process to maintain financing quality.
- Indonesia Eximbank implemented financing relaxation for debtors affected by COVID-19. This was in line with Law No. 2 of 2020 and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 14/POJK.05/2020 on Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for Non-Bank Financial Services Institutions.
- Indonesia Eximbank maintained liquidity carried out through USD and Rupiah funding, as well as through bilateral loans. Indonesia Eximbank also cooperated with multilateral agencies/eximbanks of other countries to manage liquidity efficiently. Indonesia Eximbank also optimized liquidity management to reduce cost of funds.
- Operational cost efficiency is conducted by optimizing the utilization of fixed assets/office spaces, selective exercise of consultancy work, and improving procurement mechanism. Indonesia Eximbank also continuously promotes cost-efficiency culture in its activities.

RINGKASAN KINERJA 2020
PERFORMANCE SUMMARY 2020

MENJALANKAN MANDAT DAN BISNIS SECARA SELEKTIF

SELECTIVE EXERCISE OF MANDATE AND BUSINESS

- Peningkatan Pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi dan *Trade Finance*
- Increasing NIA Financing, Guarantee, Insurance and Trade Finance

Inisiatif Strategis 2020

Strategic Initiatives in 2020

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan pengembangan bisnis dengan sangat selektif untuk menjaga kualitas aset. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga terus menjalankan mandatnya untuk menyalurkan pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau *National Interest Account* (NIA), dan program Penjaminan Pemerintah. Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk melaksanakan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) hingga akhir tahun 2020 sebesar Rp6,2 triliun. PMN tersebut telah dialokasikan secara penuh ke dalam tujuh program yaitu PKE Kereta, PKE Pesawat Udara, PKE KEK Mandalika, PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, PKE UKM, PKE Industri Penerbangan, dan PKE *Trade Finance*.
- Indonesia Eximbank was strictly selective in conducting business development in order to maintain asset quality. It also continued to exercise its mandate to channel the National Interest Account and Government Guarantee. As per December 2020, Indonesia Eximbank received a total of Rp6.2 trillion of State Equity Participation (SEP) to be used in NIA activities. The SEP was allocated to seven NIA projects: railway, aircrafts, the Mandalika SEZ; Africa, South Asia, and the Middle East; export-oriented SMEs, aviation industry, and trade finance.

RINGKASAN KINERJA 2020
PERFORMANCE SUMMARY 2020

PENGUATAN PROSES INTERNAL

INTERNAL PROCESS STRENGTHENING

- Penguatan Organisasi Kelembagaan
- Penguatan Komunikasi kepada *Stakeholders*
- Pemenuhan Rekomendasi Auditor Eksternal
- Penguatan Operasional, Tata Kelola, Manajemen Risiko

- Organizational and Institutional Strengthening
- Increased Stakeholder Engagement
- Fulfillment of External Auditor's Recommendations
- Operational, Governance, and Risk Management Strengthening

Inisiatif Strategis 2020

Strategic Initiatives in 2020

- Organisasi yang *agile* sesuai dengan kebutuhan dan dinamika bisnis juga harus didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan penyesuaian struktur organisasi, penyempurnaan struktur anggota dari komite-komite, memperkuat struktur organisasi pengelolaan aset bermasalah, serta meningkatkan kinerja dan kapabilitas SDM melalui berbagai macam program sertifikasi.

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menguatkan *stakeholder engagement* dengan menjaga komunikasi kepada *stakeholders*, pemenuhan laporan secara berkala dan tepat waktu, serta menyampaikan *update* isu-isu strategis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Menyelesaikan rekomendasi auditor eksternal di tahun 2020 sebagai bagian dari penguatan proses internal.

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan penyempurnaan model bisnis, sistem, pembuatan *Management Information System blueprint*, dan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Selain itu, juga melakukan penguatan manajemen risiko antara lain dengan *Risk Management Framework* (*sui generis*), *Risk Appetite Statement*, *Portfolio Guideline*, dan sosialisasi pilar tata kelola lembaga.

- In order to meet business requirements and anticipate the dynamics, an agile organization should be supported by capable human resources. Therefore, Indonesia Eximbank adjusted its organizational structure, improved the membership structure of its committees, strengthened non-performing asset management organization, and improved the overall performance and capabilities of its people through various certification programs.

- To better communicate with its stakeholders, Indonesia Eximbank ensures its reports are regularly updated and summited timely. It also provides updates on strategic issues relevant to Indonesia Eximbank.

- Completion of external auditor's recommendations in 2020 as part of strengthening the internal process.

- Indonesia Eximbank upgraded its business model, systems, and created Management Information System (MIS) blueprint. It also applied the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71. In order to strengthen risk management, Indonesia Eximbank improved its Risk Management Framework (sui generis), Risk Appetite Statement (RAS), Portfolio Guideline, and disseminated the pillars of governance.

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

POSISI KEUANGAN	2020	2019	2018	2017	2016	FINANCIAL POSITION
Total Aset	92.084.560	108.701.725	120.071.057	110.475.577	100.669.017	Total Assets
Portofolio Tresuri	14.091.697	18.466.036	12.422.358	9.564.188	11.296.139	Treasury Portfolio - Gross
Portofolio Pembiayaan dan Piutang - Bruto	90.408.073	97.806.606	108.858.667	101.012.284	88.531.570	Financing and Receivables Portfolio- Gross
Tagihan Derivatif	-	1.410	1.283	3.976	7.920	Derivatives Receivable
Piutang Asuransi dan Penjaminan	34.631	1.400	5.415	5.580	3.628	Insurances Receivable
Aset Reasuransi	1.284	4.853	3.728	2.084	3.177	Reinsurances Assets
Tagihan Akseptasi	558.417	658.289	1.407.413	1.485.828	1.546.222	Acceptances Receivable
Total Liabilitas	**67.288.011**	**89.762.973**	**98.881.645**	**89.207.566**	**83.228.452**	**Total Liabilities**
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Bruto	36.524.500	45.209.502	44.169.595	39.972.728	39.904.096	Debt Securities Issued - Gross
Pinjaman yang Diterima	28.599.773	41.492.912	49.858.784	44.530.307	38.499.396	Fund Borrowings
Utang Asuransi	2.563	2.150	3.061	3.312	1.616	Insurances Payable
Utang Penjaminan	560	497	572	2.599	2.101	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	3.230	6.515	4.109	2.963	3.333	Insurances Liabilities
Total Ekuitas	**24.796.549**	**18.938.752**	**21.189.412**	**21.268.011**	**17.440.565**	**Total Equity**
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF						STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan Operasional - Neto	1.157.483	1.709.727	2.463.674	2.766.412	2.583.313	Total Operating Income - Net
Pendapatan Bunga	5.102.881	7.061.466	7.541.717	7.327.072	6.480.420	Interest Income
Beban Bunga	(4.262.993)	(5.646.218)	(5.415.182)	(4.947.856)	(4.229.466)	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	839.888	1.415.248	2.126.535	2.379.216	2.250.954	Net Interest Income
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(423.080)	(6.681.341)	(1.700.719)	(928.898)	(196.615)	Provision for Impairment Losses on Financial Assets Value
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	(1.946)	6.802	(5.578)	(900)	(2.449)	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional - Neto	(676.887)	(691.234)	(661.614)	(611.424)	(585.076)	Total Operating Expense - Net
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	6.152	21.188	14.458	16.086	14.102	Non-Operating Income (Expense) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	61.722	(5.634.858)	110.221	1.241.276	1.813.275	Profit (Loss) Before Tax
Laba (Rugi) Setelah Pajak	288.388	(4.710.849)	171.673	1.016.608	1.410.370	Profit (Loss) After Tax
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain –Neto	109.837	15.982	25.330	(6.797)	46.864	Other Comprehensive Income (Expense) - Net
Laba (Rugi) Komprehensif	398.225	(4.694.867)	197.003	1.009.811	1.457.234	Comprehensive Income (Loss)
KOMITMEN & KONTINJENSI						COMMITMENT & CONTINGENCIES
Irrevocable L/C Masih Berjalan	164.415	280.657	1.052.563	1.121.059	795.952	Outstanding Irrevocable L/C
Penjaminan yang Diberikan	9.908.992	10.127.895	11.307.056	10.551.440	8.125.555	Guarantee Facility
Asuransi Ekspor	8.108.726	8.178.647	11.322.172	9.973.711	9.434.140	Export Insurance
RASIO KEUANGAN (%)						FINANCIAL RATIO (%)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit	29,47	17,62	17,57	18,07	16,73	Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit dan Pasar	28,07	17,32	17,43	17,99	16,72	Market & Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
NPL Gross	26,08	23,39	13,73	6,81	3,99	NPL Gross
NPL Neto	11,49	13,96	10,31	4,78	2,65	NPL Net
Pengembalian atas Aktiva (ROA)	0.06	-4,84	0,10	1,17	1,96	Return on Assets (ROA)
Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	1.41	-21,63	0,81	5,83	10,81	Return on Equity (ROE)
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	0.77	1,18	1,83	2,25	2,58	Net Interest Income to Earning Assets (NIM)
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	100.25	179,63	100,51	86,17	73,50	Operating Expenses to Operating Income
Posisi Devisa Neto	16.96	9,70	4,68	2,31	0,52	Net Open Position
Kewajiban terhadap Ekuitas (kali)	2,71	4,74	4,67	4,19	4,77	Liabilities to Equity (times)
Kewajiban terhadap Aset (kali)	0,73	0,83	0,82	0,81	0,83	Liabilities to Assets (times)

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Total Aset
Total Assets

Rp Miliar | Rp Billion

Pembiayaan - Bruto
Financing - Gross

Rp Miliar | Rp Billion

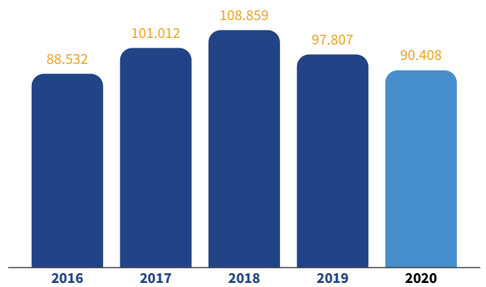

Asuransi
Insurance

Rp Miliar | Rp Billion

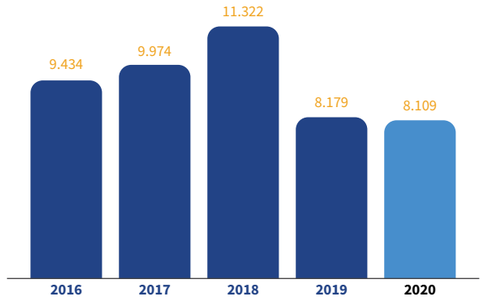

Penjaminan yang Diberikan
Guarantee Facility

Rp Miliar | Rp Billion

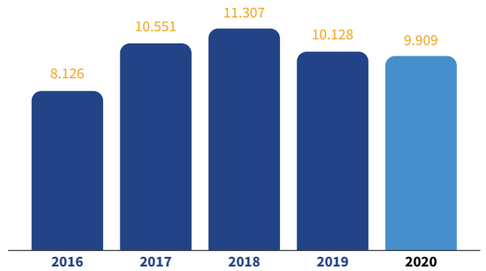

Ekuitas
Equity

Rp Miliar | Rp Billion

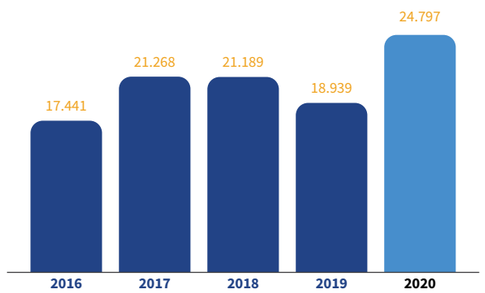

Laba Bersih
Net Profit

Rp Miliar | Rp Billion

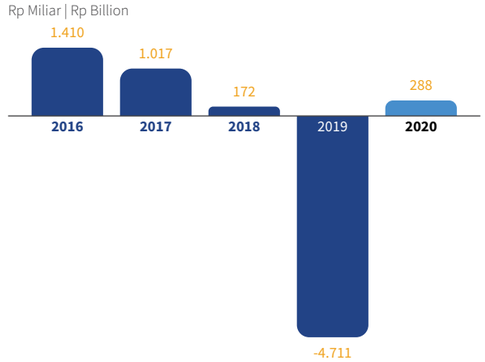

IKHTISAR OBLIGASI

BONDS HIGHLIGHTS

Ikhtisar Obligasi

Berikut outstanding efek Indonesia Eximbank per Tahun Buku 2020:

Bonds Highlights

The following are securities outstanding of Indonesia Eximbank for Fiscal Year 2020:

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
Obligasi dalam mata uang Rupiah | Bonds denominated in Rupiah								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds II Phase VII of 2016*	C	1,732	9.60%	19-Feb-16	19-Feb-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase I of 2016*	C	2,252	8.70%	08-Jun-16	08-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase II of 2016*	C	1,582	8.35%	15-Jul-16	25-Aug-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase III of 2016*	C	282	8.20%	22-Nov-16	22-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,038	8.50%	22-Nov-16	22-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase IV of 2017*	C	748	8.90%	23-Feb-17	23-Feb-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,007	9.20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1,266	9.40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase V of 2017*	B	436	7.90%	15-Aug-17	15-Aug-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,786	8.25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase VI of 2018*	A	610	6.35%	14-Feb-18	14-Feb-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1,650	6.70%	14-Feb-18	14-Feb-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	206	6.90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018*	A	938	7.50%	06-Jun-18	6-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	35	7.70%	06-Jun-18	6-Jun-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,756	8.30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase II of 2018*	B	190	7.50%	05-Sep-18	5-Sep-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	276	8.40%	05-Sep-18	5-Sep-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,324	8.75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase III of 2018*	B	81	8.75%	08-Nov-18	8-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	28	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	380	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase IV of 2019*	B	935	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,523	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9.25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9.50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9.80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
12	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase V of 2019*	B	621	8.45%	09-Jul-19	9-Jul-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	330	8.70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9.20%	09-Jul-19	9-Jul-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
13	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VI of 2019*	B	15	7.80%	03-Sep-19	3-Sep-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	6	8.10%	03-Sep-19	3-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	715	8.50%	03-Sep-19	3-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
14	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VII of 2019*	B	101	7.80%	29-Oct-19	29-Oct-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	26	8.10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8.50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	220	8.75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
15	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 *Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VIII of 2019*	A	88	7.50%	06-Dec-19	6-Dec-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1,551	7.90%	06-Dec-19	6-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	23	8.20%	06-Dec-19	6-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
16	Obligasi PUB IEB V Tahap I Tahun 2020 *PUB IEB Bonds V Phase I of 2020*	-	48	7.60%	08-Jul-20	8-Jul-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi | Total Bonds			**27,905**					

IKHTISAR OBLIGASI

BONDS HIGHLIGHTS

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
Sukuk dalam mata uang Rupiah | Sukuk denominated in Rupiah								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 *Indonesia Eximbank* Sukuk Mudharabah *I Phase I of 2018*	B	365	7.50%	06-Jun-18	6-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 *Indonesia Eximbank* Sukuk Mudharabah *I Phase II of 2018*	B	250	8.75%	08-Nov-18	8-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	14	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	155	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 *Indonesia Eximbank* Sukuk Mudharabah *I Phase III of 2019*	B	145	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	66	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 *Indonesia Eximbank* Sukuk Mudharabah *II Phase I of 2020*	-	100	6.75%	08-Jul-20	18-Jul-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Sukuk | Total Sukuk			**1,095**					

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
MTN dalam mata uang Rupiah | MTN denominated in Rupiah								
1	MTN I Indonesia Eximbank Tahun 2016 *Indonesia Eximbank* MTN *I of 2016*	-	500	8.65%	15-Jul-16	15-Jul-21	-	idAAA (Pefindo)
Jumlah MTN Rupiah | Total MTN Rupiah			**500**					

PERISTIWA PENTING 2020

2020 EVENTS HIGHLIGHTS

08 JAN

Penandatanganan Nota Kesepahaman LPEI dan Kementerian Luar Negeri untuk Mendukung Diplomasi Ekonomi
Signing of Memorandum of Understanding between Indonesia Eximbank and Ministry of Foreign Affairs to Support Economic Diplomacy

LPEI dan Kementerian Luar Negeri RI sepakati Kerja Sama untuk mendukung Diplomasi Ekonomi di Kantor Kementerian Luar Negeri RI dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2020.

Indonesia Eximbank and Indonesian Ministry of Foreign Affaris agreed to support Economic Diplomacy. This was announced at the Ministry's office during the Ministry's 2020 Annual Press Conference.

15 JAN

Peresmian Kantor Bersama Ekspor
Inauguration of an Export Joint Office

LPEI Jalin Kerja Sama dengan LNSW Bentuk Kantor Bersama Ekspor pada tanggal 15 Januari 2020.

Indonesia Eximbank collaborated with the National Single Window Institution (LNSW) by opening a Joint Export Office on 15 January 2020.

17 JAN

Penandatanganan Fasilitas Kredit Investasi dengan ITDC
Signing of Investment Credit Facility with ITDC

19 MAY

Sinergi SMV : SMV di bawah Kemenkeu berikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19 di Muara Angke
SMV Synergy: Joint Donations of SMVs under the Finance Ministry for Covid-19 affected community in Muara Angke

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bersama *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) berupa donasi sebanyak 10 unit wastafel portabel dan 50 paket sembako kepada masyarakat khususnya warga kampung nelayan Blok Eceng yang berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.

Indonesia Eximbank and other Special Mission Vehicles (SMVs) under the Finance Ministry carried out a joint corporate social responsibility initiative of donating 10 hand washing portable stand and 50 staple food packages to a fishing community in the Blok Eceng, Muara Angke.

20 FEB

Focus Group Discussion (FGD) Produk Penjaminan LPEI dengan Kemenkeu & Kemenkumham.

FGD on Indonesia Eximbank Guarantee Products with Ministry of Finance and Ministry of Law and Human Rights.

11 MAR

Dialog Nasional Perdagangan 2020
National Trade Dialogue 2020

Dialog Nasional "Memperbaiki Neraca Perdagangan dengan Mendorong Ekspor dan Mengelola Impor", Jakarta, 11 Maret 2020.

National Dialogue "Improving Trade Balance by Pushing Export and Managing Import", Jakarta, 11 March 2020.

PERISTIWA PENTING 2020
2020 EVENTS HIGHLIGHTS

20 MAY

Sinergi SMV : Optimis Lewat Nada
SMV Synergy: Staying Optimistic through Songs

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bersama Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI berinisiatif dan bersinergi melakukan penggalangan dana membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ataupun mereka yang membutuhkan uluran tangan, melalui konser musik virtual yang mengandeng salah satu artis kebanggaan tanah air, @dr_tompi.

Indonesia Eximbank and other Special Mission Vehicles (SMVs) under the Finance Ministry joined hands in a fundraising event to help Covid-19 affected communities and others in need. The event featured a virtual music concert of Indonesia's well-known singer, @dr_tompi.

08 JUN

Pengangkatan Kasan sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI
Appointment of Mr. Kasan as Member of Indonesia Eximbank's Board of Directors

Kementerian Keuangan RI mengangkat Kasan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Indonesian Ministry of Finance appointed Mr. Kasan as a member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank.

23 JUN

Webinar Penjaminan Kredit LPEI
Indonesia Eximbank's Credit Guarantee Webinar

Dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI melaksanakan Web Seminar yang bertajuk "Efektivitas Stimulus Fiskal dan Sektor Keuangan untuk Menghidupkan Sektor Riil di Masa Pandemi", yang diselenggarakan oleh Infobank bekerja sama dengan Ikatan Alumni Asian Institute of Management Indonesia (IAAIMI).

Supporting the national economy recovery efforts, Indonesia Eximbank hosted a webinar titled "The Effectiveness of Fiscal Stimulus and the Financial Sector in Reviving the Real Sector During the Pandemic". The event was organized by Infobank and the Alumni Association of Asian Institute of Management Indonesia (IAAIMI).

26 JUN

LPEI dan Bank Mandiri Sepakati Kerja Sama Penjaminan Kredit Bank untuk Dorong Ekspor Nasional
Indonesia Eximbank and Bank Mandiri Signed Credit Guarantee Cooperation to Boost National Exports

Penandatanganan kerja sama LPEI dan Bank Mandiri dalam rangka Penjaminan Kredit Bank untuk Dorong Ekspor Nasional.

Indonesia Eximbank and Bank Mandiri Signed Credit Guarantee Cooperation to Boost National Exports.

10 JUL

LPEI Salurkan Bantuan Wastafel Portabel & Thermo Gun Kepada Pelaku Usaha
Signing Indonesia Eximbank Donated Portable Hand Washing Portable Stand & Thermo Guns for Business Players

Pemberian 250 unit wastafel portabel dan 250 unit thermo gun kepada 54 pelaku usaha yang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Donating of 250 units of hand washing portable stand and 250 units of thermo guns to 54 businesses across several areas.

PERISTIWA PENTING 2020
2020 EVENTS HIGHLIGHTS

29 JUL

Pelaksanaan Dukungan Loss Limit atas Penjaminan Pemerintah
Implementation of Loss Limit Support on Government Guarantee

LPEI menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Dukungan Loss Limit atas Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi. Di waktu bersamaan, LPEI juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 15 Bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum lainnya.

Indonesia Eximbank signed the Memorandum of Understanding with PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) regarding the Implementation of Loss Limit Support on Government Guarantee for Corporate Businesses. At the same time, Indonesia Eximbank also signed the Memorandum of Understanding with 15 Himbara Banks (group of SOEs Banks), Regional Development Banks and other Commercial Banks.

25 AUG

Penandatanganan Program Penjaminan Pemerintah dengan 3 Bank
Signing of Government Guarantee Program with 3 Banks

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PermataBank, Danamon, Bank Banten dan Jawa Barat, dan CIMB terkait Program Penjaminan Pemerintah.

Signing of Cooperation Agreement with PermataBank, Danamon, Bank Banten dan Jawa Barat, CIMB on Government Guarantee.

03 SEP

Penandatanganan LPEI dan Pemkab Klungkung Kembangkan Desa Devisa
Indonesia Eximbank and Klungkung Regency Government Signed Agreement to Develop 'Desa Devisa'

LPEI bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, untuk bersama-sama mendampingi dan melatih pengusaha sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Koperasi dan UMKM agar mampu menembus pasar global.

Indonesia Eximbank synergized with Klungkung Regency Government in Bali to mentor and coach businesses in the Small and Medium Industry, Cooperative, and MSME sectors to help them enter the global market.

08 SEP

Webinar Sinergi LPEI & DJPPR Kemenkeu
Indonesia Eximbank-Directorate General of Budget Financing and Risk Management Webinar

Sinergi antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI dengan LPEI dalam melakukan sosialisasi atas penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI dalam rangka memberikan dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah berorientasi ekspor.

Directorate General of Budget Financing and Risk Management, Ministry of Finance and Indonesia Eximbank conducted a socialization on National Interest Account to support Export-oriented Small and Medium Enterprises.

17 SEP

Penghargaan Silver Award untuk kategori "Empowerment of Women" dari Global CSR Summit and Awards
Silver Award in "Empowerment of Women" Category from Global CSR Summit and Awards

LPEI Mendapatkan Penghargaan Silver Award untuk Kategori Empowerment of Women dari Global CSR Summit and Awards.

Indonesia Eximbank received the Silver Award in the "Empowerment of Women" category from Global CSR Summit and Awards.

PERISTIWA PENTING 2020
2020 EVENTS HIGHLIGHTS

24 SEP

Penandatanganan Perjanjian Bilateral Committed Credit Facility dengan PT Bank ICBC Indonesia
The signing of agreement on bilateral committed loan facility with PT Bank ICBC.

LPEI dan Bank ICBC Indonesia menandatangani perjanjian "Bilateral Committed Loan Credit Facility" senilai USD380.000.000 untuk tenor 3 dan 5 tahun bertempat di Kantor Pusat LPEI, Jakarta.

Indonesia Eximbank and Bank ICBC Indonesia signed "Bilateral Committed Loan Credit Facility" amounting to USD380,000,000 with 3 and 5-year tenor at Indonesia Eximbank Head Office, Jakarta.

25 SEP

LPEI dan China Eximbank Tandatangani Perjanjian Term Loan
Indonesia Eximbank and China EximBank Signed Term Loan Agreement

LPEI dan China Eximbank menandatangani perjanjian "Term Loan Credit Facility" senilai USD200.000.000 untuk tenor 3 tahun yang dilakukan secara daring.

Indonesia Eximbank and China Eximbank carried out virtual signing of "Term Loan Credit Facility" amounting to USD200,000,000 with a 3-year tenor.

22 OCT

Webinar Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia
Webinar on Indonesia Becoming a Global Halal Producer Hub

Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas menjadi salah satu panelis dalam kegiatan Webinar Strategis Nasional dengan tema "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia".

Indonesia Eximbank's Executive Director D. James Rompas sat as one of the panelists in a National Strategic Webinar themed "Indonesia Becoming a Global Halal Producer Hub".

10-16 NOV

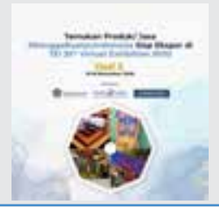

LPEI dan Kementerian Keuangan Dukung Penyelenggaraan *Virtual Trade Expo Indonesia*
Indonesia Eximbank and Ministry of Finance Support the Virtual Trade Expo Indonesia Exhibition

Pameran dagang terbesar di Indonesia kembali diadakan dengan skema virtual. Kali ini LPEI bersama dengan Lembaga National Single Window ikut berpartisipasi untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh pihak terkait ekspor.

The largest trade exhibition in Indonesia was held virtually this year. Indonesia Eximbank jointly participated with National Single Window to introduce products and services for all exports related parties.

06 NOV

Dorong Ekspor Nasional LPEI Jalin Kerja Sama dengan Kemendag
Supporting National Export, Indonesia Eximbank Collaborates with Trade Ministry

LPEI melakukan penyaluran fasilitas pembiayaan ekspor melalui skema PKE UKM Berorientasi Ekspor kepada 2 (dua) pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yaitu PT Urchindize Indonesia dan CV Indo Arab.

Indonesia Eximbank channeled export financing facility as part of its support to export-oriented SMEs to 2 (two) SMEs, PT Urchindize Indonesia and CV Indo Arab.

PERISTIWA PENTING 2020
2020 EVENTS HIGHLIGHTS

20 NOV

Penandatanganan Program Penjaminan Pemerintah II
Signing of Government Guarantee II

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Resona, MUFG, Maybank dan QNB terkait Penjaminan Pemerintah.

Signing of cooperation agreement with Bank Resona, MUFG, Maybank, and QNB on Government Guarantee.

26 NOV

Pengangkatan Anggota Dewan Direktur, Arus Gunawan
Appointment of Mr. Arus Gunawan as Member of Board of Directors

Kementerian Keuangan RI mengangkat Arus Gunawan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Indonesian Finance Ministry appointed Arus Gunawan as member of Indonesia Eximbank's Board of Directors.

10 DEC

Penandatanganan Program Penjaminan Pemerintah III
Signing of Government Guarantee III

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jateng terkait Penjaminan Pemerintah.

Signing of cooperation agreement with Bank Jateng on Government Guarantee.

22 DEC

LPEI dan Export-Import Bank of Korea Tandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit
Indonesia Eximbank and Export-Import Bank of Korea Signed Credit Facility Agreement

Seremonial penandatanganan Master Interface Credit Facility Agreement senilai USD200.000.000 antara LPEI dan Export-Import Bank of Korea.

Signing ceremony of Master Interface Credit Facility Agreement amounting to USD200,000,000 between Indonesia Eximbank and Export-Import Bank of Korea.

28 DEC

Pemerintah melalui LPEI Salurkan Pembiayaan ke PTPN III untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Government supports to PTPN III through Indonesia Eximbank to Accelerate National Economic Recovery

LPEI memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara III guna mendorong kinerja perusahaan di sektor perkebunan dalam rangka kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Indonesia Eximbank provided loan facility to PT Perkebunan Nusantara III to help this state-owned company recover its performance in the plantation business and as part of the National Economic Recovery policy.

LAPORAN MANAJEMEN

Management Reports

LPEI memiliki fungsi menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional.

Indonesia Eximbank's function to implement the National Export Financing aims to support the Government's policy in developing the national export programs.

D. James Rompas

Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors
concurrently Executive Director

LAPORAN DEWAN DIREKTUR

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah nikmat dan karuniaNya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan, terutama dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami sebagai Dewan Direktur menyampaikan hasil pengawasan kami terhadap kegiatan operasional LPEI untuk tahun buku 2020.

Kondisi Ekonomi dan Industri Tahun 2020

Pandemi COVID-19 telah memunculkan persoalan berbagai dimensi dimulai dari aspek kesehatan dan pembatasan interaksi sosial masyarakat, yang berujung pada terhambatnya aktivitas ekonomi global dan domestik. PDB dunia tahun 2020 tercatat minus 3,26 % yoy, terdalam sejak depresi ekonomi 1930-an. Dampaknya, volume perdagangan dunia juga turun signifikan (minus 8,5% yoy) dipengaruhi tidak hanya dari sisi *demand* tetapi juga sisi *supply* termasuk jalur logistik dan distribusi akibat inspeksi kesehatan dan pembatasan atau penguncian (*lockdown*) wilayah negara.

Dari sisi volume perdagangan barang dan jasa global pada tahun 2020, IMF mengestimasikan terkontraksi ke level -9,6% yoy atau turun drastis dari tahun sebelumnya yang bertumbuh 1,0% yoy. Ekspor Indonesia pada tahun 2020 tercatat mencapai USD163,31 miliar atau turun -2,61% yoy. Produk non-migas masih yang berkontribusi terbesar yakni 94,91% terhadap total ekspor dengan nilai setara USD155 miliar atau turun -0,57% yoy. Sementara ekspor migas berkontribusi sebesar 5,09% dari total nilai ekspor dengan nilai setara USD8,31 miliar, atau terkontraksi -29,52% yoy. Hal ini tidak terlepas dari faktor penurunan harga minyak mentah yang signifikan, seiring dengan penurunan permintaan akibat rendahnya aktivitas transportasi dan persediaan minyak yang tinggi di negara-negara produsen.

Sementara dari sisi impor di tahun 2020, kondisinya mengalami penurunan sampai dengan ke level -17,34% yoy menjadi USD141,57 miliar. Penurunan impor yang cukup dalam ini menunjukkan cukup terganggunya industri di dalam negeri lantaran terdampak pandemi

Dear Esteemed Stakeholders,
We would like to express our gratitude to God Almighty for His blessing that Indonesia Eximbank was able to navigate through 2020, a year filled with challenges, especially from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. In this good opportunity, please allow us as the Board of Directors to present our report on Indonesia Eximbank's operational activities for the 2020 fiscal year.

The Economy and Industry in 2020

The COVID-19 pandemic caused several aspects such health and social activities restriction problems which eventually had slowed down the global and domestic economy. The 2020 World's GDP showed the negative 3,26% yoy, the lowest since the economy depression in 1930s. As a result, the world trade volume significantly decreased (minus 8,5%) which was influenced not only by the demand side but also the supply side, including restriction on logistic route and distribution by some countries.

IMF estimated that global trade volume declined to -9.6% yoy in 2020, or significantly dropped from the previous year's growth of 1.0% yoy. Indonesia's exports in 2020 were recorded at USD163.31 billion or decreased by -2.61% yoy. Non-oil and gas products remained the biggest contributor, accounted for 94.91% of total exports or equivalent to USD155 billion, decreased by -0.57% yoy. Oil and gas exports contributed 5.09% of the total export value or equivalent to USD8.31 billion, decreased by -29.52% yoy. This condition was due to the significant decrease in crude oil prices, following the falling demand due to low transportation activity and high oil supplies in producing countries.

On the other hand, imports declined by -17.34% yoy to USD141.57 billion in 2020. This significant decline in imports indicated disruption in the domestic industrial sector because of the COVID-19 pandemic as the majority, or 72.91% of Indonesia's imports were raw materials/

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

COVID-19. Sebab sebagian besar impor Indonesia merupakan bahan baku/penolong dengan porsi 72,91%. Sedangkan porsi barang modal sebanyak 16,74% untuk industri. Sementara porsi impor produk konsumsi hanya sebesar 10,35%. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 yang tercatat surplus USD21,74 miliar lebih ditopang oleh surplus sektor nonmigas sebesar USD27,69 miliar. Di sisi lain, neraca migas mengalami defisit senilai USD5,95 miliar.

components, and 16.74% were capital goods for industry. In comparison, consumer product imports were only 10.35%. Thus, Indonesia's trade balance in 2020, which recorded a surplus of USD21.74 billion, was mainly supported by a surplus in the non-oil and gas sector of USD27.69 billion. Meanwhile, the oil and gas trade balance experienced a deficit of USD5.95 billion.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kondisi kredit nasional juga mengalami kontraksi di tahun 2020. Penyaluran kredit perbankan tampak mengalami penurunan hingga -2,68% yoy, yang dikontribusikan oleh penurunan kredit produktif -3,46% (terdiri dari kredit modal kerja dan investasi yang masing-masing turun -4,85% dan -1,03% yoy), serta kredit konsumtif yang turun tipis -0,73%.

Based on Bank Indonesia (BI) data, the national lending sector also declined in 2020. Bank lending decreased by -2.68% yoy due to the decline in productive loans by -3.46% (consists of working capital loans and investment loans, decreased by -4.85% and -1.03% yoy, respectively) and a slight decline in consumer loans by -0.73%.

Untuk mengukur dan melakukan langkah strategis atas dampak pandemi COVID-19 terhadap portofolio kegiatan usaha yang dikelola, LPEI telah melakukan pemetaan berdasarkan sektor ekonomi. Di mana 73,5% portofolio LPEI mengalami dampak sedang, 11,2% terdampak signifikan, dan 15,3% terdampak ringan dari pandemi COVID-19.

To measure and take strategic steps regarding the impact of the COVID-19 pandemic on the business portfolio, Indonesia Eximbank mapped business activities based on economic sectors. 73.5% of Indonesia Eximbank's portfolio experienced a moderate impact, 11.2% had a significant impact, and 15.3% had a mild impact from the COVID-19 pandemic.

No	Sektor Ekonomi Economic Sector	Dampak Impact	Persentase Terhadap Total Pembiayaan Percentage to Total Financing
1	Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Transportation, Warehousing, and Communication Sector	Signifikan Significant	11,0%
2	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provision of Accommodation and Food and Beverage Sector	Signifikan Significant	0,2%
3	Sektor Industri Pengolahan Processing Industry Sector	Sedang Moderate	42,4%
4	Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Agriculture, Plantation, and Forestry Sector	Sedang Moderate	20,1%
5	Sektor Pertambangan Mining Sector	Sedang Moderate	7,9%
6	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade Sector	Sedang Moderate	3,1%
7	Sektor Ekonomi Lainnya Other Economic Sector	Ringan Mild	15,3%

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Penilaian Kinerja Usaha

Secara keseluruhan, Dewan Direktur menilai baik atas kinerja Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana dalam mencapai sasaran strategis dan inisiatif yang dilakukannya di tahun 2020. Capaian tersebut mencakup capaian kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPEI tahun 2020. Ada pun capaian yang belum mencapai target yang diharapkan adalah aspek pelaksanaan mandat dalam bentuk penyaluran pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

Dewan Direktur mencermati kinerja LPEI tahun 2020 secara umum telah menunjukkan perbaikan, serta prioritas yang disusun dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut tercermin dari perbaikan rasio *Non Performing Loans* (NPL) *net* yang mengalami penurunan, peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk memperkuat *coverage ratio*, optimalisasi likuiditas berupa pengelolaan aset tresuri yang mengikuti kebutuhan pertumbuhan aset agar dapat menekan *costs of fund* dan *interest expenses*, serta penguatan ekuitas dengan adanya penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Direktur mengapresiasi Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana, meskipun dalam pelaksanaan bisnis pada kegiatan pembiayaan, penjaminan dan asuransi belum mencapai angka yang diharapkan akibat dampak multidimensi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 selama tahun 2020.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

LPEI mengawali tahun 2020 dengan kondisi keuangan yang menantang. Di antaranya yaitu tingginya angka NPL yang berdampak kepada besarnya pembentukan CKPN, walau terdapat konsekuensi berpengaruh pada performa pendapatan LPEI. Di tengah upaya perbaikan NPL, LPEI juga dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang menimbulkan tekanan pada perekonomian global maupun ekonomi negara-negara tujuan ekspor.

Business Performance Assessment

Overall, the Executive Director and the Managing Directors performed well in achieving the strategic goals and the initiatives carried out in 2020. The achievements included financial and non-financial performance targets specified in Indonesia Eximbank's 2020 Annual Work Plan and Budget (RKAT). Achievements in financing disbursement, guarantees, and insurance were below the expected targets.

In general, Indonesia Eximbank improved its 2020 performance, and the priorities set were well executed. As reflected in lower net Non-Performing Loans (NPL) ratio, increase in Allowance for Impairment Losses to strengthen the coverage ratio, liquidity optimization in the form of treasury asset management that was in line with asset growth to reduce costs of funds and interest expenses, and stronger equity resulted from the State Equity Participation (SEP) in 2020.

The Board of Directors appreciates the Executive Director and Managing Directors for these achievements, even though financing, guarantee, and insurance business activities did not meet the expected targets due to the multidimensional impact caused by the COVID-19 pandemic in 2020.

Supervision towards Strategy Implementation

Indonesia Eximbank started 2020 with a challenging financial condition. Among them was the high NPL amount, which prompted a high amount of Allowance for Impairment Losses booked despite having consequences to Indonesia Eximbank's revenue. Amid efforts to improve NPL, Indonesia Eximbank also faced the challenges of the COVID-19 pandemic, which created pressure on the global economy and the economies of export destination countries.

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Direktur memberikan arahan kepada Manajemen untuk melakukan *stress testing* dampak COVID-19 terhadap LPEI; melaksanakan restrukturisasi bagi debitur terdampak COVID-19 selaras dengan kebijakan restrukturisasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); menyusun strategi dan prioritas dengan titik berat pada penguatan neraca; optimalisasi likuiditas dan permodalan; serta melakukan penyesuaian RKAT dengan memperhatikan dampak COVID-19.

Sebagai upaya *regain our footing* pada tahun 2020, terdapat tiga area sasaran strategis yang disusun oleh Manajemen, yaitu restrukturisasi dan efisiensi, penguatan proses internal, serta selektif dalam menjalankan bisnis. Ketiga area sasaran strategis ini diturunkan dalam sembilan inisiatif strategis utama.

Kesembilan inisiatif strategis utama ini meliputi perbaikan kualitas aset, relaksasi dan restrukturisasi untuk korporasi terdampak COVID-19, efisiensi biaya, optimalisasi Likuiditas, dan penguatan organisasi, penguatan tata kelola operasi dan manajemen risiko, penguatan komunikasi, pemenuhan rekomendasi audit, dan terakhir peningkatan pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi dan *Trade Finance*.

Atas upaya-upaya yang dilakukan tersebut, kami memandang Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana telah melaksanakan sasaran dan inisiatif strategis dengan baik. Sehingga LPEI mampu memperbaiki kinerja di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

To respond to the situation, the Board of Directors gave direction to the Management to conduct stress testing on the impact of COVID-19 to Indonesia Eximbank, carry out restructuring for debtors affected by COVID-19 that was in line with the restructuring policy established by the Financial Services Authority (OJK), develop strategies and priorities with an emphasis on strengthening the balance sheet, optimize liquidity and capital, and make adjustments to the Annual Work Plan & Budget incorporated the impact of COVID-19.

As effort to regain our footing in 2020, the Management established three strategic target areas; restructuring and efficiency, internal processes strengthening, and selective business. These three strategic target areas were broken down into nine major strategic initiatives.

The nine major strategic initiatives include improvement of asset quality, relaxation and restructuring for corporations affected by COVID-19, cost efficiency, liquidity optimization, organization strengthening, solidifying operational governance and risk management, strengthening communication, fulfilling audit recommendations, and increasing NIA financing, Guarantees, Insurance, and Trade Finance.

Based on these efforts, the Executive Director and Managing Directors had properly implemented strategic goals and initiatives, which resulted in improved performance amidst the various challenges faced by Indonesia Eximbank.

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Perencanaan Stratejik Lembaga

Arah pengembangan LPEI dalam 5 (lima) tahun kedepan dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

Institution Strategic Plans

Indonesia Eximbank's development direction in the next 5 (five) years is elaborated in the following chart:

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Pandangan terhadap Prospek Usaha

Dewan Direktur menyambut baik dan telah menyetujui RKAT tahun 2021 LPEI yang disusun oleh Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana. RKAT tersebut sejalan dengan rencana jangka panjang (RJP) LPEI serta selaras dengan arahan yang diberikan Kementerian Keuangan RI. Kami tetap memandang optimis akan prospek usaha LPEI di tengah tantangan yang penuh dinamika ke depannya.

Adapun pokok-pokok RKAT tahun 2021 yang telah disetujui Dewan Direktur antara lain:

a. Pelaksanaan mandat yang utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan dengan fokus pada segmen UMKM dan UKME, pembiayaan skema PKE, serta pertumbuhan penjaminan yang dikontribusi oleh pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN.
b. Perbaikan kualitas aset yang tercermin dari jumlah nilai NPL dan rasio NPL.
c. Peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM dan UKME melalui pengembangan bisnis model, penciptaan eksportir baru dan pengembangan komunitas (Desa Devisa).
d. Perbaikan kinerja keuangan yang berkelanjutan.
e. Pelaksanaan tata kelola dan *risk awareness* Lembaga serta penguatan teknologi dan sistem informasi manajemen (SIM).
f. Penguatan struktur organisasi, kapasitas dan kapabilitas SDM, serta budaya kerja.

Seiring dengan kinerja keuangan LPEI yang mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2020, dan perekonomian Indonesia diproyeksikan akan berangsur pulih, Dewan Direktur berharap besar kepada Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana dapat meningkatkan pelaksanaan mandat yang diberikan pada tahun 2021.

Adapun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Direktur Eksekutif dan *Board of Management* LPEI ke depan antara lain:

a. Perlunya menjaga momentum *turn around*
   Perbaikan kinerja LPEI telah terlihat pada 2020 dan diharapkan Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* dapat menjaga momentum perbaikan dan semakin meningkatkan peranan LPEI dalam melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional dan turut serta aktif dalam program PEN.

b. Perlunya terobosan dalam perbaikan kualitas pembiayaan
   Meskipun kualitas aset telah menunjukkan perbaikan pada 2020, Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* perlu melaksanakan terobosan-terobosan agar perbaikan kualitas pembiayaan dapat diakselerasi. Terobosan tersebut mencakup aspek proses bisnis internal untuk menjaga kualitas aset yang ada maupun melakukan perbaikan kualitas aset bermasalah, maupun aspek eksternal melalui kerjasama dengan unit-unit Kementerian Keuangan maupun kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya.

c. Perlunya menyiapkan strategi untuk skenario terburuk
   Meskipun perekonomian diharapkan akan pulih secara perlahan seiring dengan vaksinasi COVID-19, Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* perlu mengantisipasi jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi dan dampak-dampak lain pandemi terhadap bisnis LPEI, sehingga risiko-risiko dapat dimitigasi dengan baik.

d. Perlunya meningkatkan kinerja dan *high performance culture*
   Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* perlu untuk memastikan bahwa seluruh jajaran LPEI menjunjung tinggi dan menerapkan budaya Lembaga yaitu *Trustworthy*, *Reliable*, *Unique*, *Service Excellence* dan *Teamwork* (TRUST) serta berkinerja tinggi.

e. Perlunya perbaikan atas proses bisnis serta teknologi dan sistem informasi manajemen
   Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* perlu untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan tata kelola internal, serta perbaikan teknologi dan MIS yang mendukung pemantauan kinerja bisnis dan keuangan, *early warning signal* dan pengambilan keputusan.

Business Prospects

The Board of Directors approved Indonesia Eximbank's 2021 Annual Work Plan and Budget prepared by the Executive Director and Managing Directors. This is in line with Indonesia Eximbank's corporate plan and the direction given by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. We remain optimistic on Indonesia Eximbank's business prospects amidst the dynamic challenges in the future.

The main points of the 2021 Annual Work Plan and Budget approved by the Board of Directors including:

a. The execution of the mandate is mainly driven by growth in the MSME segment and export-oriented MSME segment financing, NIA financing, and guarantees. Growth in guarantees is contributed by the implementation of the Government Guarantee Program in the context of the NER program.
b. Improvement in asset quality, as reflected in the total NPL value and the NPL ratio.
c. Increasing the role of Indonesia Eximbank in growing MSMEs and export-oriented MSMEs by developing business models, creating new exporters, and developing communities (*Desa Devisa*).
d. Continuous improvement of financial performance.
e. Implementation of governance and risk awareness, strengthening the technology and management information systems (MIS).
f. Strengthening the organizational structure, capacity and capabilities of human resources, and work culture.

As Indonesia Eximbank's financial performance began to show improvement in 2020, and the Indonesian economy is projected to gradually recover, the Board of Directors expects the Executive Director and Managing Directors to improve the execution of the mandate in 2021.

Several points to be considered by the Executive Director and the Board of Management in the future, including:

a. Maintaining the turnaround momentum
   Indonesia Eximbank's performance began to improve in 2020. It is expected that the Executive Director and the Board of Management will be able to maintain the momentum of improvement and further increase the Indonesia Eximbank's role in implementing the National Export Financing and participation in the NER program.
b. Breakthroughs in improving the quality of financing
   Even though asset quality improved in 2020, the Executive Director and the Board of Management need to carry out breakthroughs to accelerate improvements in financing quality. Breakthroughs include aspects of internal business processes to maintain the quality of existing assets and improve the quality of non-performing assets, including external aspects, by cooperating with units under the Ministry of Finance and collaborating with other Ministries and Institutions.
c. Preparing strategies for worst-case scenarios
   Although the economy is expected to gradually recover along with the COVID-19 vaccination rollout, the Executive Director and the Board of Management need to anticipate the length of time required for economic recovery and other impacts of the pandemic on Indonesia Eximbank's business to mitigate risks.
d. Improving performance and the high-performance culture
   The Executive Director and the Board of Management need to ensure that all employees uphold and implement Indonesia Eximbank's culture of Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence, and Teamwork (TRUST) and deliver a high performance.
e. Improvement in business processes as well as technology and management information systems
   The Executive Director and the Board of Management need to continue to improve business processes and internal governance and to improve technology and MIS that support business and financial performance monitoring, early warning signals, and decision-making.

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Pandangan atas Penerapan GCG

LPEI secara rutin telah melakukan pelaporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), dan melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola Lembaga. Dewan Direktur mengapresiasi langkah yang diambil Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* untuk memperkuat fungsi internal audit LPEI di tahun 2020. Penguatan fungsi internal audit ini diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan operasional LPEI secara efektif, serta mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan.

Dari sisi manajemen risiko, terjadinya pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko yang dihadapi LPEI utamanya risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Di sisi kredit, terdapat risiko peningkatan NPL akibat penurunan aktivitas bisnis debitur. Di sisi likuiditas, kondisi pandemi semakin meningkatkan tantangan LPEI dalam memenuhi kebutuhan pendanaan di tengah tinggi nya NPL. Dalam hal operasional, penerapan pembatasan aktivitas sosial tentunya berdampak kepada kegiatan operasional LPEI.

Atas hal-hal tersebut, Dewan Direktur telah meminta Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* untuk melakukan *stress testing* portofolio LPEI dan melakukan pengawasan secara aktif atas strategi Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* untuk mitigasi risiko kredit, likuiditas dan operasional LPEI. Selain itu, Dewan Direktur juga melakukan pengawasan atas aspek-aspek manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam RKAT yaitu penyusunan portofolio *guidelines*, *industry risk acceptance criteria* serta menetapkan *Risk Appetite Statement* dalam penyusunan RKAT 2021.

Aktivitas Dewan Direktur dan Kinerja Komite di bawah Dewan Direktur

Selama tahun 2020, pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Direktur tercermin dari telah terlaksananya Rapat Dewan Direktur sebanyak 37 kali dengan tingkat kehadiran rata-rata 100%. Selain itu, peran aktif Dewan Direktur juga tercermin dari kinerja komite di bawah Dewan Direktur dengan penilaian sebagai berikut:

Overview on GCG Implementation

Indonesia Eximbank routinely reported the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) principles and conducted assessments on the implementation of corporate governance. The Board of Directors appreciates the steps taken by the Executive Director and the Board of Management to strengthen Indonesia Eximbank's internal audit function in 2020. The strengthening of the internal audit function was expected to enable an effective operational oversight function and identify areas that can be improved.

On risk management, the COVID-19 pandemic has increased the risks faced by Indonesia Eximbank, particularly credit risk, liquidity risk, and operational risk. On credit, the decline in debtors' business activities posed the risk of a higher NPL. On the liquidity side, the pandemic further increased the challenges faced by Indonesia Eximbank in meeting funding needs amidst high NPL. And the restrictions on social activities certainly impacted Indonesia Eximbank's operational activities.

Accordingly, the Board of Directors requested the Executive Director and the Board of Management to perform stress testing on Indonesia Eximbank's portfolio and to conduct active supervision on the strategy of the Executive Director and the Board of Management to mitigate credit risks, liquidity risks, and operational risks. The Board of Directors also supervised the risk management aspects specified in the Annual Work Plan & Budget, namely the development of portfolio guidelines, industry risk acceptance criteria, and the Risk Appetite Statement in drafting the 2021 Annual Work Plan & Budget.

Activities of the Board of Directors and the Performance of Committees under the Board of Directors

The active supervision by the Board of Directors was reflected in the number of the Board of Directors meetings, held 37 times during 2020, with an average attendance rate of 100%. The active role of the Board of Directors was also shown in the performance of the committees under the Board of Directors. The assessments regarding the committees are as follows:

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

1. Komite Audit telah melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan kolaborasi dalam menanggapi tindak lanjut temuan auditor eksternal. Selain itu, Komite Audit telah memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan kapasitas fungsi Internal audit dan meningkatkan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Rapat Komite Audit telah terlaksana sebanyak 41 kali dengan tingkat kehadiran 100%;
2. Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap fungsi manajemen risiko untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dan pengendalian risiko yang memadai. Memantau kecukupan kebijakan dan prosedur, terutama terhadap dua risiko utama yakni risiko pembiayaan dan operasional, seperti *monitoring* proses kredit, dan risiko integritas data dan optimalisasi alokasi resources. Rapat Komite Pemantau Risiko telah terlaksana 29 kali dengan tingkat kehadiran 100%;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi aktif mendukung penguatan organisasi termasuk didalamnya perbaikan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah terlaksana 7 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Di samping pelaksanaan rapat pada masing-masing komite, juga dilakukan 14 kali *joint committee meeting* untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang bersifat integrasi antar fungsi. Termasuk pembahasan dan memfasilitasi rencana penerapan *Governance*, *Risk Management*, and *Compliance* (GRC) dan *Three Line of Defense*.

Penerapan *Whistleblowing System*

Dalam mendukung peran LPEI sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2/2009 tentang LPEI, di antara aspek penting dalam prinsip GCG adalah mewujudkan partisipasi dari unsur internal maupun eksternal LPEI. Salah satunya adalah penyampaian informasi tentang pelanggaran dan perbuatan yang berpotensi dan atau bersifat merugikan LPEI. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yang salah satunya melalui penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) LPEI. Dewan Direktur mendukung agar mekanisme

1. Audit Committee supervised, advised, and collaborated to respond to the follow-ups of external auditors' findings. It also facilitated the improvement of capability and capacity of the Internal Audit function and increased cooperation with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The Audit Committee held 41 meetings with an attendance rate of 100%;
2. Risk Oversight Committee supervised the risk management function to ensure the implementation of good governance and adequate control of risks. Monitored the adequacy of policies and procedures, especially against the two main types of risks: financing risks and operational risks, such as credit process monitoring and data integrity risks, and optimizing resource allocation. Risk Oversight Committee held 29 meetings with an attendance rate of 100%;
3. Remuneration and Nomination Committee actively supported organizational strengthening, including improving Human Resources (HR) policies. Remuneration and Nomination Committee held 7 meetings with an attendance rate of 100%.

In addition to meetings held by each committee, there were also 14 joint committee meetings for cross-function coordination and consultations, including discussions and facilitating plans to implement Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) and the Three Lines of Defense.

Whistleblowing System Practices

In supporting the role of Indonesia Eximbank as mandated in Law No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank, among the important aspects of the GCG principles is realizing the participation of both internal and external elements of Indonesia Eximbank. One of them is the delivery of information regarding violations and actions that have the potential and or are detrimental to Indonesia Eximbank. As such, it is essential to strengthen the internal control system, one of which is through the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at Indonesia Eximbank. The Board of Directors supports that the existing WBS

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

WBS yang telah ada dapat berjalan secara optimal dan saling melengkapi fungsi yang dijalankan internal audit.

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Dewan Direktur menetapkan bahwa sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 untuk melakukan kegiatan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi, LPEI dalam menjalankan aktivitasnya harus memiliki kepedulian dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Sangat disadari bahwa risiko pembiayaan dan reputasi dapat timbul dari aktivitas proyek yang mengancam kelestarian lingkungan. Kegiatan LPEI berupa penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang ramah lingkungan tentu dapat membantu LPEI menurunkan risiko pada pelaku ekspor dan membantu memastikan keberlangsungan usaha dengan baik sehingga akan berdampak pada perkembangan ekspor Indonesia di masa mendatang.

Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

LPEI menetapkan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan pedoman teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan memperhatikan faktor – faktor eksternal dan internal Lembaga. Dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang tercantum dalam Road Map Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI tahun 2020-2024, tahun 2020 Dewan Direktur mengarahkan agar implementasi Keuangan Berkelanjutan diprioritaskan pada persiapan penerapan aksi keuangan berkelanjutan dengan penyusunan pedoman atau regulasi di LPEI mengenai pengelola keuangan berkelanjutan.

Perubahan Komposisi Dewan Direktur

Selama tahun 2020, LPEI telah mengalami tiga kali perubahan komposisi Dewan Direktur dengan rincian sebagai berikut:

mechanism performs optimally and complements the functions carried out by the internal audit.

Sustainable Finance Policy

As an institution mandated by the Law No. 2 of 2009 regarding the implementation of financing, guarantee, insurance and advisory, Indonesia Eximbank shall take into account the social and environmental aspects in implementing its activities. We are aware that financing and reputation risks may arise from project activities that threaten environmental sustainability. Environmentally friendly activities of Indonesia Eximbank such as disbursement of financing, guarantee, insurance and advisory will certainly be able to reduce risks to exporters and help to ensure good business continuity, hence will have an impact on the development of Indonesian export going forward.

Priorities of Sustainable Finance Implementation

Indonesia Eximbank stipulates the priorities for the implementation of sustainable finance in accordance with technical guidelines of POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding Sustainable Finance Practices for Financial Services, Issuers, and Public Companies and taking into account external and internal factors. In implementing sustainable finance, as stated in Indonesia Eximbank Sustainable Finance Action Road Map 2020-2024, the Board of Directors provides direction to prioritize the preparation of Sustainable Finance in 2020 by focusing on formulation of guidelines and regulations in the Company.

Changes in the Composition of the Board of Directors

The composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors changed three times in 2020, as follows:

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

a. Komposisi Periode 1 Januari – 8 Januari 2020 | Composition for the Period of 1 January – 8 January 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Arlinda	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	521/KMK.06/2018
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	71/KMK.06/2015
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

KMK : Keputusan Menteri Keuangan | Minister of Finance Decree

b. Komposisi Periode 9 Januari – 7 Juni 2020 (Perubahan I) | Composition for the Period of 9 January – 7 June 2020 (First Change)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Arlinda	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	521/KMK.06/2018
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

c. Komposisi Periode 8 Juni – 24 November 2020 (Perubahan II) | Composition for the Period of 8 June – 24 November 2020 (Second Change)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	274/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

d. Komposisi Periode 25 November – 31 Desember 2020 (Perubahan III) | Composition for the Period of 25 November – 31 December 2020 (Third Change)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Jakarta, Juni | June 2021

Atas Nama Dewan Direktur
On Behalf of the Board of Directors

D. James Rompas
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Suminto
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Kasan
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Felia Salim
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Rijani Tirtoso
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

DEWAN DIREKTUR

BOARD OF DIRECTORS

1. **D. James Rompas**
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

2. **Suminto**
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

3. **Kasan**
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

4. **Arus Gunawan**
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

5. **Felia Salim**
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

6. **Rijani Tirtoso**
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

LPEI telah membuat rencana strategis lima tahun yang dimulai dengan penguatan fondasi melalui semangat "*Regain our Footing*" untuk periode 2020-2021. Fokus LPEI di tahun 2020 menajamkan tiga aspek yaitu restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa Konsultasi, dan penguatan proses Internal. Ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020.

Kinerja keuangan LPEI tahun 2020 secara keseluruhan selaras dengan fokus yang ingin dicapai, yaitu perbaikan kualitas aset dengan penurunan nominal NPL *net* hingga 24% dibandingkan posisi tahun sebelumnya, pelaksanaan mandat melalui pembiayaan khusus NIA yang tumbuh pesat hingga 106%, serta mampu menjalankan peran sebagai *Special Mission Vehicle* Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan penyaluran sebesar Rp567 miliar untuk Penjaminan Pemerintah Jaminah yang bekerja sama dengan 20 bank.

Dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih menjadi bagian dari dinamika tantangan perekonomian tahun 2021. Namun, semakin membaiknya penanggulangan pandemi, adaptasi kehidupan sosial, ekonomi, regulasi, serta distribusi vaksin yang kian meluas, diharapkan itu semua akan memberikan optimisme kondisi yang lebih kondusif pada tahun 2021.

Indonesia Eximbank has developed its five-yearly strategic plan. The first phase, 'Regain our Footing' which aims to strengthen the Company's foundation, is the focus of the 2020-2021 period. In 2020 in particular, Indonesia Eximbank prioritized three aspects of restructuring and efficiency, selective mandate and business implementation including the Advisory Services, and internal process strengthening. These aspects have been translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

On financial performance, the overall performance in 2020 was consistent with Indonesia Eximbank's key focus areas, namely improved asset quality as evidenced by 24% of net NPL compared to last year's position, notable 106% growth of special financing projects through the NIA mandate, and the exercise of the Company's role as the government's Special Mission Vehicle in the national economic recovery program where LPEI disbursed Rp567 billion in Guarantee in the cooperation with 20 banks.

While the impacts of the COVID-19 pandemic are predicted to continue in 2021, progress in the outcomes of pandemic response; adaptation in social and economic life as well as regulations; and vaccine rollout give promising signals that 2021 will be a stronger, better year for all.

D. James Rompas

Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors
concurrently Executive Director

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih, anugerah dan penyertaanNya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dapat menutup kinerja tahun 2020 dengan baik. Tahun 2020 merupakan tahun konsolidasi bagi mayoritas perusahaan atau lembaga untuk menuju kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian kinerja LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Dear Distinguished Stakeholders,
We express our gratitude to God Almighty for His grace and benevolence that allowed Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) or Indonesia Eximbank to conclude 2020 performance in good terms. For most companies or institutions, 2020 was a year of consolidation in order to build back stronger and to continue deliver sustainable growth. On this occasion, please allow us, to report Indonesia Eximbank's management outcomes and performance for the year ended 31 December 2020.

Tinjauan Makro Ekonomi dan Industri Tahun 2020

Pada tahun 2020, perekonomian global dan nasional menghadapi tekanan kuat dari rambatan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang awal mulanya hanya menimbulkan isu kesehatan dan kemanusiaan. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat serta aktivitas barang dan jasa yang merupakan mitigasi penyebaran COVID-19, memunculkan konsekuensi penurunan signifikan pada perekonomian dunia, termasuk ekonomi Indonesia.

Namun pemulihan ekonomi global dan nasional terus berlanjut hingga akhir tahun 2020. Hal ini terlihat antara lain dari kenaikan *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dan jasa di Amerika Serikat dan Tiongkok, dan respon positif terhadap rencana vaksinasi COVID-19 yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong kenaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi global dan nasional. Dengan perkembangan tersebut, *International Monetary Fund* (IMF) mengeluarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) periode Januari 2021 yang memprakirakan ekonomi global terkontraksi -3,5% *year on year* (yoy). Di sisi lain ekonomi Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat mengalami kontraksi -2,07% yoy.

Terjadinya kontraksi ekonomi dunia tidak terlepas dari permintaan dunia yang melemah dan rantai pasokan global yang terganggu sepanjang tahun 2020. Volume perdagangan global (barang dan jasa) diestimasikan terkontraksi -9,6% yoy pada tahun 2020, turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 1,0% yoy. Sejalan dengan itu, volume perdagangan barang dan jasa negara maju dan negara berkembang dan *emerging* juga

2020 Macroeconomics and Industry Overview

Throughout 2020, the global and national economy had to deal with intense pressure from the impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. While the effects of the pandemic were initially thought to be limited to health and humanitarian issues, the pandemic response policies that restricted mobility and flow of goods and services were severely detrimental to the global economic growth, including Indonesia's.

Nevertheless, the global and national economic recovery picked up towards the end of 2020. This was evident from, among others, the increase in the purchasing manager's index (PMI) and services in the United States and China, and the positive market response to COVID-19 vaccination roll out, which is expected to drive mobility and economic activities. Based on recent developments, the January 2021 edition of the International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (WEO) report forecasts that the global economy would contract 3.5% year-on-year (yoy). In Indonesia, data from Statistics Indonesia (BPS) recorded growth contraction of -2.07% yoy.

The decline was driven by weakening global demand and disrupted global supply chains throughout 2020. Global trade volume (goods and services) was estimated to contract -9.6% yoy in 2020, significantly dropped from previous year's growth of 1.0% yoy. In line with that, the trade volume of goods and services of developed and

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

diestimasikan turun masing-masing di level -10,1% yoy dan -8,9% yoy.

Di Indonesia kontraksi ekonomi disebabkan oleh pelemahan hampir semua komponen Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran, terkecuali komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 1,94% yoy. Kontraksi paling dalam terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa yang ke level -7,70% yoy, sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa tercatat terkontraksi ke level -14,71% yoy.

Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor Indonesia tercatat mencapai USD163,31 miliar pada tahun 2020, terkontraksi -2,61% yoy dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi produk nonmigas dan migas terhadap nilai ekspor ini sebesar 94,91% dan 5,09%, dengan kontraksi masing-masing tercatat ke level -0,57% dan -29,52% yoy.

Hingga tahun 2020, Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan pangsa 19,31% dari total ekspor nonmigas, atau setara USD29,93 miliar dengan kenaikan 15,59% yoy. Produk nonmigas utama yang diekspor ke Tiongkok adalah besi dan baja serta batubara. Ekspor nonmigas ke AS juga meningkat 4,58% yoy menjadi USD18,62 miliar dengan pangsa 12,01%. Sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa mencapai USD13,04 miliar, turun -9,86% yoy dari tahun sebelumnya sehingga pangsanya menjadi 8,41% dari total ekspor nonmigas.

Pada impor Indonesia tahun 2020, nilainya mencapai USD141,57 miliar atau terkontraksi ke level -17,34% yoy. Kontribusi produk nonmigas dan migas terhadap nilai ekspor ini sebesar 89,93% dan 10,07%, dengan kontraksi masing-masing tercatat ke level -14,78% dan -34,86% yoy. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 tercatat surplus USD21,74 miliar. Surplus ini terutama didorong dari surplus nonmigas sebesar USD27,69 miliar. Di sisi lain, neraca migas mengalami defisit sebesar USD5,95 miliar.

Indikator makro ekonomi khususnya nilai tukar Rupiah secara *point-to-point* (ptp) memang mengalami depresiasi 1,33%, dan ditutup di level Rp14.050 per dolar AS pada 31 Desember 2020. Secara rerata keseluruhan tahun 2020, nilai tukar Rupiah melemah 2,82% ke posisi Rp14.543 per dolar

developing economies and emerging markets was also estimated to fall by -10.1% yoy and -8.9% yoy, respectively.

Meanwhile, In Indonesia, economic contraction was resulted by the weakening of nearly all expenditure components in the Gross Domestic Product (GDP), except the government spending that grew by 1.94% yoy. Export of goods and services experienced the deepest contraction to -7.70% yoy, while import of goods and services contracted to -14.71% yoy.

On foreign trade, the value of Indonesia's exports reached USD163.31 billion in 2020, contracting -2.61% yoy compared to the previous year. The contribution of non-oil and gas products to the export value was 94.91% and 5.09%, with contractions of -0.57% and -29.52% yoy, respectively.

Up until 2020, China remained as Indonesia's main non-oil and gas export destination with a share of 19.31% to the total non-oil and gas exports, or equivalent to USD29.93 billion with an increase of 15.59% yoy. Iron, steel, and coal were the main export commodities to China. With the US, Indonesia's non-oil and gas exports also increased 4.58% yoy to USD18.62 billion with a share of 12.01%. Meanwhile, non-oil and gas exports to the European Union reached USD13.04 billion, down -9.86% yoy from a year earlier, bringing its share to 8.41% to the total non-oil and gas exports.

In terms of imports, Indonesia's import value in 2020 stood at USD141.57 billion or contracted to -17.34% yoy. The contribution of non-oil and gas products to the export value was 89.93% and 10.07%, with contractions of -14.78% and -34.86% yoy, respectively. With these results, Indonesia's trade balance in 2020 recorded a surplus of USD21.74 billion that was primarily driven by a non-oil and gas surplus of USD27.69 billion. On the other hand, oil and gas balance recorded a deficit of USD5.95 billion.

The rupiah exchange rate as a macroeconomic indicator depreciated by 1.33% point-to-point (ptp) and closed at a level of Rp14,050 per US dollar on 31 December 2020. On average, throughout 2020, rupiah depreciated 2.82% to

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

AS. Tetapi depresiasi Rupiah lebih terjaga dibandingkan pelemahan beberapa mata uang negara *peers* lainnya.

Indikator makro ekonomi lainnya seperti inflasi Indonesia tahun 2020, posisinya tercatat sebesar 1,68% yoy atau di bawah target sasaran inflasi yang di kisaran 2%-4%. Pada cadangan devisa Indonesia, posisinya mencapai USD135,9 miliar di akhir tahun 2020, setara pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) mengalami penurunan sebanyak 125 basis poin (bps) sepanjang tahun 2020 menjadi 3,75%.

Kredit yang disalurkan perbankan tahun 2020, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp5.481,6 triliun atau terkontraksi ke level -2,41% yoy. Hal ini disebabkan kredit produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi) maupun kredit konsumtif sama-sama mengalami penurunan. Rasio *Non Performing Loans* (NPL) perbankan juga menunjukkan kenaikan ke level 3,06%. Sementara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan tetap terjaga di level 23,89%.

Analisis Kinerja Tahun 2020

LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu Penugasan Umum dan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau *National Interest Account* (NIA). Penugasan umum adalah penyediaan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor nasional yang secara komersial dapat dilakukan oleh LPEI. Sedangkan PKE adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.

Kinerja keuangan LPEI tahun 2020 secara keseluruhan selaras dengan fokus yang ingin dicapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan kualitas aset yang tercermin dari penurunan *outstanding* NPL *nett* sebesar Rp3,3 triliun, atau dapat ditekan hingga 24% dibandingkan posisi tahun sebelumnya. NPL *gross* dapat ditahan pertumbuhannya 3% atau naik sebesar Rp699 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Pencapaian ini seiring dengan peningkatan

Rp14,543 per US dollar, but the depreciation was limited compared to the weakening of some other peer currencies.

Other macroeconomic indicators such as Indonesia's inflation in 2020, the position stood at 1.68% yoy or below the target inflation target of 2%-4%. In Indonesia's official reserve assets, the position reached USD135.9 billion at the end of 2020, equivalent to financing 10.2 months of imports or 9.8 months of imports and repayment of government external debt. Meanwhile, Bank Indonesia's benchmark interest rate 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) decreased by 125 basis points (bps) throughout 2020 to 3.75%.

Lending disbursed by the banking industry, according to data from the Financial Services Authority (OJK), lending disbursed in 2020 reached Rp5,481.6 trillion or contracted to the level of -2.41% yoy due to the decline in both productive (working capital and investment loans) and consumer loans. Non-Performing Loans (NPL) ratio also rose to 3.06%. Meanwhile, Capital Adequacy Ratio (CAR) was maintained at 23.89%.

Performance Review in 2020

Indonesia Eximbank performs two concurrent functions of General Assignment and National Interest Account (NIA). General Assignment refers to the financing support for national exports in the form of financing, guarantee, and insurance to support national export performance which commercially can be done by Indonesia Eximbank. Meanwhile, NIA refers to the special government mandates to provide financing for transactions or projects that are not commercially viable but are crucial for government's policies or national export activities.

Overall, our financial performance in 2020 was consistent with the key objectives of Indonesia Eximbank. This was evident from improved asset quality, indicated by a decrease in net NPL outstanding to Rp3.3 trillion or decreased by 24% compared to the previous year position. We were also able to limit the increase of gross NPL at 3%, or an increase of Rp699 billion compared to previous year. In line with these results, we recorded an increase in

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

akumulasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi Rp17,7 triliun, naik 57% dari tahun sebelumnya.

Kemudian terkait fokus pelaksanaan mandat melalui penugasan khusus, LPEI dapat menumbuhkannya hingga 106% menjadi Rp1,6 triliun di tahun 2020. Penugasan khusus NIA tersebut disalurkan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), UKM berorientasi ekspor, industri penerbangan, dan PKE *Trade Finance*. Namun, secara total, pembiayaan LPEI di tahun 2020 mengalami penurunan 8% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp90,4 triliun. Hal ini sejalan melesunya permintaan dan penutupan (*lockdown*) negara-negara tujuan ekspor Indonesia, sehingga upaya kami melakukan ekspansi pembiayaan secara selektif tidak mampu mengimbangi pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo.

Fokus LPEI lainnya di tahun 2020 sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Pemerintah dalam menyediakan penjaminan untuk segmen korporasi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sampai dengan akhir tahun 2020 dari penyaluran penjaminan pemerintah hasil kerja sama dengan 20 bank yang disebut Jaminah mencapai sebesar Rp567 miliar. Diharapkan *credit enhancement* ini akan mampu memicu perbankan untuk memberikan tambahan modal kerja kepada para debiturnya sehingga pada gilirannya akan dalam mempercepat pemulihan roda perekonomian. Di sisi lain, sebagai lembaga keuangan, LPEI menyadari bahwa pandemi yang membuat keterbatasan aktivitas ekonomi akan mempengaruhi performa debitur yang dibiayai. Oleh karena itu, selama tahun 2020, LPEI telah melakukan relaksasi untuk debitur-debitur yang terdampak COVID-19. Jumlahnya tercatat sebanyak 125 debitur dengan total portofolio sebesar Rp27 triliun.

Di tengah masa pandemi selama tahun 2020, LPEI juga tetap melakukan dukungan terhadap segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan UMKM tercatat mencapai Rp14,1 triliun di tahun 2020, yang meliputi berbagai sektor industri dan tersebar di 27 provinsi di Indonesia. LPEI turut melakukan dukungan non-finansial kepada segmen UMKM, antara lain berupa pelatihan melalui *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) yang membantu para pelaku UMKM berorientasi ekspor. Di sepanjang tahun 2020, CPNE telah terlaksana kepada 27 UKM di Yogyakarta, 29 UKM di Makassar, dan 35 UKM di Kalimantan.

cumulative impairment losses reserve to Rp17.7 trillion, up 57% from previous year.

With respect to our performance in NIA, Indonesia Eximbank's support in 2020 grew by 106% to Rp1.6 trillion. Our financing scheme through NIA was disbursed for the development of the Special Economic Zones (SEZs), export-oriented SMEs, the aviation industry, and NIA in trade finance. Nevertheless, in total, the amount of financing that we disbursed in 2020 declined 8% or Rp90.4 trillion compared to the previous year. One of the reasons for the decline was the slowing down of the demand and activity restriction (lock-down) of Indonesia export destination countries, so that our effort to perform financing expansion selectively was not able to balance financing repayment maturity date.

Another focus of Indonesia Eximbank in 2020 as the government's Special Mission Vehicle (SMV) which provides government corporation credit guarantee to support the National Economic Recovery (NER) program. Until the end of 2020, disbursement of government guarantee which Indonesia Eximbank had already cooperated with 20 banks called Jaminah, has reached total Rp567 billion. Expectedly credit enhancement will encourage banks to increase the working capital to debtors so that can accelerate economy recovery. On the other hand, as the financial institution, Indonesia Eximbank was well aware that restricted economic activities due to the pandemic affected the performance of many debtors. For that reason, in 2020 Indonesia Eximbank introduced relaxation for COVID-19 affected debtors, a total of 125 companies with a total portfolio of Rp27 trillion.

Moreover, in the midst of the pandemic during 2020, Indonesia Eximbank continued to support Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) segment. MSME financing reached Rp14.1 trillion in 2020, covering various industrial sectors and spread across 27 provinces in Indonesia. Indonesia Eximbank also provided non-financial support to MSMEs, such as the Coaching Program for New Exporters (CPNE) that targeted export-oriented MSMEs. Throughout 2020, CPNE was carried out for 27 MSMEs in Yogyakarta, 29 in Makassar, and 35 in Kalimantan.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Selain itu, LPEI juga memberikan pendampingan dalam memasarkan produk-produk mitra binaan ke dalam *Global Marketplace* di tahun 2020. Seperti 323 produk yang dipasarkan di Alibaba dan 30 produk di Tradekey. LPEI juga berhasil mendorong terciptanya 21 eksportir baru. LPEI juga telah melaksanakan jasa konsultasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang disebut "Desa Devisa" dengan tujuan meningkatkan ekspor. Sampai dengan akhir tahun 2020, LPEI telah mengembangkan dua Desa Devisa yaitu di Jembrana, Bali dan Bantul, Yogyakarta.

Dari sisi pendapatan pada tahun 2020, pendapatan bunga LPEI mengalami koreksi 28% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp5,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh kegiatan usaha yang dibiayai LPEI turut terdampak pandemi COVID-19 sehingga permintaan akan pembiayaan melemah, serta adanya relaksasi yang dilakukan terhadap debitur-debitur yang terdampak pandemi. Untuk mengimbangi kondisi sulit tersebut, LPEI telah melakukan penyesuaian pada sumber pendanaannya dengan melakukan pengelolaan likuiditas yang efisien dan optimal. Hasilnya, antara lain beban bunga dapat diturunkan hingga 24% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp4,3 triliun.

Kemudian dari sisi efisiensi pada biaya umum dan administrasi pada tahun 2020, LPEI mampu menurunkannya hingga 22% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp235 miliar. Beban CKPN pun dapat diturunkan secara signifikan oleh LPEI, dari sebelumnya sebesar Rp6,7 triliun di tahun 2019 menjadi Rp423 miliar. Dengan penerapan efisiensi terkait biaya-biaya ini, LPEI dapat mencatat laba bersih tahun 2020 sebesar Rp288 miliar, atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang menderita kerugian sebesar Rp4,7 triliun.

Dari sisi rasio-rasio penting di tahun 2020, LPEI diantaranya mampu menguatkan rasio permodalan (CAR) dari 17,3% di tahun 2019 naik menjadi 28,1%. Kualitas pembiayaan juga dapat diperbaiki yang terefleksi dari penurunan rasio NPL *nett* menjadi 11,5% dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,0%. Hal ini diikuti pula dengan peningkatan *coverage ratio* menjadi 75% di akhir tahun 2020 dari 49% di tahun sebelumnya.

Terkait aksi Korporasi yang dilakukan LPEI selama tahun 2020 salah satunya adalah berupa penerbitan obligasi.

In addition, in 2020 Indonesia Eximbank provided assistance in placing the products of its partner enterprises into the global marketplace, as many as 323 products are now available on Alibaba and another 30 on Tradekey. Indonesia Eximbank also succeeded in mentoring 21 new exporters and has implemented consulting services in the communities by actively growing "Desa Devisa" to increase exports. Until the end of 2020, Indonesia Eximbank has developed two "Desa Devisa" Jembrana, Bali and in Bantul, Yogyakarta.

In terms of income in 2020, Indonesia Eximbank's interest income decreased by 28% to Rp5.1 trillion compared to the previous year. The decline was contributed by the effects of the COVID-19 pandemic that weakened demands for financing and the relaxation that was given to the debtors which were affected by the pandemic. To compensate, Indonesia Eximbank made adjustments to its funding sources by conducting efficient and optimal liquidity management. As a result, interest expense decreased by 24% to Rp4.3 trillion compared to previous year.

As for the efficiency in general and administrative expenses, Indonesia Eximbank was able to cut down this expense by 22% to Rp235 billion in 2020 compared to previous year. Indonesia Eximbank also significantly reduced its provision for impairment losses on financial assets from Rp6.7 trillion in 2019 to Rp423 billion in 2019. Through these efficiencies, net income in 2020 stood at Rp288 billion, an increase from the losses of Rp4.7 trillion in 2019.

On key financial ratios, Indonesia Eximbank was able to, among others, strengthen its capital adequacy ratio (CAR) from 17.3% in 2019 to 28.1% in 2020. The quality of financing can also be improved which was reflected from the decrease of net NPL to 11.5% compared to 14.0% in the previous year. This was followed by an increase in coverage ratio to 75% at the end of 2020 from 49% in the previous year.

Indonesia Eximbank also carried out corporate actions in 2020.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Sebagai salah satu bentuk kepedulian LPEI terkait dampak pandemi COVID-19, LPEI memberikan bantuan sosial dalam bentuk donasi ke masyarakat dan pelaku usaha berupa wastafel portabel, paket sembako untuk masyarakat dan *thermo gun* untuk pelaku usaha.

Kebijakan Strategis 2020

Dampak multidimensi yang ditimbulkan pandemi COVID-19 secara global maupun nasional sepanjang tahun 2020, antara lain perlambatan ekonomi yang signifikan dan perubahan pada aspek kehidupan sosial. Kondisi ini membuat LPEI harus beradaptasi dengan kondisi baru yang dikenal dengan "*new normal*" dalam menjalankan mandatnya.

Perubahan sedemikian cepat tentunya sangat berpengaruh pada kinerja dan operasional LPEI. Namun, di saat sulit inilah, LPEI memiliki tugas krusial sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN diharapkan mengakselerasi dan memulihkan mata rantai ekosistem ekonomi yang tatanannya terganggu sejak pandemi terjadi.

Mencermati perkembangan pandemi yang mencuat pada awal triwulan pertama tahun 2020 untuk menjaga kinerja secara komprehensif, baik finansial maupun non-finansial serta terintegrasi di tahun 2020, LPEI fokus pada tiga aspek yaitu:

- Restrukturisasi dan efisiensi.
- Menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa Konsultasi.
- Penguatan proses Internal.

Ketiga aspek tersebut kemudian ditranslasikan oleh LPEI menjadi sembilan prioritas utama serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis tahun 2020, yaitu:

1. Pengelolaan & Perbaikan Pembiayaan NPL
   LPEI berupaya mengoptimalkan proses restrukturisasi dan *recovery* dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan.

Meanwhile, due to the impact of the COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank donated hand washing portable stand and staple food packages to communities in need as well as thermo guns for businesses.

Strategic Policies in 2020

The multidimensional impacts of the COVID-19 pandemic globally and nationally throughout 2020 included a significant economic slowdown and changes in all aspects of social life. The situation forced Indonesia Eximbank to adapt to a situation known as the 'new normal' in order to continue exercising its mandates.

The rapid changes significantly affected Indonesia Eximbank's performance and operations. However, this difficult time demanded Indonesia Eximbank to fulfill a critical role and to act as the government's arm in implementing NER program. The NER is expected to accelerate and restore the economic ecosystem and order that has been upended since the pandemic broke.

Considering all developments since the pandemic occurred in the first quarter of 2020 to maintain its overall financial and non-financial performance in an integrated manner, Indonesia Eximbank focused on three aspects in 2020:

- Restructuring and efficiency
- Exercise of its mandate and business activities selectively, including providing Consultancy Services
- Strengthening internal processes.

Indonesia Eximbank translated the three aspects into nine key priorities that also formed its business development strategies in 2020:

1. NPL Management & Improvement
   Indonesia Eximbank sought to optimize restructuring and recovery process to maintain financing quality.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

2. Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan terdampak COVID-19
   Implementasi relaksasi pembiayaan atas debitur-debitur LPEI yang terdampak COVID-19 sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. Hal ini bertujuan menjaga kualitas pembiayaan LPEI dari pemburukan debitur akibat dampak COVID-19, serta sebagai upaya mengatasi penurunan kinerja nasabah ekspor.

3. Pengelolaan Likuiditas LPEI yang *Sustainable* dan Efisien
   Terjaganya likuiditas LPEI 2020 dilakukan melalui pendanaan USD dan Rupiah, serta perolehan pinjaman bilateral untuk mendukung terjaganya likuiditas. LPEI juga bekerja sama dengan *multilateral agency*/*Eximbank* negara lain dalam mengelola likuiditas yang efisien.

4. Penerapan *Cost Efficiency* secara Optimal
   Efisiensi yang dilakukan LPEI antara lain dengan optimalisasi penggunaan *fixed asset*/ruang kantor LPEI, pengelolaan konsultan secara selektif, dan penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa. LPEI juga senantiasa membangun budaya *cost efficiency* secara berkesinambungan dalam melakukan aktivitasnya.

5. Peningkatan Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor, Penjaminan, Asuransi dan *Trade Finance*
   LPEI melakukan pengembangan bisnis dengan sangat selektif untuk menghindari potensi pemburukan kualitas aset ke depannya . LPEI juga terus menjalankan mandatnya untuk menyalurkan Penugasan Khusus Ekspor serta program Penjaminan Pemerintah.

6. Penguatan Organisasi Kelembagaan
   Organisasi yang *agile* sesuai dengan kebutuhan dan dinamika bisnis juga harus didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, LPEI melakukan penyesuaian struktur organisasi, penyempurnaan struktur anggota dari komite-komite, memperkuat struktur organisasi pengelolaan aset bermasalah, serta meningkatkan kinerja dan kapabilitas SDM melalui berbagai macam program sertifikasi.

7. Penguatan Komunikasi kepada *Stakeholder*
   Berupa *stakeholder engagement* dengan menjaga komunikasi dengan *stakeholders*, pemenuhan laporan secara berkala dan tepat waktu, serta menyampaikan *update* isu-isu strategis LPEI. Selain itu, juga melakukan *media monitoring* serta pengelolaan media digital seperti *social media* dan *website*.

8. Pemenuhan Rekomendasi Auditor Eksternal
   LPEI berkomitmen dalam melakukan perbaikan salah satunya dengan melaksanakan rekomendasi hasil temuan auditor eksternal.

9. Penguatan Operasional, Tata Kelola, Manajemen Risiko
   Dilakukan dengan melakukan penyempurnaan model bisnis, sistem, pembuatan *Management Information System* (MIS) *blueprint*, dan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Selain itu, juga melakukan penguatan manajemen risiko antara lain dengan *Risk Management Framework* (*sui generis*), *Risk Appetite Statement* (RAS), *Portfolio Guideline*, dan sosialisasi pilar tata kelola lembaga.

Perbandingan Realisasi dan Target 2020

LPEI mencatat jumlah pendapatan dari Penugasan Umum dan PKE pada tahun 2020 menurun 27,74% menjadi Rp5,10 triliun. Penurunan disebabkan terutama pendapatan dari Penugasan Umum yang menurun 29,18% menjadi Rp4,79 triliun. Namun pendapatan dari PKE menunjukkan peningkatan sebesar 4,91%, dari sebelumnya Rp299,86 miliar menjadi Rp314,58 miliar.

Penugasan Umum

Pada tahun 2020, kami memandang realisasi kinerja Penugasan Umum LPEI terutama Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dari faktor eksternal. Kinerja masing-masingnya turun sebesar 7,56%, 2,16%, dan 0,85% atau menjadi Rp90,41 triliun, Rp9,91 triliun, dan Rp8,11 triliun.

2. Financing relaxation on COVID-19 affected business.
   The implementation of financing relaxation for Indonesia Eximbank debtors affected by COVID-19 was in line with Law No. 2 of 2020 and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 14/POJK.05/2020 on Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for Non-Bank Financial Services Institutions. The aim was to maintain the quality of Indonesia Eximbank financing from debtors' declining payment capacity due to COVID-19, as well as to address the declining performance of export customers.

3. Sustainable and Efficient Management of Liquidity
   In 2020, Indonesia Eximbank maintained its liquidity position through funding in USD and rupiah as well as bilateral loans. LPEI also cooperated with multilateral agencies/other EXIM banks to manage liquidity efficiently.

4. Optimal Cost Efficiency
   To achieve better efficiency, Indonesia Eximbank among others optimized the utilization of its fixed assets/office spaces, selective exercise of consultancy, and improved its procurement mechanism. Indonesia Eximbank also continuously promotes cost-efficiency culture in its operations.

5. Increase of NIA Financing, Guarantee, Insurance, and Trade Finance
   Indonesia Eximbank selectively developed its business to avoid asset quality risk. Indonesia Eximbank also continued to exercise its mandate in disbursing NIA financing and in providing Government Guarantee.

6. Organizational and Institutional Strengthening
   An agile organization that is able to meet business requirements and dynamics need to have capable human resource. To that end, Indonesia Eximbank adjusted its organizational structure, improved the membership structure of its committees, strengthened non-performing asset management organization, and improved the overall performance and capabilities of its people through various certification programs.

7. Increased Stakeholder Engagement
   To better communicate with stakeholders, Indonesia Eximbank ensured its reports are regularly updated and timely. Indonesia Eximbank also consistently communicates updates on strategic issues and carries out media monitoring as well as digital media management, such as social media and website.

8. Follow-up of External Auditor's Recommendations
   Indonesia Eximbank is committed to continuous improvement, including by following-up the recommendations of its external auditor.

9. Solidifying Operational, Governance, and Risk Management
   To improve these areas, Indonesia Eximbank upgraded its business model, systems, and created Management Information System (MIS) blueprint. We also applied the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71. To strengthen risk management, Indonesia Eximbank improved Risk Management Framework (*sui generis*), Risk Appetite Statement (RAS), Portfolio Guideline, and disseminated the pillars of governance.

Target Achievement 2020

Indonesia Eximbank's total revenue from General Assignment and NIA in 2020 decreased by 27.74% to Rp5.10 trillion. The decrease was mainly due to a decline of 29.18% in revenue from General Assignment to Rp4.79 trillion. Conversely, revenue from NIA increased by 4.91% from Rp299.86 billion to Rp314.58 billion.

General Assignment

We experienced significant external challenges in 2020 in realizing the performance of General Assignment, particularly on Financing, Guarantee, and Insurance. The performance of each line of business decreased by 7.56%, 2.16%, and 0.85%, respectively, to Rp90.41 trillion, Rp9.91 trillion, and Rp8.11 trillion.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Penugasan Khusus

Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima LPEI untuk melaksanakan PKE per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6,2 triliun. PMN ini telah dialokasikan secara penuh ke dalam tujuh program yaitu PKE Kereta, PKE Pesawat Udara, PKE KEK Mandalika, PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, PKE UKM, PKE Industri Penerbangan, dan PKE *Trade Finance*.

Namun, kondisi pandemi telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan program PKE *on-going* selama tahun 2020. Dimana terdapat beberapa potensi proyek yang menjadi tertunda proses negosiasi serta proses *delivery* produk yang terhambat akibat adanya *lockdown* di negara tujuan ekspor.

National Interest Account

As at 31 December 2020, Indonesia Eximbank received a total of Rp6.2 trillion of State Equity Participation (SEP) to be used in our NIA activities. The SEP was allocated to seven NIA projects: railway, aircrafts, the Mandalika SEZ; Africa, South Asia, and Middle East; SMEs, aviation industry, and trade finance.

However, the pandemic disrupted some ongoing NIA projects in 2020. The negotiation process of several projects was on hold, while product delivery was disrupted due to border lockdown in several export destinations.

Kendala dan Solusi 2020

Tantangan di tahun 2020 tidak lepas dari dampak langsung maupun tidak langsung terjadinya pandemi COVID-19. Perekonomian global tahun 2020 diperkirakan oleh IMF mengalami kontraksi dikarenakan antara lain terbatasnya aktivitas ekonomi dan tren harga komoditi yang menurun khususnya kelompok energi. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi dan menghambat perputaran roda ekonomi secara keseluruhan.

Perlambatan ekonomi nasional sendiri tentunya tidak terlepas dari imbas penurunan perekonomian global. Pelemahan penyaluran kredit di tahun 2020 dikarenakan turunnya permintaan kredit dari pelaku ekonomi. Selain itu, potensi penurunan kualitas aset juga menjadi salah satu tantangan besar karena banyaknya pelaku usaha baik yang berskala besar maupun kecil telah terdampak pandemi COVID-19.

Dengan segala tantangan yang dihadapinya di tahun 2020, LPEI fokus pada tiga aspek utama dalam menjalankan bisnisnya sebagaimana dijabarkan sebelumnya Restrukturisasi dan Efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa Konsultasi, dan penguatan proses Internal. Ketiga aspek ini kemudian diterjemahkan ke dalam sembilan prioritas utama sebagai agenda kerja LPEI di tahun 2020.

Challenges and Solutions in 2020

The challenges in 2020 were tied to the direct and indirect impact of the COVID-19 pandemic. The IMF already expected the global economy in 2020 to contract due to, among others, limited economic activity and a downward trend in commodity prices, especially in the energy sector, which significantly affected the economy overall.

Due to the global economic downturn, the national economy slowdown became inevitable. Weak lending activities in 2020 was driven by a drop in loan demand from businesses, while the potential decline in asset quality was one of the main challenges as large and small businesses were affected by the pandemic.

Considering these challenges, Indonesia Eximbank focused on three main aspects in its business, as mentioned before restructuring and efficiency, selectively carrying out mandates and businesses including consulting services, and strengthening internal processes. These three aspects had been translated into nine key priorities as Indonesia Eximbank's work agenda in 2020.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Prospek Usaha 2021

Tahun 2021 menurut kami masih akan menjadi tahun yang penuh dinamika untuk ekspor nasional, baik itu dari sisi tantangan maupun rintangan yang harus dihadapi. Meski demikian, kami meyakini bahwa dari sisi peluang dan potensinya juga masih sangat besar. Oleh karena itu, posisi LPEI yang strategis di dalam ekosistem ekspor nasional sejatinya tetap memiliki prospek usaha yang bagus.

Dengan begitu prospek usaha LPEI di tahun 2021 cukup baik, dengan memperhatikan prospek industri, serta memperhitungkan peluang bisnis negara tujuan ekspor maupun profil risiko dari calon debitur. Dalam hal ekspansi penyaluran pembiayaan, LPEI juga akan mengedepankan penerapan GCG dan manajemen risiko untuk memitigasi kualitas dari pembiayaannya.

Selain itu, adanya rencana strategis LPEI untuk segmen Jasa Konsultasi yang akan memberdayakan Usaha Kecil Menengah berorientasi Ekspor (UKME) kami yakini akan menciptakan eksportir-eksportir baru yang berkualitas. Demikian pula dengan penguatan program *community development* yang kami percaya akan melahirkan lebih banyak Desa Devisa baru ke depannya.

Adapun rencana strategis LPEI untuk menghadapi tahun 2021 yang diperkirakan masih akan penuh dengan tantangan yang sangat dinamis adalah tetap melanjutkan tahap akhir dari penguatan fondasi yang telah dimulai sejak tahun 2020 yaitu "*Regain Our Footing*". Sebagai keberlanjutan dari tahun 2020, fokus LPEI untuk tahun 2021 yaitu:

- Perbaikan Kualitas Aset
- Pelaksanaan Mandat
- Pengembangan Bisnis
- Penguatan Internal

Business Prospects in 2021

In our view, 2021 will continue to be a highly dynamic year for national exports, both in terms of challenges and obstacles. At the same time, we believe that there are significant market opportunities to tap into. To that end, Indonesia Eximbank's strategic position in the national export ecosystem remain highly potential with business prospects.

2021 business prospects is comprehensively good. It has carefully taken into account the industry prospects, business opportunities in export destination countries, and the risk profile of prospective debtors. On financing expansion, Indonesia Eximbank will prioritize the implementation of GCG and stronger risk management to maintain the quality of its financing.

Moreover, we also believe that our strategic plan for the Advisory Services segment that aims to empower export-oriented Small and Medium Enterprises (UKME) will create new qualified exporters. Similarly, the strengthening of community development programs we believe will give way to more "Desa Devisa" in the future.

The strategic plan to address 2021, which is expected to continue to have highly dynamic challenges, is to continue with the final stage of our foundation building initiative called 'Regain Our Footing' that was started in 2020. Continuing the 2020 activities, Indonesia Eximbank's focus in 2021 will be on:

- Asset Quality Improvement
- Mandate Exercise
- Business Development
- Internal Strengthening

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Dalam menjalankan bisnis dan mewujudkan fokus yang ingin dicapai pada tahun 2021, LPEI telah menetapkan strategi delapan prioritas utama yaitu:

1. Pengelolaan & Perbaikan Kualitas Aset.
2. Peningkatan Penjaminan, Pembiayaan, *Trade Finance* dan Asuransi.
3. Pelaksanaan PEN, IP dan PKE (Jaminan, UKM dan *Trade Finance*).
4. Pengembangan Bisnis UMKM & UMBE.
5. Penguatan Operasional, Manajemen Risiko, Tata Kelola.
6. Efisiensi Biaya yang Berkelanjutan.
7. Transformasi MIS & Pengembangan Teknologi.
8. Pengembangan Kompetensi SDM, Pemberdayaan Budaya TRUST dan Manajemen Kinerja yang terintegrasi.

Keberlanjutan penguatan fondasi utama Lembaga yang sudah dimulai sejak tahun 2020, dan adanya komitmen penuh pelaksanaan delapan prioritas utama tahun 2021, diyakini akan membuat fondasi yang dibangun akan semakin kokoh dalam menunjang pelaksanaan mandat dan pengembangan bisnis LPEI guna mendukung peningkatan ekspor Indonesia.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), LPEI mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan prinsip-prinsip GCG (Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kewajaran atau disingkat TARIF).

Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana dalam bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi dilakukan secara intens dan sistematis. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat direksi satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur juga melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI tetap berjalan dengan baik.

To implement its business strategies and realize its intended focus areas in 2021, Indonesia Eximbank has identified eight key priority strategies:

1. Asset management & quality improvement
2. Improvement of Guarantee, Financing, Trade Finance, and Insurance.
3. Implementation of NER, IP, and NIA (Guarantee, SME, and Trade Finance).
4. Business development of MSMEs and export-oriented medium enterprises.
5. Solidifying Operational, Risk, Management, and Governance.
6. Continuous Cost Efficiency.
7. MIS Transformation & Technology Development.
8. Development of people's competency, building the TRUST culture, and implementing integrated performance management.

With continued efforts to strengthen the key foundations that we started in 2020, and our full commitment to implement our eight priority strategies in 2021, Indonesia Eximbank will only grow a stronger footing in exercising its mandate and developing its business support Indonesia's Export Business.

Good Corporate Governance Implementation

In implementing Good Corporate Governance (GCG), Indonesia Eximbank refers to article 17 of Law No. 2 of 2009 concerning Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, and GCC principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness or TARIF).

The Executive Director is assisted by the Managing Director in conducting Indonesia Eximbank operations, with intensive and systematic coordination between both roles. Regular meetings include weekly board meetings, monthly ALCO meetings, and monthly performance meetings. In addition, the Executive Director and the Board of Directors may hold other coordination meetings to ensure efficient operations.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Selama tahun 2020, telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 50 kali. Direktur Eksekutif aktif melakukan komunikasi dengan Dewan Direktur sebagai organ tunggal di LPEI sebagai pemutus kebijakan dan pengawasan. Keputusan strategis diambil melalui mekanisme rapat dan didokumentasikan secara baik. Dalam pelaksanaan operasional, dibentuk pula komite di bawah Direktur Eksekutif.

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain dengan dibantu monitoring oleh Komite Audit. Di samping hal tersebut, RUPS di Indonesia Eximbank berbentuk Rapat Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya.

Dari sisi penguatan proses internal dan manajemen risiko, beberapa pencapaian di tahun 2020 antara lain implementasi PSAK 71, mulainya penerapan *three line of defence*, dan Tersedianya portfolio *guideline* dan RAS.

PERUBAHAN KOMPOSISI MANAJEMEN

Selama tahun 2020, LPEI tidak melakukan perubahan komposisi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Dengan demikian susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

In 2020, the Executive Director and the Managing Director has conducted 50 meetings. The Executive Director actively communicates with the Board of Directors as the single unit of Indonesia Eximbank who perform policy's decision making and surveillance. Strategic decisions are taken during the meetings and all decisions are documented. To support operations, a committee was also established under the Executive Director.

The Executive Director and Managing Director follow-up on the audit findings and recommendations of internal auditor unit, external auditors, and/or supervisory results of the Minister of Finance and/or other authorities. The Audit Committee provides support in monitoring follow-up actions. In addition, Indonesia Eximbank also holds its version of a shareholders' meeting, namely the five-yearly Long-Term Plan Endorsement Meeting and the Annual Work Plan and Budget meeting.

As part of internal process and risk management strengthening in 2020, Indonesia Eximbank implemented PSAK 71 and started to apply the three lines of defense as well as provided portfolio guideline and RAS.

CHANGES IN THE BOARD OF MANAGEMENT COMPOSITION

In 2020, there was no changes in Indonesia Eximbank's Executive Director and Managing Director membership. The composition of the Executive Director and Managing Director of LPEI as of 31 December 2020 is as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
D. James Rompas	Direktur Eksekutif | Executive Director	KMK No. 933/KMK.06/2019
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana I | Managing Director I	KDD No. 0010/KDD/08/2019
Djoko Retnadi	Direktur Pelaksana II | Managing Director II	KDD No. 0011/KDD/08/2019
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana III | Managing Director III	KDD No. 0012/KDD/08/2019
Henry Sihotang	Direktur Pelaksana IV | Managing Director IV	KDD No. 0013/KDD/08/2019
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana V | Managing Director V	KDD No. 0014/KDD/08/2019

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

APRESIASI

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pemangku Kepentingan dan Dewan Direktur atas dukungan dan arahan yang diberikan dalam rangka menjalankan kepengurusan LPEI.

Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Manajemen dan seluruh Pegawai yang telah menunjukkan kerja keras di tengah dinamika tantangan selama tahun 2020, sehingga LPEI mampu melaluinya dengan kondisi tetap baik dan terjaga.

Demikian laporan atas kegiatan kepengurusan LPEI ini kami sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kita semua kesehatan dan dapat segera melalui pandemi COVID-19.

APPRECIATION

We would like to express our appreciation to all stakeholders and the Board of Directors for the support and direction with respect to the operations and management of Indonesia Eximbank.

We also extend our highest appreciation to the management and all employees who have been exceptionally dedicated in the midst of the challenges during 2020. Their hard work allowed Indonesia Eximbank to successfully navigate the situation.

We hereby conclude the report of Indonesia Eximbank management. May God almighty always bestows us with good health and we pray that the we can soon navigate through the COVID-19 pandemic.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Jakarta, Juni | June 2021

D. James Rompas
Direktur Eksekutif
Executive Director

Dikdik Yustandi
Direktur Pelaksana I
Managing Director I

Djoko Retnadi
Direktur Pelaksana II
Managing Director II

Agus Windiarto
Direktur Pelaksana III
Managing Director III

Henry Sihotang
Direktur Pelaksana IV
Managing Director IV

Chesna F. Anwar
Direktur Pelaksana V
Managing Director V

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

1. **D. James Rompas**
   Direktur Eksekutif
   Executive Director

2. **Dikdik Yustandi**
   Direktur Pelaksana I
   Managing Director I

3. **Djoko Retnadi**
   Direktur Pelaksana II
   Managing Director II

4. **Agus Windiarto**
   Direktur Pelaksana III
   Managing Director III

5. **Henry Sihotang**
   Direktur Pelaksana IV
   Managing Director IV

6. **Chesna F. Anwar**
   Direktur Pelaksana V
   Managing Director V

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

REPORT FROM THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Usaha Syariah LPEI untuk memastikan agar seluruh aspek kegiatan bisnis telah sesuai dengan prinsip Syariah.

The Sharia Supervisory Board carried out its supervisory role on Indonesia Eximbank's sharia business activities, ensuring their full compliance with sharia principles

Bismillaahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dimampukan dalam menjalankan tugas dan amanah yang dititipkan kepada kita. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa sallam.

We express praises to God Almighty for His blessings and grace that allows us to exercise the mandate entrusted to us. We send salawat and peace to the Prophet Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa sallam.

Kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab, salah satunya adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha Syariah LPEI agar sesuai dengan prinsip Syariah dan dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Oleh karenanya perkenankan kami menyampaikan resume laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha Syariah LPEI selama tahun 2020.

The responsibility and mandate of the Sharia Supervisory Board (SSB) includes an advisory role to the Executive Director. We also supervise Indonesia Eximbank's sharia activities to ensure their compliance with sharia principles and within the framework of good corporate governance. As such, please allow us to present a summary of our supervisory report on Indonesia Eximbank Sharia business during 2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan LPEI mengingat bahwa di Indonesia telah berkembang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti bank syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, Reksa Dana syariah, dan LKS lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.

Pursuant to Law No. 2 of 2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) or Indonesia Eximbank, in addition to conventional business activities, Indonesia Eximbank may also carry out sharia-based export financing. The sharia-based services offered by Indonesia Eximbank follow the development of Sharia Financial Institution (LKS) in Indonesia, such as sharia banks, sharia insurance and re-insurance, sharia pawns, sharia mutual funds, and other sharia financial institutions that are widely accepted by the market and viewed as having comparative and competitive advantage.

Kanny Hidaya, SE., MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chair of the Sharia Supervisory Board

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

REPORT FROM THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Selama tahun 2020, secara umum, Kami berpendapat bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dijalankan oleh LPEI telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini yang kami keluarkan serta ketentuan terkait lainnya.

Dapat Kami informasikan juga bahwa pencapaian kinerja kegiatan usaha syariah LPEI juga dapat dijaga dengan relatif baik. Hal ini diantaranya tercermin dari pembiayaan *Musyarakah* LPEI yang beranjak menjadi Rp12,99 triliun pada akhir tahun 2020, atau bertumbuh 1,41% di tengah situasi yang dinamis dan penuh tantangan akibat pandemi di hampir sepanjang tahun 2020. Selain itu, pada bulan Juli 2020, LPEI juga berhasil menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020 sebesar Rp100 miliar. Dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* ini digunakan untuk meningkatkan pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan LPEI. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan ini mendapat *rating* yang sangat baik dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu "*triple A*" atau "idAAA(sy)".

Selama tahun 2020, DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali yang dilakukan secara daring, dimana salah satunya agendanya adalah Rapat Koordinasi Direktur Eksekutif bersama DPS. Agenda lainnya adalah pembahasan Rencana Pembiayaan Proyek Menggunakan Skema Syariah, pembahasan Program Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk juga pembahasan tentang prosedur standard, khususnya atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh LPEI.

In 2020, overall, we believe that the sharia-based activities carried out by Indonesia Eximbank were in compliance with the fatwa issued by the National Sharia Council - Indonesia Muslim Ulema (DSN-MUI), with our opinions, and other stipulations.

We are also pleased to share Indonesia Eximbank's good performance in sharia business. Amid a highly dynamic and challenging situation because of the pandemic, *Musyarakah* financing grew to Rp12.99 trillion or by 1.41% at the end or 2020. Moreover, Indonesia Eximbank also successfully issued Sukuk *Mudharabah* Shelf Bonds II Phase 1 of 2020 amounted to Rp100 billion in July 2020. The proceeds of the issuance were used to improve productive sharia-based export financing carried out by Indonesia Eximbank. Rating company PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rated the Sukuk *Mudharabah* with "triple A" or "idAAA(sy)".

During 2020, the SSB held 10 online meetings which one of the agendas was coordination between SSB and the Executive Director. Other agendas were discussion on Sharia-Scheme Project Financing Plans, discussion on National Economic Recovery Program including discussion on standard procedures, specifically on sharia-principle based financing carried out by Indonesia Eximbank.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
REPORT FROM THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Demikian kami sampaikan resume laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha Syariah LPEI selama tahun 2020. Kami mengapresiasi kepada Manajemen atas pencapaian kinerja usaha Syariah LPEI di tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa menjaga kita semua dalam menjalankan aktivitas kita, semoga kegiatan usaha Syariah lebih sukses pada tahun-tahun mendatang, dan semoga pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini dapat segera berakhir.

We hereby concluded our supervisory report on the Sharia business activities of Indonesia Eximbank during 2020. We would like to express our appreciation to the Management for Indonesia Eximbank's sharia performance in 2020. May God Almighty continue to bless us in implementing our sharia activities. We also pray for continued and greater accomplishments in the coming years and for the COVID-19 pandemic to be over soon.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh

Jakarta, Juni | June 2021

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah
On behalf of the Sharia Supervisory Board

Kanny Hidaya, SE., MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chair of the Sharia Supervisory Board

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2020 OLEH DEWAN DIREKTUR

Statements of Accountability of 2020 Annual Report by the Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2020 Annual Report of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Juni | June 2021

Dewan Direktur
Board of Directors

D. JAMES ROMPAS
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

SUMINTO
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

KASAN
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

ARUS GUNAWAN
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

FELIA SALIM
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

RIJANI TIRTOSO
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2020 OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Statements of Accountability of 2020 Annual Report by the Executive Directors & Managing Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2020 Annual Report of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Juni | June 2021

Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana
Executive Directors & Managing Directors

D. JAMES ROMPAS
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

DIKDIK YUSTANDI
Direktur Pelaksana I
Managing Director I

DJOKO RETNADI
Direktur Pelaksana II
Managing Director II

AGUS WINDIARTO
Direktur Pelaksana III
Managing Director III

HENRY SIHOTANG
Direktur Pelaksana IV
Managing Director IV

CHESNA F. ANWAR
Direktur Pelaksana V
Managing Director V

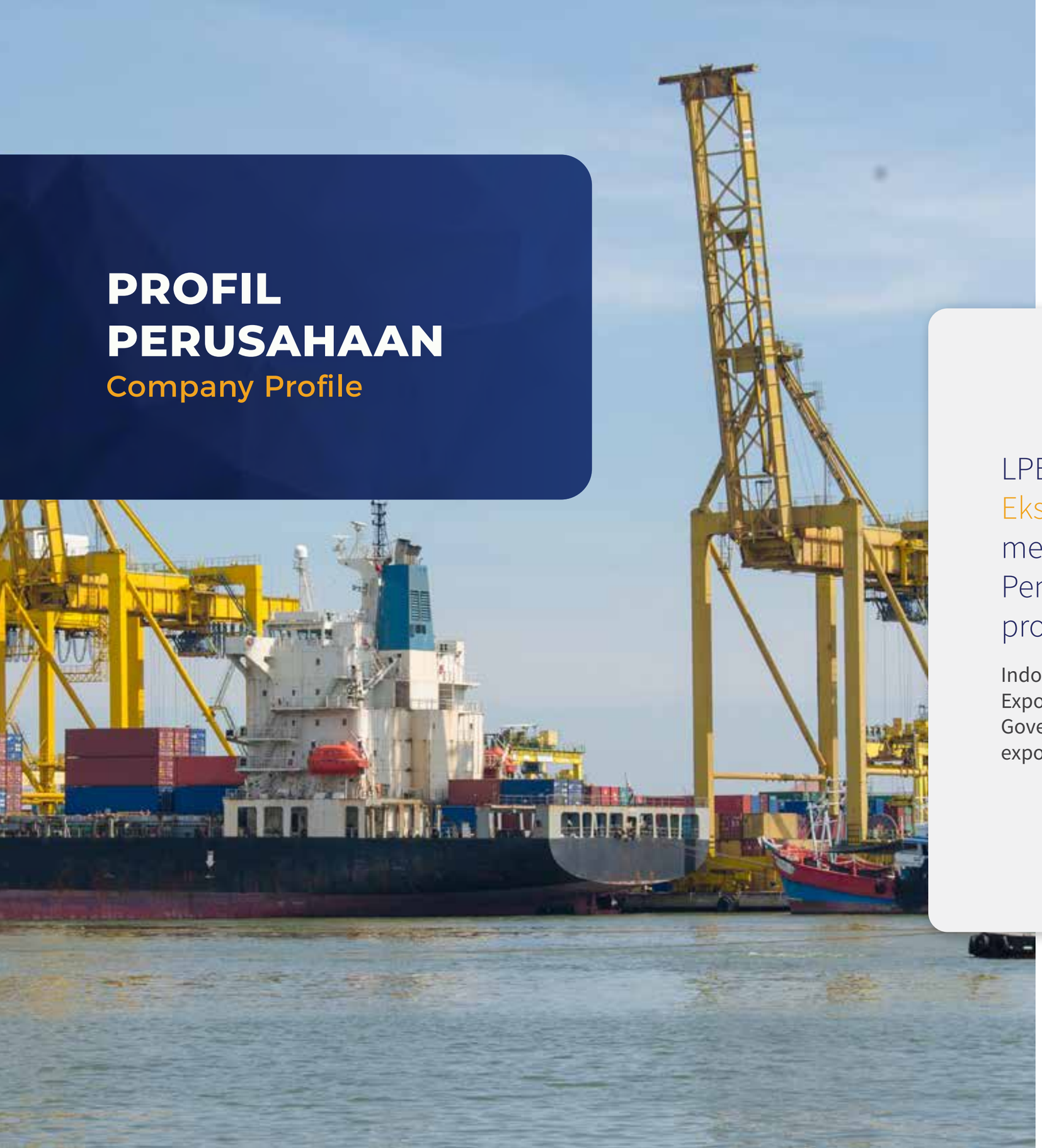

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

LPEI menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional.

Indonesia Eximbank implements the National Export Financing, which aims to support the Government's policy in promoting the national export programs.

IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan
Company Name
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Indonesia Eximbank

Perubahan Identitas Perusahaan
Identity Changes of Entity
Sejak didirikan tanggal 1 September 2009, tidak pernah terjadi perubahan identitas seperti perubahan nama dan status hukum.

Since its establishment on September 1, 2009 there were no changes on the company's identity, name or legal status.

Tanggal Pendirian
Date of Establishment
1 September 2009

Jenis/Badan Hukum Perusahaan
Legal Status of Entity
Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009.

Special Financial Institution established under the Act No. 2 of 2009.

Bidang Usaha
Line of Business
Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Jasa Konsultasi baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam, maupun di luar negeri.

A Financial Institution established specifically to provide the National Export Financing in the form of Financing, Guarantee and Insurance as well as Advisory Services conventionally and on sharia principle-based, domestically or overseas.

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4957

Act of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Addition of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4957

Modal Dasar
Authorized Capital
Rp4.321.586.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully-Paid In Capital
Rp14.692.187.667.645

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
100% milik Pemerintah Indonesia dan tidak terbagi atas saham.
100% Government-owned and not divided into shares.

Bursa Efek
Stock Exchange
Obligasi LPEI dicatat dan diperdagangkan pada:
1. Bursa Efek Indonesia (IDX) dan
2. Bursa Efek Singapura (SGX)

Indonesia Eximbank Bonds are listed and traded at:
1. Indonesia Stock Exchange (IDX); and
2. Singapore Stock Exchange (SGX)

Situs Web Perusahaan
Corporate Website
www.Indonesiaeximbank.go.id

Alamat Email Perusahaan
Corporate Email Address
corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Alamat Kantor
Office Address
Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Kantor Wilayah | Regional Offices
Jakarta
Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta1210,
Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Surabaya
Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1
Jl. Panglima Sudirman 101-103,
Surabaya 60271, Indonesia

Kantor Cabang | Branch Offices
Medan
B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 12
Jl. Putri Hijau No. 10,
Medan 20111, Indonesia

Makassar
Wisma Kalla Building 6th Floor
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10,
Makassar 90125, Indonesia

Surakarta
Indonesia Eximbank Building 2nd d Floor
Jl. Slamet Riyadi No. 341,
Surakarta 57141, Indonesia

Kantor Pemasaran | Representative Offices
Balikpapan
Grand Sudirman Building
Panin Tower, Main Lobby 203
Jl. Jend. Sudirman No. 7,
Balikpapan 76411, Indonesia

Batam
Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704
Jl. Raya Batam Center,
Batam 29461, Indonesia

Denpasar
Jl. Raya Puputan No. 160 Renon,
Denpasar 80235, Indonesia

SEKILAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

INDONESIA EXIMBANK AT A GLANCE

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan sebagai lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia. Pendirian LPEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. LPEI memiliki fungsi menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia or Indonesia Eximbank is a financial institution owned by the Government of the Republic of Indonesia that was established pursuant to Act No. 2 of 2009. Indonesia Eximbank has the functions to implement the National Export Financing (PEN), which aims to support the Government's policy in promoting the national export programs.

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) disalurkan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi yang diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Juga kepada badan usaha yang berdomisili di dalam, maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dan termasuk perorangan. Penyaluran PEN oleh LPEI dapat dilakukan baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, LPEI memiliki tugas untuk:

- Menyalurkan pembiayaan, penjaminan dan/ atau asuransi dalam rangka ekspor, maupun menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
- Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain itu, LPEI juga melakukan bimbingan dan Jasa Konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan UU. No. 2/2009.

Dewan Direktur merupakan organ tertinggi di LPEI. Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana. Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

The National Export Financing is disbursed in the form of Financing, Guarantee, and/or Insurance to enterprises, both legal and non-legal entities, including individuals who are domiciled either inside or outside the territory of the Republic of Indonesia. The disbursements of National Export Financing by Indonesia Eximbank are carried out in either conventional financings or on Sharia principles-based. In carrying out its functions, the duties of Indonesia Eximbank are as follows:

- Disbursement of financing, guarantee and/or insurance for exports or producing goods and services and/or other businesses supporting export;
- Providing financing for the transactions or projects that falls into the category that cannot be financed by banks, but has the prospects to increase the national exports; and
- Assisting in overcoming the barriers encountered by the Banks or Financial Institutions in providing financing for Exporters that are commercially potential and/or important in Indonesia's economic development.

Indonesia Eximbank also provides Advisory Services to the Banks, Financial Institutions, Exporters, export goods producers, particularly in the micro, small and medium enterprises segment, and cooperatives; and carries out other activities that support the duties and authorities of Indonesia Eximbank that are in line with Act No. 2/2009.

The Board of Directors is the sole organ of Indonesia Eximbank. The Board of Directors is responsible for formulating and establishing policies, as well as supervising the operations of Indonesia Eximbank.

The Executive Director performs Indonesia Eximbank's operational activities, and is assisted by a maximum of 5 (five) Managing Directors. The initial capital of Indonesia Eximbank was set at a minimum of Rp4.00 trillion. The capital consists of state treasury that is separated and is not divided into shares.

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

Bidang Usaha berdasarkan Dasar Hukum Pendirian

Kegiatan usaha Lembaga sesuai mandat Undang- Undang Nomor 2/2009, LPEI dibentuk untuk mendukung Program Ekspor nasional dengan memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang terdiri dari penyediaan Pembiayaan, Penjaminan, dan/ atau Asuransi. Bidang usaha yang dijalankan adalah:

a. Pembiayaan yang diberikan dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor.
b. Penjaminan yang diberikan dapat berupa:
   - Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
   - Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
   - Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan
   - Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
c. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk:
   - Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
   - Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
   - Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/ atau
   - Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dapat memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan prinsip syariah. Di samping memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada nasabah, LPEI dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen

Business Activities based on Legal Basis of Establishment

As mandated by Act No. 2/2009, Indonesia Eximbank was established to support the National Export Program by providing the National Export Financing (PEN), which consists of Financing, Guarantee and/or Insurance. Therefore, the business sectors carried out are:

a. The financing disbursements are provided in the form of export working capital financing and investment export financing.
b. The guarantees are provided in the form of:
   - Guarantee for Indonesian exporters on payments received from the overseas buyer of goods and/or services;
   - Guarantee for Indonesian importer of goods and services abroad for the payment of which has been provided to Indonesian exporters to finance export contracts on the sale of goods and/or services or fulfillment of work or services carried out by the Indonesian companies;
   - Guarantee to Bank's partner in providing financing export transaction that has been provided to the Indonesian Exporters; and/or
   - Guarantee in the framework of tenders related to the implementation of projects that partly or entirely support export activities.
c. Insurances are provided in the form of:
   - Insurance to cover the risk of failure on export;
   - Insurance to cover the risk of payment failure;
   - Insurance to cover the investment by Indonesian companies abroad, and/or
   - Insurance to cover the political risk in the country's export destinations.

Other than conventional business activities, Indonesia Eximbank also provides the National Export Financing of the Sharia principles-based. Apart from providing financing, guarantee, and insurance to customers, Indonesia Eximbank also provides mentoring and advisory services to Banks, Financial Institutions, exporters, export

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

barang ekspor, serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan ekspor (Eximbank) di negara lain antara lain penyediaan *counter guarantee* (kontra garansi), *joint guarantee* (penjaminan bersama), pembiayaan subtitusi impor, serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

LPEI dapat menjalankan Penugasan Khusus Pemerintah atau *National Interest Account*, yaitu penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor. Sumber dana LPEI diperoleh dari:

a. Penerbitan surat berharga;
b. Pinjaman jangka pendek, menengah, dan/ atau panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dan serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam, maupun luar negeri, dan Pemerintah;
c. Hibah;
d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia; dan
e. Penyertaan Modal Negara.

goods manufacturers, as well as carries out other activities commonly conducted by the export financing institution (Eximbank) in other countries, among others counter guarantee, joint guarantee, import substitution financing, as well as imports of raw materials financing implemented to meet the national needs.

Indonesia Eximbank is also able to carry out the Government Special Assignment or the National Interest Account. This is an assignment from the government to Indonesia Eximbank to provide Export Financing for transactions or projects that are commercially difficult to implement, but considered necessary by the Government to support the export policies or programs. Indonesia Eximbank source of funds can be obtained from:

a. The issuance of securities/bonds;
b. Short-term, medium and/or long-term borrowings from foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions, and the Government;
c. Grants;
d. Placements by Bank Indonesia, and;
e. State Capital Investment.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

PEMBIAYAAN
FINANCING

A. Pembiayaan Luar Negeri
- Pembiayaan Investasi di Luar Negeri
- Pembiayaan Proyek di Luar Negeri
- *Buyer's Credit*

B. Pembiayaan Dalam Negeri
- Pembiayaan Modal Kerja Ekspor
- Pembiayaan Investasi Ekspor
- Pembiayaan Resi Gudang
- Negosiasi & Diskonto Tagihan Ekspor
- Pembiayaan L/C & SKBDN
- *Trust Receipt*
- Pembiayaan Project
- Pembelian Tagihan Supplier
- Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor

C. Pembiayaan Syariah
- Murabahah
- Musyarakah
- Mudharabah
- Qardh
- Wakalah

A. Overseas Financing
- Overseas Investment Financing
- Overseas Project Financing
- Buyer's Credit

B. Domestic Financing
- Working Capital Export Financing
- Investment Export Financing
- Warehouse Receipt Financing
- Export Bills Purchasing
- LC Financing
- Trust Receipt
- Project Financing
- Supplier Bills Purchasing
- Export-Oriented People's Business Credit

C. Sharia Financing
- Murabahah
- Musyarakah
- Mudharabah
- Qardh
- Wakalah

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

PENJAMINAN
GUARANTEE

- Penjaminan Proyek
- Jaminan Kepabeanan
- Penjaminan Kredit Bagi Bank & Lembaga Keuangan

- Project Guarantee
- Custom Bond
- Credit Guarantee for Banks & Financial Institutions

ASURANSI
INSURANCE

- Proteksi Piutang Dagang
- Marine Cargo
- Reasuransi

- Trade Credit Insurance
- Marine Cargo
- Reinsurance

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

- CPNE (*Coaching Program for new Exporter)*
- *Marketing Handholding*
- Desa Devisa
- *Export Enabler*
- Program Kemitraan

- CPNE (Coaching Program for new Exporter)
- Marketing Handholding
- *Desa Devisa*
- Export Enabler
- *Program Kemitraan*

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2009

Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan UU No. 2/2009 dan membubarkan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Seluruh hak dan kewajiban PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi hak dan kewajiban Indonesia Eximbank.

The Government of Indonesia established the Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank) under Act No. 2/2009 and dissolved PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). All rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) become the rights and obligations of Indonesia Eximbank.

2010

Tahun 2010 merupakan tahun pertama bagi LPEI untuk menerbitkan Obligasi Indonesia Eximbank I senilai Rp3,00 triliun dan menandatangani perjanjian-perjanjian kerja sama baik bilateral, maupun multilateral. Selain itu, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas LPEI dalam mendukung program ekspor nasional melalui kegiatan pembiayaan asuransi dan penjaminan.

2010 was the first year for Indonesia Eximbank to issue Indonesia Eximbank Bonds I amounting to Rp3.00 trillion and signed the bilateral and multilateral cooperation agreements. In addition, the Government provided State Equity Investment of Rp2.00 trillion to increase the capacity of Indonesia Eximbank in supporting the national exports programs through export financing, insurance and guarantee activities.

2011

- Sesuai mandat yang diemban, LPEI dapat melakukan pembiayaan di luar negeri. LPEI memberikan pembiayaan di luar negeri melalui fasilitas Overseas Financing di Amerika Serikat, Malaysia dan Arab Saudi.
- LPEI menjadi lembaga keuangan yang pertama dalam membiayai pembangunan smelter di Indonesia.
- LPEI meluncurkan program Pendidikan Calon Pegawai angkatan I sebagai salah satu strategi pemenuhan SDM Lembaga.

- Pursuant to the mandate, Indonesia Eximbank is able to provide financing abroad. This financing is provided through Overseas Financing facilities in the United States, Malaysia and Saudi Arabia.
- Indonesia Eximbank is the first financial institution to finance the construction of smelters in Indonesia.
- Indonesia Eximbank launched the first batch of Employees Candidate Education as one of the strategies to address the Institution's HR fulfillment.

2012

- LPEI menerbitkan Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only senilai USD500 juta.
- LPEI menandatangani Fasilitas Kredit Overseas Project Financing dengan BUMN Karya dalam ekspor jasa Waskita Karya untuk pembangunan bandara Suai Timor Leste.

- Indonesia Eximbank issued Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only amounted to USD500 million.
- Indonesia Eximbank signed Credit Facility of Overseas Project Financing between Indonesia Eximbank and Karya State-Owned Enterprises in Waskita Karya export services for development of Suai Timor Leste airport.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2013

Pengangkatan Bapak Hadiyanto, Bapak A. Fuad Rahmany dan Bapak Bachrul Chairi selaku Anggota Dewan Direktur LPEI untuk periode 2013-2018 dan Bapak Isnen Sutopo selaku Direktur Pelaksana II Indonesia Eximbank yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Suharsono. Keberadaan manajemen baru diharapkan dapat membawa LPEI menjadi lembaga yang "*advanced in export services*".

The Appointment of Hadiyanto, A. Fuad Rahmany and Bachrul Chairi as members of the Board of Directors for the period of 2013-2018 and Isnen Sutopo as the Managing Director II of Indonesia Eximbank, formerly held by Suharsono. The new management is expected to bring Indonesia Eximbank to become an "advanced institution in the export services".

2014

- LPEI mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah:
  1. Penugasan Khusus Program Ekspor Gerbong Kereta Penumpang ke Bangladesh
  2. Penugasan Khusus Program Ekspor Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015
- LPEI meluncurkan Coaching Program for New Exporters (CPNE)
- Pemerintah kembali memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,00 triliun kepada LPEI untuk memperkuat modal, juga meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya dalam mendukung program ekspor nasional.

- Indonesia Eximbank was granted specific assignments from the government:
  1. National Interest Account on the Passenger Train Cars Export to Bangladesh
  2. National Interest Account on Export Program to Support the Government Economic Policy Package 2015.
- Indonesia Eximbank launched the Coaching Program for New Exporters (CPNE)
- The Government granted the State Capital Investment of Rp1.00 trillion to Indonesia Eximbank to strengthen its capital, as well as to increase the capacity of its business activities in supporting the national export programs.

2015

- LPEI meluncurkan produk asuransi baru, Marine Cargo Insurance untuk memberikan perlindungan atas pengiriman barang ekspor. Selain itu, LPEI bersinergi dengan 11 perusahaan asuransi dan reasuransi yang ditandai dengan penandatanganan Treaty Marine Cargo Insurance.
- Melalui program Corporate Social Responsibility, LPEI berkontribusi dalam Program Penghijauan Berbasis Agroforestry dengan menanam 10 ribu bibit pohon Sengon di Wonogiri, Jawa Tengah.

- Indonesia Eximbank launched a new insurance product, Marine Cargo Insurance to provide protection for the delivery of export goods. In addition, Indonesia Eximbank synergized with 11 insurance and reinsurance companies, which was marked by the signing of the Marine Cargo Insurance Treaty.
- Through its Corporate Social Responsibility, Indonesia Eximbank contributed to the Agroforestry-Based Green Program by planting 10 thousand of sengon tree seedlings in Wonogiri, Central Java.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2016

- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,20 triliun yang terdiri atas Rp1,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,20 triliun untuk penugasan khusus.
- LPEI mendapatkan Penugasan Khusus dari pemerintah berupa Keputusan Menteri Keuangan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 374/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor gerbong penumpang kereta api.
  2. Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor pesawat udara.
  3. Keputusan Menteri Keuangan No. 787/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika.

- The government provided the State Capital Investment (PMN) of Rp3.20 trillion, comprising of Rp1.00 trillion for operational capacity improvement and Rp2.20 trillion for the National Interest Account program implementation.
- Indonesia Eximbank received the National Interest Account from the government under the Finance Minister's Decree with the following details:
  1. Decree of Finance Minister No. 374/KMK.08/2017 on the interest account to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to provide export financing for the passengers train carriages.
  2. Decree of Finance Minister No. 649/KMK.08/2017 on the interest account to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to provide export financing of aircrafts.
  3. Decree of Finance Minister No. 787/KMK.08/2017 on the interest account to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to foster export to the African countries.

2017

- LPEI meluncurkan fasilitas KURBE (Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor) sebagai dukungan terhadap paket kebijakan ekonomi jilid XI.
- LPEI membuka Kantor Pemasaran di Batam dan Denpasar sebagai upaya untuk menjangkau potensi ekspor UKM di wilayah Sumatera dan Bali.
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp4,00 triliun yang terdiri atas Rp2,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,00 triliun untuk penugasan khusus.

- Indonesia Eximbank launched the Export- Oriented Small Business Loan (KURBE) facility in support of the Government's economic policy package series XI.
- Indonesia Eximbank established the Marketing Offices at Batam and Denpasar in an effort to reach the export potential of SMEs in Sumatra and Bali.
- The Government provided the State Capital Investment of Rp4.00 trillion of which Rp2.00 trillion is allocated to increase the business capacity of Indonesia Eximbank and Rp2.00 trillion for the National Interest Accounts.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2018

LPEI melakukan Reformasi Kelembagaan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Eximbank (IEB) 2020, yaitu *Top of Mind, Sovereign Entity, Regional Leader, An Institution of Proud,* dan *True Policy* Bank. Program Reformasi Kelembagaan merupakan suatu terobosan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan lembaga sebagai salah satu bagian dari rencana pengembangan ekspor nasional yang berkelanjutan.

Dalam mengawal proses Reformasi Kelembagaan tersebut, arah perubahan mengacu pada 4 aspek mendasar yaitu:

a. Proses bisnis dan operasional menjadi lebih efektif dan efisien.
b. Fundamental manajemen risiko yang lebih kuat.
c. Keandalan sistem digital dan layanan teknologi informasi komunikasi dalam mendukung operasional Lembaga
d. Kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dan internalisasi budaya Lembaga.

Indonesia Eximbank conducts Institutional Reform in order to realize the vision of Indonesia Eximbank (IEB) 2020, namely Top of Mind, Sovereign Entity, Regional Leader, An Institution of Proud, and True Policy Bank. The Institutional Reform Program is a breakthrough to realize the ideals of establishing an institution as part of a plan for sustainable national export development.

In guarding the Institutional Reform process, the direction of change refers to 4 fundamental aspects, namely:

a. Business and operational processes are more effective and efficient.
b. Stronger risk management fundamentals.
c. Reliability of digital systems and communication information technology services in supporting the operations of the Institute.
d. Competency of human resources and internalization of the corporate culture

2019

- Peresmian kantor pusat LPEI di Prosperity Tower, District 8 pada tanggal 12 Februari 2019.
- Peresmian Desa Devisa Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) pada tanggal 6 Desember 2019.
- Peresmian Desa Devisa Koperasi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) pada tanggal 20 Desember 2019.

- Inauguration of Indonesia Eximbank head office in Prosperity Tower, District 8 on February 12, 2019.
- Inauguration of Desa Devisa Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) on December 6, 2019.
- Inauguration of Desa Devisa Koperasi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) on December 20, 2019.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2020

- Melaksanakan Jasa Konsultasi dalam bentuk pengembangan masyarakat yang disebut “Desa Devisa” dengan tujuan meningkatkan ekspor. Sampai dengan akhir tahun 2020, LPEI telah mengembangkan 2 Desa Devisa yaitu di Jembrana, Bali dan Bantul, Yogyakarta
- LPEI juga telah mendorong terciptanya 21 eksportir baru
- LPEI telah melakukan relaksasi terhadap debitur yang terdampak COVID-19
- Bekerjasama dengan 14 bank dalam program Jaminah (penjaminan pemerintah) sebesar Rp867 miliar
- Penyaluran khusus PKE NIA sebesar Rp1,5 triliun antara lain pada sektor :
  - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
  - UKM berorientasi ekspor
  - Industri Penerbangan
  - PKE Trade Finance
- Penerimaan PMN total sebesar Rp10 triliun untuk penugasan umum, Penugasan Khusus Ekspor dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- Advisory in terms of community development called “Desa Devisa” with the objectives to enhance export. As of the end of 2020, Indonesia Eximbank has developed 2 Desa Devisa namely in jembrana, Bali and Bantul, Yogyakarta
- Indonesia Eximbank promotes the creation of 21 new exporters
- On the impact of the COVID-19, Indonesia Eximbank has carried out restructuring of a total of 125 borrowers impacted by the COVID-19
- Cooperate with 14 banks for the Jaminah program (government assurance) amounted to Rp567 billion
- Specific disbursement of NIA amounted to Rp1,5 trillion among others on the sector:
  - Specific Economic Areas Development
  - Export-oriented SMEs
  - Aviation Industry
  - NIA Trade Finance
- Received State Equity Participation (SEP) amounted to Rp10 trillion for general assignment, National Interest Account and National Economy Recovery

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

Per 31 Desember 2020 | As of 31 December 2020

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Personalia
- Komite Bisnis
  - Komite Kebijakan Bisnis (Pembiayaan)
  - Komite Pengembangan Produk
  - Komite Bisnis Penugasan Khusus Ekspor
- Komite *Assets & Liabilities*
- Komite Personalia
- Komite Teknologi Sistem Informasi
- Komite Bisnis Penugasan Khusus Ekspor

- Risk Management Committee
- Personnel Committee
- Business Committees
  - Business Policy (Financing) Committee
  - Product Development Committee
  - Export Special Assignment Business Committee
- Assets & Liabilities Committee
- Personnel Committee
- Information System Technology Committee
- Export Special Assignment Business Committee

- Komite Audit
- Komite Remunerasi & Nominasi
- Komite Pemantau Risiko

- Audit Committee
- Remuneration & Nomination Committee
- Risk Monitoring Committee

Suminto
Anggota DD - Ex. Officio & Ketua Komite Remunerasi & Nominasi
DD - Ex. Officio Member & Chairman of Remuneration & Nomination Committee

D. James Rompas
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Head of Board of Directors concurrently Executive Director

Felia Salim
Anggota DD - Ex. Officio & Ketua Komite Pemantau Risiko
DD - Ex. Officio Member & Chairman of Risk Monitoring Committee

Rijani Tirtoso
Anggota DD - Ex. Officio & Ketua Komite Audit
DD - Ex. Officio Member & Chairman of Audit Committee

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Dikdik Yustandi
DP I / CBO 1

- **T. Wahyu Prihadi Wibowo** – Senior Executive VP. IV
  - Divisi | Division HRBP & Recruitment
    - Dep. HRBP
    - Dep. Recruitment
  - Divisi | Division Organization & People Development
    - Dep. OD & Performance
    - Dep. Talent, People Development & Culture
  - Divisi | Division HR - Services
    - Dep. Compensation & Benefit
    - Dep. Employee Engagement
    - Dep. HRIS & Personnel Adm.
  - Divisi | Division Kepatuhan
    - Dep. Anti Money Laundering
    - Dep. Regulatory
    - Dep. Business Advisory
  - Divisi | Division Transformation Office
    - Dep. Project Management Office
    - Dep. Change Management Office
- **Restiana Ie Tjoe L.** – Senior Executive VP. V
  - Divisi | Division Reguler Audit & Methodology
    - Dep. Bisnis Audit
    - Dep. IT & Support Audit
    - Dep. QA, Follow Up & Methodology
  - Divisi | Division Special Audit
    - Dep. Special Audit 1
    - Dep. Special Audit 2
- **Salomi Adriana** – Senior Executive VP. I
  - Divisi Pembiayaan Khusus Special Financing Division
    - Dep. Pembiayaan Khusus | Special Financing
  - Divisi Penjaminan & Asuransi Guarantee & Insurance Division
    - Team Leader Penjaminan | Guarantee 1
    - Team Leader Penjaminan | Guarantee 2
    - Team Leader Asuransi | Insurance
    - Team Leader Re-asuransi dan Klaim | Re-insurance and Claims
  - Divisi Bisnis Korporasi I Corporate I Business Division
    - Team Leader Bisnis Korporasi 1 | Corporate 1 Business
    - Team Leader Bisnis Korporasi 2 | Corporate 2 Business
    - Team Leader Bisnis Korporasi 3 | Corporate 3 Business
  - Divisi Bisnis Korporasi I Corporate I Business Division
    - Team Leader Bisnis Korporasi 1 | Corporate 1 Business
    - Team Leader Bisnis Korporasi 2 | Corporate 2 Business
    - Team Leader Bisnis Korporasi 3 | Corporate 3 Business
  - Divisi Bisnis BUMN SOE Business Division
    - Team Leader Bisnis BUMN | SOE Business 1
    - Team Leader Bisnis BUMN | SOE Business 2
  - Divisi | Division Trade Finance
    - Team Leader Trade Marketing
    - Team Leader Structured Trade
    - Team Leader Corporate Desk Surabaya

Djoko Retnadi
DP II / CBO 2

- Divisi Bisnis Syariah Sharia Business Division
  - Dep. Syariah Advisory
  - Dep. Syariah Product Dev.
  - Team Leader Prime Mover
  - Team Leader Prime Mover 2
- Divisi Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK) Small, Medium Enterprise and Commercial Division (SMEC)
  - Team Leader Bisnis UKMK | SMEC 1
  - Team Leader Bisnis UKMK | SMEC 2
- Divisi Jasa Konsultasi Advisory Services Division
  - Dep. Jasa Konsultasi | Advisory Services 1
  - Dep. Jasa Konsultasi | Advisory Services 2
- Kantor Wilayah | Regional Office Jakarta
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business 1
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business 2
  - Team Leader Kantor Pemasaran | Marketing Office Batam
- Kantor Cabang | Regional Office Medan
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business
  - Bidang Operasional Operations
- Kantor Wilayah | Regional Office Surabaya
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business 1
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business 2
  - Bidang Operasional Operations
  - Team Leader Kantor Pemasaran | Marketing Office Denpasar
- Kantor Cabang | Regional Office Makassar
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business
  - Bidang Operasional Operations
- Kantor Cabang | Regional Office Surakarta
  - Team Leader Bidang Bisnis | Business
  - Bidang Operasional Operations
  - Team Leader Kantor Pemasaran | Marketing Office Balikpapan

Agus Windiarto
DP III / CP 3
Corporate Secretary

- **Anwar Harsono** – Senior Executive VP. III
  - Divisi Finance Finance Division
    - Dep. Accounting Control
    - Dep. Financial Reporting
    - Dep. Management Accounting
    - Dep. Tax & Payment
    - Dep. Accounting Policy & Cost
  - Divisi | Division Strategic Planning
    - Dep. Corporate Planning
    - Dep. Strategy & Performance Management
  - Divisi | Division MIS & Business Finance
    - Dep. Management Information System
    - Dep. Strategy Initiative Management Office
  - Divisi | Division Financial Institution and Treasury
    - Dealing Room
    - Dep. Pendanaan Funding Department
    - Dep. Financial Institution
  - Divisi | Division Middle Office Treasury
    - Dep. Assets and Liabilities Management
    - Dep. Market and Liquidity Risk
  - Divisi | Division Communication & Stakeholder Engagement
    - Dep. Komunikasi | Communication
    - Dep. Investor & International Relation
    - Dep. Stakeholders Management
  - Divisi | Division Office of The Board
    - Dep. Biro Direksi | Board of Directors Bureau
    - Dep. Sekretariat & Pelaporan DD | Secretariat & BOD Reporting
  - Divisi | Division IEB Institute
    - Dep. Riset dan Pengembangan | Research and Development
    - Dep. Market Intelligence

Henry Sihotang
DP IV / CRO

- **Titiek Setiyowati** – Senior Executive VP. VI
  - Divisi | Division Credit Reviewer I
    - Team Leader Credit Reviewer 1
    - Team Leader Credit Reviewer 2
    - Team Leader Credit Reviewer 3
    - Team Leader Credit Reviewer 4
  - Divisi | Division Credit Reviewer II
    - Team Leader Credit Reviewer 1
    - Team Leader Credit Reviewer 2
    - Team Leader Credit Reviewer 3
    - Team Leader Credit Reviewer 4
  - Divisi | Division Product Development & Portfolio Management
    - Dep. Product Development
    - Dep. Portofolio Management
    - Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder
  - Divisi Restrukturisasi Aset I Assets Restructuring I Division
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 1
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 2
  - Divisi Restrukturisasi Aset II Assets Restructuring II Division
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 1
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 2
  - Divisi Restrukturisasi Aset III Assets Restructuring III Division
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 1
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 2
  - Divisi Restrukturisasi Aset IV Assets Restructuring IV Division
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 1
    - Team Leader Restrukturisasi Aset | Assets Restructuring 2
  - Divisi Restrukturisasi Aset Syariah Sharia Assets Restructuring Division
    - Team Leader Restrukturisasi Aset Syariah | Sharia Assets Restructuring 1
    - Team Leader Restrukturisasi Aset Syariah | Sharia Assets Restructuring 2
  - Divisi Litigasi Litigation Division
    - Dep. Asset Management and Repo Sale
    - Litigator

Chesna F. Anwar
DP V / CCO

- **Mohammad Guntur** – Senior Executive VP. II
  - Divisi Teknologi Sistem Informasi Information System Technology Division
    - Dep. Perencanaan dan Pengendalian IT IT Planning and Control Department
    - Dep. Pengembangan Core System Core System Development Department
    - Dep. Support dan Pemeliharaan Sistem System Support and Maintenance Department
    - Dep. Pengembangan Office Automation Office Automation Development Department
    - Dep. Data Management Data Management Department
  - Divisi Operational Operations Division
    - Dep. Loan Operation & Settlement
    - Dep. Trade, Guarantee & Insurance Operation
    - Dep. Treasury Operation & Settlement
  - Divisi Pengadaan dan Umum Procurement and General Affairs Division
    - Dep. Pengadaan Procurement Department
    - Dep. Umum General Affairs Department
    - Dep. Vendor Management
  - Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
    - Dep. Governance
    - Dep. Analystic
    - Dep. Risk Reporting
  - Divisi Hukum dan Litigasi Legal and Litigation Division
    - Dep. Hukum Bisnis 1 Legal Business 1 Department
    - Dep. Hukum Bisnis 2 Legal Business 2 Department
    - Dep. Hukum Bisnis 3 Legal Business 3 Department
    - Dep. Hukum Kelembagaan Institutional Legal Department
  - Divisi | Division Credit Operation and Supervision
    - Dep. Credit Admin. Review
    - Dep. Credit Legal Admin.
    - Dep. Credit Monitoring & Supervision
    - Dep. Credit Document & Custodian

Struktur Organisasi yang berlaku sampai 31 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan MPO.0038/CEO/08/2020 tentang Penyempurnaan Keenam PDE No.0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Organizational Structure that effective as of December 31, 2020 pursuant to the MPO.0038/CEO/08/2020 concerning the Sixth Refinement of PDE No. 0065/PDE/11/2019 regarding Organizational Guidelines and Procedures of Indonesia Eximbank.

VISI & MISI

VISION & MISSION

Visi Vision

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

To become an Eximbank that is credible and excells in promoting national export with high competitiveness on the global level.

Penjelasan Pernyataan Visi | Explanation of Vision Statement

- LPEI memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 2/2009 dan memposisikan LPEI menjadi mitra ekonomi global yang dapat dipercaya.
- LPEI ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani di tataran global, karenamampu menghasilkan produk dan jasa ekspor yang berkelas dunia.
- Indonesia Eximbank has a role in promoting Indonesian exporters as capable business players in the global markets with world-class export products and services.
- Indonesia Eximbank has the roles in promoting Indonesian exporters as respectful business players in the global markets with world-class export products and services.

Misi Mission

- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.

- Encourage the sustainability of conducive business climate for the sustainable growth of national export.
- Provide national export financing services and consultancy services as the solution to the needs of Indonesian export.
- Improve the ability of business perpetrators, including the small and medium enterprises, to produce superior and competitive export- oriented products.

Penjelasan Pernyataan Misi | Explanation of Mission Statement

- LPEI menjadi penggerak dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk menciptakan lingkungan ekspor yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi bernilai tambah terhadap kebutuhan ekspor yang spesifik.
- LPEI mendapatkan mandat untuk menggerakkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah yang mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor yang berdaya saing.
- Indonesia Eximbank is the driving force in the coordination with other government agencies in the creation of conducive export environment towards sustainable growth of Indonesia's exports.
- Providing high-quality financing, guarantee, insurance and consultation services as a value-added solution to specific export needs.
- Indonesia Eximbank has a mandate to mobilize businesses in Indonesia, including the Small and Medium Enterprise sector, to be capable of producing competitive export-oriented products.

Visi dan misi LPEI ditetapkan oleh Direktur Eksekutif pada tanggal 30 Desember 2014 yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang.
Vision and Mission of Indonesia Eximbank has been stipulated by the Executive Director on December 30, 2014 as part of the Strategic Plan.

BUDAYA KERJA LEMBAGA

CORPORATE CULTURE

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja, tanggung jawab dan produktivitas kinerja yang optimal guna mendukung visi, misi dan tujuan lembaga, LPEI memiliki acuan untuk bersikap, berperilaku dan bertindak yang tercermin dalam nilai-nilai budaya lembaga, yaitu TRUST . TRUST merupakan akronim dari 5 nilai budaya yang dimiliki LPEI dan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif No.0001/PDE/01/2014. nilai budaya tersebut menjadi landasan berperilaku dan bersikap oleh seluruh pegawai dan jajaran manajemen LPEI.

In creating a pool of human resources with optimum work ethics, responsibility and productivity in support of the vision, mission and objective of the institution, Indonesia Eximbank has established a code of conduct that reflects the core corporate culture of the institution, known as TRUST. TRUST is the acronym of the 5 core values of Indonesia Eximbank as formally established by Decree of the Executive Director No.0001/ PDE/01/2014. These core values forms a foundation for the conduct of all staff and management personnel at Indonesia Eximbank.

T TRUSTWORTHY

Menjunjung tinggi integritas, didasari dengan niat ikhlas, hati yang tulus dan kejujuran serta menjaga kehormatan dan melaksanakan kode etik LPEI sehingga mampu mendapatkan dan memelihara kepercayaan.

Upholding integrity with heartfelt sincerity, intentions and honesty as well as upholding honor and implementing Indonesian Eximbank code of ethics to gain and maintain trust.

R RELIABLE

Melaksanakan tugas secara profesional, handal dan terpercaya dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corprate Governance* dan manajemen risiko serta bersikap proaktif dan antisipatif untuk mencapai kualitas hasil kerja yang optimal.

To be professional, reliable, trustworthy in conducting one's responsibilities by applying the principles of Good Corporate Governance and risk management as well as being proactive and prepared to achieve optimal quality of work.

U UNIQUE

Menjunjung tinggi kehormatan dan berkomitmen penuh terhadap fungsi, tugas dan wewenang sebagai lembaga keuangan khusus sesuai dengan undang-undang pendiriannya.

To be honorable and fully committed to the functions, duties and authority of a specialized financial institution in accordance with the establishing act.

S SERVICE EXCELLENCE

Memberikan pelayanan prima, yang melampaui harapan pemangku kepentingan LPEI secara lengkap dan profesional.

Provide excellent service that exceeds the expectations of Indonesia Eximbank stakeholders thoroughly and professionally.

T TEAMWORK

Berorientasi kepada pencapaian tujuan LPEI melalui penerapan kerja sama di dalam tim kerja yang solid, efektif dan efisien, dengan saling menghormati kewenangan masing-masing.

To focus on Indonesia Eximbank's achievement of objectives by applying solid, effective and efficient cooperation within a solid team, with mutual respect for each other's authorities.

PROFIL DEWAN DIREKTUR

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Komposisi Dewan Direktur per 31 Desember 2020 | Board of Directors Composition as of 31 December 2020

D. JAMES ROMPAS

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

62 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1984). Bachelor Degree of Economics, University of Jayabaya, Jakarta (1984).
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif sejak tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan KMK No. 933/ KMK.06/2019 (Desember 2019 – sekarang) Serves as Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director since 23 December 2019 based on KMK No. 933/KMK.06/2019 (December 2019 – present)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Wakil Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga (2006-2016) • Direktur Bisnis PT Bank Niaga (2000-2006) • Direktur Manajemen Risiko PT Bank Niaga (1999-2000) • Vice President Director PT Bank CIMB Niaga (2006-2016) • Business Banking Director PT Bank Niaga (2000-2006) • Risk Mangement Director PT Bank Niaga (1999-2000)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.

SUMINTO

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

48 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Ritsumeikan Asia Pacific, Jepang (2012) • Magister Sains Keuangan Pembangunan dari Universitas Hiroshima, Jepang (2002) • Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (1995).	• Doctorate degree in Development Economics from Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan (2012) • Master degree in Development Finance from Hiroshima University, Japan (2002) • Bachelor degree in International Relations from Airlangga University (1995).
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 1 September 2018 berdasarkan KMK No. 554/KMK.06/2018 Member of the Board of Directors since 1 September 2018 pursuant to KMK No. 554/KMK.06/2018	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Oktober 2019 - Februari 2021) • Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (Juli 2018- Oktober 2019) • Pelaksana Tugas Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan RI (2017-2018) • Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI (Februari 2015–Juli 2018) • Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (Oktober 2014–Februari 2015) • Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (Januari 2013–Oktober 2014) • Berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI.	• International Expert Staff, Macro Economy and Internasional Finance (October 2019-February 2021) • Assistant Finance Minister for Government Expenditures (July 2018-October 2019) • Acting Director for Loans and Grants, Ministry of Finance (2017-2018) • Director of Islamic Financing, Directorate General of Financing and Risk Management (February 2015-July 2018) • Director of Islamic Financing, Directorate General of Debt Management (October 2014-February 2015) • Deputy Director of Debt Planning and Strategy, Directorate General of Debt Management (January 2013-October 2014) • Various assignments in the Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, Secretariat General, Directorate General of Debt Management, and Directorate General of Financing and Risk Management.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional (Oktober 2019-sekarang) • Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2020-sekarang) • Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (2020-sekarang) • Dewan Pengawas RS Kanker Dharmais (2020-sekarang) • Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (2019-sekarang) • Direktur Eksekutif, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-sekarang)	• Assistant Finance Minister for Macro Economy and International Finance (October 2019-present) • Head of Secretariat for National Committee of Islamic Economic and Finance (KNEKS) (2020-present) • Commissioner, National Zakat Board (BAZNAS) (2020-present) • Commissioner, Dharmais Hospital (2020-present) • Commissioner, National Social Security Council (2019-present) • Director, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

KASAN
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

54 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian, di bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2012) • Magister Manajemen, di bidang Manajemen Internasional dari Universitas Indonesia (1998) • Sarjana Pertanian di bidang Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya dari Institut Pertanian Bogor (1989)	• Doctorate of Agriculture Economics Science, in Agricultural Economy from Institute of Agriculture Bogor (2012) • Master of Management, in International Management from University of Indonesia (1998) • Bachelor of Agriculture, in Agricultural Economy and Resources from Institute of Agriculture Bogor (1989)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 8 Juni 2020 berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020 Member of the Board of Directors since 8 June 2020 pursuant to KMK No. 274/KMK.06/2020	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI (April 2020 - April 2021) • Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2019 – 2020) • Anggota Board of Director International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020) • Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Januari 2017 - April 2020) • Staf Ahli bidang Hubungan Internasional, Kementerian Perdagangan RI (2016) • Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (2010-2016) • Berbagai penugasan di lingkungan Kementerian Perdagangan RI	• Director General National Export Development, Ministry of Commerce of RI (April 2020 - April 2021) • Member of the Supervisory Board for the Palm Oil Plantations Fund Management Agency, (2019-2020) • Member of Board of Director International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020) • Head of Trade Research & Development Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2017-April 2020) • International Expert Staff, Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia (2016) • Director of Centre for Foreign Trade Policy (TREDA), Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia (2010-2016) • Various assignments in the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Mei 2021 - sekarang). Head of Commerce Study and Development Agency, Ministry of Commerce of RI (May 2021 - present).	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

ARUS GUNAWAN
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

55 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (1993) Bachelor of Electrical Engineering, Institute of National Science and Technology (1993)	
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 25 November 2020 berdasarkan KMK No. 530/KMK.06/2020 Member of the Board of Directors since 25 November 2020 pursuant to KMK No. 530/KMK.06/2020	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (Maret 2020-Januari 2021) • Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (November 2018-Maret 2020) • Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Kementerian Perindustrian RI (Desember 2016-November 2018) • Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2016-Desember 2016) • Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (2014 – 2016)	• Inspector General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (March 2020-January 2021) • Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (November 2018-March 2020) • Director of Industrial Area Development I, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (December 2016-November 2018) • Director of Machinery and Agricultural Machinery Equipment Industry, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (January 2016-December 2016) • Secretary to Inspectorat General, the Ministry of Industry of the Republic Indonesia (2014 - 2016)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (2021-sekarang) Head of Industrial Human Resources Development Agency (2021-present)	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

FELIA SALIM
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

63 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014) • MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010) • Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003) • Sarjana Fakultas Ekonomi dan Politik, Carleton University, Ottawa Canada (1983)	• The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014) • MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010) • Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003) • Bachelor Degree of Economics and Politic Faculty, Carleton University, Ottawa Canada (1983)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 25 Juli 2018 berdasarkan KMK No. 522/KMK.06/2018 Member of the Board of Directors since 25 July 2018 pursuant to KMK No.522/KMK.06/2018	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Wakil Direktur Utama/Direktur Transformasi PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk. (2006–2015) • Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang bertanggungjawab memimpin Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2003-2005) • Ketua Komite sekretariat keuangan berlanjut sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002) • Direktur Bursa Efek Jakarta (1994-1999) • Vice President PT Jardine Fleming Nusantara (1991-1993) • Vice President Citibank Indonesia (1983-1991)	• Vice President Director/Transformation Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (2004–2015) • Independent Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk who is responsible for leading the Risk and Compliance Management Committee (2003-2005) • Chairperson of the financial secretariat committee and as Deputy Chairperson of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2002) • Director of Jakarta Stock Exchange (1994-1999) • Vice President of PT Jardine Fleming Nusantara (1991-1993) • Vice President Citibank Indonesia (1983-1991)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Komite Audit PT Vale Indonesia Tbk (2020 - sekarang) • Anggota Dewan Direktur The AndGreen Fund (2017 - sekarang)	• Audit Committee of PT Vale Indonesia Tbk (2020-present) • Member of the Board of Directors The AndGreen Fund (2017 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

RIJANI TIRTOSO
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

59 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994 • Sarjana (S-1) Keahlian Tanah, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, 1984	• Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994 • Bachelor Degree in Soil Experts, Institute of Agriculture Bogor, Indonesia, 1984
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 23 Desember 2019 berdasarkan KMK No. 934/KMK.06/2019 Member of the Board of Directors since 23 December 2019 pursuant to KMK No. 934/KMK.06/2019	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Project Advisor of Business Process Reenginering Bank Mandiri (2019) • SEVP Retail Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019) • SEVP Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2015) • Group Head Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008) • Group Head Corporate Credit Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2008)	
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

MANAGING DIRECTORS' PROFILE

Komposisi Dewan Direktur per 31 Desember 2020 | Board of Directors Composition as of 31 December 2020

DIKDIK YUSTANDI

Direktur Pelaksana I
Managing Director I

57 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Manajemen, Universitas Satyagama, Jakarta (1997) • Sarjana Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1987)	• Magister Management, University of Satyagama, Jakarta (1997) • Bachelor degree, Fishery Faculty, Institute of Agriculture Bogor (1987)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Direktur Pelaksana I sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0010/ KDD/08/2019 Serves as Managing Director I since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0010/KDD/08/2019	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Pelaksana II (29 Maret 2019 - 31 Agustus 2019) • Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Maret 2018 - 28 Maret 2019) • Komisaris, Bank Mandiri Syariah (15 Januari 2018 - 29 Maret 2019) • Advisor, Bank Mandiri Syariah (Mei 2018 - 13 Desember 2018) • Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Februari 2016 - 26 Maret 2018) • Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Oktober 2014 - Febuari 2016) • General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Desember 2010 - Oktober 2014) • Regional Manager VIII Surabaya, Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2010 - November 2010)	• Managing Director II (29 March 2019 - 31 August 2019) • Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (March 2018 - 28 March 2019) • Komisaris, Bank Mandiri Syariah (15 January 2018 - 29 March 2019) • Advisor, Bank Mandiri Syariah (May 2018 - 13 December 2018) • Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Feb 2016 - 26 March 2018) • Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (October 2014 - Febuary 2016) • General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tb. (December 2010 - October 2014) • Regional Manager VIII Surabaya, Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (January 2010 - November 2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

DJOKO RETNADI

Direktur Pelaksana II
Managing Director II

57 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Management di Bidang Perbankan dan Keuangan di Monash University ditahun 2000. Master Degree of Banking and Finance at Monash University Melbourne, in 2000	
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Direktur Pelaksana II sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0011/KDD/08/2019 Serves as Manageing Director II since 1 September pursuant to KDD No.0011/KDD/08/2019	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Pelaksana IV (10 Juni 2019 - 31 Agustus 2019) • Direktur Pengembangan dan Investasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (2018 - 30 April 2019) • Direktur SDM dan Manajemen Aset PT Rajawali Nusantara Indonesia (Agustus 2015 - 2018) • Anggota Dewan Pengawas PT Rajawali Nusantara Indonesia (Desember 2015 - 2018) • Komisaris Utama PT Nusaindo (2015 October - 2019) • Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Mei 2015 - Juni 2015)	• Managing Director IV, Indonesia Eximbank (10 June 2019-31 August 2019) • PT Rajawali Nusantara Indonesia Investment and Development Director (2018 - April 30 2019) • PT Rajawali Nusantara Indonesia Human Resource and Asset Management Director (August 2015 - 2018) • PT Rajawali Nusantara Indonesia Pension Fund Supervisory Board (December 2015 - 2018) • PT Nusaindo Commissioner (2015 October - 2019) • PT Rajawali Nusantara Indonesia Acting as President Director (May 2015 - June 2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

AGUS WINDIARTO
Direktur Pelaksana III
Managing Director III

57 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master in Business Administration (MBA), Middlesex University, London, UK (1998) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1988)	• Master in Business Administration (MBA) from Middlesex University, London, UK (1998) • Bachelor of Economics from Krisnadwipayana University, Jakarta (1988)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Direktur Pelaksana III sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0012/KDD/08/2019 Serves as Managing Director III since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0012/KDD/08/2019	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Pelaksana III LPEI (29 Maret-31 Agustus 2019) • Plt. Direktur Pelaksana III LPEI (Januari-29 Maret 2019) • Kepala Divisi Corporate Planning and Finance LPEI (Januari 2018-Januari 2019) • Kepala Divisi Akunting dan SIE (Mei 2013-Desember 2017) • Plt. Kepala Divisi Tresuri (Februari 2013-April 2013) • Kepala Divisi Manajemen Perencanaan dan Strategis (2011-2013) • Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan (Februari 2010-Desember 2011)	• Managing Director III Indonesia Eximbank (29 March-31 August 2019) • Acting Managing Director III Indonesia Eximbank (January-29 March 2019) • Head of Corporate Planning and Finance of Indonesia Eximbank (January 2018-January 2019) • Head of Accounting and SIE Division (May 2013-December 2017) • Acting as Head of Treasury Division (February 2013-April 2013) • Head of Planning and Strategic Division (2011-2013) • Head of Planning, Research and Development Division (February 2010-December 2011)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Merangkap jabatan sebagai Sekretaris Lembaga LPEI Concurrently act as Corporate Secretary	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

HENRY SIHOTANG
Direktur Pelaksana IV
Managing Director IV

59 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama, Jakarta (1988) Master of Financial Management, Satyagama University, Jakarta (1988)	
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Direktur Pelaksana IV sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0013/KDD/08/2019 Serves as Managing Director IV since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0013/KDD/08/2019	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Utama, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (November 2017-Mei 2019) • Direktur, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Mei 2014-Agustus 2019) • Komisaris Utama, PT PPA Kapital (Juli 2018 s/d Agustus 2019) • Komisaris Utama, PT PPA Finance (Februari 2015-Juni 2018) • Executive Vice President/Group Head – Corporate Credit Risk II Group PT Bank Mandiri (Persero) – (Februari 2010 s/d Mei 2014) • Komisaris, (Rangkap Jabatan) PT Pengelola Investama Mandiri (Oktober 2009-Juli 2014) • Non-Executive Director, (Rangkap Jabatan) Bank Mandiri Eropean Ltd, London (Juni 2010-Desember 2012) • Senior Vice President/Group Head – Credit Recovery II Group, PT Bank Mandiri (Persero) – (November 2008-Januari 2010) • Vice President – Loan Workout Department, PT Bank Mandiri (Persero) (April 2006-Oktober 2008) • Vice President – Commercial Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) – (Oktober 2004-April 2006) • Vice President – Operational Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) (Juli 2003-Oktober 2004) • Assistant Vice President, CRM – Corporate Credit & Financial Institution PT Bank Mandiri (Persero) (Agustus 1999-Juli 2003)	• President Director, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Nov 2017-May 2019) • Director, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (May 2014-August 2019) • Commissioner, PT PPA Kapital (July 2018- August 2019) • Comissioner, PT PPA Finance (Feb 2015-June 2018) • Executive Vice President/Group Head – Corporate Credit Risk II Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Feb 2010-May 2014) • Comissioner, (Multiple Position) PT Pengelola Investama Mandiri (Oct 2009-July 2014) • Non-Executive Director, (Rangkap Jabatan) Bank Mandiri Eropean Ltd, London (June 2010-Dec 2012) • Senior Vice President/Group Head – Credit Recovery II Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Nov 2008-Jan 2010) • Vice President – Loan Workout Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2006-Oct 2008) • Vice President – Commercial Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Oct 2004-April 2006) • Vice President – Operational Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (July 2003-Oct 2004) • Assistant Vice President, CRM – Corporate Credit & Financial Institution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (August 1999-July2003)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

MANAGING DIRECTORS' PROFILE

CHESNA F. ANWAR
Direktur Pelaksana V
Managing Director V

59 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi dari University of Maryland, Amerika Serikat (1983) Obtained degree in Economics in University of Maryland, United State, 1983
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0014/KDD/08/2019 Serves as Managing Director V since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0014/KDD/08/2019
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Kepatuhan, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019) • Direktur Internal Affairs, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010) • Direktur Kepatuhan, Citibank, N.A. (1994-2005) • Manajer Preferred Banking dan Manajer Bank Universal Cabang Pondok Indah (1992-1994) • Compliance Director, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019) • Internal Affairs Director, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010) • Compliance Director, Citibank, N.A. (1994-2005) • Preferred Banking Manager and Bank Universal Manager Pondok Indah Region (1992- 1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.

MANAJEMEN SENIOR

SENIOR MANAGEMENT

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

Komposisi SEVP per 31 Desember 2020 | SEVP Composition as of 31 December 2020

SALOMI ADRIANA
Plt. Senior Executive Vice President I

49 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994) • Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1994) • Bachelor of Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta) (1997)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	KDE No.: 0050/KDE/07/2020 sejak 6 Agustus 2020 KDE No.: 0050/KDE/07/2020 since August 6, 2020
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi (2019-2020) • Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (Januari 2019-Maret 2019) • Pj. Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi (2018-2019) • Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan Sistem Prosedur (Januari 2018-Mei 2018) • Kepala Departemen Pengembangan SDM (2013-2018) • Kepala Departemen Hub. Kelembagaan & Pembiayaan FI (2010-2013) • Pj. Kepala Departemen Pembiayaan Kembali & Hubungan Kelembagaan (2009-2010) • Head of Guarantee and Insurance Division (2019-2020) • Acting Head of Small, Medium Enterprises and Commercial Financing Division (January 2019-March 2019) • Acting Head of Guarantee and Insurance Division (2018-2019) • Head of Organizational Development and Procedure System Department (January 2018-May 2018) • Head of HR Development Department (2013-2018) • Head of Institutional Relations & FI Financing Department (2010-2013) • Acting Head of Refinancing & Institutional Relations Department (2009-2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Kepala Divisi Asuransi (Maret 2021-sekarang) • Head of Insurance Division (March 2021-present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Workshop Penyelarasan KPI Unit Kerja dan Individu, 22-23 Desember • Enabling Business Performance Sesi III, 27 Agustus • Enabling Business Performance Sesi I, 19 Agustus • Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 24 Juli • Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan, 26 Juni • Friday Morning dengan Topik "Prospek Ekspor Kelapa Sawit Indonesia di Tengah Pandemi Covid- 19", 26 Juni • Diskusi dan Bedah Manual Pembiayaan dengan SEVP VI, 19 Juni • Mitigasi Risiko Kredit dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan, 16 Juni • *Business Survival Webinar – Will The Strong Survive or Will The Smart Survive*, 12 Mei • Sosialisasi POJK No. 14/POJK.05/2020, 11 Mei • Sharing Session Produk Penjaminan Obligasi dengan PT Indonesia Infrastructure Finance, 27 Februari • Workshop of Alignment of KPI for Work Units and Individuals, 22-23 December • Enabling Business Performance Session III, 27 August • Enabling Business Performance Session I, 19 August • Respond on Bank Indonesia Policies in Handling the Covid-19 Pandemic, 24 July • Dissemination of Financing Governance, 26 June • Friday Morning with the Topic of "Indonesian Palm Oil Export Prospects Amidst the Covid-19 Pandemic", 26 June • Discussion and Analysis of Financing Manual with SEVP VI, 19 June • Mitigation of Credit Risk and Restructuring Through Guarantee, 16 June • Business Survival Webinar – Will The Strong Survive or Will The Smart Survive, 12 May • Socialization of POJK No. 14/POJK.05/2020, 11 May • Sharing Session of Bonds Guarantee Product with PT Indonesia Infrastructure Finance, 27 February

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

MOHAMMAD GUNTUR

Senior Executive Vice President II

56 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Penyuluhan Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1997) • Magister Marketing dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986)	• Bachelor of Agricultural Consultancy from Bogor Institute of Agriculture, Bogor (1997) • Master of Marketing from University of Gadjah Mada, Yogyakarta (1986)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	KDE No. 0128/KDE/09/2019 PJ No. 0009/HRB/07/2020 (1 Agustus 2020 – 31 Desember 2020)	KDE No. 0128/KDE/09/2019 PJ No. 0009/HRB/07/2020 (1 August 2020 – 31 December 2020)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Utama PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019) • GH Enterprise Data Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • GH IT Strategy & Architecture, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • GH Planning, Policies, Procedures, Architec, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2007-2015) • GH I&T Information & Knowledge Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007) • DH Retail Business Solution, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2003-2005)	• President Director PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019) • GH Enterprise Data Management, PT Bank Mandiri (2016-2019) • GH IT Strategy & Architecture, PT Bank Mandiri (2015-2016) • GH Planning, Policies, Procedures, Architec, PT Bank Mandiri (2007-2015) • GH I&T Information & Knowledge Management, PT Bank Mandiri (2005-2007) • DH Retail Business Solution, PT Bank Mandiri (2003-2005)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Transformation of Banking Operations in Digital Era : Resilience and Sustainability Beyond New Normal 2-3 Desember • Enabling Business Performance Sesi III 27 Agustus	• Transformation of Banking Operations in Digital Era : Resilience and Sustainability Beyond New Normal 2-3 December • Enabling Business Performance Session III, 27 August

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

ANWAR HARSONO

Senior Executive Vice President III

47 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Finance dari Cleveland State University (2003) • Sarjana Accounting dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997)	• Master degree of Finance dari Cleveland State University (2003) • Bachelor degree of Accounting from Trisakti University, Jakarta (1997)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	KDE No. 0064/KDE/09/2020 (1 Juli 2020 – sekarang) KDE No. 0064/KDE/09/2020 (1 Juli 2020 – present)	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Country CFO/Finance Director, Standard Chartered Bank Indonesia (2018-2020) • Head of Finance & Strategy, Bank CIMB Niaga Tbk (2013-2018) • Board of Commisioner Member, CIMB Niaga Pension Funds (2015-2017) • Bankwide Management Acct & Financial Acct Group Head, Bank CIMB Niaga Tbk (2010-2013) • Bankwide Management Acct & Fin Analysis Div Head, Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2010) • Corporate Finance & Analysis Dept Head, Bank CIMB Niaga Tbk (2004-2008) • Accounting, Budget & Financial Analyst, Astra Otoparts Tbk (1997-2000)	
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Enabling Business Performance Sesi III 27 Agustus	• Enabling Business Performance Session III, 27 August

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

WAHYU P. WIBOWO

Senior Executive Vice President IV

55 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Strategic Management dari Konstanz University (2004) • S2 Manajemen dari Swiss German University (2004) • S1 Social Philosophy dari STF Driyarkara Jakarta (1991)	• Master of Strategic Management from Konstanz University (2004) • Master of Management from Swiss German University (2004) • Bachelor of Social Philosophy from STF Driyarkara Jakarta (1991)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	PJ No: PJ.0018/HRM/02/2020 sejak 17 Februari 2020 PJ No: PJ.0018/HRM/02/2020 since February 17th, 2020	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Managing Director, Chief Learning & Development Officer, Prudential Life Assurance (2017-2020) • EVP, Head of HRBP & Employee Engagement, CIMB Niaga (2012-2017) • Director, Human Capita, Sinarmas Land (2010-2011) • Director, HR & Corp. Affair, PAM Lyonnaise Jaya (2004-2010) • Director, HR & Legal, Allianz Life Indonesia (2002-2004) • General Manager, HR, Allianz Life Indonesia (2001-2004) • Manager, HR, AXA Indonesia (2000-2001) • Supervisor, HR & International Service Personnel Administrator, General motors Indonesia (1997-2000) • Officer, Industrial Relation, Excelcomindo Pratama (1995-1996)	
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Workshop Penyelarasan KPI Unit Kerja dan Individu, 22-23 Desember • Pengujian Keandalan dan Evaluasi Efektivitas sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis, 29-30 September • Pembangunan Prosedur Aplikatif Kontingensi Bisnis (*Business Contingency Plan*), 22-23 September • Perumusan Strategi Jitu Pemulihan Bisnis (*Business Recovery Strategy*), 15 September • Analisis Dampak Bisinis (*Business Impact Analysis*) Yang Efektif, 8-9 September • BCM (*Bussiness Continuity Management*) Essentials Berbasis ISO 22301:2019, 1 September • *Enabling Business Performance* Sesi III, 27 Agustus • Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan, 26 Juni • *Structured Approach & Methodology of Organizational Risk Culture*, 24 Juni • Diskusi dan Bedah Manual Pembiayaan dengan SEVP VI, 19 Juni • Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2, 12 Mei	• Workshop of Alignment of KPI for Work Units and Individuals, 22-23 December • Reliability Testing and Evaluation of Business Continuity Management System Effectiveness, 29-30 September • Business Contingency Plan Application Procedures Development, 22-23 September • Business Recovery Srategy Formulation, 15 September • Effective Business Impact Analysis, 8-9 September • Business Continuity Management Essentials of ISO 22301:2019 Based, 1 September • Enabling Business Performance Session III, 27 August • Financing Governance Socialization, 26 June • Structured Approach & Methodology of Organizational Risk Culture, 24 June • Discussion and Analysis of Financing Manual with SEVP VI, 19 June • Socialization of AML & CTF Program Manual Batch 2, 12 May

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

RESTIANA IE TJOE LINGGAJAYA

Senior Executive Vice President V

54 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Management dari Asian Institute of Management, The Philippines (2000) • Sarjana Finance dari Universitas Trisakti, Jakarta (1989)	• Master of Management from Asian Institute of Management, The Philippines (2000) • Bachelor of Finance from University of Trisakti, Jakarta (1989)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	KDE No. 0048/KDE/07/2020 sejak 1 Mei 2020 KDE No. 0048/KDE/07/2020 since May 1, 2020	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Chief Risk & Compliance Officer, PT Smartfren Telecom (2018-2020) • Chief Operating Officer, PT Maybank Indonesia (2017-2018) • Chief Audit Executive, PT Bank CIMB Niaga (2010-2017) • Chief Internal Auditor, PT Bank Danamon Indonesia (2004-2010) • Finance & Accounting Director, PT Asuransi Allianz Life (2002-2004) • VP Internal Audit, ABN Amro Bank N.V (2000-2002) • VP Head of Treasury, Cash Management & Custody, PT ING Barings Indonesia (1996-1998) • Manager Worldwide Securities Services, Citibank N.A (1994-1996) • Manager FX. Loan Deposit Operation, Citibank N.A (1992-1994) • Asst. Manager Financial Control, Citibank N.A (1990-1992)	
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Enabling Business Performance Sesi III, 27 Agustus • Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan, 26 Juni • Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan, 25 Juni • *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, 11, 18 & 25 Juni	• Enabling Business Performance Session III, 27 August • Financing Governance Socialization, 26 June • Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit, 25 June • Refreshment of Risk Management Certification Level 4, 11, 18 & 25 June

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

TITIEK SETIYOWATI
Senior Executive Vice President VI

58 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jember, Jawa Timur (1989) Bachelor of Agriculture Economics Social from Jember University, East Java (1989)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	PJ No: PJ.0035/HRM/02/2020 (1 Maret 2020-28 Februari 2022) PJ No: PJ.0035/HRM/02/2020 (March 1, 2020-February 28, 2022)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Advisory, Coach, Trainer di Mandiri University Group, PT Bank Mandiri (2019-2020) • Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun | Chairman of Pension Fund Supervisory Board, Bank Mandiri 2 (Eks. BDN) – (2016-2020) • SVP, Group Head Commercial, PT Bank Mandiri (2017-2019) • SVP, Group Head Policy & Procedure, PT Bank Mandiri (2015-2016) • SVP, Chief Auditor, PT Bank Mandiri (2010-2014) • VP, Dept. Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (2007-2010) • VP, Pemegang Kewenangan Kredit Segmen Commercial Risk | Loan Authority Manager of Commercial Risk Segment, PT Bank Mandiri (2006) • VP, Dept. Head Corporate Credit Risk, PT Bank Mandiri (2004-2005) • AVP, Credit Risk Manager, PT Bank Mandiri (2002-2003) • Sr. Credit Risk Manager, PT Bank Mandiri (1999-2001) • ARM, Bank Dagang Negara (1995-1998) • Credit Analyst, Bank Dagang Negara (1990-1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Enabling Business Performance Sesi III, 27 Agustus • Enabling Business Performance Session III, 27 August

MANAJEMEN SENIOR

SENIOR MANAGEMENT

Komposisi Manajemen Senior per 31 Desember 2020 | Senior Management Composition as of December 31, 2020

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
1	Agung Waluyo	Ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Head of IAU	JKT	21 Mar 1964	S2, Akuntansi Master Degree, Accounting	PJ.0057/HRB/11/2020
2	Sumarno	Pj. Kepala Divisi *Transformation Office* Acting Head of Transformation Office Division	JKT	24 May 1971	S2, Ilmu Manajemen Master Degree, Management Science	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
3	Rudi Rinardi	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset III Head of Assets Restructuring III Division	JKT	07 Dec 1972	S1, Administrasi Niaga Bachelor Degree, Commerce Administration	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
4	T. Dyza Rovina Aziz Rochadi	Kepala Divisi *Office of The Board* merangkap Kepala Divisi *Communication & Stakeholder Engagement* Head of Office of The Board Division concurrently Head of Communication & Stakeholder Engagement	JKT	01 Dec 1971	S2, Keuangan dan Perbankan Master Degree, Finance and Banking	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
5	Eddy Suswadi	Pegawai Masa Persiapan Pensiun Pegawai (MPP) Employee of Pensioner Preparation (MPP)	JKT	12 Mar 1965	S2, Manajemen Master Degree, Management	Nomor 0019/KDE/03/2020 Tanggal 31 Maret 2021 Dated 31 March 2021
6	Sunu Widi Purwoko	Kepala Divisi *Credit Reviewer* I Head of Credit Reviewer I Division	JKT	10 Apr 1971	S2, Ilmu Hukum Master Degree, Law Science	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
7	Nugroho Kusumowibhowo	Pj. Kepala Kantor Cabang Medan Acting Head of Branch Office Medan	MDN	15 Jul 1969	S2, Hukum Master Degree, Law	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
8	Priyo Basuki	Kepala Divisi Pengadaan dan Umum Head of Procurement and General Affairs	JKT	28 Jun 1969	S1, Administrasi Bisnis Bachelor Degree, Business Administration	Nomor 0068/KDE/10/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Dated 15 October 2020
9	Yoseph Tri Purnomosidi	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset IV Head of Assets Restructuring IV Division	JKT	13 Mar 1969	S2, Manajemen Master Degree, Management	Nomor 0055/KDE/08/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 Dated 31 August 2020
10	Emalia Tisnamisastra	Kepala Divisi *Middle Office Treasury* merangkap Kepala Divisi *Financial Institution & Treasury* Head of Middle Office Treasury Division concurrently Head of Financial Institution & Treasury Division	JKT	21 Dec 1971	S1, Ekonomi Bachelor Degree, Economics	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
11	M. Syafruddin	Kepala Divisi *Trade Finance* Head of Trade Finance Division	JKT	10 Sep 1966	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
12	Noviana Rahatmi	Kepala Divisi *Organization & People Development* Head of Organization & People Development Division	JKT	04 Nov 1970	S1, Keuangan Bachelor Degree, Finance	Nomor 0018/KDE/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Dated 31 March 2020
13	Eka Achdiatna Supriana	Pj. Kepala Divisi Perencanaan Strategis Acting Head of Strategic Planning Division	JKT	17 Apr 1979	S2, Keuangan Master Degree, Applied Finance	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
14	Ridha Farid Lesmana	Kepala Divisi Bisnis BUMN merangkap Kepala Divisi Pembiayaan Khusus Head of SOE Business Division concurrently Head of Special Financing Division	JKT	12 Apr 1977	S1, Teknik Sipil Bachelor Degree, Civil Engineering	Nomor 0050/KDE/08/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 Dated 7 August 2020
15	Budy Hartono	CT. Kepala Divisi Restrukturisasi Aset Syariah Acting Head of Sharia Assets Restructuring Division	JKT	10 Jun 1967	S1, Biologi Bachelor Degree, Biology	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020

MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
16	Ferry Sjaifoellah	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset I Head of Assets Restructuring I Division	JKT	19 Sep 1971	S1, Teknik Elektro Bachelor Degree, Electronical Engineering	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
17	Maryani Saswidyanti	Kepala Divisi Operasional Head of Operations Division	JKT	27 Feb 1971	S2, Manajemen Master Degree, Management	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
18	Hendi Wibawa	Pj. Kepala Divisi *Finance* Acting Head of Finance Division	JKT	24 Jul 1981	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	Nomor 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
19	Andri Setiawan	Pj. Kepala Kantor Cabang Surakarta Acting Head of Branch Office Surakarta	SLO	12 Jun 1976	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
20	Raden Gerald Setiawan Grisanto	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division	JKT	23 Jun 1983	S2, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
21	Rosi Susanti	Kepala Divisi Hukum dan Litigasi Head of Legal and Litigation Division	JKT	10 Jul 1966	S1, Ilmu Hukum Bachelor Degree, Law Science	Nomor 0200/KDE/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019 Dated 20 December 2019
22	Damianus Ledjo Hufat	Kepala Divisi Bisnis Korporasi II Head of Corporate Business II Division	JKT	12 Feb 1963	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
23	Koerniawan Prijambodo	Kepala Kantor Wilayah Surabaya Head of Regional Office Surabaya	SBY	29 Jul 1967	S2, Manajemen Master Degree, Management	PJ.0016/SDM/01/2020
24	Yanti Sudjarwo	Kepala Divisi *HRBP & Recruitment* Head of HRBP & Recruitment Division	JKT	22 Nov 1972	S1, Teknik Industri Bachelor Degree, Industrial Engineering	Nomor 0030.01/KDE/05/2020 Tanggal 24 Mei 2020 Dated 24 May 2020
25	Pretty Halim	Kepala Kantor Wilayah Jakarta merangkap Kepala Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK) Head of Regional Office Jakarta concurrently Head of Small, Medium Enterprise and Commercial (SMEC)	JKT	09 Mar 1974	S2, Applied Finance Master Degree, Applied Finance	Nomor 0033/KDE/06/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Dated 12 June 2020
26	Farid Maruf	Kapala Divisi Credit Reviewer II Head of Credit Reviewer II Division	JKT	24 Feb 1963	S1, Pertanian Bachelor Degree, Agricultural	PJ.0045/HRM/03/2020
27	Rini Satriani	PGS Kepala Divisi IEB Institute Acting Head of IEB Institute Division	JKT	06 Feb 1983	S1, Ilmu Ekonomi Pembangunan Bachelor Degree, Economics Development Science	Nomor 0040/KDE/03/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Dated 29 March 2019
28	Haryo Parampara	Kepala Divisi Bisnis Korporasi I Head of Corporate Business I Division	JKT	01 Nov 1978	S1, Teknik Kimia Bachelor Degree, Chemical Engineering	PJ.0044/HRM/03/2020
29	Hendratno Tri Wibowo	Kepala Divisi *Special Audit* Head of Special Audit Division	JKT	24 May 1974	S2, *Professional Accounting* Master Degree, Professional Accounting	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
30	Tota Melanie L. Tobing	Kepala Divisi *Credit Operation and Supervision* Head of Credit Operation and Supervision Division	JKT	06 Oct 1967	S2, Finance Master Degree, Finance	PJ.0001/HRB/04/2020
31	Fandhy Haristha	Kepala Divisi Reguler Audit & Methodology Head of Regular Audit & Methodology Division	JKT	06 Jun 1976	S2, Manajemen Informatika Master Degree, Informatics Management	Nomor 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020

MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
32	Rusdi Dahardin	Kepala Divisi Bisnis Syariah Head of Sharia Business Division	JKT	04 May 1965	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	PJ.0002/HRB/05/2020
33	Rossiyana Amir	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	JKT	13 Feb 1969	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	PJ.0007/HRB/06/2020
34	Edi Winanto	Kepala Divisi Litigasi Head of Litigation Division	JKT	28 Dec 1963	S2, Hukum Master Degree, Law	PJ.0014/HRB/08/2020
35	Thio Sucy	Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division	JKT	14 May 1969	S1, Keuangan Bachelor Degree, Finance	PJ.0065/HRB/12/2020

DEMOGRAFI PEGAWAI

EMPLOYEES DEMOGRAPHY

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
Employee Composition Based on Position

Kelompok Jabatan	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Position
Senior Executive Vice President	6*	2	Senior Executive Vice President
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah	43	34	Division Head
Kepala Departemen	113	90	Department Head
Kepala Seksi	-	-	Section Head
Staf dan lainnya	394	392	Staff and Others
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

* Termasuk Ketua SKAI Agung Waluyo (Ketua SKAI) | Including Head of IAU Agung Waluyo

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education

Tingkat Pendidikan	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Education
Doktor	1	1	Doctorate
Master	124	106	Master Degree
Sarjana	430	410	Bachelor Degree
Diploma	1	1	Diploma
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja
Employee Composition Based on Job Location

Lokasi Kerja	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Location
Kantor Pusat Jakarta	465	425	Jakarta Head Office
Kantor Wilayah Jakarta	12	-	Jakarta Regional Office
Kantor Wilayah Surabaya	26	25	Surabaya Regional Office
Kantor Cabang Medan	12	17	Medan Regional Office
Kantor Cabang Makassar	11	17	Makassar Regional Office
Kantor Cabang Surakarta	16	17	Surakarta Regional Office
Kantor Pemasaran Denpasar	6	5	Denpasar Marketing Representative Office
Kantor Pemasaran Batam	4	7	Batam Marketing Representative Office
Kantor Pemasaran Balikpapan	4	5	Balikpapan Marketing Representative Office
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
Employee Composition Based on Term of Office

Masa Kerja (Tahun)	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Term of Office (Years)
<1	75	58	<1
1-5	185	224	1-5
6-10	192	160	6-10
11-15	63	41	11-15
>15	41	35	>15
Jumlah Pegawai	556	518	**Total Employee**

DEMOGRAFI PEGAWAI
EMPLOYEES DEMOGRAPHY

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Employee Composition Based on Age

Kelompok Usia (Tahun)	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Age (Years)
<25	26	13	<25
25-30	137	171	25-30
31-35	189	156	31-35
35-40	82	80	35-40
41-50	79	72	41-50
>50	43	26	>50
Jumlah Pegawai	556	518	Total Employee

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Gender
Laki-laki	340	321	Male
Perempuan	216	197	Female
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition Based on Employee Status

Status Kepegawaian	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Employee Status
Tetap	463	466	Permanent
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	75	51	Specific Time Work Agreement (PKWT)
Percobaan 3 Bulan	18	1	3 Month Probation
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Direktorat
Employee Composition Based on Directorate

Direktorate	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Directorate
Direktur Eksekutif	-	78	Executive Director
Direktur Pelaksana I	60	48	Managing Director I
Direktur Pelaksana II	122	144	Managing Director II
Direktur Pelaksana III	35	43	Managing Director III
Direktur Pelaksana IV	75	69	Managing Director IV
Direktur Pelaksana V	44	30	Managing Director V
SEVP I	30	52	Senior Executive Vice President I
SEVP II	51	54	Senior Executive Vice President II
SEVP III	43	-	Senior Executive Vice President III
SEVP IV	30	-	Senior Executive Vice President IV
SEVP V	20*	-	Senior Executive Vice President V
SEVP VI	46	-	Senior Executive Vice President VI
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

* Termasuk Ketua SKAI Agung Waluyo (Ketua SKAI) | Including Head of IAU Agung Waluyo

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TAHUN 2020

HR COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT IN 2020

Program pengembangan kompetensi dilakukan dengan memberikan pelatihan kompetensi teknis dan non teknis. Selama tahun 2020, jumlah peserta pelatihan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.662 peserta menjadi 4.188 peserta. LPEI telah melaksanakan pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai berikut:

The Competency development program is carried out by providing technical and non-technical competency training. During 2020, total training participants increased from previous year by 1,662 participants to 4,188 participants. Indonesia Eximbank has organized trainings in the country and overseas as follows:

Pelatihan Pegawai Per Kategori
Employee Training per Category

No	Kategori Pelatihan Training Category	Jumlah Peserta Number of Participants (orang | person)	Jumlah Pelatihan Number of Training	Tipe Pelatihan Type of Training		Lokasi Location	
				Eksternal External	In House	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas
1	Accounting & Tax	8	1	1	-	1	-
2	Compliance and Audit	352	14	6	8	14	-
3	Credit & Loan Restructuring	57	1	1	-	1	-
4	Economy, Industry and Commodity	448	4	1	3	4	-
5	Finance & Corporate Banking	804	5	2	3	5	-
6	General Service	15	1	-	1	1	-
7	Human Resource Management	605	16	5	11	16	-
8	Insurance & Guarantee	92	12	11	1	12	-
9	Islamic Finance and Banking	64	3	1	2	3	-
10	Law, Regulation, Policy & Procedure	225	6	2	4	6	-
11	Leadership and Interpersonal Skill	74	12	12	-	12	-
12	Marketing	14	1	1	-	1	-
13	Methodology (Statistic, BSC, Malcome Balridge)	145	21	21	-	21	-
14	Risk Management	884	76	18	68	76	-
15	Seminar & General Knowledge (banking/ lokakarya | workshop)	59	4	3	1	4	-
16	Sertifikasi | Certification	14	4	4	-	4	-
17	Strategic and Management	205	7	5	2	7	-
18	System and Information Technology	61	11	9	2	10	1
19	Trade Finance & Structured (operation)	60	1	-	1	1	-
20	Treasury & Derivative Product	2	2	2	-	2	-
	Total	**4.188**	**202**	**105**	**107**	**201**	**1**

Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2020

Pada tahun 2020, realisasi dana pelatihan dan pengembangan SDM mencapai Rp10,867 miliar.

HR Competency Training and Development Expense in 2020

In 2020, the realization of funds for HR training and development reached Rp10.867 billion.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DIREKTUR PELAKSANA, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Informasi mengenai pendidikan dan pelatihan bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, dapat dilihat pada masing-masing bagian Profil di Bab ini. Sedangkan untuk Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal disajikan dalam pembahasan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam Laporan Tahunan ini.

BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR, MANAGING DIRECTOR, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY AND INTERNAL AUDIT UNIT EDUCATION AND TRAINING PROGRAM

Information on education and training for the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors can be found on the Profile section of this Chapter. While for the Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit are presented in the Corporate Governance (GCG) section in this Annual Report.

Pendidikan & Pelatihan Dewan Direktur
Workshop & Trainings of the Board of Directors

Peserta Participants	Topik Pelatihan Topics	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
SUMINTO	Cambridge Business Sustainability Management online short course	Februari-Mei 2020 February-May 2020	
FELIA SALIM	Embedding Sustainability Program into Bank's Business Model	12 – 13 Maret 2020 12 – 13 March 2020	BARa, Jakarta
RIJANI TIRTOSO	Embedding Sustainability Program into Bank's Business Model	12 – 13 Maret 2020 12 – 13 March 2020	BARa, Jakarta

Pendidikan & Pelatihan Direktur Pelaksana
Workshop & Trainings of Managing Directors

Peserta Participants	Topik Pelatihan Topics	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
HENRY SIHOTANG	Narasumber: Refreshment Risk Management: Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi *Respondent: Risk Management Refreshment: Loan Restructuring During the Pandemic*	25 September 2020	
	Seminar: Restructuring and Handling on NPL during the COVID-19 Pandemic Period	14 Mei 2020 14 May 2020	
	Narasumber Training PT SMF: Penanganan Non-Performing Loan Respondent of PT SMF Training: Handling of Non-Performing Loans	12 Februari 2020 12 February	

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS INFORMATION

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Indonesia Eximbank 100% fully owned by the Government of Republic Indonesia in which the capital is not divided into shares.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Secara Langsung Direct Ownership (%)	Kepemilikan Secara Tidak Langsung Indirect Ownership (%)
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas saham	100%	-
Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Total		**100%**	

ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARIES & ASSOCIATES

Sampai dipublikasikannya Laporan Tahunan 2020 ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi.

By the publication of this 2020 Annual Report, Indonesia Eximbank does not have any subsidiaries or associates.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE

Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank is a State-Owned Enterprise in which all Company shares are 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia, which represented by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY

Selama tahun 2020, LPEI telah merealisasikan penerbitan efek-efek bersifat utang melalui *public bond* dengan rincian sebagai berikut:

During 2020, Indonesia Eximbank has issued debt securities through public bonds with the following details:

LPEI telah merealisasikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 dengan total sebesar Rp148 miliar. Penerbitan-penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dengan target dana sebesar-besarnya Rp22 triliun dan PUB Sukuk Berkelanjutan Indonesia Eximbank I dengan target dana sebesar besarnya Rp2 triliun yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-183/D.04/2020 tanggal 30 Juni 2020. Detail mengenai Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh LPEI pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Indonesia Eximbank has issued the Indonesia Eximbank Shelf Bonds V Phase I of 2020 and Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah Shelf Bonds II Phase I of 2020 amounted to Rp148 billion. These issuances are part of Indonesia Eximbank Shelf Bonds Public Offering V with the target funds of Rp22 Trillion and Indonesia Eximbank Shelf Bonds Public Offering I with the target funds of Rp2 Trillion which already obtained effective statements from the Financial Services Authority (OJK) through letter No. S-183/D.04/2020 dated 30 June 2020. The details on the Bonds and Sukuk Mudharabah issued by Indonesia Eximbank in 2020 are as follows:

- Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V tahap I Tahun 2020
  Obligasi V tahap I diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2020 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp48.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Indonesia Eximbank Shelf Bonds V Phase I of 2020

  Bonds V phase I was issued on 8 July 2020 with total Bonds Principal of Rp48,000,000,000, with the following details:

Seri Obligasi Bonds	Jumlah Amount (Rp)	Bunga Interest (%)	Jangka Waktu Tenor	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Efek Ratings
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Shelf Bonds V Phase I of 2020	48.000.000.000	7,60	3 tahun/ years	8 Juli/July 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020
  Sukuk Mudharabah II Tahap I Tahun 2020 diterbitkan pada tanggal 8 juli 2020 dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp100.000.000.000, dengan rincian Mudharabah sebagai berikut:

- Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020
  Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020 was issued on 8 July 2020 amounted to Rp100,000,000,000, with the following details:

Seri Obligasi Bonds	Jumlah Amount (Rp)	Bunga Interest (%)	Jangka Waktu Tenor	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Efek Ratings
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020	100.000.000.000	6,75	370 hari kalender/ calendar days	18 Juli/July 2021	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN
OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY

Berikut *outstanding* efek Indonesia Eximbank per Tahun Buku 2020:

The following are securities outstanding of Indonesia Eximbank for Fiscal Year 2020:

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
A. Obligasi dalam mata uang Rupiah | Bonds denominated in Rupiah								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds II Phase VII of 2016	C	1,732	9.60%	19-Feb-16	19-Feb-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase I of 2016	C	2,252	8.70%	08-Jun-16	08-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase II of 2016	C	1,582	8.35%	15-Jul-16	25-Aug-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase III of 2016	C	282	8.20%	22-Nov-16	22-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,038	8.50%	22-Nov-16	22-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase IV of 2017	C	748	8.90%	23-Feb-17	23-Feb-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,007	9.20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1,266	9.40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase V of 2017	B	436	7.90%	15-Aug-17	15-Aug-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,786	8.25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase VI of 2018	A	610	6.35%	14-Feb-18	14-Feb-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1,650	6.70%	14-Feb-18	14-Feb-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	206	6.90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018	A	938	7.50%	06-Jun-18	6-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	35	7.70%	06-Jun-18	6-Jun-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,756	8.30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase II of 2018	B	190	7.50%	05-Sep-18	5-Sep-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	276	8.40%	05-Sep-18	5-Sep-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,324	8.75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase III of 2018	B	81	8.75%	08-Nov-18	8-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	28	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	380	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase IV of 2019	B	935	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,523	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9.25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9.50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9.80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
12	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase V of 2019	B	621	8.45%	09-Jul-19	9-Jul-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	330	8.70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9.20%	09-Jul-19	9-Jul-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
13	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VI of 2019	B	15	7.80%	03-Sep-19	3-Sep-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	6	8.10%	03-Sep-19	3-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	715	8.50%	03-Sep-19	3-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
14	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VII of 2019	B	101	7.80%	29-Oct-19	29-Oct-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	26	8.10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8.50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	220	8.75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
15	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VIII of 2019	A	88	7.50%	06-Dec-19	6-Dec-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1,551	7.90%	06-Dec-19	6-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	23	8.20%	06-Dec-19	6-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
16	Obligasi PUB IEB V Tahap I Tahun 2020 PUB IEB Bonds V Phase I of 2020	-	48	7.60%	08-Jul-20	8-Jul-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi | Total Bonds			**27,905**					

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN
OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
B. Sukuk dalam mata uang Rupiah | Sukuk denominated in Rupiah								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase I of 2018	B	365	7.50%	06-Jun-18	6-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	B	250	8.75%	08-Nov-18	8-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	14	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	155	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	B	145	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	66	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020	-	100	6.75%	08-Jul-20	18-Jul-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Sukuk | Total Sukuk			**1,095**					

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2020 Total Outstanding as od 31 December 2020 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
C. MTN dalam mata uang Rupiah | MTN denominated in Rupiah								
1	MTN I Indonesia Eximbank Tahun 2016 Indonesia Eximbank MTN I of 2016	-	500	8.65%	15-Jul-16	15-Jul-21	-	idAAA (Pefindo)
Jumlah MTN Rupiah | Total MTN Rupiah			**500**					

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Berikut ini lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan LPEI pada tahun 2020.

The following are capital market supporting agencies and professions for the issuance of Indonesia Eximbank Shelf Bonds and Sukuk in 2020.

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments	Periode Penugasan Assignment Periods	PUB Obligasi IEB V Tahap I Tahun 2020 PUB IEB Bonds V Phase I of 2020	PUB Sukuk IEB II Tahap I Tahun 2020 PUB IEB Sukuk II Phase I of 2020
1. Penjamin Pelaksana Emisi | Underwriter						
a	PT Mandiri Sekuritas	Menara Mandiri 1, Lt. 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Penjamin Pelaksana Emisi Tahun 2020 Underwriter of 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√
b	PT CIMB Niaga Sekuritas	Graha CIMB Niaga, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190	Penjamin Pelaksana Emisi Tahun 2020 Underwriter of 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√
c	PT Danareksa Sekuritas	Gedung BRI II Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	Penjamin Pelaksana Emisi Tahun 2020 Underwriter of 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√
2. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal | Capital Market Institutions and Professions						
a	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Panin Tower Senayan City Lt.17, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 Tel. (021) 7278 2380 Fax. (021) 7278 2370	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Tahun 2020 Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√
b	PT. Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 0515 Fax. (021) 515 0330	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Tahun 2020 Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan efek yang dicatat jatuh tempo Until the maturity of listed securities	√	√
c	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199	Lembaga Kustodi dan Penyelesaian di Pasar Modal atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Tahun 2020 Custodian Agency and Settlement in the Capital Market for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan masing-masing seri efek jatuh tempo Until the maturity of each securities serie	√	√
d	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Telp. (021) 527 5370 Fax. (021) 526 8201	Wali Amanat atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Tahun 2020 Trustee for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan efek jatuh tempo Until the maturity of securities	√	√

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments	Periode Penugasan Assignment Periods	PUB Obligasi IEB V Tahap I Tahun 2020 PUB IEB Bonds V Phase I of 2020	PUB Sukuk IEB II Tahap I Tahun 2020 PUB IEB Sukuk II Phase I of 2020
e	Konsultan Hukum Warens & Partners	Menara Taspen Lantai 3, Suite 301 & 302, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 2511 580 Fax. (021) 2511 579	Konsultan Hukum atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Tahun 2020 Law Firm for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√
f	Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	JL. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tel : (021) 724 4650 Fax : (021) 726 5090	Notaris Emisi atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Tahun 2020 Notary for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√
g	KAP "Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali"	Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6–7 Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi, 17132 Tel. (021) 88866199 Fax. (021) 88865750	Auditor Penjatahan atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Tahun 2020 Allocation Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank in 2020	Sampai dengan dana Emisi diterima Until the receipt of proceed	√	√

ALAMAT KANTOR

OFFICE ADDRESS

Alamat Kantor
Office Address
Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Kantor Wilayah | Regional Offices

Jakarta
Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Surabaya
Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1
Jl. Panglima Sudirman 101-103,
Surabaya 60271, Indonesia

Kantor Cabang | Branch Offices

Medan
B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 12
Jl. Putri Hijau No. 10,
Medan 20111, Indonesia

Makassar
Wisma Kalla Building 6th Floor
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10,
Makassar 90125, Indonesia

Surakarta
Indonesia Eximbank Building 2nd d Floor
Jl. Slamet Riyadi No. 341,
Surakarta 57141, Indonesia

Kantor Pemasaran | Representative Offices

Balikpapan
Grand Sudirman Building
Panin Tower, Main Lobby 203
Jl. Jend. Sudirman No. 7,
Balikpapan 76411, Indonesia

Batam
Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704
Jl. Raya Batam Center,
Batam 29461, Indonesia

Denpasar
Jl. Raya Puputan No. 160 Renon,
Denpasar 80235, Indonesia

PENGHARGAAN

AWARDS

LPEI mendapatkan penghargaan berupa silver *award* untuk kategori "*Empowerment of Woman*" dari Global CSR Summit and Awards (17 September 2020)

Indonesia Eximbank received a silver award for the category of "Empowerment of Woman" from Global CSR Summit and Awards (17 September 2020)

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki situs web resmi yang dapat diakses di www.indonesiaeximbank.go.id, yang tersedia dalam dua pilihan bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada situs web Indonesia disajikan informasi dan data mengenai LPEI yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Situs web LPEI telah memenuhi berbagai ketentuan yang relevan baik eksternal, maupun internal, termasuk:

a. Undang-Undang RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun bukan berstatus Perusahaan Publik, LPEI senantiasa berupaya menjaga standar transparansi dan keterbukaan informasi khususnya serta praktik-praktik tata kelola perusahaan pada umumnya, yang setara dengan perusahaan-perusahaan publik yang terbaik.

Indonesia Eximbank has the official website accessible at www.indonesiaeximbank.go.id, available in two languages, Bahasa Indonesia and English. The website presents information and data on Indonesia Eximbank that can be accessed by the stakeholders and public in general in accordance with the transparency and information disclosure principles.

Indonesia Eximbank website has met the relevant rules, both externally and internally, including:

a. RI Act No. 14/2008 on the Public Information Disclosures.
b. RI Act No. 11/2008 on the Electronic Information and Transaction.

Despite its status as a non-Public Company, Indonesia Eximbank strives to maintain its transparency and information disclosures standard in particular as well as corporate governance practices in general, which are equal with the best public companies.

Oleh karenanya, komponen situs web LPEI juga telah memenuhi cakupan informasi yang wajib dimuat dalam situs web Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015, terkecuali untuk item-item yang spesifik untuk sebuah Perusahaan Publik.

Secara garis besar, informasi pada situs web terdiri dari:

- Informasi umum tentang LPEI yang terdiri dari Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Sejarah Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, Jaringan Kantor dan Wilayah Kerja.
- Informasi terkait kegiatan bisnis, produk-produk, serta informasi seputar kegiatan pengadaan.
- Informasi seputar kegiatan LPEI dalam bentuk *News Release, News update*, sambutan/pidato manajemen, publikasi digital, event, serta pengumuman pengadaan lelang pengadaan produk jasa yang diselenggarakan oleh LPEI.
- Informasi terkait Hubungan Investor yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keberlanjutan, Informasi Efek, Peringkat Efek, dan Obligasi.
- Informasi terkait aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dari waktu ke waktu, LPEI selalu berupaya untuk menyempurnakan situs web Lembaga agar menjadi lebih informatif, mudah diakses, mudah dinavigasi serta ramah bagi penggunanya.

As such, Indonesia Eximbank website components has also met the mandatory information in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015, except on specific elements for the Public Companies.

Broadly, Indonesia Eximbank's website includes the following information:

- General information on Indonesia Eximbank that consist of Company Profile, Vision and Mission, History, Corporate Governance, Board of Directors, Executive Directors, Office Networks and Operational Areas.
- Information on business activities, products, and procurement activity.
- Information on Indonesia Eximbank such as News Releases, News Update, management messages/speeches, digital publication, Events, and auction announcements of good and services procurement organized by Indonesia Eximbank.
- Information on Investor Relations, which consists of Annual Reports, Financial Statements, Sustainability Reports, Securities Information, Stock Rating, and Bonds.
- Information on Corporate Social Responsibility activities

Indonesia Eximbank frequently strives to refine its website to be more informative, accessible with easy navigation and users friendly.

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

2020

LPEI telah mampu menjalankan mandatnya baik dari sisi bisnis dan operasional sebagai *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan RI, meski ditengah kondisi makro ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

In the midst of macroeconomics condition impacted by the COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank has been able to implement its mandate in both business and operations as the Special Mission Vehicle of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

TINJAUAN EKONOMI

ECONOMIC OVERVIEW

Perekonomian Global

Sejak pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada November 2019, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak disangka menjadi pandemi karena penyebarannya melanda hampir seluruh dunia selama tahun 2020, bahkan masih berlanjut sampai dengan saat ini. Dampak pandemi COVID-19 memberi tekanan kuat terhadap berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga mengakibatkan banyak negara menghadapi resesi ekonomi di tahun 2020.

Negara-negara yang sempat melaksanakan penguncian (*lockdown*) setelah melakukan pelonggaran pun ternyata malah berhadapan dengan lonjakan kasus maupun babak baru pandemi gelombang kedua. Beberapa negara seperti seperti Amerika Serikat (AS) bahkan mengalami gelombang ketiga, dimana AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia, dengan pangsa ekspor mencapai 11,40% dari total ekspor Indonesia tahun 2020. Jumlah kasus COVID-19 per 31 Desember 2020, telah menembus 81,5 juta kasus di dunia, dengan jumlah kasus tertinggi dicatatkan oleh AS dengan total kasus sebanyak 19,3 juta kasus.

Global Economy

The first case of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) was discovered in Wuhan, Hubei Province of China in November 2019, and quickly developed into an unprecedented global pandemic. COVID-19 affected the world in 2020 and is still ongoing until today. The pandemic upended all aspects of lives, not only in terms of health and humanity, but also the economy with many countries fell into recession in 2020.

Several countries had initially relaxed their border restrictions, but this was followed up by another round of national lockdown. This measure, however, was not entirely effective in preventing the second wave of the pandemic. Countries like the United States have even experienced the pandemic's third wave. For Indonesia, the US is its second-largest trade partner and accounted for 11.40% of Indonesian exports in 2020. Globally, by 31 December 2020, there were 81.5 million COVID-19 cases, with the US leading the tally with 19.3. million cases.

Perkembangan Kasus COVID-19 di Negara Mitra Dagang Utama (Posisi 31 Desember 2020)
COVID-19 Cases Reported in Indonesia's Key Trade Partners (as of 31 December 2020)

Peringkat Jumlah Kasus Dunia Global Rank by Total Cases	Negara Countries	Jumlah Kasus Total Cases	Jumlah Kematian Total Fatalities	Tingkat Fatalitas Fatality Rate	Jumlah Sembuh Total Recoveries	Gelombang Kasus COVID-19 COVID-19 Waves		*Share* Terhadap Ekspor Indonesia 2020 Share to Indonesia Export 2020
	Dunia Global	**81.540.567**	**1.800.300**	**2,18%**	**47.010.049**			
1	Amerika Serikat United States	19.346.790	335.789	1,73%	16.399.044	3rd Wave		11,40%
2	India	10.266.674	148.738	1,45%	9.860.280	1st Wave		6,38%
5	Perancis France	2.556.708	64.004	2,42%	400.284	2nd Wave		0,56%
6	Inggris England	2.432.892	72.548	2,95%	10.958	3rd Wave		0,79%
7	Italia Italy	2.083.689	73.604	3,52%	1.463.111	2nd Wave		1,07%

Peringkat Jumlah Kasus Dunia Global Rank by Total Cases	Negara Countries	Jumlah Kasus Total Cases	Jumlah Kematian Total Fatalities	Tingkat Fatalitas Fatality Rate	Jumlah Sembuh Total Recoveries	Gelombang Kasus COVID-19 COVID-19 Waves		*Share* Terhadap Ekspor Indonesia 2020 Share to Indonesia Export 2020
	Dunia Global	**81.540.567**	**1.800.300**	**2,18%**	**47.010.049**			
8	Spanyol Spain	1.947.035	51.270	2,64%	150.376	3rd Wave		0,93%
9	Jerman Germany	1.719.737	33.071	1,92%	1.350.708	3rd Wave		1,50%
19	Belanda Netherlands	786.673	11.309	1,43%	19.170	3rd Wave		1,91%
20	Indonesia	743.198	22.138	2,98%	611.097	1st Wave		
29	Filipina Philippines	472.532	9.230	1,95%	439.796	1st Wave		3,61%
42	Jepang Japan	230.304	13	1,40%	191.295	3rd Wave		8,37%
74	Malaysia	110.485	463	0,42%	88.941	2nd Wave		4,98%
78	Tiongkok China	96.673	4.788	4,98%	179.846	1st Wave		19,46%
87	Korea Selatan South Korea	60.733	900	1,49%	42.953	3rd Wave	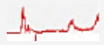	3,98%
88	Singapura Singapore	58.569	29	0,05%	58.449	2nd Wave		6,56%
140	Thailand	6.690	61	0,88%	4.273	1st Wave		3,13%
173	Vietnam	1.456	35	2,39%	1.325	2nd Wave		3,03%

Sumber | Source: (I) CEIC Data; (ii) https://ourworldindata.org/grapher/deaths-covid-19-vs-case-fatality-rate?tab=table&time=2020-12-29, diolah | processed.

Berdasarkan data *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2021, perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia tahun 2020 diestimasikan mengalami kontraksi sebesar -3,5% *year-on-year* (yoy). Estimasi ini tidak sedalam estimasi sebelumnya, yaitu terkontraksi -4,4% yoy (dalam WEO per Oktober 2020). Pencapaian PDB Dunia tahun 2020 ini jauh lebih buruk dibanding saat krisis keuangan global periode 2008-2009 lalu.

The World Economic Outlook (WEO) data released by the International Monetary Fund (IMF) in January 2021 project that the global gross domestic product (GDP) in 2020 would contract by -3.5% year-on-year (yoy). This projection has been improved from its previous estimate of -4.4% yoy contraction (according to WEO in October 2020). Nevertheless, it is worth noting that the contraction of the 2020 GDP exceeded the contraction during 2008-2009 global crisis.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang (% yoy)
Growth of Advanced Economies and the Emerging Markets and Developing Economies (% yoy)

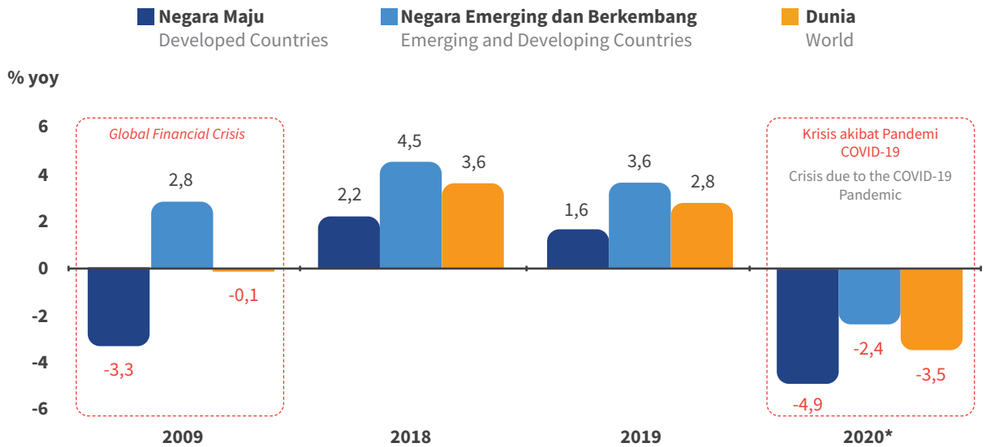

(*): estimasi. | estimated.

Sumber | Source: IMF WEO per Januari 2021, diolah. | IMF WEO as of January 2021, processed.

Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi pada level yang beragam, di negara maju diestimasikan kontraksi hingga -4,9% yoy pada tahun 2020, sementara di negara berkembang diestimasikan kontraksi di level -2,4% yoy. Adapun pertumbuhan ekonomi negara maju yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti AS, Jepang, dan Kawasan Euro mengalami kontraksi masing-masing pada level: -3,4% yoy; -5,1% yoy; dan -7,2% yoy. Sementara itu Tiongkok menjadi katalis pemulihan ekonomi di negara *emerging* dan berkembang karena mampu mengakselerasi fase pemulihan ekonomi, setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam di awal tahun 2020. IMF mengestimasikan ekonomi Tiongkok tumbuh 2,3% yoy pada 2020.

The economic pressure resulting from the COVID-19 pandemic varies; in developed countries, the overall contraction in 2020 is estimated to be -4.9% yoy. In contrast, emerging economies are estimated to contract by -2.4% yoy. The key trade partners of Indonesia among advanced economies, such as the US, Japan, and the Euro Zone also contracted to -3,4% yoy; -5,1% yoy; and -7,2% yoy, respectively. Among the emerging markets and developing countries, China is expected to be the catalyst of recovery, as the government has accelerated its growth following a deep contraction in 2020. According to IMF projection, China grew by 2.3% yoy in 2002.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Utama Indonesia (% yoy)
Economic Growth of Indonesia's Selected Key Trade Partners (% yoy)

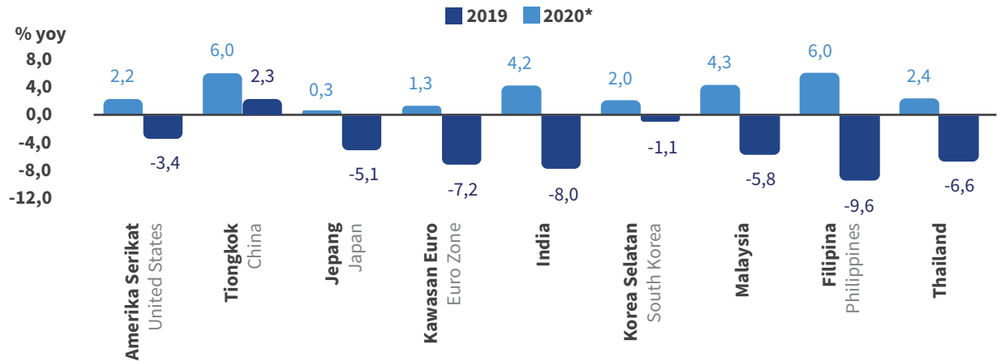

(*): estimasi. | estimated.

Sumber | Source: IMF WEO per Januari 2021, diolah. | IMF WEO as of January 2021, processed.

Terjadinya kontraksi ekonomi dunia tidak terlepas dari permintaan dunia yang melemah dan rantai pasokan global yang terganggu sepanjang tahun 2020. Volume perdagangan global (barang dan jasa) diestimasikan terkontraksi di level -9,6% yoy pada tahun 2020, turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 1,0% yoy. Sejalan dengan itu, volume perdagangan barang dan jasa negara maju dan negara berkembang & *emerging* juga diestimasikan turun masing-masing di level -10,1% yoy dan -8,9% yoy.

Dari sisi konsumsi, aktivitas konsumsi negara-negara utama di dunia yang terindikasi dari *leading indicators* tingkat penjualan ritel ini mengalami kontraksi yang cukup dalam pada awal pembatasan/lockdown guna membatasi penyebaran COVID-19 dengan sinyal pemulihan ke arah *V-shape.* Pada akhir periode 2020, terdapat cenderung melemah kembali akibat diberlakukannya kembali pembatasan karena *third wave* pandemi COVID-19 di sejumlah negara seperti AS dan Jepang, serta *second wave* yang terjadi di Kawasan Euro.

Weak demands and heavily disrupted global chain throughout 2020 were the main drivers behind global economic contraction. Global trade volume, both goods and services, are estimated to drop by -9,6% yoy in 2020, and this represents a significant fall from the previous growth level of 1.0% yoy. Similarly, the emerging markets and developing economies are also projected to contract by -10.1% yoy and -8.9% yoy.

At the same time, consumption level in critical countries, indicated by retail sales volume, plunged due to mobility restrictions/lockdown as measures to flatten the curve of transmission. While there were initial signals of recovery towards the V-shape, consumption again weakened at the end of 2020 due to the pandemic's third wave in countries such as the US and Japan, while the countries in the Euro zone started to experience the second wave.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Sektor Konsumsi (Penjualan Ritel % yoy)
Consumption (Retail sales, % yoy)

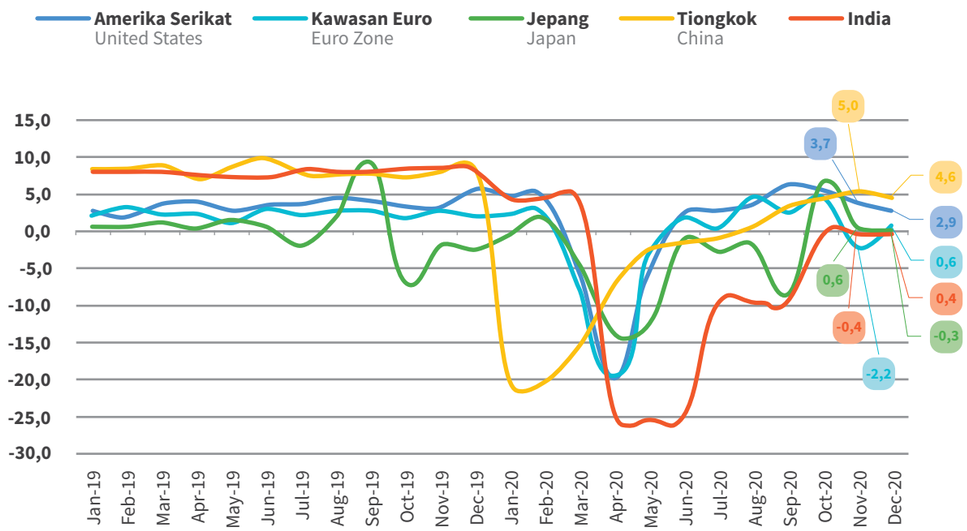

Note: khusus India menggunakan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor.
India's indicator is represented by sales of motorized vehicle.

Sumber | Source: CEIC Data Manager dan Oxford Economics, diolah. | CEIC Data Manager and Oxford Economics, processed.

Pada sisi investasi, aktivitas investasi negara-negara utama dunia yang diproksikan dengan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Komposit menunjukkan pemulihan aktivitas bisnis di tengah pandemi COVID-19 dengan pergerakan yang juga ke arah *V-shape*. Aktivitas investasi di Tiongkok mengalami ekspansi lebih awal pada Mei 2020. Sedangkan aktivitas investasi di AS dan Kawasan Euro kembali ke zona ekspansi mulai Juli 2020, setelah berada di zona kontraksi pada paruh pertama tahun 2020. Sementara India mencatatkan ekspansi baru pada September 2020. Namun, aktivitas investasi Jepang mengalami kontraksi di hampir sepanjang tahun 2020, kecuali pada Januari 2020.

In terms of investment, the Purchasing Managers' Index (PMI) showed promising signs of business activity recovery amid the pandemic with the curve developing into a V-shape. China showed investment growth as early as May 2020, while investment activities in the US and Euro Zone returned to a positive level in July 2020 after recording negative growth throughout the first half of 2020. India also reported investment improvement starting September 2020, leaving Japan in continued contraction throughout 2020 except in January

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Sektor Investasi (PMI Komposit)
Investment Sector (Composite PMI)

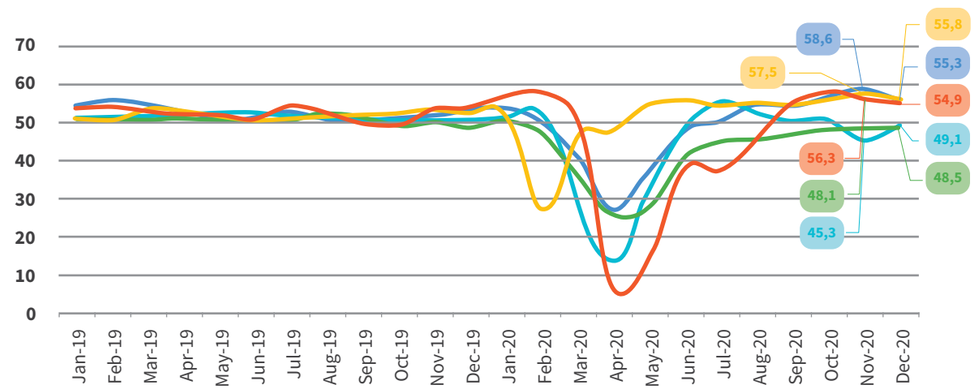

Note: PMI > 50 artinya terjadi ekspansi; PMI < 50 artinya terjadi kontraksi; PMI = 50 artinya tidak terdapat perubahan.
PMI > 50 indicates expansion; PMI < 50 indicates decline; PMI = 50 indicates no change.

Sumber | Source: Bloomberg, diolah. | Bloomberg, processed.

Secara umum, ekspansi aktivitas investasi AS, Tiongkok, dan India mengalami perlambatan saat menjelang akhir tahun 2020. Sedangkan aktivitas investasi kawasan Euro kembali berada di zona kontraksi. Perkembangan ini di dorong oleh *second wave* yang terjadi di kawasan Euro dan varian COVID-19 baru di Inggris dan Denmark menyebabkan harus diambilnya langkah-langkah pengetatan kembali oleh banyak negara, terutama kegiatan *gathering* untuk menekan infeksi COVID-19 varian baru. Perkembangan tersebut kemudian menekan permintaan pesanan baru, baik domestik maupun luar negeri (ekspor).

Kebijakan pembatasan mobilitas untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di sebagian besar negara dilaksanakan sejak Maret 2020, dengan tingkat keketatan yang bervariasi dan sesuai dinamika perkembangan pandemi COVID-19 di masing-masing negara. Hal ini berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian global. Produksi industri dan penjualan ritel paling terdampak pasca pengetatan tersebut yang tercermin dari realisasi pada April 2020.

In general, the investment activities in the US, China, and India decelerated towards the end of 2020, while the Euro Zone returned to negative growth. These were caused by the second wave of the pandemic in the EU and the new COVID-19 strains found in the UK and Denmark, which led to governments taking strict measures including prohibiting large gatherings to prevent wider transmission. In turn, such decision inevitably affected domestic and international economic activities.

Overall, most countries began to regulate public mobilities in March 2020, aiming to cut the chain of COVID-19 transmission. While the level of restriction differed by government, according to the domestic situation of COVID-19, the global economy was nevertheless disrupted. Industrial output and retail sales became two sectors that were most heavily impacted, as reflected from their performance in April 2020.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Produksi Industri dan Penjualan Ritel*
Industrial Output and Retail Sales*

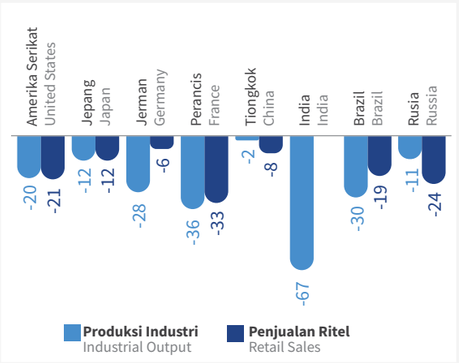

PMI Manufaktur dan Jasa Dunia**
Global Manufacturing and Services PMI**

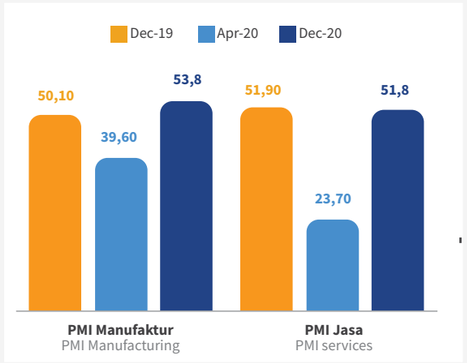

Note: (*): Delta Indeks (100 = Desember 2019) terhadap April 2020;
Delta Index (100 = December 2019) to April 2020;
(**): PMI > 50 artinya terjadi ekspansi; PMI < 50 artinya terjadi kontraksi; PMI = 50 artinya tidak terdapat perubahan.
PMI > 50 indicates expansion; PMI < 50 indicates decline; PMI = 50 indicates no change.

Sumber | Source: CEIC dan IMF WEO Oktober 2020, diolah. | CEIC and IMF WEO October 2020, processed.

Produksi industri dan penjualan ritel negara utama seperti AS, Jepang, Jerman, Perancis, Tiongkok, India, Brazil, dan Rusia mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan posisi Desember 2019. Dari sisi aktivitas investasi yang diproksikan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) global juga berada di zona kontraksi paling dalam pada April 2020, sebelum kemudian membaik dan tercatat pada zona ekspansi pada Desember 2020.

In the US, Japan, Germany, France, China, India, Brazil, and Russia, as the key countries, industrial output and retail sales demonstrated deep contraction compared to December 2019 position. The global PMI also experienced the most significant downturn in April 2020, and then gradually improved and returned to expansion level in December 2020.

Pembatasan mobilitas dalam bentuk penutupan akses masuk antarnegara telah berdampak pada aktivitas sektor manufaktur dan jasa. Terhambatnya aktivitas perdagangan internasional dan rantai pasok global sejalan dengan aktivitas produksi yang terhenti, disrupsi pada arus distribusi barang, dan menurunnya permintaan. Sedangkan aktivitas sektor jasa mengalami penurunan paling tajam terutama industri pariwisata global karena kebijakan pembatasan perjalanan, baik secara internasional maupun dalam beberapa kasus di dalam negeri telah membatasi pergerakan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini terkonfirmasi dari PMI Jasa (April 2020 di level 23,70) yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan PMI Manufaktur (April 2020 di level 39,60) akibat pembatasan aktivitas.

Moreover, border closing also affected manufacturing activities and services. As production decreased, distribution flow of goods disrupted, and demands dropped, international trade and global supply chain were sent to a standstill. In the services sector, the global hospitality industry was immediately and significantly affected, as international and domestic travel was restricted. This was evident from the services PMI (at 23.70 as of April 2020) that experienced deeper contraction compared to the Manufacturing PMI (at 39.60 as of April 2020).

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Stimulus fiskal yang ekspansif dengan skala besar telah dikucurkan oleh otoritas di berbagai negara guna meredam dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Total stimulus fiskal tercatat sekitar USD11,7 triliun di tahun 2020 atau mendekati 12% dari PDB dunia, dengan respon kebijakan fiskal negara maju lebih besar dibandingkan negara berkembang. Secara umum, stimulus fiskal ditujukan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, dan sisi produksi.

To tackle the impacts of the pandemic, governments provided expansive fiscal stimulus. Globally, the total fiscal stimulus in 2020 amounted to USD11.7 trillion, or close to 12% of the global GDP, with stimulus amount in advanced countries exceeding the amount in developed countries. In general, the main goals of this measure were to protect health response efforts, purchasing power, and production.

Defisit Fiskal Tahun 2020 di Negara Maju dan Berkembang (% dari total PDB)
Fiscal Deficit in Advanced and Developing Countries in 2020 (% of total GDP)

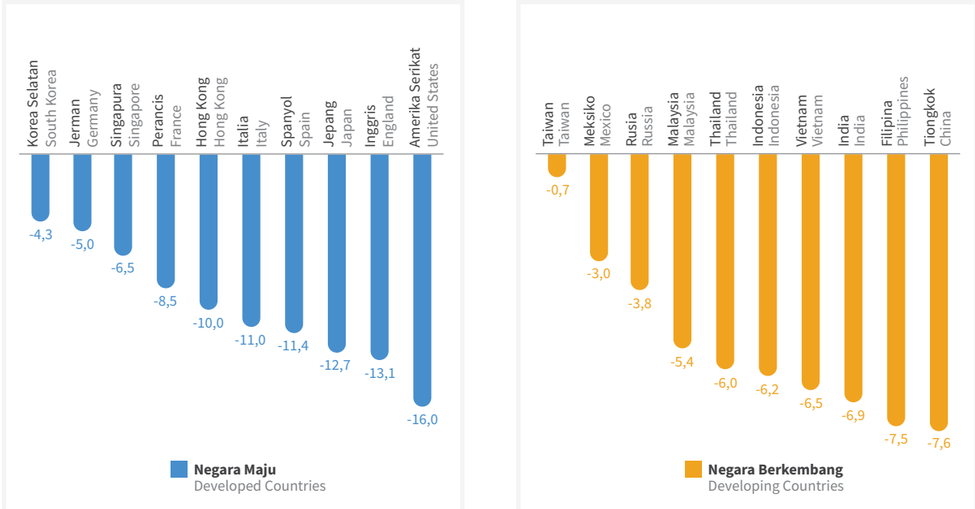

Sumber | Source: Oxford Economics, diolah. | Oxford Economics, processed.

Pemberian stimulus fiskal yang besar dan penerimaan pajak yang turun menyebabkan defisit fiskal melebar di banyak negara. Di negara maju, pelebaran defisit fiskal mencapai lebih dari 8% terhadap PDB, kecuali Korea Selatan, Jerman, dan Singapura. Sedangkan peningkatan defisit fiskal di negara berkembang secara umum tercatat lebih rendah dari negara maju, lantaran dipicu keterbatasan ruang pembiayaan fiskal.

At the same time that governments disbursed a large amount of fiscal stimulus, tax revenues dropped and caused a steep increase in fiscal deficit in multiple countries. In advanced economies, the deficit could reach as high as 8% of the GDP except for of South Korea, Germany, and Singapore. In contrast, the overall deficit level in developing economies was lower, as their fiscal room had also been narrowed.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Dampak pandemi COVID-19 juga direspons oleh bank sentral di berbagai negara dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Ketersediaan ruang kebijakan di masing-masing negara menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Pada negara-negara maju, bank sentral melakukan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing* atau QE) ke sektor keuangan, mengingat suku bunga kebijakan sudah mendekati atau sama dengan nol persen. QE ditempuh antara lain melalui program pembelian aset keuangan (*Asset Purchase Program*) dari pasar obligasi Pemerintah, obligasi swasta, maupun sekuritas kredit.

Sementara bank sentral di negara berkembang lebih cenderung melakukan kombinasi instumen dengan menurunkan suku bunga kebijakan yang disesuaikan dengan penurunan inflasi dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selain itu, bank sentral juga melakukan QE terutama melalui operasi moneter karena ketersediaan aset-aset keuangan masih relatif terbatas di pasar sekunder. Lebih lanjut, beberapa bank sentral seperti Bank Indonesia, Bank of Thailand, Bangko Sentral ng Pilipinas, Banco Central do Brazil juga telah berkomitmen untuk membantu pembiayaan defisit fiskal melalui injeksi likuiditas pada pemerintah.

Central banks also responded to the pandemic effects through their monetary policies, with different countries exercising different instruments depending on their policy posture. In advanced economies, the central banks were more likely to perform quantitative easing (QE) to support the financial sector, especially considering that benchmark interest rates were near or at zero percent. Several instruments were used to realize QE, such as asset purchase program from the sovereign bond market, private bond, and credit securities.

In developed countries, the central banks favored a combination of instruments, including lowering benchmark rates following the country's inflation level and exercising other measures to maintain the exchange rate. Central banks may also exercise QE, especially through monetary operations considering the limited availability of government financial assets in the secondary market. Additionally, several central banks, such as Bank Indonesia, Bank of Thailand, Bangko Sentral ng Pilipinas, and Banco Central do Brazil supplemented the government's liquidity to buffer fiscal deficit.

Perkembangan Suku Bunga Bank Sentral (Desember 2020 vs Desember 2019)
Benchmark Interest Rates (December 2020 vs December 2019)

(dalam % | in %)

Bank Sentral (Suku Bunga) Bank Sentral (Suku Bunga)	Dec-19	Mar-20	Jun-20	Sep-20	Dec-20	Perubahan Des-19 Terhadap Des-20 Perubahan Des-19 Terhadap Des-20
AS (Fed Rate)	1,75	0,25	0,25	0,25	0,25 ▼	-1,50
Europe (ECB Rate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ▶	0,00
Japan (BoJ Overnight Call Rate)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10 ▶	0,00
England (BoE Rate)	0,75	0,10	0,10	0,10	0,10 ▼	-0,65
India (RBI Repo Rate)	5,15	4,40	4,00	4,00	4,00 ▼	-1,15
Hong Kong (HKMA Rate)	2,49	1,65	0,50	0,50	0,50 ▼	-1,99
China (PBC Base Interest Rate)	4,15	4,05	3,85	3,85	3,85 ▼	-0,30
Malaysia (Overnight Policy Rate)	3,00	2,50	2,00	1,75	1,75 ▼	-1,25
Phillippines (Reverse Repurchase Rate)	4,00	3,25	2,25	2,25	2,00 ▼	-2,00
Thailand (Repurchase Market Rate)	1,25	0,75	0,50	0,50	0,50 ▼	-0,75
Vietnam (Refinancing Rate)	6,00	5,00	4,50	4,50	4,00 ▼	-2,00

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

(dalam % | in %)

Bank Sentral (Suku Bunga) Bank Sentral (Suku Bunga)	Dec-19	Mar-20	Jun-20	Sep-20	Dec-20	Perubahan Des-19 Terhadap Des-20 Perubahan Des-19 Terhadap Des-20
Mynmar (CBoM Rate)	10,00	9,50	7,00	7,00	7,00 ▼	-3,00
Brunei (CB Rate)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50 ▶	0,00
Indonesia (BI 7-Day Repo Rate)	5,00	4,50	4,25	4,00	3,75 ▼	-1,25

Sumber | Source: Bloomberg, diolah. | Bloomberg, processed.

Perekonomian Indonesia dan Tinjauan Industri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 tercatat kontraksi di level -2,07% yoy sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Realisasi ini jauh di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya, di level 5,02% yoy. Kontraksi ekonomi terjadi pada hampir semua komponen PDB Pengeluaran, kecuali Komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94% yoy. Kontraksi paling dalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa, yaitu di level -7,70% yoy, diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (-4,95% yoy), Komponen Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga atau LNPRT (-4,29% yoy), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (-2,63% yoy). Sementara itu, komponen yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran yaitu Komponen Impor Barang dan Jasa tercatat terkontraksi di level -14,71% yoy.

Indonesia's Economy and Industry Overview

In 2020, Indonesia's growth contracted to -2,07% yoy because of the COVID-19 pandemic. The growth level was notably lower from 5.02% yoy in the preceding year. The contraction could be seen across all spending indicators of the GDP, except public spending that rose by 1.94% yoy. Meanwhile, the steepest contraction occurred in Export at -7.70% yoy, followed by Gross Fixed Capital Formation (-4.95% yoy), Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) (-4.29% yoy), and Household Consumption (-2.63% yoy). Meanwhile, outside of the GDP, import contracted to -14,71% yoy.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)
Indonesia's Economic Growth (% yoy)

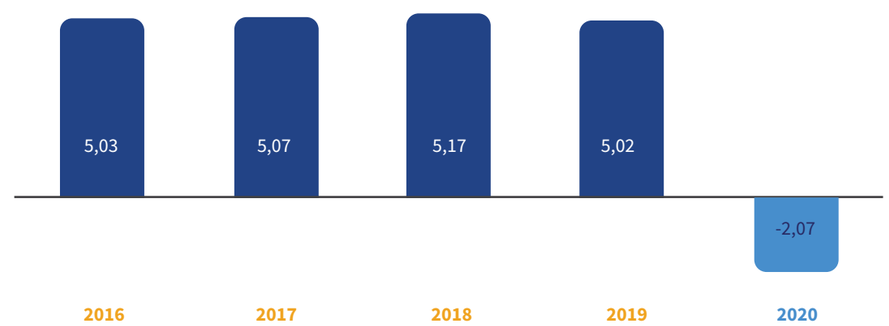

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik, diolah. | Statistics Indonesia, processed.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (% yoy)
GDP Growth in Several Spending Components (% yoy)

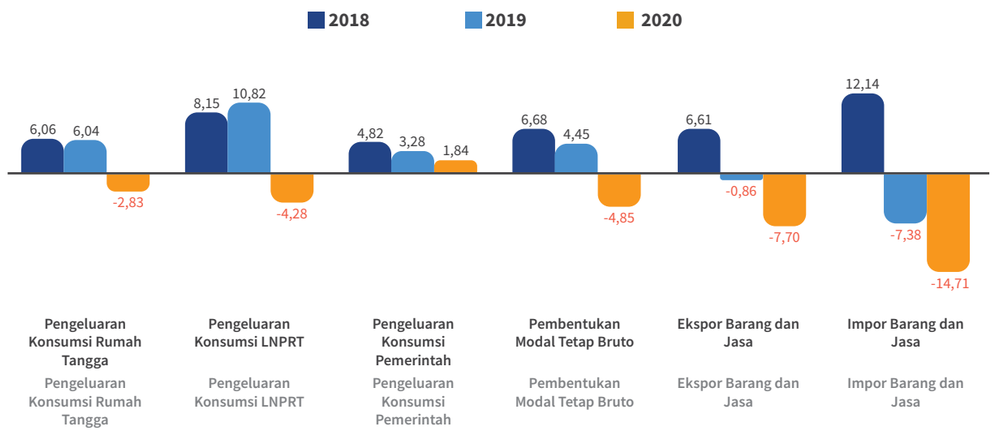

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik. | Statistics Indonesia.

Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor tahun 2020 mencapai USD163,31 miliar pada tahun 2020, terkontraksi di level -2,61% yoy dari nilai ekspor tahun sebelumnya (USD167,68 miliar). Produk non-migas berkontribusi 94,91% terhadap total ekspor atau setara USD154,99 miliar, turun tipis di level -0,57% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar ekspor nonmigas Indonesia tahun 2020 terjadi pada produk Bahan Bakar Mineral yang turun 22,16% yoy, dipicu turunnya ekspor Batubara karena rendahnya kebutuhan energi pada masa pandemi dan adanya kecenderungan beberapa negara untuk mengurangi batubara dalam bauran energinya guna menekan emisi karbon. Produk nonmigas dengan peningkatan ekspor terbesar dicatatkan oleh Besi dan Baja yang naik 46,84% yoy karena melonjaknya permintaan terutama dari sektor konstruksi dan manufaktur di Tiongkok, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat di negara tersebut dan adanya upaya pemerintah Tiongkok untuk mendorong sektor infrastruktur agar kinerja ekonomi tidak terlalu terpuruk.

In terms of foreign trade, export value in 2020 reached USD163.31 billion, fell -2.61% yoy from the earlier yar (USD167.68 billion). Non-oil and gas contributed 94.91% to the total export or an equivalent of USD154.99 billion, a slight decline by -0.57% compared to the same period in the previous year. The most significant decline of non-oil and gas export in 2020 occurred in the Mineral Fuel product, which lost 22.16% yoy. This was due to the low coal export performance, as demand significantly weakened during the pandemic, coupled with decarbonization initiatives in several countries that resulted in the cut down of coal consumption. Meanwhile, the largest export growth of non-oil and gas commodity at 46.84% was contributed by iron and steel, following a sharp rise in demand, especially from China's construction and manufacturing sectors. China was noted to demonstrate a quicker rebound and was determined to stimulate its infrastructure sector to prevent a further economic contraction.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Perkembangan Ekspor Indonesia Periode 2019 – 2020
Indonesian Export, 2019 – 2020

Keterangan Description	Nilai Ekspor FOB (Juta USD) Export Value, FOB (Million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran Terhadap Total Nilai Ekspor Share to National Export
	Dec-19	Nov-20	Dec-20	Jan-Dec 2019	Jan-Dec 20	Dec-20	Dec-20	Jan-Dec 20	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(mtm)	(yoy)	(yoy)	(Jan-Dec 2020)
Total Nilai Ekspor Total export value	**14.428,8**	**15.259,3**	**16.539,3**	**167.683,0**	**163.307,5**	8,39%	14,63%	-2,61%	**100,00%**
Migas Oil and gas	1.133,3	762,2	1.018,8	11.789,3	8.309,0	33,66%	-10,10%	-29,52%	5,09%
Nonmigas Non-oil and gas	13.295,5	14.497,1	15.520,5	155.893,7	154.998,5	7,06%	16,73%	-0,57%	94,91%
Berdasarkan Sektor Nonmigas Non-oil and gas, by sector									
Pertanian Agriculture	369,8	448,1	431,3	3.612,4	4.117,5	-3,75%	16,61%	13,98%	2,52%
Industri Pengolahan Manufacturing	10.842,2	12.095,9	12.916,9	127.377,7	131.131,7	6,79%	19,14%	2,95%	80,30%
Pertambangan dan lainnya Mining and others	2.083,5	1.953,1	2.172,3	24.903,6	19.749,3	11,23%	4,26%	-20,70%	12,09%

Keterangan | Description:
- = Tumbuh negatif (turun dari bulan sebelumnya) | negative growth (decline compared to previous month);
- = Tumbuh negatif (tidak seburuk bulan sebelumnya, tetap di zona negatif) | negative growth (less contraction than previous month, still in the negative zone);
- = Tumbuh positif (melambat dari bulan sebelumnya) | positive growth (lower than previous month);
- = Tumbuh positif (meningkat dari bulan sebelumnya | positive growth (higher than previous month).

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik, diolah.| Statistics Indonesia, processed.

Berdasarkan sektor, penyumbang terbesar ekspor nonmigas tahun 2020 masih berasal dari industri pengolahan yang sebesar 80,30%, diikuti sektor pertambangan dan lainnya sebesar 12,09%, serta sektor pertanian 2,52%.

Dari sisi ekspor migas berkontribusi sebesar 5,09% dari total nilai ekspor atau setara USD8,31 miliar, turun 29,52% yoy dibandingkan tahun 2019 yang sebesar USD11,79 miliar. Hal ini tidak terlepas dari faktor penurunan signifikan pada harga minyak mentah karena permintaan yang lesu akibat rendahnya aktivitas transportasi dan persediaan minyak yang tinggi di negara-negara produsen.

By sector, manufacturing remained as the largest contributor of non-oil and gas export in 2020 with 80.30%, followed by mining and others with 12.09% and agriculture with 2.52%.

In terms of export, oil and gas contributed 5.09% of the total export value or equivalent to USD8.31 billion, down 29.52% yoy from USD11.79 billion in 2019. This was due to significant drops in crude oil prices against sluggish demands caused by low transport activities and stock surplus in producing countries.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Pangsa Ekspor Nonmigas Indonesia Tahun 2020 (USD juta)
Pangsa Ekspor Nonmigas Indonesia Tahun 2020 (USD juta)

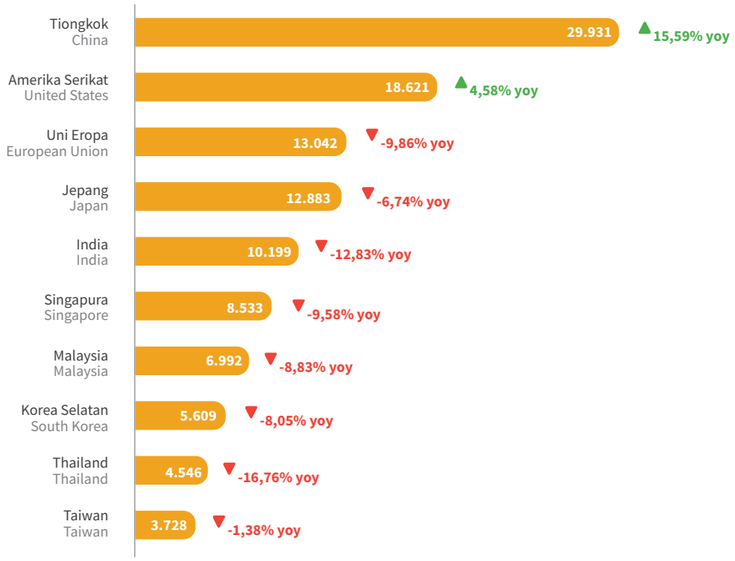

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik, diolah. | Statistics Indonesia, processed.

Pada tahun 2020, Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan pangsa 19,31% dari total ekspor nonmigas atau setara USD29,93 miliar, naik 15,59% yoy dari tahun 2019 yang sebesar USD25,89 miliar. Produk nonmigas utama yang diekspor ke Tiongkok adalah Besi dan Baja serta Batubara. Ekspor nonmigas ke AS juga meningkat 4,58% yoy mencapai USD18,62 miliar (pangsa sebesar 12,01% ekspor nonmigas), dari USD17,81 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu ekspor nonmigas ke Uni Eropa hanya mencapai USD13,04 miliar (pangsa 8,41% ekspor nonmigas), turun 9,86% yoy dari tahun sebelumnya (USD14,47 miliar).

Ekspor nonmigas nonmigas Indonesia menurut sektor industri pengolahan meningkat 2,95% yoy, yang disumbang oleh peningkatan terbesar pada ekspor besi/baja, demikian juga ekspor produk pertanian meningkat 13,98% yoy, sedangkan ekspor produk pertambangan dan lainnya menurun 20,70% yoy yang disumbang oleh menurunnya ekspor batubara.

In 2020, China stayed as Indonesia's key non-oil and gas export market, with a market share of 19.31% of the total non-oil and gas export or equivalent to the amount of USD29.93 billion. This volume increased by 15,59% yoy from USD25.89 billion in 2019, with iron and steel as the primary commodities. Indonesia's non-oil and gas export to the US also rose by 4.58% yoy to USD18.62 billion (accounted for 12.01% of non-oil and gas export) from USD17.81 billion in the previous year. Meanwhile, with the EU, Indonesia's export reached just USD13.04 billion (accounted for 8.41% of the total non-oil and gas export), down by 9.86% yoy from the previous year (USD14.47 billion).

By sector of non-oil and gas export, exports in the manufacturing sector grew by 2.95%, thanks to iron and steel contribution, agriculture rose by 13.98% yoy, while mining and other products decreased by 20.70%, primarily due to weaker coal export.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Ekspor Indonesia Menurut Sektor Tahun 2020 (USD Juta)
Indonesia's Export by Sector in 2020 (million USD)

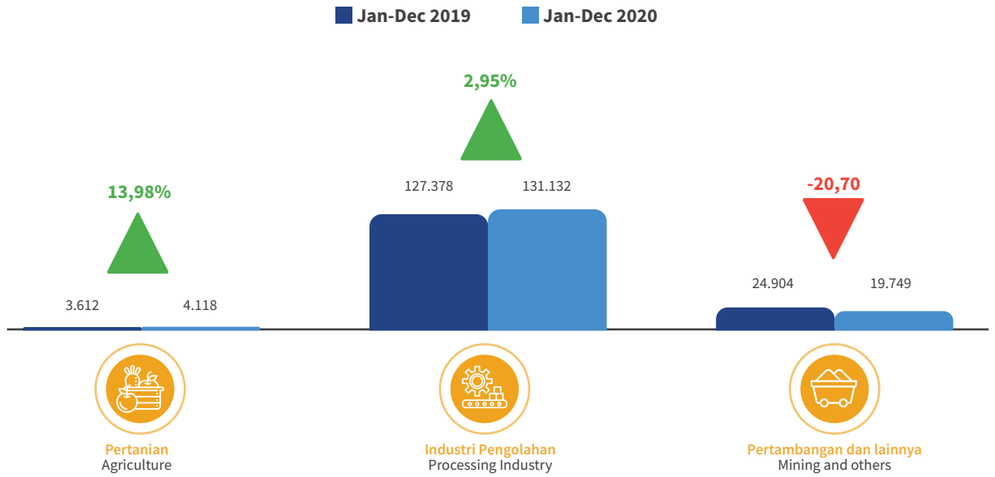

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik, diolah. | Statistics Indonesia, processed.

Perkembangan harga komoditas global yang membaik telah berpengaruh positif terhadap kinerja komoditas ekspor Indonesia di akhir tahun 2020. Harga komoditas energi khususnya Batubara, menunjukkan peningkatan sejak pertengahan Oktober 2020. Hal tersebut terutama di dorong peningkatan permintaan dari Tiongkok selaku salah satu konsumen dan importir Batubara terbesar di dunia. Sedangkan harga komoditas logam dasar global pun turut membaik di akhir tahun 2020, akibat data manufaktur yang solid khususnya dari konsumen logam industri terbesar dunia yaitu Tiongkok, serta peluncuran vaksin COVID-19 di beberapa ekonomi utama memberikan harapan dan mendorong peningkatan permintaan. Sementara harga minyak sawit meningkat mengikuti kenaikan harga minyak kedelai, serta adanya penurunan produksi khususnya di Malaysia karena kurangnya tenaga kerja di tengah adanya pembatasan akibat pandemi.

The positive trend of global commodity prices had favorable impacts on the performance of Indonesia's commodity exports, especially towards the end of 2020. Commodity prices, coal in particular, gradually improved since mid-October 2020. The improvement was primarily driven by the demand in China, the largest coal consumer and importer in the world. At the same time, global base metals commodity prices also improved at the end of 2020, due to solid manufacturing activities especially from the world's largest industrial metal consumer, China. Another driver of these positive developments introducing of COVID-19 vaccines in several major economies – creating hope and driving demands. Meanwhile, palm oil prices increased following the rise in soybean oil prices, combined with production decrease, especially in Malaysia due to workforce shortage amid restrictions because of the pandemic.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) vs Pertumbuhan Ekspor
Indonesia Export Commodity Price Index (IHKEI) vs Export Growth

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik, CEIC, World Bank, diolah. | Statistics Indonesia, CEIC, World Bank, processed.

Nilai impor tahun 2020 mencapai USD141,57 miliar atau terkontraksi di level -17,34% yoy dari nilai impor tahun 2019 (USD171,28 miliar). Penurunan ini menggambarkan terganggunya industri di dalam negeri akibat terdampak pandemi COVID-19. Pasalnya, sebagian besar impor Indonesia merupakan bahan baku atau penolong hingga 72,91% dan barang modal sebesar 16,74% untuk tujuan industri pengolahan. Sementara porsi impor produk konsumsi hanya sebesar 10,35%.

Import value in 2020 reached USD141.57 billion or contracted to -17.34% yoy from the import value in 2019 (USD171.28 billion). The decline reflected the disruption of domestic industries due to COVID-19 pandemic, since the majority of imported goods in Indonesia are raw materials or precursors accounted for 72.91% of import, and capital goods of 16.74% of import – all used in the manufacturing industry. While Import of consumption goods accounted for just 10.35% of the total import.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Perkembangan Impor Indonesia Periode 2019 – 2020
Indonesia's Import, 2019 – 2020

Keterangan Description	Nilai Impor FOB (Juta USD) Import value (million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran Terhadap Total Nilai Impor Share to total Import
	Dec-19	Nov-20	Dec-20	Jan-Dec 2019	Jan-Dec 20	Dec-20	Dec-20	Jan-Dec 20	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(mtm)	(yoy)	(yoy)	(Jan-Dec 2020)
Total Nilai Impor Total Import Value	**14.506,8**	**12.664,4**	**14.437,9**	**171.275,7**	**141.568,3**	🟡 **14,00%**	🟠 **-0,47%**	🔴 **-17,34%**	**100,00%**
Migas Oil and gas	2.133,2	1.085,0	1.481,8	21.885,3	14.256,8	🟢 36,57%	🟠 -30,54%	🔴 -34,86%	10,07%
Nonmigas Non-oil and gas	12.373,6	11.579,4	12.956,1	149.390,4	127.311,5	🟡 11,89%	🟢 4,71%	🔴 -14,78%	89,93%
Berdasarkan Penggunaan Barang By type of utilization									
Barang Konsumsi Consumption goods	1.651,9	1.300,9	1.715,7	16.454,6	14.655,7	🟢 31,89%	🟢 3,86%	🔴 -10,93%	10,35%
Bahan Baku/Penolong Raw materials/precursors	10.402,9	8.928,7	10.192,6	126.355,5	103.209,8	🟢 14,15%	🟠 -2,02%	🔴 -18,32%	72,91%
Barang Modal Capital goods	2.452,0	2.434,8	2.529,6	28.465,6	23.702,8	🟡 3,89%	🟢 3,16%	🔴 -16,73%	16,74%

Keterangan | Description:
🔴 = Tumbuh negatif (turun dari bulan sebelumnya) | negative growth (decline compared to previous month);
🟡 = Tumbuh negatif (tidak seburuk bulan sebelumnya, tetap di zona negatif) | negative growth (less contraction than previous month, still in the negative zone);
🟠 = Tumbuh positif (melambat dari bulan sebelumnya) | positive growth (lower than previous month);
🟢 = Tumbuh positif (meningkat dari bulan sebelumnya | positive growth (higher than previous month).

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik, diolah.| Statistics Indonesia, processed.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 tercatat surplus USD21,74 miliar, yang dikontribusikan oleh surplus nonmigas sebesar USD27,69 miliar dan defisit neraca migas sebesar USD5,95 miliar.

As such, Indonesia's trade balance in 2020 recorded a surplus amounting to USD21.74 billion, contributed by surplus in the non-oil and gas in the amount of USD27.69 billion and deficit in the oil and gas amounting to USD5.95 billion.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2019 - 2020
Indonesia Trade Balance, 2019 - 2020

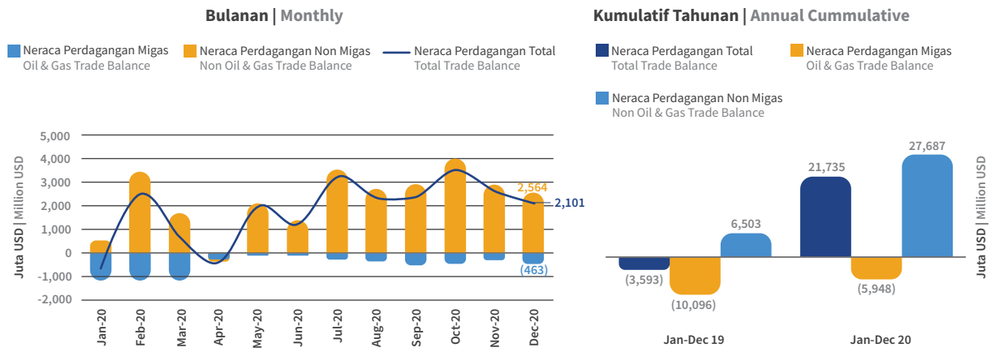

Nilai tukar Rupiah secara *point-to-point* (ptp) terdepresiasi 1,33% dan ditutup di level Rp14.050 per dolar AS pada 31 Desember 2020. Secara rerata keseluruhan tahun 2020, nilai tukar Rupiah melemah 2,82% di posisi Rp14.543 per dolar AS, dari Rp14.144 per dolar AS pada tahun 2019. Meskipun Rupiah terdepresiasi secara tahunan, depresiasi Rupiah lebih terbatas dibandingkan dengan pelemahan beberapa mata uang negara *peers* lainnya, seperti Real Brazil (BRL), Lira Turki (TRY) dan Rand Afrika Selatan (ZAR).

The exchange rate of rupiah was depreciated by 1.33% point-to-point (ptp) and was closed at Rp14,050 per US Dollar at 31 December 2020. On average, in 2020 rupiah weakened by 2.82% to Rp14,543 per USD, from Rp14,144 per USD in 2019. Despite the annual depreciation, the rupiah was, in fact, stronger compared to other peer currencies that recorded steeper depreciation, such as Real Brazil (BRL), Turkish Lira (TRY), and South African Rand (ZAR).

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Perkembangan Nilai Tukar Indonesia vs Peers
Indonesia Exchange Rate vs Peers

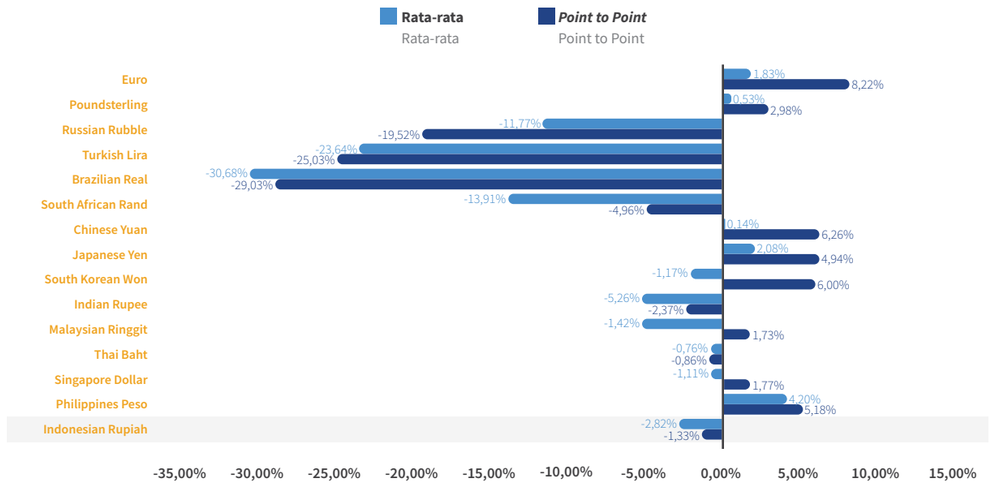

Note:
- *Point to point* (ptp) adalah persentase pertumbuhan posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019
  Point to point (ptp) represents the percent of growth as at 31 December 2020 compared to as at 31 December 2019
- Rata rata adalah persentase pertumbuhan rata rata selama periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dibandingkan dengan rata rata periode yang sama di bulan sebelumnya (1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019)
  Average is the average growth in percent from 1 January 2020 to 31 December 2020 compared to the average growth of the same period in the previous year (1 January 2019 to 31 December 2019)

Sumber | Source: Bloomberg, diolah. | Bloomberg, processed.

Perkembangan nilai tukar Rupiah secara umum masih terjaga didorong meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

The movement of rupiah was generally under control. It was also influenced by the inflow of foreign investments to the domestic money market, as uncertainties in the global market eased and investors embraced a more positive outlook towards Indonesia's economic prospects.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang disalurkan per Desember 2020 sebesar Rp5.481,6 triliun atau mengalami kontraksi di level -2,41% yoy. Kontraksi ini disebabkan oleh semua jenis kredit, baik produktif (Kredit Modal Kerja/KMK maupun Kredit Investasi/KI) dan konsumtif (Kredit Konsumsi/KK). Kredit produktif mengalami kontraksi di level -2,41% yoy dengan rincian: KMK mengalami kontraksi paling dalam di level -4,31% yoy, sementara itu KI dan KK masing-masing terkontraksi di level -0,85% yoy dan -0,76% yoy.

According to the banking statistics released by the Financial Services Authority (OJK), as of December 2020 banks disbursed credit amounting to Rp5,481.6 trillion. The number represented -2.41% yoy contraction, as recognition, both for production and consumption purposes, experienced a downturn. Productive credit contracted at 2.41% yoy, contributed primarily by the -4.31% contraction of the Working Capital Credit, while Investment Credit and Consumption Credit contracted at -0.85% yoy and -0.76% yoy, respectively.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Loans by Use

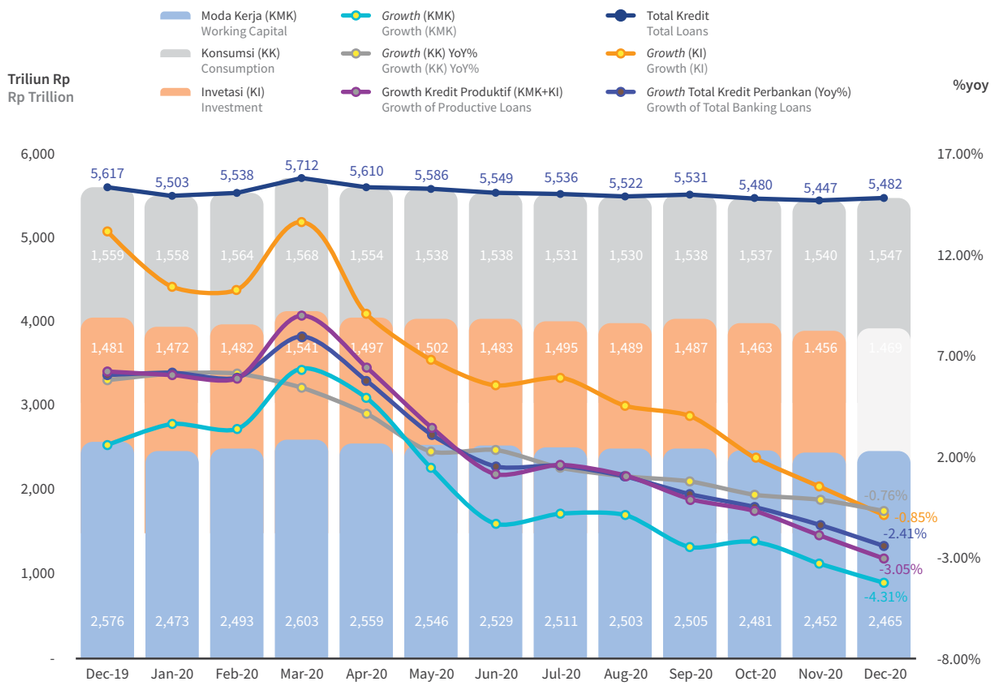

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, diolah. | Financial Services Authority and Bank Indonesia, processed.

Rasio *Non Performing Loans* (NPL) perbankan tercatat di level 3,06% pada Desember 2020. Rasio NPL Kredit produktif perbankan tercatat di level 3,56%, dengan rincian: 3,92% untuk KMK dan 2,95% untuk KI. Sementara itu Rasio NPL KK masih terjaga di level 1,79%.

Berdasarkan lapangan usaha, Rasio NPL tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,26%; diikuti oleh sektor industri pengolahan yang mencapai 4,58%; dan sektor perdagangan, restoran, dan hotel di level 4,54%. Sementara itu, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) perbankan tetap terjaga di level 23,89% per Desember 2020.

The banking non-performing loan (NPL) ratio stood at 3.06% as of December 2020. The NPL ratio of productive loans stood at 3.56%, consisting of: 3.92% NPL of Working Capital and 2.95% NPL of Investment. Meanwhile, Consumption Credit NPL was stable at 1.79%.

By industry sector, the highest NPL appeared in the mining and extraction sector at 7.26%, followed by the manufacturing industry at 4.58%, and trade, restaurants, and hotels at 4.54%. Meanwhile, the Capital Adequacy Ratio (CAR) of banks was at a sound level of 23.8% as at December 2020.

TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW

Rasio NPL berdasarkan Lapangan Usaha
NPL Ratio by Industry Sector

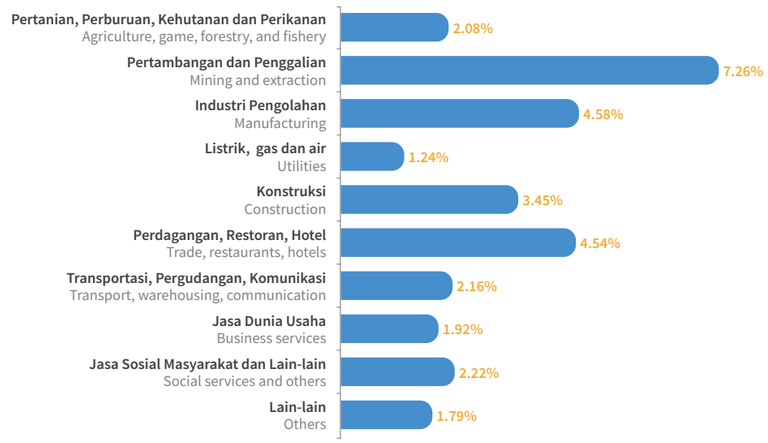

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah. | Financial Services Authority, processed.

Inflasi tahun 2020 tercatat sebesar 1,68% yoy atau merupakan level inflasi terendah sepanjang sejarah. Angka tersebut juga berada di bawah target sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebelumnya yaitu sebesar 2%-4%. Posisi cadangan devisa Indonesia mencapai USD135,9 miliar per Desember 2020, setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu tiga bulan impor.

Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) mengalami penurunan sebanyak 125 basis poin (bps) sepanjang tahun 2020 menjadi 3,75%. Penurunan tersebut merupakan langkah *pre-emptive* BI untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, serta sejalan dengan rendahnya inflasi.

In 2020, inflation stood at 1.68% yoy, or the lowest in history. It was also below the government's inflation rate target of 2%-4%. Indonesia's foreign exchange reserves amounted to US$135.9 billion as of December 2020 or equivalent to 10.2 times of import and 9.8 times of import and government external debt repayment, and above the international adequacy standard of an equivalent of 3-month import.

Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) was lowered by a total of 125 basis points (bps) in 2020 to 3.75%. This was Bank Indonesia's preemptive measure to maintain economic stability and boost economic recovery amid the pandemic, and to ensure that the rate was consistent with inflation level.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL

BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

Pada tahun 2020, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI atau Indonesia Eximbank) menghadapi tantangan yang sangat dinamis. Sebab di tengah tantangan perbaikan kualitas aset, LPEI juga dihadapkan dengan tantangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak multidimensi pada kehidupan perekonomian dan sosial.

Dalam menanggapi berbagai tantangan tersebut, LPEI telah melakukan adaptasi untuk memastikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tetap dapat terlaksana dengan baik, kinerja bisnis dan operasional tetap tumbuh berkesinambungan, serta untuk mendukung penuh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) Pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, amanat yang diemban oleh LPEI adalah untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui Pengembangan kapasitas usaha atau Penugasan Umum serta sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) pemerintah dalam menjalankan Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Dengan UU tersendiri ini (*Lex Specialist*), LPEI dapat berperan dan berfungsi secara efektif, beroperasi secara independen, serta memiliki sifat *sovereign status*.

The challenges encountered by Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) in 2020 were highly dynamic. Not only Indonesia Eximbank had to improve asset quality, but the institution also had to cope with the multidimensional impacts of the Corona Virus Disease 2019 pandemic (COVID-19), where both the economy and social life were affected.

Indonesia Eximbank responded to the situation by taking necessary adjustments that would ensure the continued exercise of its mandate under Law No. 2 of 2009, the sustainable growth of business and operations, and its support to the Government's National Economic Recovery Program (PEN Program) in tackling the pandemic.

Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank outlines the institution's mandate, which is distinguished into General Assignment, where Indonesia Eximbank provides support to government export policies by enhancing business capacity, as a Special Mission Vehicle (SMV), and an as institution that supports the National Interest Account. The specific statute (Lex Specialist) empowers the Company in playing its role and function fully and effectively as an independent, sovereign entity.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

Pengembangan kapasitas usaha atau Penugasan Umum LPEI adalah menyediakan produk dan layanan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi yang bertujuan meningkatkan ekspor nasional. LPEI menyediakan layanan pembiayaan yang meliputi berbagai segmen antara lain Korporasi, UKM, dan Syariah, serta dalam melaksanakan kegiatannya, LPEI juga dapat menjalankan peran untuk mengisi ceruk pasar *(fill the market gap).* LPEI juga dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan kategori *bankable* maupun *not bankable* yang mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Selain memberikan pembiayaan langsung kepada eksportir, LPEI juga bertindak menjadi *credit enhancement* melalui program penjaminan sehingga diharapkan meningkatkan pertumbuhan kredit oleh perbankan yang akan menjadi katalisator pemulihan ekonomi. Layanan lainnya yang diberikan LPEI adalah Asuransi yang mengcover risiko gagal bayar importir dan risiko selama pengapalan barang seperti *Trade Credit Insurance* dan *Marine Cargo Insurance*.

LPEI sadar bahwa pelaku UKM di Indonesia dapat terus ditingkatkan kelasnya menjadi penghasil devisa melalui peningkatan ekspor nasional, oleh karena itu LPEI juga memberikan jasa konsultasi untuk mencetak eksportir-eksportir baru melalui berbagai macam program seperti *Coaching Program for New Exporters (CPNE)* yang berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM berorientasi ekspor yang dilakukan oleh banyak UKM di berbagai kota di Indonesia. Selain dalam bentuk pelatihan, LPEI juga memberikan pendampingan dalam memasarkan produk-produk mitra binaan ke dalam *Global Marketplace.* LPEI juga melakukan pengembangan komunitas agar menghasilkan produk unggulan penghasil devisa melalui jasa konsultasi pengembangan masyarakat yang disebut dengan Desa Devisa, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan UKM dengan menjadi bagian dalam rantai pasokan ekspor global.

Under the General Assignment, Indonesia Eximbank enhances the capacity of businesses through Financing, Export Guarantee, Export Insurance, and Advisory Services aimed at increasing national exports. In financing, Indonesia Eximbank serves a wide range of segments from corporation, SMEs, and sharia businesses, and can offer financing services to fill the market gap. Indonesia Eximbank may provide financing to customers that have the potential to contributing to national exports regardless of their bankability. In addition to providing direct financing to exporters, Indonesia Eximbank may also offer credit enhancement through a guarantee program to boost the credit growth of banks as the catalysts of economic recovery. Other than that, Indonesia Eximbank also offers export insurance, such as trade credit insurance and marine cargo insurance, that covers the risk of default of importers and risks during shipment of goods.

Moreover, Indonesia Eximbank acknowledges the potential of Indonesian SMEs to grow and generate foreign exchange reserves by engaging in export activities. To realize this potential, Indonesia Eximbank provides advisory services to create new exporters, such as through the coaching program for new exporters (CPNE) that deliver training and mentoring to SMEs engaged in export activities, conducted in various Indonesian cities. In addition to training, Indonesia Eximbank also provides assistance to place the products of its partner SMEs in the global marketplace. For the community, Indonesia Eximbank carries out community development activities under "Desa Devisa" program, an initiative to nurture the potential of small businesses in producing export-quality products. Through "Desa Devisa", Indonesia Eximbank hopes to grow the welfare and revenues of SMEs and linking them with the global supply export chain.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

LPEI juga menjadi *Special Mission Vehicle* (SMV) Pemerintah dalam menjalankan Penugasan Khusus Ekspor (PKE), dengan menyediakan pembiayaan sesuai penugasan Pemerintah bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program *National Interest Account* (NIA).

Dengan pengembangan kapasitas usaha atau penugasan umum beserta penugasan khusus ekspor, LPEI berperan dalam mendorong peningkatan ekspor nasional baik melalui kegiatan menghasilkan devisa (*direct & indirect* ekspor), kegiatan menghemat devisa (substitusi impor), dan kegiatan meningkatkan kapasitas produksi nasional (penunjang ekspor) yang diberikan oleh LPEI kepada segmen korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta prinsip pembiayaan secara konvensional maupun Syariah.

Selain itu, LPEI juga bersinergi dengan Pemangku Kepentingan lainnya antara lain sinergi dengan lembaga jasa keuangan dalam maupun luar negeri untuk menunjang peran LPEI dalam pelaksanaan pembiayaan ekspor nasional seperti melakukan transaksi pasar uang, menerima dan melaporkan devisa hasil ekspor, dan melakukan lindung nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPEI juga bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan ekspor nasional antara lain dalam mengoptimalkan potensi ekspor di daerah tertentu ataupun riset dan pengembangan dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI selain bertindak sebagai *eximbank*, juga bertindak sebagai *export credit agency* bagi negara Republik Indonesia yang dapat bekerjasama dengan *eximbank* dan *export credit agency* negara lain.

Di tahun 2020, LPEI mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk turut serta aktif dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penugasan-penugasan yang diberikan antara lain dengan menyalurkan Program Penjaminan Pemerintah yang berfungsi sebagai *credit enhancement* bagi perbankan yang diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Indonesia Eximbank is also a Special Mission Vehicle (SMV) of the government that supports the National Interest Account (NIA); under this mandate, Indonesia Eximbank provides financing to transactions or projects that are not commercially viable but vital for Indonesia's policies or export programs.

Through its activities in general assignment and as an SMV, Indonesia Eximbank plays an important role in driving national exports through activities that generate foreign exchange (direct & indirect exports), activities that save foreign exchange (import substitution), and activities that increase the capacity of national production (export support). The support is provided to the corporate segment and SMEs using conventional or sharia-based principles.

In providing its financing, Indonesia Eximbank synergizes with other stakeholders, including domestic and foreign financial services, to get support in money market transactions, receiving and reporting foreign exchange proceeds from exports, and hedging as regulated in the laws and regulations. Indonesia Eximbank also works closely with the central government and local governments to optimize export potential in certain regions or research and development to expand national export programs. In addition to playing a role as an eximbank, the Company is also an export credit agency for the Republic of Indonesia and has the power to cooperate with other eximbanks and export credit agencies.

In 2020, Indonesia Eximbank was trusted by the government to participate in the National Economic Recovery Program (PEN). Indonesia Eximbank has been assigned to, among others, channel the government guarantee program credit enhancement for banks to accelerate national economic recovery.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

STRATEGI BISNIS TAHUN 2020

Dalam usahanya untuk memperbaiki kinerja yang berkelanjutan dan mencapai tujuan untuk menjadi *Export Agency* dengan kinerja tertinggi di ASEAN pada tahun 2025, LPEI menetapkan strategi 5 tahun ke depan yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. *Regain our Footing* (periode implementasi 2020–2021)
2. *Grow a Strong Core for LPEI & the country* (periode implementasi 2022-2023)
3. *Become a Lighthouse Export Agency* (periode implementasi 2024-2025)

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan bagi LPEI, dimana merupakan langkah pertama bagi LPEI dalam implementasi strategi 5 tahun yaitu *"Regain Our Footing"* yang bertujuan untuk mempersiapkan LPEI dengan fondasi yang kokoh untuk menjalankan mandatnya. Namun pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, memiliki dampak global dan domestik yang menyebabkan terpukulnya perekonomian dan juga kehidupan sosial.

Dalam menanggapi tantangan tersebut, LPEI di tahun 2020 fokus pada tiga aspek yang menjadi sasaran strategis di tahun 2020 yaitu:

1. Restrukturisasi dan efisiensi,
2. Menjalankan mandat dan bisnis secara selektif
3. Penguatan proses internal.

Ketiga aspek tersebut kemudian ditranslasikan menjadi 9 prioritas utama lembaga yang menjadi acuan dan ukuran keberhasilan dari penerapan tahap awal dari fase *"Regain Our Footing"* di tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Pengelolaan dan Perbaikan Pembiayaan NPL**
   LPEI berupaya mengoptimalkan proses restrukturisasi, *recovery*, dan penghapusbukuan dalam rangka penurunan portfolio pembiayaan dengan kategori *Non Performing Loan* (NPL). Selain memperbaiki portofolio pembiayaan yang sudah menjadi NPL, LPEI juga menjaga agar tidak terjadi penambahan portofolio NPL dengan melakukan beberapa hal antara lain pelaksanaan analisis risiko berupa penilaian yang komprehensif sesuai

BUSINESS STRATEGIES IN 2020

To sustainably improve its performance and be the best performing export agency in ASEAN by 2025, Indonesia Eximbank has identified a five-year strategy that is divided into three phases:

1. Regain our Footing (implemented 2020 – 2021)
2. Grow a Strong Core for Indonesia Eximbank & the country (implemented 2022-2023)
3. Become a Lighthouse Export Agency (implemented 2024-2025)

The year 2020 was a challenging year for Indonesia Eximbank and at the same time was the Company's first phase in its 5-year strategy. Through "Regain Our Footing", Indonesia Eximbank aimed at building a solid foundation to carry out its mandate. However, the COVID-19 pandemic that began in the first quarter of 2020 caused severe economic and social impacts.

In response, Indonesia Eximbank focused on three issues in 2020:

1. Restructuring and efficiency;
2. Being selective in implementing its mandate and business;
3. Strengthening internal process.

These aspects were translated into nine key priorities for Indonesia Eximbank. They were also the performance indicators of the Regain Our Footing phase in 2020:

1. **Managing and Improving NPL Financing**
   Indonesia Eximbank optimized its restructuring, recovery, and write off process to reduce Non-Performing Loan (NPL). In addition to portfolio improving, Indonesia Eximbank also took several measures to prevent the increase of NPL in its portfolio, such as by carrying out comprehensive risk analysis that adheres to the Company's prudence principle. The analysis covers a debtor's solvability, changes in financing terms and condition and

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

ketentuan prinsip kehati-hatian yang berlaku di LPEI, yang mencakup analisis terhadap kemampuan membayar debitur, perubahan syarat ketentuan yang berlaku (*term and condition*) dan analisis terhadap makro ekonomi; penetapan *rating* dan pemberian *credit line* terhadap calon debitur sebagai kontrol eksposur; pembatasan jangka waktu fasilitas yang sesuai dengan jangka waktu instrumen yang mendasari; persetujuan pembiayaan sesuai Komite Pembiayaan berdasarkan kewenangan yang berlaku; analisis secara historis maupun proyeksi; dan penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

macroeconomic analysis, application of rating and credit line on prospective debtors to control exposure; limitation of facility term in accordance with the duration of underlying instrument; financing approval based on Financing Committee's deliberation and applicable authority; historical analysis and projections; allowance for impairment losses (CKPN).

2. **Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Terdampak COVID-19**
   Implementasi relaksasi pembiayaan atas debitur-debitur LPEI yang terdampak COVID-19 sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah menjadi POJK Nomor 58/POJK.05/2020 saat menjelang akhir tahun 2020. Hal ini bertujuan menjaga kualitas pembiayaan LPEI dari pemburukan debitur akibat dampak COVID-19 dan sebagai upaya mengatasi penurunan kinerja nasabah ekspor.

2. **Financing Relaxation for COVID-19 Impacted Projects**
   Indonesia Eximbank implemented financing relaxation for COVID-19 impacted borrowers based on Law No. 2 of 2020 and based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of COVID-19 Pandemic for Nonbank Financial Services Institutions as amended by POJK No. 58/POJK.05/2020 towards the end of 2020. The relaxation aimed at protecting the Company's financing quality and to mitigate the borrowers' declining performance due to the COVID-19.

3. **Pengelolaan Likuiditas LPEI yang *Sustainable* dan Efisien**
   Untuk mendukung terjaganya likuiditas di sepanjang tahun 2020, LPEI telah melakukannya melalui pendanaan USD dan Rupiah serta perolehan pinjaman bilateral. LPEI juga bekerja sama dengan multilateral *agency*/Eximbank negara lain dalam mengelola likuiditas yang efisien.

3. **Sustainable and Efficient Liquidity Management**
   To manage liquidity throughout 2020, Indonesia Eximbank provided funding in USD and Rupiah and acquired bilateral loans. Indonesia Eximbank also cooperated with other multilateral agencies/other Eximbanks to efficiently manage liquidity.

4. **Penerapan *Cost Efficiency* secara Optimal**
   Efisiensi yang dilakukan LPEI antara lain dengan optimalisasi penggunaan *fixed asset* atau ruang kantor LPEI, pengelolaan konsultan secara selektif, serta penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa. LPEI juga senantiasa membangun budaya *cost efficiency* secara berkesinambungan dalam melakukan aktivitasnya.

4. **Optimum Cost Efficiency**
   Indonesia Eximbank enhanced its cost efficiency by, among others, optimizing the use of its office space as fixed assets, selective management of consultants, and improving procurement mechanisms. Indonesia Eximbank also continued to promote cost-efficiency as a culture in all activities.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

5. **Peningkatan Pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi, dan *Trade Finance***
   LPEI melakukan pengembangan bisnis dengan sangat selektif untuk menghindari potensi pemburukan kualitas aset kedepannya. LPEI juga terus menjalankan mandatnya untuk menyalurkan pembiayaan khusus NIA serta program Penjaminan Pemerintah.

5. **Improving Financing for NIA, Guarantee, Insurance, and Trade Finance**
   Indonesia Eximbank carried out selective business development activities to protect the institution from the future risk of asset impairment. Indonesia Eximbank also continued to carry out its mandate to provide NIA financing as well as government guarantee programs.

6. **Penguatan Organisasi Kelembagaan**
   LPEI meyakini organisasi yang *agile* dan relevan dengan kebutuhan dan dinamika bisnis harus didukung juga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu LPEI telah melakukan penyesuaian struktur organisasi, penyempurnaan struktur anggota dari komite-komite, memperkuat struktur organisasi pengelolaan aset bermasalah, serta meningkatkan kinerja dan kapabilitas SDM melalui berbagai macam program sertifikasi.

6. **Organizational Strengthening**
   Indonesia Eximbank believes an agile organization and relevant to business needs and dynamics need the right people. As such, Indonesia Eximbank made adjustments to its organizational structure, improved the membership of committees, strengthened the organizational structure of non-performing asset management, and improved the performance and capabilities of human resources through various certification programs.

7. **Penguatan Komunikasi kepada *Stakeholders***
   LPEI dalam menjaga komunikasi dengan para *Stakeholders* telah melaksanakan *Stakeholders engagement*, pemenuhan laporan secara berkala dan tepat waktu, serta menyampaikan *update* isu-isu strategis LPEI. Selain itu, LPEI juga melakukan media *monitoring* serta pengelolaan media digital seperti media sosial dan *website*.

7. **Improving Communication with Stakeholders**
   To maintain communication with stakeholders, Indonesia Eximbank carried out stakeholder engagement activities, provided regular and timely reports, and published updates on strategic issues that are relevant to the Company. The Company also conducted media monitoring and management of digital media, such as social media and websites.

8. **Pemenuhan Rekomendasi Auditor Eksternal**
   LPEI berkomitmen melakukan perbaikan salah satunya dengan melaksanakan rekomendasi hasil temuan auditor eksternal.

8. **Follow-up of External Auditor Recommendations**
   Indonesia Eximbank is committed to continuous improvement, including by following up recommendations of external auditors.

9. **Penguatan Operasional, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko**
   Dilakukan dengan melakukan penyempurnaan model bisnis, sistem, pembuatan *Management Information System* (MIS) *blueprint*, dan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Kemudian penguatan manajemen risiko antara lain dengan *Risk Management Framework* (*sui generis*), *Risk Appetite Statement* (RAS), *Portfolio Guideline*, dan sosialisasi pilar tata kelola lembaga.

9. **Strengthening Operations, Governance, and Risk Management**
   Indonesia Eximbank refined its business model and system, created the Management Information System (MIS) blueprint, and applied PSAK 71. In terms of risk management, Indonesia Eximbank improved its Risk Management Framework (sui generis), Risk Appetite Statement (RAS), Portfolio Guideline, and launched governance pillars.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

KINERJA BISNIS TAHUN 2020

Di tengah tantangan yang luar biasa di sepanjang tahun 2020, kinerja LPEI secara umum tetap mampu menunjukkan perbaikan, serta sembilan prioritas utama yang disusun telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terefleksi antara lain dari sisi permodalan, di mana LPEI dapat menguatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi 28,1% di tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebesar 17,3%.

Kemudian dari sisi kualitas pembiayaan, untuk NPL *gross* dapat ditahan pertumbuhannya 3% atau naik sebesar Rp699 miliar. Sedangkan NPL *net* dapat diturunkan 24% atau senilai Rp3,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan NPL *net* ini seiring dengan peningkatan akumulasi CKPN sebanyak 57% dari tahun lalu menjadi Rp17,7 triliun. Dengan upaya perbaikan kualitas pembiayaan tersebut, posisi rasio NPL *nett* dapat merendah menjadi 11,5% dibanding tahun 2019 yang sebesar 14,0%. Sementara rasio NPL *gross* menjadi 26,1% dari sebelumnya 23,4% di tahun 2019. Hal ini diikuti pula dengan peningkatan rasio NPL *coverage* yang terjaga menjadi 75% di akhir tahun 2020 dari sebelumnya 49% di tahun 2019.

Dari sisi pembiayaan selama tahun 2020, LPEI fokus pada pelaksanaan mandat melalui pembiayaan NIA yang meningkat menjadi Rp1,59 triliun atau bertumbuh 106% dibandingkan tahun lalu. Namun secara total, pembiayaan LPEI turun menjadi Rp90,4 triliun atau terkoreksi 8% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan fokus LPEI lebih kepada pada perbaikan kualitas aset serta bertumbuh secara selektif di tengah situasi ekonomi yang berat di hampir sepanjang tahun 2020.

Dari sisi pendapatan bunga, pencapaiannya memang mengalami penurunan sebesar 28% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp5,1 triliun di tahun 2020. Hal ini disebabkan laju pembiayaan harus menempuh jalur selektif dan adanya restorasi pada kualitas pembiayaan. Namun LPEI juga mampu melakukan efisiensi dengan penurunan beban bunga hingga 24% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp4,3 triliun yang dicapai dengan melalukan pengelolaan likuiditas secara lebih efektif.

Sementara dari sisi biaya umum dan administrasi, LPEI berhasil melakukan efisiensi dengan mengendalikannya menjadi Rp235 miliar per tahun 2020 atau dapat ditekan hingga 22% per dibandingkan tahun lalu. Beban CKPN pun turun signifikan dari sebelumnya sebesar Rp6,7 triliun di tahun 2019 menjadi Rp423 miliar di tahun 2020. Dengan berbagai upaya efisiensi tersebut, LPEI dapat mencatat laba bersih sebesar Rp288 miliar, atau kembali positif dibandingkan tahun 2019 yang menderita kerugian sebesar Rp4,7 triliun.

Adapun pencapaian LPEI dalam menjalankan mandat Penugasan Umum selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

BUSINESS PERFORMANCE IN 2020

Despite the extraordinary challenges in 2020, Indonesia Eximbank remained able to demonstrate improved performance and the nine priority activities were realized. The Company's performance could be seen from, among others the Capital Adequacy Ratio (CAR) that stood at 28.1% in 2020 compared to 17.3% in 2019.

In terms of financing quality, the Company managed to maintain the increase of gross NPL to 3% or by Rp699 billion. While net NPL decreased 24% or Rp3.3 trillion compared to the previous year. This was in line with the increase of CKPN accumulation by 57% from Rp17.7 trillion in 2019. Through the efforts to improve financing quality, net NPL was lowered to 11.5% from 14.0% in 2019, while gross NPL was 26.1% from 23.4% in 2019. An increase followed this in NPL coverage ratio maintained at 75% as at the end of 2020 from 49% in 2019.

In terms of financing, in 2020, Indonesia Eximbank focused on implementing its NIA financing mandate that grew to Rp1.59 trillion or by 106% compared to last year. However, in total, the Company financing decreased to Rp90.4 trillion or corrected by 8% compared to the previous year. This was due to the Institution's focus on assets quality improvement and selective growth amid the tough economic situation throughout the year.

The Company's interest income decreased by 28% from 2019 to Rp5.1 trillion in 2020, as Indonesia Eximbank had to be more selective, accompanied by measures to improve financing quality. However, Indonesia Eximbank successfully achieved cost efficiency by lowering interest expense by 24% to Rp4.3 trillion compared to previous year. This was achieved through improved effectiveness of liquidity management.

Meanwhile, in terms of general and administrative costs, Indonesia Eximbank was able to achieve cost-efficiency by lowering this component to Rp235 billion in 2020 or by 22% compared to 2019. CKPN's expenses also decreased significantly from Rp6.7 trillion in 2019 to Rp423 billion in 2020. Through these efficiency initiatives, LPEI reported a positive net income of Rp288 billion from net loss of Rp4.7 trillion in 2019.

In terms of the Company's performance in exercising its General Assignment mandate, the following table summarizes its position in the past three years.

Indikator	2018	2019	2020	Indicators
Kegiatan Usaha (Rp Miiar)				**Business Activities (Rp billion)**
Pembiayaan	108.859	97.807	90.408	Financing
Penjaminan	11.307	10.127	9.909	Guarantee
Asuransi	11.322	8.179	8.109	Insurance
Jumlah Kontrak				**Number of Contracts**
Pembiayaan	7.972	6.776	4.437	Financing
Penjaminan	1.181	1.060	724	Guarantee
Asuransi	880	780	639	Insurance
Jumlah Kontrak Pembiayaan				**The Number of Financing Contracts**
Berdasarkan Penggunaan Dana				**Based on Use of Funds**
Modal Kerja	6.054	4.972	3.036	Working Capital
Investasi	1.397	1.307	957	Investment
Lainnya	476	497	444	Others
Jumlah	7.927	6.776	4.437	Total
Jumlah Kontrak Penjaminan				**The Number of Guarantee Contracts**
Berdasarkan Jenis Penjaminan				**Based on Type of Guarantee**
Proyek	987	894	702	Project
Kepabeanan	182	153	12	Customs
Kredit Bank	5	4	4	Bank Loan
Importir	7	9	4	Importer
SBLC			2	SBLC
Jumlah	1.181	1.060	724	Total
Jumlah Kontrak Asuransi				**The Number of Insurance Contracts**
Berdasarkan Jenis Asuransi				**Based on The Type of Insurance**
Proteksi Piutang Dagang	372	574	623	Account Receivable Protection
Marine Cargo	157	206	16	Marine Cargo
Property All Risk	345	0	0	Property All Risk
Rekayasa	6	0	0	Engineering
Jumlah	880	780	639	Total

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

Terkait dengan pelaksanaan PKE yang telah diselesaikan LPEI telah memberikan dampak pada peningkatan penerimaan devisa, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dengan adanya aktivitas produksi. Selain itu, juga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di dunia internasional yang pada akhirnya menciptakan potensi ekspor jangka panjang. Sampai dengan saat ini, PKE dalam bentuk NIA yang dimulai sejak tahun 2015 telah menyelesaikan empat penugasan.

Terkait program NIA terbaru yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dengan Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI di tahun 2020 yaitu:

1. KMK Nomor 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor.
2. KMK Nomor 428/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia.
3. KMK No. 526/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sedangkan terkait peran sebagai SMV Pemerintah dalam rangka implementasi Program PEN, LPEI telah berhasil menyalurkan Rp567 miliar untuk Penjaminan Pemerintah. Pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi *credit enhancement* bagi perbankan dalam menyalurkan kredit sehingga mempercepat pemulihan roda perekonomian nasional. Selain itu, LPEI juga telah melakukan relaksasi kepada 125 debitur yang terdampak COVID-19 dengan total portofolio tercatat sebesar Rp27 triliun.

KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Selaku bagian dari ekosistem ekspor, LPEI senantiasa memperkuat sinergi kelembagaan baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Komunikasi aktif dan kerja sama kelembagaan dijalin bersama Kementerian/Lembaga terkait di dalam negeri, *Exim Bank*, *Export Credit Agency*, lembaga keuangan, lembaga multilateral di luar negeri, serta terlibat aktif dalam forum-forum internasional.

Hingga saat ini, LPEI telah memiliki hubungan korespondensi dengan 384 bank korespondensi yang tersebar di 68 negara dan terlibat aktif dalam forum internasional seperti:
1. Asian Exim Banks Forum (AEBF).
2. Global Network of Eximbanks and Development FI (G-NEXID).
3. Berne Union.
4. International Working Group (IWG) for Export Credit.
5. D20.
6. Aman Union.

Adapun kegiatan terkait sinergi kelembagaan yang dilakukan LPEI selama tahun 2020, antara lain:

- Partisipasi LPEI dalam *webinar series the Americas* yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada 7 dan 14 Agustus 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi perdagangan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Amerika. LPEI memberikan pandangan mengenai peluang Indonesia serta memberi pemahaman terkait dukungan yang dapat diberikan selaku *export credit agency*.

With respect to NIA, Indonesia Eximbank contributed to increasing revenues in foreign exchange, job opportunities, and productive domestic industry growth. LPEI also improved the competitiveness of Indonesian products in the global market, which would create export potential in the long term. Since NIA was first mandated to the Company in 2015, Indonesia Eximbank has completed four missions.

The recent NIA programs identified in the Finance Ministry Decision (KMK) on the Company's National Interest Account Assignments in 2020 are:

1. KMK No. 372/KMK.08/2020 on National Interest Account Assignment to Indonesia Eximbank in Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector.
2. KMK No. 428/KMK.08/2020 on National Interest Account Assignment to Indonesia Eximbank in Supporting Indonesian Aviation Industry.
3. KMK No. 526/KMK.08/2020 National Interest Account Assignment to Indonesia Eximbank in Providing Trade Finance Facility to Support the National Economic Recovery.

Furthermore, in its role as the Government SMV in the PEN program, Indonesia Eximbank disbursed Rp567 billion in Government Guarantee. The facility was expected to serve as credit enhancement for banks to accelerate the economic recovery. Finally, Indonesia Eximbank also applied credit relaxation to 125 of its COVID-affected borrowers that had a combined portfolio value of Rp27 trillion.

INSTITUTIONAL COOPERATION

As part of the export ecosystem, Indonesia Eximbank consistently strengthens its synergy with domestic and foreign institutions to improve its effectiveness in providing National Export Financing. Indonesia Eximbank actively communicates and collaborates with national ministries/institutions, other eximbanks, export credit agencies, various financial institutions, foreign multilateral institutions, and in international fora.

To date, Indonesia Eximbank engages with 384 correspondence banks in 68 countries and is part of the following international fora:

1. Asian Exim Banks Forum (AEBF)
2. Global Network of Eximbanks and Development FI (G-NEXID)
3. Berne Union
4. International Working Group (IWG) for Export Credit
5. D20
6. Aman Union.

The following are the Company's activities in 2020 as part of its institutional synergy efforts:

- Participation in the webinar series the Americas, organized by the Ministry of Foreign Affairs on 7 and 14 August 2020. The webinar aimed to explore trade potential between Indonesia and countries in the American continent. Indonesia Eximbank contributed its insights on Indonesia's opportunities and the support it could provide as an export credit agency.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

- LPEI berpartisipasi pada acara INA-LAC *Business Forum* 2020 melalui serangkaian kegiatan yaitu *webinar road to* INA-LAC pada 29 September 2020, peluncuran platform digital INA-LAC pada 9 Oktober 2020, dan Panel *Session* pada 9 November 2020. LPEI mengajak serta UKM ekspor binaan untuk berpartisipasi dalam pameran virtual agar mereka dapat memasarkan produk secara langsung kepada calon *buyer*.

- Participation in the INA-LAC Business Forum 2020, held as a series of activities consisted of INA-LAC webinar on 29 September 2020, launch if INA-LAC digital platform on 9 October 2020, and a panel session on 9 November 2020. Indonesia Eximbank invited its partner export-oriented MSEs to participate in the virtual expo and promoting their products directly to prospective buyers.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

- Partisipasi LPEI pada kegiatan promosi dagang virtual ke AFRIKA melalui serangkaian *webinar series* yang diselenggarakan bersama Kementerian Luar Negeri pada 23 dan 27 Oktober 2020. LPEI berkomitmen mendukung program pemerintah untuk memperluas ekspor ke pasar potensial seperti Afrika. Keterlibatan LPEI pada promosi dagang ini menunjukkan konsistensi LPEI menjalankan mandat yang diamanatkan oleh pemerintah.

- Participation in a virtual trade promo targeting the African market through a webinar series held by the Ministry of Foreign Affairs on 23 and 27 October 2020. Indonesia Eximbank supported the government's commitment to expanding export to potential markets, such as Africa. The Company's participation showed its consistency in exercising the government's mandate.

- Partisipasi aktif dalam pertemuan secara virtual di Asian Exim Banks Forum untuk saling bertukar informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh exim banks dan pemerintah negara anggota untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

- Active participation in the Asian EXIM Banks Forum virtual session to share the policies in different EXIM banks and governments in response to COVID-19.

- LPEI turut serta pada pertemuan virtual The Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) untuk melakukan pertukaran informasi mengenai dampak COVID-19 dan dampaknya terhadap *trade* negara *South-South*.

- LPEI menghadiri pertemuan virtual yang selenggarakan oleh Berne Union dengan agenda acara pertukaran informasi mengenai dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap kinerja *credit insurance* secara global, serta mengikuti *Training Short Term/Medium–Long Term* dan *Country Risk* Berne Union.

Informasi yang diperoleh dalam forum tersebut menjadi masukan bagi manajemen LPEI dalam mengambil langkah strategis guna mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Selain itu, pada tahun 2020 LPEI juga telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) tentang Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Ekspor dan Impor kepada Negara-negara Berkembang dalam Kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan, ditandatangani 8 Januari 2020.

- Kesepahaman Bersama antara Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) tentang Pengembangan Kapasitas untuk Menunjang Diplomasi Ekonomi, ditandatangani 8 Januari 2020.

- Participation in the virtual meeting of the Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) on COVID-19 and its impacts to south-south trade.

- Participation in a virtual session of the Berne Union to discuss COVID-19 and its impacts on global credit insurance and participation in the Short Term/ Medium–Long Term Training and Country Risk Berne Union.

All information gained by Indonesia Eximbank in those fora enriched the management's decision-making on strategic actions to alleviate COVID-19 impacts.

In addition, in 2020 Indonesia Eximbank signed the following Memorandum of Understanding (MoU):

- MoU with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on Capacity Building for Business Owners and Export-Import Stakeholders in Developing Countries under the South-South Cooperation Framework, executed on 8 January 2020.

- MoU with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia with University of Indonesia and Indonesia Eximbank on Capacity Building to Support the Economic Diplomacy, executed 8 January 2020.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL
BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

PENYERTAAN MODAL NEGARA 2020 - 2021

Selama tahun 2020, LPEI telah menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp10 triliun. Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan PMN-RI ke dalam Modal LPEI dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan PMN sebesar Rp5 triliun yang terdiri dari Rp 4 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1 triliun untuk melaksanakan Penugasan Khusus. PMN tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020.

Kemudian dalam rangka melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya perihal Penjaminan Pemerintah, LPEI telah menerima penambahan PMN sebesar Rp5 triliun berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Penambahan PMN dimaksud efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 30 Desember 2020.

Sedangkan PMN kepada LPEI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang merupakan Penugasan Umum sebesar Rp2,5 triliun ditujukan untuk peningkatan kapasitas usaha yang akan digunakan untuk mendukung peningkatan penyediaan pembiayaan dan pelaksanaan fungsi LPEI sebagai *credit enhancer*.

STATE CAPITAL PARTICIPATION 2020 - 2021

In 2020, Indonesia Eximbank received additional state capital investment (PMN) amounting to a total of Rp10 trillion. According to Government Regulation (GR) No. 40 of 2020 dated 21 July 2020 on the Provisioning of State Capital Participation for Indonesia Eximbank, the state may provide PMN amounting to Rp5 trillion, consisting of Rp4 trillion to expand LPEI's business capacity and Rp1 trillion to enable Indonesia Eximbank in exercising its NIA assignment. The PMN was effectively received and recorded by Indonesia Eximbank on 12 August 2020 and 18 August 2020, respectively.

To implement the National Economic Recovery Program specifically on the Government Guarantee, Indonesia Eximbank has also received additional PMN amounting to Rp5 trillion based on GR No. 78 of 2020 dated 30 December 2020. The addition of PMN was effectively received and recorded by Indonesia Eximbank on 30 December 2020.

Going forward, in the 2021 state budget (APBN), Indonesia Eximbank has been earmarked to receive Rp2.5 trillion of PMN for the Company's General Assignment on supporting business capacity. Indonesia Eximbank will use the fund to provide financing and to exercise its role

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL

BUSINESS AND OPERATIONAL REVIEW

Sementara alokasi untuk penugasan khusus NIA sebesar Rp2,5 triliun digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus dari Pemerintah atas sektor yang memiliki potensi ekspor yaitu industri tertentu, UMKM berbasis ekspor, penerbangan, dan industri lainnya.

Arah pengembangan kegiatan LPEI dalam lima tahun ke depan ditunjukkan dengan adanya pergeseran fungsi dari semula sebagian besar kegiatan berupa fungsi *financier* terutama kepada korporasi menjadi lebih seimbang dengan porsi UKM Ekspor dan peningkatan fungsi *credit enhancer*. Dengan adanya penambahan PMN tersebut diharapkan akan berdampak pada tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang kompetitif karena struktur pendanaan yang lebih baik akan mendorong penurunan *cost of fund* (CoF) LPEI, dan akan mendorong eksportir lebih kompetitif dibandingkan pesaing.

Manfaat yang diharapkan dari penambahan PMN kepada LPEI tahun 2021 antara lain berupa penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional, terciptanya pasar ekspor baru, eksportir baru, produk unggulan ekspor baru maupun kombinasi ketiganya, dan peningkatan aktivitas investasi dalam negeri. Hal ini diharapkan mampu berdampak pada peningkatan ekspor nasional dan perolehan devisa negara guna memperbaiki defisit neraca perdagangan serta pendapatan negara berupa dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.

as a credit enhancer. Another Rp2.5 trillion has also been appropriated for NIA, focusing on industry sectors with export potential, export-oriented MSEs, the aviation industry, and other industries.

In the next five years, the Company's activities will be expanded as shown from the adjustments in its roles. Initially focusing its activities as a financier of corporate customers, the Company's portfolio is now more diverse with more export-oriented SMEs, and the Company's function as credit enhancer. The additional PMN is expected to lower the Company's cost of funds (CoF); with improved funding structure, Indonesia Eximbank will be able to offer competitive export financing and Indonesian exporters can excel from its competitors.

For 2021, the additional PMN is expected to strengthen the competitiveness of domestic goods and services in the international market, to enable entry to new export markets, to create new exports, and to create new leading export commodities, as well as increase in domestic investments. In turn, the national export performance can grow, trade balance deficit narrowed, and state revenues in foreign exchange, taxes, and non-tax revenues can improve.

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PENUGASAN KHUSUS

NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Penugasan khusus atau National Interest Account (NIA) kepada LPEI menjadi strategis di tahun 2020, utamanya dalam mendukung upaya Pemerintah menangani dampak COVID-19 pandemi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Selama tahun 2020 LPEI melakukan pendampingan dalam proses perumusan program PKE baru di tahun 2020 dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah. Terdapat tiga Program PKE baru sudah diterbitkan Pemerintah pada tahun 2020 yaitu PKE untuk mendukung sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor, PKE Industri Penerbangan, dan PKE Trade Finance.

In 2020, the National Interest Account to Indonesia Eximbank was strategic, particularly in supporting the Government's efforts to deal with the impact of the COVID-19 pandemic on Indonesia's exports performance. Throughout 2020, Indonesia Eximbank assisted in the process of formulating a new PKE program, in order to support the Government's National Economic Recovery program. There are three new PKE programs that have been issued by the Government in 2020, such as the PKE which supports the export-oriented Small and Medium Enterprises (SME), PKE Aviation Industry and PKE Trade Finance.

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Melalui program *National Interest Account* (NIA), Pemerintah telah memberikan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) kepada LPEI untuk menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi kepada pelaku ekspor atas transaksi yang secara komersial sulit dilakukan tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan/Program Ekspor Nasional.

Program NIA diharapkan dapat memberikan pembiayaan dengan *term & conditions* yang kompetitif. Sehingga bisa meningkatkan daya saing serta *value-added* bagi produk/jasa dari pelaku ekspor dalam bersaing dengan kompetitor dari negara lain, serta pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan ekspor nasional sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah secara berkelanjutan.

Strategi Tahun 2020

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 di hampir seluruh negara telah memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan pada tahun 2020. Pandemi memberikan tantangan berupa tekanan kepada perekonomian baik dari sisi *supply* maupun *demand* serta telah menyebabkan melambatnya aktivitas perdagangan global, termasuk di Indonesia.

Berikut beberapa dampak ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19 di tahun 2020 antara lain:

a. Dengan adanya *lockdown* di berbagai negara menyebabkan kinerja ekonomi menurun tajam dimana konsumsi terganggu, investasi terhambat, serta ekspor-impor terkontraksi.
b. Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Sehingga mengakibatkan terganggunya rantai pasokan secara keseluruhan.
c. Terjadinya penurunan permintaan agregat dari berbagai komoditas yang mengakibatkan sektor usaha menjadi semakin terpukul hingga memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.
d. Volatilitas dan gejolak sektor keuangan dirasakan seketika sejak munculnya wabah yang mengakibatkan turunnya *confidence* dari para investor dan terjadinya *capital flight*. Disamping itu, sektor keuangan juga terdampak akibat menurunnya kinerja sektor riil dimana kualitas pembiayaan, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.
e. Ketidakpastian global dan terganggunya stabilitas pasar keuangan mendorong tingkat volatilitas harga komoditas internasional.

Through the National Interest Account (NIA) program, the Government has provided a Specific Export Assignment to Indonesia Eximbank for export financing facilities. This is provided to exporters through Financing, Guarantee and/or Insurance for transactions that are commercially difficult but necessary, as to support the National Export Policy/Programs.

The NIA program is expected to provide financing with competitive terms & conditions, in order to increase competitiveness and value-added products/services from exporters competing with competitors from other countries. Moreover, it is eventually expected to increase the national exports in accordance with the Government's policies.

2020 Strategy

The impact of COVID-19 pandemic throughout the world, has created a domino effect on the social, economic and financial aspects in 2020. The pandemic presents challenges by pressuring the economy, both from the supply and demand side. Furthermore, it has caused a slowdown in global trade activities, including in Indonesia.

The following are some of the economic impacts caused by the COVID-19 pandemic in 2020:

a. Due to the lockdown in various countries, economic performance declined sharply. Also, consumption was disrupted, investment was hindered, and exports and imports contracted.
b. The fast and widespread nature of COVID-19 stopped economic activities that absorb labor in various sectors, resulting in disruption of the supply chain as a whole.
c. There has been a decrease in aggregate demand for various commodities, which devastated the business sector triggering massive layoffs.
d. The volatility and turmoil of the financial sector was felt immediately since the start of the outbreak, resulting in decreased confidence from investors and capital flight. Additionally, the financial sector was also affected by the decline in the performance of the real sector where the quality of financing, profitability and solvency of companies were under pressure.
e. The global uncertainty and disruption to the stability of the financial market has stimulated the level of volatility in international commodity prices.

Pelaku Eksportir Indonesia menjadi salah satu pihak yang terdampak oleh pandemi COVID-19 baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Permasalahan yang dihadapi oleh para Eksportir dari sisi *supply* adalah terganggunya proses pembelian bahan baku untuk produksi (*non-delivery/delay*). Sedangkan dari sisi *demand* terjadinya penurunan permintaan, penundaan pembayaran barang yang telah dikirim, serta terganggunya pengiriman yang disebabkan baik karena terbatasnya aktivitas logistik dan pelabuhan di negara tujuan, maupun atas penundaan pengiriman barang atas permintaan *buyer*.

Adapun inisiatif strategi yang telah dilakukan LPEI untuk percepatan pelaksanaan program PKE dan optimalisasi pemanfaatan dana Penugasan Khusus pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan Komite PKE dan stakeholder terkait dalam rangka percepatan implementasi atas pelaksanaan masing-masing program penugasan yang telah diberikan Pemerintah kepada LPEI.
b. Menyiapkan analisa dampak COVID-19 terhadap portofolio pembiayaan PKE, serta melakukan koordinasi dengan Komite PKE terkait inisiatif program yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku ekspor yang terdampak COVID-19 khususnya dukungan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
c. Melakukan pendampingan kepada Komite PKE dalam proses penyusunan program PKE baru di tahun 2020 dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah. Terdapat tiga Program PKE baru sudah diterbitkan Pemerintah pada tahun 2020 yaitu PKE untuk mendukung sektor UKM berorientasi ekspor, PKE Industri Penerbangan, dan PKE Trade Finance.
d. *Close monitoring* atas pelaksanaan PKE Kereta, PKE Pesawat Udara, PKE Kawasan, PKE Pariwisata, PKE UKM, PKE Industri Penerbangan, dan PKE *Trade Finance* dengan berkoordinasi bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, pelaku ekspor, dan pihak

Indonesian Exporters are one of the parties affected by the COVID-19 pandemic both in terms of supply and demand. From the supply side, the exporters shall address the disruption in the process of purchasing raw materials for production (non-delivery/delay). Whereas, on demand side, there has been a decrease in demand, delays in payment of goods that have been dispatched, and disruption of delivery due either to limited logistical activities and ports in the destination country, or to delays in delivery of goods at the request of the buyer.

The strategic initiatives that have been carried out by Indonesia Eximbank to accelerate the implementation of NIA program and optimize the use of Special Assignment funds in 2020 are as follows:

a. Coordinating with the NIA Committee and related stakeholders in order to accelerate the implementation of each assignment program that has been given by the Government to the Company.
b. Preparing an analysis of the impact of COVID-19 on NIA financing portfolios, as well as coordinating with the NIA Committee on program initiatives that can be carried out to help exporters affected by COVID-19, particularly to support Small and Medium Enterprises (SMEs).
c. Assisting the NIA Committee in the process of drafting a new NIA program in 2020 in order to support the Government's National Economic Recovery program. There are three New NIA Programs that have been issued by the Government in 2020: NIA to support the export-oriented SME sector, NIA Aviation Industry, and NIA Trade Finance.
d. Close monitoring of the implementation of NIA Kereta, NIA Aircraft, NIA Area, NIA Tourism, NIA SMEs, NIA Aviation Industry, and NIA Trade Finance. Coordinating with related Ministries and Institutions

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

terkait lainnya dalam rangka akselerasi pelaksanaan PKE dimaksud.

e. Menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PKE UKM dan PKE Trade Finance.
f. Menyiapkan konsep usulan penyempurnaan tata kelola & penguatan manajemen risiko program PKE.
g. Menyiapkan kajian untuk mengukur developmental impact atas pelaksanaan program PKE yang dibantu oleh konsultan independen untuk melakukan kajian outcomes atas pelaksanaan PKE.
h. Berpartisipasi aktif mendampingi Kemenlu dan Kemendag melakukan diplomasi ekonomi dalam upaya penetrasi produk/jasa Indonesia ke *overseas market* khususnya pasar non-tradisional.

(K/L), exporters, and other related parties in order to accelerate the implementation of NIA.

e. Preparing the necessary infrastructure for the implementation of NIA SMEs and NIA Trade Finance.
f. Preparing draft proposals for improving governance and strengthening the risk management of NIA program.
g. Preparing a study to measure the developmental impact on the implementation of NIA program, which is assisted by an independent consultant to conduct an outcome study.
h. Actively participating in accompanying the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Trade in carrying out economic diplomacy, in efforts to advance Indonesian products/services to the overseas markets, especially in non-traditional markets.

Kinerja Tahun 2020

Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima LPEI untuk melaksanakan PKE per 31 Desember 2020 sebesar Rp6,2 triliun telah dialokasikan secara penuh ke dalam tujuh program yaitu PKE kereta, PKE Pesawat Udara, PKE KEK Mandalika, PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, PKE UKM, PKE Industri Penerbangan, dan PKE *Trade Finance*.

2020 Performance

The total State Equity Participation (SEP) received by Indonesia Eximbank to implement NIA on 31 December 2020 amounted to Rp6.2 trillion. The fund has been fully allocated into seven programs, NIA trains, NIA Aircraft, NIA KEK Mandalika, NIA for Africa, South and East Asia Tengah, NIA SME, NIA Aviation Industry, and NIA Trade Finance.

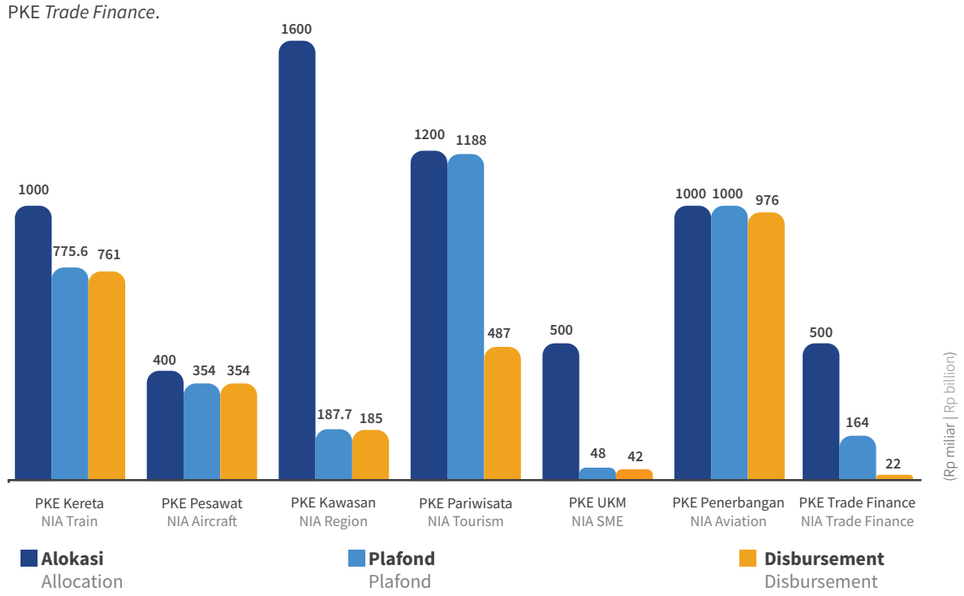

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Kondisi pandemi telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan program PKE *on-going* di tahun 2020, di mana terdapat beberapa potensi proyek yang menjadi di *hold* proses negosiasi serta proses *delivery* produk yang terhambat akibat adanya *lockdown* di negara tujuan ekspor. Berikut disampaikan detail terkait dampak pandemi terhadap pelaksanaan program PKE:

The conditions resulting from the pandemic have had an impact on the implementation of on-going NIA programs in 2020. Several potential projects that are being held in the negotiation process and the product delivery process have been hindered due to the lockdown measures in export destination countries. The following are details regarding the impact of the pandemic on the implementation of NIA programs:

Program PKE Program PKE	Negara Tujuan Ekspor Negara Tujuan Ekspor	Progres Pelaksanaan Sampai Dengan Tahun 2020 Progres Pelaksanaan Sampai Dengan Tahun 2020
PKE Kereta Penumpang dan Gerbong Barang **KMK** **No.513/KMK.08/2018** **Tanggal 17 Juli 2018** **Alokasi Dana:** **Rp 1 triliun**	Bangladesh	• Pembiayaan modal kerja sebesar Rp775 miliar kepada perusahaan BUMN produsen kereta terkait kontrak pengadaan 250 kereta dengan Bangladesh *Railways*. • Perusahaan BUMN produsen kereta telah menyelesaikan pengiriman 250 kereta kepada Bangladesh *Railway* dan fasilitas pembiayaan telah lunas. • Jangka waktu penugasan telah berakhir pada 31 Desember 2020 dan direncanakan untuk digabung dengan PKE Pesawat Udara menjadi PKE Industri Strategis/Industri Unggulan.
NIA Passenger Trains and Freight Carriers **KMK** **No.513/KMK.08/2018** **Dated 17 July 2018** **Budget Allocation:** **RP 1 trillion**	Bangladesh	• A working capital financing of Rp775 billion to state-owned railroad manufacturers, related to the 250-train procurement contract with Bangladesh Railways. • The state-owned railway company has completed the delivery of 250 trains to the Bangladesh Railway and the financing facility has been paid off. • The term of assignment has ended on 31 December 2020 and it is planned to be merged with NIA Aircraft to become the NIA Strategic Industry/Leading Industry.
PKE Pesawat Udara **KMK** **No.512/KMK.08/2018** **Tanggal 17 Juli 2018** **Alokasi Dana:** **Rp400 miliar**	Nepal & Senegal	• Pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp354 miliar kepada perusahaan BUMN produsen pesawat udara untuk pengerjaan kontrak pengadaan pesawat CN-235 kepada Nepalese *Army* dan Senegal *Airforce*. • Perusahaan BUMN produsen pesawat udara telah melakukan *ferry flight* pesawat CN-235 ke Nepal *Airforce* pada Oktober 2019. • Pengiriman pesawat CN-235 kepada Senegal *Airforce* diproyeksikan akan dilakukan Maret 2021. • Jangka waktu penugasan telah berakhir pada 31 Desember 2020 dan direncanakan untuk digabung dengan PKE Kereta menjadi PKE Industri Strategis.
NIA Aircraft **KMK** **No.512/KMK.08/2018** **Dated 17 July 2018** **Budget Allocation:** **Rp400 billion**	Nepal & Senegal	• A working capital financing of Rp354 billion for state-owned aircraft manufacturers, regarding the contract on the procurement of CN-235 aircraft to the Nepalese Army and Senegal Airforce. • On October 2019, the state-owned aircraft manufacturer company carried out a ferry flight for CN-235 aircraft to Nepal Airforce. • Delivery of the CN-235 aircraft to Senegal Airforce is projected to take place in March 2021. • The term of assignment has ended on 31 December 2020 and it is planned to be merged with NIA Trains, to become the NIA for Strategic Industry.

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Program PKE Program PKE	Negara Tujuan Ekspor Negara Tujuan Ekspor	Progres Pelaksanaan Sampai Dengan Tahun 2020 Progres Pelaksanaan Sampai Dengan Tahun 2020
PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah **KMK No.01/KMK.08/2019 Tanggal 2 Januari 2019** **Alokasi Dana: Rp1,6 triliun**	**Aljazair**	• Pembiayaan proyek pembangunan *lodgement* oleh perusahaan BUMN Karya di Aljazair dengan plafon pembiayaan modal kerja sebesar Rp187 miliar. • Pada tahun 2020, pengerjaan proyek di Aljazair telah selesai dan pembiayaan modal kerja PKE telah lunas. • Sisa dana PKE Kawasan yang belum terutilisasi di alokasikan untuk pembiayaan atas beberapa *on-going pipelines project* di tiga Kawasan baik pelaku UKM, BUMN dan Non-BUMN.
NIA Africa, South Asia and the Middle East **KMK No.01/KMK.08/2019 Dated 2 January 2019** **Budget Allocation: Rp1,6 trillion**	Algeria	• A working capital financing ceiling of Rp187 billion for the funding of lodgment development projects by BUMN Karya in Algeria. • Project work in Algeria has been completed and NIA working capital financing has been paid off in 2020. • The remaining NIA area funds that have not been utilized, are allocated to finance several on-going pipelines projects in three areas such as the SMEs, SOEs and Non-SOEs.
PKE Pengembangan Pariwisata KEK Mandalika **KMK No.685/KMK.08/2019 Tanggal 27 Agustus 2019** **Alokasi Dana: Rp1,2 triliun**	Mandalika (Ekspor jasa moda 3)	• Per 31 Desember 2020, telah dilakukan pencairan fasilitas PKE sebesar Rp487 miliar terkait dengan pengerjaan infrastruktur dasar (sirkuit dan non-sirkuit). Diproyeksikan fasilitas Rp1,18 triliun akan ditarik penuh oleh ITDC pada Triwulan IV 2021 sesuai dengan perkembangan progres fisik pelaksanaan proyek pengembangan Kawasan pariwisata KEK Mandalika.
NIA for Tourism Development in KEK Mandalika **KMK No.685/KMK.08/2019 Dated 27 August 2019** **Budget Allocation: Rp 1,2 trillion**	Mandalika (Export of modal 3 Services)	• A disbursement of NIA facilities amounting to Rp487 billion, relating to the work on basic infrastructure (circuit and non-circuit) as of 31 December 2020. It is projected that the Rp1.18 trillion facility will be fully withdrawn by ITDC in the fourth quarter of 2021 in accordance with the physical progress of the implementation of the Mandalika SEZ tourism development project.
PKE UKM Berorientasi Eskpor **KMK No.372/KMK.08/2020 Tanggal 11 Agustus 2020** **Alokasi Dana: Rp500 miliar**	Semua Negara	• Terhitung September 2020, sebanyak 13 Debitur PKE UKM yang telah direalisasi dengan nominal realisasi sebesar Rp42 miliar. • Akselerasi proses evaluasi *pipelines* calon debitur PKE UKM pada tahun 2021.
NIA SMEs Export Oriented **KMK No.372/KMK.08/2020 Dated 11 August 2020** **Budget Allocation: Rp500 billion**	All Countries	• As of September 2020, 13 borrowers of NIA SMEs have been realized with a nominal value of Rp42 billion. • Acceleration of the pipeline's evaluation process for the prospective NIA SMEs borrowers in 2021.

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Program PKE Program PKE	Negara Tujuan Ekspor Negara Tujuan Ekspor	Progres Pelaksanaan Sampai Dengan Tahun 2020 Progres Pelaksanaan Sampai Dengan Tahun 2020
PKE Industri Penerbangan **KMK No.428/KMK.08/2020 Tanggal 23 September 2020** **Alokasi Dana: Rp1 triliun**	Semua Negara	• Telah dilakukan tanda tangan Perjanjian Kredit pada 6 Oktober 2020. • Pemberian fasilitas modal kerja kepada perusahaan BUMN Industri Penerbangan dengan plafon pembiayaan sebesar Rp1 triliun. • Telah dilakukan realisasi pencairan sebesar Rp976,6 miliar pada Kuartal IV 2020.
NIA Aviation Industry **KMK No.428/KMK.08/2020 Dated 23 September 2020** **Alokasi Dana: Rp1 triliun**	All Countries	• Signed Credit Agreement on 6 October 2020. • A financing ceiling of Rp1 trillion for the working capital facilities for state-owned aviation industry companies. • Disbursements of Rp976.6 billion were made in the fourth quarter of 2020.
PKE Trade Finance **KMK No.526/KMK.08/2020 tanggal 11 November 2020** **Alokasi Dana: Rp500 miliar**	Semua Negara	• Total debitur yang telah disetujui adalah lima debitur dengan total plafon *equivalent* Rp164 miliar. • Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, belum terdapat pencairan fasilitas pembiayaan PKE TF. Telah terdapat utilisasi *non cash loan* (*Open LC*) sebesar Rp22 miliar pada tahun 2020. • Penarikan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan *underlying* dokumen. • Akselerasi proses evaluasi *pipelines* calon debitur PKE TF pada tahun 2021.
NIA Trade Finance **KMK No.526/KMK.08/2020 Dated 11 November 2020** **Budget Allocation: Rp500 billion**	All Countries	• Five total approved borrowers with a total ceiling equivalent to Rp164 billion. • As of 31 December 2020, there has been no disbursement of NIA TF financing facilities. In 2020, there has been a non-cash loan (Open LC) utilization of Rp22 billion. • Withdrawals will be made in stages according to the underlying document. • Acceleration of the pipeline's evaluation process for the NIA TF prospective debtors in 2021.

Sehubungan dengan akibat dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, LPEI sebagai *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan berinisatif untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah melalui pelaksanaan tiga inisiatif program PKE di tahun 2020 sebagai stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN). Penjelasan lebih lanjut ketiga inisiatif program PKE dimaksud tergambar dalam bagan sebagai berikut:

Regarding the impact of the COVID-19 pandemic in 2020, Indonesia Eximbank, as the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV), has taken the initiative to provide support to the Government. This is carried out through the implementation of three NIA program initiatives, as a stimulus for the National Economic Recovery Program (NER Program). Further explanation of the three NIA program initiatives is illustrated in the following chart:

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Stimulus Program PKE dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Dampak Pandemi Covid-19
NIA Programs Stimulus for the National Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic Impact

TUJUAN
OBJECTIVES

1. Menjaga kinerja pelaku usaha/eksportir yang terdampak Covid-19 untuk:
   - Mengurangi tekanan likuiditas akibat turunnya permintaan dan lockdown di sejumlah negara;
   - Memenuhi kewajiban kepada Bank/Lembaga Keuangan dan supplier;
   - Memenuhi permintaan dan menjaga hubungan baik dengan buyer yang masih beroperasi.
2. Stimulus Pemerintah dalam rangka mengurangi dampak ekonomi yang lebih luas dari Covid-19.

1. Maintain the performance of businessmen/exporters impacted by the Covid-19 to:
   - Reduce liquidity pressure due to the decrease of demand and lockdown in several countries;
   - Fulfill obligations to the Banks/Financial Institutions and suppliers;
   - Fulfill demand and maintain good relations with buyers that remain operating.
2. Government Stimulus to reduce wider economic impact from Covid-19.

PKE UKM
NIA SME

- Alokasi dana PKE Rp500M.
- UKM/Koperasi berorientasi ekspor.
- *Bundling* Pembiayaan UKM, Asuransi TCI LPEI Komersial, dan Penjaminan kredit ASKRINDO.
- Suku bunga 6%, p.a (*Include all*).
- Jaminan ASKRINDO 70% plus jaminan tambahan minimal 30%
- Jangka waktu pinjaman 3 - 5 tahun.

- Allocation of NIA fund of Rp500 Billion.
- SME/Cooperatives of export oriented.
- Financing Bundling of SME, Insurance TCI Commercial Indonesia Eximbank, and Loan Guarantee ASKRINDO.
- 6% interest rate, p.a (include all).
- 70% Guarantee ASKRINDO plus additional guarantee of minimum 30%.
- Loan period of 3 – 5 years.

KMK No.372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020
KMK No.372/KMK.08/2020 dated 11 August 2020

PKE Trade Finance
NIA Trade Finance

- Alokasi dana PKE Rp500M.
- Eksportir yang berkinerja baik.
- Kriteria produk : Produk Karet, Kopi, Furniture, Alas Kaki, TPT, dan Makanan Olahan.
- Fasilitas *trade underlying* (*pre-shipment* dan *post-shipment*).
- Suku Bunga : IDR 5-6% p.a
  USD 1-2.5% p.a

- Allocation of NIA fund of Rp500 Billion.
- Exporters with good performance.
- Product Criteria: Rubber Product, Coffee, Furniture, Sandals, TPT, and Processing Food.
- Trade underlying facility (pre-shipment and post-shipment).
- Interest rate: IDR 5-6% p.a
  USD 1-2.5% p.a

KMK No.526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020
KMK No.526/KMK.08/2020 dated 18 November 2020

PKE Industri Penerbangan
NIA Aviation Industry

- Alokasi dana PKE Rp1T.
- Fasilitas Pembiayaan, penjaminan dan/atau Asuransi.
- Suku bunga pinjaman maksimal sebesar SBN sesuai tenor.

- Allocation of NIA fund of Rp1 trillion.
- Financing, Guarantee and/or Insurance facilities.
- Maximum loan interest rate of Government Bonds according to tenor.

KMK No.428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020
KMK No.428/KMK.08/2020 dated 23 September 2020

PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Rencana Strategis Tahun 2021
Pada tahun 2021, terdapat beberapa rencana strategis LPEI terkait dengan pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor dengan rincian sebagai berikut:

- Optimalisasi *disbursement* dana PKE yang telah dialokasikan ke dalam masing-masing program PKE sesuai dengan desain masing-masing program yang telah ditetapkan Pemerintah. Sebagai tambahan, LPEI akan terus melaksanakan penugasan dalam rangka memberikan dukungan atas program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah melalui dukungan pembiayaan PKE kepada pelaku UKM dan sektor-sektor industri yang menjadi prioritas Pemerintah.
- Terdapat rencana penambahan dana PMN PKE tahun 2021 sebesar Rp2,5 triliun. Oleh karena itu, LPEI akan melakukan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam merumuskan program PKE baru di tahun 2021 bersama-sama dengan Komite PKE. Terdapat beberapa inisiatif terkait dengan rencana program PKE baru di 2021 antara lain PKE untuk mendukung industri strategis, PKE untuk mendukung program substitusi impor pemerintah khususnya dalam industri farmasi (bahan baku obat), PKE untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan PKE lain yang menjadi *interest* dari Pemerintah.
- Penguatan *regulatory framework* PKE baik secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2021, ditargetkan untuk melakukan penyempurnaan tata kelola PKE (revisi PMK No.198/2017) yang akan dibantu oleh *reputable independent consultant* untuk melakukan kajian dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program PKE.
- Penguatan organisasi dan *people* (peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai) terkait dengan pelaksanaan program PKE di tahun 2021.
- Melakukan kegiatan *benchmarking* program sejenis yang dilakukan oleh Eximbank/ECA negara lain.
- *Close monitoring* atas pelaksanaan PKE Kawasan, PKE KEK Mandalika, PKE UKM, PKE Industri Penerbangan dan PKE *Trade Finance* dengan berkoordinasi bersama K/L terkait, pelaku ekspor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PKE di tahun 2021.

Strategic Plan for 2021
There are several strategic plans of Indonesia Eximbank related to the implementation of Special Assignments in 2021, with the following details:

- Optimizing the disbursement of NIA funds that have been allocated to each NIA program according to the design of each program that has been determined by the Government. Additionally, the Company will continue to carry out assignments in order to provide support for the National Economic Recovery program carried out by the Government through NIA financing support for SMEs and industrial sectors, which are Government priorities.
- Plan to increase SEP of NIA funds in 2021 amounting to Rp2.5 trillion. To that end, Indonesia Eximbank will coordinate with the related Ministries/Institutions and the NIA Committee in formulating a new NIA program. Moreover, there are several initiatives related to the new NIA program in 2021, including NIA to support strategic industries, NIA to support government import substitution programs (especially in the pharmaceutical industry (medicinal raw materials)), NIA to support the development of the tourism sector and other NIAs which are in the interest of the Government.
- Strengthening the NIA regulatory framework both internally and externally. In 2021, it is targeted to improve NIA governance (revised PMK No. 198/2017) which will be assisted by a reputable independent consultant to conduct studies and recommendations.
- Strengthening the organization and the people (enhancing the competence and capacity of employees) related to the implementation of the NIA program in 2021.
- Conducting similar benchmarking program activities conducted by Eximbank/ECA in other countries.
- Close monitoring of the implementation of NIA Regions, NIA KEK Mandalika, NIA SME, NIA Aviation Industry and NIA Trade Finance in coordination with related Ministries/Agencies, exporters, and other related parties in order to optimize the implementation of NIa in 2021.

PEMBIAYAAN

FINANCING

Upaya LPEI memperbaiki kualitas pembiayaan menunjukkan hasil yang signifikan. LPEI juga mampu menjaga bisnis segmen pembiayaan dengan baik, di tengah terjadinya pandemi COVID-19 di hampir sepanjang tahun 2020.

Indonesia Eximbank's efforts to improve the quality of financing have delivered significant results. In the midst of the COVID-19 pandemic for most of 2020, Indonesia Eximbank was able to maintain the financing segment business well.

.

PEMBIAYAAN

FINANCING

Sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian bangsa. Sesuai dengan mandat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI adalah lembaga pembiayaan independen yang dibentuk untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis melalui fasilitas pembiayaan, penjaminan, Asuransi dan jasa lainnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor, dan mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Adapun strategi pembiayaan ekspor nasional yaitu dengan cara menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, serta meningkatkan kapasitas produksi nasional.

LPEI memberikan pembiayaan ekspor dalam bentuk Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Kredit Investasi Ekspor (KIE), dan *Trade Finance* untuk segmen usaha Korporasi maupun Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor (UKME) yang berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor atau kegiatan penunjang ekspor dengan domisili di dalam atau di luar negeri. Selain melakukan kegiatan usaha secara konvensional, LPEI juga memberikan pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan LPEI dalam bentuk KMKE, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Sedangkan pembiayaan dalam bentuk KIE, antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin; ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru; pembiayaan proyek seperti pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan pembiayaan

The foreign trade sector is one of the factors supporting the growth, equity and stability of the national economy to improve the welfare, progress and independence of the nation. In accordance with the mandate set out in Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank is an independent financing institution established to accelerate the growth rate of Indonesia's foreign trade and increase the competitiveness of business actors through financing, underwriting, insurance and other services.

The government has established a basic policy for national export financing. It aims to create a business climate that is conducive to increasing national exports, accelerating the increase in national exports, helping to increase national production capacity that is highly competitive and has advantages for exports, and encourages the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives to develop export-oriented products. The national export financing strategy will generate foreign exchange, save domestic foreign exchange, and increase national production capacity.

Indonesia Eximbank provides export financing through Export Working Capital Credit (EWCC), Investment Export Credit (IEC), and Trade Finance for the Corporate segment and Export-oriented Small and Medium Enterprises (ESME). This may or may not be in the form of a legal entity, including individuals who carry out export activities or export support activities based in the country or overseas. Apart from conducting conventional business activities, Indonesia Eximbank also provides export financing based on sharia principles.

Indonesia Eximbank financing through EWCC includes financing for the procurement of raw or supporting materials, purchasing of raw materials from overseas, replacing or maintaining components and production facilities. Meanwhile, financing through IEC includes financing for machine modernization; business expansion including construction and expansion of new factories; project financing, such as construction of construction projects, infrastructure, exploration and exploitation activities, as well as supporting industries at home and overseas. In addition to the financing for exporters, Indonesia Eximbank also provides financing to overseas

PEMBIAYAAN
FINANCING

kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

Kinerja pembiayaan LPEI relatif berkembang moderat selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Situasi ekonomi global dan domestik yang sulit pada beberapa tahun terakhir antara lain disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menekan volume perdagangan dunia, ditambah dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak luas pada multidimensi baik perekonomian maupun sosial.

Meski berada di dalam situasi yang sulit tersebut, LPEI mampu merealisasikan target total pembiayaan tahun 2020 hingga 94,11% atau senilai Rp90,4 triliun. Pembiayaan tersebut mayoritas diberikan dalam bentuk Kredit Modal Kerja (52,59%) dan Kredit Investasi (47,30%) dari total pembiayaan bruto tahun 2020.

Di saat yang bersamaan fokus LPEI dalam hal perbaikan kualitas pembiayaan menunjukkan perbaikan yang signifikan, dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan *Non Perfoming Loans* (NPL) *net* menjadi 11,5% per tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebesar 14,0%, hasil pencapaian di tengah situasi kondisi perekonomian yang tidak kondusif ini tentunya menghembuskan angin segar dan optimisme dalam perbaikan kinerja LPEI kedepannya.

PEMBIAYAAN SEGMEN KORPORASI

Pembiayaan segmen korporasi adalah pembiayaan untuk tujuan bersifat produktif yang diberikan kepada badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan, dengan bentuk perusahaan atau perorangan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. Swasta yang mempunyai *Gross Annual Sales* (GAS) > Eq. Rp500 miliar;
b. Swasta dengan limit pembiayaan > Eq. Rp200 miliar;
c. Lembaga Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
d. Badan Usaha Asing;
e. Perusahaan multinasional;
f. Debitur pembiayaan sindikasi;

buyers to import goods and services produced in Indonesia (buyer's credit).

The financing performance of Indonesia Eximbank has developed relatively moderately over the last three years (2018-2020). The difficult global and domestic economic situation in recent years has been caused, among others, by the trade war between the United States and China which depressed the volume of world trade, as well as the outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic which has a significant impact economically and socially.

Regardless of the difficult situation, Indonesia Eximbank was able to realize the total financing target in 2020 of up to 94.11% or Rp90.4 trillion. The majority of this financing is provided through Working Capital Loans (52.59%) and Investment Loans (47.30%) of the total gross financing in 2020.

At the same time, despite the situation, Indonesia Eximbank's focus in enhancing the quality of financing did show a significant improvement compared to previous year by the decrease of net Non-Performing Loans (NPL) to 11.5% in 2020, compared to 14.0% in 2019. The results of this achievement in the midst of unfavorable economic conditions have certainly brought a breath of fresh air and optimism in improving the performance of Indonesia Eximbank going forward.

CORPORATE FINANCING

Corporate financing is financing for productive purposes provided to business entities, both legal and non-legal entities, both companies or individuals that meet one of the following criteria:

a. Private sector with Gross Annual Sales (GAS) > Eq. Rp500 billion;
b. Private sector with financing limit> Eq. Rp200 billion;
c. Central Government Institutions or State-Owned Enterprises (SOEs);
d. Foreign corporation;
e. Multinational companies;
f. Syndicated financing debtors;

PEMBIAYAAN
FINANCING

g. *Buyer's credit*;
h. *Overseas Financing*; dan/atau
i. Pembiayaan kepada badan usaha di negara lain.

Strategi Tahun 2020

Tantangan pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian global maupun nasional mengalami tekanan signifikan selama tahun 2020. Sehingga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja sebagian besar para pelaku usaha ataupun para Eksportir, termasuk para debitur LPEI di segmen Korporasi. Pada debitur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, beberapa industri/sektor yang terkena efek negatif pandemi selama tahun 2020 antara lain pariwisata, penerbangan, manufaktur, perkebunan, konstruksi, jasa pengelola bandar udara, transportasi, dan jasa pengusahaan jalan tol.

Terganggunya kegiatan usaha para debitur Korporasi tentunya turut mempengaruhi performa pembiayaan LPEI di tahun 2020, khususnya di segmen Korporasi seperti penurunan pendapatan bunga. Hal ini terjadi karena LPEI harus melakukan restrukturisasi penangguhan bunga dan penyesuaian tingkat suku bunga guna menyelamatkan kelangsungan usaha para debitur Korporasi yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, pertumbuhan *outstanding* pembiayaan juga mengalami tersendat lantaran terjadinya penurunan permintaan fasilitas pembiayaan baru.

Strategi Pemerintah dalam memulihkan perekonomian akibat dari pandemi COVID-19 yaitu dengan melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), LPEI sebagai SMV pemerintah juga berperan sebagai *countercyclical* yang artinya di saat pembiayaan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan lain mengalami perlambatan, LPEI diharapkan tetap menyalurkan pembiayaan agar roda perekonomian terus berputar. Dalam mendukung penuh hal tersebut segmen pembiayaan segmen Korporasi tetap berjalan dan dijaga dengan baik selama tahun 2020 antara lain:

- Melakukan identifikasi dan memetakan kondisi debitur eksisting atas dampak dari pandemi COVID-19, yaitu keberlangsungan usaha debitur (ringan, sedang, atau berat).

g. Buyer's credit;
h. Overseas Financing; and or
i. Financing to business entities in other countries.

2020 Strategies

The challenges of the COVID-19 pandemic have put the global and national economies under significant pressure during 2020. It has a direct and indirect impact on the performance of most business practitioners or exporters, including Indonesia Eximbank borrowers in the Corporate segment. For state-owned enterprises (SOEs) borrowers, for example, several industries/sectors affected by the negative impacts of the pandemic during 2020 include tourism, aviation, manufacturing, plantations, construction, airport management services, transportation, and toll road management services.

The disruption in the business activities of Corporate borrowers also affected Indonesia Eximbank's financing performance in 2020, particularly in the Corporate segment, resulting in a decrease in interest income. This occurred as Indonesia Eximbank had to carry out restructuring of interest suspension and adjustment on interest rates to save the business continuity of corporate borrowers impacted by the COVID-19 pandemic. Moreover, growth in outstanding financing has also stalled due to a decline in demand for new financing facilities.

The Government's strategy in restoring the economy as a result of the COVID-19 pandemic is by carrying out the National Economic Recovery (NER) program. Indonesia Eximbank, as the government's SMV, also acts as a countercyclical, which means that when the financing by banks or other financial institutions is slowing down, Indonesia Eximbank is expected to continue to disburse financing hence continue to drive the economic growth. In fully supporting this, the Corporate financing segment continues to perform and was well maintained throughout 2020, among others by:

- Identifying and mapping the condition of the existing borrowers on the impact of the COVID-19 pandemic, particularly the continuity of the borrowers' business (mild, moderate, or severe).

PEMBIAYAAN
FINANCING

- Tindakan antisipasi agar tetap dapat mendukung kegiatan usaha debitur antar lain dengan melakukan restrukturisasi.
- Pemberian pembiayaan dilakukan secara selektif yang tetap memberikan dampak baik bagi devisa dengan beberapa pertimbangan seperti sektor industri, rekam jejak debitur maupun sponsor, dan kebutuhan pembiayaan dalam situasi pandemi.
- Monitoring secara ketat terhadap kinerja keuangan debitur agar tidak terjadi risiko gagal bayar kewajiban.

- Anticipation measures in order to continue supporting the borrowers' business activities, among others, by restructuring.
- Financing is carried out selectively, which still has a positive impact on foreign exchange with several considerations such as the industrial sector, track record of borrowers and sponsors, and financing needs during the pandemic.
- Close monitoring of the borrowers' financial performance hence there is no risk of defaulting on liabilities.

Kinerja Tahun 2020

Segmen Korporasi

Outstanding pembiayaan segmen Korporasi tercatat sebesar Rp59,3 triliun di tahun 2020, atau terkontraksi dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp65,7 triliun.

2020 Performance

Corporate Segment

Outstanding financing for the Corporate segment was recorded at Rp59.3 trillion in 2020, compared to 2019 which was Rp65.7 trillion.

Pembiayaan LPEI di Segmen Korporasi Tahun 2019-2020
LPEI Financing in the Corporate Segment 2019-2020

Tahun Year	*Outstanding* (Rp Juta) Outstanding (Rp Million)	Δ
2019	65.656.902	na
2020	59.287.234	-9,70%

Portofolio pembiayaan segmen Korporasi mayoritas telah disalurkan kepada industri/sektor Perindustrian (66,38%), Jasa-jasa Dunia Usaha (10,89%), Perdagangan, Restoran dan Hotel (8,50%), Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian (5,44%), Pertambangan (5,04%), Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi (2,41%), Konstruksi (1,33%).

The majority of financing portfolio for Corporate segment has been disbursed to the ndustry (66,38%), Business Services (10,89%), Commerce, Restaurant and Hotel (8,50%), Agriculture, Hunting and Agricultural Facilities (5,44%), Mining (5,04%), Transportation, Warehouse, Communication (2,41%), Construction (1,33%).

PEMBIAYAAN
FINANCING

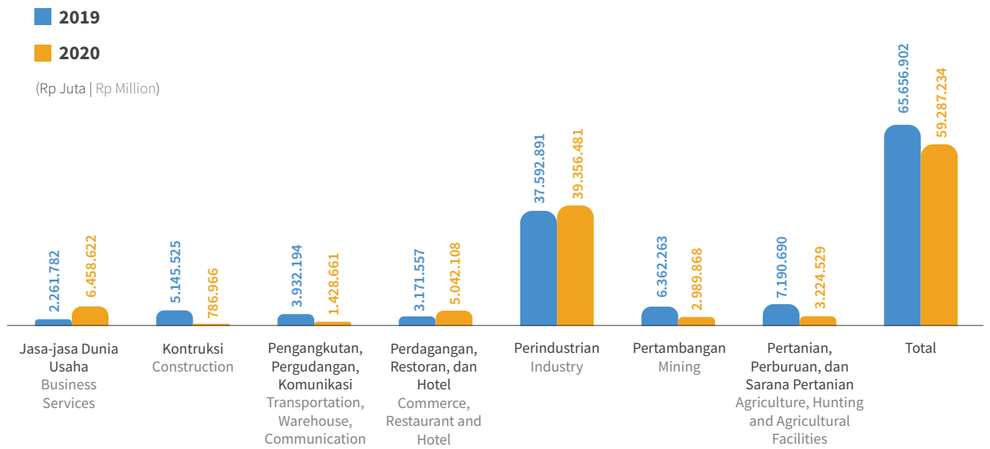

Pada tahun 2020, pembiayaan Korporasi berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan adalah KMKE (53,80%) dan KIE (46,20%).

In 2020, corporate financing based on the types of facilities provided are: EWCC (53.80%) and IEC (46.20%).

Outstanding berdasarkan Jenis Fasilitas
Outstanding by Facility Type

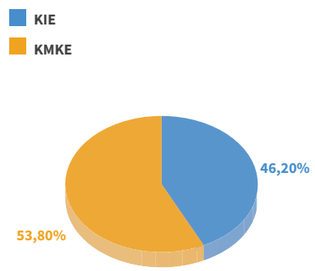

Outstanding berdasarkan Valuta
Outstanding by Valuta

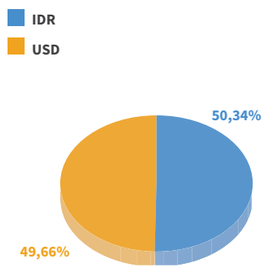

Outstanding terhadap Kesesuaian ALCO
Outstanding by ALCO Compliance

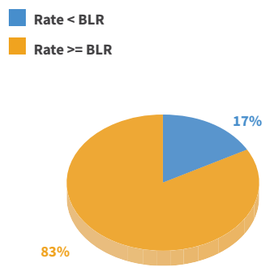

PEMBIAYAAN
FINANCING

Kinerja *outstanding* pembiayaan LPEI pada segmen Korporasi BUMN (termasuk NIA) mencapai Rp14,4 triliun di tahun 2020, atau 118% dari target yang ditetapkan. Kendati demikian, pencapaian pembiayaan tersebut mengalami kontraksi sebesar 8,7% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp14,2 triliun. Penurunan *outstanding* sebesar Rp1,1 triliun tersebut dikarenakan tidak terdapat penambahan plafon fasilitas baru akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kinerja debitur BUMN, serta adanya *reprofiling* debitur BUMN (pelunasan) dengan justifikasi ekspor rendah khususnya debitur sektor *multifinance*, jasa pengusahaan jalan tol, kelistrikan dan jasa konstruksi.

Indonesia Eximbank financing outstanding performance in the SOE Corporate segment (including NIA) reached Rp14.4 trillion in 2020, 107% of the set target. Nevertheless, the achievement of this financing declined by 8.7% compared to Rp14.2 trillion in 2019. The decrease in Rp1.1 trillion outstanding was due to the absence of additional ceiling facilities due to the COVID-19 pandemic. The pandemic had an impact on the performance of SOE borrowers, as well as the reprofiling of SOE borrowers (repayment) with low export justification, particularly for multi-sector borrowers, toll road management services, electricity and construction services.

Pembiayaan LPEI di Segmen Korporasi BUMN tahun 2020
Indonesia Eximbank Financing in SOE Corporate Segment

Uraian Description	Target (Rp Miliar) Target (Rp Billion)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Rp Billion)	Pencapaian Achievement
Penyaluran PKE Baru New Disbursement NIA	1.400	1.461	104%
Grand Total (Termasuk NIA) Grand Total (Including NIA)	12.198	14.419	118%

Berdasarkan portofolio bidang usaha segmen Korporasi BUMN yang dibiayai oleh LPEI hingga akhir tahun 2020 secara urutan terbesar disalurkan kepada industri/sektor lainnya (42%), pengangkutan (20%), perkebunan (18%), konstruksi (9%), perindustrian 7%, dan kawasan pariwisata (4%). Sedangkan dari sisi porsi jumlah debitur Korporasi BUMN per jenis kredit secara urutan terbesar adalah KIE (45%), KMKE (41%), dan Trade Finance (14%).

From the business sector portfolio, the largest financing of SOE Corporate segment by Indonesia Eximbank until the end of 2020 was disbursed to other industries/sectors (42%), transportation (20%), plantations (18%), construction (9%), industrial 7%, and tourism areas (4%). Whereas, in terms of the largest portion of SOE corporate borrowers per type of credit, the largest order was IEC (45%), EWCC (41%), and Trade Finance (14%).

OS per Bidang Usaha
OS per Business Field

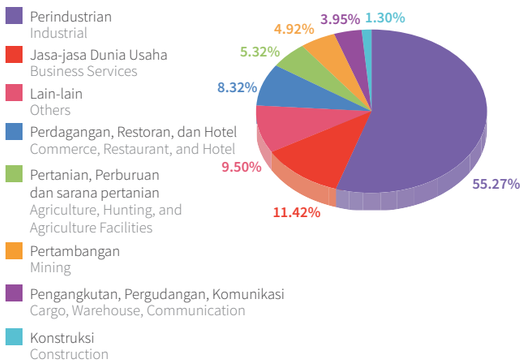

Jumlah Debitur per Jenis Kredit
Number of Borrowers per Loan Types

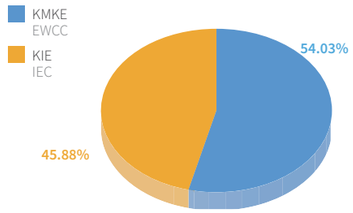

PEMBIAYAAN
FINANCING

Adapun peristiwa penting terkait bisnis pembiayaan Korporasi BUMN selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk Kawasan pariwisata KEK Mandalika dengan limit Rp1,1 triliun dan *disbursement* sebesar Rp487 miliar.
2. Realisasi program PKE untuk Industri Penerbangan dengan limit Rp1 triliun dan *disbursement* sebesar Rp976 miliar.
3. Melakukan restrukturisasi terhadap debitur terdampak COVID-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
4. Turut serta aktif membantu merealisasikan Program PEN dalam bentuk Penjaminan Korporasi padat karya non BUMN dan Pinjaman Investasi Pemerintah untuk BUMN perkebunan.

The key events related to SOE Corporate financing business during 2020 are as follows:

1. Realization of National Interest Account (NIA) program for the Mandalika SEZ tourism area with a limit of Rp1.1 trillion and a disbursement of Rp487 billion.
2. Realization of NIA program for the Aviation Industry with a limit of Rp1 trillion and a disbursement of Rp976 billion.
3. Restructuring for borrowers impacted by the COVID-19 in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 11/POJK.03/2020 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Corona Virus Disease 2019 outbreak.
4. Actively participating in succeeding the realization of NER Program through a non-SOE labor-intensive Corporate Guarantee and Government Investment Loans for plantation SOEs.

PEMBIAYAAN SEGMEN UMKM BERORIENTASI EKSPOR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (Kebijakan Dasar PEN), segmentasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu kepada Undang-Undang UKM yang berlaku. Sedangkan segmentasi Usaha Menengah berorientasi Ekspor adalah pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp50 miliar sampai dengan Rp500 miliar.

Sementara berdasarkan Lampiran I PDE Nomor 0004/PDE/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Manual Operasional Pembiayaan LPEI, segmentasi Pembiayaan UMKM adalah Eksportir yang memiliki badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki GAS tahun terakhir ≤ Eqv. Rp500 miliar dan atau total plafon pembiayaan ≤ Eqv. Rp200 miliar. Sedangkan untuk debitur baru, total pembiayaan awal diberikan dalam bentuk KMKE dan atau KIE ≤ Eqv. Rp150 miliar.

EXPORT-ORIENTED MSME FINANCING

Pursuant to the Government Regulation No. 43 of 2019, on the Basic Policy for National Export Financing, the segmentation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) refers to the applicable SME Law. Meanwhile, the Export-oriented Medium Business segmentation refers to business practitioners with annual sales greater than Rp50 billion to Rp500 billion.

As stipulated in Appendix I of PDE No. 0004/PDE/02/2019 dated 19 February 2019 on Indonesia Eximbank Financing Operating Manual, the segmentation of MSME Financing are exporters with legal and non-legal business entities. It also includes individuals who carry out export activities directly or indirectly with last year's GAS of ≤ Eqv. Rp500 billion and or total financing ceiling of ≤ Eqv. Rp200 billion. Meanwhile, for new borrowers, the total initial financing is provided through EWCC and/or IEC ≤ Eqv. Rp150 billion.

PEMBIAYAAN
FINANCING

Dalam hal debitur pembiayaan UKME eksisting dengan total fasilitas pembiayaan telah mencapai Rp200 miliar, namun bermaksud mengajukan tambahan fasilitas, maka unit kerja pengelolanya akan ditetapkan kemudian dengan mempertimbangkan karakteristik usaha debitur oleh Komite Pembiayaan sesuai kewenangannya.

In the event that an existing ESME financing borrower reaches a total financing facility of Rp200 billion, but intends to apply for additional facilities, the management unit will be determined by considering the characteristics of the borrower's business through the Financing Committee.

Strategi Tahun 2020

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 telah mengakibatkan adanya kebijakan *lockdown*/pembatasan kegiatan perpindahan barang baik di negara tujuan ekspor maupun di lokasi usaha Debitur. Hal ini menjadi tantangan besar dan memberikan dampak kepada pelaku usaha selama semester pertama tahun 2020 seperti perpanjangan waktu pembayaran piutang dagang oleh *buyer*, adanya penundaan *purchase order* dari *buyer*, dan adanya penundaan pengiriman barang kepada *buyer*.

Pada semester kedua tahun 2020, seiring dengan pengurangan pembatasan dan mulai mengalirnya kembali *order* dari *buyer* dan dibukanya kembali *lockdown* di negara tujuan ekspor memang memungkinkan pelaku usaha untuk dapat mengirim kembali produk yang telah dibuat ke *buyer*. Namun pelaku usaha menghadapi kelangkaan *container* untuk melakukan eskpor.

Kondisi selama tahun 2020 tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku usaha ekspor telah mengalami penurunan kinerja usaha, penumpukan *stock* barang dan *cashflow* usaha yang cukup ketat. Merespon tantangan tersebut, LPEI telah menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan operasional pembiayaan di segmen UKME tetap dapat berjalan dengan baik. Strategi dimaksud antara lain:

1. Mentransmisikan kebijakan Pemerintah dan OJK dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan melakukan relaksasi dan restrukturisasi fasilitas pembiayaan kepada para pelaku usaha yang membutuhkan sepanjang tahun 2020.
2. Menjaga kualitas pembiayaan debitur dengan melakukan relaksasi dan restrukturisasi fasilitas debitur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, serta memastikan operasional usaha debitur tetap berjalan di tengah pandemi sehingga meminimalisir adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan debitur.

2020 Strategy

The COVID-19 pandemic has resulted in a lockdown policy and restrictions on the movement of goods, both in the export destination country and in the borrower's business location. This is a significant challenge and has had an impact on business practitioners during the first semester of 2020. These challenges consist of an extended time period for payment of accounts receivable by buyers, a delay in purchase orders from buyers, and a delay in the delivery of goods to buyers.

With the reduction of restrictions and the flow of orders from buyers, and the reopening of lockdowns in export destination countries, it is indeed possible for business practitioners to deliver the products produced for buyers in the second semester of 2020. However, business practitioners still face a scarcity of containers to export.

The conditions during 2020 caused most of the export business practitioners to experience a decline in business performance, the accumulation of stock of goods and a tight business cash flow. Indonesia Eximbank countered these challenges by implementing a number of strategies to ensure that financing operations in the ESME segment can continue to perform well. These strategies include:

1. Transmitting the Government and OJK's policies in dealing with the impact of the COVID-19 pandemic by carrying out relaxation and restructuring financing facilities for business practitioners in need throughout 2020.
2. Maintaining the quality of borrowers' financing by carrying out relaxation and restructuring borrower facilities while prioritizing prudence, and ensuring that the borrower's business operations continue in the midst of the pandemic, hence to minimize any layoffs of borrower's employees.

PEMBIAYAAN
FINANCING

3. Melaksanakan Penugasan Khusus dari Pemerintah dalam memberikan pembiayaan kepada UKM dengan suku bunga kompetitif, baik PKE UKM maupun PKE *Trade Finance* guna meringankan dampak pandemi kepada sektor usaha khususnya UKM.

3. Executing a Special Assignment from the Government in providing financing to SMEs with competitive interest rates, as well as to NIA SME and NIA Trade Finance in order to alleviate the impact of the pandemic on the business sector, specifically SMEs.

No.	Tantangan Challenges	Strategi Strategy	Program Kerja Work Programs
1	Angka NPL UKM yang masih cukup tinggi	• Menemukan *root cause* debitur yang berpotensi bermasalah sehingga dapat mencegah pemburukan kualitas aset. • Melakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian atas debitur. • Menyalurkan pembiayaan baru dengan prinsip tumbuh berkualitas	• Melakukan R3 (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*) secara selektif kepada debitur apabila dibutuhkan. • Mengusahakan eksekusi agunan dalam hal Debitur tidak kooperatif atau kegiatan usahanya telah berhenti. • Penambahan portofolio pembiayaan baru secara selektif melalui kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Instansi terkait.
	The NPL figure for SME is still quite high	• Find the root cause of borrowers who are potentially problematic so as to prevent deterioration of asset quality. • Undertake restructuring or settlement efforts on borrowers. • Disburse new financing based on the principle of quality growth	• Perform the R3 (Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring) selectively to the borrowers if needed. • Attempt to execute collateral in the event that the borrowers are not co-operating, or business activities have ceased. • Add new financing portfolios selectively through cooperation with related Ministries/Institutions/ Agencies.
2	Risiko kredit yang masih tinggi	• Mengikuti *Industrial Guideline* yang ditetapkan oleh Lembaga. • Melakukan skema *linkage program* dan *supply chain financing.*	• Sosialisasi secara kontinu kepada Internal Lembaga terkait pemahaman *Industrial Guideline.* • Memperbaharui Peraturan dan Ketentuan internal terkait termasuk formula *lending* pada skema *linkage program* dan *supply chain financing.* • *Cross selling* dengan Bisnis Unit Korporasi dalam memasarkan SCF dan *Linkage Program.*
	Credit risk is still high	• Follow the Industrial Guideline set by the Company. • Conduct a linkage program and supply chain financing schemes.	• Continuous socialization to the Company's Internal in relations to understanding the Industrial Guideline. • Update related internal regulations and rules, including lending formula in linkage program and supply chain financing schemes. • Cross selling with the Corporate Business Unit in marketing the SCF and Linkage Program.
3	Menyalurkan pembiayaan dengan skema penugasan khusus dari pemerintah di masa pandemi COVID- 19	Bekerjasama dengan asuransi kredit untuk mengurangi dampak kerugian dalam hal terdapat debitur yang bermasalah, maupun mengatasi kendala kecukupan agunan.	Penambahan portofolio pembiayaan baru secara selektif melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/Instansi terkait.
	Disbursing financing with a special assignment scheme from the government during the COVID-19 pandemic	Cooperate with credit insurance to reduce the impact of losses in the event of a non-performing borrowers, as well as to overcome collateral adequacy constraints.	Add new financing portfolios selectively through cooperation with related Ministries/Institutions/ Agencies.
4	*Monitoring* terhadap rekening operasional Debitur	Melakukan *Cash Monitoring System* (CMS) bekerjasama dengan Perbankan Nasional.	Sosialisasi secara kontinu kepada Debitur dan Bisnis Unit perihal CMS.
	Monitoring of the Borrowers' operational accounts	Conduct a Cash Monitoring System (CMS) in collaboration with the National Banking.	Continuous outreach to Borrowers and Business Units regarding CMS.

PEMBIAYAAN
FINANCING

Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, kinerja *outstanding* pembiayaan UKME tercatat mencapai Rp14,1 triliun, atau terkontraksi 8,44% yoy dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp15,4 triliun. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir sepanjang tahun 2020. Namun dari sisi kualitas pembiayaan UKME mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan penurunan NPL *net* menjadi 15,28% per tahun 2020 dari sebelumnya 20,49% di tahun 2019.

Performance in 2020

In 2020, ESME financing outstanding performance reeached Rp14.1 trillion, or decreased by 8.44% yoy compared to Rp15.4 trillion in 2019. The decrease was due to the COVID-19 pandemic occurred throughout 2020. However, on quality, ESME financing begun to show improvement marked by a decrease in net NPL to 15.28% in 2020 from 20.49% in 2019.

Pembiayaan LPEI Di Segmen UKME Tahun 2019-2020
Indonesia Eximbank Financing in ESME Segment 2019-2020

Tahun / Year	Outstanding UKME (Rp Juta | Million)			NPL GROSS	NPL NET
	PL	NPL	Total		
2019	10.628.206	4.818.936	15.447.142	31,20%	20,31%
2020	7.904.368	6.238.263	14.142.631	44,11%	15,28%

Perkembangan pembiayaan LPEI di segmen UKME berdasarkan sektor yang menunjukkan peningkatan porsi di tahun 2020 dibanding tahun 2019 adalah sektor perindustrian menjadi 62% dari sebelumnya 61%, dan sektor jasa-jasa dunia usaha yang naik menjadi 7% dari sebelumnya 4%. Adapun gambaran perkembangan porsi pembiayaan segmen UKME di masing-masing sektor periode 2019-2020 adalah sebagai berikut:

The development of Indonesia Eximbank financing in ESME segment based on sectors with improved performance are industrial sector at 62% from 61% previously, and business services sector that increased to 7% from previously 4%. The following are development of financing portion of ESME segment in each sector for 2019-2020 period:

Sektor Pembiayaan UKM Tahun 2019
Financing Sector of SME in 2019

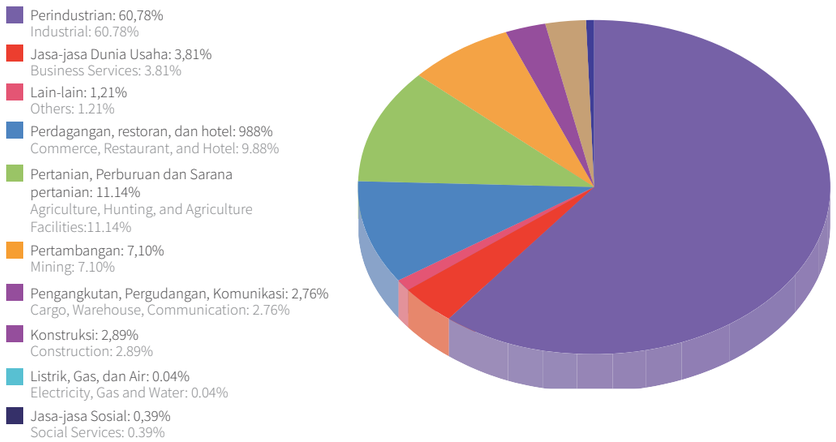

PEMBIAYAAN
FINANCING

Sektor Pembiayaan UKM Tahun 2020
Financing Sector of SME in 2020

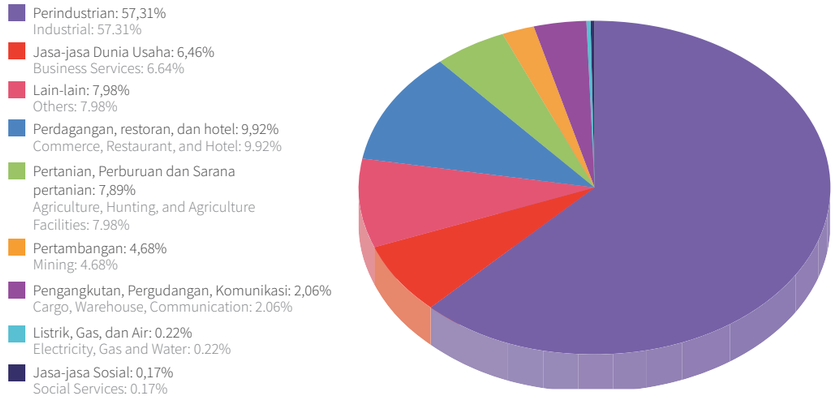

Strategi Tahun 2021

Dalam rangka menghadapi tantangan yang masih penuh dinamika pada tahun 2021, LPEI telah menetapkan sejumlah strategi antara lain sebagai berikut:

2021 Strategy

To address the dynamic challenges in 2021, Indonesia Eximbank has established a number of strategies, as follows:

No	Key Plan 2021	Time Line
1	Pertumbuhan berkualitas : • Menurunkan NPL dengan cara optimalisasi upaya R3 dan/atau penyelesaian debitur bermasalah bekerja sama dengan Unit RSA. • Menyalurkan pembiayaan baru secara prudent baik penugasan umum maupun penugasan khusus pemerintah. • Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga dalam proses penyusunan *pipeline* untuk mendukung UKM ekspor.	Januari – Desember 2021
	Quality growth : • Reduce NPL by optimizing R3 efforts and/or resolving non-performing borrowers in collaboration with the RSA Unit. • Disburse new financing prudently, both for general assignments and for national interest account. • Synergize with Ministries and Institutions in the pipeline preparation process to support export SMEs.	January – December 2021
2	Penyesuaian proses pembiayaan dan pembuatan Formula *Lending* untuk pemberian Fasilitas < Rp5 miliar.	Januari – Juni 2021
	Adjust the financing process and preparation of Lending Formula for the disbursement of < Rp5 billion Facility.	Januari – Juni 2021
3	UKM Center/Rumah Ekspor: • UKM Center/Rumah Ekspor merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai fasilitator, akselerator, aggregator, dan *arranger* bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia. • Dengan pembentukan UKM Center/Rumah Ekspor diharapkan LPEI dapat berperan lebih besar dalam pengembangan ekspor nasional melalui pemberian jasa konsultasi, menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan instansi terkait, memberi informasi terkini terkait pasar di negara tujuan ekspor dan membuka potensi pemberian fasilitas pembiayaan/ penjaminan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor. • Mengidentifikasi dan mendorong tumbuhnya eksportir-eksportir baru melalui program-program pembinaan/jasa konsultasi.	April – Desember 2021
	SME Center/Export House: • SME Center/Export House is a forum that functions as a facilitator, accelerator, aggregator and arranger for export-oriented business practitioners in Indonesia. • With the establishment of an SME Center/Export House, it is hoped that the Company can take a bigger role in the development of national exports by providing advisory services, bridging the interests of business practitioners with related agencies, providing up-to-date information regarding markets in export destination countries and providing financing/guarantee facilities to export-oriented business. • Identify and encourage growth of new exporters through development programs/ advisory services.	April – Desember 2021

PEMBIAYAAN
FINANCING

PEMBIAYAAN SEGMEN SYARIAH

Segmen Pembiayaan Syariah LPEI saat ini adalah pembiayaan di sektor korporasi dengan sektor mayoritas di Perkebunan Kelapa Sawit serta turunannya sebagai bentuk mendukung ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) skala nasional. Fasilitas yang disediakan oleh LPEI yaitu dalam bentuk KMKE dan KIE berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan untuk pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam atau luar negeri. Pembiayaan Syariah di LPEI dapat dilaksanakan menggunakan akad *Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Qardh, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Hawalah, Wakalah,* dan *Kafalah.*

Strategi Tahun 2020

Selama tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 telah mengharuskan aktivitas masyarakat umum maupun pelaku usaha masuk ke dalam era Kenormalan Baru. Hal ini menjadi tantangan besar bagi LPEI dalam mengembangkan bisnis pembiayaan segmen syariah, terutama risiko memburuknya kolektibilitas nasabah-nasabah akibat bisnis yang terhambat pandemi COVID-19. Untuk mengimbangi tantangan tersebut, LPEI telah menerapkan strategi tahun 2020 sebagai berikut:

1. Memonitor perkembangan usaha masing-masing nasabah mengingat sebagiannya telah terdampak COVID-19.
2. Melakukan restrukturisasi kepada nasabah-nasabah yang terdampak COVID-19 sebagai langkah mitigas terjadinya pemburukan kolektibilitas. Restrukturisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK perihal relaksasi dampak COVID-19.

Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, kinerja pembiayaan LPEI di segmen Syariah mencapai Rp15,2 triliun atau sedikit mengalami kontraksi sebesar 3,66%. Hal tersebut terjadi disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan usaha para nasabah. Sehingga para nasabah sedikit banyak terganggu dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI maupun dalam mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, fokus LPEI pada pembiayaan syariah adalah melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh di sepanjang tahun 2020.

SHARIA FINANCING

The current Indonesia Eximbank Sharia Financing segment is financing in the corporate sector with majority in Oil Palm Plantation and its derivatives as a form of supporting the national scale export of Crude Palm Oil (CPO). The Company provides EWCC and IEC facilities based on sharia principles aimed at business practitioners, in both legal entities and non-legal entities, including individuals domiciled in the country or overseas. Sharia financing in the Company is implemented through *Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Qardh, Ijarah Munjukiyah Bit Tamlik (IMBT), Hawalah, Wakalah*, and *Kafalah* contracts.

2020 Strategy

During 2020, the impact of the COVID-19 pandemic has forced the activities of the general public and business practitioners to enter the New Normal era. This is a big challenge for the Company in developing the sharia segment financing business, particularly of the risk of worsening customer collectability. To balance these challenges, Indonesia Eximbank has implemented the 2020 strategy as follows:

1. Monitoring business development of each customer, considering that some of them have been affected by COVID-19.
2. Restructuring for customers impacted by the COVID-19 as a mitigating measure in case of deteriorating collectability. The restructuring was carried out in accordance with OJK regulations regarding the relaxation of the COVID-19.

2020 Performance

In 2020, Indonesia Eximbank Sharia financing performance reached Rp15.2 trillion, slightly decreased by 3.66%. This was due to the impact of the COVID-19 pandemic which greatly impacted customers' business activities, as they are unable to fulfill their obligations to the Company and in developing their business. To that end, the Company's focus on sharia financing is to carry out comprehensive internal consolidation throughout 2020.

PEMBIAYAAN
FINANCING

Outstanding Pembiayaan Syariah
Sharia Financing Outstanding

(Rp Juta | Rp million)

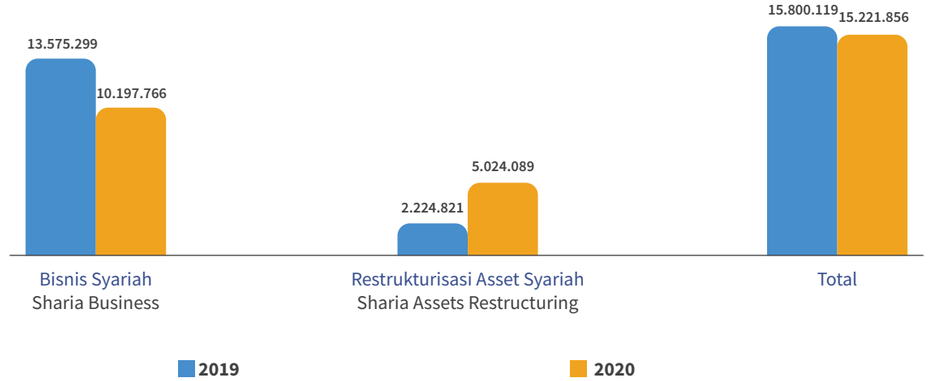

Sejak pandemi COVID-19 mulai terjadi di Indonesia pada Maret 2020, LPEI dengan sigap langsung melakukan penanganan pemisahan pembiayaan yang lancar dan yang bermasalah. Selain itu, LPEI juga melakukan penguatan organisasi dengan menyempurnakan "Kepatuhan Syariah" sesuai peraturan yang berlaku terutama terkait restrukturisasi. LPEI telah melakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan syariah dengan total Rp6,8 triliun untuk 16 nasabah pada tahun 2020, serta berhasil mempertahankan kolektibilitas kategori *Performing Financing*.

Meski dihadapkan dengan keadaan yang sangat menantang selama tahun 2020, LPEI mampu menumbuhkan total pendapatan dari segmen syariah hingga 11,69% yoy atau menjadi Rp830 miliar. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen penuh LPEI dalam melaksanakan program restrukturisasi dan disiplin dalam menerapkan program *cost management*.

Since the outbreak of the COVID-19 pandemic in Indonesia in March 2020, Indonesia Eximbank has swiftly handled the separation of performing and non-performing financing. Moreover, Indonesia Eximbank has also strengthened the organization by improving "Sharia Compliance" in accordance with the prevailing regulations, particularly those related to restructuring. Indonesia Eximbank has further restructured its sharia financing facility with a total of Rp6.8 trillion for 16 customers in 2020, and has succeeded in maintaining the collectability of the Performing Financing category.

Despite being faced with very challenging circumstances during 2020, Indonesia Eximbank was able to grow its total revenue from sharia segment by 11.69% yoy, amounting to Rp830 billion. This achievement cannot be separated from the full commitment of the Company's restructuring program implementation and its discipline in implementing the cost management program.

PEMBIAYAAN
FINANCING

Dari sisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari enam indikator, bisnis pembiayaan syariah LPEI secara keseluruhan mampu mencapai nilai 98,12. Hal ini menunjukkan kinerja pembiayaan syariah LPEI dapat dicapai dengan sangat baik untuk periode 2020 di tengah tantangan besar dari pandemi COVID-19.

On the Key Performance Indicators (KPI), which consists of six indicators, Indonesia Eximbank sharia financing as a whole was able to reach a score of 98.12. This indicates that the Company's sharia financing performance was achieved extremely well for the 2020 period despite all the challenges of the COVID-19 pandemic.

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators (KPI)	Indikator Kinerja Performance Indicators		Realisasi Realisation	Pencapaian Achievement	Nilai Score
		Bobot Weight	Target			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(d)/(c)	(g)=(f)x(b)
1	*Outstanding* pembiayaan Bisnis Syariah Kolektibilitas 1 (Rp Miliar) Outstanding Sharia Business Financing Collectability 1 (Rp Billion)	55%	9.531	8.743	92%	50,45
2	Volume *Trade Finance*	5%	1.999	80	4%	0,20
3	Realisasi Biaya Umum dan Administrasi tidak melebihi RKAT (Rp Juta) Realization of General and Administrative Costs does not exceed the Annual Work Plan & Budget (Rp Million)	5%	696	383	125%	6,25
4	Pemenuhan *covenant* pembiayaan Nasabah Fulfilled the Customer financing covenants	15%	80%	93%	116%	17,46
5	Terjaganya batas maksimal *outstanding* NPL. Maintained the maximum limit of outstanding NPL.	15%	687	92	125%	18,75
6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM terkait manajemen risiko dan kredit Increased the capacity and capability of human resources related to risk and credit management	5%	100%	100%	100%	5,00
Bobot | Weight		100%				98,12

PEMBIAYAAN
FINANCING

Strategi Tahun 2021

Dalam menghadapi tahun 2021 yang diprakirakan akan tetap berhadapan dengan tantangan penuh dinamika, termasuk tantangan pandemi COVID-19 yang belum mereda, LPEI telah menyiapkan sejumlah strategi sebagai berikut:

2021 Strategy

To effectively address highly predicted dynamic challenges of 2021, including the challenges of the COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank has prepared a number of strategies as follows:

Kategori Category	Strategi Strategy
Pengembangan usaha dan kualitas pembiayaan Business development and financing quality	• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap literasi dan pemahaman mengenai bisnis Syariah. • Penyempurnaan dan penguatan kualitas pembiayaan Syariah terhadap aspek kepatuhan Syariah • Pengembangan dan penguatan organisasi yang membidangi hukum, *product development* dan Kepatuhan Syariah untuk mendukung bisnis Syariah. • Penyempurnaan struktur produk dan dokumentasi akad Syariah • Pengembangan produk dan aktivitas baru, seperti *Trade Finance*, Penjaminan Syariah dan IMBT. • *Reprofiling portfolio* dari *Corporate Size* menjadi UKM *Size* dengan memanfaatkan *supply chain* nasabah eksisting *corporate*. • Penetrasi pasar di segmen industri halal berorientasi ekspor. • Meningkatkan kualitas pembiayaan Syariah terhadap kepatuhan prinsip Syariah. • Improve the quality of human resources on the literacy and understanding of Sharia business. • Refine and strengthen the quality of Sharia financing on aspects of Sharia compliance. • Develop and strengthen organizations in charge of law, product development and Sharia compliance to support Sharia businesses. • Improve the Sharia product structure and contract documentation. • Develop new products and activities, such as Trade Finance, Sharia Guarantee and IMBT. • Reprofiling portfolio from Corporate Size to SME Size by utilizing the existing corporate customer supply chain. • Penetrate the market in the export-oriented halal industry segment. • Improve the quality of Sharia financing towards compliance in accordance to Sharia principles. • Gradually implement Sharia Synergy in the Company's Business Units.
Menekan rasio *Non Performing Financing* Suppress the Non-Performing Financing ratio	• Restrukturisasi dan *rescheduling*. • Litigasi. • Penjualan jaminan. • PKPU, dll • Restructuring and rescheduling. • Litigation. • Sales guarantee. • PKPU, etc

PENJAMINAN

GUARANTEE

Terjadinya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi performa segmen bisnis Penjaminan LPEI selama tahun 2020. Kendati demikian LPEI telah menjalankan dengan sangat baik penugasan yang diberikan Pemerintah terkait pelaksanaan Program Penjaminan Kredit Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekspor Nasional melalui program Jaminah. Sampai akhir tahun 2020 tercatat 14 bank sudah memanfaatkan dan mengimplementasikan program Jaminah dan diperkirakan akan terus meningkat kedepannya.

The COVID-19 pandemic has affected the performance of Indonesia Eximbank Guarantee business segment during 2020. Nevertheless, Indonesia Eximbank has successfully carried out the Government assignments regarding the implementation of the Government Credit Guarantee Program for the National Export Recovery through the Jaminah program. As of the end of 2020, a total of 14 banks had utilized and implemented the Jaminah program and are estimated to continue increasing going forward.

.

PENJAMINAN

GUARANTEE

Kegiatan usaha LPEI dalam bisnis segmen Penjaminan meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri. Lalu penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan. Kemudian penjaminan bagi Bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Adapun cakupan produk dan layanan Penjaminan yang dimiliki dan ditawarkan oleh LPEI:

a. Penjaminan Proyek
   Merupakan Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Penjaminan ini diberikan dalam rangka pengerjaan proyek, antara lain:
   - Jaminan Penawaran
     Penjaminan untuk menjamin dalam hal *Principal*/*Contractor* tidak akan mengundurkan diri dan tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.
   - Jaminan Pelaksanaan
     Penjaminan untuk menjamin bahwa *Principal* akan melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai Kontrak antara *Principal* dengan *Obligee*.
   - Jaminan Uang Muka
     Penjaminan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh uang muka yang telah dibayarkan oleh *Obligee* kepada *Principal* sesuai Kontrak antara *Principal* dengan *Obligee*, apabila *Principal* wanprestasi.
   - Jaminan Pembayaran
     Penjaminan untuk menjamin bahwa Obligee akan melakukan pembayaran kepada *Principal*/*Contractor* apabila *Principal*/*Contractor* telah menyelesaikan kewajiban sesuai Kontrak.
   - Jaminan Pemeliharaan
     Penjaminan untuk menjamin bahwa *Principal*/*Contractor* akan melaksanakan pemeliharaan proyek yang telah diselesaikan.

Indonesia Eximbank activities in the Guarantee segment business include guarantees for Indonesian exporters for payments received from buyers of goods/services abroad, guarantees for importers of Indonesian goods/services abroad for the payments that have been given, guarantees for banks that provide financing for export transactions to Indonesian exporters, as well as guarantees for tenders related to project implementation, which are wholly or partly export-supporting activities. The coverage of Guarantee products and services owned and offered by Indonesia Eximbank are as follows:

a. Project Guarantee
   Is a guarantee in the framework of tenders related to the implementation of projects which are wholly or partly export-supporting activities. This guarantee is given in the framework of project work, such as:
   - Bid Bond
     Guarantee of assurance for the Principal/Contractor to not resign and are not willing to sign the Contract following the appointment as the tender's winner.
   - Performance bond
     Guarantee of assurance for the Principal to carry out the obligation to complete the works in accordance with the contract between the Principal and the Obligee.
   - Advance Payment Guarantee
     Guarantee of assurance for the return of part or all of the down payment that has been paid by the Obligee to the Principal in accordance with the contract between the Principal and the Obligee, if the Principal is in default.
   - Payment Guarantee
     Guarantee that the Obligee will make payments to the Principal/Contractor if the Principal/Contractor has completed the obligations under the Contract.
   - Maintenance Guarantee
     Guarantee of assurance that the Principal/Contractor will carry out the maintenance of the completed project.

PENJAMINAN
GUARANTEE

b. Penjaminan Kepabeanan
Produk Penjaminan ini ditujukan untuk Dirjen Bea dan Cukai atas impor bahan baku yang akan diproses menjadi barang siap ekspor. Jaminan ini akan menangguhkan pembebanan bea masuk impor pada kondisi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KABER).

c. Penjaminan Kredit Bank
Penjaminan ini diberikan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang telah memberikan pembiayaan bagi para eksportir. Objek Penjaminan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut. Jenis Penjaminan Kredit Bank dibagi menjadi dua, antara lain:
– *Sovereignty Basis*
Penjaminan Kredit – *Sovereignty Basis* didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK Nomor 32/POJK.03/2018 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 11/SEOJK.03/2018 mengenai Perubahan atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Pengaturan dalam POJK maupun SEOJK tersebut mengatur bahwa dengan adanya Penjaminan Kredit dari LPEI maka atas porsi yang dijamin, Bank sebagai Penerima Jaminan dapat memperhitungkan pembebanan ATMR sebesar 0% serta mendapatkan pengecualian atas perhitungan BMPK atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) atas pembiayaan yang dijamin oleh Penjamin. Dalam penjaminan skema *sovereign*, LPEI tidak diperbolehkan untuk menjamin kembali porsi yang dijamin (*counter guarantee*).

b. Customs Guarantee
This guarantee product is intended for the Director General of Customs and Excise of the import of raw materials that will be processed into ready-to-export goods. This guarantee will suspend the imposition of import duties on the conditions of the Ease of Import for Export Purpose (KITE) and Bonded Zone (KABER).

c. Credit Guarantee
This guarantee is provided for Commercial Banks as referred to in the Law on Banking, which provides financing for exporters. The object of Guarantee is financing provided by the bank. Types of Bank Credit Guarantee are divided into two:

– Sovereignty Base
Loan Guarantee - Sovereignty Basis refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40/POJK.03/2019 on Asset Quality Assessment for Commercial Banks, POJK No. 32/POJK.03/2018 on Legal Lending Limit (LLL) and Provision of Large Exposures for Commercial Banks, and OJK Circular (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2018 on Amendments to SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 regarding Guidelines for Calculation of Credit Risk Weighted Assets (RWA) Using a Standardized Approach.

The POJK and SEOJK stipulate that with the Loan Guarantee from Indonesia Eximbank, the Bank as the Guarantee Recipient can calculate the 0% RWA charge and get an exemption from the calculation of LLL or the Maximum Legal Lending Limits for the financing guaranteed by Guarantor. In the guarantee of the sovereign scheme, Indonesia Eximbank is not allowed to counter guarantee the guaranteed portion.

PENJAMINAN
GUARANTEE

– *Commercial Basis*
Skema Penjaminan Kredit - *Commercial Basis* secara prinsip tidak mengacu kepada POJK dan SEOJK yang digunakan pada *sovereign basis*. Skema penjaminan *commercial* digunakan oleh Bank yang membutuhkan fungsi *credit enhancer*, di mana dengan penjaminan LPEI maka *rating* Terjamin dapat mengikuti *rating* LPEI sehingga diharapkan akan meningkatkan *appetite* dari Bank untuk memberikan kredit. Untuk skema penjaminan *commercial*, penentuan bobot ATMR adalah mengikuti pengaturan yang berlaku serta LPEI dapat melakukan mekanisme *counter guarantee* atau regaransi dalam upaya melakukan *risk sharing*.

– Commercial Basis
The Loan Guarantee Scheme - Commercial Basis in principle does not refer to the POJK and SEOJK which are used on a sovereign basis. The commercial guarantee scheme is used by banks that require a credit enhancer function, where with Indonesia Eximbank guarantee, the Guaranteed rating can follow the Indonesia Eximbank rating hence it is expected to increase the Bank's appetite to provide loans. In determining the weight of RWA for commercial guarantee schemes, it follows the applicable regulations and implementation by Indonesia Eximbank for a counter guarantee or guarantee mechanism in an effort to carry out risk sharing.

Strategi Tahun 2020

Pada tahun 2020, bisnis segmen Penjaminan LPEI tengah menghadapi tantangan terutama dari pandemi COVID-19. Tantangan ini telah menimbulkan dampak perlambatan pelaksanaan proyek baik di dalam maupun di luar negeri yang mengakibatkan permintaan Penjaminan mengalami penurunan. Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan yang turut terimbas pandemi akibat penurunan aktivitas usaha di hampir seluruh sektor ekonomi, juga sangat mempengaruhi performa dari bisnis segmen Penjaminan LPEI.

Untuk mengimbangi tantangan pandemi COVID-19 dan tetap dapat mendukung kegiatan ekspor Indonesia utamanya terkait Penjaminan di tahun 2020, LPEI telah menerapkan beberapa strategi antara lain:

- Tetap mengelola fasilitas Penjaminan yang telah diberikan kepada Eksportir melalui skema Fasilitas ataupun skema Kontra Bank Garansi dengan perusahaan Asuransi, dan melakukan *monitoring* secara berkala untuk progres pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak pekerjaan yang diperoleh.
- Penerbitan Jaminan Indonesia Eximbank dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan kapasitas Eksportir dalam melaksanakan proyek agar dapat meminimalisir potensi kerugian.

2020 Strategy

In 2020, Indonesia Eximbank Guarantee segment business encountered multiple challenges, particularly from the COVID-19 pandemic. These challenges have resulted in a slowdown in project implementation both within the country and overseas, which resulted in a decrease of demand for guarantees. Furthermore, the growth in bank loans, which was also affected by the pandemic due to the decline in business activities in almost all economic sectors, also greatly affected the performance of Indonesia Eximbank Guarantee segment.

To balance the challenges of the COVID-19 pandemic and continue to support Indonesia's export activities, particularly related to Guarantee in 2020, Indonesia Eximbank has implemented several strategies, such as:

- Continue to manage the Guarantee facilities that have been provided to Exporters through the Facility scheme or the Counter Bank Guarantee scheme with the Insurance company. Moreover, to regularly monitor the work progress that has been carried out in accordance with obtained work contract.
- The issuance of Indonesia Eximbank Guarantee is carried out by taking into account the performance and capacity of the Exporter in implementing the project in order to minimize potential losses.

PENJAMINAN
GUARANTEE

- Meningkatkan kerjasama dengan perbankan baik dalam negeri ataupun luar negeri untuk sosialisasi produk Penjaminan Kredit *Sovereignty Basis* dan *Commercial Basis*.

- Increase cooperation with domestic and foreign banks to disseminate the Sovereignty Basis and Commercial Basis Credit Guarantee products.

Kinerja Tahun 2020

Kinerja *outstanding* Penjaminan LPEI secara umum telah mencapai Rp9,91 triliun di tahun 2020, atau turun sebesar 2,16% yoy dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah *outstanding* dari seluruh segmen produk Penjaminan yaitu Penjaminan Proyek, Penjaminan Kepabeanan, Penjaminan Importir, maupun Penjaminan Kredit Bank. Penurunan *outstanding* dari seluruh segmen terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas bisnis yang disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 di hampir sepanjang tahun 2020.

2020 Performance

Indonesia Eximbank Guarantee outstanding performance in general has reached Rp9.91 trillion in 2020, decreased by 2.16% yoy compared to the previous year. This was due to a decrease in the outstanding number of all Guarantee product segments, namely Project Guarantee, Customs Guarantee, Importer Guarantee, and Credit Guarantee. The decline in outstanding of all segments was mainly due to a drop in business activities impacted by the COVID-19 pandemic throughout most of 2020.

Penjaminan per Pasal
Guarantee per Clause

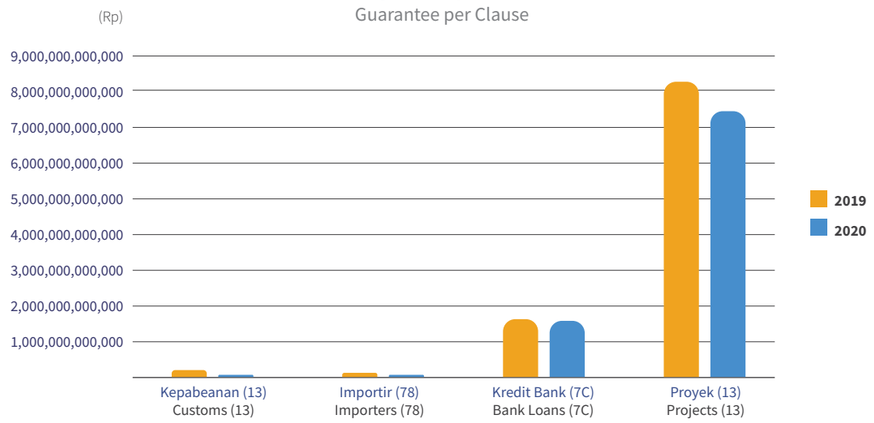

PENJAMINAN
GUARANTEE

Adapun jumlah Nasabah Penjaminan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 184 Terjamin atau menurun 17,39% yoy dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 216 Terjamin. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa nasabah produk Penjaminan yang sudah tidak melakukan penerbitan Penjaminan di LPEI, dan beberapa nasabah produk Penjaminan proyek yang mengalami kemunduran atau batalnya pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan.

The number of Guarantee Customers in 2020 stood at 184 Guaranteed, decreased by 17.39% yoy compared to 216 Guaranteed in 2019. This was due to a number of Guarantee product customers who had not issued Guarantee products to the Company, and other project Guarantee customers experienced a setback or cancellation of a project implementation.

Jumlah Nasabah Penjaminan
Number of Guarantee Customers

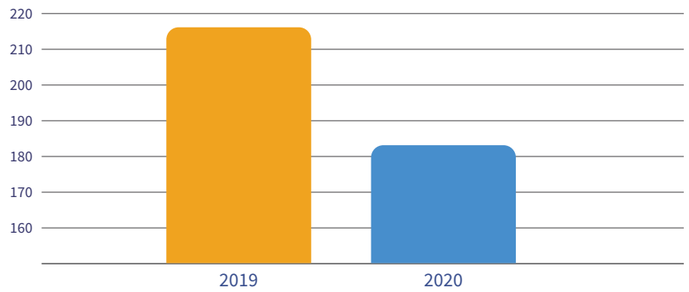

Pendapatan dari segmen bisnis Penjaminan tercatat mencapai Rp80,19 miliar di tahun 2020, atau menurun sebesar 19,18% yoy dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp99,22 triliun. Pencapaian ini membuat kontribusi pendapatan dari bisnis segmen Penjaminan terhadap total pendapatan usaha turut mengalami penurunan.

Revenue from the Guarantee business segment stood at Rp80,19 billion in 2020, decreased by 19,18% yoy compared to Rp99.22 trillion in 2019. Hence the Guarantee segment revenue contribution to total operating income was also decreased.

Pendapatan Segmen Bisnis Penjaminan
Revenues of Guarantee Segment

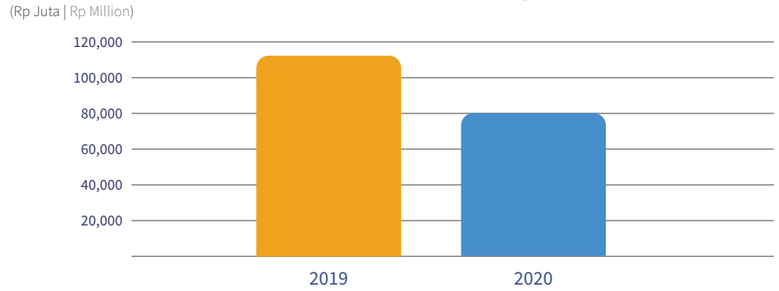

PENJAMINAN
GUARANTEE

Sedangkan kontribusi segmen bisnis Penjaminan menjadi lebih terdistribusi ke beberapa sektor di tahun 2020, di mana sektor industri Transportasi adalah segmen yang terbesar dengan porsi sebesar 20% dari seluruh Penjaminan di LPEI. Urutan setelahnya adalah sektor industri pertambangan (19%); *elektrikal, installation & inspection* (14%); infrastruktur (12%); perindustrian (11%); jasa dunia usaha lainnya (9%); konstruksi (8%); *oil and gas* (6%); dan sektor industri *manpower* (2%).

Meanwhile, the contribution of Guarantee business segment became more distributed to several sectors in 2020, where the Transportation industry sector had become the largest segment with a share of 20% of all Guarantee in the Company. This followed by mining industry sector (19%); electrical, installation & inspection (14%); infrastructure (12%); industrial (11%); other business services (9%); construction (8%); oil and gas (6%); and manpower industrial sector (2%).

Sektor Industri (2020)
Industrial Sector (2020)

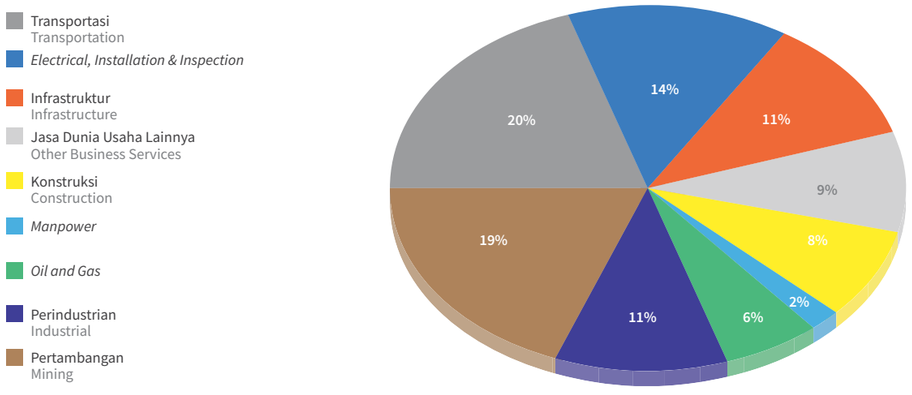

Dari sisi nilai kontrak proyek Penjaminan LPEI, kinerjanya juga mengalami penurunan sebesar 21,71% yoy, dari Rp360,52 triliun di tahun 2019 menjadi Rp296,22 triliun di tahun 2020.

On contract value of Guarantee project, its performance also declined by 21.71% yoy, from Rp360.52 trillion in 2019 to Rp296.22 trillion in 2020.

PENJAMINAN
GUARANTEE

Nilai Kontrak Proyek Penjaminan LPEI
Guarantee Project Contract Value

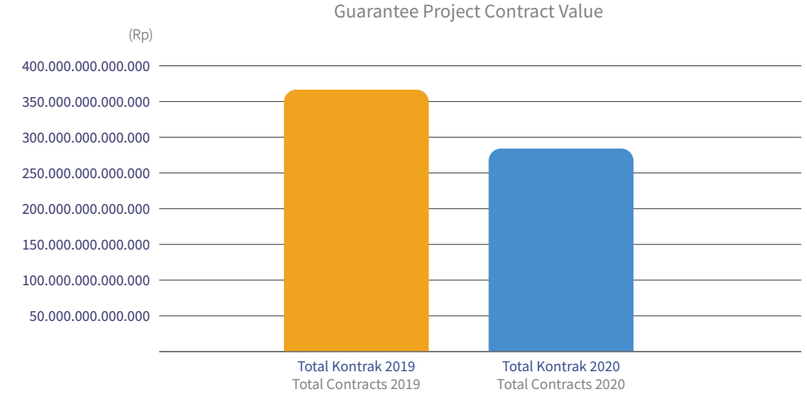

Porsi retensi sendiri Penjaminan turut mengalami penurunan, dari tahun 2019 sebesar 27,05% menjadi sebesar 25,13% di tahun 2020.

A portion of the Guarantee's own retention has also decreased, from 27.05% in 2019 to 25.13% in 2020.

Retensi Penjaminan LPEI
Guarantee Retention

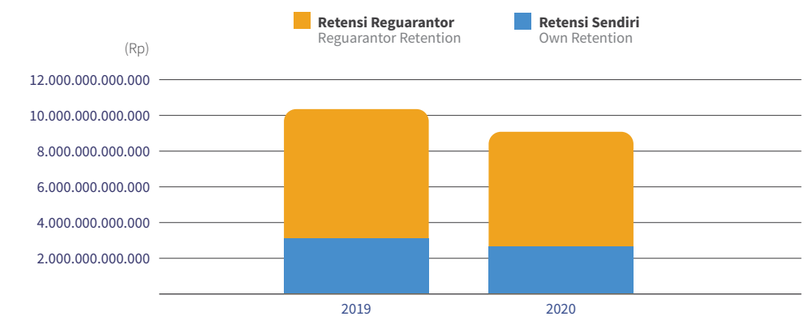

Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 telah direspon oleh Pemerintah dengan memberikan penugasan kepada LPEI, yaitu untuk melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekspor Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.08/2020

One of the Government's responses to the COVID-19 pandemic in 2020 was providing an assignment for Indonesia Eximbank to implement the Government Guarantee Program for the National Export Recovery, as stipulated under the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 98/PMK.08/2020 regarding the Government Guarantee Procedures for

PENJAMINAN
GUARANTEE

tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menjawab penugasan tersebut, LPEI telah merilis Program Penjaminan Kredit Pemerintah (Jaminah) untuk memberikan dukungan kepada Perbankan dalam bentuk Penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) bagi pelaku usaha korporasi. Diharapkan Jaminah dapat membantu kegiatan usaha dan menghidupkan roda perkenomian, sehingga dapat memberikan ruang bagi Perbankan dalam menyalurkan KMK kepada pelaku usaha.

Sampai akhir tahun 2020, setidaknya terdapat 14 bank yang sudah memanfaatkan dan mengimplementasikan program Jaminah tersebut. Ke-14 bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Resona Perdania, MUFG Bank, Bank QNB, Standard Chartered Bank, Maybank Indonesia, Bank Jateng, Bank OCBC NISP, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank BJB. LPEI terus berupaya melakukan peningkatan kerja sama dengan Perbankan dalam program Jaminah agar semakin banyak pelaku usaha dapat merasakan dukungan Pemerintah dalam upaya mempertahankan usahanya.

Pelaku usaha yang terdampak COVID-19 dan menjadi sasaran Program Jaminah adalah korporasi berorientasi ekspor yang menghasilkan atau menghemat devisa dan meningkatkan kapasitas produksi nasional dan/atau perusahaan padat karya. Salah satu kriteria korporasi penerima program ini adalah nasabah eksisting dan nasabah baru bank pemberi kredit yang memerlukan tambahan modal kerja dengan nilai Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Sejak program Jaminah diperkenalkan, LPEI telah menerbitkan sembilan Sertifikat Penjaminan dengan nilai sebesar Rp867 Miliar kepada lima Industri, yaitu Tekstil (32,6%), Batubara (27,6%), Pakan Ternak (18,4%), Kertas (13,3%), dan Kontruksi (2,7%).

Corporate Businesses through Guarantee Business Entities Designated to Implement the National Economic Recovery Program.

Responding to this assignment, Indonesia Eximbank has released the Government Credit Guarantee Program (Jaminah) to support banks through Working Capital Credit Guarantee (KMK) for corporate businesses. It is expected that Jaminah can help business activities hence it can provide room for banks to distribute KMK to business communities.

As of the end of 2020, at least a total of 14 banks had utilized and implemented the Jaminah program. The 14 banks consist of Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Resona Perdania, MUFG Bank, Bank QNB, Standard Chartered Bank, Maybank Indonesia, Bank Jateng, Bank OCBC NISP, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, and BJB Bank. Indonesia Eximbank continues to strive in increasing cooperation with banks in the Jaminah program that aim to provide businesses with the support of the Government in an effort to maintain their businesses.

The business communities impacted by COVID-19 and targeted by the Jaminah Program are export-oriented corporations that generate or save foreign exchange and increase national production capacity and/or labor-intensive companies. One of the criteria for corporate beneficiaries of this program, is to have existing customers and new customers of lending banks that need additional working capital with a value of Rp10 billion to Rp1 trillion.

Since the Jaminah program was introduced, Indonesia Eximbank has issued nine Guarantee Certificates with a value of Rp.67 billion to five industries, such as Textiles (32.6%), Coal (27.6%), Animal Feed (18.4%), Paper (13.3%), and Construction (2.7%).

PENJAMINAN
GUARANTEE

Rencana Strategis Tahun 2021

Tahun 2021 diprakirakan masih menjadi tahun yang sangat menantang untuk segmen bisnis Penjaminan LPEI, mengingat angka yang terpapar COVID-19 sampai dengan awal tahun 2021 terus menunjukkan peningkatan. Sehingga Pemerintah masih harus memberlakukan pembatasan aktivitas untuk menahan laju perkembangan pandemi COVID-19.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana strategis yang akan dilakukan LPEI dalam bisnis Penjaminan pada tahun 2021 antara lain:

- Fokus pada peningkatan fungsi LPEI sebagai *credit enhancer* untuk mendukung Perbankan agar lebih percaya diri dalam melakukan penyaluran kredit, baik dalam penjaminan kredit yang merupakan bisnis LPEI maupun melalui Jaminah untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Meningkatkan kerja sama dengan perbankan nasional maupun asing dalam upaya memperkuat fungsi sebagai *credit enhancer*.
- Mempertahankan bisnis penjaminan proyek melalui peningkatan *cross selling* dengan nasabah pembiayaan LPEI maupun melalui kerja sama dengan lembaga asuransi atau penjaminan untuk skema kontra bank garansi.

Untuk mendukung pelaksanaan rencana dan strategi tahun 2021, LPEI akan melakukan penguatan organisasi dengan membentuk organisasi monoline untuk bisnis penjaminan sejak awal tahun 2021. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses analisa dan pengambilan keputusan.

Strategic Plan for 2021

2021 is predicted to be a very challenging year for Indonesia Eximbank Guarantee business segment, considering that the number exposed to COVID-19 until early 2021 continues to increase. Thereby the government still has to impose activity restrictions to curb the pace of the COVID-19 pandemic.

To address these challenges, the strategic plans that will be carried out by Indonesia Eximbank in the Guarantee business in 2021 are as follows:

- Focusing on improving Indonesia Eximbank function as a credit enhancer, to support banks to be more confident in lending, in credit guarantee as the Company's business, and through Jaminah to support the National Economic Recovery program.
- Enhancing cooperation with national and foreign banks in an effort to strengthen function as credit enhancers.
- Maintaining project guarantee business through increased cross selling with Indonesia Eximbank financing customers, or through cooperation with insurance institutions or guarantees for a counter-bank guarantee scheme.

To support the implementation of plans and strategies for 2021, Indonesia Eximbank will strengthen itself by forming a monoline organization for the guarantee business in early 2021. This is expected to accelerate the analysis and decision-making processes.

ASURANSI
INSURANCE

Pada tahun 2020, kinerja total pendapatan premi gross LPEI telah mengalami pertumbuhan pesat hingga 33,03% yoy dibanding tahun 2019. Jumlah tertanggung Asuransi juga meningkat sampai dengan 8,70% yoy. Pencapaian positif ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha dan institusi terkait lainnya untuk merangkul lebih banyak eksportir melakukan penetrasi ke pasar-pasar baru.

In 2020, Indonesia Eximbank total gross premium income performance has rapidly grew to reach 33.03% yoy compared to 2019. The number of insurances insured also increased by 8.70% yoy. These positive achievements are expected to continue in line with increased cooperation with Ministries/ Institutions, business associations and other related institutions to engage more exporters to penetrate new markets.

.

ASURANSI
INSURANCE

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, dalam rangka menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional, LPEI juga berperan memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi. LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga asuransi lain tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir, atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri.

Adapun layanan asuransi yang tersedia di LPEI hingga saat ini adalah sebagai berikut:

As stipulated under Law No. 2 of 2009, in order to carry out the National Export Financing, Indonesia Eximbank provides financing in the form of insurance. Indonesia Eximbank can provide insurance facilities to exporters in the event that other insurance institutions cannot fulfill their requests, or in order to fulfill the conditions required by overseas buyers.

The insurance services available at Indonesia Eximbank to date are as follows:

	Trade Credit Insurance	*Marine Cargo Insurance*	*Overseas Investment Insurance*
Definisi	Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Eksportir Indonesia terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya pembayaran dari Importir/*Buyer* atau Bank pembuka L/C yang disebabkan oleh Risiko Komersial dan/atau Risiko Politik.	Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian/ kerusakan/kehilangan barang terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan, baik melalui laut, darat dan udara.	Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Investor Indonesia terhadap kemungkinan risiko kerugian investasi karena risiko politik.
Definition	Insurance that provides compensation to Indonesian Exporters against possible risk of loss due to non-receipt of payment from the Importer/Buyer or the L/C opening Bank caused by Commercial Risk and/or Political Risk.	Insurance that provides compensation for loss/damage/loss of goods against risks that may occur during transportation, either by sea, land or air.	Insurance that provides compensation to Indonesian investors against possible risk of investment loss due to political risks.
Manfaat	a. Memberikan rasa aman kepada Eksportir Indonesia dalam menjalankan penjualan ekspornya. b. Membantu Eksportir Indonesia dalam melakukan manajemen risiko. c. Memberikan dukungan kepada Eksportir Indonesia untuk ekspansi ke pasar internasional. d. Membantu Eksportir Indonesia untuk lebih kompetitif (dengan syarat pembayaran yang lebih flexible/ non L/C). e. Memperbaiki neraca perusahaan. f. Strategi untuk meningkatkan loyalitas *buyer* (importir).	a. Memberikan rasa aman kepada Eksportir Indonesia dalam menjalankan penjualan ekspornya. b. Menghindari kebangkrutan dan kerugian atas risiko kerusakan/ kehilangan barang selama proses pengangkutan.	a. Memberikan rasa aman kepada Eksportir Indonesia dalam menjalankan investasinya dari ketidakstabilan politik yang terjadi di negara investor Indonesia berinvestasi. b. Memberikan dukungan kepada Investor Indonesia untuk ekspansi ke pasar internasional yang baru. c. Membantu investor Indonesia untuk mendapatkan *Term & condition* pendanaan dari Bank yang lebih baik.
Advantages	a. Provides a sense of security to Indonesian exporters in carrying out export sales. b. Assists Indonesian Exporters in carrying out risk management. c. Provides support to Indonesian Exporters that aim to expand into international markets d. Helps Indonesian Exporters become more competitive (with more flexible/ non L/C payment terms). e. Improve the company's balance sheet. f. Strategy to increase buyer (importer) loyalty.	a. Provides a sense of security to Indonesian exporters in carrying out export sales. b. Avoids bankruptcy and loss of the risk of damage/loss of goods during the transportation process..	a. Provides a sense of security to Indonesian exporters in carrying out investments from the political instability within those investing countries. b. Provides support to Indonesian investors to expand into new international markets. c. Assists Indonesian investors to get better funding terms & conditions from the Bank.

ASURANSI
INSURANCE

	Trade Credit Insurance	*Marine Cargo Insurance*	*Overseas Investment Insurance*
Coverage	a. Risiko Komersial – Importir/*Buyer* Pailit (*insolvency*). – Importir/*Buyer* gagal untuk membayar sejumlah utang/ tagihan sesuai dengan kontrak (*default payment*). b. Risiko Politik – Moratorium Pemerintah (*Goverment Moratorium*). – Larangan transfer dari pemerintah importir (*present or delay payment*). – Penghapusan hutang dari pemerintah importir/buyer (*discharge of debt*). – Perang atau tindakan permusuhan (*war*). – Wanprestasi *public buyer* (*public buyer default).* – Kegagalan kontrak akibat dari tindakan pemerintah importir/*buyer* (*contract frustation*).	• Institute Cargo Clauses A (ICC A). • Institute Cargo Clauses B (ICC B). • Institute Cargo Clauses C (ICC C). • Institute Cargo Clauses Air (ICC Air/udara).	a. *Expropriation* (risiko perampasan/ pengambil-alihan). b. *Transfer Restriction* (risiko pembatasan transfer). c. *War and Civil disturbance* (risiko perang dan gangguan sipil). d. *Breach of contract* (risiko pelanggaran kontrak oleh otoritas pemerintah negara tujuan investasi.
Coverage	a. Commercial Risk – Bankrupt importer/buyer (insolvency). – The importer/buyer fails to pay a number of debts / bills in accordance with the contract (default payment). b. Political Risk – Government Moratorium. – Prohibition of transfers from the importing government (present or delay payment). – Write-off of debt from the importer/buyer government (discharge of debt). – War or acts of hostility. – Public buyer default. – - Contract failure as a result of the importer / buyer government action (contract frustration).	• Institute Cargo Clauses A (ICC A). • Institute Cargo Clauses B (ICC B). • Institute Cargo Clauses C (ICC C). • Institute Cargo Clauses Air (ICC Air/udara).	a. Expropriation b. Transfer Restriction c. War and Civil disturbance d. Breach of contract

Strategi Tahun 2020
Strategi yang dilakukan oleh LPEI berkaitan dengan aktivitas Asuransi dan dalam rangka tetap mendukung Eksportir Indonesia dalam menjalankan transaksi ekspor selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 antara lain:

- Berupaya untuk mempertahankan *credit limit*/ asuransi yang telah diberikan kepada Eksportir dengan melakukan *monitoring* secara berkala untuk transaksi *buyer* dan kondisi politik negara *buyer*.
- Penarikan *credit limit* (*freeze credit limit*) *buyer* hanya akan dilakukan apabila terdapat informasi politik yang sedang bergejolak, baik dari media atau dari *partner international* LPEI di negara-negara *buyer existing*. Atas saran/*advise* dari *partner international*, LPEI akan segera menyampaikan kepada Tertanggung/Eksportir untuk mengambil kebijakan penjualan dan menarik *credit limit buyer* dimaksud.
- Memperhatikan saran/*advise* dari *partner international* terkait klasifikasi sektor usaha yang terdampak COVID-19. Sehingga fokus LPEI dalam melakukan upaya pengembangan bisnis asuransi pada sektor usaha yang bukan merupakan kategori *high exposure* (*red category*).

2020 Strategy
The following are strategies undertaken by Indonesia Eximbank on insurance activities and continuous support to Indonesian Exporters in carrying out export transactions during the COVID-19 pandemic in 2020:

- Strive to maintain credit limit/insurance that has been granted to Exporters by regularly monitoring buyer transactions and the political conditions of the buyer's country.
- The withdrawal of a buyer's credit limit (freeze credit limit) will only be carried out if volatile political information exists, either from the media or from Indonesia Eximbank international partners in existing buyer countries. Regarding the advice of an international partner, Indonesia Eximbank will immediately inform the Insured/Exporter to take a sales policy and withdraw the credit limit of the intended buyer.
- Taking into account the suggestions/advice from international partners regarding the classification of business sectors impacted by COVID-19. This is to ensure that Indonesia Eximbank focuses on making efforts to develop the insurance business in the business sector which is not a high exposure category (red category).

ASURANSI
INSURANCE

LPEI juga telah melakukan kerja sama dengan Kementrian Perdagangan pada tahun 2020, dengan menjadi salah satu rekanan terdaftar pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PERMENDAG) Nomor 40/2020. Rekanan terdaftar sesuai permendag tersebut dibentuk oleh Pemerintah untuk memberikan ganti rugi atas kerugian/kerusakan/kehilangan barang terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan melalui laut. Selain itu, LPEI telah pula melakukan beberapa usulan penyesuaian pada peraturan internal terkait kegiatan asuransi.

Indonesia Eximbank has also collaborated with the Ministry of Commerce in 2020, by being one of partners registered in the Regulation of the Minister of Commerce of the Republic of Indonesia (PERMENDAG) No. 40/2020, the registered Partners according to the Minister of Commerce is established by the Government to provide compensation for losses/damages/ losses of goods against the risks that may occur during transportation by sea. Additionally, Indonesia Eximbank has also made several recommendations on adjustments to the internal regulations of insurance activities.

Kinerja Tahun 2020
Pada tahun 2020, kinerja total pendapatan premi *gross* LPEI mencapai Rp9,84 miliar, meningkat 22,76% dari tahun 2019 sebesar Rp8,02 miliar. Pendapatan premi didominasi dari sektor perindustrian sebesar 89,07% dari total portofolio. Disusul kemudian sektor pengangkutan sebesar 5,33%, perdagangan sebanyak 4,66%, perikanan sebesar 0,88%, dan sektor konstruksi sebesar 0,06%.

2020 Performance
In 2020, the total performance of Indonesia Eximbank gross premium income reached Rp9,84 billion, increased by 22,76% from Rp8,02 billion in 2019. The premium income was dominated by industrial sector at 89.07% of total portfolio. This was followed by transportation sector at 5.33%, trade at 4.66%, fisheries at 0.88%, and construction sector at 0.06%.

Pendapatan Premi Gross per Segmen
Gross Premium Income per Segment

(Rp Miliar | Billion)

Industri Industry	2019	Porsi Portion	2020	Porsi Portion
Pengangkutan | Transportation	371	5,62%	431	5,33%
Perdagangan | Commerce	18	0,27%	377	4,66%
Perikanan | Fishery	407	6,17%	71	0,88%
Perindustrian | Industry	5.804	87,94%	7.205	89,07%
Konstruksi | Construction	0	0,00%	5	0,06%
Total	**6.600**	**100,00%**	**8.089**	**100,00%**

Dari segi nilai pertanggungan Asuransi LPEI, totalnya tercatat sebesar Rp8,11 triliun di tahun 2020 atau turun tipis 0,85% yoy dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp8,18 triliun. Pencapaian tersebut dari Rencana Kerja Anggara Tahunan (RKAT) 2020 tercapai 97,04%. Penurunan nilai pertanggungan asuransi LPEI ini dari sisi keuangan disebabkan karena nilai pertanggungan *Marine Cargo Insurance* mengalami penurunan menjadi Rp4,71 triliun pada tahun 2020.

The total coverage of Indonesia Eximbank Insurance was recorded at Rp8.11 trillion in 2020, slightly decreased by 0.85% yoy compared to Rp8.18 trillion in 2019. This attainment from the 2020 Annual Budget Work Plan (RKAT) was achieved at 97.04%. The decrease of Indonesia Eximbank insurance coverage was due to the decrease in the coverage of Marine Cargo Insurance of Rp4.71 trillion in 2020.

ASURANSI
INSURANCE

Nilai Pertanggungan Asuransi
Insurance Coverage Value

(Rp Juta | Million)

Asuransi Insurance	Nama Produk Product Name	2019	2020	Δ
Asuransi Gagal Bayar Default Insurance	Proteksi Piutang Dagang Accounts Receivable Protection	2.933.711	3.403.118	16,00%
Asuransi Gagal Ekspor Export Default Insurance	*Marine Cargo Insurance*	5.244.936	4.705.608	-10,28%
Total		**8.178.647**	**8.108.726**	**-0,85%**

Namun, nilai pertanggungan asuransi pada produk Proteksi Piutang Dagang (*Trade Credit Insurance*) menunjukkan pertumbuhan hingga 16,00% yoy menjadi Rp3,40 triliun di tahun 2020, dibandingkan posisi tahun 2019 yang sebesar Rp2,93 triliun. Pencapaian positif produk Proteksi Piutang Dagang terjadi kareka LPEI berkomitmen menjalankan strategi dengan reposisi produk sesuai arahan *stakeholders*, di mana pencapaian premi sebesar 33% dari tahun sebelumnya.

However, the value of insurance coverage in the Trade Credit Insurance product grew by 16.00% yoy to Rp3.40 trillion in 2020, compared to Rp2.93 trillion in 2019. This achievement of Accounts Receivable Protection products was possible due to Indonesia Eximbank's commitment in implementing its strategy of product repositioning, according to the direction of stakeholders, where the premium achievement was 33% from the previous year.

Sedangkan penurunan total nilai pertanggungan Asuransi LPEI dari sisi operasional pada tahun 2020 disebabkan kondisi politik yang tidak kondusif di negara *buyer* (Lebanon) yang diberikan pertanggungan asuransi dan didukung laporan negatif dari pihak *partner international*. Sehingga harus dilakukan penarikan *credit limit buyers* di Lebanon. Selain itu, juga terdapat beberapa *buyers* yang mengalami penunggakan terus-menerus sehingga perlu dilakukan *freeze credit limit* hingga pembayaran dapat dilakukan, serta terbatasnya pemenuhan kapasitas reasuransi selama pandemi COVID-19. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh LPEI dalam rangka memitigasi dan/atau meminimalisir kemungkinan risiko klaim asuransi yang akan terjadi.

On the other hand, Indonesia Eximbank's decline in total insurance coverage from the operational side in 2020 was due to unfavorable political conditions in the buyer's country (Lebanon), which was provided with insurance coverage and was supported by negative reports from international partners. This resulted in withdrawal of credit limit buyers in Lebanon. Additionally, there were some buyers who were constantly in arrears, hence it was necessary to freeze credit limits until payments can be made, as well as the limited fulfillment of reinsurance during the COVID-19 pandemic. These measures were carried out by Indonesia Eximbank in order to mitigate and/or minimize the possible risk of insurance claims that would arise.

Jumlah Tertanggung Asuransi
Total Insurance Insured

Asuransi Insurance	Nama Produk Product Name	2019	2020	Δ
Asuransi Gagal Bayar Default Insurance	Proteksi Piutang Dagang Accounts Receivable Protection	34	38	11,76%
Asuransi Gagal Ekspor Export Default Insurance	*Marine Cargo Insurance*	12	12	0,00%
Total		46	50	8,70%

ASURANSI
INSURANCE

Dari segi tertanggung Asuransi pada tahun 2020, jumlahnya menunjukkan pertambahan menjadi 50 tertanggung dari sebelumnya 46 di tahun 2019 atau tumbuh 8,70% yoy. Penambahan ini di kontribusi dari Asuransi Proteksi Piutang Dagang yang dari sebelumnya 34 tertanggung menjadi 38 tertanggung.

The number of insured increased to 50 insured from 46 in 2019, grew by 8.70% yoy. This progress was contributed by the Accounts Receivable Protection Insurance, which grew to 38 insured from 34 previously.

Peningkatan jumlah *buyer* yang di pertanggungkan dalam Asuransi Proteksi Piutang Dagang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 620 *buyer* yang tersebar di 75 negara yaitu Brasil, Meksiko, Panama, Peru, AS, Pantai Gading, Mesir, Kenya, Maroko, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, Tanzania, Tunisia, Bahrain, Bangladesh, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, UEA, Vietnam, Austria, Belgia, Bulgaria, Denmark, Inggris, Prancis , Jerman, Irlandia, Italia, Lituania, Malta, Belanda, Polandia, Rumania, Rusia, Serbia, Spanyol, Swedia, Ukraina.

The increase in the number of buyers covered under Accounts Receivable Protection Insurance in 2020 were 620 buyers spread across 75 countries, such as: Brazil, Mexico, Panama, Peru, US, Ivory Coast, Egypt, Kenya, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Tunisia, Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Jordan, South Korea, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka , Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, Vietnam, Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, UK, France, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Russia, Serbia, Spain, Sweden, Ukraine.

Sedangkan jumlah tertanggung produk *Marine Cargo Insurance* tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu 12 tertanggung. Hal ini disebabkan jumlah tertanggung yang tidak melakukan perpanjangan polis sama dengan jumlah tertanggung baru, tetapi nilai pertanggungan baru tidak sebesar nilai pertanggungan jatuh tempo.

Meanwhile, the number of insured for Marine Cargo Insurance products remained the same as the previous year of 12 insured. This was due to the same numbers of insured that did not extend the policy and the new insured. However, the value of the new insured was not equal to the sum insured.

Rencana Strategis Tahun 2021

LPEI telah menetapkan rencana strategis untuk tahun 2021 yang diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha serta kelancaran dalam menjalankan mandat yang telah ditetapkan. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha dan institusi terkait lainnya akan diperkuat dan diperluas untuk merangkul lebih banyak eksportir yang melakukan penetrasi ke pasar-pasar baru. Bagi nasabah pembiayaan yang selama ini telah berjalan, LPEI akan mengoptimalkan *cross selling* produk asuransi.

2021 Strategic Plan

Indonesia Eximbank has set a strategic plan for 2021 to support business activities as well as efficiency in performing the mandate that has been set. Cooperation with Ministries/ Institutions, business associations and other related institutions will be strengthened and expanded to reach more exporters that penetrate new markets. For existing financing customers, Indonesia Eximbank will optimize cross selling of insurance products.

LPEI selalu melakukan perbaikan dalam hal memperluas *coverage* dan pelayanan Asuransi Ekspor untuk mendukung peningkatan nilai ekspor nasional. Strategi ini terutama difokuskan untuk negara-negara tujuan ekspor serta tujuan investasi yang potensial, baik di negara-negara yang termasuk *low risk country* maupun *high risk country*.

Indonesia Eximbank strives for continuous improvements in expanding the coverage and services of Export Insurance to support the increase in value of national exports. This strategy is primarily focused on export destination countries as well as potential investment destinations, both low risk countries and high-risk countries.

ASURANSI

INSURANCE

Strategi lainnya adalah melakukan pengembangan produk Asuransi antara lain *Marine Cargo Insurance with Rejection Clause*, *Export Bill Insurance*, dan *Buyers Credit Insurance*. Pengembangan produk tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan eksportir dalam memasuki pasar dan persaingan global terkait dengan pengelolaan risiko. Strategi LPEI juga dilakukan melalui optimasi kerja sama dengan perusahaan reasuransi lokal dan luar negeri dalam rangka mitigasi risiko untuk memenuhi prinsip *prudent* dan kehati-hatian.

Another strategy is to develop insurance products, including the Marine Cargo Insurance with Rejection Clause, Export Bill Insurance, and Buyers Credit Insurance. The product development aims to meet the needs of exporters in entering the market and global competition's risk management. To ensure prudent principles, Indonesia Eximbank strategy is also carried out by optimizing cooperation with local and foreign reinsurance companies in risk mitigation.

JASA KONSULTASI

ADVISORY SERVICES

Performa Jasa Konsultasi LPEI mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2020. Hal ini terefleksi dari jumlah UKM yang melakukan ekspor tercatat bertambah menjadi 21 UKM atau bertumbuh 31,25% dibanding tahun sebelumnya. Fokus mengimplementasikan lima pilar dengan konsisten telah menjadi kunci sukses Jasa Konsultasi LPEI di tahun 2020.

Indonesia Eximbank Advisory Services recorded positive growth during 2020. This was reflected in the increase number of SMEs that carried out export to 21 SMEs, grew by 31.25% compared to the previous year. The focus on consistently implementing the five pillars has been the key to the success of Indonesia Eximbank Advisory Services in 2020.

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

Jasa Konsultasi LPEI adalah kegiatan yang ditujukan kepada pihak terkait untuk memberi bantuan dan mengatasi hambatan dalam rangka ekspor serta penyediaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI berfungsi mendukung program eskpor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, Produsen barang ekspor khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Langkah LPEI dalam menjalankan kegiatan usaha Jasa Konsultasi juga semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN), di mana PEN mendorong pengembangan usaha pelaku ekspor yang ada dan menghasilkan pelaku ekspor yang baru. Disamping itu, Jasa Konsultasi yang diberikan LPEI juga dapat dalam bentuk pemberdayaan, pengembangan kapasitas, advokasi, dan/atau Jasa Konsultasi lainnya yang termasuk didalamnya kegiatan dari pendampingan calon eksportir baru.

Dengan demikian, *value proposition* pelaksanaan Jasa Konsultasi oleh LPEI adalah mempermudah proses ekspor terutama pelaku UKM; membuka peluang pasar tujuan ekspor; mendampingi Eksportir yang tidak dapat menjangkau perbankan konvensional; berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendorong ekspor nasional; serta menjaga *Financial Sustainability* lembaga dengan *Fiscal Responsibilty*.

Strategi Tahun 2020
Selama tahun 2020, kegiatan Jasa Konsultasi LPEI difokuskan pada lima pilar yaitu sebagai berikut:

1. ***Coaching Program for New Exporter*** **(CPNE)**
   Scalling up UKM melalui pelatihan ekspor dan pengembangan kapasitas usaha.

2. ***Marketing Handholding*** **(MH)**
   Membuka akses pasar luar negeri dan meningkatkan nilai ekspor bagi para UKM berorientasi ekspor melalui pendampingan intensif dalam rangka pemasaran produk UKM.

Indonesia Eximbank Advisory Services are activities aimed at providing assistance to related parties and overcome obstacles in exports and the provision of National Export Financing. In accordance with Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank functions to support the national export program through National Export Financing (PEN), by providing guidance and advisory services to the Banks, Financial Institutions, Exporters, and Producers of export goods, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Indonesia Eximbank steps in carrying out Advisory Services have also been strengthened by the existence of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 43 of 2019 regarding the Basic Policy for National Export Financing (KD PEN), in which PEN encourages the business development of existing exporters and creates new exporters. Additionally, the Advisory Services provided by Indonesia Eximbank can also be through empowerment, capacity building, advocacy, and/or other Advisory Services that include the activities of assisting new prospective exporters.

As such, the value proposition of Indonesia Eximbank Advisory Services is to simplify export process, particularly for SMEs; open export destination market opportunities; assist exporters that are unable to reach conventional banks; coordinate and synergize with related Ministries/ Institutions (K/L) and State-Owned Enterprises (SOEs) in encouraging national exports; as well as maintain the institution's Financial Sustainability with Fiscal Responsibility.

2020 Strategy
During 2020, Indonesia Eximbank Advisory Services focused on five pillars, namely:

1. **Coaching Program for New Exporters (CPNE)**
   Scaling up SMEs through export training and business capacity building.

2. **Marketing Handholding (MH)**
   Open access to foreign markets and increase export value for export-oriented SMEs through intensive assistance in marketing SME products.

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

3. ***Export Enabler***
   Mengatasi hambatan eksportir dalam mengakses pembiayaan melalui pendampingan intensif kepada UKM Mitra Binaan LPEI.

4. ***Community Development*** **(Desa Devisa)**
   Memperbesar akses masyarakat dan menghasilkan devisa yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui kegiatan berbasis pengembangan komunitas yang memiliki produk unggulan/kearifan lokal.

5. **Program Kemitraan**
   Program pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi mandiri.

Pelaksanaan lima pilar tersebut secara konsisten dan dilakukan dengan komitmen penuh oleh LPEI diharapkan akan memberikan keluaran pelaksanaan mandat dan penguatan persepsi lembaga, PEN yang berkelanjutan, dan meningkatkan *developmental impact*.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 di hampir sepanjang tahun 2020, berbagai kegiatan Jasa Konsultasi yang dilakukan oleh LPEI harus mengalami penyesuaian strategi. Dari sebelumnya secara tatap muka (*offline*) menjadi harus dilakukan dengan cara daring (*online*). Beberapa strategi LPEI dalam menjalankan kegiatan Jasa Konsultasi selama tahun 2020 diantaranya:

- Pameran TEI menjadi *online*.
- Pelatihan Ekspor (CPNE, Tematik, Alumni *Gathering*, IWAPI) menjadi *online*.
- Perluasan akses pasar melalui Platform *E-Commerce* Global.
- Pemetaan dan pelatihan Desa Devisa dilakukan secara *online*.

Kinerja Tahun 2020
Secara komprehensif, kinerja Jasa Konsultasi LPEI menunjukkan hasil yang positif selama tahun 2020. Hal ini tercermin dari jumlah UKM yang melakukan ekspor tercatat bertambah menjadi 21 UKM di tahun 2020, atau bertumbuh 31,25% dibanding tahun 2019 sebanyak 16 UKM. Sedangkan jumlah pelatihan dan atau *coaching* mencapai 26 pelatihan selama tahun 2020, atau menurun dibanding tahun 2019 yang sebanyak 37 pelatihan

3. **Export Enabler**
   Overcoming exporter's barriers in accessing financing through intensive assistance to Indonesia Eximbank's SME Mentoring Partners.

4. **Community Development (Foreign Exchange Village)**
   Enlarge public access and generate foreign exchange which is carried out continuously through community-based activities that have superior products/local wisdom.

5. **Partnership Program**
   Financing program to support capacity building for micro and small businesses so they can become independent.

The consistent implementation of five pillars were carried out with full commitment by Indonesia Eximbank, and is expected to provide outputs of implementing the mandate and strengthening institutional perceptions, sustainable PEN, and increasing developmental impact.

With the COVID-19 pandemic occurring throughout 2020, various Advisory Services activities carried out by Indonesia Eximbank underwent strategic adjustments. From previously face-to-face (offline) to online. Some of the Indonesia Eximbank strategies in carrying out Advisory Services activities during 2020 are among others:

- Online TEI exhibition.
- Online Export Training (CPNE, Thematic, Alumni Gathering, IWAPI).
- Expansion of market access through the Global E-Commerce Platform.
- Mapping and Online Training of Desa Devisa.

2020 Performance
Comprehensively, the performance of Indonesia Eximbank Advisory Services has shown positive results during 2020. This is reflected in the increase number of SMEs that carry out export to 21 SMEs in 2020, grew by 31.25% compared to 16 SMEs in 2019. Meanwhile, the number of trainings and/or coaching reached 26 trainings during 2020, which decreased compared to 37 trainings in 2019. This was due

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas Jasa Konsultasi.

to the COVID-19 pandemic which limited the activities of Advisory Services.

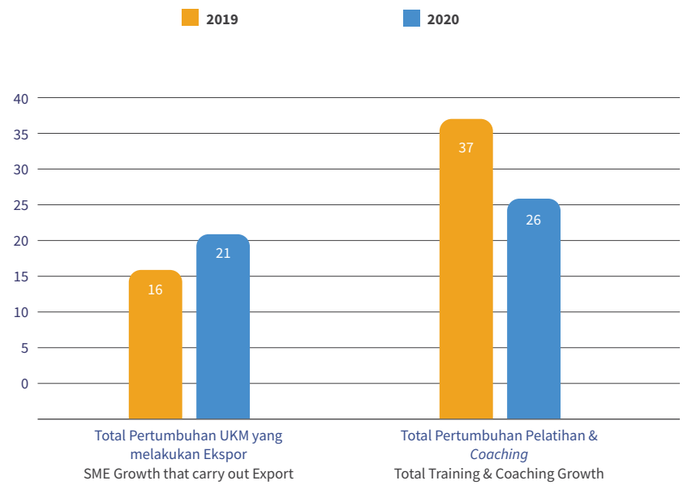

Dalam rangka meningkatkan *capacity building* UKM melalui Jasa Konsultasi, LPEI tercatat telah melakukan sebanyak 32 jenis kegiatan selama tahun 2020. Informasi jenis kegiatan tersebut terinci dalam tabel sebagai berikut:

In order to increase SME capacity building through Advisory Services, Indonesia Eximbank has conducted 32 activities during 2020. Information of activities is detailed in the table below:

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah UKM Number of SMEs	Keterangan Remark
1.	Pendaftaran Calon Peserta CPNE Yogyakarta Registration of Candidates for CPNE Yogyakarta Participants	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yogyakarta, BI Yogyakarta dan Asosiasi Yogyakarta Trade and Industry Office, BI Yogyakarta and the Association	Yogyakarta	58 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
2.	Kurasi Calon Peserta CPNE Yogyakarta Curation of Candidates for CPNE Yogyakarta Participants	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yogyakarta, BI Yogyakarta dan Asosiasi dan Tim Kurator Yogyakarta Trade and Industry Office, BI Yogyakarta and the Association and Team of Curators	Yogyakarta	37 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
3.	Pelatihan ke-1 CPNE Yogyakarta (tatap muka) Modul 1: Bagaimana Memulai Ekspor dan Modul 2: Manajemen Ekspor 1st CPNE Yogyakarta Training (face to face) Module 1: How to Start Exports and Module 2: Export Management	LPEI	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
4.	Pendaftaran Calon Peserta CPNE Makassar (*Online*) Registration of Candidates for CPNE Makassar Participants (Online)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Makassar, BI Sulsel dan Asosiasi dan Tim Kurator Makassar Trade and Industry Office, BI South Sulawesi and the Association and Team of Curators	Makassar	60 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar
5.	Kurasi Calon Peserta CPNE Makassar (*Online*) Curation of Candidates for Candidates for CPNE Makassar Participants (Online)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Makassar, BI Sulsel dan Asosiasi dan Tim Kurator Makassar Trade and Industry Office, BI South Sulawesi and the Association and Team of Curators	Makassar	42 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar
6.	Pelatihan ke-1 CPNE Makassar (*Webinar online*) Modul 1: Bagaimana Memulai Ekspor dan Modul 2: Manajemen Ekspor 1st CPNE Makassar Training (Online Webinar) Module 1: How to Start Exports and Module 2: Export Management	LPEI	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar
7.	Kegiatan *Webinar* Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2019 ke 1 Tema: Aktivitas Ekspor di Masa Covid 19, Kenapa Tidak? 1st CPNE Alumni Webinar Activities Class of 2015 - 2019 Theme: Export Activities in the Covid 19 Period, Why Not?	LPEI	Jakarta	50 UKM | SMEs	Kegiatan webinar alumni CPNE CPNE alumni webinar activities
8.	Pelatihan ke-2 CPNE Yogyakarta (*webinar online*), Modul 3 Korespondensi dan Kontrak Ekspor 2nd CPNE Yogyakarta Training (online webinar), Module 3 Correspondence and Export Contracts	LPEI	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
9.	Pelatihan ke-2 CPNE Makassar (*webinar online*), Modul 3 Korespondensi dan Kontrak Ekspor 2nd CPNE Makassar Training (online webinar), Module 3 Correspondence and Export Contracts	LPEI	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar
10.	Kegiatan *Webinar* Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2019 ke-2 Tema: *Business During* COVID-19 *What To Do?* 2nd CPNE Alumni Webinar Activities Class of 2015 - 2019 Theme: Business During COVID-19 What To Do?	LPEI	Jakarta	60 UKM | SMEs	Kegiatan webinar alumni CPNE CPNE alumni webinar activities
11.	Pelatihan ke-2 CPNE Yogyakarta (*webinar online*), Modul 4: Strategi Internet *Marketing* 2nd CPNE Yogyakarta Training (online webinar), Module 4: Internet Marketing Strategy	LPEI	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah UKM Number of SMEs	Keterangan Remark
12.	Pelatihan ke-2 CPNE Makassar (*webinar online*), Modul 4 : Strategi Internet *Marketing* 2nd CPNE Makassar Training (online webinar), Module 4: Internet Marketing Strategy	LPEI	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar
13.	Pendaftaran Calon Peserta CPNE Kalimantan (*Online*) Registration of Candidates for CPNE Kalimantan Participants (Online)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Se Kalimantan, Perwakilan BI se-Kalimantan dan Asosiasi dan Tim Kurator Department of Trade and Industry in Kalimantan, Representatives of BI in Kalimantan and the Association and Team of Curators	Kalimantan	90 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
14.	Kurasi Calon Peserta CPNE Kalimantan (*Online*) Curation of Candidates for CPNE Kalimantan Participants (On line)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Se Kalimantan, Perwakilan BI se- Kalimantan dan Asosiasi dan Tim Kurator Department of Trade and Industry in Kalimantan, Representatives of BI in Kalimantan and the Association and Team of Curators	Kalimantan	40 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
15.	Pelatihan ke-1 CPNE Kalimantan (*webinar online*), Modul 1: Bagaimana Memulai Ekspor 1st CPNE Kalimantan Training (online webinar), Module 1: How to Start Exporting	LPEI	Kalimantan	30 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
16.	Kegiatan *Webinar* Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2019 ke 3 Tema: *Business Continuity Planning* bagi UKM Ekspor 3rd CPNE Alumni Webinar Activities Class of 2015 - 2019 Theme: Business Continuity Planning for Export SMEs	LPEI	Jakarta	70 UKM | SMEs	Kegiatan webinar alumni CPNE CPNE alumni webinar activities
17.	Pelatihan ke-2 CPNE Kalimantan (*webinar online*), Modul 2: Manajemen Ekspor 2nd CPNE Kalimantan Training (online webinar), Module 2: Export Management	LPEI	Kalimantan	30 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
18.	Pelatihan ke-3 CPNE Yogyakarta (*webinar online*), Modul 5: Pembayaran Internasional (Trade Finance) 3rd CPNE Yogyakarta Training (online webinar), Module 5: International Payments (Trade Finance)	LPEI	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
19.	Pelatihan ke-3 CPNE Makassar (*webinar online*), Modul 5 : Pembayaran Internasional (*Trade Finance*) 3rd CPNE Makassar Training (online webinar), Module 5: International Payments (Trade Finance)	LPEI	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah UKM Number of SMEs	Keterangan Remark
20.	Pelaksanaan pelatihan khusus ekspor bagi anggota IWAPI Kelas *Basic* (Webinar Online) Implementation of special export training for Basic Class IWAPI members (Online Webinar)	IWAPI	Jakarta	70 UKM | SMEs	Pelatihan ekspor bagi IWAPI Export training for IWAPI
21.	Pelaksanaan pelatihan khusus ekspor bagi anggota IWAPI Kelas *Advance* (*Webinar Online*) Implementation of special export training for Advance Class IWAPI members (Online Webinar)	IWAPI	Jakarta	50 UKM | SMEs	Pelatihan ekspor bagi IWAPI Export training for IWAPI
22.	Kegiatan *Webinar* Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2016 Tema: Pengembangan Pasar Ekspor 2015-2016 CPNE Alumni Webinar Activities Theme: Export Market Development	LPEI	Jakarta	20 UKM | SMEs	Kegiatan webinar alumni CPNE CPNE alumni webinar activities
23.	Pelatihan ke-3 CPNE Kalimantan (*webinar online*), Modul 3: Indentifikasi Pasar Ekspor 3rd CPNE Kalimantan Training (online webinar), Module 3: Identification of Export Markets	LPEI	Kalimantan	30 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
24.	Pelatihan ke-4 CPNE Yogyakarta (*webinar online*), Modul 6: Market Intelegent Negara Korea Selatan dan Jepang 4th CPNE Yogyakarta Training (online webinar), Module 6: Market Intelligence in South Korea and Japan	LPEI	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
25.	Pelatihan ke-4 CPNE Makassar (*webinar online*), Modul 6 : *Market Intelegent* Negara Korea Selatan dan Jepang 4th CPNE Makassar Training (online webinar), Module 6: Market Intelligence in South Korea and Japan	LPEI	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Makassar
26.	Kegiatan *Webinar* Alumni CPNE Angkatan 2017 Tema: Akses Pasar dan Sosialisasi Program Jasa Konsultasi 2017 CPNE Alumni Webinar Activities Theme: Market Access and Socialization of Consulting Services Program	LPEI	Jakarta	30 UKM | SMEs	Kegiatan webinar alumni CPNE CPNE alumni webinar activities
27.	Pelatihan CPNE Yogyakarta (*webinar online*), Modul 7: Tata Cara dan Optimalisasi Pameran Internasional CPNE Yogyakarta Training (online webinar), Module 7: Procedures and Optimization of International Exhibitions	LPEI	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah UKM Number of SMEs	Keterangan Remark
28.	Pelatihan CPNE Makassar (*webinar online*), Modul 7: Tata Cara dan Optimalisasi Pameran Internasional CPNE Makassar Training (online webinar), Module 7: Procedures and Optimization of International Exhibitions	LPEI	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Makassar Implementation of CPNE Yogyakarta
29.	Pelatihan CPNE Kalimantan (*webinar online*), Modul 4: Pembayaran Internasional (*Trade Finance*) CPNE Kalimantan Training (online webinar), Module 4: International Payments (Trade Finance)	LPEI	Kalimantan	30 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
30.	Pelatihan CPNE Yogyakarta (*webinar online*), Modul 8: Pencatatan Keuangan – Laporan Keuangan CPNE Yogyakarta Training (online webinar), Module 8: Financial Recording - Financial Reporting	LPEI, Bank Indonesia	Yogyakarta	27 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Yogyakarta Implementation of CPNE Yogyakarta
31.	Pelatihan CPNE Makassar (*webinar online*), Modul 8: Pencatatan Keuangan – Laporan Keuangan CPNE Makassar Training (online webinar), Module 8: Financial Recording - Financial Reporting	LPEI, Bank Indonesia	Makassar	28 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan
32.	Pelatihan CPNE Kalimantan (*webinar online*), Modul 5: Pencatatan Keuangan – Laporan Keuangan CPNE Kalimantan Training (online webinar), Module 5: Financial Recording - Financial Reporting	LPEI, Bank Indonesia	Kalimantan	30 UKM | SMEs	Pelaksanaan CPNE Kalimantan Implementation of CPNE Kalimantan

Rincian terkait aktivitas pendampingan ekspor perdana oleh LPEI selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

Details related to the initial export assistance activities by Indonesia Eximbank during 2020 are described below:

No.	Produk Products	Nilai Ekspor Export Value	Lokasi Location	Tujuan Ekspor Export Destination
1	Gula Aren | Palm Sugar	USD 1.674	Serang	Korea Selatan | South Korea
2	Pakaian Anak | Children Clothing	USD 3.000	Bandung	Malaysia
3	The | Tea	USD 1.926	Bandung	Bangladesh
4	Briket Arang | Charcoal	USD 28.750	Depok	Arab Saudi
5	Furniture	USD 10.000	Yogyakarta	USA
6	Kopra | Copra	USD 15.000	Bandung	Spanyol | Spain
7	Furniture	USD 12.000	Yogyakarta	Swiss
8	Gula Semut | Sugar	USD 1.202	Purworejo	Singapore
9	Sapu Lidi Kelapa Sawit | Palm Oil Broom	USD 32.795	Medan	India
10	Furniture	USD 159.652	Jepara	UK

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

No.	Produk Products	Nilai Ekspor Export Value	Lokasi Location	Tujuan Ekspor Export Destination
11	Kakao Olahan | Processed Cocoa	IDR 30 juta	Makassar	Jepang | Japan
12	Rendang | Meat Stew	USD 124	Jakarta	Australia
13	Kecap botol | Bottle ketchup	IDR 2 juta	Semarang	Jepang | Japan
14	Furniture	USD 17.800	Jakarta	Kanada | Canada
15	Lulur Kosmetik | Cosmetic Scrub	IDR 5 juta	Makassar	Taiwan
16	Furniture	USD 21.500	Yogyakarta	Inggris | UK
17	Kopi | Coffee	USD 500	Balikpapan	Kanada | Canada
18	Fashion	IDR 10,5 juta	Jakarta	Kanada | Canada
19	Permen Jahe | Ginger Candy	USD 10.500	Semarang	Belgia | Belgium
20	Hasil Laut | Sea Produce	USD 850	Makassar	Singapore
21	Umbi Cilembu | Sweet Potato	USD 17.000	Bandung	Hongkong

Rincian terkait aktivitas pelaksanaan *Marketing handholding* oleh LPEI selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

Details related to the activities of implementing Marketing handholding by Indonesia Eximbank during 2020 are described below:

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Lokasi Location	Jumlah Amount
A	Pendaftaran Calon Peserta *Marketing Handholding* Tahap I Registration of Candidates for Participants in Marketing Handholding Phase I	Bali, Jatim, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, NTB Bali, East Java, DIY, Central Java, West Java, NTT, NTB	600 UKM | SMEs
	Kurasi Calon Peserta *Marketing Handholding* Tahap I Curation of Phase I Marketing Handholding Participant Candidates	Bali, Jatim, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, NTB Bali, East Java, DIY, Central Java, West Java, NTT, NTB	59 UKM | SMEs
	Peserta yang lolos kurasi *Marketing Handholding* Tahap I Participants who pass the Marketing Handholding Phase I curation	Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, NTB East Java, DIY, Central Java, Bali, West Java, NTB	1. Produk Rempah-Rempah = 9 UKM 2. Produk Buah & Sayur = 19 UKM 3. Produk Kelapa & turunannya = 16 UKM 1. Spice Products = 9 SMEs 2. Fruit & Vegetable Products = 19 SMEs 3. Coconut Products & their derivatives = 16 SMEs
	Jumlah Posting Produk Number of Product Posts	www.Alibaba.com	Posting Produk: 1. Produk Rempah-Rempah = 52 *posting* 2. Produk Buah & Sayur = 19 *posting* 3. Produk Kelapa & turunannya = 11 *posting* Product Post: 1. Spice Products = 52 posts 2. Fruit & Vegetable Products = 19 posts 3. Coconut Products & derivatives = 11 posts
B	Pendaftaran Calon Peserta *Marketing Handholding* Tahap II Registration of Candidates for Participants in Marketing Handholding Phase II	Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lombok, Bali Central Java, DIY, East Java, Lombok, Bali	62 UKM | SMEs

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Lokasi Location	Jumlah Amount
	Kurasi Calon Peserta *Marketing Handholding* Tahap II Curation of Phase II Marketing Handholding Participant Candidates	Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lombok, Bali Central Java, DIY, East Java, Lombok, Bali	27 UKM | SMEs
	Peserta yang lolos kurasi *Marketing Handholding* Tahap I Participants who pass the Marketing Handholding Phase I curation	Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lombok, Bali Central Java, DIY, East Java, Lombok, Bali	20 UKM | SMEs
	Jumlah *Posting* Produk *Handicraft* & Furniture Number of Posts for Handicraft & Furniture Products	www.Alibaba.com	241 posting Produk | Product posts
C	Pendaftaran Calon Peserta *Marketing Handholding* Tahap III Registration of Candidates for Participants in Marketing Handholding Phase III	Jawa timur, Jawa Barat, DIY, Banten, Kalsel, NTB, Riau, Bali, DKI Jakarta East Java, West Java, DIY, Banten, South Kalimantan, NTB, Riau, Bali, DKI Jakarta	44 UKM | SMEs
	Kurasi Calon Peserta *Marketing Handholding* Tahap III Curation of Phase III Marketing Handholding Participant Candidates	Jawa timur, Jawa Barat, DIY, Banten, Kalsel, NTB, Riau, Bali, DKI Jakarta East Java, West Java, DIY, Banten, South Kalimantan, NTB, Riau, Bali, DKI Jakarta	44 UKM | SMEs
	Peserta yang lolos kurasi *Marketing Handholding* Tahap III Participants who pass the Marketing Handholding Phase III curation	Jawa timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalsel, DKI Jakarta East Java, West Java, Central Java, South Kalimantan, DKI Jakarta	30 UKM | SMEs
	Jumlah Posting Produk Makanan & Minuman serta Komoditi (Kopi) Number of Posts for Food & Beverage Products and Commodities (Coffee)	www.Tradekey.com	30 *Posting* Produk | Product Posts
D	Tansaksi B2B B2B Transactions		
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) Sambal ke Korea Selatan peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) for Sambal to South Korea, participants of the TEI exhibition	Depok , Jawa Barat Depok, West Java	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) *eco coffin & craft* ke UK & Belanda peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) of eco coffin & craft to UK & Netherlands TEI exhibitors	DI Yogyakarta	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) gula semut ke Singapura peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) for sugar ants to Singapore for TEI exhibitors	Purworejo, Jawa Tengah Purworejo, Central Java	1 UKM | SMEs

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Lokasi Location	Jumlah Amount
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) Briket ke Jordan peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) for Briquettes to Jordan TEI exhibitors	Banyuwangi, Jawa Timur Banyuwangi, East Java	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) furniture peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) for furniture for TEI exhibitors	Semarang, Jawa Tengah Semarang, Central Java	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) Rendang ke Aussie peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) Rendang to Aussie TEI exhibitors	DKI Jakarta	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) Kecap Oishii ke Jepang peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) of Oishii Soy Sauce to Japan TEI exhibitors	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) *craft* ke Swedia peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) of craft to Sweden for TEI exhibitors	Ngawi, Jawa Timur Ngawi, East Java	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) furniture ke Australia peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) for furniture to Australia for TEI exhibitors	DI Yogyakarta	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) craft ke Denmark peserta pameran TEI Export Contract Transactions (B2B) for craft to Denmark for TEI exhibitors	Solo	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) *briquette charcoal* Export Contract Transactions (B2B) of Briquette Charcoal	Depok	1 UKM | SMEs
	Transaksi Kontrak Ekspor (B2B) *furniture* Export Contract Transactions (B2B) of furniture	Jepara	1 UKM | SMEs

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

Terkait pelaksanaan *Community Development* oleh LPEI selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

The implementation of Community Development by Indonesia Eximbank during 2020 is described in the following table:

No	Jenis Kegiatan Type of Activity	Lokasi Location	Jumlah Numbers
1.	Survei Potensi Program Pengembangan DESA DEVISA Agrowisata Kawasan Ijen, Banyuwangi – Jawa Timur. Potential Survey of the Ijen Agro-tourism DEVISA VILLAGE Development Program, Banyuwangi - East Java.	Banyuwangi, Jawa Timur	2 Desa | Villages
2.	Penguatan Produksi Pengrajin Coffin Ramah Lingkungan Yang Berorientasi Ekspor Bagi Kelompok UKM Binaan Koperasi APIKRI – Provinsi DI.Yogyakarta Strengthening Production of Export-Oriented Eco-Friendly Coffin Craftsmen for SME Groups Assisted by the APIKRI Cooperative - DI. Yogyakarta Province	Yogyakarta	5 UKM | SMEs
3.	Peningkatan Kapasitas Petani Kakao Koperasi KSS, Kab. Jembrana – Bali Capacity Building for Koperasi KSS Cocoa Farmers, Kab. Jembrana - Bali	Jembrana, Bali	20 Petani | Farmers
4.	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha Koperasi Semaya Samaniya Dalam Masa Pandemi Covid-19 Assistance & Monitoring of Semaya Samaniya Cooperative Business Activities during the Covid-19 Pandemic	Jembrana, Bali	1 Koperasi | Cooperative
5.	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha KSU APIKRI Dalam Masa Pandemi Covid-19 Assistance & Monitoring of APIKRI's KSU Business Activities during the Covid-19 Pandemic	Yogyakarta	1 Koperasi | Cooperative
6.	MOU dengan DJKN Balinusra dan Pemkab Klungkung untuk Pengembangan DESA DEVISA Garam Kusamba MOU with DJKN Balinusra and Klungkung Regency Government for Development of Kusamba Salt DEVISA VILLAGE	Klungkung, Bali	1 Koperasi | Cooperative
7.	Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Berbasis Pengembangan Komoditas Ekspor Unggulan Forum Group Discussion (FGD) Institutional Empowerment Development-Based Cooperatives Leading Export Commodities	Klungkung, Bali Banyuwangi, Jawa Timur	2 Koperasi | Cooperatives

JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk menghadapi tahun 2021 yang diprakirakan masih penuh dengan tantangan utamanya dari pandemi COVID-19, fokus LPEI adalah kepada penyiapan rencana strategis yang menguatkan lima pilar sebagai berikut:

2021 Strategic Plan

To address 2021 that forecasted to remain challenges with the COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank's focus is to prepare a strategic plan that strengthens the five pillars:

Kegiatan Activity	Rencana Strategis The Strategic Plan
Coaching Program for New Exporter (CPNE)	Fokus pada: 1. Penguatan Infrastruktur pelaksanaan CPNE (Sistem Penjaringan, Modul, dan *Trainer*); 2. Digitalisasi pelatihan dan pendampingan (*Platform E-Learing* dan *Apps Exim Starter*); dan 3. Perluasan jangkauan Wilayah Pelatihan. Focus on: 1. Strengthening the infrastructure for implementing CPNE (Networking System, Modules, and Trainers); 2. Digitalizing training and mentoring (E-Learing Platform and Exim Starter Apps); and 3. Expanding the coverage of the Training Area..
Marketing Handholding (MH)	Fokus pada: 1. Penguatan Infrastruktur Pelaksanaan MH (*Platform E-Commerce* LPEI); 2. Perluasan jumlah UKM dan Produk yang terdaftar di *Marketplace*; dan 3. Pameran berskala Internasional. Focus on: 1. Strengthening the Implementation Infrastructure of the MH (LPEI E-Commerce Platform); 2. Expanding the number of SMEs and products listed on the Marketplace; and 3. International exhibition.
Desa Devisa Foreign Exchange Village	Fokus pada: 1. Penguatan Infrastruktur pelaksanaan Desa Devisa (Penguatan program, Manual dan SOP); 2. Sinergi dengan SMV dan *stakeholder* lainnya; 3. Penguatan potensi baru (R & D); dan 4. Perluasan jangkauan Desa Devisa. Focus on: 1. Strengthening Infrastructure for the implementation of Desa Devisa (Strengthening programs, Manuals and SOPs); 2. Synergy with SMV and other stakeholders; 3. Strengthening new potential (R & D); and 4. xpanding the reach of Desa Devisa.
Export enabler	Fokus pada: 1. Penguatan infrastruktur pelaksanaan *export enabler* (Pembuatan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan UKM); dan 2. Perluasan pemberian jasa pendampingan pre pembiayaan khusus UKM Mitra Binaan. Focus on: 1. Strengthening the infrastructure for the implementation of the export enabler (Making Applications for the Compilation of SME Financial Statements); and 2. Expanding the provision of pre-financing assistance services specifically for SMEs Mentoring Partners.
Program Kemitraan Partnership Program	Fokus pada: 1. Pembuatan *Credit Scoring*; dan 2. Penyaluran dilakukan oleh Divisi Bisnis UKMK. Focus on: 1. Preparation of Credit Scoring; and 2. Distribution carried out by the UKMK Business Divisio.

PENGELOLAAN TRESURI

TREASURY MANAGEMENT

Pada tahun 2020, LPEI telah mendapatkan dukungan likuiditas dari fasilitas pinjaman valuta asing bilateral dan sindikasi sebesar US$1,24 miliar, termasuk diantaranya *Stand By Facility* senilai US$210 Juta. LPEI juga mendapat dukungan likuiditas pinjaman Rupiah sebesar Rp6,28 triliun yang didalamnya termasuk *Stand By Facility* senilai Rp2,95 triliun. Penyertaan Modal Negara turut diperoleh LPEI untuk meningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional maupun pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah Rp10 triliun.

In 2020, Indonesia Eximbank has received liquidity support from a bilateral and syndicated foreign currency loan facility of US$1.24 billion, including a Stand By Facility at US$210 million. Indonesia Eximbank has also received liquidity support for Rupiah loans amounted to Rp6.28 trillion, which includes a Stand By Facility of Rp2.95 trillion. Indonesia Eximbank has also obtained State Equity Participation to increase the National Export Financing and the implementation of the National Economic Recovery Program at Rp10 trillion.

PENGELOLAAN TRESURI

TREASURY MANAGEMENT

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) selalu berupaya meningkatkan aktivitas bisnis tresuri untuk mengelola kecukupan likuiditas, serta optimasi pendapatan dari pengelolaan portofolio tresuri. Pengelolaan tresuri memberikan layanan secara langsung kepada nasabah berupa produk yang diperlukan, baik untuk kebutuhan transaksi, likuiditas, maupun dalam hal mitigasi risiko nilai tukar dan suku bunga.

Produk tresuri yang ditransaksikan di pasar keuangan terdiri dari produk *foreign exchange*, *money market*, *fixed income* atau surat berharga yang diterbitkan, serta produk derivatif untuk tujuan lindung nilai. LPEI juga senantiasa mengendalikan likuiditas pendanaan agar dapat dipergunakan setiap saat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dengan biaya dana yang wajar.

Strategi Tahun 2020

LPEI telah menetapkan fokus pada tahun 2020. Pada prinsipnya yang menjadi fokus adalah pengelolaan likuiditas yang optimal dengan tetap memberikan pelayanan produk treasuri kepada nasabah, dan pengelolaan eksposur portofolio tresuri dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pada tahun 2019, LPEI masih mencatatkan *Non Performing Loans* (NPL) di atas ketentuan POJK No. 40 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sehingga LPEI diharuskan untuk memperoleh *majority waiver consent* atas seluruh pinjaman sindikasi yang masih *outstanding*.

Kinerja keuangan LPEI, khususnya kondisi NPL juga menyebabkan turunnya minat dari kreditur inti. Hal tersebut diiringi dengan pengenaan *risk* premium oleh kreditur baru yang menyebabkan tekanan dalam perolehan dana kompetitif. Investor juga belum memiliki platform dalam berinvestasi kepada Lembaga Keuangan *Sovereign*, minat semata-mata didasarkan pada kinerja keuangan.

Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir sepanjang tahun 2020 telah memaksa proses pekerjaan dilakukan secara *remote* dan virtual. Hal tersebut membuat tuntutan digitalisasi proses operasional semakin besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Indonesia Eximbank strives to increase treasury business activities to manage adequate liquidity, as well as to optimize revenue from the treasury portfolio management. Treasury management provides direct services to customers through products for transaction needs, liquidity, as well as to mitigate foreign exchange and interest rate risks.

Treasury products transaction on the financial market consist of foreign exchange products, money market, fixed income or securities issued, as well as derivative products for hedging purposes. Indonesia Eximbank also constantly controls the liquidity of funding so that it can be used at any time to meet payment obligations to third parties at reasonable costs.

2020 Strategy

Indonesia Eximbank has set a focus in 2020. In principle, this focus is on optimal liquidity management, while providing treasury product services to customers and management of treasury portfolio exposure while taking into account the prudential principles.

In 2019, Indonesia Eximbank still recorded Non-Performing Loans (NPL) above the stipulation of POJK No. 40 regarding Development and Supervision of Indonesian Export Financing Institutions. This requires Indonesia Eximbank to obtain a majority waiver consent for all outstanding syndicated loans.

Indonesia Eximbank's financial performance, particularly the condition of NPL, also caused a decline in interest from core creditors. This was accompanied by the imposition of a risk premium by new creditors which caused pressure to obtain competitive funds. Investors also do not have a platform to invest in Sovereign Financial Institutions, as interest is solely based on financial performance.

The conditions of the COVID-19 pandemic throughout 2020 have forced the work process to be done remotely and virtually. This makes the demands for digitalization of the operational process even greater.

PENGELOLAAN TRESURI
TREASURY MANAGEMENT

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, LPEI telah menerapkan beberapa strategi yang relevan dan disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki. Strategi dimaksud antara lain:

- Identifikasi kreditur untuk mengetahui potensi perolehan *waiver*, sehingga dapat fokus untuk melakukan pendekatan kepada kreditur yang tepat.
- Melakukan pemetaan terhadap kreditur eksisting dan memperluas sebaran kreditur untuk mendapatkan bauran sumber dana yang variatif, baik dari basis kreditur maupun produk pendanaan (tenor valuta, serta suku bunga).
- Antisipatif dengan menyiapkan opsi-opsi pendanaan sebagai mitigasi apabila kreditur potensial tidak dapat lanjut pada tahap finalisasi perjanjian kerja sama.
- Penyederhanaan dan digitalisasi proses operasional tresuri dengan memberlakukan *digital signature*, STP (*straight thru processing*), dan MIS yang terintegrasi.

To address these challenges, Indonesia Eximbank has implemented several strategies that are relevant and adjusted to its capabilities. These strategies among others:

- Identification of creditors to determine potential waivers, hence to focus on making approaches to the right creditors.
- Mapping existing creditors and expanding the distribution of creditors to obtain a varied mix of sources of funds, both from the creditor base and funding products (tenor currency, and interest rates).
- Preparing funding options as mitigation to anticipate whether potential creditors are unable to continue at the stage of finalizing the cooperation agreement.
- Simplification and digitization of treasury operational processes by implementing integrated digital signature, STP (straight thru processing), and MIS.

Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, LPEI telah mendapatkan dukungan likuiditas Valuta Asing (Valas) dari hasil pinjaman bilateral dan sindikasi sebesar US$1,24 miliar, termasuk diantaranya *Stand By Facility* senilai US$210 juta. LPEI juga memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan total plafon sebesar Rp24 triliun. Tanggal berakhirnya program tersebut hingga 30 Juni 2022.

LPEI mendapatkan pula dukungan fasilitas likuiditas Rupiah sebesar Rp6,28 triliun, termasuk diantaranya *Stand By Faciity* senilai Rp2,95 triliun. Sedangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional serta melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) tercatat totalnya sebesar Rp10 triliun.

Selain untuk memastikan tingkat likuiditas yang memadai, pengelolaan tresuri juga untuk memaksimalkan pendapatan dari portofolio tresuri yang dimiliki LPEI. Adapun terkait program kerja dan kegiatan, serta realisasi pengelolaan tresuri oleh LPEI selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

2020 Performance

In 2020, Indonesia Eximbank has received support for foreign currency (FX) liquidity from bilateral and syndicated loans of US$1.24 billion, including a Stand By Facility of US$210 million. Indonesia Eximbank also obtained an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) for the Sustainable Public Offering (PUB) of Indonesia Eximbank V Shelf Bonds and PUB Sustainable Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II with a total ceiling of Rp24 trillion. The expiration date of the program is until 30 June 2022.

Indonesia Eximbank also received support of Rupiah liquidity facilities at Rp6.28 trillion, including Stand By Facilities of Rp2.95 trillion. Meanwhile, the State Equity Participation (SEP) to enhance the National Export Financing and implement the National Economic Recovery Program (PEN Program) was recorded at a total of Rp10 trillion.

Apart from ensuring an adequate level of liquidity, treasury management is also intended to maximize income from the treasury portfolio owned by Indonesia Eximbank. The work program and activities, as well as the realization of treasury management by Indonesia Eximbank during 2020 are as follows:

PENGELOLAAN TRESURI
TREASURY MANAGEMENT

Program Kerja & Kegiatan Work & Activity Programs	Realisasi Realization
Terpenuhinya *Majority Waiver Consent* 66,67% dari setiap fasilitas Sindikasi *Outstanding* senilai US$2,16 miliar Fulfilled the Majority Waiver Consent of 66.67% of each Outstanding Syndication facility which is worth US$2.16 billion	Diperolehnya *Majority Waiver Consent* atas tiga fasilitas Sindikasi *Outstanding* Received Majority Waiver Consent for three Outstanding Syndication facilities
Terpenuhinya kewajiban hutang valas US$900 Juta, efek-efek yang diterbitkan Rp8,4 triliun dan bilateral sebesar Rp2 triliun. Fulfilled the foreign currency debt obligations of US$900 million, securities issued of Rp8.4 trillion and bilateral of Rp2 trillion.	Terpenuhinya kewajiban hutang valas US$900 Juta dan efek-efek yang diterbitkan Rp8,4 triliun, dengan: • Diperolehnya pinjaman valas dengan total US$1,24 miliar dari 10 Bank dan/atau Lembaga Keuangan. • Pinjaman Rupiah sebesar Rp6,28 triliun dari enam Bank. • Serta pengoptimalan *Treasury Asset* untuk menjaga likuiditas yang efisien. Fulfilled foreign currency debt obligations of US$900 million and securities issued of Rp8.4 trillion by: • Obtaining foreign currency loans totaling US$1.24 billion from 10 banks and/or financial institutions. • Rupiah loans amounting to Rp6.28 trillion from six banks. • Optimizing Treasury Asset to maintain efficient liquidity.
Update Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) hingga 2022. Update on the Sustainable Public Offering Program (PUB) until 2022	Memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan total plafon hingga sebesar Rp24 Triliun dengan tanggal berakhir program hingga 30 Juni 2022. Obtained an effective statement from OJK for the Sustainable Public Offering (PUB) of Indonesia Eximbank V Shelf Bonds and PUB Sustainable Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II with a total ceiling of up to Rp24 Trillion, with the program ending date until 30 June 2022
Bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Multilateral. Cooperation with Multilateral Financial Institutions.	Bekerjasama dengan dua Lembaga Keuangan Multilateral, yaitu: 1. China Eximbank – *Term Loan Syndicated* US$200 Juta 2. Korea Eximbank – *Uncommitted Loan* US$200 Juta Collaboration with two Multilateral Financial Institutions, namely: 1. China Eximbank - Syndicated Term Loan of US$200 Million 2. Korea Eximbank - Uncommitted Loan of US$200 Million
Mendukung berjalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pelaksanaan MOU dan PKS PEN dengan Perbankan di Indonesia. Support the implementation of the National Economic Recovery (PEN) program by implementing the MOU and PKS PEN with Banking in Indonesia.	Penandatangan MOU dan/atau Perjanjian Kerjasama Program PEN dengan 21 Bank. Signing of the MOU and/or PEN Program Cooperation Agreement with 21 Banks,

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk dapat menghadapi tantangan tahun 2021 yang diproyeksikan masih penuh dengan dinamika utamanya dari pandemi COVID-19 sebagai episentrumnya, LPEI telah menyusun rencana dan strategi tahun 2021 sebagai berikut:

Strategic Plan for 2021

To address the challenges of the COVID-19 Pandemic in 2021, Indonesia Eximbank has developed the following plans and strategies:

PENGELOLAAN TRESURI

TREASURY MANAGEMENT

Rencana Plan	Strategi Strategy
Terpenuhinya kewajiban hutang valas US$335 Juta, efek-efek yang diterbitkan Rp8,88 triliun dan bilateral sebesar Rp1,57 triliun. Fulfill foreign currency debt obligations of US$335 million, securities issued of Rp8.88 trillion and bilateral of Rp1.57 trillion.	Memperluas sebaran kreditur untuk mendapatkan bauran sumber dana yang variatif, baik dari basis kreditur maupun produk pendanaan (tenor valuta, serta suku bunga). Memperbanyak fasilitas *stand by* untuk memastikan ketersediaan sumber dana. Expand the distribution of creditors to obtain a varied mix of sources of funds, both from the creditor base and funding products (tenor currency, and interest rates). Increase stand-by facilities to ensure the availability of sources of funds.
Mendukung Program Pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Support Government Programs, particularly the National Economic Recovery (PEN).	Menambah jumlah Bank yang bekerjasama dalam program PEN, *monitoring* proses pelaksanaan dengan tujuan untuk menambah jumlah utilisasi penjaminan. Increase the number of banks that cooperate in the PEN program and monitor the implementation process with the aim of increasing the total utilization of guarantees.
Digitalisasi proses operasional Tresuri. Digitalisasi proses operasional Tresuri.	Penyempurnaan penyederhanaan dan digitalisasi proses operasional Tresuri dengan memberlakukan *digital signature*, STP (*straight thru processing*), dan MIS yang terintegrasi. Complete the simplification and digitization of the Treasury's operational processes by implementing an integrated digital signature, STP (straight thru processing), and MIS.
Optimalisasi Hubungan Korespondensi dan Limit Bank Optimalisasi Hubungan Korespondensi dan Limit Bank	Melakukan *review* secara menyeluruh atas hubungan korespondensi dan limit Bank yang dimiliki oleh LPEI, agar dapat mendukung serta mengakomodasi transaksi ekspor & bank garansi yang eksisting maupun potensi Lembaga ke depan. Conduct a thorough review of the correspondence relationship and Bank limits owned by LPEI, in order to support and accommodate existing export and bank guarantee transactions, as well as the potential of the Institution in the future.

TRADE FINANCE

TRADE FINANCE

Pada tahun 2020, LPEI terus berupaya mengembangkan dan menguatkan fitur produk *Trade Finance* untuk meningkatkan daya saing Eksportir Indonesia, serta peningkatan layanan dan efisiensi proses. LPEI juga antusias menjalankan mandat Program Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance*.

In 2020, Indonesia Eximbank continues to develop and strengthen its Trade Finance product features to increase the competitiveness of Indonesian Exporters, as well as to improve service and process efficiency. Indonesia Eximbank is also enthusiastic in carrying out the mandate of Trade Finance Export National Interest Account Program.

TRADE FINANCE

TRADE FINANCE

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus berupaya menyediakan *one stop solution services* kepada nasabah dengan penyediaan fasilitas *Trade Finance.* Baik itu untuk *pre-shipment* (termasuk di dalamnya *post-import)* hingga *post-shipment,* sesuai dengan kebutuhan nasabah atau calon nasabah. Untuk melaksanakan upaya tersebut, LPEI telah melakukan *technical assistance* dan *advisory* dalam menyusun struktur fasilitas *Trade Finance*, yang merupakan kolaborasi antara fasilitas *Trade Finance* dengan dukungan fasilitas *guarantee* maupun *insurance.*

Dalam perencanaan struktur fasilitas *Trade Finance*, selain risiko komersial dan operasional, risiko-risiko dalam transaksi *cross-border* juga diperhitungkan secara cermat oleh LPEI. Seperti risiko *sovereign,* risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko pasar atas fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, risiko likuiditas, dan *credit risk default.* Selain itu, dengan pemanfaatan jaringan yang luas untuk memitigasi risiko dan optimasi *funding* berbasis *Trade Finance,* diharapkan juga dapat diperoleh biaya dan *pricing* yang lebih efisien.

LPEI terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas proses bisnis yang *prudent* dan berdasar pada *trade cycle* Eksportir. Pengembangan dan peningkatan yang dimaksud adalah dalam hal penyediaan fasilitas kepada nasabah, pelaksanaan proses transaksi yang sesuai dengan *domestic* dan *international standard rules*, *technical assistance* dan *advisory* oleh *certified and professional trade advisor*, penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kepatuhan, serta kehati-hatian yang mengikuti isu-isu *international compliance*.

Di sisi lain, penyediaan fasilitas rantai pasok terintegrasi dan mempertimbangkan *trade cycle* kepada Eksportir telah memberikan manfaat berupa nilai tambah. Tidak hanya bagi Eksportir melainkan juga termasuk di dalamnya para pemasok. Di mana fasilitas tersebut menciptakan peluang bisnis baru atau peningkatan penjualan bagi para pemasok, yang kemudian berdampak positif dengan bertambahnya kesempatan lapangan kerja serta dapat berkontribusi bagi peningkatan taraf hidup pada masyarakat sekitar.

Manfaat lain penyediaan fasilitas *Trade Finance* LPEI kepada Eksportir adalah memberikan peluang perusahaan untuk berekspansi. Sehingga diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas perekonomian nasional, peningkatan ekspor nasional, penyerapan tenaga kerja maupun pengurangan kemiskinan.

Dengan fasilitas *Trade Finance* yang diberikan oleh LPEI, Eksportir dapat pula mengoptimalkan *cash flow* ketika mendapatkan talangan pembayaran hutang dagang dan mendapatkan percepatan pembayaran piutang. Sehingga Eksportir dapat memenuhi kebutuhan operasional, percepatan pembelian bahan baku untuk proses produksi berikutnya, serta diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan ekspor maupun dalam rangka ekspor.

Selain itu, LPEI juga berupaya memberikan *technical assistance* dan *advisory* kepada Eksportir dan calon Eksportir, khususnya UKME. Tujuannya untuk *capacity building* dan penyediaan alternatif skema transaksi ekspor agar aktivitas perdagangan eksportir lebih optimal.

Strategi Tahun 2020

Global pandemi COVID-19 memberikan tekanan dalam aktifitas pedagangan antar negara, termasuk ekspor Indonesia di hampir sepanjang tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara masih *volatile* disebabkan tinggi rendahnya kasus COVID-19 setiap negara berbeda, sehingga berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi di masing-masing negara.

Untuk mengimbangi tantangan tersebut, strategi yang dilakukan LPEI di tahun 2020 antara lain terus berupaya mengembangkan dan menguatkan fitur produk untuk meningkatkan daya saing Eksportir Indonesia, serta peningkatan layanan dan efisiensi proses *Trade Finance*.

Di tengah kondisi ketidakpastian global dan peningkatan risiko perdagangan yang dihadapi oleh para Eksportir selama tahun 2020, LPEI juga menerapkan strategi penguatan peran dan dukungan fasilitasi ekspor untuk memperkuat infrastuktur pendukung *Trade Finance*. Baik secara langsung maupun fasilitasi melalui sinergi dan kerja sama kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, serta Lembaga Keuangan Bank/Bukan Bank.

LPEI turut memberikan *technical assistance* maupun *sharing knowledge* dalam hal *Trade Finance* kepada nasabah *existing*, perusahaan UKM rintisan ekspor melalui

Indonesia Eximbank strives to continually provide one stop solution services to customers by providing Trade Finance facilities. Whether it's pre-shipment (including post-import) to post-shipment according to customer or prospective customer needs. To carry out these efforts, Indonesia Eximbank has provided a technical assistance and advisory system in structuring the Trade Finance facility, which is a collaboration between the Trade Finance facility and the support of both guarantee and insurance facilities.

In planning the structure of the Trade Finance facility, apart from commercial and operational risks, Indonesia Eximbank carefully calculates the risks involved in cross-border transactions. These include sovereign risk, legal risk, compliance risk, reputation risk, market risk on fluctuations in exchange rates and interest rates, liquidity risk, and default credit risk. Additionally, it is hoped that more efficient costs and pricing can be obtained by utilizing an extensive network to mitigate risks and optimize trade finance-based funding.

Indonesia Eximbank continues to develop and improve the quality of sensible business processes and the Exporter's trade cycle. The developments and enhancements referred to are provisions of facilities to customers, implementation of transaction processes in accordance with domestic and international standard rules, technical assistance and advisories by certified and professional trade advisors, the strengthening of risk management and implementation of compliance principles, as well as adhering to caution towards international compliance issues.

On the other hand, the provision of an integrated supply chain facility and consideration to the trade cycle to exporters has provided added value benefits not only for exporters, but also for suppliers. These facilities create new business opportunities and increase sales for suppliers, which then has a positive impact as it increases job opportunities and can contribute to improving the standard of living of the community.

Another benefit of Indonesia Eximbank Trade Finance facilities to exporters is that it gives companies the opportunity to expand. It is thus expected to increase national economic activity, increase national exports, absorb labor and reduce poverty.

With the Trade Finance facility provided by Indonesia Eximbank, Exporters can also optimize cash flow when getting bailouts of accounts payable and getting early payment of accounts payable. This enables exporters to meet operational needs, accelerates the purchase of raw materials for the next production process, and increases the volume of export sales.

Apart from that, Indonesia Eximbank also strives to provide technical assistance and advice to exporters and prospective exporters, particularly ESME. The aim is for capacity building and the provision of alternative export transaction schemes to optimize exporters' trade activities.

2020 Strategy

The global COVID-19 pandemic has put pressure on trade activities between countries, including Indonesia's exports for most of 2020. The projected economic growth of each country remain volatile due to the high and low levels of COVID-19 cases in each country, thus affecting the economic recovery individually.

To balance these challenges, the strategies implemented by Indonesia Eximbank in 2020 include continuing to develop and strengthen product features to increase the competitiveness of Indonesian exporters, as well as improve services and efficiency of the Trade Finance process.

In the midst of global uncertainty and increased trade risk faced by exporters during 2020, Indonesia Eximbank also implemented a strategy to strengthen the supporting infrastructure for Trade Finance, by reinforcing the role and support of export facilitation. It also directly strengthen facilitation through synergy and institutional cooperation with Ministries/Institutions, as well as Banks/Non-Bank Financial Institutions.

Indonesia Eximbank also provides technical assistance and knowledge sharing of Trade Finance to existing customers, export start-up SME companies through the

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

program *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) dan kepada *stakeholder* lainnya.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberikan stimulus kepada Eksportir, di penghujung tahun LPEI juga menjalankan mandat Program Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance*.

Kinerja Tahun 2020
Perkembangan volume *Trade Finance* LPEI mengalami perlambatan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan tekanan kondisi perekonomian global, persaingan dagang, serta pandemi COVID-19 telah berdampak pada aktivitas perdagangan debitur LPEI dengan mitra dagangnya.

Selama tahun 2020, LPEI terus berupaya memperkuat koordinasi dan infrastuktur internal dalam hal:
- Melakukan pemasaran bersama dan struktur fasilitas dengan unit pembiayaan kepada nasabah Korporasi, UKM, dan Syariah.
- Memproses utilisasi/*disbursement* fasilitas *Trade Finance* untuk nasabah, baik dalam hal penerimaan dokumen, pengecekan syarat dan kondisi penarikan, persiapan sumber dana, sampai dengan instruksi pelaksanaan transaksi dai pembukuan oleh unit kerja operasional.
- Memberikan pelayanan *Trade Finance* dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang ketat, melalui peningkatan peran kantor wilayah dan pelayanan LPEI sebagai representasi Kantor Pusat dalam penerimaan dokumen *Trade Finance* nasabah.
- Menjadi *contributor* dalam pengembangan fitur maupun modul produk dalam pembangunan *corebanking system* pendukung transaksi *Trade Finance*.
- *Sharing knowledge, capacity building*, *technical assistance* dan *advisory* kepada internal lembaga untuk pemerataan informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola transaksi *Trade Finance*.

Coaching Program for New Exporter (CPNE) and to other stakeholders.

To support the Government's program to provide stimulus to exporters, at the end of the year Indonesia Eximbank also carried out the mandate of the Trade Finance Export National Interest Account Program.

2020 Performance
The development of Indonesia Eximbank Trade Finance volume was stagnant in 2020. This was due to pressures from global economic conditions, trade competition, and the COVID-19 pandemic that has impacted trading activities of Indonesia Eximbank borrowers and their trading partners.

During 2020, Indonesia Eximbank continues to strengthen internal coordination and infrastructure by:
- Conducting joint marketing and facility structures with financing units to corporate, SME and Sharia customers.
- Processing the utilization/disbursement of Trade Finance facilities for customers, through receiving documents, checking terms and conditions for withdrawals, preparing sources of funds, and carrying out transactions and bookkeeping by operating units.
- Providing Trade Finance services with a strict Service Level Agreement (SLA), by enhancing the role of regional offices and Indonesia Eximbank services as representatives of the Head Office in receiving customers' Trade Finance documents.
- Becoming a contributor in the development of product features and modules in the construction of a core banking system to support Trade Finance transactions.
- Sharing knowledge, capacity building, technical assistance and advice to internal institutions to distribute information, knowledge and experience in managing Trade Finance transactions.

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

Sedangkan dukungan kepada Eksportir dan sinergi dengan pihak eksternal yang dilakukan pada tahun 2020 diantaranya:
- Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dalam hal antara lain *trade based funding* (pemenuhan sumber dana yang efisien), *trade facility* (pengelolaan transaksi LKB/LKBB Risk), *trade infrastructure & network* (sinergi pelayanan rekening dan transaksi), serta *trade relationship management* (komunikasi, kerja sama maupun *sharing* informasi dalam hal *Trade Finance*).
- Menginisiasi terobosan perluasan jaringan pelayanan transaksi maupun pelaksanaan ketentuan pelaporan dari regulator dengan menjalin kerja sama kelembagaan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT. Bank UOB Indonesia.
- Melaksanakan penugasan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi untuk meningkatkan transaksi perdagangan melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE) *Trade Finance*.
- Menjadi pemateri/anggota khusus dalam program Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan ekspor. Di antaranya terkait *task force countertrade*, *trade facilitation*, dan perluasan pasar non-tradisional.
- Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga maupun regulator dalam hal *sharing knowledge*, *capacity building*, *technical assistance* dan *advisory* kepada para pemangku kepentingan eksternal. Di antaranya kepada Eksportir maupun regulator sebagai upaya sinkronisasi kebijakan terkait *Trade Finance*.
- Menjadi anggota *Factor Chain International* (FCI) yang merupakan asosiasi para pelaku *factoring* yang beranggotakan sekitar 400-an *Factor Agency* dari 90 negara di dunia.

Rencana Strategis Tahun 2021
Pada tahun 2021, kondisi perekonomian global diprediksi masih akan mengalami tekanan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan akibat dampak pandemi global COVID-19 yang masih terus berlanjut. Di tengah tantangan ini, LPEI senantiasa berupaya meningkatkan layanan dengan mendorong efisiensi pelayanan *Trade Finance* dan mengembangkan produk-produk yang meningkatkan daya saing Eksportir Indonesia

Meanwhile, support for exporters and synergy with external parties in 2020 include:

- Cooperating with financial institutions through trade based funding (fulfillment of efficient funding sources), trade facilities (management of LKB/LKBB Risk transactions), trade infrastructure & networks (synergy of account and transaction services), and trade relationship management (communication, cooperation and information sharing in terms of Trade Finance).
- Initiating breakthroughs in expanding the transaction service network and implementing regulatory reporting requirements by establishing institutional cooperation with PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, and PT. Bank UOB Indonesia.
- Carrying out government assignments related to stimulating the economy in order to increase trade transactions through the Trade Finance Export National Interest Account (NIA).
- Becoming a speaker/special member in the Ministry/Institution program to increase exports. Among them are related to the task force countertrade, trade facilitation, and expansion of non-traditional markets.
- Cooperation with Ministries/Institutios and regulators by sharing knowledge, capacity building, technical assistance and advisory to external stakeholders. Also, cooperation with exporters and regulators as an effort to synchronize policies related to Trade Finance.
- Becoming a member of the Factor Chain International (FCI), which is an association of factoring actors with around 400 Factor Agencies from 90 countries around the world.

2021 Strategic Plan
In 2021, it is still predicted that global economic conditions will continue to experience pressure and uncertainty in trade policies due to the COVID-19 pandemic. Despite this challenge, Indonesia Eximbank strives to improve services by encouraging the efficiency of Trade Finance services and developing products that increase the competitiveness of Indonesian Exporters.

TRADE FINANCE

TRADE FINANCE

Upaya peningkatan yang dilakukan LPEI adalah dengan memfasilitasi Eksportir secara langsung melalui fasilitas pembiayaan yang terstruktur *pre* dan *post shipment financing* sebagai bentuk *credit risk mitigation*. LPEI juga akan memperkuat peran dalam mengisi ceruk pasar (*filling the market gap*) melalui peningkatan kerja sama dengan mitra Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank untuk memfasilitasi Eksportir Indonesia yang merupakan nasabah lembaga keuangan dimaksud.
Sedangkan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, LPEI akan melanjutkan pelaksanaan mandat Program Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance*, dan mendukung penuh agenda Pemerintah untuk melakukan penetrasi pasar ke negara-negara non-tradisional dengan menjalin hubungan melalui perbankan dan lembaga keuangan di negara-negara non-tradisional.

Aktivitas *sharing knowledge* dan *technical assistance* kepada para pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal juga akan dilaksanakan oleh LPEI secara konsisten terkait dengan fasilitas *Trade Finance*.

Indonesia Eximbank's improvement efforts are by facilitating exporters directly through structured pre and post shipment financing facilities, as a form of credit risk mitigation. Indonesia Eximbank will also strengthen its role in filling the market gap by increasing cooperation with Bank and Non-Bank Financial Institution partners in order to facilitate Indonesian Exporters as the customers of such financial institutions.

Meanwhile, to support the National Economic Recovery Program, Indonesia Eximbank will continue to carry out the mandate of Export Trade Finance National Interest Account Program, and fully support the Government's agenda to penetrate the market of non-traditional countries by establishing relationships through banks and financial institutions in non-traditional countries.

Sharing knowledge and technical assistance to stakeholders, both internal and external, will also be consistently carried out by Indonesia Eximbank in relations with Trade Finance facilities.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Tinjauan keuangan berikut ini mengacu kepada laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member firm of the RSM network, dan memperoleh opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LPEI tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following financial review refers to the consolidated financial statements of Indonesia Eximbank, which has been audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member firm of the RSM network, and obtained the opinion of fairly, in all material respects, the financial position of Indonesia Eximbank dated 31 December 2020, including financial performance and cash flows for the year ended on the said date, in accordance with the Financial Accounting Standard in Indonesia.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Komponen Aset (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Assets Components (Rp Million)
Kas	342	1.350	1.099	-18,59%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8.331	15.090	17.913	18,71%	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank - Neto	184.388	335.734	5.520.843	1544,41%	Current Account with Banks - Net
Penempatan pada Bank - Neto	10.542.492	17.538.669	7.980.668	-54,50%	Placements with Banks - Net
Efek-Efek	182.492	576.543	572.273	-0,74%	Securities
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.504.655	-	-	-	Reverse Repos
Tagihan Derivatif	1.283	1.410	-	-100,00%	Derivative Receivable
Pembiayaan dan Piutang	108.858.667	97.806.606	90.408.073	-7,56%	Financing and Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Pembiayaan dan Piutang	-4.744.318	-11.281.176	-17.672.164	-56,65%	Allowance for Impairment Losses - Financing and Receivables
Piutang Lainnya	300.951	290.587	303,054	4,29%	Other receivables
CKPN - Piutang Lainnya	-1.624	-2.989	-7.242	-142,29%	Allowance for Impairment Losses - Other Receivables
Pajak Dibayar Dimuka	246.357	339.625	169.074	-50,22%	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	18.698	14.582	12.068	-17,24%	Prepaid Expenses
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Neto	5.415	1.400	34.631	2.373,64%	Insurance and Guarantess Receivables - Net
Aset Reasuransi	3.728	4.853	1.284	-73,54%	Reinsurance Assets
Tagihan Akseptasi - Neto	1.407.413	658.289	558.417	-15,17%	Acceptances Receivables- Net
Aset Tetap - Neto	1.334.577	1.253.355	1.166.348	-6,94%	Fixed Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan – Neto	161.584	1.080.267	2.793.458	158,59%	Defered Tax Assets - Net
Aset Lain-Lain	55.626	67.530	224.763	232,83%	Other Assets
Jumlah Aset	**120.071.057**	**108.701.725**	**92.084.560**	**-15,29%**	**Total Assets**

ASET

Jumlah aset LPEI tahun 2020 mencapai Rp92,08 triliun atau turun 15,29% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp108,70 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh turunnya penempatan pada bank, serta pembiayaan dan piutang. Selain itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) mengalami peningkatan, hal ini untuk menjaga kualitas asset serta mitigasi risiko kerugian yang mungkin terjadi pada aset bermasalah. Sedangkan akun aset yang menunjukkan kenaikan pesat adalah giro pada bank.

ASSETS

In 2020, Indonesia Eximbank total assets reached Rp92.08 trillion or decreased by 15.29% compared to Rp108.70 trillion in 2019. The decrease was mainly due to a decrease of placements with banks, as well as financing and receivables. Moreover, allowance for impairment losses increased, in order to maintain assets quality and mitigate the risk of losses that may occur on non-performing assets. While assets that recorded an increase was current accounts with banks.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas LPEI tahun 2020 mencapai Rp13,54 triliun pada tahun 2020, turun 24,33% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp17,89 triliun. Penurunan ini disebabkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan, sementara di sisi lain kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menunjukkan peningkatan. Sedangkan dari aktivitas investasi tercatat ada perolehan pada kas neto meski jumlahnya tidak cukup siginifikan.

Cash and Cash Equivalents

In 2020, Indonesia Eximbank cash and cash equivalents position reached Rp13.54 trillion, decreased by 24.33% compared to Rp17.89 trillion in 2019. The decrease was due to a decrease of net caash from operating activities, while net cash used in funding activities increased. Whereas there was gain of net cash from investing activities eventhough the number was insignificant.

Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki LPEI tahun 2020 mencapai Rp572,27 miliar, turun sedikit 0,74% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp576,54 miliar. Efek-efek LPEI terdiri atas efek-efek yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN), SPN Syariah, dan Obligasi Pemerintah Republik Indonesia lainnya. Efek-efek tersebut dalam mata uang Rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS), serta diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Securities

In 2020, Indonesia Eximbank securities reached Rp572.27 billion, slightly decreased by 0.74% compared to Rp576.54 billion in 2019. The Company's securities consist of Government Bonds (SPN), Sharia Bonds, and other Republic of Indonesia Government Bonds. In both Rupiah and US Dollar currencies, and traded in the capital market and money market.

Pembiayaan dan Piutang yang Diberikan

Total pembiayaan dan piutang yang diberikan LPEI tahun 2020 turun 7,56% menjadi Rp90,41 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp97,81 triliun. Penurunan ini terjadi disebabkan pembiayaan dan piutang yang diberikan LPEI terkait Penugasan Umum juga turun 8,47% menjadi Rp88,81 triliun di tahun 2020. Namun pembiayaan dan piutang yang diberikan LPEI terkait Penugasan Khusus mengalami peningkatan pesat hingga 106,48%, dari sebelumnya Rp773,63 miliar naik menjadi Rp1,59 triliun.

Financing and Receivables

In 2020, Indonesia Eximbank financing and receivables decreased by 7.56% to Rp90.41 trillion, compared to Rp97.81 trillion in the previous year. The decrease was dued to a decrease of financing and receivables of General Assignment by 8.47% to Rp88.81 trillion in 2020. However, financing and receivables of National Interest Account was significanty increased by 106.48% from previously Rp773.63 billion to Rp1.59 trillion.

Pembiayaan dan Piutang yang Diberikan Berdasarkan Penugasan
Financing and Receivables Based on Assignment

Pembiayaan Diberikan (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Financing (Rp Million)
Penugasan Umum	107.986.655	97.032.975	88.810.706	-8,47%	General Assignment
Penugasan Khusus	872.012	773.631	1.597.367	106,48%	National Interest Account
Total Pembiayaan dan Piutang yang Diberikan	**108.858.667**	**97.806.606**	**90.408.073**	**-7,56%**	**Total Financing and Receivables**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Dari sisi pembiayaan dan piutang yang diberikan LPEI berdasarkan jenis penggunaan pada tahun 2020, baik itu modal kerja, investasi, dan lainnya masing-masing mengalami penurunan menjadi Rp47,54 triliun, Rp42,76 triliun, dan Rp102,99 miliar. Sehingga porsi masing-masingnya juga ada perubahan, di mana yang mengalami peningkatan adalah modal kerja dari sebelumnya 51,84% di tahun 2019 menjadi 52,59% di tahun 2020. Sedangkan investasi dan lainnya turun dari sebelumnya 48,04% dan 0,12% menjadi 47,30% dan 0,11%.

Financing and receivables provided by the Company based on types of use such as working capital, investment, and others were respectively decreased in 2020 to Rp47.54 trillion, Rp42.76 trillion, and Rp102.99 billion. Thereby each portion also changed, where the increase was on working capital from previously 51.84% in 2019 to 52.59% in 2020. Whereas investment and others decreased from previously 48.04% and 0.12% to 47.30% and 0.11%.

Pembiayaan dan Piutang yang Diberikan Berdasarkan Jenis Penggunaan
Financing and Receivables Based on Types of Use

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Modal Kerja	56.214.781	50.704.202	47.542.043	-6,24%	Working Capital
Investasi	52.529.841	46.983.709	42.763.042	-8,98%	Investment
Lainnya	114.045	118.695	102.988	-13,23%	Others
Jumlah	**108.858.667**	**97.806.606**	**90.408.073**	**-7,56%**	**Total**

Berdasarkan mata uang, pembiayaan dan piutang yang diberikan LPEI mayoritas masih dalam denominasi Rupiah dengan porsi menjadi 59,35% pada tahun 2020 atau naik dibanding tahun 2019 yang sebesar 59,17%. Sedangkan porsi dalam mata uang dolar AS menurun dibanding tahun sebelumnya, dari 40,83% menjadi 40,65%.

Indonesia Eximbank financing and receivables based on currencies was still in Rupiah denomination with a share of 59.35% in 2020 or increased compared to 59.17% in 2019. While portion of US Dollar currency decreased by 40.65% from previously 40.83%.

Pembiayaan dan Piutang yang Diberikan Berdasarkan Mata Uang
Financing and Receivables Based on Currencies

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Rupiah	59.843.868	57.867.646	53.655.180	-7,28%	Rupiah
US Dollar	49.014.799	39.938.960	36.752.893	-7,98%	US Dollar
Jumlah	**108.858.667**	**97.806.606**	**90.408.073**	**-7,56%**	**Total**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk LPEI senantiasa berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi ekonomi serta tren pembiayaan dan piutang tahun berjalan. Tujuannya untuk menjaga kualitas pembiayaan dan piutang serta sebagai bentuk langkah mitigasi risiko.

Di sepanjang tahun 2020, situasi dan kondisi ekonomi global dan nasional serta pembiayaan dan piutang telah terkena dampak pandemi COVID-19. Dalam merespon kondisi serta adanya penerapan PSAK 71, LPEI harus meningkatkan CKPN pembiayaan dan piutang sebesar 56,65% atau dari sebelumnya Rp11,28 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp17,67 triliun pada tahun 2020.

Allowance for Impairment Losses

Indonesia Eximbank sets the Allowance for Impairment Losses based on consideration related to economic conditions and relevant year financing and receivables. This is to maintain financing and receivables quality as well as for risk mitigation measure.

Throughout 2020, the global and national economic situation and conditions including financing and receivables were impacted by the COVID-19 pandemic. In responding this conditions and with the application of PSAK 71, Indonesia Eximbank shall increase the financial and receivables allowance for impairment losses by 56.65% or from previously Rp11.28 trillion in 2019 to Rp17.67 trillion in 2020.

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Saldo awal per 1 Januari	2.944.952	4.744.318	11.281.176	137,78%	Balance December 31 (Previous Year)
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	6.007.009	-	SFAS 71 first implementation impact
Saldo awal per 1 Januari -setelah penyesuian	-	-	17.288.185	-	Balance January 1 (Current Year)
Pembentukan penyisihan tahun berjalan	1.699.095	6.671.355	446.425	-93,31%	Provision for impairment losses during the year
Penghapusbukuan		(1.990)	-	-	Written-off
Penyesuian karena penjabaran mata uang asing	100.271	(132.507)	(62.446)	52,87%	Foreign exchange translation adjustment
Saldo per 31 Desember	**4.744.318**	**11.281.176**	**17.672.164**	**56,65%**	**Balance as of 31 December**

Piutang Asuransi dan Penjaminan

Pada tahun 2020, piutang asuransi dan penjaminan LPEI tercatat mencapai Rp34,63 miliar, tumbuh signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp1,40 miliar. Sementara aset reasuransi turun menjadi Rp1,28 miliar di tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp4,85 miliar.

Insurance and Guarantee Receivables

In 2020, Indonesia Eximbank insurance and guarantee receivables reached Rp34.63 billion, significantly grew compared to previous year achievement of Rp1.40 billion. While reinsurance assets decreased to Rp1.28 billion in 2020 compared to Rp4.85 billion in the previous year.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas LPEI tahun 2020 tercatat sebesar Rp67,29 triliun, turun 25,04% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp89,76 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya pinjaman yang diterima dan efek-efek utang yang diterbitkan guna menjaga optimalisasi *liabilities* dan *liquidity management*. Sedangkan akun liabilitas yang mengalami peningkatan antara lain estimasi klaim penjaminan dan liabilitas segera.

LIABILITIES

In 2020, Indonesia Eximbank total liabilities stood at Rp67.29 trillion, decreased by 25.04% compared to Rp89.76 trillion in the previous year. The decrease was mainly due to a decrease of fund borrowings and debt securities issued in order to maintain optimization of liabilities and liquidity management. Whereas an increase of liabilities accounts were among others estimated guarantee claims and current liabilities.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Liabilitas Segera	37.302	35.030	37.936	8,30%	Current Liabilities
Liabilitas Akseptasi	1.407.413	658.289	562.727	-14,52%	Acceptance Payable
Utang Pajak	58.396	45.929	11.664	-74,60%	Taxes Payable
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Neto	44.113.667	45.146.915	36.481.044	-19,19%	Debt Securities Issued - Net
Liabilitas Terkait Dengan Transaksi Efek-Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	1.504.655	-	-	-	Liability Related to Reverse Repos
Liabilitas Derivatif	29.144	2.258	-	-100,00%	Derivatives Payable
Pinjaman yang Diterima	49.858.784	41.492.912	28.599.773	-31,07%	Fund Borrowings
Utang Asuransi	3.061	2.150	2.563	19,21%	Insurance Payable
Utang Penjaminan	572	497	560	12,68%	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	4.109	6.515	3.230	-50,42%	Insurance Liabilities
Estimasi Klaim Penjaminan	13.851	6.848	41.129	500,60%	Estimated Guarantee Claim
Liabilitas Imbalan Kerja	231.274	292.329	182.553	-37,55%	Liability for Employee Benefits
Liabilitas Sewa Guna Usaha	2.464	-	14.837	-	Lease liabilities
Liabilitas Lain-Lain	1.616.953	2.073.301	1.349.995	-34,89%	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	**98.881.645**	**89.762.973**	**67.288.011**	**-25,04%**	**Total Liabilities**

Efek-efek Utang yang Diterbitkan

Di tengah situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya kondusif dengan terjadinya pandemi selama tahun 2020, LPEI hanya menerbitkan dua efek utang untuk mendukung pembiayaan aset produktif. Efek-efek dimaksud adalah Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I – 2020 yang diterbitkan pada Juli 2020. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp22 triliun, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama dua tahun.

Debt Securities Issued

In the midst of unfavorable situation and conditions due to the pandemic during 2020, Indonesia Eximbank only issued two debt securities to support earnings assets financing. The securities were Indonesia Eximbank Shelf Bonds V Phase I of 2020 issued on July 2020. This Bonds was part of Indonesia Eximbank Shelf Bonds V with fixed interest rate and targeted fund acquisition of Rp22 trillion, which planned to be fully disbursed during two years.

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta | Rp Million)	Jatuh Tempo Maturity Date	Name of Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48.000	Juli 2023 July 2023	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020

Kemudian di periode yang sama, LPEI juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I – 2020. Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif

In the same period, Indonesia Eximbank also issued Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020. Proceeds from this Sukuk Mudharabah issuance was used to provide earnings assets financing in the form of export

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 47,37% dengan indikatif bagi hasil setara 6,75% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu 8 Juli 2020. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

financing of sharia principles. Ratio of Sukuk Mudharabah holders stood at 47.37% with an indication of profit sharing equal to 6.75% per annum, within a period of 370 Calendar Days since the Issuance Date of 8 July 2020. This Sukuk Mudharabah was listed at the Indonesia Stock Exchange.

Nama Sukuk Mudharabah	Nominal (Rp Juta | Rp Million)	Jatuh Tempo Maturity Date	Name of Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020	100.000	Juli 2021 July 2021	Sukuk Mudharabah Phase I Shelf Registration Offering II - 2020

Pinjaman yang Diterima

Pada tahun 2020, *outstanding* pinjaman yang diterima LPEI mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp41,49 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp28,59 triliun atau turun 31,07%. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya pinjaman sindikasi sebesar 50,60% menjadi Rp18,96 triliun. Sedangkan pada pinjaman bilateral mengalami pertumbuhan 209,22% menjadi Rp9,64 triliun.

Fund Borrowings

In 2020, outstanding fund borrowings received by Indonesia Eximbank decreased from previously Rp41.49 trillion in 2019 to Rp28.59 trillion or decreased by 31.07%. The decrease was mainly due to a decrease of syndicated loans by 50.60% to Rp18.96 trillion. Wherease bilateral loans grew by 209.22% to Rp9.64 trillion.

Utang Asuransi dan Penjaminan

Utang asuransi yang terdiri dari utang premi reasuransi, utang komisi, dan utang klaim LPEI mengalami peningkatan 19,21% menjadi Rp2,56 miliar pada tahun 2020, dari sebelumnya Rp2,15 miliar pada tahun 2019. Sedangkan utang penjaminan tumbuh 12,68% menjadi Rp560 juta dari sebelumnya Rp497 juta.

Insurance Payables and Guarantee Payables

Indonesia Eximbank's insurance payables consisting of reinsurance premium payables, commission payables, and claims payables increased by 19.21% to Rp2.56 billion in 2020, from previously Rp2.15 billion in 2019. Whereas guarantee payables grew 12.68% to Rp560 million from previously Rp497 million.

EKUITAS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal LPEI dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan PMN sebesar Rp5 triliun. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp4 triliun yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI, dan Rp1 triliun untuk melaksanakan Penugasan Khusus.

Kemudian berdasarkan PP No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke dalam Modal LPEI dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan PMN sebesar Rp5 triliun. Penambahan penyertaan modal dimaksud

EQUITY

Pursuant to the Government Regulation No. 40 of 2020 dated 21 July 2020 on the Contribution of State Equity Participation (SEP) of the Republic of Indonesia in to Indonesia Eximbank Capital, which stated that the Government of Indonesia contributed SEP amounted to Rp5 trillion. The capital contribution consisted of Rp4 trillion to increase Indonesia Eximbank business capacity, and Rp1 trillion for the National Interest Account.

Further based on Government Regulation No. 70 of 2020 dated 30 December 2020 regarding the Contribution of SEP of the Republic of Indonesia in to Indonesia Eximbank Capital, which stated that the Government of Indonesia contributed SEP amounted to Rp5 trillion. The capital

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

digunakan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2020 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI mencapai Rp32,15 triliun, meningkat 45,15% dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp22,15 triliun.

Secara keseluruhan, posisi ekuitas LPEI tercatat sebesar Rp24,79 triliun atau tumbuh 30,93% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp18,94 triliun. Adapun uraian terkait ekuitas LPEI adalah sebagai berikut:

contribution was aimed for the Implementation of National Economic Recovery Program.

As such, as of the end of 2020 the equity contribution of the Government of Indonesia to Indonesia Eximbank reached Rp32.15 tillion, increased by 45.15% compared to Rp22.15 trillion in 2019.

Overall, Indonesia Eximbank equity position stood at Rp24.79 trillion or grew 30.93% in 2020 compared to Rp18.94 trillion in 2019. The following are details of the Company's equity:

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Kontribusi modal Pemerintah					**Government Capital Contribution**
Penugasan Umum	15.330.397	16.946.276	20.946.276	23,60%	General Assignment
Penugasan Khusus	4.200.000	5.200.000	11.200.000	115,38%	National Interest Account
	19.530.397	22.146.276	32.146.276	45,15%	
Laba (rugi) yang Belum Direalisasi Atas Efek-Efek Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual - neto, Setelah Pajak Tangguhan	-3.849	13.245	39.456	197,89%	Unrealized Gain (Loss) on Available-For-Sale Securities, Net of Deferred Tax
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti - Neto Setelah Pajak Tangguhan	9.131	8.019	91.645	1.042,85%	Remeasurement of Defined Benefit Obligation, Net of Deferred Tax
Saldo Laba					**Retained Earnings**
Telah Ditentukan Penggunaanya					Appropriated
Cadangan Umum	322.161	322.161	322.161	0,00%	General Reserve
Cadangan Tujuan	758.235	758.235	758.235	0,00%	Specific Reserve
	1.080.396	1.080.396	1.080.396	0,00%	
Belum Ditentukan Penggunaannya	573.337	(4.309.184)	(8.561.224)	-98,67%	Unappropriated
Total Ekuitas	**21.189.412**	**18.938.752**	**24.796.549**	**30,93%**	**Total Equity**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Pendapatan dan Beban Operasional					**Income and Expenses from Operations**
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	7.540.609	7.061.466	5.102.881	-27,74%	Interest Income and Income from Sharia
Pendapatan Usaha dari Ujrah	1.108	-	-	-	Income from Ujrah
Beban Bunga	(5.415.182)	(5.646.218)	(4.262.993)	24,50%	Interest Expense
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah - Neto	**2.126.535**	**1.415.248**	**839.888**	**-40,65%**	**Interest Income and Income from Sharia - Net**
Pendapatan Dari Asuransi – Neto	2.788	3.320	4.104	23,61%	Income from Insurance – Net
- Pendapatan dari Asuransi	8.628	8.018	9.843	22,76%	Income from Insurance -
- Premi Reasuransi	(5.840)	(4.698)	(5.739)	-22,16%	Reinsurance Premiums -
(Kenaikan)/Penurunan pada Liabilitas Asuransi	(969)	(2.499)	2.979	219,21%	(Increase)/Decrease in Insurance Liabilities
Kenaikan/(Penurunan) Pada Aset Reasuransi	1.502	1.166	(3.437)	-394,77%	Increase/(Decrease) In Reinsurance Assets
Beban Klaim Asuransi dan Lainnya	(1.126)	(952)	(1.395)	-46,53%	Claim Expense from Insurance and Other
Pendapatan Dari Penjaminan	113.277	99.222	80.194	-19,18%	Income from Guarantee
Keuntungan Transaksi Mata	106.812	31.292	70.889	126,54%	Gain on Foreign Exchange
Uang Asing - Neto					Transactions - Net
Provisi dan Komisi Selain dari Pembiayaan dan Piutang	87.305	82.898	86.861	4,78%	Non-Financing and Receivables Related Fees and Commission
Lain-lain	27.550	80.032	77.400	-3,29%	Others
Pendapatan Operasional Lainnya - Neto	**337.139**	**294.479**	**317.595**	**7,85%**	**Total Other Operating Income - Net**
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(1.700.719)	(6.681.341)	(423.080)	93,67%	Provision for Impairment Losses on Financial Assets
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	(5.578)	6.802	(1.946)	-128,61%	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional Lainnya					**Other Operating Expenses**
Gaji dan Tunjangan	(369.941)	(366.280)	(395.732)	-8,04%	Salaries and benefits
Umum dan Administrasi	(276.549)	(300.391)	(235.346)	21,65%	General and Administrative
Beban Lain-Lain	(15.124)	(24.563)	(45.809)	-86,50%	Others
(Rugi) Laba Operasional	**95.763**	**(5.656.046)**	**55.570**	**100,98%**	**(Loss) Income From Operations**
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	14.458	21.188	6.152	-70,96%	Non-Operating Income – Net
(Rugi) Laba Sebelum Beban Pajak	110.221	(5.634.858)	61.722	101,10%	(Loss) Income Before Tax Expense
Manfaat Pajak	61.452	924.009	226.666	-75,47%	Tax Benefit
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	**171.673**	**(4.710.849)**	**288.388**	**106,12%**	**(Loss) Income For The Year**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain – Neto Setelah Pajak	25.330	15.982	109.837	587,25%	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**197.003**	**(4.694.867)**	**398.225**	**108,48%**	**Total Comprehensive (Loss) Income for the year**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

Pada tahun 2020, LPEI membukukan pendapatan bunga dan usaha syariah sebesar Rp5,10 triliun atau turun 27,74% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp7,06 triliun. Penurunan terutama disebabkan pendapatan dari Penugasan Umum turun 29,18% menjadi Rp4,79 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6,76 triliun. Sedangkan pendapatan dari Penugasan Khusus terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 4,91%, dari sebelumnya Rp299,86 miliar menjadi Rp314,58 miliar.

Hingga akhir tahun 2020, porsi pendapatan LPEI terbesar masih di kontribusi dari pendapatan bunga pembiayaan dan piutang walau perolehannya menurun dibanding tahun sebelumnya. Porsinya terhitung menjadi 73,83% per tahun 2020 atau turun tipis dibanding tahun 2019 sebesar 73,96%. Sedangkan pendapatan usaha syariah walau pencapaiannya menurun tetapi secara porsi menunjukkan peningkatan dari 15,27% menjadi 16,27%. Adapun penjelasan lebih rinci dari pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Interest Income and Income from Sharia

In 2020, Indonesia Eximbank booked interest income and income from sharia at Rp5.10 trillion or decreased by 27.74% compared to Rp7.06 trillion in 2019. The decrease was mainly due to a decrease of income from General Assignment by 29.18% to Rp4.79 trillion compared to Rp6.76 trillion in 2019. Whereas income from National Interest Account positively grew by 4.91% from previously Rp299.86 billion to Rp314.58 billion.

As of the end of 2020, Indonesia Eximbank's portion of income remained contributed by interest income of financing and receivables eventhough recorded a decrease of acquisition compared to previous year. The portion stood at 73.83% in 2020 or slightly decreased compared to 73.96% in 2019. Whereas income from sharia, eventhough recorded a decrease of acquisition, the portion increased from 15.27% to 16.27%. The following are details explanation on Indonesia Eximbank interest income and income from sharia during the last three years:

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Pendapatan Bunga					**Interest Income**
Pembiayaan dan piutang	5.860.080	5.222.653	3.767.277	-27,87%	Financing and Receivables
Penempatan pada bank	423.905	706.855	477.224	-32,49%	Placement with banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	116.550	33.620	-	-100,00%	Reverse repos
Giro pada bank tersedia untuk dijual	4.037	3.147	1.397	-55,61%	Current account with bank available for sale
Efek-efek Diukur pada nilai wajar	6.048	16.641	26.914	61,73%	Securities Measured at fair value
Total pendapatan Bunga	**6.410.620**	**5.982.916**	**4.272.812**	**-28,58%**	**Total Interest Income**
Pendapatan Usaha Syariah					**Income from Sharia**
Pembiayaan *Musyarakah*	899.830	835.747	681.746	-18,43%	Musyarakah Financing
Marjin Piutang *Murabahah*	230.159	242.803	148.323	-38,91%	Murabahah Receivables Margin
Total Pendapatan Usaha Syariah	**1.129.989**	**1.078.550**	**830.069**	**-23,04%**	**Total Income from Sharia**
Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	**7.540.609**	**7.061.466**	**5.102.881**	**-27,74%**	**Total Insterest Income and Income from Sharia**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Beban bunga

LPEI mampu mengendalikan beban bunga dengan menurunkannya hingga 24,50% menjadi sebesar Rp4,26 triliun di tahun 2020, dari sebelumnya Rp5,65 triliun di tahun 2019. Penurunan tersebut didukung dengan beban bunga dari efek-efek utang yang diterbikan turun hingga 12,11%, dari sebelumnya Rp3,47 triliun menjadi Rp3,05 triliun. Kemudian beban bunga dari pinjaman yang diterima dapat ditekan hingga 44,30% menjadi Rp1,21 triliun, dari sebelumnya Rp2,17 triliun.

Interest Expenses

Indonesia Eximbank was able to control interest expense with a decrease of 24.50% to Rp4.26 trillion in 2020, from previously Rp5.65 trillion in 2019. The decrease was supported by a decrease of debt securities issued by 12.11% from previously Rp3.47 trillion to Rp3.05 trillion. Further interest expense from fund borrowings was decreased by 44.30% to Rp1.21 trillion, from previously Rp2.17 trillion.

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description (Rp Million)
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan	3.493.698	3.473.728	3.052.891	-12,11%	Debt Securities Issued
Pinjaman yang Diterima	1.921.484	2.172.490	1.210.102	-44,30%	Fund Borrowings
Total Beban Bunga	5.415.182	5.646.218	4.262.993	-24,50%	Total Interest Expense

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Pada tahun 2020, LPEI tercatat mampu membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp61,72 miliar. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya LPEI mengendalikan beban bunga dan beban operasional lainnya dengan baik di tengah tantangan pandemi selama tahun 2020.

Profit (Loss) Before Tax

In 2020, Indonesia Eximbank was able to book profit before tax at Rp61.72 billion. This achievement is an integral part of the Company's good efforts in controlling interest expense and other operating expense in the midst of the pandemic during 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba sebelum pajak yang positif dan diperolehnya manfaat pajak sebesar Rp226,67 miliar membuat LPEI menghasilkan laba tahun berjalan sebesar Rp288,39 miliar, atau mencapai target laba tahun 2020. Perbaikan yang cukup signifikan tersebut merupakan salah satu hasil kerja keras LPEI yang terus berupaya menguatkan fondasi dengan semangat "*Regain our Footing*" selama tahun 2020, serta akan terus berusaha melanjutkan momentum yang baik ini pada tahun 2021.

Profit (Loss) for The Year

Backed by positive profit before tax and acquisition of tax benefits at Rp226.67 billion has enabled Indonesia Eximbank to book profit for the year amounted to Rp288.39 billion, or reaching the target of profit for 2020. Such fairly significant improvement was one of the results of the Company's hard work that continually strives to strengthen its foundation with a spirit of "Regain our Footing" during 2020. The Company will continue to maintain this good momentum in 2021.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

ARUS KAS

Posisi Kas dan Setara Kas akhir tahun LPEI pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp13,54 triliun, turun 24,33% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp17,89 triliun. Penurunan ini disebabkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan. Sementara di sisi lain, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan tinggi dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi belum cukup signifikan.

CASH FLOWS

Indonesia Eximbank Cash and Cash Equivalents position reached Rp13.54 trillion in 2020, decreased by 24.33% compared to Rp17.89 trillion in 2019. The decrease was due to a decrease of net cash provided by operating activities. While on the other hand, net cash used in financing activities was highly increased and net cash provided by investing activities were yet insignificant.

Uraian (Rp Juta)	2018	2019	2020	Description (Rp Million)
Kas Neto Diperoleh dari/ (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(6.237.255)	12.197.956	7.121.718	Net Cash Provided By/ (used in) Operating Activities
Kas Neto Diperoleh dari/ (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(349.366)	(183.464)	35.135	Net Cash Provided By/ (used In) Investing Activities
Kas Neto Diperoleh dari/ (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	9.209.952	(4.890.494)	(11.579.733)	Net Cash Provided By/ (Used In) Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	2.730.143	7.155.290	(4.351.991)	Net Increase/(Decrease) In Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	8.005.410	10.735.553	17.890.843	Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	10.735.553	17.890.843	13.538.852	Cash and Cash Equivalent at End of Year

Arus Kas Dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp7,12 triliun atau turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp12,19 triliun. Penurunan ini antara lain disebabkan penurunan aset operasi dari pembiayaan dan piutang tahun 2020 hanya sebesar Rp6,76 triliun, atau jauh lebih kecil dari tahun 2019 yang sebesar Rp11,43 triliun. Hal ini diikuti pula oleh penerimaan bunga, provisi dan komisi tahun 2020 yang juga lebih kecil dari tahun sebelumnya, dari Rp5,99 triliun menjadi Rp4,27 triliun.

Cash Flows from Operating Activities

In 2020, net cash provided by operating activities stood at Rp7.12 trillion or decreased compared to Rp12.19 trillion in 2019. The decrease was among others due to a decrease of operating assets from financing and receivables at Rp6.76 trillion in 2020, or lower compared to Rp11.43 trillion in 2019. This was also followed by a decrease acquisition of interest, fees and commission from previous year of Rp5.99 trillion to Rp4.27 trillion in 2020.

Arus Kas Untuk Kegiatan Investasi

Pada tahun 2020, aktivitas investasi yang dilakukan oleh LPEI memperoleh kas bersih sebesar Rp35,14 miliar. Mencermati situasi dan kondisi investasi selama tahun 2020 yang terganggu dengan adanya pandemi COVID-19, LPEI meresponnya antara lain dengan tidak melakukan pembelian efek-efek tersedia untuk dijual.

Cash Flows for Investing Activities

Indonesia Eximbank acquired net cash from investing activities at Rp35.14 billion in 2020. Observing the investment situation and condidtion during 2020 that was disrupted by the COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank responded among other by not carrying out any purchase of securities available for sale.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2020, kas neto yang digunakan LPEI untuk aktivitas Pendanaan tercatat mencapai Rp11,58 triliun atau meningkat 136,78% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,89 triliun. Hal ini terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman yang diterima dan efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo masing-masingnya sebesar Rp45,57 triliun dan Rp8,83 triliun di tahun 2020 atau meningkat dibandingkan pembayaran tahun sebelumnya.

Cash Flows from Financing Activities

In 2020, Indonesia Eximbank net cash used in financing activities reached Rp11.58 trillion or increased by 136.78% compared to Rp4.89 trillion in 2019. This was mainly used for payments of fund borrowings and matured debt securities issued at respectively Rp45.57 trillion and Rp8.83 trillion in 2020 or increased compared to previous year payments.

Namun di sisi lain, aktivitas pendanaan LPEI di tahun 2020 juga terdapat peningkatan pada penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp32,68 triliun, serta penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp10 triliun.

However on the other hand, Indonesia Eximbank financing activities in 2020 recorded an increase of proceeds from fund borrowings amounted to Rp32.68 trillion, and contributed capital received from the Government of Indonesia at Rp10 trillion.

ANALISA KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG SERTA RASIO KEUANGAN YANG RELEVAN

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND RELEVANT FINANCIAL RATIOS

Kemampuan Membayar Utang

LPEI memiliki kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemampuan LPEI untuk memenuhi kewajiban terefleksi dari penilaian lembaga pemeringkat PT Pefindo. Berikut penilaian dari lembaga pemeringkat PT Pefindo yang diperoleh LPEI untuk tahun 2019 dan 2020:

Solvency

Indonesia Eximbank has sufficient solvency in the long term and short term. This was reflected from the rating assesment by rating agency PT Pefindo. The following are assessment form rating agency PT Pefindo received by the Company in 2019 and 2020:

Obligasi/MTN/Sukuk	Peringkat Pefindo / Pefindo Ratings		Bonds/MTN/Sukuk
	2019	2020	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV - 2015	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II - 2015
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V - 2015	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II - 2015
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI - 2015	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II - 2015
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII - 2016	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I - 2016	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016
MTN I Indonesia Eximbank - 2016	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase I MTN - 2016
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II - 2016	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Obligasi/MTN/Sukuk	Peringkat Pefindo Pefindo Ratings 2019	2020	Bonds/MTN/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018	idAAA(sy)	idAAA(sy)	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018	idAAA(sy)	idAAA(sy)	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019	idAAA(sy)	idAAA(sy)	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV - 2019	idAAA(sy)	idAAA(sy)	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019	idAAA	idAAA	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	-	idAAA	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020	-	idAAA(sy)	Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah terdiri dari Kolektibilitas Kurang lancar, Diragukan, dan Macet. LPEI tetap terus berupaya mengendalikan kualitas pembiayaannya sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meski menghadapi tantangan pandemi di tahun 2020.

Financing Collectability Levels

Non-performing financing consists of substandard, doubtful, and loss collectability. Indonesia Eximbank strives to control its financing quality in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulation despite the challenges in addressing the pandemic in 2020.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Kolektibilitas Pembiayaan (Rp Juta)	2018	2019	2020	Financing Collectibility Levels (Rp Millions)
Pembiayaan Lancar	93.911.174	74.929.793	66.832.220	Current Financing
Lancar	83.376.010	63.336.224	49.832.561	Current
Dalam Perhatian Khusus	10.535.164	11.593.569	16.999.659	Special Mention
Pembiayaan Bermasalah	14.947.493	22.876.813	23.575.853	Non-Performing Financing
Kurang Lancar	4.459.741	7.679.581	4.938.575	Substandard
Diragukan	1.804.721	3.700.435	15.060	Doubful
Macet	8.683.031	11.496.797	18.622.218	Loss
Total Pembiayaan	108.858.667	97.806.606	90.408.073	Total Financing
CKPN NPL	(3.719.876)	(9.220.223)	(13.184.648)	CKPN NPL

Rasio Kecukupan Permodalan

LPEI senantiasa berupaya memastikan memiliki rasio kecukupan permodalan yang kuat di tengah tantangan pandemi yang berimbas pada perekonomian global dan nasional selama tahun 2020. *Capital to Adequacy Ratio* (CAR) LPEI tercatat meningkat menjadi 28,07%, atau berada di atas persyaratan minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan oleh regulator. Posisi permodalan yang kuat menopang LPEI dalam melakukan pengembangan portofolio pembiayaan secara berkelanjutan.

Capital Adequacy Ratio

Indonesia Eximbank strives to maintain strong capital adequacy ratio amid the challenges of the pandemic that impacted global and national economy during 2020. Indonesia Eximbank's capital adequacy ratio (CAR) stood at 28.07% or above the minimum requirements according to risk profile set by the regulators. Strong capital position encourages Indonesia Eximbank to expand a sustainable financing portfolio.

Rasio Keuangan	2018	2019	2020	Financial Ratios
Kecukupan Permodalan				**Capital Adequacy**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	17,43%	17,32%	28,07%	Capital to Adequacy Ratio (CAR)
Kualitas Aset				**Asset Quality**
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - gross	13,73%	23,39%	26,08%	Non-Performing Loans to Total Financing - gross (Gross NPL)
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - net	10,31%	13,96%	11,49%	Non-Performing Loans to Total Financing - net (Net NPL)
Rentabilitas				**Earnings**
Tingkat Pengembalian Atas Aset	0,10%	-4,84%	0,06%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas	0,81%	-21,63%	1,41%	Return on Equity (ROE)
Marjin Bunga Bersih	1,83%	1,18%	0,77%	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	100,51%	179,63%	100,25%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)
Rasio Kepatuhan				**Liquidity Ratio**
Posisi Devisa Neto (PDN)	4,68%	9,70%	16,96%	Net Open Position (NOP)
Utang terhadap Ekuitas (DER) - x	4,67	4,74	2,71	Debt to Equity Ratio - x

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPL)
Hasil kinerja finansial LPEI tahun 2020 secara keseluruhan selaras dengan fokus yang ingin dicapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan kualitas aset yang tercermin dari penurunan nominal NPL *nett* sebesar Rp3,3 triliun, atau dapat ditekan hingga 24% dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Non-Performing Loans Ratio (NPL)
The financial performance in 2020 was consistent with the key objectives of Indonesia Eximbank. This was evident from improved asset quality, indicated by a decrease in net nominal NPL to Rp3.3 trillion or decreased by 24% compared to the previous year position.

Rentabilitas
LPEI yang memperoleh laba tahun berjalan pada tahun 2020 membuat rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) masing-masingnya kembali ke jalur positif menjadi 0,06% dan 1,41%. Perbaikan rentabillitas LPEI disebabkan oleh adanya perbaikan dalam pencapaian laba yang mencapai 150,28% dari target dan prospek rentabilitas yang sudah positif.

Earnings
Indonesia Eximbank posted profit for the year in 2020 that deliverd positive ratios of Return on Assets and Return on Equity (ROE) which respectively at 0.06% and 1.41%. The improvement of earnings was due to an improvement of profit that reached 150.28% of target and positive earnings prospect.

Beberapa hal yang menjadi perhatian LPEI terkait pencapaian rentabilitas di tahun 2020 untuk kedepannya adalah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan kualitas aktiva produktif, serta pengelolaan sumber dana yang optimal dan efisien agar dapat mendukung rentabiltasi melalui operasional bisnis.

Indonesia Eximbank takes into account the earnings acquisition in 2020 by preparing measures for the coming years such as improvement of earnings assets quality, as well as optimum and efficient funding sources management in order to support earnings through business operations.

Adapun dari sisi rasio *Net Interest Margin* (NIM) tercatat 0,77%, dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dapat ditekan ke level 100,25%.

While Net Interest Margin (NIM) ratio stood at 0.77%, and Operating Expense to Operating Income ratio can be maintained at the level 100.25%.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Struktur Permodalan
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) LPEI tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019. Sehingga permodalan LPEI per tahun 2020 telah memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.

Capital Structure
Indonesia Eximbank's capital adequacy ratio (CAR) in 2020 increased compared to 2019. Thereby the Company's capital in 2020 has had the quality and adequacy toward its risk profile, which followed by strong capital management in accordance with the Company's business scale, and business complexities.

Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tercatat naik signifikan dari sebelumnya 17,32% di tahun 2019 menjadi 28,07% di tahun 2020, atau jauh di atas ketentuan minimal yang sebesar 8%. Terjaganya rasio KPMM terutama disebabkan adanya PMN dari Pemerintah selama periode 2010-2020.

CAR ratio with credit risk and market risk was significantly increased from previously 17.32% in 2019 to 28.07% in 2020, or above minimum benchmark of 8%. The manageable CAR was mainly due to State Equity Participation from the Government during the period of 2010-2020.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Struktur Permodalan (Rp Juta)	2018	2019	2020	Capital Structure (Rp Millions)
Modal				Capital
Modal Inti	21.094.444	18.930.733	24.560.709	Core Capital
Modal Pelengkap	837.373	635.822	1.078.559	Supplmentary Capital
Jumlah Modal Untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	21.931.817	19.566.555	25.639.268	Total Capital for Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar	124.838.518	111.064.412	87.000.665	Risk Weighted Assets (RWA) Without Market Risk Charge
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan Memperhitungkan Risiko Pasar	125.864.043	112.963.175	91.348.831	Risk Weighted Assets (RWA) With Market Risk Charge
Rasio KPMM Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar	17,57%	17,62%	29,47%	CAR Without Market Risk Charge
Rasio KPMM Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar	17,43%	17,32%	28,07%	CAR With Market Risk Charge
Rasio KPMM Minimum	8,00%	8,00%	8,00%	Minimum CAR

Kebijakan Struktur Modal
Selama tahun 2020, LPEI menerima penambahan PMN dari Pemerintah sebesar Rp10 triliun. Berdasarkan PP No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan PMN-RI ke dalam Modal LPEI dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan PMN sebesar Rp5 triliun yang terdiri dari Rp4 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1 triliun untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Dalam rangka melaksanakan program penjaminan pemerintah LPEI menerima penambahan PMN sebesar Rp5 triliun berdasarkan PP No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. PMN tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 12 Agustus, 18 Agustus dan 30 Desember 2020.

Capital Structure Policy
During 2020, Indonesia Eximbank received SEP contribution from the Government amounted to Rp10 trillion. Pursuant to the Government Regulation No. 40 of 2020 dated 21 July 2020 on the Contribution of SEP of the Republic of Indonesia in to Indonesia Eximbank, which stated that the Government of Indonesia contributed SEP of Rp5 trillion consisted of Rp4 trillion to increase Indonesia Eximbank business capacity, and Rp1 trillion for the National Interest Account. To implement the government guarantee program, Indonesia Eximbank received SEP contribution of Rp5 trillion based on Government Regulation No. 70 of 2020 dated 30 December 2020. The SEP was effectively received and posted by Indonesia Eximbank on 12 August, 18 August and 30 December 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kebijakan struktur modal, tahun 2020 tidak ada penetapan Kapitalisasi Modal LPEI karena tidak terdapat surplus pada tahun buku 2019. Sehingga, per 31 Desember 2020 dan 2019, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI masing-masing sebesar Rp32,15 triliun dan Rp22,15 triliun.

Based on the measurement of capital structure policy, there was no determination of the Company's Equity Capitalization in 2020 as there was no surplus in fiscal year 2019. Thereby, as of 31 December 2020 and 2019, the Government of Indonesia equity contribution to Indonesia Eximbank was respectively at Rp32.15 trillion and Rp22.15 trillion.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari

Management Policy Determination Basis on Capital Structure
Pursuant to Law No. 2 of 2009 dated 12 January 2009 concerning Indonesia Eximbank, its initial capital is determined at least Rp4 trillion. In the event that Indonesia Eximbank's capital is less than Rp4 trillion, the

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan PP.

Government will cover the balance from the State Budget based on applicable mechanisms. This is stipulated with Government Regulation.

LPEI telah beberapa kali menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam bentuk PMN sebagai perwujudan dukungan kuat Pemerintah RI kepada LPEI. PMN yang telah disetorkan kepada LPEI diantaranya sebesar Rp2 triliun pada tahun 2010, Rp1 triliun pada tahun 2014; Rp1 triliun pada tahun 2015; Rp4 triliun pada tahun 2016; Rp3,2 triliun pada tahun 2017; Rp2,5 triliun pada tahun 2019 dan Rp10 triliun pada tahun 2020.

Indonesia Eximbank has received several capital contributions from the Government of Republic of Indonesia through State Equity Participation. The capital contribution to Indonesia Eximbank among others was Rp2 trillion in 2010, Rp1 trillion in 2014, Rp1 trillion in 2015, Rp4 trillion in 2016, Rp3.2 trillion in 2017 and Rp2.5 trillion in 2019 and Rp10 trillion in 2020.

Tahun Tahun	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha PMN Peningkatan Kapasitas Usaha	PMN Penugasan Khusus PMN Penugasan Khusus	PMN Dalam Rangka PEN PMN Dalam Rangka PEN	Total PMN Total PMN	Dasar Hukum Dasar Hukum
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	
2010	2.000	-	-	2.000	Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2010
2014	1.000	-	-	1.000	Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014
2015	1.000	-	-	1.000	Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015
2016	2.000	2.000	-	4.000	Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016
2017	1.000	2.200	-	3.200	Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017
2019	1.500	1.000	-	2.500	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019
2020	4.000	1.000	-	5.000	Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020
2020	-	-	5.000	5.000	Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2020
Total	**12.500**	**6.200**	**5.000**	**23.700**	

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

LPEI tidak melakukan perikatan material mengenai investasi barang modal dengan berbagai pihak di tahun 2020.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

There are no material commitments for capital goods investment conductec by Indonesia Eximbank during 2020.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

REALISASI INVESTASI/BELANJA BARANG MODAL

Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal

Pada tahun 2020, LPEI telah merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp8,78 miliar atau turun 66,85% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp26,48 miliar. Investasi barang modal yang untuk mendukung operasional bisnis berkelanjutan pada tahun 2020 tersebut dalam bentuk gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan bermotor, dan aset yang masih dalam penyelesaian. Dengan penambahan ini, maka jumlah aset tetap LPEI untuk tahun buku 2020 sebesar Rp1,53 triliun. Berikut informasi investasi belanja barang modal LPEI pada tahun 2020:

REALIZATION OF CAPITAL INVESTMENT/ EXPENDITURES

Types, Objectives, and Values of Capital Expenditures

In 2020, Indonesia Eximbank has realized capital expenditures amounted to Rp8.78 billion or decreased by 66.85% compared to Rp26.48 billion in the previous year. The capital goods investment conducted to sustain business operations in 2020 was in the form of building, office furniture and fixtures, vehicles, and construction in progress. With this contribution, Indonesia Eximbank fixed assets for fiscal year 2020 amounted to Rp1.53 trillion. The following are information on Indonesia Eximbank capital expenditures in 2020:

Investasi Barang Modal Investasi Barang Modal	Nilai | Values (Rp Juta | Rp Million)	Investment in Capital Goods
Gedung	6.120	Building
Peralatan dan Perlengkapan	1.082	Office Furniture and
Kantor		Fixtures
Kendaraan Bermotor	458	Motor Vehicles
Aset Dalam Penyelesaian	1.120	Construction In Progress
Total Penambahan Investasi	8.780	Total Added Investment

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2020 SERTA PROYEKSI 2021

Di tengah tantangan pandemi COVID-19 selama tahun 2020, secara keseluruhan LPEI dapat merealisasikan targetnya dengan baik. Indikator yang realisasinya dapat melampaui target yaitu total ekuitas dan laba bersih. Sedangkan indikator yang realisasinya 90% ke atas dari target adalah total aset, total pembiayaan, dan total asuransi. Sementara indikator yang realisasinya di bawah 90% adalah total penjaminan. Adapun rincian perbandingan antara target dan realisasi LPEI di tahun 2020 serta proyeksinya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

COMPARISON OF 2020 TARGET AND REALIZATION AND 2021 PROJECTION

Amid the COVID-19 pandemic during 2020, overall Indonesia Eximbank was able to realize its targets well. Indicators that realized exceeding the target are equity and net profit. While indicators with realization of 90% above are total assets, total financing, and total insurance. While realization below 90% is total guarantee. The comparison between 2020 target and realization and 2021 projection of Indonesia Eximbank is as follows:

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Indikator (Rp Juta)	2020			Proyeksi 2021 2021 Projection	Indicators (Rp Million)
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievements		
Total Aset	98.980.321	92.084.560	93,03%	97.812.051	Total Assets
Total Pembiayaan	96.065.421	90.408.073	94,11%	94.276.128	Total Financing
Total Penjaminan	40.073.350	9.908.992	24,73%	76.810.221	Total Guarantee
Total Asuransi	8.356.349	8.108.726	97,04%	9.222.416	Total Insurance
Total Ekuitas	23.103.920	24.796.549	107,33%	30.238.364	Total Equity
Laba Bersih	190.015	288.388	151,77%	554.348	Net Profit

LPEI secara berkesinambungan terus mengembangkan bisnisnya sesuai dengan mandat yang diberikan untuk mendukung Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN).

Indonesia Eximbank sustainably develops its business in accordance with the mandate to foster the National Export Financing.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Memorandum Prosedur No. MPO.0003/CEO/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mulai berlaku tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembidangan Unit Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah sebagai berikut:

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana I, Direktur Pelaksana II, Direktur Pelaksana III, Direktur Pelaksana IV Direktur Pelaksana V, *Head of Compliance*, HR & TO, dan *Head of Internal Audit*.
- Direktur Pelaksana I membawahi Head of Penjaminan, Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Bisnis BUMN, Divisi *Trade Finance*, Divisi Asuransi, *Corporate Desk* Surabaya, dan *Decision Support*.
- Direktur Pelaksana II membawahi Divisi Bisnis Syariah & *Special Mention*, Divisi Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial, Divisi Jasa Konsultasi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, Divisi Penugasan Khusus, Divisi Program Investasi Pemerintah, dan *Decision Support*.
- Direktur Pelaksana III membawahi *Head of Finance & Strategic Planning*, Divisi *Communicatoin & Stakeholder Engagement*, Divisi *Office of The Board*, Divisi *IEB Institute*, Divisi *Financial Institution & Treasury*, Divisi Pengadaan dan Umum, dan Divisi Hukum.
- Direktur Pelaksana IV membawahi *Head of Credit & Risk*, Divisi *Credit Reviewer*, Divisi Restrukturisasi Aset Konvensional dan Syariah, Divisi Litigasi, dan *Decision Support*.
- Direktur Pelaksana V membawahi *Head of Operation & IT*, Divisi *Policy and Procedure*, Divisi *Product Development*, dan Divisi *Credit Operation and Supervision*.
- Head of Penjaminan membawahi Divisi Penjaminan, Divisi *Reviewer* Penjaminan dan Divisi *Operation* Penjaminan.
- *Head of Operation & IT* membawahi Divisi Teknologi Sistem Informasi, dan Divisi Operasional.
- *Head of Finance & Strategic Planning* membawahi Divisi *Finance*, Divisi *Strategic & Corporate Planning*, Divisi *MIS & Business Finance*, dan Divisi *Middle Office Treasury*.
- *Head of Compliance*, HR & TO membawahi Divisi *Human Resources Business Partner*, *Organization & Recruitment*, Divisi *Human Resources Services & People Development*, Divisi Kepatuhan, dan Divisi *Transformation Office & Culture*.
- *Head of Internal Audit* membawahi Divisi Reguler Audit, Divisi *Special Audit*, dan Departemen QA, *Follow Up & Methodology*.
- *Head of Credit & Risk* membawahi Divisi *Credit Reviewer*, Divisi *Risk & Portofolio Management* dan Pemegang Limit Individu.

SUBSEQUENT EVENTS

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Memorandum of Procedure No. MPO.0003/CEO/02/2021 dated February 8, 2021 which is an inseparable part of Executive Director Regulation No. 0065/PDE/11/2019 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Indonesian Export Financing Institutions which came into force on January 20, 2020, regarding the Work Unit Structure of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia are as follows:

- Executive Director is responsible for Managing Director I, Managing Director II, Managing Director III, Managing Director IV, Managing Director V, Head of Compliance, HR & TO, and Head of Internal Audit.
- Managing Director I is responsible for Head of Guarantee, Corporate Financing, SOE Financing, Trade Finance, Insurance, Corporate Desk Surabaya, and Decision Support.
- Managing Director II is responsible for Sharia & Special Mention, Small Medium Enterprise Financing and Commercial, Consultation, Regional Offices and Branch Offices, Special Assignment, Government Investment Program, and Decision Support.
- Managing Director III is responsible for Head of Finance & Strategic Planning, Communication & Stakeholder Engagement, Office of The Board, IEB Institute, Financial Institution & Treasury, Procurement and General Affairs, and Legal.
- Managing Director IV is responsible for Head of Credit & Risk, Divisi Credit Reviewer, Restructuring Conventional Sharia, Recovery Conventional and Sharia, Litigation, and Decision Support.
- Managing Director V is responsible for Head of Operation & IT, Divisi Policy and Procedure, Product Development, and Credit Operation and Supervision.
- Head of Guarantee is responsible for Guarantees, Guarantee Reviewer, Guarantee Operations.
- Head of Operation & IT is responsible for Information Systems, and Operations.
- Head of Finance & Strategic Planning is responsible for Finance, Strategic & Corporate Planning, MIS & Business Finance, and Middle Office Treasury.
- Head of Compliance, HR & TO is responsible Human Resources Business Organization & Recruitment, Human Resources Services & People Development, Compliance, and Transformation Office & Culture.
- Head of Internal Audit is responsible for Reguler Audit, Special Audit, dan QA, Follow Up & Methodology.
- Head of Credit & Risk is responsible for Credit Reviewer, Risk & Portofolio Management, and Individual Limit Holders.

PROSPEK USAHA

Dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih menjadi bagian dari dinamika dan tantangan perekonomian di tahun 2021. Namun, semakin membaiknya penanggulangan pandemi, adaptasi kehidupan sosial, ekonomi, regulasi, serta distribusi vaksin yang kian meluas, diharapkan dapat memercepat pemulihan dan menjadikan kondisi perekonomian lebih kondusif di tahun 2021.

LPEI memandang prospek usaha LPEI di tahun 2021 tetap optimis mengingat masih besarnya potensi bisnis ekspor Indonesia dan posisi LPEI yang strategis di dalam ekosistem ekspor nasional. Dalam menjalankan bisnis di tahun 2021, LPEI menetapkan strategi utama yang menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis, antara lain:

BUSINESS PROSPECT

The impact of the COVID-19 pandemic is predicted to still be part of the dynamics and challenges of the economy in 2021. However, the improvement in the handling of the pandemic, the adaptation of social life, the economy, regulations, and the increasingly widespread distribution of vaccines are expected to accelerate recovery and create a more favorable economic condition in 2021.

Indonesia Eximbank's business prospect in 2021 remain optimist considering Indonesian export business potential to also remain exponential and the Company's strategic position in the national export ecosystem. In carrying out its business in 2021, Indonesia Eximbank stipulates core strategy as a reference in business development, such as:

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

- Pelaksanaan mandat berupa pengembangan kapasitas usaha LPEI melalui penyaluran pembiayaan, penjaminan dan asuransi, pelaksanaan penugasan khusus serta menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional.
- Pengelolaan dan perbaikan kualitas asset yang berkelanjutan
- Penguatan proses bisnis untuk memperkuat tata kelola, operasional, manajemen risiko dan teknologi
- Penguatan proses internal yang berupa pengembangan organisasi, peningkatan kompetensi SDM dan manajemen kinerja yang menyesuaikan dengan arah strategi LPEI

LPEI senantiasa berusaha meningkatkan peran dalam mendorong dan meningkatkan kelas UKM Indonesia. Untuk memfasilitasi kolaborasi antara K/L terkait dengan seluruh kegiatan dalam rangka ekspor, LPEI bersama K/L terkait tengah membangun Kantor Bersama Ekspor Indonesia (KBEI). Tujuannya adalah sebagai pusat informasi ekspor bagi eksportir Indonesia maupun *buyers* di luar negeri, percepatan ekspor dan mengatasi hambatan ekspor (*debottlenecking*), tidak terjadi redudansi kegiatan yang sama antar K/L, serta eksekusi isu strategis ekspor.

Kolaborasi dalam KBEI pada tahap awal akan mencakup lima metode kolaborasi, yaitu *capacity building*, pusat data dan informasi ekspor, solusi permasalahan ekspor, promosi ekspor, dan pusat studi ekspor.

Secara umum LPEI cukup optimis atas prospek usaha di tahun 2021. Namun dengan masih adanya dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan, LPEI akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih cermat dalam memperhatikan prospek industri yang sesuai dengan *risk appetite* nya, serta memperhitungkan peluang bisnis negara tujuan ekspor maupun profil risiko dari calon debitur. Dalam hal ekspansi penyaluran pembiayaan, LPEI juga akan mengedepankan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko untuk memitigasi kualitas dari pembiayaannya.

- Implementation of mandate by developing business capacities through financing, guarantee and insurance, implementation of national interest account as well as as a government's executor in the national economic recovery programs.
- Sustainable assets quality management and improvement.
- Solidifying business process to strengthen governance, operations, risk management and technology.
- Solidifying internal process such as organizational development, HR competence enhancement and performance management adjusted to the Company's strategy directions.

Indonesia Eximbank strives to enhance its roles in promoting and improving SME in Indonesia. To facilitate collaboration between Ministry/ Institutions in relation with all export activities, Indonesia Eximbank and Ministry/ Institutions are undergoing a construction for Indonesia Export Joint Office (KBEI). The objectives are as export information center for Indonesian exporters and overseas buyers, to accelerate export and handling of export debettlenecking, prevention of redundancy of similar activities between Ministry/ Institutions, as well as execution of export strategic issues.

Initial collaboration in KBEI will cover five methods, namely capacity building, export data and information center, export issue solution, export promotion, and export study center.

In general, Indonesia Eximbank is optimist on business prospect in 2021. However with the pandemic that remains and the economic conditions that remain under recovery, the Company will continue upholding prudential principles and more thorough in considering the industry prospect according to its risk appetite, as well as taking into account business opportunities of export destination country's businesses including risk profile of prospect borrowers. On financing expansion, Indonesia Eximbank will emphasize on Good Corporate Governance (GCG) and risk management to mitigate its financing quality.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

ASPEK PEMASARAN

LPEI memiliki strategi pemasaran dalam rangka menjalankan mandatnya untuk mendukung Pembiayaan Ekspor Nasional sebagai berikut:

- Meningkatkan penyaluran pembiayaan
  Peningkatan penyaluran pembiayaan ekspor dilakukan antara lain melalui pembiayaan konvensional maupun prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. LPEI juga menyediakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekspor serta membiayai segmen UKME dan pembiayaan korporasi dengan memperhatikan pengelolaan risiko secara sehat.

- Meningkatkan penyaluran penjaminan
  Dalam upaya meningkatkan penyaluran penjaminan ekspor, LPEI senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian, berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak penjaminan yang diberikan. Selain itu, menyediakan penjaminan bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan.

  Penjaminan meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

  Selain itu LPEI juga melaksanakan peyaluran penjaminan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program penjaminan korporasi padat karya (Jaminah) untuk perbankan agar pemberian kredit dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat

- Meningkatkan penyaluran asuransi
  Aktivitas peningkatan penyaluran asuransi ekspor dilakukan dengan berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan

MARKETING ASPECTS

Indonesia Eximbank has in place marketing strategy in carrying out its mandate to foster the National Export Financing, as follows:

- Improving financing disbursement
  Export financing improvement is carried out among others through convensional financing and sharia-principles both in the country and overseas by taking into account prudential principles. Indonesia Eximbank also provides financing in line with the needs to support export activity and to finance export-oriented SME and corporate financing by considering sound risk management.

- Improving guarantee disbursement
  To improve export guarantee disbursement, Indonesia Eximbank strives to carry out prudential principles, coordinates with regulators mainly in terms of regulatory adjustments to expand room for guarantee. Moreover, provides guarantee for export-oriented SME to facilitate financing access.

  Guarantee includes guarantee for Indonesia exporters on payments received from overseas buyers of goods/services, guarantee for Indonesian importers of goods/services overseas on payments received, guarantee for banks that provide export transaction financing to Indonesia exporters, as well as guarantee for tender related to projects implementation, which are wholly or partly are export activities.

  Indonesia Eximbank also carries out government guarantee disbursement for the National Economic Recovery through labor intensive corporate guarantee program (Jaminah) for banking for an efficient lending that enable faster economic recovery.

- Improving insurance disbursement
  Insurance disbursement activity for export is carried out by coordinating with main regulators in the regulatory adjustments to expand insurance room of

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

peraturan untuk memperluas ruang gerak asuransi. LPEI juga menyediakan asuransi bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan.

Asuransi ekspor meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

- Meningkatkan peran jasa konsultasi
  Pelaksanaan jasa konsultasi difokuskan pada peningkatan kapasitas *business advisory* serta perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun *digital commerce*. LPEI senantiasa meningkatkan kapasitas baik secara komprehensif maupun secara tematik yang dapat diaplikasikan melalui *stakeholders* eksternal.

  Bimbingan dan jasa konsultasi mencakup kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Pangsa Pasar
LPEI adalah satu-satunya lembaga keuangan khusus didirikan berdasarkan Undang-Undang yang memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor. Oleh karena itu, pangsa pasar yang dimiliki adalah 100%.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan pasal 21 UU-RI No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan PMK No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu satu tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum,

growth. Indonesia Eximbank also provides insurance for export-oriented SME to facilitate financing access.

Export insurance includes insurance on export failure risk, insurance on dafault payment risk, insurance on investment by Indonesian companies overseas, and/or insurance on political risk at export destination country.

- Improving advisory roles
  Implementation of advisory is focused on improving advisroy business capacity and market access expansion conventionally or in digital commerce. Indonesia Eximbank strives to enhance capacities in both comprehensive and tematic that can be applied through external stakeholders.

  Mentoring and advisory services includes for banks, financial institutions, exporters, export goods producers, specifically micro, small, medium enterprises and cooperatives. This is aimed at helping to handling obstacles faced by the banks/financial institutions in providing financing for exporters which commercially have a potential and/or vital for Indonesian economic growth.

Market Shares
Indonesia Eximbank is the only financial institution that specifically established pursuant to Law to provide financing, guarantee, and insurance for export. To that end, the Company takes 100% market shares.

DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 of 2009 regarding Indonesia Eximbank and Regulation of the Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015. the surplus gained by LPEI in one year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as general reserve and special purpose reserve shall be 90% of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada tahun 2020, tidak terdapat alokasi cadangan umum, cadangan tujuan, dan bagian laba Pemerintah karena karena tidak terdapat surplus pada tahun buku 2019.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sebagai lembaga yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, tidak terdapat program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 dan Suku Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 yang jumlahnya mencapai Rp145,69 miliar telah terserap seluruhnya untuk ekspansi pembiayaan aset produktif.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN & TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan
Indonesia Eximbank tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan yang berakhir akhir pada 31 Desember 2020.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi
Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Informasi lengkap tentang transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2020 terdapat pada Catatan No. 38 atas Laporan Keuangan *Audited*.

reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

In 2020, there was no allocation for general reserve, special purpose reserve, and the Government's profit share due to no surplus in fiscal year 2019.

STOCK OPTION PROGRAMS FOR EMPLO YEES AND/OR MANAGEMENT (ESOP/MSOP)

As an intitution that fully owns by Government, there are no stock options programs by employees and/or management (ESOP/MSOP) that currently exercised until fiscal year.

USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

The proceeds from Indonesia Eximbank Shelf Bonds V Phase I of 2020, and Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020 that reached Rp145.69 billion as of the end of 2020 has been entirely used for the expansion of earnings assets financing.

MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTERESTS & TRANSACTIONS WITH AFFILIATES

Material Transactions with Conflict of Interests

Indonesia Eximbank did not exercise transaction with conflict of interests during reporting period ended on 31 December 2020.

Affiliates or Related Parties Transactions
In the normal course of business, Indonesia Eximbank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties. Comprehensive information on material transactions with related parties during 2020 can be found on Notes No. 38 in the Audited Financial Statements.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

INFORMASI TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI

LPEI tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi selama tahun 2020.

TRANSACTIONS INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, RESTRUCTURING

Indonesia Eximbank did not exercise any investment, expansion, divestment, acquisition and restructuring in 2020.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

LPEI senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan baru maupun amendemen dari peraturan yang telah ada sebelumnya untuk mengindentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan ketentuan tersebut dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Adapun perubahan peraturan dan atau peraturan baru yang berkaitan dengan LPEI pada tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

TRANSACTIONS INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, RESTRUCTURING

Indonesia Eximbank did not exercise any investment, expansion, divestment, acquisition and restructuring in 2020.

REGULATORY CHANGES THAT SIGNIFICANTLY IMPACT THE COMPANY

Indonesia Eximbank continually reviews new regulations and amendments of exsiting regulations to identify impact that may occurr from such changes and compliance with the regulations. Changes in the regulatory related to Indonesia Eximbank in 2020 are as follows:

- Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019 outbreak for Nonbank Financial Services Institutions as amended by Financial Services Authority Regulation No. 58/POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 14 /POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread for Non-Bank Financial Services Institutions.
- Government Regulation No. 40 of 2020 dated 21 July 2020 regarding Government of Indonesia's capital contribution to Indonesia Eximbank.
- Government Regulation No. 78 of 2020 dated 30 December 2020 regarding Government of Indonesia's capital contribution to Indonesia Eximbank.
- Financial Services Authority Regulation No. 36/POJK.02/2020 regarding Third Amendment of Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.04/2014 regarding Administrative Sanction Billing Procedures on Sanctions in Financial Service Sector.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun

- Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 on Development and Supervision of Indonesia Eximbank.
- Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2020 regarding Second Amendment of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.05/2014 regarding Direct Audit of Nonbank Financial Service Institution.
- Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 regarding Government Guarantee Procedures for Corporate Business through Guarantee Agency Appointed to Implement the National Economic Recovery Program.
- Government Regulation No. 23 of 2020 regarding the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support the State Financial Policy to Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or to Address Dangerous Threat to the National Economy and/or Financial System Stability as well as National Economic Recovery as amended by the Government Regulation No. 42 of 2020 regarding the Amendment on Government Regulation No. 23 of 2020 concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support the State Financial Policy to Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or to Address Dangerous Threat to the National Economy and/or Financial System Stability as well as National Economic Recovery.
- Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.06/2020 regarding Government Investment for the National Economic Recovery Program.
- Minister of Finance Decree No. 372/KMK.08/2020 regarding the National Interest Account to Indonesia Eximbank to Support Small and Medium Enterprises of Export Oriented Sector.
- Minister of Finance Decree No. 363/KMK.08/2020 regarding the Assignment to Indonesia Eximbank in Implementing Government Guarantee for Corporate Business in the Implementation of the National Economic Recovery Program.
- Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 regarding the Amendment of Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.06/2020 tentang Penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Sebagai Pelaksana Investasi untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, Serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK. 07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

regarding the Procedures for Registry, Announcement, and Auditing of State Administrators Assets.

- Minister of Finance Decree No. 533/KMK.06/2020 regarding Technical Manual of Government Investment Fund Management for the National Economic Recovery Program in the State Treasury Account.
- Minister of Finance Decree No. 545/KMK.06/2020 regarding the Assignment to Indonesia Eximbank as the Investment Executor on Government Investment for the the National Economic Recovery Program to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.
- Minister of Finance Decree No. 428/KMK.08/2020 regarding the National Interest Account to Indonesia Eximbank to Support Indonesian Aviation Industry.
- Minister of Finance Regulation No. 187/PMK.05/2020 regarding Procedures of Government Bonds Issuance in the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Pandemic and National Economic Recovery 2020 and Use of Fund Balance of Government Bonds 2020 for the Financing of Continuation in the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Pandemic and National Economic Recovery 2020.
- Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.07/2020 on the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority.
- Financial Services Authority Regulation No. 64/POJK.03/2020 regarding the Amendment on Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2017 regarding the Reporting and Request of Borrowers Information Via Financial Information Services System.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2020, LPEI menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) baru dan revisi sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi LPEI telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan substansial terhadap kebijakan akuntansi LPEI dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau sebelumnya:

a. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2". Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

   Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

b. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 Business Combinations: Definition of Business merupakan hasil dari joint project antara International Accounting Standards Board (IASB) dan US Financial Accounting Standards Board (FASB). Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING POLICY CHANGES

On 1 January 2020, Indonesia Eximbank adopted new and revised statements of financial accounting standards (SFAS) and interpretations of statements of financial accounting standards (ISFAS) that are mandatory for application from that date. Changes to Indonesia Eximbank accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to LPEI's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current of prior financial years:

a. Amendment to SFAS No. 71, "Financial Instruments", Amendment to SFAS No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendment to SFAS No. 60: "Financial Instruments, Disclosure", Amendment to SFAS No. 62: "Insurance Contracts", and Amendment to SFAS No. 73: "Lease" regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2. This amendment describes Interest Rate Reference Reform - Phase 2 adopted from IFRS regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

   Annual Adjustment 2020 - SFAS No. 71, "Financial Instruments - Fee under test "10 per cent" for derecognition of a financial liability". The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

b. SFAS No. 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business", this amendment adopted from the IFRS Amendment 3: "Business Combinations: Definition of Business" is the result of a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board (FASB). This amendment clarifies the definition of business with the aim of assisting the entity in determining whether a transaction should be recorded as a business combination or an asset acquisition.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Aktivitas pendanaan LPEI selama tahun 2020 tidak terdapat pembayaran ke Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana di tahun 2019 terdapat PNBP yang telah disetorkan ke kas Negara sebesar Rp38,63 miliar.

CONTRIBUTION TO STATE REVENUE

There were no deposits to the Government for Indonesia Eximbank funding activity in 2020 as non-tax revenues (PNBP), compared to 2019 that was deposited into the state treasury amounting to Rp38,626 billion.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan LPEI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, dan berkeyakinan bahwa LPEI memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen juga tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, LPEI terus berupaya memperbaiki dan menguatkan kinerja keuangan agar usaha tetap tumbuh berkelanjutan.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

The management has assessed Indonesia Eximbank's ability to continue as a going concern and believes that Indonesia Eximbank has the resources to continue its business in the future. In addition, management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to Indonesia Eximbank'S ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.2/2009, LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. LPEI juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut dan memperhatikan kondisi kinerja operasional dan keuangan LPEI di tahun 2020, LPEI tidak menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Matters that Potentially Have Significant Impacts to the Company Business Continuity

Based on Article 39 Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank can only be dissolved by Law. Indonesia Eximbank also cannot be put under banckruptcy based on Law on Banckruptcy. Based on this stipulation and taking into account Indonesia Eximbank operations and financial performance condition in 2020, Indonesia Eximbank does not encounter matters that significantly impacts its business continuity.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga

Manajemen telah melakukan analisis proyeksi ekonomi terhadap kondisi keuangan LPEI di masa mendatang. Namun demikian, Manajemen tidak mengetahui akan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Lembaga untuk melanjutkan usahanya.

Management Assessment on Matters that Potentially Have Significant Impacts to the Company Business Continuity

The Management has carried out economic projection analysis to Indonesia Eximbank financial conditions in the future. However, the management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to Indonesia Eximbank'S ability to continue as a going concern.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Dalam melakukan *assessment*, manajemen menggunakan asumsi makro ekonomi dalam APBN 2021, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, proyeksi ekspor, dan pergerakan kurs. Selain itu, menggunakan indikator harga komoditas ekspor dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan negara tujuan ekspor dari sumber-sumber yang kredibel seperti IMF dan World Bank. Manajemen juga menganalisis kinerja operasional dan kinerja keuangan Lembaga serta pelaksanaan tata kelola di internal Lembaga dengan menggunakan pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT).

Assumption Used by the Management for Assessment

In conducting the assessment, the management uses macroeconomics assumption in the State Budget 2021, among others economic growth, inflation, export projection, and exchange fluctuation. The management also uses export commodity price indicators and growth projections of global economy, and export destination countries and other credible sources such as IMF and World Bank. The management also analysed the Company operations and financial performance including governance practices internally by using the strength, weakness, opportunity and challenges approach (SWOT).

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mengelola SDM di tengah pandemi COVID-19 melakukannya dengan penyesuaian Roadmap SDM. Baik penyiapan dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kompetensi SDM melalui pembentukan beberapa Team Task Force dengan tetap mengedepankan TRUST sebagai Nilai Budaya Kerja LPEI.

Amid of the COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank carried out the HR management by adjusting the HR Roadmap. The preparation includes infrastructure and HR competency enhancement through Task Force Teams' establishment while emphasising TRUST as the Company's Work Culture Value.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi perkembangan ekonomi global dengan terjadinya pandemi COVID-19. Kondisi ini mendorong bisnis seluruh dunia mencari berbagai peluang agar bisa bertahan dan keluar dari krisis, tidak terkecuali dengan Indonesia yang menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap bertahan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menyikapi situasi tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mandat menjalankan program pemerintah melalui penugasan khusus telah melakukan beberapa perubahan dalam *business model*.

Untuk itu LPEI telah melakukan penyesuaian atas *Roadmap* Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2020, dengan penyiapan infrastruktur dan SDM melalui pembentukan beberapa *Team Task Force* yaitu *Task Force* Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, *Task force* Program Investasi Pemerintah dalam rangka PEN, dan *Task force* Penanggulangan COVID-19 di lingkungan kerja LPEI.

Selain itu, LPEI juga melakukan penguatan dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh SDM agar dapat menjadi SDM yang handal dan mumpuni dalam menjalankan penugasan tersebut.

Adapun pencapaian penting LPEI dalam melakukan pengelolaan SDM selama tahun 2020 antara lain:

a. Penguatan organisasi sesuai dengan mandat (Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, Trade, *National Interest Account*), dan Syariah.
b. Penguatan kompetensi organisasi dengan *recruitment seasoned bankers*, sertifikasi *risk management*, *credit skill*, Syariah, IT, dan *technical skills* lain.
c. Peluncuran *Performance Management Framework* yang baru sebagai awal penerapan budaya kinerja.
d. Peluncuran *Talent Management Framework*.
e. Pengembangan *Employee Self-Service* melalui *HRIS & GreatDay Apps*.

2020 is a pretty tricky period for the global economic development with the COVID-19 pandemic. This condition encourages businesses around the world to seek for various opportunities to survive and navigate out of the crisis, including Indonesia which has carried out various policies to maintain the Indonesian economic resilience through the National Economic Recovery (PEN) program.

Indonesia Eximbank as an institution under the Ministry of Finance that has a mandate to implement the government programs through specific assignments has addressed the situation by carrying out changes in business model.

In 2020, Indonesia Eximbank has adjusted the Human Resources (HR) Roadmap, by preparing infrastructure and HR through the establishment of several Task Force Teams, namely Government Assurance Program Task Force for PEN, Government Investment Program Task Force for PEN, and COVID-19 Countermeasures Task Force at the Company's work environment.

Moreover, Indonesia Eximbank also strengthened the competencies of its HR to become reliable and qualified HR in carrying out the assignments.

The following are critical achievements of Indonesia Eximbank in HR management during 2020:

a. Strengthening of organization in accordance with the mandate (Financing, Guarantee, Insurance, Trade, National Interest Account), and Sharia.
b. Strengthening of organization competencies with recruitment seasoned bankers, risk management certifications, credit skills, Sharia, IT, and other technical skills.
c. Launching of new Performance Management Framework as the initial implementation of performance culture.
d. Launching of Talent Management Framework.
e. Development of Employee Self-Service through HRIS & GreatDay Apps.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

f. Pembangunan otomasi sistem kepegawaian (HRIS) sehingga absensi dapat dilakukan di aplikasi *GreatDay*.
g. *Engagement Programs* untuk meningkatkan loyalitas pegawai dengan *corporate song*, *webinar series*, *LeadersTalk*, *employees club*, dan *engagement survey*.

KEBIJAKAN SDM 2020

Kebijakan internal SDM LPEI tahun 2020 dijalankan pada setiap fungsi dari SDM yang diatur dalam suatu tatanan ketentuan, dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Eksekutif (PDE), dan menjadi pedoman bagi operasional SDM yang telah memperhatikan risiko-risiko operasional lembaga.

Kebijakan SDM tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Peraturan Kepegawaian LPEI berisi seluruh ketentuan kepegawaian yang bersifat kebijakan secara umum yang berbentuk *hands book*, sehingga memudahkan pegawai untuk memahami inti-inti dari ketentuan yang ada seperti:
   1. Pengembangan Organisasi.
   2. Rekrutmen dan Seleksi.
   3. *Compensation* dan *Benefit*.
   4. Manajemen Karir dan Talenta.
   5. Pelatihan dan Pengembangan.
   6. Administrasi Kepegawaian.
   7. *Employee Engagement & Internal Communication*.
   8. Disiplin Pegawai.
   9. Pengakhiran Hubungan Kerja.

b. Peraturan Pelaksanaan yang berisi penjabaran dari setiap kebijakan kepegawaian yang tercantum di dalam Peraturan Kepegawaian.

Seluruh ketentuan tersebut selalu dilakukan pengkinian secara berkala, baik secara parsial dan bertahap ataupun secara keseluruhan yang diselaraskan dengan dinamika perkembangan strategi dan arah pengembangan LPEI.

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN SDM 2020

Fokus LPEI dalam menerapkan strategi dan pengembangan SDM di tahun 2020 adalah tetap melakukan peningkatan kompetensi pegawai berupa pengetahuan dan keterampilan, baik dalam hal pembiayaan berdasarkan

f. Development of employee system automation (HRIS), thereby absence record can be done with GreatDay apps.
g. Engagement Programs to enhance employee loyalty with corporate song, webinar series, LeadersTalk, employees club, and engagement survey.

HR POLICIES IN 2020

In 2020, Indonesia Eximbank implements HR internal policy at every HR function that are under stipulations, stated through Executive Director Regulation (PDE), and as a guidance for HR operations that has taken into account the institution's operational risks.

The HR policy is divided into two elements as follows:

a. Indonesia Eximbank Employment Rules containing general policies of employment in the form of handbook, hence facilitating employee to comprehend the existing main rules, such as:
   1. Organizational Development.
   2. Recruitment and Selection.
   3. Compensation and Benefits.
   4. Career and Talent Management.
   5. Training and Enhancement.
   6. Employment Administrative.
   7. Employee Engagement & Internal Communication.
   8. Employee Disciplinary.
   9. Work Relations Termination.

b. Implementation Rules containing elaboration of every employment policy stated in the Employment Rules.

Periodical update on the rules is carried out, partially and in stages or on overall contents that harmonizes with the dynamics of Indonesia Eximbank's strategy development and directions.

HR STRATEGIES AND DEVELOPMENTS IN 2020

In 2020, Indonesia Eximbank's focus in implementing HR strategy and development is by remain improving employee competencies such as knowledges and skills, in terms of financing based on industrial and/or leading

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

sektor industri dan/atau komoditi unggulan ekspor, penjaminan dan asuransi, manajemen risiko, maupun *trade finance*.

Dalam hal penguatan kompetensi teknis pembiayaan secara komprehensif di tahun 2020, LPEI telah melakukan kerja sama dengan Moody's Analytics untuk memberikan *e-learning Credit Skill*. Selain itu, penguatan mengenai pengelolaan risiko juga diwujudkan dalam pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko untuk seluruh pegawai LPEI.

Terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa pada seluruh aspek kehidupan seluruh dunia, tidak terkecuali kepada LPEI. Pandemi yang muncul di Indonesia pada akhir triwulan pertama tahun 2020 merupakan kejadian yang tidak terduga, sehingga tidak ada satupun organisasi yang bersiap menghadapinya.

Namun demikian, LPEI sigap melakukan berbagai upaya dan program mitigasi risiko akan dampak COVID-19 di lingkungan kerja demi menjaga keberlangsungan bisnis dan operasional Lembaga. Penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang telah dilakukan LPEI di lingkungan kerja sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Organisasi
   Pembentukan Gugus Tugas (Satuan Kerja) Penanggulangan dan Pencegahan COVID -19.
b. Infrastruktur
   – Pemberian bantuan dan dukungan infrastruktur kerja bagi pegawai yang bekerja di rumah (WFH).
   – Penyemprotan *disinfectant* di seluruh lingkungan kantor LPEI secara rutin dan berkala.
   – Penyediaan alat-alat sanitasi bagi pegawai yang bekerja di kantor (WFO).
   – Penyediaan akomodasi berupa makan siang dan tunjangan transportasi kepada pegawai yang WFO.
c. Pengaturan Kerja
   Pengaturan kerja di kantor (WFO) dan di rumah (WFH) dengan memberlakukan operasional kantor secara *minimum operation* dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja LPEI.
d. Pelayanan Kesehatan
   – Pelaksanaan deteksi COVID-19 berkala bagi seluruh manajemen dan pegawai LPEI baik secara mandiri maupun secara massal.

export commodities, guarantee and insurance, risk management, as well as trade finance sectors.

On strengthening comprehensive financing technical competency in 2020, Indonesia Eximbank has collaborated with Moody's Analytics to provide e-learning Credit Skill. Moreover, risk management solidification is also provided through risk management certification for all of Indonesia Eximbank's employees.

The COVID-19 pandemic in 2020 has significantly impacted on the entire aspects of life globally, no exception to Indonesia Eximbank. The pandemic that came about in Indonesia at the end of the first quarter of 2020 was unprecedented, thereby not one organization are ready to address it.

Nevertheless, Indonesia Eximbank was agile in carried out various efforts and risk mitigation programs on the COVID-19 impact in its working environments so as to maintain business continuity and operations of the Institution. The following are the handling and countermeasures of COVID-19 carried out by the Company during 2020:

a. Organization
   Establishment of Task Force for the COVID-19 Handling and Prevention.
b. Infrastructure
   – Work infrastructure assistance and support for employees that are working from home (WFH).
   – Spraying of disinfectant in the entire offices' environment regularly and periodically.
   – Providing sanitary equipment for employees working in office (WFO).
   – Providing accommodation such as lunches and transportation facilities to working in office (WFO).
c. Work Arrangement
   Arrangement of work from office (WFO) and work from Home (WFH) by applying minimum operations in order to prevent the spread of COVID-19 within the Company's work environment.
d. Healthcare
   – Periodical COVID-19 detection for all of the Company's management and employees independently or en masse.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

- Pemberian fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan kepada manajemen, pegawai dan keluarga yang terinfeksi COVID-19.
- Pelaksanaan injeksi multivitamin bagi seluruh manajemen dan pegawai LPEI secara massal.

e. Laporan
- Pemantauan Status COVID-19 di lingkungan kerja LPEI.
- Laporan status COVID-19 secara rutin kepada *stakeholder* dan *shareholders* LPEI.

f. CSR
Pemberian donasi kepada debitur dan pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab sosial LPEI terhadap lingkungan.

BUDAYA KERJA

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 memiliki visi dan misi yang jelas dalam mendukung Pembiayaan Ekspor Nasional sesuai dengan amanah di dalam undang-undang pendiriannya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, LPEI menyadari perlu memiliki SDM yang berintegritas tinggi, memiliki etika dan kompeten dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk itu dibentuklah suatu sistem nilai yang menjadi dasar dan acuan bagi seluruh pegawai LPEI dalam bersikap, berperilaku dan bertindak yang dibakukan sebagai budaya kerja LPEI.

Perumusan Budaya Kerja LPEI di mulai sejak tahun 2010 dengan melibatkan *Top Management* beserta seluruh Pimpinan Unit Kerja, yang secara bersama-sama merumuskan nilai-nilai budaya kerja dan dibakukan di dalam suatu Peraturan Direktur Eksekutif pada tahun 2014. Hasil dari perumusan tersebut telah melahirkan lima Nilai Budaya Kerja LPEI yaitu TRUST yang merupakan akronim dari:

- Providing medical and healthcare facilities for management, employees and family that are infected by the COVID-19.
- Providing multivitamin injections for all of the Company's management and employees en masse.

e. Reports
- Monitoring of the COVID-19 Status at the Company's work environment.
- Regular reports of the COVID-19 status to the Company's stakeholders and shareholders.

f. CSR
Providing donation to borrowers and third parties as a form of the Company's social responsibility to the environment.

WORK CULTURE

Pursuant to its establishment based on Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank has in place clear vision and mission in fostering the National Export Financing in accordance with the mandate in its establishment law.

To manifest its vision and mission, Indonesia Eximbank realizes the need to acquire HR of high integrity, have ethics and competencies in carrying out the works. To that end a value system is established as a reference and benchmark for all of the Company's employees in their conducts, behavior and actions that is standardized as the Company's work culture.

The formulation of Work Culture began in 2010 by involving the Top Management and all Heads of Work Units that jointly develop the work culture values and formalized it into the Executive Director Regulation in 2014. The result was the formulation of 5 Work Culture Values, called TRUST, which is an acronym of:

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Internalisasi nilai budaya tersebut dilakukan dengan adanya komitmen dari *Top Management* dan seluruh Pimpinan Unit Kerja untuk terus mensosialisasikan budaya kerja LPEI dengan menjadi sosok panutan (*role model*). Sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kerja tersebut dapat dimengerti, dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai LPEI. Internalisasi nilai budaya juga bertujuan untuk menumbuhkan *sense of identity* dan *sense of ownership* pegawai terhadap LPEI.

REKRUTMEN

Rekrutmen yang dilakukan LPEI mengacu pada rencana kebutuhan tenaga kerja dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini direalisasikan melalui proses seleksi yang transparan, non-diskriminatif dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki setiap individu.

Proses rekrutmen pegawai yang dilakukan LPEI bertujuan untuk memastikan regenerasi pegawai dapat berlangsung secara berkesinambungan dan selaras dengan rencana pengembangan bisnis. Tujuan proses rekrutmen tersebut menjadi faktor utama LPEI dalam menetapkan tambahan pegawai baru.

Selama tahun 2020, LPEI melakukan rekrutmen calon pegawai yang telah memiliki pengalaman di bidangnya dan menerapkan program *Leader For Tomorrow* (LFT). Program LFT ini khusus dirancang sesuai kebutuhan dalam rangka mempersiapkan putra putri terbaik bangsa sebagai penerus pemimpin yang tangguh dan mempunyai nilai-nilai budaya LPEI. Hingga akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 76 pegawai baru menjadi bagian dari keluarga besar dan 33 pegawai memutuskan untuk keluar dari LPEI.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIR

Jalur karir menggambarkan perjalanan karir Pegawai disusun berdasarkan posisi pekerjaan dari Kelompok Jabatan terendah sampai dengan Kelompok Jabatan tertinggi. Pada dasarnya, pergerakan karir Pegawai LPEI memperhatikan beberapa hal berikut ini:
1. Berdasarkan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran LPEI.
2. Memperhatikan kinerja Pegawai.

The internalization of the cultural values is carried out with the commitment of Top Management and all Work Unit Heads by continuing to disseminate the work culture into a role model, thereby its values can be comprehended, understood and implemented by all employees. This internalization is also aimed at enhancing a sense of identity and a sense of ownership by the employee to the Company.

RECRUITMENT

Recruitment is conducted in reference to the workforce requirement plan and is based on the principles of fairness and equality. This principle is realized through a transparent, non-discriminatory, and based on each individual's competencies.

Employees' recruitment process aims at ensuring employee regeneration is implemented sustainably and in harmony with the business development plan. This objective becomes the Company's main factor in determining the needs of new employees.

During 2020, the Company recruited prospective employees with experiences in its fields and implemented Leader For Tomorrow (LFT) program. The LFT program is specifically designed according to the needs in order to prepare the best generations of the nation as the successor of strong leaders with the Company's corporate values. At the end of 2020, 76 new employees were hired, and 33 employees decided to resign from the institution.

CAREER DEVELOPMENT POLICY

The Career path illustrates the employee's career path which is developed based on the work position from the lowest ranks to the highest position group. The employee's career path movement takes into account the following:
1. Organization requirements for performance improvements and target achievement.
2. Employee performance.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

3. Mempersyaratkan pemenuhan kualifikasi jabatan yang mencakup pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, Golongan Pegawai, dan pendidikan khusus (sertifikasi), termasuk keahlian khusus atau spesialisasi jabatan.
4. Mempersyaratkan pemenuhan kompetensi Pegawai, baik *soft competency* dan *technical competency* melalui proses *assessment* pegawai.
5. Memperhatikan masa jabatan Pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan yang sama selama lebih dari empat tahun adalah Pegawai yang perlu diprioritaskan untuk memperoleh penyegaran dan pengembangan.
6. Merupakan penerapan manajemen talenta (*talent management*) melalui kebijakan rekrutmen internal untuk pengisian jabatan strategis dan struktural.
7. Merupakan penerapan manajemen perencanaan karir Pegawai.

Pergerakan karir Pegawai LPEI dapat berupa:
a. Promosi, yaitu perubahan jabatan Pegawai dari Kelompok Jabatan yang lebih rendah ke Kelompok Jabatan yang lebih tinggi.
b. Progresi, yaitu perubahan Golongan Pegawai (*Personal Grading*) dari Golongan Pegawai yang lebih rendah ke Golongan Pegawai yang lebih tinggi.
c. Rotasi atau pengalihan tugas yaitu perubahan jabatan Pegawai dalam Kelompok Jabatan yang sama.
d. Demosi, yaitu perubahan jabatan Pegawai dari Kelompok Jabatan ke Kelompok Jabatan yang lebih rendah atau penempatan Pegawai menjadi Staf Khusus Tanpa Penugasan.
e. Regresi yaitu perubahan Golongan Pegawai dari Golongan Pegawai yang lebih tinggi ke Golongan Pegawai yang lebih rendah.

PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*) sebagai upaya menilai prestasi atau evaluasi secara sistematis terhadap kinerja pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja, LPEI selalu menjaga efektivitas pelaksanaannya secara *fair* dan objektif.

3. Job qualifications requirements covering professional background, educational background, employee classes, and specific certifications, including special skills or job specializations.
4. Employee competencies in both soft competency and technical competency through employee assessment process.
5. Employee term of office. Employee with more than four years tenure shall be prioritized for refreshment and development programs.
6. Talent management through internal recruitment policy for strategic and structural positions.
7. Employee career planning management.

Employee career path of Indonesia Eximbank consists of:
a. Promotion, a change of Employee's position from the lower Job Group to higher Job Group.
b. Progression, a change of Personal Grading from the lower grading to higher grading.
c. Rotation or transfer of duties, a change of Employee's position in the same Job Group.
d. Demotion, a change of Employee's position from Job Group to the lower Job Group or placement into Special Staff Without Assignment.
e. Regression, a change of Personal Grading from the higher grading to lower grading.

PERFORMANCE ASSESSMENT AND REMUNERATION

Indonesia Eximbank carries out the Performance Appraisal to systematically assess the achievements or evaluation of employee's performance that aims at improving employee's productivity. In implementing Performance Appraisal, the Company maintains its effectiveness in a fair and objective manner.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Penilaian kinerja pegawai LPEI menggunakan sistem *Balance Score Card*. Dalam hal ini, Rencana Kerja Individu (RKI) yang merupakan hasil *cascading* dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja dan IKU Lembaga. Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan mengedepankan prinsip terukur, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek penilaian kinerja pegawai meliputi pencapaian sasaran individu, perilaku kerja dan kompetensi, serta faktor penambah dan faktor pengurang.

Penilaian atas pencapaian sasaran individu pegawai dilakukan dengan mengukur tingkat realisasi pencapaian sasaran yang tercantum dalam RKI yang telah disahkan. Penilaian perilaku kerja dan kompetensi pegawai dilakukan terhadap Budaya Kerja beserta level kompetensinya.

Tahapan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara berjenjang, di mana atasan langsung dari pegawai yang dinilai bertindak sebagai penilai pertama. Selanjutnya atasan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan bertindak sebagai penilai kedua untuk memberikan keputusan terhadap hasil penilaian kinerja pegawai. Seluruh hasil penilaian kinerja pegawai dari penilai pertama dan penilai kedua selanjutnya diputuskan dalam rapat Komite Personalia, yang beranggotakan Direktur Eksekutif dan seluruh Direktur Pelaksana.

Dengan memperhatikan faktor penilaian kinerja dan mekanisme penilaian kinerja tersebut, setiap pegawai akan memperoleh predikat kinerja dengan pencapaian kinerja Istimewa, Memuaskan, Baik, Cukup, dan Kurang.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga senantiasa memberikan imbal jasa yang sesuai dengan hasil kerja seluruh pegawai serta aturan dan standar yang berlaku. Sistem dan nilai remunerasi pegawai LPEI ditetapkan oleh Direktur Eksekutif melalui Peraturan Direktur Eksekutif dan/atau Keputusan Direktur Eksekutif.

The Institution's employee performance assessment applies a Balance Score Card system. To this end, the Individual Work Plan (IWP) is resulted from the cascading of the Key Performance Indicators (KPI) of Work Units and the Company. The employee performance assessment is carried out by emphasizing on measured principles, objectives and accountability. The aspect of employee performance assessment includes the Individual target achievements, code of conduct and competencies, as well as addition and reduction factors.

The assessment on individual target achievements is carried out by measuring the realization level of the target achievement stated in the ratified IWP. Code of conduct and competencies is conducted towards Work Culture and its competencies levels.

The employee performance assessment is carried out in stages, whereby the direct supervisor acts as the first assessor of concerned employee. The manager above the direct supervisor of the concerned employee acts as the second assessor to provide decision on the results of employee performance assessment. All results from the first and second assessors will then be decided in the Personnel Committee, which members consist of Executive Directors and all Managing Directors.

By taking into account the performance assessment factors and mechanisms, every employee will receive performance rating with the achievements of Excellent, Good, Average and Poor.

Indonesia Eximbank also provides remuneration in accordance with work results of all employees and applicable rules and standards. The Company's remuneration system and amount are determined by the Executive Director through Executive Director Regulation and/or Executive Director Decree.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Prinsip dasar pemberian remunerasi pegawai di LPEI adalah:

1. *Merit Based* dan *Performance Based System* yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, Golongan Pegawai (*Personal Grading*), Kelompok Jabatan (*Job Group*), Golongan Jabatan (*Job Grading*), Masa Kerja Pegawai dan/atau masa memangku Jabatan secara adil (*internally fair*), serta wajar tanpa membedakan latar belakang politik, agama, ras, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia dan kondisi kesehatan.
2. Kompetitif (*externally competitive*), yaitu mengacu pada industri/institusi yang dijadikan acuan/benchmark, dan mengarahkan posisi total remunerasi Pegawai pada posisi *Upper Percentile* (P75) nilai remunerasi pasar (industri/institusi *benchmark*).
3. Terstruktur dan sistematis.

The following are basic principles in providing employee's remuneration:

1. Merit Based and Performance Based System, which is based on qualifications, competency, performance, Personal Grading, Job Group, Job Grading, Term of Office and/of internally fair, as well as fairness regardless of political background, religion, race, origin, gender, marital status, age and health conditions.
2. Externally Competitive, which refers/benchmarks to the industry/institutions, and directs the employee's remuneration at the Upper Percentile (P75) position of the market remuneration amount (industry/institutions benchmark).
3. Structured and systematics.

DIGITALISASI SDM

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memahami bahwa pada hakikatnya revolusi industri 4.0 adalah digitalisasi. Implementasi Revolusi industri 4.0 salah satunya adalah pada bidang pengelolaan SDM. Pada tahun 2020, LPEI secara bertahap telah melakukan pembaharuan pada sistem kerja SDM menuju ke arah digitalisasi. LPEI menerapkan pembaharuan dan pengalihan fungsi tugas manual menjadi digital dengan memaksimalkan fungsi *Employee Self Service*, beberapa diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan absensi digital dengan menggunakan aplikasi *Employee Self Service*. Hal ini dilakukan untuk mendukung fleksibilitas kerja pegawai di era pandemi COVID-19 dalam rangka menunjang efektivitas dan produktivitas pegawai. Absensi secara digital juga mampu melakukan perekaman lokasi secara otomatis.
2. Pembaharuan database kepegawaian menjadi digital pada *Employee Self Service*. Data umum kepegawaian LPEI saat ini dapat diakses secara *real time* dan dapat diakses dari mana saja, sehingga proses pelaporan kepegawaian yang dibutuhkan menjadi lebih mudah, cepat dan akurat.

HR DIGITALIZATION

Indonesia Eximbank realizes that in essence the 4.0 industrial revolution is digitalization. One of the implementations of 4.0 industrial revolution is on HR management aspect. In 2020, the Company gradually has updated its HR work systems toward digitization. The Company refines and transfers the manual assignment functions to digital by optimizing the function of Employee Self Services, among others are:

1. Digital attendance by using Employee Self Service application. This is carried out to bolster employee's work flexibility during the COVID-19 pandemic in order to support employee's effectiveness and productivity. Digital attendance is also able to recording the location automatically.
2. Updating the employment database to digital on Employee Self Service. The Company's employment general data is currently can be accessed real time and from anywhere, hence the required employment reporting process becomes easier, faster and accurate.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

3. Pelaksanaan pelatihan daring. LPEI juga telah mengaplikasikan kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi dengan memberikan pelatihan daring kepada pegawai. Laporan keikutsertaan pegawai pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan juga dapat diakomodir secara otomatis pada *website Employee Self Service*, sehingga memberikan kemudahan dan keakuratan secara bersamaan.
4. Pelaksanaan proses klaim pegawai secara digital. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas pegawai saat melakukan pengajuan klaim fasilitas pegawai. Pegawai dapat melakukan pengajuan klaim secara mandiri serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan mengakses *website* maupun aplikasi *Employee Self Service*.

3. Online trainings. The Company has also applied convenience offered by digitalization by providing online trainings for employees. The employee's participation report at trainings is also automatically accommodate on the Employee Self Services website, while providing convenience and accuracy.
4. Digitally claim process for employee. This update is aimed at improving employee's flexibility for employee's claims facility submission. Employee can independently submit the claims wherever and anytime by accessing website or Employee Self Service application.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senantiasa berkomitmen menjalin hubungan yang harmonis dengan pegawai. Hubungan industrial di LPEI dilandasi oleh semangat para pihak untuk memberikan yang terbaik bagi pegawai maupun Lembaga.

Hubungan industrial LPEI telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan LPEI (secara internal disebut Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian) yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

INDUSTRIAL RELATIONS

Indonesia Eximbank is committed to establishing harmonious relations with employees. The Company's industrial relations are based on the spirit of the parties to provide the best for employees and Institution.

The Company's industrial relations have been stipulated in the Company Rules (internally called Executive Director Regulation on the Employment System Policy) registered and ratified by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia through the Decree of Director General Industrial Relations Development and Social Security No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 dated 20 February 2020.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

PELATIHAN 2020

Program pengembangan kompetensi dilakukan dengan memberikan pelatihan kompetensi teknis dan non teknis. Selama tahun 2020, jumlah peserta pelatihan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.662 peserta menjadi 4.188 peserta. Lembaga telah melaksanakan pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai berikut:

TRAININGS IN 2020

Competency development program is provided with technical and non-technical competency programs. During 2020, the number of participants increased from previous year by 1,662 participants to 4,188 participants. The Company has carried out training domestically as well as overseas, as follows:

No	Kategori Pelatihan Training Category	Jumlah Peserta Number of Participants (orang | person)	Jumlah Pelatihan Number of Training	Tipe Pelatihan Type of Training		Lokasi Location	
				Eksternal External	*In House*	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas
1	*Accounting & Tax*	8	1	1	-	1	-
2	*Compliance and Audit*	352	14	6	8	14	-
3	*Credit & Loan Restructuring*	57	1	1	-	1	-
4	*Economy, Industry and Commodity*	448	4	1	3	4	-
5	*Finance & Corporate Banking*	804	5	2	3	5	-
6	*General Service*	15	1	-	1	1	-
7	*Human Resource Management*	605	16	5	11	16	-
8	*Insurance & Guarantee*	92	12	11	1	12	-
9	*Islamic Finance and Banking*	64	3	1	2	3	-
10	*Law, Regulation, Policy & Procedure*	225	6	2	4	6	-
11	*Leadership and Interpersonal Skill*	74	12	12	-	12	-
12	*Marketing*	14	1	1	-	1	-
13	*Methodology (Statistic, BSC, Malcome Balridge)*	145	21	21	-	21	-
14	*Risk Management*	884	76	18	68	76	-
15	*Seminar & General Knowledge (banking/lokakarya | Workshop)*	59	4	3	1	4	-
16	*Sertifikasi | Certification*	14	4	4	-	4	-
17	*Strategic and Management*	205	7	5	2	7	-
18	*System and Information Technology*	61	11	9	2	10	1
19	*Trade Finance & Structured (operation)*	60	1	-	1	1	-
20	*Treasury & Derivative Product*	2	2	2	-	2	-
	Total	**4.188**	**202**	**105**	**107**	**201**	**1**

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2021

Strategi dan rencana pengembangan LPEI dalam pengelolaan SDM tahun 2021 didasarkan kepada siklus manajemen kinerja, yang diselaraskan dengan rencana kerja dan target LPEI di tahun 2021. Sehingga tercipta sikronisasi dalam pengembangan SDM yang mendukung pencapaian target tersebut.

HR DEVELOPMENT PLAN IN 2021

The Company's strategy and development plan for HR development in 2020 is based upon the performance management cycle, which is harmonized with the Company's work plan and targets in 2021. As such the HR development is synchronized fostered by the achievement of targets.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Adapun rencana pengembangan tersebut meliputi tiga area yang berbeda yaitu:

1. Penguatan organisasi yang meliputi penyusunan Struktur Organisasi yang *Agile* diselaraskan dengan dinamika Lembaga, pemenuhan kebutuhan pegawai melalui perencanaan yang matang dan pengembangan karir bagi pegawai.
2. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi SDM baik kompetensi teknis (*technical competency*) dan kompetensi non teknis (*soft competency*) yang dilaksanakan sesuai dengan standarisari kompetensi jabatan yang telah ada.
3. Peningkatan kesadaran budaya kinerja melalui perbaikan sistem manajemen kinerja individu pegawai, sistem imbalan (*Total Reward*), manajemen talenta, serta suksesi sebagaimana yang tercermin di dalam *Performance Mangement Cycle*.

The development plan covers three different areas, as follows:

1. Strengthening of an organization that includes Agile Structure Development aligned with the Company's dynamics, fulfillment of employee needs through the firm planning and career development for the employee.
2. HR capability and competency development, both technical competency and soft competency implemented in accordance with existing position competency standardization.
3. Improvement of performance culture awareness through enhancement of individual performance management system, total reward, talent management, as well as success as reflected in Performance Management Cycle.

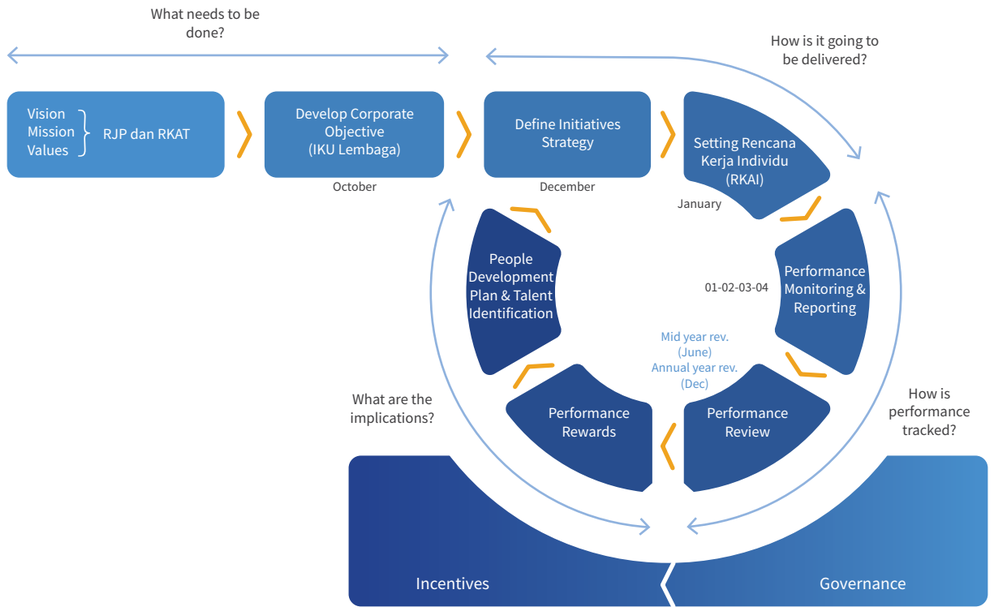

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

DEMOGRAFI SDM

Pada tahun 2020, Lembaga mencatat jumlah pegawai sebanyak 556 personel dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 518 pegawai. Berikut rincian demografi pegawai selama tahun 2020.

HR DEMOGRAPHICS

In 2020, the Company recorded a total of 556 employees compared to 518 employees in 2019. The following are details of employee's demographics during 2020.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
Employee Composition Based on Position

Kelompok Jabatan	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Position
Senior Executive Vice President	6*	2	Senior Executive Vice President
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah	43	34	Division Head
Kepala Departemen	113	90	Department Head
Kepala Seksi	-	-	Section Head
Staf dan lainnya	394	392	Staff and Others
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

* Termasuk Ketua SKAI Agung Waluyo (Ketua SKAI) | Including Head of IAU Agung Waluyo

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education

Kelompok Pendikan	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Education
Doktor	1	1	Doctorate
Master	124	106	Master Degree
Sarjana	430	410	Bachelor Degree
Diploma	1	1	Diploma
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja
Employee Composition Based on Job Location

Lokasi Kerja	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Location
Kantor Pusat Jakarta	465	425	Jakarta Head Office
Kantor Wilayah Jakarta	12	-	Jakarta Regional Office
Kantor Wilayah Surabaya	26	25	Surabaya Regional Office
Kantor Cabang Medan	12	17	Medan Regional Office
Kantor Cabang Makassar	11	17	Makassar Regional Office
Kantor Cabang Surakarta	16	17	Surakarta Regional Office
Kantor Pemasaran Denpasar	6	5	Denpasar Marketing Representative Office
Kantor Pemasaran Batam	4	7	Batam Marketing Representative Office
Kantor Pemasaran Balikpapan	4	5	Balikpapan Marketing Representative Office
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
Employee Composition Based on Term of Office

Masa Kerja (Tahun)	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Term of Office (Years)
<1	75	58	<1
1-5	185	224	1-5
6-10	192	160	6-10
11-15	63	41	11-15
>15	41	35	>15
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Employee Composition Based on Age

Kelompok Usia (Tahun)	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Age (Years Old)
<25	26	13	<25
25-30	137	171	25-30
31-35	189	156	31-35
35-40	82	80	35-40
41-50	79	72	41-50
>50	43	26	>50
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Gender
Laki-laki	340	321	Male
Perempuan	216	197	Female
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition Based on Employee Status

Status Kepegawaian	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Employee Status
Tetap	463	466	Permanent
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	75	51	Specific Time Work Agreement (PKWT)
Percobaan 3 Bulan	18	1	3 Month Probation
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Komposisi Pegawai Berdasarkan Direktorat

Employee Composition Based on Directorate

Direktorat	2020 Orang | Person	2019 Orang | Person	Directorate
Direktur Eksekutif	-	78	Executive Director
Direktur Pelaksana I	60	48	Managing Director I
Direktur Pelaksana II	122	144	Managing Director II
Direktur Pelaksana III	35	43	Managing Director III
Direktur Pelaksana IV	75	69	Managing Director IV
Direktur Pelaksana V	44	30	Managing Director V
SEVP I	30	52	Senior Executive Vice President I
SEVP II	51	54	Senior Executive Vice President II
SEVP III	43	-	Senior Executive Vice President III
SEVP IV	30	-	Senior Executive Vice President IV
SEVP V	20*	-	Senior Executive Vice President V
SEVP VI	46	-	Senior Executive Vice President VI
Jumlah Pegawai	**556**	**518**	**Total Employee**

* Termasuk Ketua SKAI Agung Waluyo (Ketua SKAI) | Including Head of IAU Agung Waluyo

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Pada tahun 2020, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah mengakselerasi transformasi budaya digital di lingkungan kerja dengan memposisikan Teknologi Informasi sebagai enabler dalam proses bisnis dan dapat mengoptimalkan operasional Lembaga. Fokus transformasi budaya digital lebih kepada *user customer experience*, *operational process*, dan *business model*.

In 2020, Indonesia Eximbank accelerated digital culture transformation in the organization by making Information Technology as the business process enabler that optimizes Indonesia Eximbank's operations. User and customer experience, operational process, and business model became the focus of our digital culture transformation initiative.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memiliki peran sebagai pusat ekspor yang ditunjang oleh Teknologi Informasi (TI). Karenanya Teknologi Sistem Informasi (TSI) senantiasa menjadi *tools* bagi LPEI dalam mendorong kebutuhan ekspor Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam visi TI LPEI yaitu TSI menjadi penggerak utama untuk mewujudkan LPEI sebagai Fasilitator, Akselerator, Agregator, dan *Arranger* dalam mendukung program ekspor nasional.

Sedangkan misi TI LPEI adalah sebagai berikut:
1. Menjadikan LPEI sebagai kustodian data ekspor nasional yang unggul dan kredibel.
2. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan berkualitas, guna mendukung:
   - Operasional bisnis yang handal dan berkelanjutan;
   - Keunggulan strategis melalui pengambilan keputusan manajerial yang cepat dan akurat.
3. Mewujudkan organisasi dan Sumber Daya Manusia TI yang *fit for purpose* melalui implementasi tata kelola TI yang baik dan pengelolaan anggaran TI yang efektif dan efisien.

LPEI melalui Divisi TSI akan terus membangun TSI dan Sistem Informasi Manajemen yang handal, baik untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan pelaporan, maupun kebutuhan aspek pengembangan. Peran Divisi TSI antara lain:
a. Memastikan seluruh layanan TI dapat mendukung proses bisnis serta dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna LPEI.
b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan proses bisnis dan operasional LPEI.
c. Melakukan pengembangan teknologi dan sistem informasi sesuai dengan perkembangan terkini.
d. Memastikan keamanan informasi untuk seluruh layanan teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung proses bisnis dan operasional LPEI.

Focusing on enhancing Indonesia's export, Indonesia Eximbank or Indonesia Eximbank is supported by reliable information technology (IT) system. Indonesia Eximbank benefits from IT-based tools that enable the institution to drive export growth. This is in line with the Institution's IT vision of making the TSI Division as the main engine behind Indonesia Eximbank activities as the facilitator, accelerator, aggregator, arranger in the national export activities.

Indonesia Eximbank IT missions are:
1. To enable Indonesia Eximbank as the excellent and credible custodian of national export data.
2. To build the solid and quality information system that supports:
   - Reliable and sustainable business operations;
   - Strategic excellence, allowing the management to exercise quick and accurate decision making.
3. To establish an IT organization and foster IT that is fit-for-purpose by implementing good IT governance as well as effective and efficient IT budget management.

Through the TSI Division, Indonesia Eximbank will continue to develop capable TSI and management information system for business, reporting, and development needs. The TSI Division undertakes the following roles:

a. Ensuring that the entire IT services effectively support business process and are fully aligned with users' needs.
b. Improving business process and operational efficiency and effectiveness.
c. Ensuring that the information system and technology (IST) are always up to date.
d. Ensuring data and system security across all systems used in Indonesia Eximbank to support its business process and operations.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

ROADMAP TI

LPEI senantiasa mengedepankan peran strategis Teknologi Sistem Informasi untuk memberikan manfaat secara optimal terhadap pencapaian sasaran perencanaan Lembaga. Hal ini dilakukan melalui penguatan bisnis proses yang efisien dan didukung platform TI yang kuat, sebagaimana tercermin dalam visi dan misi TI di LPEI.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi TI, LPEI telah menyusun *roadmap* sebagai acuan strategis mencapai sasaran utama dengan masing-masing *milestones/stages* yang memiliki fokus teknologi. Sehingga penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan dapat membantu daam pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan komprehensif.

IT ROADMAP

Indonesia Eximbank believes in the strategic role of Information System Technology and the optimum benefit the system can bring to the Company's goal attainment. As outlined in the IT vision and mission, Indonesia Eximbank therefore supports business process efficiency, backed by sophisticated IT platform.

To realize the vision and mission, Indonesia Eximbank has developed a roadmap. The strategic document articulates key objectives and milestones relating to IT development. Overall, the goal is to have a system that can swiftly generate information hence decision-making process can be faster and comprehensive.

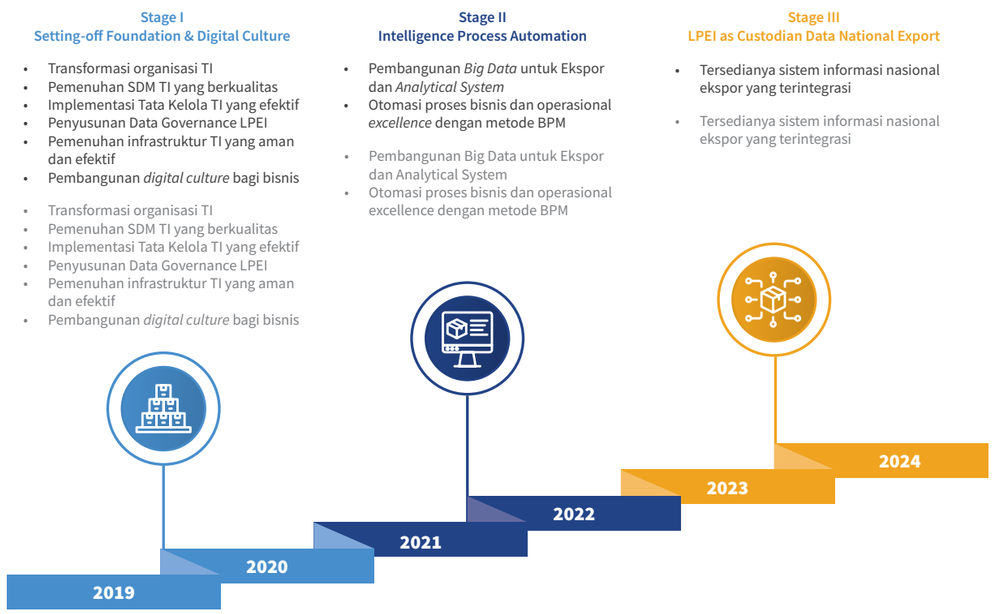

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

RENCANA DAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN TI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, LPEI telah menetapkan tema TI adalah *Setting-Off Foundation & Digital Culture*. Pelaksanaanya mencakup transformasi organisasi TI, pemenuhan SDM TI yang berkualitas, implementasi tata kelola TI yang efektif, penyusunan *data governance* LPEI, pemenuhan infrastruktur TI yang aman dan efektif, serta pembangunan budaya digital bagi bisnis.

Beberapa rencana kerja tahun 2020 yang dikembangkan LPEI terkait dengan TI, antara lain revitalisasi *Disaster Recovery Center* (DRC), *Big Data*, *Enterprise GL Engine*, *Middleware Payment System*, Eximbank Nota Dinas – *Paperless* Nota Dinas, dan *Lead Management Export*.

Sedangkan program kerja Divisi TSI di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan sistem/aplikasi
   - Sistem Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71).
   - *New Human Resource Information System*.
   - *Trade Processing System*.
   - *Meeting Room Management System/Smart Room*.

b. Implementasi perangkat infrastruktur
   - *New Firewall Farm Server*.
   - *New Load Balancer/Application Delivery Controller*.
   - *All-Flash Storage*.

c. Pengembangan sistem/aplikasi
   - *Enhancement* sistem Asuransi.
   - *Enhancement Treasury Dealing System*.
   - *Enhancement Dashboard Management System*.
   - *Enhancement* Sistem Pembiayaan.

LPEI juga melakukan pengembangan TSI terkait dengan peluncuran produk dan atau jasa baru untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020. Penguatan dan pengembangan Sistem Manajemen Informasi yang andal melalui integrasi sistem dan teknologi juga dapat dicapai dengan baik oleh LPEI pada tahun 2020.

IT DEVELOPMENT PLAN AND PROGRAMS IN 2020

The theme of IT for 2020 was Setting-Off Foundation & Digital Culture. The theme was translated into organizational transformation, fulfillment of qualified IT HR, implementation of effective IT governance, development of the Company's data governance, ensuring safe and effective IT infrastructure, and development of digital culture in business activities.

In terms of IT workplan in 2020, Indonesia Eximbank identified disaster recovery center (DRC) revitalization, Big Data, Enterprise GL Engine, Middleware Payment System, Eximbank Internal Correspondence – Paperless Correspondence, and Lead Management Export.

The following are the work programs of TSI Division in 2020:

a. System/app development
   - System for the Statements of Financial Accounting Standards 71 (PSAK 71).
   - New Human Resource Information System.
   - Trade Processing System.
   - Meeting Room Management System/Smart Room.

b. Infrastructure implementation
   - New Firewall Farm Server.
   - New Load Balancer/Application Delivery Controller.
   - All-Flash Storage.

c. System/app development
   - Insurance system enhancement
   - Treasury Dealing System enhancement
   - Dashboard Management System enhancement
   - Payment system enhancement

Indonesia Eximbank also carried out TSI development to support new product and service launch in connection to the National Economic Recovery (PEN) program. Moreover, Indonesia Eximbank completed Management Information System development by integrating existing systems and technologies.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

TANTANGAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN TI TAHUN 2020

Tantangan terbesar yang dihadapi LPEI terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan TI di tahun 2020 adalah adanya efisiensi anggaran. Namun hal ini tidak sepenuhnya menghambat Divisi TSI dalam mendukung pengembangan kegiatan operasional dan bisnis Lembaga. Sebab sudah terdapat pengelompokan program kerja dengan memiliki prioritas pelaksanaan dan pengembangan.

Selain adanya efisiensi anggaran, juga terdapat tantangan perubahan organisasi yang memiliki dampak terhadap *time line* pelaksanaan keseluruhan proyek kerja. Untuk meminimalisir mundurnya jadwal penyelesaian proyek di tahun 2020, Divisi TSI telah melakukan komunikasi dengan intensif kepada *user-user* yang terlibat dalam proyek tersebut.

PENGEMBANGAN SDM TI TAHUN 2020

Di tahun 2020, LPEI terus mengembangkan kompetensi SDM internal dengan memberikan pelatihan-pelatihan, baik dalam bentuk *soft-skill* maupun *hard-skill*. LPEI juga melakukan pemenuhan sertifikasi yang diharapkan dapat membuat Divisi TSI dapat berkembang serta menambah daya saing untuk mendukung operasional dan bisnis Lembaga. LPEI melakukan pula rekrutmen staf baru sesuai dengan kebutuhkan operasional TSI di tahun 2020.

INVESTASI TI TAHUN 2020

Terkait kebutuhan investasi di tahun 2020, LPEI melakukannya melalui Komite Pengadaan Lembaga. Sedangkan terkait realisasi investasi dilaporkan kepada Komite TSI secara berkala. Komite TSI telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal kebijakan pengembangan TSI jangka menengah dan jangka panjang, rencana kegiatan investasi TSI, dan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan TSI yang telah dilakukan.

CHALLENGES OF IT APPLICATION AND DEVELOPMENT IN 2020

In 2020, the primary challenge in Indonesia Eximbank concerning IT development was budget efficiency. However, Indonesia Eximbank had already identified development priority and work plan for the year, and this ensured that the TSI Division was still able to provide the necessary support to operational and business activities.

Other than budget efficiency, organizational transformation also created a challenge in terms of project timeliness. To minimize the delay of projects completion schedule in 2020, the TSI Division has carried out intensive communication with users involved in the projects.

IT HR DEVELOPMENT IN 2020

In 2020, Indonesia Eximbank continued to develop the soft-skills and hard skills of IT human resource through various training and certification programs to enhance their competitiveness in supporting the Company's operations and business. Indonesia Eximbank also recruited new staff for the TSI Division as needed by the division operations in 2020.

IT INVESTMENT IN 2020

IT investment in 2020 was realized through the Procurement Committee, and TSI Committee periodically receives investment realization report. TSI submits its recommendations to the Executive Director on medium and long-term TSI development, investment plan, and monitoring and evaluation results of past activities.

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

TATA KELOLA TI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, pelaksanaan operasional TI telah dilakukan sesuai dengan tata kelola TI. Diantaranya pengendalian aktivitas teknologi informasi yang menjadi dasar dalam melakukan pemutakhiran standar prosedur operasi yang mendukung aktifitas TI.

IT GOVERNANCE IN 2020

IT operations throughout 2020 were carried out in accordance with IT governance rules and policies, such as IT activity control that informs the updates of IT standard operating procedures.

SASARAN DAN STRATEGI TI TAHUN 2021

Untuk menghadapi berbagai tantangan tahun 2021, termasuk pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih berlangsung, LPEI menetapkan sasaran dan strategi Divisi TSI dari sisi infrastruktur dan sistem sebagai berikut:

- Dari sisi infrastruktur: melakukan peremajaan perangkat *data center* & *DRC collocation*.
- Di sisi sistem, membangun *Management Information System* (MIS) dan sistem pendukung MIS yang handal untuk mendukung proses bisnis dan *operational excellence*, termasuk membangun beberapa sistem yang lain dalam rangka percepatan proses bisnis *end to end* khususnya terkait dengan pembiayaan (*Lead Management*, *Prescreen*, *Application*, *Analysis*, *Approval*, *Drawdown*, dan *Monitoring*).

IT OBJECTIVES AND STRATEGY IN 2021

To address the various challenges of 2021, including the ongoing COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank has identified the following IT development objectives and strategy:

- Infrastructure: revitalize data center equipment and DRC collocation.
- System: develop reliable Management Information System (MIS) and its supporting systems to create excellent business process and operations. These include the systems that will enable end-to-end business acceleration, especially financing activities (Lead Management, Prescreen, Application, Analysis, Approval, Drawdown, dan Monitoring).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

LPEI menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan dalam pelaksanaan mandat untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, yang berperan penting dalam membangun aktivitas usaha lembaga yang mumpuni. LPEI berkomitmen untuk secara konsisten meningkatkan kualitas tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik.

In implementing its mandate to support the national export program through the National Export Financing, Indonesia Eximbank applies the Corporate Governance best practices that to develop excellent business activities. The Company is committed to consistently enhancing GCG quality based on its principles and best practices.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Bagi LPEI, Tata Kelola Perusahaan yang baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) didefinisikan sebagai suatu struktur dan proses sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan risiko serta menjaga keseimbangan kepentingan internal dan eksternal, dalam rangka mewujudkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan LPEI lainnya.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Dalam menjalankan mandat untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan dan penjaminan ekspor, LPEI menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen dan tujuan dari penerapan praktik terbaik GCG di seluruh lingkup operasional LPEI meliputi:

- Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan;
- Menyeimbangkan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan;
- Menghindari timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko reputasi; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCG

LPEI memastikan bahwa penerapan GCG telah sesuai dan berdasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan GCG di LPEI adalah sebagai berikut:

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.06/2020.

PRINSIP-PRINSIP GCG

LPEI menerapkan prinsip-prinsip" Good Corporate Governance" (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di LPEI. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang No.2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip" Good Corporate Governance (GCG)"/tata kelola lembaga yang baik di LPEI, Dewan Direktur juga telah menyusun pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya.

Penerapan GCG di LPEI mengacu pada 5 prinsip GCG, yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

For Indonesia Eximbank, GCG (Good Corporate Governance) is defined as a structure and processes of effective and efficient management system in the management of company resources and risks as well as in balancing internal and external interests, in the creation of sustainable added value for shareholders and other stakeholders of Indonesia Eximbank.

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

In carrying out its mandate to support national export programs through financing and export guarantee, Indonesia Eximbank applies GCG best practices. The commitment and purpose of GCG best practices across Indonesia Eximbank operations are as follows:

- Safeguarding the stakeholders' interest;
- Balancing the authorities to ensure business continuity and accountability to the stakeholders;
- Provide strategic directions to ensure the achievement of Vision, Mission and Corporate Values;
- Prevention of risks that unlimited to reputation risk; and
- Enhance the compliance on prevailing laws and regulatory.

GCG LEGAL REFERENCES

Indonesia Eximbank ensures that the implementation of GCG is in accordance and based on prevailing laws and regulations. The regulatory basis is as follows:

- Article 17 Law No. 2/2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- Finance Minister Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Principles of Governance for Indonesia Eximbank.
- Article 2 paragraph (2) and Article 8 of the Regulation of the Minister of Finance No. 58/PMK.06/2020

GCG PRINCIPLES

Indonesia Eximbank applies the principles of "Good Corporate Governance" (GCG) as emphasized in Article 17 paragraphs 1 and 2 of the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 which states that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank is obliged to apply good governance, risk management, and know your customer principles.

This governance principle has been reaffirmed through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 141/PMK 010/2009 which regulates the implementation of good governance in Indonesia Eximbank. As a manifestation of compliance with Law No. 2 of 2009 and to ensure the implementation of "Good Corporate Governance (GCG)"/good institutional governance principles in Indonesia Eximbank, the Board of Directors has also prepared guidelines for the Board of Directors, Executive Directors and Managing Director in carrying out each of their functions.

GCG implementation in Indonesia Eximbank refers to five GCG principles, which described as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Keterbukaan
Pelaksanaan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Akuntabilitas
Kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Tanggung Jawab
Kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.

Kemandirian
Kegiatan usaha LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Kewajaran
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN GCG TAHUN 2020

LPEI meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara *sustainable* dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis akan diraih, jika LPEI dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten. Karena itu, bagi LPEI, penerapan GCG tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

Transparency
Business activities of Indonesia Eximbank that ensures transparency in the decision-making processes related to the business activities of Indonesia Eximbank in accordance with prevailing regulations and common practices.

Accountability
Business activities of Indonesia Eximbank that describes the function of Indonesia Eximbank's related parties in accordance with prevailing regulations and common practices.

Responsibility
Business activities by Indonesia Eximbank that describes the roles and status of Indonesia Eximbank's related parties for every policy development and application in Indonesia Eximbank.

Independency
Business activities of Indonesia Eximbank that professionally managed without conflict of interest and/or influence or pressure from any parties that is not in compliance with the prevailing regulations and common practices.

Fairness
Fairness and equality in the fulfillment of the right of parties based on contractual agreements and prevailing regulations.

GCG IMPLEMENTATION IN 2020

Good performance can be sustainably achieved in the long term including various business prospects, if the Company implements consistent Corporate Governance principles. To that end, for Indonesia Eximbank, GCG practice is not only a necessity, however is also a main foundation in carrying out business to optimize benefits and added vale for stakeholders, while maintaining business continuity.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Sepanjang tahun 2020 LPEI telah melaksanakan implementasi penerapan GCG antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan dan pemenuhan kecukupan regulasi internal LPEI, diantaranya selama tahun 2020 telah diterbitkan aturan:
  - Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (*Board Manual*).
  - Pengkinian Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
  - Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI
  - Penyempurnaan Manual Operasional Pembiayaan LPEI.
  - Penyempurnaan beberapa Peraturan Internal mengenai proses bisnis.
  - Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
  - Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
  - Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI.
  - Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus Trade Finance dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
  - Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
  - Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan Know Your Employee (KYE) LPEI
  - Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI
- Sosialisasi terkait Kode Etik dan Budaya Kerja melalui *Computer Based Training* (CBT), termasuk melakukan *updating* Pakta Integritas Pegawai dan Manajemen.
- Sosialisasi Penerapan Tata Kelola yang Baik pada LPEI kepada seluruh Pegawai oleh Konsultan Independen. Sehingga segenap pegawai LPEI memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan GCG.

in 2020, Indonesia Eximbank has implemented the following GCG program:

- Improvement and fulfilment of internal regulations adequacy, among them were issued during 2020:
  - Issuance of Board Manual of the Board of Directors.
  - Updating of Policy and Procedures on Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Programs (AML & CTF).
  - Refinement of Regulation on Organization Guidelines and Work Procedures.
  - Refinement of Financial Operating Manual.
  - Refinement of several Internal Regulations on business process.
  - Issuance of Export Activity Policy, Export Supports and Other Activities related to Government Guarantee for Corporate Business Practitioners in order to Implement the National Economic Recovery Program.
  - Issuance of Government Credit Guarantee Product Manual for Corporate Businesses to Implement the National Economic Recovery Program.
  - Issuance of NIA Product Manual to Support Small and Medium Enterprises of Export-Oriented.
  - Issuance of NIA Trade Finance Product Manual to Support the National Economic Recovery.
  - Issuance of Government Investment Product Manual for the National Economic Recovery.
  - Issuance of Know Your Employee (KYE) Regulation.
  - Issuance of Disciplinary Enforcement and Sanction Determination on Frauds.
- Dissemination of Code of Conduct and Work Culture through Computer Based Training (CBT), including to updating Integrity Pact of Employee and Management.
- Dissemination of GCG Practices at the Company to all Employees by Independent Consultant, hence all employees to have common understanding in implementing GCG.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

- Penyempurnaan struktur organisasi yang lebih efektif sesuai kebutuhan lembaga.
- Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai baru LPEI melalui program *New Hire Orientation* terkait Kode Etik, *Whistleblowing System* (WBS), Tata Kelola, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Penerapan APU & PPT.
- Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola LPEI untuk posisi Tahun 2019.
- Pelaksanaan evaluasi *Self Assessment* Tata Kelola LPEI untuk posisi Tahun 2019 oleh konsultan independen termasuk memenuhi poin-poin kelemahan dan rekomendasi dari konsultan independen.
- Pemenuhan saran dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) atas Laporan Pelaksanaaan Tata Kelola Tahun 2019 diantaranya:
  - Pemenuhan Pelaporan LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor LPEI 100%.
  - Sosialisasi pada unit terkait dan/atau kantor wilayah dan kantor pemasaran berkenaan dengan penerbitan peraturan baru dalam rangka peningkatan budaya kepatuhan dan meningkatkan *awareness* terhadap risiko.
  - Sinergi antara divisi kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit dalam rangka menjaga proses bisnis LPEI, yang dilakukan yaitu dengan Penguatan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (menuju GRC).
  - Telah tersedianya *tools* manajemen risiko yang mengacu kepada *best practice,* yaitu *Industrial Acceptance Criteria, Risk Appetite Statement* (RAS) dan *Portofolio Guideline.*
  - Pelaksanaan pemantauan kewajiban pelaporan kepada regulator dan pemangku kepentingan.

- Refinement of a more effective organization structure according to the Company's needs.
- Dissemination to all new employees through New Hire Orientation on Code of Conduct, Whistleblowing System (WBS), Governance, Compliance Function Practices, and AML & CTF Practices.
- GCG Self Assessment implementation for 2019 position.
- GCG Self Assessment implementation for 2019 position by independent consultant including to fulfill points of weaknesses and recommendations from the independent consultant.
- Fulfillment of recommendations from evaluation results of Finance Ministry (Directorate General of State Treasury) on GCG Implementation Report Year 2019, among others:
  - Fulfillment of LHKPN Report for Executives that have the Mandatory to Report 100%.
  - Dissemination at related units and/or regional offices and marketing offices regarding the issuance of new regulations in order to improve compliance culture and risk awareness.
  - Synergy between compliance division, risk management and internal audit in order to maintain the Company's business processes, which is carried out by Strengthening Internal Control System Policy (toward GRC).
  - The availability of risk management tools referring to best practices, namely Industrial Acceptance Criteria, Risk Appetite Statement (RAS) and Portfolio Guideline.
  - Monitoring or reporting mandatory to regulators and stakeholders.

Fokus dan Penerapan GCG di tahun 2021:

Fokus dan implementasi GCG LPEI di tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 yaitu fokus pada perbaikan *Governance Structure* (Struktur Tata Kelola) dan *Governance Process* (Proses Tata Kelola), selain itu fokus implementasi GCG pada tahun 2021 juga fokus pada pemenuhan dan perbaikan atas faktor kelemahan dari hasil *self assessment* GCG pada tahun 2020.

Perbaikan *Govenance Structure* (Struktur Tata Kelola) di LPEI pada tahun 2021 akan dilakukan dengan fokus perbaikan dan pemenuhan kecukupan regulasi internal LPEI, penyempurnaan infrastruktur penerapan GCG dan penyempurnaan struktur organisasi yang lebih efektif sesuai kebutuhan lembaga serta pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sedangkan perbaikan *Governance Process* (Proses Tata Kelola) dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi masing-masing organ dan unit kerja lembaga dan penerapan budaya kerja yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu perbaikan penyempurnaan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) juga akan difokuskan dengan melakukan perbaikan data dan *reporting* yang tentunya perlu ditunjang juga oleh perbaikan sistem informasi yang memadai.

Focus and Implementation of GCG in 2021:

The focus and implementation of the Company's GCG in 2021 will be similar with 2020, namely focus on improving the Governance Structure and Governance Process. Additionally, the GCG implementation in 2021 will also be focusing on the fulfilment and improvement of weakness factors from the results of GCG self assessment year 2020.

Improvement of Governance Structure at the Company in 2021 will be carried out by focusing on improvement and fulfilment of internal regulation adequacy, refinement of GCG practices infrastructure and refinement of a more effective organization structure according to the needs of the company, as well as fulfilment of qualified human resources.

Whereas improvement of Governance Process is carried out by optimizing the implementation of function of each organ and work units, and implementation of consistent and sustainable work culture. In addition, the improvement of Governance Process will also be focusing on data and reporting improvement in which also requires the improvement of adequate information system.

SISTEM TATA KELOLA LPEI

Sistem Tata kelola LPEI adalah "One Board System'. Dewan Direktur sebagai organ tunggal perusahaan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Dalam organisasi LPEI, paling banyak terdapat sepuluh (10) orang anggota Dewan Direktur sebagai organ tunggal LPEI yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Anggota Dewan Direktur berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian; dan orang/pihak dari luar dan/atau dalam LPEI.

Direktur Eksekutif melakukan kegiatan operasional LPEI termasuk mewakili LPEI, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif. Paling banyak 4 (empat) orang dari Direktur Pelaksana berasal dari dalam LPEI.

GOVERNANCE SYSTEM

The Governance System of Indonesia Eximbank is a "One Board System". The Board of Directors is the company's sole organ with the principal duties and function to formulate, set the policies, and carries out oversight on the Company's operations. The segregation of duties and work ethics of members of the Board of Directors are stipulated by the Board of Directors.

In the Company's organization, the greatest number of members of the Board of Directors are ten (10) members as the Company's sole organ that are appointed and terminated by the Ministry. Members of the Board of Directors are assigned from institutions with expertise in fiscal, commerce, industrial, and agriculture; and person/party from external sources and/or from the internal of the Company.

Executive Director is in charge of the Company's operations including to represent the Company, both in and or out of courts. In implementing its duties, the Executive Director is assisted maximum by 5 (five) members of Managing Director that are appointed and terminated by the Board of Directors following the proposal of the Executive Director. Maximum of 4 (four) members of Managing Director are from the Company.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

ORGAN (One Board, One Star)

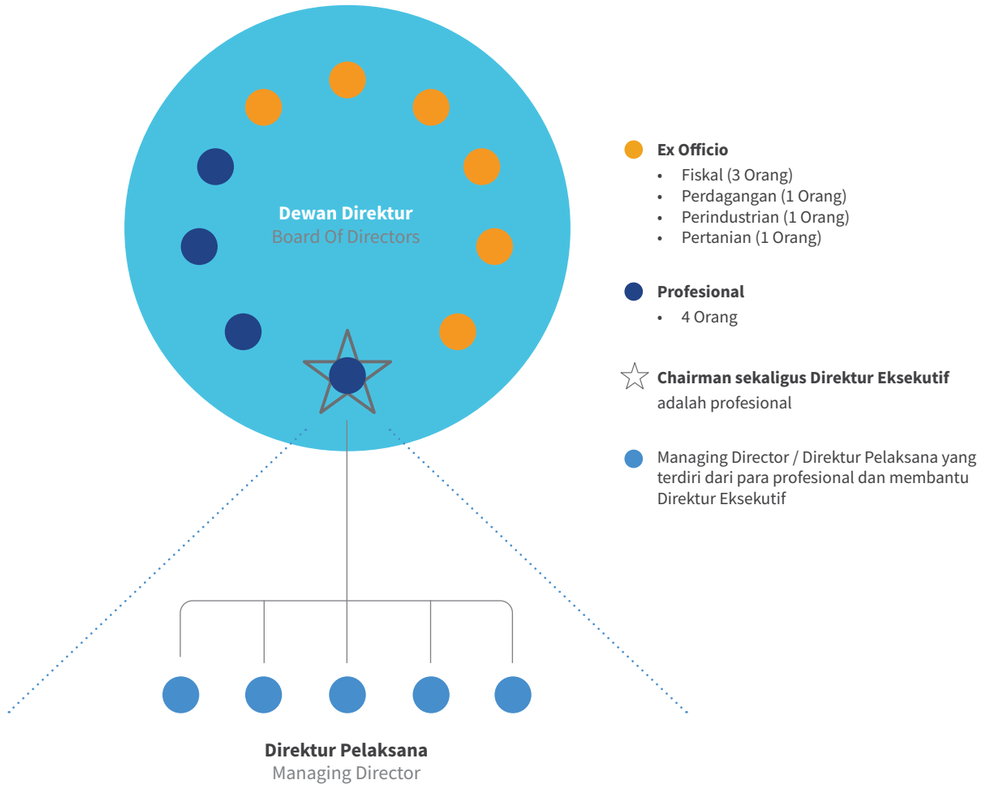

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG

LPEI memiliki struktur GCG yang dibentuk berdasarkan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009.

Struktur GCG LPEI secara garis besar terbagi atas Organ Utama dan Organ Pendukung yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana serta pelaksanaan Rapat Pengesahan (Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham - RUPS).

Rapat Pengesahan (Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham - RUPS) LPEI dilaksanakan untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur wajib membentuk komite-komite, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing Komite bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Direktur (KDD).

Sementara itu, Direktur Eksekutif telah membentuk antara lain Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Bisnis, Komite Pengembangan Produk, Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor, Komite Personalia, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Asset & Liabilities, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern. Selain fungsi internal audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern, fungsi kepatuhan dan fungsi audit ekstern harus dilaksanakan untuk memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap UU No. 2/2009 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Arsitektur Kebijakan GCG

Arsitektur penyusunan kebijakan dan prosedur berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan mengamanatkan adanya Kebijakan dan Prosedur tertulis, sebagaimana skema berikut:

GCG STRUCTURE AND ARCHITECTURE

The Company has established GCG structure based on the function, authority and responsibilities of each organ pursuant to the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009.

The Company's GCG structure consists of Main Organ and Supporting Organ, realized through the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, the Executive Director, and the Managing Director, as well as the Ratification Meeting (General Meeting of Shareholders - GMS).

The Ratification Meeting (General Meeting of Shareholders - GMS) is carried out to discuss the fiveyearly Corporate Plans and the annual Work & Budget Plans.

To foster the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors shall establish several committees, among others the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Each Committee works according to the scope of duties and responsibilities, as determined by the Decree of the Board of Directors.

Meanwhile, the Executive Directors has established among others the Financing Committee, Business Policy Committee, Product Development Committee, National Interest Account Financing Committee, Personnel Committee, Information Technology System Committee, Assets & Liabilities Committee, Risk Management Committee, Risk Management Unit, and Internal Audit Unit. Besides its internal audit function, the Internal Audit Unit shall carry out compliance function and the external audit function to ensure compliance with Law No. 2/2009, as well as other prevailing laws and regulations.

GCG Policy Architecture

The Company's policy development and procedures that are based on the principles of GCG are mandated through the following written schemes:

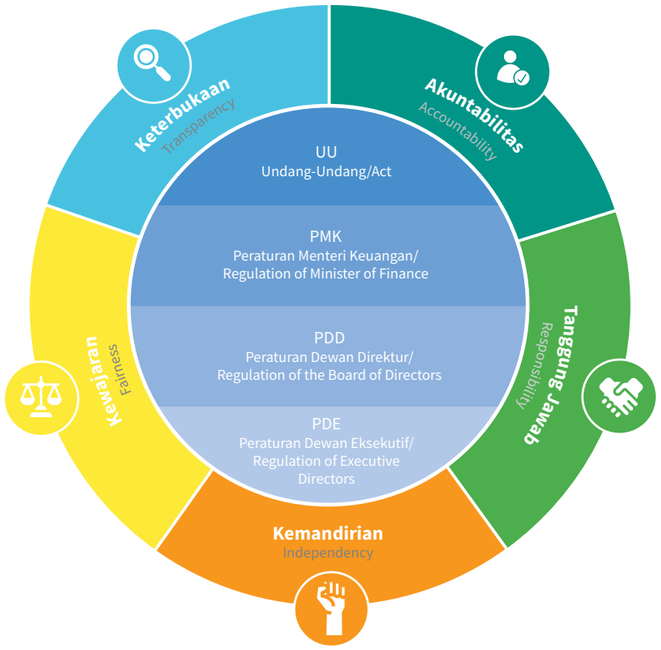

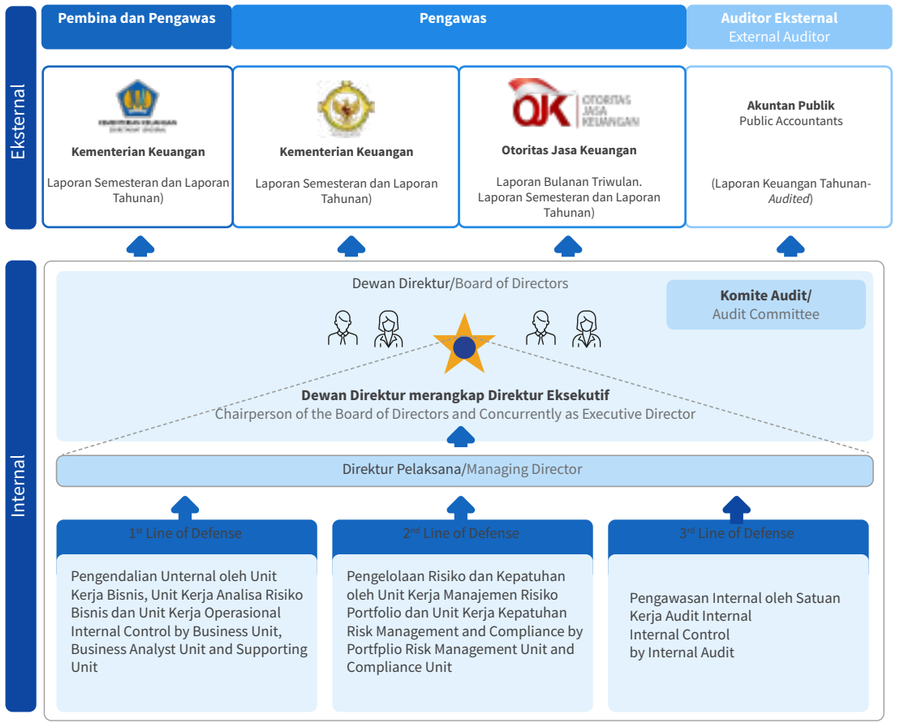

RAPAT PENGESAHAN

RATIFICATION MEETINGS

Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan di LPEI (Fungsi RUPS) adalah organ perusahaan dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 2/2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Pengesahan merupakan forum bagi Kementerian Keuangan/Pemegang Saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan Lembaga.

The Ratification Meetings (GMS Function) in Indonesia Eximbank is a company organ with authorities not granted to the Board of Directors and the Executive Directors within threshold as set forth under the Articles of Association and prevailing regulations. The Ratification Meetings serves as a forum for the Shareholder to exercise rights, initiate authorities, and submission of opinions, votings, and request of information relating to the strategic decision-making or the Company's management.

Landasan Hukum dan Tahapan Pelaksanaan Rapat Pengesahan

Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan:

- Pasal 36: Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- Pasal 37:
  - Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
  - Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
  - Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri."

Legal References and Stages of the Ratification Meetings

Pursuant to Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency Fourth Part Work Plan and Annual Budget:

- Article 36: Indonesia Eximbank Fiscal Year and Financial Year begin from 1 January to 31 December Annual Work Plan and Budget.
- Article 37:
  - The Executive Director prepares a Long-Term Plan as a strategic plan that contains the objectives to be achieved by the Company within a 5 (five) year period.
  - The Executive Director prepares an Annual Work Plan and Budget as an annual translation of the Long-Term Plan.
  - The procedures for the preparation, submission and amendment of the Long- Term Plan and Work Plan and Annual Budget are stipulated in a Ministerial Regulation.

Hak-hak Pemegang Saham

LPEI tidak terbagi atas saham dan 100% milik Pemerintah.

Shareholders Rights

Indonesia Eximbank is wholly owned (100%) by the Government and is not divided into shares.

Kesetaraan Perlakuan terhadap Pemegang Saham

LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Equality in Treatment of the Shareholders

Indonesia Eximbank is 100% Government ownership and not divided into shares.

Pelaksanaan Rapat Pengesahan Tahun 2020

Laporan Rapat Pengesahan LPEI telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor BS.0118/CE0/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pengesahan dan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Audited Tahun 2019, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Ratification Meetings in 2020

Indonesia Eximbank Ratification Meeting Report has been approved by the Minister of Finance through letter No. BS.0118/CE0/06/2020 dated 24 June 2020 concerning the Ratification and Follow Up of Audited Financial Report 2019 of Indonesia Eximbank, which includes the following:

RAPAT PENGESAHAN
RATIFICATION MEETINGS

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan
Ratification Meeting Resolutions

No.	Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Ratification Meeting Resolutions
1	Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dalam laporannya No. 00113/2.1032/AU.1/09/0240-1/1/ll/2020 tanggal 21 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ratified the Annual Financial Report of Indonesia Eximbank Fiscal Year 2019 that has been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as stated in its report No. 00113/2.1032/AU.1/09/0240-1/1/ll/2020 dated 21 February 2020 with the opinion of fairness in all material respects, the financial position of Indonesia Eximbank date 31 December 2019, including financial performance and cash flows ended on the said date, in accordance with the Financial Accounting Standard in Indonesia.
2	Menyetujui capaian kinerja Manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun Buku 2019 sebagaimana telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young). Approved the performance achievement of the Management according to Management Contract Fiscal Year 2019 as has been reviewed by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).
3	Memberikan pembebasan kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif LPEI atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 dalam semua hal yang material atas Laporan Keuangan Tahun 2019 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019. Granted release to the Board of Directors and Executive Director of Indonesia Eximbank on oversight and management that have been implemented during the period of 1 January 2019 to 31 December 2019 in all material aspects on the Financial Statements of 2019, as long as the actions are not a criminal act and such actions were reflected in the Financial Statements period of 1 January 2019 to 31 December 2019.
4	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian: a. Melaksanakan Business Continuity Plan dengan disiplin di tengah pandemi COVID-19 guna memastikan program kegiatan LPEI dapat terus berjalan dan memastikan risiko yang timbul dari pandemic COVID-19 dapat termitigasi dengan baik. b. Memastikan perbaikan hal-hal fundamental terkait kapasitas SOM secara technical maupun risk awereness pembiayaan dan bisnis LPEI lainya, integrasi sistem teknologi informasi, dan budaya kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta hubungan dengan kelembagaan dengan kementerian/lembaga sektoral yang mendukung kegiatan ekspor. c. Melakukan upaya yang maksimal dalam rangka pencapaian target perbaikan kualitas pembiayaan bermasalah, perbaikan proses monitoring pembiayaan dan penyelesaian restrukturisasi yang komprehensif, dan pembenahan bisnis proses pembiayaan, serta penguatan bisnis penjaminan dan asuransi dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan prisip kehati-hatian. d. Melakukan evaluasi atas tata kelola dan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Penugasan Khusus Ekspor baik dari sisi regulasi maupun implementasi. e. Memastikan seluruh temuan BPK, OJK, dan Itjen maupun auditor eksternal dapat segera ditindaklanjuti dan diupayakan untuk tidak terulang kembali. f. Melaporkan upaya perbaikan dan tindak lanjut dari arahan di atas secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Issues Requiring Attention: a. Disciplined implementation of Business Continuity Plan in the midst of the COVID-19 pandemic in order to ensure the Company's program activities are continuously conducted and ensure proper mitigation on inherent risks from the COVID-19 pandemic b. Ensuring improvement on fundamental matters related to HR capacity technically as well as risk awareness of financing and other businesses, integration of information technology system, and compliance culture on the set policies, as well as institutional relations with the sectoral ministry/agency supporting the export activities. c. Conducting maximum efforts to achieve improvement target of non-performing financing quality, improvement of financing monitoring process and comprehensive restructuring settlement, and improvement of financing process business, as well as strengthening the guarantee and insurance business, while remain to take into account the good governance, risk management, and prudential principles. d. Evaluating the governance and challenges encountered in the National Interest Account programs, both on regulations and implementation. e. Ensuring immediate follow up and efforts to prevent the reoccurrence on all findings by BPK, OJK, Inspectorate General or external auditor. f. Reporting improvement efforts and follow ups on the above directives periodically to the Minister of Finance c.q. Directorate General of State Treasury.

RAPAT PENGESAHAN
RATIFICATION MEETINGS

No.	Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Ratification Meeting Resolutions
	Realisasi **Realization** Seluruh poin di atas telah dilaksanakan dengan surat Menteri Keuangan BS.0118/CE0/06/2020 All points have been implemented in accordance with the Letter of Minister of Finance No. BS.0118/CE0/06/2020
	Status Selesai Completed

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Tahun Sebelumnya 2019
Seluruh keputusan Rapat Pengesahan Tahun 2019 telah selesai dan telah direalisasikan.

Ratification Meetings Resolutions in the Previous Year 2019
All resolutions from the 2019 Ratification Meetings have been completed and fully realized.

DEWAN DIREKTUR

BOARD OF DIRECTORS

Sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009, Dewan Direktur (Fungsi Dewan Komisaris) merupakan organ dalam LPEI. Dewan Direktur memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

Dasar Hukum

Pembentukan Dewan Direktur LPEI berdasarkan pada peraturan-peraturan berikut:

Peraturan Internal

PDD No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI (Board Manual).

Peraturan Eksternal

a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
c. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komposisi Dewan Direktur

Sesuai ketentuan pasal 25 ayat (2) UU Nomor 2/2009, bahwa Anggota Dewan Direktur terdiri dari unsur:

a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
b. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Pursuant to the article 26 paragraph (1) of the Act No. 2/2009, the Board of Directors (Board of Commissioners' Function) serves as the single organ of Indonesia Eximbank. The Board of Directors is in charge to formulate and stipulate the policy, as well as conduct oversight on Indonesia Eximbank operations activity.

Legal References

The establishment of Indonesia Eximbank's Board of Directors refers to:

Internal Regulations

BOD Decree No. 0007/PDD/12/2020 on the Indonesia Eximbank Board of Directors Charter (Board Manual).

External Regulations

a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Export Financing Institution
b. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 concerning Guidance and Supervision of the LPEI
c. Finance Ministry of RI Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Governance Principle of Indonesia Export Financing Institution.
d. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 regarding Development and Supervision of Indonesia Eximbank.

Board of Directors' Composition

Pursuant to the article 25 paragraph (2) Law No. 2/2009, Member of the Board of Directors consists of the following elements:

a. 3 (three) officials from the institution or department in charge of fiscal, 1 (one) official from the institution or department in charge of commerce, 1 (one) official from the institution or department in charge of industry, and 1 (one) official from the institution or department in charge of agriculture.
b. At the most 3 (three) members from the external Indonesia Eximbank and 1 (one) member from the internal Indonesia Eximbank.

DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS

Komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami 3 kali perubahan sepanjang tahun 2020. Berikut ini rinciannya:

Indonesia Eximbank Board of Directors composition underwent 3 changes throughout 2020 with the following details:

a. Komposisi Periode 1 Januari – 8 Januari 2020
Composition for the Period of 1 January – 8 January 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Arlinda	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	521/KMK.06/2018
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	71/KMK.06/2015
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

KMK : Keputusan Menteri Keuangan | Minister of Finance Decree

b. Komposisi Periode 9 Januari – 7 Juni 2020 (Perubahan I)
Composition for the Period of 9 January – 7 June 2020 (First Change)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Arlinda	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	521/KMK.06/2018
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

c. Komposisi Periode 8 Juni – 24 November 2020 (Perubahan II)
Composition for the Period of 8 June – 24 November 2020 (Second Change)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	274/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

d. Komposisi Periode 25 November – 31 Desember 2020 (Perubahan III)
Composition for the Period of 25 November – 31 December 2020 (Third Change)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	934/KMK.06/2019

Tugas dan Tanggung Jawab
Sebagaimana tercantum pada PMK No 141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bab III, Pasal 4 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur, Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen:

1. Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
4. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern LPEI, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

Duties and Responsibilities
As stated in PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning the Principles of Governance of the Indonesia Export Financing Institution Chapter III, Article 4 on the Duties and Responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors shall independently carry out its duties and responsibilities:

1. As referred to in Article 2, the Board of Directors shall ensure the implementation of good governance principles in every Company's business activity at all organizational levels or elements.
2. The Board of Directors shall exercise oversight on the Executive Directors' duties and responsibilities implementation, and provide advisory to the Executive Director.
3. In carrying out its oversight duty as referred to in paragraph (2), the Board of Directors shall direct, monitor and evaluate the implementation of basic and strategic policies.
4. The Board of Directors shall ensure the Executive Director has followed up on audit findings and recommendations from the internal audit unit, external auditor, results of the Minister's supervision, and/or results of certain supervision by other authorities.

Pengungkapan Mengenai Board Charter
Pedoman tata kerja Dewan Direktur diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) Nomor 007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI yang merupakan pengkinian atas Board Manual yang ditetapkan sebelumnya yaitu PDD Nomor 0016/PDD/12/2010. Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur dimaksud meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, etika dan waktu kerja, rapat Dewan Direktur, sekretariat komite-komite dan staf ahli Dewan Direktur, hubungan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana serta tata kerja Direktur Eksekutif.

Disclosure of Board Charter
The Board of Directors Charter is regulated in the Board of Directors Regulation (PDD) No. 007/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank Board of Directors Work Procedure Guidelines which is an update on the previously established Board Manual, PDD No. 0016/PDD/12/2010. The Board of Directors Charter include duties, authorities and responsibilities, rights and obligations, ethics and working hours, meetings of the Board of Directors, secretariat of the committees and expert staff of the Board of Directors, the relationship between the Board of Directors and the Executive Director and the Managing Directors as well as the work ethics of the Directors.

Independensi Dewan Direktur
PMK Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI mengatur bahwa Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Anggota Dewan Direktur wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Direktur lain. Sebagai implementasi penerapan hal-hal tersebut, anggota Dewan Direktur LPEI telah menandatangani surat pernyataan independensi dan pakta integritas yang didokumentasikan dengan baik oleh LPEI.

Board of Directors Independence
PMK No. 141/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles stipulates that the Board of Directors is obliged to carry out its duties and responsibilities independently. Members of the Board of Directors must disclose their share ownership in other companies, both domiciled at home and abroad, as well as financial relationships and family relationships of other members of the Board of Directors. As the implementation of these matters, members of the Company's Board of Directors have signed a statement of independence and an integrity pact which is well documented by the Company.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Direktur

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur telah membentuk komite-komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite dan Nominasi dan Remunerasi.

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite juga wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Indikator yang digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja komite-komite meliputi kontribusi komite serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Direktur. Berikut adalah penilaian seluruh komite pada tahun 2020.

Performance Assessment of The Board of Directors' Committees
In assisting effectiveness of its duties and responsibilities, the Board of Directors has established the committees, which are the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of committee members is carried out by the Executive Director following the decision of the Board of Directors' meeting. The Board of Directors shall ensure effective implementation of duties by the appointed committees. The committees shall also develop the committee charter.

The performance assessment to the committees is carried out by using indicators of contributions to the Board of Directors as well as the implementation of assigned duties. The following is the assessment of all committees in 2020.

Komite Audit
Komite Audit telah melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan kolaborasi dalam menanggapi tindak lanjut temuan auditor eksternal. Selain itu, Komite Audit

Audit Committee
The Audit Committee has supervised, consulted, and collaborated in responding to the follow-up to the external auditors' findings. In addition, the Audit Committee

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

telah menfasilitasi peningkatan kapabilitas dan kapasitas fungsi Internal audit dan meningkatkan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Rapat Komite Audit telah terlaksana sebanyak 41 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap fungsi manajemen risiko untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dan pengendalian risiko yang memadai. Memantau kecukupan kebijakan dan prosedur, terutama terhadap 2 risiko utama yakni risiko pembiayaan dan operasional, seperti monitoring proses kredit, risiko integritas data serta optimalisasi alokasi resources. Rapat Komite Pemantau Risiko telah terlaksana 29 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi aktif mendukung penguatan organisasi termasuk di dalamnya perbaikan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah terlaksana 7 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Program Pengenalan Dewan Direktur Baru

Dewan Direktur yang baru bergabung pada periode tahun berjalan telah dikenalkan kepada jajaran Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada Rapat Dewan Direktur. Kepada seluruh jajaran pegawai LPEI, Dewan Direktur baru telah dikenalkan melalui penyelenggaraan *town hall meeting* tanggal 30 Desember 2020.

Program Pengembangan Dewan Direktur

Rincian tentang program pengembangan Dewan Direktur disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

LPEI merupakan lembaga keuangan khusus (*sui generis*) yang didirikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI. UU LPEI tidak menggunakan terminologi komisaris independen. Anggota Dewan Direktur LPEI berasal dari unsur pejabat dari instansi atau lembaga dan unsur dari dalam atau dari luar LPEI.

has facilitated increased capability and capacity of the Internal audit function and increased cooperation with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The Audit Committee meetings have been held 41 times with an attendance rate of 100%.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee carried out oversight on risk management function to ensure the implementation of good governance and adequate risk control. Monitors the adequacy of policies and procedures, particularly on 2 main risks namely financing and operational risks, such as monitoring loan process, data integrity risk, including optimization of resources allocation. The Risk Monitoring Committee has held 29 meetings with 100% attendance level.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee actively supports the organizational strengthening, including improvements to Human Resources (HR) policies. The Remuneration and Nomination Committee Meetings have been held 7 times with an attendance rate of 100%.

New Board of Directors Introduction Program

The new Board of Directors joining in the current year has been introduced to the Board of Directors and Managing Directors at the Board of Directors Meeting. To all Indonesia Eximbank employees, new Board of Directors has been introduced through the town hall meeting on 30 December 2020.

Board of Directors Development Program

Details of the Board of Directors' development program are presented in the Company Profile section in this Annual Report.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesia Eximbank is a special financial institution (*sui generis*) which was established based on Law No. 2 of 2009 which stipulates that the Board of Directors is the sole organ of the Company. The Law does not use the term independent commissioner. Members of the Company's Board of Directors come from elements of officials from agencies or institutions and elements from internal and external of the Company.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Syarat minimal untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur LPEI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2009 yaitu:

1. Warga negara Indonesia;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
5. Tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
6. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
7. Memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
8. Tidak pernah dinyatakan pailit.

The following are minimum requirements to be appointed as the Company's Board of Directors as stipulated in Law No. 2 of 2009:

1. Indonesian citizen;
2. Able to carry out legal actions;
3. Physically and mentally healthy;
4. Has integrity, leadership, good behavior, and high dedication;
5. Not included in the list of failures, either compiled by the banking authority or the capital market authority and financial institutions;
6. Never committed a criminal act in the banking and economic sector;
7. Having expertise and experience in one of the fields that fall within the scope of the Company's activities; and
8. Have never been declared bankrupt.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU No. 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam, maupun di luar pengadilan.

Dasar Hukum

Pembentukan Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana LPEI berdasarkan pada sejumlah regulasi, yaitu:

Peraturan Internal

a. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana.

Peraturan Eksternal

a. Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
c. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana

Berikut komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana per 31 Desember 2020:

Pursuant to Law No. 2 of 2009 on the Indonesian Export Financing Institution, the Executive Director shall carry out Indonesia Eximbank's operational activity. In implementing its duties, the Executive Director is assisted by Managing Director.

Referring to Article 25 paragraph (5) of Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank Executive Director is one of members of the Board of Directors determined by the Minister of Finance as Chairman of the Board of Directors concurrently as the Executive Director. Furthermore, in Article 29 paragraph (1) and Article 30 paragraph (1), the Executive Director carries out operational activities and represents Indonesia Eximbank both inside and outside the court.

Legal References

The establishment of Indonesia Eximbank's Executive Director - Managing Directors refers to:

Internal Regulations

a. Board of Directors Regulation (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 concerning Indonesia Eximbank Board of Directors Charter.
b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning Managing Director Charter.

External Regulations

a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Export Financing Institution.
b. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 on Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
c. Finance Ministry of RI Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Governance Principle of Indonesia Eximbank.
d. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 regarding Development and Supervision of Indonesia Eximbank.

Executive Directors – Managing Directors Composition

The following are the composition of Executive Directors - Managing Directors as of 31 December 2020:

Periode Januari – Desember 2020
January – December 2020 Period

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
D. James Rompas	Direktur Eksekutif | Executive Director	KMK No. 933/KMK.06/2019
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana I | Managing Director I	KDD No. 0010/KDD/08/2019
Djoko Retnadi	Direktur Pelaksana II | Managing Director II	KDD No. 0011/KDD/08/2019
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana III | Managing Director III	KDD No. 0012/KDD/08/2019
Henry Sihotang	Direktur Pelaksana IV | Managing Director IV	KDD No. 0013/KDD/08/2019
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana V | Managing Director V	KDD No. 0014/KDD/08/2019

Tugas dan Tanggung Jawab

Direktur Eksekutif

Tugas Direktur Eksekutif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang meliputi:

- Melakukan kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU No. 2/2009.
- Melaksanakan kepengurusan Lembaga.
- Melaksanakan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam PMK.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengasawan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

Direktur Pelaksana

Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi. Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0002/PDD/09/2015 tentang Kebijakan Struktur Organisasi yaitu:

- Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU No. 2/2009.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan Lembaga.

Duties and Responsibilities

Executive Director

The duties of the Executive Director are stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning the Principles for the Management of Indonesian Export Financing Institutions, as follows:

- Conducting the operational activities of the Institution based on the Law No. 2/2009.
- Implementing the institutional management.
- Implementing GCG in all of the Institution's business activity in all organization levels or lines.
- Establishing the committee as stated in the PMK.
- Following up the audit findings and recommendation from the Internal Audit Unit, External Auditors, and/or the Minister of Finance oversight and/or certain supervision assessment from other authorities.
- Developing the work guidelines and procedures that are binding to the Executive Director and Managing Directors.

Managing Director

The Managing Director is responsible to the Executive Director for the implementation of the supervised field. The duties of the Managing Director as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0002/PDD/09/2015 on Policy of Organizational Structure, namely:

- Assisting the Executive Director in the operational activities of the Institution in accordance with Law No. 2/2009.
- Assist the Executive Director in the management of the Institution.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

- Membantu Direktur Eksekutif dalam implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

- Assist the Executive Director in the implementation of GCG in each institution's business activities at all levels of the organization.
- Assist the Executive Director in following up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, external audit, and/or the results of supervision of the Minister of Finance.
- Assist the Executive Director in drafting work guidelines and procedures that are binding for the Executive Director and Managing Director.

Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Pembidangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilakukan berdasarkan MPO.0038/CEO/08/2020 Perihal Penyempurnaan Keenam PDE No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI dengan rincian sebagai berikut:

Segregation of Duties of Executive Directors and Managing Directors

Segregation of duties of Executive Director and Managing Directors is referred to MPO.0038/CEO/08/2020 Regarding the Refinement of Six PDE No. 0065/PDE/11/2019 on Indonesia Eximbank Organizational Guidelines and Procedures, as the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah Direktur Pelaksana I-V dan SEVP IV - V. • Membidangi seluruh Komite di bawah Direktur Eksekutif • Membidangi seluruh komite di bawah Dewan Direktur • Membidangi Unit Kerja Sekretariat Dewan Direktur • Membidangi Unit Kerja Dewan Pengawas Syariah	• In charge of all units under the Managing Director I-V and SEVP IV-V. • In charge of all Committees under the Executive Director • In charge of all committees under the Board of Directors • In charge of the Board of Directors Secretariat Unit • In charge of the Sharia Supervisory Board Unit
	Senior Executive Vice President IV (SEVP IV)	• Membidangi Unit Kerja Kepatuhan • Membidangi Unit Kerja Transformation Office • Membidangi Unit Kerja Human Resources Business Partner & Recruitment • Membidangi Unit Kerja Organization & People Development • Membidangi Unit Kerja Human Resources Service	• In charge of the Compliance Unit • In charge of the Transformation Office Unit • In charge of the Human Resources Business Partner & Recruitment Unit • In charge of the Organization & People Development Unit • In charge of the Human Resources Service Unit
	Senior Executive Vice President V (SEVP V)	• Membidangi Unit Kerja Reguler Audit & Methodology • Membidangi Unit Kerja Special Audit	• In charge of the Reguler Audit & Methodology Unit • In charge of the Special Audit Unit
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana I Managing Director I	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP I • Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi I • Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi II • Membidangi Unit Kerja Bisnis BUMN • Membidangi Unit Kerja Trade Finance • Membidangi Tim Leader Corporate Desk Surabaya	• In charge of all units under the SEVP I • In charge of Business Corporation Unit I • In charge of Business Corporation Unit II • In charge of State Owned Enteprises Business Unit • In charge of the Trade Finance Unit • In charge of the Tim Leader Corporate Desk Surabaya
	Senior Executive Vice President I (SEVP I)	• Membidangi Unit Kerja Penjaminan dan Asuransi • Membidangi Unit Kerja Pembiayaan Khusus	• In charge of the Guarantee and Insurance Unit • In charge of National Interest Account and Business Development Unit

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
Djoko Retnadi	Direktur Pelaksana II Managing Director II	• Membidangi Unit Kerja Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK) • Membidangi Unit Kerja Bisnis Syariah • Membidangi Unit Kerja Jasa Konsultasi • Membidangi Kantor Wilayah Jakarta • Membidangi Kantor Wilayah Surabaya • Membidangi Kantor Cabang Medan • Membidangi Kantor Cabang Surakarta • Membidangi Kantor Cabang Makassar	• In charge of Small, Medium Enterprise and Commercial Business Units (SMEC) • In charge of the Sharia Business Unit • In charge of the Advisory Services Unit • In charge of Jakarta Regional Office • In charge of Surabaya Regional Office • In charge of Medan Branch Office • In charge of Surakarta Branch Office • In charge of Makassar Branch Office
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana III dan Corporate Secretary Managing Director III and Corporate Secretary	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP III • Membidangi Unit Kerja IEB Institute • Membidangi Unit Kerja Communication & Stakeholder Engagement • Membidangi Unit Kerja Office of The Board	• In charge of all units under the SEVP III • In charge of the IEB Institute Unit • In charge of the Communication & Stakeholder Engagement Unit • In charge of the Office of The Board Unit
	Senior Executive Vice President III (SEVP III)	• Membidangi Unit Kerja Finance • Membidangi Unit Kerja Strategic & Corporate Planning • Membidangi Unit Kerja Strategic Initiative Management Office • Membidangi Unit Kerja Financial Institution & Treasury • Membidangi Unit Kerja Middle Office Treasury	• In charge of the Finance Unit • In charge of the Strategic & Corporate Planning Unit • In charge of the Strategic Initiative Management Office Unit • In charge of Financial Institution & Treasury Unit • In charge of the Middle Office Treasury Unit
Henry Sihotang	Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP VI • Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset I • Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset II • Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset III • Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset IV • Membidangi Unit Kerja Retrukturisasi Aset Syariah • Membidangi Unit Kerja Litigasi	• In charge of all units under the SEVP VI • In charge of the Asset Restructuring Unit I • In charge of the Asset Restructuring Unit II • In charge of the Asset Restructuring Unit III • In charge of the Asset Restructuring Unit IV • In charge of the Sharia Asset Restructuring Unit • In charge of the Litigation Unit
	Senior Executive Vice President VI (SEVP VI)	• Membidangi Unit Kerja Credit Reviewer I • Membidangi Unit Kerja Credit Reviewer II • Membidangi Unit Kerja Product Development & Portofolio Management	• In charge of the Credit Reviewer Unit I • In charge of the Credit Reviewer Unit II • In charge of the Product Development & Portofolio Management
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana V Managing Director V	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP II • Membidangi Unit Kerja Manajemen Risiko • Membidangi Unit Kerja Hukum dan Litigasi • Membidangi Unit Kerja Credit Operation and Supervision	• In charge of all units under the SEVP II • In charge of the Risk Management Unit • In charge of the Legal Unit • In charge of the Credit Operation and Supervision Unit
-	Senior Executive Vice President II (SEVP II)	• Membidangi Unit Kerja Teknologi Sistem Informasi • Membidangi Unit Kerja Operasional • Membidangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum	• In charge of the Information System Technology Unit • In charge of the Operational Unit - In charge of the Gebneral & Procurement Unit

Board Charter

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjabarkan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan.

Board Charter

In performing its duties, the Chairman of Board of Directors, concurrently serves as Executive Director, has the charter as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/12/2020 regarding Board of Directors Charter. The Board Charter elaborates the duties, authorities, obligations, responsibilities, work divisions, work hours, work ethics, meeting procedures, and duties implementation related with the Ratification Meeting.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direktur Eksekutif

Pada tahun 2020, secara umum kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif telah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Komite-komite dimaksud adalah:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan Bisnis
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor
5. Komite Pengembangan Produk
6. Komite Assets & Liabilities Management
7. Komite Personalia
8. Komite Teknologi Sistem Informasi

Berikut ini penilaian dari pelaksanaan tugas komite-komite pada tahun 2020:

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya. Selain itu, Komite juga memberikan rekomendasi atas perbaikan Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, dan penetapan terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum cukup diatur dalam prosedur.

Komite Kebijakan Bisnis

Komite Kebijakan Bisnis telah memberikan rekomendasi dan pengawasan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI, Komite juga memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal pembiayaan, penjaminan, dan asuransi termasuk kegiatan tresuri yang mengandung risiko tinggi, serta memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio kegiatan usaha LPEI.

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan telah memberikan Keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi, serta Credit Line termasuk *Country Limit* dan penempatan dana Tresuri. Komite Pembiayaan juga telah mengambil

Performance Assessment of the Committees Under Executive Director

In 2020, the performance of the committees under the Executive Director in general has met the assigned duties and responsibilities. The committees are:

1. Risk Management Committee
2. Financing Guarantee and Insurance Policy Committee
3. Financing Committee
4. National Interest Account Financing Committee
5. Product Development Committee
6. Assets & Liabilities Committee
7. Personnel Committee
8. Information Technology System Committee

The following are the assessment and implementation of duties during 2020:

Risk Management Committee

The Risk Management Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the policies, strategies, and risk management guidelines as well as its changes. In addition, the Committee also provided recommendations on improvement or refinement of risk management periodically based on the implementation of evaluation, and stipulation on matters related to business decisions that are not yet sufficiently regulated within the procedures.

Business Policy Committee

The Business Policy Committee has provided the recommendations and oversight to the Executive Director on the preparation or refinement of policies and stipulations in the Company's business activities, the Committee has also provided consideration to the Financing Committee related to financing, guarantee and insurance proposals including treasury activities with high risk, as well as monitoring and evaluating the Company's business portfolio development.

Financing Committee

The Financing Committee has provided the Decisions on Financing, Guarantee, and Insurance proposals, as well as Credit Line including the Country Limit and placement of treasury funds. The Committee has also provided the

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah, dan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif sesuai dengan limit masing-masing komite pembiayaan.

Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor

Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor telah memberikan keputusan terkait dengan Penugasan Khusus Ekspor yang diajukan oleh calon nasabah.

Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal pengembangan dan penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan di LPEI serta pengembangan dan penyempurnaan atas manual produk, Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan lain terkait produk dan aktivitas/kegiatan di LPEI.

Komite Assets & Liabilities Management

Komite Assets & Liabilities telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan risiko, penetapan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan asset dan liabilities dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Komite Personalia

Komite Personalia telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia dan pengembangan nilai-nilai lembaga (corporate values).

Komite Teknologi Sistem Informasi

Komite Teknologi Sistem Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang, rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi, dan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.

Program Pengenalan Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana Baru

Melalui *town hall* yang dilaksanakan di kantor pusat LPEI pada tanggal 2 Januari 2020.

decisions on the non-performing financing handling proposal, and decision on the stipulation of earnings assets quality level in accordance with the threshold of each financing committee.

National Interest Account Financing Committee

The National Interest Account Management Committee has provided decisions related to financing under the National Interest Account submitted by prospective customers.

Product Development Committee

The Product Development Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the Company's product development and refinement and activities, as well as product manual development and refinement, Standard Operating Procedures (SOP) and other rules related to the Company's product and activities.

Assets & Liabilities Committee

The Assets & Liabilities Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the risk management policy stipulation, policy stipulation, assets and liabilities thresholds and management strategy guidelines, by taking into account the external and internal conditions.

Personnel Committee

The Personnel Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the direction, changes, and refinement of personnel policies, and corporate values development.

Information Technology System Committee

The Information Technology System Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the medium- and long-term information technology system development policies, information technology system investment plans, and oversight and evaluation on the applied information technology system development and implementation.

Introduction Program for New Executive Director & Managing Director

Through the town hall, which was held at the Indonesia Eximbank Head Office on January 2, 2020.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

Program Pengembangan Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Rincian tentang program pengembangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana disampaikan pada bab "Analisa dan Pembahasan Manajemen" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Executive Director & Managing Director Development Program

Details of the Executive Director and Managing Director development program are presented in the Company Profile section in this Annual Report.

Pernyataan Independensi

Dalam rangka transparansi, Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menyatakan independensinya pada saat pengangkatan melalui surat pernyataan sebagai berikut:

Statement of Independence

On the transparency, members of the Executive Director and Managing Directors have declared their independency during the appointment through the following statements:

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

Frekuensi rapat Dewan Direktur LPEI diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.010/2009. Rapat Dewan Direktur wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi yang baik, semua hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasannya.

Rapat Dewan Direktur

Dewan Direktur bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan serta melakukan pengawasan terhadap operasional LPEI. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Direktur yang diwajibkan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat Dewan Direktur menjadi wadah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis manajemen di LPEI sekaligus memastikan ditindaklanjutinya hasil temuan audit.

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan melibatkan Anggota Dewan Direktur lainnya. Selain itu juga dilakukan rapat gabungan antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

Pada tahun 2020 Dewan Direktur telah mengadakan 37 kali rapat dengan frekuensi tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

The frequency of Indonesia Eximbank's Board of Directors' meeting is stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 Article 11. The Board of Directors' meeting shall be carried out periodically at least once a month and shall be physically attended by all members of the Board of Directors at least 4 (four) times in a year. Chairman of the Board of Directors leads the Meeting.

Decision making in the Board of Directors' meeting is carried out based on deliberation and consensus. If an agreement is not achieved, the decision can be taken through voting. All decisions of the Board of Directors are binding for all members of the Board of Directors.

To maintain orderly administration and good documentation, all meeting resolutions then shall be recorded in the meeting minutes, including dissenting opinions with its reasons.

Meeting of the Board of Directors

The Board of Directors is responsible for formulating, stipulating and supervising the Company operations. One form of supervision is carried out through the holding of a Board of Directors meeting which is required to be held at least once a month. The Board of Directors meeting serves as a forum for monitoring and evaluating strategic management policies in the Company as well as ensuring that audit findings are followed up.

The Board of Directors Meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors concurrently the Executive Director and invites other Board Members. In addition, a joint meeting shall also be held between the Board of Directors and the Managing Director.

In 2020 the Board of Directors has held 37 meetings with the following frequency attendance rate and agenda:

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

Kehadiran Rapat Dewan Direktur
Board of Directors' Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Jumlah Total	Persentase Percentage
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive DIrector	37	37	100%
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	32	37	86%
Kasan*	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	17	17	100%
Arus Gunawan*	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	2	2	100%
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	36	37	97%
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	36	37	97%
Arlinda*	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	18	20	90%
Arif Budimanta*	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	1	1	100%

* Kasan menjabat sejak 8 Juni 2020 | Kasan serves since 8 June 2020
* Arus Gunawan menjabat sejak 25 November 2020 | Arus Gunawan serves since 25 November 2020
* Arlinda menjabat hingga 7 Juni 2020 | Arlinda serves since 7 June 2020
* Arif Budimanta menjabat hingga 8 Januari 2020 | Arif Budimanta serves since 8 January 2020

Agenda Rapat Dewan Direktur Tahun 2020
Board of Directors' 2020 Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1.	6 Jan 2020 Jan 6, 2020	1. Tindak Lanjut Prognosa Keuangan 31 Desember 2019 dan RKAT 2020 serta RJP 2020-2024 2. Progress Audit BPK 1. Follow-up on December 31, 2019 Financial Prognosis and RKAT 2020 as well as RJP 2020-2024 2. BPK Audit Progress	1. D. James Rompas 2. Arlinda 3. Arif Budimanta 4. Rijani Tirtoso 5. Dikdik Yustandi 6. Djoko Retnadi 7. Agus Windiarto 8. Henry Sihotang 9. Chesna F. Anwar 10. Yadi J. Ruchandi 11. M. Guntur
2.	14 Jan 2020 Jan 14, 2020	1. Update pra RUPS dengan DJKN mengenai rancangan RKAT 2020 dan RJP 2020-2024 2. Update Hasil Pertemuan dengan OJK 3. Update Progress Audit 4. Komite – Komite Dewan Direktur 1. Pre-GMS update with DJKN regarding the 2020 RKAT and RJP 2020-2024 drafts 2. Update on the results of the meeting with the OJK 3. Audit Progress Update 4. Committees of the Board of Directors	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F. Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
3.	21 Jan 2020 Jan 21, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur 14 Januari 2020 2. Update dari Direktur Eksekutif 3. Update Progress Audit EY 4. Update Pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK (17 Januari 2020) 5. Update Rapat PMN (20 Januari 2020) 6. Penyampaian Draft Laporan Monitoring Pembiayaan Bermasalah Triwulan IV 2019 7. Komite-Komite Dewan Direktur 1. Ratification of the Minutes of Meeting and Follow-up to the Meeting of the Board of Directors on January 14, 2020 2. Update from the Executive Director 3. EY Audit Progress Update 4. Update on Meeting with the Chief Executive of the IKNB OJK Supervisor (January 17, 2020) 5. Update on the Committee Meeting of the DPR Commission XI regarding PMN (January 20, 2020) 6. Submission of the Non-Performing Financing Monitoring Report Draft for Quarter IV 2019 7. Board of Directors Committees	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Chesna F Anwar
4.	28 Jan 2020 Jan 28, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur 21 Januari 2020 2. Update dari Direktur Eksekutif 3. Penyampaian Draft Laporan Monitoring Pembiayaan Triwulan IV 2019 4. Persiapan Pengesahan RKAT 2020 dengan Kementerian Keuangan 5. Pemaparan Advisor Komunikasi 6. Pemaparan Advisor Komunikasi 7. Pembahasan Advisor Transformasi LPEI 8. Penetapan Anggota Komite-Komite Dewan Direktur 9. Penetapan Sekretaris dan Staf Ahli Dewan Direktur 1. Ratification of the Minutes of Meeting and Follow-up to the Meeting of the Board of Directors on January 21, 2020 2. Update from the Executive Director 3. Submission of the Financing Monitoring Report Draft for the 4th Quarter of 2019 4. Preparation for RKAT 2020 Ratification with the Ministry of Finance 5. Presentation of the Communication Advisor (BYOND) 6. Presentation of the Communication Advisor (Irakusno Communication) 7. Discussion on the LPEI Transformation Advisor 8. Determination of the Members of the Board of Directors' Committees 9. Appointment of the Secretary and Expert Staff of the Board of Directors	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso 5. Nufransa Wira Sakti 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Henry Sihotang
5.	30 Jan 2020 Jan 30, 2020	1. Pembahasan Advisor Komunikasi 2. Penetapan Sekretaris dan Staf Ahli Dewan Direktur 3. Penatapan Anggota Komite - komite Dewan Direktur 4. Pembahasan Advisor Transformasi LPEI 1. Discussion of the Communication Advisor 2. Appointment of the Secretary and Expert Staff of the Board of Directors 3. Appointment of the members of the Board of Directors' committees 4. Discussion on the LPEI Transformation Advisor	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso 5. Fajar Hasri Ramadhana 6. Chesna F. Anwar 7. Yadi J. Ruchandi
6.	4 Feb 2020 Feb 4, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur 28 & 30 Januari 2020 2. Update Progress Laporan Keuangan 3. Pemaparan Kajian PMN 2021 4. Project Manajemen Execution Progress 1. Ratification of the Minutes of Meeting and Follow-up to the Board of Directors Meeting on January 28 & 30, 2020 2. Update on Financial Report Progress by Ernst & Young (EY) 3. Presentation of the 2021 PMN Study 4. Project Management Execution Progress	1. D. James Rompas 2. Arlinda 3. Felia Salim 4. Dikdik Yustandi 5. Djoko Retnadi 6. Agus Windiarto 7. Henry Sihotang 8. Chesna F. Anwar 9. Yadi J. Ruchandi 10. M. Guntur
7.	10 Feb 2020 Feb 10, 2020	Penetapan Susunan Keanggotaan Komite- Komite Dewan Direktur Determination of Board of Directors' Committees Membership Composition	1. D. James Rompas 2. Arlinda 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
8.	21 Feb 2020 Feb 21, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur 04 Februari 2020 2. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan 2019 (audited), Publikasi dan Strategi Komunikasi 3. Kinerja Keuangan per 31 Januari 2020 4. Persetujuan RPMK Pembinaan dan Pengawasan 5. Persetujuan Penerapan PSAK 71 dan Kesiapan LPEI 6. Persetujuan Penerbitan Obligasi PUB V Tahap I Tahun 2020 (IDR & USD) 7. Penetapan Susunan Komite-Komite Dewan Direktur 8. Agenda Lain-lain: a. Pembahasan Ringkasan Kajian atas 2 Konsultan Transformasi LPE b. Implementasi APU PPT di LPEI Periode Triwulan IV Tahun 2019 1. Ratification of the Minutes of Meeting and Follow-up to the Meeting of the Board of Directors on February 04, 2020 2. Approval for the Issuance of 2019 Financial Statements (audited), Publications and Communication Strategies 3. Financial Performance as of January 31, 2020 4. Approval of RPMK for Guidance and Supervision 5. Approval of PSAK 71 Implementation and LPEI Readiness 6. Approval of the 2020 Phase I PUB Bond Issuance (IDR & USD) 7. Determination of the Composition of the Committees of the Board of Directors 8. Other Agenda: a. Discussion Summary of the Study on 2 LPE Transformation Consultants b. b. Implementation of APU PPT at LPEI for the fourth quarter of 2019	1. D. James Rompas 2. Arlinda 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso 5. Fajar Hasri Ramadhana 6. Agus Windiarto 7. Chesna F. Anwar 8. Yadi J. Ruchandi 9. Konsultan Ernst & Young
9.	6 Mar 2020 Mar 6, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur 21 Februari 2020 2. Persetujuan Kinerja Keuangan periode Februari 2020 3. Draft Laporan Pembiayaan bulan Januari 2020 4. Pemaparan RSM 5. Pemaparan Kajian 2 Konsultan Transformasi LPEI 6. Pemaparan Principle Based RPMK Pembinaan dan Pengawasan 7. Agenda Lain-lain: – Timeline Laporan Pengawasan Dewan Direktur Semester II Tahun 2019 – Update Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Ratification of the Minutes of Meeting and Follow-up to the Meeting of the Board of Director on February 21, 2020 2. Approval of Financial Performance for the period of February 2020 3. Financing Report Draft for January 2020 4. RSM exposure 5. Presentation of Study 2 of LPEI Transformation Consultants 6. Explanation of Principle Based RPMK for Guidance and Supervision 7. Other Agenda: – Timeline of the 2019 Semester II Board of Directors' Supervisory Report – Remuneration and Nomination Committee Update	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Nufransa Wira Sakti 7. Agus Windiarto 8. Djoko Retnadi 9. Henry Sihotang 10. Chesna F. Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Wahyu P. Wibowo 14. Titiek Setiyowati 15. Konsultan RSM
10.	9 Mar 2020 Mar 9, 2020	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI ("RPMK Binwas") Draft Discussion on the Regulation of the Minister of Finance on Guidance and Supervision of the LPEI ("RPMK Binwas")	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Yadi J. Ruchandi 13. M. Guntur 14. Wahyu P. Wibowo 15. Titiek Setiyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
11.	20 Mar 2020 Mar 20, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) 06 dan 09 Maret 2020 2. Langkah-langkah LPEI dalam menghadapi kondisi ketidakpastian pasar: a. Likuiditas (terkait sindikasi) b. Kualitas Aset c. Stress Testing d. Kepegawaian 3. Kinerja dan Prognosa Direktorat IV Q1 Tahun 2020 dan Draft Pembiayaan Bermasalah Bulan Februari 2020 4. Penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Direktur Semester II Tahun 2019 1. Ratification of the Minutes of Meeting and Follow-up of the Meeting of the Board of Directors (RDD) on March 06 and 09, 2020 2. LPEI steps in dealing with market uncertainty: a. Liquidity (related to syndication) b. Asset Quality c. Stress Testing d. Staffing 3. Performance and Prognosis of Directorate IV Q1 Year 2020 and Draft of Non-Performing Financing in February 2020 4. Submission of the 2019 Semester II Board of Directors' Supervisory Report	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Nufransa Wira Sakti 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Yadi J. Ruchandi 13. Wahyu P. Wibowo 14. Ricky Dompas 15. Yulida S. Marbun 16. Rubi Pertama
12.	3 Apr 2020 Apr 3, 2020	1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2019 2. Perkembangan Kondisi Likuiditas 3. Update pengelolaan media sosial LPEI 1. Follow-up to the 2019 Audit Result Report) 2. Development of Liquidity Conditions 3. Update LPEI Social Media Management	1. D. James Rompas 2. Arlinda 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso 5. Agus Windiarto 6. Chesna F. Anwar 7. Ricky Dompas 8. Yulida S. Marbun 9. Rubi Pertama
13.	8 Apr 2020 Apr 8, 2020	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2019 Follow-up to the 2019 Audit Result Report	1. Isa Rachmatarwata 2. Meirijal Nur 3. D. James Rompas 4. Suminto 5. Arlinda 6. Felia Salim 7. Rijani Tirtoso 8. Henry Sihotang 9. Chesna F. Anwar
14.	9 Apr 2020 Apr 9, 2020	1. Ratifikasi Risalah dan Tindak Lanjut RDD 20 Maret dan 3 April 2020 2. Update Gugus Tugas COVID-19 LPEI 3. Kinerja Keuangan per 31 Maret 2020 dan Kondisi Likuiditas LPEI 4. Pemaparan 1st Draft Materi Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi XI 5. Tindak Lanjut Strategi Komunikasi 1. Ratification of the Minutes and Follow-up of RDD on March 20 and April 3, 2020 2. Update the LPEI COVID-19 Task Force 3. Financial Performance as of March 31, 2020 and Liquidity Conditions of the LPEI 4. Presentation of the 1st Draft Material of the DPR Commission XI Hearing Meeting (RDP) 5. Follow-up Communication Strategy	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F Anwar 12. Yadi J. Ruchandi 13. M .Guntur 14. Wahyu P. Wibowo 15. Titiek Setiyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
15.	16 Apr 2020 Apr 16, 2020	Pembahasan Evaluasi Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI serta tindak lanjutnya Evaluation of the Results of the DPR RI Commission XI Hearing Meeting (RDP) and its follow-ups	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Wahyu P. Wibowo 14. Titiek Setiyowati
16.	24 Apr 2020 Apr 24, 2020	1. Ratifikasi Risalah dan Tindak Lanjut RDD tanggal 09 dan tanggal 16 April 2020 2. Update DE 3. Draft Laporan Monitoring Pembiayaan Triwulan I Th 2020 4. Laporan Terkini mengenai LPEI dan Stress Testing terhadap Asset dan Likuiditas 5. Pembahasan Dewan Pengawas Syariah 1. Ratification of the Minutes and Follow-up of RDD on April 09 and 16, 2020 2. DE Update 3. Draft of the Monitoring Report for Financing for the First Quarter of 2020 4. Latest Report on LPEI and Stress Testing on Asset and Liquidity 5. Discussion on the Sharia Supervisory Board	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Nufransa Wira Sakti 7. Fajar Hasri R. 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Chesna F. Anwar
17.	8 Mei 2020 May 08, 2020	1. Ratifikasi Risalah dan Tindak Lanjut RDD tanggal 24 April 2020 2. Kinerja Keuangan per 30 April 2020 3. Proyeksi Kinerja Keuangan LPEI sebagai dampak pandemi Covid-19 4. RPDD Kebijakan Pembiayaan 5. ITSP Data Manajemen 6. Perpanjangan Anggota KA dan KPR 1. Ratification of the Minutes and Follow-up of the RDD on April 24, 2020 2. Financial Performance as of April 30, 2020 3. Financial Performance Projection of Indonesia Eximbank as impacted by the Covid-19 pandemic 4. RPDD Financing Policy 5. ITSP Management Data 6. Extension of KA and KPR members	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Nufransa Wira Sakti 7. Fajar Hasri R. 8. Dikdik Yustandi 9. Djoko Retnadi 10. Agus Windiarto 11. Henry Sihotang 12. Chesna F Anwar 13. Yadi J. Ruchandi 14. M. Guntur 15. Wahyu P. Wibowo 16. Restiana Ie Tjoe L. 17. Titiek Setiyowati
18.	11 Mei 2020 May 11, 2020	Pembahasan mengenai inisiatif LPEI dalam pertumbuhan ekonomi akibat Covid 19 Discussion of LPEI initiative in economic growth due to Covid 19	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F. Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Wahyu P. Wibowo 14. Restiana Ie Tjoe L. 15. Titiek Setiyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
19.	20 Mei 2020 May 20, 2020	1. Ratifikasi risalah dan tindak lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) tanggal 8 dan 11 Mei 2020 2. Laporan ketentuan dalam Memorandum Prosedur (MPO) COVID-19 3. Update Direktur Eksekutif 4. Laporan Komite-Komite di bawah Dewan Direktur 1. Ratification of the minutes and follow-up of the Board of Directors Meeting (RDD) on May 8 and 11, 2020 2. Report on the provisions in the COVID-19 Procedure Memorandum (MPO) 3. Executive Director Update 4. Reports of the Committees under the Board of Directors	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Agus Windiarto 7. Chesna F Anwar 8. Restiana Ie Tjoe L. 9. Yulida S Marbun 10. Rubi Pertama
20.	5 Jun 2020 Jun 5, 2020	1. Update Risk Profile Report 2. Laporan Keuangan posisi 31 Mei 2020 (unadjusted) dan Rencana Revisi RKAT 2020 3. Rancangan Peraturan Dewan Direktur tentang Program Kemitraan 4. Rancangan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Pembiayaan 5. Agenda Lain-lain: a. Perkembangan PMN 2020 b. Update Ketersediaan Credit Line c. Update Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Update the Risk Profile Report 2. Financial Statements for the position of May 31, 2020 (unadjusted) and the 2020 RKAT Revised Plan 3. Regulation Draft of the Board of Directors on the Partnership Program 4. Regulation Draft of the Board of Directors on Financing Policy 5. Other Agenda: a. PMN 2020 development b. Credit Line Availability Update c. Remuneration and Nomination Committee Update	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Yadi J. Ruchandi 7. M. Guntur 8. Anwar Harsono 9. Wahyu P. Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe L. 11. Titiek Setiyowati 12. Rubi Pertama
21.	19 Jun 2020 Jun 19, 2020	1. Ratifikasi risalah dan tindak lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) tanggal 20 Mei dan 5 Juni 2020 2. a. Perkembangan Kinerja LPEI s.d 31 Mei 2020 dan Usulan Perubahan RKAT 2020 b. Usulan Risk Appetite Statement 3. Update Peraturan Sosialisasi PMK Pembinaan dan Pengawasan dan Mapping dan action plan penyesuaian peraturan internal 4. Update Rencana kerja Internal Audit dan asistensi Inspektorat Jenderal 5. Agenda lain-lain: a. Program LPEI Peduli - Donasi Covid19 b. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Ratification of the minutes and follow-up of the Board of Directors Meeting (RDD) on May 20 and June 5, 2020 2. a. LPEI Performance Development until May 31, 2020 and Proposed Amendments to the 2020 RKA b. Proposed Risk Appetite Statement 3. Update on Regulation of PMK for Guidance and Supervision and Mapping and action plan for adjusting internal regulations 4. Update the work plan of the Internal Audit and the assistance of the Inspectorate General 5. Other agenda: a. LPEI Peduli Program - Covid Donation 19 b. Remuneration and Nomination Committee Membership	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P. Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati 17. Konsultan Olyver Wyman 18. Yulida S Marbun

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
22.	22 Jun 2020 Jun 22, 2020	Finalisasi usulan perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2020 Finalization of the proposed changes to the 2020 Annual Budget Work Plan	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati
23.	3 Jul 2020 Jul 3, 2020	1. Ratifikasi risalah dan tindak lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) tanggal 22 Juni 2020 2. Laporan Financial Highlights per 30 Juni 2020 3. Laporan Hasil Stress Testing 4. Laporan Tingkat Kesehatan 1. Ratification of the minutes and follow-up to the Board of Directors Meeting (RDD) on June 22, 2020 2. Financial Highlights report as of June 30, 2020 3. Stress Testing Results Report 4. Health Level Report	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P. Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati 17. Konsultan Olyver Wyman

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
24.	24 Jul 2020 Jul 24, 2020	1. Perkembangan Penanganan Karyawan Terdampak COVID-19 2. Ratifikasi risalah dan tindak lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) tanggal 3 Juli 2020 3. Laporan Komite-Komite Dewan Direktur: 4. Komite Audit (KAP, DMTL, GCG) 5. Join Committee Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 6. Komite Pemantau Risiko 7. Komite Remunerasi dan Nominasi 8. Laporan Manajemen: 9. Arahan Menteri Keuangan 10. Program-program Strategis: • Pemulihan Ekspor Nasional (PEN) Penjaminan Korporasi Padat Karya • Program Khusus Ekspor UKM • Program Khusus Ekspor BUMN 11. Informasi Revisi RKAT dan PSAK 71 12. Informasi Konsultan Komunikasi 1. Developments in the Management of Employees Affected by COVID-19 2. Ratification of the minutes and follow-up to the Board of Directors Meeting (RDD) on July 3, 2020 3. Report of the Committees of the Board of Directors: 4. Audit Committee (KAP, DMTL, GCG) 5. Join the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee 6. Risk Monitoring Committee 7. Remuneration and Nomination Committee 8. Management Report: 9. Director of the Minister of Finance 10. Strategic Programs: • National Export Recovery (PEN) Guarantee for labor-intensive corporations • SME Export Special Program • SOE Export Special Program 11. Revised Information on RKAT and PSAK 71 12. Information Communication Consultant	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F. Anwar 11. Yadi J. Ruchandi 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P. Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati 17. Anggota Komite Pemantau Risiko 18. Anggota Komite Audit
25.	7 Aug 2020 Aug 7, 2020	1. Ratifikasi risalah dan tindak lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) tanggal 24 Juli 2020 2. Laporan Kinerja Keuangan 3. Penyampaian kinerja laporan keuangan per 31 Juli 2020 4. Usulan Rencana Revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) serta Dampak PSAK 71 5. Usulan Pengadaan Jasa Audit Keuangan Tahun 2020 dan 2021 6. Laporan Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasiona 7. Usulan Rancangan Peraturan Dewan Direktur (PDD) tentang Implementasi PEN Penjaminan Korporasi Padat Karya 1. Ratification of the minutes and follow-up to the Board of Directors Meeting (RDD) on July 24, 2020 2. Financial Performance Report 3. Submission of financial report performance as of July 31, 2020 4. Proposed Annual Budget Work Plan Revision Plan (RKAT) and Impact of PSAK 71 5. Proposal for the Procurement of Financial Audit Services in 2020 and 2021 6. Progress report on Government Guarantee Program. 7. Proposed Draft Regulation of the Board of Directors (PDD) on the Implementation of Labor-Intensive Corporation Guarantee Pen	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Salomi Adriana 13. M. Guntur 14. Anwar Harsono 15. Wahyu P. Wibowo 16. Restiana Ie Tjoe L. 17. Titiek Setiyowati 18. Yulida S Marbun

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
26.	27 Aug 2020 Aug 27, 2020	Rapat Pengawasan Semester I tahun 2020 Supervision Meeting Semester I 2020	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Salomi Adriana 13. M. Guntur 14. Anwar Harsono 15. Wahyu P. Wibowo 16. Restiana Ie Tjoe L. 17. Titiek Setiyowati 18. Rubi Pertama 19. Yulida S. Marbun
27.	4 Sep 2020 Sep 4, 2020	1. Ratifikasi risalah dan tindak lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD) tanggal 27 Agustus 2020. 2. Kinerja Keuangan per 31 Agustus 2020 3. Arahan Dewan Direktur terhadap Laporan Manajemen Risiko bulan Juli dan Tingkat Kesehatan Triwulan II/2020 4. Agenda Lain-lain: a. Informasi Trade Expo b. Update Dashboard Management 1. Ratification of the minutes and follow-up to the Board of Directors Meeting (RDD) on August 27, 2020. 2. Financial Performance as of August 31, 2020 3. Direction of the Board of Directors on the Risk Management Report for July and Health Level for Quarter II / 2020 4. Other Agenda: a. Trade Expo Information b. Update Management Dashboard	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Salomi Adriana 13. M. Guntur 14. Anwar Harsono 15. Wahyu P. Wibowo 16. Restiana Ie Tjoe L. 17. Titiek Setiyowati
28.	18 Sep 2020 Sep 18, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 04 September 2020 2. Pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 3. Rencana Pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) 4. Laporan Pelaksanaan Program Penugasan Pemerintah 1. Ratification of Board of Directors Meeting on September 4, 2020 2. Submission of State Equity Participation (PMN) 2021 3. Plans for the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) 4. Report on the Implementation of Government Assignment Programs	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Salomi Adriana 13. M. Guntur 14. Anwar Harsono 15. Wahyu P. Wibowo 16. Restiana Ie Tjoe L. 17. Titiek Setiyowati 18. Yulida S. Marbun 19. Rubi Pertama

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
29.	7 Okt 2020 Oct 7, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 18 September 2020 2. Kinerja Keuangan per Triwulan III Tahun 2020 3. Summary Strategic Discussion Penyusunan RKAT 2021 4. Rancangan bahan pertemuan Rapimtas Menteri Keuangan 1. Ratification of the Board of Directors Meeting on September 18, 2020 2. Financial Performance as of the 3rd Quarter of 2020 3. Summary Strategic Discussion of the Preparation of the 2021 RKAT 4. The design of materials for the Minister of Finance Rapimtas meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Fajar Hasri Ramadhana 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Salomi Adriana 13. M. Guntur 14. Anwar Harsono 15. Wahyu P. Wibowo 16. Restiana Ie Tjoe L. 17. Titiek Setiyowati
30.	23 Okt 2020 Oct 23, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 07 Oktober 2020 2. Pemaparan DPS: Strategi Bisnis Syariah 3. Penyampaian Usulan IKU dan RKAT 2021 1. Ratification of the Board of Directors Meeting on October 07, 2020 2. DPS explanation: Sharia Business Strategy 3. Submission of the 2021 IKU and RKAT proposals	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Salomi Adriana 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P. Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati 17. Rubi Pertama 18. Yulida S. Marbun 19. Untung Dwiyono
31.	23 Okt 2020 Oct 23, 2020	Update informasi dan sharing ide untuk program tertentu Update information and share ideas for certain programs	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso
32.	28 Okt 2020 Oct 28, 2020	1. Pembahasan Usulan RKAT dan IKU 2021 2. Pembahasan Isu Strategis 1. Discussion on the Proposed RKAT and IKU 2021 2. Discussion on Strategic Issue	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Salomi Adriana 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
33.	6 Nov 2020 Nov 6, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 23 dan 28 Oktober 2020 2. Kinerja Keuangan per 31 Oktober 2020 3. Pengajuan Persetujuan Dewan Direktur 1. Ratification of Board of Directors Meeting on October 23 and 28, 2020 2. Financial Performance as of October 31, 2020 3. Proposal for Board's Approval	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F Anwar 11. Salomi Adriana 12. Anwar Harsono 13. Wahyu P. Wibowo 14. Restiana Ie Tjoe L. 15. Titiek Setiyowati
34.	11 Nov 2020 Nov 11, 2020	Pengajuan Persetujuan Dewan Direktur Proposal for Board's Approval	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Agus Windiarto 7. Henry Sihotang 8. Chesna F. Anwar 9. Wahyu P. Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe L.
35.	20 Nov 2020 Nov 20, 2020	1. Surat kepada Menteri 2. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 6 dan 11 November 2020 3. Kinerja Keuangan per 31 Oktober 4. Laporan Daftar Monitoring Tindak Lanjut 5. Usulan Pergantian Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 1. Letter to the Minister 2. Ratification of the Board of Directors Meeting on November 6 and 11, 2020 3. Financial Performance as of October 31 4. Follow-up Monitoring List Report 5. Proposal to Change the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI)	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Dikdik Yustandi 7. Djoko Retnadi 8. Agus Windiarto 9. Henry Sihotang 10. Chesna F. Anwar 11. Salomi Adriana 12. M. Guntur 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P. Wibowo 15. Restiana Ie Tjoe L. 16. Titiek Setiyowati
36.	10 Des 2020 Dec 10, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 20 November 2020 2. Kinerja Keuangan per 30 November 2020 3. Feasibility Study dan Kajian Hukum SPV 4. Update Account Productivity 5. Agenda Lain-lain; a. Laporan Portfolio Quality LPEI per 31 Oktober 2020 b. Update MIS Project c. Update Direktur Eksekutif 1. Ratification of Board of Directors Meeting on November 20, 2020 2. Financial Performance as of November 30, 2020 3. Feasibility Study and SPV Legal Studies 4. Update Account Productivity 5. Other Agenda; a. LPEI Portfolio Quality Report as of 31 October 2020 b. Update the MIS Project c. Executive Director Update	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Henry Sihotang 11. Chesna F. Anwar 12. Salomi Adriana 13. Anwar Harsono 14. Wahyu P. Wibowo 15. Agung Waluyo 16. Konsultan Deloitte 17. Konsultan Tumbuan & Partners

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
37.	28 Des 2020 Dec 28, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 10 Desember 2020 2. Penyampaian Rancangan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Kepada OJK 3. Penyampaian Usulan Risk Appetite Statement 4. Penyampaian Rancangan Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur (Board Manual) 1. Ratification of Board of Directors Meeting on December 10, 2020 2. Submission of the Draft Sustainable Finance Action Plan to OJK 3. Submission of the Proposed Risk Appetite Statement 4. Submission of Draft Guidelines for Board of Directors Work Procedure (Board Manual)	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. Chesna F. Anwar 11. Salomi Adriana 12. Anwar Harsono 13. Wahyu P. Wibowo 14. Titiek Setiyowati 15. Agung Waluyo 16. Anggota Komite Audit 17. Anggota Komite Pemantau Risiko

Rapat Board of Management

Direktur Eksektif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi dilakukan secara intens dan sistematis. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat Direksi satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.

Selama tahun 2020 telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 50 kali. Dengan agenda sebagai berikut:

Board of Management Meetings

The Executive Director assisted by the Managing Director is in charge of conducting the Company operations with intense and systematic coordination. Routine meetings that are held are Board of Directors meetings once a week, ALCO meetings once a month, and monthly performance meetings. In addition, the Executive Director and the Board of Directors hold other coordination meetings to ensure operations are performed well.

During 2020, there were 50 meetings between the Executive Director and the Managing Director, with the following agenda:

Rapat Board of Management Tahun 2020
Board of Management 2020 Meetings

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
1	MR.0004/EXO/01/2020	20 Jan 2020 Jan 20, 2020	1. Paparan dari MRO 2. Paparan dari Masing-Masing Directorat 3. Tindak Lanjut 1. Presentation by MRO 2. Presentation by Each Directorate 3. Follow up	1. D. James Rompas 2. Djoko Retnadi 3. Agus Windiarto 4. Henry SIhotang 5. Yadi J Ruchandi 6. M Guntur
2	MR.0001/CSC/01/2020	27 Jan 2020 Jan 27, 2020	1. Ratifikasi Rapat Direksi tanggal 20 Januari 2020 dan PMO *Execution Pregress Report* 2. Persiapan RKAT 3. Persiapan Rapat dengan DJKN 1. Ratification of the Board of Directors Meeting on January 20, 2020 and PMO Execution Progress Report 2. Preparation of the RKAT 3. Preparation for a Meeting with DJKN	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Yadi Ruchandi 7. M. Guntur

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
3	MR.0003/CSC/02/2020	03 Feb 2020 Feb 03, 2020	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur tanggal 28 Januari 2020 2. Laporan Setiap Direktorat dan Tindak Lanjut 1. Ratification of the Board of Directors Meeting on January 28, 2020 2. Report from every Directorate's and Follow-Up	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur
4	MR.0005/CSC/02/2020	10 Feb 2020 Feb 10, 2020	1. Presentasi Hasil Pelaksanaan Audit 2. Ratifikasi Rapat *Board of Management* tanggal 03 Februari 2020 oleh PMO 3. Finalisasi *Report Closing* 4. RPMK Pembinaan Pengawasan 5. Strategi Komunikasi sekaligus Pemaparan oleh *Advisor* Komunikasi 1. Presentation of Audit Result 2. Ratification of the Board of Management Meeting on February 03, 2020 by PMO 3. Finalization of Report Closing 4. RPMK Supervision Guidance 5. Communication Strategy as well as Presentation by the Communication Advisor	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur
5	MR.0006/CSC/02/2020	17 Feb 2020 Feb 17, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat Direksi tanggal 10 Februari 2020 2. Update Singkat Direktorat 3. *Supply Chain Financing* 4. *Financial Report* 1. Ratification of the Minutes of the Board of Directors Meeting on February 10, 2020 2. Directorate Brief Update 3. Supply Chain Financing 4. Financial Report	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo
6	MR.0008/CSC/02/2020	24 Feb 2020 Feb 24, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat Direksi 10 & 17 Februari 2020 2. Reprofiling Nasabah Kelolaan Div. Bisnis BUMN 3. SCF, Strategi UKM, Transformasi Bisnis Model, Syariah & Evaluasi Positioning Kanwil MKS 4. Kinerja Keuangan per 31 Januari 2020 5. Update Annual Report 6. Update Singkat Direktorat 1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Directors on February 10 & 17, 2020 2. Reprofiling of Customers Managed Div. BUMN Business 3. SCF, SME Strategy, Business Model Transformation, Sharia & Positioning Evaluation of Regional Office MKS DP 4. Financial Performance as of January 31, 2020 5. Update Annual Report 6. Directorate Brief Update	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo
7	MR.0010/CSC/03/2020	02 Mar 2020 Mar 02, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat Direksi tanggal 17 & 24 Februari 2020 2. *Project Management Execution Progress Report as of* 29 Februari 2020 3. Update Singkat Direktorat 4. Transformasi Model Bisnis Pembiayaan Syariah (*Dual Banking Leverage Model*) 1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Directors on February 17 & 24, 2020 2. Project Management Execution Progress Report as of February 29, 2020 3. Directorate Brief Update 4. Transformation of the Sharia Financing Business Model (Dual Banking Leverage Model)	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
8	MR.0011/CSC/03/2020	10 Mar 2020 Mar 10, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 02 Maret 2020 2. Update Singkat Direktorat III : 3. Notulensi Rapat Kreditur dan DJKN 4. Rating Affirmation LPEI oleh Moody's – Maret 2020 5. Update Penandatanganan Kontrak Kinerja 6. Update Singkat Direktorat V 7. Pemaparan Ketentuan Kerjasama dengan Pihak Eksternal 8. Update Pembentukan Komite Account Strategy 9. *Impact Coronavirus (Covid-19)* Terhadap Portofolio Debitur LPEI – DP I & DP II 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on March 02, 2020 2. Brief Update of Directorate III: 3. Minutes of Creditors and DJKN Meetings 4. Moody's LPEI Rating Affirmation - March 2020 5. Performance Contract Signing Update 6. Brief Update of the Directorate V 7. Explanation of the Terms of Cooperation with External Parties 8. Update on Account Strategy Committee Formation 9. Impact of Coronavirus (Covid-19) on the LPEI Debtor Portfolio - DP I & DP II	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Titiek Setyowati
9	MR.0012/CSC/03/2020	16 Mar 2020 Mar 16, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 10 Maret 2020; 2. Pemaparan *Annual Report* 2019; 3. Pemaparan *Management Letter* EY; 4. Kinerja dan Proyeksi Keuangan 5. Kinerja Triwulan I/2020 6. Strategi Bisnis Triwulan II/2020; 7. Pemaparan Hasil *Stress Testing;* 8. Kebijakan Pembiayaan. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on March 10, 2020; 2. Presentation of the 2019 Annual Report; 3. Presentation of EY's Management Letter; 4. Financial Performance and Projections 5. Quarterly Performance I / 2020 6. Business Strategy for Quarter II / 2020; 7. Description of Stress Testing Results; 8. Financing Policy.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Titiek Setyowati
10	MR.0013/CSC/03/2020	23 Mar 2020 Mar 23, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 16 Maret 2020; 2. Penerapan Operasional Terbatas; 3. Pemaparan *Layout* dan Penyewaan *Office Space*. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on March 16, 2020; 2. Limited Operation; 3. Layout and Office Space Rental Exposure.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Titiek Setyowati
11	MR.0014/CSC/03/2020	30 Mar 2020 Mar 30, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 23 Maret 2020; 2. Kinerja dan Proyeksi Keuangan; 3. *Procurement Project* TSI. 4. *Update* DP V; 5. *Update* SEVP IV. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on March 23, 2020; 2. Financial Performance and Projections; 3. TSI Procurement Project. 4. Update DP V; 5. Update SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
12	MR.0015/CSC/04/2020	06 Apr 2020 Apr 06, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 30 Maret 2020; 3. Laporan Gugus Tugas Evaluasi Efektifitas Kerja selama WFH. 4. *Update* DP I. 5. *Update* SEVP I. 1. Economic Condition Update; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on March 30, 2020; 3. Report of the Task Force for Evaluation of Work Effectiveness during WFH. 4. Update DP I. 5. Update SEVP I.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Chesna F Anwar 6. Yadi Ruchandi 7. M. Guntur 8. Wahyu P Wibowo 9. Titiek Setyowati
13	MR.0016/CSC/04/2020	13 Apr 2020 Apr 13, 2020	1. *Update* Kondisi Ekonomi – SEVP I; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 06 April 2020; 3. Laporan Pengelolaan Debitur – SEVP VI; 4. *Mapping* Debitur dan *Update* Debitur terkait Penarikan dan Kondisi Saat ini – DP I; 5. Skenario Likuiditas dengan Menggunakan PMN dalam Bentuk SBN – DP III; 6. *Refocusing* Rencana Kerja LPEI 2020 – SEVP IV; 7. Materi RDP dengan Komisi XI DPR RI – DP III; dan 8. Perpanjangan Asuransi Kesehatan – SEVP II. 1. Update on Economic Conditions – SEVP I; 2. Ratification of Board of Management Meeting Minutes date 06 April 2020; 3. Borrowers Management Report – SEVP VI; 4. Mapping and Update of Borrowers related to Withdrawals and Current Conditions – DP I; 5. Liquidity Scenario with SEP in the form of Government Bonds – DP III; 6. Refocusing of Work Plan 2020 – SEVP IV; 7. RDP Material with Commission XI of House of Representatives of RI – DP III; and 8. Extension of Health Insurance – SEVP II.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Chesna F Anwar 6. Yadi Ruchandi 7. M. Guntur 8. Wahyu P Wibowo 9. Titiek Setyowati
14	MR.0019/CSC/04/2020	20 Apr 2020 Apr 20, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi – SEVP I; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 13 April 2020; 3. Skenario Perhitungan PDN dan CKPN – DP III; 4. Project Initiative P4 – SEVP I; 5. Presentasi Hasil Survey Kinerja Pelaksanaan Operasional Terbatas – SEVP IV; 6. Update Donasi LPEI Perduli – SEVP IV. 1. Economic Condition Update - SEVP I; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on April 13, 2020; 3. Scenarios of Foreign Currency PDN and CKPN Squaring - DP III; 4. Project Initiative P4 - SEVP I; 5. Presentation of the Results of Limited Operational Implementation Performance Survey - SEVP IV; 6. Update Donation LPEI Concern - SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Chesna F Anwar 6. Yadi Ruchandi 7. M. Guntur 8. Wahyu P Wibowo 9. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
15	MR.0020/CSC/04/2020	27 Apr 2020 Apr 27, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 20 April 2020; 3. *Update* DP III; 4. *Update* DP I; 5. *Update* SEVP IV; 6. *Update* SEVP I. 1. Economic Condition Update; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on April 20, 2020; 3. Update DP III; 4. Update DP I; 5. Update SEVP IV; 6. Update SEVP I.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Titiek Setyowati
16	MR.0022/CSC/05/2020	04 Mei 2020 May 04, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 27 April 2020; 3. *Update* DP III; 4. *Update* SEVP I; 5. *Update* DP II. 1. Economic Condition Update; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on April 20, 2020; 3. Update DP III; 4. Update DP I; 5. Update SEVP IV; 6. Update SEVP I.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
17	MR.0024/CSC/05/2020	11 Mei 2020 May 11, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 04 Mei 2020; 3. *Update* DP I; 4. *Update* DP V. 1. Economic Condition Update; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on May 4, 2020; 3. Update DP I; 4. Update DP V.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
18	MR.0026/CSC/05/2020	18 Mei 2020 May 18, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 11 Mei 2020; 3. *Update* SEVP IV; 4. *Update* DP III; 5. *Update* DP I. 1. Economic Condition Update; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on 11 May 2020; 3. Update SEVP IV; 4. Update DP III; 5. Update DP I.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
19	MR.0027/CSC/05/2020	26 Mei 2020 May 26, 2020	1. Update Kondisi Ekonomi; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 18 Mei 2020; 3. Arahan DE; 1. Economic Condition Update; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on May 18, 2020; 3. DE directives.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
20	MR.0028/CSC/06/2020	02 Jun 2020 Jun 02, 2020	1. *Update* Kondisi Ekonomi; 2. Presentasi Konsultan Komunikasi; 3. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 26 Mei 2020; 4. RPDD Kebijakan Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan LPEI; 5. RPDD Pembiayaan; 6. *Credit Document Safekeeping.* 1. Economic Condition Update; 2. Communication consultant presentation; 3. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on May 26, 2020; 4. RPDD LPEI Partnership and Community Development Program Policy; 5. RPDD Financing; 6. Credit Document Safekeeping.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
21	MR.0030/CSC/06/2020	08 Jun 2020 Jun 08, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 02 Juni 2020; 2. Informasi Daftar Rekanan KAP, KJPP dan Notaris. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting dated June 02, 2020; 2. Information on the List of KAP, KJPP and Notary Partners.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
22	MR.0031/CSC/06/2020	15 Jun 2020 Jun 15, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 08 Juni 2020; 2. Sosialisasi PMK Binwas LPEI. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on June 8, 2020; 2. Socialization of PMK Binwas LPEI.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
23	MR.0033/CSC/06/2020	22 Jun 2020 Jun 23, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 15 Juni 2020. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on June 15, 2020.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
24	MR.0034/CSC/06/2020	29 Jun 2020 Jun 29, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 22 Juni 2020; 2. 2020 *Audit Plan* & Tindak Lanjut Audit – SEVP V; 3. Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian – DP III; 4. Penjelasan Terkait Penyusunan Perubahan POJK No.40/2015 tentang Binwas LPEI – DP III; 5. GCG LPEI 2019 – SEVP IV; 6. Usulan Perubahan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI – DP V. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on June 22, 2020; 2. 2020 Audit Plan & Audit Follow-up - SEVP V; 3. Statement of Submission of Report on the Application of the Prudential Principles - DP III; 4. Explanation regarding the Preparation of Amendments to POJK No.40/2015 concerning Binwas LPEI - DP III; 5. GCG LPEI 2019 - SEVP IV; 6. Proposed Amendment to the LPEI Sharia Supervisory Board Charter - DP V.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
25	MR.0003/OTB/07/2020	06 Jul 2020 Jul 06, 2020	1. Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik – Divisi INS; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 29 Juni 2020; 3. Komite Teknologi Sistem Informasi – SEVP II; 4. Progres Kinerja Debitur LPEI & Prognosa Cashflow – DP II; 5. Program Penjaminan Korporasi Padat Karya – SEVP I; 6. Usulan Perubahan Piagam Audit – SEVP V; 7. Struktur Organisasi – SEVP IV. 1. Global and Domestic Economic Development - INS Division; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on June 29, 2020; 3. Information Systems Technology Committee - SEVP II; 4. Progress of LPEI Debtor & Prognosis for Cashflow - DP II; 5. Labor Intensive Corporation Guarantee Program - SEVP I; 6. Proposed Changes to the Audit Charter - SEVP V; 7. Organizational Structure - SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
26	MR.0004/OTB/07/2020	14 Jul 2020 Jul 14, 2020	1. *Feedback* Rapat Dengar Pendapat DPR tanggal 13 Juli 2020; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 06 Juli 2020; 3. Kinerja Keuangan Posisi 30 Juni 2020 – SEVP III; 4. *Update* Program Penugasan Khusus Ekspor – DP I dan SEVP I; 5. *Update* Covid-19 – SEVP IV. 1. Feedback on the DPR Hearing Meeting on July 13, 2020; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on July 6, 2020; 3. Financial Performance Position 30 June 2020 - SEVP III; 4. Update on Export Special Assignment Programs - DP I and SEVP I; 5. Update Covid-19 - SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
27	MR.0006/OTB/07/2020	20 Jul 2020 Jul 20. 2020	1. Arahan Menteri Keuangan; 2. Konsep Jawaban Pertanyaan RDP Komisi XI DPR RI; 3. RPMK Investasi Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Program PEN; 4. Penunjukan Konsultan; 5. Pengadaan Jasa Audit Keuangan tahun 2020 - 2021; 6. *Update* Direktorat V. 1. Directions from the Minister of Finance; 2. Question Answer Concept of RDP Commission XI of House of Representatives of RI; 3. RPMK of Government Investment on the Implementation of NER Program; 4. Appointment of Oliver Wyman; 5. Procurement of Financial Audit Services period of 2020 – 2021; 6. Update of Directorate V.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
28	MR.0007/OTB/07/2020	28 Jul 2020 Jul 28, 2020	1. Laporan Penjaminan untuk Korporasi Padat Karya Non BUMN dan Non UKM; 2. Format PKS antara Kemenkeu dan LPEI; 3. Format MoU antara LPEI dan PII; 4. Format MoU antara LPEI dan Perbankan; 5. Struktur Organisasi. 1. Guarantee Report for Non BUMN and Non SME Labor Intensive Corporations; 2. PKS format between Ministry of Finance and LPEI; 3. Format of the MoU between LPEI and PII; 4. Format of MoU between LPEI and Banking; 5. Organizational Structure.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Wahyu P Wibowo 10. Restiana Ie Tjoe 11. Titiek Setyowati
29	MR.0008/OTB/08/2020	03 Aug 2020 Aug 03, 2020	1. *Monthly Update :* Perkembangan Makro Ekonomi Global dan Domestik – Div INS; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 20 Juli dan 28 Juli 2020; 3. Progres Implementasi IFOS – DP V; 4. Usulan Revisi RKAT 2020 dan Dampak Penerapan PSAK 71 – SEVP III; 5. Update Pengadaan Jasa Audit Keuangan Tahun 2020 dan 2021 – SEVP III; 6. Penggunaan PMN 2020 – DP III. 1. Monthly Update: Global and Domestic Economic Macro Development - INS Div; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meetings on July 20 and 28, 2020; 3. Progress of IFOS Implementation - DP V; 4. Proposed Revision of RKAT 2020 and Impact of Implementation of PSAK 71 - SEVP III; 5. Update on Financial Audit Service Procurement for 2020 and 2021 - SEVP III; 6. Use of PMN 2020 - DP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Yadi Ruchandi 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
30	MR.0009/OTB/09/2020	10 Aug 2020 Aug 10, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 03 Agustus 2020; 2. Verifikasi Audit – SEVP V; 3. *Check Point Update* Gugus Tugas – SEVP IV. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting dated August 03, 2020; 2. Verification of Audit - SEVP V; 3. Check Point for Task Force Update - SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
31	MR.0010/OTB/08/2020	18 Aug 2020 Aug 18, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 10 Agustus 2020; 2. *Project Management Initiative 2020* – TFO; 3. Laporan Pengelolaan Asset Pembiayaan – DP II & DP IV; 4. Progres Pembahasan Rancangan POJK Tingkat Kesehatan LPEI – DP III; 5. *Capital Update* – SEVP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on 10 August 2020; 2. Project Management Initiative 2020 - TFO; 3. Financing Report - DP II & DP IV; 4. Progress of Discussion on the Draft POJK Health Level LPEI - DP III; 5. Capital Update - SEVP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
32	MR.0011/OTB/08/2020	24 Aug 2020 Aug 24, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 18 Agustus 2020; 2. *Financial Projection 2020* – SEVP III; 3. Materi Rapat Pembahasan Perkembangan Terkini Pembinaan dan Pengawasan terhadap LPEI – SEVP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on August 18, 2020; 2. Financial Projection 2020 - SEVP III; 3. Material for the Discussion Meeting on the Latest Development and Supervision of LPEI - SEVP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
33	MR.0012/OTB/08/2020	31 Aug 2020 Aug 31, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 24 Agustus 2020; 2. Rencana Penandatanganan MoU antara Pemkab Klungkung, LPEI dan DJKN; 3. MoU Kerjasama antar Unit Pengadaan Barang dan Jasa SMV dibawah Kementerian Keuangan; 4. Laporan Pengawasan Dewan Direktur; 5. *Assets Quality Update;* 6. Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan PEN; 7. Lomba Lagu HUT LPEI ke-11. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on August 24, 2020; 2. Plans for signing the MoU between Klungkung Regency Government, LPEI and DJKN; 3. MoU on Cooperation between the SMV Goods and Services Procurement Units under the Ministry of Finance; 4. Board of Directors Supervisory Report; 5. Assets Quality Update; 6. Manual of Government Credit Guarantee Products for Corporate Business Actors in the Context of Implementing PEN; 7. 11th LPEI Anniversary Song Competition.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
34	MR.0013/OTB/09/2020	07 Sep 2020 Sep 07, 2020	1. Perkembangan Makroekonomi Global dan Domestik; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 31 Agustus 2020; 3. *Update* PMK No.118/PMK.06/2020; 4. *Strategic Discussion;* 5. Agenda Lain-Lain – Protokol Covid-19. 1. Global and Domestic Macroeconomic Development; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on August 31, 2020; 3. Update PMK No.118 / PMK.06 / 2020; 4. Strategic Discussion; 5. Miscellaneous Agenda - Covid-19 Protocol.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
35	MR.0016/OTB/09/2020	15 Sep 2020 Sep 15, 2020	1. Review Direktur Eksekutif; 2. Aplikasi LPEI (*Sign*) – SEVP II / TSI 3. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 07 September 2020; 4. PDE Manual Operasional Pembiayaan – DP V; 5. *Summary* Program PKE & PEN – DP V / HKM; 6. IKU *August 2020 and Simulation December 2020* – SEVP III; 7. MIS *Project Kickoff Meeting* – SEVP III; 8. *Monitoring Target Pipeline* – DP I dan DP II; 9. *Progress Update* (Posisi September 2020) - DP IV. 1. Executive Director's Review; 2. LPEI (Sign) Application - SEVP II / TSI 3. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on September 7, 2020; 4. PDE Financing Operational Manual - DP V; 5. Summary of PKE & PEN Program - DP V / HKM; 6. IKU August 2020 and Simulation December 2020 - SEVP III; 7. MIS Project Kickoff Meeting - SEVP III; 8. Monitoring of Pipeline Targets - DP I and DP II; 9. Progress Update (Position September 2020) - DP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
36	MR.0017/OTB/09/2020	21 Sep 2020 Sep 21, 2020	1. Kinerja Keuangan Agustus 2020 – DP III/SEVP III; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 15 September 2020; 3. Pelaksanaan Pinjaman Investasi Pemerintah PEN – DP I. 1. Financial Performance August 2020 - DP III / SEVP III; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on 15 September 2020; 3. Implementation of Government Investment Loans PEN - DP I.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
37	MR.0018/OTB/09/2020	28 Sep 2020 Sep 28, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 21 September 2020; 2. *Financial Update* posisi 25 September 2020 – SEVP III; 3. *Special Purpose Vehicle* (SPV) – SEVP III; 4. *Update Training Credit Risk* – SEVP IV. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on 21 September 2020; 2. Financial Update for position 25 September 2020 - SEVP III; 3. Special Purpose Vehicle (SPV) - SEVP III; 4. Update Credit Risk Training - SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
38	MR.0019/OTB/10/2020	05 Okt 2020 Oct 05, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 28 September 2020; 2. Finalisasi Bahan Rapat dengan Menteri Keuangan – DP III; 3. *Financial Update* per Posisi 02 Oktober 2020 – SEVP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on September 28, 2020; 2. Finalization of Materials for the Meeting with the Minister of Finance - DP III; 3. Financial Update as of Position 02 October 2020 - SEVP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
39	MR.0020/OTB/10/2020	12 Okt 2020 Oct 12, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 05 Oktober 2020; 2. *Project Management Initiative 2020* – SEVP IV/TFO; 3. Kinerja Keuangan – SEVP III; 4. Financial Update – SEVP III; 5. Perkembangan Rekomendasi DJKN (GCG LPEI 2019) – SEVP IV; 6. Pengesahan Perubahan RKAT 2020 – DP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on October 5, 2020; 2. Project Management Initiative 2020 - SEVP IV / TFO; 3. Financial Performance - SEVP III; 4. Financial Update - SEVP III; 5. Development of DJKN Recommendations (2019 LPEI GCG) - SEVP IV; 6. Ratification of the RKAT 2020 Amendment - DP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
40	MR.0021/OTB/10/2020	19 Okt 2020 Oct 19, 2020	1. Perkembangan Makroekonomi Global dan Domestik – INS; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 12 Oktober 2020; 3. Arahan Menteri Keuangan dalam Rapat Sinergi SMV – OTB; 4. Financial Update – SEVP III; 5. Webinar Nasional LPEI – CSM; 6. Strategi Komunikasi JAMINAH – CSM; 7. *Prognosa & Roadmap Trade Finance* – DP I; 8. Penugasan Khusus Ekspor – DP I; 9. *Project Management Initiative 2020* – SEVP IV/TFO. 1. Global and Domestic Macroeconomic Developments - INS; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on October 12, 2020; 3. The direction of the Minister of Finance in the SMV - OTB Synergy Meeting; 4. Financial Update - SEVP III; 5. National LPEI Webinar - CSM; 6. Communication Strategy JAMINAH - CSM; 7. Prognosis & Roadmap of Trade Finance - DP I; 8. Special Export Assignment - DP I; 9. Project Management Initiative 2020 - SEVP IV / TFO.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
41	MR.0022/OTB/10/2020	26 Okt 2020 Oct 26, 2020	1. *Financial Update* – SEVP III; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 19 Oktober 2020; 3. *Update* IKU dan RKAT 2021 – SEVP III; 4. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Arahan Dewan Direktur atas Laporan Pengawasan Semester I/2020 – OTB; 5. Hal-hal yang Menjadi Perhatian dan Tindak Lanjut dari Laporan Komite-Komite Dewan Direktur – OTB. 1. Financial Update - SEVP III; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on 19 October 2020; 3. Update on IKU and RKAT 2021 - SEVP III; 4. Monitoring Report of the Follow-up to the Direction of the Board of Directors on the Supervision Report of Semester I / 2020 - OTB; 5. Matters of Attention and Follow-up to Reports of the Committees of the Board of Directors - OTB.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
42	MR.0023/OTB/11/2020	02 Nov 2020 Nov 02, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 26 Oktober 2020; 2. Angka Keuangan Oktober 2020 dan Proyeksi Desember 2020 – SEVP III; 3. *Press Conference* Kesiapan Penyelenggaraan TEI – OTB: 4. Laporan OTB; 5. *Sublease* 2 Lantai LPEI. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on October 26, 2020; 2. Financial Figures for October 2020 and Projections for December 2020 - SEVP III; 3. Press Conference on the Readiness to Organize TEI - OTB; 4. OTB Report: 5. Sublease 2 floors LPEI.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
43	MR.0025/OTB/11/2020	09 Nov 2020 Nov 09, 2020	1. Kick Off Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan 2020; 2. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management tanggal 2 November 2020; 3. Financial Update posisi 6 November 2020; 4. Penyampaian Hasil Evaluasi Self Assessment GCG LPEI oleh Konsultan; 5. Review atas Draft RPOJK Tingkat Kesehatan LPEI. 1. Kick Off for Audit of Financial Statements 2020; 2. Ratification of Board of Management Meeting Minutes dated 2 November 2020; 3. Financial Update position 6 November 2020; 4. Submission of the Company's GCG Self Assessment Results by Consultant; 5. Review of RPOJK Draft of the Company's Soundness Rating.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
44	MR.0026/OTB/11/2020	17 Nov 2020 Nov 17, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 09 November 2020; 2. *Project Management Initiative* 2020 – SEVP IV; 3. *Financial Update* per Posisi 13 November 2020 – SEVP III; 4. *MIS Blueprint & MIS Roadmap Project* – SEVP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on November 9, 2020; 2. Project Management Initiative 2020 - SEVP IV; 3. Financial Update as of Position 13 November 2020 - SEVP III; 4. MIS Blueprint & MIS Roadmap Project - SEVP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati
45	MR.0027/OTB/11/2020	23 Nov 2020 Nov 23, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 17 November 2020; 2. *Financial Update* per Posisi 20 November 2020 – SEVP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on November 17, 2020; 2. Financial Update as of Position 20 November 2020 - SEVP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati 13. Agung Waluyo

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
46	MR.0028/OTB/11/2020	30 Nov 2020 Nov 30, 2020	1. Perkembangan dan proyeksi Makroekonomi Edisi November 2020 – INS; 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – DP III; 3. Kinerja Keuangan Posisi 26 November 2020 – SEVP III*; 4. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 23 November 2020; 5. *Monitoring* dan Tindak Lanjut Arahan Dewan Direktur atas Laporan Pengawasan S1; 1. Macroeconomic developments and projections November 2020 Edition - INS; 2. Sustainable Finance Action Plan - DP III; 3. Financial Performance November 26, 2020 position - SEVP III *; 4. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on November 23 2020; 5. Monitoring and Follow-up of the Direction of the Board of Directors on the S1 Supervisory Report;	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. M. Guntur 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Restiana Ie Tjoe 12. Titiek Setyowati 13. Agung Waluyo
47	MR.0030/OTB/12/2020	08 Des 2020 Dec 08, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 30 November 2020; 2. *Performance Management Meeting* – SEVP III; 3. *Financial Update* – SEVP III; 4. *Computer Based Training (CBT)* / Kode Etik – SEVP IV; 5. Program Pendidikan Manajemen Eksekutif – SEVP IV. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on November 30, 2020; 2. Performance Management Meeting - SEVP III; 3. Financial Update - SEVP III; 4. Computer Based Training (CBT) / Code of Ethics - SEVP IV; 5. Executive Management Education Program - SEVP IV.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Anwar Harsono 9. Wahyu P Wibowo 10. Agung Waluyo
48	MR.0031/OTB/12/2020	14 Des 2020 Dec 14, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 30 November 2020; 2. *Project Management Initiative 2020* – SEVP IV; 3. *Financial Update* – SEVP III. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on November 30, 2020; 2. Project Management Initiative 2020 - SEVP IV; 3. Financial Update - SEVP III.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Anwar Harsono 9. Wahyu P Wibowo 10. Agung Waluyo

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR MEETINGS

No	No Risalah Minute Number	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Participants
49	MR.0033/OTB/12/2020	21 Des 2020 Dec 21, 2020	1. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 14 Desember 2020; 2. *Financial Update* posisi 18 Desember 2020 - SEVP III; 3. Pemaparan Rancangan *Board Manual* – SEVP IV; 4. Pemaparan Rancangan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – DPV/SEVP IV; 5. Pemaparan *Draft Risk Appetite Statement* – DP V; 6. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit – SKAI; 7. Catatan Agenda Penting Akhir Tahun – OTB; 8. Laporan Acara Hari Ibu Kementerian Keuangan – OTB. 1. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on December 14, 2020; 2. Financial Update for position 18 December 2020 - SEVP III; 3. Explanation of the Design Board Manual - SEVP IV; 4. Presentation of the Draft Sustainable Finance Action Plan - DPV / SEVP IV; 5. Presentation of the Draft Risk Appetite Statement - DP V; 6. Audit Progress Report - SKAI; 7. Record Important Year-End Agenda - OTB; 8. Ministry of Finance Mother's Day Event Report - OTB.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Anwar Harsono 9. Wahyu P Wibowo 10. Agung Waluyo
50	MR.0034/OTB/12/2020	30 Des 2020	1. Perkembangan dan Proyeksi Makroekonomi – INS; 2. Ratifikasi Risalah Rapat *Board of Management* tanggal 21 Desember 2020; 3. *Financial Update* posisi 28 Desember 2020 - SEVP III; 4. Laporan Pelaksanaan Audit 2020 dan Rencana Audit 2021 – Ketua SKAI. 1. Macroeconomic Development and Projection - INS; 2. Ratification of the Minutes of the Board of Management Meeting on 21 December 2020; 3. Financial Update position December 28 2020 - SEVP III; 4. 2020 Audit Report and 2021 Audit Plan - Chairman of SKAI.	1. D. James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Djoko Retnadi 4. Agus Windiarto 5. Chesna F Anwar 6. Anwar Harsono 7. Wahyu P Wibowo 8. Agung Waluyo

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION ON ULTIMATE AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank is a State-Owned Enterprise in which all Company shares are 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia, which represented by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA

POLICY ON THE DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR, AND MANAGING DIRECTOR

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI diatur dalam Pasal 25 UU No. 2/2009.

Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 orang dan paling sedikit 4 orang. Komposisi Dewan Direktur LPEI terdiri dari unsur Ex-Officio instansi atau lembaga dan unsur professional.

Komposisi anggota Dewan Direktur dari unsur Ex-Officio instansi atau lembaga yaitu 3 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan,1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

Komposisi anggota Dewan Direktur dari unsur professional yaitu paling banyak 3 orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 orang dari dalam LPEI. PMK Nomor 58/PMK.06/2020 mengatur bahwa calon anggota Dewan Direktur wajib memiliki paling sedikit keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang diperlukan oleh LPEI, yaitu keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, penjaminan, asuransi, perdagangan internasional dan/atau hukum.

The diversity of the composition of the Company's Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors is regulated in Article 25 of Law No 2/2009.

The total number of members of the Board of Directors is 10 people and at least 4 people. The composition of the Company's Board of Directors consists of Ex-Officio elements from agencies or institutions and professional elements.

The composition of the members of the Board of Directors is from the Ex-Officio agency or institution, namely 3 officials from an agency or institution in charge of fiscal affairs, 1 official from an agency or institution in charge of commerce, 1 official from an agency or institution in charge of industry, 1 official from the agency or institution in agriculture.

The composition of members of the Board of Directors from the professional element is a maximum of 3 people from external of the Company and 1 person from internal. PMK No. 58/PMK.06/2020 stipulates that prospective member of the Board of Directors must have at least the expertise and experience in one of the fields required by the Company, namely expertise and experience in economics, finance, banking, underwriting, insurance, international trade and/or law.

Komposisi Composition	Kebijakan Keberagaman Policy of Diversity
Dewan Direktur Board of Directors	Anggota Dewan Direktur LPEI berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pejabat yang membidangi fiskal, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan kalangan profesional. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Total members of the Board of Directors of Indonesia Eximbank are the most consisted of 10 (ten) members that include the executives in charge of fiscal, trade, industry, agriculture, and professionals. One of members of the Board of Directors is stipulated by the Finance Minister as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director.
Direktur Eksekutif Executive Director	Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan kegiatan operasional Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana. One of members of the Board of Directors is stipulated by the Finance Minister as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director. In implementing operational activity, the Executive Director is assisted by the Managing Directors.
Direktur Pelaksana Managing Director	Direktur Pelaksana LPEI paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam Lembaga. Total members of the Managing Directors of Indonesia Eximbank are the most consisted of 5 (five) members and at the most 4 (four) members from internal Institution.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA

FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTORS

Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di LPEI bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

Based on the current situation in the Company, the Board of Directors with other Members of the Board of Directors and the Managing Director do not have financial and family relations up to the second degree or in-laws with members of the Board of Directors and the Managing Director.

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan: Affiliation with:							
	Dewan Direktur Board of Directors		Direktur Eksekutif Executive Directors		Direktur Pelaksana Managing Directors		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
D. James Rompas Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director		√		√		√		√
Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		√		√		√		√
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		√		√		√		√
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		√		√		√		√
Felia Salim Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		√		√		√		√
Rijani Tirtoso Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		√		√		√		√
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana I Managing Director I		√		√		√		√
Djoko Retnadi Direktur Pelaksana II Managing Director II		√		√		√		√
Agus Windiarto Direktur Pelaksana III Managing Director III		√		√		√		√
Henry Sihotang Direktur Pelaksana IV Managing Director IV		√		√		√		√
Chesna F. Anwar Direktur Pelaksana V Managing Director V		√		√		√		√

PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR-MANAGING DIRECTORS

Secara umum dasar kebijakan penilaian kinerja dari Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana mengacu kepada mandat LPEI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009. Setiap tahun, Menteri Keuangan menetapkan Kontrak Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut target yang hendak dicapai oleh Dewan Direktur termasuk Direktur Eksekutif-Direktur Pelaksana.

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dilakukan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Proses Pelaksanaan Asesmen Kinerja

Atas capaian kinerja pada tahun berjalan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana diberikan tantiem. Hal ini sesuai Pasal 21 UU No. 2/2009 surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk:

a. Cadangan umum;
b. Cadangan tujuan;
c. Jasa produksi dan tantiem; dan
d. Bagian laba pemerintah.

Ketentuan mengenai penetapan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana berupa pemberian tantiem dilakukan berdasarkan:

a. Ketentuan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 621/KMK.06/2018.
b. Sedangkan ketentuan penetapan tunjangan dan penghasilan lainnya diatur melalui KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

In general, the basis of performance assessment policy for the Board of Directors and Executive Director - Managing Director refers to the Company mandate as stated in Law No. 2 of 2009. The Minister of Finance sets out the Management Contract every year that contains the Key Performance Indicators (KPI) and targets to be achieved by the Board of Directors and the Executive Director-Managing Director.

Assessments

The Minister of Finance carries out the performance assessment of the Board of Directors and Executive Directors at the Annual Work Plan and Budget (RKAT) Ratification Meeting.

Performance Assessment Procedures

The tantiem is granted to the Board of Directors, Executive Director and Managing Directors for the achievements in the current year, which is based on the article 21 Law No. 2/2009 that the surplus achieved by Indonesia Eximbank in 1 (one) year can be allocated for:

a. General reserves;
b. Specific reserves;
c. Performance bonus and tantiem; and
d. Government profit share.

The determination of tantiem for the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors remuneration refers to:

a. Basic salary for the Board of Directors and Managing Director is stipulated through Minister of Finance Decree KMK No. 621/KMK.06/2018.
b. While the stipulations on benefits and other income are regulated through KMK No. 322/KMK.06/2018 concerning the Determination of Income and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of LPEI.

PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA
GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR-MANAGING DIRECTORS

Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Surplus;
b. Capaian Indikator Kinerja Utama;
c. Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan
d. Faktor-faktor lain yang relevan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana

Penilaian Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi:

The determination of Performance Bonus and Tantiem is considered by:

a. Surplus;
b. Key Performance Indicators Achievement;
c. National interest account implementation; and
d. Other relevant factors.

Performance Assessment Criteria of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors

The performance assessment of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors uses the KPI which includes:

Sasaran Strategis Strategic Goal	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator Ukuran Indicator
PERSPEKTIF MANDAT DAN KEUANGAN | MANDATE AND FINANCIAL PERSPECTIVE	
1. Pelaksanaan kegiatan menghasilkan dan/atau menghemat devisa serta peningkatan kapasitas usaha Actitivities generate and/or save foreign exchange and increase business capacity	1. Penyaluran Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa Outstanding Pembiayaan, Outstanding Penjaminan, Outstanding Asuransi dan Volume Trade Finance: Distribution of National Export Financing (PEN) in the form of Outstanding Financing, Outstanding Guarantee, Outstanding Insurance and Trade Finance Volume:
	2. Peningkatan Penjaminan Kredit Bank Improvement of Bank Credit Guarantee
	3. Reprofiling Pembiayaan dengan fokus pada segmen UKME, UMKM dan UMBE Financing reprofiling with a focus on the SME, MSME and UMBE segments
	4. Jumlah pelaku usaha segmen mikro, kecil, menengah dan koperasi yang melakukan ekspor perdana di kawasan Indonesia Timur The number of business actors in the micro, small, medium and cooperative segments that carry out initial exports in the Eastern Indonesia region
2. Optimalisasi Pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Optimizing the Implementation of Special Export Assignments (PKE)	5. Persentase pelaksanaan dan penyaluran dana PKE Percentage of implementation and distribution of PKE funds
3. Pengelolaan keuangan yang optimal dan berkelanjutan Optimal and sustainable financial management	6. Pemenuhan rasio *Net Interest Margin* (NIM) Fulfillment of the Net Interest Margin (NIM) ratio
	7. *Cost Efficiency Ration* (CER)
PERSPEKTIF STAKEHOLDER DAN CUSTOMER | STAKEHOLDERS AND CUTOMERS PERSPECTIVE	
4. Peningkatan peran LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Increasing the role of the LPEI as a Special Mission Vehicle (SMV)	8. Jumlah kontrak atau transaksi baru ekspor yang dihasilkan dari kegiatan *Business to Business (B2B) Matchmaking* Number of new export contracts or transactions resulting from Business to Business (B2B) Matchmaking activities
	9. Pelaksanaan kegiatan sinergi antar *Special Mission Vehicle (SMV)* Kementerian Keuangan Implementation of synergy activities between the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV)

PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR-MANAGING DIRECTORS

Sasaran Strategis Strategic Goal	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator Ukuran Indicator
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	
5. Penguatan manajemen risiko dan tata kelola lembaga yang baik Strengthening risk management and good corporate governance	10. Implementasi kebijakan manajemen risiko bagi kegiatan bisnis Lembaga (*portfolio guideline* dan *industries risk acceptance criteria*) Implementation of risk management policies for the institution's business activities (portfolio guideline and industries risk acceptance criteria)
	11. Profil risiko Lembaga dan *framework sui generis* Institutional risk profile and sui generis framework
	12. Hasil penilaian pelaksanaan tata kelola lembaga Results of the assessment of the implementation of corporate governance
	13. Penyempurnaan Manual/SOP terkait pelaksanaan PKE Improved Manual/SOP related to PKE implementation
6. Penguatan riset untuk mendukung daya saing Strengthening research to support competitiveness	14. Tersedianya riset untuk mendukung daya saing ekspor dari sisi potensi dan risiko The availability of research to support export competitiveness in terms of potential and risks
7. Perbaikan kualitas pembiayaan Improving the quality of financing	15. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Netto Net Non-Performing Loan (NPL) Ratio
	16. Perbaikan kualitas aset pembiayaan netto Improved quality of net financing assets
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN | LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	
8. Organisasi yang *agile* Agile Organization	17. Penataan struktur organisasi sesuai kebutuhan Lembaga Arranging the organizational structure according to the needs of the Institute
9. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berkinerja tinggi Competent and high-performance human resources (HR)	18. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Increase the capacity and capability of human resources
10. Sistem manajemen informasi yang andal Reliable information management system	19. Integrasi sistem dan teknologi Integration of systems and technology

Pelaksanaan Asesmen

Pelaksanaan Asesmen kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dilakukan dalam Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan.

Assessment

The Minister of Finance carries out the performance assessment of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors in the Ratification Meeting.

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kebijakan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui KMK No. 621/ KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya).

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

Remuneration Policy

Remuneration policy refers to Law No. 2/2009 on Indonesian Export Financing Agency, Article 26 paragraph (3) stating that the Finance Minister of the Republic of Indonesia stipulates the salary, income, and other benefits of the Board of Directors and Managing Directors.

The policy on basic salary amount for the Board of Directors and Managing Directors refers to KMK No. 621/ KMK.06/2018 on the Basic Salary of the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on salary amounts) and KMK No.322/KMK.06/2018 on Income and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on benefits and other income).

As elaborated in the Executive Director section in this annual report, the Executive Director of Indonesia Eximbank is one of members of the Board of Directors assigned by the Finance Minister as Chairman of the Board of Directors. As such, the procedure of remuneration for the Executive Director is the same as for the Board of Directors.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi untuk melakukan benchmarking terhadap penghasilan Top Management baik dari industri perbankan, maupun lembaga keuangan nonbank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan diajukan kepada Menteri Keuangan RI.

Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, sebagai berikut:

Remuneration Procedures

The remuneration for the Board of Directors and Managing Directors is proposed by the Remuneration and Nomination Committee coordinating with Human Resources and General Affairs Unit, to carry out benchmarking for the Top Managements income either from banking or non-banking financial institution.

The result will be provided to the Board of Directors through the Remuneration and Nomination Committee, and further the Board of Directors will propose to the Minister of Finance.

The remuneration procedures for the Board of Directors and Managing Directors, are as follows:

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Komite Remunerasi & Nominasi
Remuneration & Nomination Committee

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur

Provide reccomendation for the Board of Directors

Dewan Direktur
Board of Directors

Mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri Keuangan

Submit the proposal of Remuneration to the Minister of Finance

Menteri Keuangan
Minister of Finance

- Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi
- Melakukan proses persetujuan
- Menerbitkan putusan melalui Keputusan Menteri Keuangan

- Evaluate the proposal of remuneration
- Perform the approval process
- Issued the decision through the Minister of Finance Decision

Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur, maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK No. 621/KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya) adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure and Facility

The remuneration structure of the Board of Directors and Managing Directors includes the types and amount of short term and long term incentives or post tenure of each member of the Board of Directors or Managing Directors based on KMK No. 621/KMK.06/2018 concerning the Basic Salary of the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on salary amounts) and KMK No. 322/ KMK.06/2018 on Income and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on benefits and other income) are as follows:

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur
Remuneration Structure and other Facilities for Executive Director and Chairman of the Board of Directors

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium | Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 100%
2	Tunjangan | Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium Insurance scheme with maximum premium of 25% of salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (*at cost*) Provided at cost
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Diberikan lumpsum, maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan Provided lumpsum, maximum 30% of salary per month. Provided if there is no housing allowance
3	Fasilitas | Facility	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan skema operational lease Provided 1 (one) unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease scheme
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
	Club Membership Club Membership	Maksimal pada 2 (dua) club Maximum at 2 (two) clubs
	Biaya Representasi Representation Cost Facility	Diberikan dalam bentuk Corporate Credit Card Provided in the form of Corporate Credit Card
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Bussiness Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur
Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium | Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 50% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 50%
2	Tunjangan | Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium Insurance scheme with maximum premium of 25% of salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (*at cost*) Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3	Fasilitas | Facility	
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Bussiness Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

Remuneration Structure and Facilities for Managing Directors

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium | Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 90% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 90%
2	Tunjangan | Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium Insurance scheme with maximum premium of 25% of salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (*at cost*) Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3	Fasilitas | Facility	
	Kesehatan Health	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan skema operational lease Provided 1 (one) unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease scheme
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Bussiness Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Remuneration Structure and Facilities for Executive Director and Managing Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dalam 1 tahun Amount Received by the Executive Director and Managing Directors for 1 Year		Type of Remuneration and Other Facilities
	Orang Person	Jumlah (Rupiah) Amount (Rupiah)	
Gaji dan Tunjangan	6	19,332,586,054	Salary & Benefits
Tantiem	6	0	Tantiem
Fasilitas lain dalam bentuk Natura	6	4,007,824,199	Other benefits in kind
Total	**6**	**23,340,410,253**	**Total**

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Anggota Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dalam 1 tahun Amount Received by the Executive Director and Managing Directors for 1 Year		Type of Remuneration and Other Facilities
	Orang Person	Jumlah (Rupiah) Amount (Rupiah)	
Gaji dan Tunjangan	5	7,381,619,764	Salary & Benefits
Tantiem	5	0	Tantiem
Fasilitas lain dalam bentuk Natura	5	2,057,528,619	Other benefits in kind
Total	**5**	**9,429,148,383**	**Total**

Kelompok Jumlah Remunerasi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Group of Remuneration for Executive Director and Managing Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Orang Total Personnel	Type of Remuneration and Other Facilities
Di atas Rp2 miliar	6	Above Rp2 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	0	Between Rp1 billion to Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1miliar	0	Between Rp500 million to Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	0	Below Rp500 million

Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Direktur

Group of Remuneration for Members of the Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Orang Total Personnel	Type of Remuneration and Other Facilities
Di atas Rp2 miliar	3	Above Rp2 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1	Between Rp1 billion to Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1miliar	0	Between Rp500 million to Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	1	Below Rp500 million

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2020, rasio ini meliputi:

Highest and Lowest Salary Ratio

Indonesia Eximbank monitors the highest and lowest salary ratio within the Company as part of GCG practices. The ratio in 2020 is as follows:

No.	Rasio Gaji Ratio of Salary	Kali Times	
		Gaji Pokok Basic Salary	Take Home Pay (THP)
1.	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi Ratio of highest to lowest employee salary	21,2	15,76
2.	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi Ratio of highest to lowest Managing Directors Salary	1	1
3.	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi Ratio of highest to lowest the Board of Directors Salary	1	1
4.	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawaii tertinggi Highest salary ratio for Managing Directors vs employee	1,21	1,21

Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan dalam Kontrak manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (Cascading) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada RKAT antara lain sebagai berikut:

Executive Director & Managing Directors Performance Indicators for Remuneration Stipulation

The performance indicators of the Executive Director and Managing Directors are stipulated in the beginning of the year through the ratification meeting of Annual Work & Budget Plan as stated in the management Contract between the Board of Directors and Minister of Finance c.q. Director General of State Treasury. Furthermore, the management contract cascades between the Managing Directors and Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director.

The Director's performance assessment is reflected from the realization of performance indicators achievements in the management contract which is part of the targets set forth in the Annual Work & Budget Plan, among others are:

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Capaian Indikator Kinerja Utama Lembaga 2020
2020 Key Performance Indicators Achievement

Per 31 Desember 2020 | As of 31 December 2020

Sasaran Strategis Strategic Targets		No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Weights (%)	Realisasi Realization	Target Targets	Capaian Achievements
Perspektif Mandat dan Keuangan Mandate and Financial Perspective				40,0%			95,3%
IEB-1	Pelaksanaan kegiatan menghasilkan dan/atau menghemat devisa serta peningkatan kapasitas usaha Implementation of activities to generate and/or save foreign exchange and increase business capacity	1	Penyaluran Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa *Outstanding* Pembiayaan, *Outstanding* Penjaminan, *Outstanding* Asuransi dan Volume *Trade Finance* Disbursement of National Export Financing (NEF) such as Outstanding Financing, Outstanding Guarantee, Outstanding Insurance and Trade Finance Volume	7,5%	63%	100%	63,5%
			a. Outstanding Pembiayaan Outstanding Financing		90.408	96.065	94,1%
			b. Outstanding Penjaminan Outstanding Guarantee		9.909	40.073	24,7%
			c. Outstanding Asuransi Outstanding Insurance		8.109	8.356	97,0%
			d. Volume Trade Finance		6.107	16.046	38,1%
		2	Peningkatan Penjaminan Kredit Bank *(Bank Guarantee)* Bank Loan Guarantee Increase	5,0%	1.553	3.000	51,8%
		3	*Reprofiling* Pembiayaan dengan fokus pada segmen UKME, UMKM dan UMBE Financing Reprofiling with a focus on the SME, MSME and UMBE segments	5,0%	15,64%	16,13%	97,0%
		4	Jumlah pelaku usaha segmen mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang melakukan ekspor perdana di kawasan Indonesia Timur Number of micro, small, medium enterprises and cooperative segments that carry out initial exports in the Eastern Indonesia region	2,5%	4	3	120,0%
IEB-2	Optimalisasi pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Optimization of the National Interest Account (NIA) implementation	5	Persentase Pelaksanaan dan Penyaluran Dana PKE Percentage of Implementation and Disbursement of NIA Funds	5,0%			98,1%
			a. Jumlah *new disbursement* di 2020 Total new disbursements in 2020		1.523	2.000	76,2%
			b. Jumlah proposal UKM PKE yang disetujui Number of approved NIA SME proposals		25	10	120,0%

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Sasaran Strategis Strategic Targets		No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Weights (%)	Realisasi Realization	Target Targets	Capaian Achievements
IEB-3	Pengelolaan keuangan yang optimal dan berkelanjutan Optimal and sustainable financial management	6	Pemenuhan raio Net Interest Margin (NIM) Fulfilment of Net Interest Margin (NIM) ratio	7,5%	0,77%	0,56%	120,0%
		7	*Cost Efficiency Ratio* (CER)	7,5%	61,86%	78,28%	120,0%
Perspektif Stakeholder dan Customer Stakeholders and Customers Perspective				**5,0%**			**120,0%**
IEB-4	Peningkatan peran LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Increasing the role of Indonesia Eximbank as a Special Mission Vehicle (SMV)	8	Jumlah kontrak atau transaksi baru ekspor yang dihasilkan hari kegiatan Business to Business (B2B) Matchmaking Number of new export contracts or transactions generated on the day of Business to Business (B2B) Matchmaking	2,5%	13	10	120,0%
		9	Pelaksanaan kegiatan sinergi antar Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Implementation of synergy activities between the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV)	2,5%	7	3	120,0%
Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspective				**45,0%**			**75,7%**
IEB-5	Penguatan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Lembaga yang baik Strengthening Risk Management and Good Governance	10	Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko bagi kegiatan Bisnis Lembaga (*Portfolio Guideline* dan *Industries Risk Acceptance Criteria*) Implementation of Risk Management Policy for Institutional Business activities (Portfolio Guideline and Industries Risk Acceptance Criteria)	5,0%	100%	100%	100,0%
			Portfolio Guideline		100%	100%	100,0%
			Industries Risk Acceptance Criteria		100%	100%	100,0%
		11	Profil risiko Lembaga dan *Framework sui* generis Institution risk profile and sui generis Framework	5,0%	63%	100%	63,3%
		12	Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga Results of GCG Assessment of Institution	5,0%	82,45%	85%	97,0%
		13	Penyempurnaan Manual / SOP terkait pelaksanaan PKE Completion of Manuals / SOPs on NIA implementation	2,5%	33%	100%	33,3%
IEB-6	Penguatan riset untuk mendukung Daya Saing Strengthening the research to support competitiveness	14	Tersedianya riset untuk mendukung daya saing ekspor dari sisi potensi dan risiko Availability of research to support export competitiveness in terms of potential and risk	2,5%	4	4	100,0%

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Sasaran Strategis Strategic Targets		No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Weights (%)	Realisasi Realization	Target Targets	Capaian Achievements
IEB-7	Perbaikan Kualitas Pembiayaan Financing Quality Improvement	15	Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *Netto* Net Non-Performing Loans Ratio (NPL)	15,0%	11,49%	14,01%	118,0%
		16	Perbaikan kualitas aset pembiayan *netto* Improvement of net financing asset quality	10,0%	(699)	465	0,0%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growing Perspective				10,0%			107,1%
IEB-8	Organisasi yang *agile* Agile organization	17	Penataan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan Lembaga Structuring the Organizational Structure according to the needs of the Institution	2,5%	120%	100%	120,0%
IEB-9	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkinerja tinggi Competent and high-performing Human Resources (HR)	18	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM HR Capability and Capacity Building	2,5%	109%	100%	108,6%
IEB-10	Sistem Manajemen Informasi yang andal Reliable Information Management System	19	Integrasi Sistem dan Teknologi System and Technology Integration	5,0%	100%	100%	100,0%
Total				**100%**			**88,8%**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut, LPEI wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna membantu Direktur Eksekutif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pursuant to Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank can conduct Sharia-based business activities. In performing business activities based on Sharia principles, and implementing the principles of GCG, the Sharia Supervisory Board (SSB) shall support the Executive Director.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0017.01/PDE/07/2020 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoneisa.

- Memberikan nasihat dan saran (advisory) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi kegiatan LPEI agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS antara lain meliputi:
  - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI.
  - Mengawasi, memberikan masukan dan nasehat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
  - Merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya.
  - Melakukan review secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Syariah LPEI.
  - Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan assessment kepatuhan syariah di kantor-kantor wilayah LPEI, termasuk melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf kanwil dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh kantor pusat atau kanwil.
  - Menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dan DSN-MUI secara semesteran sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPEI. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup bagi LPEI untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Duties and Responsibilities

Implementation of duties of Sharia Supervisory Board is carried out based on the Executive Director Regulation No. 0017.01/PDE/07/2020 regarding the Sharia Supervisory Board Charter of Indonesia Eximbank.

- Provide advisory and recommendations to the Executive Director and supervise the Company's activities to comply with sharia principles.
- The implementation of SSB's duties and responsibilities includes:
  - Assess and ensure compliance with sharia principles for all policies, operational guidelines, products, transactions and Islamic financial reports issued by the LPEI.
  - Supervise, provide input and advice on the development of new sharia products to comply with the DSN-MUI Fatwa.
  - Recommending the LPEI to submit a fatwa to the DSN-MUI for LPEI's new sharia products for which there is no fatwa.
  - Conduct periodic reviews at least once in three months on the fulfillment of Sharia principles on the implementation of LPEI Sharia business activities.
  - Supervising, inspecting and assessing sharia compliance in LPEI regional offices, including providing education and coaching to regional office staff and customers recommended by the head office or regional offices.
  - Prepare a semesterly DPS Supervisory Report to the Executive Director and DSN-MUI according to the format stipulated by LPEI. The report as referred to in this paragraph must be submitted no later than 2 (two) months after the end of the semester period.
- SSB members shall provide sufficient time for Indonesia Eximbank to carry out their duties and responsibilities optimally.

Keanggotaan

Per 31 Desember 2020, anggota Dewan Pengawas Syariah LPEI adalah sebagai berikut:

Membership

As of December 31, 2020, membership of Sharia Supervisory Board is as follows:

Ketua Chairman	Kanny Hidaya, SE., MA
Anggota Tetap Permanent Member	Dr. Yulizar D. Sanrego, MEc

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Member Profile

Kanny Hidaya, SE., MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

54 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Tempat / Tanggal Lahir Place / Date of Birth	Jakarta, 8 Juni 1966 Jakarta, 8 June 1966	
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0020/KDE/05/2013 Executive Director Decree No. 0020/KDE/05/2013	
Periode Jabatan Position Period	21 Mei 2013 – sekarang 21 May 2013 – present	
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Assistant Vice President, Asset Management and Product Development • PT Danareksa (Persero) (Maret 1994 - Oktober 2001) • Senior Consultant, Financial Information Technology Supervisor, PT Sumarno Pabottingi Management and Business Consulting (Oktober 1990 – Februari 1994) • Deputy Secretary of Executive Committee of National Sharia Board, Indonesia Council of Ulama (Badan Pelaksana Harian-DSNMUI) (2005 – sekarang) • Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Mega Syariah (2003 – sekarang) • Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank DKI Syariah, Sharia Unit (2003 – sekarang) • Member of Sharia Supervisory Board of PT AXA Insurance, Sharia Unit (2009 – sekarang) • Member of Sharia Supervisory Board of PT bahana Artha Ventura, Sharia Unit (2009 – sekarang)	• Assistant Vice President, Asset Management and Product Development • PT Danareksa (Persero) (March 1994 - October 2001) • Senior Consultant, Financial Information Technology Supervisor, PT Sumarno Pabottingi Management and Business Consulting (October 1990 – February 1994) • Deputy Secretary of Executive Committee of National Sharia Board, Indonesia Council of Ulama (Badan Pelaksana Harian-DSNMUI) (2005 – now) • Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Mega Syariah (2003 – present) • Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank DKI Syariah, Sharia Unit (2003 – present) • Member of Sharia Supervisory Board of PT AXA Insurance, Sharia Unit (2009 – present) • Member of Sharia Supervisory Board of PT bahana Artha Ventura, Sharia Unit (2009 – present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1993) • Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2004.	• Bachelor of Economy, Universitas Indonesia (1993) • Magister Islamic Economy, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta in 2004.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dr. Yulizar D. Sanrego MEc
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

47 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Tempat / Tanggal Lahir Place / Date of Birth	Bogor, 4 Juli 1973 Bogor, 4 July 1973
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0020/KDE/05/2013 Executive Director Decree No. 0020/KDE/05/2013
Periode Jabatan Position Period	21 Mei 2013 – sekarang 21 May 2013 – present
Pengalaman Kerja Professional Experience	Kepala Institut Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STEI Tazkia Head of Research and Community Empowerment Institute of STEI Tazkia
Sertifikasi Certification	Dewan Pengawas Syariah (DPS) – BPRS. DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010) Sharia Supervisory Board certificate - BPRS. DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Islam / Muamalah dari Universitas Djuanda, Indonesia. • Master Ekonomi dan Pembiayaan Islam dari International Islamic University Malaysia • Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. • Bachelor Degree in Islamic Economy / Muamalah from Universitas Djuanda, Indonesia • Master's Degree in Islamic Economy & Finance from International Islamic University Malaysia • Doctorate degree in Islamic Economy from Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Mekanisme Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dari DPS dapat dilakukan melalui rapat DPS yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih bilamana dianggap perlu oleh Ketua DPS.
2. Wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
3. Pemanggilan Rapat disampaikan oleh Unit Kerja Bisnis Syariah kepada setiap anggota DPS sekurang-kurangnya 5 hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan rapat dimaksud pada butir 3 harus telah mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat diadakan di tempat kedudukan LPEI atau tempat lain yang disetujui DPS dan LPEI.
6. DPS dan/atau LPEI dapat meminta kehadiran pejabat-pejabat tertentu di dalam Rapat DPS untuk memaparkan usulan yang membutuhkan opini dan persetujuan DPS.
7. Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS.
8. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambill keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh 100% dari jumlah anggota dPS yang sedang menjabat.
9. Keptutusan Rapat DPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. DPS dapat menetapkan keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DPS, dengan ketentuan semua anggota DPS telah dibertahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
10. Berita acara opini dan persetujuan DPS harus dibuat oleh Unit Kerja Bisnis Syariah dan diberi nomor registrasi dan tanggal serta ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS.
11. Dalam hal DPS memandang perlu melakukan kajian untuk dapat memberikan opini dan persetujuan atas suatu usulan, wajib dicantumkan di dalam Berita Acara Opini dan persetujaun DPS dan menyantumkan batas penyampaian hasil kajiannnya kepada LPEI.

Mechanism for Provision of Advice and Supervision

The frequency and method of SSB advisory can be implemented through SSB meetings held in accordance with the following stipulations:

1. Held at least 1 (one) time in 1 (one) month or more if deemed necessary by SSB.
2. Shall be attended by all SSB members physically at least 12 (twelve) times a year.
3. Summons to the Meeting shall be conveyed by the Sharia Business Unit to each DPS member at least 5 days before the meeting is held.
4. Summons to meeting referred to in point 3 must include the agenda, date, time and venue of the meeting.
5. Meetings are held at the domicile of LPEI or other places approved by SSB and LPEI.
6. SSB and/or LPEI may request the attendance of certain officials at the SSB Meeting to present proposals that require SSB opinion and approval.
7. The SSB meeting is chaired by the Chairman of the SSB.
8. SSB meetings are valid and have the right to adopt binding decisions if attended by 100% of the current DPS members currently serving.
9. The decision of the SSB Meeting must be made based on deliberation to reach a consensus. SSB can make a valid decision without holding a SSB Meeting, provided that all SSB members have been notified in writing of the proposed decision and all SSB members give their approval of the proposal submitted in writing and sign the agreement.
10. Minutes of opinion and approval of SSB must be made by the Sharia Business Unit and given a registration number and date and signed by the Chairman and members of SSB.
11. In the event that SSB deems it necessary to conduct a study to be able to provide an opinion and approval on a proposal, it must be included in the Minutes of Opinion and SSB approval and state the limit for submitting the results of the study to LPEI.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

12. Dalam hal DPS menilai usulan unit kerja untuk mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS harus memberikan solusi dan advisory agar usulan unit kerja menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
13. Berita acara opini dan persetujuan DPS merupakan bukti sah, baik untuk para anggota DPS maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat DPS yang bersangkutan.
14. Berita acara opini dan persetujuan DPS wajib diadministrasikan dengan baik oleh unit Kerja Bisnis Syariah dan Unit Kerja Kepatuhan.
15. Wajib dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) anggota DPS secara fisik paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.

12. In the event that SSB considers that the proposed work unit to obtain SSB Opinion and Approval is not in accordance with Sharia Principles, SSB must provide solutions and advisories so that the proposed work unit is in accordance with sharia principles.
13. Minutes of opinion and approval of SSB are valid evidence, both for SSB members and for other parties regarding decisions taken at the SSB Meeting concerned.
14. Minutes of opinion and approval by DPS must be properly administered by the Sharia Business Unit and the Compliance Unit.
15. Must be physically attended by at least 2 (two) DPS members at least 12 (twelve) times a year.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali yang dilakukan secara daring, dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Meetings

During 2020, the Sharia Supervisory Board has held 10 online meetings, with attendance levels and meeting agendas as follows:

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Meetings Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Frekuansi Kehadiran Attendance	Presentase Kehadiran Attendance Percentage
Kanny Hidaya, SE., MA	Ketua | Chairman	10	10	100%
Dr. Yulizar D. Sanrego, MEc	Anggota | Member	10	10	100%

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	22-Jan-20 Jan 22, 2020	Rapat Koordinasi Direktur Eksekutif bersama Dewan Pengawas Syariah. Executive Director Coordination Meeting with the Sharia Supervisory Board.
2	19-Feb-20 Feb 19, 2020	Rencana Pembiayaan Project Nasabah Menggunakan Skema Syariah. Project Debtor Financing Plan Using Sharia Schemes.
3	05-Mar-20 Mar 05, 2020	Konversi Pembiayaan Project Nasabah Menggunakan Skema Syariah dan Tanggapan PerK No. 161POJK. 04/2015. Converting Debtor Project Financing Using Sharia Schemes and Responses to PerK No. 161POJK. 04/2015.
4	24-Jul-20 Jul 24, 2020	Pembahasan Konversi Pembiayaan Nasabah. Discussion on Conversion Financing Debtor.
5	08-Sep-20 Sep 08, 2020	Program Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional. National Economic Recovery Guarantee Program.
6	10-Sep-20 Sep 10, 2020	Program Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional. National Economic Recovery Guarantee Program.
7	04-Nov-20 Nov 04, 2020	Pembahasan Tunggakan Denda Nasabah. Discussion on Arrears Fines Debtor.
8	12-Nov-20 Nov 12, 2020	Pembahasan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nasabah. Discussion on Musyarakah Mutanaqishah Financing Agreement Debtor.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	16-Nov-20 Nov 16, 2020	Pembahasan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nasabah. Discussion on Musyarakah Mutanaqishah Financing Agreement Debtor.
10	15-Dec-20 Dec 15, 2020	Informasi mengenai Departemen Syariah Advisory. Pembiayaan MMQ untuk Refinancing Aset Dengan Kondisi Tanpa Adanya Dasar Laporan Appraisal Yang Memadai. Lain-lain dan Penetapan Rapat DPS Bulan Januari 2021. Information regarding the Sharia Advisory Department. MMQ Financing for Asset Refinancing in the absence of an adequate basis for appraisal report. Others and the Determination of the DPS Meeting for January 2021.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstern dan intern, dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Audit.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit serta tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJ K) No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0003/ PDD/04/2018 tanggal 06 April 2018. Piagam Komite Audit berfungsi sebagai landasan kerja bagi anggota Komite dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Direktur.

Komposisi dan Profil Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, terjadi beberapa kali perubahan susunan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Dewan Direktur (KDD) Nomor 0003/KDD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by the Board of Directors to support the implementation of duties and function of the Board of Directors in ensuring effectiveness of internal control system and effectiveness of duties implementation of external and internal auditors, whereby the duties and functions are stipulated in the Audit Committee Charter.

Legal References

The establishment of the Audit Committee and its duties and functions refers to the prevailing regulations, among others:

1. Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning Good Corporate Governance of Indonesian Export Financing Agency.
2. Financial Services Authority (OJ K) Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017, concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities.

Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter has been prepared and determined based on the Board of Directors Decree No. 0003/PDD/04/2018 dated April 6, 2018. The Audit Committee Charter serves as a guideline for the Committee's members in performing their roles, duties, and responsibilities to assist the Board of Directors.

Composition and Profile of the Audit Committee

There were several changes in the composition of the Audit Committee throughout 2020. Based on the Decree of the Board of Directors (KDD) No. 0003/ KDD/02/2019 dated February 14, 2019 concerning the Membership of the Audit Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Felia Salim	Ketua Komite Audit | Chairman of the Audit Committee
Deddy Supriyanto	Anggota | Member
Gunarso	Anggota | Member

Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0009/ KDE/01/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Perubahan Komposisi Komite Audit, susunan Komite Audit LPEI adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Executive Director (KDE) No. 0009/KDE/01/2020 dated February 18, 2020 concerning Changes in the Composition of the Audit Committee, the composition of the LPEI Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Rijani Tirtoso	Ketua Komite Audit | Chairman of the Audit Committee
Ricky Dompas	Anggota | Member
Yulida S Marbun	Anggota | Member

Selanjutnya, sesuai Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit, komposisi anggota Komite Audit hingga berakhirnya tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Furthermore, according to the Decree of the Executive Director (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 concerning Audit Committee Memberships, the composition of the members of the Audit Committee until the end of the 2020 fiscal year is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Rijani Tirtoso	Ketua Komite Audit | Chairman of the Audit Committee
Untung Dwiyono	Anggota | Member
Yulida S Marbun	Anggota | Member

Profil Komite Audit 2020
Audit Committee Profile 2020

Rijani Tirtoso Ketua Komite Audit Merangkap Anggota Dewan Direktur Chairman of the Audit Committee concurrently Member of the Board of Directors	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director Decree (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 concerning the Membership of the Audit Committee
Profil Profile	Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini. Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

Untung Dwiyono

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director Decree (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 concerning the Membership of the Audit Committee
Periode Jabatan Term of office	27 Juli 2020 – sekarang 27 July 2020 - present
Profil | Profile	
Usia Age	57 tahun 57 years old
Kewarga negaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Pendidikan Education	Menyelesaikan pendidikan di bidang Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991 dan Magister di bidang Business Administration University of Colorado at Denver, USA pada tahun 1996. Graduated in Accounting at the State College of Accountancy in 1991 and Masters in Business Administration at the University of Colorado at Denver, USA in 1996.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI (1985 – sekarang) • Anggota Komite Audit PT Dahana (2013 – 2015) • Anggota Komite Audit PT BNI Securities (2011 – 2013) • Anggota Komite Audit PT Balai Pustaka (2006 – 2011) • Anggota Komite Risiko PT Hutama Karya (2005 – 2009) • Anggota Divisi Forensic and Asset Tracing BPPN (2000 – 2005) • Auditor of the Inspectorate General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1985 - present) • Member of the Audit Committee of PT Dahana (2013 - 2015) • Member of the Audit Committee of PT BNI Securities (2011 - 2013) • Member of the Audit Committee of PT Balai Pustaka (2006 - 2011) • Member of the Risk Committee of PT Hutama Karya (2005 - 2009) • Member of the Forensic and Asset Tracing Division of IBRA (2000 - 2005)

Yulida S Marbun

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director Decree (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 concerning the Membership of the Audit Committee
Periode Jabatan Term of office	18 Februari 2020 – sekarang 18 February 2020 – present
Profil | Profile	
Usia Age	57 tahun 57 years old
Kewarga negaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Pendidikan Education	Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan Magister di bidang Ekonomi Manajemen di STIE IBEK pada tahun 2000. Obtained a Bahcelor Degree in Agriculture from the Institute of Agriculture Bogor in 1987 and Master of Economic Management at STIE IBEK in 2000.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Audit Manager/Department Head di KP Direktorat Internal Audit 2008 - 2014 (Vice President) • LF Risk Management di Mandiri University - Bank Mandiri 2014-2015 (Vice President) • Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (Vice President) • Audit Manager/Department Head at Head Office Internal Audit Directorate 2008 - 2014 (Vice President) • LF Risk Management at Mandiri University - Bank Mandiri 2014-2015 (Vice President) • Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (Vice President)

Periode dan Masa Jabatan

Pengaturan masa jabatan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit. Regulasi dan pedoman kerja tersebut menetapkan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

Period and Terms of Office

The tenure of the Audit Committee refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee and the Audit Committee Charter. The regulations and guidelines stipulate the Audit Committee's tenure cannot exceed the Board of Directors' term. The Audit Committee may be re-elected only for the next period.

The Board of Directors may terminate member of the Audit Committee who is not a member of the Board of Directors if the concerned member is deemed to not properly perform as stated in the Appointment Decree. If deemed necessary, the Board of Directors may reappoint members of the Audit Committee who are not members of the Board of Directors after their tenure has ended.

Independensi Anggota Komite

Piagam Komite Audit LPEI telah menetapkan persyaratan independensi anggota Komite Audit yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Direktur Eksekutif, Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.
3. Bukan merupakan karyawan kunci LPEI dalam 6 bulan terkahir sebelum diangkat oleh Dewan Direktur.
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material lembaga.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan/atau non aidot atau jasa konsultasi lainnya kepada LPEI dalam 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Direktur.
6. Bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi tersebut di atas.

Committee Members Independence

The Company's Audit Committee Charter has stipulated the independence requirements of the Audit Committee members, which are:

1. Do not have blood and affinity to the second degree, either in a straight line or a sideways line with the Executive Director, the Board of Directors and the Executive Director of the Company.
2. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
3. Not a key employee of the Company in the last 6 months before being appointed by the Board of Directors.
4. Do not have direct or indirect personal interest in the material information of the institution.
5. Is not a personnel in a Public Accountant Firm, Legal Consulting Firm or other party that provides audit and/or non-aid services or other consulting services to Indonesia Eximbank in the last 6 months prior to being appointed by the Board of Directors.
6. Willing to make and sign a written statement relating to the independence requirements mentioned above.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

All members of the Audit Committee have met all the criteria for independence and are able to carry out their duties independently. In carrying out its duties, the Audit Committee cannot be influenced by any party.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

All members of the Audit Committee also have no affiliation. This relationship is related to finance, share management and/or family relations with the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and/or Shareholders.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, terutama mengacu pada ketetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang sejalan dengan regulasi lainnya. Pada Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tugas Komite Audit, yaitu:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Direktur.

Duties and Responsibilities

The duties of Audit Committee refer primarily to the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Corporate Governance of Indonesia Eximbank, which are aligned with other regulatory. In the Article 35 of the Minister of Finance Regulation, the Audit Committee duties are as follows:

1. Ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditor duties.
2. Monitoring and evaluation on:
   a. Duty implementation of the Internal Audit Unit (IAU);
   b. Appropriateness of audit by Public Accounting Firm with the prevailing audit standards;
   c. Appropriateness of Financial Statements with the prevailing accounting standards; and
   d. Following ups the IAU and Public Accountant Firm findings by the Executive Director
3. Providing recommendation to the Board of Directors on the appointment of Public Accounting Firm.

Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2020, anggota Komite Audit ikut berpartisipasi dalam program pengembangan sebagai berikut:

Committee Development Program

During 2020, members of the Audit Committee participated in the following development programs:

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

Nama Name	Jenis Pelatihan / Seminar Training / Seminar Types	Penyelenggara Organizers	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan Event Dates and Locatons
Untung Dwiyono	*Visualizing the New Normal in Bank Lending*	Bankers Association for Risk Management	2 Desember 2020 di Jakarta December 2, 2020 in Jakarta
Yulida S Marbun	*Visualizing the New Normal in Bank Lending*	Bankers Association for Risk Management	2 Desember 2020 di Jakarta December 2, 2020 in Jakarta

Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan program kerja Komite Audit. Selama tahun 2020 Komite Audit melangsungkan rapat sebanyak 55 kali, antara lain rapat internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit.

Berikut ini rincian kegiatan rapat Komite Audit tahun 2020:

Audit Committee Meetings

The Audit Committee Charter stipulates that the Audit Committee must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months to complete the Audit Committee work program. During 2020 the Audit Committee held 55 meetings, including internal Audit Committee meetings and joint Audit Committee meetings with internal audit and external audit.

The following are details of the 2020 Audit Committee meeting activities:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran
Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Jumlah Rapat Meeting Total	Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rijani Tirtoso	55	55	100%
Yulida S. Marbun	55	55	100%
Untung Dwiyono**	31	28	90,32%
Ricky Dompas*	14	14	100 %
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Voting Members			

Keterangan | Description:
* Masa jabatan Ricky Dompas berakhir pada 18 Mei 2020 | Ricky Dompas' term of office ends on 18 May 2020
** Untung Dwiyono sejak 27 Juli 2020 | Untung Dwiyono since July 27, 2020

Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
Rapat Internal Komite Audit Audit Committee Internal Meetings			
1	27 Feb 2020 Feb 27, 2020	Perkenalan dan Pembahasan Tugas Audit untuk waktu terdekat. Introduction and Discussion of Audit Tasks for the nearest future.	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S Marbun 3. Ricky Dompas 4. Yoseph Tri 5. Saeful Hendra
2	17 Mar 2020 Mar 17, 2020	Pembahasan Temuan KAP EY Discussion on the Findings of KAP EY	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S Marbun 3. Ricky Dompas 4. Yoseph Tri 5. Saeful Hendra

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
3	23 Mar 2020 Mar 23, 2020	DMTL dan BPK DTML and BPK	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S Marbun 3. Ricky Dompas 4. Yoseph Tri 5. Saeful Hendra
4	2 Apr 2020 Apr 2, 2020	1. Pembahasan LHP Final Audit BPK. 2. Review Rencana Audit Tahun 2020 1. Discussion of BPK's Final Audit LHP. 2. Review the 2020 Audit Plan	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S Marbun 3. Ricky Dompas 4. Yoseph Tri 5. Saeful Hendra 6. Tri Rianto
5	14 Apr 2020 Apr 14, 2020	1. Penyusunan Profil Risiko yang menjadi salah satu dasar penyusunan RAT 2020. 2. Frame work grand design kolaborasi 3 lines of defense 1. Preparation of a Risk Profile which is one of the bases for preparing the 2020 RAT 2. Frame work grand design collaboration 3 lines of defense	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S Marbun 3. Ricky Dompas 4. Yoseph Tri 5. Saeful Hendra 6. Tri Rianto
6	16 April 2020 April 16, 2020	Pembahasan Reformulasi Risk Appetite Statement (RAS) yang akan menjadi salah satu pertimbangan perubahan/adjusment RKAT LPEI dan sebagai dasar tinjauan dalam penyusunan Rencana Audit Tahunan (RAT) 2020 Discussion on the Reformulation of the Risk Appetite Statement (RAS) which will be one of the considerations for changes / adjustments to the LPEI RKAT and as a basis for review in the preparation of the 2020 Annual Audit Plan (RAT)	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Putu 4. Yoseph T. P. 5. Saeful Hendra 6. Rubi Pertama 7. Amir Faisal 8. Ricky Dompas 9. Yulida S. Marbun
7	22 Apr 2020 Apr 22, 2020	Membahas Risk Appetite Statement (RAS) yang harus sejalan dengan Risk Profil LPEI, sehingga menjadi acuan perubahan/adjusment RKAT LPEI. Discussing the Risk Appetite Statement (RAS) which must be in line with the LPEI Risk Profile, so that it becomes a reference for changes/adjustments to the LPEI RKAT.	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Putu 4. Yoseph T. P. 5. Saeful Hendra 6. Rubi Pertama 7. Amir Faisal 8. Ricky Dompas 9. Yulida S. Marbun
8	30 Apr 2020 Apr 30, 2020	Pembahasan terkait agenda kerja menuju penyempurnaan profil risiko, pembuatan risk apptetite statement & dashboard. Discussion related to the agenda of improving the risk profile, creating a risk appetite statement & dashboard.	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Putu 4. Yoseph T. P 5. Saeful Hendra 6. Rubi Pertama 7. Amir Faisal 8. Ricky Dompas 9. Yulida S. Marbun
9	7 Mei 2020 May 7, 2020	Penyempurnaan Risk Profile dan RAS Improvement of the Risk Profile and RAS	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Putu 4. Yoseph T. P 5. Saeful Hendra 6. Rubi Pertama 7. Amir Faisal 8. Ricky Dompas 9. Yulida S. Marbun

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
10	13 Mei 2020 May 13, 2020	Pembahasan Risk Appetite Statement Discussion on the Risk Appetite Statement	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Putu 4. Yoseph T. P 5. Saeful Hendra 6. Rubi Pertama 7. Amir Faisal 8. Ricky Dompas 9. Yulida S. Marbun
11	19 Mei 2020 May 19, 2020	Pembahasan Risk Appetite Statement Discussion on the Risk Appetite Statement	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Putu 4. Yoseph T. P 5. Saeful Hendra 6. Rubi Pertama 7. Amir Faisal 8. Ricky Dompas 9. Yulida S. Marbun
12	22 Mei 2020 May 22, 2020	Pembahasan RPDD Kebijakan Pembiayaan Discussion on RPDD Financing Policy	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Tri Wibowo 4. Fandhy Siregar 5. Yulida S. Marbun
13	28 Mei 2020 May 28, 2020	ITSP Data Manajemen	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Chesna F. Anwar 4. Moh. Guntur 5. Restiana Ie Tjoe 6. Priyo Basuki 7. Yoseph T 8. Hendratno Tri Wibowo 9. Fandhy Siregar
14	28 Mei 2020 May 28, 2020	1. Penyusunan Rencana Kerja Divisi Internal Audit 2. Penyusunan Rencana Kerja Divisi Post Mortem & Forensic Audit 3. Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit 1. Preparation of the Internal Audit Division Work Plan 2. Preparation of Work Plan for the Post Mortem & Forensic Audit Division 3. Preparation of the Audit Committee Work Plan	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Restiana Ie Tjoe 4. Yoseph T 5. Hendratno Tri Wibowo 6. Fandhy Siregar
15	29 Mei 2020 May 29, 2020	Data Dashboard Manajemen, KAP, GRC, dampak COVID-19, minuta rapat, Hapus Buku, Revisi PDD Pembiayaan Management Dashboard Data, KAP, GRC, the impact of COVID-19, meeting minutes, Write-offs, Revised PDD Financing	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Tri Wibowo 4. Fandhy Siregar 5. Yulida S. Marbun
16	29 Jun 2020 Jun 29, 2020	1. Revisi RKAT Internal Audit Tahun 2020 dan RJP Internal Audit Tahun 2020 – 2024 2. Audit Charter 3. Revisi RKAT Komite Audit Tahun 2020 dan RJP Komite Audit Tahun 2020 – 2024 1. Revised RKAT Internal Audit for 2020 and RJP for Internal Audit for 2020-2024 2. Audit Charter 3. Revised RKAT for the Audit Committee for 2020 and RJP for the Audit Committee for 2020-2024	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Tri Wibowo 4. Fandhy Siregar 5. Yulida S. Marbun
17	1 Jul 2020 Jul 1, 2020	1. Follow up keputusan Komite Audit yang lalu 2. Pembahasan Piagam Audit & Kode Etik 3. Pembahasan RKAT, RJP internal Audit, Komite Audit 4. Penilaian KAP 5. Rencana dan agenda untuk *joint committee* 1. Follow up on previous Audit Committee decisions 2. Discussion of the Audit Charter & Code of Ethics 3. Discussion on the RKAT, RJP for Internal Audit, and the Audit Committee 4. KAP assessment 5. Plans and agenda for the joint committee	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Yulida S. Marbun 4. Fandhy H. Siregar 5. Hendratno Tri Wibowo 6. Yoseph Tri Purnomosidi

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
18	15 Jul 2020 Jul 15, 2020	1. Pengadaan Jasa Audit Keuangan Tahun 2020 2. GCG LPEI 2019 1. Procurement of Financial Audit Services in 2020 2. 2019 LPEI GCG	1. Rijani Tirtoso 2. Agus Windiarto 3. Chesna F. Anwar 4. Anwar Harsono 5. Wahyu Wibowo 6. Restiana Ie Tjoe L 7. Hendi Wibawa 8. Fandhy Siregar 9. Irene Simanjuntak 10. Yulida S. Marbun
19	23 Jul 2020 Jul 23, 2020	1. SPI 2. Revisi Charter IA & KA 3. Hapus Buku 1. SPI 2. Revised IA & KA Charter 3. Write-offs	1. Rijani Tirtoso 2. Henry Sihotang 3. Chesna F. Anwar 4. Wahyu P Wibowo 5. Restiana Ie Tjoe L 6. M. Rahman R. 7. Yulida S. Marbun 8. Hendratno Tri Wibowo 9. Fandhy H. Siregar 10. Rossiyana 11. Yoseph T.P 12. Irene Simanjuntak 13. Arry Herdian 14. Rio Martha 15. Fariza Anindya
20	7 Agt 2020 Aug 7, 2020	Rapat Pengadaan KAP KAP Procurement Meeting	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Anwar Harsono 4. M. Guntur 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Hendi Wibawa 7. Fandhy Siregar 8. Irene Simanjuntak 9. Janur Nugroho 10. Yudha Yunanto 11. Untung Dwiyono 12. Yulida S. Marbun
21	25 Agt 2020 Aug 25, 2020	Rencana penerbitan surat penunjukan KAP RSM/AAJ sebagai pemenang seleksi Plans to issue a letter of appointment of KAP RSM / AAJ as the winner of the selection	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Anwar Harsono 4. Wahyu P. Wibowo 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Hendi Wibawa 7. Fandhy Siregar 8. Irene Simanjuntak 9. Rossiyana Amir 10. Priyo Basuki 11. Tota Tobing 12. Yudha Yunanto 13. Untung Dwiyono 14. Yulida S. Marbun
22	25 Agt 2020 Agt 25, 2020	1. Kebijakan SPI; 2. Status DMTL Eksternal BPK/OJK/KAP 1. SPI Policy; 2. Status of External BPK / OJK / KAP DMTL	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Fandhy Siregar 4. Untung Dwiyono 5. Yulida S. Marbun

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
23	9 Sep 2020 Sep 9, 2020	Rapat Komite Audit: Profil Debitur LPEI Audit Committee Meetings: LPEI's Debtors Profile	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Anwar Harsono 6. Restiana Ie Tjoe L 7. Titiek Setiyowati 8. Rudi Rinardi 9. Tito Elvano 10. Fandhy Siregar 11. Yoseph T. Purnomo 12. Arry 13. Untung Dwiyono 14. Yulida S. Marbun
24	11 Sep 2020 Sep 11, 2020	Rapat Komite Audit: SPI, Kebijakan AI, SOP Manual Audit Audit Committee Meetings: SPI, AI Policy, Audit Manual SOP	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Fandhy Siregar 4. Untung Dwiyono 5. Yulida S. Marbun 6. Wisda Prasparani
25	17 Sep 2020 Sep 17, 2020	Pembahasan Profil Nasabah LPEI Customer profile discussion	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Titiek Setiyowati 7. Budy Hartono 8. Fandhy H. Siregar 9. Yulida S. Marbun
26	25 Sep 2020 Sep 25, 2020	Pembahasan Profil Nasabah LPEI Customer profile discussion	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Restiana Ie Tjoe L 4. Titiek Setiyowati 5. Rudi Rinardi 6. Budy Hartono 7. Tyas Lugtyastiti 8. Yoseph T. Purnomo 9. Edi Winanto 10. Ryan 11. Fandhy H. Siregar 12. Untung Dwiyono 13. Yulida S. Marbun
27	30 Sep 2020 Sep 30, 2020	Perbaikan proses pengadaan barang/jasa LPEI Improvement of the LPEI goods / services procurement process	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Mohammad Guntur 4. Priyo Basuki 5. Yudha Yunanto 6. Rossiyana Amir 7. Espe Dini 8. Fandhy H. Siregar 9. Adhyatma Ndaru 10. Untung Dwiyono 11. Yulida S. Marbun

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
28	1 Okt 2020 Oct 1, 2020	Pembahasan Profil Nasabah LPEI Customer profile discussion	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Anwar Harsono 6. Restiana Ie Tjoe L 7. Titiek Setiyowati 8. Tyas Lugtyastiti 9. Rosi Oci 10. Budy Hartono 11. Rudi Rinardi 12. Ediwinanto 13. Fandhy H. Siregar 14. Ryan 15. Nova Agustina 16. Yulida S. Marbun 17. Untung Dwiyono 18. Yulida S. Marbun
29	9 Okt 2020 Oct 9, 2020	Pembahasan Profil Nasabah LPEI Customer profile discussion	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Anwar Harsono 6. Restiana Ie Tjoe L 7. Titiek Setiyowati 8. Tyas Lugtyastiti 9. Rosi Oci 10. Ferry S. 11. Mega S. Pradipta 12. Yudhi Kurniawan 13. Fandhy H. Siregar 14. Untung Dwiyono 15. Yulida S. Marbun
30	16 Oct 2020 Oct 16, 2020	Pembahasan Profil Nasabah LPEI Customer profile discussion	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Titiek Setiyowati 7. Tyas Lugtyastiti 8. Rosi Susanti 9. Yoseph Tri Purnomosidi 10. Tito Elvano 11. Ferry S. 12. Onot Sujatmiko 13. Mega S. Pradipta 14. Anggriawan Hamzah 15. Fandhy H. Siregar 16. Untung Dwiyono 17. Yulida S. Marbun

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
31	22 Oct 2020 Oct 20, 2020	Pembahasan Profil Nasabah LPEI Customer profile discussion	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Titiek Setiyowati 7. Tyas Lugtyastiti 8. Yoseph Tri Purnomosidi 9. Ediwinanto 10. Derry Pramudia Pamungkas 11. Gilang Arif Dharmawan 12. Yulia Dwi Ananto 13. Fandhy H. Siregar 14. Untung Dwiyono 15. Yulida S. Marbun
32	4 Nov 2020 Nov 4, 2020	Strategi penyelesaian nasabah bermasalah. Settlement strategies for the debtors with issues.	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Titiek Setiyowati 7. Tyas Lugtyastiti 8. Ferry S. 9. Ediwinanto 10. Budy Hartono 11. Fandhy H. Siregar 12. Baskhara Pratama 13. Yudhi Kurniawan 14. Mega S. Pradipta 15. Okky Singgih 16. Ryan 17. Ibnu Sina 18. Untung Dwiyono 19. Yulida S. Marbun
33	5 Nov 2020 Nov 05, 2020	Laporan hasil audit investigasi kepada Komite Audit. Report on the results of investigative audit to the Audit Committee.	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Henry Sihotang 4. Dikdik Yustandi 5. Wahyu P. Wibowo 6. Restiana Ie Tjoe L 7. Titiek Setiyowati 8. Tyas Lugyastiti 9. Arnold 10. Ichwan Rohmanu 11. Imam Kusmiyadi 12. Mardianto 13. Yanti Sudjarwo 14. Hendratno Tri Wibowo 15. Juli Wibowo 16. Imansyah 17. Saeful Hendra 18. Untung Dwiyono 19. Yulida S. Marbun
34	18 Nov 2020 Nov 18, 2020	Konsultasi dengan KA terkait: 1. Penyampaian RKAT tahun 2020 2. Revisi Penyusunan RKAT tahun 2020 3. Realisasi pemenuhan DMTL eksternal posisi Oktober 2020 Consultation with related KA: 1. Submission of the 2020 RKAT 2. RKAT Preparation 2020 Revision 3. Realization of external DMTL fulfillment for the position of October 2020	1. Rijani Tirtoso B. 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Untung Dwiyono 4. Yulida S. Marbun 5. M Rahman R 6. Fandhy Siregar 7. Tri Hendratno Wibowo 8. Saeful Hendra 9. Tri Rianto Basuki

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
35	19 Nov 2020 Nov 19, 2020	Pemaparan Strategi Pengelolaan Aset Presentation of Asset Management Strategy	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Titiek Setiyowati 7. Anwar Harsono 8. Tyas Lugtyastiti 9. Ediwinanto 10. Yoseph Tri Purnomosidi 11. Baskhara Pratama 12. Fandhy H. Siregar 13. Hendratno Tri Wibowo 14. Untung Dwiyono 15. Yulida S. Marbun
36	26 Nov 2020 Nov 26, 2020	1. RKAT & IKU Compliance 2020. 2. Kebijakan Tata Kelola LPEI. 3. Hasil Potret Compliance 2020 1. RKAT & IKU Compliance 2020. 2. LPEI Governance Policy. 3. Portrait of 2020 Compliance	1. Rijani Tirtoso 2. Restiana Ie Tjoe L 3. Agung Waluyo 4. Wahyu P. Wibowo 5. Sucy Thio 6. Sumarno Fahdy Shafar 7. Agung Saputro 8. Fandhy H. Siregar 9. Saeful Hendra 10. Untung Dwiyono 11. Yulida S. Marbun
37	26 Nov 2020 Nov 26, 2020	Pemaparan Strategi Pengelolaan Aset Presentation of Asset Management Strategy	1. Rijani Tirtoso 2. Chesna F. Anwar 3. Henry Sihotang 4. Restiana Ie Tjoe L 5. Agung Waluyo 6. Titiek Setiyowati 7. Tyas Lugtyastiti 8. Ediwinanto 9. Yoseph Tri Purnomosidi 10. Budy Hartono 11. Baskhara Pratama 12. Gilang Arif Dharmawan 13. Ibnu Sina 14. Ryan W. 15. Satrio 16. Fandhy H. Siregar 17. Untung Dwiyono 18. Yulida S. Marbun
38	1 Des 2020 Dec 1, 2020	1. Matriks Rekomendasi BPK termasuk strategi DMTL investigasi & time line nya. 2. Pending matters untuk BAST. 1. BPK recommendation matrix including the DMTL investigation strategy & its time line. 2. Pending matters for BAST.	1. Rijani Tirtoso 2. Agung Waluyo 3. Restiana Ie Tjoe L 4. Untung Dwiyono 5. Yulida S. Marbun 6. Hendratno Tri Wibowo 7. Fandhy H. Siregar

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
39	3 Des 2020 Dec 3, 2020	Pemaparan Strategi Pengelolaan Aset Presentation of Asset Management Strategy	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Agung Waluyo 6. Tyas Lugtyastiti 7. Yoseph Tri Purnomosidi 8. Derry Pramudia Pamungkas 9. Yulia Dwi Ananto 10. Gilang Arif Dharmawan 11. Hendratno Tri Wibowo 12. Fandhy H. Siregar 13. Untung Dwiyono 14. Yulida S. Marbun
40	10 Des 2020 Dec 10, 2020	Pemaparan Strategi Pengelolaan Aset Presentation of Asset Management Strategy	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Chesna F. Anwar 4. Henry Sihotang 5. Agung Waluyo 6. Tyas Lugtyastiti 7. Yoseph T. Purnomosidi 8. Gilang Arif Dharmawan 9. Anggriawan Hamzah 10. Fandhy H. Siregar 11. Untung Dwiyono 12. Yulida S. Marbun
Rapat Komite Audit dengan KAP Audit Committee Meeting with KAP			
41	3 Dec 2020 Dec 3, 2020	Progres berkala terkait sample yang digunakan oleh KAP-RSM Periodic progress regarding the sample used by KAP-RSM	1. Rijani Tirtoso 2. Agung Waluyo 3. Anwar Harsono 4. Hendi Wibawa 5. Dedy Sukrisnadi 6. Rai Syam 7. Mulyo Basuki 8. Ponda Hidajat 9. Muhammad Iqbal 10. Alex Apriandi 11. Ramdan 12. Michael Wemang 13. Galuh Worohapsari 14. Maulidya Hapsari 15. Dhea Charlene 16. Anarita Pinem 17. Fandhy H. Siregar 18. Untung Dwiyono 19. Yulida S. Marbun
Rapat Gabungan Komite Audit dengan KPR, KRN Audit Committee Joint Meeting with KPR, KRN			
42	6 Mar 2020 Mar 6, 2020	Rencana Kerja Monitoring dan Pemeriksaan Tahun 2020 dan Rencana Penerapan *Integrated Three Lines of Defense.* Year 2020 Monitoring and Inspection Work Plan and Integrated Three Lines of Defense Implementation Plan.	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. Rubi Pertama 5. Ricky Dompas 6. Yulida S. Marbun 7. Yoseph T. Purnomosidi 8. Irene Simandjuntak 9. Tri Rianto Basuki 10. Amir Faisal 11. Ilvon B. Demas 12. Wilsa Arini

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
43	23 Mar 2020 Mar 23, 2020	Pemaparan Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2019. Presentation of the 2019 Semester II RKAT Supervisory Report.	1. Rijani T. Bondan 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. Rubi Pertama 5. Ricky Dompas 6. Yulida Marbun 7. YosephT. Purnomosidi 8. Eka Achdiatna 9. Susilo Wibowo
44	8 Mei 2020 May 8, 2020	Pemaparan draft Risk Appetite Statement dan Profil Risiko LPEI yang bersifat sui generis. Presentation of the draft Risk Appetite Statement and sui generis Risk Profile of LPEI.	1. Felia Salim 2. Rijani Tirtoso 3. Arlinda Imbang Jaya 4. Chesna F. Anwar 5. Wahyu P. Wibowo 6. Restiana L. Tjoe 7. Rubi Pertama 8. Ricky Dompas 9. Yulida Marbun 10. Putu Rahwidhiyasa 11. Amril Faisal 12. Wahyu Pramita
45	14 Juli 2020 Juli 14, 2020	1. Penilaian KAP EY 2. Konsep GRC 3. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) 4. Project Management Initiative 2020 – Project #8 5. Status Progress Trw II 2020 1. Assessment of KAP EY. 2. The GRC concept. 3. Export Special Assignment (PKE). 4. Project Management Initiative 2020 – Project #8. 5. Status of Trw II 2020 Progress	1. Rijani T. Bondan 2. Felia Salim 3. Restiana Ie Tjoe L 4. Rubi Pertama 5. Fandhy Siregar 6. Yulida S. Marbun
46	22 Jul 2020 Jul 22, 2020	1. Kerangka Kerja Integrated GRC. 2. Strategi Legal Action, Target Debitur dan Timeline. 3. Strategi Transformasi dan Komunikasi Internal & Pegawai LPEI. 1. The Integrated GRC Framework. 2. Legal Action Strategy, Debtor Target and Timeline. 3. Transformation Strategy and Internal Communication & LPEI Employees.	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Henry Sihotang 4. Chesna F Anwar 5. Wahyu P Wibowo 6. Restiana Ie Tjoe L 7. Titiek Setiyowati 8. Yulida S Marbun 9. Rubi Pertama 10. Tri Hendratno Wibowo 11. Fandhy Siregar 12. Yoseph T.P 13. T. Dyza Rochadi 14. Irene Simanjuntak 15. Rossiyana Amir 16. Rosi Susanti 17. Hendi Wibawa 18. Arry Herdian 19. Tota Tobing
47	12 Agt 2020 Aug 12, 2020	1. Integritas Data. 2. Kebijakan & Kriteria Perbaikan dan Recovery. 3. Legal Action dan Profiling per Debitur di semua Divisi. 1. Data Integrity. 2. Repair and Recovery Policy & Criteria. 3. Legal Action and Profiling per Debtor in all Divisions.	1. Rijani T. Bondan 2. Felia Salim 3. Henry Sihotang 4. Yulida S. Marbun 5. Rubi Pertama 6. Ferry Sjaifoeilah 7. Tito Adrian Elvano 8. Rudi Rinardi 9. Yoseph T. Purnomosidi 10. Budi Hartono

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
48	28 Agt 2020 Aug 28, 2020	Update DMTL Rekomendasi Audit Eksternal DMTL Update on External Audit Recommendations	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Felia Salim 4. Kasan 5. Chesna F. Anwar 6. Henry Sihotang 7. Dikdik Yustandi 8. Djoko Retnadi 9. Agus Windiarto 10. M. Guntur 11. Wahyu P. Wibowo 12. Restiana Ie Tjoe L 13. Titiek Setiyowati 14. Lorin 15. Yulida S. Marbun 16. Untung Dwiyono 17. Rubi Pertama 18. Hendratno Tri Wibowo 19. Fandhy Siregar 20. T. Dyza Rochadi 21. Yoseph T. Purnomo 22. Saeful Hendra 23. Dimas Rahmadi
49	31 Agt 2020 Aug 31, 2020	Briefing Performance Session Performance Briefing Session	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Kasan 4. Chesna F. Anwar 5. Agus Windiarto 6. Wahyu P. Wibowo 7. Anwar Harsono 8. Yulida S. Marbun 9. Untung Dwiyono 10. Rubi Pertama
50	3 Sep 2020 Sep 3, 2020	1. Rencana Kerja. 2. Giro Operasional. 1. Work Plan. 2. Operational Current Account.	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. M. Guntur 5. Restiana Ie Tjoe L 6. Anwar Harsono 7. Wahyu P. Wibowo 8. Eka Achdiatna S. 9. Priyo Basuki 10. Fandhy H. Siregar 11. Irene Simandjuntak 12. Maryani Saswidyanti 13. Dani Saputra 14. Sofyan 15. Rubi Pertama 16. Untung Dwiyono 17. Yulida S. Marbun
51	5 Oct 2020 Oct 5, 2020	Diskusi perkembangan terakhir LPEI dan peran Dewan Direktur Discussion on the latest LPEI developments and the role of the Board of Directors	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Suminto 4. Kasan 5. Yulida S. Marbun (sebagai Notulis)

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
52	21 Okt 2020 Oct 21, 2020	Materi Usulan Rancangan PDD tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur PDD Design Proposal Material on Guidelines for Board of Directors Work Procedure	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. Agus Windiarto 5. Wahyu P. Wibowo 6. Sumarno 7. Dyza Rochadi 8. Rossiyana Amir 9. Dorcas Siahaan 10. Fahdy Shafar 11. Arif Sjamsuddin 12. Wahyu Pramita 13. Susilo Wibowo 14. Rubi Pertama 15. Untung Dwiyono 16. Yulida S. Marbun
53	5 Nov 2020 Nov 5, 2020	1. Stress Testing. 2. Update MIS Project. 1. Stress Testing. 2. MIS Project Update	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. Agus Windiarto 5. Anwar Harsono 6. Mohammad Guntur 7. Rossiyana Amir 8. Rini Satriani 9. Eka A.S 10. Komang Swandewi 11. Ari Wibowo 12. Herwan Ng 13. Rubi Pertama 14. Untung Dwiyono 15. Yulida S. Marbun
54	1 Des 2020 Dec 1, 2020	Studi Kelayakan atas Pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) Feasibility Study on the Establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV)	1. D. James Rompas 2. Rijani Tirtoso 3. Felia Salim 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. Agus Windiarto 7. Henry Sihotang 8. Chesna F. Anwar 9. Anwar Harsono 10. Wahyu P Wibowo 11. Rubi Pertama 12. Herwan NG 13. Untung Dwiyono 14. Yulida S. Marbun 15. Dyza Rochadi 16. Rossiyana Amir 17. Eka Achdiatna 18. Rosi Susanti 19. Febri Nila 20. Tim Lawyers Tumbuan 21. Tim Deloitte

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
55	23 Des 2020 Dec 23, 2020	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Risk Apetite Statement (RAS) Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and Risk Appetite Statement (RAS)	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. Agung Waluyo 5. Wahyu P Wibowo 6. Putu Rahwidhiyasa 7. Rossiyana Amir 8. Sucy Thio 9. Dyza Rochadi 10. Dwipa Harimurti 11. Fandhy H. Siregar 12. Nabilla Ayu Fauziyyah 13. Rubi Pertama 14. Herwan NG 15. Untung Dwiyono 16. Yulida S. Marbun

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Pada Tahun 2020

Pada 2020, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas nya antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi dan menjalankan fungsi consulting review atas tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK, OJK, KAP) dan auditor internal.
2. Melakukan supervisi dan review atas kinerja KAP tahun buku 2019 dan memberikan advisory atas usulan pemilihan KAP tahun buku 2020.
3. Melakukan consulting review atas program kerja Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit secara berkala.
4. Melakukan sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentang sistem pencegahan dan penindakan serta kebijakan dan prosedur hapus buku.
5. Melakukan sinergi dengan stakeholders utama di bidang pengawasan, antara lain: BPK dan OJK.
6. Menjalankan fungsi consulting review atas RKAT dan IKU LPEI, Internal Audit dan Kepatuhan.
7. Menjalankan fungsi consulting review atas penyusunan dan perbaikan kebijakan, peraturan dan penguatan organisasi internal LPEI serta laporan-laporan Dewan Direktur.
8. Menjalankan tugas-tugas lain dari Dewan Direktur sesuai dengan cakupan tugas Komite Audit antara lain consulting review atas penanganan debitur bermasalah dan debitur yang menjadi catatan auditor.

Audit Committee's Activities in 2020

In 2020, the Audit Committee has carried out various activities in accordance with its duties, including the following:

1. Supervise and carry out the consulting review function on the follow-up to the findings of external auditors (BPK, OJK, KAP) and internal auditors.
2. Supervise and review the performance of KAP for the 2019 financial year and provide advisory on the proposed KAP election for the 2020 financial year.
3. Performing consulting review on the work program of the Internal Audit Division and the Special Audit Division on a regular basis.
4. Synergize with the Inspectorate General of the Ministry of Finance regarding prevention and enforcement systems as well as write-off policies and procedures.
5. To synergize with the main stakeholders in the supervision, including: BPK and OJK.
6. Carrying out the consulting review function on the RKAT and IKU LPEI, Internal Audit and Compliance.
7. Carrying out the consulting review function on the formulation and improvement of policies, regulations and strengthening of the Company's internal organization as well as reports from the Board of Directors.
8. Carrying out other duties of the Board of Directors in accordance with the scope of duties of the Audit Committee, including consulting review on the handling of problem debtors and debtors that are the auditor's record.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam menentukan kebijakan remunerasi dan nominasi, dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Remuneration and Nomination Committee is established by the Board of Directors to assist the duties implementation and function of the Board of Directors in determining the remuneration and nomination policy, whereby its duties and functions are stipulated in the Remuneration and Nomination Committee Charter.

Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Direktur untuk menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009.

Legal References

The Remuneration and Nomination Committee is established by the Board of Directors to formulate and provide recommendations regarding the remuneration and nomination policies as stipulated in Article 37 of the Minister of Finance Regulation No.141/PMK.010/2009.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite Charter)

Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI telah memiliki committee charter dengan No. 0008/PDD/12/2020.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur struktur keanggotaan, kedudukan, wewenang dan batasan tugas, tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan ketentuan kerja, termasuk tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pelaporan, etika dan waktu kerja dan evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remuneration and Nomination Committee Charter

The Company's Remuneration and Nomination Committee already has a committee charter No. 0008/PDD/12/2020.

The Remuneration and Nomination Committee Charter regulates the membership structure, position, authority and limits of duties, duties and responsibilities, working mechanisms and conditions, including meeting rules, decision-making mechanisms, accountability and reporting, ethics and working hours and performance evaluation of the Remuneration and Nomination Committee.

Komposisi dan Profil Komite

Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami beberapa kali perubahan, sejalan dengan terjadinya pergantian pada komposisi Dewan Direktur. Berikut ini rinciannya:

Composition and Profile of the Committee

The composition of members of the Remuneration and Nomination Committee has undergone several changes, in line with changes in the Board of Directors composition. The following are the details:

Periode Januari – Februari 2020 | January – February 2020 Period

Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar | Basis
Suminto	Ketua | Chairman	0002/KDD/12/2018
Arlinda	Anggota | Member	0002/KDD/12/2018
Noviana Rahatmi	Anggota | Member	0002/KDD/12/2018

Periode Februari – Juni 2020 | February – June 2020 Period

Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar | Basis
Suminto	Ketua | Chairman	0011/KDE/02/2020
Arlinda	Anggota | Member	0011/KDE/02/2020
Wahyu P Wiboro	Anggota | Member	0011/KDE/02/2020

Periode Juni – Desember 2020 | June – December 2020 Period

Nama | Name	Jabatan | Position	Dasar | Basis
Suminto	Ketua | Chairman	0035/KDE/06/2020
Kasan	Anggota | Member	0035/KDE/06/2020
Wahyu P Wibowo	Anggota | Member	0035/KDE/06/2020

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Member Profile

Suminto
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi merangkap Anggota Dewan Direktur
Chairman of the Remuneration and Nomination Committee Concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 2018 sampai dengan saat ini berdasarkan KMK No.554/KMK.06/2018. Serve as a Member of the Board of Directors from 2018 to the present based on KMK No. 554 / KMK.06 / 2018.
Profil Profile	Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini. Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

Kasan
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of the Remuneration and Nomination Committee

Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	54 tahun per 31 Desember 2020, Sumedang, 27 Juli 1966 54 years old as of December 31 2020, Sumedang, July 27, 1966
Riwayat Pendidikan Education	• Doktor Ilmu Pertanian, Jurusan Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor (2012) • Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Internasional, Universitas Indonesia (1997) • Sarjana Pertanian, Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Institut Pertanian Bogor (1989) • Doctor of Agricultural Science, Department of Agricultural Economics, Bogor Agricultural Institute (2012) • Master of Management, Department of International Management, University of Indonesia (1997) • Bachelor of Agriculture, Department of Agricultural and Resource Economics, Bogor Agricultural University (1989)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020 Serving as a Member of the Board of Directors since June 8, 2020 based on KMK No. 274/KMK.06/2020

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Wahyu P Wibowo Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2020 , Semarang 15 Agustus 1965. 55 years old as of December 31, 2020, Semarang, August 15, 1965.
Riwayat Pendidikan Education	• Magister in Strategic Management dari Konstanz University (2004) • Magister Management dari Swiss German University (2004) • Program Kepemimpinan INSEAD (Mei 2016 - Januari 2017) • Sarjana Sosial Filsafat STF Driyakara Jakarta) • Magister in Strategic Management from Konstanz University (2004) • Magister in Management from Swiss German University (2004) • INSEAD Leadership Program (May 2016 - January 2017) • Bachelor of Social Philosophy, STF Driyakara Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai SEVP bidang sumber daya manusia berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020 Serving as SEVP in the field of human resources based on KMK No. 274 / KMK.06 / 2020

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur. Dengan demikian, masa jabatannya adalah 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Direktur.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 bulan terkahir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
2. Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Direktur; dan
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Suksesi Direksi

Sebagai wujud regenerasi dan kelangsungan bisnis lembaga, LPEI memiliki kebijakan suksesi Direktur Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/12/2018 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diselaraskan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2/2009.

Kebijakan itu juga mengatur komposisi Direktur Pelaksana yaitu paling banyak 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal LPEI. Dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

Secara rinci, alur suksesi Direksi dapat dilihat dalam simulasi berikut ini.

Period and Tenure

The tenure of the Remuneration and Nomination Committee members refers to the Minister of Finance Decree concerning the Appointment of the Board of Directors. As such, the term of office is 5 years, according to the term as a member of the Board of Directors.

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The independence of members of the Remuneration and Nomination Committee has been regulated in the Remuneration and Nomination Committee Charter, including:

1. Not a person in a public accountant firm, legal consulting firm or any other party providing audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company in the last 6 months prior to being appointed as a member of the Remuneration and Nomination Committee.
2. Has no family relationship due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Company's Board of Directors.
3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Duties and Responsibilities

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesian Export Financing Institutions, the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are:

1. Provide recommendations to the Board of Directors regarding employee remuneration policies to be submitted to the Executive Director, including, among others, the payroll system, allowances, and continuity of income during retirement;
2. Provide recommendations to the Board of Directors regarding employee nomination policies to be submitted to the Executive Director, among others by suggesting the selection criteria and nomination procedures, as well as developing an assessment system;
3. Provide recommendations to the Board of Directors on the remuneration policy for the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors to be submitted to the Minister;
4. Compile and provide recommendations to the Board of Directors on the system and procedure for selecting and/or replacing the Executive Director and executive officers of the Company to be submitted to the Executive Director;
5. Provide recommendations to the Board of Directors regarding independent parties who will become members of the Committee of the Board of Directors;
6. Evaluating the implementation of the remuneration and nomination policies.

Board of Directors Succession

As a regeneration and continuity of the Company's business, Indonesia Eximbank has in place a succession policy for Managing Directors, as set out in the Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/12/2018 on the Procedures for Proposals, Appointment and Termination of the Managing Directors of Indonesia Eximbank aligned with Article 29 of Law No. 2/2009.

The policy also regulates the composition of the Managing Director, namely a maximum of 5 (five) people and a maximum of 4 (four) of whom come from internal of the Company. The regulation also stipulates that the Managing Director is appointed and dismissed by the Board of Directors at the recommendation of the Executive Director.

In details, the Board of Directors' succession flow is illustrated in the following simulation.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Usulan Tertulis Kandidat Direktur Pelaksana
Written Proposal for Executive Director Candidates

Dewan Direktur meminta usulan tertulis kandidat Direktur Pelaksana dari Direktur Eksekutif.

The Board of Directors requests a written proposal on candidates for Managing Director from the Chief Executive Officer.

Direktur Eksekutif meminta pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi
Chief Executive Officer asks for considerations of Remuneration & Nomination Committee

- Direktur Eksekutif wajib meminta pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dalam hal Komite belum terbentuk, maka Direktur Eksekutif dapat meminta pejabat Divisi Sumber Daya Manusia, kecuali menyangkut diri pejabat yang dimaksud.

- The Chief Executive Officer is onligated to ask the considerations of the Remuneration and Nomination Committee.
- In the event that the Remuneration and Nomination Committee is not yet established, the Executive Director shall refer to the Executive in charge of Human Resources, unless the Officer is also the candidate proposed.

Pengecekan Persyaratan
Candidate Requirements Check

Kandidat Direktur Pelaksana wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

The proposed cancidates shold fulfil the prevailing requirements.

Uji Kemampuan dan Kepatuhan
Fit and Proper Test

Uji Kemampuan dan Kepatuhan dilakukan oleh Tim dengan materi uji mencakup penilaian administratif dan wawancara.

Fit and Proper Test by a Team, involving administrative evaluation and interviews.

Hasil akhir Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan
Final Result of Fit and Proper Test

Berdasarkan hasil akhir, Tim menyampaikan 2 orang calon tertinggi kepada Dewan Direktur.

Based on the final result of the Fit and Proper Test, the Team proposed 2 (two) highest-scoring candidates to the Board of Directors.

Keputusan Dewan Direktur
Board of Directors' Decision

Dewan Direktur menetapkan Direktur Pelaksana terpilih berdasarkan keputusan Dewan Direktur.

The Board of Directors assigns the selected Managing Directors by a Decree of the Board of Directors.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Program Pengembangan Komite
Sepanjang tahun 2020 Ketua Komite, Bapak Suminto, mengikuti pelatihan *Cambrigde Business Sustainability Management online short course* pada tanggal 12 Februari tahun 2020.

Committee Development Program
Throughout 2020, the Chairman of the Committee, Mr. Suminto, attended the Cambridge Business Sustainability Management online short course on February 12, 2020.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee Meeting
During 2020, the Remuneration and Nomination Committee held 7 (seven) meetings, with frequency and attendance levels as follows:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran
Meeting Frequency and Attendance

Nama | Name	Jumlah Rapat | Meeting Total	Kehadiran | Attendance	% Kehadiran | % Attendance
Suminto	Ketua | Chairman	7	100%
Arlinda*	Anggota | Member	2	100%
Kasan**	Anggota | Member	5	100%
Wahyu P. Wibowo	Anggota | Member	7	100%

Keterangan | Description:
*Ibu Arlinda telah selesai masa jabatan per 7 Juni 2020 digantikan oleh Bapak Kasan per 8 Juni 2020 | Ms. Arlinda has finished her term of office as of June 7, 2020, and has been replaced by Mr. Kasan as of June 8, 2020
**Efektif Per Tanggal 8 Juni 2020; Frekuensi rapat diperhitungkan sejak periode efektif | Effective as of 8 June 2020; The meeting frequency is calculated from the effective period

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
14 May 2020 May 14, 2020	1. Laporan SDM tentang jumlah dan biaya tenaga kerja serta pelatihan 2. Usulan Perubahan Tata Kelola Dewan Pengawas Syariah dan Komite 3. Usulan Perpanjangan atau Penghentian Anggota Komite 1. HR reports on the number and costs of labor and training 2. Proposed Change in Governance of the Sharia Supervisory Board and Committee 3. Proposed Extension or Termination of Committee Members	1. Suminto 2. Arlinda 3. Wahyu
4 Jun 2020 Jun 4, 2020	1. Dewan Pengawas Syariah 2. Manpower Planning 2020 3. Office of the Board dan Corporate Secretary 4. Engagement Program 1. Sharia Supervisory Board 2. Manpower Planning 2020 3. Office of the Board and Corporate Secretary 4. Engagement Program	1. Suminto 2. Arlinda 3. Wahyu
3 Jul 2020 Jul 3, 2020	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu
24 Jul 2020 Jul 24, 2020	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	1. Suminto 2. Arlinda 3. Wahyu

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Paticipants
15 Okt 2020 Oct 15, 2020	1. Presentasi Leaders for Tomorrow 2. Pembahasan Rancangan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Presentation of Leaders for Tomorrow 2. Discussion of the Draft Remuneration and Nomination Committee Charter	1. Suminto 2. Arlinda 3. Wahyu
22 Okt 2020 Oct 22, 2020	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Members	1. Suminto 2. Arlinda 3. Wahyu
29 Nov 2020 Nov 29, 2020	Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Direktur tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur LPEI Discussion on the Draft Regulation of the Board of Directors regarding the Work Guidelines for the LPEI Board of Directors	1. Suminto 2. Arlinda 3. Wahyu

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menindaklanjuti keputusan yang ditetapkan dalam rapat Dewan Direktur dengan Direktur Eksekutif, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasilnya telah direkomendasikan kepada Dewan Direktur.

Remuneration and Nomination Committee Activities in 2020

In 2020, the Remuneration and Nomination Committee has followed up the decisions made in the Board of Directors meeting with the Executive Directors, in accordance with their duties and functions. The results have been recommended to the Board of Directors.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

RISK MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko dalam hubungannya dengan pembiayaan ekspor nasional, dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko terbaru telah disetujui oleh Dewan Direktur pada tanggal 28 Desember 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur struktur keanggotaan, kedudukan, wewenang dan batasan tugas, tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan ketentuan kerja, termasuk tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pelaporan, etika dan waktu kerja dan evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko.

Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.

Sepanjang tahun 2020, terjadi beberapa kali perubahan susunan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Keputusan Dewan Direktur (KDD) Nomor 0002/KDD/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Directors to assist the implementation of duties and function of the Board of Directors in carrying out periodical assessment and providing recommendations on risk in relations with national export financing, whereby its duties and functions are stipulated in the Risk Monitoring Charter.

Legal References

The Risk Monitoring Committee was formed based on Article 8 paragraph (1) of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 141/PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of the Indonesian Export Financing Agency (LPEI).

Risk Monitoring Committee Charter

The latest Risk Monitoring Committee Charter was approved by the Board of Directors on 28 December 2020 as outlined in the Board of Directors Regulation No. 0009/PDD/12/2020 on the Risk Monitoring Committee Charter for Indonesia Eximbank which refers to the legal basis of Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009.

The Risk Oversight Committee Charter regulates the membership structure, position, authority and limits of duties, duties and responsibilities, working mechanisms and conditions, including meeting rules, decision-making mechanisms, accountability and reporting, ethics and working time and performance evaluation of the Risk Monitoring Committee.

Composition and Profile of Risk Management

Members of the Risk Monitoring Committee consist of 1 member of the Board of Directors as chairman, 1 independent party with expertise in risk management as a member and 1 independent party with expertise in finance as a member.

Throughout 2020, there were several changes in the composition of the Risk Monitoring Committee. Based on the Decree of the Board of Directors No. 0002/KDD/11/2017 dated 27 November 2017 on Membership of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Nama | Name	Jabatan | Position
Arif Budimanta	Ketua Komite | Committee Chairman
Djoni Tatan	Anggota | Member
Supriyadi	Anggota | Member

Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0010/KDE/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Perubahan Komposisi Komite Pemantau Risiko, susunan Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Executive Director (KDE) No. 0010/KDE/02/2020 dated 18 February 2020 on Changes in the Composition of the Risk Monitoring Committee, the composition of the Company's Risk Monitoring Committee is as follows:

Nama | Name	Jabatan | Position
Felia Salim	Ketua Komite | Committee Chairman
Rubi Pertama	Anggota | Member

Per 31 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) 0071/KDE/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, based on the Decree of the Executive Director (KDE) 0071/KDE/10/2020 dated 26 October 2020 on the Membership of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

Nama | Name	Jabatan | Position
Felia Salim	Ketua Komite | Committee Chairman
Rubi Pertama	Anggota | Member
Herwan Ng	Anggota | Member

Profil Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Profiles

Felia Salim
Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap Anggota Dewan Direktur
Chairman of the Risk Monitoring Committee concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KDE 0071/KDE/10/2020
Profil Profile	Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini. Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Rubi Pertama
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KDE 0071/KDE/10/2020
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	57 tahun per 31 Desember 2020, Jakarta 3 November 1963 57 years old as of December 31, 2020, Jakarta, November 3, 1963
Periode Jabatan Term of Office	18 Februari 2020-sekarang 18 February 2020 – present
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan di JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta Branch. • Head of Risk Management Group di PT Bank UOB Indonesia, Tbk. • Beberapa jabatan Manajemen Risiko dan Audit Internal di PT Bank CIMB Niaga Kantor Pusat Jakarta, Los Angeles Agency dan CIMB Group Kuala Lumpur. • Executive Officer of Risk Management and Compliance at JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta Branch. • Head of Risk Management Group at PT Bank UOB Indonesia, Tbk. • Several positions in Risk Management and Internal Audit at PT Bank CIMB Niaga Jakarta Headquarters, Los Angeles Agency and CIMB Group Kuala Lumpur.

Herwan Ng
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KDE 0071/KDE/10/2020
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	48 tahun per 31 Desember 2020, Tanjungpandan, 20 Juli 1972 48 years old as of December 31, 2020, Tanjungpandan, July 20, 1972
Periode Jabatan Term of Office	26 Oktober 2020 – sekarang 26 October 2020 – present
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di Hewlett-Packard Finance Indonesia (2016 - sekarang) • DIrektur Pengelola di AWR Lloyd (2019 - 2020) • Direktur dan CFO di Rio Tinto Indonesia (2005 - 2019) • PricewaterhouseCoopers (1995 - 2005) • Independent Commissioner and Audit Chief Committee in Indonesia Hewlett-Packard Finance (2016 - now) • Managing Director in AWR Lloyd (2019 - 2020) • CFO and Director in Rio Tinto Indonesia (2005 - 2019) • PricewaterhouseCoopers (1995 - 2005)

Periode dan Masa Jabatan
Menunjuk Keputusan Direktur Eksekutif Nomor 0071/KDE/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko LPEI, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dirubah dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) tahun.

Period and Term of Office
Referring to the Decree of the Executive Director Number 0071/KDE/10/2020 dated 26 October 2020 concerning the Membership of the Company's Risk Monitoring Committee, the term of office of Risk Monitoring Committee members was changed from the previously 6 (six) months to 3 (three) years.

Independensi komite
Independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang

Independence of the committee
The independence of the Risk Monitoring Committee members has been stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter, including:

1. Not personnel in a public accountant firm, legal consulting firm or any other party providing audit

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 bulan terkahir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

services, non-audit services and/or other consulting services to the Company in the last 6 months prior to being appointed as a member of the Risk Monitoring Committee.
2. Has no family relationship due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Company's Board of Directors.
3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko untuk melakukan penilaian secara berkala dalam rangka membantu Dewan Direktur untuk memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI, paling kurang dilaksanakan dengan melakukan:
1. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
3. Tugas-tugas lain yang sesuai dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Direktur

Duties and responsibilities
The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are based on Article 36 of the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009 on Governance Principles of Indonesia Eximbank and Regulation of the Board of Directors No. 0009/PDD/12/2020 on the Risk Monitoring Committee Charter to carry out periodic assessments in order to assist the Board of Directors in providing recommendations on business risks in relation to the National Export Financing provided by the Company, at least carried out by:

1. Evaluation of the suitability between the Risk Management Policy and the implementation of the policy;
2. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Work Unit; and
3. Other duties in accordance with the functions of the Risk Monitoring Committee at the request of the Board of Directors.

Program Pengembangan Komite
Selama tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko tidak mengikuti program pengembangan.

Committee Development Program
In 2020, members of the Risk Monitoring Committee did not participate in the development program.

Rapat Komite
Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat dengan rincian berikut:

Committee Meetings
During 2020, the Risk Monitoring Committee convened 29 (twenty-nine) meetings with the following details:

Nama | Name	Jabatan | Position	Frekuensi | Frequency	Jumlah | Total	Persentase | Percentage
Felia Salim	Ketua | Chairman	29	29	100%
Rubi Pertama	Anggota | Member	29	29	100%
Herwan Ng (*)	Anggota | Member	5	5	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	**11 Mar 2020** Mar 11, 2020	Arahan Ketua KPR mengenai fungsi dan tugas utama Komite Pemantau Risiko Directions from the KPR Chairman regarding the main functions and duties of the Risk Monitoring Committee	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Arlinda
2	21 Apr 2020 Apr 21, 2020	Evaluasi dan review Laporan Perbaikan Kualitas Pembiayaan Posisi Maret 2020 untuk dikirimkan ke DJKN Evaluation and review of the March 2020 Position Financing Quality Improvement Report to be sent to DJKN	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama
3	23 Apr 2020 Apr 23, 2020	Perkembangan program NIA, penjaminan dan asuransi terkait pandemi COVID-19 serta risiko operasional yang dihadapi The development of the NIA program, underwriting and insurance related to the COVID-19 pandemic and the operational risks faced	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Yadi J Ruchandi 4. Sumarno
4	23 Apr 2020 Apr 23, 2020	Perhitungan stress testing berdasarkan Sensitivity Analysis terkait pandemi COVID-19 terhadap Portofolio Pembiayaan LPEI posisi 31 Maret 2020 Stress testing calculation based on Sensitivity Analysis related to the COVID-19 pandemic on the LPEI Financing Portfolio as of March 31, 2020	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Chesna F Anwar 4. Sumarno
5	28 Apr 2020 Apr 28, 2020	Penyusunan Memorandum KPR yang ditujukan kepada Dewan Direktur melalui Direktur Eksekutif mengenai dampak pandemi COVID-19 Preparation of a KPR Memorandum addressed to the Board of Directors through the Executive Director regarding the impact of the COVID-19 pandemic	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama
6	6 Mei 2020 May 6, 2020	Penyusunan Framework dan Rencana Kerja KPR Tahun 2020 Preparation of the 2020 KPR Framework and Work Plan	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama
7	22 Mei 2020 May 22, 2020	Penilaian dan penentuan rating Profil Risiko LPEI Periode Triwulan I/2020 Assessment and determination of the LPEI Risk Profile rating for the Quarter I / 2020 Period	1. Felia Salim 2. Chesna F Anwar 3. Restiana Ie Tjoe 4. Rubi Pertama 5. Yulida S Marbun
8	27 Mei 2020 May 27, 2020	Penyusunan Rencana Jadwal dan Agenda pertemuan dengan seluruh Direktur Pelaksana dan SEVP untuk membahas isu-isu yang menjadi fokus Rencana Kerja KPR 2020 Preparation of a Plan Schedule and Agenda for meetings with all Managing Directors and SEVP to discuss issues that are the focus of the 2020 KPR Work Plan	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama
9	3 Jun 2020 Jun 3, 2020	Beberapa isu terkait organisasi MRO, manajemen risiko kredit & operasional, risk appetite dan pelaporan manajemen risiko Several issues related to MRO organization, credit & operational risk management, risk appetite and risk management reporting	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Chesna F Anwar
10	16 Jun 2020 Jun 16, 2020	Beberapa isu terkait profil bisnis sesuai mandat LPEI, manajemen kinerja Direktorat 1 dan kebijakan relaksasi terkait pandemi COVID-19 Several issues related to the business profile according to the LPEI mandate, Directorate 1 performance management and relaxation policies related to the COVID-19 pandemic	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Dikdik Yustandi 4. Ridha Farid Lesmana 5. M. Syafrudin 6. Haryo P.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

RISK MONITORING COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
11	17 Jun 2020 Jun 17, 2020	Beberapa isu terkait credit risk & recovery model, pemisahan pengelolaan NPL, kebijakan relaksasi dan revisi action plan resolusi NPL terkait pandemi COVID-19 Several issues related to the credit risk & recovery model, separation of NPL management, relaxation policies and revised NPL resolution action plans related to the COVID-19 pandemic	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Henry Sihotang 4. Titiek Setyowati
12	18 Jun 2020 Jun 18, 2020	Beberapa isu terkait profil bisnis sesuai mandat LPEI, manajemen kinerja Direktorat 2 dan kebijakan relaksasi terkait pandemi COVID-19 Several issues related to the business profile according to the LPEI mandate, Directorate 2 performance management and relaxation policies related to the COVID-19 pandemic	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Djoko Retnadi 4. Anton Nugroho 5. Pretty Halim
13	18 Jun 2020 Jun 18, 2020	Beberapa isu terkait pelaksanaan program NIA sesuai mandat LPEI, trade finance sebagai bagian dari bisnis NIA, penerapan kerangka manajemen risiko yang tepat dan kinerja usaha sesuai IKU dalam menjalankan mandat SMV Several issues related to the implementation of the NIA program according to the mandate of the LPEI, trade finance as part of the NIA business, the application of an appropriate risk management framework and business performance according to the IKU in carrying out the SMV mandate	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Yadi J Ruchandi 4. Dyza Rochadi
14	23 Jun 2020 Jun 23, 2020	Beberapa isu terkait manajemen risiko stratejik dan reputasi serta fungsi OTB dalam rangka optimalisasi Board Engagement Several issues related to strategic and reputation risk management as well as OTB functions in order to optimize Board Engagement	1. Felia Salim 2. Yadi J Ruchandi 3. Sumarno 4. Nur Hira Windria 5. Novi Krisnawati 6. Dorcas S.
15	24 Jun 2020 Jun 24, 2020	Beberapa isu terkait kebijakan ALM, pemantauan risiko likuiditas, Loan Pricing Model, pengelolaan dana PMN, fungsi Middle Office dan Central Liability System Several issues related to ALM policy, liquidity risk monitoring, Loan Pricing Model, PMN fund management, Middle Office and Central Liability System functions	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Agus Windiarto 4. Emalia Tisnamisastra 5. Zulmahdan
16	24 Jun 2020 Jun 24, 2020	Beberapa isu terkait IT Governance Framework, perbaikan integritas Data/MIS dan BCP yang memadai terkait pandemi COVID-19 Several issues related to the IT Governance Framework, improvement of data integrity / MIS and adequate BCP related to the COVID-19 pandemic	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Muh. Guntur 4. Priyo Basuki
17	21 Jul 2020 Jul 21, 2020	Peranan IEB Institute The role of the IEB Institute	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Agus Windiarto 4. Rini Satriani
18	22 Jul 2020 Jul 22, 2020	Kerangka Kerja KPR dan Status Progres Q2/2020: Isu-isu utama yang menjadi fokus perhatian KPR KPR Framework and Progress Status Q2 / 2020: The main issues that become the focus of attention of the KPR	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama
19	31 Agt 2020 Aug 31, 2020	Pembahasan profil asset LPEI, kekuatan balance sheet, loan pricing dan kuantifikasi risiko operasional Discussion of LPEI asset profiles, balance sheet strength, loan pricing and operational risk quantification	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Anwar Harsono
20	14 Sep 2020 Sep 14, 2020	Beberapa isu terkait ERM, risk register, risk by area/funtion dan credit model terkait good & bad bank (rencana pembentukan SPV) Several issues related to ERM, risk registers, risk by area / function and credit models related to good & bad banks (plans to form SPV)	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
21	25 Sep 2020 Sep 25, 2020	Pembahasan credit model good & bad bank (terkait rencana pembentukan SPV untuk portfolio NPL) dan kontribusi LPEI dalam share Ekspor Indonesia Discussion on the good & bad bank credit model (related to the plan to form SPV for the NPL portfolio) and the LPEI's contribution to Indonesia's export share	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Anwar Harsono 4. Rini Satriani
22	29 Sep 2020 Sep 29, 2020	Pembahasan penguatan SDM terkait 9 inisiatif utama LPEI, peope risk, protokol WFH, pengawasan dan laporan Kepatuhan Discussion on strengthening human resources related to 9 main LPEI initiatives, people risk, WFH protocol, monitoring and Compliance reports	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Wahyu P Wibowo 4. Irene S. 5. Sumarno 6. Yanti Sudjarwo 7. Noviana Rahatmi 8. Fandhy Siregar
23	1 Okt 2020 Oct 1, 2020	Pembahasan penguatan Manajemen Risiko terkait 9 inisiatif utama LPEI: ERM, RAS dan Portfolio Guideline serta Risk Register untuk risiko operasional dan kredit. Discussion on strengthening Risk Management related to 9 main LPEI initiatives: ERM, RAS and Portfolio Guideline as well as Risk Register for operational and credit risks.	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Chesna F Anwar 4. Rossiyana Amir 5. Sumarno 6. Panjalu S W Indarto 7. Amril Faisal
24	16 Okt 2020 Oct 16, 2020	Pembahasan hal-hal yang perlu dikejar untuk menyelesaikan Revisi IKU 2020 al. terkait profil risiko lembaga dan framework sui generis berikut Risk Appetite Statement serta update pengawasan manajemen risiko, risk monitoring by area/function dan risiko fraud. Discussion on matters that need to be pursued to complete the 2020 IKU Revision al. related to the risk profile of the institution and the sui generis framework along with the Risk Appetite Statement as well as updates on risk management oversight, risk monitoring by area / function and fraud risk.	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Chesna F Anwar 4. Rossiyana Amir 5. Amril Faisal 6. Nabilla Ayu Fauziyyah
25	27 Okt 2020 Oct 27, 2020	Progress Rencana Kerja KPR 2020 dan pembahasan Rencana Kerja KPR 2021 Progress of the 2020 KPR Work Plan and discussion of the 2021 KPR Work Plan	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng
26	16 Nov 2020 Nov 16, 2020	Tugas-tugas rutin dan hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian KPR dan pembahasan draft Piagam Komite Pemantau Risiko Routine tasks and main matters that need KPR attention and discussion of the draft Risk Monitoring Committee Charter	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng
27	2 Dec 2020 Dec 2, 2020	Pembahasan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Triwulan III/20 dan Rencana Kerja MRO Tahun 2021 Discussion on the Risk Profile and Health Level Report for Quarter III / 20 and the 2021 MRO Work Plan	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Chesna F Anwar 5. Rossiyana Amir 6. Amril Faisal 7. Nabilla Ayu Fauziyyah
28	11 Dec 2020 Dec 11, 2020	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan III/20 Discussion on Quarterly Financial Statements III / 20	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Anwar Harsono
29	16 Dec 2020 Dec 16, 2020	Pembahasan Draft Piagam Komite Pemantau Risiko Discussion on the Draft Risk Monitoring Committee Charter	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Wahyu Wibowo 5. Sumarno

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Melakukan review dan evaluasi atas target rencana bisnis LPEI tahun 2020 yang dituangkan dalam RKAT dan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dari perspektif manajemen risiko yang mencakup antara lain:
   a. Pemantauan dan pengawasan periodik pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko
   b. Kerangka dan Tata Kelola Manajemen Risiko atau Risk Management Framework & Governance
   c. Pelaksanaan Mandat dan Kesesuaian Manajemen Risiko Bisnis termasuk review program National Interest Account (NIA)
   d. Kecukupan Manajemen Risiko Kredit terutama dalam masa Covid-19
   e. Kecukupan Manajemen Risiko Operasional
   f. Kecukupan Manajemen Risiko Likuiditas
   g. Kecukupan Fungsi-fungsi Infrastruktur
   h. Memfasilitasi Pelaporan Dewan Direktur ke DJKN
2. Mengkaji laporan-laporan rutin seperti:
   a. Laporan Pengawasan RKAT LPEI oleh Dewan Direktur
   b. Laporan Perbaikan Kualitas Pembiayaan
   c. Laporan Profil Risiko dan laporan rutin manajemen risiko
3. Melakukan rapat berkala dengan Ketua Komite Pemantau Risiko
4. Melakukan rapat berkala dengan unit kerja Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis/Keuangan serta unit kerja lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi atas laporan-laporan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

Implementation of Risk Monitoring Committee Activities in 2020

The Risk Monitoring Committee has carried out various activities in accordance with its duties and responsibilities, namely:

1. Review and evaluate the LPEI business plan target for 2020 as outlined in the RKAT and Main Performance Indicators (IKU) of the institution from a risk management perspective which includes, among others:
   a. Periodic monitoring and supervision of the implementation of duties of the Risk Management Unit
   b. Risk Management Framework & Governance
   c. Implementation of the Mandate and Conformity of Business Risk Management including a review of the National Interest Account (NIA) program
   d. Adequacy of Credit Risk Management, especially during the Covid-19 period
   e. Adequacy of Operational Risk Management
   f. Adequacy of Liquidity Risk Management
   g. Adequacy of Infrastructure Functions
   h. Facilitating Board of Directors Reporting to DJKN
2. Review routine reports such as:
   a. Supervisory Report of the LPEI RKAT by the Board of Directors
   b. Financing Quality Improvement Report
   c. Risk Profile Reports and routine risk management reports
3. Conduct regular meetings with the Chairman of the Risk Monitoring Committee
4. Conduct regular meetings with the Risk Management & Strategic Planning/Financial unit and other work units to obtain clarification and additional information on reports and other matters related to the duties of the Risk Monitoring Committee.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF
EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

Guna mendukung tugas dan fungsinya, Direktur Eksekutif membentuk komite-komite yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif. Peraturan Direktur Eksekutif mengatur struktur dan keanggotaan komite, tugas dan tata cara pengambilan keputusan. Penunjukan keanggotaan bersifat ex-officio sehingga kewenangan pengambilan keputusan melekat kepada jabatan.

Berikut komite-komite di bawah Direktur Eksekutif:
1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan Bisnis
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor
5. Komite Pengembangan Produk
6. Komite Assets Liabilities Management
7. Komite Personalia
8. Komite Teknologi Sistem Informasi

In performing its duties and functions, the Executive Director establishes the committees stipulated in the Executive Director Regulations. The Executive Director Regulation stipulates the committee's structure and membership, duties and decisionmaking procedures. Members' appointments are exofficio hence the authority of decision-making is embedded into the position.

Below are the Commitees of the Executive Director:
1. Risk Management Committee
2. Business Policy Committee
3. Financing Committee
4. National Interest Account Financing Committee
5. Product Development Committee
6. Assets Liabilities Management Committee
7. Personnel Committee
8. Information Technology System Committee

KOMITE MANAJEMEN RISIKO Risk Management Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0024/PDE/05/2019
Struktur Keanggotaan Membership Structure	• Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana Yang Membidangi Manajemen Risiko • Sekretaris merangkap Anggota Tetap: Kepala Divisi Manajemen Risiko • Anggota: Seluruh Direktur Pelaksana dan Pejabat Setingkat Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua Komite Manajemen Risiko • Chairman and Permanent Member: Managing Director in charge of Risk Management • Secretary and Permanent Member: Risk Management Division Head • Members: All Managing Directors and Executives of the same level of Managing Directors that are not served as Chairman of Risk Management Committee
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	• Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; • Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; • Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang penyimpang dan prosedur normal (irregularities). • Penetapan peraturan internal LPEI berupa manual operasional dan Standard Operating Procedure (SOP) selain yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha (pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk kegiatan tresuri) dan kepegawaian. • Develop Risk Management policies, strategies and guidelines; • Improve or refine Risk Management practices based on the assessment results. • Justification of matters on deviated business decisions and normal procedures (irregularities). • Determination of Indonesia Eximbank internal regulations such as operating manuals and other Standard Operating Procedures (SOPs) that directly related to business activities (financing, guarantee, insurance, and consulting services, including treasury activities) and employment.
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. During 2020, the Risk Management Committee convened 1 (one) meeting with 100% attendance

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE KEBIJAKAN BISNIS Business Policy Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0025/PDE/05/2019
Struktur Keanggotaan Membership Structure	• Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana Yang Membidangi Manajemen Risiko • Sekretaris merangkap Anggota Tetap: Kepala Divisi Manajemen Risiko • Anggota: Direktur Pelaksana dan Pejabat Setingkat Direktur Pelaksana selain Ketua Komite Kebijakan Bisnis • Anggota Tidak Tetap: Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang terkait dengan materi pembahasan • Chairman and Permanent Member: Managing Director in charge of Risk Management • Secretary and Permanent Member: Risk Management Division Head • Members: Managing Directors and Executives of the same level of Managing Directors other than Chairman of Business Policy Committee • Non-Permanent Members: Division Head/executives of the same level of Division Head relevant to the discussion materials
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	• Memberikan usulan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI. • MeIakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI, serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi. • Memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang mengandung risiko tinggi. • Memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio kegiatan usaha LPEI. • Provide recommendations to the Executive Director in developing or refining policies and rules for Indonesia Eximbank business activities. • Supervise the implementation of policies and rules in Indonesia Eximbank business activities, and propose solutions to any issues. • Provide consideration to the Financing Committee on financing, guarantee and insurance proposals with high risks. • Monitor and evaluate the development of Indonesia Eximbank business activity portfolio.
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Kebijakan Bisnis telah mengadakan nihil rapat. During 2020, the Business Policy Committee convened nil meetings.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF
EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE PEMBIAYAAN Financing Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0033/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan LPEI sebagaimana diubah sementara melalui Memorandum Prosedur No. MPO.0012/CEO/03/2020 dan Memorandum Prosedur No. 0043/CEO/10/2020 Perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur Tentang Komite Pembiayaan dan Komite Special Asset Management. PDE No. 0033/PDE/08/2019 and temporary amendment through Procedure Memorandum No. MPO.0012/CEO/03/2020 and Procedure Memorandum No. MPO.0043/CEO/10/2020 regarding Procedure Memorandum Extension about Financing Committee and Special Asset Management Committee.
Struktur Keanggotaan Membership Structure	**Fungsi Bisnis:** 1. Direktur Pelaksana I 2. Direktur Pelaksana II 3. Direktur Pelaksana III 4. Senior Executive Vice President I **Fungsi Risiko:** 1. Direktur Eksekutif 2. Direktur Pelaksana IV 3. Direktur Pelaksana V 4. Senior Executive Vice President VI 5. Kepala Divisi Credit Reviewer **Anggota Observer:** Dewan Direktur **Business Function:** 1. Managing Director I 2. Managing Director II 3. Managing Director III 4. Senior Executive Vice President I **Risk Function:** 1. Executive Director 2. Managing Director IV 3. Managing Director V **Observer Member:** Board of Directors
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	• Melakukan pengambilan keputusan atas proposal pembiayaan, penjaminan, asuransi, pembayaran klaim, global line dan bank line (Iembaga keuangan bank dan Iembaga keuangan non bank), country limit, dan penugasan khusus ekspor. • Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas). • Making decisions on proposals for financing, guarantee, insurance, claims payment, global lines and bank lines (bank financial institutions and non-bank financial institutions), country limits and national interest accounts. • Making decisions on proposals for determining the level of earnings assets quality (collectability).
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Pembiayaan telah mengadakan 309 kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. During 2020, the Financing Committee convened 309 meetings with 100% attendance.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE PEMBIAYAAN PENUGASAN KHUSUS EKSPOR National Interest Account Financing Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0034/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI sebagaimana diubah sementara melalui Memorandum Prosedur No. MPO.0012/CEO/03/2020 dan Memorandum Prosedur No. 0043/CEO/10/2020 Perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur Tentang Komite Pembiayaan dan Komite Special Asset Management. PDE No.0034/PDE/08/2019 regarding National Interest Account Financing Committee as temporarily change to Procedure Memorandum No. MPO.0012/CEO/03/2020 and Procedure Memorandum No. 0043/CEO/10/2020 regarding Procedure Memorandum regarding Financing Committee and Special Asset Management Committee.
Struktur Keanggotaan Membership Structure	**Fungsi Bisnis:** 1. Direktur Pelaksana I 2. Direktur Pelaksana II 3. Direktur Pelaksana III 4. Senior Executive Vice President I **Fungsi Risiko:** 1. Direktur Eksekutif 2. Direktur Pelaksana IV 3. Direktur Pelaksana V 4. Senior Executive Vice President VI 5. Kepala Divisi Credit Reviewer **Anggota Observer:** Dewan Direktur **Business Function:** 1. Managing Director I 2. Managing Director II 3. Managing Director III 4. Senior Executive Vice President I **Risk Function:** 1. Executive Director 2. Managing Director IV 3. Managing Director V 4. Senior Executive Vice President VI 5. Credit Reviewer Division Head **Observer Member:** Board of Directors
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	• Menyetujui atau menolak Usulan Fasilitas Penugasan Khusus yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan hasil penilaian Aspek Finansial Transaksi atau Proyek; • Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan Penugasan Khusus bermasalah baik dalam tahap pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian, termasuk keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan Pembiayaan bermasalah. • Melakukan pengambilan keputusan atas penempatan dana Penugasan Khusus yang belum digunakan pada instrumen keuangan sebagaimana diatur daiam peraturan yang berlaku. • Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan pembiayaan, provisi penjaminan, dan/atau premi asuransi apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri. • Approve or reject the Proposed National Interest Account Facility submitted by prospective customers based on the results of the Transaction or Project Financial Aspect assessment. • Making decisions on non-performing handling proposals for National Interest Account from guidance, restructuring and recovery, including court decisions relating to non-performing financing handling. • Making decisions on funds placement of National Interest Account that have not been used on financial instruments as stipulated in applicable regulations. • Making decision on financing disbursement, insurance provision, and/or insurance premium if not stipulated through a Ministerial Decree.
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. During 2020, the National Interest Account Financing Committee convened 4 (four) meetings with 100% attendance.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK Product Development Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0018/PDE/04/2018
Struktur Keanggotaan Membership Structure	• Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana I, II, III, V • Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana IV • Sekretaris merangkap Anggota Tetap: Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi • Anggota Tetap: 1. Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengembangan Produk 2. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko • Anggota Tidak Tetap: Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang terkait dengan materi pembahasan • Chairman and Permanent Member: Managing Director I, II, III, V • Vice Chairman and Permanent Member: Managing Director IV • Secretary and Permanent Member: Human Resources and Organizational Development Division Head • Permanent Members: 1. All Managing Directors other than Chairman and Vice Chairman of Product Development Committee 2. Legal and Compliance Division Head 3. Risk Management Division Head • Non-Permanent Members: Division Head/executives of the same level of Division Head relevant to the discussion materials
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	Tugas Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai: • Pengembangan produk dan aktivitas/kegiatan baru; • Penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan; dan • Penyusunan manual, Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan lain yang tierkait dengan produk dan aktivitas/ kegiatan LPEI. The Product Development Committee provides recommendations to the Executive Director, including: • Developing new products and activities; • Improving products and activities; and • Developing manuals, Standard Operating Procedures (SOPs) and other stipulations on Indonesia Eximbank products and activities.
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Pengembangan Produk telah mengadakan nihil rapat. During 2020, the Product Development Committee convened nil meetings.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT Assets & Liabilities Management Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No.0026/PDE/05/2019 dan perubahan sesuai dengan Memorandum Prosedur No. MPO.0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan No. MPO.0036.01/CEO/08/2020 perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur No. 0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PDE No.0026/PDE/05/2019 and amendment according to Procedure Memorandum No. MPO.0006/CEO/02/2020 on the Amendment of Executive Director Regulation regarding Assets & Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank and No. MPO.0036.01/CEO/08/2020 on the Extention of Procedure Memorandumg No. 0006/CEO/02/2020 regarding the Amendment of Executive Director Regulation regarding Assets & Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank.
Struktur Keanggotaan Membership Structure	• Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara: Direktur Eksekutif • Sekretaris merangkap Anggota Dengan Hak Suara: Kepala Divisi Financial Institution & Tresuri • Anggota Dengan Hak Suara (Voting Member): 1. Direktur Pelaksana dan pejabat setingkat Direktur Pelaksana 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang membidangi unit kerja bisnis • Anggota Tanpa Hak Suara (Non Voting Member): Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota dengan hak suara. • Chairman and Voting Member: Executive Director • Secretary and Voting Member: Financial Institution & Treasury Division Head • Voting Members: 1. Managing Directors and executives of the same level of Managing Directors 2. Division Heads/executive of the same level of Division Head in charge of business unit • Non-Voting Members: Division Head/executives of the same level of Division Head other than voting members.
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	1. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut: a. Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA; b. Mengkaji ulang penetapan suku bunga (pricing) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA. c. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. d. Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. e. Menetapkan suku bunga (pricing) kepada debitur yang besarnya di bawah Base Lending Rate (BLR). 2. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan assets dan liabilitas dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi: a. Manajemen Likuiditas b. Manajemen Gap c. Manajemen Pricing d. Manajemen Forex 3. Menyelenggarakan rapat ALCO sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu. 1. Stipulate risk management policies of Indonesia Eximbank, as follows: a. Developing, re-studying and modifying the ALMA strategy; b. Re-studying pricing determination of assets and liabilities to ensure the pricing can optimize investment returns, minimize cost of funds, and maintain a balance sheet structure in accordance with ALMA strategy. c. Disclosure of information on any developments related to rules and regulations that affect ALMA's strategy and policies. d. Decide on a funding strategy and placement of funds of Indonesia Eximbank. e. Determine the interest rate (pricing) for borrowers, which is below the Base Lending Rate (BLR). 2. Stipulate the policies, limitations and guidelines of assets and liabilities management strategy by considering internal and external conditions, such as: a. Liquidity Management b. Gap Management c. Pricing Management d. Forex Management 3. Holding ALCO meetings at least once a month or anytime deem necessary. .
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Assets & Liabilities Management telah mengadakan 34 kali rapat dengan kehadiran 100%. During 2020, the Assets & Liabilities Management Committee convened 34 meetings with 100% attendance.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF
EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE PERSONALIA Personnel Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0008/PDE/02/2018
Struktur Keanggotaan Membership Structure	• Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Eksekutif • Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana IV • Sekretaris merangkap Anggota Tetap: Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi • Anggota: Direktur Pelaksana I, II, III, IV, V • Chairman and Permanent Member: Executive Director • Vice Chairman and Permanent Member: Managing Director IV • Secretary and Permanent Member: Human Resources and Organizational Development Division Head • Members: Managing Director I, II, III, IV, V
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	1. Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia LPEI. 2. Memastikan kebijakan personalia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain: a. Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku. b. Kewajaran dengan peers' group. c. Sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga. 3. Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (Corporate values) sebagai pedoman dalam membentuk budaya lembaga (Corporate culture) untuk mencapai visi dan misi LPEI. 1. Determine the direction, change and improvement of the employment policies of Indonesia Eximbank. 2. Ensure employment policies are implemented with observance to: a. Financial and budget conditions as stipulated in the applicable stipulations. b. Fairness with peers' group. c. Corporate long-term goals and strategies. 3. Determine the development of corporate values as a guideline in shaping the corporate culture to achieve the vision and mission of Indonesia Eximbank.
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Personalia telah mengadakan 12 kali rapat dengan kehadiran 100%. During 2020, the Personnel Committee convened 12 meetings with 100% attendance.

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI Information System Technology Committee	
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	PDE No. 0027/PDE/05/2019 dan terakhir diubah melalui Memorandum Prosedur No. MPO.0037/CEO/08/2020 PDE No. 0027/PDE/05/2019 and last amended through Procedure Memorandum No. MPO.0037/CEO/08/2020
Struktur Keanggotaan Membership Structure	• Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana V • Wakil Ketua: Senior Executive Vice President II • Sekretaris merangkap Anggota Tetap: Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi • Anggota Tetap Dengan Hak Suara: 1. Direktur Pelaksana III 2. Direktur Pelaksana V 3. Senior Executive Vice President II 4. Senior Executive Vice President III • Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara: Direktur Pelaksana dan/atau Senior Executive Vice President terkait materi • Anggota Tetap tanpa Hak Suara: 1. Senior Executive Vice President IV 2. Senior Executive Vice President V • Invitee: 1. Ketua Komite Audit 2. Ketua Komite Pemantau Risiko • Kontribusi Tetap tanpa Hak Suara: 1. Sekretaris 2. Kepala Divisi Unit Kerja Terkait • Chairman and Permanent Member: Managing Director V • Vice Chairman: Senior Executive Vice President II • Secretary and Permanent Member: Information System Technology Division Head • Permanent Voting Members: 1. Managing Director III 2. Managing Director V 3. Senior Executive Vice President II 4. Senior Executive Vice President III • Non-Permanent Voting Members: Managing Director and/or Senior Executive Vice President related to the materials • Permanent Non-Voting Members: 1. Senior Executive Vice President IV 2. Senior Executive Vice President V • Invitee: 1. Chairman of Audit Committee 2. Chairman of Risk Monitoring Committee • Non-Voting Permanent Contribution: 1. Secretary 2. Division Head of Related Business Units
Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	1. Menetapkan arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang (IT Strategic Plan Lembaga). 2. Memutus atau memberikan arahan terkait rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi. 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan agar sesuai dengan IT Strategic Plan Lembaga. 4. Menetapkan acuan strategis untuk mengelola semua sumber daya teknologi sistem informasi. 5. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek terkait teknologi sistem informasi beserta anggarannya. 6. Menetapkan strategi pengamanan dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi sistem informasi. 7. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran teknologi sistem informasi yang telah diputus dalam RKAT. 1. Stipulate the mid-term and long-term directives and policies of information system technology development (IT Strategic Plan). 2. Take decision or provide directives on information system technology investment plan. 3. Supervise and evaluate the implemented information system technology development and application in order to be aligned with the IT Strategic Plan. 4. Stipulate strategic references to manage all resources of information system technology. 5. Stipulate strategies and action plans on all projects related to information system technology including its budgets. 6. Stipulate security strategy and risk management in the use of information system technology. 7. Stipulate priorities and budget allocation of information system technology that has been decided in the Annual Work Plan & Budget.
Agenda 2020	Selama tahun 2020 Komite Teknologi Sistem Informasi telah mengadakan 12 kali rapat dengan kehadiran 100%. During 2020, the Information System Technology Committee convened 12 meetings with 100% attendance.

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR

SECRETARY TO THE BOARD OF DIRECTORS

Sekretaris Dewan Direktur berfungsi untuk membantu kelancaran tugas Dewan Direktur, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan serta melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pengurusan Lembaga oleh Direktur Eksekutif dan segenap jajarannya.

The Secretary of the Board of Directors has the function to assist the effectiveness of the Board of Directors' duties, including the development and establishment of policies as well as oversight on the Company's management by Executive Director and all elements.

Profil Sekretaris Dewan Direktur
Profile of Secretary of the Board of Directors

T. Dyza R. A. Rochadi
Sekretaris Dewan Direktur
Secretary to the Board of Directors

49 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	PDD No. 007/PDD/12/2020	
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Merangkap sebagai Kepala Divisi Communication and Stakeholders Engagement Concurrently serving as Head of the Communication and Stakeholders Engagement Division	
Pengalaman Kerja Professional Experience	LPEI • Kepala Divisi Office of the Board (Juli 2020 - masa pelaporan) • Kepala Divisi Trade Finance (Apr 2019 – Juni 2020) • Kepala Divisi Executive Office (Januari 2018 – April 2019) • Kepala Divisi Internasional (Agustus 2014 – Januari 2018) • Pj. Kepala Divisi Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis (Agustus 2013 - Juli 2014) • Kepala Departemen MSDM (Januari 2011 - Juli 2013) • Kepala Departemen SDM (September 2009 – Desember 2011) PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) • Sr. Manager SDM dan Umum (September 2006 - Agustus 2009) • Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan (November 2003 - September 2006) • RM Koresponden Bank – International (Juni 2000 - November 2003) • RM Koresponden Bank (September 1999 - Juni 2000) PT. Bank Nusa International • Unit Head of Business Development Unit (April 1999 - Agustus 1999) • Dept. Head Overseas Correspondent Banking (Januari 1999 - April 1999) • RM of Overseas Correspondent Banking Dept (Mei 1998 - Januari 1999) • Unit Head of International Banking Unit (Desember 1997 - Mei 1998) • Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - Desember 1997) • Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)	Indonesia Eximbank • Head of Division Office of the Board (July 2020 - reporting period) • Head of the Trade Finance Division (Apr 2019 - June 2020) • Head of Executive Office Division (January 2018 - April 2019) • Head of International Division (August 2014 - January 2018) • Pj. Head of Risk Management & Strategic Planning Division (August 2013 - July 2014) • Head of the Department of HRM (January 2011 - July 2013) • Head of the HR Department (September 2009 - December 2011) PT. Indonesian Export Bank (Persero) • Sr. HR and General Manager (September 2006 - August 2009) • Head of the Department of Institutional Relations (November 2003 - September 2006) • RM Koresponden Bank - International (June 2000 - November 2003) • Bank Correspondent RM (September 1999 - June 2000) PT. Bank Nusa International • Unit Head of Business Development Unit (April 1999 - August 1999) • Dept. Head Overseas Correspondent Banking (January 1999 - April 1999) • RM of Overseas Correspondent Banking Dept (May 1998 - January 1999) • Unit Head of International Banking Unit (December 1997 - May 1998) • Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - December 1997) • Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)
Riwayat Pendidikan Education	• S2 Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia, Jakarta – Indonesia, Tahun 1999 • S1 Manajemen Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta - Indonesia, Tahun 1995	• Master's Degree in Finance and Banking, University of Indonesia, Jakarta - Indonesia, 1999 • Bachelor of Financial Management, Trisakti University, Jakarta - Indonesia, 1995

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR
SECRETARY TO THE BOARD OF DIRECTORS

Tugas Dan Tanggung Jawab
Sekretaris Dewan Direktur memimpin Unit Kerja *Office of The Board* yang melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Direktur dengan tugas dan tanggung jawab:
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Direktur;
2. Mencatat dan mengadministrasikan rapat Dewan Direktur;
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Direktur serta komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
4. Menjalankan fungsi penghubung (liason) antara Dewan Direktur dengan fungsi-fungsi eksekutif LPEI;
5. Memastikan tata kelola Dewan Direktur sesuai dengan prinsip tata kelola kelembagaan dan memenuhi aturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Duties and Responsibilities
The Secretary of the Board of Directors leads the Office of the Board Unit which carries out the secretariat functions of the Board of Directors with duties and responsibilities:
1. To carry out activities to support the functions and activities of the Board of Directors;
2. To record and administer the Board of Directors meeting;
3. Administration of the correspondence and reports of the Board of Directors as well as the committees under the Board of Directors;
4. To carry out the liaison function (liason) between the Board of Directors and the executive functions of Indonesia Eximbank;
5. Ensure that the governance of the Board of Directors is in accordance with the principles of institutional governance and complies with statutory regulations; and
6. Carry out other duties as determined by the Board of Directors.

Laporan Pelaksanaan Tugas 2020
Pada tahun 2020, Sekretaris Dewan Direktur telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Mengelola agenda Dewan Direktur dalam bentuk pengaturan penjadwalan, penyediaan materi serta penyusunan dan pendokumentasian risalah rapat;
2. Memastikan tindak lanjut atas setiap arahan Dewan Direktur;
3. Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam agenda Dewan Direktur;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Direktur secara tepat waktu;
5. Mengusulkan penyempurnaan regulasi internal terkait tata kerja Dewan Direktur dan tata naskah dinas lembaga;
6. Menjalin hubungan dan mewujudkan sinergi antar Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya.

Duties Implementation Report
In 2020, the Secretary to the Board of Directors has carried out the following duties:
1. Manage the agenda of the Board of Directors such as scheduling arrangements, provision of materials and preparation and documentation of minutes of meetings;
2. Ensuring follow-up on every direction of the Board of Directors;
3. Carry out protocol functions in the agenda of the Board of Directors;
4. Prepare and submit reports of the Board of Directors in a timely manner;
5. Propose improvements to internal regulations related to the work procedures of the Board of Directors and institutional service manuscripts;
6. Establishing relationships and creating synergies between the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) and other institutions.

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

LPEI memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Peran ini melekat pada Sekretaris Lembaga LPEI yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direktur Eksekutif serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

Sebagai aspek penting dalam penerapan GCG, Sekretaris Lembaga dibentuk untuk memberi dukungan bagi Manajemen dalam mencapai dan memastikan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundangan serta dalam implementasi keputusan-keputusan Direksi.

Dasar Hukum
LPEI mengangkat Agus Windiarto sebagai Sekretaris Lembaga yang telah disahkan berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor MPO.0035/CEO/07/2020 menggantikan Yadi J. Ruchandi.

Indonesia Eximbank has in place a corporate secretary function that serves as a link between the company's organ with the external parties including government and non-government institutions, shareholders, as well as other capital market players. The Company's Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the Decree of Executive Director, and is directly responsible to the Executive Director.

As an important aspect of GCG implementation, Corporate Secretary is established to assist the Management to achieve and ensure compliance with the statutory and regulatory requirements and in the implementation of the Board of Directors' decisions.

Legal References
Indonesia Eximbank has appointed Ayus Windiarto as the Corporate Secretary, which has been ratified by MPO.0035/CEO/07/2020. He replaced Yadi J. Ruchandi.

Profil Sekretaris Lembaga
Corporate Secretary Profile

AGUS WINDIARTO
Direktur Pelaksana III merangkap Corporate Secretary
Managing Director III Concurrently Acting Corporate Secretary

57 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master in Business Administration (MBA), Middlesex University, London, UK (1998) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1988)	• Master in Business Administration (MBA) from Middlesex University, London, UK (1998) • Bachelor of Economics from Krisnadwipayana University, Jakarta (1988)
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Memorandum Prosedur No. MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 Procedure Memorandum No. MPO.0035/CEO/07/2020 dated 1 July 2020	

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)

CORPORATE SECRETARY

Pengalaman Kerja Professional Experience	• Direktur Pelaksana III LPEI (01 September 2019 -sekarang) • Plt. Direktur Pelaksana III LPEI (01 Januari-31 Agustus 2019) • Kepala Divisi Corporate Planning and Finance (Januari 2018-Januari 2019) • Kepala Divisi Akunting dan SIE (Oktober 2013-Desember 2017) • Detasering Kepala Divisi Tresuri (Juli 2013-September 2013) • Kepala Divisi Manajemen Perencanaan dan Strategis (2011-2013) • Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan (2010- 2011)	• Managing Director III Indonesia Eximbank (01 September 2019-present) • Acting Managing Director III Indonesia Eximbank (01 January-31 August 2019) • Head of Corporate Planning and Finance of Indonesia Eximbank (January 2018-January 2019) • Head of Accounting and SIE Division (October 2013-December 2017) • Acting as Head of Treasury Division (July 2013-September 2013) • Head of Planning and Strategic Division (2011-2013) • Head of Planning, Research and Development Division (February 2010-December 2011)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Merangkap jabatan sebagai Sekretaris Lembaga LPEI Concurrently act as Corporate Secretary	
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliate relationship, both with the Board of Directors, Managing Directors, and Shareholders.	
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	Sepanjang tahun 2020 tidak mengikuti pelatihan No training during 2020	

Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga

Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

Organization Structure of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Executive Director and is directly responsible to the Executive Director.

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara khusus, Sekretaris Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membantu Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web LPEI;
  - Penyampaian laporan kepada pemangku kepentingan dan regulator secara tepat waktu;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Pengesahan; dan
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan Direktur dan/atau Direktur Eksekutif.
- Menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan utama seperti Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kreditur, Debitur dan publik secara luas.

Duties and Responsibilities

In particular, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- To provide input to the Board of Directors and Executive Directors in compliance with the laws and regulations;
- To assist the Board of Directors and Executive Directors in the implementation of GCG, among others:
  - Information transparency to the public, including disclosure in Indonesia Eximbank website;
  - Timely report submission to the ministry of finance and other regulators;
  - Organization and documentation of the Endorsment Meeting/GMS; and
  - Organization and documentation of the Board of Directors and Executive Directors meetings.
- To establish an effective communication with the primary stakeholders such as ministry of finance, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, The Trustee, Creditors, Debtors and Public in general.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Lembaga melaksanakan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, sebagai berikut:**

Duties Implementation in 2020

During 2020, the Corporate Secretary has conducted the following activities:

1. **Activities to maintain effective communication with stakeholders are as follows:**

No	Nama Kegiatan | Activities	Tanggal | Date
1	Penandatanganan Nota Kesepahaman LPEI dan Kementerian Luar Negeri untuk Mendukung Diplomasi Ekonomi Signing of Memorandum of Understanding of Indonesia Eximbank and Foreign Affairs Ministry to Support Economic Diplomacy	8 Januari 2020 January 8, 2020
2	Peresemian Kantor Bersama Ekspor, LPEI Jalin Kerjasama dengan LNSW Inauguration of Export Joint Office, Indonesia Eximbank Cooperates with LNSW	16 Januari 2020 January 16, 2020
3	RKAT 2020 Annual Work Plan & Budget 2020	29 Januari 2020 January 29, 2020
4	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dissemination of Duties and Function of State Financial Accountability Agency	10 Februari 2020 February 10, 2020
5	*Informal Gathering* "Peningkatan Ekspor RI" di Kementerian Luar Negeri Informal Gathering of "RI Export Improvement" at the Foreign Affairs Ministry	15 Februari 2020 February 15, 2020
6	Signing Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi dengan ITDC Signing of Investment Loan Agreement with ITDC	17 Februari 2020 February 17, 2020
7	FGD Produk Penjaminan LPEI dengan Kemenkeu & Kemenkumham FGD of Indonesia Eximbank Guarantee Products with Ministry of Finance & Ministry of Justice and Human Rights	20 Februari 2020 February 20, 2020
8	*Creditors Meeting*	4 Maret 2020 March 4, 2020
9	Dialog Nasional Perdagangan 2020 " Memperbaiki Neraca Pedagangan dengan Mendorong Ekspor dan Mengelola Impor" National Dialogue on Commerce 2020 "Improving Trade Balance by Promoting Export and Import Management"	11 Maret 2020 March 11, 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)

CORPORATE SECRETARY

No	Nama Kegiatan | Activities	Tanggal | Date
10	Sinergi SMV : SMV Di Bawah Kemenkeu Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Covid-19 di Muara Angke SMV Synergy: SMV under the Minister of Finance Provides Assistance to Communities Impacted by the Covid-19 at Muara Angke	19 Mei 2020 May 19, 2020
11	Sinergi SMV : Optimis Lewat Nada SMV Synergy: Optimist With Music Tunes	20 Mei 2020 May 20, 2020
12	Halal Bi Halal Pegawai LPEI Indonesia Eximbank Employee Gathering	26 Mei 2020 May 26, 2020
13	Pengangkatan Kasan sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI Appointment of Kasan as Member of Indonesia Eximbank Board of Directors	8 Juni 2020 June 8, 2020
14	Sosialisasi *Marketing Handholding* Jilid II 2nd Edition of Marketing Handholding Dissemination	8 Juni 2020 June 8, 2020
15	*Half day Seminar Business Enrichment Session*	22 Juni 2020 June 22, 2020
16	Sosialisasi *Marketing Handholding* Jilid II 2nd Edition of Marketing Handholding Dissemination	11 Juni 2020 June 11, 2020
17	Webinar Infobank	24 Juni 2020 June 24, 2020
18	LPEI dan Bank Mandiri Sepakati Kerjasama Penjaminan Kredit Bank untuk Dorong Ekspor Nasional Indonesia Eximbank and Bank Mandiri Cooperation Agreement of Bank Loan Guarantee to Foster National Export	26 Juni 2020 June 26, 2020
19	Perpisahan Komite Committee Farewell	3 Juli 2020 July 3, 2020
20	LPEI Salurkan Bantuan *Wastafel Portable & Thermo Gun* Kepada Pelaku Usaha Indonesia Eximbank Provides Hand Washing Portable Stand & Thermo Guns to Businesses	10 Juli 2020 July 10, 2020
21	LPEI Selenggarakan CPNE Kalimantan 2020 Indonesia Eximbank Held CPNE Kalimantan 2020	16 Juli 2020 July 16, 2020
22	Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 15 Bank tentang Penyediaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Signing of Memorandum of Understanding with 15 Banks on the Provision of Government Guarantee to Corporate Businesses	29 Juli 2020 July 29, 2020
23	Penandatanganan Perjanjian kerja sama dengan PermataBank, Danamon, Bank BJB, dan CIMB terkait Penjaminan Pemerintah Signing of Cooperation Agreement with PermataBank, Danamon, BJB Bank, and CIMB on Government Guarantee	25 Agustus 2020 August 25, 2020
24	Tasyakuran HUT LPEI Indonesia Eximbank Anniversary Celebration	2 September 2020 September 2, 2020
25	*Signing* LPEI dan Pemkab Klungkung Kembangkan Desa Devisa Signig of Indonesia Eximbank and Klungkung Regency Government to Develop Desa Devisa	3 September 2020 September 3, 2020
26	Webinar Sinergi LPEI & DJPPR Kemenkeu : Sosialisasi Dukungan Terhadap Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor melalui Program Penugasan Khusus Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Webinar of Synergy of Indonesia Eximbank & DJPPR Ministry of Finance: Dissemination of Support to Export Oriented Small and Medium Enterprises through Indonesia Eximbank National Interest Account Programs	8 September 2020 September 8, 2020
27	Sinergi SMV dan Kita Bisa.com : Dukungan SMV untuk Bantu Ringankan Dampak Covid-19 SMV Synergy and Kita Bisa.com: Support of SMV to Assist in Managing the Impact of the Covid-19	9 September 2020 September 9, 2020
28	LPEI Berikan Pelatihan Ekspor kepada Ikatan Wanita Usaha Indonesia (IWAPI) Indonesia Eximbank Provides Export Training to Indonesian Business Women Association (IWAPI)	22 April 2020 April 22, 2020
29	LPEI Mendapatkan Penghargaan *Silver Award* untuk Kategori *Empowerment of Women* dari *Global CSR Summit and Awards* Indonesia Eximbank Receives Silver Award for the Category of Empowerment of Women from Global CSR Summit and Awards	17 September 2020 September 17, 2020
30	Penandatanganan perjanjian *Bilateral committed loan credit facility* USD380,000,000 LPEI dan PT Bank ICBC indonesia Signing of Bilateral committed loan agreement of USD380,000,000 of Indonesia Eximbank and PT Bank ICBC indonesia	24 September 2020 September 24, 2020
31	LPEI dan China Eximbank Tandatangani Perjanjian *Term Loan* Indonesia Eximbank and China Eximbank Signing of Term Loan Agreement	25 September 2020 September 25, 2020
32	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan NIA kepada Garuda Indonesia Signing of NIA Financing Facility Agreement to Garuda Indonesia	6 Oktober 2020 October 6, 2020
33	Webinar Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia Webinar of Indonesia Toward the World Halal Producers Center	22 Oktober 2020 October 22, 2020
34	*Virtual Trade* Expo Indonesia	10-16 November 2020 November 10-16, 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

No	Nama Kegiatan | Activities	Tanggal | Date
35	Dorong Ekspor Nasional LPEI Jalin Kerjasama dengan Kemendag Fostering National Export, Indonesia Eximbank Cooperates with Ministry of Trade	06 November 2020 November 06, 2020
36	*Signing* dengan Bank Resona, MUFG, Maybank dan QNB terkait Penjaminan Pemerintah Signing with Resona Bank, MUFG, Maybank and QNB on Government Guarantee	20 November 2020 November 20, 2020
37	Kementerian Keuangan RI Angkat Arus Gunawan sebagai Angota Dewan Direktur LPEI Finance Ministry of RI Assigns Arus Gunawan as Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank	26 November 2020 November 26, 2020
38	*Signing* dengan Bank Jateng terkait Penjaminan Pemerintah Signing with Bank Jateng on Government Guarantee	10 Desember 2020 December 10, 2020
39	*Signing Ceremonial Master Interbank Credit Facility Agreement* USD200,000,000 Indonesia Eximbank & Export-Import Bank of Korea Signing of Ceremonial Master Interbank Credit Facility Agreement USD200,000,000 Indonesia Eximbank & Export-Import Bank of Korea	22 Desember 2020 December 22, 2020
40	Pemerintah melalui LPEI Salurkan Pembiayaan ke PTPN III untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Government through Indonesia Eximbank Disburses Financing to PTPN III to Accelerate the National Economic Recovery	28 Desember 2020 December 28, 2020
41	*Townhall* akhir tahun Year end Townhall	30 Desember 2020 December 30, 2020

2. Penyusunan Siaran Pers dalam rangka Keterbukaan informasi kepada media dan publik, sebagai berikut:

2. Press Releases for Information Transparency to the media and public are as follows:

No	Judul Press Release | Press Release Subject	Tanggal | Date
1	Kementerian Luar Negeri RI dan LPEI Sepakati Kerja Sama untuk Mendukung Diplomasi Ekonomi Ministry of Foreign Affairs of RI and Indonesia Eximbank Cooperate to Foster Economic Diplomacy	8 Januari 2020 January 8, 2020
2	LPEI Jalin Kerjasama dengan LNSW Bentuk Kantor Bersama Ekspor Indonesia Eximbank Cooperates with LNSW Establish Export Joint Office	15 Januari 2020 January 15, 2020
4	Ekspor perdana Aninda Furniture Peserta Program CPNE ke Swiss di tengah Pandemi Initial Export of Aninda Furniture, Member of CPNE Program to Swiss amid the Pandemic	17 April 2020 April 17, 2020
5	Ditengah Pandemi, Ekspor Furniture asal Jawa Tengah Masih Bertahan Amid the Pandemic, Furniture Export from Central Java Remain to Sustain	20 April 2020 April 20, 2020
7	Dukung Pemerintah Cegah Covid-19, LPEI Berikan Bantuan Wastafel Portable & Paket Sembako kepada Warga Muara Angke Fosters the Government to Prevent Covid-19, Indonesia Eximbank Provides Hand Washing Portable Stand & Basic Food Pacakges to the Communities of Muara Angke	19 Mei 2020 May 19, 2020
10	Kementerian Keuangan RI Angkat Kasan sebagai Dewan Direktur LPEI Ministry of Finance of RI Appoints Kasan as Member of Indonesia Eximbank Board of Directors	8 Juni 2020 June 8, 2020
11	Wawancara CNBC TV dengan Bapak D. James Rompas di acara Squawkbox Interview with CNBC TV with Mr. D. James Rompas at Squawkbox event	16 Juni 2020 June 16, 2020
12	Bisnis Penjaminan LPEI Mampu Dorong Kinerja Ekspor dan Jaga Kualitas Kredit Perbankan Indonesia Eximbank Guarantee Business is able to Foster Export Performance and Maintain Banking Credit Quality	23 Juni 2020 June 23, 2020
13	LPEI dan Bank Mandiri Sepakati Kerjasama Penjaminan Kredit Bank untuk Dorong Ekspor Nasional Indonesia Eximbank and Bank Mandiri Bank Loan Cooperation Agreement to Foster National Export	26 Juni 2020 June 26, 2020
14	Dukung Aktivitas Bisnis Kembali Normal, LPEI Salurkan Bantuan Wastafel Portable & Thermo Gun ke Berbagai Daerah Foster Business Activity to Return to Normal, Indonesia Eximbank Provides Hand Washing Portable Stand & Thermo Guns to Various Regions	10 Juli 2020 July 10, 2020
15	LPEI Komitmen Terus Salurkan Pembiayaan untuk Dukung Kinerja Ekspor Indonesia Eximbank Continues to Disburse Financing to Foster Export Performance	15 Juli 2020 July 15, 2020
16	LPEI Terus Latih UMKM Daerah Agar Mampu Tembus Pasar Ekspor Indonesia Eximbank Continues to Train Regional MSME to be able to Penetrate Export Market	17 Juli 2020 July 17, 2020
17	Dukung Pemulihan Ekonomi, LPEI Berikan Bantuan Kepada Pelaku Usaha di Jawa Barat dan sekitarnya Fosters Economic Recovery, Indonesia Eximbank Provides Assistance to Businesses in West Java and surrounding areas	20 Juli 2020 July 20, 2020
18	(Rilis Bersama) Kebijakan Terbaru Pemerintah dalam Program PEN untuk Dukung Korporasi (Joint Release) The Latest Government Policy in NER Program to Foster Corporations	29 Juli 2020 July 29, 2020
19	Pulihkan Ekonomi, LPEI Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan 15 Bank Economic Recovery, Indonesia Eximbank Cooperate in Loan Guarantee with 15 Banks	30 Juli 2020 July 30, 2020
20	Penjaminan Kredit sebagai Katalis dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Loan Guarantee as the Catalyst in the Acceleration of National Economic Recovery	3 Agustus 2020 August 3, 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

No	Judul Press Release | Press Release Subject	Tanggal | Date
21	Wawancara CNBC TV tentang Penugasan LPEI untuk Program Penjaminan Kredit Bagi Korporasi Padat Karya Interview of CNBC TV on Indonesia Eximbank Assignment for Loan Guarantee Program for Labor Intensive Corporations	11 Agustus 2020 August 11, 2020
22	LPEI: Bank Peserta Program Penjaminan PEN Bertambah Indonesia Eximbank: Participant Banks of NER Guarantee Program are Added	25 Agustus 2020 August 25, 2020
23	LPEI Latih Ratusan Pelaku UKM Agar Tembus Pasar Ekspor di Tengah Pandemi Indonesia Eximbank Trains Hundreds of SMEs to Penetrate Export Market During the Pandemic	1 September 2020 September 1, 2020
24	LPEI Bersinergi dengan Pemkab Klungkung Kembangkan Desa Devisa Indonesia Eximbank Synergizes with Klungkung Regency Municipality to Develop Desa Devisa	3 September 2020 September 3, 2020
25	(Rilis Bersama) Kemenkeu dan LPEI Sosialisasi Dukungan terhadap UKM Berorientasi Ekspor (Joint Release) Ministry of Finance and Indonesia Eximbank Disseminate the Support to Export Oriented SME	8 September 2020 September 8, 2020
26	LPEI Beri Fasilitas Pembiayaan Bagi UMKM Berorientasi Ekspor Indonesia Eximbank Provides Financing for Export Oriented MSME	8 September 2020 September 8, 2020
27	Dukung Pemulihan Ekonomi, LPEI Jalin Kerja Sama untuk Biayai UKM Berorientasi Ekspor Fosters the Economic Recovery, Indonesia Eximbank Cooperates to Finance Export-Oriented SME	14 September 2020 September 14, 2020
28	Berhasi Berdayakan Petani Kakao, LPEI Raih Penghargaan Global CSR Award Success in Empowering Cacao Farmers, Indonesia Eximbank Receives Global CSR Award	21 September 2020 September 21, 2020
29	LPEI Peroleh Fasilitas Pendanaan USD580 Juta dari Dua Lembaga Keuangan Indonesia Eximbank Receives Financing Facility of USD580 Million from Two Financial Institutions	28 September 2020 September 21, 2020
30	LPEI Bantu Petani Kakao Desa Devisa di Jembrana Kembali Ekspor di Tengah Pandemi Indonesia Eximbank Assists Cacao Farmers of Desa Devisa at Jembrana to Again Export Amid the Pandemic	22 Oktober2020 October 22, 2020
31	Potensi Ekspor USD229 Juta, LPEI Siap Dukung Industri Halal Export Potential of USD229 Million, Indonesia Eximbank Ready to Support Halal Industry	25 Oktober2020 October 25, 2020
32	Dorong Ekspor Nasional, LPEI Jalin Kerja sama dengan Kemendag RI Fosters the National Export, Indonesia Eximbank Cooperates with Ministry of Trade of RI	5 November 2020 November 5, 2020
33	(Rilis Bersama) Sinergi Pembiayaan Ekspor UKM, Kemendag Jalin MoU dengan Perbankan (Joint Release) Synergy of Export SME Financing, Ministry of Trade Sign MoU with Banking	5 November 2020 November 5, 2020
34	Begini Cara LPEI Meningkatkan Daya Saing UKM Berorientasi Ekspor This is How Indonesia Eximbank Improves Export-Oriented SME Competitiveness	11 November 2020 November 11, 2020
35	LPEI Siap Dukung Startup Lokal Tembus Pasar Ekspor Indonesia Eximbank Ready to Support Local Startups to Penetrate Export Market	16 November 2020 November 16, 2020
36	2.200 Mitra Binaan LPEI Siap Melakukan Ekspor 2,200 Mentoring Partners of Indonesia Eximbank are Ready to Export	19 November 2020 November 19, 2020
37	Melalui Program Jaminah, LPEI Kembali Jalin Kerja Sama dengan Empat Bank Through Jaminah Program, Indonesia Eximbank Again Cooperates with Four Banks	20 November 2020 November 20, 2020
38	Kementerian Keuangan RI Angkat Arus Gunawan sebagai Angota Dewan Direktur LPEI Ministry of Finance of RI Appoints Arus Gunawan as Member of Indonesia Eximbank Board of Directors	25 November 2020 November 25, 2020
39	LPEI Realisasikan Fasilitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada UKM Ekspor senilai Rp9,5 Miliar Indonesia Eximbank Realizes the National Economic Recovery Program Facilities to Export SME of Rp9.5 Billion	3 Desember 2020 December 3, 2020
40	Fasilitas Layanan Pembiayaan Ekspor, Kemendag Galang Dukungan Perbankan Export Financing Facility, Ministry of Trade Held Banking Supports	3 Desember 2020 December 3, 2020
41	Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, LPEI Beri Pembiayaan Rp500 Juta Kepada Pelaku UKM Lulusan CPNE Asal Pasuruan Fosters the National Economic Recovery Program, Indonesia Eximbank Provides Financing of Rp500 Million to SME Communities of CPNE Pasuruan	4 Desember 2020 December 4, 2020
43	(Rilis Bersama) LPEI Tanda Tangani PKS dengan Bank Jateng (Joint Release) Indonesia Eximbank Signs the Cooperation Agreement with Bank Jateng	17 Desember 2020 December 17, 2020
44	LPEI dan Bank Jateng Teken Kerja Sama Perjanjian Penjaminan Kredit Indonesia Eximbank and Bank Jateng Sign Loan Guarantee Agreement	17 Desember 2020 December 17, 2020
45	LPEI Teken Program Jaminah Dengan OCBC Untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Indonesia Eximbank Signs Jaminah Program with OCBC to Accelerate Economic Recovery	21 Desember 2020 December 21, 2020
46	LPEI Dapatkan Pendanaan USD200 Juta untuk Tingkatkan Ekspor Indonesia Eximbank Receives Funding of USD200 Million to Improve Export	23 Desember 2020 December 23, 2020
47	Pemerintah melalui LPEI Salurkan Pembiayaan ke PTPN III untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Government through Indonesia Eximbank Disburses Financing to PTPN III to Accelerate the National Economic Recovery	28 Desember 2020 December 28, 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

3. Menyampaikan pelaporan secara tepat waktu dengan keterangan sebagai berikut:

3. Timely reporting submission as follows:

No	Judul Pelaporan Reporting Subject	Terlapor Reported	Deadline	Tanggal Pelaporan Reporting Date
1	Penyampaian Laporan Tahunan (*Annual Report*) LPEI thn 2019 Submission of Indonesia Eximbank Annual Report 2019	1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perindustrian 3. Menteri Pertanian 4. Menteri Perdagangan 5. Bank Indonesia 6. OJK 7. IDX 8. Bank Mandiri (Wali Amanat) 1. Minister of Finance 2. Minister of Industry 3. Minister of Agriculture 4. Minister of Trade 5. Bank Indonesia 6. OJK 7. IDX 8. Bank Mandiri (Trustee)	30 April tahun berikutnya Relaksasi : Diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu penyampaian pelaporan 30 April of following year Relaxation: Extended fo 2 months from time limit of reporting submission	30 Juni 2020 June 30, 2020
2	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Audited) LPEI tahun buku 2019 Submission of Annual Financial Statements (Audited) of Indonesia Eximbank fiscal year 2019	1. Menteri Keuangan | *Finance Minister* 2. DJKN 3. OJK 4. IDX 5. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	30 April tahun berikutnya 30 April of following year	26 Februari 2020 February 26, 2020
3	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan (Un-Audited) LPEI Posisi 31 Maret 2020 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of Indonesia Eximbank of 31 March 2020 Position	1. DJKN 2. OJK 3. IDX 4. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	Paling Lambat 1 bulan setelah Periode Pelaporan (30 April) Relaksasi : Diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu penyampaian pelaporan At the latest 1 month after Reporting Period (30 April) Relaxation: Extended fo 2 months from time limit of reporting submission	23 Juni 2020 June 23, 2020
4	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahun 2020 (Un-Audited) LPEI Posisi 30 Juni 2020 Submission of Mid Year 2020 Financial Statements (Un-Audited) of Indonesia Eximbank of 30 June 2020 Position	1. Menteri Keuangan | *Finance Minister* 2. DJKN 3. OJK 4. IDX 5. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	Paling Lambat 1 bulan setelah Periode Pelaporan (31 Juli) At the latest 1 month after Reporting Period (31 July)	30 Juli 2020 July 30, 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)

CORPORATE SECRETARY

No	Judul Pelaporan Reporting Subject	Terlapor Reported	Deadline	Tanggal Pelaporan Reporting Date
5	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan (Un-Audited) LPEI Posisi 30 September 2020 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of Indonesia Eximbank of 30 September 2020 Position	1. Menteri Keuangan | *Finance Minister* 2. DJKN 3. OJK 4. IDX 5. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	Paling Lambat 1 bulan setelah Periode Pelaporan (31 Oktober) At the latest 1 month after Reporting Period (31 October)	27 Oktober 2020 October 27, 2020
6	Penyampaian Susunan Manajemen LPEI Efektif tanggal 05 Juni 2020 Submission of Indonesia Eximbank Management Structure Effective as of 05 June 2020	1. OJK 2. IDX 3. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	2 Hari Kerja setelah terdapatnya informasi atau fakta material 2 Work Days after the information or material fact	08 Juni 2020 June 08, 2020
7	Penyampaian Susunan Manajemen LPEI Efektif tanggal 25 November 2020 Submission of Indonesia Eximbank Management Structure Effective as of 25 November 2020	1. OJK 2. IDX 3. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	2 Hari Kerja setelah terdapatnya informasi atau fakta material 2 Work Days after the information or material fact	26 November 2020 November 26, 2020
8	Penyampaian Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Lembaga, Obligasi, Sukuk Mudharabah dan MTN LPEI Submission of Annual Rating Monitoring Certificate on the Institution, Bonds, Sukuk Mudharabah and MTN of Indonesia Eximbank	1. OJK 2. IDX 3. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	10 hari kerja dari tanggal jatuh tempo 10 work days from due date	11 Maret 2020 March 11, 2020
9	Penyampaian Perubahan Susunan Komite Audit LPEI Submission of Changes of Indonesia Eximbank Audit Committee Structure	1. OJK 2. IDX 3. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	2 Hari Kerja setelah terjadinya pengangkatan atau pemberhentian 2 Work Days after the appointment or termination	20 Mei 2020 May 20, 2020
10	Penyampaian Perubahan Susunan Komite Audit LPEI Submission of Changes of Indonesia Eximbank Audit Committee Structure	1. OJK 2. IDX 3. Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*)	2 Hari Kerja setelah terjadinya pengangkatan atau pemberhentian 2 Work Days after the appointment or termination	27 Juli 2020 July 27, 2020
11	Penggantian Corporate Seccretary LPEI Replacement of Indonesia Eximbank Corporate Secretary	1. OJK 2. IDX 3 . Bank Mandiri (Wali Amanat | *Trustee*) 4. KSEI	2 Hari Kerja setelah terjadinya pengangkatan atau pemberhentian 2 Work Days after the appointment or termination	02 Juli 2020 July 02, 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

4. Melakukan Korespondensi dengan sejumlah pihak diantaranya adalah:

4. Correspondences with various parties, as follows:

No	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter Number	Sumber From	Tujuan To	Perihal Subject
1	29/06/2020	BS.0021/SV1/06/2020	SV1	PT BEI, OJK, Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - Indonesia Eximbank Tahun 2019 Submission of Indonesia Eximbank Annual Report Year 2019
2	22/06/2020	BS.0019/SV1/06/2020	SV1	PT BEI, OJK, DJKN, DJPPR, Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan (Un-Audited) Posisi 31 Maret 2020 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) Position of 31 March 2020
3	15/06/2020	BS.0016/SV1/06/2020	SV1	Bapak|Mr. Aries Suudi	Bantuan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Demak, Jawa Tengah Assistance for COVID-19 Handiling at Demak Regency, Central Java
4	8/6/2020	BS.0015/SV1/06/2020	SV1	Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Director of Institutional and Non-Bank Financial Industry Product (IKNB)	Penyampaian Susunan Manajemen LPEI atau Indonesia Eximbank Efektif Tanggal 05 Juni 2020 Submission of Indonesia Eximbank Management Structure Effective as of 05 June 2020
5	20/05/2020	BS.0013/SV1/05/2020	SV1	OJK	Perihal Pergantian Anggota Komite Audit Regarding the Replacement of Audit Committee Members
6	8/5/2020	BS.0012/SV1/05/2020	SV1	Bapak|Mr. M. Agus Rofiudin	Publikasi Pelayanan Prima Prima Services Publication
7	4/5/2020	BS.0011/SV1/05/2020	SV1	Bapak Hilmi S. Rathomi, dr.MKM Direktur Eksekutif Diferensia Foundation Jl. Gunung Batu No. 57 Bandung Mr. Hilmi S. Rathomi, dr.MKM Executive Director of Diferensia Foundation Jl. Gunung Batu No. 57 Bandung	Bantuan Alat Pelindung Diri Petugas Medis dan Sembako Warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Banyumas Assistance of Personal Protective Equipment for Medic Officers and Basic Food for Communities impacted by the COVID-19 at Banyumas Regency
8	21/04/2020	BS.0010/SV1/04/2020	SV1	PT Bursa Efek Indonesia	Laporan Hasil Pemeringkatan Rating Results Report
9	16/04/2020	BS.0009/SV1/04/2020	SV1	Bapak Rahmat Nurhidayat, SE Ketua Mr. Rahmat Nurhidayat, SE Chairman	Bantuan Kemanusiaan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Banyumas Humanitarian Aid to Prevent the Spread of Covid-19 at Banyumas Regency
10	10/3/2020	BS.0007/SV1/03/2020	SV1	PT Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Lembaga, Obligasi, Sukuk Mudharabah dan MTN Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Submission of Annual Rating Monitoring Certificate on the Institution, Bonds, Sukuk Mudharabah and MTN of Indonesia Eximbank
11	25/02/2020	BS.0005/SV1/02/2020	SV1	Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Executive Head of INB Supervisor	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited LPEI Tahun Buku 2019 Submission of Indonesia Eximbank Audited Annual Financial Statements Fiscal Year 2019
12	20/02/2020	BS.0004/SV1/02/2020	SV1	Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan Directorate of Institutional and Non-Bank Financial Industry Product (IKNB), Financial Services Authority	Penyampaian Perubahan Susunan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank Submission of Changes of Indonesia Eximbank Audit Committee Structure

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)

CORPORATE SECRETARY

No	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter Number	Sumber From	Tujuan To	Perihal Subject
13	16/12/2020	BS.0064/ CSC/12/2020	CSC	Kementerian Luar Negeri Ministry of Foreign Affairs	Kajian Kawasan Afrika yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Study on Africa Region by Indonesia Eximbank
14	16/12/2020	BS.0063/ CSC/12/2020	CSC	Kementerian Luar Negeri Ministry of Foreign Affairs	Kajian Kawasan Amerika Latin yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Study on Latin America Region by Indonesia Eximbank
15	16/12/2020	BS.0062/ CSC/12/2020	CSC	Kementerian Luar Negeri Ministry of Foreign Affairs	Kajian Sektor Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Study on Creative Economy Sector by Indonesia Eximbank
16	16/12/2020	BS.0061/ CSC/12/2020	CSC	Kementerian Keuangan Ministry of Foreign Affairs	Kajian Sektor Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Study on Creative Economy Sector by Indonesia Eximbank
17	8/12/2020	BS.0060/ CSC/12/2020	CSC	Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Jl. Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur 13230 Director General of Customs and Excise Ministry of Finance of RI Jl. Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur 13230	Permohonan Data Logistik Pelabuhan terkait Kelangkaan Kontainer Global dan Indonesia di Tengah Pendemi COVID-19 Request of Port Logistic Data related to Scarcity of Global and Indonesian Containers Amid the COVID-19 Pandemic
18	25/11/2020	BS.0059/ CSC/11/2020	CSC	OJK	Pelaporan Perubahan Susunan Manajemen Reporting of Changes of Management Structure
19	17/11/2020	BS.0057/ CSC/11/2020	CSC	Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan RI Head of General Affairs of RI Ministry of Finance	Partisipasi dalam pengisian dekorasi Executive (Prime) Participation in Executive décor (Prime)
20	3/11/2020	BS.0056/ CSC/11/2020	CSC	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kesiapan Emiten Untuk Pembayaran Efek Bersifat Utang yang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan IEB IV Tahap VII Tahun 2019 Seri A Readiness of Issuers on the Payment of Debt Securities Maturity of IEB Shelf Bonds IV Phase VII of 2019 Series A
21	3/11/2020	BS.0055/ CSC/11/2020	CSC	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Kesiapan Menjelang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018 Seri A (Obligasi) Readiness Towards Maturity of Shelf Bonds III Phase IV of 2018 Series A (Bonds)
22	3/11/2020	BS.0054/ CSC/11/2020	CSC	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Kesiapan Menjelang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri C (Obligasi) Readiness Towards Maturity of Shelf Bonds II Phase VII of 2016 Series C (Bonds)
23	26/10/2020	BS.0053/ CSC/10/2020	CSC	PT BEI, OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank Posisi 30 September 2020 Submission of Indonesia Eximbank Quarterly Financial Statements Position of 30 September 2020

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)
CORPORATE SECRETARY

No	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter Number	Sumber From	Tujuan To	Perihal Subject
24	26/10/2020	BS.0052/ CSC/10/2020	CSC	PT BEI, OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank Posisi 30 September 2020 Submission of Indonesia Eximbank Quarterly Financial Statements Position of 30 September 2020
25	23/10/2020	BS.0051/ CSC/10/2020	CSC	DJKN	Penyampaian Kontrak Manajemen LPEI Submission of Indonesia Eximbank Management Contract
26	31/08/2020	BS.0048/ CSC/08/2020	CSC	DJKN Jakarta	MoU dengan Pemkab Klungkung MoU with Klungkung Regency Municipality
30	31/08/2020	BS.0044/ CSC/08/2020	CSC	PT PII	Informasi biaya penyelenggaraan penandatanganan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman program penjaminan pemerintah Information of fee in organizing signing of cooperation agreement and memorandum of understanding of government guarantee programs
31	28/08/2020	BS.0042/ CSC/08/2020	CSC	Bupati Klungkung Klungkung Regent	Undangan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten Klungkung, LPEI dan DJKN RI Invitation of signing of memorandum of understanding between the Klungkung regency municipality, Indonesia Eximbank and DJKN RI
32	28/08/2020	BS.0041/ CSC/08/2020	CSC	Dirjen Kekayaan Negara Klugkung Director General of State Treasury Klungkung	Undangan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten Klungkung, LPEI dan DJKN RI Invitation of signing of memorandum of understanding between the Klungkung regency municipality, Indonesia Eximbank and DJKN RI
33	18/08/2020	BS.0040/ CSC/08/2020	CSC	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan dampak Covid-19 Covid-19 impact report
34	6/8/2020	BS.0039/ CSC/08/2020	CSC	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Head of Fiscal Policy	Undangan menghadiri presentasi Invitation to attend presentation
35	3/8/2020	BS.0038/ CSC/08/2020	CSC	Building Management	Informasi kepada Building Management Kancab Medan Information to Building Management of Medan Branch Office
36	30/07/2020	BS.0037/ CSC/07/2020	CSC	PT BEI, OJK, Mandiri	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2020 (Andis) Submission of Mid Year Financial Statements 2020
37	28/07/2020	BS.0036/ CSC/07/2020	CSC	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	Undangan Menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Invitation to Attend the Signing of Cooperation Agreement and Memorandum of Understanding of Government Guarantee Program to Labor Intensive Corporate to Accelerate the National Economic Recovery
38	28/07/2020	BS.0035/ CSC/07/2020	CSC	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Pemberitahuan Operasional Terbatas LPEI Notification of Indonesia Eximbank Limitation Operations

SEKRETARIS LEMBAGA (PERUSAHAAN)

CORPORATE SECRETARY

No	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter Number	Sumber From	Tujuan To	Perihal Subject
39	28/07/2020	BS.0034/ CSC/07/2020	CSC	Menteri (Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian) dan Gubernur Bank Indonesia Ministers (Finance, Industry, Trade, Agriculture) and Governor of Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - Indonesia Eximbank Tahun 2019 Submission of Indonesia Eximbank Annual Report 2019
40	27/07/2020	BS.0028/ CSC/07/2020	CSC	OJK	Susunan Komite Audit Audit Committee Structure
41	26/07/2020	BS.0027/ CSC/07/2020	CSC	Building Management	Penyampaian Informasi Information Disclosure
42	24/07/2020	BS.0019/ CSC/07/2020	CSC	Nasabah	Signing MoU PEN
43	23/07/2020	BS.0018/ CSC/07/2020	CSC	Building Management Prosperity Tower	Penyampaian Informasi Information Disclosure
44	15/07/2020	BS.0017/ CSC/07/2020	CSC	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan dampak Covid-19 Covid-19 impact report
45	8/7/2020	BS.0016/ CSC/07/2020	CSC	Nasabah	Undangan Menghadiri Acara Penyerahan Donasi LPEI Invitation to Attend Indonesia Eximbank Donation
46	2/7/2020	BS.0015/ CSC/07/2020	CSC	DJKN dan DJPPR Kementerian Keuangan RI	Penyampaian Buku Himpunan Peraturan LPEI Submission of Indonesia Eximbank Regulation Compilation Book
47	1/7/2020	BS.0014/ CSC/07/2020	CSC	Direktur Pengamanan Perdagangan	Penyampaian Keterangan atas Tambahan Pertanyaan Uni Eropa terkait Penyelidikan Anti-Subsidi Produk Hot-Rolled Stainless-Steel dari Indonesia Submission of Information on Additional Questions of European Union on Investigation of Anti-Subsidy of Hot-Rolled Stainless-Steel Product from Indonesia

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020 Sekretaris Lembaga tidak mengikuti pelatihan, seminar ataupun workshop.

Corporate Secretary Competencies Development

During 2020 the Corporate Secretary has not participated in the trainings, seminars or workshops.

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Unit Audit Internal LPEI dibentuk guna meng-implementasikan proses evaluasi dan pengendalian internal Lembaga dengan tujuan meningkatkan efektivitas kegiatan usaha yang dilakukan termasuk melalui kegiatan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Internal Audit Unit of Indonesia Eximbank is established to implement a process of evaluation and development of internal control that can improve the effectiveness of the Company's activities, which include risk management and corporate governance.

Dasar Hukum

Divisi Internal Audit dibentuk berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, serta disahkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif PDE No. 0065/PDE/11/2019 tanggal 29 November 2019.

Legal References

Pursuant to the OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter and the Indonesia Stock Exchange regulation No. I-A, the Company has established the Internal Audit Division, and has been ratified by Executive Director Regulation PDE No. 0065/PDE/11/2019 dated 29 November 2019.

Fungsi audit intern di LPEI dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dikepalai oleh Kepala SKAI (*Senior Executive Vice President* 5) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif, mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. Satuan kerja tersebut membawahi Divisi Regular Audit & Methodology yang melakukan tugas pelaksanaan audit dan penugasan non-Audit sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT), dan Divisi Special Audit yang melaksanakan investigasi dan verifikasi untuk keperluan hapus buku, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Divisi.

The internal audit function in the Company is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) that led by the Head of IAU (Senior Executive Vice President 5) and directly responsible to the Executive Director, as referring to the MPO.0038/CEO/08/2020 dated 31 August 2020 on the Refinement of the Sixth Regulations of Executive Director No. 0065/PDE/11/2019. The unit is in charge of Regular Audit & Methodology Division tasks to implement audit and non-audit according to the Annual Audit Plan, and Special Audit Division tasks to investigate and verify write-off, which each led by Division Head.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, SKAI secara konsisten menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* yang menjadi rujukan pelaksanaan fungsi Audit Internal oleh *Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO)* serta turut mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang disusun oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA).

On internal supervision, IAU is consistently using the Risk Based Audit approach that become a reference in carrying out internal audit function by the Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO), as well as referring ot the Internal Audit Professional Practices of International Standard developed by the Institute of Internal Auditor (IIA).

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Profil Kepala Audit Internal
Profile of Head of Internal Audit

Agung Waluyo
Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

56 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Perjanjian Kerja No. PJ. 0057/HRB/11/2020 Work Agreement No. PJ. 0057/HRB/11/2020
Periode Jabatan Position Period	1 Januari 2020 – sekarang 1 January 2020 – present
Pengalaman Kerja Work Experiences	Chief Audit Executive Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Riwayat Pendidikan Education	• S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. • D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 1991. • Master Degree University of Indonesia, Jakarta 2010. • D4 State Accounting Academy, Jakarta, 1991.

Piagam Audit Internal
LPEI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman yang memuat tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan fungsi Internal Audit dalam organisasi, sehingga dapat menempatkan fungsi Internal Audit secara independen.

Piagam Audit Internal sedang dalam proses pembaharuan seiring dengan adanya perubahan organisasi pada unit Satuan Kerja Audit Internal, menyempurnakan pengaturan sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 07/PDE/02/2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Audit Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Eksekutif.
3. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal oleh Direktur Eksekutif harus mendapat persetujuan dari Dewan Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Ketua Komite Audit.

Internal Audit Charter
The Company has an Internal Audit Charter as a guideline of the objectives, authorities, responsibilities, and scope of work of the Internal Audit function within the organization, hence to be able to operate independently.

The Internal Audit Charter is under the updating process in line with Internal Audit Unit organizational changes, which updated the previous arrangements stipulated in the Board of Directors Regulation No. 07/PDE/02/2019, with the following details:

1. The Internal Audit Unit is led by the Internal Audit Unit Head, who reports directly to the Executive Director.
2. In carrying out its duties, the Internal Audit Unit submits reports to the Executive Director.
3. Every appointment, replacement or dismissal of the Internal Audit Unit Head by the Executive Director must be approved by the Board of Directors by considering Chairman of the Audit Committee recommendation.

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

4. Ruang lingkup penugasan Satuan Kerja Audit Internal meliputi jasa Asurans yang memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan pengendalian internal dan tata kelola LPEI, dan jasa Konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan tata kelola LPEI.

4. The scope of Internal Audit Unit assignment includes Assurance services that provide an independent assessment on the implementation of the Company internal control and governance, and consulting services aimed at improving its effectiveness.

Jumlah Pegawai Divisi Audit Internal
Audit Internal dipimpin oleh Kepala SKAI (*Senior Executive Vice President* 5) yang membawahi dua Divisi yaitu Divisi Reguler Audit & Methodology serta Divisi Special Audit.

Divisi Reguler Audit & Methodology dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi tiga unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Audit Bisnis dan Departemen Audit IT & Support yang bertugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan konsultasi secara berkala, serta Departemen QA, Follow Up & Methodology yang melakukan fungsi *quality assurance, Follow Up* atas rekomendasi auditor eksternal dan bertindak sebagai *liaison officer* atas pemeriksaan eksternal. Setiap Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.

Divisi Special Audit dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi dua unit kerja setara departemen yaitu Departemen Special Audit 1 dan Departemen Special Audit 2. Dalam menjalankan tugasnya, setiap Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen. Adapun detail pegawai Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

Internal Audit Division Number of Employees
The Internal Audit Division is led by a Division Head overseeing two Divisions, namely Regular Audit & Methodology Division and Special Audit Division.

The Regular Audit & Methodology Division is led by a Division Head in charge of three work units equal to department, namely Audit Business Department and Audit IT & Support Department tasked for supervisory by periodic auditing and consutancy, as well as QA, Follow Up & Methodology Department that carry out quality assurance, Follow Up on external auditor recommendations and act as a liaison officer on external audits. Every Department is led by a Head of Department.

The Special Audit Division is led by a Division Head in charge of two work units equal to department, namely Special Audit 1 Deparment and Special Audit 2 Department. In implementing its duties, every Department is led by a Head of Department. The following are details of Internal Audit Unit staffs:

Jabatan Position	Jumlah Pegawai Number of Employee
Kepala Satuan Kerja Audit Internal | Head of Internal Audit Unit	1
Kepala Divisi | Division Head	2
Kepala Departemen | Department Head	5
Auditor	11
Total	**19**

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit
Hingga akhir tahun 2020, sebagian Kepala Departemen dan staf telah memiliki kualifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) telah memegang sertifikasi QIA, selebihnya sedang dalam proses sertifikasi QIA dengan target waktu pemenuhan tahun 2021 ataupun sertifikasi lain dibidang Internal Audit yang relevan dengan bidang pekerjaan. Berikut adalah komposisi staf dalam proses pemenuhan sertifikasi QIA.

Internal Audit Qualifications/Professional Certification
As of the end of 2020, some of Department Heads and staffs have achieved the QIA (Qualified Internal Auditors) qualifications, while the rest are in the process of obtaining the QIA certification with fulfillment target in 2021 or other certifications of Internal Audit that relevant with work fields. The following are composition of stafss that still under the QIA certification fulfilment process.

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Sertifikat Certification	Jumlah Total
QIA Lanjutan I | QIA Advance Level I	5
QIA Manajerial | QIA Managerial Level	6

Kedudukan Direktorat Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan unit Audit Internal mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Tata Kerja LPEI. Peraturan ini menyatakan bahwa struktur Direktorat Internal Audit berada di bawah supervisi Direktur Eksekutif.

Dengan demikian, Direktorat Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Eksekutif. Kendati demikian, Direktorat ini memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal.

Internal Audit Directorate Composition in the Organization Structure

The Internal Audit unit structure and position refer to MPO.0038/CEO/08/2020 dated 31 August 2020 on the Refinement of the Sixth Work Procedures of Indonesia Eximbank. This regulation states that the structure of Internal Audit Directorate is under the supervision of Executive Director.

As such, the Internal Audit Directorate is directly under the Executive Director. Nevertheless, this Directorate has the independency in carrying out its duties in accordance with the Internal Audit Charter.

Struktur Organisasi Direktorat Internal Audit
Internal Audit Directorate Organization Structure

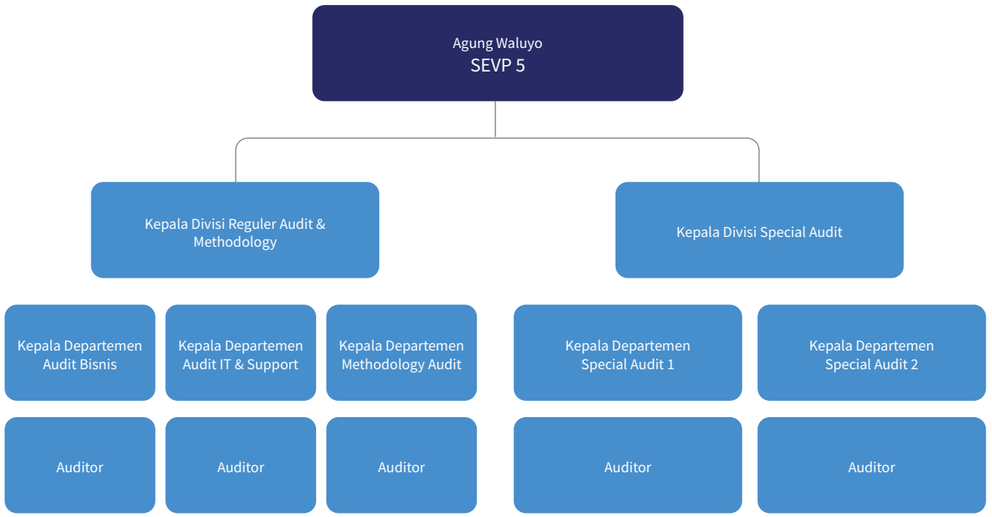

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Satuan Kerja Internal Audit berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas atas Sistem Pengendalian Internal melalui:

a. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI.

b. Memberi keyakininan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI, melalui penilaian dan pengevaluasian atas efisiensi dan efektifitas kegiatan dibidang keuangan, akuntansi, operational, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
c. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI.
d. Memberikan konsultasi mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI secara independen dan obyektif.

e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistim pengendalian intern dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Lembaga.

Duties and Responsibilities

In accordance with the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit evaluates the effectiveness of the Internal Control System by:

e. Maintaining and improving the quality of the Company's duties and functions implementation governance.
f. Providing adequate assurance on the obedience, prudence, efficiency and effectiveness in achieving the Company's duties and functions, through assessment and evaluation of efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
g. Providing early warning and increasing risk management effectiveness in implementing the Company's duties and functions.
h. Providing consultation on the Company's duties and functions implementation independently and objectively.
i. Testing and evaluating the implementation of internal control system and risk management in accordance with the Company's policies.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Audit Internal

Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2009 Tentang LPEI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal merupakan kewenangan Direktur Eksekutif.

Appointment & Termination of Head of Internal Audit

In accordance with the Article 31 Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, the appointment and termination of Head of Internal Audit Division is the authority of the Executive Director.

Bagan Pengangkatan dan Pemberhentian
Chart of Appointment and Dissmissal

Direktur Eksekutif Executive Director	Komite Audit Audit Committee	Dewan Direktur Board of Directors
a. Melakukan Fit and Proper b. Menyampaikan ke Anggota Dewan Direktur melalui Komite Audit a. Conduct Fit and Proper b. Submit to Members of the Board of Directors through the Audit Committee	Melaporkan kepada Dewan Direktur atas usulan pengangkatan/pergantian/ Pemberhentian Kepala Audit Internal yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Report to the Board of Directors on the proposal for appointment/replacement/ termination of Head of Internal Audit submitted by Executive Director	Menerima laporan dan memberikan persetujuan atas pengangkatan/ perubahan/ Pergantian Ketua Audit Received the report and approved the appointment/change of Chairman of Audit Committee

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Persyaratan Auditor Internal, baik secara individu, maupun kelompok

Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam bidang operasional lembaga pembiayaan dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan.

Requirements for Internal Auditors, both individually and in groups

Professional auditors have professional knowledge and skills obtained through education and experience in the financial institutions operational and always work based on a mental attitude and established code of ethics.

Pengembangan Kompetensi

Dalam meningkatkan kompetensi pegawai pada Satuan Keja Audit Internal, telah dilakukan serangkaian kegiatan berupa pelatihan, seminar dan konferensi taraf nasional dan internasional terkait bidang Internal Audit yang diadakan oleh IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank), IIA (Intitute Of Internal Auditors), YPIA (Yayasan Pengembangan Internal Audit), maupun lembaga lain yang memberikan pelatihan di bidang teknis seperti Manajemen Risiko oleh Banker Association for Risk Management (BARA), maupun keahlian teknis lainnya terkait analisa laporan keuangan dan pelaksanaan APU PPT. Pelaksanan pengembangan kompetensi berkelanjutan tersebut akan meningkatkan kemampuan, wawasan dan teknik Auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Internal Auditor.

Competency Development

To enhance of its staffs competencies, the Internal Audit Unit has participated in trainings, national and international seminars and conferences held by IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank), IIA (Intitute of Internal Auditors), YPIA (Internal Audit Development Foundation) and other training institutions that provide technical trainings such as risk management by the Banker Association for Risk Management (BARA), or other technical skills regarding financial statements and implementation of AML CTF. The continuous competency development will improve the capabilities, insights and techniques of the Auditors in conducting duties and responsibilities as the Internal Auditor.

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi
Training & Competence Development

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Fandhy Haristha	1. 19 Juni 2020 2. 24 Juli 2020 3. 2 Juli 2020 4. 19 Agustus 2020 5. 27 Agustus 2020 6. 14 - 15 Oktober 2020	1. Diskusi dan Bedah Manual Pembiayaan dengan SEVP VI 2. Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 3. Teammate Data Analytic 4. Enabling Business Performance Sesi I 5. Enabling Business Performance Sesi III 6. Training Credit dan Data Analytics	1. LPEI 2. Indonesia Banking School (IBS) 3. PT. Centria Integrity Advisory 4. Bester & CO 5. Bester & CO 6. LPEI
	1. June 19, 2020 2. July 24, 2020 3. July 2, 2020 4. August 19, 2020 5. August 27, 2020 6. October 14 – 15, 2020	1. Discussion and Review of Financing Manual with SEVP VI 2. Response of Bank Indonesia's Policy in Handling the Covid-19 Pandemic 3. Teammate Data Analytic 4. Enabling Business Performance, Session I 5. Enabling Business Performance, Session III 6. Credit and Data Analytics Training	

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Hendratno Tri Wibowo	1. 11 Mei 2020 2. 25 Juni 2020 3. 24 Juli 2020 4. 27 Agustus 2020	1. Sosialisasi POJK No.14/POJK.05/2020 2. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 3. Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 4. Enabling Business Performance Sesi III	1. LPEI 2. LPEI 3. Indonesia Banking School (IBS) 4. Bester & CO
	1. May 11, 2020 2. June 25, 2020 3. July 24, 2020 4. August 27, 2020	1. Dissemination of POJK No.14/POJK.05/2020 2. Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit 3. Response to Bank Indonesia's Policy in Handling the Covid-19 Pandemic 4. Enabling Business Performance, Session III	
Rio Martha	1. 13-14 Februari 2020 2. 5 Maret 2020 3. 11 Maret 2020 4. 20-27 April 2020 5. 5,6, dan 8 Mei 2020 6. 6 Mei 2020 7. 19 Juni 2020 8. 25 Juni 2020 9. 26 Juni 2020 10. 23-28 Juli 2020 11. 2 Juli 2020 12. 10-11 Agustus 2020 13. 19 Agustus 2020 14. 27 Agustus 2020 15. 28-29 September 2020 16. 14-15 Oktober 2020	1. Kelas Persiapan dan Ujian sertifikasi manajemen Risiko lvl 1 - Batch 9 2. Sosialisasi Proses Bisnis dan Focus Group Discussion (FGD) Pembekalan Pembuatan Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) & Credit Risk Review Memorandum (CRRM) - Level Kadep Batch 3 3. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) - Batch 1 4. "Training Core System Trade Finance" 5. E - Learning Manajemen Risiko lvl 2 Batch 2 6. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 7. Diskusi dan Bedah Manual Pembiayaan dengan SEVP VI 8. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 9. Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan 10. Strengthening Your Leadership Talent 11. Teammate Data Analytic 12. "Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Batch 12" 13. Enabling Business Performance Sesi II 14. Enabling Business Performance Sesi III 15. Kelas Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Batch 3 16. Training Credit dan Data Analytics	1. Banker Association for Risk Management (BARA) 2. LPEI 3. LPEI 4. FINASTRA 5. LPEI 6. LPEI 7. LPEI 8. LPEI 9. LPEI 10. PPM Manajemen 11. PT. Centria Integrity Advisory 12. Banker Association for Risk Management (BARA) 13. Bester & CO 14. Bester & CO 15. Banker Association for Risk Management (BARA) 16. LPEI
	1. February 13-14, 2020 2. March 5, 2020 3. March 11, 2020 4. April 20-27, 2020 5. May 5,6, and 8, 2020 6. May 6, 2020 7. June 19, 2020 8. June 25, 2020 9. June 26, 2020 10. July 23-28, 2020 11. July 2, 2020 12. August 10-11, 2020 13. August 19, 2020 14. August 27, 2020 15. September 28-29, 2020 16. October 14-15, 2020	1. Preparation Class and Exam for Risk Management Certification Lvl 1 - Batch 9 2. Business Process Dissemination and Focus Group Discussion (FGD) Briefing Preparation of Financing Analysis Memorandum (MAP) & Credit Risk Review Memorandum (CRRM) – Dept Head Level Batch 3 3. Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) and the Maximum Financing Limit (BMPP) - Batch 1 4. "Training Core System Trade Finance" 5. E - Learning Risk Management Lvl 2 Batch 2 6. Dissemination of The Batch 2 APU & PPT Program Implementation Manual 7. Discussion and Review of Financing Manual with SEVP VI 8. Financial Statement Analysis Related to Financing Audit 9. Dissemination of Financing Governance 10. Strengthening Your Leadership Talent 11. Teammate Data Analytic 12. "Preparation Class and Risk Management Certification Test Level 2 Batch 12" 13. Enabling Business Performance, Session II 14. Enabling Business Performance, Session III 15. Risk Management Certification Preparation Class Level 3 - Batch 3 16. Training Credit and Data Analytics	

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Arnoldy Armyn	1. 14-15 Oktober 2020 2. 14-15 Desember 2020	1. Training Credit dan Data Analytics 2. Kelas Persiapan Manajemen Risiko Level 3 Batch 6	1. LPEI 2. Banker Association for Risk Management (BARA)
	1. October 14-15, 2020 2. December 14-15, 2020	1. Training Credit and Data Analytics 2. Risk Management Preparation Class Level 3 Batch 6	
Tri Rianto Basuki	1. 27-28 Februari 2020 2. 4 Maret 2020 3. 12 Maret 2020 4. 20-27 April 2020 5. 11-13 Mei 2020 6. 12 Juni 2020 7. 19 Juni 2020 8. 25 Juni 2020 9. 29 Juni 2020 10. 2 Jul 2020 11. 6-7 Juli 2020 12. 14-15 Oktober 2020 13. 23 November - 23 Desember 2020	1. Kelas Persiapan dan Ujian sertifikasi manajemen Risiko lvl 1 - Batch 10 2. Sosialisasi Proses Bisnis dan Focus Group Discussion (FGD) Pembekalan Pembuatan Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) & Credit Risk Review Memorandum (CRRM) - Level Kadep Batch 2 3. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) - Batch 2 4. "Training Core System Trade Finance" 5. E - Learning Manajemen Risiko lvl 2 Batch 3 6. Inspiring Employees in Facing the New Normal 7. Diskusi dan Bedah Manual Pembiayaan dengan SEVP VI 8. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 9. Sosialisasi Tahapan Awal Penerapan ESMS Kelembagaan di LPEI 10. Teammate Data Analytic 11. Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Batch 10 12. Training Credit dan Data Analytics 13. Dasar-Dasar Keuangan dan Pembiayaan Syariah	1. Banker Association for Risk Management (BARA) 2. LPEI 3. LPEI 4. FINASTRA 5. LPEI 6. Dunamis 7. LPEI 8. LPEI 9. PT. Hatfield Indonesia 10. PT. Centria Integrity Advisory 11. Banker Association for Risk Management (BARA) 12. LPEI 13. Pasar Trainer | Trainer Market
	1. February 27-28, 2020 2. March 4, 2020 3. March 12, 2020 4. April 20-27, 2020 5. May 11-13, 2020 6. June 12, 2020 7. June 19, 2020 8. June 25, 2020 9. June 29, 2020 10. July 2, 2020 11. July 6-7, 2020 12. October 14-15, 2020 13. November 23-December 23, 2020	1. Preparation Class and Exam for Risk Management Certification Lvl 1 - Batch 10 2. Business Process Dissemination and Focus Group Discussion (FGD) Briefing Preparation of Financing Analysis Memorandum (MAP) & Credit Risk Review Memorandum (CRRM) – Dept Head Level Batch 2 3. Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing (AML-CFT) and the Maximum Financing Limit (BMPP) - Batch 2 4. "Training Core System Trade Finance" 5. E - Learning Risk Management lvl 2 Batch 3 6. Inspiring Employees in Facing the New Normal 7. Discussion and Review of Financing Manual with SEVP VI 8. Financial Statement Analysis Related to Financing Audit 9. Socialization of the Early Stages of Institutional ESMS Implementation at LPEI 10. Teammate Data Analytic 11. Preparation Class and Level 2 Risk Management Certification Test Batch 10 12. Training Credit and Data Analytics 13. Basics of Sharia Finance and Financing	

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Saeful Hendra	1. 20-27April 2020 2. 9 Mei 2020 3. 5,6, dan 8 Mei 2020 4. 11 Mei 2020 5. 25 Juni 2020 6. 29 Jun 2020 7. 13-14 Juli 2020 8. 19 Agustus 2020 9. 16-17 November 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. "CIFAST WEBINAR SERIES Mendeteksi kecurangan melalui Akuntansi Forensik & Investigasi" 3. E - Learning Manajemen Risiko lvl 1 Batch 4 4. Sosialisasi POJK No.14/POJK.05/2020 5. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 6. Sosialisasi Tahapan Awal Penerapan ESMS Kelembagaan di LPEI 7. Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Batch 12 8. Enabling Business Performance Sesi II 9. Kelas Persiapan Manajemen Risiko Level 2 Batch 17	1. FINASTRA 2. CIFAST 3. LPEI 4. LPEI 5. LPEI 6. PT. Hatfield Indonesia 7. Banker Association for Risk Management (BARA) 8. Bester & CO 9. Banker Association for Risk
	1. April 20-27, 2020 2. May 29, 2020 3. May 5,6, and 8, 2020 4. May 11, 2020 5. June 25, 2020 6. Jun 29, 2020 7. July 13-14, 2020 8. August 19, 2020 9. November 16-17, 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. "CIFAST WEBINAR SERIES Detecting fraud through Forensic Accounting & Investigations" 3. E - Learning Risk Management lvl 1 Batch 4 4. Dissemination of POJK No.14/POJK.05/2020 5. Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit 6. Dissemination of the Early Stages of Institutional ESMS Implementation at LPEI 7. Preparation Class and Level 1 Risk Management Certification Test Batch 12 8. Enabling Business Performance Session II 9. Risk Management Preparation Class Level 2 Batch 17	
Adhyatma Ndaru Suhardono	1. 11 Maret 2020 2. 20-27April 2020 3. 6 Mei 2020 4. 25 Juni 2020 5. 26 Juni 2020 6. 29 Juni 2020 7. 2 Juli 2020 8. 28-29 Juli 20 9. 4 September 2020 10. 14-15 Oktober 2020 11. 23 November - 23 Desember 2020 12. 7-19 Desember 2020	1. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) - Batch 1 2. "Training Core System Trade Finance" 3. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 4. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 5. Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan 6. Sosialisasi Tahapan Awal Penerapan ESMS Kelembagaan di LPEI 7. Teammate Data Analytic 8. TeamMate Analytics 9. Performance Management Batch 4 10. Training Credit dan Data Analytics 11. Dasar-Dasar Keuangan dan Pembiayaan Syariah 12. Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) - Tingkat Lanjutan	1. LPEI 2. FINASTRA 3. LPEI 4. LPEI 5. LPEI 6. PT. Hatfield Indonesia 7. PT. Centria Integrity Advisory 8. PT. Centria Integrity Advisory 9. LPEI 10. LPEI 11. Pasar Trainer 12. Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	1. 11 March 2020 2. 20-27April 2020 3. 6 May 2020 4. 25 June 2020 5. 26 June 2020 6. 29 June 2020 7. 2 July 2020 8. 28-29 July 20 9. 4 September 2020 10. 14-15 October 2020 11. 23 November - 23 December 2020 12. 7-19 December 2020	1. Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing (AML-CFT) and the Maximum Financing Limit (BMPP) - Batch 1 2. "Training Core System Trade Finance" 3. Dissemination of the Batch 2 APU & PPT Program Implementation Manual 4. Analysis of Financial Statements Related to the Financing Audit 5. Dissemination of Financing Governance 6. Dissemination of the Early Stages of Institutional ESMS Implementation at LPEI 7. Teammate Data Analytic 8. TeamMate Analytics 9. Performance Management Batch 4 10. Training Credit and Data Analytics 11. Fundamentals of Sharia Finance and Financing 12. Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Advanced Level	

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Rizki Aulia Rezza Effendi	1. 20 Februari 2020 2. 20-27 April 2020 3. 6 Mei 2020 4. 25 Juni 2020 5. 2 Juli 2020 6. 28-29 Juli 2020 7. 8 September 2020 8. 14-15 Oktober 2020 9. 17-18 Desember 2020	1. Sosialisasi Proses Bisnis dan Focus Group Discussion (FGD) Pembekalan Pembuatan Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) Bacth 6 2. "Training Core System Trade Finance" 3. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 4. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 5. Teammate Data Analytic 6. TeamMate Analytics 7. Performance Management Batch 6 8. Training Credit dan Data Analytics 9. Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi	1. LPEI 2. FINASTRA 3. LPEI 4. LPEI 5. PT. Centria Integrity Advisory 6. PT. Centria Integrity Advisory 7. LPEI 8. LPEI 9. Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	1. February 20, 2020 2. April 20-27, 2020 3. May 6, 2020 4. June 25, 2020 5. July 2, 2020 6. July 28-29, 2020 7. September 8, 2020 8. October 14-15, 2020 9. December 17-18, 2020	1. Business Process Dissemination and Focus Group Discussion (FGD) Preparation of Financing Analysis Memorandum (MAP) Fact 6 2. "Training Core System Trade Finance" 3. Dissemination of the Batch 2 APU & PPT Program Implementation Manual 4. Analysis of Financial Statements Related to the Financing Audit 5. Teammate Data Analytic 6. TeamMate Analytics 7. Performance Management Batch 6 8. Training Credit and Data Analytics 9. Internal Audit Standards & Professional Code of Ethics	
Yanti Nitra Sianipar	1. 20–27 April 2020 2. 6 Mei 2020 3. 25 Juni 2020 4. 26 Juni 2020 5. 26 Juni 2020 6. 2 Juli 2020 7. 28-29 Juli 2020 8. 3 September 2020 9. 14-15 Oktober 2020 10. 17-22 Desember 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 3. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 4. Friday Morning dengan Topik "Prospek Ekspor 5. Kelapa Sawit Indonesia di Tengah Pandemi Covid- 19" 6. Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan 7. Teammate Data Analytic TeamMate Analytics 8. Performance Management Batch 3 9. Training Credit dan Data Analytics 10. Finnon - Understanding Financial Statement	1. FINASTRA 2. LPEI 3. LPEI 4. LPEI 5. LPEI 6. PT. Centria Integrity Advisory 7. PT. Centria Integrity Advisory 8. LPEI 9. LPEI 10. PPM Manajemen
	1. April 20–27, 2020 2. May 6, 2020 3. June 25, 2020 4. June 26, 2020 5. June 26, 2020 6. July2, 2020 7. July 28-29, 2020 8. September 3, 2020 9. October 14-15, 2020 10. December 17-22, 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. Dissemination of the Batch 2 APU & PPT Program Implementation Manual 3. Analysis of Financial Statements Related to the Financing Audit 4. Friday Morning with the Topic" "Export Prospects 5. Indonesian Palm Oil in the Middle of the Covid-19 Pandemic" 6. Dissemination of Financing Governance 7. Teammate Data Analytic TeamMate Analytics 8. Performance Management Batch 3 9. Training Credit and Data Analytics 10. Finnon - Understanding Financial Statement	
M Harsya Mursyid	1. 20-27April 2020 2. 25 Juni 2020 3. 2 Juli 2020 4. 14-15 Oktober 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 3. Teammate Data Analytic 4. Training Credit dan Data Analytics	1. FINASTRA 2. LPEI 3. PT. Centria Integrity Advisory 4. LPEI
	1. April20-27, 2020 2. June 25, 2020 3. July 2, 2020 4. October 14-15, 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit 3. Teammate Data Analytic 4. Credit and Data Analytics Training -	
Sri Anindianti	20-27 April 2020 April 20-27, 2020	"Training Core System Trade Finance"	FINASTRA

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Fariza Anindya	1. 21 - 23 Januari 2020 2. 12 Maret 2020 3. 20-27 April 2020 4. 6 Mei 2020 5. 25 Juni 2020 6. 26 Juni 2020 7. 26 Jun 2020 8. 2 Juli 2020 9. 9 September 2020 10. 14-15 Oktober 2020 11. 7-19 Desember 2020	1. Balanced Score Card - Master Class Training 2. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) - Batch 2 3. "Training Core System Trade Finance" 4. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 5. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 6. "Friday Morning dengan Topik "Prospek Ekspor Kelapa Sawit Indonesia di Tengah Pandemi Covid- 19"" 7. Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan Teammate Data Analytic 8. Performance Management Batch 7 9. Training Credit dan Data Analytics 10. Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) - Tingkat Lanjutan	1. PT. Kreasi Cipta Asia (GML) 2. LPEI 3. FINASTRA 4. LPEI 5. LPEI 6. LPEI 7. LPEI 8. PT. Centria Integrity Advisory 9. LPEI 10. LPEI 11. Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	1. January 21 – 23, 2020 2. March 12, 2020 3. April 20-27, 2020 4. May 6, 2020 5. June 25, 2020 6. June 26, 2020 7. Jun 26, 2020 8. July 2, 2020 9. September 9, 2020 10. October 14-15, 2020 11. December 7-19, 2020	1. Balanced Score Card - Master Class Training 2. Anti Money Laundering & Prevention of Terrorism Financing (AML-PPT) and the Maximum Financing Limit (BMPP) - Batch 2 3. "Training Core System Trade Finance" 4. Dissemination of the Batch 2 APU & PPT Program Implementation Manual 5. Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit 6. "Friday Morning with the topic" Export Prospects 6. Indonesian Palm Oil in the Middle of the Covid-19 Pandemic"" 7. Dissemination of Teammate Data Analytic Financing Governance 8. Performance Management Batch 7 9. Training Credit and Data Analytics 10. 10. Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Advanced Level	
Dimas Rachmadi S	1. 10-11 Maret 2020 2. 20-27 April 2020 3. 9 Mei 2020 4. 25 JunI 2020 5. 2 Juli 2020 6. 28-29 Juli 2020 7. 3 September 2020 8. 14-15 Oktober 2020 9. 18-19 November 2020 10. 23 November - 23 Desember 2020	1. Kelas Persiapan dan Ujian sertifikasi manajemen Risiko lvl 2 - Batch 8 2. "Training Core System Trade Finance" 3. "CIFAST WEBINAR SERIES Mendeteksi kecurangan melalui 4. Akuntansi Forensik & Investigasi" 5. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 6. Teammate Data Analytic 7. TeamMate Analytics 8. Performance Management Batch 3 9. Training Credit dan Data Analytics TeamMate+ 10. Dasar-Dasar Keuangan dan Pembiayaan Syariah	1. Banker Association for Risk Management (BARA) 2. FINASTRA 3. CIFAST 4. LPEI 5. PT. Centria Integrity Advisory 6. PT. Centria Integrity Advisory 7. LPEI 8. LPEI 9. PT Centria Integrity Advisory 10. Pasar Trainer | Trainer Market
	1. March 10-11, 2020 2. April 20-27, 2020 3. May 9, 2020 4. June 25, 2020 5. July 2, 2020 6. July 28-29, 2020 7. September 3, 2020 8. October 14-15, 2020 9. November 18-19, 2020 10. November 23-December 23, 2020	1. Class Preparation and Exam for Risk management certification lvl 2 - Batch 8 2. "Training Core System Trade Finance" 3. "CIFAST WEBINAR SERIES Detect cheating via 4. Forensic Accounting & Investigation " 5. Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit 6. Teammate Data Analytic 7. TeamMate Analytics 8. Performance Management Batch 3 9. TeamMate + Training Credit and Data Analytics 10. Fundamentals of Sharia Finance and Financing	

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Wisda Prasparani	1. 11 Maret 2020 2. 20-27 April 2020 3. 9 Mei 2020 4. 25 Juni 2020 5. 2 Juli 2020 6. 28-29 Juli 2020 7. 8 September 2020 8. 14-15 Oktober 2020 9. 18-19 November 2020	1. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) - Batch 1 2. "Training Core System Trade Finance" 3. "CIFAST WEBINAR SERIES Mendeteksi kecurangan melalui 4. Akuntansi Forensik & Investigasi" 5. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 6. Teammate Data Analytic 7. TeamMate Analytics 8. Performance Management Batch 6 9. Training Credit dan Data Analytics TeamMate+	1. LPEI 2. FINASTRA 3. CIFAST 4. LPEI 5. PT. Centria Integrity Advisory 6. PT. Centria Integrity Advisory 7. LPEI 8. LPEI 9. PT Centria Integrity Advisory
	1. March 11, 2020 2. April 20-27, 2020 3. May 9, 2020 4. June 25, 2020 5. July 2, 2020 6. July 28-29, 2020 7. September 8, 2020 8. October 14-15, 2020 9. November 18-19, 2020	1. Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing (AML-CTF) and the Maximum Financing Limit (BMPP) - Batch 1 2. "Training Core System Trade Finance" 3. "CIFAST WEBINAR SERIES Detect cheating via 4. Forensic Accounting & Investigation " 5. Analysis of Financial Statements Related to Financing Audit 6. Teammate Data Analytic 7. TeamMate Analytics 8. Performance Management Batch 6 9. TeamMate + Training Credit and Data Analytics	
Agus Imansyah	1. 13-14 Februari 2020 2. 19 FebRuari 2020 3. 12 Maret 2020 4. 20-27April 2020 5. 9 Mei 2020 6. 5,6 dan 8 Mei 2020 7. 6 Mei 20 8. 25 Juni 2020 9. 29 Juni 2020 10. 10-11 Agustus 2020 11. 8 September 20 12. 21-22 September 2020	1. Kelas Persiapan dan Ujian sertifikasi manajemen Risiko lvl 1 - Batch 9 2. Sosialisasi Proses Bisnis dan Focus Group Discussion (FGD) Pembekalan Pembuatan Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) Bacth 4 3. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) - Batch 2 4. "Training Core System Trade Finance" 5. "CIFAST WEBINAR SERIES Mendeteksi kecurangan melalui Akuntansi Forensik & Investigasi" 6. E - Learning Manajemen Risiko lvl 2 Batch 2 7. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 8. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 9. Sosialisasi Tahapan Awal Penerapan ESMS Kelembagaan di LPEI 10. Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Batch 12 11. Performance Management Batch 6 12. Kelas Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Batch 14	1. Banker Association for Risk Management (BARA) 2. LPEI 3. LPEI 4. FINASTRA 5. CIFAST 6. LPEI 7. LPEI 8. LPEI 9. PT. Hatfield Indonesia 10. Banker Association for Risk Management (BARA) 11. LPEI 12. Banker Association for Risk Management (BARA)
	1. February 13-14, 2020 2. February 19, 2020 3. March 12, 2020 4. April 20-27, 2020 5. May 9, 2020 6. May 6 and 8, 2020 7. May 6, 2020 8. June 25, 2020 9. June 29, 2020 10. August 10-11, 2020 11. September 8, 20 12. September 21-22, 2020	1. Preparation Class and Exam for Risk management certification lvl 1 - Batch 9 2. Business Process Dissemination and Focus Group Discussion (FGD) Briefing on Making a Memorandum of Financing Analysis (MAP) Fact 4 3. Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing (AML-CTF) and the Maximum Financing Limit (BMPP) - Batch 2 4. "Training Core System Trade Finance" 5. "CIFAST WEBINAR SERIES Detecting fraud through Forensic Accounting & Investigations" 6. E - Learning Risk Management lvl 2 Batch 2 7. Dissemination of the Batch 2 APU & PPT Program Implementation Manual 8. Financial Statement Analysis Related to Financing Audit 9. Dissemination of the Early Stages of Institutional ESMS Implementation at LPEI 10. Preparation Class and Level 2 Risk Management Certification Test Batch 12 11. Performance Management Batch 6 12. Risk Management Certification Preparation Class Level 2 - Batch 14	

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Peserta Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Juli Wibowo	1. 20–27 April 2020 2. 6 Mei 2020 3. 25 Juni 2020 4. 26 Juni 2020 5. 3 September 2020 6. 2-14 November 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. Sosialisasi Manual Penerapan Program APU & PPT Batch 2 3. Analisa Laporan Keuangan Terkait Audit Pembiayaan 4. Sosialisasi Tata Kelola Pembiayaan 5. Performance Management Batch 3 6. QIA Tingkat Dasar	1. FINASTRA 2. LPEI 3. LPEI 4. LPEI 5. LPEI 6. Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	1. April 20–27, 2020 2. May 6, 2020 3. June 25, 2020 4. June 26, 2020 5. September 3, 2020 6. November 2-14, 2020	1. "Training Core System Trade Finance" 2. AML & CTF Program Implementation Manual 3. Analysis of Financial Statements Related to the Financing Audit 4. Dissemination of Financing Governance 5. Performance Management Batch 3 6. Basic QIA	
Aiqan H Rahmana	1. 2 Juli 2020 2. 20-24 November 2020 3. 2-3 November 2020	1. Teammate Data Analytic 2. "Building Effective Interpersonal Skill" 3. Kelas Persiapan Manajemen Risiko Level 1 Batch 15	1. PT. Centria Integrity Advisory 2. PPM Manajemen 3. Banker Association for Risk Management (BARA)
	1. July 2, 2020 2. November 20-24, 2020 3. November 2-3, 2020	1. Teammate Data Analytic 2. "Building Effective Interpersonal Skill" 3. Risk Management Preparation Class Level 1 Batch 15	

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2020

Penugasan audit dilaksanakan sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT), dengan realisasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Audit Mandatory - Sistem Pembayaran BI Real Time Gross Settlement (RTGS) sesuai target pada Triwulan I tahun 2020. Laporan hasil audit telah disampaikan kepada Divisi TSI dan OPS melalui internal memo No. 0058/IAD/05/2020tanggal 29 Mei 2020.
2. Audit Verifikasi untuk keperluan hapus buku terhadap 7 debitur. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Divisi Recovery dan Litigasi berdasarkan internal memo No. 0046/IAD/05/2020 tanggal 12 Mei 2020.
3. Audit Khusus terhadap 6 debitur KW Makassar sesuai rekomendasi Manajamen LPEI yang telah disampaikan kepada Direktur Pelaksana II dan SEVP V melalui internal memo No. 0069/IAD/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.
4. Audit atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat yang telah disampaikan melalui internal memo 0018/SV5/11/2020 tanggal 17 November 2020.
5. Audit atas Manajemen IT (Architecture, Utilization, Information Quality and Accuracy) yang telah disampaikan melalui internal memo 141/RAM/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.
6. Pelaksanaan audit Investigasi atas 3 grup debitur dan 1 badan usaha, yang keseluruhannya terdiri dari 19 badan usaha.

Internal Audit Unit Activities in 2020

Audit assignments are carried out in accordance with the Annual Audit Plan (RAT), with the realization during 2020 as follows:

1. Mandatory Audit - BI Real Time Gross Settlement (RTGS) Payment System is on target in the first quarter of 2020. The audit report has been submitted to the TSI and OPS Divisions via internal memo number 0058/IAD/05/2020 dated 29 May 2020.
2. Verification Audit for 7 debtor writes-off purpose. This report has been submitted to the Recovery and Litigation Division based on internal memo number 0046/IAD/05/2020 dated 12 May 2020.
3. Special Audit for 6 KW Makassar debtors according to the Company Management recommendation submitted to Managing Director II and SEVP V through internal memo No. 0069/IAD/06/2020 dated 16 June 2020.
4. Audit of the Procurement of Goods and Services Process at the Head Office which has been submitted via internal memo 0018/SV5/11/2020 dated 17 November 2020.
5. IT Management Audit (Architecture, Utilization, Information Quality and Accuracy), submitted through internal memo 141/RAM/12/2020 dated 21 December 2020.
6. Conducted an investigation audit of 3 debtor groups and 1 business entity, which in total consisted of 19 business entities.

UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

7. Pelaksanaan audit verifikasi untuk proses hapus buku sebanyak 2 debitur yang telah diajukan kepada Manajemen/DJKN dan 6 debitur yang sudah selesai diverifikasi dan akan diajukan kepada manajemen/DJKN pada tahun 2021.
8. Pelaksanaan validasi dan monitoring Action Plan Pembiayaan Bermasalah ke OJK untuk periode penyampaian TW I dan TW II tahun 2020.
9. Pelaksanaan Continous Audit atas Pembiayaan yang disampaikan melalui IM No. 112/RAM/08/2020 perihal Perbedaan Kolektibilitas Debitur LPEI dan IM No. 114/RAM/09/2020 perihal Kelengkapan dan Kualitas Data Agunan, Debitur dan Perbandingan PDO dengan Kolektibilitas.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN) dalam proses pendampingan Program Pencegahan dan Penindakan di LPEI

7. The verification audit was carried out for the write-off process of 2 borrowers which have been submitted to Management/DJKN and 6 borrowers that have been verified and will be submitted to management/DJKN in 2021.
8. Implementation of validation and monitoring of Non Performing Financing Action Plans to the OJK for the Q1 and Q2 of 2020 submission periods.
9. Implementation of Continuous Audit on Financing submitted through IM No. 112/RAM/08/2020 regarding the Difference in Collectibility of Indonesia Eximbank Borrowers and IM No. 114/RAM/09/2020 on the Completeness and Quality of Collateral Data, Debtors and Comparison of PDO with Collectability.
10. Coordination with the Inspectorate General of the Ministry of Finance (ITJEN) in the process of assisting the Prevention and Enforcement Program at the Company.

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Prosedur Penunjukkan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme Pengadaan Jasa reviu Audit 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk tahun 2020, LPEI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan LPEI.

Lingkup Jasa Kantor Akuntan Publik

Lingkup pekerjaan tahun 2020 meliputi:

1. Audit umum atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Melakukan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Melakukan penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Triwulan IV Tahun 2020 per 31 Desember 2020.
4. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas atas Laporan pinjaman Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) posisi per 31 Desember 2020.
5. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas atas Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) posisi per 31 Desember 2020.
6. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas atas *Internal Control Operation dan Information Tchnology* (IT).
7. Perikatan Prosedur yang disepakati untuk pelaporan kegiatan lalu lintas Devisa dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehatihatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi Non-Bank.

Public Accountant Firm Appointment Procedures

With reference to the Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 on the Governance Principles of Indonesia Eximbank, the appointment of an external audit and determination of fees are carried out by the Executive Director with the approval of the Board of Directors. The appointment of Public Accountant Firm is carried out through the mechanism of Services Procurement of Audit review 2020 by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

In 2020, Indonesia Eximbank has appointed Public Accountant Firm Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan to audit the Company's financial statements.

Public Accounting Firm Scope of Services

The 2020 work scope includes:

1. General audit of Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
2. Audit on Compliance with laws and regulations as well as internal controls for the years ended 31 December 2020.
3. Implementation of procedures agreed upon for Prudential Principles Practices Report (KPPK) of Quarter IV Year 2020 as of 31 December 2020.
4. Limited assurance procedures services and publish a report on the loan of Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) as of 31 December 2020.
5. Limited assurance on Key Performance Indicators Report as of 31 December 2020.
6. Limited assurance on Internal Control Operation and Information Technology (IT).
7. Commitment Procedures agreed upon for foreign exchange flows reporting and reporting on the application of prudential principle in managing non-bank corporate foreign debt.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Berikut ini informasi kantor akuntan publik yang ditunjuk dalam lima tahun terakhir:

Following is the information of the appointed public accounting firm in the past five years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Biaya Jasa | Fee (Rp Juta | Rp Million)
2015	Suherman & Surja	Sinarta	2.175
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja	Yasir	3.037
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	3.402
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	3.400
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Muhammad Kurniawan, CPA	4.400
2020	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	Dedy Sukrisnadi	3.589

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis LPEI yang semakin besar, merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In line with the Company's business development and scope that increasingly grows, it is a challenge to be prudent of compliance risk. To that end, prevention action is required to minimize possibility of fraud on onternal rules as well as prevailing laws and regulations.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Good and timely compliance risk management and in line with the latest risk management practices is expected to minimize risk impact as early as possible.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dibentuk suatu piagam kepatuhan (compliance charter) yang memuat ketentuan dan komitmen penerapan fungsi kepatuhan sehingga diharapkan dapat terbangun budaya patuh pada ketentuan di lingkungan LPEI.

As such, the compliance charter has been established that states the stipulations and commitment in implementing compliance function, thereby it is expected to build compliance culture on the Company's rules.

Divisi Kepatuhan memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan fungsinya di LPEI, yaitu dengan Visi "Menjadi mitra kerja bagi seluruh komponen secara harmonis dan berbudaya kepatuhan Lembaga dalam melaksanakan mandat Undang-Undang", dan Misi "Berperan lebih strategis dalam mendukung kinerja Lembaga yang lebih baik dengan menjaga harmonisasi antara pelaksanaan kegitan usaha Lembaga dan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia".

Compliance Division has in place the Vision and Mission in implementing its functions in the Company, which Vision is to "Become partner for all components harmoniously and has the compliance culture minded in implementing the Law mandate", and the Mission "To have a strategic role in supporting better performance for the Company by maintaining harmonization between the business activities and compliance or adherence to prevailing laws and regulations for Indonesia Eximbank".

Prinsip-prinsip Dasar Fungsi Kepatuhan
Fungsi Kepatuhan memiliki pemisahan yang jelas dengan fungsi lainnya agar dapat fokus dan profesional dalam melaksanakan tugas utamanya. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan:

1. Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

Basic Principles of Compliance Function
The Compliance function has a clear separation from other functions in order to be focused and professional in carrying out its main duties. The compliance function is a series of actions or steps that are preventive in nature, to ensure:

1. Policies, provisions, systems, procedures, and operational activities carried out by the Company are in accordance with applicable laws and regulations.
2. The Company's compliance with commitments made by Indonesia Eximbank to regulators and/ or other regulatory authorities.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Prinsip-prinsip dasar Fungsi Kepatuhan LPEI adalah bahwa Unit Kerja Kepatuhan LPEI harus:

1. Independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional LPEI, dimana pegawai pada Unit Kerja Kepatuhan tidak boleh ditempatkan pada posisi dimana kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara tanggung jawab kepatuhan dengan tanggung jawab lainnya.
2. Memiliki kedudukan dan wewenang yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Memiliki akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dari semua pihak yang relevan dan sesuai dengan kewenangannya.
4. Berhak untuk mengambil inisiatif melakukan investigasi terhadap pelanggaran ketentuan regulator dan ketidakpatuhan atas sesuatu hal yang bukan bersifat kecurangan (penipuan).
5. Berhak untuk mengemukakan dan membuka temuan hasil investigasi pelanggaran ketentuan kepada Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Dewan Direktur (jika dipertimbangkan perlu).
6. Memiliki hak akses langsung kepada Direktur Eksekutif.
7. Berhak untuk meminta pendapat kepada pihak eksternal (pakar/ahli) atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian secara teknis.
8. Diberikan anggaran yang memadai dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas dan fungsinya.

As the basic principles of Compliance Function, the Company's Compliance Unit shall:

1. Be independent to the Company's business and operational activities, where the Compliance Unit's staff may not be placed in a position where there may be a conflict of interest between compliance and other responsibilities.
2. Have a position and authority in accordance with his responsibilities.
3. Have unlimited access to obtain information from all relevant parties and in accordance with their authority.
4. Have the rights to take the initiative to investigate violations of regulatory stipulations and incompliance with non-fraudulent issues.
5. Have the rights to convey and inform the findings of investigations on violations of stipulations to the Executive Director, Managing Director, and/or Board of Directors (if considered necessary).
6. Have a direct access rights to the Executive Director.
7. Have the rights to request opinions from external parties (experts) or third parties with technical expertise.
8. Be provided with adequate budget and sufficient resources to carry out its tasks and functions.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan
Compliance Function Structure Organization

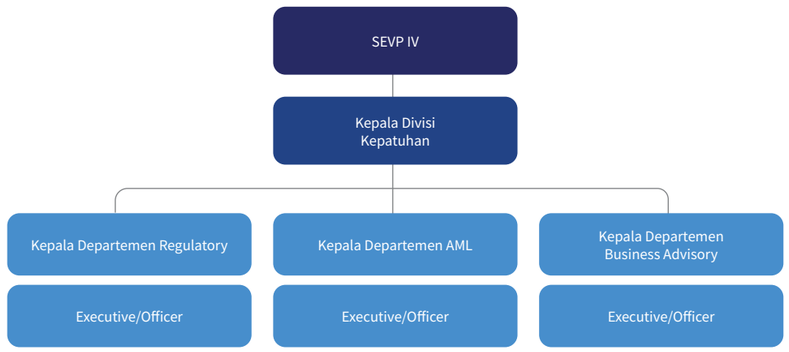

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Profil Kepala Divisi Kepatuhan
Profile of Head of Compliance Division

Thio Sucy
Kepala Divisi Kepatuhan
Head of Compliance Division

52 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	KDE No.0038/KDE/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 efektif sejak tanggal 1 Maret 2021. KDE No.0038/KDE/03/2021 dated 10 Maret 2021 effective from March 1, 2021
Pengalaman Kerja Work Experiences	Memiliki pengalaman dan rekam jejak selama 26 tahun di industri perbankan, karier profesional beliau dimulai di Citibank Indonesia (1994-2009), mengawali karir sebagai Asia Pasific Management Associate di Citibank Indonesia dan meniti karir memimpin beberapa divisi dengan jabatan terakhir sebagai Vice President AMLCO, Compliance. Kemudian, beliau melanjutkan karier dengan bergabung bersama PT Bank Barclays Indonesia dengan menduduki jabatan sebagai Senior Vice President, Kepala Satuan Unit Kerja APU-PPT (2009-2010); Kepala SKAI (2010-2011). Karier beliau berlanjut dengan menjabat sebagai Audit Director, Kepala SKAI di PT Bank ANZ Indonesia (2011-2017), kemudian bergabung dengan PT Bank Commonwealth sebagai Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018) dan Direktur Kepatuhan (2018-2020), sebelum bergabung dengan LPEI dan menjabat di posisi sekarang. Has 26 years of experience and track record in the banking industry, started her professional career in Citibank Indonesia (1994-2009) serving in various positions with the last position as Vice President, Head of AML and Financial Crime Division (2005-2009) then joined PT Bank Barclays Indonesia as Senior Vice President, Head of AML and Financial Crime (2009-2010); Head of Internal Audit (2010-2011). Next at PT Bank ANZ Indonesia as Audit Director, Head of Internal Audit (2011-2017), then joined PT Bank Commonwealth as Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018) and Director of Compliance (2018-2020), before joining LPEI and serving in the current position
Riwayat Pendidikan Education	Meraih gelar Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney - Australia pada tahun 1994. Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney-Australia pada tahun 1994.
Sertifikasi Certification	• Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP) • International Certificate in Banking Risk and Regulation from Global Association of Risk Professionals (GARP)

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Program Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2020
Compliance Division Work Programs in 2020

No.	Rencana Kerja Tahun 2020 2020 Work Plan	Realisasi Kepatuhan Tahun 2020 2020 Compliance Realization
1	Penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*) melalui: a. Penerapan CBT dan TT kode etik dan budaya lembaga b. Melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT c. Penyediaan akses regulasi d. Compliance Champion Strengthening compliance culture through: a. CBT and TT of code of conduct and work culture b. Dissemination and/or training on Governance, Compliance Function and AML-CTF c. Availability of regulation access d. Compliance Champion	Dalam rangka penguatan budaya kepatuhan (compliance culture) pada semua tingkatan organisasi, Divisi Kepatuhan telah melakukan: 1. Pengembangan Computer Based Training (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT. 3. Menyediakan Data dan Akses Peraturan, melalui penyebaran peraturan internal baru dan pengelolaan Search Engine Regulation. 4. Pembentukan Compliance Champion, kick off meeting, dan meeting antara Compliance Champion dan Audit Champion. 5. Melakukan Fungsi Advisory atas produk dan aktivitas baru/eksisting. 6. Program Budaya Kepatuhan lainnya (Aktivasi Portal Web Kepatuhan, Reminder Screensaver terkait Larangan Gratifikasi, Pengisian E-LHKPN, dan lain-lain). To strengthen compliance culture in all levels of organization, the Compliance Division has carried out: 1. Computer Based Training (CBT) Development for Code of Conduct and Work Culture. 2. Dissemination and/or training on Governance, Compliance Function and AML-CTF. 3. Availability of Data and Regulation Access through dissemination of new internal regulations and Search Engine Regulation management. 4. Establishing Compliance Champion, kick off meeting, and meeting between Compliance Champion and Audit Champion. 5. Advisory function on new/existing products and activities. 6. Other Compliance Culture Programs (Activation of Compliance Web Portal, Reminder Screensaver related to Gratuity Prohibition, Filling in E-LHKPN, and others).
2	Penyelesaian benchmarking penerapan GCG di SMV, BUMN dan eximbank negara lain Completion of benchmarking of GCG practices at SMV, SOEs and eximbank of other countries	1. Tanggal 17 November 2020, melalui bantuan Tim IIR telah disampaikan email permohonan berikut proposal dan daftar pertanyaan kepada Eximbank India, Korea, Thai, Turki, Malaysia/ Australia. 2. Telah dilakukan Video Conference dengan Eximbank India tanggal 20 November 2020. 3. Turk Eximbank on Islamic finance in export credit and insurance telah mengirimkan hasil pengisian Queries Benchmarking Corporate Governance dari LPEI pada tanggal 26 November 2020. 4. Eximbank Thailand telah mengirimkan hasil pengisian Queries Benchmarking Corporate Governance dari LPEI pada tanggal 24 Desember 2020. 5. Penyampaian hasil Laporan Benchmarking Penerapan GCG kepada Dewan Direktur. 1. On 17 November 2020, with the help of IIR Team email was submitted on request and proposal and questionnaires to Eximbank India, Korea, Thai, Turki, Malaysia/Australia. 2. Video Conference with Eximbank India on 20 November 2020. 3. Turk Eximbank on Islamic finance in export credit and insurance has sent the completion of Queries Benchmarking Corporate Governance from Indonesia Eximbank on 26 November 2020. 4. Eximbank Thailand has sent the completion of Queries Benchmarking Corporate Governance from Indonesia Eximbank on 24 December 2020. 5. Submission of GCG Practices Benchmarking Reports to the Board of Directors.
3	Pemenuhan waktu pelaksanaan uji kepatuhan dan pemeriksaan KYC/ APU PPT atas Proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, Trade Finance, Bank Line, dan Global Line, termasuk Program PEN (Penyelamatan Ekonomi Nasional) dan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Fulfillment of compliance test schedule and audit of KYC/AML CTF on the Proposals of Financing, Guarantee, Insurance, Trade Finance, Bank Lines, and Global Lines, including NER Program (National Economic Recovery) and National Interest Account Programs	Divisi Kepatuhan secara konsisten telah melaksanakan uji kepatuhan dan pemeriksaan KYC/ APU PPT atas Proses Pembiayaan, Asuransi, Penjaminan, Trade Finance termasuk Program PEN dan PKE, serta Bank Line dan Global Line (Financial Institution) yang diberikan secara tepat waktu. Selama tahun 2020 Divisi Kepatuhan telah melakukan Uji Kepatuhan sebanyak total 557 Proposal Pengajuan. Compliance Division has carried out compliance test and audit of KYC/AML CTF on process for Financing, Insurance, Guarantee, Trade Finance including NER and NIA Programs, as well as Bank Lines and Global Lines (Financial Institution) provided timely. During 2020, Compliance Division has carried out a total of 557 Submission Proposals of Compliance Test.
4	Pemantauan pemenuhan pelaporan LPEI kepada Pihak Ekstenral (merujuk pada PDE tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI) Monitoring of fulfilment of Indonesia Eximbank reporting to External Parties (referring to PDE on Operating Manual of Determination of Unit in Charge of Reporting)	Divisi kepatuhan secara rutin melakukan monitoring dan reminder kewajiban pelaporan kepada masing-masing PIC Pelaporan, saat ini Sistem Web Reminder telah berjalan kembali untuk melakukan reminder secara otomatis. Selama Januari –Desember 2020 tidak terdapat pelanggaran ataupun teguran atas kewajiban pelaporan LPEI kepada Regulator Compliance Division routinely monitoring and reminding the mandatory reporting to each Reporting PIC. Currently We Reminder has been operating again for automatic reminder. During January – December 2020, there were no violations or exemplary on Indonesia Eximbank reporting mandatory to Regulators.
5	Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan internal: 1. Kebijakan APU & PPT 2. Manual Penerapan Program APU & PPT 3. Manual Penerapan Know Your Employee 4. Manual Kewajiban Pelaporan LHKPN Pejabat LPEI 5. Kebijakan Tata Kelola LPEI Development and refinement of internal rules: 1. AML & CTF Policies 2. AML & CTF Program Manual 3. Know Your Employee Manual 4. LHKPN Reporting Mandatory Manual of Executives 5. Governance Policies	1. Pembentukan PDD Kebijakan APU & PPT (Target 31 Maret 2020) – (Done) 2. Penyempurnaan PDE Penerapan APU & PPT (Target 31 Maret 2020) – (Done) 3. Pembentukan PDE Penerapan Know Your Employee (Target 31 Desember 2020) – (Done) 4. Pembentukan PDD Kebijakan Tata Kelola LPEI (Target 31 Desember 2020) – (carry over 2021) 5. Penyempurnaan PDD dan PDE terkait Penyampaian LHKPN (carry over 2021) 1. Establishment of PDD for AML & CTF Policies (Target 31 March 2020) – (Done) 2. Refinement of PDE of for AML & CTF Practices (Target 31 March 2020) – (Done) 3. Establishment of PDD for Know Your Employee Practices (Target 31 December 2020) – (Done) 4. Establishment of PDD for Governance Policies (Target 31 December 2020) – (carry over 2021) 5. Refinement of PDD and PDE on LHKPN Submission (carry over 2021)
6	Hasil Penilaian Profil Risiko Kepatuhan Lembaga Assessment Result of Compliance Risk Profile	Telah dilakukan penilaian Profil Risiko Kepatuhan Lembaga secara berkala (Triwulanan) dengan hasil sbb: Triwulan I: Peringkat 3 Triwulan II: Peringkat 3 Triwulan III: Peringkat 3 Triwulan IV: Peringkat 3 Periodical Compliance Risk Profile assessment has been done (Quarterly) with the following results: Quarter I: Rank 3 Quarter II: Rank 3 Quarter III: Rank 3 Quarter IV: Rank 3

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

7	Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga GCG Assessment	Telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga baik oleh Divisi Kepatuhan dan Pihak Independen (SDP) LPEI memperoleh Predikat Komposit "Baik" dengan Nilai Komposit 1,98 atau Total Tingkat Kecukupan 82,45%. GCG Assessment has been done by Compliance Division and Independent Party (SDP) Indonesia Eximbank received Composite Predicate of "Good" with Composite Score of 1.98 or Total Adequacy of 82.45%.
8	Internalisasi dan penguatan penerapan Whistleblowing System (WBS) LPEI Internalization and strengthening Whistleblowing System (WBS)	Internalisasi dan penguatan penerapan Whistleblowing System (WBS) selama tahun 2020 diantaranya: 1. Sosialisasi terkait Whistleblowing System kepada Kantor Wilayah. 2. Telah dilakukan Sharing Session bersama Inspektorat Jenderal pada tanggal 29 Agustus 2020. 3. Melakukan benchmarking melalui workshop di Kementerian Keuangan tanggal 17 November 2020. 4. Join meeting bersama Komite Audit dan Internal Audit dalam rangka penguatan WBS. The following are Internalization and strengthening of Whistleblowing System (WBS) during 2020: 1. Dissemination of Whistleblowing System to Regional Offices. 2. Sharing Session with Inspectorate General on 29 August 2020. 3. Benchmarking through workshop at the Ministry of Finance on 17 November 2020. 4. Joint meeting with Audit Committee and Internal Audit on strengthening of Whistleblowing System
9	Monitoring dan Kajian Peraturan Regulator Monitoring and Studying the Regulations	Selama tahun 2020 Divisi Kepatuhan telah melakukan monitoring dan kajian terhadap seluruh peraturan regulator yang berdampak baik secara langsung atau tidak langsung terhadap LPEI. During 2020 Compliance Division has carried out monitoring and study on all regulations of the regulators that have direct or indirect impact to the Company.
10	Monitoring Prudential Principle (Sanksi/ Denda, BMPP, NPL, PDN) Monitoring Prudential Principle (Sanction/ Penalty, LLL, NPL, PDN)	Divisi Kepatuhan telah secara berkala melakukan monitoring terhadap Prudential Principle (Sanksi/Denda, BMPP, NPL, PDN) setiap bulannya dan dilaporkan dalam Laporan Kepatuhan kepada manajemen. Compliance Division has carried out regular monitoring on Prudential Principle (Sanction/ Penalty, LLL, NPL, PDN) every month and reported into Compliance Report to the management.
11	Penguatan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (menuju GRC), antara lain melalui: 1. Updating Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Internal dalam bentuk PDD / kebijakan; atau 2. Updating Manual Audit Internal dalam bentuk PDE; atau 3. Updating Audit Charter dalam bentuk PDE. Strengthening Internal Control System Policy (towards GRC), among others through: 1. Updating Internal Audit Function Policy in terms of PDD/policy; or 2. Updating Internal Audit Manual in terms of PDE; or 3. Updating Audit Charter in terms of PDE.	Realisasi Penguatan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (menuju GRC) selama tahun 2020: 1. Telah dilakukan diskusi antara RAM; MRO; & KPT, dengan Unit Kerja terkait (Bisnis; Operation; dll)- pada 23 September 2020 antara lain membahas: – Tindak lanjut hasil audit eksternal; – Tindak lanjut hasil kajian regulasi; dan – Pemaparan mengenai manfaat dari sinergi KPT-IAD-MRO – Pemaparan konsep GRC oleh Konsultan GCG (SDP) 2. Terkait dengan penyempurnaan Kebijakan Audit, Divisi Kepatuhan senantiasa melakukan support dalam bentuk penyediaan opini, masukan, dan pembahasan rapat dalam penyempurnaan kebijakan audit. Realization of Strengthening Internal Control System Policy (towards GRC) during 2020: 1. Discussion between RAM; MRO; & KPT; with related Work Unit (Business; Operation; etc.) on 23 September 2020 among others to discuss: – Follow up of external audit results; – Follow up regulation study results; and – Presentation on the benefits of KPT-IAD-MRO synergy – Presentation of GRC concept by GCG Consultant (SDP) 2. On Audit Policy refinement, Compliance Division always support by providing opinion, inputs, and meeting discussion in the refinement of audit policy.
12	Memastikan pelaksanaan pelaporan E-LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN di LPEI Ensuring E-LHKPN reporint by LJKPN Mandatory Reporting in the Company	Divisi Kepatuhan telah memastikan pelaksanaan pelaporan E-LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN di LPEI pada Tahun 2020. Compliance Division has ensured the implementation of E-LJKPN reporting by LHKPN Mandatory Reporting in the Company in 2020.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

13	Peningkatan kompetensi pegawai Employee competency enhancement	Seluruh personel kepatuhan telah mengikuti Sertifikasi, Pelatihan, E-learning, Seminar atau workshop. All compliance personnel has participated in the Certification, Trainings, E-learning, Seminar or workshops.
14	Pelaksanaan coaching (internal meeting/ sharing session) kepada pegawai di Divisi Kepatuhan Coaching (internal meeting/ sharing session) to employee of Compliance Division	Divisi Kepatuhan memiliki program secara rutin untuk melakukan internal meeting dengan satu divisi, masing-masing departemen, maupun masing-masing individu. Compliance Division has routine programs to carry out internal meeting with one division, each department, or each individual.
15	Pengembangan/ Penyempurnaan Sistem Informasi (Web Reminder System, Sistem APU & PPT, Search Engine Regulation, dan Computer Based Training) Development/ Refinement of Information System (Web Reminder System, AML & CTF System, Search Engine Regulation, and Computer Based Training)	Realisasi Pengembangan/ Penyempurnaan Sistem Informasi: 1. September 2020 Divisi Kepatuhan telah selesai melakukan enhancement terhadap System Web Reminder untuk membantu melakukan reminder dan monitoring secara otomatis. 2. Aplikasi CBT Kode Etik dan budaya lembaga LPEI sudah Launching pada tanggal 18 Desember 2020. 3. Dalam proses aktivasi mode blocking SWIFT Sanction Screening System. Realization of Development/ Refinement of Information System: 1. September 2020, Compliance Division has completed the enhancement of Web Reminder System to assist on automatic reminder and monitoring. 2. Application of CBT of Code of Conduct and work culture was launched on 18 December 2020. 3. The mode blocking SWIFT Sanction Screening System is under activation process.
16	Menindaklanjuti komitmen/temuan hasil pemeriksaan Regulator/Otoritas yang berwenang (Kementerian Keuangan, OJK, BPK, PPATK) dan Auditor Eksternal Following up the commitment/finding of audit of Regulators/Authorities (Ministry of Finance, OJK, BPK, PPATK) and External Auditor	Divisi Kepatuhan telah menindaklanjuti 100% seluruh komitmen/temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal pada tahun 2020. Compliance Division has 100% followed up all commitments/audit findings of External Auditor in 2020.
17	Melakukan kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan penerapan program APU-PPT Carrying out reporting mandatory related with AML-CTF programs	Melakukan kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan penerapan program APU-PPT, selama periode Semester II-2020, sebagai berikut: • Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) – 7 Laporan. • Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) – 5 Laporan. • Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah. • Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah. • Laporan Nihil/Pemblokiran Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTOT) – 3 Laporan. • Laporan Semester Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU-PPT kepada Manajemen. Carrying out reporting mandatory related with AML-CTF programs during the period of Semester II-2020, as follows: • Suspicious Financial Transaction Report (LTKM) – 7 Reports. • Integrated Service User Information System Report (SIPESAT) – 5 Reports. • Customer Data Update Plan Report. • Customer Data Update Realization Report. • Alleged Terrorist/Terrorist Organization List Nil/Block Report (DTOT) – 3 Report. • Semester Report on Compliance Function and AML-CTF Program to the Management.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Rencana Kerja Divisi Kepatuhan tahun 2021
Compliance Division Work Plans 2021

No.	Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2021 | 2021 Compliance Work Plan
1	Peningkatan Budaya Kepatuhan melalui sosialisasi/pelatihan mengenai fungsi kepatuhan, tata kelola, APU-PPT kepada seluruh pegawai. Compliance Culture improcement through dissemination/traiing on compliance function, governance, AML-CTF to all employees.
2	Melakukan kajian kepatuhan atas peraturan Regulator dan berkoordinasi dengan Compliance Champion dalam menyampaikan kajian peraturan Regulator termasuk sosialisasi dan tindaklanjutnya. Compliance study on Regulatory and coordinates with Compliance Champion in submitting Regulatory study including its dissemination and follow up.
3	Memberikan advis, opini dan/atau kajian kepatuhan dalam Penyusunan Kebijakan/Prosedur LPEI. Provide advice, opinion and/or study on compliance in the Policy/Procedure Development.
6	Optimalisasi pemantauan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal. Optimizing monitoring of reporting mandatory to external parties.
7	Pelaksanaan uji kepatuhan dan pemeriksaan KYC/ APU PPT atas Proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, Trade Finance, Bank Line, dan Global Line, termasuk Program PEN (Penyelamatan Ekonomi Nasional) dan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Compliance test and audit on KYC/AML CTF on the Proposals of Financing, Guarantee, Insurance, Trade Finance, Bank Lines, and Global Lines, including NER Program (National Economic Recovery) and National Interest Account (NIA) program.
8	Compliance Assessment (Uji Petik) terhadap Debitur di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Compliance Assessment on Borrowers at the Head Office and Regional Office.
9	Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga. GCG Assessment.
10	Efektifitas pelaksanaan Screening, verifikasi dan penilaian profil risiko nasabah pada saat pengajuan baru maupun pengkinian. Effectiveness of Screening, verification and assessment of risk profile for new proposals or updating.
11	Implementasi SWIFT Sanction Screening System. Implementation of SWIFT Sanction Screening System.
12	Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan internal: • Kebijakan & Prosedur APU-PPT • Manual SWIFT Sanction Screening • Manual Kewajiban Pelaporan LHKPN Pejabat LPEI • Kebijakan Tata Kelola LPEI Development and refinement of internal rules: • AML-CTF Policies & Procedures • SWIFT Sanction Screening Manual • LHKPN Executives Mandatory Reporting Manual • GCG Policies
13	Pelaporan APU & PPT (SIPESAT, DTTOT, LTKM, Laporan Rencana & Realisasi Pengkinian Data Nasabah, serta Laporan Penerapan APUPPT kepada Manajemen). Reporting of AML & CTF (SIPESAT, DTTOT, LTKM, Customer Data Update Plan & Realization Reports, and AML CTF Report to the Management).
14	Internalisasi dan penguatan penerapan Whistleblowing System (WBS) LPEI. Internalization and strengthening of Whistleblowing System (WBS).
15	Peningkatan kompetensi pegawai Divisi Kepatuhan. Enhancement of employee competency of Compliance Division.
16	Pelaksanaan coaching (internal meeting/ sharing session) kepada pegawai di Divisi Kepatuhan. Coaching (internal meeting/ sharing session) to employee of Compliance Division.
17	Pengembangan/ Penyempurnaan Sistem Informasi (Web Reminder System, Sistem APU & PPT, Search Engine Regulation, dan Computer Based Training). Development/ Refinement of Information System (Web Reminder System, AML & CTF System, Search Engine Regulation, and Computer Based Training).
18	Menindaklanjuti komitmen/temuan hasil pemeriksaan Regulator/Otoritas yang berwenang (Kementerian Keuangan, OJK, BPK, PPATK) dan Auditor Eksternal. Following up commitments/audit findings of Regulators/Authorities (Ministry of Finance, OJK, BPK, PPATK) and External Auditors.

Pelatihan dan Sertifikasi Tahun 2020
Personil Divisi Kepatuhan selama tahun 2020 telah mengikuti pelatihan, seminar maupun sosialisasi sebagai berikut:

Trainings and Certifications in 2020
The following are trainings and certifications participated by Compliance Function personnel during 2020.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Kategori Category	Judul Program Programs	Penyelenggara Organizers
Risk Management	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1 Certification	LSPP & BARA
Risk Management	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Level 2 Certification	LSPP & BARA
Risk Management	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Level 3 Certification	LSPP & BARA
Risk Management	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Refreshment of Risk Management Level 2 Certification	IBI BCC
Risk Management & Compliance	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1 Certification	LSPP
Pengadaan Barang & Jasa Goods & Services Procurement	Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Government Goods & Services Procurement Certification	Eksternal | External
Basic Sharia Financing	Training Sertifikasi Perbankan Syariah Sharia Banking Certification Training	LPEI
Sosialisasi Dissemination	Sosialisasi PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dissemination of PMK No. 58/PMK.06/2020 on the Development and Supervision of Indonesia Eximbank	LPEI
Sosialisasi Dissemination	Sosialisasi Unit Pengendali Gratifikasi Dissemination of Gratification Control Unit	KPK
Sosialisasi Dissemination	Sosialisasi Roadmap Penerapan Penguatan Integritas dalam Organisasi Dissemination of Roadmap of Integrity Solidification in Organization	EY
Sosialisasi Dissemination	Sosialisasi Tahapan Awal Penerapan ESMS Kelembagaan di LPEI Dissemination of Initial Stage of Institutional ESME Practices in Indonesia Eximbank	Hatfield Consultants
Seminar	Seminar Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pasca Pandemik Covid-19 Seminar of Sustainable Finance Implementation Post Covid-19 Pandemic	OJK
Webinar	Webinar Penerapan Risk Based Approach dalam Program APU-PPT Webinar of Risk Based Approach Practice in AML-CTF Program	EY
Performance Management	Performance Management Training	LPEI
Softskill Training	Training: Mastering and Enhancing PowerPoint 2016 Presentations	Executrain
Sosialisasi Dissemination	Sosialisasi Roadmap Penerapan Penguatan Integritas dalam Organisasi Dissemination of Roadmap of Integrity Solidification in Organization	EY
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Education and Training	Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Perusahaan Pembiayaan oleh PPATK Training of Financial Transactoin for Financing Companies by PPATK	PPATK
Good Corporate Governance	Sosialisasi Penguatan Implementasi Tata Kelola yang Baik di LPEI Dissemination of GCG Strengthening at Indonesia Eximbank	PT Sinergi Daya Prima
Pelatihan Training	Advance Trade Credit Insurance (TCI)	Eksternal | External
Seminar	Sinergitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK) Synergistic of Personal Data Protection Policy with Effectiveness of Prevention and Eradication of Money Laundry Crime (PPATK)	PPATK
GCG & Fraud	Implementing Effective Anti Bribery Controls in Organization	EY
Webinar	How to Mitigate the Risk Related to Human Factor	Bank Mizuho
Pelatihan Training	Traning Aplikasi e-Procurement LPEI	LPEI
Sosialisasi Dissemination	Enhancement SLIK OJK	OJK
Computer Based Training	CBT Kode Etik & Budaya Kerja	LPEI
Sosialisasi Dissemination	Sosialisasi Internal Pengaktifan User Supervisor SLIK OJK Dissemination of Internal Activation of User Supervisor SLIK OJK	LPEI

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

LPEI menaruh perhatian yang besar dan terus melakukan pengawasan atas aspek risiko yang dihadapinya terutama risiko yang berdampak signifikan terhadap kegiatan Lembaga agar dapat diantisipasi sedini mungkin.

Indonesia Eximbank places great attention and continues to mitigate the encountered risks, particularly the risks that have significant impact on the Company's activities hence to be able to anticipate such risks as early as possible.

Kebijakan

Kebijakan penerapan manajemen risiko LPEI disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI. Dasar penerapan manajemen risiko LPEI adalah Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.

Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh jajaran manajemen sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Selain itu, Manajemen juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Policy

Risk Management policy in Indonesia Eximbank is adapted to business objectives and policies, as well as business size and complexity. Risk Management implementation refers to Article 17 Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, and Minister of Finance Regulation (PMK) No. 142/PMK.010/2009 dated August 13 2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management.

Implementation of risk management is the responsibility of all levels of management in accordance with their respective functions and authorities.

In addition, the Management shall also ensure that the organization has adequate structure, determine clear duties and responsibilities of each unit, as well as ensure adequate quantity and quality of Human Resources to support an effective implementation of Risk Management.

Dasar Hukum

Berikut dasar kebijakan dan peraturan yang dijadikan acuan dalam penerapan manajemen risiko LPEI:

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.
3. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional (Enterprise Risk Management Manual) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Legal References

The following are the basic policies and regulatory applied as references in implementing risk management:

1. Article 17 of Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Institution.
2. Minister of Finance Regulation No. 142/PMK.010/2009 dated August 31, 2009 on Indonesia Eximbank Risk Management.
3. Regulation of the Board of Directors (PDD) No. 0006/PDD/07/2018 on Enterprise Risk Management Policy of the Indonesian Export Financing Institution.
4. Executive Director Regulation (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 on the Enterprise Risk Management Manual of the Indonesian Export Financing Institution.

Fokus Penerapan Manajemen Risiko 2020

Pada tahun 2020, LPEI melakukan beberapa langkah penerapan dan upaya penyempurnaan proses manajemen risiko kredit, antara lain:

Risk Management Implementation Focuses in 2020

In 2020, Indonesia Eximbank carried out several measures and refinement of credit risk management process, among others:

1. Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta manual operasional pembiayaan yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan manajemen risiko yang lebih baik.
2. Tersedianya tools Manajemen Risiko yang mengacu kepada best practice, yaitu *Industrial Acceptance Criteria, Risk Appetite Statement (RAS),* dan *Portfolio Guideline*.
3. Dikembangkannya *Environmental and Social Management System (ESMS) Framework*.
4. Pengembangan kerangka penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)yang sui generis.
5. Implementasi permodelan risiko untuk pengukuran instrumen keuangan sesuai PSAK 71.
6. Permodelan dan Pengukuran CKPN kolektif dengan metode backtesting.
7. Pengukuran Peringkat Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI.
8. Pengukuran stress testing terhadap portfolio pembiayaan LPEI.
9. Kaji ulang alat ukur profil risiko.
10. Peningkatan *risk culture* di LPEI melalui sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai LPEI

1. Development and refinement of financing operating manual and policies adjusted with the development of organization and improved risk management.
2. Availability of Risk Management tools that refer to best practices, such as Industrial Acceptance Criteria, Risk Appetite Statement (RAS), and Portfolio Guidelines.
3. Development of Environmental and Social Management System (ESMS) Framework.
4. Development of sui generis Risk Management Framework.
5. Implementation of risk model to measure financial instrument according to PSAK 71.
6. Modeling and measurement of collective allowance for impairment losses with backtesting method.
7. Measurement of Risk Profile Rating and Soundness Rating of Indonesia Eximbank.
8. Measurement of stress testing to the Company's financing portfolio.
9. Re-studying of risk profile measurement tool.
10. Enhancement of risk culture at Indonesia Eximbank through risk management certifications for the Company's employees.

Sistem Manajemen Risiko

Penerapan Sistem manajemen risiko di LPEI bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha untuk tetap berada dalam koridor profil risiko yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sistem manajemen risiko LPEI berfungsi sebagai penyaring atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang didukung infrastruktur sistem yang dapat mengumpulkan dan mengolah data risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga.

Risk Management System

The implementation of risk management system in Indonesia Eximbank aims to manage business activities while remaining within the corridor of a controlled, directed, integrated and sustainable risk profile. Indonesia Eximbank risk management system functions as a screening or an early warning system carried out thoroughly, including the stages of identification, measurement, monitoring and risk control fostered by a system infrastructure that can collect and process risk data in all of Company's business activities.

Pilar Manajemen Risiko

Empat pilar penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi. Cakupan empat pilar tersebut adalah:

Risk Management Pillar

Four Pillars of risk management application as mentioned in Minister of Finance Regulation No. 142/PMK.010/2009 becomes reference in the implementation of risk management in Financing, Guarantee and Insurance business activities. The scope of four pillars are as follows:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan serta pemahaman tentang Manajemen Risiko LPEI secara enterprise risk dipetakan dalam sebuah kerangka kerja sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap internalisasi risk culture di LPEI. Adapun ERM *framework* yang telah disusun sebagai berikut:

1. Active supervision of the Board of Directors and Executive Directors.
2. Adequacy of policies, procedures and stipulation of risk thresholds.
3. Adequacy of process of identification, measurement, monitoring, and risk control as well as risk management information system; and
4. Comprehensive internal control system.

Implementation on Indonesia Eximbank Risk Management in terms of enterprise risk is mapped in a framework to strengthen the link to risk culture internalization at Indonesia Eximbank. The ERM framework is as follows:

Kerangka ERM
ERM Framework

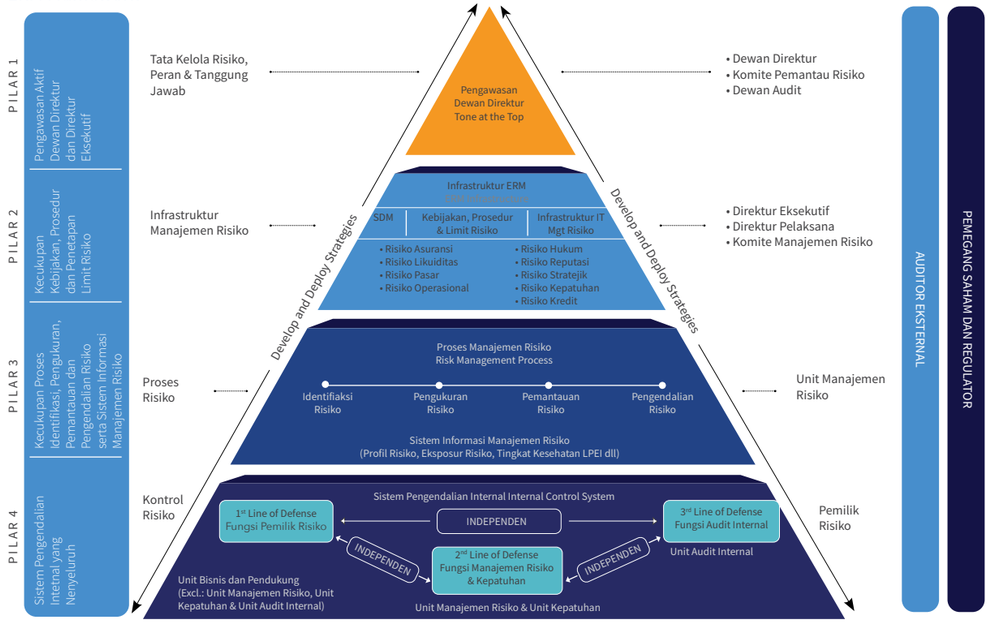

Kerangka ERM dibagi menjadi 4 (empat) pilar, dengan penjelasan sebagai berikut:

ERM framework is divided into 4 (four) pillars, with the following explanation:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pilar 1: Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif

Pillar 1: Active Supervision of the Board of Directors and Executive Director

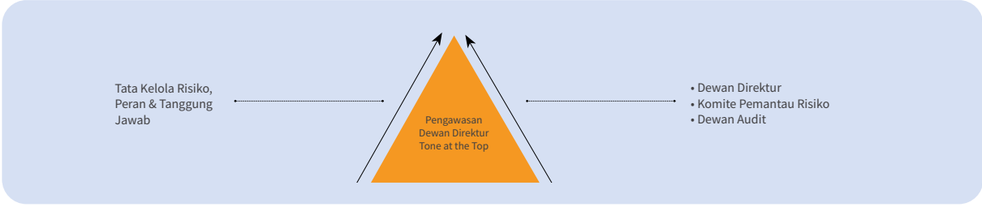

Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif berfungsi oversight board dalam membangun risk governance di LPEI. Pengawasan aktif Dewan Direktur dilakukan melalui pemberian persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direktur Eksekutif. Secara berkala Dewan Direktur juga melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan, Dewan Direktur secara berkala setiap 1 bulan sekali melakukan Rapat Dewan Direktur. Pengawasan Dewan Direktur di bidang manajemen risiko di bantu oleh Komite Pemantau Risiko. Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko tersebut melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional LPEI.

Pengawasan Aktif Dewan Direktur yang dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dilakukan paling kurang meliputi:
a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Sedangkan pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:
a. Merumuskan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan.

Active supervision by the Board of Directors and Executive Director is an oversight board function in building risk governance at Indonesia Eximbank. The active oversight of the Board of Directors is carried out through the approval and evaluation of risk management policies prepared by the Executive Director. Periodically the Board of Directors also evaluates the implementation of risk management policies.

In carrying out oversight duties, the Board of Directors periodically holds a monthly Board of Directors Meeting. The Board of Directors oversight in risk management is assisted by the Risk Monitoring Committee, in which duties include to carry out regular assessments and provide recommendations on business risks in relation to Indonesia Eximbank National Export Financing.

Active supervision of the Board of Directors assisted by the Risk Monitoring Committee, consists of at the very least:
a. Approving and evaluating risk management policies.
b. Evaluating risk management policies implementation.

Active supervision by the Executive Director consists of at the very least:
a. Formulating written and comprehensive Risk Management policies and strategy.
b. Implementing Risk Management policies and overall risk exposure taken by the Company.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif
d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   – Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   – Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
   – Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Adapun tataran pelaksanaan pengawasan aktif telah dilakukan melalui berbagai laporan dan rapat rutin sebagai berikut:
- Rapat bulanan terkait ekposur risiko kredit, pasar dan likuiditas.
- Penyampaian sistem informasi manajemen risiko secara bulanan.
- Penyampaian profil risiko secara triwulan.
- Penyampaian penilaian tingkat kesehatan risiko secara triwulan.
- Rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah.
- Pengungkapan manajemen risiko secara triwulan.

c. Evaluating and deciding on transactions that require the approval of Execurive Director
d. Developing Risk Management culture at all levels of organization
e. Ensuring competency improvement of personnel related to risk management.
f. Ensuring independent operation of Risk Management function.
g. Implementing regular reviews to ensure:
   – Accuracy of risk assessment methodology.
   – Adequacy of risk management information system implementation.
   – Accuracy of risk threshold policies, procedures and determination.

Active supervision has been carried out through various reports and routine meetings as follows:
- Monthly meetings on credit risk, market risk and liquidity risk exposure.
- Submission of monthly risk management information system.
- Submission of quarterly risk profile.
- Submission of quarterly risk health assessment result.
- Regular meetings with the Shariah Supervisory Board.
- Disclosure of risk management on quarterly basis.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko

Pillar 2: Adequacy of Policies, Procedures and Risk Limits

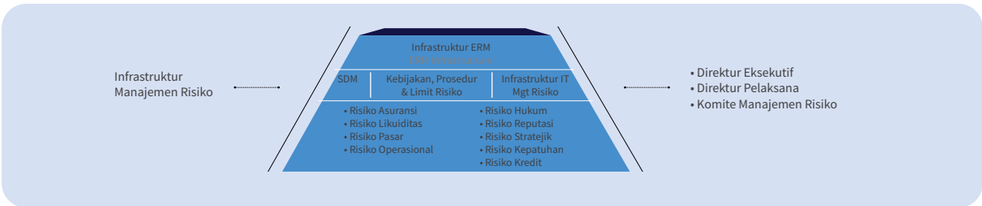

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis dituangkan dalam beberapa kebijakan, prosedur dan limit risiko, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Dewan Direktur, dimulai dari kebijakan umum manajemen risiko, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko dan proses manajemen risiko.

Selanjutnya Kebijakan Manajemen Risiko tersebut dirumuskan secara lebih terperinci dalam manual operasional yang di tetapkan dalam PDD.

Adapun 3 (tiga) kelompok kebijakan, manual dan SOP yaitu kelompok kegiatan usaha, kelompok operasional dan kelompok pengendalian internal. Kebijakan, manual, dan SOP kelompok kegiatan usaha merupakan serangkaian pedoman dan prosedur yang digunakan di LPEI dalam menjalankan kegiatan usaha (Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi). Kebijakan, manual, dan SOP kelompok operasional menjadi pedoman dan prosedur dalam menjalankan kegiatan penunjang usaha. Sedangkan kebijakan, manual, dan SOP kelompok pengendalian internal merupakan pedoman dan prosedur untuk melakukan pengendalian internal.

Integrated and systematic risk management principles are stipulated in the policies, procedures and risk limits, such as Risk Management Policy defined in Regulation of the Board of Directors, from risk management general policy, strategy, organization, risk management information system and risk management process.

Furthermore, the Risk Management Policy is formulated in more detail in the operational manual specified in the PDD followed by the operational manual.

The 3 (three) groups of policies, manuals and SOPs are business activity groups, operational groups and internal control groups. The business activities group policies, manuals, and SOPs are a set of guidelines and procedures used at Indonesia Eximbank in conducting business activities (Financing, Guarantee, Insurance). Policies, manuals, and operational group SOPs are guidelines and procedures in carrying out business support activities. While policies, manuals, and SOPs for internal control groups are guidelines and procedures for carrying out internal controls.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

Risiko Pillar 3: Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes and Risk Management Information Systems

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia dengan memperhatikan probabilitas timbulnya risiko beserta konsekuensinya. Implementasi kecukupan proses identifikasi risiko antara lain melalui analisis risiko bisnis dalam kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, kajian risiko Negara dan kajian pemetaan potensi risiko bisnis melalui riset komoditas, sektor industri atau perkembangan ekonomi wilayah tertentu. Selain itu, LPEI juga melakukan kajian risiko pendanaan yang akan dilakukan.

Risk identification is conducted by combining and analyzing the risk information from all available sources of information by taking into account the probability of risk and consequences. Adequacy of risk identification process, among others, is carried out through business risk analysis in Financing, Guarantee and Insurance, Country risk assessment and study of potential business risk mapping through commodity research, industrial sector or economic development of certain regions. Moreover, Indonesia Eximbank also reviews the financing risk.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pengukuran risiko ditujukan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada kegiatan usaha untuk dibandingkan dengan risk appetite LPEI, sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko dan ditetapkan kecukupan modal atas risiko residualnya. Besaran risiko dapat diukur secara individual, maupun portofolio. Selain itu LPEI juga melakukan stress testing untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem. Pemantauan risiko dilakukan berdasarkan perbandingan antara limit risiko yang ditetapkan dengan eksposur risiko yang dikelola. Pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan oleh risk taking unit, risk owner dan risk control unit berdasarkan jenis risiko. Hasil penilaian risiko tersebut secara berkala dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerapan manajemen risiko termasuk tersedianya kebijakan, prosedur dan limit risiko.

Risk measurement is aimed to determine the amount of risk inherent in business activity to be compared with risk appetite of Indonesia Eximbank, hence risk mitigation can be performed and capital adequacy is determined for its residual risk. The risk amount can be measured individually or in portfolio. In addition, LPEI also conducts stress testing to anticipate extreme conditions. Risk monitoring and control is performed on the basis of comparison between specified risk thresholds and risk exposures. Risk monitoring is conducted by risk taking unit, risk owner and risk control unit based on the type of risk. The results of the risk assessment are regularly reported to stakeholders.

A technology-based risk management system is also developed to improve the quality of risk management infrastructure including the availability of policies, procedures and risk thresholds.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal

Pillar 4: Internal Control System

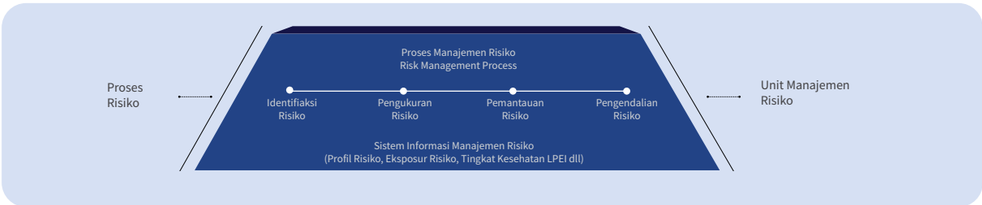

Sistem pengendalian intern LPEI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:

- *First line of defense* merupakan *business function* yang terdiri dari unit kerja bisnis dengan aktivitas fungsional sebagai unit kerja yang memasarkan dan memproses Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi dengan merujuk pada kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan dikaji secara joint memo oleh unit kerja Analisa Risiko Bisnis yang bertindak sebagai *dynamic partner* dari unit bisnis serta unit kerja pendukung yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.
- *Second line of defense* merupakan *risk management and compliance function* yang terdiri unit kerja Manajemen Risiko dan unit kerja yang melakukan fungsi kepatuhan. Unit-unit tersebut bersifat independen dalam memantau penerapan manajemen risiko secara keseluruhan di LPEI termasuk dalam pelaksanaan kegiatan kepatuhan.
- *Third line of defense* merupakan *internal audit function* yang terdiri dari unit kerja Audit Internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada *first and second lines of defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana secara independen.

Internal control system in Indonesia Eximbank is developed and implemented using Three Lines of Defense model consisting of:

- First line of defense is business function consisting of business units with functional activities as work units which markets and processes financing, guarantee and insurance with reference to the policy, procedures and limits determined and reviewed as a joint memo by Business Risk Analysis Unit that acts as a dynamic partner of business unit and supporting units that fosters business activities.
- The Second line of defense is a risk management and compliance function consisting of Risk Management units and other units in charge of compliance functions. These units are independent in monitoring the implementation of overall risk management at Indonesia Eximbank, including in the implementation of compliance activities.
- Third line of defense is Internal Audit Unit function which consists of an Internal Audit unit that functions to control the evaluation of the first and second lines of defense and provide reports to the Executive Director and Managing Director independently.

Prinsip-Prinsip Penerapan Manajemen Risiko

LPEI wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, yang meliputi:

1. Kecukupan modal, yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai Risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi, yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan Risiko.
3. Independensi, yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
4. Konsolidasi, yaitu bahwa pengelolaan Risiko dilakukan secara kelembagaan dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis Risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
5. Proses berkelanjutan, yaitu bahwa pengelolaan Risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
6. Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaran kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
7. Responsibilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.

Risk Management Principles

Indonesia Eximbank shall implement effective risk management by applying the following risk management principles:

1. Capital adequacy, Indonesia Eximbank shall be able to allocate its capital in accordance with its risks appetite and strives to maintain the level of capital adequacy in accordance with applicable regulations.
2. Transparency, Indonesia Eximbank shall transparently convey relevant information in the risk-taking process.
3. Independency, Indonesia Eximbank management shall conduct professional action without influence or pressure from any parties.
4. Consolidated, risk management shall be implemented corporate-wide in an integrated and consolidated manner among all types of risks and work units and is undertaken comprehensively.
5. Continuous process, risk management shall be carried out continuously at all times and shall be continuously improved in line with business conditions and applicable best practices.
6. Accountability, Indonesia Eximbank business conduct shall describe the function of each related party to the Company in accordance with prevailing regulations and common practices.
7. Responsibility, Indonesia Eximbank business conduct shall determine and describe the role and status of each party related to the Company with regard to policy formulation and implementation.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

8. Kewajaran, yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Obyektif, yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria Risiko standar yang baku dan dianalisa secara obyektif.
10. Relevan, yaitu bahwa LPEI harus manganalisa Risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis Risiko yang dihadapi.
11. Komprehensif, yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajamen Risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi Risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis Risiko tertentu.

8. Fairness, Indonesia Eximbank shall maintain fairness and equality in fulfilling the rights of parties based on agreements as well as prevailing laws and regulations.

9. Objective, Indonesia Eximbank shall implement Risk Management by using standardized risk criteria and objectively analyzed.

10. Relevancy, Indonesia Eximbank shall conduct risk analysis using the relevant methodology for the particular risk type.
11. Comprehensive, Indonesia Eximbank shall implement risk management in a comprehensive manner for all existing risk potential and without partiality for certain types of risk.

Struktur Manajemen Risiko
Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, organisasi dan fungsi manajemen risiko dibagi menjadi:
1. Kewenangan dan Tugas Dewan Direktur
   Pelaksanaan Tugas-tugas Dewan Direktur yang berkaitan dengan manajemen risiko dibantu oleh komite di bawah Dewan Direktur, yaitu Komite Pemantau Risiko.
2. Kewenangan dan Tugas Direktur Eksekutif
   Komite Manajemen Risiko bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   Satuan ini harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau kepada Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

Risk Management Structure
For effective Risk Management process and system, the organization and function of risk management are divided into:
1. Authority and duties of the Board of Directors
   The implementation of duties of the Board of Directors relating to risk management are assisted by committee under the Board of Directors, namely Risk Monitoring Committee.
2. Authority and Duties of the Executive Director
   Risk Management Committee in charge in providing recommendations to Executive Director.
3. Risk Management Unit
   This unit shall be independent from the risktaking unit and internal control function. The Risk Management unit is responsible directly to the Executive Director or to a specially assigned Managing Director.

Risiko-risiko yang Dihadapi dan Upaya Mitigasi
Manajemen Risiko LPEI bertujuan untuk mengelola setiap risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional Lembaga.

Jenis risiko adalah pengelompokan potensi kerugian yang material, dan yang mungkin timbul dalam kegiatan atau area yang berbeda dalam perusahaan. Secara umum LPEI mengidentifikasi beberapa risiko utama yang berpotensi memiliki dampak terhadap aktivitas operasional Lembaga.

Risks and Risk Mitigation
Risk Management in the Company aims to manage every risk by identifying, analyzing and mitigating risks that may arise from the Company's operations.

Risk Type is a grouping of potential losses which are material, and which may arise in different activities or areas of the company. In general Indonesia Eximbank identifies some of the main risks that could potentially impact the Company's operational activities.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Risiko yang dihadapi LPEI hingga akhir tahun 2020 terdiri dari sembilan risiko, yaitu risiko kredit, risiko asuransi, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Pengelolaan sembilan risiko tersebut juga termasuk pengelolaan risiko Penugasan Khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 198/ PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI. Namun pada tahun 2020, seiring dengan perkembangan kegiatan usaha, jumlah jenis risiko yang harus dikelola LPEI akan bertambah menjadi 11 jenis risiko diantaranya:
1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Asuransi
10. Risiko Investasi Syariah
11. Risiko Imbal Hasil Syariah

Sementara terkait alat pengukuran, dan metodologi selama tahun 2020, LPEI terus berupaya menyempurnakan formula penilaian risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang proporsional dengan kegiatan usaha LPEI. Baik itu mengacu dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun international best practices. Sedangkan terkait risk culture, pegawai LPEI yang mengikuti sertifikasi manajemen risiko telah mencapai sekitar 80% hingga akhir tahun 2020.

Dengan adanya upaya proses penyempurnaan sistem manajemen risiko yang befungsi sebagai penyaring dan pemberi peringatan dini oleh LPEI di tahun 2020, maka kerangka kerja manajemen risiko LPEI besar harapan akan mengalami titik balik pada tahun 2021. Sehingga pelaksanaan kegiatan usaha LPEI senantiasa berada dalam koridor profil risiko lembaga yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan dirumuskan langkah mitigasinya agar dampak yang timbul dapat terkendali. Berikut penjelasan dari masing-masing risiko serta mitigasi yang dilakukan Lembaga.

As of the end of 2020, Indonesia Eximbank mitigated nine risks that include credit risk, insurance risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk. The management of those risks also includes the Special Assignment risk management through RI Minister of Finance Regulation No. 198/PMK.08/2017 concerning Special Assignment to Indonesia Eximbank. However in 2020, in accordance with business developments, Indonesia Eximbank shall manage 11 risk types, as follows:

1. Credit Risk
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Operational Risk
5. Legal Risk
6. Reputation Risk
7. Strategic Risk
8. Compliance Risk
9. Insurance Risk
10. Investment Risk (Sharia)
11. Return Risk (Sharia)

In relation to risk appetite, measurement instruments, and methodology during 2020, Indonesia Eximbank strives to improve the inherent risk assessment formula and Risk Management Implementation Quality, in proportion with the Company's business activities, by referring to Financial Service Authority Regulations (POJK) and International Best Practices. While on risk culture, 80% of Indonesia Eximbank employees have attended risk management certification by the end of 2020.

With risk management system improvement process that serves as screening and early warning by Indonesia Eximbank in 2020, its risk management framework will experience a turning point in 2021, thereby Indonesia Eximbank business activities will be in a controlled, focused, integrated, and continuous risk profile corridor.

Such risks shall be well managed and the mitigation of each risk must be formulated hence the impacts that arise can be controlled. The following are elaboration on each risk and its mitigation efforts by the Company.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

1. RISIKO KREDIT

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan nasabah atau *counterparties* melakukan pembayaran kembali kepada LPEI.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit, mitigasi risko yang dikembangkan dan dilaksanakan LPEI antara lain:

- Telah memiliki *early warning system* seperti *Credit Rating* dan *Scoring System, E-Monitoring Sheet, Pefindo Scoring, PDO report*. Dalam tahun 2020 juga telah dikembangkan *tools* Manajemen Risiko seperti Portfolio *Guideline* dan *Industry Risk Acceptance Criteria* yang akan diimplementasikan secara efektif mulai tahun 2021.
- Memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Pembiayaan, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Pembiayaan, Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan. Kebijakan, Manual dan Petunjuk Teknis merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Manual sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas portfolio LPEI.
- Proses manajemen risiko kredit berlangsung secara berkesinambungan yang diawali dengan penetapan strategi dan perencanaan, *customer insight*, perencanaan portofolio, pengembangan produk, pemrosesan pembiayaan, pemantauan yang intensif, administrasi kredit dan optimisasi portofolio.
- Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas dan kesadaran akan manajemen risiko bagi pegawai, maka pegawai juga diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen risiko.
- Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko kredit senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama, Portfolio Quality Report dan pembahasan melalui forum secara berkala.
- Ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, disamping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.

1. CREDIT RISK

Credit risk is defined as the risk of the inability of debtors or counterparties to fulfill its obligation to the Company.

To anticipate and control credit risk, the risk mitigation developed and implemented by the Company includes:

- Early warning system such as Credit Rating and Scoring System, E-Monitoring Sheet, Pefindo Scoring, PDO report. In 2020, Risk Management tools such as Portfolio Guideline and Industry Acceptance Criteria have been developed which will be implemented effectively starting in 2021.
- Internal rules regarding Financing Policies, Executive Director Regulations on Financing Manuals, Financing Operational Technical Guidelines, and the Financing Committee. Policies, Manuals and Technical Guidelines are improvements to the previous Policies and Manuals as an effort to continuously improve the quality of the Company's portfolio.
- Credit risk management process takes place continuously, starting with the establishment of a strategy and planning, customer insights, portfolio planning, product development, financing processing, intensive monitoring, credit administration and portfolio optimization.
- In addition to increasing the capability and awareness of risk management for employees, employees are also given training related to risk management.
- At the level of portfolio risk exposure, credit risk exposure is monitored and reported regularly to the Management, among others, through the submission of management reports on major risk exposures, Portfolio Quality Report and discussion through periodical forums.
- Set a Legal Lending Limit (LLL) which is the maximum limit of financing for each individual and group, besides that LLL is used as an effort to manage the risk of financing concentration.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*impairment*) adalah kondisi saat nilai aset tercatat (*carrying amount*) suatu aset keuangan melebihi nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) dari aset tersebut. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Kredit

Perangkat dan Metode

Untuk mendukung proses bisnis dan pengelolaan risiko kredit selama tahun 2020, LPEI telah mengembangkan dan menyempurnakan beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio.

Pada tataran eksposur individu, LPEI telah mengembangkan *internal rating system* untuk segmen korporasi. Pengembangan tersebut antara lain peningkatan alur proses *input* dan *approval* serta integrasi data untuk *lambrown, monitoring sheet* dan memorandum analisa pembiayaan.

LPEI menerapkan IEB *Credit Rating System* untuk analisa debitur baru dan/atau analisa pemantauan debitur eksisting. Potensi risiko secara individual dapat diindikasikan melalui hasil peringkat (*rating*). Hasil peringkat IEB *Credit Rating System* digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan debitur serta sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap penurunan kinerja keuangan debitur.

Dengan sistem *rating*, LPEI dapat memproses pembiayaan dengan kualitas lebih baik, objektif dan standar, serta dengan waktu proses relatif lebih cepat. Sistem *rating* mengklasifikasikan entitas perusahaan atau korporasi secara sistematis ke dalam satu kelas risiko (*grading* atau peringkat). Selain sebagai alat bantu dalam mendukung proses persetujuan pembiayaan, sistem *rating* dan *scoring* juga merupakan alat bantu penerapan *risk based pricing* dan *portfolio management*. *Monitoring* juga dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan *rating*

- Formation of Allowances for Impairment Losses is a condition when the carrying amount of a financial asset exceeds the recoverable amount of the asset. The Company periodically evaluates the impairment of all financial assets except for financial assets classified in groups which is measured as fair value through profit and loss.

Credit Risk Management Policies and Procedures

Tools and Methods

To support business processes and credit risk management during 2020, the Company has developed and refined several credit risk management tools at both the individual and portfolio levels.

At the individual exposure level, the Company has developed an internal rating system for the corporate segment. These developments include improving the input and approval process flow as well as integrating data for lambrowns, monitoring sheets and financing analysis memoranda.

The Company implements the IEB Credit Rating System for new debtor analysis and/or monitoring analysis of existing borrowers. Individual potential risk can be indicated through the rating results. The IEB Credit Rating System rating results are used as a tool to measure the financial performance of the borrowers and as an early warning against the decline in the borrowers' financial performance.

With a rating system, the Company can process financing with better quality, objective and standard, and with relatively faster processing time. The rating system classifies corporate or corporate entities systematically into one risk class (grading or rating). Apart from being a tool in supporting the financing approval process, the rating and scoring system is also a tool for implementing risk-based pricing and portfolio management. Monitoring is also carried out on debtors who have decreased their

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

menjadi *non investment grade*, agar tidak mengarah menjadi *Non Performing Loan*.

Sedangkan pada tataran eksposur portofolio, telah ditetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup. Disamping itu BMPP juga digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.

LPEI juga memiliki batas *inhouse limit* sebagai salah satu strategi pengendalian risiko konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi pembiayaan yang selama ini telah terdiversifikasi cukup baik.

Perhitungan *inhouse limit* merupakan gabungan pembiayaan, retensi sendiri penjaminan, dan retensi sendiri asuransi. Pemberian fasilitas pembiayaan dilarang melebihi *inhouse limit* (pelanggaran), namun pelampauan *inhouse limit* akibat perubahan kurs dan/atau perubahan modal LPEI akan dilakukan penurunan *outstanding* secara bertahap.

Dalam mengelola risiko kredit secara portofolio dan individual, LPEI juga melakukan *stress testing* dengan beberapa skenario untuk menilai ketahanan usaha dari debitur dalam menghadapi kondisi ekstrim.

Selain itu, juga dilaksanakan beberapa langkah penerapan dan upaya perbaikan manajemen risiko kredit melalui pengembangan sistem risiko kredit antara lain Pefindo *Scoring*, *datawarehouse, E-monitoring sheet* dan *portfolio guideline*.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan Nilai (*impairment*) adalah kondisi dimana nilai aset tercatat (*carrying amount*) suatu aset keuangan melebihi nilai yang dapat dipulihkan (recoverable amount) dari aset tersebut. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).

rating to non-investment grade, hence they do not lead to non-performing loans.

Meanwhile, at the level of portfolio exposure, a Legal Lending Limit (LLL) has been set, which is the maximum limit for financing for each individual and group. In addition, LLL is also used as an effort to manage the risk of financing concentration.

The Company also has an inhouse threshold as one of the strategies for controlling concentration risk and maintaining the level of financing concentration which has been quite well diversified so far.

The inhouse threshold calculation is a combination of financing, underwriting self-retention, and insurance self-retention. The financing facilities is prohibited from exceeding the inhouse threshold (violation), however if the inhouse threshold is exceeded due to changes in exchange rates and/or changes in the Company's capital, the outstanding will be gradually decreased.

In managing credit risk both in portfolio and individually, the Company also performs stress testing with several scenarios to assess the business resilience of borrowers in light of extreme conditions.

Moreover, a number of implementation measures and efforts to improve credit risk management were also implemented through the development of a credit risk system, including Pefindo Scoring, data warehouses, E-monitoring sheets and portfolio guidelines.

Provision for Impairment Loss

Impairment is a condition in which the carrying amount of a financial asset exceeds the recoverable amount of the asset. The Company periodically evaluates the impairment of all financial assets except financial assets classified in groups whose fair value is measured through the income statement (fair value through profit and loss).

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pada tahun 2020 LPEI mengimplementasikan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Perlakuan akuntansi PSAK 71 terkait pencadangan mengharuskan pengukuran impairment dalam bentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), atau disebut juga *Expected Credit Loss* (ECL) akibat risiko kredit, yang dihitung dengan mempertimbangkan komponen *forward-looking*. Konsep ini berbeda dengan penerapan PSAK 55 di mana konsep *incurred loss* digunakan sebagai basis perhitungan.

Adapun asesmen penurunan nilai (perhitungan CKPN) di LPEI menggunakan 2 (dua) metode yaitu penilaian secara individual dan penilaian secara kolektif.

1. Perhitungan CKPN secara Individual dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi kredit yang merupakan ruang lingkup dari evaluasi secara individual:
   - Akun yang *default* atau mengalami restrukturisasi; atau
   - Debitur yang memiliki bukti objektif penurunan nilai

   Kriteria yang digunakan LPEI untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:
   a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami oleh pihak peminjam;
   b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pokok atau bunga;
   c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsensi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
   d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
   e. Hilangnya pasar aktif dari asset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

In 2020, the Company implements PSAK 71 on Financial Instruments which is an adoption of IFRS 9 issued by the International Accounting Standard Board (IASB). PSAK 71 treatment related to allowance requires impairment measurement in the form of allowance for impairment losses (CKPN), or also called Expected Credit Loss (ECL) due to credit risk, which is calculated by taking into account forward-looking component. This concept is different with PSAK 55 application where it used incurred loss concept as calculation basis.

Indonesia Eximbank uses 2 (two) methods to assess impairment (calculation of CKPN) namely the individual assessment and collective assessment.

1. Calculation of CKPN is carried out individually by stipulating significancy of credit level that serves as a scope of individual evaluation:
   - Default account or under restructuring; or
   - Borrower with objective evidence of impairment

   Criteria used by the Company to determine objective evidence from impairment as follows:
   a. Significant financial difficulties experienced by borrowers;
   b. Contract breaches, such as the occurance of defaults or arrears of principal or interest;
   c. Lenders, with economic or legal reasons in relations with financial difficulties experienced by borrowers, provide consessions to the borrowers that would not be possible if the borrowers are not experiencing such difficulties;
   d. Possibility that the borrwoers will be declared bankcrupt or carry out other financial reorganization;
   e. Loss of an active market from financial assets due to financial difficulties; or

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa dating dari kelompok asset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap asset keuangan secara individual dalam kelompok asset tersebut, termasuk:
   1) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   2) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Besarnya CKPN individual dihitung berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit pada saat default (pokok dan bunga) dengan nilai kini (*present value*) dari *recoverable amount* yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. Perhitungan CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *Incurred Loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* [PD] dan *Loss Given Default* [LGD]) dari masing-masing kelompok aset tertentu. Perhitungan CKPN secara kolektif dilakukan bagi semua aset keuangan yang:
   – Aset keuangan yang tidak dilakukan evaluasi penurunan nilai secara individual.
   – Aset keuangan yang telah dilakukan evaluasi tetapi tidak ditemukan adanya bukti obyektif penurunan nilai.
   – Aset keuangan yang mempunyai kesamaan karakteristik risiko kredit dan memiliki klasifikasi performing.

Tahapan membangun model evaluasi penurunan nilai secara kolektif adalah sebagai berikut:

f. The observable data indicated a measurable decrease in the estimated future cash flows of a financial assets group since initial recognition of assets, although the decrease has not yet been identified for the individual financial assets in the group of assets, including:
   1) Worsening payment status of borrowers in the group; and
   2) National or local economic conditions that corelate with defaults on assets in the group.

The amount of individual CKPN is calculated based on the difference between credit carrying value during default (principal and interest) and the present value of the recoverable amount discounted using the effective interest rate.

2. CKPN is collectively calculated using historical loss data (calculation of Incurred Loss based on estimated Probability of Default [PD] and Loss Given Default [LGD]) from each group of assets. The calculation of CKPN is collectively applied to all financial assets that:
   – Financial assets that are not evaluated for impairment individually.
   – Financial assets that have been evaluated but no objective evidence of impairment has been found.
   – Financial assets that have similar credit risk characteristics and have a performing classification

The stages of building a collective evaluation model for impairment are as follows:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

***Probability of Default* (PD)**

PD mencerminkan estimasi kemungkinan debitur gagal bayar pada rentang waktu tertentu. Perhitungan PD dilakukan untuk setiap bucket pada setiap segmen yang telah ditetapkan melalui analisis kesamaan karakteristik risiko kredit, kecuali terdapat kondisi yang menyebabkan perhitungan PD perlu dilakukan dengan pengelompokkan yang berbeda. LPEI perlu mempertimbangkan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam menghitung kejadian gagal bayar. Oleh karena itu, perhitungan PD dilakukan dengan tahapan:

1. Perhitungan PD secara historis (PD TTC) menggunakan metode *Transition Matrix* (Markov Chain);
2. Perhitungan PD *Forward-Looking* dengan permodelan regresi antara *Observed Default Rate* (ODR) dan MEV; dan
3. Perhitungan PD *Point in Time* (PD PIT) melalui proses *scaling*.

Probability of Default (PD)

Probability of default reflects the estimated probability of a debtor defaulting over a certain period of time. PD is calculated for each bucket in each segment that has been stipulated through similarity analysis in credit risk characteristic, unless if there are conditions that cause the need of PD calculation with different groupings. The Company shall consider past, present and future information in calculating default payment. To that end, PD is calculated with the following stages:

1. Historical PD calculation (PD TTC) using a Transition Matrix (Markov Chain) method;
2. Forward-Looking PD calculation with a regression model between Observed Default Rate (ODR) and MEV; and
3. Point in Time PD calculation (PD PIT) through a scaling process.

***Loss Given Default* (LGD)**

Loss given default (LGD) merupakan estimasi kerugian dengan menghitung recovery yang didapatkan setelah debitur tersebut default. Recovery date dihitung mempertimbangkan time value of money dari pengembalian kewajiban yang telah default. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung time value of money adalah effective interest rate (EIR). Perhitungan LGD dilakukan dengan tahapan:

1. Perhitungan LGD secara historis (LGD TTC) menggunakan formula:
   LGD = 100% – Recovery Rate
   Dalam perhitungan LGD TTC, LPEI melakukan analisis *workout period* untuk menentukan populasi data default. Workout period adalah rentang waktu terpendek dimana hasil recovery yang dihasilkan telah mencapai hasil optimum.
2. Perhitungan LGD Forward-Looking dengan permodelan regresi antara nilai LGD dan MEV; dan
3. Perhitungan LGD Point in Time (LGD PIT) melalui proses scaling.

Loss Given Default (LGD)

Loss given default (LGD) is the estimated loss by calculating the recoverable amount through collateral after the debtor has defaulted. The recovery date is calculated by considering the time value of money from the repayment of the defaulted obligation. The interest rate used to calculate the time value of money is the effective interest rate (EIR). LGD is calculated with the following stages:

1. Historical LGD calculation (LGD TTC) using a formula:
   LGD = 100% – Recovery Rate
   In TTC LGD calculation, the Company analyzes a workout period to determine default data population. A workout period is the shortest period where the recovery rate has recorded optimum results.
2. Forward-Looking LGD calculation with a regression model between LGD value and MEV; and
3. Point in Time LGD calculation (LGD PIT) through a scaling process.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

***Exposure at Default* (EAD)**

Exposure at Default (EAD) merupakan perkiraan eksposur pada saat terjadinya default di masa mendatang dengan mempertimbangkan perubahan dalam eksposur setelah tanggal pelaporan, termasuk kelebihan pembayaran (*prepayment*), estimasi waktu pelunasan pokok dan bunga (*expected lifetime*) dan penarikan komitmen pinjaman (*credit conversion factor*). LPEI memperhitungkan jumlah eksposur *on balance sheet* (*drawn*) dan *off balance sheet* (*undrawn*) dalam menentukan nilai EAD. Selanjutnya nilai CKPN Kolektif didapatkan dari hasil perkalian PD x LGD x EAD

Transaksi Derivatif

Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif.

Transaksi derivatif yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Bentuk transaksi derivatif yang dilakukan LPEI umumnya dalam bentuk transaksi *spot, forward, futures*, dan *swap*. Dalam melakukan transaksi derivatif, LPEI ditetapkan memiliki maksimum transaksi untuk setiap pihak lawan sebesar 10% dari modal.

2. RISIKO PASAR

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko pasar antara lain:

Exposure at Default (EAD)

Exposure at Default (EAD) is an estimate of exposure at the time of default in the future by considering changes in exposure after the reporting date, including prepayments, estimated principal and interest repayment times (expected lifetime) and withdrawal of loan commitments (credit conversion factor). The Company takes into account the amount of on balance sheet (drawn) and off balance sheet (undrawn) exposures in determining the EAD value. Furthermore, a Collective CKPN value is obtained from the multiplication of PD x LGD x EAD.

Derivative Transactions

Derivative Transactions are contracts or payment agreements whose value is derived from the value of the underlying instrument, such as interest rates, commodity, equity and index exchange rates whether followed by movements or without movement of funds/instruments, which are carried out in the context of hedging.

As stipulated in the Minister of Finance Regulation, the Company shall apply the precautionary principle in managing receivables and/or liabilities arising from derivative transactions.

Derivative transactions can only be carried out in the context of hedging.

Derivative transactions conducted by the Company are generally in the form of spot, forward, futures and swap transactions. In conducting derivative transactions, LPEI is determined to have a maximum transaction for each opposing party of 10% of capital.

2. MARKET RISK

Market risk is the risk of loss arising from the movement of market factors including interest rates and exchange rates that are contrary to the position held by the Company. To anticipate and control market risk, steps taken include:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- Pengelolaan risiko pasar di LPEI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *front office, middle office*, dan *back office*.
- Memiliki Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Umum Tresuri LPEI, Peraturan Direktur Eksekutif terkait Limit Transaksi Tresuri dan Manual Produk Tresuri.
- Monitoring eksposur risiko pasar senantiasa dipantau secara harian.
- Pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai Limit PDN dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar 20%.
- Penetapan batas transaksi (limit), khususnya untuk transaksi *trading* yang mencakup limit *counterparty*, *limit currency, limit* posisi, *cut loss limit, stop loss limit*, dan *limit dealer*.
- Stress testing risiko pasar untuk menilai ketahanan LPEI dalam menghadapi perubahan nilai tukar dan suku bunga yang ekstrem.
- Dukungan infrastruktur pengelolaan risiko pasar, LPEI telah memiliki *Treasury Dealing System* (TDS) dan *market risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari Reuters, Bloomberg dan sumber independen lainnya.
- Melakukan gap management dengan tujuan mengelola risiko pasar sebagai akibat perubahan tingkat bunga dalam hubungannya dengan kesenjangan posisi (*mismatch*) untuk *repricing structure* pada kedua posisi neraca (*asset and liability*) dan memaksimalkan pendapatan bunga neto (*net interest income*) agar tetap pada tingkat risiko yang bisa ditoleransi.
- Melakukan lindung nilai (*natural hedge*).
- Pemantauan risiko nilai tukar juga dilakukan dengan analisa sensitivitas untuk menganalisis kemungkinan perubahan nilai tukar. Analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan nilai tukar untuk portofolio terhadap IDR.
- Pemantauan risiko suku bunga juga dilakukan melalui analisa sensitivitas untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book*.

- Market risk management in the Company consists of 3 (three) parts, namely front office, middle office, and back office.
- The Board of Directors Regulations regarding the General Policy of Treasury, Executive Director Regulations related to Limit Treasury Transactions and Treasury Product Manuals.
- Daily monitoring of market risk exposures.
- Monitoring the Net Open Position (NOP) according to the NOP Limit in the provisions of the Minister of Finance Regulation, which is 20%.
- Determination of transaction limits, especially for trading transactions that include counterparty limits, currency limits, position limits, cut loss limits, stop loss limits and dealer limits.
- Stress testing of market risk to assess the resilience of the Company in the face of extreme changes in exchange rates and interest rates.
- To support the market risk management infrastructure, the Company has a Treasury Dealing System (TDS) and market risk management tools. Whereas to obtain market data obtained from Reuters, Bloomberg and other independent sources.
- Conduct gap management with the aim of managing market risk as a result of changes in interest rates in relation to the position gap (mismatch) for repricing structure in both asset and liability positions and maximizing net interest income to remain at the risk level tolerable.
- Conducting natural hedges.
- Monitoring of exchange rate risk is also carried out with sensitivity analysis to analyze possible changes in exchange rates. Sensitivity analysis uses the assumption of exchange rate changes for the portfolio against IDR.
- Monitoring interest rate risk is also carried out through sensitivity analysis to analyze possible changes in interest rates that have an impact on the profit and loss of the banking book portfolio.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

3. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa LPEI tidak akan mampu memenuhi liabilitas pembayaran pada saat jatuh tempo dalam keadaan normal ataupun tertekan (*distress*). LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko likuiditas antara lain:

- Penetapan dan pemantauan limit dilakukan secara berkala oleh Unit Kerja Tresuri. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserves* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Assets and Liabilities Committee (ALCO).
- Pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas.
- Menyusun skenario likuiditas berdasarkan kondisi yang berbeda, baik kondisi normal, kondisi tidak normal, maupun kondisi ekstrim (*stress testing*) sehingga dapat ditetapkan contingency funding plan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrim tersebut.
- Menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual, maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang.

3. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is defined as the inability to meet debt obligations at maturity in normal condition or under distressed condition. The Company manages liquidity risk to meet every obligation in time and maintain optimum liquidity ratio at the same time.

To anticipate and control the liquidity risk, among others:

- Determination and monitoring of limits, carried out regularly by the Treasury Unit. Whereas the availability of reserves is monitored on a daily, weekly and monthly basis by the Assets and Liabilities Committee (ALCO).
- Management of high quality of liquid assets in sufficient quantities and in compositions tailored to business characteristics and liquidity risk profiles.
- Develop a liquidity scenario based on different conditions, both normal conditions, abnormal conditions, and extreme conditions (stress testing) so as to establish a contingency funding plans to anticipate the occurrence of these extreme conditions.
- Using daily cash flow projections and monthly maturity profiles, both on contractual and behavioural basis, to be able to establish appropriate and accurate strategies in anticipating future liquidity conditions.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kendala eksternal. Risiko operasional sangat berhubungan dengan kelengkapan dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan kegiatan usaha serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja usaha LPEI. Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan terhadap setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat serta komprehensif.

4. OPERATIONAL RISK

Operational risks are among others caused by inadequate and/or malfunctioning of internal processes, human error, system failure, or external constraints. Operational risk is closely related to the completeness and effectiveness of the system, procedure and control in the business environment and the capabilities of human resources that may affect the performance of Indonesia Eximbank's business. Implementation of operational risk management is conducted on every activity that is implemented in an integrated system and process of risk management that is accurate and comprehensive.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko operasional antara lain:

- Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengelolaan *data loss event* yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari hasil audit dan catatan kepatuhan.
- Pengukuran risiko operasional dalam profil risiko.
- Pengendalian risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab risiko operasional yang mencakup: organisasi, sumber daya manusia, data dan informasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan factor eksternal.
- *Self-assessment* dilakukan untuk memetakan risiko operasional yang terjadi di setiap unit kerja. Sehingga risiko operasional tersebut dapat di mitigasi secara lebih dini dan tepat waktu.
- Telah menerapkan manajemen keberlangsungan usaha (*Business Continuity Plan*/BCP) untuk meminimalisir risiko operasional dalam kondisi darurat atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia yang mengganggu kegiatan usaha.
- Melakukan *cleansing* data debitur di sistem.
- Pengaturan pengelolaan ruang khasanah dengan sistem dual kontrol dan penunjukan petugas khusus yang diberi akses untuk masuk.
- Penggunaan *dashboard spreadsheet* untuk memonitor SLA transaksi, pemenuhan *covenant*, *indexing* dokumen, penerimaan dan pelepasan dokumen agunan.
- LPEI terus menyempurnakan pendekatan dan *framework* yang digunakan dalam manajemen risiko operasional.

To assist the operational risk management process, among others:

- Risk management is conducted through the management of loss event data based on the data and information obtained from audit results and compliance records.
- Assessment of operational risk in a risk profile.
- Operational risk control is carried out on the factors causing operational risk, which include: organization, human resources, data and information, information technology, business process, and external factors.
- Self-assessment is conducted to map the operational risk that occurs in each work unit. Hence operational risk can be promptly mitigated early.
- Implemented a Business Continuity Plan (BCP) to minimize operational risks in emergency or disasters caused by natural factors or human actions that disrupt business activities.
- Cleansing debtor data in the system.
- Arrangements for the management of the treasury with a dual control system and the appointment of special officers who are given access to enter.
- Use of a spreadsheet dashboard to monitor SLA transactions, fulfillment of covenants, indexing documents, receiving and releasing collateral documents.
- The Company continues to improve the approach and framework used in operational risk management.

5. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko hukum antara lain:

5. LEGAL RISK

Legal risks are risks arising from lawsuits and/ or weakness of juridical aspects. This risk arises, among others, due to the absence of supporting regulations or weakness of the agreement, such as the non-fulfillment of the terms of the contract's validity or inadequate collateral.

To anticipate and manage legal risks, among others:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- Penanganan perkara-perkara hukum serta pemantauan proses penanganannya dilakukan secara langsung ataupun bekerja sama dengan konsultan hukum.
- Pelaksanaan *review* atas perjanjian dengan pihak ketiga dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kelemahan atas perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi LPEI.
- Pemberian opini hukum atas perjanjian kerja sama antara LPEI dengan pihak lain, yang akan ditandatangani untuk melindungi kepentingan hukum Lembaga.
- Pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.
- Istilah dalam perjanjian menggunakan istilah umum dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia serta klausul-klausul sesuai dengan best practice.
- Pengkinian dan perbaikan atas penggunaan standar perjanjian dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- Pegawai LPEI secara berkala diikutsertakan dalam pelatihan, seminar, dan *workshop* terkait permasalahan legal untuk dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan usaha.

6. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan LPEI dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko stratejik antara lain:
- Pelaksanaan pengukuran risiko strategis antara lain melalui analisa pencapaian target dibandingkan dengan realisasi secara periodik.
- Penetapan target dan strategi dipastikan telah mempertimbangkan seluruh risiko.
- Penyusunan rencana pengembangan produk dan atau aktivitas baru, penetapan pasar baru, serta kegiatan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

- The handling of legal cases and its monitoring process is implemented directly or in cooperation with legal consultants.
- The Implementation of agreements with third parties review is conducted periodically to mend weaknesses of agreements that may cause harm to Indonesia Eximbank.
- The legal opinion on the cooperation agreement between Indonesia Eximbank and other parties, which will be signed, is provided to protect the legal interests of Indonesia Eximbank.
- The implementation of business activities in accordance with the applicable legal provisions and is supported by adequate legal documents.
- The terms of the agreement shall use general terms and in accordance with applicable standards in Indonesia and clauses in accordance with best practice.
- Updates and improvements on the use of standard agreements shall be made periodically or as required.
- The Company's employees are regularly participated in trainings, seminars and workshops related to legal issues to be able to continue to adjust to the development and changes in the business environment.

6. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to the inappropriate decision making in Indonesia Eximbank and/or failure of strategic decision implementation and as well as in anticipating the changes in the business environment.

To anticipate and control strategic risks include:

- Implementation of strategic risk measurement amongst others, through the analysis of targets achievements compared with the periodic realization.
- Ensure the targets and strategy stipulation has taken into account all risks.
- Product development and/or new activity plan, new market determination, and business activity shall be conducted by considering owned resources.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- Pemantauan pelaksanaan strategi dan pencapaian target yang telah ditetapkan dilakukan antara lain melalui laporan Profil Risiko, laporan realisasi rencana kerja dan anggaran yang dilaporkan secara berkala.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi salah satu alat ukur dalam pelaksanaan mandat LPEI.
- Pelaksanaan Penugasan Khusus pemerintah khususnya pembiayaan dalam rangka penetrasi ke pasar non tradisional dan ketahanan usaha.
- Melakukan pengembangan terhadap produk dan aktivitas baru yang disesuaikan dengan kondisi usaha dan kebutuhan pasar.

7. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder (antara lain: regulator, nasabah, masyarakat, manajemen dan pegawai) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LPEI.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko reputasi antara lain:
- Telah melakukan pengukuran dan pemantauan atas jumlah komplain dan tingkat penyelesaian komplain.
- Telah melaksanakan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Dewan Legislatif.
- Seluruh pegawai dan pengurus LPEI wajib untuk menandatangani piagam pakta integritas yang berisi code of conduct, dan secara berkala melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
- Bekerja sama dengan media baik cetak dan elektronik untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai sosialisasi akan kegiatan usaha LPEI, pencapaian, serta mengundang masyarakat untuk bekerja sama dengan LPEI sebagai nasabah untuk meningkatkan ekspor nasional.
- Pelaksanaan program *corporate social responsibility* dan program sosialisasi serta pelatihan kepada pelaku ekspor.
- Pengelolaan risiko reputasi akibat keluhan nasabah telah didukung dengan adanya kebijakan dan SOP

- The monitoring implementation on strategy and achievement of the set targets has been conducted, among others, through the Risk Profile report, the periodic report on realizationr of the work plan and budget.
- Key Performance Indicator (KPI) as one of measuring tools in the implementation of the mandate of Indonesia Eximbank.
- Implementation of Special Assignment of government in particular to financing in the framework of penetration to non-traditional market and business endurance.
- Develops new products and activities tailored to business conditions and market needs.

7. REPUTATION RISK

Reputation risk is a risk due to the decrement level of stakeholder trust (e.g, regulator, customers, communities, management and employees) derived from negative perceptions of Indonesia Eximbank.

To anticipate and control reputation risk include:

- Carried out measurements and monitoring of the number of complaints and the level of resolution of complaints.
- Implemented good governance principles such as transparency in reporting and coordination with the Government and the Legislative Council.
- All employees and management of Indonesia Eximbank are obliged to sign a charter of integrity pact containing code of conduct, and periodically report their assets (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK).
- Cooperate with both printed and electronic to inform the public as socialization of Indonesia Eximbank business activities, achievement, and invite the community to cooperate with Indonesia Eximbank as a customer to increase national exports.
- Implementation of corporate social responsibility program and socialization program and training to exporters.
- The reputation risk management resulting from customer complaints has been supported by the

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Penanganan Keluhanan Nasabah beserta unit yang berwenang untuk menangani keluhan nasabah.

- Telah memiliki konsep Sistem Pengendalian Intern (SPI). LPEI memastikan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur dengan melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh unit kerja independen berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada unit kerja operasional/bisnis/*support*. Manajemen merespons setiap hasil pemeriksaan audit dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan skala prioritas.

8. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kepatuhan antara lain:
- Pemberian opini kepatuhan atas rancangan kebijakan atau ketentuan atas pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- Pemantauan implementasi Pakta Integritas dan pengelolaan dan sosialisasi kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).
- Pemenuhan aspek kepatuhan dalam proses bisnis.
- Penerapan Uji Kepatuhan (melalui prosedur secara berkala)
- Kajian terhadap kebijakan regulator yang terdampak kepada LPEI dan adanya koordinasi antar unit dalam rangka memastikan kebijakan internal LPEI telah sesuai dengan peraturan regulator.
- Kecukupan pengendalian terhadap produk baru dan pelaporan.
- Penerapan Program APU & PPT secara konsisten
- Telah tersedianya Kebijakan dan Prosedur tentang Fungsi Kepatuhan
- Pemantauan atas penyampaian laporan secara berkala baik kepada pihak internal dan eksternal dilakukan tepat waktu. Laporan-laporan tersebut antara lain laporan realisasi RKAT, laporan Pengawasan, Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Profil Risiko, Laporan Manajemen Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan dan Laporan Keuangan.

policy and SOP on Customer Complaint Handling with the authorized unit to handle the customer complaints.
- Has had the concept of Internal Control System (SPI). Indonesia Eximbank ensures on the adequacy of policies, systems and procedures by conducting a review from an independent work unit based on the results of conducted verification on the operational/business/support work unit. The Management responds to each audit audit result and follow up the review results according to the scale priority.

8. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk that arises as a result of the Company's incompliance with and/or not implementing the prevailing laws and regulations.

The following are carried out to anticipate and control the compliance risk:
- Providing compliance opinions on draft policies or provisions for new product and/or activity development.
- Monitoring the implementation of the Integrity Pact and managing and disseminating the Whistle Blowing System (WBS) policy.
- Fulfillment of compliance aspects in business processes.
- Implementation of Compliance Test (through periodic procedures)
- Review of regulatory policies that impact on the Company and coordination between units in order to ensure that the Company's internal policies comply with regulatory regulations.
- Adequacy of controls on new products and reporting.
- Consistent implementation of AML & CFT Programs
- Policies and Procedures on Compliance Function are in place
- Monitoring of the submission of periodic reports to both internal and external parties is done on time. These reports include reports on the realization of the Annual Work Plan & BUdget, Supervision reports, Business Activity Reports, Risk Profile Reports, Risk Management Reports, Soundness Level Reports and Financial Reports.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

9. RISIKO ASURANSI

Potensi kegagalan yang dihadapi LPEI dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dana/penanganan klaim.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko asuransi antara lain:
- Telah memiliki *early warning system* seperti *Sistem Internal Credit Risk Rating dan CARE System*
- Memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Asuransi, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Asuransi, dan Komite.
- Meningkatkan kapabilitas dan kesadaran akan manajemen risiko bagi pegawai, maka pegawai juga diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen risiko.
- Menjaga komposisi tingkat konsentrasi pertanggungan asuransi pada level sesuai limit yang telah ditentukan.
- Kecukupan pencadangan klaim kegiatan asuransi sesuai dengan pembentukan Retensi Sendiri tidak melebihi 2x modal disetor.
- Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko asuransi senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama, Portfolio Quality Report dan pembahasan melalui forum secara berkala.

10. RISIKO INVESTASI (SYARIAH)

Risiko yang muncul saat penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil debitur. Pembiayaanbagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk akad mudharabah, musyarakah, musaqah, muzara'ah, mukharabah, dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko investasi ini, LPEI menggunakan caradan sistem yang sama dalam mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit.

9. INSURANCE RISK

Potential failures faced by Indonesia Eximbank in fulfilling obligations to the guaranteed and insured as a result of inadequate risk selection process (underwriting), pricing, reinsurance of funds/claims handling.

To anticipate and control insurance risk, among others:

- Has an early warning system such as the Internal Credit Risk Rating System and the CARE System
- Has internal provisions regarding Insurance Policies, Executive Director Regulations on Insurance Manuals, and Committees.
- Increase the capability and awareness of risk management for employees, hence employees are also given training related to risk management.
- Maintain the composition of the insurance coverage concentration level at a level according to a predetermined limit.
- The adequacy of the provision for claims for insurance activities in accordance with the formation of Own Retention does not exceed 2x the paid-up capital.
- At the level of portfolio risk exposure, insurance risk exposure is monitored and reported regularly to management, among others by submitting management reports on major risk exposures, Portfolio Quality Report and discussion through forums on a regular basis.

10. INVESTMENT RISK (SHARIA)

Risk that arises during financing of borrower's profit sharing based. Profit sharing financing can be carried out through mudharabah, musyarakah, musaqah, muzara'ah, mukharabah agreements, and so forth.

To anticipate and control investment risk, Indonesia Eximbank applies similar methods and systems in anticipating and controlling credit risk.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

11. RISIKO IMBAL HASIL (SYARIAH)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Lembaga kepada debitur, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Lembaga dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku kreditur dana Lembaga.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko imbal hasil ini, LPEI menggunakan cara dan sistem yang sama dalam mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit.

11. RETURN RISK (SHARIA)

Risk due to the changes in the rate of return paid by the Company to the borrowers, because of the changes in the rate of return received by the Company from funding, which can affect the creditor's behaviour to the Company.

To anticipate and control return risk, Indonesia Eximbank applies similar methods and systems in anticipating and controlling credit risk.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko antara lain dilakukan melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.

Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara efektif di dalam LPEI. Serta menyadari risiko yang dihadapi Lembaga, kedua organ tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawasi manajemen risiko yang berhasil di seluruh unit bisnis.

Dalam pelaksanaanya, efektivitas sistem manajemen risiko Lembaga dievaluasi oleh Unit Manajemen Risiko. Unit ini melaksanakan penilaian secara berkala atas kinerja dan efektivitas implementasi manajemen risiko di LPEI untuk memastikan bahwa Lembaga selalu mengetahui risiko-risiko usaha yang berpotensi terjadi. Penilaian risiko disesuaikan dengan tingkat risiko dan tingkat pengendaliannya untuk kemudian dijadikan sebagai acuan tindak lanjut perbaikan pengendalian internal dan manajemen risiko.

RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS EVALUATION

Risk management system effectiveness evaluation aims to assess the adequacy of design and effectiveness of risk management process. Risk management system effectiveness evaluation is carried out, among others, through the implementation of a risk management effectiveness survey.

The Boards of Directors and Executive Directors are responsible for the effective implementation of risk management within the Company. As well as being aware of the risks encountered by the Company, the organs also have an important role in the support and supervision of the successful risk management across business units.

In its implementatation, the Risk Management Unit evaluates the Company's risk management system effectiveness. The unit conducts periodic assessment of the performance and effectiveness of risk management implementation in the Company to ensure that the Company is always aware of potential business risks. The risk assessment is adjusted to the level of risk and level of control to be then used as a follow-up reference for the improvement of internal control and risk management.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pada tahun 2020, LPEI melakukan beberapa langkah penerapan dan upaya penyempurnaan proses manajemen risiko kredit, antara lain:

1. Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta manual operasional pembiayaan yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan manajemen risiko yang lebih baik.
2. Tersedianya tools Manajemen Risiko yang mengacu kepada best practice, yaitu Industrial *Risk Acceptance* Criteria, Risk Appetite Statement (RAS), dan Portfolio Guideline.
3. Dikembangkannya *Environmental and Social Management System* (ESMS) *Framework*.
4. Pengembangan kerangka penerapan Manajemen Risiko (Risk Management Framework) yang sui generis.
5. Implementasi permodelan risiko untuk pengukuran instrumen keuangan sesuai PSAK 71.
6. Permodelan dan Pengukuran CKPN kolektif dengan metode *backtesting*.
7. Pengukuran Peringkat Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI.
8. Pengukuran stress testing terhadap portfolio pembiayaan LPEI.
9. Kaji ulang alat ukur profil risiko.
10. Peningkatan risk culture di LPEI melalui sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai LPEI.

Secara umum penerapan sistem Manajemen risiko pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik. LPEI mampu mengelola dan mengatasi potensi-potensi risiko yang terjadi.

In 2020, Indonesia Eximbank carried out several measures and refinement of credit risk management, as follows:

1. Development and refinement of financing policies and operating manual adjusted with organizational development and improved risk management.
2. The availability of Risk Management tools referring to best practices, namely Industrial Risk Acceptance Criteria, Risk Appetite Statement (RAS), and Portfolio Guideline.
3. Development of Environmental and Social Management System (ESMS) Framework.
4. Development of sui generis Risk Management Framework.
5. Implementation of risk model to measure financial instrument according to SFAS 71.
6. Collective Allowance for Impairment Losses Model and Measurement with backtesting method.
7. Measurement of Risk Profile Rating and Soundness Level of Indonesia Eximbank.
8. Measurement of stress testing to Indonesia Eximbank financing portfolio.
9. Re analysis of risk profile measurement tools.
10. Enhancement of risk culture in Indonesia Eximbank through risk management certification for the Company's employees.

In general, the implementation of risk management in 2020 went well. The Company was able to manage and minimize the risk that potentially occurred.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal di LPEI bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Lembaga, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional, maupun finansial serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen sebagai mekanisme pengawasan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan yang memadai atas terlaksananya:

a. Kegiatan operasional yang efisien dan efektif dalam setiap kegiatan,
b. Laporan keuangan yang handal, dan
c. Kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
d. Budaya Risiko (Risk Culture) pada organisasi LPEI secara menyeluruh.

Sebagai salah satu pelaksanaan pilar penerapan manajemen risiko, LPEI telah menjalankan SPI secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LPEI, serta memastikan terdapatnya:

1. Kegiatan usaha LPEI yang berjalan secara efisien dan efektif dalam penggunaan aset, maupun sumber daya lainnya dalam rangka melindungi LPEI dari risiko kerugian.
2. Informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kesesuaian pelaksanaan atas seluruh kegiatan usaha LPEI dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas pengawas, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal; dan
4. Budaya risiko yang efektif pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di LPEI secara berkesinambungan.

The Internal Control System in Indonesia Eximbank aims to support the achievement of the Company's performance objectives, improve value to the stakeholders and assure effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reports, sufficiency of financial and operational controls, and compliance with prevailing laws and regulations.

Implementation of Financial and Operational Controls

The Internal Control System (ICS) is a plan, method, procedure, and policy designed by management as a continuous monitoring mechanism to provide adequate guarantee for the implementation of:

a. Efficient and effective operational activities in every activity,
b. Reliable financial statements, and
c. Compliance with applicable laws, policies and regulations.
d. Comprehensive Risk Culture in Indonesia Eximbank.

As one of the pillars of risk management implementation, Indonesia Eximbank has implemented effective ICS in carrying out business and operational activities at all levels of the Indonesia Eximbank organization, and ensuring that:

1. Indonesia Eximbank's efficient and effective business activities in the use of assets, and other resources in order to protect Indonesia Eximbank from risk of losses.
2. Financial, management information that is accurate, complete, timely, and relevant, required to make the right decisions and can be accounted for.
3. Compliance with the implementation of all Indonesia Eximbank's business activities with the stipulations and prevailing laws and regulations, both issued by the Government, the supervisory authority, as well as internal policies, regulations and procedures; and
4. An effective risk culture in the organization as a whole to identify weaknesses and assess deviations early and reassess the fairness of existing policies and procedures in Indonesia Eximbank.

Kesesuaian SPI dengan Kerangka Internasional COSO

Kajian atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara berkala setiap tahun, dengan menggunakan parameter yang diadopsi dari Framework Pengendalian Internal dari organisasi COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Risiko;
c. Aktivitas Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi;
e. Pemantauan.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal 2020

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan secara self assesment, Indonesia Eximbank pada bulan Maret 2020 mendapatkan nilai "3,93" yang menunjukkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di LPEI termasuk dalam kategori " Cukup Baik".

ICS Compliance with COSO International Framework

Review on the Internal Control System effectiveness is carried out regularly every year, using parameters adopted from the Internal Control Framework of COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) organization, which include:

a. Control Environment;
b. Risk Assessment;
c. Control Activities (Control Activities);
d. Information and Communication;
e. Monitoring.

Internal Control Effectiveness Evaluation in 2020

Based on the self-assessment results of Internal Control System, Indonesia Eximbank received a score of "3.93" in March 2020, which indicates the Internal Control System implementation in Indonesia Eximbank is in the "Good Enough" category.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI

LITIGATION

Daftar Perkara LPEI Posisi 31 Desember 2020
Indonesia Eximbank Litigation List as of December 31, 2020

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Pemohon Plaintiff	Status Penyelesaian Settlement Status
1	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38602/ PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Verdict No. Put.38602 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
2	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38603/ PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Verdict No. Put.38603 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
3	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38606/ PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Verdict No. Put.38606 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
4	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38607/ PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Verdict No. Put.38607 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
5	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38612/ PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Verdict No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
6	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57515/PP/M. IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 Tax Court Verdict No. Put.57515/PP/M. IVB/16/2014 dated November 20, 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
7	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57516/PP/M. IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 Tax Court Verdict No. Put.57515/PP/M. IVB/16/2014 dated November 20, 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
8	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57518/PP/M. IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 Tax Court Verdict No. Put.57518/PP/M. IVB/16/2014 dated November 20, 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
9	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59987/PP/M. IVB/15/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Verdict No. Put.59987/PP/M. IVB/15/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI
LITIGATION

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Pemohon Plaintiff	Status Penyelesaian Settlement Status
10	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59988/PP/M. IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Verdict No. Put.59988/PP/M. IVB/15/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
11	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59989/PP/M. IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Verdict No. Put.59989/PP/M. IVB/15/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
12	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59990/PP/M. IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Verdict No. Put.59990/PP/M. IVB/15/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
13	Perkara Perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 13 Juli 2018 Civil Case at Sukoharjo District Court with case register No. 65/Pdt.G/2017/PN.Skh dated July 13, 2018	Kasasi ke Mahkamah Agung RI Cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Manda Andika Manda Andika	masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of cassation examination at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
14	Perkara perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Sleman dengan register perkara No. 145/ Pdt.G/2018/PN.Smn. tanggal 22 Oktober 2018 Civil case at the Sleman District Court with case register No. 145/Pdt.G/2018/PN.Smn. October 22, 2018	Kasasi ke Mahkamah Agung RI Cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	LPEI	masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia still in the process of cassation examination at the Supreme Court of the Republic of Indonesia

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2020, LPEI tidak mendapat sanksi administratif baik oleh pihak regulator, maupun pihak berwenang lainnya.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

During 2020, the Company was not subjected to any administrative sanctions either by the regulators or other relevant authorities.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

INFORMATION ACCESS AND COMPANY DATA

LPEI menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, oleh karena itu, LPEI menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi secara tepat waktu dan akurat menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi, LPEI juga melakukan pelaporan informasi melalui media surat-menyurat dan e-reporting kepada pihak regulator, serta situs Lembaga. Seluruh Informasi dan laporan Lembaga dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, diantaranya:

Siaran Pers
LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan stratejik yang dilakukan LPEI.

Media Sosial
LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun:

Indonesia Eximbank upholds the principle of transparency and information disclosure, as such, the Company provides means and facilities that enable the stakeholders to obtain timely and accurate information in accordance with the prevailing rules and regulations.

In addition, as its compliance to the regulations, the Company also submits information through correspondence and e-reporting to the regulators, as well as the Company's website. All information and reports of the Institution can be obtained through easily accessible means, among others are:

Press Release
Indonesia Eximbank periodically publishes Press Releases as information transparencies to public on the Institution key and strategic corporate actions.

Social Media
Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through social media accounts of:

Facebook: LPEI | Youtube: LPEI | Twitter: @eximbank_ID | Instagram: @IndonesiaEximbank

Intranet
LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk membantu menjalankan aktivitas.

Melalui intranet, pegawai juga dapat melakukan komunikasi melalui forum diskusi. Intranet LPEI dilengkapi dengan quick link ke aplikasi penunjang pekerjaan yang dibautuhkan oleh pegawai. Intranet juga dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai Lembaga yang perlu diketahui oleh pegawai, seperti peraturan dan kebijakan terbaru Lembaga.

Intranet
Indonesia Eximbank has an internal information portal, the intranet. To carry out their activities, all employees can access the intranet.

With intranet, employees can also communicate through discussion forums. The Company's Intranet is equipped with a quick link to applications that support the work needed by employees. Intranet is also equipped with information on the Company for disclosure to employees, such as the latest regulations and policies.

Alamat | Address:
Prosperity Tower Lantai 1
District 8, SCBD Lot 28
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12191, Indonesia

Tel. (62 21) 395 03600
Fax. (62 21) 395 03699

Email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id
Situs Web: www.indonesiaeximbank.go.id

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

LPEI menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik LPEI mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, setiap individu di lingkungan Perseroan maupun pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku keseharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Indonesia Eximbank instills its core values and builds a strong culture through Code of Conduct as a form of the Company's commitment to enhancing the integrity of each of its employees in applying good corporate governance.

The Company's Code of Conduct governs the matters that are the responsibility of the Company, every individual within the Company as well as other parties who have business relations with the Company, whether in relation to the business ethics, work ethics or daily behavior. Every employee is required to behave in reflection of the Company's values in realizing its vision and mission.

Dasar Hukum Kode Etik LPEI
Code of Conduct Legal Basis

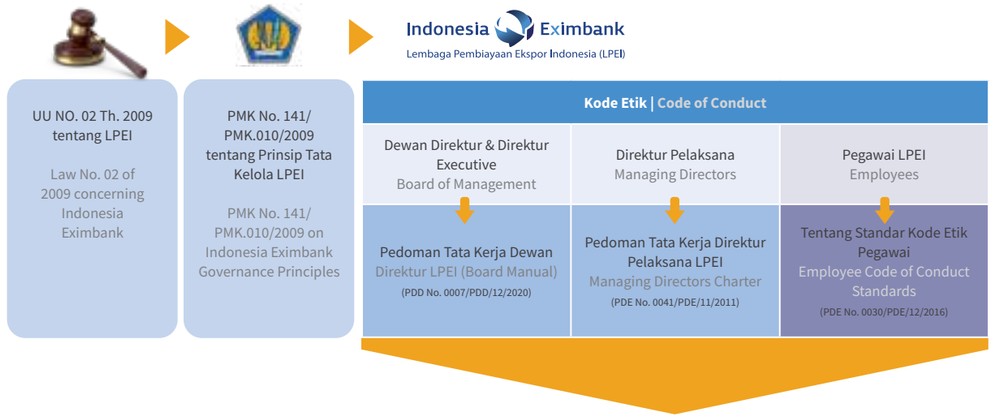

- Kebijakan Sistem Kepegawaian | Employment System Policy (PDE No.0005/PDE/01/2018)
- Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran LPEI | Whistleblowing System (PDE No. 0018/PDE/0/2012)
- Budaya Kerja LPEI | Work Culture (PDE No.00001/PDE/01/2014)
- Manual Pakta Integritas LPEI | Integrity Pact Manual (PDE No.0017/PDE/0/2012)
- Penegakan Disiplin Pegawai dan Penentuan Sanksi Atas Pelanggaran LPEI | Employee Disciplinary Enforcement and Sanction for Frauds (PDE No. 0028/PDE/12/2020)

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

INFORMATION ACCESS AND COMPANY DATA

Standar Kode Etik Pegawai

- **Pegawai** adalah setiap orang yang bekerja atau terikat dalam hubungan kerja dengan LPEI dan oleh karenanya menerima gaji dan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain dari LPEI dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) LPEI.
- **Standar Kode Etik** adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai LPEI maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya.

Pokok-Pokok Kode Etik

Dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI, seluruh elemen Lembaga wajib menjalankan Kode Etik yang meliputi:

1. Patuh dan taat pada semua ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pencatatan dengan benar.
3. Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Mengindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan para nasabah LPEI.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan LPEI terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Tidak menerima gratifikasi, hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi, maupun keluarga.
9. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra profesinya.

Pemberlakuan Kode Etik Di Seluruh Level Organisasi

- Standar kode etik berisi nilai-nilai dasar etika, kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsi selaku pegawai dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan operasional LPEI, maupun dalam pergaulan dengan lingkungan masyarakat.
- Standar kode etik berlaku mengikat untuk seluruh pegawai LPEI, termasuk di dalamnya Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana.

Employee Code of Conduct Standards

- **Employee** is every person that works or binds in work relations with Indonesia Eximbank and as such receive salary and income or remuneration in other forms from the Company and has the Employee Main Number (NIP).
- **Code of Conduct Standards** is a guideline for behavior, conduct, action, values and norms that are binding all Employees in implementing their duties and functions as the Company's Employee or in daily interactions with the surrounding communities.

Code of Conduct Principles

In carrying out its operational activities, all elements of the Company shall implement Code of Conduct, which includes:

1. Compliance with and adhere to prevailing laws and regulations.
2. Carrying out proper listing.
3. Avoiding unfair competitions.
4. Not abusing authority for personal interests.
5. Avoiding involvement in decision making to avoid conflicts of interest.
6. Maintaining confidentiality of the Company's customers.
7. Taking into account adverse impacts of each policy set by the Company on economic, social and environmental conditions.
8. Not accepting gratifications, gifts or rewards that enrich his/her personally or family.
9. Not performing actions that can harm the image of his/her profession.

Code of Conducts Enforcement in Organization

- Code of Conduct standards contains basic ethical values, obligations and prohibitions in carrying out duties, obligations and functions as employees in relation to the Company's operational activities and in association with the community.
- Code of Conduct standards is binding for all employees, including the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
INFORMATION ACCESS AND COMPANY DATA

- Standar kode etik dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi di bidang kode etik telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 oleh Divisi Kepatuhan bersama Divisi Sumber Daya Manusia. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah LPEI yang dilakukan melalui *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja pada tanggal 21 – 23 Desember 2020.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Penerapan dan penegakan kode etik menjadi tanggung jawab unit kerja SDM dan disosialisasikan oleh unit kerja Kepatuhan melalui email kepada seluruh Pegawai.

- Code of Conduct standards is carried out without tolerance and exceptions for irregularities and carries sanctions for those who violate them.

Code of Conduct Dissemination

Compliance Division and Human Resources Division, Compliance Division have carried out code of conduct dissemination throughout 2020. The dissemination was provided to all employees at Indonesia Eximbank Head Office and Regional Offices through Computer Based Training (CBT) Code of Conduct and Work Culture on 21 – 23 December 2020.

Code of Conduct Practices and Enforcement

Implementation and enforcement of code of conduct is the responsibility of Human Resources unit and is socialized by the Compliance unit through email to all Employees

Mekanisme Laporan Pelanggaran Kode Etik
Mechanism of Code of Conduct Violations Report

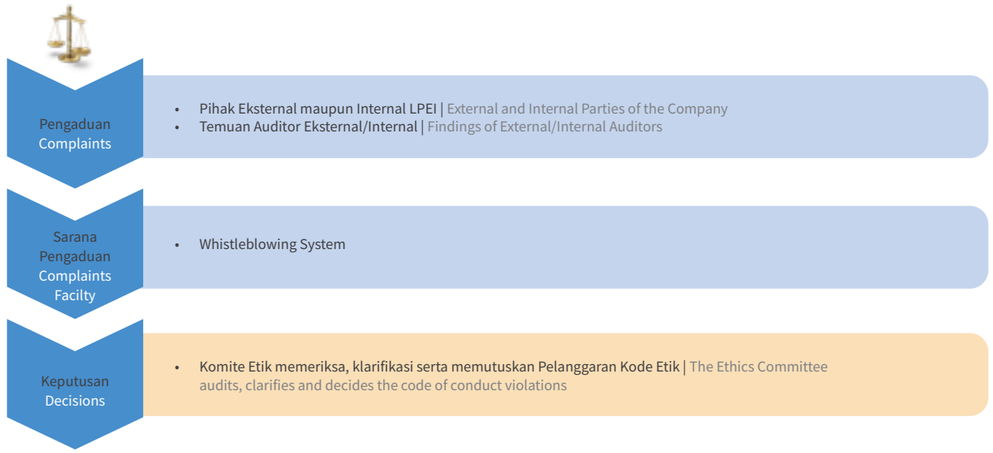

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

INFORMATION ACCESS AND COMPANY DATA

Jenis Sanksi untuk Setiap Pelanggaran Kode Etik

Segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar pokok-pokok Kode Etik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Eksekutif mengenai Kode Etik merupakan Pelanggaran Kode Etik. Mekanisme pengaduan Pelanggaran Kode Etik baik dari pihak eksternal, maupun internal LPEI mengacu kepada mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing).

Direktur Eksekutif berwenang mengenakan sanksi untuk semua tingkat kepada pegawai, namun dalam pelaksanaannya sebagian wewenang dapat didelegasikan tanpa hak subsitusi kepada pejabat sebagai berikut:

1. Pegawai pada Kelompok jabatan Kepala Departemen berwenang untuk mengenakan Sanksi Ringan berupa Surat Peringatan Lisan terbatas kepada Pegawai yang merupakan bawahan langsungnya.
2. Pegawai pada Kelompok jabatan Kepala Divisi berwenang untuk mengenakan Sanksi Ringan berupa Surat Peringatan Pertama hingga Surat Peringatan Ketiga terbatas kepada Pegawai yang berada pada Unit Kerjanya.
3. Kepala Divisi SDM berwenang untuk mengenakan semua Sanksi Ringan serta Sanksi Sedang berupa Peringatan Keras Tertulis kepada seluruh Pegawai.

Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 tidak ada pelanggaran kode etik, dengan demikian tidak ada sanksi yang diberikan.

Sanctions for Every Code Violation

All employee's remarks, writings or actions that violate code of conduct principles as regulated in the Executive Director's Regulation regarding the Code of Conduct constitute a Violation of the Code of Conduct. The Code of Conduct complaint mechanism from both external and internal parties of Indonesia Eximbang refers to the whistleblowing mechanism.

The Executive Director has the authority to impose sanctions on all levels of employees, but in practice some authority can be delegated without substitution rights to the following executives:

1. Employee in the Department Head position group has the authority to impose Minor Sanctions through a limited Oral Warning to Employees under direct subordinates.
2. Employee in the Division Head position group has the authority to impose Minor Sanctions through the First Warning Letter up to the Third Warning Letter limited to Employees under his/her Units.
3. Head of HR Division has the authority to impose Minor Sanctions and Medium Sanctions through Written Strong Warnings to all Employees.

Code of Conduct Violations and Sanctions in 2020

Throughout 2020 there were no violations of the code of ethics, thus no sanctions were given.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Salah satu aspek penting dalam prinsip tata kelola yang baik adalah mewujudkan partisipasi dari unsur internal maupun eksternal LPEI. Salah satunya adalah penyampaian informasi tetang pelanggaran dan perbuatan yang berpotensi dan/atau bersifat merugikan LPEI.

Berdasarkan informasi tersebut, Direktur Eksekutif dapat segera melakukan tindakan pencegahan (preventif) atau pemulihan secara cepat atas kerugian yang timbul ataupun tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direktur Eksekutif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yang salah satunya melalui penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) LPEI.

Dasar Peraturan

- UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan ketentuan perubahan-perubahannya;
- PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan ketentuan perubahan-perubahannya;
- PDD No. 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) LPEI dan ketentuan perubahan-perubahannya;
- PDE No. 0045/PDE/10/2019 Tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI.

Penerapan di LPEI

Sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System merupakan bagian dari upaya pengendalian internal di lingkungan Indonesia Eximbank.

LPEI secara rutin telah melakukan Pelaporan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola Lembaga. Dewan Direktur mengapresiasi langkah yang diambil Direktur Eksekutif beserta jajaran *Board of Management* untuk memperkuat fungsi audit internal LPEI. Penguatan fungsi internal audit ini diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan operasional LPEI secara efektif serta mengidentifkasi area-area yang dapat ditingkatkan. Dewan Direktur mengharapkan agar mekanisme whistleblowing system yang telah ada dapat berjalan secara optimal dan saling melengkapi fungsi yang dijalankan internal audit.

One of key aspects in good governance principles is to manifest the internal and external participations of the Company. On of which is the disclosure of potential and/or detrimental frauds and actions to the Company.

As such, the Executive Director can immediately carry out preventive actions or recovery on any lossess or other actions that are deemed necessary by the Executive Director. To realize such condition, an internal control system is required which one of them is carried out through the Whistleblowing System (WBS) of the Company.

Regulation References

- Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank;
- PMK No. 141/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles and its amendments;
- PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management and its amendments;
- PDD No. 0006/PDD/07/2018 on Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Policies and its amendments;
- PDE No. 0045/PDE/10/2019 on Operating Manual of Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy Practices.

Implementation in Indonesia Eximbank

Whistleblowing System is a part of internal control efforts in the Indonesia Eximbank environment.

The Company regularly conducted Reporting on the Good Governance Principles Implementation and conducted an assessment of the institutional governance. The Board of Directors appreciates the steps taken by the Executive Director and the Board of Management to strengthen the Company's internal audit function, which is expected to carry out operational oversight function and identify areas for improvement. The Board of Directors hopes that the existing whistleblowing system mechanism can perform optimally and complement the functions carried out by internal audit.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Ketentuan Umum Whistleblowing System LPEI
General Rules of Whistleblowing System

Definisi Whistleblowing
Whistleblowing Defintion

Pengungkapan tindakan Pelanggaran atau pengungkapan perbuatan Pelanggaran yang dapat merugikan LPEI yang umumnya dilakukan secara rahasia (confidential)

Disclosure of Frauds or Violations that may be detrimental to the Company that generally carried out confidentially.

Whistleblowing System LPEI
Indonesia Eximbank Whistleblowing System

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) LPEI adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi Pelapor Pelanggaran untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan sebagai suatu Pelanggaran yang terjadi di LPEI.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) LPEI ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai LPEI.

1. Indonesia Eximbank Whistleblowing System is a system represents as a media for the Whistleblowers to submit information on frauds that indicated as a Fraud in the Company.
2. Indonesia Eximbank Whistleblowing System functions as one of control and monitoring tools on the fraud potential carry out by the Company's employee.

Pelapor Pelanggaran
Whistleblowers:

3. Pegawai LPEI | Employees;
4. Rekanan LPEI | Vendors;
5. Nasabah LPEI | Customers;
6. Pihak Terafiliasi LPEI, dan | Affiliated Parties, and;
7. Mitra LPEI | Partners.

Unsur Pokok Whistleblowing System
- Terlapor Pelanggaran;
- Pelapor Pelanggaran;
- Direktur Eksekutif;
- Direktur Pelaksana;
- Laporan Pelanggaran;
- Verifikator;
- Investigator.

Principal Elements of Whistleblowing System
- Reported Violators
- Whistleblowers
- Executive Director
- Managing Director
- Whistleblowing Reports
- Verificators
- Investigators

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Jenis-Jenis Pelanggaran
1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, antara lain pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang;
2. Pelanggaran kode etik LPEI, antara lain benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang terlarang;
3. Pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi termasuk kegiatan penyediaan sumber dana bagi LPEI, kegiatan penempatan dana, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya;
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian financial ataupun non financial bagi LPEI;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja LPEI.

Violation Types
1. Violation of laws and regulations, such as falsification of signatures, corruption, embezzlement, mark-ups, drug use, destruction of goods;
2. Violation of Indonesia Eximbank code of conduct, such as conflicts of interest, harassment, involvement in prohibited community activities;
3. Violation of generally accepted accounting principles;
4. Fraud in financing, underwriting, insurance and consulting services business activities including activities of providing sources of funds for the Company, fund placement activities, procurement of goods and services and other operational activities;
5. Other fraudulent acts that may cause financial or non-financial losses to the Company;
6. Actions that endanger occupational health and safety of the Company.

Mekanisme Pelaporan
1. Pelapor Pelanggaran dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui sarana yang telah disediakan oleh LPEI.
2. Pelaporan Pelanggaran sekurang-kurangnya mencatumkan informasi sebagai berikut:
   a. Nama Pegawai LPEI dan Unit Kerja yang terlibat;
   b. Jenis perbuatan yang terindikasi adanya Pelanggaran;
   c. Waktu terjadinya Pelanggaran;
   d. Lokasi terjadinya Pelanggaran.
3. Pelaporan Pelanggaran harus dilampirkan bukti awal yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya Pelanggaran yang dilakukan. Bukti awal dimaksud antara lain:
   a. Dokumen-dokumen informasi Pelanggaran;
   b. Foto-foto kejadian Pelanggaran;
   c. Rekaman (audio/video);
   d. Saksi (apabila ada), dan;
   e. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Reporting Mechanisms
1. The Whistleblowers can submit the Whistleblowing Report through facilities provided by the Company.
2. The Whistleblowing Report at least contains the following information:
   a. Name of involved Employee and Work Unit;
   b. Type of actions that indicate as Violations;
   c. Time of Violations;
   d. Location of Violations.
3. The Whistleblowing Report shall be completed with initial evidence that support or explain the possibility of Frauds. The initial evidences are among others:
   a. Violation information documents;
   b. Pictures of Violation events;
   c. Recording (audio/video);
   d. Witnesses (if any), and;
   e. Data of information sources for further investigation.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Kebijakan Perlindungan Bagi Pelapor Pelanggaran

1. LPEI menyediakan sarana Pelaporan Pelanggaran yang independen, bebas dan rahasia;
2. LPEI memberikan perlindungan kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran;
3. LPEI memberikan perlindungan atas tindakan balasan dari Terlapor.

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

1. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan oleh Verifikator, dengan supervisi langsung oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan.
2. Untuk menghindari adanya tujuan yang tidak baik dari Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran, maka Verifikator harus melakukan seleksi awal terhadap Laporan Pelanggaran yang diterima.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran tidak dilengkapi dengan bukti awal atau bukti awal yang diberikan tidak berkaitan secara langsung dengan Pelaporan Pelanggaran, maka Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut.
4. Tugas dan tanggung jawab Verifikator adalah:
   a. Mengelola sarana Pelaporan Pelanggaran LPEI.
   b. Menerima Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
   c. Meminta bukti awal dari Pelapor Pelanggaran melalui sarana yang tersedia.
   d. Melakukan analisa awal terhadap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
   e. Mengajukan izin prinsip tindak lanjut pemrosesan Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang.
   f. Melakukan proses verifikasi Pelaporan Pelanggaran sesuai izin prinsip tindak-lanjut pemrosesan yang di setujui oleh Direktur Pelaksana Bidang.
   g. Menatausahakan Pelaporan Pelanggaran secara tertib dan aman sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga dengan baik.

Protection Policy for the Whistleblowers

1. The Company provides an independent, free and confidential Whistleblowing System;
2. The Company provides protection of indentity confidentiality for the Whistleblowers;
3. The Company provides protection on retaliation from the Reported Violators.

Whistleblowing System Management

1. The Whistleblowing Report is carried out by Verificators, with direct supervision by the Compliance Unit Head.
2. To prevent any indecent purpose from the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers, then the Verificators shall carry out initial selection on the received Whistleblowing Report.
3. If the Whistleblowing Report is not submitted with initial evidence or such initial evidence is not directly related with the Whistleblowing Report, then the Report is not feasible for further process.
4. The duties and responsibilities of Verificators are:
   a. Manage the Company Whistleblowing System.
   b. Receive the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers.
   c. Request initial evidence from the Whistleblowers through available facility.
   d. Carry out initial analysis on the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers.
   e. Propose permission in principle to follow up the Whistleblowing Report process to the Field Managing Director.
   f. Carry out verification of Whistleblowing Report according to permission in principle of process follow up approved by the Field Managing Director.
   g. Administer the Whistleblowing Report properly and safely thereby to properly maintain its confidentiality aspect.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sarana Pelaporan Pelanggaran

Indonesia Eximbank telah menyediakan sarana penyampaian pelaporan, baik bagi pihak eksternal, maupun internal. Media atau saluran yang digunakan adalah:

a. Kotak Pos khusus dengan sarana PO BOX 1909/JKTM 12700;
b. *Email* dengan alamat khusus: gcg@indonesiaeximbank.go.id atau group email (Whistleblowing System);
c. Sistem elektronik lainnya.

Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran

Mekanisme dan alur penyampaian pelaporan serta penanganan pengaduan dapat dilihat dari Bagan Alur Penyampaian Pelaporan Pelanggaran dan Penanganan Pengaduan berikut ini:

Whistleblowing System Reporting Mechanisms

Indonesia Eximbank has provided reporting facilities, both for external and internal parties. Media or channels used are:

a. A special post office box addressed to PO BOX 1909/JKTM 12700
b. Official e-mail addressed to address: gcg@indonesiaeximbank.go.id or group email (Whistleblowing System);
c. Other electronic systems.

Whistleblowing System Report Handling Mechanism

The mechanism and flow of reporting and handling complaints can be seen from the Flow Chart of Whistleblowing Submission and Complaints Handling below:

Bagan Penanganan Pengaduan
Whistleblowing System Diagram

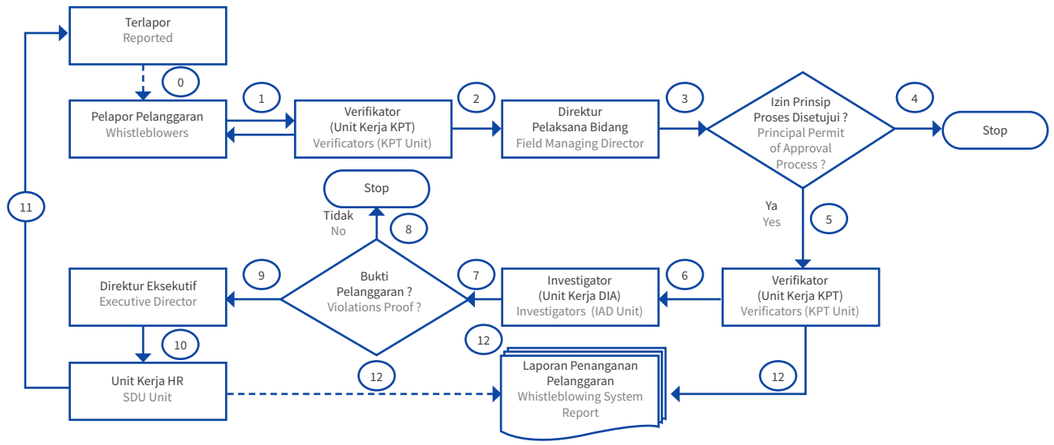

Keterangan:

0. Pelapor Pelanggaran mendapat informasi Pelanggaran yang di duga dilakukan oleh Terlapor.
1. Pelapor Pelanggaran membuat Pelaporan Pelanggaran menggunakan sarana yang telah ditetapkan.
2. a. Verifikator menerima Laporan Pelanggaran dari Pelapor Pelanggaran.
   b. Verifikator menerima bukti awal atas Pelapor Pelanggaran.
   c. Verifikator melakukan telaah awal dengan supervisi Kepala Unit Kerja Kepatuhan (KPT) dan mengajukan ijin prinsip pemrosesan lebih lanjut atas Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang;

Description:

0. Whistleblower receives alleged Violation information by the Reported.
1. Whistleblower prepares Whistleblowing Report using set forth facilities.
2. a. Verificator receives Whistleblowing Report from the Whistleblower.
   b. Verificator requests for initial proof on the Whistleblowing Report.
   c. Verificator carries out initial analysis with the supervision of Compliance Unit Head and propose principal permit for further process on the Whistleblowing Report to the Field Managing Director.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

3. Direktur Pelaksana Bidang memberikan keputusan atas ijin prinsip pemrosesan lebih lanjut atas Pelaporan Pelanggaran;
4. Dalam hal Direktur Pelaksana Bidang tidak meyetujui ijin prinsip untuk pemrosesan lebih lanjut atas Laporan Pelanggaran, maka proses dihentikan;
5. Dalam hal ini Direktur Pelaksana Bidang menyetujui secara tertulis ijin prinsip untuk pemrosesan lebih lanjut atas Lapotan Pelanggaran, maka proses dilanjutkan oleh Verifikator.
6. a. Verifikator melakukan verifikasi secara lengkap atas Laporan Pelanggaran.
   b. Hasil verifikasi disampaikan kepada Unit Kerja Audit Internal (DIA) LPEI selaku Investigator melalui sarana internal memo dan bersifat sangat rahasia.
7. a. Unit Kerja Audit Internal LPEI melakukan audit Investigasi terhadap Pegawai LPEI yang diduga melakukan Pelanggaran sesuai Laporan Pelanggaran dimaksud.
   b. Ketentuan audit Investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit Internal (DIA) LPEI merujuk pada terjadinya Pelanggaran, maka proses dihentikan.
8. a. Dalam hal hasil audit Investigasi tidak diketemukan bukti yang kuat yang mengarah pada terjadinya Pelanggaran, maka proses dihentikan.
   b. Proses penghentian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Terlapor dan selanjutnya kepada Terlapor diberikan rehabilitas nama baiknya yang dinyatakan secara tertulis pada saat surat pemberitahuan tersebut.
9. a. Dalam hal hasil audit Investigasi diketemukan bukti yang kuat dan telah terbukti telah terjadi Pelanggaran, maka Unit Kerja Audit Internal menyusun rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai berbagai jenis sanksi yang akan diberikan kepada Terlapor sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
   b. Apabila menurut Investigator terdapat indikasi perbuatan pidana yang merugikan LPEI secara finansial, maka dapat diberikan rekomendasi untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganannya.
10. a. Direktur Eksekutif memberikan keputusan atas rekomendasi hasil audit Investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit Internal.
    b. Keputusan Direktur Eksekutif untuk pemberian sanksi Pelanggaran diserahkan kepada Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum (SDU) untuk dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian LPEI.
11. a. Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum melaksanakan pemberian sanksi kepegawaian kepada Terlapor.
    b. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terdapat indikasi pidana yang merugikan LPEI secara finansial, maka Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum melaksanakan penyerahan Terlapor kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Unit Kerja Kepatuhan (KPT) dengan berkoordinasi dengan Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum dan Unit Kerja Audit Internal melakukan pemantuan dan menyusun Laporan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) kepada Direktur Eksekutif.

3. Field Managing Director provides decision on principal permit for further process on the Whistleblowing Report.
4. In the event that Field Managing Director does not approved on principal permit for further process on the Whistleblowing Report, the process shall be terminated.
5. In the event that Field Managing Director approved in writing on principal permit for further process on the Whistleblowing Report, the process shall be progressed by the Verificator.
6. a. The Verifier to comprehensively verify the Fraud Reports.
   b. The verification results are submitted to the Company's Internal Audit Unit (IAU) as the Investigator through internal memo and strictly confidential.
7. a. The Company's IAU carries out investigation audit to the Company's employee that are suspected to commit Fraud according to Fraud Report.
   b. The investigation audit rules carried out by IAU refers to the occurrence of Fraud, then the process is terminated.
8. a. In the event that there is no finding of strong evidence of Fraud on Investigation audit results, then the process is terminated.
   b. The termination process is notified in writing to the Reported Party and subsequently given the rehabilitation of good name in writing in the notification letter.
9. a. In the event that there is finding of strong evidence and has been proven of the occurrence of Fraud, then the IAU prepares recommendation to the Executive Director on various sanctions that will be given to the Reported Party according to applicable employment rules.
   b. If the Investigators find the indication of criminal act that may be financially detrimental to the Company, then a recommendation can be given to the authorities for further handling.
10. a. The Executive Director takes decision on the recommendation of investigation audit results by the IAU.
    b. The decision of Executive Director on Fraud sanctions is submitted to the Human Resources and General Affairs Unit for implementation according to the Company's employment rules.
11. a. The Human Resources and General Affairs Unit carries out the provision of employment sanctions to the Reported Party.
    b. If the fraud carried out by the Reported Party is found to have an indication of criminal act that may be financially detrimental to the Company, then the Human Resources and General Affairs Unit shall carry out submission of Reported Party to the authorities in accordance with prevailing regulations.
12. The Compliance Unit coordinates with Human Resources and General Affairs Unit and IAU to monitor and develop Whistleblowing System Report to the Executive Director.

PENERAPAN PEDOMAN GCG

GCG GUIDELINES APPLICATION

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Governance Principles	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
1	Pelaksana tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors.	a. PDD No. 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana a. PDD No. 0016/PDD/12/2010 concerning the Working Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning the Working Guidelines for the Managing Director	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI. b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). c. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI. d. Peraturan Menteri Keuangan RI No.143/PMK.06/2014 tentang Perubahan PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI. e. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI. f. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI. a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. b. RI Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of Indonesia Eximbank. c. Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors. d. RI Minister of Finance Regulation No. 143/PMK.06/2014 concerning Amendments to PMK No. 106/PMK.06/2009 concerning the Procedures for Proposing, Appointment and Dismissal of Indonesia Eximbank Board of Directors. e. RI Minister of Finance Regulation No. No. 2/PMK.06/2017 on Second Amendment of PMK No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors. f. RI Minister of Finance Regulation No. 105/PMK.06/2017 on Amendment of PMK No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors.

PENERAPAN PEDOMAN GCG

GCG GUIDELINES APPLICATION

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Governance Principles	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
2	Kelengkapan dan pelaksaanaan Komite-Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern. The completeness and implementation of Committees and units carrying out internal control functions.	Komite Dibawah Dewan Direktur: a. PDD 0008/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI b. PDD 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI Komite Dibawah Direktur Eksekutif: c. PDE No.0033/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan LPEI d. PDE No. 0034/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI e. PDE No. 0008/PDE/02/2018 tentang Komite Personalia LPEI f. PDE No. 0027/PDE/05/2019 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi dan MPO No. 0037/CEO/08/2020 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi g. PDE No. 0026/PDE/05/2019 tentang Komite Asset dan Liabilities LPEI dan MPO No. 0006/CEO/02/2020 tentang Perubahan PDE tentang Komite Asset dan Liabilities LPEI. h. PDE No.0018/PDE/04/2018 tentang Komite Pengembangan Produk LPEI i. PDE No. 0025/PDE/05/2019 tentang Komite Kebijakan Bisnis LPEI j. PDE 0024/PDE/05/2019 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI k. MPO.0028/CEO/04/2020 tentang Komite Efisiensi l. MPO.0027/CEO/04/2020 tentang Komite Pengadaan m. MPO.0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai LPEI Committees Under the Board of Directors: a. PDD 0008/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank NRC Charter b. PDD 0009/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee Charter Committees Under the Executive Director: a. PDE No.0033/PDE/08/2019 on Indonesia Eximbank Financing Committee b. PDE No. 0034/PDE/08/2019 on Indonesia Eximbank NIA Financing Committee c. PDE No. 0008/PDE/02/2018 on Indonesia Eximbank Personnel Committee d. PDE No. 0027/PDE/05/2019 on Information System Technology Committee and MPO No. 0037/CEO/08/2020 on Information System Technology Committee e. PDE No. 0026/PDE/05/2019 on Indonesia Eximbank Asset & Liabilities Committee and MPO No. 0006/CEO/02/2020 on Amendment of PDE regarding Indonesia Eximbank Asset & Liabilities Committee. f. PDE No.0018/PDE/04/2018 on Indonesia Eximbank Product Development Committee g. PDE No. 0025/PDE/05/2019 on Indonesia Eximbank Business Policy Committee h. PDE 0024/PDE/05/2019 on Indonesia Eximbank Risk Management Committee i. MPO.0028/CEO/04/2020 on Efficiency Committee j. MPO.0027/CEO/04/2020 on Procurement Committee k. MPO.0086/KDE/12/2020 on Indonesia Eximbank Ethics and Employee Disciplinary Committee	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) a. Law no. 2 of 2009 concerning LPEI b. RI Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of the Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank)

PENERAPAN PEDOMAN GCG

GCG GUIDELINES APPLICATION

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Governance Principles	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
3	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	a. PDD No. 0017/PDD/09/2009 tentang Kebijakan Kepatuhan LPEI b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 tentang Manual Operasional Piagam Kepatuhan *(Compliance Charter)* LPEI a. PDD No. 0017/PDD/09/2009 on Indonesia Eximbank Compliance Policy b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 concerning the Indonesia Eximbank Compliance Charter Operating Manual	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI c. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI d. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI e. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI a. Law No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Development and Supervision of Indonesia Eximbank c. PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance d. d. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management PMK No. 143/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Know Your Customer Principles
	3.1 LHKPN	a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Tentang Manual, Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 concerning LHKPN Submission Requirements for Indonesia Eximbank Executives b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Regarding Manual, Preparation of LHKPN for Indonesia Eximbank Executives	a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. PerKom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara d. Surat Edaran No. SE- 08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian Dan Pegelolaan LHKPN a. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free of Collution- Corruption-Nepotism b. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission c. KPK PerKom No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Assets d. Circular No. SE-08/01/10/2016 concerning Technical Instructions for Submission and Management of LHKPN
	3.2. Gratifikasi 3.2. Gratification	PDE No. 0029/PDE/06/2019 tentang Manual Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI PDE No. 0029/PD/06/2019 concerning the Operating Manual for Gratification Control in Indonesia Eximbank Environment	a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Surat KPK No.B.1341/01- 13/03/2017 tanggal 15 Maret 2015 a. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes with amendments to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. b. KPK Letter No. B.1341/01- 13/03/2017 dated March 15, 2015

PENERAPAN PEDOMAN GCG

GCG GUIDELINES APPLICATION

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Governance Principles	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
	3.3 Whistleblowing System	PDE No. 0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) LPEI PDE No. 0018/PDE/03/2012 concerning Indonesia Eximbank Whistleblowing System Manual	c. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI d. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI e. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI f. Law No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank g. PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance h. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management
	3.4. Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) 3.4. Know Your Customer Principles in the framework of Implementing the Anti-Money Laundering and Preventing Terrorism Funding Program (APU PPT)	a. PDD No. 0002/PDD/03/2020 Tentang Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 Tentang Manual Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. c. PDE No. 0006/PDE/03/2017 tentang SOP Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. d. PDE No. 0027/PDE/11/2020 tentang Manual Penerapan *Know Your Employee* a. PDD No. 0002/PDD/03/2020 regarding Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Policy (AML & CTF) of Indonesia Eximbank. b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 regarding Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Manual (AML & CTF) of Indonesia Eximbank. c. PDE No. 0006/PDE/03/2017 regarding Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding SOP (AML & CTF) of Indonesia Eximbank. d. PDE No. 0027/PDE/11/2020 on Know Your Employee Practice Manual	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI c. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. d. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan e. Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank f. Peraturan Kepala PPATK No. 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. g. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang a. Law No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. b. PMK No. 143/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Know Your Customer Principles c. c. POJ K No. 12/POJ K.01/2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector. d. d. POJK No. 23/POJK.01/2019 dated 18 September 2019 on Amendment of OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 regarding Anti Money Laundry and Counter Terrorism financing Implementation in Financial Services Sector e. e. OJ K Circular Letter No. 37/SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for Implementing Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector f. f. Head of PPAT K Regulation No. 02/1.02/PPAT K/02/15 concerning the category of service users who have the potential to commit money laundering crimes. g. g. Head of PPAT K Regulation No. PER-02/1.02/PPAT K/02/15 concerning the Category of Service Users who Potentially Commit Criminal Acts of Money Laundering.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Governance Principles	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
	3.5. Kepatuhan pemenuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator 3.5. Compliance with external reporting, including to regulators	PDE No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggungjawab Pelaporan LPEI PDE No. 0067/PDE/12/2019 concerning the Operating Manual for Establishing Indonesia Eximbank Reporting Responsible Units	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan a. RI Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of Indonesia Eximbank b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Development and Supervision
	3.6. Kepatuhan penyelesaian advance pegawai 3.6. Compliance with advance employee settlement	PDE No.0036/PDE/10/2018 tentang Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI PDE No.0036/PDE/10/2018 concerning the Authority Limits for Approval of the Use of Indonesia Eximbank Budget	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan a. RI Minister of Finance Regulation No.141/PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of the Indonesian Export Financing Institution (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Development and Supervision
	a. Anti Fraud	PDE No.0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Strategi Anti Fraud LPEI PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy Operating Manual	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI a. RI Finance Minister Regulation No.141/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles b. PMK No. 142/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Risk Management
	b. Penerapan Kode Etik dan Pakta Integritas b. Implementation of the Code of Ethics and Integrity Pact	a. PDE No. 0030/PDE/12/2016 tentang Standar Kode Etik Pegawai b. PDE No. 0005/PDE/01/2018 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian c. PDE No. 0042/PDE/09/2019 tentang Manual Pakta Integritas LPEI d. SE No. 0018/CEO/12/2020 tentang Penerapan Pakta Integritas Pegawai LPEI a. PDE No. 0030/PDE/12/2016 concerning Employee Code of Conduct Standards b. PDE No. 0005/PDE/01/2018 concerning Staffing System Policy c. PDE No. 0042/PDE/09/2019 concerning the LPEI Integrity Pact Manual d. SE No. 0018/CEO/12/2020 concerning the Implementation of the LPEI Employee Integrity Pact	

PENERAPAN PEDOMAN GCG

GCG GUIDELINES APPLICATION

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Governance Principles	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
4	Audit Intern Internal Audit	a. PDE No. 0007/PDE/02/2019 tentang Piagam Audit Internal b. PDD nomor 0002/PDD/06/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI c. PDE No.0014/PDE/06/2014 tentang Manual Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI d. PDE. No.0006/PDE/09/2009 Pedoman Menanggapi Laporan Hasil Audit Divisi Internal Audit LPEI a. PDE No. 0007/PDE/02/2019 on Internal Audit Charter b. PDD No. 0002/PDD/06/2019 on Indonesia Eximbank Internal Audit Function Practices c. PDE No.0014/PDE/06/2014 on Internal Control Manua on Audit Verification of Non- Performing Financing of Indonesia Eximbank d. PDE. No.0006/PDE/09/2009 on Guidelines to Responding Audit Results Reports of Indonesia Eximbank Internal Audit Division	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) c. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank b. RI Finance Minister Regulation No.141/ PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles c. PMK No. 140/PMK.010/2009 on Mentoring and Oversight
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern Risk management implementation including internal control systems	a. PDE No.0024/PDE/05/2018 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI b. PDE No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management Manual) LPEI a. PDE No.0024/PDE/05/2018 regarding Indonesia Eximbank Risk Management Committee b. PDE No. 0032/PDE/09/2018 regarding Indonesia Eximbank Risk Management Operating Manual (Enterprise Risk Management Manual)	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan a. RI Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Mentoring and Oversight
6	Pengadaan barang & jasa Procurement of goods & services	a. PDE No. 0041/PDE09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI b. PDD No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI c. PDE No. 0033/PDE/10/2018 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI d. PDE No. 0034/PDE/10/2011 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang/ Jasa LPEI a. PDE No. 0041/PDE09/2019 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Operating Manual b. PDD No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Policies c. PDE No. 0033/PDE/10/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Operating Manual d. PDE No. 0034/PDE/10/2011 concerning Indonesia Eximbank Procurement of Goods or Services Standard Operating Procedures (SOP)	Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) RI Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles
7	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Transparency of financial and non-financial conditions	a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI b. PDE No.0007/PDE/01/2012 tentang Manual Pelaporan Keuangan LPEI a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning Indonesia Eximbank Accounting Policies b. PDE No.0007/PDE/01/2012 concerning Indonesia Eximbank Financial Reporting Manual	a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning LPEI Accounting Policies b. PDE No. 0007/PDE/01/2012 concerning the LPEI Financial Reporting Manual a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning Indonesia Eximbank Accounting Policies b. PDE No. 0007/PDE/01/2012 concerning Indonesia Eximbank Financial Reporting Manual

PENILAIAN GCG

GCG ASSESSMENT

Berdasarkan pelaksanaan *Self Assessment* atas Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik tahun buku 2020 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Keuangan Nomor: 141/ PMK.010/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di LPEI dengan kajian yang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian dengan Nilai Komposit yang diperoleh oleh LPEI untuk tahun buku 2020 adalah sebesar **1,581** dengan Predikat Komposit **BAIK**. Adapun penjabaran pencapaian nilai komposit disampaikan sebagai berikut:

Based on the implementation of Indonesia Eximbank Self-Assessment of Good Governance Principles of fiscal year 2020, using the parameters set by the Ministry of Finance Office No.: 141/PMK.010/2009 dated 31 December 2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles, which aimed to assess the implementation of good governance principles in Indonesia Eximbank, with a study covering 11 (eleven) factors, the Composite Score obtained by Indonesia Eximbank for 2020 fiscal year was **1.581,** or the Composite Predicate of **GOOD**. The description of the achievement of composite scores is presented as follows:

Nilai Komposit, Predikat dan Peringkat masing-masing Faktor Penilaian
Composite Scores, Predicate and Rating of each Assessment Factor

No.	Faktor Penilaian Assessment Factors	Nilai Scores	Predikat Predicate
(1)	(2)	(5)=(3) x (4)	(6)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur Duties and Responsibilities of the Board of Directors	0,100	Sangat Baik Very Good
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Duties and Responsibilities of Executive Directors and Managing Directors	0,200	Sangat Baik Very Good
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	0,127	Sangat Baik Very Good
4	Penanganan Benturan Kepentingan Conflicts of Interest Handling	0,150	Baik Good
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Compliance Function Practices	0,100	Baik Good
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Internal Audit Function Practices	0,150	Baik Good
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern External Audit Function Practices	0,113	Baik Good
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern Risk Management including Internal Control Systems	0,225	Cukup Baik Fair
9	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	0,150	Baik Good
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan internal Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Reports on Good Governance Principles Practices, and Internal Reporting	0,191	Baik Good
11	RJP dan RKAT Corporate Plan and Annual Work Plan and Budget	0,075	Baik Good
	Nilai Komposit Composite Score	1,581	Baik Good

PENILAIAN GCG
GCG ASSESSMENT

Nilai Komposit	Predikat Komposit | Composite Predicate	Composite Scores
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik | Excellent	Composite Score < 1.5
1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik	1.5 ≤ Composite Score < 2.5
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik	2.5 ≤ Composite Score < 3.5
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik	3.5 ≤ Composite Score < 4.5
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik	4.5 ≤ Composite Score < 5

Kesimpulan Nilai Hasil Self Assessment
Self-Assessment Result Score Conclusion

Nilai Komposit Composite Score	Predikat Komposit Composite Predicate	Keterangan Description
1,581	**BAIK** GOOD	Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen. This reflects that in general, the implementation of the Company Governance practice is good. It is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance. Weaknesses in the application of Governance principles are generally not very significant and can be resolved using normal actions by the management.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS & SERVICES PROCUREMENT

Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, serta Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang dan Jasa.

Prinsip Dalam Pengadaan Barang & Jasa
Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
c. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
f. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI.

Goods & Services Procurement
Goods and Services Procurement Policy refers to the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, and Executive Director's Regulation (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 concerning Goods & Services Procurement Operating Manuals.

Goods and Services Procurement Principles
The principles in the procurement of goods and services are as follows:

a. Efficient, which means Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services must be attained using minimum funds and power to achieve quality and targets within the stipulated time or using funds that have been determined to achieve results and targets with maximum quality.
b. Effective, which means Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services must be in accordance with the specified needs and targets and provide maximum benefits.
c. Transparent, which means that all provisions and information regarding Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services are clear and can be widely known by interested Goods and Services Providers and the general public.
d. Open, which means that all interested suppliers of goods and services as well as the general public can participate in the procurement of goods and services.
e. Competitive, which means that the procurement of goods and services must be done through fair competition among as many providers of equal goods and services and meet the specified requirements hence goods and services can be offered competitively and there are no interventions that interfere with the creation of market mechanisms in the procurement of goods and services.
f. Fair and non-discriminatory, which means providing equal treatment to all prospective Goods and Services Providers and does not lead to benefit certain parties in any way and and or reason, with due observance to the interests of Indonesia Eximbank.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS & SERVICES PROCUREMENT

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
h. Kemandirian berarti suatu keadaan dimana keadaan barang dan jasa dikelola secara professional dan tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
i. Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap lembaga selama proses Pengadaan Barang dan Jasa.
j. Independen berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari conflict of interest.

Metode pengadaan

a. Metode pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
   1. Pelelangan Umum;
   2. Pemilihan Langsung;
   3. Pengadaan Langsung;
   4. Penunjukan Langsung; atau
   5. Kontes/Sayembara.
b. Metode pemilihan untuk pengadaan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan:
   1. Seleksi Umum;
   2. Seleksi Langsung;
   3. Pengadaan Langsung;
   4. Penunjukan Langsung; atau
   5. Sayembara.

Ketentuan Dalam Pengelolaan Vendor

Ketentuan pengelolaan vendor diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa.

Kode Etik Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No.0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus mematuhi etika sebagai berikut:

g. Accountable, which means must be in accordance with the rules and regulations related to the Procurement of Goods and Services for accountability.
h. Independence, which is a situation where the condition of goods and services is managed professionally and there is no conflict of interest and influence or pressure from any party.
i. Prudent, which means to always regard the anticipatory steps to prevent losses to the Company during the process of Goods and Services Procurement.
j. Independent, which means that the implementation of Goods and Services Procurement shall be carried out with high integrity and free from conflict of interest.

Procurement methods

a. The selection method for Other Goods and Services Providers can be implemented by:
   1. General Auction;
   2. Direct Selection;
   3. Direct Procurement;
   4. Direct Appointment; or
   5. Contest/Competition.
b. Selection method for Consultancy Services can be implemented by:
   1. General Selection;
   2. Direct Selection;
   3. Direct Procurement;
   4. Direct Appointment; or
   5. Contest.

Vendor Management Stipulations

Vendor management is stipulated in the Executive Director Regulation (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 concerning the Goods & Services Procurement Operating Manual.

Procurement of Goods and Services Code of Conduct

Pursuant to the Board of Directors (PDD) Regulation No. 0004/PDD/04/2018 regarding Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, the Parties engage in Goods and Services Procurement must comply with the following ethics:

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS & SERVICES PROCUREMENT

a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.
b. Bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung, maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan semua pihak yang terkait baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan LPEI dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, unit kerja atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan LPEI.
h. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, Para Pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di LPEI terdiri dari:

a. Unit Kerja Pengusul Pengadaan;
b. Unit Kerja Pelaksana Pengadaan;
c. Panitia Pengadaan; dan
d. Unit Kerja Pelaksana Pengendalian Biaya.

a. Carry out the tasks in an orderly manner accompanied by a sense of responsibility to achieve the goals, efficiency, and accuracy of the achievement of Procurement of Goods and Services objectives.
b. Work professionally and independently and maintain the confidentiality of documents related to the Procurement of Goods and Services, which by their nature must be kept confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services.
c. Not influencing each other directly or indirectly resulting in unfair competition.
d. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the written agreement of the parties.
e. Avoid and prevent conflicts of interest of all parties involved either directly or indirectly in the process of procurement of goods and services.
f. Avoid and prevent financial squander and leaks in the procurement of goods and services.
g. Avoid and prevent the abuse of authority and/ or collusion for the purpose of personal gain, work units or other parties, which can directly or indirectly harm the Company.
h. Do not accept, not offer and do not promise to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates or any form from or to anyone who is known or reasonably suspected in connection with the Procurement of Goods and Services.

Activity Implementations

In accordance with the Board of Directors (PDD) Regulation No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, the Parties engage in Goods and Services Procurement in Indonesia Eximbank consist of:
a. Procurement Proposing Unit;
b. Procurement Implementation Unit;
c. Procurement Committee; and
d. Cost Control Implementing Unit.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS & SERVICES PROCUREMENT

Sistem Pengawasan

Sesuai Pasal 18 (1) Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI dinyatakan bahwa:

"Direktur Eksekutif wajib melakukan pengawasan terhadap Unit Kerja Pelaksana Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa serta menugaskan Unit Kerja yang membidangi Internal Audit untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku".

Supervision System

In accordance with Article 18 (1) Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy states that:

"The Executive Director shall supervise the Procurement Executing Unit and the Goods and Services Procurement Committee in carrying out the Procurement of Goods and Services and assign the Unit in charge of Internal Audit to conduct supervision in accordance with prevailing regulations".

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

Dasar Kebijakan

a. Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4957).
b. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164).
c. Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No. 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5406).
d. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 148, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5709).
e. Peraturan OJK No. 12/POJ K.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
f. Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
g. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.
h. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
i. Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
j. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
k. Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Policy References

a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank (State Gazette of the Republic of Indonesia 2009 No. 2, additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4957).
b. Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 122 of 2010, additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5164).
c. Law No. 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts on Terrorism Funding (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 in 2013, additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5406).
d. Government Regulation No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Money Laundering (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015 No. 148, additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5709).
e. OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector.
f. OJK Regulation No. 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector.
g. Minister of Finance Regulation No. 143/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank principle of Know Your Customer.
h. Head of PPATK Regulation No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning the Category of Service Users who Potentially Commits Criminal Acts of Money Laundering.
i. Head of PPATK Regulation No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/2012 on Submission Procedures of Suspicious Financial Transaction Report and Cash Transaction Report for Financial Services Providers.
j. Head of PPATK Regulation No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 on Integrated Services Users Information System.
k. OJK Circular No. 37/SEOJ K.05/2017 concerning the Implementation of the Anti- Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Non-Bank Financial Industry Sector.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

l. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris sebagaimana telah diubah melalui SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019.

Penerapan Program APU & PPT

Secara umum Divisi Kepatuhan adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di LPEI. Penerapan program APU PPT berbasis risiko (riskbased approach) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya LPEI. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LPEI memiliki struktur pengendalian internal yang efektif antara lain dibuktikan dengan:

1. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
3. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Pejabat senior harus menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk membatasi dan mengontrol risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);
b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direktur Eksekutif;

l. OJK Circular No. 38/SEOJ K.01/2017 concerning the Direct Blocking Guidelines for Customers of Financial Services Sector in which Indetities are Stated in the Alleged Terrorist List and Terrorist Organization as amended through SEOJ K No. 29/SEOJ K.01/2019.

Implementation of AML & CTF Program

Compliance Division in general is a working unit responsible in ensuring the practice of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML & CTF) in Indonesia Eximbank. The effective risk-based approach of AML CTF shall be implemented in internal control and internalized within the Company's culture. The senior executives are responsible in ensuring effective internal control structure in Indonesia Eximbank, among others by:

1. Establishing adequate internal policies, procedures and monitoring;
2. Limitation of authority and responsibilities of relevant unit with the AML and CTF program practices; and
3. Independet audit to ensure the effectiveness of AML and CTF programs.

Senior executives shall create a culture of risk management and compliance, ensuring that employees adhere to policies and procedures intended to limit and control risk.

Duties and responsibilities

a. Regular analysis on risk evaluation of Money Laundering criminal act and/or Terrorism Financing criminal act related to the Customer, state or geographical areas, products, services, transaction or delivery channels;
b. Develop, update, and propose the AML and CTF policies and procedures that have been developed to manage and mitigate risks based on risk evaluation as stated in point a, for the consideration and approval of Executive Directors;

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
f. Memantau pelaksanaan transaksi Nasabah;
g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan;
h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
i. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJ K mengenai penerapan APU & PPT;
k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;
l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan dan sumber informasi yang memadai;
n. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh satuan kerja;
o. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan-laporan lain terkait dengan penerapan APU & PPT;

c. Ensure systems that can identify, analyze, monitor and provide effective reports on transaction charactristics by Customers;
d. Ensure the policies and procedures as stated in point b have met the changes and development of among others products, services, and technology in financial services sector, business activity and complexity, transaction volume of financial services companies, and mode of Money Laundering and/or Terrorism Financing;
e. Ensure the Customers' form has accommodated required data in implementing AML and CTF program;
f. Moniroting Customer's transactions;
g. Evaluate Customer monitoring results and transaction analysis to ensure the existence or nonexistence of Suspicious Financial Transaction;
h. Administer monitoring and evaluation results;
i. Ensure Customer data and profile update as well as Customer transaction data and profile;
j. Ensure effective identification of high-risk business activities toward criminal acts of Money Laundering and/or Terrorism Financing in accordance with Financial Services Companies policies and procedures as well as rules as stated in OJ K Regulation concerning the AML & CTF practices;
k. Ensure good communication mechanism from each relevant unit to specific unit or responsible executives on AML and CTF practices by maintaining information confidentiality and taking into account the anti tipping-off rules;
l. Oversight on AML and CTF program practices in relevant unit;
m. Ensure high-risk area identification related to AML and CTF program practices by referring to the laws and regulatory as well as adequate information sources;
n. Accept, analyze and develop Suspicious Financial Transaction report submitted by work unit;
o. Develop Suspicious Financial Transaction report and other reports related to AML and CTF program practices;

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

p. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan

q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

p. Ensure good implementation of activities related to AML and CTF program practices; and

q. Monitor, analyze, and recommend training requirements on AML and CTF program practices for executives and/or employees of Financial Services Companies.

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

TRANSPARENCY OF INSTITUTION FINANCIAL AND NON-FINANCIAL

Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan tercermin dari pelaporan yang dilakukan Indonesia Eximbank kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Melampirkan seluruh jenis pelaporan berdasarkan PDE No. 0019/ PDE/07/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal:

The financial and non-financial condition transparency are reflected from the reporting by Indonesia Eximbank to the stakeholders in accordance with the rules and timely manner. The following is all types of reporting based on the Executive Director Regulation No. 0019/PDE/07/2014 dated 8 July 2014 on the Mandatory of Reporting to the External Parties:

Jenis Pelaporan Type of Reporting	Periode Laporan Report Period	Instansi Penerima Recipient
Laporan Pelampauan Posisi Devisa Neto (PDN) Net Open Position (NOP) Exceed Report	Insidentil Incidentil	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Laparan Posisi Devisa Neto (PDN) Net Open Position (NOP) Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Laporan Kualitas Aktiva Asset Quality Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Laporan Kecukupan Modal (CAR) Capital Adequacy Ratio (CAR) Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Laporan Keuangan Konvensional Conventional Financial Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Laporan Keuangan Syariah Sharia Financial Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Laporan Rekapitulasi Utang Luar Negeri (ULN) Foreign Debt Recapitulation Report	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
Laporan SPT Masa PPh 22/23/26, Pasal 4 ayat 2 Tax Report PPh 22/23/26, Article 4 clause 2	Bulanan Monthly	KPP BUMN/Dirjen Pajak KPP SOE/DirGen Tax
Pembayaran SSP, PPh 22/23/26, pasal 4 ayat 2, PPN Tax Payment, PPh 22/23/26, Article 4 clause 2	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Bank Perception
Pembayaran SSP, PPh 25 SSP Payment, PPh 25	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Bank Perception
Pembayaran wapu PPN Payment of VAT	Bulanan Monthly	Bank Persepsi – Kas Negara State Treasury
Pelaporan wapu PPN VAT Reporting	Bulanan Monthly	KPP Wajib Pajak Besar IV KPP Large Taxpayer IV
Pembayaran PPN Luar Negeri Foreign VAT Payment	Bulanan Monthly	KPP Wajib Pajak Besar IV KPP Large Taxpayer IV
Pelaporan PPN Luar Negeri Foreign VAT Reporting	Bulanan Monthly	KPP Wajib Pajak Besar IV KPP Large Taxpayer IV
Laporan Sistem Informasi Debitur Debtor Information System Report	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
Laporan BMPP BMPP Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Kementerian Keuangan Finance Ministry
Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) – LKNB Forex Fluctuation Report	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
Laporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Export Result Forex Report	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
Laporan Upah Jamsostek Jamsostek Wage Report	Bulanan Monthly	PT Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Employment
Kontribusi Pensiun (DPLK) Retirement Contribution	Bulanan Monthly	DPLK Manulife
Laporan SID Pinjaman Pegawai Employees Loan Report	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
Laporan SPT Masa PPH 21 Tax Report PPh 21	Bulanan Monthly	KPP BUMN/Dirjen Pajak KPP SOE/DirGen Tax

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

TRANSPARENCY OF INSTITUTION FINANCIAL AND NON-FINANCIAL

Jenis Pelaporan Type of Reporting	Periode Laporan Report Period	Instansi Penerima Recipient
Pembayaran SSP PPh 21 Tax Payment PPh 21	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Bank Perception
Laporan Realisasi RKAT Work & Budget Plan Actual Report	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Finance Ministry
Kegiatan Usaha Konvensional & Syariah Conventional & Sharia Business Activity	Semesteran Mid Year	Kementerian Keuangan Finance Ministry
Rencana Jangka Panjang (RJP) Corporate Plan	Lima Tahunan Five Years	Kementerian Keuangan Finance Ministry
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Work and Budget Plan	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Finance Ministry
Laporan Pengawasan RKAT Work & Budget Plan Oversight Report	Semesteran Mid Year	Kementerian Keuangan Finance Ministry
Laporan Manajemen Risiko Risk Management Report	Bulanan Monthly	Dewan Direktur Board of Directors
Laporan Profil Risiko Risk Profile Report	Triwulan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Kementerian Keuangan Finance Ministry
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Emisi Obligasi Realization of Bonds Issuance Proceeds Usage Report	Triwulan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Wali amanat Trustee
Laporan Modal Kekayaan Negara yang Dipisahkan (MKND) Separated Stated Treasury Capital Report	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Finance Ministry
Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Un- Audited) posisi 30 Juni Un-Audited Mid Year Financial Statements as of 30 June	Semesteran Mid Year	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
		Wali amanat Trustee
		Kementerian Keuangan Finance Ministry
Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Audited Annual Financial Statements	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Finance Ministry
		Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
		Wali amanat Trustee
		Koran
Publikasi Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Publication of Audited Annual Financial Statements	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Finance Ministry
		Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
		Wali amanat Trustee
		Koran

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA
TRANSPARENCY OF INSTITUTION FINANCIAL AND NON-FINANCIAL

Jenis Pelaporan Type of Reporting	Periode Laporan Report Period	Instansi Penerima Recipient
Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Un-Audited) Publication of Un-Audited Mid Year Financial Statements	Semesteran Mid Year	Kementerian Keuangan Finance Ministry
		Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
		Wali amanat Trustee
Buku Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Finance Ministry
		Menteri Perdagangan RI Trade Minister of RI
		Menteri Perindustrian Industry Ministy
		Menteri Pertanian Agriculture Ministy
		Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
		Bank Indonesia
		Wali amanat Trustee
		Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indonesian Consumen Agency Foundation
Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehatihatian (KPPK) Prudential Principle Application Activity Report	Triwulan Quarterly	Bank Indonesia
Laporan Extensible Business Reporting Language (XBRL) Extensible Business Reporting Language Report	Triwulan Quarterly	Bank Indonesia
Hasil Pemeringkatan Rating Results	Tahunan Annual	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bursa Ekspor Indonesia dan Wali amanat Indonesia Export Exchange and Trustee
Laporan Keuangan Triwulan (Un-Audited) Un-Audited Quarterly Financial Statements	Triwulan Quarterly	Bursa Ekspor Indonesia dan Wali amanat Indonesia Export Exchange and Trustee
(Triwulan I/Q1: 30 April & Triwulan III/Q3: 31 Oktober)		
Laporan Prinsip Tata Kelola (GCG) Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank GCG Principles Report	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
		Menteri Perdagangan RI Trade Minister of RI
		Menteri Perindustrian Industry Ministy
		Menteri Pertanian Agriculture Ministy
		Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Bank Indonesia
		Dewan Direktur Board of Directors
Informasi Laporan Tata Kelola Governance Report Information	Tahunan Annual	Website Indonesia Eximbank
Laporan SIPESAT SIPESAT Report	Insidentil Incidentil	PPATK
Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi & Penjaminan Insurance & Guarantee Closure Retention Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

TRANSPARENCY OF INSTITUTION FINANCIAL AND NON-FINANCIAL

Jenis Pelaporan Type of Reporting	Periode Laporan Report Period	Instansi Penerima Recipient
Laporan Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing, Proyeksi Pembayaran Hutang/Kewajiban per bulan, serta Informasi jatuh Tempo Hutang/ Kewajiban Perusahaan Debt/Borrowings Report in Foreign Exchange, Projetion of Debt/LIabitlities Payments per month, as well as maturity information on Debt/ Liabilities	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (Pengawasan Pasar Modal II) Financial Services Authority (Capital Market Oversight II)
Laporan Semesteran mengenai perkembangan penarikan pinjaman penerusan dan penyaluran pinjaman Mid year report on extention borrowings withdrawal and borrowing disbursement	Semesteran Mid Year	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
Laporan Keuangan (Audited), selama jangka waktu Pinjaman Penerusan Audited Financial Statements, during the Extention Borrowings	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
1 (satu) dokumen RKAP yang telah diputuskan dan disahkan 1 document of Work & Budget Plan has been stipulated and ratified	Tahunan Annual	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
Laporan Keuangan (audited) selama jangka waktu Pinjaman Sindikasi Audited Financial Statements, during the Syndication Borrowings	Tahunan Annual	Facility Agent

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

Indonesia Eximbank telah memiliki beberapa kebijakan terkait pencegahan korupsi, antara lain kebijakan mengenai:

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Dasar Peraturan

- Eksternal
  1. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
  2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. PerKom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  4. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian Dan Pegelolaan LHKPN.
- Internal
  1. Peraturan internal yang dikeluarkan oleh Dewan Direktur, yaitu nomor 0001/PDD/07/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI.
  2. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0013/ PDE/04/2013 Tentang Manual, Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI.

Penerapan di LPEI

a. Wajib Lapor LHKPN LPEI yaitu Kepala Divisi, Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif, dan Dewan Direktur mengisi formulir e-Filling LHKPN.

b. Divisi Kepatuhan LPEI ditunjuk sebagai petugas Admin Instansi KPK.

c. Divisi Kepatuhan menyampaikan dan menginput dokumen e Filling melalui sistem e LHKPN dan surat kepada KPK.

d. Periode Pelaporan Wajib Lapor LHKPN LPEI Tahun 2019 menggunakan sistem aplikasi e LHKPN KPK dengan batas waktu pelaporan maksimal 31 Maret 2020.

There are several policies regarding corruption prevention in Indonesia Eximbank:

REPORT OF STATE OF OFFICIALS WEALTH (LHKPN)

Regulatory References

- External
  1. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and KKN-Free State Administrators.
  2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
  3. KPK PerKom No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Organizer's Assets.
  4. Circular No. SE-08/01/10/2016 concerning Technical Instructions for Submission and Management of LHKPN.
- Internal
  1. Internal regulations issued by the Board of Directors, No. 0001/PDD/07/2017 concerning LHKPN Submission Requirements for Indonesia Eximbank Executives.
  2. Executive Director Regulation Number 0013/ PDE/04/2013 Regarding Manual, LHKPN Preparation for Indonesia Eximbank Executives.

Implementation in Indonesia Eximbank

a. Indonesia Eximbank LHKPN's compulsory reportings, the Division Head, Managing Director, Executive Director, and Board of Directors must fill out the LHKPN e-Filling form.

b. Indonesia Eximbank Compliance Division was appointed as the KPK Agency Admin officer.

c. Compliance Division submits and inputs the e Filling documents through the LHKPN e system and letters to the KPK.

d. Indonesia Eximbank LHKPN's Compulsory Reporting Reporting Period Year 2019 uses the LHKPN KPK e application system with a maximum reporting deadline of 31 March 2020.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

e. Divisi Hukum menyelenggarakan sosialisai dan bimbingan teknis pengisian laporan harta kekayaan dalam sistem e LHKPN kepada Wajib Lapor LHKPN LPEI pada tanggal 31 Januari 2020 dan 2 Maret 2020.
f. Pelaporan Penyelenggara Wajib Lapor LHKPN LPEI setiap tahun paling lambat pada 15 Desember.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Peraturan

- Eksternal
  1. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Surat KPK No.B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2015.
- Internal
  1. PDE No. 0029/PDE/06/2019 tentang Manual Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI.
  2. PDE No. 0024/PDE/09/2019 tentang Pakta Integritas LPEI.

Penerapan di LPEI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI senantiasa berupaya untuk melaksanakan tata kelola yang baik sebagai salah satu upaya untuk mendukung penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. LPEI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yaitu Unit Kerja Kepatuhan

Penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik diatur sebagai berikut:

1. Sosialisasi Berkelanjutan
   Sosialisasi dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI baik di Kantor Pusat, maupun Kantor Wilayah. Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka, email blast, dan screen saver.
2. Penandatanganan Pakta Integritas
   Pakta Integritas merupakan pernyataan seluruh jajaran LPEI untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integiras, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan LPEI dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap setahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai LPEI (selain Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana) pada saat pertama kali bekerja di LPEI.
3. Pelaporan Gratifikasi tahun 2020
   Pelaporan gratifikasi di LPEI dilakukan oleh Pegawai LPEI dengan 2 (dua) mekanisme yaitu:
   a. Pelaporan melalui Unit Pengendali Gratifikasi
   b. Pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai harus menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan gratifikasi dengan mengirimkan formulir pelaporan gratifikasi yang dapat diminta kepada UPG atau pun melalui website KPK dengan disertai dokumen pendukung seperti foto barang, bukti acara serah terima, undangan, maupun dokumen pendukung lainnya. Setelah menerima laporan, UPG akan melakukan review dan mengelompokkan laporan gratifikasi apakah merupakan kewenangan LPEI atau kewenangan KPK. Untuk tahun 2020 tidak terdapat pelaporan.
4. Penerapan Berkesinambungan
   a. Menyusun dan/atau mengevaluasi dari waktu ke waktu ketentuan Internal terkait gratifikasi dengan mengikuti aturan eksternal.
   b. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari penerima gratifikasi.
   c. Menyampaikan laporan gratifikasi (tanpa melalui proses analisa/review hanya pengelompokan jenis gratifikasi) kepada KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
   e. Mengadministrasikan laporan gratifikasi secara tertib.

e. Legal Division held a socialization and technical guidance for filing assets reports in the LHKPN e system to the Indonesia Eximbank LHKPN Compulsory Report on January 31 2020 and March 2 2020.
f. Report submissions of Indonesia Eximbank LHKPN's compulsory reporting every year no later than 15 December.

GRATIFICATION CONTROL

Regulatory References

- External
  1. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes with amendments to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes
  2. KPK Letter No. B.1341/01-13/03/2017 dated March 15, 2015.
- Internal
  1. PDE No. 0029/PDE/06/2019 concerning the Operating Manual for Gratification Control in Indonesia Eximbank Environment.
  2. PDE No. 0024/PDE/09/2019 concerning Indonesia Eximbank Integrity Pact.

Implementation in Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank strives to implement good corporate governance to foster a clean and free of corruption, collusion and nepotism country. Indonesia Eximbank has established the Gratification Control Unit (UPG), which is the Compliance Unit.

Sustainable gratification control in implementing good corporate governance is regulated as follows:

1. Sustainable Dissemination
   Dissemination conducted by the Gratification Control Unit to all Indonesia Eximbank employees both at the Head Office and Regional Offices. The socialization is done though face to face, email blast, and screen saver.
2. Integrity Pact Signing
   Integrity Pact is a statement from all Indonesia Eximbank employees on the commitment to upholding morals and integrity, safeguarding and protecting Indonesia Eximbank image, credibility and interests by not asking for or accepting gratifications from parties who have conflicts of interest. The Integrity Pact is signed by the Board of Directors and Managing Director at a determined time and re-signed every year. In addition, all Indonesia Eximbank employees also signed the Integrity Pact (other than the Board of Directors and Managing Directors) when they first joined the Company.
3. Gratification Reporting in 2020
   Reporting gratification in Indonesia Eximbank is carried out by Employees with 2 (two) mechanisms:
   a. Reporting through the Gratification Control Unit
   b. The report submission to the Corruption Eradication Commission. Employees must submit the reports of acceptance or rejection to UPG no later than 7 (seven) working days from the date of receipt or rejection of gratifications by sending a gratification reporting form that can be requested to UPG or through the KPK website accompanied by supporting documents such as photos of goods, proof of handover, invitations and other supporting documents. After receiving the report, UPG will conduct a review and classify the gratification report whether it is the authority of Indonesia Eximbank or the authority of the KPK. There was no report in 2020.
4. Sustainable Implementation
   a. Develop and/or evaluate from time to time the internal rules on gratification by following external rules.
   b. Receive gratifications reports with complete documents from gratification recipients.
   c. Submit a gratification report (without analysis/review, only the gratification type grouping) to the KPK in accordance with prevailing regulations.
   d. Regular gratification reports to the Director in charge of the Compliance function.
   e. Administer gratification report in an orderly manner.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

f. LPEI telah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi yang fungsinya dilekatkan pada Divisi Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penanganan gratifikasi di lingkungan LPEI sesuai dengan Surat KPK No. B.1341/01-13/03/2017.

g. Telah dilakukan Sosialisasi terkait pengenalan Gratifikasi di kepada seluruh pegawai LPEI.

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD LPEI

Dasar Peraturan

- Eksternal
  a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
  b. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.
- Internal
  PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Strategi Anti Fraud LPEI.

Penerapan di LPEI

LPEI telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang diatur dalam PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI. Implementasi strategi anti fraud LPEI melibatkan seluruh unit kerja dengan fungsi sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

a. Fungsi Koordinasi
   Fungsi Koordinasi dalam penerapan strategi anti fraud dijalankan oleh Unit Pengendali Fraud, dalam hal ini adalah Unit Kerja Internal Audit
b. Fungsi Pencegahan
   Fungsi Pencegahan terdiri dari 3 hal sub fungsi sebagai berikut:
   – Anti fraud awareness, dilakukan oleh seluruh unit kerja LPEI
   – Identifikasi kerawanan, dilakukan oleh seluruh unit kerja LPEI
   – Know Your Employee, dilakukan oleh seluruh kepala divisi dan pejabat setingkat kepala kantor wilayah di LPEI

f. Indonesia Eximbank has a Gratification Control Unit which function is attached to Compliance Division with duties and responsibilities to coordinate gratification handling in Indonesia Eximbank environment in accordance with the Corruption Eradication Commission Letter No. B.1341/01- 13/03/2017.

g. Socialization was conducted related to the introduction of Gratification to all Indonesia Eximbank employees.

INDONESIA EXIMBANK ANTI-FRAUD STRATEGY

Regulatory References

- External
  a. RI Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles.
  b. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management.
- Internal
  PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy Operating Manual.

Implementation in Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank has implemented the Anti Fraud Strategy set out in PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning the Operating Manual of Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy. Indonesia Eximbank anti-fraud strategy involves all units with functions in accordance with their authorities, which are:

a. Coordination function
   The Coordination Function in implementing anti-fraud strategy is carried out by Fraud Control Unit, in this case the Internal Audit Unit
b. Prevention Function
   The Prevention Function consists of 3 sub-functions as follows:
   – Anti-fraud awareness, carried out by all Indonesia Eximbank units
   – Identification of vulnerability, carried out by all Indonesia Eximbank units
   – Know Your Employee, carried out by all division heads and executives at the regional office level in Indonesia Eximbank

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

c. Fungsi Deteksi
   Fungsi Deteksi terdiri dari 3 hal sub fungsi sebagai berikut:
   – Whistle blowing, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
   – Surprise Audit, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit
   – Surveillance System, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit
d. Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
   Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi dilakukan oleh Unit Kerja yaitu:
   – Fungsi Investigasi dan Pelaporan, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit
   – Fungsi Pemberian Sanksi, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
e. Fungsi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
   Fungsi ini dilakukan langsung oleh Unit Kerja Internal Audit.

Berikut adalah bagan organisasi, fungsi, dan tanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud LPEI:

c. Detection function
   The Detection Function consists of 3 terms of sub functions as follows:
   – Whistleblowing, conducted by Human Resources and Organizational Development Unit
   – Surprise Audit, conducted by Internal Audit Unit
   – Surveillance System, conducted by Internal Audit Unit
d. Investigation, Reporting and Sanction Functions
   The Investigation, Reporting and Sanction Functions are carried out by the following Units:
   – Investigation and Reporting Functions, carried out by Internal Audit Unit
   – Sanction Function, carried out by Human Resources and Organizational Development Unit
e. Monitoring, Evaluation and Follow-up Functions This function is carried out directly by Internal Audit Unit.

Diagram of organization, functions, and responsibilities in Indonesia Eximbank anti-fraud strategy implementation:

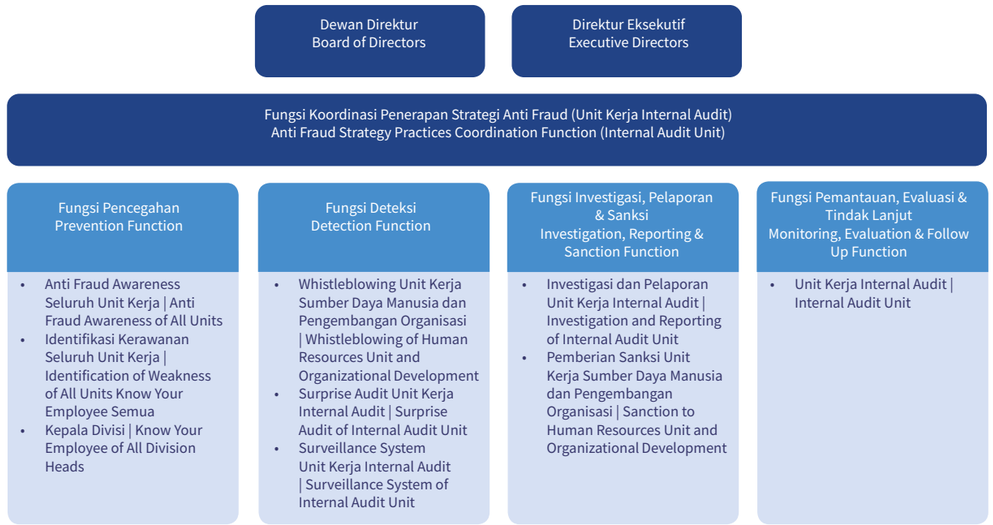

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian risiko terjadinya fraud, wajib dilakukan dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
3. Pengendalian dan Pemantauan

Penerapan strategi anti fraud dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar yang tercermin dalam framework di bawah ini:

Risk Management implementation to control risk of fraud shall be carried out by strengthening of several aspects, including the following:

1. Active Supervision of the Board of Directors and Executive Director
2. Organizational Structure and Responsibility
3. Control and Monitoring

Anti-fraud strategy implementation is carried out based on 4 (four) pillars described in the framework below:

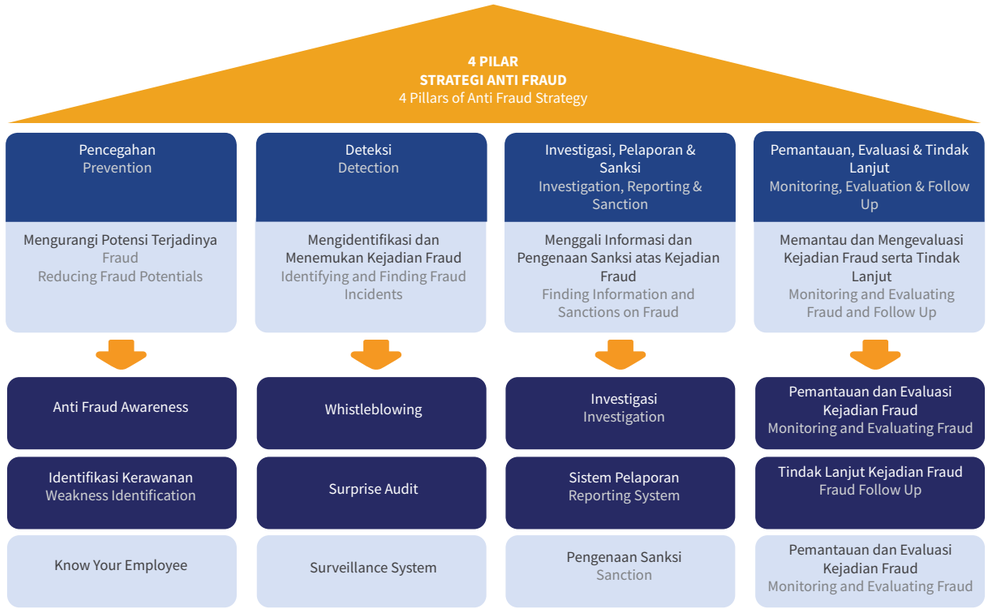

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI

SHARE BUY BACK AND BOND BUY BACK

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, LPEI tidak melakukan kegiatan buy back obligasi. Sedangkan buy back saham, Lembaga bukan merupakan perusahaan publik dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank did not exercise any bond buyback as of the end of fiscal year 2020, while on share buyback, the Company is not a publicly listed company and all of its shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA TAHUN 2020

COMPANY STRATEGIC PLAN IN 2020

Dalam usahanya untuk memperbaiki kinerja yang berkelanjutan dan mencapai tujuan untuk menjadi *Export Agency* dengan kinerja tertinggi di ASEAN pada tahun 2025, LPEI menetapkan strategi 5 tahun ke depan yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. *Regain our Footing* (periode implementasi 2020 – 2021)
2. *Grow a Strong Core for LPEI & the country* (periode implementasi 2022-2023)
3. *Become a Lighthouse Export Agency* (periode implementasi 2024-2025)

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan bagi LPEI, dimana merupakan langkah pertama bagi LPEI dalam implementasi strategi 5 tahun yaitu "*Regain Our Footing*" yang bertujuan untuk mempersiapkan LPEI dengan fondasi yang kokoh untuk menjalankan mandatnya. Namun pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, memiliki dampak global dan domestik yang menyebabkan terpukulnya perekonomian dan juga kehidupan sosial.

To sustainably improve its performance and be the best performing export agency in ASEAN by 2025, Indonesia Eximbank has identified a five-year strategy that is divided into three phases:

1. Regain our Footing (implemented 2020 – 2021)
2. Grow a Strong Core for Indonesia Eximbank & the country (implemented 2022-2023)
3. Become a Lighthouse Export Agency (implemented 2024-2025)

The year 2020 was a challenging year for Indonesia Eximbank and at the same time was the Company's first phase in its 5-year strategy. Through "Regain Our Footing", Indonesia Eximbank aimed at building a solid foundation to carry out its mandate. However, the COVID-19 pandemic that began in the first quarter of 2020 caused severe economic and social impacts.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

DISTRIBUTION OF FUND TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURES

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, LPEI tidak memiliki transaksi dengan pihak terkait. Namun LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selama tahun 2019, LPEI tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Laporan BMPP secara berkala telah dilaporkan kepada regulator sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009 dan POJ K 040/ POJK.05/2015.

In its business activity implementation, Indonesia Eximbank does not render any transaction with relevant parties. However, Indonesia Eximbank performs transaction with related parties namely parties under the ownership and/ or management relations. All transactions with related parties have been implemented in accordance with the prevailing policies. During 2019, Indonesia Eximbank did not violate or exceed the Legal Lending Limit (LLL). The Legal Lending Limit report is periodically submitted to the regulators according to the Finance Minister Regulation No. 140/PMK.010/2009 and POJ K 040/ POJK.05/2015.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN POLITIK

FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES AND POLITICAL INTERESTS

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
Pemberian dana untuk kegiatan sosial di LPEI dilakukan dalam bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipaparkan pada bagian CSR dilaporan tahunan ini.

Funding for Social Activities
Funding for Social Activities in Indonesia Eximbank is acted in the form of Corporate Social Responsibilty (CSR) which is presented in the CSR section of this Annual Report.

Pemberian Dana Untuk Kepentingan Politik
Selama tahun 2020, LPEI tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Funding for Political Purposes
Indonesia Eximbank did not fund any political activities in 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

LPEI secara konsisten berkomitmen penuh melaksanakan CSR untuk menyeimbangkan kegiatan usaha dan pengembangan masyarakat, di tengah terjadinya pandemi COVID-19 di hampir sepanjang tahun 2020. Komitmen ini dilakukan sebagai wujud kepedulian LPEI terhadap keberlanjutan aspek sosial dan lingkungan, serta sebagai bentuk pelaksanaan mandat yang diemban oleh LPEI.

In the midst of the COVID-19 pandemic throughout most of 2020, Indonesia Eximbank is consistently committed to implementing CSR to balance its business activities with community development. The full commitment represents the Company's concern for the social and environmental sustainability, as well as its mandate.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Kebijakan CSR

Sebagai Lembaga yang terus bertumbuh dan beroperasi di Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus berupaya agar keberadaannya memberikan pengaruh positif dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh LPEI melalui imlementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR).

Di tengah tantangan yang luar biasa akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di hampir sepanjang tahun 2020, LPEI tetap berkomitmen penuh melaksanakan CSR untuk menyeimbangkan kegiatan usaha dan pengembangan masyarakat. Hal ini dlakukan sebagai wujud peran serta dan kepedulian terhadap keberlanjutan aspek sosial dan lingkungan, maupun sebagai bentuk pelaksanaan mandat Lembaga. LPEI melaksanakan kegiatan CSR melalui pemberian Bimbingan dan Jasa Konsultasi dalam bentuk kegiatan antara lain:

- Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor (UKME).
- Pemberian bantuan sarana produksi yang memberikan nilai tambah terhadap pengembangan hasil produksi, dengan memperkenalkan teknologi/inovasi terbaru dalam pengolahan/proses produksi.
- Bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada di sentra penghasil komoditi ekspor.
- Pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulian LPEI terhadap pelestarian alam dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan dari program kegiatan CSR di LPEI diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0024/PDD/09/2009 tentang mekanisme pelaksanaan CSR yang efektif, efisien, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi LPEI.

CSR Policy

As an Institution that continuously grows and operates in Indonesia, Indonesia Eximbank strives to influence stakeholders, particularly the Indonesian people, positively. This is done by the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

In the midst of the extraordinary challenges of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic almost all the way through 2020, Indonesia Eximbank remains fully committed to implementing CSR to balance business activities with community development. This is a form of participation and concern for the social and environmental sustainability as well the Institution's mandate. The CSR activities is carried out through the provision of Mentoring and Advisory Services through the following activities:

- Training and mentoring to increase the capacity of Export-oriented Small and Medium Enterprises (ESME).
- Production facilities providing added value to production outputs by introducing the latest technology/innovations in production processes.
- Public facilities and infrastructure construction assistance to improve their life quality, especially those living in export commodity-producing centers.
- Environmental preservation as a form of the Company's concern for nature preservation by involving community participation.

Indonesia Eximbank CSR is regulated in the Board of Directors Regulation No. 0024/PDD/09/2009 concerning an effective, efficient, planned and sustainable CSR implementation mechanism following the Company's vision and mission.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Visi dan Misi CSR

Visi
Turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fundamental ekonomi berbasis ekspor sesuai dengan visi dan misi Lembaga.

Misi
1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui capacity building guna menyejahterakan masyarakat Indonesia.
2. Meningkatkan sinergi antar Lembaga dalam memajukan ekonomi berbasis UKM berorientasi ekspor.
3. Menghantar pelaku UKM untuk melakukan ekspor.

CSR Vision and Mission

Vision
To take an active role in advancing Indonesia through community empowerment and export-based economic fundamentals development in accordance with the vision and mission of the Institute.

Mission
1. To increase skills and knowledge through capacity building in order to improve the welfare of Indonesians.
2. To increase inter-institution synergy in advancing an export-oriented SME economy.
3. To escort SMEs in exporting activities.

Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Management Structure

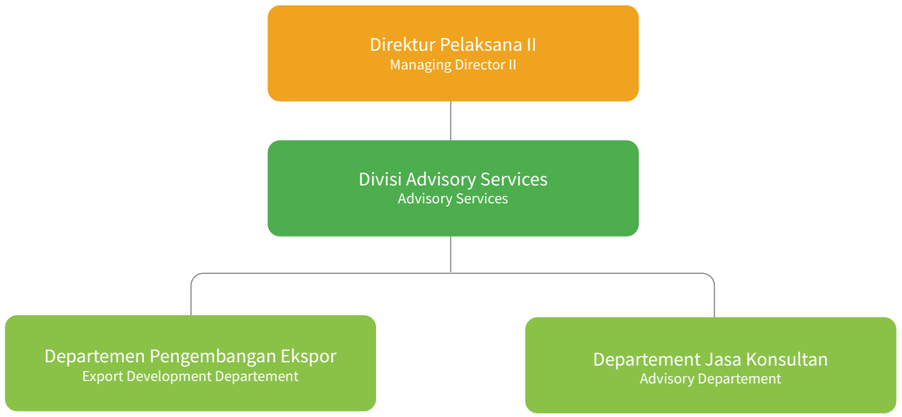

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dasar Penerapan

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten dilaksanakan sesuai dengan empat program yang tercantum dalam ketentuan tersebut sebagaimana bagan berikut:

Basis of Implementation

Based on Financial Services Authority Circular No. 30/SEOJK.04/2016, the issuer's social and environmental responsibility is carried out in accordance with the four programs in the following chart:

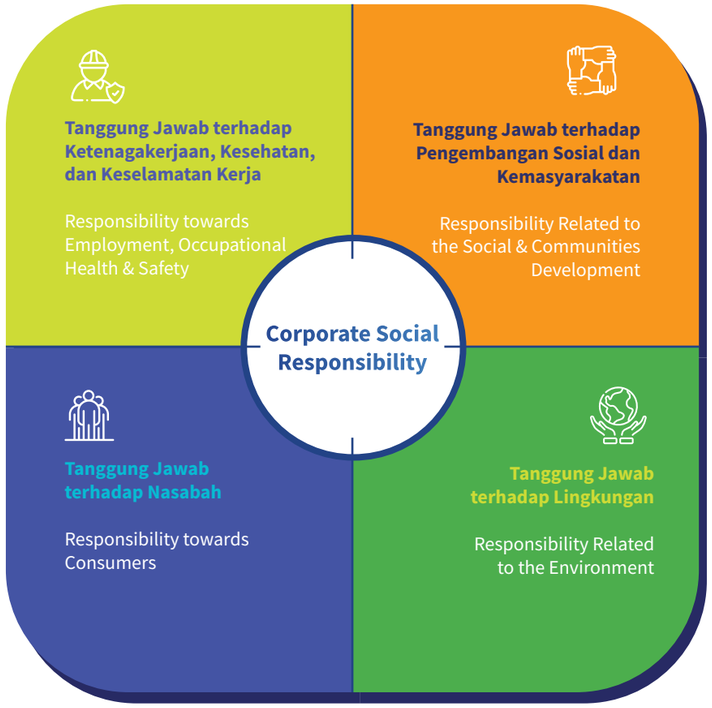

Pembiayaan dan Anggaran Program CSR

Sesuai dengan moto (*tagline*) program CSR LPEI yaitu "Sahabat UKM Ekspor", program CSR ini diharapkan dapat mendukung strategi bisnis LPEI yaitu mampu menyiapkan pelaku usaha UKM menjadi eksportir yang tangguh dan beretika, serta senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan melalui kepedulian terhadap pelestarian alam. Selama tahun 2020, LPEI telah menyalurkan dana untuk kegiatan CSR sebesar Rp1,61 miliar.

CSR Program Financing and Budget

In accordance with Indonesia Eximbank CSR motto (tagline), "*Sahabat UKM Export*", the program is expected to support the business strategy, which is to prepare SME businesses in becoming solid and ethical exporters, and to always maintain environmental balance by paying attention to nature conservation. During 2020, Indonesia Eximbank has disbursed CSR activity funds amounting to Rp1.61 billion.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Kegiatan Corporate Social Responsibility yang bersifat jangka panjang dan memiliki multiplier efek kepada masyarakat setempat merupakan bentuk tanggung jawab LPEI terhadap lingkungan hidup dan pelestarian alam. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Salah satu kegiatan dari program green office adalah menghimbau pegawai untuk membatasi penggunaan kertas dalam bekerja.

Indonesia Eximbank's responsibility for the environment and nature conservation is manifested in Long-term Corporate Social Responsibility activities with multiplier effects on the local community. It aims to create a more prosperous and independent life. One of green office programs is to request employee to limit the paper consumption during work operations.

Komitmen dan Kebijakan

Pelaksanaan program green office oleh Indonesia Eximbank yang dilakukan sejak 2012 merupakan implementasi atas Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No.0024/PDE/04/2012 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai. Dalam pelaksanaanya, Divisi SDM dan Umum sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan program green office melakukan himbauan secara berkala untuk menerapkan program ini.

Commitment and Policy

The green office programs carried out by Indonesia Eximbank since 2012 is the implementation of Executive Director Regulation No. 0024/PDE/04/2012 regarding Facility and Infrastructure Management of Indonesia Eximbank as a guideline for all employees. In its implementation, HR and General Affairs Division is a unit in charge of the green office program management, which conducts regular dissemination of the program application.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan hidup, LPEI melaksanakan program *green office* dalam setiap kegiatan operasional di lingkungan kerja. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan fokus dari program *green office* tersebut.

Program Green Office Indonesia Eximbank

1. Efisiensi penggunaan kertas dilakukan dengan cara pemanfaatan kertas bekas namun tetap memperhatikan aspek fungsi, peruntukan dan kerahasiaan dokumen.
2. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan mematikan perangkat dan peralatan listrik seperti membatasi penggunaan peralatan listrik, komputer, printer dan alat elektronik lainnya apabila telah selesai bekerja/meninggalkan kantor, mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
3. Efisiensi penggunaan air dilakukan dengan memastikan keran air dalam kondisi mati apabila telah selesai digunakan.

As a form of responsibility to the environment, Indonesia Eximbank implements a green office program in every work environment activity. The focus is effectiveness and efficiency of energy and material use.

Indonesia Eximbank Green Office Programs

1. Paper consumption efficiency is carried out by utilizing used paper however remains taking into account the aspect of function, purpose and confidentiality of documents.
2. Electricity consumption efficiency is carried out by switching off electrical tools and equipment, such as limitation of use of electrical tools, computers, printers and other electronic devices. Upon completion of working/leaving the office, it is requested to turn off the lights in the room that are not in use.
3. Water consumption efficiency is carried out by turning off water tap after use

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL & KEMASYARAKATAN

RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL & COMMUNITIES DEVELOPMENT

Sebagai salah satu lembaga Pemerintah, LPEI turut bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyusunan program CSR, LPEI berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat.

As a government agency, Indonesia Eximbank is also responsible for improving the Indonesian people's capabilities. To that end, Indonesia Eximbank focuses on enhancing skills and empowering the community in preparing the CSR programs.

.

Komitmen dan Kebijakan

Landasan pelaksanaan kegiatan CSR di bidang sosial dan kemasyarakatan mengacu pada Peraturan Dewan Direktur 0024/PDD/09/2009 tanggal 2 September 2009 tentang *Corporate Social Responsibility* LPEI.

Commitment and Policy

The basis of CSR social and community refers to the Board of Directors Regulation 0024/PDD/09/2009 dated 2 September 2009 concerning Indonesia Eximbank Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Realisasi Kegiatan CSR Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan 2020

Dalam melaksanakan kegiatan CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, LPEI selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Selama tahun 2020, LPEI terus melanjutkan program pengembangan Desa Devisa yang merupakan rangkaian kegiatan berbasis *community development*. Arah dari program tersebut untuk memperbesar akses masyarakat mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik, dibandingkan sebelum adanya kegiatan serta dapat menghasilkan devisa.

Adapun kegiatan berbasis *community development* yang dilaksanakan oleh LPEI selama tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Realization of 2020 Social and Community Development CSR Activities

In carrying out CSR activities related to social and community development, Indonesia Eximbank always pays attention to the exact needs of the community and provide maximum benefits.

During 2020, Indonesia Eximbank continues the Desa Devisa (Foreign Exchange Village) development program which is a series of community development-based activities. The direction of the program is to increase public access to better socio-economic-cultural conditions, compared to the times prior to the development activities and to generate foreign exchange.

The community development-based activities carried out by Indonesia Eximbank during 2020 are as follows:

No	Jenis Kegiatan Activities	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah Total
1	Survei Potensi Program Pengembangan DESA DEVISA Agrowisata Kawasan Ijen, Banyuwangi – Jawa Timur.	Bappeda Banyuwangi, *Ijen Tourism Cluster* (ITC), Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi (KKIB), Souvantara	Banyuwangi, Jawa Timur	2 Desa
	Potential Survey of the Ijen Agro-tourism DESA DEVISA Development Program, Banyuwangi - East Java.	Bappeda Banyuwangi, Ijen Tourism Cluster (ITC), Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi (KKIB), Souvantara	Banyuwangi, East Java	2 Villages
2	Penguatan Produksi Pengrajin Coffin Ramah Lingkungan Yang Berorientasi Ekspor Bagi Kelompok UKM Binaan Koperasi APIKRI – Provinsi DI.Yogyakarta	KSU APIKRI	Yogyakarta	5 UKM
	Strengthening Production of Export-Oriented Eco-Friendly Coffin Craftsmen for SME Groups Assisted by the APIKRI Cooperative - DI.Yogyakarta Province			5 SMEs
3	Peningkatan Kapasitas Petani Kakao Koperasi KSS, Kab. Jembrana – Bali	Koperasi KSS, Yayasan Kalimajari	Jembrana, Bali	20 Petani
	Capacity Building of KSS Cooperative Cocoa Farmers, Kab. Jembrana - Bali	KSS Cooperative, Kalimajari Foundation		20 Farmers
4	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha Koperasi Semaya Samaniya Dalam Masa Pandemi Covid-19	Koperasi KSS	Jembrana, Bali	1 Koperasi
	Assistance & Monitoring of Semaya Samaniya Cooperative Business Activities During the Covid-19 Pandemic	KSS Cooperative		1 Cooperative
5	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha KSU APIKRI Dalam Masa Pandemi Covid-19	KSU APIKRI	Yogyakarta	1 Koperasi
	Assistance & Monitoring of APIKRI's KSU Business Activities during the Covid-19 Pandemic			1 Cooperative

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

No	Jenis Kegiatan Activities	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah Total
6	MOU dengan DJKN Balinusra dan Pemkab Klungkung untuk Pengembangan DESA DEVISA Garam Kusamba	DJKN Balinusra, Pemkab Klungkung.	Klungkung, Bali	1 Koperasi
	MOU with DJKN Balinusra and Klungkung Regency Government for Development of Kusamba Salt DESA DEVISA.	DKJN Balinusra Klungkung Regency Government		1 Cooperative
7	Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Berbasis Pengembangan Komoditas Ekspor Unggulan	DJKN Balinusra, Pemkab Klungkung, KPP Bea Cukai Denpasar, KPP Bea Cukai Banyuwangi	Klungkung, Bali Banyuwangi, Jawa Timur	2 Koperasi
	Institutional Empowerment of Leading Export Commodities Development-Based Cooperatives Forum Group Discussion (FGD)	DKJN Balinusra, Klungkung Regency Government, Denpasar Customs and Excise KPP, Banyuwangi Customs and Excise KPP	Klungkung, Bali Banyuwangi, East Java	2 Cooperatives

Sedangkan terkait program peningkatan kapasitas (*capacity building*) UKME selama tahun 2020, LPEI tercatat telah melaksanakan 32 jenis kegiatan yang dilaksanakan sendiri maupun kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Sementara terkait program pendampingan (*coaching program*) ekspor perdana, LPEI telah merealisasikannya terhadap 21 perusahaan.

Di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, LPEI dalam mendukung Pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi salah satunya dengan melakukan donasi kepada 54 nasabah/pelaku usaha berupa 250 unit of wastafel *portable* dan 250 unit *Thermo Gun* yang senilai Rp1,61miliar. Sumber pendanaannya berasal dari Manajemen dan Pegawai LPEI yang didonasikan untuk membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kedua peralatan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan yang lebih maksimal kepada sekitar 63 ribu pegawai. Sehingga risiko penyebaran/ penularan di lingkungan kerja dapat diminimalisir. Donasi ini didistribusikan ke 18 kota di seluruh Indonesia melalui perwakilan kantor wilayah dan cabang LPEI seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Surakarta, Batam, Balikpapan dan Denpasar.

LPEI telah melakukan pula tes COVID kepada 1.858 peserta, injeksi multivitamin massal kepada 598 peserta, vaksin influenza massal kepada 260 peserta, serta perawatan (*inpatient* dan *outpatient*) kesehatan bagi Pegawai dan Pihak Ketiga beserta keluarga yang terinfeksi COVID-19 kepada 126 orang selama tahun 2020.

Concerning the export-oriented SMEs capacity building program during 2020, Indonesia Eximbank carried out 32 activities independently or in collaboration with related ministries or institutions. As for the initial export coaching, Indonesia Eximbank implemented the program for 21 companies.

In the midst of the COVID-19 pandemic in 2020, Indonesia Eximbank supports the Government in preventing the spread of the pandemic, including by providing donations to 54 customers/businesses in the form of 250 hand washing portable stand units and 250 thermo guns units, valued at Rp1.61 billion. The source of funding comes from Indonesia Eximbank Management and Employees donated to the National Economic Recovery (NER) program.

These types of equipment are expected to provide maximum health protection for around 63 thousand employees to minimize the risk of spread/ transmission in the work environment. This donation is distributed to 18 cities throughout Indonesia through representatives of Indonesia Eximbank regional offices and branches such as in Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Surakarta, Batam, Balikpapan and Denpasar.

Indonesia Eximbank has also conducted COVID-19 tests for 1,858 participants, mass multivitamin injections for 598 participants, mass influenza vaccines for 260 participants, and health care (inpatient and outpatient) for employees and third parties and their families infected with COVID-19 to 126 people during 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LPEI bersama *Special Mission Vehicle* di bawah Kementerian Keuangan RI, dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia melaksanakan program CSR berupa donasi sebanyak 10 unit wastafel portabel yang didistribusikan oleh Koperasi Blok Eceng ke lokasi yang strategis. Sedangkan donasi untuk penyaluran 50 paket sembako di bantu oleh Lembaga Kemanusiaan *Human Initiative* kepada warga yang terdampak COVID-19. Kedua bentuk donasi tersebut diberikan khususnya kepada warga kampung nelayan Blok Eceng yang berada di kawasan Muara Angke.

Memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan prinsip keberlanjutan usaha dan menerapkan tanggung jawab sosial, LPEI dianugerahi penghargaan Global CSR Award untuk kategori "*Empowerment of Women*" pada 15 September 2020. Penghargaan ini diperoleh atas keberhasilan LPEI di mata internasional atas peluncuran *pilot project* berupa program Desa Devisa di Kabupaten Jembrana, Bali. Program ini merupakan pengembangan dari kegiatan komunitas 600 petani penghasil kakao yang lebih dari separuhnya kaum perempuan.

Para juri juga mengapresiasi program yang menerapkan standar dan target bisnis sambil menggunakan prinsip dampak sosial dan lingkungan. keberhasilan LPEI meraih penghargaan, merupakan bukti nyata bahwa program Desa Devisa di Bali, telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong para petani semakin mampu melahirkan berbagai produk yang inovatif, hingga menembus pasar global.

Indonesia Eximbank and the Special Mission Vehicles under the Republic of Indonesia Ministry of Finance and University of Indonesia Alumni Association carried out a CSR program through donations of 10 hand washing portable stand units distributed by the *Blok Eceng* Cooperative to strategic locations. Meanwhile, donations for the distribution of 50 basic food packages were assisted by the Humanitarian Institution for the Human Initiative to residents affected by COVID-19. Both forms of donations were given especially to residents of the *Blok Eceng* fishing village in the Muara Angke area.

Having a high commitment in carrying out the principles of business sustainability and implementing social responsibility, *Blok Eceng* was awarded the Global CSR Award for the "Empowerment of Women" category on 15 September 2020. This award was obtained for the success of Indonesia Eximbank according to the international community in the launch of a pilot project in the *Desa Devisa* program in Jembrana Regency, Bali. This program is the development of the community activities of 600 cocoa-producing farmers, more than half of which were women.

The judges also appreciated the program that applies business standards and targets while using the principles of social and environmental impact. The success of Indonesia Eximbank in winning the award is clear evidence that the *Desa Devisa* program in Bali has provided real benefits to the community and has encouraged farmers to be more able in producing various innovative products to penetrate the global market.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

RESPONSIBILITY TOWARDS EMPLOYMENT & OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh pegawai, LPEI senantiasa memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai pemenuhan kewajiban dalam memastikan pegawai dan lingkungan kerja tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu, LPEI melakukan praktek kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik.

Indonesia Eximbank pays attention to occupational health and safety to create favorable working atmosphere. Indonesia Eximbank implements good health and safety practices to fulfill its obligations to ensure that employees and the work environment remain in a safe condition at all times.

Komitmen dan Kebijakan

LPEI menyadari bahwa dalam menjalankan usahanya terdapat kegiatan yang berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, LPEI secara konsisten menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja secara baik.

Landasan pelaksanaan kegiatan CSR di bidang ketenagakerjaan & K3 mengacu pada Peraturan Dewan Direktur 0024/PDD/09/2009 tanggal 2 September 2009 tentang *Corporate Social Responsibility* LPEI.

Commitment and Policy

Indonesia Eximbank realizes the implementation of its business activities may directly and indirectly impact the occupational health and safety (OHS). To that end, the Company consistently implements proper occupational health and safety system.

Implementation basis of employment & OHS CSR activities refers to the Board of Directors Regulation No. 0024/PDD/09/2009 dated September 2, 2009, concerning Indonesia Eximbank Corporate Social Responsibility.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sarana dan prasarana penunjang serta kebijakan yang dilakukan dalam praktek kesehatan dan keselamatan di LPEI, antara lain:

- Memperkuat *Disaster Recovery Center* (DRC) guna mengantisipasi jika terjadi bencana atau kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional bisnis, sehingga keberlangsungan bisnis LPEI tetap terjaga.
- Melakukan kegiatan latihan evakuasi secara berkala bersama-sama dengan *building management* guna mengantisipasi kondisi darurat/bencana, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
- Menyediakan fasilitas ruangan khusus laktasi/*nursery room* diperuntukan bagi kenyamanan pegawai perempuan yang menyusui.
- Menyediakan fasilitas perangkat medis antara lain kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tabung oksigen, kursi roda dan obat-obatan umum untuk mengantisipasi kondisi darurat pegawai di lingkungan kerja LPEI.
- Kebijakan pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan kerja termasuk larangan merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok yang ditentukan oleh LPEI dan *building management*.
- Menyediakan fasilitas perawatan kesehatan berupa asuransi kesehatan bagi pegawai dan keluarga.
- Menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pegawai di tempat pemeriksaan kesehatan sesuai standar LPEI, dan menerapkan standar protokol kesehatan sesuai standar pemerintah.
- Memberikan fasilitas penutupan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh pegawai LPEI yang sedang melakukan kegiatan kedinasan.
- Memberikan dukungan kepada pegawai dalam meningkatkan kesehatan dengan memfasilitasi kegiatan olah raga.
- Memberikan hak cuti melahirkan dan hak cuti keguguran kepada pegawai wanita yang membutuhkan.
- Memberikan hak cuti di luar tanggungan dalam waktu yang relatif lama bagi pegawai, ditujukan untuk keperluan perawatan kesehatan pegawai/ keluarga pegawai.
- Memberikan istirahat sakit tanpa mengurangi hak-hak pegawai.

Supporting facilities and infrastructure as well as the policies concerning health and safety practices in Indonesia Eximbank, are among others:

- Maintaining Indonesia Eximbank business sustainability by strengthening the Disaster Recovery Center (DRC) to anticipate a disaster or conditions that can disrupt business operations.
- Conducting regular evacuation drills jointly with building management to anticipate emergencies/ disasters and minimize the risk of work accidents.
- Providing a special nursing room for breastfeeding employees.
- Providing medical equipment facilities, including first aid kit (P3K) for accidents, oxygen cylinders, wheelchairs and general medicines to anticipate emergencies for employees at the Company's work environment.
- Smoking ban policy in places that are prohibited from smoking as determined by Indonesia Eximbank and building management to prevent fire hazards.
- Healthcare facilities in the form of health insurance for employees and their families.
- Regular health check facilities for employees at checkpoints according to Indonesia Eximbank standards, and implementing health protocols according to government standards.
- Work accident insurance coverage facility for all Indonesia Eximbank employees who are conducting official activities.
- Supporting/facilitating employee sports activities to improve health.
- Maternity leave and miscarriage leave rights to female employees who need them.
- Providing the employee with the rights of leave without pay for a relatively long period of time, aimed at the healthcare needs of the employee/ employee's family.
- Sick leave without reducing employee rights.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BIDANG KETENAGAKERJAAN

LPEI senantiasa memastikan selalu menjalankan praktik ketenagakerjaan yang baik dan benar. Selain terus menyempurnakan sistem dan menyediakan layanan kesehatan kepada pegawai dan anggota keluarganya, LPEI juga menyelenggarakan transparansi informasi ketenagakerjaan dengan rutin mengadakan sosialisasi peraturan kerja dan kode etik.

Dalam melakukan rekrutmen pegawai, LPEI tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan, ataupun tingkatan sosial. Proses perekrutan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan, tidak diskriminatif, dan transparan.

LPEI juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai di posisi tertentu secara bertahap. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan, LPEI berupaya memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkulitas. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan LPEI pada tahun buku 2020 sebesar Rp10,87 miliar.

Beberapa *milestones* yang dicapai LPEI dalam bidang ketenagakerjaan selama tahun 2020 antara lain:

- Penguatan organisasi sesuai dengan mandat (pembiayaan, penjaminan asuransi, *trade*, NIA) dan Syariah.
- Penguatan kompetensi organisasi dengan *recruitment seasoned bankers*, sertifikasi *risk management*, *credit skill*, Syariah, IT, dan *technical skills* lain.
- Peluncuran *Performance Management Framework* yang baru sebagai awal penerapan penerapan budaya kinerja.
- Peluncuran *Talent Management Framework*.
- Pengembangan *Employee Self-Service* melalui HRIS & *GreatDay Apps*.
- Pembangunan otomasi sistem kepegawaian (HRIS) sehingga absensi dapat dilakukan di aplikasi GreatDay.
- *Engagement Programs* untuk meningkatkan loyalitas pegawai dengan *corporate song*, *webinar series*, *LeadersTalk*, *employees club*, dan *engagement survey*.

EMPLOYMENT ASPECT

Indonesia Eximbank ensures to implement good and proper employment practices. Apart from continually refining its systems and providing healthcare to its employees and their descendants, the Company also organizes employment information transparency by regularly disseminating work rules and code of conduct.

Concerning employee recruitment, the Company does not regard ethnicity, religion, race, class, or social grades. The recruitment process is carried out by upholding equality, non-discriminative, and transparent principles.

Indonesia Eximbank also organizes education and training to fulfill employee's competencies requirements in certain position that conducted gradually. To enhance the effectiveness of education and training, the Company is expected to be able to hire competent and qualified human resources. The employee competency development costs incurred by Indonesia Eximbank in the 2020 fiscal year amounted to Rp10.87 billion.

The following are milestones achieved by Indonesia Eximbank in employment aspect during 2020:

- Organizational strengthening in accordance with the mandates (financing, insurance underwriting, trade, NIA) and Sharia.
- Strengthening organizational competence with seasoned banker recruitments, risk management certification, credit skills, Sharia, IT, and other technical skills.
- Launching a new Performance Management Framework as a starting point for performance culture implementation.
- Launching the Talent Management Framework.
- Employee Self-Service Development through HRIS & GreatDay Apps.
- Development of an automated staffing system (HRIS) so that attendance can be done in the GreatDay application.
- Engagement Programs to increase employee loyalty with corporate songs, webinar series, LeadersTalk, employees club, and engagement surveys.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Kesetaraan Gender, Kesempatan Kerja, & Pengembangan Kompetensi

Dalam memenuhi tanggung jawab terkait ketenagakerjaan, LPEI menjamin hak seluruh pegawai diperlakukan secara adil dan setara tanpa ada kebijakan internal yang membedakan hak pegawai berdasarkan diskriminasi suku, agama, ras, golongan maupun terkait dengan gender.

Prinsip kesetaraan ini ditegakkan diantaranya melalui pemberian kesempatan kerja bagi setiap gender secara adil, memberikan hak cuti kepada pegawai yang mengambil cuti melahirkan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri serta memperoleh peningkatan karir.

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah pegawai LPEI mencapai 556 pegawai yang tersebar di seluruh wilayah operasional. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 340 orang merupakan pegawai laki-laki dan 216 orang pegawai perempuan. Demografi pegawai berdasarkan gender tersebut menunjukkan bahwa sistem rekrutmen LPEI diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita.

LPEI juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai termasuk hak untuk memperoleh promosi pengembangan karir, pendidikan dan hak-hak pegawai lainnya yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini komposisi pegawai baru berdasarkan gender dan lokasi kantor:

Gender Equality, Work Opportunities, & Competencies Development

In fulfilling responsibility toward employment, Indonesia Eximbank ensures all employee's rights for fair and equal treatment without any internal policy that differentiates employee's rights based on ethnic, race, class or gender.

This equality principle is upheld among others through the provision of fair work opportunity for every gender, provision of maternity leaves as well as provision of equal opportunity on self-development and career improvement for every employee.

As of the end of 2020, Indonesia Eximbank recorded a total of 556 employees spread across the operating regions. Of this total, 340 employees are male and 216 employees are female. The employee's demographics based on gender indicated the implementation of high regards on equality and work opportunity principle in the Company's recruitment system regardless of male and female gender.

Indonesia Eximbank also provides equal opportunity for all employees including the rights to obtain career development promotion, education and other employee's rights as stated in the work agreement and prevailing laws and regulations.

The following are new employee composition based on gender and office location:

Lokasi | Location	Tahun | Year					
	2018		2019		2020	
	L | M	P | F	L | M	P | F	L | M	P | F
Kantor Pusat Jakarta | Jakarta Head Office	19	14	34	22	40	34
Kantor Cabang Medan | Medan Branch Office	0	0	0	0	0	0
Kantor Pemasaran Batam | Batam Marketing Representative Office	0	0	0	0	0	0
Kantor Wilayah Surabaya | Surabaya Regional Office	2	1	0	2	1	0
Kantor Pemasaran Denpasar | Denpasar Marketing Representative Office	0	1	0	0	0	0
Kantor Wilayah Surakarta | Surakarta Regional Office	0	0	0	0	1	0
Kantor Pemasaran Balikpapan | Balikpapan Marketing Representative Office	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang Makassar | Makassar Branch Office	1	0	0	0	0	0
Total	**22**	**16**	**34**	**24**	**42**	**34**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LPEI memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan dan pengembangan. Selama tahun 2020, terdapat 203 kali penyelenggaraan kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 4.188 orang. Dari total tersebut, berikut ini komposisi jenis kelamin peserta:

Indonesia Eximbank provides equal opportunity for all employees on competency enhancement through trainings and development. During 2020, Indonesia Eximbank organized 203 trainings with 4,188 participants. The following are gender composition from all participants:

	Persentase | Percentage
Laki-laki | Male	61 %
Perempuan | Female	39 %

Remunerasi

LPEI senantiasa memberikan imbal jasa yang sesuai dengan hasil kerja seluruh pegawai serta aturan dan standar yang berlaku. Sistem dan nilai remunerasi pegawai LPEI ditetapkan oleh Direktur Eksekutif melalui Peraturan Direktur Eksekutif dan/atau Keputusan Direktur Eksekutif. Dalam pemberian remunerasi, LPEI tidak membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan hanya terjadi apabila terdapat perbedaan atas kinerja kompetensi atau pengalaman kerja.

Hubungan Industrial

LPEI berkomitmen menjalin hubungan yang harmonis dengan para pegawai. Hubungan industrial di LPEI dilandasi semangat para pihak untuk memberikan yang terbaik bagi pegawai maupun LPEI.

Hubungan industrial LPEI telah diatur di dalam Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Infrastruktur Ketenagakerjaan

Dalam rangka menunjang kinerja SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada internal pegawai Lembaga pengembangan aplikasi terus dilakukan, antara lain:

- Pembaharuan *Human Resources Information System* (HRIS) yang merupakan *Employee Self-Service* (ESS) untuk seluruh pegawai, antara lain *Payslip Online*, *Loan Information & simulation*, *Leave Request*,

Remuneration

Indonesia Eximbank provides remuneration based on employee's work results and in compliance with prevailing rules and standards. The system and value of Indonesia Eximbank employee remuneration is determined by the Executive Director through Executive Director Regulations and/or Executive Director Decrees. Indonesia Eximbank does not discriminate between genders, ethnics, religions, races, or classes. The difference will only be based on competence performance or work experience.

Industrial Relations

Indonesia Eximbank always promotes harmonious relations with employees. The industrial relations in the Company were founded upon the spirit of all parties to provide the best for both employee and the Company.

Indonesia Eximbank's industrial relations has been stipulated under Executive Director Regulation on Employment System Policy registered and ratified by the RI Ministry of Manpower through the Decree of Directorate General Industrial Relations and Manpower Social Security No. Kep.284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 dated February 20, 2020.

Employment Infrastructure

Application development is continually carried out to support HR performance in enhancing services quality to the Company's internal employees, among others are:

- Update of Human Resources Information System (HRIS), an Employee Self-Service (ESS) for all employees, such as Payslip Online, Loan Information & simulation, Leave Request, Attendance History,

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Attendance History, *Absence Request*, *Glasses Claim Information*, *performance management online* (PA Online), *HR Form & Regulation Information*, *Personal Data*, dan *Subordinate Information*.
- *Employee Expense System*, yaitu sistem yang dapat mengakomodir pengajuan *cash advance* pegawai, *travel reimbursement* dan laporan *expense*.

Selain itu dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada external SDM telah melakukan pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Divisi Sumber Daya Manusia menjadi pintu utama terkait pengaduan masalah ketenagakerjaan di lingkungan LPEI. Pegawai dapat secara langsung menyampaikan keluh kesah dalam hal kebijakan LPEI, kenyamanan dalam pekerjaan, ataupun pengaduan yang sifatnya horizontal sesama pegawai.

Untuk bentuk format pengaduan masalah ketenagakerjaan di LPEI belum memiliki standarisasi, namun ke depan Divisi SDM sudah mempersiapkan program dalam hal penerimaan dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di lingkungan LPEI.

Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan di LPEI antara lain:
1. Mengirimkan pengaduan ke Email Divisi SDM.
2. Atau mengirimkan pengaduan via SMS ke Nomor Hp Khusus Divisi SDM.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kecelakaan kerja yang menimpa pegawai LPEI.

Absence Request, Glasses Claim Information, performance management online (PA Online), HR Form & Regulation Information, Personal Data, and Subordinate Information.
- Employee Expense System, a system to accommodate cash advance proposal, travel reimbursement and expense report.

Additionally, to enhance service quality to external party, HR has conducted an integrated application development with OJK SLIK system.

Employment Complaints Mechanisms

HR Division is currently the main facility for employment issues complaints in Indonesia Eximbank. Employee shall be able to directly submit complaints on the Company's policies, comfort at work or horizontal complaints between employees.

Indonesia Eximbank is yet to establish the standardized complaints format on employment issues, however HR Division is currently preparing the program to receive and settle employment issues in the Company.

Indonesia Eximbank's employment complaints mechanisms are as follows:
1. Submit the complaints to HR Division Email.
2. Or to submit the complaints via SMS to Special Cellular Number of HR Division.

Work Accident Levels

There are no records of work accidents on the Company's employees during 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kepedulian LPEI terhadap kesehatan dan keselamatan pegawai diwujudkan secara berkesinambungan guna memenuhi hak pegawai dan memitigasi dampak operasional. Sebagai bentuk komitmen, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja LPEI mengadopsi dasar hukum pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 antara lain menegaskan perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat dan berunding bersama keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjamin tenaga kerja yang menyangkut jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan dan jaminan terhadap kematian, serta syarat-syarat kerja lainnya yang perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahan dengan pertimbangan dampak ekonomi, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberian kerja dan kemampuan tenaga kerja.

Dengan adanya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga dapat meningkatkan keuntungan LPEI dan sekaligus terwujudnya kesejahteraan pegawai.

Program K3 tidak akan efektif untuk dilaksanakan jika LPEI tidak menetapkan kebijakan yang konsisten untuk dilaksanakan di dalam LPEI. Diperlukan kerja sama yang baik antara manajemen dengan para pegawai untuk bersama-sama melaksanakan program K3 yang akan lebih efektif.

Adapun bukti nyata bahwa LPEI telah melaksanakan tanggung jawab sosial di Bidang K3 adalah sebagai berikut:
- Memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh pegawai dan keluarga pegawai LPEI dengan mengikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Memberikan perlindungan kesehatan tambahan yang dikelola oleh Asuransi Umum terhadap pegawai dan Keluarga Pegawai LPEI.
- Memberikan kondisi dan ruang nyaman di lingkungan pekerjaan.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

Indonesia Eximbank sustainably manifests its engagement on employee health and safety in order to meet employee's rights and mitigate operational impacts. As its commitment, the Company adopts a legal basis of the State Policy Outline (GBHN) 1993 for its occupational health and safety policy, which among others affirming: the manpower protection including the rights to associate and jointly deliberate on occupational health and safety, and provide manpower insurance related to retirement insurance, health insurance, accident insurance and death insurance, as well as other working conditions that required to be developed incoherently and that sustain with the economic impact consideration, preparedness of relevant sectors, work assignment conditions and manpower capabilities.

With Occupational Health and Safety (OHS) Program, the losses that occur due to accident and illness because of works can be minimized, thereby will be able to improve the Company's profitability while realizing employee's welfare.

The OHS programs will not be effective if no policy established for consistent implementation within the Company. For a more effective OHS, good cooperation between the management and employee is required in jointly implementing OHS programs.

The Company's real contribution for OHS social responsibility is as follows:
- Providing health protection and insurance for all Company's employees and their descendants by the participation in BPJS Employment and BPJS Health programs as mandated by Law No. 40 of 2004 regarding National Social Insurance System.
- Providing additional healthcare managed by General Insurance to the Company's employees and their descendants.
- Providing comfort conditions and rooms at workplace.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Selain itu, berbagai program dan kegiatan juga dilakukan LPEI untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, antara lain:

- **Memelihara perlengkapan kerja**
  LPEI senantiasa memelihara kondisi perlengkapan agar selalu dalam kondisi yang baik. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak yang buruk kepada pegawai apabila terjadi kesalahan dalam perlengkapan.

- **Melakukan pengontrolan pada peralatan-peralatan kerja dengan berkala**
  Hal ini bermanfaat untuk mengetahui perlengkapan yang mengalami kerusakan agar dapat diperbaiki dan tidak membahayakan pegawai.

- **Melindungi kebersihan lingkungan perusahaan**
  LPEI memperkerjakan petugas kebersihan untuk selalu melindungi kebersihan lingkungan perusahaan, sehingga akan melindungi kesehatan para pegawai.

- **Menyediakan sarana yang memadai**
  Fasilitas kantin disediakan untuk makan siang bagi pegawai saat jam istirahat setelah bekerja.

- **Menyediakan sarana dan ruangan untuk ibu menyusui**
  LPEI turut mendukung program pemerintah dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) esklusif dengan menyediakan ruangan menyusui di setiap lantai gedung kantor serta lemari pendingin yang dapat digunakan untuk penyimpanan ASI.

- **Menyediakan fasilitas keselamatan kerja**
  Untuk memenuhi aspek keselamatan kerja, LPEI memastikan alat pemadam kebakaran dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan selalu tersedia, berfungsi, dan mudah diakses.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali kepada LPEI. Pandemi yang terjadi pada akhir triwulan pertama tahun 2020 tidak terduga dan terencana. Sehingga tidak satupun organisasi yang mempersiapkan hal tersebut sebelumnya. Namun demikian, LPEI melakukan berbagai upaya dan program mitigasi resiko akan dampak COVID-19 di lingkungan kerja LPEI demi menjaga keberlangsunan bisnis dan operasional Lembaga. Penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang telah dilakukan di lingkungan kerja LPEI sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Organisasi
   Pembentukan Gugus Tugas (Satuan Kerja) Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19.

b. Infrastuktur
   - Pemberian bantuan dan dukungan infrastruktur kerja bagi pegawai yang bekerja di rumah (WFH).
   - Penyemprotan *disinfectant* seluruh lingkungan kantor LPEI secara rutin dan berkala.
   - Penyediaan alat-alat sanitasi bagi pegawai yang bekerja di kantor (WFO).
   - Penyediaan akomodasi berupa makan siang dan tunjangan transportasi kepada pegawai yang WFO.

c. Pengaturan Kerja
   Pengaturan kerja di kantor (WFO) dan di rumah (WFH) dengan memberlakukan operasional kantor secara minimum operation dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja LPEI.

d. Pelayanan Kesehatan
   - Pelaksanaan deteksi COVID-19 berkala bagi seluruh manajemen dan pegawai LPEI baik secara mandiri maupun secara massal.
   - Pemberian fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan kepada manajemen, pegawai dan keluarga yang terinfeksi COVID-19.
   - Pelaksanaan injeksi multivitamin bagi seluruh manajemen dan pegawai LPEI secara massal.

Moreover, Indonesia Eximbank also conducts various programs and activities to ensure employee health and safety, among others:

- **Maintaining work equipment**
  The Company shall always maintain proper equipment conditions. This is done to prevent destructive impact on employees due to equipment errors.

- **Regular control on work equipment**

  This is done to ensure proper maintenance on broken equipment and prevent bad impact to employees.

- **Protecting the company's environmental cleanliness**
  Indonesia Eximbank hires caretakers to ensure the company's environmental cleanliness, thereby will protect employee's health.

- **Providing adequate facilities**
  Canteen is provided for employee's meals during break time from work.

- **Providing facilities and rooms for nursing mothers**

  Indonesia Eximbank fosters the government program in providing exclusive breast milk (ASI) with the availability of nursing rooms in every office building floor including refrigerators for ASI.

- **Providing work safety facilities**
  To fulfill occupational safety aspect, Indonesia Eximbank ensures the availability, functions and accessibility of fire extinguishers and first aid facilities.

The COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on all aspects of life, including Indonesia Eximbank. The pandemic that occurred at the end of 2020 first quarter was unpredictable and unplanned. No organizations were prepared. However, Indonesia Eximbank has made various efforts and risk mitigation programs for the impact of COVID-19 in the Company's work environment in order to maintain the continuity of the Company's business and operations. The handling and countermeasures of the COVID-19 that has been carried out in Indonesia Eximbank work environment throughout 2020 are as follows:

a. Organization
   Establishment of a COVID-19 Response and Prevention Task Force.

b. Infrastructure
   - Provision of assistance and work infrastructure support for employees who work from home (WFH).
   - Spraying of disinfectant throughout the Company's office environment regularly and periodically.
   - Provision of sanitation equipment for employees working in offices (WFO).
   - Provision of accommodation in the form of lunch and transportation allowances for WFO employees.

c. Work Arrangements
   Work arrangements at the office (WFO) and home (WFH) by imposing minimum office operations in the context of preventing the transmission of COVID-19 in the Company's work environment.

d. Health services
   - Implementation of periodic COVID-19 detection for all Indonesia Eximbank management and employees, both independently and en masse.
   - Providing medical and health care facilities to management, employees and families infected with COVID-19.
   - Implementation of multivitamin injection for all Indonesia Eximbank management and employees in bulk.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

e. Laporan
   - Pemantauan Status COVID-19 di lingkungan kerja LPEI.
   - Laporan status COVID-19 secara rutin kepada *stakeholder* dan *shareholders* LPEI.

f. CSR
   Pemberian donasi kepada debitur dan pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab sosial LPEI terhadap lingkungan.

e. Report
   - Monitoring the status of COVID-19 in the Company's work environment.
   - Report on the status of COVID-19 regularly to Indonesia Eximbank stakeholders and shareholders.

f. CSR
   Providing donations to borrowers and third parties as a form of Indonesia Eximbank's social responsibility towards the environment.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH

RESPONSIBILITY TOWARDS CUSTOMERS

Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab LPEI untuk melindungi hak-hak nasabah dalam berinteraksi dengan LPEI.

One of Indonesia Eximbank's responsibility to protect customers' rights in interacting with the Company is the handling and settling of customer complaints.

Komitmen dan Kebijakan

LPEI memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/09/2009. Selain itu, landasan pelaksanaan kegiatan CSR terhadap nasabah juga mengacu pada Peraturan Dewan Direktur 0024/PDD/09/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Corporate Social Responsibility LPEI.

Commitment and Policy

Indonesia Eximbank has an effective and efficient customer complaint resolution mechanism in accordance with the principles of implementing Good Corporate Governance as stated in the Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/09/2009.The implementation basis of customer CSR activities refer to the Board of Directors Regulation No. 0024/PDD/09/2009 dated 2 September 2009 concerning Indonesia Eximbank Corporate Social Responsibility.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Kebijakan penyelesaian pengaduan nasabah diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Kebijakan atas Penerimaan Pengaduan
  Unit kerja yang berwenang wajib menerima setiap pengaduan secara tertulis maupun lisan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, dan meneruskan pengaduan tersebut kepada unit terkait;
- Kebijakan atas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan
  Jangka waktu penyelesaian pengaduan baik secara lisan maupun tertulis akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kebijakan atas Pemantauan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

Unit kerja yang berwenang dan unit terkait wajib mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan penerimaan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah. Sejak tahun 2009, LPEI telah memiliki ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah yang tertuang dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/ PDD/09/2009.

The policy for resolving customer complaints is implemented through the following steps:

- Policy on Complaints Acceptance
  The authorized work unit is obliged to receive any written or oral complaints submitted by the Customer and/or Customer Representatives, and forward the complaint to the related unit;
- Policy on Complaint Handling and Resolution
  The period for resolving complaints both verbally and in writing will be resolved in accordance with the applicable provisions;
- Policy on Complaint Handling Monitoring and Resolution

The authorized work unit and related units are required to administer all documents related to the receipt, handling and settlement of Customer Complaints and/or Customer Representatives. Since 2009, Indonesia Eximbank has had provisions for resolving customer complaints as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/09/2009.

Kegiatan Tahun 2020
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, LPEI memberikan edukasi mengenai produk dan jasa yang diberikan selama tahun 2020 melalui berbagai kegiatan. Di antaranya adalah pameran Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi *online*, pelatihan ekspor (*Coaching Program for New Eksporter*, Tematik, Alumni *Gathering*, IWAPI) menjadi *online*, perluasan akses pasar melalui platform *e-commerce* global, serta pemetaan dan pelatihan Desa Devisa yang dilakukan secara *online*.

Activities in 2020
As its responsibility to all stakeholders, Indonesia Eximbank provides products and services education activities during 2020. Among them are the online TEI exhibition, online export training (Coaching Program for New Exporters, Thematic, Alumni Gathering, IWAPI), expanding market access through a global e-commerce platform, as well as online mapping and training for *Desa Devisa*.

Informasi dan Keamanan Produk
Untuk menginformasikan peran dan fungsi LPEI beserta produk dan layanan secara lengkap, LPEI melaksanakannya dengan melakukan hal sebagai berikut:
- Publikasi melalui media sosial yang dimiliki LPEI, antara lain *website*, *instagram*, *twitter*, *facebook*, dan *youtube* yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Product Information and Safety
To inform about Indonesia Eximbank role and functions including its comprehensive products and services, the Company carries out:
- Continuous social media publication among others through the Company's website, instagram, twitter, facebook, and youtube.
- Mass media publication, print and electronic.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui *corporate event* yang dilakukan oleh LPEI.
- Pameran-pameran yang diikuti oleh LPEI.

Penanganan Keluhan Pelanggan
Dalam penanganan pengaduan nasabah, LPEI telah menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Sekretaris LPEI melalui:

- Socialization to business community through corporate event by Indonesia Eximbank.
- Exhibitions participated by Indonesia Eximbank.

Customer Complaints Handling
On customer complaints handling, Indonesia Eximbank has provided complaints channels to be addressed to the Corporate Secretary through:

Email:
corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Phone:
(021) 39503600

Corporate Secretary:
Prosperity Tower, Lantai 1
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia
Kode Pos 12190

LAPORAN PROGRES KEBERLANJUTAN LPEI 2020

Indonesia Eximbank Sustainability Progress Report 2020

STRATEGI KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY STRATEGY

Sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 untuk melakukan kegiatan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi, LPEI dalam menjalankan aktivitasnya memiliki kepedulian dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. LPEI menyadari bahwa risiko pembiayaan dan reputasi dapat timbul dari aktivitas proyek yang mengancam kelestarian lingkungan. Kegiatan LPEI berupa penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang ramah lingkungan tentu dapat membantu LPEI menurunkan risiko pada pelaku ekspor dan membantu memastikan keberlangsungan usaha dengan baik sehingga akan berdampak pada perkembangan ekspor Indonesia di masa mendatang.

As an institution mandated by Law No. 2 of 2009 to carry out financing, guarantee, insurance and advisory services, Indonesia Eximbank cares about and pays attention to social and environmental aspects. Indonesia Eximbank is aware that financing and reputational risks may arise from project activities that threaten environmental sustainability. Indonesia Eximbank's activities that include disbursement of financing, guarantees, insurance and environmentally friendly advisory services will help reduce risk to exporters and help ensure good business continuity and affects the development of Indonesia's exports.

Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

LPEI menetapkan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan pedoman teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan memperhatikan faktor – faktor eksternal dan internal Lembaga. Dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang tercantum dalam Road Map Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI tahun 2020-2024, tahun 2020 LPEI memprioritaskan pada persiapan penerapan aksi keuangan berkelanjutan dengan penyusunan pedoman atau regulasi di LPEI mengenai pengelola keuangan berkelanjutan.

Priority for Sustainable Finance Implementation

Indonesia Eximbank's priorities in implementing sustainable finance are in accordance with the POJK technical guidelines No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies and taking into account the external and internal factors of the Institution. In implementing sustainable finance as stated in the Company's Sustainable Finance Action Road Map for 2020-2024, Indonesia Eximbank prioritizes preparation of sustainable finance actions in 2020 by drafting the guidelines or regulations at the Company regarding sustainable finance management.

Uraian Aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Aktivitas dari implementasi program keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

(1) **Pembentukan unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan**
Pedoman teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi keuangan berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program – program keuangan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar lebih fokus dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penerapan keuangan berkelanjutan di LPEI.

Sustainable Finance Implementation Activities

The activities of sustainable finance program are as follows:

(1) **The establishment of a special unit for sustainable finance management**
POJK technical guidelines No. 51/POJK.03/2017 states that the adjustment of organizational structure can be done by adding sustainable finance main tasks and functions to existing units or adding special units that perform sustainable finance programs. This is aimed to be more focused in ensuring the effectiveness and efficiency of sustainable finance in Indonesia Eximbank.

STRATEGI KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY STRATEGY

(2) **Penyusunan pedoman keuangan berkelanjutan**
Dalam memastikan penerapan aksi keuangan berkelanjutan selaras dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai keuangan berkelanjutan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai isu sosial dan lingkungan hidup, dibutuhkan pedoman teknis keuangan berkelanjutan. Pedoman ini dibutuhkan untuk melaksanakan program dan aktivitas keuangan berkelanjutan.

(3) **Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk meningkatkan kompetensi LPEI terhadap Aksi Keuangan Berkelanjutan, dibutuhkan edukasi internal secara menyeluruh.**

Adapun edukasi internal yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut:
- Peningkatan kompetensi pegawai Satuan Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- Melakukan pelatihan kepada pegawai; dan
- Pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan kepada pegawai.

(4) **Implementasi target dan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**
LPEI melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menekankan kepada Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.

(5) **Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI tahun 2021**
Dalam rangka pembentukan rencana aksi dan keterbukaan informasi atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan dan sebagai bentuk kepatuhan atas POJK No. 51/POJK.03/2017, LPEI melakukan penyusunan rencana Aksi Keuangan Berlanjutan dengan berpedoman pada POJK No. 51/POJK.03/2017.

(2) **Preparation of sustainable finance guidelines**
In ensuring that the implementation of sustainable finance actions is in line with the various applicable rules and regulations regarding sustainable finance as well as social and environmental issues, technical guidelines for sustainable finance are needed in implementing sustainable finance programs and activities.

(3) **Implementation of internal education in collaboration with various external parties to improve Indonesia Eximbank's competence towards Sustainable Finance Action, which requires a thorough internal education.**

The internal education that will be carried out includes the following:
- Increasing the competence of employees of Sustainable Finance Action Unit;
- Training for employees; and
- Training on the preparation of sustainability reports for employees.

(4) **Implementation of targets and funds allocation of Social and Environmental Responsibility (TJSL)**
Indonesia Eximbank carries out a Social and Environmental Responsibility program that emphasizes the Environment, Social Affairs, and Governance.

(5) **Development of the Sustainable Finance Action Plan for 2021**
To establish an action plan and disclose information on the implementation of sustainable financial actions and as a form of compliance with POJK No. 51/POJK.03/2017, Indonesia Eximbank has prepared a Sustainable Finance Action plan based on POJK No. 51/POJK.03/2017.

IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP)
OVERVIEW OF SUSTAINABILITY ASPECTS (ECONOMY AND ENVIRONMENT)

ASPEK EKONOMI
ECONOMIC ASPECTS

Uraian	2019 (Rp Miliar | Billion)	2020 (Rp Miliar | Billion)	Description
Kredit yang Disalurkan			Disbursed Credit
1. Segmen Korporasi	65,657	59,287	1. Corporate Segment
2. Segmen UKM	15,447	14,143	2. SME segment
3. Pembiayaan Syariah	15,800	15,222	3. Sharia Financing
4. NIA	774	1,597	4. NIA
5. Employee Loan	129	159	5. Employee Loans
Pendapatan Operasional	1,710	1.157	Operational Income
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(4.711)	288	Profit (Loss) After Tax

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
ENVIRONMENTAL ASPECTS

Uraian	2019	2020	Description
Pemakaian Listrik	Rp2,94 miliar Rp2.94 billion	Rp2,63 miliar Rp2.63 billion	Electricity Usage
Pemakaian Kertas	2,67 juta lembar 2.67 million sheets	1,84 juta lembar 1.84 million sheets	Paper Usage
Pemakaian Printer	Rp1,74 miliar Rp1.74 billion	Rp1,38 miliar Rp1.38 billion	Printer Usage
Pemakaian Air Minum	Rp102,6 juta Rp102.6 million	Rp65,5 juta Rp65.5 million	Drinking Water Usage

PROFIL SINGKAT LPEI

INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

VISI, MISI DAN NILAI KEBERLANJUTAN:

VISION, MISSION AND SUSTAINABILITY VALUES:

Visi Vision

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

To become an Eximbank that is credible and excells in promoting national export with high competitiveness on the global level.

Misi Mission

- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.

- Encourage the sustainability of conducive business climate for the sustainable growth of national export.
- Provide national export financing services and consultancy services as the solution to the needs of Indonesian export.
- Improve the ability of business perpetrators, including the small and medium enterprises, to produce superior and competitive export- oriented products.

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja, tanggung jawab dan produktivitas kinerja yang optimal guna mendukung visi, misi dan tujuan lembaga, LPEI memiliki acuan untuk bersikap, berprilaku dan bertindak yang tercermin dalam nilia-nilai budaya lembaga yaitu TRUST (*Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence, Teamwork*)

In creating human resources who have a work ethic, responsibility and optimal performance productivity to support the vision, mission and goals of the institution, LPEI refers to the institutional cultural values, called TRUST (Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence, Teamwork) in behaving and acting.

TATA KELOLA BERKELANJUTAN

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

PENJELASAN DIREKSI

Sejalan dengan Laporan Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan (RAKB) LPEI dan dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yakni prinsip investasi bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko dan lingkungan hidup, tata kelola, komunikasi yang informatif, inklusif, pengembangan sektor unggulan prioritas dan koordinasi dan kolaborasi, LPEI berkomitmen untuk melaksanakan *road map* RAKB untuk periode 5 tahunan yaitu 2021-2025.

LPEI menyadari pentingnya Keuangan Berkelanjutan bagi kegiatan usaha namun diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan dalam seluruh kegiatan usaha. Kendala yang dihadapi dalam penerapan RAKB baik internal dan eksternal dalam mengimplementasikan RAKB yang masih dihadapi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun 2021 antara lain:

- Tantangan Internal berupa regulasi internal, peningkatan kapasitas dan pemahaman internal tentang lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam proses kredit dan manajemen risiko.
- Tantangan Eksternal antara lain dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada lemahnya pertumbuhan kredit dalam kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), aturan pelaksanaan, kepastian hukum dan pengelolaan konflik pada sektor usaha KUB yang berpotensi meningkatkan risiko finansial bagi lembaga jasa keuangan.

LPEI berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan dan upaya mitigasi untukmeminimalkan dampak jika kendala tersebut muncul, antara lain:

- Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan kesadaran dan kompetensi dalam perbaikan penerapan keuangan berkelanjutan serta proses integrasi dengan tata kelola manajemen risiko.
- Meningkatkan kompetensi manajemen senior dan karyawan dalam penerapan keuangan berkelanjutan termasuk proses penyaluran pembiayaan.

BOARD OF DIRECTORS EXPLANATION

In line with Indonesia Eximbank Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Report, and by applying sustainable finance principles, specifically the principles of responsible investment, sustainable business strategies and practices, risk and environmental management, governance, informative, inclusive communication, development of priority leading sectors and coordination and collaboration, Indonesia Eximbank is committed to implementing the RAKB road map for a 5-year period of 2021 - 2025.

Indonesia Eximbank realizes the importance of Sustainable Finance for business activities, however it will take an extensive period of time to adopt financial principles in all business activities. Limitations in implementing RAKB both internally and externally in 2020 and to remain continue in 2021 among others are:

- Internal challenges such as internal regulations, capacity building and internal understanding of the environment, economy, and social in credit process and risk management.
- External challenges such as the Covid-19 pandemic which has impacted on weakening loan growth in the Sustainable Business (KUB) category, implementation rules, legal certainty and conflict management in the KUB business sector which potentially increases financial risk for financial service institutions.

If such obstacles arise, Indonesia Eximbank is committed to continuous improvement and mitigation efforts to minimize the impact, among others to:

- Foster the commitment of all stakeholders to increase awareness and competence in sustainable finance and the integration process with risk management governance.
- Enhance the competence of senior management and employees in implementing sustainable finance, including the financing process.

PROFIL SINGKAT LPEI
INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

- Melakukan identifikasi terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang terkait dengan dampak pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola dan kajian untuk pembentukan organisasi untuk memperkuat koordinasi, fungsi pemantauan, dan inovasi.
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penerapan keuangan berkelanjutan untuk memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Saat ini dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI telah memiliki kebijakan, peraturan dan manual yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan beberapa hal sudah memenuhi dan mengadopsi peraturan yang berlaku tentang lingkungan dan sosial, antara lain terdapat pada:

- **Hierarki Peraturan dalam LPEI.** Hirarki ini menunjukkan telah terbangunnya sistem manajemen perusahaan yang memastikan adanya tatakelola yang baik. Untuk penerapan keuangan berkelanjutan, persyaratan-persyaratan kebijakan, manual dan prosedur akan diintegrasikan dengan hirarki yang telah ada;
- **Standar Pengelolaan Kepegawaian.** LPEI telah menerapkan standar pengelolaan kepegawaian yang sesuai dengan Peraturan Nasional dan juga Standar Internasional;
- **Kebijakan Efisiensi Energi dan Sumberdaya**. Di dalam Manual Pengelolaan Sarana dan Prasarana LPEI telah membuat manual pengelolaan terkait penghematan kertas, energi listrik dan air. Kebijakan penghematan sumberdaya dan energi sesuai dengan konvensi internasional misalnya terkait isu perubahan iklim. Dalam hal ini, LPEI telah sesuai dengan Prinsip 7 Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yaitu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim;
- **Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Pembiayaan yang Sehat.** Di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, LPEI menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Pembiayaan yang Sehat;

- Identify all policies and procedures related to environmental, social, and governance impacts and studies for organizational establishment to strengthen coordination, function, and innovation.
- Conduct regular reviews on sustainable finance implementation to ensure the involvement of all stakeholders.

In carrying out its businesses, Indonesia Eximbank currently has in place the policies, regulations and manuals as the guidelines for its activities and have complied with and adopted the applicable environmental and social regulations, among others for:

- **Hierarchy of Regulations within the Company**. This hierarchy indicates a well-established corporate management system that ensures good governance. In implementing sustainable finance, policy requirements, manuals and procedures will be integrated with the existing hierarchy;
- **Personnel Management Standards**. Indonesia Eximbank has implemented personnel management standards in accordance with National Regulations as well as International Standards;
- **Energy and Resource Efficiency Policy**. In the Facilities and Infrastructure Management Manual, Indonesia Eximbank has developed manuals on paper, electricity and water savings. The resources and energy saving policy is in accordance with international conventions, such as the climate change issue. In this instance, Indonesia Eximbank has met the Principle 7 of Sustainable Finance Implementation, which is fostering sustainable development goals, including climate change management;
- **Prudential Principles and Sound Financing Principles**. In carrying out its business activities, Indonesia Eximbank applies Prudential Principles and Sound Financing Principles;

PROFIL SINGKAT LPEI
INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

- ***Corporate Social Responsibility* (CSR).** LPEI berupaya agar keberadaannya memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu misi lembaga, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan; dan
- **Aspek Lingkungan dan Sosial**. LPEI telah memasukan aspek lingkungan dan sosial dalam program pembekalan kepada para calon eksportir.

Di dalam Manual Operasional Pembiayaan, LPEI telah mempunyai mekanisme analisis pembiayaan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Pembiayaan yang menganalisa kualitas dan kuantitas dari calon debitur.

Di dalam analisis kualitas dijelaskan bahwa LPEI perlu menghindari pemberian pembiayaan untuk proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. Aspek-aspek yang dipertimbangkan antara lain:

- Pendirian, perizinan, kewenangan dan *track record* perusahaan/debitur;
- Industri dan usaha debitur;
- Karakter manajamen;
- Pemasaran;
- Teknis Produksi; dan
- Aspek sosial dan AMDAL.

Di dalam mekanisme pembiayaan, aspek AMDAL juga menjadi bahan pertimbangan di dalam analisis proses bisnis. Aspek AMDAL yang tercantum di dalam analisis bisnis tersebut antara lain izin dari instansi berwenang dan hal-hal lain yang dipandang perlu terkait aspek AMDAL.

TATA KELOLA KELEMBAGAAN YANG BAIK

Komitmen Tata Kelola Lembaga:
LPEI berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola kelembagaan yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Komitmen ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Lembaga secara berkelanjutan serta memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan.

Pengembangan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh LPEI mencakup pula penerapan keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam praktik GCG secara

- **Corporate Social Responsibility** (CSR). Indonesia Eximbank strives to render positive and beneficial impacts to stakeholders, specifically the community. This is in line with one of the Company's mission, to promote sustainable national economic growth; and
- **Environmental and Social Aspects**. Indonesia Eximbank has included environmental and social aspects in the training program for potential exporters.

In the Financing Operating Manual, Indonesia Eximbank has a financing analysis mechanism as stated in the Financing Analysis Memorandum that analyses the quality and quantity of prospective borrowers.

The quality analysis explains that Indonesia Eximbank should prevent any financing for projects or businesses that clearly harm the environment. The aspects considered are among others:

- Establishment, licensing, authority and track record of the companies/borrowers;
- Industry and business of borrowers;
- Character management;
- Marketing;
- Production Technical; and
- Social aspects and AMDAL.

Within the financing mechanism, the AMDAL aspect is also considered in the business analysis process. AMDAL aspects listed in the business analysis include permits from relevant agencies and other matters deemed necessary for AMDAL aspects

GOOD INSTITUTIONAL GOVERNANCE

Institutional Governance Commitment
Indonesia Eximbank is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the organization. This is in an effort to continuously improve the Company's performance and gain the trust of stakeholders.

The development of good corporate governance includes the implementation of sustainable finance that integrates environmental, social, and governance aspects into overall GCG practices. The Company seeks to develop

PROFIL SINGKAT LPEI
INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

keseluruhan. Lembaga berupaya membangun manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai salah satu inisiatif dalam strategi LPEI, dengan tujuan menciptakan fundamental yang kuat bagi masa depan Lembaga.

environmental, social, and governance risk management as one of the initiatives in its strategy, with the aim of creating strong fundamentals for the future of the Company.

Struktur Tata Kelola LPEI
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 di dalam sistem tata kelola atau *governance* LPEI adalah *"One Board System",* dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi. Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

Indonesia Eximbank Governance Structure
In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009, Indonesia Eximbank governance system is a "One Board System", where the Board of Directors is the single organ of the organization. The Board of Directors as the sole organ has the main duties and functions to formulate, establish policies, and supervise the operational activities of Indonesia Eximbank.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan
Peningkatan pemahaman tentang prinsip dan penerapan pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan LPEI menjadi prioritas utama dalam penerapan keuangan berkelanjutan, untuk itu LPEI menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas internal personil LPEI dengan kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Sustainable Finance Competency Development
Enhancing the understanding of the principles and application of environmental, social, and governance aspects of management in Indonesia Eximbank activities is a top priority in implementing sustainable finance, as such Indonesia Eximbank conducts internal capacity building activities for the Company's personnel through training and dissemination activities.

Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

LPEI telah memiliki ketentuan internal dan komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam produk dan layanan keuangan yang disediakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup:

1. Integrasi pertimbangan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas pembiayaan untuk mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif.
2. Keterlibatan dan dialog dengan debitur/calon debitur dengan bekerja bersama dalam perbaikan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk debitur/ calon debitur.
3. Upaya terus menerus terhadap peluang untuk meminimalkan dampak dari pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap operasi, produk, dan layanan LPEI.
4. Pengecualian debitur/calon debitur yang kegiatan bisnisnya sesuai dengan *Black List Activities*. LPEI telah membuat kriteria sebagai bagian dari pedoman Pembiayaan yang Bertanggung Jawab dalam mengelola risiko-risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pedoman ini menjadi referensi dan pertimbangan dalam proses pemberian keputusan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip utama pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Environmental, Social, and Governance Risk Management
Indonesia Eximbank has its internal regulations and commitments for environmental, social and governance management into the financial products and services it provides. The implementation of the policy includes:

1. Integration of environmental, social and governance management considerations into financing activities to effectively manage environmental, social and governance risks.
2. Engagement and dialogue with borrowers/ prospective borrowers by working together in improving environmental, social, and governance management for borrowers /prospective borrowers.
3. Continuous efforts towards opportunities to minimize the impact of environmental, social and governance management on Indonesia Eximbank operations, products and services.
4. Exemption of borrowers /prospective borrowers whose business activities are in accordance with the Black List Activities. Indonesia Eximbank has established criteria as part of the Responsible Financing guidelines in managing environmental, social and governance risks. This guideline becomes a reference and consideration in the process of providing financing decisions based on the main principles of environmental, social and governance management.

Cakupan Aspek Pengelolaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola:

The Scope of Environmental, Social, and Governance Aspects:

Lingkungan Environment	Sosial Social	Tata Kelola Governance
Perubahan iklim Pemanfaatan lahan Pemakaian air Pemakaian energi Konversi sumber daya alam/keberlanjutan • Climate change • Land use • Water usage • Energy consumption • Natural resource conversion/ sustainability	• Hak asasi manusia • Hak dan Tunjangan karyawan • Keberagaman Tenaga kerja • Tanggung jawab produk dan jasa • Manajemen rantai pasok • Investasi berbasis komunitas • Tanggung jawab social lembaga • Perlindungan konsumen • Human rights • Employee rights and benefits • Workforce Diversity • Product and service responsibility • Supply chain management • Community-based investment • Institutional social responsibility • Consumer protection	Tata kelola lembaga Transparansi dan pelaporan Keuangan berkelanjutan Manajemen pemangku kepentingan • Institutional governance • Transparency and reporting • Sustainable finance • Stakeholder management

Memantau, dan Mengendalikan Risiko
LPEI melaksanakan manajemen risiko melalui prinsip *Three Lines of Defense* dan *Four Eyes Principle* untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan melakukan mitigasi 11 risiko lembaga secara berkelanjutan: Kredit, Asuransi, Pasar, Operasional, Likuiditas, Hukum, Reputasi, Stratejik, Kepatuhan, Investasi Syariah, Imbal Hasil Syariah. LPEI menjalankannya dengan mengidentifikasi dan mengelola semua eksposur risiko yang melekat pada Lembaga secara maksimal.

Monitoring, and Controlling Risk
Indonesia Eximbank implements risk management through the Three Lines of Defense and Four Eyes Principles to identify, control, monitor and mitigate 11 institutional risks on an ongoing basis: Credit, Insurance, Market, Operations, Liquidity, Legal, Reputation, Strategic, Compliance, Sharia Investment, Returns Sharia. It is done by identifying and managing all risk exposures inherent in the Institution to the fullest.

Pelaksanaan Kehati-hatian
Sebagai salah satu industri jasa keuangan non bank, LPEI menetapkan dan menerapkan kebijakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan program-program pelaksanaannya. Termasuk dalam hal ini adalah Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Penerapan Strategi Anti-Fraud, Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) dan peraturan pendukungnya.

Prudence Implementation
As one of the non-bank financial services industry, Indonesia Eximbank stipulates and implements policies of prudence principle in its business activities and programs. Included in this are the Code of Conduct and Institutional Work Culture, the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Funding Programs (AML CTF), Implementation of Anti-Fraud Strategy, Whistleblowing System and its supporting regulations.

PROFIL SINGKAT LPEI
INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

PROFIL SINGKAT LPEI
INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai LPEI

Dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI, Pegawai wajib menerapkan Budaya kerja dan Kode Etik. Budaya kerja LPEI adalah suatu system nilai yang menjadi dasar dan acuan bagi pegawai LPEI dalam bersikap, berprilaku dan bertindak sesuai dengan visi, misi dan amanah dari UU nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI. Kode Etik Pegawai LPEI adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai LPEI maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya.

Kode Etik Pegawai

1) Kepatuhan kepada hukum dan peraturan
2) Pencatatan secara benar
3) Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat
4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi
5) Menghindarkan diri dari konflik kepentingan
6) Menjaga kerahasiaan informasi LPEI
7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan
8) Tidak menerima gratifikasi
9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan citra profesi

Pemangku Kepentingan

LPEI berinteraksi erat dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan produk dan jasa serta melaksanakan strategi keuangan berkelanjutan. Pemangku kepentingan prioritas lembaga dalam hal ini diperoleh melalui asesmen pemangku kepentingan berdasarkan tiga kriteria yang berkaitan erat dengan keberlanjutan lembaga: keabsahan (*legitimacy*), kedekatan fisik (*proximity*) dan urgensi (*urgency*). Pemangku kepentingan prioritas dan metode pelibatannya dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- **Nasabah dan Klien**
  Menampung dan menyelesaikan keluhan nasabah, mengidentifikasi kepuasan nasabah dan peningkatan kualitas layanan, pembinaan dan peningkatan hubungan bisnis dan edukasi layanan lembaga.

Indonesia Eximbank Employee Work Culture and Code of Conduct

In carrying out the Company's activities, employees are required to apply work culture and code of conduct. Indonesia Eximbank work culture is a value system that becomes the basis and reference for the Company's employees in behaving and acting in accordance with the vision, mission and mandate of Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. The Employee Code of Conduct is a guideline for attitudes, behavior, actions, values and norms that bind all employees in carrying out their duties and functions as the Company's employees and in daily interactions with the community.

Employee Code of Conduct

1) Compliance with laws and regulations
2) Recording correctly
3) Avoiding unfair competition
4) Do not abuse authority for personal gain
5) Avoiding conflicts of interest
6) Maintain confidentiality of the Company information
7) Taking into account the adverse impact of each policy adopted on the economic, social and environmental conditions
8) Not receiving gratuities
9) Do not do anything that harms the image of the profession

Stakeholders

Indonesia Eximbank interacts closely with stakeholders to provide products and services and implement sustainable finance strategies. The institution's priority stakeholders are obtained through an assessment based on three criteria closely related to the sustainability of the institution: legitimacy, physical proximity and urgency. The priority stakeholders and their methods of involvement in the implementation of sustainable finance are as follows:

- **Customers and Clients**
  Accommodating and resolving customer complaints, identifying customer satisfaction and improving service quality, fostering and improving business relationships and educating institutional services.

PROFIL SINGKAT LPEI
INDONESIA EXIMBANK BRIEF PROFILE

- **Pemerintah (Kementerian Keuangan, OJK, BI dan Lembaga terkait)**
  Pemenuhan peraturan dan perundang-undangan, aspek transparasi, peningkatan kualitas tata kelola melalui komunikasi dan konsultasi.

- **Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat**
  Melakukan kerjasama strategis dalam rangka tanggung jawab sosial dengan memberdayakan kehidupan sosial dan partisipasi pada pelestarian lingkungan serta sosialisasi kebijakan dan program Corporate Responsibility.

- **Media**
  Pemberian informasi kinerja lembaga, investasi, produk, dan rencana korporasi lainnya.

- **Karyawan**
  Komunikasi konstruktif untuk menjalin pengertian timbal balik antara karyawan dengan manajemen, pemberian informasi pada karyawan tentang berbagai acara dan kegiatan serta informasi yang berkenaan dengan lembaga dan sosialisasi peraturan tentang kepegawaian dilakukan melalui sejumlah sarana komunikasi dan pertemuan.

- **Government (Ministry of Finance, OJK, BI and related institutions)**
  Fulfillment of laws and regulations, aspects of transparency, improving the quality of governance through communication and consultation.

- **Society and Non-Governmental Organizations**
  Strategic cooperation on social responsibility by empowering social life and participation in environmental conservation as well as socializing Corporate Responsibility policies and programs.

- **Media**
  Providing information on the performance of institutions, investments, products, and other corporate plans.

- **Employees**
  Constructive communication to establish mutual understanding between employees and management, providing information to employees about various events and activities as well as information relating to institutions and dissemination of regulations regarding employment is carried out through a number of communication facilities and meetings.

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE PERFORMANCE

ASPEK EKONOMI

Tahun 2020 diisi oleh tantangan yang tidak diduga akibat pandemi global Covid-19, dampaknya tidak saja untuk LPEI tetapi seluruh dunia, penerapan pembatasan sosial serta melambatnya aktivitas usaha menyebabkan penyerapan kredit melambat signifikan. Dalam kondisi ini, LPEI harus berupaya mempertahankan kondisi keuangan agar tetap sehat dan tumbuh secara prudent, tujuannya agar fungsi intermediasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tetap terlayani dan keberlangsungan jangka panjang LPEI tetap terjaga.

Per 31 Desember 2020, laba bersih LPEI setelah pajak tercatat sebesar Rp288 miliar selama tahun 2020, atau naik dibanding tahun 2019 sebesar Rp(4,711 miliar).

Pandemi telah berdampak pada menurunnya permintaan kredit. Sepanjang 2020 LPEI telah menyalurkan kredit sebesar Rp90,408 miliar, turun 7,56 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat kesehatan LPEI pada 2020 masih dalam rentang kategori yang baik, dengan langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak dari pandemi terhadap seluruh portofolio dengan mencermati kualitas aset dengan melakukan pendekatan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 26,08 % (gross) dan 11,49 % (net) pada Desember 2020 dibandingkan dengan 23,39 % (gross) dan 13,96 % (net) pada Desember 2019.

Posisi permodalan LPEI cukup kokoh dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 28,07 % pada Desember 2020 dibandingkan dengan 17,32 % pada periode yang sama tahun lalu, dan total permodalan naik menjadi Rp25,639 miliar pada Desember 2020, naik dari Rp19,567 miliar pada Desember 2019.

ASPEK SOSIAL

Tanggung Jawab Sosial:
Selama masa pandemi Covid-19, LPEI berperan aktif menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu komunitas terdampak pandemi. LPEI turut melakukan serangkaian aktivitas sosial untuk membantu

ECONOMIC ASPECT

2020 was full of unexpected challenges due to the global Covid-19 pandemic, impacting not only Indonesia Eximbank but globally. The social restrictions and slowdown in business activities resulted in significant weakening of credit absorption. In this condition, Indonesia Eximbank strives to maintain financial conditions to remain sound and to grow prudently, the aim is that the intermediation function needed by the community can still be served and the long-term sustainability of the Company is maintained.

As of December 31, 2020, Indonesia Eximbank net profit after tax stood at Rp288 billion in 2020, or increased compared to Rp(4.711 billion) in 2019.

The pandemic has impacted the declining demand of credit. Throughout 2020, Indonesia Eximbank had disbursed loans of Rp90.408 billion, decreased by 7.56% compared to the previous year.

Indonesia Eximbank's soundness level in 2020 remained in the good category, with proactive measures to anticipate the impact of the pandemic on all portfolio by observing assets quality by taking a prudent approach and strict risk management. The Non-Performing Loans (NPL) rate stood at 26.08% (gross) and 11.49% (net) in December 2020 compared to 23.39% (gross) and 13.96% (net) in December 2019.

Indonesia Eximbank capital position was quite solid with a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 28.07% in December 2020 compared to 17.32% in the same period last year, and total capital increased to Rp25.639 billion in December 2020, from Rp19.567 billion in December 2019.

SOCIAL ASPECT

Social Responsibility:
During the Covid-19 pandemic, Indonesia Eximbank took an active role with community activities to help those affected by the pandemic. Indonesia Eximbank also carried

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE PERFORMANCE

Indonesia menghadapi krisis kesehatan ini melalui berbagai inisiatif:
- Pengembangan Desa Devisa di Klungkung, Bali
- Bantuan wastafel portable dan paket sembako kepada warga terdampak Covid-19 di kampung nelayan Muara Angke, Jakarta
- Konser musik virtual untuk penggalangan dana Covid-19

Program *Corporate Responsibility*:
Penyelenggaraan *Corporate Responsibility* bertujuan untuk memberikan dampak positif guna memajukan kondisi social komunitas dan masyarakat dengan pelaksanaan program tepat guna dan berdampak jangka panjang dengan mengembangkan program yang berkesinambungan. Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk senantiasa berada di tengah komunitas serta tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Program *Corporate Responsibility* (CR) adalah wujud komitmen LPEI untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan komunitas, lingkungan, dan pemangku kepentingan yang terhubung baik secara lokal, nasional maupun global, serta mengarah kepada misi LPEI yaitu:
- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan,
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultansi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, dan
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.

Pemberdayaan Masyarakat:
Dalam melaksanakan kegiatan CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, LPEI selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Selama tahun 2020, LPEI terus melanjutkan program pengembangan Desa Devisa yang merupakan rangkaian kegiatan berbasis *community development*. Arah dari program tersebut untuk memperbesar akses masyarakat mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik, dibandingkan sebelum adanya kegiatan serta dapat menghasilkan devisa.

out a series of social activities to help Indonesia address this health crisis through various initiatives:
- Development of a 'Desa Devisa' in Klungkung, Bali
- Assistance of hand washing portable stand and food packages for residents affected by Covid-19 in the fishing village of Muara Angke, Jakarta
- Virtual music concert for Covid-19 fundraising

Corporate Responsibility Programs:
The implementation of Corporate Responsibility is aimed to positively impact the advancement of social conditions of community and society by implementing appropriate programs and having a long-term impact by developing sustainable programs. In line with the company's commitment to always be near the community and grow and develop with the community. The Corporate Responsibility (CR) program is a manifestation of Indonesia Eximbank's commitment to build harmonious and sustainable relationships with communities, environment, and stakeholders that are connected locally, nationally and globally, and toward the Indonesia Eximbank mission, namely:
- Promoting a conducive business climate for sustainable national export growth,
- Providing quality services for national export financing and advisory as a solution to Indonesia's export needs, and
- Developing the capability of entrepreneurs, including small and medium enterprises, to produce excellent and competitive export-oriented products.

Community Empowerment:
In CSR activities related to social and community development, Indonesia Eximbank always pays attention to the needs of the community to be right on target and provides the maximum benefit. During 2020, Indonesia Eximbank continued to develop the Desa Devisa program, a series of community development-based activities. The program will broaden the access for people to increase their livelihood from social, economic, and cultural aspect, as well as becoming economic contributor to the country.

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE PERFORMANCE

Adapun kegiatan berbasis *community development* yang dilaksanakan oleh LPEI selama tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

The community development activities carried out by Indonesia Eximbank during 2020 are as follows:

No	Jenis Kegiatan Activities	Institusi Terkait Related Instirution	Lokasi Location	Jumlah Total
1.	Survei Potensi Program Pengembangan DESA DEVISA Agrowisata Kawasan Ijen, Banyuwangi – Jawa Timur. Survey on the Potential of the DESA DEVISA Development Program for Agrotourism in the Ijen Region, Banyuwangi – East Java.	Bappeda Banyuwangi, *Ijen Tourism Cluster* (ITC), Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi (KKIB), Souvantara Banyuwangi Bappeda, Ijen Tourism Cluster (ITC), Banyuwangi Ijen Cluster Cooperative (KKIB), Souvantara	Banyuwangi, Jawa Timur Banyuwangi, East Java	2 Desa 2 Villages
3.	Penguatan Produksi Pengrajin Coffin Ramah Lingkungan Yang Berorientasi Ekspor Bagi Kelompok UKM Binaan Koperasi APIKRI – Provinsi D.I. Yogyakarta Strengthening the Production of Export-Oriented Eco-Friendly Coffin Craftsmen for the SME Group Assisted by the APIKRI Cooperative – D.I. Yogyakarta Province.	KSU APIKRI	Yogyakarta	5 UKM 5 SME
4.	Peningkatan Kapasitas Petani Kakao Koperasi KSS, Kab. Jembrana – Bali Capacity Building for KSS Cooperative Cocoa Farmers, Kab. Jembrana - Bali	Koperasi KSS, Yayasan Kalimajari KSS Cooperative, Kalimajari Foundation	Jembrana, Bali	20 Petani 20 Farmers
5.	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha Koperasi Semaya Samaniya Dalam Masa Pandemi Covid-19 Assistance & Monitoring of Semaya Samaniya Cooperative Business Activities During the Covid-19 Pandemic	Koperasi KSS KSS Cooperative	Jembrana, Bali	1 Koperasi 1 Cooperative
6.	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha KSU APIKRI Dalam Masa Pandemi Covid-19 Assistance & Monitoring of KSU APIKRI Business Activities During the Covid-19 Pandemic	KSU APIKRI	Yogyakarta	1 Koperasi 1 Cooperative
7.	MOU dengan DJKN Balinusra dan Pemkab Klungkung untuk Pengembangan DESA DEVISA Garam Kusamba MOU with DJKN Balinusra and Klungkung Regency Government for the Development of the Kusamba Salt DESA DEVISA	DJKN Balinusra, Pemkab Klungkung. DJKN Balinusra, Klungkung Regency Government,	Klungkung, Bali	1 Koperasi 1 Cooperative
8.	Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Berbasis Pengembangan Komoditas Ekspor Unggulan Forum Group Discussion (FGD) Institutional Empowerment of Cooperatives Based on the Development of Leading Export Commodities	DJKN Balinusra, Pemkab Klungkung, KPP Bea Cukai Denpasar, KPP Bea Cukai Banyuwangi DJKN Balinusra, Klungkung Regency Government, Denpasar Customs KPP, Banyuwangi Customs KPP	Klungkung, Bali Banyuwangi, Jawa Timur Klungkung, Bali Banyuwangi, East Java	2 Koperasi 2 Cooperatives

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE PERFORMANCE

Edukasi Literasi Keuangan:
LPEI melaksanakan kegiatan CSR melalui pemberian Bimbingan dan Jasa Konsultasi dalam bentuk kegiatan antara lain penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor (UKME).

Terkait program peningkatan kapasitas (*capacity building*) UKME selama tahun 2020, LPEI tercatat telah melaksanakan 32 jenis kegiatan yang dilaksanakan sendiri maupun kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Sementara terkait program pendampingan (*coaching program*) ekspor perdana, LPEI telah merealisasikannya terhadap 21 perusahaan.

Financial Literacy Education:
Indonesia Eximbank's CSR activities are carried out with the provision of Mentoring and Advisory Services throughtraining and assistance to increasing the capacity of Export-oriented Small and Medium Enterprises (UKME).

Regarding the UKME capacity building program during 2020, Indonesia Eximbank carried out 32 activities independently or in collaboration with related ministries or institutions. Meanwhile, Indonesia Eximbank has realized initial export coaching program for 21 companies.

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Green Office:

Mengurangi dampak lingkungan dengan digitalisasi
Digitalisasi merupakan salah satu inisiatif penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas LPEI, baik digitalisasi produk dan layanan keuangan maupun digitalisasi proses bisnis internal. Pemanfaatan platform digital untuk layanan sumber daya manusia dengan HRIS (Human Resource Information System), aplikasi *GreatDay*, CBT (*Computer Based Training*) Kode Etik untuk *e-learning* dan lain-lain, dapat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi, air, dan kertas karena pegawai tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk aplikasi kepersonaliaan. Ke depan, LPEI secara berkala akan meningkatkan kapabilitas layanan dengan pelaksanaan pemrosesan *end-to-end* transaksi secara *paperless* sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi kantor LPEI berupa pemakaian listrik, air, dan timbulan emisi serta limbah, LPEI menerapkan inisiatif *Green Office* sebagai bagian dari pelaksanaan inisiatif keuangan berkelanjutan. Tujuan *Green Office* adalah menciptakan kesadaran pegawai terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan konsumsi yang bertanggung jawab. Penerapan '*Green Office*' dalam operasional keseharian lembaga dilakukan dengan mengikutsertakan Eximbankers dalam kegiatan-kegiatan efisiensi, antara lain:

ENVIRONMENTAL ASPECT

Green Office:

Reducing environmental impact with digitalization
Digitalization is one of the important initiatives to reduce the environmental impact of Indonesia Eximbank activities, both on the financial products and services as well as the internal business processes. Utilization of digital platforms for human resource services with HRIS (Human Resource Information System), GreatDay application, CBT (Computer Based Training) Code of Ethics for e-learning and others, can reduce the environmental impact of the use of energy, water, and paper because employees no longer need to use paper for personnel applications. Going forward, Indonesia Eximbank will periodically improve service capabilities by implementing paperless end-to-end transaction processing in accordance with customer needs.

To reduce the environmental impact of Indonesia Eximbank office operations in electricity and water consumption, as well as the generation of emissions and waste, Indonesia Eximbank implements the Green Office initiative as part of sustainable finance. The goal of is to create employee awareness of environmental conservation by responsible consumption. The implementation of the 'Green Office' in the daily operations is carried out by involving Eximbankers in efficiency activities, including:

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE PERFORMANCE

1) Penghematan konsumsi listrik:
   - Memberikan himbauan agar seluruh pegawai mematikan dan melepas peralatan elektronik pribadi saat pulang kantor.
   - Menghimbau kepada karyawan yang terakhir pulang untuk mematikan lampu dan AC saat mereka telah selesai bertugas di Kantor.
   - Menginstruksikan karyawan outsourching (*Office Boy/Office Girl dan Security*) untuk mematikan Lampu dan AC untuk area kerja yang sudah kosong.
   - Penggunaan fasilitas rapat dengan video *conference* yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
   - Penggunaan fasilitas webinar untuk pelatihan/ sosialisasi, dan lain sebagainya.

2) Penghematan konsumsi air minum:
   - Megurangi penggunaan air mineral 500ml botol plastic dengan membawa botol minum.
   - Menyiapkan *Pitcher* dan botol untuk kegiatan *meeting*, atau pegawai diminta membawa botol minum (*tumbler*) sendiri dalam setiap rapat dan kegiatan kantor.

3) Penghematan konsumsi kertas:
   - Memilah kertas yang masih layak pakai dan menyiapkan *box* penyimpanan di area mesin printer.
   - Memberikan himbauan di area mesin printer untuk sebisa mungkin menggunakan kertas bekas layak pakai untuk mencetak dokumen *draft*.
   - Memberikan himbauan untuk menggunakan dokumen digital, seperti pengiriman surat/ undangan melalui surel/media daring.

4) Penghematan konsumsi printer:
   - Pembaharuan terhadap sistim printer/teknologi *update*.

1) Electricity consumption saving:
   - Reminders to all employees to turn off and remove personal electronic equipment when returning from work.
   - Encouraging employees who are the last to leave to turn off the lights and air conditioning after finished working in the office.
   - Instructing the outsourced employees (Office Boy/Office Girl and Security) to turn off lights and air conditioners for empty work areas.
   - Use of meeting facilities with video conferencing which is carried out effectively and efficiently.
   - Use of webinar facilities for training/socialization, and so on.

2) Saving on drinking water consumption:
   - Reducing the use of 500ml plastic bottled mineral water by bringing a drinking bottle.
   - Prepare Pitchers and bottles for meeting activities, or employees are asked to bring their own tumblers in every meeting and office activity.

3) Paper consumption savings:
   - Sorting paper that is still good to use and preparing a storage box in the printer machine area.
   - Reminders in the printer engine area to use as much as possible used paper suitable for printing draft documents.
   - Reminders to use digital documents, such as sending letters/invitations via email/online media.

4) Printer consumption savings:
   - Updating the printer system / technology update.

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE PERFORMANCE

Pengelolaan lingkungan hidup pada produk Pembiayaan

LPEI memastikan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha oleh debitur yang memanfaatkan pembiayaan dari LPEI, sebagai bagian dari risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola, dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar, dan pelaksanaan prosedur pembiayaan.

LPEI memegang teguh peraturan yang berlaku, termasuk dalam bidang pembiayaan. Berdasarkan SE nomor SE.0008/CEO/05/2021 tentang Penerapan *Green Office Lifestyle Culture* di Lingkungan LPEI, LPEI tidak menyediakan pembiayaan bagi usaha atau kegiatan yang masuk dalam kategori dilarang atas dasar terbukti melanggar hukum lingkungan.

Perlakuan yang sama juga diterapkan bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat merah atau hitam dalam daftar Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Environmental management in Financing products

Indonesia Eximbank ensures that the management of social and environmental risks that may arise from business activities by borrowers utilizing financing from the Company, as part of Environmental, Social and Governance risks, is carried out in accordance with policies, standards, and implementation of financing procedures.

Indonesia Eximbank adheres to the applicable regulations, including in the financing sector. Based on SE No. SE.0008/ CEO/05/2021 concerning the Implementation of Green Office Lifestyle Culture in the Company Environment, Indonesia Eximbank does not provide financing for businesses or activities that fall into the prohibited category on the basis of being proven to have violated environmental laws.

The same treatment was also applied to companies rated as red or black list in the Corporate Performance Rating Program (PROPER) released by the Ministry of Environment.

LAPORAN KEUANGAN 2020

Financial Statements 2020

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut Beserta
Laporan Auditor Independen

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year
Then Ended with
Independent Auditor's Report

Daftar Isi **Halaman/** ***Page*** ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Director Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan **Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada** **Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**		***Financial Statements*** ***For the Years Ended*** ***December 31, 2020 and 2019***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	*Statements of Profit Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	7	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	9	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	12	*Notes to the Financial Statements*

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower, Lantai 1
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 395 03600
Fax. : (62 21) 395 03699
www.indonesiaeximbank.go.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Nomor : BS.0051/CEO/04/2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Daniel James Rompas
   Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia

   Alamat Rumah : Jl. Kencana Indah I No. 8 RT 004 RW 015 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan

   Nomor Telepon : +6221 395 03600
   Jabatan : Direktur Eksekutif

2. Nama : Agus Windiarto
   Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 – Indonesia

   Alamat Rumah : Jl. Daksa I No.2 Unit A 2-1 RT 008 RW 001 Selong Kebayoran Baru

   Nomor Telepon : +6221 395 03600
   Jabatan : Direktur Pelaksana

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" atau "LPEI");

2. Laporan keuangan LPEI telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Number : BS.0051/CEO/04/2021

We, the undersigned:

1. *Name* : *Daniel James Rompas*
   Office address : *Prosperity Tower, 1st Floor, Disctrict 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia*

   Residential address : *Jl. Kencana Indah I No. 8 RT 004 RW 015 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan*

   Telephone : *+6221 395 03600*
   Title : *Executive Director*

2. *Name* : *Agus Windiarto*
   Office address : *Prosperity Tower, 1st Floor, Disctrict 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia*

   Residential address : *Jl. Daksa I No.2 Unit A 2-1 RT 008 RW 001 Selong Kebayoran Baru*

   Telephone : *+6221 395 03600*
   Title : *Managing Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" or "LPEI");*

2. *The financial statements of LPEI have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Nomor : BS.0051/CEO/04/2021

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan LPEI telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan LPEI tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intenal dalam LPEI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Number : BS.0051/CEO/04/2021

3. a. *All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. *LPEI's financial statements do not contain any material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts.*

4. *We are responsible for LPEI's internal control system.*

This is our declaration, which has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of Board of Directors*

Jakarta, 12 April 2021 / *April 12, 2021*

METERAI TEMPEL
1C4AJX051279081

Daniel James Rompas	**Agus Windiarto**
Direktur Eksekutif/	Direktur Pelaksana/
Executife Director	*Managing Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00329/2.1030/AU.1/09/0645-1/1/IV/2021

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana/
The Shareholder, Board of Directors, and Managing Directors

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence KMK No 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan atas suatu hal
Kami membawa perhatian ke Catatan 30 dan 46 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, serta dampaknya terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Catatan tersebut juga telah mengungkapkan tindakan yang telah dilakukan dan rencana yang disusun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk merespons kondisi tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Emphasis of a matter
We draw attention to Notes 30 and 46 to the accompanying financial statements which explains the condition of the Indonesian economy that affected by COVID-19 pandemic, as well as its impact to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. The Note has also disclosed the actions that have been taken and the plans of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia in response to such condition. Our opinion is not modified in respect of this matter.

RSM
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Hal lain
Laporan keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independent lain yang dalam laporannya No. 00113/2.1032/AU.1/09/0240-1/1/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Other matter
The financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia as of and for the year ended December 31, 2019 were audited by other independent auditor whose report No. 00113/2.1032/AU.1/09/0240-1/1/II/2020 dated February 21, 2020 expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dedy Sukrisnadi
Nomor Izin Akuntan Publik: 0645/
Public Accountant License Number: 0645

Jakarta, 12 April/*April 12*, 2021

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2020	2019	
ASET				***ASSETS***
Kas	2a,2c	1.099	1.350	*Cash*
				Current account
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2d,4	17.913	15.090	*with Bank Indonesia*
Giro pada bank	2a,2b,2c,2d,			*Current accounts with banks*
Penugasan Umum	2ad,5,38	486.015	335.683	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(222)	--	*Allowance for impairment losses*
		485.793	335.683	
Penugasan Khusus		5.035.104	51	*National Interest Account*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(54)	--	*Allowance for impairment losses*
		5.035.050	51	
		5.520.843	335.734	
Penempatan pada bank	2a,2b,2c,2e,			*Placements with banks*
Penugasan Umum	2ad,6,38	2.405.621	12.474.259	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.635)	--	*Allowance for impairment losses*
		2.398.986	12.474.259	
Penugasan Khusus		5.593.100	5.064.410	*National Interest Account*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(11.418)	--	*Allowance for impairment losses*
		5.581.682	5.064.410	
		7.980.668	17.538.669	
Efek-efek	2a,2b,2c,2f,7	572.273	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	2a,2c,2h, 2ad,3,8a	--	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya				*Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables*
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah				*Financing and receivables, and financing and sharia receivables*
Penugasan Umum	2a,2b,2c,2j,2k,			*General Assignment*
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2m,2ad,3,9, 38,41	73.448.592	81.042.524	*Financing and Receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(15.560.422)	(10.035.344)	*Allowance for impairment losses*
		57.888.170	71.007.180	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2a,2b,2c,2j,2k, 2l,2m,2ad	15.362.114	15.990.451	*Financing and sharia receivables*
Cadangan penyisihan aset produktif	3,9,38,41	(2.067.206)	(1.239.590)	*Allowance for doubtful accounts*
		13.294.908	14.750.861	
Penugasan Khusus	2a,2b,2c,2j,2k,			*National Interest Account*
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2m,2ad,3,9, 38,41	1.597.367	773.631	*Financing and receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(44.536)	(6.242)	*Allowance for impairment losses*
		1.552.831	767.389	
Total - neto		72.735.909	86.525.430	*Total - net*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2020	2019	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
Piutang lainnya				***Other receivables***
Piutang pembiayaan garansi	2a,2b,2c,2j,2k, 2m,2ad,3,9i, 38,41	303.054	290.587	*Guarantee financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(7.242)	(2.989)	*Allowance for impairment losses*
Total - neto		295.812	287.598	*Total - net*
Klaim atas kelebihan pembayaran pajak	2a,2ae,3,15a,41	169.074	339.625	*Claims for tax refund*
Biaya dibayar dimuka	2a, 2t,12	12.068	14.582	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan	2a,2c,2o	35.540	4.228	*Insurance and guarantee receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2p,2ad,10a	(909)	(2.828)	*Allowance for impairment losses*
Total - neto		34.631	1.400	*Total - net*
Aset reasuransi	2a,2p,2ad,10b	1.284	4.853	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi	2a,2b,2c,2q			*Acceptances receivable*
Penugasan Umum	2ad,11a	562.727	658.289	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.310)	--	*Allowance for impairment losses*
Total - neto		558.417	658.289	*Total - net*
Aset tetap				*Premises and equipment*
Harga perolehan	2a,2r,3,13	1.532.395	1.508.693	*Cost*
Akumulasi penyusutan		(366.047)	(255.338)	*Accumulated depreciation*
Total - neto		1.166.348	1.253.355	*Total - net*
Aset pajak tangguhan - neto	2a,2ae,3,15d,41	2.793.458	1.080.267	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	2a,2c,2k,2l 2s, 2ac,14	224.763	67.530	*Other assets*
TOTAL ASET		**92.084.560**	**108.701.725**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2a,2c,2u	37.936	35.030	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	2a,2b,2c,2q			*Acceptances payable*
Penugasan Umum	2ad,11,38	562.727	658.289	*General Assignment*
Utang pajak	2a,2b,2ae,15b	11.664	45.929	*Taxes payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	2a,2c,2v	36.524.500	45.209.502	*Debt securities issued*
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	2ad,16,38	(43.456)	(62.587)	*Unamortized debt issuance cost*
		36.481.044	45.146.915	
Liabilitas derivatif	2a,2c,2h,2ad,8b	--	2.258	*Derivatives payable*
Pinjaman yang diterima	2a,2c, 2w, 17,38			*Fund borrowings*
Pinjaman		28.599.773	41.492.912	*Borrowings*
Utang asuransi	2a,2c,2p	2.563	2.150	*Insurance payable*
Utang penjaminan	2a,2c,2o	560	497	*Guarantee payable*
Liabilitas asuransi	2a,2c,2p,2ad,10c	3.230	6.515	*Insurance liabilities*
Estimasi klaim penjaminan	2a,2o, 2ad,18b	41.129	6.848	*Estimated guarantee claim*
Liabilitas imbalan kerja	2a,2b,2ac,3,28,38	182.553	292.329	*Liability for employee benefits*
Liabilitas sewa	2a,2c,2r,19	14.837	--	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	2a,2c,2s, 2x,2ad,20	1.349.995	2.073.301	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**67.288.011**	**89.762.973**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Kontribusi modal Pemerintah				*Government capital contribution*
Penugasan Umum	2a,21	20.946.276	16.946.276	*General Assignment*
Penugasan Khusus	2a,21	11.200.000	5.200.000	*National Interest Account*
		32.146.276	22.146.276	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	2a,7,15d	39.456	13.245	*Unrealized gain of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2ac,15d	91.645	8.019	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Saldo laba (rugi)				*Retained earnings (deficit)*
Telah ditentukan penggunaannya:				*Appropriated:*
Cadangan umum	2a,22	322.161	322.161	*General reserve*
Cadangan tujuan	2a,22	758.235	758.235	*Specific reserve*
		1.080.396	1.080.396	
Belum ditentukan penggunaannya		(8.561.224)	(4.309.184)	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS		**24.796.549**	**18.938.752**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**92.084.560**	**108.701.725**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,* 2020	2019	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga dan usaha syariah				*Interest income and income from sharia*
Pendapatan bunga				*Interest income*
Penugasan Umum	2a,2b,2y,23a	3.958.233	5.683.058	*General Assignment*
Penugasan Khusus	2a,2b,2y,23a	314.579	299.858	*National Interest Account*
		4.272.812	5.982.916	
Usaha syariah				*Income from sharia*
Penugasan Umum	2a,2b,2aa,23b	830.069	1.078.550	*General Assignment*
Total pendapatan bunga dan usaha syariah		5.102.881	7.061.466	*Total interest income and income from sharia*
Beban bunga	2a,2b,2c,2y, 2aa,24	(4.262.993)	(5.646.218)	*Interest expense*
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO		**839.888**	**1.415.248**	***INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan dari asuransi				*Income from insurance*
Pendapatan dari asuransi	2a,2ab,10d	9.843	8.018	*Income from insurance*
Premi reasuransi	2a,2ab,10d	(5.739)	(4.698)	*Reinsurance premiums*
Pendapatan dari asuransi - neto		4.104	3.320	*Income from insurance - net*
Kenaikan (penurunan) pada liabilitas asuransi	2a,2p,2ab, 10h	2.979	(2.499)	*Increase (decrease) in insurance liabilities*
(Kenaikan) penurunan pada aset reasuransi	2a,2p,2ab,10g	(3.437)	1.166	*(Increase) decrease in reinsurance assets*
Beban klaim asuransi dan lainnya	2a,2p,2ab,10e	(1.395)	(952)	*Claim expense from insurance and other*
Pendapatan dari penjaminan	2a,2o,10f	80.194	99.222	*Income from guarantee*
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2a,2ad	70.889	31.292	*Gain on foreign exchange transactions - net*
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	2a,2x,2z	86.861	82.898	*Non financing and receivables related fees and commission*
Lain-lain		77.400	80.032	*Others*
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO		**317.595**	**294.479**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,* 2020	2019	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	2a,2m,9,25	(423.080)	(6.681.341)	*Provision for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	2a,2o,18b	(1.946)	6.802	*Provision for impairment losses on estimated guarantee claim*
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	2a,2b,2ab,3,27	(395.732)	(366.280)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	2a,2r,2ac,26	(235.346)	(300.391)	*General and administrative*
Lain-lain		(45.809)	(24.563)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(676.887)	(691.234)	***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES***
LABA (RUGI) OPERASIONAL		55.570	(5.656.046)	***INCOME/(LOSS) FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO		6.152	21.188	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK		61.722	(5.634.858)	***INCOME/(LOSS) BEFORE TAX EXPENSE***
MANFAAT PAJAK	2a,2ae,15c	226.666	924.009	***TAX BENEFIT***
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN		**288.388**	**(4.710.849)**	***INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS***
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		32.924	22.792	*Changes in fair value of financial assets fair value through other comprehensive income- net*
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ae,15d	(6.713)	(5.698)	*Tax related to components of other comprehensive income*
		26.211	17.094	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,* 2020	2019	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS***
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	2a,2ac,28	103.864	(1.483)	*Remeasurement of defined benefit obligation*
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ae,15d	(20.238) / 83.626	371 / (1.112)	*Tax related to components of other comprehensive income*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK		109.837	15.982	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX***
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**398.225**	**(4.694.867)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catalan/ *Notes*	Kontribusi modal Pemerintah/ *Government capital contribution*	Keuntungan(kerugian) Yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan/ *Unrealized* gain (loss) on *available-for-sale securities, net of deferred tax*	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ *Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*	Saldo laba/*Retained earnings* — Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*: Cadangan umum/ *General reserve*	Cadangan tujuan/ *Specific reserve*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2018		**19.530.397**	**(3.849)**	**9.131**	**322.161**	**758.235**	**573.337**	**21.189.412**	***Balance as of December 31, 2018***
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a,21,22	--	--	--	(23.679)	(14.947)	--	(38.626)	*Government's not-tax revevue based on Law No.2 year 2009 article 20 paragraph 2*
Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a,21,22	115.879	--	--	(71.038)	(44.841)	--	--	*Capitalization based on* Law No.2 year 2019
Bagian laba pemerintah	2a,22	--	--	--	--	--	(17.167)	(17.167)	article 20 paragraph
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	2a,22	--	--	--	94.717	59.788	(154.505)	--	*Allocation for general reserve and specific reserve*
Modal tambahan									*Additional capital*
Penugasan Umum	2a,21	1.500.000	--	--	--	--	--	1.500.000	*General Assignment*
Penugasan Khusus	2a,21	1.000.000	--	--	--	--	--	1.000.000	*National Interest Account*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto, setelah pajak tangguhan	2a,2f,7,15d	--	17.094	--	--	--	--	17.094	*Unrealized gain on available-for-sale securities, net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2ad,15d,28	--	--	(1.112)	--	--	--	(1.112)	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Rugi tahun berjalan		--	--	--	--	--	(4.710.849)	(4.710.849)	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2019		**22.146.276**	**13.245**	**8.019**	**322.161**	**758.235**	**(4.309.184)**	**18.938.752**	***Balance as of December 31, 2019***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Kontribusi modal Pemerintah/ *Government capital contribution*	Keuntungan(kerugian) Yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak tangguhan/ *Unrealized gain (loss) of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax*	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ *Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*	Saldo laba/***Retained earnings*** Telah ditentukan penggunaannya/ ***Appropriated*** Cadangan umum/ *General reserve*	Cadangan tujuan/ *Specific reserve*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total ekuitas/ *Total Equity*
Saldo per 31 Desember 2019		**22.146.276**	**13.245**	**8.019**	**322.161**	**758.235**	**(4.309.184)**	**18.938.752**
Dampak penyesuaian transaksi atas penerapan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71	2a,44	--	--	--	--	--	(4.540.428)	(4.540.428)
Saldo per 1 Januari 2020 setelah penerapan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71		22.146.276	13.245	8.019	322.161	758.235	(8.849.612)	14.398.324
Modal tambahan								
Penugasan Umum	2a,21	4.000.000	--	--	--	--	--	4.000.000
Penugasan Khusus	2a,21	6.000.000	--	--	--	--	--	6.000.000
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	2a,2f,7.15d	--	26.211	--	--	--	--	26.211
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2ad,15d,28	--	--	83.626	--	--	--	83.626
Laba tahun berjalan		--	--	--	--	--	288.388	288.388
Saldo per 31 Desember 2020		**32.146.276**	**39.456**	**91.645**	**322.161**	**758.235**	**(8.561.224)**	**24.796.549**
Balance as of December 31, 2019								
Impact of transitional adjustment on the Implementation of Statement Financial Accounting Standards (SFAS) No.71								
Balance as of January 1, 2020 after the Implementation of Statement Financial Accounting Standards (SFAS) No.71								
Additional capital								
General Assignment								
National Interest Account								
Unrealized gain of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax								
Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax								
Income for the year								
Balance as of December 31, 2020								

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,* 2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		4.270.083	5.996.473	*Interest, fees and commissions received*
Pendapatan usaha syariah		830.069	1.078.550	*Sharia income*
Pendapatan operasional lainnya - neto		248.585	50.503	*Other operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan - neto		170.551	(110.770)	*Payments of corporate income tax - net*
Beban operasional lainnya - neto		(710.619)	(734.889)	*Other operating (expenses) - net*
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya		(4.057.843)	(5.643.585)	*Interest and other financing charges*
Pendapatan bukan operasional - neto		6.301	19.597	*Non-operating income - net*
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		757.127	655.879	*Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi				*Changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan) penurunan aset operasi:				*(Increase) decrease in operating assets:*
Tagihan derivatif		1.410	(127)	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang		6.757.729	11.431.361	*Financing and receivables*
Pembiayaan/piutang syariah		628.337	(368.936)	*Sharia financing/receivables*
Biaya dibayar dimuka		(1.023)	4.116	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan		(33.231)	4.015	*Insurance and guarantee receivables*
Aset reasuransi		3.569	(1.125)	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi		99.872	749.124	*Acceptances receivable*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		--	1.504.655	*Reverse repos*
Aset lain-lain		(158.157)	(12.459)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		2.906	(2.272)	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi		(95.562)	(749.124)	*Acceptances payable*
Utang pajak		(34.265)	5.035	*Taxes payable*
Liabilitas derivatif		(2.258)	(26.886)	*Derivatives payable*
Utang asuransi		413	(911)	*Insurances payable*
Utang penjaminan		63	(75)	*Guarantee payable*
Liabilitas asuransi		(3.285)	2.406	*Insurance liabilities*
Estimasi klaim penjaminan		34.281	(966)	*Estimated guarantee claim*
Liabilitas imbalan kerja		(109.776)	61.055	*Liability for employee benefits*
Liabilitas terkait dengan transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		--	(1.504.655)	*Liability related to reverse repos*
Liabilitas lain-lain		(726.432)	447.846	*Other liabilities*
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		7.121.718	12.197.956	***Net cash provided by operating activities***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOW (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,* 2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap		--	1.593	*Proceeds from sale of premises and equipment*
Penjualan efek-efek tersedia untuk dijual		37.337	--	*Sales of available for sale securities*
Pembelian efek-efek tersedia untuk dijual		--	(158.575)	*Purchases of available for sale securities*
Perolehan aset tetap	2a,13	(2.202)	(26.482)	*Acquisitions of premises and equipment*
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		35.135	(183.464)	***Net cash provided by/(used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman yang diterima		32.679.208	27.949.312	*Proceeds from fund borrowings*
Penerimaan efek-efek utang yang diterbitkan		148.000	5.857.000	*Proceeds from debt securities issued*
Pembayaran pinjaman yang diterima		(45.572.347)	(36.315.184)	*Payments of fund borrowings*
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo		(8.833.002)	(4.817.093)	*Payments for matured debt securities issued*
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak		--	(38.626)	*Payments for government as Goverment non Tax Revenue*
Pembayaran bagian laba pemerintah		--	(17.167)	*Payments government's profit share*
Penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia				*Contributed capital received from Government of the Republic of Indonesia*
Penugasan Umum	2a,21	4.000.000	1.500.000	*General Assignment*
Penugasan Khusus	2a,21	6.000.000	1.000.000	*National Interest Account*
Pembayaran emisi efek-efek utang yang diterbitkan		(1.592)	(8.736)	*Payments for issuance cost of debt securities issued*
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan		(11.579.733)	(4.890.494)	***Net cash used in financing activities***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		70.889	31.292	*Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents*
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(4.351.991)	7.155.290	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		17.890.843	10.735.553	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**13.538.852**	**17.890.843**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOW (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,* 2020	2019	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				***COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:***
Kas		1.099	1.350	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2a,4	17.913	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	2a,5	5.521.119	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2a,6	7.998.721	17.538.669	*Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date*
Total kas dan setara kas		**13.538.852**	**17.890.843**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these financial statements

1. Umum

1.a. Pendirian

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("Bank" atau "BEI") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. Pendirian Bank ditetapkan dengan akta No. 49 tanggal 25 Juni 1999 oleh notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13130.HT.01.01-TH.99 tanggal 19 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6652.

Pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar Bank tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Bank berdasarkan (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2003 yang diaktakan dengan akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2003, Tambahan No. 7838 dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Maret 2007 yang diaktakan dengan akta No. 15 tanggal 10 Mei 2007 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-05624.HT.01.04- TH.2007 tanggal 21 Mei 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7655.

1. General

1.a. Establishment

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("the Bank" or "BEI") was established based on Government Regulation No. 37 of 1999 dated May 25, 1999, regarding the State Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia in the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Banking Sector. The establishment of the Bank was notarized under deed No. 49 dated June 25, 1999 of notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-13130.HT.01.01-TH.99 dated July 19, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1999, Supplement No. 6652.

The stockholder approved the revision of article 3 of the Bank's Articles of Association concerning the Bank's objectives and scope of activities based on (i) Shareholder's Extraordinary General Meeting held on May 19, 2003 as provided in the deed No. 45 dated May 21, 2003 of notary Imas Fatimah, S.H,. which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 dated May 23, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated September 2, 2003, Supplement No. 7838 and (ii) Stockholder's Extraordinary General Meeting held on March 22, 2007 as provided in the deed No. 15 dated May 10, 2007 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-05624.HT.01.04-TH.2007 dated May 21, 2007 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 dated July 31, 2007, Supplement No. 7655.

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian (lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, yang diaktakan dengan akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 oleh notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 73679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pembiayaan perdagangan ekspor impor melalui pemberian pinjaman/pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi serta jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri, penerus pinjaman pemerintah, termasuk menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk giro, simpanan berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memperoleh pinjaman dan menerbitkan efek-efek baik di dalam maupun di luar negeri serta melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 dan beroperasi secara komersial sejak tanggal 10 September 1999. Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/ 2000 tanggal 24 April 2000, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Pada tanggal 21 September 2007, Bank telah mendapat izin usaha syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/1494/DPbs.

1. General (continued)

1.a. Establishment (continued)

In the Stockholder's Extraordinary General Meeting held on July 18, 2008 as mentioned in deed No. 2 dated August 1, 2008 of notary Sutjipto, S.H., M.Kn. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-73679.AH.01.02.Year 2008 dated October 14, 2008, the stockholders approved the entire changes in the Bank's Articles of Association to conform with Law No. 19 Year 2003, Law No. 40 Year 2007 and Government Regulation No. 45 Year 2005.

According to article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's objectives and scope are to execute and provide assistance to the government in the implementation of its policies and programs in the economic sector and in the national development in general, particularly in export and import trade financing through the disbursement/financing of trade financing and providing guarantees/insurance as well as providing consultations on foreign trade financing, the disbursement of two-step financing from the government, including collecting third-parties funds in the form of demand deposits, time deposits or other forms, obtaining borrowings and issuing securities in the local or foreign markets, and conducting sharia banking activities.

The Bank has a business license to conduct commercial banking activities based on the Decision Letter No. 1/12/KEP.GBI/1999 dated August 18, 1999 of the Governor of Bank Indonesia and started commercial operations on September 10, 1999. The Bank obtained its status as a foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 dated April 24, 2000.

On September 21, 2007, the Bank obtained its sharia business license from the Bank Indonesia through Decision Letter No. 9/1494/DPbs.

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian (lanjutan)

Gubernur Bank Indonesia memutuskan bahwa izin usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dicabut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI (Catatan 1d).

Kantor LPEI berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI mempunyai 2 kantor wilayah yaitu di Jakarta dan Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI mempunyai 3 kantor cabang yaitu di Medan, Surakarta dan Makassar.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI memiliki tiga kantor pemasaran yaitu di Balikpapan, Batam dan Denpasar, yang merupakan bagian dari kantor wilayah Surakarta, Jakarta dan Surabaya.

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah

LPEI (dahulu Bank) telah menerbitkan obligasi, *Medium Term Notes* dan Sukuk Mudharabah sejak tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2020. Berikut adalah rincian obligasi, *Medium Term Notes* dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2020:

1. General (continued)

1.a. Establishment (continued)

The Governor of Bank Indonesia decided that the license business of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) revoked as a follow up to Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 concerning Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and confirms that with the revocation of the lisence of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) switch to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”) as regulated in Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 concerning LPEI (Note 1d).

LPEI's office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has two regional offices located in Jakarta and Surabaya. As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has two branch offices located in Medan, Surakarta and Makassar.

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has three marketing offices located in Balikpapan, Batam and Denpasar, that are part of regional office in Surakarta, Jakarta and Surabaya.

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah

LPEI (formerly the Bank) issued bonds, Medium Term Notes and Sukuk Mudharabah from 2003 until December 31, 2020. Below are the details of bonds issued, Medium Term Notes and Sukuk Mudharabah which have not yet matured until December 31, 2020:

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

i. Obligasi

1. General (continued)

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

i. Bonds

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Bonds*
Obligasi berkelanjutan IEB II Tahap VII - 2016 Seri C	1.732.250	19 Februari/ *February 2021*	Tetap/*Fixed* - 9,60%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds II - 2016 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap I - 2016 Seri C	2.252.000	8 Juni/ *June 2021*	Tetap/*Fixed* - 8,70%	*IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds III - 2016 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap II - 2016 Seri C	1.582.000	25 Agustus/ *August 2021*	Tetap/*Fixed* - 8,35%	*IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds III - 2016 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap III - 2016 Seri C	282.000	22 Nopember/ *November 2021*	Tetap/*Fixed* - 8,20%	*IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds III - 2016 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap III - 2016 Seri D	1.038.000	22 Nopember/ *November 2023*	Tetap/*Fixed* - 8,50%	*IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds III - 2016 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri C	748.000	23 Februari/ *February 2022*	Tetap/*Fixed* - 8,90%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri D	1.007.000	23 Februari/ *February 2024*	Tetap/*Fixed* - 9,20%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri E	1.266.000	23 Februari/ *February 2027*	Tetap/*Fixed* - 9,40%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series E*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap V - 2017 Seri B	436.000	15 Agustus/ *August 2022*	Tetap/*Fixed* - 7,90%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap V - 2017 Seri C	1.786.000	15 Agustus/ *August 2024*	Tetap/*Fixed* - 8,25%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri A	610.000	14 Februari/ *February 2021*	Tetap/*Fixed* - 6,35%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series A*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri B	1.650.000	14 Februari/ *February 2023*	Tetap/*Fixed* - 6,70%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri C	206.000	14 Februari/ *February 2025*	Tetap/*Fixed* - 6,90%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri A	938.000	6 Juni/ *June 2021*	Tetap/*Fixed* - 7,50%	*IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series A*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri B	35.000	6 Juni/ *June 2023*	Tetap/*Fixed* - 7,70%	*IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri C	1.756.000	6 Juni/ *June 2025*	Tetap/*Fixed* - 8,30%	*IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri B	190.000	5 September / *September 2021*	Tetap/*Fixed* - 7,50%	*IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series B*

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

1. General (continued)

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

i. Bonds (continued)

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Bonds*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri C	275.700	5 September / *September 2023*	Tetap/*Fixed* - 8,40%	*IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri D	1.324.000	5 September / *September 2025*	Tetap/*Fixed* - 8,75%	*IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri B	81.000	8 Nopember/ *November 2021*	Tetap/*Fixed* - 8,75%	*IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri C	28.000	8 Nopember/ *November 2023*	Tetap/*Fixed* - 9,25%	*IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri D	380.000	8 Nopember/ *November 2025*	Tetap/*Fixed* - 9,75%	*IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri B	935.000	23 April/ *April 2022*	Tetap/*Fixed* - 8,40%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri C	1.523.000	23 April/ *April 2024*	Tetap/*Fixed* - 8,90%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri D	278.000	23 April/ *April 2026*	Tetap/*Fixed* - 9,25%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri E	349.000	23 April/ *April 2029*	Tetap/*Fixed* - 9,50%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri F	625.000	23 April/ *April 2034*	Tetap/*Fixed* - 9,80%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series F*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri B	621.000	9 Juli/ *July 2022*	Tetap/*Fixed* - 8,45%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri C	330.000	9 Juli/ *July 2024*	Tetap/*Fixed* - 8,70%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri D	737.000	9 Juli/ *July 2026*	Tetap/*Fixed* - 9,20%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri B	15.000	3 September/ *September 2022*	Tetap/*Fixed* - 7,80%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri C	6.000	3 September/ *September 2024*	Tetap/*Fixed* - 8,10%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri D	714.500	3 September/ *September 2026*	Tetap/*Fixed* - 8,50%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri B	101.300	29 Oktober/ *October 2022*	Tetap/*Fixed* - 7,80%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B*

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

1. General (continued)

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

i. Bonds (continued)

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Bonds*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri C	25.500	29 Oktober/ *October 2024*	Tetap/*Fixed* - 8,10%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri D	112.000	29 Oktober/ *October 2026*	Tetap/*Fixed* - 8,50%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri E	219.750	29 Oktober/ *October 2029*	Tetap/*Fixed* - 8,75%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri A	88.000	6 Desember/ *December 2022*	Tetap/*Fixed* - 7,50%	*IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series A*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri B	1.551.000	6 Desember/ *December 2024*	Tetap/*Fixed* - 7,90%	*IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri C	22.500	6 Desember/ *December 2026*	Tetap/*Fixed* - 8,20%	*IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48.000	8 Juli/ *July 2023*	Tetap/*Fixed* - 7,60%	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020*
Total ekuivalen Rp	**27.904.500**			***Total equivalent in Rp***

ii. *Medium term notes*

ii. Medium term notes

Nama *Medium Term Notes*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Medium Term Notes*
Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank - 2016	500.000	15 Juli/ *July 2021*	Tetap/*Fixed* 8,65%	*Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Notes (MTN) - 2016*
Euro *Medium Term Note* (EMTN) Programme IEB - 2017 (USD500.000.000)	7.025.000	6 April/ *April 2024*	Tetap/*Fixed* 3,875%	*IEB Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (USD500,000,000)*
Total ekuivalen Rp	**7.525.000**			***Total equivalent Rp***

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

iii. Sukuk mudharabah

iii. Sukuk mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Sukuk Mudharabah*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018 Seri B	365.000	6 Juni/ *June 2021*	7,50%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series B*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018 Seri B	250.000	8 November/ *November 2021*	8,75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series B*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018 Seri C	14.000	8 Nopember/ *November 2023*	9,25%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018 Seri D	155.000	8 Nopember/ *November 2025*	9,75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019 Seri B	145.000	23 April/ *April 2022*	8,40%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series B*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019 Seri C	66.000	23 April/ *April 2024*	8,90%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020	100.000	8 Juli/ *July 2021*	6,75%	*Sukuk Mudharabah Phase IV Shelf Registration Offering I - 2020*
Total ekuivalen Rp	**1.095.000**			***Total equivalent Rp***

Seluruh penerbitan obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut telah mendapat pernyataan efektif berdasarkan surat terlampir:

All the offerings of the above bonds, issuance of the Medium Term Notes and the offering of the Sukuk Mudharabah have been declared effective based on letters as follows:

i. Obligasi

i. Bonds

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Nomor surat/ *Letter number*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
Obligasi berkelanjutan IEB II, Tahap VII - 2016/ *IEB Phase VII Shelf - Registration Offering Bonds II - 2016*	No. S-245/D.04/2014	23 Mei 2014/ *May 2014*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap I, II dan III - 2016/ *IEB Phase I, II and III Shelf - Registration Offering Bonds III - 2016*	No. S-250/D.04/2016	30 Mei 2016/ *May 2016*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap IV dan V - 2017/ *IEB Phase IV and V Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017*	No. S-250/D.04/2016	30 Mei 2016/ *May 2016*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap VI - 2018/ *EIB Phase VI Shelf - Registration Offering Bonds III - 2018*	No. S-250/D.04/2016	30 Mei 2016/ *May 2016*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

i. Obligasi (lanjutan)

i. Bonds (continued)

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Nomor surat/ *Letter number*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap I,II, dan III - 2018/ *IEB Phase I, II, and III Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018*	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ *May 2018*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap IV, V, VI, VII dan VIII - 2019/ *EIB Phase IV, V, V, VII and VIII Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019*	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ *May 2018*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Obligasi berkelanjutan IEB V, Tahap I - 2020/ *EIB Phase I Shelf - Registration Offering Bonds V - 2020*	No. S-183/D.04/2020	30 Juni 2020/ *June 2020*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*

ii. Medium term notes

ii. Medium term notes

Nama obligasi/ *Name of bonds*	Nomor surat/ *Letter number*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
Euro *Medium Term Note* (EMTN). *Programme* IEB - 2015/ *IEB Medium Term Note (EMTN) Programme - 2015*	Ref:RMR/IR/THJ/ 2012040022	4 November 2015/ *November 2015*	Singapore Exchange Securities Trading
Medium Term Note (MTN) I. Indonesia Eximbank - 2016/ *Indonesia Eximbank Phase I - Medium Term Notes (MTN) - 2016*	No. SP-0036/P-EBH/ KSEI/0716	14 Juli 2016/ *July 2016*	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Medium Term Note (MTN) II Indonesia Eximbank - 2016/ *Indonesia Eximbank Phase II - Medium Term Notes (MTN) - 2016*	No. SP-0062/P-EBH/ KSEI/1016	10 Oktober 2016/ *October 2016*	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
EMTN Program IEB - 2017/ *IEB EMTN Programme - 2017*	Ref:RMR/IR/THJ/ 2012040022	7 April 2017/ *April 2017*	Singapore Exchange Securities Trading

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

iii. Sukuk mudharabah

1. General (continued)

1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

iii. Sukuk mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah/ *Name of Sukuk Mudharabah*	Nomor surat/ *Letter number*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I dan II - 2018/ *Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I and II - 2018*	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ *May 2018*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III dan IV - 2019/ *Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III and IV - 2019*	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ *May 2018*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020/ *Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020*	No. S-183/D.04/2020	30 Juni 2020/ *June 2020*	Otoritas Jasa Keuangan/ *Financial Services Authority*

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai

Susunan Dewan Direktur LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees

The composition of the Board of Directors of LPEI as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember 2020 / ***December 31, 2020***	**31 Desember 2019 /** ***December 31, 2019***	
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif *)	Daniel James Rompas	Daniel James Rompas	*Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director *)*
Anggota Dewan Direktur **)	Kasan	Arlinda Imbang Jaya	*Member of Board of Directors **)*
Anggota Dewan Direktur ***)	Arus Gunawan	Arif Budimanta	*Member of Board of Directors ***)*
Anggota Dewan Direktur ****)	Suminto	Suminto	*Member of Board of Directors ****)*
Anggota Dewan Direktur *****)	Felia Salim	Felia Salim	*Member of Board of Directors *****)*
Anggota Dewan Direktur ******)	Rijani Tirtoso	Rijani Tirtoso	*Member of Board of Directors ******)*

*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 933/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 23 Desember 2019, memberhentikan dengan hormat Sinthya Roesly dan mengangkat Daniel James Rompas sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif sejak 23 Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

*) *Based on Minister of Finance Decision Letter No.933/KMK.06/2019 regarding Termintation and Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 23, 2019, Sinthya Roesly was honorably dismissed and appointed Daniel James Rompas as Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director since December 23, 2019 with a tenure up to August 31, 2024.*

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

**) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 5 Juni 2020, mengangkat Kasan sebagai anggota dewan direktur sejak 5 Juni 2020 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.06/ 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Mei 2018, mengangkat Arlinda Imbang Jaya sebagai anggota dewan direktur sejak 1 Juni 2018 menggantikan Bachrul Chairi untuk sisa masa jabatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang digantikannya.

***) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keungan No. 530/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 November 2020, mengangkat Arus Gunawan sebagai anggota dewan direktur sejak 19 November 2020 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 71/KMK.06/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 9 Januari 2015. Arif Budimanta diangkat sebagai anggota dewan direktur LPEI sejak tanggal 9 Januari 2015 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

****) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Agustus 2018, memberhentikan Susiwijono Moegiarso dan mengangkat Suminto sebagai anggota dewan direktur sejak 1 September 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

***) *Based on Minister of Finance Decision Letter No. 274/KMK.06/2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated June 5, 2020, Kasan was appointed as a member of the board of directors since June 5, 2020 for a tenure oup to August 31, 2023 and based on Minister of Finance Decision Letter No. 427/KMK.06/2018 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated May 31, 2018, Arlinda Imbang Jaya was appointed as a member of the board of directors since June 1, 2018 replacing Bachrul Chairi to fill in the remaining tenure of the member of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia that she substituted.*

****) *Based on Minister of Finance Decision Letter No. 530/KMK.06/2020 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated November 19, 2020, Arus Gunawan was appointed as a member of the board of directors since November 19, 2020 for a tenure of 5 (five) years and based on Minister of Finance Decision Letter No. 71/KMK.06/2015 regarding The Appointment of Members of Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated January 9, 2015, Arif Budimanta was appointed as member of the board of directors of LPEI since January 9, 2015 for a tenure of 5 (five) years.*

*****) *Based on Minister of Finance Decision Letter No. 554/KMK.06/2018 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated August 14, 2018, dismissed Susiwijono Moegiarso and Suminto was appointed as a member of the board of directors since September 1, 2018 for a tenure of 5 (five) years.*

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

*****) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 25 Juli 2018, mengangkat Felia Salim sebagai anggota dewan direktur sejak 25 Juli 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

******) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 934/KMK.06/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 23 Desember 2019, mengangkat Rijani Tirtoso sebagai anggota dewan direktur sejak 23 Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024.

Berdasarkan pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyatakan bahwa salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Susunan Direktur Pelaksana LPEI pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

*****) *Based on Minister of Finance Decision Letter No. 522/KMK.06/2018 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated July 25, 2018, Felia Salim was appointed as a member of the board of directors since July 25, 2018 for a tenure of 5 (five) years.*

******) *Based on Minister of Finance Decision Letter No. 934/KMK.06/2019 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 23, 2019, Rijani Tirtoso was appointed as a member of the board of directors since December 23, 2019 for a tenure up to December 23, 2024.*

According to article 25 paragraph (5) of Law No. 2 of year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), it states that one of the members of the Board of Directors referred to in paragraph (2) b is determined by the Minister as Chairman of the Board of Director and Executive Director.

The Managing Directors of LPEI as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	**31 Desember 2019 / *December 31, 2019***	
Direktur Pelaksana I *)	Dikdik Yustandi	Dikdik Yustandi	*Managing Director I*
Direktur Pelaksana II **)	Djoko Retnadi	Djoko Retnadi	*Managing Director II*
Direktur Pelaksana III ***)	Agus Windiarto	Agus Windiarto	*Managing Director III*
Direktur Pelaksana IV ****)	Henry Sihotang	Henry Sihotang	*Managing Director IV*
Direktur Pelaksana V *****)	Chesna Fizetty Anwar	Chesna Fizetty Anwar	*Managing Director V*

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0010/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Dikdik Yustandi sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

*) *Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0010/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Dikdik Yustandi was assigned as Managing Director I since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.*

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

**) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0011/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Djoko Retnadi sebagai Direktur Pelaksana II sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

***) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0012/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Agus Windiarto sebagai Direktur Pelaksana III sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

****) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0013/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Henry Sihotang sebagai Direktur Pelaksana IV sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

*****) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0014/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Chezna Fizetty Anwar sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

***) *Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0011/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Djoko Retnadi was assigned as Managing Director II since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.*

****) *Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0012/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Agus Windiarto was assigned as Managing Director III since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.*

*****) *Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0013/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Henry Sihotang was assigned as Managing Director IV since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.*

******) *Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0014/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Chesna Fizetty Anwar was assigned as Managing Director V since September 1, 2019 for her term until August 31, 2024.*

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Memorandum Prosedur No. MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mulai berlaku tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembidangan Unit Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah sebagai berikut:

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana I, Direktur Pelaksana II, Direktur Pelaksana III, Direktur Pelaksana IV Direktur Pelaksana V, *Senior Executive Vice President* IV, dan *Senior Executive Vice President* V.
- Direktur Pelaksana I membawahi Senior Executive Vice President I, Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Bisnis BUMN, Divisi *Trade Finance* dan *Team Leader Corporate Desk* Surabaya.
- Direktur Pelaksana II membawahi Divisi Bisnis Syariah, Divisi Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial, Divisi Jasa Konsultasi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
- Direktur Pelaksana III membawahi *Senior Executive Vice President* III, Divisi IEB Institute, Divisi *Communication & Stakeholder Engagement*, dan Divisi *Office of the Board.*
- Direktur Pelaksana IV membawahi membawahi *Senior Executive Vice President* VI, Divisi Restrukturisasi Aset Konvensional dan Syariah, dan Divisi Litigasi.
- Direktur Pelaksana V membawahi *Senior Executive Vice President* II, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum dan Litigasi, dan Divisi *Credit Operation and Supervision.*

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Memorandum of Procedure No. MPO.0038/CEO/08/2020 dated August 31, 2020 which is an inseparable part of Executive Director Regulation No. 0065/PDE/11/2019 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Indonesian Export Financing Institutions which came into force on January 20, 2020, regarding the Work Unit Structure of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia are as follows:

- *Executive Director is responsible for Managing Director I, Managing Director II, Managing Director III, Managing Director IV, Managing Director V, Senior Executive Vice President IV, and Senior Executive Vice President V.*
- *Managing Director I is responsible for Executive Vice President I, Corporation Financing, State-Owned Enterprise Financing, Trade Finance and Team Leader Corporate Desk Surabaya.*
- *Managing Director II is responsible for Small Medium Enterprise Financing and Commercial, Consultation, Regional Offices and Branch Offices.*
- *Managing Director III is responsible for Senior Executive Vice President III, IEB Institute, Communication & Stakeholder Engagement and Office of the Board.*
- *Managing Director IV is responsible for Senior Executive Vice President VI, Asset Restructuring Conventional and Syariah and Recovery and Litigation.*
- *Managing Director V is responsible for Senior Executive Vice President II, Risk Management, Compliance, Legal and Litigation and Credit Operation and Supervision.*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

- *Senior Executive Vice President* I membawahi Divisi Pembiayaan Khusus dan Divisi Penjaminan dan Asuransi.
- *Senior Executive Vice President* II membawahi Divisi Teknologi Sistem Informasi, Divisi Operasional, dan Divisi Pengadaan dan Umum.
- *Senior Executive Vice President* III membawahi Divisi *Finance*, Divisi *Strategic Planning*, Divisi *MIS & Business Finance*, Divisi *Financial Institution and Treasury*, dan Divisi *Middle Office Treasury.*
- *Senior Executive Vice President* IV membawahi Divisi *Human Resources Business Partner & Recruitment*, Divisi *Organization & People Development*, Divisi *Human Resources Services*, Divisi Kepatuhan, dan Divisi *Transformation Office.*
- *Senior Executive Vice President* V membawahi Divisi *Reguler Audit & Methodology* dan Divisi *Special Audit.*
- *Senior Executive Vice President* VI membawahi Divisi *Credit Reviewer* I, Divisi *Credit Reviewer* II, dan Divisi *Product Development & Portofolio Management.*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No. 0029/KDE/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan No. 0003/KDD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, susunan Komite Audit LPEI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

- *Senior Executive Vice President I is responsible for Special Assignment and Advisory Services and Guarantees and Insurance.*
- *Senior Executive Vice President II is responsible for Information Systems, Operations and General and Procurement.*
- *Senior Executive Vice President III is responsible for Finance, Strategic Planning, MIS & Business Finance, Financial Institution and Treasury and Middle Office Treasury.*
- *Senior Executive Vice President IV is responsible for Human Resources Business Partner & Recruitment, Organization & People Development, Human Resources Services, Compliance, dan Transformation Office.*
- *Senior Executive Vice President V is responsible for Reguler Audit & Methodology dan Special Audit.*
- *Senior Executive Vice President VI is responsible for Credit Reviewer dan Product Development & Portofolio Management.*

LPEI's Audit Committee as of December 31, 2020 and 2019 based on the Board of Directors' Decision Letter No. 0029/KDE/05/2020 dated May 20, 2020 and 0003/KDD/02/2019 dated February 14, 2019 is composed of the following:

	31 Desember 2020 / ***December 31, 2020***	**31 Desember 2019 /** ***December 31, 2019***	
Ketua	Rijani Tirtoso	Felia Salim	*Chairman*
Anggota	Yulida S. Marbun	Deddy Supriyanto	*Member*
Anggota	Untung Dwiyono	Gunarso	*Member*

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan No. 0025/KDE/03/2015 tanggal 18 Maret 2015, Kepala Divisi Internal Audit LPEI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	**31 Desember 2019 / *December 31, 2019***	
Kepala Divisi *Reguler Audit & Methodology*	Fandhy Haristha	-	*Chief of Reguler Audit & Methodology*
Kepala Divisi *Special Audit*	Hendratni Tri Wibowo	-	*Chief of Special Audit*
Kepala Divisi Internal Audit	-	Yoseph Tri Purnomosidi	*Chief of Internal Audit*

Berdasarkan Memorandum Prosedur No.MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan No. 0004/KDD/03/2019 tanggal 5 Maret 2019, Sekretaris LPEI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	**31 Desember 2019 / *December 31, 2019***	
Sekretaris LPEI	Agus Windiarto	Emalia Tisnamisastra	*LPEI's Secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan No. 0020/KDE/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dengan Surat Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah No. BS.0078/CEO/04/2020 tanggal 29 April 2020 dan No. 0021/KDE/05/2013 tanggal 21 Mei 2013, susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	**31 Desember 2019 / *December 31, 2019***	
Ketua	Kanny Hidaya	Kanny Hidaya	*Chairman*
Anggota	Yulizar D. Sanrego	Yulizar D. Sanrego	*Member*
Anggota	-	Agustianto	*Member*

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui surat No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

Chief of Internal Audit of LPEI as of December 31, 2020 and 2019 based on the Executive Director Decision Letters No. 0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 and No. 0025/KDE/03/2015 dated March 18, 2015 is as follows:

Based on the Memorandum of Procedure No.MPO.0035/CEO/07/2020 dated July 1, 2020 and No. 0004/KDD/03/2019 dated March 5, 2019, LPEI's secretary as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

Based on the Executive Director Decision Letters No.0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 and No.0020/KDE/05/2013 dated May 21, 2013 with an Extension Work Period Letter No. BS.0078/CEO/04/2020 dated April 2019, 2020 and No. 0021/KDE/05/2013 dated May 21, 2013, the composition of Sharia Supervisory Board as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

The appointment of member of the Sharia Supervisory Board based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) by the letter No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 dated December 12, 2012.

1. Umum (lanjutan)

1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)

Jumlah pegawai tetap LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 461 dan 466 (tidak diaudit).

1.d. Pembentukan LPEI

Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1999 dikembangkan menjadi sebuah lembaga keuangan yang berdaulat, dengan nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007, Presiden Republik Indonesia telah menegaskan pengembangan ekspor melalui pembentukan LPEI tersebut. Pembentukan LPEI ini berdasarkan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009.

Gubernur Bank Indonesia memutuskan bahwa izin usaha Bank dicabut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan menegaskan bahwa dengan pencabutan izin usaha Bank maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI beralih kepada LPEI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI Pasal 48 menyebutkan bahwa paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, LPEI mulai beroperasi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal mulai beroperasinya LPEI. Pada saat mulai beroperasinya LPEI, maka Bank dinyatakan bubar dan seketika itu pula seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Bank dan pegawai BEI tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI dan pegawai LPEI.

1. General (continued)

1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI had 461 and 466 permanent employees, respectively (unaudited).

1.d. Formation of LPEI

The Bank which was formed according to the Government Regulations (PP) No. 37 year 1999 was developed as sovereign financial institution, named Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). In compliance to the President Instruction No. 6 Year 2007, the President of Republic of Indonesia had confirmed the development of export through the formation of LPEI. The formation of LPEI is based on the Law No. 2 Year 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) which was signed by the President of Republic Indonesia on January 12, 2009.

The Governor of Bank Indonesia decided to revoke the Bank's business license pursuant to Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) and stated that according to the revocation of license, are transferred all legal assets and liabilities of BEI to LPEI as regulated in Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI.

Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI Article 48 states maximum of 9 (nine) months since the Law was promulgated, LPEI started to operate so that based on Decree of the Financial Minister No. 336/KMK.06/2009 dated August 24, 2009, the Government of Republic of Indonesia decided that September 1, 2009 is the start of operation date of LPEI. When LPEI started to operate, the Bank was dissolved and effective immediately, all legal assets and liabilities as well as rights and obligations of the Bank and the Bank's employees become the legal assets and liabilities, as well as the rights and obligations of employees of LPEI.

1. Umum (lanjutan)

1.d. Pembentukan LPEI (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan No. 16 tanggal 31 Agustus 2009 oleh Notaris Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., pemegang saham memutuskan diantaranya:

- Mengalihkan seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Bank menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI.
- Mengalihkan semua pegawai Bank menjadi mpegawai LPEI termasuk namun tidak terbatas pada masa kerja, penghargaan masa kerja dan jasa produksi pegawai yang telah dibiayakan sampai dengan 31 Agustus 2009.
- Pembubaran Bank tanpa likuidasi.

LPEI akan lebih berfokus dalam menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor. Keberadaan LPEI juga akan memberikan garansi atas berbagai risiko yang selama ini tidak diberikan oleh bank komersial. Pihak asing akan lebih mempunyai keyakinan atas LPEI karena LPEI merupakan bagian dari Pemerintah dan dibentuk berdasarkan atas undang-undang (*sovereign*). LPEI juga bisa mengatur *prudential norm*-nya sendiri. Selain itu, struktur organisasi LPEI yang menggunakan *One Board System* tentu akan bisa mengefektifkan pengambilan keputusan.

Kegiatan usaha LPEI adalah:

a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. Penjaminan yang meliputi: penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor;

1. General (continued)

1.d. Formation of LPEI (continued)

Based on the decision statement of the Bank's Stockholder's Extraordinary General Meeting as mentioned in the deed No. 16 dated August 31, 2009 of notary Ms. Anne Meyanne Alwie, S.H., the stockholders decided among others to:

- *Transfer all the legal assets, liabilities, rights and obligations of the Bank to become the legal assets, liabilities, rights and obligations of LPEI.*
- *Transfer all of the Bank's employees to become employees of LPEI including but not limited to the working period, employee benefits and employee production service that had been expensed up to August 31, 2009.*
- *Dissolve the Bank without liquidation.*

LPEI will be more focused on running the business activities of financing, guarantees, insurance and consulting services in order to export. The presence of LPEI also will provide warranty for a variety of risk that has not been granted by commercial banks. Foreign parties will have more confidence in LPEI because LPEI is part of the Government and was formed based on law (sovereign). LPEI can also set the prudential norm of his own. In addition, the structure of LPEI use One Board System would be effective for decision making.

LPEI business activities are:

a. Provides local and international financing and receivable under the conventional and Syariah principles;
b. Guarantee that includes: underwriting for Indonesian exporters for payment received from the buyer of goods/services overseas, guarantee for importers of goods/services from Indonesia to overseas for the payment of which has been given, which provides a guarantee for bank financing on export transactions to Indonesian exporters, as well as guarantee in order to tender related to the implementation of the project in whole or in part which is supporting export activity;

1. Umum (lanjutan)

1.d. Pembentukan LPEI (lanjutan)

c. Asuransi ekspor yang meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor;
d. Bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk membiayai kegiatan dalam melaksanakan Penugasan Umum, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

a. Penerbitan surat berharga;
b. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik di dalam maupun luar negeri;
c. Hibah;
d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia.

1.e. Penugasan Khusus

Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan Khusus kepada LPEI bertujuan membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

1. General (continued)

1.d. Formation of LPEI (continued)

c. Export insurances cover the risk of failure on export, failure to pay, the investment by insurance Indonesian companies abroad, and/or political risk insurance in a country's export destination;

d. Provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, manufacturers of export goods, especially micro, small, medium and cooperatives to help overcome the barriers faced by banks/ financial institutions in providing financing to exporters with commercial potential and/or important to the economic development of Indonesia.

To finance its activities in order to conduct the General Assignment, LPEI can obtain funds derived from:

a. Issuance of securities;
b. Short-term, medium-term, and/or long-term Indonesia government, foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions and finance loans, both at domestic and abroad;
c. Grant;
d. Placement of funds by Bank Indonesia.

1.e. National Interest Account

The Special Assignment or National Interest Account (NIA) was assigned from government to LPEI to provide export financing for transactions or projects that is difficult to be implemented commercially, but its required by the government to support the government policies or export program.

This NIA assignment to LPEI aims to help in providing finance to the area that is not accessible by banks or commercial financial institutions that are reluctant or do not have the capacity in terms of competitive financing and the ability to absorb risks, it must meet the criteria to enhance competitiveness and value-added indonesian products, support the growth of the domestic industry and has the potential for improvement and long-term export development.

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI dapat memberikan pembiayaan atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional/*National Interest Account* (NIA). Penugasan khusus ini menjadi strategis karena bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

Kegiatan usaha LPEI dalam rangka Penugasan Khusus dapat diberikan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang meliputi pembiayaan, penjaminan dan asuransi kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Di tahun 2015, LPEI telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2015. Pelaksanaan atas mandat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Produk Gerbong Penumpang Kereta Api. KMK No. 1231/KMK.08/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015 dan KMK No. 167/KMK.08/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015.

1. General (continued)

1.e. National Interest Account (continued)

Based on the mandate of Law No. 2 Year 2009, LPEI is able to provide financing for the transaction or project that is commercially difficult to implement but is considered necessary by the Government to support a national export policy or program/NIA. This special assignment becomes strategic because it aims to improve the competitiveness and value-added products of Indonesia, supporting the growth of the domestic industry, and has the potential for improvement and long-term export development.

The business activities of LPEI in the framework of NIA can be administered either through conventional or based on sharia principles that include financing, guarantees and insurance to both legal entities and other entities including individuals who live inside or outside the territory of the Republic Indonesia.

In 2015, LPEI has gained a special assignment from the Government through the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 134/PMK.08/2015 on National Interest Account Assignment To Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia issued on July 14, 2015. The implementation of the mandate is set out in Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 dated November 13, 2015 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Product and also KMK No. 1231/KMK.08/2015 dated December 8, 2015 on Special Assignment To LPEI Economic Policy Package To Support Government in 2015 and KMK No. 167/KMK.08/2016 dated March 8, 2016 on the Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 1231/KMK.08/2015 on Special Assignment To LPEI To Support Government Economic Policy Package year 2015.

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)

LPEI telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Gerbong Penumpang Kereta Api yang ditetapkan tanggal 12 Mei 2017 dengan negara tujuan ke Bangladesh dan memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 513/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 347/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Kereta Penumpang dan Gerbong Barang Kereta Api Dengan Negara Tujuan ke Bangladesh dan Srilanka yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

LPEI telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang ditetapkan tanggal 5 September 2017 dengan negara tujuan ke Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab dan negara- negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

Pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan PMK No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan mencabut PMK No. 134/PMK.08/2015.

1. General (continued)

1.e. National Interest Account (continued)

LPEI has gained a special assignment from the Government through the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 374/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products dated on May 12, 2017 with Bangladesh as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2018 taking into account the allocation of funds.

In 2018, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 513/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 374/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.

LPEI has gained a special assignment from the Government through the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 649/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Aircrafts dated on September 5, 2017 with the countries of destination Thailand, Nepal, United Arab Emirates and countries in the African region that are not in the embargo of the United Nations and has term of assignment until December 31, 2018 taking into account the allocation of funds.

In 2017, the Government issued PMK No. 198/PMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 21, 2017 and revoked PMK No. 134/PMK.08/2015.

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 512/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana.

Pada tahun 2019 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 01/KMK.08/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai Addendum KMK No.787/KMK.08/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2021.

1. General (continued)

1.e. National Interest Account (continued)

In 2018, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 512/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 649/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.

In 2019, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 01/KMK.08/2019 dated January 2, 2019 regarding changes of KMK No. 787/KMK.08/2017 dated November 6, 2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing Exports to Africa, South Asia and the Middle East and issued the Decree of Minister of Finance (KMK) Np. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to developing Mandalika Special Economic Zone Tourism.

In 2020, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector, with a term of assignment period until December 31, 2025.

In 2020, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 428/KMK.08/2020 dated September 23, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting Supporting the Indonesian Aviation Industry, with a term of assignment period until December 31, 2021.

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK/08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu dibentuk komite penugasan khusus.

Dalam rangka pelaksanaan tugas komite, Ketua komite membentuk tim teknis, Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memperoleh masukan terkait kebijakan kementerian sektor sesuai surat keputusan Menteri Keuangan No. 191/KMK.08/2016 dibentuk kelompok advisori yang merupakan perwakilan dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 409/KMK.08/2019 tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2019 ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.08/2020 tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2020, masa kerja komite dan kelompok Advisori ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.08/2017 tentang LPEI juga memuat tata cara pengajuan usul program ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian, pembentukan komite penugasan khusus ekspor dan pembayaran.

1. General (continued)

1.e. National Interest Account (continued)

In 2020, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Trade Finance Facilities In Order To Support National Economic Recovery.

According to Article 8 Minister of Finance Regulation No. 198/PMK/08/2017 on special assignment to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, committees for NIA need to be established.

In order to execute the task of the committee, the Chairman of the committee formed a technical team, the Committee which is responsible and report on performance of its duties to the Ministry of Finance.

In order to obtain feedback regarding the appropriate sector ministry policy decision in accordance with the Minister of Finance decision No. 191/KMK.08/2016, Advisory Group comprising representatives of the Ministries/Non-ministries Government Organization has been formed.

Based on the decision of the Minister of Finance No. 409/KMK.08/2019, about Establishing Committees for NIA in 2019, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2019 until December 31, 2019.

Based on the decision of the Minister of Finance No. 66/KMK.08/2020, about establishing committess for NIA in 2020, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2020 until December 31, 2020.

Minister of Finance Regulation No. 198/PMK.08/2017 on LPEI also includes procedure of filing a national export program proposals of ministries and agencies, sources of funds, fines, underwriting fees, insurance premiums, indemnities, committees and special assignments export payments.

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)

Kegiatan usaha LPEI dalam Penugasan Khusus:

a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. Penjaminan yang meliputi Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa diluar negeri, penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
c. Asuransi yang meliputi asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi risiko politik.

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penyertaan modal negara yang diakui dalam ekuitas LPEI sebagaimana penambahan modal dan/atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan menteri;
b. Bagian kapitalisasi modal LPEI untuk Dana Penugasan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pelaksanaan Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI guna mendukung program ekspor nasional pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Negara Republik Indonesia telah menyetorkan penambahan penyertaan modal negara masing-masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp1.000.000 untuk LPEI. Modal tersebut pada tahun 2019 efektif diterima tanggal 28 Juni 2019 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000 efektif diterima tanggal 18 Agustus 2020, dan Rp5.000.000 efektif diterima pada 30 Desember 2020.

1. General (continued)

1.e. National Interest Account (continued)

LPEI's business activities in NIA include the following:

a. Provides conventional and sharia financing both domestic and overseas;

b. Guarantees for Indonesian exporters on payments received from the buyer of goods and/or services abroad, guarantee for banks that become partners in providing financing transactions that have been provided to the Indonesian exporters;

c. Insurance that cover against payment default. insurance on the investments made by the Indonesian company in overseas, and/or insurance on political risk.

To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from:

a. State budget of revenues and expenditures in the form of equity participation which is recognized in LPEI's equity as additional capital and/or other forms stipulated in the ministerial regulations;
b. Part of capitalization of LPEI's equity for NIA stipulated in the requirements of law;

c. Other legitimate sources in accordance with the requirements of law.

In strengthening the capital structure and increase the capacity of business for the implementation of NIA to export financing to support export programs nationwide, as of December 31, 2020 and 2019, the Republic of Indonesia has injected additional equity participation amounting to Rp6,000,000 and Rp1,000,000 to LPEI, respectively.The capital injection in 2019 was received on June 28, 2019 and in 2020 Rp1.000.000 was received on August 18, 2020 and Rp5.000.000 was received on December 30, 2020, respectively.

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)

Dana dalam rekening Penugasan Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penugasan Khusus. Pendanaan program Penugasan Khusus dibatasi paling banyak sebesar akumulasi dana Penugasan Khusus, setelah memperhitungkan seluruh biaya terkait. Biaya terkait program Penugasan Khusus meliputi biaya dana, cadangan kerugian penurunan nilai dan biaya operasional lain yang dibebankan oleh LPEI.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Dasar penyajian laporan keuangan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan LPEI telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Laporan keuangan disajikan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar, dan disusun atas basis akrual, kecuali untuk bagi hasil dari pembiayaan Musyarakah dan laporan arus kas.

1. General (continued)

1.e. National Interest Account (continued)

The funds available under NIA bank account can only be used for the implementation of NIA program. Financing for NIA program is limited to the accumulated funds of NIA, after taking into account all of the related costs. The cost of NIA includes cost of fund and allowance for impairment and operational expense charge by LPEI.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Basis of financial statements presentation Statement of Compliance

The financial statements of LPEI were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SFAS) in Indonesia, which include the Statement and Interpretation which published by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and Regulations from the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM - LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, Regulation of Financial Minister (PMK) No. 140/PMK.010/2009 about Development and Supervision of LPEI, PMK No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI and PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, and Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI.

The financial statements have been prepared using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement, and under the accrual basis, except for profit sharing income from Musyarakah financing and the statement of cash flows.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.a. Dasar penyajian laporan keuangan Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Untuk unit syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip perbankan syariah, laporan keuangannya disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2016) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2016) "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 "Akuntansi Wa'd", dan Pedoman Akuntasi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank dan penempatan pada bank yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional. Angka-angka disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.a. Basis of financial statements presentation Statement of Compliance (continued)

For the sharia business unit which operates based on the shariah banking principles, the presentation of the financial statement is in accordance to SFAS No. 101 (Revised 2016) "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2016) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 "Accounting for Istishna'', SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 "Accounting for Musyarakah", SFAS No. 107 (Revised 2016) "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Sukuk Accounting", SFAS Np. 111 "Wa'd Accounting", and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) established by Bank Indonesia and the Indonesian Institute of Accountants.

The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks and placements with banks maturing within 3 (three) months from the date of acquisition, provided they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used for the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp), which is LPEI's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.a. Dasar penyajian laporan keuangan Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

LPEI menyajikan laporan posisi keuangan sesuai tingkat likuiditas. Suatu analisis mengenai pemulihan (aset) atau penyelesaian (kewajiban) dalam dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (lancar) dan lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (tidak lancar) disajikan di dalam Catatan 41.

Termasuk di dalam laporan keuangan LPEI adalah penyajian aset, liabilitas, modal, laba dan rugi yang berasal dari Penugasan Khusus sesuai surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-368/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017.

2.b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

LPEI menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personel manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan berelasi.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan LPEI jika:

a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan LPEI; (ii) memiliki kepentingan dalam LPEI yang memberikan pengaruh signifikan atas LPEI; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas LPEI;
b. suatu pihak yang berelasi dengan LPEI;
c. suatu pihak adalah ventura bersama di mana LPEI sebagai *venturer*;
d. suatu pihak adalah anggota dari personel manajemen kunci LPEI;

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.a. Basis of financial statements presentation Statement of Compliance (continued)

LPEI presents its statement of financial position based on liquidity level. An analysis regarding recovery (asset) or settlement (liability) within twelve (12) months after the reporting date (current) and more than twelve (12) months after the reporting date (non-current) is presented in Note 41.

Included in the financial statements of LPEI is the presentation of assets, liabilities, capital, profits and losses derived from Special Assignment accordance with the letter issued by the Directorate General of State No. S-368/KN/2017 dated February 16, 2017.

2.b. Transactions with related parties

LPEI implemented SFAS No. 7 (improvement 2015) "Related Party Disclosures". This improvement of SFAS clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures.

Parties are considered to be related to LPEI if:

a. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the parties (i) controll, or are controlled by, or are under common control as with LPEI, (ii) have interests in LPEI which give significant influence on LPEI; or (iii) have joint control over LPEI;
b. a party which is related to LPEI;
c. a party is a joint venture in which LPEI is a venturer;
d. a party is the member of key management personnel of LPEI;

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari LPEI atau entitas yang terkait dengan LPEI;

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali dengan personel manajemen kunci, dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan LPEI akan memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara LPEI dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah Negara RI diungkapkan juga pada Catatan 38.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.b. Transactions with related parties (continued)

e. a party is a close family members of an individual described in clause (a) or (d);

f. a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in some entities, directly or indirectly, which are individuals identified in point (d) or (e);

g. a party is a post-employment programs for the benefit of employees of either LPEI or a party related to LPEI;

Transaction with related parties, except for key management personel is conducted under terms and conditions similar with third party transactions. The transactions to be conducted by LPEI will be in accordance with the regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("Bapepam-LK") No. IX.E.1 regarding "Transaction with Afiliation and Certain Conflict of Interests" when the transactions are conducted.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 38 of the financial statements. Furthermore, material balances and transactions between LPEI with the Government of the Republik Indonesia (RI) and other entities that are related with the Government of RI are disclosed also in Note 38.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

LPEI menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yang menggantikan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Aset keuangan LPEI terdiri dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank, efek-efek, tagihan derivatif, pembiayaan dan piutang syariah, piutang pembiayaan garansi, piutang asuransi dan penjaminan, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain (bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan).

Liabilitas keuangan LPEI terdiri dari liabilitas segera, liabilitas akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, liabilitas terkait dengan transaksi liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha dan liabilitas lain-lain (bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi, kewajiban kepada penjamin ulang).

(i) Klasifikasi

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

LPEI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajarmelalui penghasilan komprehensif lain;
3. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities

LPEI adopted PSAK 71, "Financial Instruments" with effect beginning January 1, 2020 which replaced PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

LPEI's financial assets consist of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, placements with banks, securities, derivative receivables, financing and sharia receivables, guarantee financing receivables, insurance and guarantee receivables, acceptances receivable, and other assets (accrued interest receivables and refundable deposits).

LPEI's financial liabilities consist of current liabilities, acceptances payable, derivative payables, debt securities issued, fund borrowings, insurance payables, guarantee payables, liability related to reverse repos, lease liabilities and other liabilities (accrued interest payable, tantiem and accrued bonus, liabilities to reguarantor).

(i) Classification

Applicable as of January 1, 2020

LPEI classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

1. *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
2. *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
3. *Financial assets measured at amortized cost.*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pengujian SPPI
Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, LPEI menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan memenuhi pengujian SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian pembiayaan biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, LPEI menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada FVPL.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

SPPI Test
As a first step of its classification process, LPEI assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within a lending arrangement are typically the consideration for the time value of money and financing risk. To make the SPPI assessment, LPEI applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at FVPL.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis
LPEI menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana LPEI mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis LPEI tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumen nya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian LPEI.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario *"worst case"* atau *"stress case"*. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, LPEI tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Business model assessment
LPEI determines its business model at the level that best reflects how it manages LPEI of financial assets to achieve its business objective.

LPEIs business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *How managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value and timing of sales are also important aspects of LPEI's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from LPEI's original expectations, LPEI does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

LPEI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

   LPEI mengukur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:
   1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
   2. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (SPPI).

b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   LPEI menerapkan kategori baru berdasarkan PSAK 71 dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
   1. Instrumen utang dimiliki dalam model bisnis, yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
   2. Ketentuan kontrak dari aset keuangan yang memenuhi pengujian SPPI.

c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

LPEI classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

a. Financial assets measured at amortised cost

   LPEI measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:
   1. The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows.
   2. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

   LPEI applies the new category under SFAS 71 of financial assets measured at FVOCI when both of the following conditions are met:
   1. The debt instrument is held within a business model, the objective of which is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets.
   2. The contractual terms of the financial asset meet the SPPI test.

c. Financial assets measured at fair value through profit or loss.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

LPEI menerapkan kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

   Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh LPEI untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

   Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki LPEI untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

b. Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

   Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

LPEI applies the category of financial assets based on fair value through profit or loss if it does not meet the criteria as amortised cost or fair value through other comprehensive income.

Financial liabilities are classified into the following categories:

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss

   Financial liabilities at fair value through profit or loss consist of two sub-categories; financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by LPEI as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

   A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking.

b. Financial liabilities measured at amortised cost

   Financial liabilities at amortized cost are financial liabilities that are not held-for-trading nor designated as at fair value through profit or loss upon the recognition liability.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71 / ***Category as defined by PSAK 71***		**Golongan (ditentukan oleh LPEI)/** ***Class (as determined by LPEI)***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Tagihan derivatif/*derivative receivables*
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortised cost*	Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank-bank lain/*Current accounts with other banks*
		Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain/*Placements with Bank Indonesia and other banks*
		Tagihan akseptasi/*Acceptances receivables*
		Pembiayaan, piutang pembiayaan garansi, tagihan akseptasi/*Financing receivables, guarantee financing receivables, acceptances receivable*
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	Efek-efek/*Marketable securities*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif/*Derivative payables*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortised cost*	Liabilitas segera/*Obligation due immediately*
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase*
		Liabilitas akseptasi/*Acceptable payables*
		Efek-efek yang ditebitkan/*Marketable securities issued*
		Pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha/*Fund Borrowings, insurance payables, guarantee payables, lease liabilities*
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

LPEI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Applicable before January 1, 2020

LPEI classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Pembiayaan dan piutang;
- Dimiliki hingga jatuh temo;
- Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, yang diperoleh atau dimiliki LPEI untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

- *Financial assets at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets as held for trading;*
- *Financing and receivables;*
- *Held-to-maturity;*
- *Available-for-sale investments.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;*
- *Other financial liabilities are measured at amortised cost.*

The sub-classification of financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are financial assets and liabilities held- for-trading which LPEI acquires or incurs principally for selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembiayaan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh LPEI untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal LPEI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the statement of financial position. with any gains or losses being recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financing and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that LPEI intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that LPEI upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;*
- *those that LPEI upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or*
- *those for which LPEI may not recover substantially all of its initial investment, other than because of financing and receivables deterioration, which shall be classified as available-for-sale.*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana LPEI mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengakuan awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that LPEI has the positive intention and ability to hold to maturity. Investments intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition. available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized under other comprehensive income under equity and reported until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange restatement for available-for-sale investments are reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held-for-trading nor designated as at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014) / ***Category as defined by PSAK 55 (Revised 2014)***		**Golongan (ditentukan oleh LPEI)/** ***Class (as determined by LPEI)***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Tagihan derivatif /*Derivative receivables*
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Financing and receivables*	Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank-bank lain/*Current accounts with other banks*
		Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain/*Placements with Bank Indonesia and other banks*
		Tagihan akseptasi/*Acceptances receivables*
		Pembiayaan dan piutang syariah, piutang pembiayaan garansi, tagihan akseptasi/*Financing and sharia receivables, guarantee financing receivables, acceptances receivable*
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/*Available for sale financial assets*	Efek-efek/*Marketable securities*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif/*Derivative payables*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortised cost*	Liabilitas segera/*Obligation due immediately*
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase*
		Liabilitas akseptasi/*Acceptable payables*
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*
		Efek-efek yang diterbitkan/*Marketable securities issued*
		Pinjaman yang diterima/*Borrowings*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(ii) Metode suku bunga efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya diamortisasi instrumen utang dan alokasi pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif yang mendiskonto penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya pada poin-poin yang dibayar atau diterima yang membentuk bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) sepanjang umur ekonomis yang diharapkan dari instrumen utang, atau (jika lebih tepat) periode yang lebih singkat, dengan jumlah tercatat neto pada pengakuan awal.

(ii) Effective interest method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate exactly that discounts estimated future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on the initial recognition.

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya
Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

(iii) Initial recognition and subsequent measurement
Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the settlement date.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

Financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets and liabilities not measured at fair value through profit and loss, plus directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
  Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- Liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
  a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
  b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
  c) Kontrak jaminan keuangan.
  d) Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.

  Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020
Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

Financial liabilities are initially measured at (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities at amortized cost.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss.*
  This category consists of two sub-categories: financial liabilities classified as trading and financial liabilities which at initial recognition were designated at fair value through profit or loss

- *Financial liabilities are measured at amortized cost, except:*
  a) Financial liabilities at fair value through profit or loss.
  b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied.

  c) Financial guarantee contracts.
  d) Commitment to provide loans at below market interest rates.

  Contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination

Applicable as of January 1, 2020
After initial recognition, the LPEI measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) Amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

- Aset Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.

b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

- Financial assets at amortized cost

Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.

b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

LPEI dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan, pada periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan yang tercantum dalam poin (b) paragraf di atas diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

- Aset Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi
Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali:
  a. bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam laba rugi, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
  b. keuntungan atau kerugian penurunan nilai; atau

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

LPEI in a reporting period calculates interest income by applying the effective interest method on the acquisition cost of amortized financial assets, in the next reporting period, calculating interest income by applying an effective interest rate on the gross carrying amount if the credit risk of the financial instrument improves so that the financial assets no longer experience Impairment of credit value and improvement can be objectively related to an event that occurs after the requirements listed in point (b) of the above paragraph are applied (for example an improvement in the borrower's credit rating).

- Financial assets at amortized cost

Gains or losses of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income until the financial assets are derecognized or reclassified, except:
a. interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss, the amount recognized in profit or loss is equal to the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost;
b. impairment gains or losses; or

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

c. Keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Khusus untuk aset keuangan berbentuk instrumen ekuitas, jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi LPEI dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas.

Sesuai dengan paragraf sebelumnya, jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
  Aset dinilai pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi, kecuali instrumen lindung nilai yang ditetapkan kedalam hubungan lindung nilai tertentu.

LPEI menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

c. Foreign exchange gains or losses.

When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Specifically for financial assets in the form of equity instruments, the amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to profit or loss. However, LPEI can transfer cumulative gains or losses on equity.

In accordance with the previous paragraph, if a financial asset is measured at fair value through other comprehensive income, the amount recognized in profit or loss is the same as the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost.

- Financial assets at fair value through profit or loss
Assets are valued at fair value. All gains and losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss, except for hedging instruments that are designated in certain hedging relationships.

LPEI applies an impairment requirement for financial assets measured at amortized cost and financial assets in the form of debt instruments that are measured at fair value through other comprehensive income.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pembiayaan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

After initial recognition, LPEI measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

Applicable before January 1, 2020

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Financing and receivables and held-tomaturity investments and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

LPEI menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau LPEI mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana LPEI secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh LPEI diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana LPEI secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, LPEI menghentikan pengakuan aset tersebut jika LPEI tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, LPEI tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan LPEI dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Derecognition

LPEI derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the LPEI is recognized as a separate asset or liability.

In transactions in which the LPEI neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the LPEI derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the LPEI continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Penghentian pengakuan atas modifikasi substansial atas syarat dan ketentuan

Jika modifikasi atas aset keuangan tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka LPEI akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan modifikasian pada tanggal modifikasi. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

b. Penghentian pengakuan selain modifikasi substansial
Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- LPEI telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dan antara (a) LPEI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) LPEI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Derecognition due to substantial modification of terms and condition

If the modification of the financial asset does not result in the termination of recognition of the financial asset, LPEI will record the financial asset as the modified financial asset at the date of modification. li. The difference between the gross carrying amount of the initial financial assets and the fair value of the modified assets is recognized in profit or loss. The income or transaction costs incurred in connection with the modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

b. Derecognition other than for substantial modification
Financial assets are derecognized if:

- *the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *LPEI has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to third parties under a 'pass-through' arrangement; and either (a) LPEI has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) LPEI has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

LPEI menghapusbukukan aset keuangan dan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat LPEI menentukan bahwa kemungkinan tertagihnya aset keuangan tersebut relatif kecil. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti kemungkinan tertagihnya piutang dari debitur, telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur. Jumlah hari lewat jatuh tempo yang digunakan untuk memicu penghapusan pembiayaan tanpa jaminan dalam portofolio ritel ditentukan berdasarkan pengalaman akun masa lalu yang menunjukkan ketika suatu akun mencapai jumlah hari lewat jatuh tempo tertentu, maka probabilitas pengembalian dari akun tersebut mendekati nol.

Pembiayaan dan piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pembiayaan dan piutang atau hubungan normal antara LPEI dan debitur telah berakhir. Ketika pembiayaan dan piutang tidak dapat dilunasi, maka akan dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

LPEI writes off a financial asset and any related impairment losses, when the LPEI determines that the collectibility of financial assets is relatively remote. This decision is reached after considering information such as recoverability of the amount due from borrowers, the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. The days past due used to trigger write off of unsecured financing in retail portfolio are broadly driven by past experiences which shows that once an account reaches the certain number of days past due, the probability of recovery is almost zero.

Financing and receivables or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between LPEI and the borrowers has ceased to exist. When financing and receivables are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries from financing previously written off are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika LPEI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan LPEI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah diukur dari nilai tercatat awal dari aset dan jumlah maksimum pertimbangan bahwa LPEI diminta untuk membayar.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Perbedaaan antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi terkait pencadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dapat mengacu pada Catatan 2m.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

When LPEI has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of LPEI's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that has taken the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that LPEI could be required to repay.

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired, Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference between the carrying value of the original financial liability and the consideration paid is recognized in profit or loss.

The accountung policy ralated to the allowance for impairment losses can be seen on Note 2m.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang dicatat berdasarkan perolehan diamortisasi;

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk aset yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam ekuitas untuk aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dan pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki dilakukan jika adanya perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional LPEI seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(v) Income and expense recoginition

a. Gains and losses arising from changes in fair value are not recognized for assets recorded at amortized cost;

b. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for assets classified in the group of financial assets measured at fair value through profit or loss;

c. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in equity for assets classified as fair value through other comprehensive income.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity and other comprehensive income are recognized in the statement of profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

Applicable as of January 1, 2020

Reclassification of owned financial assets is made if there is a change in the business model for managing financial assets and is not allowed to reclassify financial liabilities.

Changes in the business model must have a significant impact on the LPEI's operational activities, such as acquiring, releasing, or ending a line of business. In addition, it is necessary to prove these changes to external parties.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

LPEI akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis LPEI harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

a. perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).

b. hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.

c. pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Suatu aset keuangan diklasifikasikan keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi ketika kondisi berikut ini terpenuhi:

- aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam jangka waktu dekat; dan
- terdapat suatu keadaan yang tidak terduga.

Suatu aset keuangan yang direklasifikasi keluar dari kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi.

Setiap keuntungan atau kerugian yang sudah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak dapat dibalik. Nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi akan menjadi biaya diamortisasi yang baru, sebagaimana berlaku.

LPEI tidak mereklasifikasi instrument keuangannya ke dalam atau ke luar dari kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

The LPEI will reclassify all financial assets affected by changes in business models. Changes in the objectives of the LPEI's business model should take effect before the reclassification date.

What is not a change in the business model are:

a. change in intention relating to a particular financial asset (even in situations of significant changes in market conditions).

b. the temporary loss of certain markets for financial assets.

c. transfers of financial assets between parts of the Group with different business models

Applicable before January 1, 2020

A financial asset is reclassified out of the fair value through profit or loss category when the following conditions are met:

- *the financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term; and*
- *there is a rare circumstance.*

A financial asset that is reclassified out of the fair value through profit or loss category is reclassified at its fair value on the date of reclassification.

Any gain or loss already recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income cannot be reversed. The fair value of the financial asset on the date of the reclassification becomes its new amortized cost, as applicable.

LPEI has not reclassified its financial instrument into or out of fair value through profit or loss category during the year ended December 31, 2019.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika LPEI memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

(vii) Saling hapus
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum berarti:
a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   i. kegiatan bisnis normal;
   ii. kondisi kegagalan usaha; dan
   iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when LPEI has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

(vii) Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

This means that the right to set off:
a. must not be contingent on a future event, and
b. must be legally enforceable in all of the following circumstances:
   i. the normal course of business;
   ii. the event of default; and
   iii. the event of insolvency or bankruptcy.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi
Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai pasar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:
- Tingkat 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 adalah input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(viii) Amortised cost measurement
The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the measurement date.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- *Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;*
- *Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and*
- *Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, LPEI menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. LPEI menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivativ dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, LPEI mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, LPEI mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

LPEI menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

If a market for a financial instrument is not active, LPEI establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis. LPEI uses its own credit risk spreads in determining the fair value for its derivative liabilities and all other liabilities for which it has elected the fair value option.

When LPEI's credit spread widens, LPEI recognizes a gain on these liabilities because the value of the liabilities has decreased. When LPEI's credit spread becomes narrow, LPEI recognizes a loss on these liabilities because the value of the liabilities has increased.

LPEI uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk instrumen yang lebih kompleks, LPEI menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivativ melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa *input* dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki LPEI. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko pembiayaan *counterparties*.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

For more complex instruments, LPEI uses internally developed model which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid. Some of the inputs to these models may not be market observable and are therefore estimated based on assumptions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimate or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that LPEI holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risks, liquidity risk and counterparties credit risk.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-*review* dan disesuaikan, jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada LPEI dan debitur ditentukan menggunakan nilai kini berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan piutang, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan, *long position*, liabilitas keuangan, dan *short position* diukur dengan harga penutupan. Dimana LPEI memiliki posisi aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka dapat digunakan nilai tengah dari nilai pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair values of financing and receivables as well as liability to LPEI and debtors are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, by cosidering quality of financing and receivables, liquidity and costs.

Financial assets, long positions, financial liabilities, and short positions are measured at closing price. Where LPEI has assets and liabilities positions with off- setting market risk, middle market prices are used to measure the off-setting risk positions and a bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Aset keuangan, *long position*, liabilitas keuangan, dan *short position* diukur dengan harga penutupan. Dimana LPEI memiliki posisi aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka dapat digunakan nilai tengah dari nilai pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

(x) Perbedaan hari pertama
Pada saat nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi. LPEI secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari" keuntungan atau kerugian) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.c. Financial assets and financial liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

Financial assets, long positions, financial liabilities, and short positions are measured at closing price. Where LPEI has assets and liabilities positions with off- setting market risk, middle market prices are used to measure the off-setting risk positions and a bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.

(x) Day 1 (one) difference
When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. LPEI immediately recognizes the difference between the transaction price and fair value (a 'Day 1' profit or loss) in the statement of profit or loss and comprehensive income. In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.d. Giro pada Bank Indonesia dan bank

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Giro pada Bank Indonesia dan bank diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dan bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Giro pada Bank Indonesia dan bank diklasifikasikan masing-masing sebagai pembiayaan dan piutang. Giro pada Bank Indonesia dan bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.e. Penempatan pada bank

Penempatan pada bank adalah penanaman dana pada bank berupa penempatan pada pasar uang (*interbank call money*) dan deposito berjangka.

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Penempatan pada bank diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Penempatan pada bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Penempatan pada bank diklasifikasikan sebagai pembiayaan dan piutang. Penempatan pada bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.d. Current accounts with Bank Indonesia and banks

Applicable as of January 1, 2020

Current accounts with Bank Indonesia and banks are classified as amortised cost. The current accounts with Bank Indonesia and banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

Applicable before January 1, 2020

Current accounts with Bank Indonesia and banks are classified as financing and receivables. The current accounts with Bank Indonesia and banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2.e. Placements with banks

Placements with banks represent funds in banks in the form of interbank call money and time deposits.

Applicable as of January 1, 2020

Placements with banks are classified as amortised cost. The placements with banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

Applicable before January 1, 2020

Placements with banks are classified as financing and receivables. The placements with banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.f. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, berupa Obligasi Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi korporasi.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Setelah pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya. Sejak 1 Januari 2020, seluruh efek-efek diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek yang nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.f. Securities

Securities consist of securities traded on the stock exchanges and in the money market, in the form of bonds of the Republic of Indonesia, Certificates of Bank Indonesia (SBI) and corporate bonds.

Securities are initially measured at fair value.

Applicable as of January 1, 2020

After the initial recognition, the securities are recorded according to their category. Since January 1, 2020 all securities are classified as fair value through other comprehensive income.

The valuation of securities is stated based on the classification as follows:

1. *Securities classified as fair value through other comprehensive income are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized directly in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*
2. *Securities classified as fair value through other comprehensive income are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on fair value through other comprehensive income investments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.f. Efek-efek (lanjutan)

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Setelah pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya. Pada 31 Desember 2019 seluruh efek-efek diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Penilaian efek-efek atas klasifikasi investasi tesedia dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek yang terseda untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain di ekuitas sampai dengan efek-efek tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dan pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

2.g. Sukuk

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.f. Securities (continued)

Applicable before January 1, 2020

After the initial recognition, the securities are recorded according to their category. As of December 31, 2019, securities are classified as available for sale.

The valuation of available for sale securities is stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on fair value through other comprehensive income investments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Fair value changes are recognized in other comprehensive income and reported directly in equity and other comprehensive income until the securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in the statement of profit or loss.

2.g. Sukuk

Sharia securities is a proof of investment based on syariah principles that are commonly traded in syariah money market and/or sharia capital market, such as sharia bonds (sukuk) and other securities based on syariah principles.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.g. Sukuk (lanjutan)

LPEI menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.
2) Surat berharga diukur pada nilai wajar. Yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.
3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

2.h. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, LPEI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing dan swap mata uang asing untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker *(quoted price)* atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.g. Sukuk (continued)

LPEI defined the classification of investment in marketable securities especially sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.
2) At fair value securities are stated at fair value through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year statements of profit or loss and other comprehensive income.
3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.

2.h. Derivative financial instruments

In the normal course of business, LPEI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts and foreign currency swaps to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risk.

All derivative instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.h. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020, derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari aset keuangan utamanya. Melainkan, aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis dan ketentuan kontraktualnya. Akuntansi untuk derivatif yang melekat atas liabilitas keuangan dan kontrak utama non-keuangan dalam PSAK 71 adalah sama dengan dalam PSAK 55.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai atau tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai instrumen lindung nilai, diakui atau dibebankan sebagai laba rugi tahun berjalan. Untuk tujuan akuntansi, transaksi derivatif LPEI bukan merupakan lindung nilai yang efektif menurut PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.h. Derivative financial instruments (continued)

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Applicable as of January 1, 2020

From January 1, 2020, embedded derivatives are no longer separated from a host financial asset. Instead, financial assets are classified based on the business model and their contractual terms. The accounting for derivatives embedded in financial liabilities and in non-financial host contracts under SFAS 71 is the same is it was under SFAS 55.

Applicable before January 1, 2020

Each derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

The changes in the fair value of the derivative instruments that are not designated as effective accounting hedges or do not meet the criteria for classification as hedging instrument are recognized in the current year profit or loss. For accounting purposes, LPEI's derivative transactions are not designated as hedging instrument under SFAS No. 55 (Revised 2014).

Derivative receivables and payables are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.i. Tagihan wesel ekspor

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan dan disajikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh LPEI. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan dan disajikan sebagai pembiayaan yang diberikan dan piutang. Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh LPEI. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan keruginan penurunan nilai.

2.j. Pembiayaan dan piutang

Pembiayaan dan piutang yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.i. Export bills receivable

Applicable as of January 1, 2020

Export bills receivable are classified and presented as amortised cost. Export bills receivable are negotiated export bills discounted and negotiated by LPEI. Export bills receivable are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

Applicable before January 1, 2020

Export bills receivable are classified and presented as financing and receivables. Export bills receivable are negotiated export bills discounted and negotiated by LPEI. Export bills receivable are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

2.j. Financing and receivables

Financing and receivables represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Applicable as of January 1, 2020

Financing and receivables are classified as amortised cost.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.j. Pembiayaan dan piutang (lanjutan)

Pembiayaan dan piutang yang diberikan pada awalnya diukur menggunakan metode EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/fee transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan kerugian kredit ekpektasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2m.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai pembiayaan yang diberikan dan piutang.

Pembiayaan dan piutang yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi

Pembiayaan dan piutang yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pembiayaan atau hubungan normal antara LPEI dengan debitur telah berakhir. Pembiayaan yang tidak dapat dilunasi, dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan di laporan posisi keuangan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.j. Financing and receivables (continued)

Financing and receivables provided are measured at amortized cost using EIR method less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and cost/fee that are an integral part of the EIR. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Allowance for impairment losses is carried out using the expected credit loss calculation method as disclosed in Note 2m.

Applicable before January 1, 2020

Financing and receivables are classified as financing and receivables.

Financing and receivables are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest method less allowance for impairment losses.

Financing and receivables are classified as amortised cost

Financing and receivales are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the normal relationship between LPEI and the borrowers has ceased to exist. When financing are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of financing previously written-off are credited to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.j. Pembiayaan dan piutang (lanjutan)

Penerimaan kembali pada tahun berjalan atas pembiayaan dan piutang yang telah dihapusbukukan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan dan piutang yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Restrukturisasi pembiayaan dan piutang
Restrukturisasi pembiayaan dan piutang meliputi modifikasi persyaratan pembiayaan dan piutang atau perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pembiayaan dan piutang yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pembiayaan dan piutang diakui dalam bentuk cadangan kerugian penurunan nilai bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pembiayaan dan piutang yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pembiayaan yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

2.k. Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah
Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/ piutang tersebut meliputi piutang *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah.*

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.j. Financing and receivables (continued)

The recoveries from written-off financing and receivables in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries from written-off financing and receivables from previous years are recorded as operational income other than interest income.

Financing and receivables restructuring
Financing and receivables restructuring may involve a modification of the terms of the financing and receivables or extending the payment arrangement.

Losses on loan restructurings due to modification of the terms of the financing and receivables are recognised as part of allowance for impairment losses only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans including receipts designated as interest and loan principal, are less than the carrying amount of financing before restructuring.

2.k. Sharia financing and receivables

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar forms of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangements and profit sharing between LPEI and borrowers for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables and musyarakah financing.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.k. Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Piutang *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan marjin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, LPEI melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari debitur.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

2.l. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh dapat disertai dengan wakalah.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.k. Sharia financing and receivables (continued)

Murabahah receivable is a transaction carried out based on sales and purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly (stated on the financing agreement). Murabahah may or may not be carried out based on a certain order to purchase goods. Under Murabahah, based on a certain order, the purchase will be realized by LPEI after the order is received.

Murabahah receivable is initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is a partnership contract between fund owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct business through partnership. All parties share profits based on a predetermined ratio, while the loss will be distributed proportionately based on the capital contribution. At statement of financial position date musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the musyarakah financing collectibility at the end of the year.

2.l. Funds of qardh

Funds of qardh are borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh can be combined with wakalah.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.l. Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Wakalah digunakan dalam hal nasabah mewakilkan kepada LPEI untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen nasabah dan menagih piutang kepada *buyer*. Atas jasa tersebut LPEI dapat memperoleh ujrah yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. LPEI menetapkan cadangan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai

Aset keuangan

Yang berlaku setelah 1 Januari 2020

Penerapan PSAK 71 telah mengubah metode kerugian penurunan nilai LPEI dengan mengganti pendekatan kerugian kredit pada saat terjadinya (*incurred loss*) dalam PSAK 55 dengan pendekatan kerugian kredit ekpektasian (*expected credit loss*). Sejak 1 Januari 2020, LPEI telah mencatat cadangan kerugian kredit ekpektasian (*expected loss*) atas instrumen keuangan sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang berupa instrumen hutang yang diklasifikasikan dalam biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
   a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan disajikan di dalam laporan laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.l. Funds of qardh (continued)

Wakalah is used in the event that the customer represents LPEI to manage customer documents and collect receivables from the buyer. For these services, LPEI can obtain ujrah which is recognized proportionally during the period.

Funds of qardh are recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. LPEI provides allowance for possible losses on qardh based on the review of quality of the individual outstanding balances.

2.m. Allowance for impairment losses

Financial asset

Applicable after January 1, 2020

The implementation of SFAS 71 has changed LPEI's loss impairment method from SFAS 55's incurred loss approach to a forward-looking expected credit loss approach. As of January 1, 2020, LPEI has been recognizing the allowance for expected credit loss (expected loss) for all financial instruments as follows:

1. Financial assets in the form of debt instruments that are classified as amortised cost or fair value through other comprehensive income.
   a. Impairment loss for financial asset under the classification of amortised cost are recognized as a deduction from the asset's carrying value and is presented as "allowance for impairment losses" in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai "*unrealized gain or loss",* (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan kompehensif lain sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

2. Komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (*commited*)
   a. Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas bank yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai "Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Komitmen Pinjaman", kecuali LPEI tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
   b. Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan.
3. Kontrak penjaminan keuangan yang termasuk dalam PSAK 71 dan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

b. Allowance for impairment of financial assets (other than equity instruments) under the classification of fair value through other comprehensive income are recognized as addition to other comprehensive income in the statement of financial position as "unrealized gain or loss" (which will not deduct the carrying value of a financial asset in the financial statement) and is presented in the statement of profit and loss and other comprehensive income as "Allowance for impairment".

2. Commited loan commitment or undisbursed loan (commited)

a. Impairment loss for loan commitments are recognized as provision in liabilty separate from its related loan asset as "Expected Credit Loss Provision on Loan Commitments*", unless an event has caused LPEI to not be able to identify both components separately.*

b. In such condition, impairment loss for loan commitment *and financial asset are recognized together as deduction to a financial asset carrying value in the statement of financial position.*

3. Financial guarantee contracts included in SFAS 71 and not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

LPEI mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

LPEI mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Dalam mengevaluasi hal tersebut, LPEI menetapkan kriteria berikut:

1. *Stage* 1
   Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya seluruh hal berikut, yaitu:
   a. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari;
   b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektabilitas 1 atau 2; dan
   c. Tidak di restrukturisasi (berdasarkan informasi flag restrukturisasi di sistem).

   Pada *stage* ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

2. *Stage* 2
   Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 89 hari.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

LPEI measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:

i. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
ii. Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

LPEI evaluates whether there is significant increase in credit risk or objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

In assessing those matters, LPEI applies the criteria as follows:

1. Stage 1
   At the evaluation date, credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition, which can be proven by the occurrence of all of the following, namely:
   a. Does not have past due obligation not more than 30 days;
   b. The financial instrument has a collectability rating 1 or 2; and
   c. Not restructured (based on restructuring flag information in the system).

   At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of an expected 12 months credit loss.

2. Stage 2
   At the evaluation date, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, when the is past due obligation of 31 days to 89 days.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pada tahapan ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*).

3. *Stage* 3
Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu:
a. Terdapat tunggakan lebih dari 89 hari; atau
b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau
c. Terdapat restrukturisasi atas aset keuangan (berdasarkan informasi flag restrukturisasi di sistem).

Pada *stage* ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

i. Penilaian secara individual

1) Kriteria individual
LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara individual jika LPEI memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya secara individual dan aset keuangan memiliki kriteria sebagai berikut:

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of the expected credit losses over its lifetime.

3. Stage 3
At the evaluation date, there is objective evidence that the financial asset is impaired, which can be proven by the occurrence of one of the following:
b. Past day obligation for more than 89 days has occured; or
c. The financial instrument has a collectability rating of 3, 4, or 5; or
d. Restructured financial instrument (based on restructuring flag information in the system).

At this stage, LPEI will measure the allowance for losses for financial instruments at the amount of the expected credit losses over their lifetime.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

i. Individual assessment

1) Individual criteria
LPEI evaluates impairment individually if LPEI has reasonable and supportable information to measure the lifetime expected credit losses on an individual instrument and the financial assets have the following criteria:

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan dikategorikan sebagai *non-performing financing*; atau
b. Aset keuangan yang mengalami restrukturisasi; atau
c. Terdapat bukti objektif penurunan nilai.

LPEI juga dapat menetapkan aset keuangan untuk di evaluasi secara individual meskipun aset keuangan dimaksud belum memiliki kriteria untuk dievaluasi secara individual apabila dinilai oleh manajemen akan menghasilkan kerugian kredit ekspektasi yang lebih akurat apabila dinilai secara individual.

2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada konsep estimasi jumlah probabilitas tertimbang kerugian aset keuangan. Konsep tersebut menggunakan pembobotan masing-masing dari 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Setiap skenario menghasilkan nilai kini arus kas yang didiskontokan menggunakan EIR, dimana arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*.

Dalam membuat estimasi *recovable amount* pada arus kas, metode individual di dasarkan pada 2 (dua) konsep yaitu: (1) *Discounted Cashflow* berdasarkan estimasi arus kas masa depan; dan (2) *Expected Collateral* berdasarkan estimasi penjualan agunan dengan mempertimbangkn nilai wajar dan jangka waktu penjualan agunan di masa depan. Selisih estimasi jumlah probabilitas tertimbang dengan jumlah *outstanding* aset keuangan mencerminkan jumlah kerugian kredit ekspektasian secara individual.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

a. The financial asset is categorized as non-performing financing

b. The financial asset is restructured; or
c. There is objective evidence that the financial asset is impaired.

LPEI can also assign certain financial assets to be evaluated individually even though the said criteria has not been met, if the management has determined that the individual method will result in a more accurate expected credit loss.

2) Impairment evaluation
Individual impairment evaluation is based on the concept of an estimated weighted probability of loss of financial assets. This concept uses the weighting of each of the 3 (three) scenarios, namely optimistic scenario, moderate scenario, and pessimistic scenario. Each scenario results in fair value of cashflow discounted using EIR, where the cashflow is based on readily available information and experienced credit judgement.

In estimating cashflow based on recoverable amount, the individual method is based on 2 (two) concept, consisting of: (1) The Discounted Cashflow which is based on estimated future cashflow; and The Expected Collateral which is based on estimated sale of collateral taking into consideration the fair value of the collateral and length of sale in the future.The difference between the estimated weighted average amount against the financial asset oustanding reflects the individual expected credit loss.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

a. Optimis
Skenario dengan asumsi penguatan ekonomi di negara-negara emerging. Terdapat setidaknya 3 faktor yang diperkirakan mampu mengangkat ekonomi negara-negara emerging, antara lain (1) Kebijakan pelonggaran ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terus berlanjut; (2) Tercapai kesepakatan antara AS dengan Tiongkok untuk mengakhiri perang dagang; dan (3) Kebijakan moneter di negara-negara maju tetap akomodatif.

b. Moderat
Skenario dengan asumsi pertumbuhan ekonomi global diekspektasikan masih lemah. Dimana dukungan dari respon kebijakan dari negara-negara utama sangat diharapkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia.

c. Pesimis
Skenario dengan asumsi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila terdapat beberapa faktor berikut antara lain (1) Pelemahan industri manufaktur terus berlanjut dan berdampak terhadap sektor jasa; (2) Pemburukan terhadap kepercayaan bisnis yang berdampak terhadap penurunan harga aset; dan (3) Kebijakan fiskal dari negara-negara utama dunia tidak mampu menahan penurunan demand.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

a. Optimistic
This scenario assumes a strengthening economy in emerging countries. There are at least 3 factors that are thought to be able to lift the economies of emerging countries, including (1) the continuity of economic easing policy of the Chinese government 's economic; (2) the end of trade war noted by an agreement between the US and China; and (3) Monetary policy in developed countries remains accommodative.

b. Moderate
This scenario assumes that global economic growth is expected to remain weak. Where support from major countries marked by policy response is very much expected to support increase in world economic growth.

c. Pessimistic
This scenario assumes that there will be a possibility of a global economic recession. This possibility can occur if the following factors occurs: (1) The weakening of the manufacturing industry continues and impacts the service sector; (2) deterioration of business confidence which impacts on the decrease of asset prices; and (3) The fiscal policies of major countries in the world are unable to contain the decline in demand.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

ii. Penilaian secara kolektif

1) Kriteria kolektif
LPEI mengevaluasi penurunan nulai secara kolektif jika aset keuangan memiliki kesamaan dalam karakteristik risiko kredit aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. LPEI mengevaluasi pencadangan secara kolektif untuk aset keuangan memiliki hari tunggakan kurang dari 90 hari untuk dan bukan merupakan *non-performing financing*.

Secara garis besar, seluruh portofolio pembiayaan yang evaluasi penurunan nilainya tidak dihitung menggunakan metode individual, akan dievaluasi menggunakan metode kolektif.

2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

a. Probability of default (PD)
Probability of default mencerminkan estimasi kemungkinan suatu debitur gagal bayar pada rentang waktu tertentu.

PD dihitung untuk setiap *bucket* pada setiap segmen yang telah ditetapkan melalui kesamaan karakterikstik risiko kredit.

Dalam menghasilkan PD, LPEI menggunakan menggunakan 3 tahapan perhitungan, yaitu: (1) PD *Through the cycle*; (2) PD *forward looking;* dan (3) PD *point in time* melalui proses *scaling*.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

ii. Collective assessment

1) Collective criteria
LPEI evaluates impairment collectively if the financial assets share the same risk characteristics of the financial assets which allows a significant increase in credit risk to be identified in a timely manner. LPEI evaluates the financial assets collectively if the financial asset has past due obligation of less than 90 days and is not categorized as non-performing loan.

In general, all financing portfolios for which impairment evaluation is not calculated using the individual method will be evaluated using the collective method.

2) Impairment evaluation
The evaluation of collective impairment is based on the concepts of probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD) which take into account past, current, and future information.

a. Probability of default (PD)
Probability of default reflects the estimated probability of a debtor defaulting over a certain period of time.

PD is calculated for each bucket in each segment that reflects similarity in credit risk characteristic.

In calculating the PD, LPEI uses 3 calculation phases, namely: (1) PD Through the cycle; (2) PD forward looking; and (3) PD point in time through a scaling process.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

a. Probability of default (PD) (lanjutan)

Dalam 3 tahapan ini LPEI menggunakan metode vasicek, *roll rate transition matrix*, dan pendekatan lainnya yang lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan regulator.

Metode vasicek adalah metode penentuan PD menggunakan formula korelasi aset yang telah ditentukan oleh Basel Committee digunakan untuk aset keuangan yang termasuk dalam portofolio tresuri, diantaranya giro pada Bank Indonesia dan Bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, serta efek-efek.

Metode *roll rate transition matrix* menggunakan transisi historis bucket PD. *Bucket* PD yang digunakan dalam perhitungan historis adalah sebagai berikut:

1. *Bucket* 1: 0 *day past due* (DPD)
2. *Bucket* 2: 1 – 30 DPD
3. *Bucket* 3: 31 – 60 DPD
4. *Bucket* 4: 61 – 89 DPD
5. *Bucket* 5: > 89 DPD, atau restrukturisasi (*flag* restukturisasi), atau berada di kolektibilitas 3, atau 4, atau 5.

PD dilakukan *forward looking macroeconomic adjustment* untuk menentukan *forward looking PD* berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD LPEI.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

a. Probability of default (PD) (continued)

In these 3 stages, LPEI uses the vasicek method, roll rate transition matrix, and other approaches that is deemed more appropriat and is not contradictory with the regulation.

The vasicek method is a method of determining PD using the asset correlation formula that has been determined by the Basel Committee, is used for financial assets that are included in treasury portfolios, namely current accounts with Bank Indonesia and other Banks, placement with Bank Indonesia and other Banks, and securities.

The roll rate transition matrix method uses the historical transition bucket PD. PD buckets used in historical calculations are as follows:

1. *Bucket 1: 0 day past due (DPD)*
2. *Bucket 2: 1 – 30 DPD*
3. *Bucket 3: 31 – 60 DPD*
4. *Bucket 4: 61 – 89 DPD*
5. *Bucket 5: > 89 DPD, or restructured financial assets (restructuring flag), or has a collectability rating of 3, 4, or 5.*

A forward looking macroeconomic adjustment is made to the PD to determine the forward looking PD based on the historical relationshio between the macroeconomic and LPEI PD value

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

b. *Loss given default* (LGD)
Loss given default (LGD) merupakan estimasi kerugian dengan menghitung recovery yang didapatkan setelah debitur tersebut default. *Recovery date* dihitung mempertimbangkan *time value of money* dari pengembalian kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *time value of money* adalah *effective interest rate* (EIR).

LGD dihitung dengan mempertimbangkan *forward looking adjustment* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI. Jika tidak terdapat hubungan antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI, maka LPEI dapat tidak menggunakan *forward looking* dalam penentuan nilai LGD.

c. Exposure at default (EAD)
Dalam menentukan nilai EAD dari setiap debitur, LPEI mempertimbangkan *expected lifetime*. EAD menggambarkan *exposure* yang akan ditanggung LPEI jika terdapat debitur yang *default.*

Expected lifetime adalah pendekatan yang mempelajari *behaviour* dari tingkat penyelesaian fasilitas (lunas atau *write off*) debitur dibandingkan dengan jadwal penyelesaian fasilitas.

d. *Expected credit loss* (ECL)
Secara umum formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah perkalian antara PD, LGD, dan EAD.

Dalam menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai kolektif, LPEI menggunakan nilai outstanding aset keuangan dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

b. Loss given default (LGD)
Loss given default (LGD) is the estimated loss by calculating the recoverable amount through collateral after the debtor has defaulted. The recovery date is calculated by considering the time value of money from the repayment of the defaulted obligation. The interest rate used to calculate the time value of money is the effective interest rate (EIR).

LGD is calculated by considering forward looking adjustments based on the historical relationship between macroeconomics and the LPEI LGD value. If there is no macroeconomic relationship with the LPEI LGD value, then the LPEI may not use forward looking in determining the LGD value.

c. Exposure at default (EAD)
In determining the EAD value of each debtor, LPEI considers the expected lifetime. EAD describes the exposure that will be borne by LPEI if a debtor has defaulted.

The expected lifetime is an approach that studies the behavior of the debtor's facility settlement rate (paid off or writen off) compared to the facility completion schedule.

d. Expected credit loss (ECL)
In general, the formula for calculating ECL collectively is the multiplication of PD, LGD, and EAD.

In calculating the amount of collective impairment loss, LPEI uses the outstanding value of collectively assessed financial assets.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai masing-masing stage sesuai pada karakteristik *staging*. Metode perhitungan pada masing-masing stage adalah sebagai berikut:

- *Stage* 1: kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- *Stage* 2: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya
- *Stage* 3: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah porsi aset keuangan yang mungkin akan *default* dalam 12 bulan ke depan.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah ekspektasi kerugian yang merupakan hasil dari kejadian *default* selama umur aset keuangan atau sesuai dengan sisa tenor fasilitas.

Faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian adalah suku bunga efektif (EIR).

Probabilitas rata-rata tertimbang *(probability weighted)* dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan LPEI yang mencakup skenario optimis, normal, dan pesimis.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

The impairment loss is calculated based on the criteria of respective stages according to the criteria stated above. The calculation method for respective stages are as follows:

- *Stage 1: 12-months expected credit loss (ECL)*
- *Stage 2: Lifetime ECL*
- *Stage 3: Lifetime ECL*

The 12-months ECL is the portion of the financial asset possibly defaulting within the next 12 months.

The ECL lifetime is the expected credit loss that result from default events over the expected life of the financial asset or according to the remaining tenor of the facility.

The discount factor used to calculate ECL is effective interest rate (EIR).

The probability weighted calculation of ECL is determined by LPEI which consists of optimistic, normal, and pessimistic scenarios.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Total rata-rata tertimbang *(weighted)* atas estimasi *cashflow* dimaksud menjadi pengurang atas nilai tercatat aset keuangan yang dimana selisihnya akan menjadi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Estimasi dan asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan PSAK 71 diungkapkan dalam Catatan 3b.2.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dan individual dihitung berdasarkan PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" dan ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

i. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

The total weighted cash flow estimation is deducted from the financial asset's carrying amount, where the difference between the weighted average cashflow estimation to the carrying value of the financial asset will result in the impairment loss of the financial assets.

The estimates and assumptions used to calculate allowance for impairment losses on financing and receivables based on PSAK 71 are disclosed in Note 3b.2.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are assessed collectively and individually is calculated based on PSAK 102 "Murabahah Accounting" and ISAK 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

i. If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi (lanjutan)

ii. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suk bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit atau tagihan oleh LPEI dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Restructured Financial Assets(continued)

ii. If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, LPEI assesses whether the financial assets recorded at amortised cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or receivable by LPEI on terms that the LPEI would not otherwise consider, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets -* POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan komitmen pinjaman, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
ii. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

i. Financial assets measured at amortized cost and loan commitments, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
ii. Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, maka pembiayaan yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, LPEI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh LPEI untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Recoveries of written-off financial assets (continued)

When a financing is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such financing are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

Applicable before January 1, 2020

At each statement of financial position date, LPEI assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criteria used by LPEI to determine that there is objective evidence of impairment include:

a) significant financial difficulties of the issuer or obligor;
b) a breach of contract, such as a default or delinquency interest or principal payments;

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
   1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Sebelum 1 Januari 2020, LPEI menghitung cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan yang diberikan dan piutang atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dinilai secara individual dengan menggunakan metode diskonto arus kas *(discounted cash flows).* Sedangkan untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai secara kolektif, LPEI menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi *(Loss Given Default)* dan dengan memperhatikan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

d) the borrower might enter into bankruptcy or other financial reorganisation;

e) the disappearance of an active market for that financial asset; or
f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:

   1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

   2) national or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

Financial assets carried at amortised cost

Before January 1, 2020, LPEI calculates the allowance for impairment losses on financial assets classified as financing and receivables or held to maturity.

Allowance for impairment losses on impaired financial assets is assessed individually by using discounted cash flows method. While for allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, LPEI uses statistical method of the historical data such as the probability of default, time of recoveries, the amount of loss incurred (Loss Given Default), and by considering the management judgement on current economic and credit conditions.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Aset keuangan dievaluasi penurunan nilainya secara individual jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset tersebut.

LPEI menetapkan pembiayaan dan piutang yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1) Pembiayaan dan piutang yang secara individual memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2) Pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi.

LPEI mengukur jumlah kerugian sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto dengan tingkat bunga efektif instrumen saat pengakuan awal atau untuk aset keuangan dengan suku bunga variabel, tingkat bunga efektif terkini sesuai dengan yang ditentukan di kontrak.

Dalam menentukan arus kas masa depan yang akan didiskontokan, LPEI menggunakan *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1) Pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan dan piutang hanya bersumber dari agunan;
2) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Financial assets are individually assessed for impairment if objective evidence of impairment exists for that financial asset.

LPEI determines financing to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1) Financing and receivable which individually have objective evidence of impairment;
2) Restructured financing and receivable.

LPEI measures the amount of the loss as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the effective interest rate of the instrument at initial recognition or for financial assets with variable interest rate,at the current effective interest rate determined under the contract.

LPEI determines financing to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1) Financing and receivables are collateral dependent, i.e. if the source of financing and receivables repayment is made only from the collateral;
2) Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika LPEI menetapkan bahwa tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dievaluasi secara individual, maka aset tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

LPEI menetapkan pembiayaan dan piutang yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika tidak ditemukan adanya bukti objektif dan memiliki indikasi penurunan nilai namun tidak dibentuk cadangan karena setelah dilakukan penilaian, nilai tercatat kredit lebih rendah dari nilai kini arus kas di masa yang akan datang.

LPEI melakukan penilaian secara kolektif untuk pembiayaan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

Penilaian penurunan nilai secara kolektif dilakukan untuk mengidentifikasi kerugian pembiayaan yang diberikan yang telah terjadi namun belum teridentifikasi secara terpisah pada tanggal pelaporan. Penilaian penurunan nilai secara kolektif dilakukan terhadap pembiayaan yang diberikan yang telah dikelompokan ke dalam segmen berdasarkan karakteristik risiko yang sama dengan menggunakan metode aktuarial.

Cadangan penurunan nilai kolektif dibentuk dengan menentukan *Probability of Default* (PD), *Loss Identification Period* (LIP), dan *Loss Given Default* (LGD) berdasarkan data historis 5 (lima) tahun. LPEI menggunakan metode matriks transisi untuk membentuk PD berdasarkan historis perilaku kerugian historis. PD disesuaikan dengan LIP menggunakan *survival rate formula.*

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

If LPEI determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

LPEI determines financing and receivable to be evaluated for impairment through collective evaluation if there is no objective evidence and with indicators of impairment but no allowance was provided after assessment because the carrying amount of the loan is lower than the present value of the future cashflow.

LPEI performs collective assessment for corporate and middle loans with collectability classification as current and special mention.

Collective assesment of impairment is performed to identify financing losses that have been incurred but have not been separately identified at the reporting date. Collective assesment of impairment is performed on financing that are grouped into segments on the basis of similar risk characteristics using actuarial methods.

Collective impairment provision is established by determining the Probability of Default (PD), Loss Identification Period (LIP), and Loss Given Default (LGD) based on 5 (five) years historical data. LPEI uses the transition matrix method to establish the PD based on historical loss behavior. PD is adjusted by LIP using the survival rate formula.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pembiayaan yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, LPEI dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan *(collateralised financial asset)* mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective interest rate. If financing and receivables or held-to-maturity investments have a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

As a practical guideline, LPEI may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price, the calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial assets reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral.

Losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through the statement of profit or loss and other comprehensive income.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Investasi tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan LPEI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau yang berkepanjangan atas nilai wajar efek di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada tahun terjadinya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Available for sale investments

For financial assets classified as available-for-sale, LPEI assesses at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statement of profit or loss and other comprehensive income. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of profit or loss is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortization and the current fair value less any impairment loss previously recognized.

Impairment losses recognized in the statement of profit or loss on available-for-sale equity instruments should not be recovered through a reversal of a previously recognized impairment loss in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale investments increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of profit or loss, the impairment loss is reversed and recognized in the year it occurred.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Investasi tersedia untuk dijual (lanjutan)

Jika persyaratan pembiayaan yang diberikan, piutang atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika, pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Aset keuangan syariah
Untuk aset keuangan unit usaha Pembiayaan Syariah, kecuali transaksi murabahah, LPEI Syariah menerapkan PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Available for sale investments (continued)

If the terms of the financing, receivables or held-to- maturity investments are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

If, in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occured after the recognition of the impairment losses (i.e. upgrade of debtor's or issuer's collectibility credit rating), the impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account. The reversal amount of financial assets is recognized in the current year statement of profit loss.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operating income other than interest income.

Sharia financial assets
For the financial assets of the business unit that is engaged in Sharia Financing, except for Murabahah transactions, LPEI Sharia applies PMK No. 140/PMK.010/2009 on Supervising and Monitoring of LPEI and PMK No. 161/PMK.010/2009 on Changes on No. 140/PMK.010/2009 on Supervising and Monitoring of LPEI for determination of impairment loss.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan

LPEI menerapkan PSAK No, 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan LPEI agar aset dicatat tidak melebihi jumlah aset yang dapat dipulihkan.

PSAK ini juga yang menentukan kapan LPEI membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non- keuangan mungkin mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2014) tentang "Penurunan Nilai Aset". Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, LPEI membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Nilai yang dapat dipulihkan adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) setelah dikurangi besarnya biaya pelepasan dibandingkan dengan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan.

Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang *(time value of money)* dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on non-financial assets

LPEI applied SFAS No, 48 (Revised 2014), Impairment of Asset, that states the procedures applicable for LPEI so that the amount of assets recorded do not exceed the assets recoverable amount.

The SFAS also states that when LPEI is able to offset the loss from impairment and the disclosures needed.

At each reporting date, LPEI assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired in accordance with SFAS No. 48 (Revised 2014) "Impairment of Assets". When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, LPEI makes a formal estimate of recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the CGU to which it belongs. Where the carrying amount of an asset (or CGU) exceeds its recoverable amount, the asset (or CGU) is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use of assets, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assesments of the time value of money and the risks specific to the asset (or CGU).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada tahun yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

Penelaahan dilakukan pada setiap tanggal pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Bila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

Perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan telah dihitung sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0036/PDE/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan dan telah berdasarkan perhitungan aktuaris.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.m. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on non financial assets (continued)

An impairment loss is charged to operations on the year in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.

An assesment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The calculation of estimated guarantee claim was calculated based on Regulation of Director Executive No. 0036/PDE/12/2015 dated December 29, 2015 regarding the calculation of estimated guarantee claim and based on actuary calculation.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.n. Kontrak penjaminan

Kontrak penjaminan yang memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan yang tercantum dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dicatat sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi" atau kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Kontrak penjaminan yang tidak memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), dicatat berdasarkan PSAK No. 62 jika memenuhi definisi kontrak asuransi. Jika tidak, dicatat dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009).

Piutang yang timbul dari proses penyelesaian klaim dari kontrak garansi dengan menggunakan akta pengakuan hutang dicatat sebagai aset keuangan karena memenuhi definisi asset keuangan sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Liabilitas yang timbul dari kontrak penjaminan keuangan diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak yang tidak berelasi dalam suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang berdiri sendiri, nilai wajarnya pada saat dimulainya transaksi kemungkinan sama dengan guarantee fee yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Setelah pengakuan awal, jumlah di dalam liabilitas kontrak jaminan keuangan diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah yang diakui provisi dan jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi amortisasi kumulatif (jika sesuai).

Liabilitas yang timbul atas suatu klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan akan dicatat sebagai utang klaim. Pendapatan fee kontrak penjaminan keuangan diakui sebagai pendapatan selama periode penjaminan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.n. Guarantee contracts

Guarantee contracts that meets the definition of financial guarantee contracts laid out in SFAS No. 55 (Revised 2014) is accounted for either as insurance contract based on SFAS No. 62, "Insurance Contract" or as financial guarantee contract based on SFAS No. 55 (Revised 2014).

Guarantee contracts that do not meet the definition of financial guarantee contracts under SFAS No. 55 (Revised 2014), is accounted for under SFAS No. 62 if it meets the definition of an insurance contract. Otherwise, they are accounted for under SFAS No. 57 (Revised 2009).

Receivables resulting from guarantee contracts claim which is settled with debentures is accounted for under SFAS No. 55 (Revised 2014).

Liabilities arising from financial guarantee contracts are recognized at fair value at initial recognition. If the financial guarantee contract was issued to an unrelated party in a stand-alone arm's length transaction, its fair value at inception is likely to equal the premium received, unless there is evidence to the contrary. After initial recognition, the amount of financial guarantee contract liabilities are measured at the higher of the provision amount recognized and amount initially recognized less cumulative amortization (when appropriate).

Liabilities incurred on claims approved but have not been paid are recorded as claims payable. Guarantee fees from financial guarantee contracts are recognized as revenue over the period of the guarantee.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.o. Piutang asuransi, liabilitas asuransi dan utang asuransi

Piutang asuransi merupakan tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker dan perusahaan asuransi *(ceding company)* pada tanggal pelaporan keuangan.

Liabilitas asuransi meliputi estimasi klaim dan premi belum merupakan pendapatan serta pendapatan premi ditangguhkan. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang dilaporkan masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).

Cadangan yang terkait dengan klaim dilaporkan masih dalam proses penyelesaian menunjukkan biaya akhir atas klaim yang dilaporkan, namun belum disetujui pada tanggal pelaporan.

IBNR adalah bagian dari klaim dimana kejadian yang diasuransikan telah terjadi namun asuradur belum memperoleh pemberitahuan atas klaim. Walaupun asuradur belum diberitahu mengenai klaim tersebut sebelum akhir tahun buku, pencadangan biaya atas klaim tersebut diperlukan untuk memenuhi konsep kehati-hatian dan konsep penandingan *(matching concept).*

Utang asuransi terdiri dari utang premi reasuransi, utang komisi, dan utang klaim.

Utang premi termasuk diantaranya adalah:

- Kewajiban pembayaran premi kepada reasuradur, sebagai akibat adanya transaksi reasuransi yang dilakukan dengan pihak reasuradur.
- Kewajiban pembayaran premi kepada koasuransi.

Utang klaim merupakan klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada tertanggung dari transaksi asuransi langsung atau koasuransi.

Utang klaim diakui saat klaim disetujui untuk dibayar.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.o. Insurance receivables, insurance liabilities and insurance payables

Insurance receivables represent premium charges due from the insured/agent/broker and insurer (ceding company) as of the reporting date.

Insurance liabilities include estimated claims and unearned premiums and deferred premium income. Estimated claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled including claims incurred but not reported (IBNR).

Reserves associated with claims reported but have not been settled represents the ultimate cost of claims that were reported, but is yet to be approved as of the reporting date.

IBNR is the element of claims where the insured event has occurred but where the insurer has yet to be notified of a claim. Although the insurer has not yet been notified of these claims before the end of the financial year, the cost of these claims are provided to comply with both the prudence and the matching concept.

Insurance payables consist of reinsurance premium payables, commission payables, and claims payables.

Premium payables includes:

- *Premium payment obligations to the reinsurer, as a result of reinsurance transactions with reinsurers.*
- *Premium payment obligations due to coinsurers.*

Claims payable is represents claims agreed but have not been paid to the insured arising from either direct insurance or coinsurance.

Claims payable is recognized when the claim is approved for payment.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.o. Piutang asuransi. liabilitas asuransi dan utang asuransi (lanjutan)

Utang klaim dihentikan pengakuannya saat kewajiban telah berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

2.p. Aset reasuransi

Aset reasuransi adalah nilai hak kontraktual neto cedant dalam perjanjian reasuransi. Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, porsi reasuransi atas liabilitas premi asuransi, dan porsi reasuransi atas klaim yang disetujui untuk dibayar (piutang reasuransi). Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan asuransi yang mendasari sesuai dengan jangka waktu kontrak reasuransi.

Setiap tanggal pelaporan, LPEI mengevaluasi apakah aset reasuransi mengalami penurunan nilai. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti obyektif yang menunjukkan adanya kemungkinan besar LPEI tidak mendapatkan jumlah yang tertagih kepada reasuradur. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.q. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Yang berlaku setelah 1 Januari 2020

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.o. Insurance receivables, insurance liabilities and insurance payables (continued)

Claims payable is derecognized when the obligation expires, is discharged or cancelled.

2.p. Reinsurance assets

Reinsurance assets is a cedant's net contractual rights under a reinsurance contract. Reinsurance assets is consist of estimated reinsurance reimbursement for claims that are still in the process of completion, estimated reinsurance reimbursement for claims incurred but not yet reported, the portion of reinsurance premiums on liability insurance and reinsurance portion of claims approved for payment (reinsurance receivables). Reinsurance assets are measured consistently with the amounts associated with the underlying insurance in accordance with the terms of the reinsurance contract.

At each reporting date, LPEI assesses whether reinsurance assets are impaired. Reinsurance assets are impaired if objective evidence is available to suggest that it is probable that LPEI will not be able to collect the amounts due from reinsurers. The impairment loss is recognized as an expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.q. Acceptances receivable and payable

Applicable after January 1, 2020

Acceptances receivable and payable are stated at amortised cost. Acceptances receivable is stated net of allowance for impairment losses.

Applicable before January 1, 2020

Acceptances receivable is classified as financing and receivables. Acceptances payable is classified as other financial liabilities stated at amortised cost.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.r. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

LPEI menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015). "Aset Tetap". Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto, dan akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Harga perolehan awal atas aset tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya langsung yang dapat diatribusikan untuk membuat aset dalam kondisi siap pakai dan berlokasi di tempat yang digunakan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu dikapitalisasi sebagai biaya penggantian atas jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

LPEI menerapkan model biaya untuk aset tetap.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.r. Fixed assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability

LPEI implemented SFAS No. 16 (Improvement 2015) "Property, Plant and Equipment". The improvement clarifies that in SFAS No. 16, the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross and net carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revaluated amounts.

The initial cost of premises and equipment consists of its purchase price and any directly attributable costs of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss.

When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon occurrence.

LPEI adopts the cost model for its premises and equipment.

At each statement of financial position date, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.r. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut.

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Gedung	20	5%	*United States Dollars*
Peralatan dan perlengkapan kantor	5	20%	*Euro*
Kendaraan bermotor	5	20%	*Singapore Dollars*

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (lessor) sesuai PSAK 30 Sewa. Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.r. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability (continued)

Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows.

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use

When premises and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive infcome

Right-of-use-Assets and Lease Liabilities

SFAS 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognise a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.r. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Dampak penerapan PSAK 73 adalah LPEI sebagai penyewa atas kontrak sewa properti dan kendaraan. LPEI telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

Kewajiban sewa yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal 1 Januari 2020, LPEI mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa LPEI akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.r. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability (continued)

Right-of-use-Assets and Lease Liabilities (continued)

The impact of SFAS 73 at LPEI is where LPEI as a lessee in property and vehicle lease contracts. LPEI has elected the simplified approach of transition and did not restate comparative information. Therefore, the comparative information continues to be reported under PSAK 30, "Leases".

Leases policy applicable as of January 1, 2020

On January 1, 2020, LPEI recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received. Rights of use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

Finance expense is recorded in the statement of income. Leased assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that LPEI will obtain ownership by the end of the lease term.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.r. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Kebijakan terkait Sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) tentang "Sewa", penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, LPEI mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan baian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa.

Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Bank Mandiri akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.r. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability (continued)

Lease-related policies before January 1, 2020

Based on PSAK No. No. 30 (Revised 2011) regarding "Lease", determines whether an agreement is a lease agreement or an agreement containing a lease based on the substance of the agreement at the inception date of the lease and whether the fulfillment of the agreement depends on the use of an asset and the agreement gives a right to use the asset. According to this PSAK, leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Further, a lease is classified as an operating lease, if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset.

Under a finance lease, LPEI recognizes assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at the beginning of the lease term, at the fair value of the leased asset or at the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Lease payments are separated between the portion which represents the finance expense and the part which represents the settlement of the lease obligation.

Finance charges are allocated to each period during the lease term, resulting in a constant periodic interest rate on the balance of the liability. Finance charges are recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter period between the useful life of the leased assets and the lease term, if there is no certainty that Bank Mandiri will acquire ownership rights at the end of the lease term.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.r. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Kebijakan terkait Sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Dalam sewa operasi, LPEI mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Jika suatu perjanjian sewa mengandung elemen tanah dan bangunan, maka LPEI menilai klasifikasi dari setiap elemen tersebut sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah.

2.s. Aset yang diambil alih

Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI dan diselesaikan melalui penjualan. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan. LPEI memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual AYDA untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

AYDA diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (net realisable value), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

LPEI membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas AYDA berdasarkan kualitas atas aset, yaitu:

1) 15% (lima belas persen) untuk kualitas kurang lancar, yaitu dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
2) 50% (lima puluh persen) untuk kualitas aset diragukan, yaitu dimiliki lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
3) 100% untuk kualitas aset macet, yaitu dimiliki lebih dari 5 tahun.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.r. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability (continued)

Lease-related policies before January 1, 2020 (continued)

Under an operating lease, LPEI recognizes lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

If a lease agreement contains land and building elements, LPEI assesses the classification of each element as finance lease or operating lease separately.

2.s. Foreclosed Assets

Foreclosed assets represent assets acquired by LPEI, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtors or based on debtors' approval to sell the collateral where the debtors could not fulfill their obligations to LPEI and is settled through a sale. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans. LPEI has policy to sell foreclosed assets to settle debtors' liabilities.

Foreclosed assets are recognised at their net realisable value. Net realisable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets.

The allowance for impairment made on foreclosed assets is based on its asset quality:

1) 15% (fifteen percent) for substandard assets, which are owned for more than 1 (one) year up to 3 (three) years.
2) 50% (fifty percent) for doubtful assets, which are owned for more than 3 (three) years up to 5 (five) years.
3) 100% (one hundred percent) for which are owned for more than 5 (five) years.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.s. Aset yang diambil alih (lanjutan)

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.

2.t. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

2.u. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas LPEI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

2.v. Efek-efek utang yang diterbitkan

Efek-efek utang yang diterbitkan terdiri dari surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh LPEI berupa obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi yang diterbitkan disajikan sebesar nilai tercatat dengan biaya perolehan yang belum diamortisasi.

Beban yang berkaitan dengan penerbitan obligasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

2.w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.s. Foreclosed Assets (continued)

Maintenance costs of foreclosed assets subsequent to the foreclosure or acquisition of the assets are charged as current year profit/loss as incurred. Gains or losses from sale of foreclosed assets are charged as current period profit/loss as incurred.

2.t. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized over its benefited periods using the straight-line method.

2.u. Current liabilities

Current liabilities represent LPEI's obligations to outside parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are recorded at amortized cost. This account is classified as other financial liabilities at amortized cost

2.v. Debt securities issued

Debt securities issued consist of obligations of LPEI in the form of bonds traded in the capital market. Bonds are stated at their carrying value, net of unamortized cost.

Expenses related to bonds issuance are recognized as discount, directly deducted from the net proceeds of the bonds issuance and amortized over the term of the bonds using the effective interest method.

2.w. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received from banks or other parties with repayment obligation based on the borrowing agreement.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.w. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2.x. Provisi

LPEI menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Provisi diakui jika LPEI memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

2.y. Pendapatan dan beban bunga

Yang berlaku setelah 1 Januari 2020

Sebelum terjadinya penurunan nilai (stage 1 & 2), pendapatan bunga dihitung menggunakan metode EIR yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.w. Fund borrowings (continued)

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2.x. Provision

LPEI adopted SFAS No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets".

Provisions are recognized when LPEI has current liability (both legal or constructive) as a result of past events with high profitability of settlement by outflow of resources with economic benefits and a reliable estimate of the amount of liability can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If there is no probable outflow of resources to settle these liabilities, provision is not recognized.

2.y. Interest income and expense

Applicable after January 1, 2020

Prior to impairment (stage 1 & 2), interest income is calculated using the EIR method, namely by applying an effective interest rate on the gross carrying amount of financial assets except for financial assets purchased or originating from credit impaired financial assets.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan niai (*stage 3* atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai untuk:

a. Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk (POCI)
   Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan duku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit *(risk adjusted effective interest rate)* atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengauan awal.

b. *Stage 3*
   Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan, yaitu nilai yang telah dikurangi kerugian akibat penurunan nilai.

   Pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai atau yang disebut dengan *unwinding* interest.

Yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui sejauh itu memiliki kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir kepada LPEI dan pendapatan dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dari instrumen dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dihitung menggunakan metode bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan. Keuntungan atau kerugian instrumen dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga dari instrumen dengan klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebagai *fee-based*.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.y. Interest income and expense (continued)

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment for:

a. Financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets (POCI)
   For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate that is adjusted to credit risk (risk adjusted effective interest rate) on the amortized cost of financial assets since initial disclosure.

b. Stage 3
   For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of financial assets in the reporting period, namely the value that has been reduced by losses due to impairment.

   Interest income is subsequently recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in measuring impairment losses or what is known as unwinding interest.

Applicable before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to LPEI and the revenue can be reliably measured.

Interest income from instruments classified as amortized cost is recorded in the income statement. Interest income from financial instruments is calculated using the effective interest method on the gross carrying amount of financial assets. Gains or losses from instruments classified as fair value through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income. Interest income from instruments classified as fair value through profit or loss is recorded as fee-based.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur seluruh liabilitas keuangan dengan klasifikasi *amortized cost* sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif:

a) Jumlah perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang diatribusikan oleh perubahan risiko kredit dari liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, dan
b) Jumlah sisa perubahan nilai wajar liabilitas tersebut disajikan dalam laba rugi.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai

Beban emisi obligasi, yang meliputi biaya notaris, akuntan publik, underwriter, konsultan hukum, penilai dan biaya lain diamortisasikan sesuai jangka waktu obligasi menggunakan suku bunga efektif.

Berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 55, semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan *EIR*, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk *fee*/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *EIR*.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.y. Interest income and expense (continued)

After initial recognition, LPEI measures all financial liabilities by amortized cost classification at amortized cost using the effective interest method:

a) The amount of change in the fair value of financial liabilities attributable to changes in credit risk of the liability is presented in other comprehensive income, and

b) The remaining amount of the change in the fair value of the liability is presented in profit or loss.

If a financial asset or group of similar financial assets has diminished its value as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Bond issuance costs, including notary fees, public accountants, underwriters, legal consultants, appraisers and other costs are amortized according to term of the bonds using effective interest method.

Under both SFAS 71 and SFAS 55, for all financial instruments measured at amortized cost, financial assets and liabilities classified as fair value through other comprehensive income, interest income and expenses are recognized using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the EIR.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika LPEI merevisi estimasi pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan *EIR* awal dan perubahan nilai tercatat dibukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada tahun berikutnya LPEI meningkatkan estimasi pemulihan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian *EIR* sejak tanggal perubahan estimasi.

Pada saat nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan akibat kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga tetap diakui pada tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa mendatang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan yang diberikan dan aset keuangan lainnya (tidak termasuk efek-efek) diklasifikasikan sebagai *non-performing* jika telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan atau macet. Sedangkan efek-efek diklasifikasikan sebagai *non-performing,* jika penerbit efek mengalami wanprestasi dalam memenuhi pembayaran bunga dan/atau pokok atau memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi.

2.z. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan piutang, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu. diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini mencakup provisi dan komisi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.y. Interest income and expense (continued)

The carrying amount of the financial asset or liability is adjusted if LPEI revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated using the original EIR and the change in carrying amount is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. However, for a reclassified financial asset for which LPEI subsequently increases its estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the EIR from the date of the change in estimate.

Once the recorded value of a financial asset or a group of similar financial assets has been reduced due to an impairment loss, interest income continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

Financing and other financial assets (excluding securities) are considered as non-performing when they are classifed as substandard, doubtful, or loss. While securities are categorized as non-performing when the issuer of securities defaults on its interest and/or principal payments or, if they are rated at least 1 (one) level below investment grade.

2.z. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to financing and receivables activities, or fees and commissions income which relate to a specific period are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include provision and commission.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.z. Pendapatan provisi dan komisi (lanjutan)

Pendapatan atau komponen pendapatan yang terkait dengan kinerja tertentu diakui setelah memenuhi kriteria yang sesuai dan diklasifikasi sebagai bagian dari provisi dan komisi dari transaksi selain pembiayaan yang diberikan dan piutang dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini meliputi pendapatan jasa penjaminan emisi, pendapatan *arranger, upfront fees* dan pendapatan komitmen.

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian asset atau liabilitas keuangan diakui sebagai bagian/(pengurang) atau penambah dari biaya perolehan asset atau liabilitas keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban dengan cara diamortisasi berdasarkan *EIR* sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya termasuk provisi yang terkait dengan kegiatan perkreditan, kegiatan ekspor-impor, provisi sebagai pengatur sindikasi dan provisi atas jasa diakui pada saat jasa tersebut dilakukan.

Beban provisi dan komisi lainnya sehubungan dengan transaksi antar bank diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima.

Saldo beban yang ditangguhkan dan pendapatan komisi atas pembiayaan yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan dalam penyelesaian.

Pendapatan asuransi lainnya
LPEI mengakui pendapatan asuransi seperti komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dan pendapatan lainnya sebagai pendapatan asuransi lainnya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.z. Fees and commission income (continued)

Fees or component of fees that are linked to a certain performance are recognized after fulfilling the corresponding criteria and classified as part of fees and commissions from non-financing and receivables transactions in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include underwriting fees, arranger fees, upfront fees and commitment fees.

Fees and commissions that have material amount directly related with the acquisition of financial assets or liabilities are recognized as part/(deduction) or addition of acquisition cost of the related financial assets or liabilities and will be recognized as income or expense and amortized using the EIR during the expected life of the financial assets or liabilities.

Other fees and commission income, including credit related fees, export-import related fees, syndication lead arranger fees, and provision for services are recognized when the related services are performed.

Other fees and commission expense related mainly to inter-bank transaction fees are expensed as the service are received.

The outstanding balances of deferred fees and commission income on financing receivable terminated or settled prior to maturity are recognized as income on settlement.

Other insurance income
LPEI recognized insurance income such as commission received from reinsurance transaction and other income as other insurance income.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.aa. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan usaha Syariah merupakan pendapatan marjin murabahah, dan pembiayaan musyarakah serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan marjin murabahah diakui menggunakan metode suku bunga efektif dengan mempertimbangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk debitur tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah sebagai “shahibul maal” dan LPEI sebagai “mudharib” sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana LPEI, seluruhnya menjadi milik LPEI.

2.ab. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi Pendapatan premi

Premi yang diterima dari kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pada bagian pemilikan premi LPEI.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.aa. Sharia profit sharing income and bonus expenses

Sharia income represents margin income from murabahah, and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on an accrual basis except for income derived from profit sharing. Sharia bonus expenses consist of bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Murabahah margin is recognized using the effective interest rate method taking into consideration directly attributable transaction costs.

Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the depositors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.

The total available margin and profit sharing are distributed to debtors as “shahibul maal” (owner of funds) and to LPEI as “mudharib” (fund manager) in accordance with a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use LPEI’s funds belong to LPEI as a whole.

2.ab. Insurance revenue and expense recognition Premium income

Premium received from insurance contracts are recognized as income during the policy period (contracts) in proportion to the insurance coverage provided. Premiums from coinsurance policy is recognized based on LPEI’s proportionate share of the premium.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.ab. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi Pendapatan premi (lanjutan)

Premi yang diterima dari kontrak jangka pendek asuransi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan secara individual ke masa pertanggungan.

Bagian tahun berjalan atas premi dari kontrak jangka panjang asuransi dicatat dengan cara yang sama seperti yang diterima untuk jangka pendek. Bagian premi tahun-tahun berikutnya ditangguhkan.

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah proporsi dari premi dalam satu tahun yang berhubungan dengan periode risiko setelah tanggal pelaporan. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara pro rata harian. Proporsi yang timbul dari periode berikutnya ditangguhkan sebagai cadangan premi yang belum merupakan pendapatan.

LPEI mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak reasuransi yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan.

Pendapatan premi menunjukkan jumlah premi bruto dan premi reasuransi. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

Beban klaim
Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim penjaminan, klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim, Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.ab. Insurance revenue and expense recognition Premium income (continued)

Premium received from short-term insurance contracts are deferred and recognized as income on an individual basis over the coverage period.

Current portion of premium received from long-term insurance contracts are accounted for in the same manner as those received for short-term insurance contract. Portion for following years is deferred.

Unearned premium are those proportions of premiums written in a year relate to periods of risk after the reporting date. Unearned premiums are calculated on a daily pro rata basis. The proportion attributable to subsequent periods is deferred as a provision for unearned premiums.

LPEI reinsures part of its total accepted risk with other insurance and reinsurance companies. Premiums paid or share in premium on prospective reinsurance contracts are recognized over the remaining period of the reinsurance contracts based on the coverage provided.

Premium income represents gross premium and reinsurance premiums. Reinsurance premium is presented as deduction from gross premium.

Claim expenses
Claims consist of settled claims, guarantee claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when the liabilities to cover claims have been incurred. Subrogated rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.ab. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi Pendapatan premi (lanjutan)

Beban klaim (lanjutan)

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim) ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim masih dalam proses di tanggal pelaporan, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan estimasi klaim diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim adalah selisih antara estimasi klaim tahun berjalan dan tahun lalu.

Beban klaim menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan (penurunan) estimasi klaim. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Estimasi klaim yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari satu tahun setelah akhir periode harus memperhitungkan pengaruh nilai waktu uang. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim sebagai hasil dari proses penelaahan lebih lanjut diakui berdasarkan perbedaan antara periode berjalan dan periode kewajiban klaim sebelumnya.

2.ac. Program dana pensiun dan imbalan kerja

LPEI menerapkan PSAK No. 24 (Amandemen 2016), “Imbalan Kerja”. PSAK ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan).

Amandemen ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.ab. Insurance revenue and expense recognition Premium income (continued)

Claim expenses (continued)

Claims in process (estimated claims) are computed based on estimated loss from claims that are still in process at reporting date, including claims incurred but not yet reported. Changes in estimated claims are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income at the time of change. Increase (decrease) in estimated claims represents the difference between the balance of estimated claims in the current year and prior year.

Claim expenses represent gross claims, reinsurance claims and increase (decrease) in estimated claims. Reinsurance claims are presented as deduction from gross claims.

Estimated claims that are expected to be settled for more than one year after the end of the period must take into account the effect of time value of money. Changes in the estimated claims liabilities as a result of further review process are recognized based on the the difference between the current period and the prior period claims liability.

2.ac. Pension plan and employee benefits

LPEI adopted SFAS No. 24 (2016 Amendments), “Employee Benefits”. This SFAS provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, gain or loss on settlement, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs because they use the latest actuarial assumptions (previously using acturial assumptions at the beginning of the annual reporting period).

These amendments clarify how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in surplus which causes the impact of the upper limit of assets to change.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.ac. Program dana pensiun dan imbalan kerja (lanjutan)

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetap. Kontribusi LPEI adalah sebesar 6%, sedangkan kontribusi pegawai adalah sebesar 4% yang dihitung berdasarkan penghasilan dasar bulanan pegawai. Kontribusi LPEI terhadap dana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

LPEI diwajibkan menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh pegawai pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui secara langsung dalam laporan posisi keuangan melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode dimana mereka terjadi. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laporan laba rugi pada periode berikutnya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.ac. Pension plan and employee benefits (continued)

LPEI has a defined contribution retirement plan covering all of its permanent employees. LPEI and the employees' contributions are computed at 6% and 4%, respectively, of the employees' monthly basic salaries, LPEI's contributions to the retirement plan are recognized as expense when incurred.

LPEI is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, the pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

A defined benefit pension plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement, usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognized in the statement of financial position is the defined benefit obligation less the fair value of the plan assets. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of a defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be fully paid and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses are recognized immediately in the statement of financial position through other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.ac. Program dana pensiun dan imbalan kerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui dalam laporan laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:
a. ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
b. ketika LPEI mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana LPEI menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.ac. Pension plan and employee benefits (continued)

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:
a. the date of the plan amendment of curtailment; and
b. the date that LPEI recognizes restructuring-related costs.

Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

Termination costs and curtailment gain or loss are recognized in the period when LPEI is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan.

2.ad. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

LPEI menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010). "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing". mengatur bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan LPEI dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs Spot Reuters pada pukul 16.00 WIB. Reuters adalah salah satu sumber kurs penutupan yang diakui oleh Bank Indonesia dan PSAK.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.ad. Foreign currency transactions and balances

LPEI applied SFAS No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of LPEI and translate financial statements into a presentation currency.

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time of the transaction. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah at the Reuters' spot exchange rates at 04.00 PM (West Indonesian local time). Reuters is one of the recognized sources of closing rate by Bank of Indonesia and SFAS.

As of December 31, 2020 and 2019, the exchange rates used are as follows:

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
Dolar Amerika Serikat	14.050	13.882	*United States Dollars*
Euro Eropa	17.234	15.571	*European Euro*
100 Yen Jepang	13.597	12.782	*100 Japanese Yen*
Dolar Singapura	10.606	10.315	*Singapore Dollars*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.ae. Pajak Penghasilan

LPEI menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan", yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK revisi ini juga mensyaratkan LPEI untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan beserta bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang dikenakan pajak final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau liabilitas tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.ae. Income Tax

LPEI applied SFAS No. 46 (Revised 2014) "Income Taxes", which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statement. The revised SFAS also prescribes LPEI to present the underpayment/ overpayment of income tax, including its interest/penalty, if any, as part of "Current Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year and calculated using the appropriate tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases, except those differences that are subject to final tax. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences while deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are credited or charged to current year statement of profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.ae. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode posisi keuangan, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan antara aset dan liabilitas menurut pajak dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

2.af. Informasi segmen

LPEI menggunakan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi yang mengklarifikasi mengenai pertimbangan dalam yang dibuat oleh manajemen dalam penerapan kriteria agregasi. PSAK No. 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat mengenai segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi lalu pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana LPEI terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana LPEI beroperasi.

LPEI menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari LPEI:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.ae. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Deferred income tax is calculated using the financial position method, on all temporary differences at the statement of financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

2.af. Segment reporting

LPEI applies SFAS No. 5 (Improvement 2015): Operating Segment which clarifies about the judgments made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of SFAS No. 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics and disclosure of reconcilitation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities.

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which LPEI is involved in and the economic environment where LPEI operates.

LPEI determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

An operating segment is a component of LPEI:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.af. Informasi segmen (lanjutan)

b) hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional perusahaan untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

LPEI hanya beroperasi dalam usaha perbankan konvensional dan syariah dan hanya beroperasi di Indonesia tanpa cabang, sehingga LPEI tidak menyajikan informasi pelaporan segmen berdasarkan wilayah geografis operasi.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan

1. Usaha yang berkelanjutan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi LPEI. manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi paling signifikan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan LPEI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa LPEI memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.af. Segment reporting (continued)

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operatingdecision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available.

LPEI only operates in the the business of conventional banking and sharia and only operates in Indonesia without any branches. Therefore, LPEI cannot present reporting information segment by the operation geographical area.

Income, costs, outcome, assets and liabilities segment include ítems that directly attributable to a certain segment and also matters that can be allocated with the basis appropriate to specified segment.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions

a. Significant accounting judgments

1. Going concern

In the process of implementing LPEI's accounting policies, management has exercised judgments and estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant use of judgments and estimates are as follows:

The management has assessed LPEI's ability to continue as a going concern and believes that LPEI has the resources to continue its business in the future. In addition, management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to LPEI's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Nilai wajar atas instrumen keuangan
Dalam rangka penerapan PSAK No.68, "Pengukuran Nilai Wajar", LPEI menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar berikut:

- Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;
- Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakaninput selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan
- Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan input yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Bila nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tercatat pada posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistic.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang dapat diobservasi tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivativ dan tingkat diskonto jangka panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

2. Fair value of financial instruments
Upon the adoption of SFAS No. 68, LPEI presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

- *Level 1 - the fair value is based quoted prices (unadjusted) in active markets;*
- *Level 2 - the fair value uses inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and*
- *Level 3 - the fair value uses inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

3. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

LPEI menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 (Revisi 2017) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi LPEI seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

4. Klasifikasi produk asuransi dan penjaminan

Produk LPEI berupa "Penjaminan Indonesia Eximbank" dan "Penjaminan Kepabeanan" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 57 (Revisi 2009) karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK No. 62 dikarenakan tidak terdapat risiko asuransi yang signifikan.

"Penjaminan Proteksi Piutang Dagang" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 28 (Revisi 2012) dan PSAK No. 62 karena penjaminan ini memenuhi kriteria pengakuan kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan LPEI telah mencatat produk tersebut sebagai kontrak asuransi dan memiliki intensi meneruskan perlakuan tersebut.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

3. Classification of financial assets and liabilities

LPEI specifies certain classification of assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the SFAS No. 71 (Revised 2017) is fulfilled. Therefore, financial assets and liabilities have been recognized in accordance with the accounting policies of LPEI stated in Note 2c.

4. Classification of insurance products and guarantees

LPEI's "Indonesia Eximbank Guarantee" and "Customs Guarantee" products are accounted for in accordance with SFAS No. 57 (Revised 2009) as they are not financial guarantee contract under SFAS No. 55 (Revised 2014) and do not qualify as insurance contract under SFAS No. 62 due to the lack of significant insurance risk.

Accounts Receivable Protection Guarantee" is recorded in accordance with SFAS No. 28 (Revised 2012) and SFAS No. 62 as it meets the recognition criteria of a financial guarantee contract under SFAS No. 55 (Revised 2014) and LPEI has recorded the product as insurance contract and intended to continue such accounting treatment.

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

5. Penilaian mata uang fungsional

Manajemen menggunakan pertimbangan-nya untuk menentukan mata uang fungsional LPEI yang dapat merepresentasikan secara benar efek ekonomi dari transaksi yang mendasarinya, peristiwa dan kondisi yang relevan dengan LPEI.

Dalam pembuatan pertimbangan tersebut, LPEI memperhatikan hal-hal berikut:

a. mata uang yang sangat mempengaruhi harga jual untuk instrumen keuangan dan jasa-jasa (ini seringkali menjadi mata uang yang digunakan, yaitu mata uang dimana harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa didenominasi dan direalisasikan);
b. mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
c. mata uang dimana penerimaan dari kegiatan operasi biasanya didapatkan.

6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan

Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan LPEI dalam menyusun laporan keuangan dan berdampak pada penerapan PSAK 71-instrumen keuangan.

Mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 serta panduan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia tentang dampak pandemi Covid-19 maka LPEI:

- Mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

5. Assesment of functional currency

The management uses its judgment to determine LPEI's functional currency which faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to LPEI.

In making this judgment, LPEI considers the following:

a. the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
b. the currency in which funds from financing activities are generated; and
c. the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

6. Impact of Covid-19 Pandemic on the adoption of SFAS 71 Financial Instruments

The Global Corona Virus pandemic (Covid-19) raises global and domestic economic uncertainties and significantly influences LPEI's considerations in preparing financial statements and has an impact on the adoption of SFAS 71-financial instruments.

Referring to POJK No. 11/POJK.03/2020 and guidance of the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Accountants Association about the impact of the pandemic Covid-19, LPEI:

- *Identifying debtors who have been performing well but have decreased their performance due to Covid-19.*

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.
- Melakukan identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi atau dampak Covid-19 berakhir.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. LPEI mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali LPEI. Perubahan tersebut dicerminkan dalam estimasi dan asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

6. Impact of Covid-19 Pandemic on the adoption of SFAS 71 Financial Instruments (continued)

- *Implementing a restructuring scheme refers to the results of the assessment which are accurately adjusted to the debtor profile with a period of maximum of 1 (one) year and is only given to debtors who are truly affected by Covid-19.*
- *Identifying and monitoring on an ongoing basis as well as being prepared to continue forming the CKPN if debtors who have obtained the restructuring facility perform well initially, are expected to decrease due to covid-19 impact, and cannot recover after the restructuring or Covid-19 damage ends.*

b. Estimates and assumptions

Future main assumption and main source of other uncertainty estimates on the reporting date which might have significant risk of material adjustment to the recorded asset and liabilities for the coming period are disclosed below. LPEI based its assumptions and estimates on the provided parameter during the preparation of financial statements. The assumptions and situations regarding the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of LPEI. Such changes are reflected in the estimates and assumptions when they occur.

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

1. Metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap

Untuk kepentingan perhitungan penyusutan. nilai sisa untuk semua aset tetap, kecuali ada catatan lain untuk aset tertentu, harus lebih besar dari Rp1 (nilai penuh). LPEI melakukan peninjauan kembali atas nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan yang ditetapkan untuk setiap aset tetap minimum pada setiap akhir tahun buku. Taksiran masa manfaat dari aset tetap diungkapkan dalam Catatan 2r.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis untuk gedung dan peralatan dan perabotan, masing-masing adalah 20 tahun dan 5 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana LPEI menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 13 untuk nilai buku atas aset tetap LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2. Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2m.

Komponen cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu dalam total cadangan kerugian penurunan nilai berlaku pada tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari debitur dan nilai bersih yang dapat direalisasi

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

1. Depreciation method and useful lives of premises and equipment

For fixed asset calculations, residual amount for all fixed assets, except when there is disclosure for the specified asset, must be greater than Rp1 (full amount). LPEI reassess the residual value, useful life, and method of depreciation used at least at the end of each year. The estimated useful lives of premises and equipment are disclosed in Note 2r.

Fixed asset are depreciated using the straight-line method based on the economic useful life. Management estimates that the useful life of building and premises and equipment, are 20 years and 5 years, respectively.

This is the expected average useful life in the industry where LPEI operates. Changes in the level of usage and technology development may affect the economic useful life and also the residual value of the assets and therefore, costs may be revised. Refer to Note 13 for book value of LPEI's premises and equipment as of December 31, 2020 and 2019.

2. Allowance for impairment losses on financing and receivables

Financial assets accounted for at amortised cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2m.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to claims evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral under

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2. Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang (lanjutan)

dari agunan yang diterima dengan lebih dari satu scenario. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kinerjanya dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Departemen Analisis Risiko dan Kredit Reviewer.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

Ketepatan dari cadangan ini tergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

2. Allowance for impairment losses on financing and receivables (continued)

impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Analysis and Credit Reviewer Department.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of claims with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired claims, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective loan loss allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimated future cash flows are determined for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

3. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
Penentuan liabilitas LPEI dan imbalan pasca kerja serta imbalan jangka panjang lainnya, tergantung pada pemilihan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria untuk menghitung estimasi tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri pegawai tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan LPEI langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Lihat Catatan 28 untuk nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja LPEI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
LPEI menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya diamortisasi berdasarkan PSAK 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

3. Pension and other long term employee benefits
The determination of LPEI liabilities and pension and also other long term employee benefits depend on the assumptions used by the actuary in calculating the estimation. Those assumptions include discount rate, annual salary increases rate, annual resignation rate, level of disability, retirement age, and mortality rate. Difference in the actual result and assumption of LPEI is recognized in the profit or loss by the time of occurrence. While LPEI believes that the assumptions are fair and appropriate, there could be a significant difference between the actual result or, change in estimation on the pension and employee benefit and net employee benefit expense. See Note 28 for the amount recorded as liabilities on LPEI employees benefit as of December 31, 2020 and 2019.

4. Impairment of equity securities classifies as fair value through other comprehensive income
LPEI review their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortised cost under SFAS 71 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS 71 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation. judgment from LPEI.

3. Pertimbangan. Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bisa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang; dan
   c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Nilai tercatat instrumen keuangan cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

Nilai tercatat efek-efek ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

4. Impairment of equity securities classifies as fair value through other comprehensive income (continued)

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money; and
   c. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The carrying value of financial instrument and allowance for impairment losses are disclosed in Note 7.

The carrying value of fair value through other comprehensive income equity securities and allowance for impairment losses are disclosed in Note 7.

3. Pertimbangan. Estimasi Dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

5. Penurunan nilai aset non-keuangan
Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, LPEI mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
2. perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
3. terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi asset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan;
4. arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari arus kas taksiran, sebelum perhitungkan diskonto.

6. Pengakuan aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

LPEI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

5. Impairment of non-financial assets
In assessing the possibility of impairment of non-financial assets, LPEI considers these factors:

1. evidence of obsolescence or physical damage on assets;
2. significant changes which might negatively affect the use of the assets;
3. evidence that the assets economical performance is worse than expected;
4. the cash flow which is materially less than expected cash flow, before any discount

6. Recognition of deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

LPEI reviews their deferred tax assets at each statement of financial position date and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

3. Pertimbangan. Estimasi Dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

6. Pengakuan aset pajak tangguhan (lanjutan)

Mengacu kepada Catatan 15d tentang aset pajak tangguhan.

7. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak LPEI sebagai *lessee*

LPEI menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk dilakukan.

LPEI memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. LPEI menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta atau keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpajangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, LPEI menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signfikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

6. Recognition of deferred tax assets (continued)

Refer to Note 15d for the deferred tax assets.

7. Determining the term of the contract with the option of contract extension and termination LPEI as lessee

The LPEI determines the lease term as the term that cannot be canceled together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be implemented, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonable to do so.

LPEI has several rental contracts that include options for extension and termination of the lease term. LPEI applies an assessment in evaluating whether it can be ascertained if it will use the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts or circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, LPEI reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

4. Giro pada Bank Indonesia | ***4. Current Account with Bank Indonesia***

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Rupiah	17.913	15.090	*Rupiah*
Total	**17.913**	**15.090**	***Total***

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 LPEI memiliki saldo giro pada Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has current account with Bank Indonesia for Real Time Gross Settlement (RTGS) transfer of funds.

5. Giro pada Bank | ***5. Current Accounts with Banks***

a. Berdasarkan *counterparties* dan mata uang | ***a. By counterparties and currencies***

	31 Desember/ *December 31, 2020*		**31 Desember/ *December 31, 2019***		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)***	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related parties (Note 38)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		5.035.597		77	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		22.791		20.784	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		7.337		1.846	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
		5.065.725		22.707	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Bank Jabar Banten Syariah		504		498	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		2		--	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
		5.066.231		23.205	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related parties (Note 38)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	107.432	1.509	--	--	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.041	85	6.041	84	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000	14	--	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

5. Giro pada Bank (lanjutan)

a. Berdasarkan *counterparties* dan mata uang (lanjutan)

5. Current Accounts with Banks (continued)

a. By counterparties and currencies (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Pihak ketiga					***Third parties***
Standard Chartered Bank, New York	19.070.663	267.942	8.535.441	118.493	*Standard Chartered Bank, New York*
The HSBC Ltd, New York	8.023.281	112.728	8.004.870	111.128	*The HSBC Ltd, New York*
Commerzbank Aktiengesellschaft	24.714	347	24.714	343	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Citibank, N.A, Jakarta	9.375	132	1.788	25	Citibank, N.A, Jakarta
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	9.229	130	9.231	128	The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta
PT Bank ICBC Indonesia	5.866	82	5.866	81	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	4.765	67	4.769	66	PT Bank Central Asia Tbk
Euro Eropa					***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related party (Note 38)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	880	15	--	--	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga					***Third parties***
Commerzbank Aktiengesellschaft	2.915.221	50.242	3.219.834	50.135	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Citibank, N.A, Jakarta	389	7	398	6	*Citibank, N.A, Jakarta*
Yen Jepang					***Japanese Yen***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related party (Note 38)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.000	5	--	--	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga					***Third parties***
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	156.650.441	21.299	156.803.052	20.041	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo*
Citibank, N.A, Jakarta	1.314.254	179	1.314.781	168	*Citibank, N.A, Jakarta*
Dolar Singapura					***Singapore Dollar***
Pihak ketiga					***Third party***
Overseas-Chinese Banking Corporation Bank (OCBC) Ltd., Singapura	9.880	105	1.147.781	11.831	*Overseas-Chinese Banking Corporation Bank (OCBC) Ltd., Singapore*
		454.888		312.529	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(276)		--	***Allowance for impairment losses***
Total		**5.520.843**		**335.734**	***Total***

Termasuk dalam giro pada bank adalah giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak berelasi (Catatan 38) sehubungan dengan Penugasan Khusus. Pemanfaatan jumlah tersebut dibatasi untuk Program NIA, sebesar Rp5.035.104 dan Rp51 masing-masing per 31 Desember 2020 dan 2019.

Included in current accounts with banks is current account in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a related party (Note 38) in relation with National Interest Account. The utilization of such amount is restricted for NIA Program, amounting to Rp5.035.104 and Rp51 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

5. Giro pada Bank (lanjutan)

b. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

LPEI melakukan penilaian giro pada bank secara individual dengan mempertimbangkan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto dan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

5. Current Accounts with Banks (continued)

b. By collectibility and allowance for impairment losses

LPEI assesses current accounts with banks individually by considering qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessments including future information.

An analysis of the movement in the gross carrying amount and the movement in the allowance for impairment lossess are, as follows:

	31 Desember/December, 31 2020					
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	335.236	--	--	498	335.734	*Balance, beginning of the year*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	5.174.914	--	--	5	5.174.919	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	1.545	--	--	--	1.545	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	--	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	5.176.459	--	--	5	5.176.464	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	8.921	--	--	--	8.921	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**5.520.617**	--	--	502	**5.521.119**	***Balance, end of year***

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--	*Balance, 31 December 2019*
Dampak penerapan awal PSAK 71	9	--	--	9	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo, 1 Januari 2020	9	--	--	9	*Balance, 1 January 2020*
Perubahan penyisihan kerugian :					*Changes in ECL :*
- Pindah ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Pindah ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Pindah ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	213	--	--	213	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset baru	53	--	--	53	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	266	--	--	266	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	1	--	--	1	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**276**	--	--	**276**	***Balance, end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 31.

5. Giro pada Bank (lanjutan)

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk giro pada bank

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Rupiah	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,00%	0,00% - 0,04%	*United States Dollars*

Giro pada bank dalam mata uang Euro Eropa, Yen Jepang dan Dolar Singapura tidak memperoleh bunga

d. Giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

6. Penempatan pada Bank

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan counterparties

	31 Desember/ *December 31, 2020*		31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah					***Rupiah***
Deposito berjangka					***Time deposit***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related parties (Note 38)***
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		4.508.000		2.847.960	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		1.220.100		1.552.050	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		--		722.500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		--		381.900	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
		5.728.100		5.504.410	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk		1.566.000		440.000	*PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk*
PT Bank DKI		--		1.100.000	*PT Bank DKI*
PT BPD Kalimantan Barat		--		560.000	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT BPD Jambi		--		410.000	*PT BPD Jambi*
PT Bank Nagari (BPD Sumatera Barat)		--		400.000	*PT Bank Nagari (BPD Sumatera Barat)*
PT BPD Jawa Tengah		--		150.000	*PT BPD Jawa Tengah*
PT Bank MNC Internasional Tbk		--		30.000	*PT Bank MNC Internasional Tbk*
		1.566.000		3.090.000	
Call Money					***Call Money***
Pihak ketiga					***Third parties***
PT BPD Jawa Timur Tbk		65.000		90.000	*PT BPD Jawa Timur Tbk*
		7.359.100		8.684.410	

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan counterparties (lanjutan)

	31 Desember/ *December 31, 2020*		31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
Deposito berjangka					***Time deposit***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related parties (Note 38)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	79.000.000	1.096.717	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	--	--	70.000.000	971.775	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	63.000.000	874.598	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	60.000.000	832.950	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
		--		3.776.040	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Bank Bukopin Tbk	17.524.592	246.221	--	--	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	--	--	118.000.000	1.638.135	*PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	85.000.000	1.180.013	*PT Bank CIMB NIaga Tbk*
PT Bank Mega Tbk	--	--	75.000.000	1.041.188	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Capital Indonesia Tbk	--	--	25.800.000	358.168	*PT Bank Capital Indonesia Tbk*
PT Bank CTBC Indonesia	--	--	23.000.000	319.297	*PT Bank CTBC Indonesia*
		246.221		4.536.801	
Call Money					***Call Money***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related parties (Note 38)***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Seoul	--	--	10.000.000	138.825	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Seoul*
Pihak ketiga					***Third parties***
Banco Bilbao Vizcaya Argen SA-HK	28.000.000	393.400	29.000.000	402.593	*Banco Bilbao Vizcaya Argen SA-HK*
		393.400		541.418	
		639.621		8.854.259	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18.053)		--	***Allowance for impairment losses***
Total		**7.980.668**		**17.538.669**	***Total***

Termasuk dalam penempatan pada bank merupakan penempatan sehubungan dengan Penugasan Khusus. Berikut adalah rincian yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Included in placements with banks is placement in relation with National Interest Account. The details as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan counterparties (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Program NIA			***NIA Program***
Deposito berjangka			***Time deposit***
Pihak berelasi (Catatan 38)			***Related parties (Note 38)***
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.508.000	2.407.960	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.085.100	1.552.050	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	722.500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	381.900	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	5.593.100	5.064.410	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.418)	--	*Allowance for impairment losses*
Total	**5.581.682**	**5.064.410**	***Total***

b. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu penempatan pada bank berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Sampai dengan 1 bulan	6.844.100	8.334.410	*Up to 1 month*
Sampai dengan 3 bulan	515.000	350.000	*Up to 3 month*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Sampai dengan 1 bulan	393.400	8.174.016	*Up to 1 month*
Sampai dengan 3 bulan	246.221	680.243	*Up to 3 month*
	7.998.721	17.538.669	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.053)	--	*Allowance for impairment losses*
Total	**7.980.668**	**17.538.669**	***Total***

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk penempatan pada bank

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Deposito berjangka	2.75% - 5,3%	6,00% - 8,5%	*Time deposit*
Call Money	3,03%	4,85%	*Call Money*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Deposito berjangka	2,8%	2,50% - 3,75%	*Time deposit*
Call Money	0,1%	1,65% - 1,87%	*Call Money*

6. Placements with Banks (continued)

a. By currencies, type and counterparties (continued)

b. By remaining period to maturity

The details of placements with banks classified as to remaining period to maturity are as follows:

c. The range of annual interest rates for placement with banks

6. Penempatan Pada Bank (lanjutan)

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

LPEI melakukan penilaian terhadap penempatan pada bank secara kolektif dengan menggunakan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Seluruh penempatan pada bank diklasifikasikan lancar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto dan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

6. Placements With Banks (continued)

d. By collectibility and allowance for impairment losses

LPEI evaluates bank placements collectively using qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessment including future information.

All placements with banks as of December 31, 2020 and 2019 are classified as current.

An analysis of the movement in the gross carrying amount and the movement in the allowance for impairment lossess are, as follows:

	31 Desember/*December, 31 2020*					
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	17.538.669	--	--	--	17.538.669	*Balance, beginning of the year*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	2.415.207	--	--	--	2.415.207	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	246.221	--	--	--	246.221	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(12.206.066)	--	--	--	(12.206.066)	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(9.544.638)	--	--	--	(9.544.638)	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	4.690	--	--	--	4.690	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**7.998.721**	--	--	--	**7.998.721**	***Balance, end of year***

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--	*Balance, 31 December 2019*
Dampak penerapan awal PSAK 71	37.192	--	--	37.192	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo, 1 Januari 2020	37.192	--	--	37.192	*Balance, 1 January 2020*
Perubahan penyisihan kerugian :					*Changes in ECL :*
- Pindah ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Pindah ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Pindah ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	3.488	--	--	3.488	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset baru	12.632	--	--	12.632	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(36.452)	--	--	(36.452)	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(20.332)	--	--	(20.332)	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	1.193	--	--	1.193	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**18.053**	--	--	**18.053**	***Balance, end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

6. Penempatan Pada Bank (lanjutan)

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

e. Penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

6. Placements With Banks (continued)

d. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.

e. Placements with banks pledged as collateral

There are no placements with banks pledged as collateral as of December 31, 2020 and 2019.

7. Efek-Efek

a. Berdasarkan mata uang, tujuan dan jenis

7. Securities

a. By currency, type and purpose

	31 Desember/ *December,31 2020*		31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	**Nilai nominal/** ***Nominal value***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through profit or loss***
Pihak berelasi (Catatan 38)					***Related parties (Note 38)***
Rupiah					***Rupiah***
FR0078	37.229	40.075	37.413	37.847	*FR0078*
FR0080	34.660	38.403	34.652	34.694	*FR0080*
FR0082	29.144	32.090	29.099	29.627	*FR0082*
FR0081	29.414	31.091	29.368	29.733	*FR0081*
FR0083	19.918	22.100	19.914	19.920	*FR0083*
FR0077	19.452	21.238	19.466	20.641	*FR0077*
FR0064	18.948	20.170	18.840	18.744	*FR0064*
FR0063	9.570	10.280	9.409	9.798	*FR0063*
SPN12200410	--	--	19.683	19.740	*SPN12200410*
SPN12200313	--	--	14.824	14.861	*SPN12200313*
SPNS10012020	--	--	6.355	6.356	*SPNS10012020*
	198.335	215.447	239.023	241.961	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Indon 29 New	56.684	62.803	56.053	57.840	*Indon 29 New*
Indon 27 New	42.022	48.094	41.505	44.353	*Indon 27 New*
Indon 25	42.304	47.090	41.833	44.613	*Indon 25*
Indon 23 New	42.094	43.994	41.566	42.343	*Indon 23 New*
Indon 28 New	35.025	40.758	34.598	37.625	*Indon 28 New*
Indon 49 New	34.918	38.214	34.498	35.586	*Indon 49 New*
Indon 28	27.756	31.471	27.383	28.963	*Indon 28*
Indon 22 New	28.500	28.934	28.540	28.527	*Indon 22 New*
Indois 24 New	14.050	15.468	13.883	14.732	*Indon 24 New*
	323.353	356.826	319.859	334.582	
Total	**521.688**	**572.273**	**558.882**	**576.543**	***Total***

7. Efek-Efek (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, tujuan dan jenis (lanjutan)

Efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

7. Securities (continued)

a. By currency, type and purpose (continued)

Securities based on currencies are as follows

	31 Desember/ *December,31 2020*		31 Desember/ *December,31 2019*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ ***Notional amount in Foreign currencies*** **(Dalam nilai penuh/** ***In full amount)***	**Ekuivalen/** ***Equivalent Rupiah***	**Jumlah nosional Mata uang asing/** ***Notional amount in Foreign currencies*** **(Dalam nilai penuh/** ***In full amount)***	**Ekuivalen/** ***Equivalent Rupiah***	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Fair value through profit or loss*
Pihak berelasi (Catatan 38)					*Related party (Note 38)*
Obligasi Pemerintah					*Government Bonds*
Rupiah	--	215.447	--	241.961	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	25.396.783	356.826	23.040.458	334.582	*United States Dollar*
Total	**25.396.783**	**572.273**	**23.040.458**	**576.543**	***Total***

Keuntungan (kerugian) LPEI yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp39.456 dan Rp13.245 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang tercatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan. Harga pasar efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya berkisar antara 100,85%-116,04% dan 93,72%-108,41% dari nilai nominal masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

LPEI's unrealized gains(loss) from the changes in market value of securities categorized as fair value through other comprehensive income amounted to Rp39.456 and Rp13,245 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, which is reported in the equity section of the statement of financial position. The market values of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2020 and December 31, 2019 ranged from 100,85%-116,04% and 93.72%-108.41%, respectively, of the nominal amount.

b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo dan suku bunga

b. By issuer, maturity and interest rate

	31 Desember/ *December 31, 2020*			
Penerbit	**Jenis/** ***Types***	**Tanggal jatuh tempo/** ***Maturity date***	**Suku bunga kontrak per tahun/** ***Contractual interest rate per annum***	***Issuer***
Pemerintah Negara Republik Indonesia				***The Government of the Republic of Indonesia***
FR0063	Obligasi/Bond	15 Mei/ *May 15, 2023*	5,625% tetap/fixed	*FR0063*
FR0064	Obligasi/Bond	15 Mei/ *May 15, 2028*	6,125% tetap/fixed	*FR0064*
FR0077	Obligasi/Bond	15 Mei/ *May 15, 2024*	8,125% tetap/fixed	*FR0077*
FR0078	Obligasi/Bond	15 Mei/ *May 15, 2029*	8,25% tetap/fixed	*FR0078*
FR0080	Obligasi/Bond	15 Juni/ *June 15, 2035*	7,50% tetap/fixed	*FR0080*
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ *June 15, 2025*	6,50% tetap/fixed	*FR0081*
FR0082	Obligasi/Bond	15 September/ *September 15, 2030*	7,00% tetap/fixed	*FR0082*
FR0083	Obligasi/Bond	15 April/ *April 15, 2040*	7,50% tetap/fixed	*FR0083*

7. Efek-Efek (lanjutan)

b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

7. Securities (continued)

b. By issuer, maturity and interest rate (continued)

Penerbit	31 Desember/ *December 31, 2020* Jenis/ *Types*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga kontrak per tahun/ *Contractual interest rate per annum*	*Issuer*
Indois 24 New	Obligasi/Bond	20 Agustus/ *August 20, 2024*	3,90% tetap/fixed	*Indois 24 New*
Indon 23 New	Obligasi/Bond	11 Januari/ *January 11, 2023*	2,95% tetap/fixed	*Indon 23 New*
Indon 22 New	Obligasi/Bond	08 Januari/ *January 08, 2022*	3,70% tetap/fixed	*Indon 23 New*
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ *January 15, 2025*	4,125% tetap/fixed	*Indon 25*
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ *January 11, 2028*	3,50% tetap/fixed	*Indon 28*
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ *July 18, 2027*	3,85% tetap/fixed	*Indon 27 New*
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ *April 24, 2028*	4,10% tetap/fixed	*Indon 28 New*
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ *September 18, 2029*	3,40% tetap/fixed	*Indon 29 New*
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oct/ *October 30, 2049*	3,70% tetap/fixed	*Indon 49 New*

Penerbit	31 Desember/ *December 31, 2019* Jenis/ *Types*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga kontrak per tahun/ *Contractual interest rate per annum*	*Issuer*
Pemerintah Negara Republik Indonesia				***The Government of the Republic of Indonesia***
FR0063	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2023*	5,63% tetap/*fixed*	*FR0063*
FR0064	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2028*	6,13% tetap/*fixed*	*FR0064*
FR0077	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2024*	8,13% tetap/*fixed*	*FR0077*
FR0078	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2029*	8,25% tetap/*fixed*	*FR0078*
FR0080	Obligasi/*Bond*	15 Juni/ *June 15, 2035*	7,50% tetap/*fixed*	*FR0080*
FR0081	Obligasi/*Bond*	15 Juni/ *June 15, 2025*	6,50% tetap/*fixed*	*FR0081*
FR0082	Obligasi/*Bond*	15 September/ *September 15, 2030*	7,00% tetap/*fixed*	*FR0082*
FR0083	Obligasi/*Bond*	15 April/ *April 15, 2040*	7,50% tetap/*fixed*	*FR0083*

7. Efek-Efek (lanjutan)

b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

7. Securities (continued)

b. By issuer, maturity and interest rate (continued)

Penerbit	31 Desember/ *December 31, 2019* Jenis/ *Types*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga kontrak per tahun/ *Contractual interest rate per annum*	*Issuer*
SPN12200313	Obligasi/*Bond*	13 Maret/ *March 13, 2020*	6,01% tetap/*fixed*	*SPN12200313*
SPN12200410	Obligasi/*Bond*	10 April/ *April 10, 2020*	5,88% tetap/*fixed*	*SPN12200410*
SPNS10012020	Obligasi/*Bond*	10 Januari/ *January 10, 2020*	6,09% tetap/*fixed*	*SPNS10012020*
Indois 24 New	Obligasi/*Bond*	20 Agustus/ *August 20, 2024*	3,90% tetap/*fixed*	*Indois 24 New*
Indon 23 New	Obligasi/*Bond*	11 Januari/ *January 11, 2023*	2,95% tetap/*fixed*	*Indon 23 New*
Indon 22 New	Obligasi/*Bond*	8 Januari/ *January 08, 2022*	3,70% tetap/*fixed*	*Indon 23 New*
Indon 25	Obligasi/*Bond*	15 Januari/ *January 15, 2025*	4,13% tetap/*fixed*	*Indon 25*
Indon 28	Obligasi/*Bond*	11 Januari/ *January 11, 2028*	3,50% tetap/*fixed*	*Indon 28*
Indon 27 New	Obligasi/*Bond*	18 Juli/ *July 18, 2027*	3,85% tetap/*fixed*	*Indon 27 New*
Indon 28 New	Obligasi/*Bond*	24 April/ *April 24, 2028*	4,10% tetap/*fixed*	*Indon 28 New*
Indon 29 New	Obligasi/*Bond*	18 September/ *September 18, 2029*	3,40% tetap/*fixed*	*Indon 29 New*
Indon 49 New	Obligasi/*Bond*	30 Oktober/ *October 30, 2049*	3,70% tetap/*fixed*	*Indon 49 New*

c. Berdasarkan peringkat

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI memiliki peringkat BBB berdasarkan penilaian S&P pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

c. By rating

Securities held by LPEI were rated BBB by S&P as of December 31, 2020 and 2019.

7. Efek-Efek (lanjutan)

d. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo

KIasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

7. Securities (continued)

d. By remaining period to maturity

The details of securities classified as to remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
Sampai dengan 5 tahun	198.095	156.998	*Up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	275.461	299.718	*More than 5 to 10 years*
Lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun	98.717	119.827	*More than 10 to 15 years*
Total	**572.273**	**576.543**	***Total***

e. Berdasarkan efek Pemerintah dan bukan Pemerintah

Seluruh efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah efek Pemerintah.

e. By Government and non-Government securities

All securities held by LPEI as of December 31, 2020 and 2019, are government securities

f. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

Seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020 tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah nihil.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

f. By collectibility and allowance for impairment losses

All securities as of December 31, 2020 and January 1, 2020 are not impaired and are classified as current.

Allowance for impairment losses on marketable securities as of December 31, 2020 and 2019 are nil, respectively.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.

g. Efek-efek yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat efek-efek yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

g. Securities pledged as collateral

There are no securities pledged as collateral as of December 31, 2020 and 2019.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

LPEI menghadapi risiko pasar atas perubahan nilai tukar mata uang dan menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko tersebut. LPEI melakukan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka mata uang asing *(forward dan swap)* dengan beberapa *counterparties* yang memungkinkan LPEI atau pihak lain untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perjanjian *swap* mata uang merupakan kontrak antara dua pihak untuk pertukaran arus kas berdasarkan nilai nosional dan nilai tukar yang ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan kontrak berjangka *forward* mata uang asing merupakan perjanjian untuk menjual sejumlah mata uang tertentu kepada pihak lain atau untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dari pihak lain pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Transaksi derivatif tersebut menimbulkan risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya fluktuasi nilai instrumen derivatif yang disebabkan adanya fluktuasi kurs mata uang asing, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kepada LPEI.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat instrumen derivatif LPEI yang memenuhi syarat sebagai transaksi lindung nilai untuk keperluan akuntansi. Oleh karena itu, seluruh keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar dari transaksi derivatif ini diakui dalam laba rugi.

a. Tagihan derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2020 LPEI tidak memiliki tagihan derivatif.

8. Derivative Receivables and Payables

LPEI faces market risk with respect to changes in foreign currency exchange rates and thus, LPEI uses derivative instruments to manage this risk. LPEI enters into derivative transactions in the form of foreign currency forward contracts (forward and swap) with certain counterparties that allow LPEI to reduce the risk of fluctuations in foreign currency exchange rates.

Currency swap contract is a contract between two parties to exchange series of cash flows based on a predetermined notional value and exchange value. While foreign currency forward contract is a covenant to sell a certain amount of currencies to other parties or to buy a certain amount of currencies from other parties in the future at a predetermined price.

Such derivative transactions result in market risk and credit risk. Market risk from derivative transactions arises as a result of fluctuation in the value of derivative instruments due to foreign currency fluctuation, while credit risk arises when the other parties fail to fulfill their obligations stated in the contracts with LPEI.

As of December 31, 2019, there are no derivatives which qualify as hedging insruments for accounting purposes. Therefore, all gains or losses resulting from fair value changes from these derivative transactions are recognized in profit or loss.

a. Derivative receivables

As of December 31, 2020, there are no derivatives receivables.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

a. Tagihan derivatif (lanjutan)

Rincian tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019	Nilai nosional mata uang asing/ Notional amount *in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Nilai wajar tagihan derivatif/ *Fair value of derivative receivables*	*December 31, 2019*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
***Forward* Jual**					***Forward Sold***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000	2 Desember/ *December* 2, 2019	6 Januari/ *January 6, 2020*	1.410	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Total tagihan derivatif				**1.410**	***Total derivative receivables***

Kolektibilitas dari seluruh tagihan derivatif LPEI per 31 Desember 2019 adalah kualitas lancar.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

b. Liabilitas derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2020 LPEI tidak memiliki tagihan derivatif.

Rincian liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019	Nilai nosional mata uang asing/ Notional amount *in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Nilai wajar liabilitas derivatif/ *Fair value of derivative payables*	*December 31, 2019*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Singapura					***Singapore Dollars***
Swap bought					***Swap bought***
Pihak ketiga					*Third party*
PT Bank UOB Indonesia	18.000.000	28 November/ *November 28, 2019*	2 Januari/ *January 2, 2020*	813	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	17.000.000	28 November/ *November 28, 2019*	2 Januari/ *January 2, 2020*	768	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	15.000.000	28 November/ *November 28, 2019*	2 Januari/ *January 2, 2020*	677	*PT Bank UOB Indonesia*
Total liabilitas derivatif				**2.258**	***Total derivatives liabilities***

8. Derivative Receivables and Payables (continued)

a. Derivative receivables (continued)

The details of derivative receivables as of December 31, 2019, are as follows:

The collectibility of all derivative receivables as of December 31, 2019 is current.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 31.

b. Derivative payables

As of December 31, 2020, there are no derivatives receivables.

The derivative payables details as of December 31, 2019 are as follows:

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

31 Desember 2020	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	*December 31, 2020*
Rupiah							***Rupiah***
Modal kerja	10.361.202	5.788.665	2.922.165	15.060	7.160.662	26.247.754	*Working capital*
Investasi	19.479.963	3.257.650	1.194.015	--	3.372.810	27.304.438	*Investment*
Konsumsi	102.988	--	--	--	--	102.988	*Consumption*
	29.944.153	9.046.315	4.116.180	15.060	10.533.472	53.655.180	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Modal kerja	9.198.141	5.339.134	822.395	--	5.934.619	21.294.289	*Working capital*
Investasi	10.690.267	2.614.210	--	--	2.154.127	15.458.604	*Investment*
	19.888.408	7.953.344	822.395	--	8.088.746	36.752.893	
Total	49.832.561	16.999.659	4.938.575	15.060	18.622.218	90.408.073	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.078.559)	(3.408.957)	(1.534.094)	(146)	(11.650.408)	(17.672.164)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**48.754.002**	**13.590.702**	**3.404.481**	**14.914**	**6.971.810**	**72.735.909**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2020*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Cadangan/ *Allowance***	
Individual	35.898.222	15.114.112	*Individual*
Kolektif:			*Collective:*
Lancar	48.629.393	938.514	*Current*
Dalam perhatian khusus	3.056.356	266.030	*Special mention*
Macet	2.824.102	1.353.508	*Loss*
Total	**90.408.073**	**17.672.164**	***Total***

31 Desember 2019	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	*December 31, 2019*
Rupiah							***Rupiah***
Modal kerja	15.097.812	4.664.119	1.635.059	1.987.975	4.839.111	28.224.076	*Working capital*
Investasi	23.743.833	1.688.401	1.902.554	1.093.314	1.096.773	29.524.875	*Investment*
Konsumsi	118.695	--	--	--	--	118.695	*Consumption*
	38.960.340	6.352.520	3.537.613	3.081.289	5.935.884	57.867.646	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Modal kerja	12.184.202	3.453.541	4.136.147	308.058	2.398.178	22.480.126	*Working capital*
Investasi	12.191.682	1.787.508	5.821	311.088	3.162.735	17.458.834	*Investment*
	24.375.884	5.241.049	4.141.968	619.146	5.560.913	39.938.960	
Total	63.336.224	11.593.569	7.679.581	3.700.435	11.496.797	97.806.606	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(796.712)	(1.264.241)	(2.144.156)	(1.458.839)	(5.617.228)	(11.281.176)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**62.539.512**	**10.329.328**	**5.535.425**	**2.241.596**	**5.879.569**	**86.525.430**	***Net***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

a. By type, currency and collectability (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Cadangan/ *Allowance***	
Individual	29.077.919	9.697.973	*Individual*
Kolektif:			*Collective:*
Lancar	62.815.733	770.727	*Current*
Dalam perhatian khusus	4.639.139	166.724	*Special mention*
Diragukan	244.525	--	*Doubtful*
Macet	1.029.290	645.752	*Loss*
Total	**97.806.606**	**11.281.176**	***Total***

Termasuk dalam pembiayaan dan piutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 piutang kepada bank dengan kategori lancar masing-masing sebesar Rp55.996 dan Rp10.116. Pembiayaan tersebut diklasifikasikan lancar dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif masing-masing sebesar Rp2.488 dan Rp44.

Financing and receivables as of December 31, 2020 and 2019 include financing and receivables to banks amounting to Rp55,996 and Rp10,116, respectively. These are classified as current and subjected to collective impairment resulting to impairment loss of Rp2,488 and Rp44, respectively.

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut

b. By economic sector, currency and collectibility

Financing and receivables based on currencies are as follows

	31 Desember/ *December 31, 2020*		**31 Desember/ *December 31, 2019***		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)***	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	
Rupiah	--	53.655.180	--	57.867.646	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2.615.864.223	36.752.893	2.876.928.502	39.938.960	*United States Dollar*
Total		90.408.073		97.806.606	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17.672.164)		(11.281.176)	*Allowance for Impairment Losses*
Neto		**72.735.909**		**86.525.430**	***Net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

b. By economic sector, currency and collectability (continued)

31 Desember 2020	**Lancar/ *Current***	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	***December 31, 2020***
Rupiah							*Rupiah*
Perindustrian	13.573.967	5.827.647	703.556	--	5.647.821	25.752.991	*Manufacturing*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	5.736.768	1.536.805	--	15.060	2.124.789	9.413.422	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Konstruksi	872.172	--	27.016	--	115.610	1.014.798	*Construction*
Listrik, gas dan air	28.243	--	--	--	1.253	29.496	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	2.092.608	22.367	489.755	--	170.387	2.775.117	*Transportation, warehousing and communication*
Perdagangan, restoran dan hotel	2.515.369	695.246	667.372	--	852.927	4.730.914	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	745.058	319.830	198.613	--	701.666	1.965.167	*Business services*
Pertambangan	2.144.175	401.443	--	--	450.421	2.996.039	*Mining*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	20.508	--	--	--	--	20.508	*Social, services/society*
Lain-lain	2.215.285	242.977	2.029.868	--	468.598	4.956.728	*Others*
	29.944.153	9.046.315	4.116.180	15.060	10.533.472	53.655.180	
Dolar Amerika Serikat							*United States Dollars*
Perindustrian	11.409.863	4.276.048	297.815	--	4.234.402	20.218.128	*Manufacturing*
Pertambangan	1.492.243	258.927	--	--	388.437	2.139.607	*Mining*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2.698.913	--	--	--	900.679	3.599.592	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	158.569	310.434	29.724	--	20.230	518.957	*Transportation, warehousing and communication*
Konstruksi	183.551	109.273	--	--	23.096	315.920	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	813.589	269.543	444.598	--	208.015	1.735.745	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	2.472.085	1.866.269	--	--	1.911.353	6.249.707	*Business services*
Listrik, gas dan air	1.381	--	--	--	--	1.381	*Electricity, gas and water*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	3.873	--	--	--	--	3.873	*Social, services/society*
Lain-lain	654.341	862.850	50.258	--	402.534	1.969.983	*Others*
	19.888.408	7.953.344	822.395	--	8.088.746	36.752.893	
Total	49.832.561	16.999.659	4.938.575	15.060	18.622.218	90.408.073	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.078.559)	(3.408.957)	(1.534.094)	(146)	(11.650.408)	(17.672.164)	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**48.754.002**	**13.590.702**	**3.404.481**	**14.914**	**6.971.810**	**72.735.909**	***Net***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)

b. By economic sector, currency and collectability (continued)

31 Desember 2019	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	*December 31, 2019*
Rupiah							*Rupiah*
Perindustrian	13.874.654	3.842.631	536.545	3.074.289	3.161.258	24.489.377	*Manufacturing*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	11.269.943	956.204	1.670.037	--	481.520	14.377.704	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Konstruksi	4.173.290	19.066	28.827	--	1.500	4.222.683	*Construction*
Listrik, gas dan air	3.247.573	--	447.276	--	--	3.694.849	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	3.038.662	126.814	72.827	--	142.550	3.380.853	*Transportation, warehousing and communication*
Perdagangan, restoran dan hotel	917.378	697.995	483.336	7.000	1.172.653	3.278.362	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	1.693.616	423.128	--	--	4.896	2.121.640	*Business services*
Pertambangan	414.385	286.682	298.765	--	955.162	1.954.994	*Mining*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	50.552	--	--	--	9.800	60.352	*Social, services/society*
Lain-lain	280.287	--	--	--	6.545	286.832	*Others*
	38.960.340	6.352.520	3.537.613	3.081.289	5.935.884	57.867.646	
Dolar Amerika Serikat							*United States Dollars*
Perindustrian	13.680.125	3.344.271	1.941.345	549.386	3.285.725	22.800.852	*Manufacturing*
Pertambangan	3.106.494	1.591.227	1.495.037	--	1.012.999	7.205.757	*Mining*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2.456.895	26.991	211.910	--	412.884	3.108.680	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	991.601	238.011	--	--	526.217	1.755.829	*Transportation, warehousing and communication*
Konstruksi	1.623.948	37.769	--	--	--	1.661.717	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	646.676	2.780	440.682	65.179	279.239	1.434.556	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	1.000.947	--	52.994	4.581	--	1.058.522	*Business services*
Listrik, gas dan air	632.962	--	--	--	--	632.962	*Electricity, gas and water*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	--	--	--	--	6.941	6.941	*Social, services/society*
Lain-lain	236.236	--	--	--	36.908	273.144	*Others*
	24.375.884	5.241.049	4.141.968	619.146	5.560.913	39.938.960	
Total	63.336.224	11.593.569	7.679.581	3.700.435	11.496.797	97.806.606	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(796.712)	(1.264.241)	(2.144.156)	(1.458.839)	(5.617.228)	(11.281.176)	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**62.539.512**	**10.329.328**	**5.535.425**	**2.241.596**	**5.879.569**	**86.525.430**	***Net***

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, lain-lain termasuk pembiayaan kepada karyawan.

As of December 31, 2020 and 2019, others include employee financing.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

c. Berdasarkan pihak-pihak, jenis dan mata uang

c. By parties, type and currency

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Rupiah			
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Rupiah*
Modal kerja	3.802.702	5.128.976	*Related parties (Note 38)*
Investasi	10.014.744	9.982.980	*Working capital*
Konsumsi	12.806	13.098	*Investment*
	13.830.252	15.125.054	*Consumption*
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	22.445.052	23.095.100	*Working capital*
Investasi	17.289.694	19.541.895	*Investment*
Konsumsi	90.182	105.597	*Consumption*
	39.824.928	42.742.592	
Total Rupiah	53.655.180	57.867.646	*Rupiah Total*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Modal kerja	338.708	418.805	*Working capital*
Investasi	436.398	449.152	*Investment*
	775.106	867.957	
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	20.955.581	22.061.321	*Working capital*
Investasi	15.022.206	17.009.682	*Investment*
	35.977.787	39.071.003	
Total Dolar Amerika Serikat	36.752.893	39.938.960	*United States Dollar Total*
Total	90.408.073	97.806.606	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.672.164)	(11.281.176)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**72.735.909**	**86.525.430**	***Net***

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Rupiah			*Rupiah*
Sampai dengan 1 tahun	11.611.285	14.279.104	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	5.691.948	6.860.893	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	3.788.920	6.017.522	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	32.563.027	30.710.127	*More than 5 years*
	53.655.180	57.867.646	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollars*
Sampai dengan 1 tahun	6.058.013	9.568.618	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	3.358.491	2.087.997	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	5.592.616	7.193.849	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	21.743.773	21.088.496	*More than 5 years*
	36.752.893	39.938.960	
Total	90.408.073	97.806.606	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.672.164)	(11.281.176)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**72.735.909**	**86.525.430**	***Net***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

e. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo

e. By remaining period to maturity

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
Rupiah			***Rupiah***
Sampai dengan 1 tahun	15.042.154	20.468.348	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	6.028.238	3.888.916	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	6.972.251	8.463.774	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	25.612.537	25.046.608	*More than 5 years*
	53.655.180	57.867.646	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollars*
Sampai dengan 1 tahun	7.900.486	12.042.046	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	8.131.595	4.863.839	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	8.008.099	10.757.649	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	12.712.713	12.275.426	*More than 5 years*
	36.752.893	39.938.960	
Total	90.408.073	97.806.606	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.672.164)	(11.281.176)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**72.735.909**	**86.525.430**	***Net***

f. Pembiayaan/piutang syariah

Rincian pembiayaan/piutang syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut

f. Sharia financing/receivables

As of December 31, 2020, and 2019, the details of sharia financing/receivables are as follows

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
Piutang *Murabahah*	2.367.032	3.175.743	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *Musyarakah*	12.995.082	12.814.708	*Musyarakah financing*
Total	15.362.114	15.990.451	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.067.206)	(1.239.590)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**13.294.908**	**14.750.861**	***Net***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

g. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus

LPEI memiliki Penugasan Khusus untuk melakukan pembiayaan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 198/PMK.08/2017 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan mencabut (PMK) No.134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus LPEI. Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

g. Financing and receivables National Interest Account

LPEI has National Interest Account (NIA) for export financing according to PMK No. 198/PMK.08/2017 dated December 21, 2017 and revoked PMK No. 134/PMK.08/2015 regarding NIA for LPEI. As of December 31, 2020, and 2019, the details of NIA financing and receivables, are as follows:

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
Pembiayaan dan piutang konvensional	1.597.367	773.631	*Financing and receivables conventional*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(44.536)	(6.242)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.552.831**	**767.389**	***Net***

Kolektibilitas pada seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah lancar.

The collectibility for all of NIA financing and receivables as of December 31, 2020 and 2019 are classified as current.

Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berdasarkan jenis dan mata uang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of NIA financing and receivables by type and currency as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
Rupiah			*Rupiah*
Modal kerja	1.092.679	773.631	*Working capital*
Investasi	504.688	--	*Investment*
Total	1.597.367	773.631	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(44.536)	(6.242)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.552.831**	**767.389**	***Net***

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus adalah debitur dengan sektor ekonomi perindustrian dan konstruksi. Suku bunga yang digunakan untuk seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berkisar antara 3,92%-5,00% dan 4,42%-4,54% pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus yang diberikan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode kolektif.

As of of December 31, 2020 and 2019, all NIA financing and receivables were originated from debtors in manufacturing economic and constructing sector. Interest rate for all NIA financing and receivables ranged from 3.92%-5.00% and 4.42%-4.54%, as of December 31, 2020 and 2019, respectively. Allowance method for impairment losses for NIA financing and receivables are collective

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya

1. Kisaran suku bunga per tahun untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah, dan Dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Suku bunga kontrak			***Contractual interest rate***
Rupiah	0,00% - 14,50%	0,00% - 14,50%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,00% - 10,75%	0,00% - 10,75%	*United States Dollars*
Suku bunga efektif			***Effective interest rate***
Rupiah	0,00% - 26,53%	0,00% - 19,53%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,00% - 13,62%	0,00% - 13,44%	*United States Dollars*

2. Pembiayaan dan piutang dijamin dengan surat sanggup *(promissory note*), agunan yang diikat dengan hak tanggungan, piutang dagang dan persediaan yang diikat secara fidusia ("*cessie*") dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh LPEI.

3. Jumlah pembiayaan dan piutang dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp21.468.184 dan Rp21.383.589 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Keikutsertaan LPEI berkisar antara 4,17% sampai dengan 85% dan 4,00% sampai dengan 90% dari jumlah pembiayaan dan piutang sindikasi, masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Risiko atas pembiayaan dan piutang sindikasi ditanggung secara proporsional oleh bank-bank peserta.

4. Pinjaman pegawai adalah pinjaman yang diberikan kepada pegawai dengan tingkat bunga sebesar 0% dan 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Jumlah pinjaman pegawai adalah sebesar Rp102.988 dan Rp118.695 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) diamortisasi sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan *Effective Interest Rate (EIR)*.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information

1. Range of annual interest rates for financing and receivables in Rupiah, and United States Dollars are as follows:

2. Financing and receivables are secured bypromissory notes, registered mortgages, trade receivables and inventories pledged under a fiduciary transfer of ownership ("cessie") and by other guarantees generally accepted by LPEI.

3. Total syndicated financing and receivables amounted to Rp21,468,184 and Rp21,383,589, as of December 31, 2020 and 2019, respectively. LPEI's share in syndicated financing and receivables ranged from 4.17% to 85% and 4.00% to 90% of the total syndicated financing and receivables as of December 31, 2020 and 2019, respectively. Risks from syndicated financing and receivables are shared proportionately among the participating banks.

4. Loans to employees which carry interest rates of 0% and 4% per annum are intended for the acquisition of houses, vehicles and other necessities with terms ranging from 1 (one) years to 20 (twenty) years. Total loan to employees amounted to Rp102,988 and Rp118,695 as of December 31, 2020 and 2019, respectively. The loan principal and interest payments are collected through monthly payroll deductions. The difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) is amortized over of the term of the loan using Effective Interest Rate (EIR).

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Besarnya biaya tersebut pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.260 dan Rp5.436 yang dibukukan sebagai bagian dari beban gaji dan tunjangan (Catatan 27).

5. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang diserahkan oleh LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pemberian pembiayaan dan piutang, baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPP.

6. Analisis atas perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, amortization of the difference amounted to Rp1,260 and Rp5,436, respectively, which is recorded as part of salaries and benefit expenses (Note 27).

5. Based on the Legal Lending Limit (LLL) reports submitted by LPEI to Otoritas Jasa Keuangan as of December 31, 2020 and 2019, there were no financing and receivables, either to related parties or third parties, that breached or exceeded the LLL requirement.

6. An analysis the movement in the allowance for impairment lossess are, as follows:

	31 Desember/*December, 31 2020*					
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo, 31 Desember 2019	682.542	63.995	9.295.049	1.239.590	11.281.176	*Balance, 31 December 2019*
Dampak penerapan awal PSAK 71	1.009.406	112.775	4.884.828	-	6.007.009	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo, 1 Januari 2020	1.691.948	176.770	14.179.877	1.239.590	17.288.185	*Balance, 1 January 2020*
Perubahan penyisihan kerugian :						*Changes in ECL :*
- Pindah ke tahap 1	4.193.478	(679.845)	(3.513.633)	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Pindah ke tahap 2	(1.578.476)	2.607.508	(1.029.032)	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Pindah ke tahap 3	(1.685.252)	(2.018.619)	3.703.871	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	929.750	(90.956)	(838.794)	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.334.234)	1.832.677	3.087.738	824.735	4.410.916	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset baru	822.294	24.526	247.422	--	1.094.242	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(593.780)	(1.752.050)	(2.709.532)	(3.371)	(5.058.733)	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(1.105.720)	105.153	625.628	821.364	446.425	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	14.819	57.426	(140.943)	6.252	(62.446)	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**1.530.797**	**248.393**	**13.825.768**	**2.067.206**	**17.672.164**	***Balance, end of year***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

The changes in the allowance for impairment losses on financing and receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2019*			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Saldo awal	2.370.695	2.373.623	4.744.318	*Beginning balance*
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	3.819.277	2.852.078	6.671.355	*Provision for impairment losses during the year (Note 25)*
Penghapusbukuan	(1.990)	--	(1.990)	*Writen-off*
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(132.507)	(132.507)	*Foreign currency translation during the year*
Saldo akhir	**6.187.982**	**5.093.194**	**11.281.176**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan dan piutang, pembiayan dan piutang syariah dan piutang lainnya.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible financing and receivables, financing and receivables and other receivable.

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi dari cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan berdasarkan kelompok untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The table below shows the reconciliation of allowance for impairment losses for financing by class for the years ended December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
	Modal Kerja/ *Working Capital*	**Investasi/ *Investment***	**Konsumsi/ *Consumption***	**Total**	
Saldo awal per 1 Januari	8.306.196	2.974.021	959	11.281.176	*Beginning balance as of January 1*
Dampak penerapan awal PSAK 71	4.023.492	1.983.995	(478)	6.007.009	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo awal per 1 Januari - setelah penyesuaian	12.329.688	4.958.016	481	17.288.185	*Beginning balance as of January 1 after adjustment -*
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	408.226	38.231	(32)	446.425	*Provision for impairment losses during the year (Note 25)*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(34.327)	(28.119)	--	(62.446)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo per 31 Desember 2020	**12.703.587**	**4.968.128**	**449**	**17.672.164**	***Balance as of December 31, 2020***
Mengalami penurunan nilai secara individual	11.854.137	3.259.975	--	15.114.112	*Individual impairment*
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	849.450	1.708.153	449	2.558.052	*Collective impairment*
Saldo per 31 Desember 2020	**12.703.587**	**4.968.128**	**449**	**17.672.164**	***Balance as of December 31, 2020***
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	**26.470.318**	**9.427.904**	--	**35.898.222**	***Gross amount of financing determined to be individually impaired***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*				
	Modal Kerja/ *Working Capital*	**Investasi/ *Investment***	**Konsumsi/ *Consumption***	**Total**	
Saldo awal per 1 Januari	3.609.457	1.134.476	385	4.744.318	*Beginning balance as of January 1*
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	4.801.174	1.869.607	574	6.671.355	*Provision for impairment losses during the year (Note 25)*
Penghapusbukuan	(1.990)	--	--	(1.990)	*Written-off*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(102.445)	(30.062)	--	(132.507)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo per 31 Desember 2019	**8.306.196**	**2.974.021**	**959**	**11.281.176**	***Balance as of December 31, 2019***
Mengalami penurunan nilai secara individual	7.557.815	2.140.158	--	9.697.973	*Individual impairment*
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	748.381	833.863	959	1.583.203	*Collective impairment*
Saldo per 31 Desember 2019	**8.306.196**	**2.974.021**	**959**	**11.281.176**	***Balance as of December 31, 2019***
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	**19.974.380**	**9.103.539**	--	**29.077.919**	***Gross amount of financing determined to be individually impaired***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on guarantee financing receivables areas follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Saldo awal per 1 Januari	2.989	1.624	*Beginning balance as of January 1*
Dampak penerapan awal PSAK 71	3.756	--	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo awal per 1 Januari - setelah penyesuaian	6.745	1.624	*Beginning balance as of January 1 after adjustment -*
Penyisihan selama tahun berjalan	418	1.421	*Provision during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	79	(56)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo	**7.242**	**2.989**	***Balance***
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	7.242	2.989	*Collective impairment*
Neto	**7.242**	**2.989**	***Net***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto dan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

An analysis of the movement in the gross carrying amount and the movement in the allowance for impairment lossess are, as follows:

	31 Desember/*December, 31 2020*					
	Tahap/ *Stage 1*	**Tahap/ *Stage 2***	**Tahap/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	290.587	--	--	--	290.587	*Balance, beginning of the year*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	--	--	--	--	--	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	--	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	--	--	--	--	--	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	12.467	--	--	--	12.467	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**303.054**	--	--	--	**303.054**	***Balance, end of year***

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
	Tahap/ Stage 1	**Tahap/ Stage 2**	**Tahap/ Stage 3**	**Jumlah/ Total**	
Saldo, 31 Desember 2019	2.989	--	--	2.989	*Balance, 31 December 2019*
Dampak penerapan awal PSAK 71	3.756	--	--	3.756	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo, 1 Januari 2020	6.745	--	--	6.745	*Balance, 1 January 2020*
Perubahan penyisihan kerugian :					*Changes in ECL :*
- Pindah ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Pindah ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Pindah ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	418	--	--	418	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset baru	--	--	--	--	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	418	--	--	418	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	79	--	--	79	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**7.242**	**--**	**--**	**7.242**	***Balance, end of year***

LPEI melakukan penilaian pembiayaan dan piutang secara individual dengan menggunakan bukti obyektif penurunan nilai.

LPEI performs individual impairment Assesment on financing and receivables based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan dan piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses on uncollectible financing and receivables.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

7. Jumlah pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp35.898.222 dan Rp29.077.919 yang terdiri dari pembiayaan dan piutang dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp19.116.830 dan Rp15.005.377 dan pembiayaan dan piutang dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar Rp16.781.392 dan Rp14.072.542.

   LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai/bermasalah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp15.114.112 dan Rp9.697.973.

7. As of December 31, 2020 and 2019, gross carrying amounts of total impaired financing and receivables amounted to Rp35,989,765 and Rp29,077,919, respectively, which consist of financing and receivables in Rupiah of Rp19,117,307 and Rp15,005,377, respectively, and financing and receivables in United States Dollars of Rp16,781,457 and Rp14,072,542, respectively.

   LPEI has provided allowance forimpairment losses on the impaired/non-performing financing and receivables amounting to R15,114,112 and Rp9,697,973, as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

8. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi oleh LPEI adalah Rp57.745.441 dan Rp28.900.096 serta cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang tersebut, telah dibentuk oleh LPEI masing-masing sebesar Rp15.098.761 dan Rp8.357.848. Skema restrukturisasi kredit meliputi perpanjangan dan penjadwalan kembali jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit dan skema restrukturisasi lain.

8. As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of financing and receivables which are restructured amounted to Rp57,745,985 and Rp28,900,096, respectively, and the related allowance for impairment losses provided by LPEI amounted to Rp15,098,761 and Rp8,357,848, respectively. Financing restructuring involves extension and rescheduling of loan maturity date, reduction of interest rate and other restructuring scheme.

a. Pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Restructured financing and receivables by collectibility are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Lancar	20.418.467	2.543.729	*Current*
Dalam perhatian khusus	16.416.874	8.901.436	*Special mention*
Kurang lancar	4.938.574	4.931.247	*Substandard*
Diragukan	15.060	3.291.213	*Doubtful*
Macet	15.956.466	9.232.471	*Loss*
Total	57.745.441	28.900.096	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.098.761)	(8.357.848)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**42.646.680**	**20.542.248**	*Net*

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

b. Pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi berdasarkan jenis dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020	Lancar/ *Current*	khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	*December 31, 2020*
Modal kerja	6.518.020	11.025.794	3.744.559	15.060	10.499.933	31.803.366	*Working capital*
Investasi	13.900.447	5.391.080	1.194.015	--	5.456.533	25.942.075	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	*Consumption*
Total	20.418.467	16.416.874	4.938.574	15.060	15.956.466	57.745.441	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(485.952)	(3.335.339)	(1.534.094)	(146)	(9.743.230)	(15.098.761)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**19.932.515**	**13.081.535**	**3.404.480**	**14.914**	**6.213.236**	**42.646.680**	***Net***

31 Desember 2019	Lancar/ *Current*	khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	*December 31, 2019*
Modal kerja	529.409	5.866.402	3.420.157	2.085.466	5.129.687	17.031.121	*Working capital*
Investasi	2.014.320	3.035.034	1.511.090	1205747,0	4.102.784	11.868.975	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	*Consumption*
Total	2.543.729	8.901.436	4.931.247	3.291.213	9.232.471	28.900.096	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.586)	(1.008.528)	(1.625.223)	(1.260.473)	(4.434.038)	(8.357.848)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.514.143**	**7.892.908**	**3.306.024**	**2.030.740**	**4.798.433**	**20.542.248**	***Net***

9. Berdasarkan POJK No. 40/POJK.05/2015("POJK No. 40") tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan LPEI dilarang memiliki Pembiayaan dengan kategori kualitas Pembiayaan bermasalah *(Non-Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan. Namun demikian, berdasarkan POJK No. 40 pasal 71 perihal "Rencana Pemenuhan", menyatakan:

   (1) Dalam hal LPEI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

b. Restructured financing and receivables by type and collectibility are as follows:

9. Based on POJK No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI, Article 14 paragraph (2) states that LPEI is not allowed to have Financing with a Non-Performing Financing (NPF) category less allowance for financing losses, more than 5% (five percent) of the total Financing. However, based on POJK
No. 40 article 71 concerning the "Fulfillment Plans", states:

(1) In the event that LPEI does notcomply with the provisions referred to in Article 14 paragraph (2), LPEI must submit a plan for fulfillment no later than 1 (one) month from the date of stipulation of the violation by the OJK.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

(2) Rencana pemenuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan oleh LPEI untuk memenuhi ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rencana pemenuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.

(4) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, LPEI wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.

(5) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh LPEI dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh LPEI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.

(6) LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) The fulfillment plan as referred to inparagraph (1) shall at least contain the plan to be carried out by LPEI to fulfill the provisions followed by a certain period of time needed to fulfill the provisions referred to in paragraph (1).

(3) The plans for fulfillment as referred toin paragraph (1) must obtain a statement of no objection from OJK.

(4) In the event that the fulfillment planas referred to in paragraph (1) is assessed by the OJK as insufficient to resolve the problem, LPEI must improve the fulfillment plan.

(5) OJK gives a statement of noobjection to the fulfillment plan submitted by LPEI by taking into account the conditions of the problems faced by LPEI no later than14 (fourteen) days from the date that OJK received the fulfillment plan.

(6) LPEI must implement the fulfillment plan referred to in paragraph (1).

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Pemenuhan Ketentuan POJK No. 40 di tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, rasio NPF bersih LPEI tidak memenuhi ketentuan POJK No. 40 Pasal 14 ayat 2 dan melalui surat OJK Nomor: S-28/NB.22/2020 tanggal 30 Januari 2020, OJK menyatakan bahwa rasio NPF bersih LPEI tidak memenuhi ketentuan POJK No. 40 Pasal 14 ayat 2 dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) atas POJK No. 40 tersebut. OJK meminta LPEI untuk wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF Bersih oleh OJK.

Selanjutnya, LPEI telah menyampaikan tanggapannya atas surat OJK tersebut perihal Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK serta Pemenuhan *Action Plan* Pembiayaan Bermasalah (NPF) dengan jangka waktu pemenuhan NPF bersih sampai dengan kuartal IV tahun 2021 melalui surat LPEI kepada OJK No. BS.0016/CEO/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 dan No.BS0027/MDI/02/2020 tanggal 18 Februari 2020. Dalam tanggapan LPEI kepada OJK, LPEI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebab NPL meningkat signifikan.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

Compliance with POJK No. 40 in 2019.

As of December 31, 2019, the ratio of LPEI net NPF did not meet the requirement of POJK No. 40 Article 14 paragraph 2 and based on Letter Number: S-28/ NB.22/2020 dated January 30, 2020, the OJK stated that the LPEI net NPF ratio did not meet the provisions of POJK No. 40 Article 14 paragraph 2 and in accordance with the provisions of Article71 paragraph (1) for POJK No. 40. OJK requests LPEI to be obliged to submit a fulfillment plan no later than 1 (one) month from the stipulated date of the Net NPF violation by the OJK.

Furthermore, LPEI has conveyed its response to the OJK regarding fulfillment the compliance of Non Performing Financing (NPF) and LPEI has submitted Fulfillment the compliance of Non Performing Financing (NPF) with the improvement period of NPF net up to the fourth quarter of 2021 OJK through LPEI letter to OJK No. BS.0016/CEO/02/2020 dated February 6, 2020 and No.BS0027/MDI/02/2020 dated February 18, 2020. In the response of LPEI to OJK, LPEI has submitted things as follows:

1. Cause of NPL has significantly increased.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di tahun 2020 dan refocusing kegiatan sepanjang tahun yang meliputi (1) perbaikan kualitas pembiayaan, (2) perbaikan kinerja keuangan, (3) penguatan manajemen risiko termasuk menyusun framework berdasarkan sui generis, (4) peningkatan peran LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan pelaksanaan NIA, (5) pembuatan model pembiayaan segmen UKME, (6) re-build corporate early warning system, dan (7) pengembangan organisasi, SDM dan TI.
3. Pelaksanaan mandat LPEI dan proyeksi keuangan tahun 2020-2024.
4. Indikator kinerja kuantitatif penanganan pembiayaan bermasalah.

Melalui surat OJK kepada LPEI Nomor:S-45/NB.22/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal tanggapan atas rencana pemenuhan ketentuan pembiayaan bermasalah (NPF), menyatakan bahwa OJK tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF Bersih yang disampaikan oleh LPEI, untuk dapat memenuhi ketentuan POJK Nomor 40 Pasal 14 ayat (2) dimana LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut (Catatan 16 dan 17):

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

2. Improving procedures for handling problem financing in 2020 and refocusing activities through out the year which includes (1) improving the quality of financing, (2) improving financial performance, (3)streng the ningrisk management including developing a framework based on sui generis, (4) enhancing the role of LPEI as an Special Mission Vehicle (SMV) and implementing the NIA, (5) creating a financing model for the UKME segment, (6) re-building corporate early warning systems, and (7) organizational, HR and IT development.
3. Implementation of the LPEI mandate and financial projections for 2020-2024.
4. Quantitative performance indicators for handling non performing financing.

Based on the OJK letter to LPEI Number: S-45/NB.22/2020 dated February 20, 2020 regarding the response to the plan to fulfill the trouble financing provisions (NPF), states that the OJK has no objection to the plan to fulfill the provisions regarding Net NPF ratios submitted by LPEI in order to fulfill POJK No. 40 Article 14 paragraph (2) where LPEI is obliged to implement the fulfillment plan that has been submitted to the OJK and report on the progress of thefulfillmentplan with the following conditions (Notes 16 and 17):

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

1. Laporan perkembangan rencana pemenuhan disampaikan secara triwulanan kepada OJK atau setiap waktu dalam hal terjadi kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana pemenuhan. Laporan perkembangan tersebut disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode triwulan yang bersangkutan berakhir atau 5 (lima) hari setelah terjadinya kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana pemenuhan.

2. Laporan perkembangan rencana pemenuhan disertai dengan dokumen pendukung, antara lain bukti penerimaan pembayaran pokok atau bunga pembiayaan dan dokumen lain yang menjadi dasar perbaikan kualitas pembiayaan masing-masing debitur.

Rasio pembiayaan dan piutang yang diklasifikasikan NPF/NPL adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

1. A progress report on the fulfillment plan is submitted quarterly to OJK or atany time in the event of a condition that can affect the achievement of the fulfillment plan. The progress report is submitted no later than 15 (fifteen) days after the quarter period ends or 5 (five) days after the occurrence of conditions that can affect the achievement of the fulfillment plan.

2. The progress report of the fulfillment plan is attached with supporting documents, including receipt of payment of principal or interest on financing and other underlying documents for improving the quality of financing of each debtor.

Financing and receivables ratios classified as NPF/NPL are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Rasio NPF bruto	26,08%	23,39%	*Gross NPF ratio*
Rasio NPF neto	11,49%	13,96%	*Net NPF ratio*

Penugasan Khusus tidak memiliki pembiayaan dan piutang yang diklasifikasikan sebagai *Non Performing Financing* per 31 Desember 2020 dan 2019.

National Interest Account does not have any Non Performing Financing as of December 31, 2020 and 2019.

Per 31 Desember 2020, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

Rupiah	**Pembiayaan dan piutang bermasalah/ *Non-performing financing and receivables***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	***Rupiah***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	2.139.849	841.175	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	1.520.299	780.687	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	6.351.377	3.705.076	*Industry*
Pertambangan	450.421	254.863	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	660.142	271.815	*Transportation, warehousing, and communication*
Konstruksi	142.626	142.627	*Construction*
Jasa dunia usaha	900.279	451.407	*Business services*
Listrik, Gas, dan Air	1.253	586	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	2.498.466	951.818	*Others*
	14.664.712	7.400.054	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	900.679	774.602	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	652.613	334.847	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	4.532.217	2.363.116	*Industry*
Pertambangan	388.437	378.784	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	49.954	26.512	*Transportation, warehousing, dan communication*
Konstruksi	23.096	18.230	*Construction*
Jasa dunia usaha	1.911.353	1.610.037	*Business services*
Lain-lain	452.792	278.466	*Others*
	8.911.141	5.784.594	
Total	**23.575.853**	**13.184.648**	***Total***

Per 31 Desember 2019, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai PMK No. 140/PMK.010/2009 yang terakhir diubah sesuai PMK No. 161/PMK/010/2010 tentang perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:

As of Decmber 31, 2019, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 140/PMK.010/2009 as last amended by PMK No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of PMK No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

31 Desember 2019 / ***December 31, 2019***

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ *Non-performing financing and receivables*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Rupiah			***Rupiah***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	2.151.557	393.246	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	1.662.989	840.841	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	6.772.092	2.524.633	*Industry*
Pertambangan	1.253.927	923.793	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	215.377	71.186	*Transportation, warehousing, and communication*
Konstruksi	30.327	7.967	*Construction*
Jasa dunia usaha	4.896	2.299	*Business services*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	9.800	4.521	*Social services/society*
Listrik, Gas, dan Air	447.276	60.986	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	6.545	4.600	*Others*
	12.554.786	4.834.072	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	624.794	176.261	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	785.100	322.076	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	5.776.456	2.289.107	*Industry*
Pertambangan	2.508.036	1.288.606	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	526.217	263.749	*Transportation, warehousing, dan communication*
Konstruksi	57.575	6.221	*Construction*
Jasa dunia usaha	6.941	3.223	*Business services*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	36.908	36.908	*Social services/society*
Lain-lain	10.322.027	4.386.151	*Others*
	22.876.813	**9.220.223**	

10. Rasio pembiayaan dan piutang usaha kecil dan menengah terhadap total pembiayaan dan piutang LPEI yang mana tidak termasuk pembiayaan yang merupakan Penugasan Khusus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 15,92% dan 16,06%.

10. The ratio of small medium enterprises financing and receivables to total financingand receivables of LPEI, which does not include loan under National Interest Account as of December 31, 2020 and 2019, are 15.92% and 16.06%, respectively.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

11. LPEI memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp126.842 dan Rp120.220. Fasilitas KURBE merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh LPEI untuk para pelaku usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. KURBE diluncurkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro, kecil dan UMKM yang berorientasi ekspor dalam memperoleh akses pendanaan yang murah. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan KURBE per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp54.135 dan Rp54.592.

i. Piutang Pembiayaan Garansi

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI memiliki piutang pembiayaan garansi sebesar Rp303.054 dan Rp290.587 dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.242 dan Rp2.989.

Piutang pembiayaan garansi tersebut adalah pembayaran klaim oleh LPEI kepada PT Pertamina (Persero) atas Refund Guarantee sebesar USD22.654.767, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan untuk nasabah Konsorsium PT Anggrek Hitam dan PT High Speed Shipyard (“HSS”) sebesar USD22.665.347 yang diterbitkan dari tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018. Konsorsium HSS telah gagal melaksanakan pekerjaan atas penyelesaian pembuatan kapal yang dipesan oleh PT Pertamina (Persero) secara tepat waktu, yaitu melewati tenggat waktu maksimal penyelesaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 31 Juli 2018.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

11. LPEI has financing under Credit Export related to SME (KURBE) as of December 31,2020 and 2019, amounting to Rp126,842 and Rp120,220, respectively. KURBE facility is a form of financing provided by LPEI for micro, small and medium enterprises (SMEs) which are export-oriented. KURBE is launched to help the export-oriented micro, small and SMEs in gaining access to low cost financing. LPEI has provided allowance for impairment losses on financing to KURBE amounting to Rp54,135 and Rp54,592, as of December 31,2020 and 2019, respectively.

i. Guarantee Financing Receivables

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has other guarantee receivables of Rp303,054 and Rp290,587 with allowance of impairment losses of Rp7,242 and Rp2,989.

Guarantee financing receivables are claims payments by LPEI to PT Pertamina (Persero) for a Refund Guarantee of USD22,654,767 where LPEI acts as guarantor of Bank Guarantees issued to Consortium customers PT Anggrek Hitam and PT High Speed Shipyard ("HSS") amounting USD22,665,347 issued from November 1, 2017 to August 24, 2018. The HSS Consortium has failed to carry out work on the completion of shipbuilding ordered by PT Pertamina (Persero) on time, i.e past the maximum agreed deadline for completion on July 31, 2018.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

i. Piutang Pembiayaan Garansi (lanjutan)

Pembayaran klaim kepada PT Pertamina (Persero) tersebut di atas berasal dari porsi retensi (yang menjadi bagian) LPEI atas klaim sebesar USD6.089.430, serta *cash collateral* sebesar USD1.743.757, dan sisanya ditanggung oleh Penjamin Ulang (*Reguarantor*), yaitu konsorsium PT Asuransi Central Asia, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia melalui skema penjaminan ulang dan kontra-bank garansi sebesar USD14.821.580.

Sehubungan dengan *recovery* atas klaim yang telah dibayarkan LPEI tersebut. HSS telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar USD21.548.796 kepada LPEI pada tanggal 5 November 2018 dengan jatuh tempo pada tangga jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020 yang diperpanjang sampai 30 September 2021.

Sesuai perjanjian kerjasama penutupan asuransi dan perjanjian pembagian pertanggungan penjaminan atas pembayaran yang diterima oleh LPEI dari HSS, LPEI akan mengembalikannya kepada para Penjamin Ulang sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Penjamin Ulang. LPEI mencatat liabilitas kepada Penjamin Ulang sebesar USD15.537.567 dan USD14.836.265 (bilangan penuh) atau ekuivalen dengan Rp215.774 dan Rp205.965 (dalam jutaan Rupiah) (Catatan 20) masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 atas porsi risiko yang ditanggung oleh Penjamin Ulang tersebut. Termasuk dalam jumlah liabilitas kepada Penjamin Ulang tersebut adalah bagian dari pengenaan denda yang menjadi porsi Penjamin Ulang sebesar USD88.107 dan USD14.685 masing-masing pada tanggal-tangal 31 Desember 2020 dan 2019.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

i. Guarantee Financing Receivables (continued)

The payment of claims to PT Pertamina (Persero) above originates from the own retention portion (which is part of) LPEI claims amounting to USD6,089,430, and cash collateral amounting to USD1,743,757, and the balance reinsured by the Reinsurer (Reguarantor), namely PT Asuransi Central Asia Consortium, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, and PT Asuransi Kredit Indonesia through a re-guarantee scheme and counter-bank guarantee amounting to USD14,821,580.

Due to the recovery of claims that was paid by LPEI, HSS has signed a Debt Recognition Agreement amounting to USD21,548,796 with LPEI on November 5, 2018, with maturity date on September 30, 2020 which has been extended up to September 30, 2021.

Referring to co-insurance agreement and co-guarantee agreement for payments received by LPEI from HSS, LPEI will share it to the Re-guarantor a portion of the risk covered by each Re-guarantor. LPEI records the reinsurance liability to the Re-Guarantee amounting to USD15,537,567 and USD14,836,265 (full amount) or equivalent with Rp215,774 and Rp205,965 (in million Rupiah) (Note 20) for the portion of the risk borne by the Reinsurer as of December 31, 2020 and 2019, respectively. Included in the obligations amount of the Re-guarantor is part of a fine which is the Re-Guarantee portion amounting to USD88,107 and USD14,685 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

10. Asuransi dan Penjaminan

a. Piutang asuransi dan penjaminan

10. Insurance and Guarantee

a. Insurance and guarantee receivables

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang penjaminan-PEN	28.620	--	*Guarantee receivables - PEN*
Piutang proteksi piutang dagang	387	6	*Trade receivable protection*
Piutang asuransi kegagalan ekspor	162	168	*Export failure insurance receivables*
Piutang asuransi properti	90	52	*Property insurance receivables*
Piutang asuransi teknik	--	31	*Engineering insurance receivables*
Piutang penjaminan	--	3	*Guarantee receivables*
	29.259	260	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Piutang proteksi piutang dagang	3.489	3.482	*Trade receivable protection receivables*
Piutang penjaminan-PEN	2.423	--	*Guarantee receivables - PEN*
Piutang asuransi kegagalan ekspor	364	480	*Export failure insurance receivables*
Piutang asuransi properti	5	6	*Property insurance receivables*
	6.281	3.968	
	35.540	4.228	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(909)	(2.828)	*Allowance for impairment losses*
Total - neto	**34.631**	**1.400**	***Total - net***

Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	2.828	--	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25)	(2.069)	2.828	*Provision during the year (Notes 25)*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	150	--	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**909**	**2.828**	***Ending balance***

b. Aset reasuransi

b. Reinsurance assets

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			*Unearned premium income*
Rupiah			*Rupiah*
Piutang proteksi piutang dagang	182	2	*Trade receivable protection*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Proteksi piutang dagang	969	432	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	133	134	*Failure on export insurance*
	1.284	568	
Estimasi klaim reasuransi			*Estimated reinsurance claim*
Rupiah			*Rupiah*
Asuransi properti/industri	--	1.201	*Property/industry insurance*
Asuransi kegagalan ekspor	--	69	*Failure on export insurance*
Proteksi piutang dagang	--	3	*Trade receivable protection*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Proteksi piutang dagang	--	2.993	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	--	19	*Failure on export insurance*
	--	4.285	
Total	**1.284**	**4.853**	***Total***

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan) / ***10. Insurance and Guarantee (continued)***

b. Aset reasuransi (lanjutan) / *b. Reinsurance assets (continued)*

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim asuransi yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset reasuransi tersebut.

Management believes that the estimated reinsurance claims provided is adequate to cover losses on the reinsurance assets.

c. Liabilitas asuransi / *c. Insurance liabilities*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			*Unearned premium income*
Rupiah			*Rupiah*
Proteksi piutang dagang	227	3	*Trade receivable protection*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Proteksi piutang dagang	1.491	683	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	132	138	*Failure on export insurance*
	1.850	824	
Estimasi klaim asuransi			*Estimated insurance claim*
Rupiah			*Rupiah*
Proteksi piutang dagang	178	5	*Trade receivable protection*
Asuransi properti/industri	--	1.236	*Property/industry insurance*
Asuransi kegagalan ekspor	--	99	*Failure on export insurance*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Proteksi piutang dagang	1.101	4.276	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	101	75	*Failure on export insurance*
	1.380	5.691	
Total	**3.230**	**6.515**	***Total***

d. Pendapatan asuransi - neto / *d. Income from insurance – net*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pendapatan asuransi - bruto			*Income from insurance - gross*
Rupiah			*Rupiah*
Pendapatan premi bruto	406	7	*Gross written premiums*
Pendapatan komisi	88	1	*Commission income*
Pendapatan asuransi lainnya	--	94	*Other insurance income*
	494	102	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Pendapatan premi bruto	7.888	6.665	*Gross written premiums*
Pendapatan komisi	1.497	1.286	*Commission income*
Pendapatan asuransi lainnya	(36)	(35)	*Other insurance income*
	9.349	7.916	
	9.843	8.018	
Premi reasuransi			*Reinsurance premiums*
Rupiah			*Rupiah*
Premi reasuransi	(323)	(485)	*Reinsurance premiums*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Premi reasuransi	(5.416)	(4.213)	*Reinsurance premiums*
	(5.739)	(4.698)	
Pendapatan dari asuransi - neto	**4.104**	**3.320**	***Income from insurance - net***

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan) / ***10. Insurance and Guarantee (continued)***

e. Beban klaim bruto asuransi dan beban asuransi lainnya / *e. Gross claim expense from insurance and other insurance expenses*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Beban klaim			***Claim expense***
Rupiah			***Rupiah***
Beban klaim bruto	(1.309)	(935)	*Gross claim expense*
Klaim reasuransi	1.270	877	*Reinsurance claims*
	(39)	(58)	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Beban klaim bruto	(1.500)	(111)	*Gross claim expense*
Klaim reasuransi	980	92	*Reinsurance claims*
	(520)	(19)	
Subtotal beban klaim	(559)	(77)	*Subtotal claim expense*
Beban asuransi lainnya			*Other insurance expense*
Rupiah			*Rupiah*
Beban asuransi lainnya	(51)	(74)	*Other insurance expense*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Beban asuransi lainnya	(785)	(801)	*Other insurance expense*
Subtotal beban asuransi lainnya	(836)	(875)	*Subtotal Other insurance expense*
Beban klaim asuransi dan lainnya	**(1.395)**	**(952)**	***Claim and other insurance expense***

f. Pendapatan penjaminan / *f. Income from guarantee*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Pendapatan penjaminan	26.565	37.678	*Guarantee income*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Pendapatan penjaminan	53.629	61.544	*Guarantee income*
	80.194	**99.222**	

g. Kenaikan/(penurunan) pada aset reasuransi - neto / *g. Increase/(decrease) in reinsurance assets – net*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Penurunan pada aset reasuransi	(1.093)	(1.156)	*Decrease in reinsurance assets*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Kenaikan/(penurunan) pada aset reasuransi	(2.344)	2.322	*Increase/(decrease) in reinsurance assets*
Total	**(3.437)**	**1.166**	***Total***

h. (Kenaikan)/ penurunan pada liabilitas asuransi / *h. (Increase)/decrease in insurance liabilities*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Penurunan pada liabilitas asuransi	938	1.352	*Decrease in insurance liabilities*
Mata uang asing			***Foreign currency***
(Kenaikan)/penurunan pada liabilitas asuransi	2.041	(3.851)	*Increase/(decrease) in insurance liabilities*
Total	**2.979**	**(2.499)**	***Total***

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

a. Berdasarkan mata uang, jatuh tempo dan hubungan

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang, jatuh tempo dan hubungan adalah sebagai berikut:

11. Acceptances Receivable and Payable

a. By currency, maturity and relationship

Acceptance's receivable and payable based on currencies, maturity and relationship are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*		31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptances receivable*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptances payable*	Tagihan akseptasi/ *Acceptances receivable*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptances payable*	
Rupiah					*Rupiah*
Pihak ketiga					*Third parties*
Sampai dengan 1 bulan			8.222	8.222	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	62.716	62.716	99.710	99.710	*More than 1up to 3 months*
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	354.351	354.351	333.735	333.735	*More than 3 up to 6 months*
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	--	--	5.000	5.000	*More than 6 up to 12 months*
	417.067	417.067	446.667	446.667	
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollars*
Pihak ketiga					*Third parties*
Sampai dengan 1 bulan	3.728	3.728	--	--	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	13.785	13.785	7.982	7.982	*More than 1 up to 3 months*
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	114.303	114.303	93.480	93.480	*More than 3 up to 6 months*
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	--	--	--	--	*More than 6 up to 12 months*
Lebih dari 1 tahun	--	--	55.639	55.639	*More than 1 year*
	131.816	131.816	157.101	157.101	
Euro Eropa					*European Euro*
Pihak berelasi (Catatan 38)					*Related party (Note 38)*
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	--	--	7.091	7.091	*More than 6 up to 12 months*
	--	--	7.091	7.091	
Pihak ketiga					*Third parties*
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	--	--	1.448	1.448	*More than 1 up to 3 months*
Lebih dari 1 tahun	13.844	13.844	17.514	17.514	*More than 1 year*
	13.844	13.844	18.962	18.962	
Yen Jepang					*Japan Yen*
Pihak ketiga					*Third parties*
Lebih dari 1 tahun	--	--	28.468	28.468	*More than 1 year*
	--	--	28.468	28.468	
Total	562.727	562.727	658.289	658.289	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.310)	--	--	--	*Allowance for impairment losses*
Neto	**558.417**	**562.727**	**658.289**	**658.289**	***Net***

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jatuh tempo dan hubungan (lanjutan)

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

11. Acceptances Receivable and Payable (continued)

a. By currency, maturity and relationship (continued)

Acceptances receivable and payable based on currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*		31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional Amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional Amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah		417.067		446.667	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	9.381.812	131.816	11.316.472	157.101	*United States Dollar*
Euro Eropa	803.250	13.844	1.673.202	26.053	*European Euro*
Yen Jepang	--	--	222.737.819	28.468	*Japan Yen*
Total		562.727		658.289	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.310)		--	*Allowance for impairment losses*
Neto		**558.417**		**658.289**	***Net***

b. Tagihan dan liabilitas akseptasi Penugasan Khusus

LPEI tidak memiliki tagihan dan liabilitas akseptasi terkait dengan Penugasan Khusus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

b. Acceptances receivable and payable - National Interest Account

LPEI does not have acceptances receivable and payable regarding to NIA as of December 31, 2020 and 2019.

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

11. Acceptances Receivable and Payable (continued)

c. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

c. By collectibility and allowance for impairment losses

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto dan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

An analysis of the movement in the gross carrying amount and the movement in the allowance for impairment lossess are, as follows:

	31 Desember/*December, 31 2020*					
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	657.217	1.072	--	--	658.289	*Balance, beginning of the year*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(643.374)	(1.072)	--	--	(644.446)	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	548.883	--	--	--	548.883	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	-	*Asset derecognized or repaid*
Total pembalikan tahun berjalan	(94.491)	(1.072)	--	--	(95.563)	*Total reverse current year*
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--	--	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**562.727**	--	--	--	**562.727**	***Balance, end of year***

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	*Total*	
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--	*Balance, 31 December 2019*
Dampak penerapan awal PSAK 71	5.854	84	--	5.938	*SFAS 71 first implementation impact*
Saldo, 1 Januari 2020	5.854	84	--	5.938	*Balance, 1 January 2020*
Perubahan penyisihan kerugian :					*Changes in ECL :*
- Pindah ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Pindah ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Pindah ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(5.736)	(84)	--	(5.820)	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset baru	4.192	--	--	4.192	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(1.544)	(84)	--	(1.628)	*Total (reverse)/addition current year*
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--	*Foreign exchange adjustment*
Saldo, akhir tahun	**4.310**	**--**	**--**	**4.310**	***Balance, end of year***

Seluruh tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai tagihan akseptasi.

As of December 31, 2020 and 2019, all LPEI acceptances receivable are classified as current.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover any possible impairment on acceptance receivables.

12. Biaya Dibayar Dimuka

12. Prepaid Expenses

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Rupiah			*Rupiah*
Asuransi	9.953	7.287	*Insurance*
Sistem	2.022	2.356	*System*
Sewa	77	4.923	*Rent*
Telekomunikasi	16	16	*Telecommunication*
Total	**12.068**	**14.582**	***Total***

13. Aset Tetap

13. Premises and Equipment

	31 Desember/ *December 31, 2020*						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak PSAK 73/ *Impact of SFAS 73*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan							***Cost***
Pemilikan langsung							***Direct ownership***
Gedung	1.148.616	--	--	--	--	1.148.616	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	337.689	--	1.082	--	8.204	346.975	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	216	--	--	--	--	216	*Motor vehicles*
	1.486.521	--	1.082	--	8.204	1.495.807	
Aset dalam penyelesaian	20.432	--	1.120	--	(8.204)	13.348	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right of use asset*
Gedung	--	8.860	6.120	--	--	14.980	*Building*
Kendaraan bermotor	1.740	6.062	458	--	--	8.260	*Motor vehicles*
Total	1.508.693	14.922	8.780	--	--	1.532.395	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Gedung	71.789	--	57.430	--	--	129.219	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	181.632	--	48.694	--	--	230.326	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	177	--	17	--	--	194	*Motor vehicles*
	253.598	--	106.141	--	--	359.739	
Aset hak guna							*Right of use asset*
Gedung	--	--	3.385	--	--	3.385	*Building*
Kendaraan bermotor	1.740	--	1.183	--	--	2.923	*Motor vehicles*
	255.338	--	110.709	--	--	366.047	
Nilai buku	**1.253.355**					**1.166.348**	***Book value***

	31 Desember/ *December 31, 2019*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Cost***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Gedung	1.148.616	--	--	--	1.148.616	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	314.655	1.022	--	22.012	337.689	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	216	--	--	--	216	*Motor vehicles*
	1.463.487	1.022	--	22.012	1.486.521	
Aset dalam penyelesaian	16.984	25.460	--	(22.012)	20.432	*Construction in progress*
Aset sewa guna usaha						*Leased asset*
Kendaraan bermotor	13.340	-	(11.600)	--	1.740	*Motor vehicles*
Total	1.493.811	26.482	(11.600)	--	1.508.693	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Gedung	14.358	57.431	--	--	71.789	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	131.622	50.010	--	--	181.632	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	147	30	--	--	177	*Motor vehicles*
	146.127	107.471	--	--	253.598	
Aset sewa guna usaha						*Leased asset*
Kendaraan bermotor	13.107	233	(11.600)	--	1.740	*Motor vehicles*
	159.234	107.704	(11.600)	--	255.338	
Nilai buku	**1.334.577**				**1.253.355**	***Book value***

13. Aset Tetap (lanjutan)

Beban penyusutan yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp110.709 dan Rp107.704 (Catatan 26).

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

13. Premises and Equipment (continued)

The depreciation expense for the year ended December 31, 2020 and 2019, amounted to Rp110,709 and Rp107,704, respectively (Note 26).

Details of construction in progress as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*			
	Total	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
Aset dalam penyelesaian	13.348	95,18%	Maret/*March 2021*	*Construction in progress*

	31 Desember/ *December 31, 2019*			
	Total	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
Aset dalam penyelesaian	20.432	83,02%	Desember/*December 2020*	*Construction in progress*

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp125.354 dan Rp187.268.

As of December 31, 2020 and 2019, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp125,354 and Rp187,268, respectively.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan pihak ketiga. Untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI menggunakan PT Asuransi Sinarmas dengan nilai pertanggungan sebesar nihil dan Rp87.222. Pada 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI menggunakan PT Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggungan sebesar sebesar Rp144 dan Rp150. Pada 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI menggunakan PT Askrindo Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp265.812 dan Rp144.570. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Premises and equipment are covered by insurance against fire and other risks under certain package policies issued by third parties. As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Sinarmas with sum insured amounting to RpNil and Rp87,222. As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Central Asia with sum insured amounting to Rp144 and Rp150. As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has obtained insurance coverage from PT Askrindo Insurance with sum insured amounting to Rp265,812 and Rp144,570. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from insured premises and equipment.

13. Aset Tetap (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat penjualan aset tetap. Pada tanggal 31 Desember 2019 LPEI telah melakukan penjualan aset tetap berupa kendaraan bermotor dengan harga perolehan sebesar Rp11.600.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

LPEI menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan. Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki LPEI adalah 2.5 tahun. LPEI juga memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah. LPEI menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

13. Premises and Equipment (continued)

As of December 31, 2020, there were no sale of premises and equipment. As of December 31, 2019, LPEI has sold fixed asset in the form of motor vehiches with acquisition cost amounting to Rp11,600.

Based on Management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate any impairment in the value of premises and equipment as of December 31, 2020 and 2019.

LPEI leases several assets including office buildings, official houses, and vehicles. The average lease period based on the contracts held by LPEI is 2.5 years. LPEI also has certain leases with lease terms of 12 months or less and leases of low value assets. LPEI applies a license for short term leases and low value leases for these leases.

14. Aset Lain-lain

14. Other Assets

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Rupiah			***Rupiah***
Bunga yang masih akan diterima:			*Accrued interest receivable:*
Penempatan pada bank	23.404	24.881	*Placements with banks*
Efek-efek	1.967	1.956	*Securities*
Uang muka	11.952	5.746	*Advances*
Uang jaminan	1.038	924	*Refundable deposits*
Agunan yang diambil alih	149.399	--	*Foreclosed assets*
Lain-lain	9.735	1.892	*Others*
	197.495	35.399	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bunga yang masih akan diterima:			*Accrued interest receivable:*
Penempatan pada bank	2.325	8.944	*Placements with banks*
Efek-efek	4.322	4.742	*Securities*
Uang jaminan	--	10.779	*Refundable deposits*
Uang muka	3.603	4.842	*Advances*
Lain-lain	17.018	2.824	*Others*
	27.268	32.131	
Total	**224.763**	**67.530**	***Total***

15. Perpajakan

15. Taxes

a. Pajak di bayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Pajak penghasilan badan			***Corporate income tax***
Tahun 2018	--	246.357	*Year 2018*
Tahun 2019	93.268	93.268	*Year 2019*
Tahun 2020	75.806	--	*Year 2020*
Total	**169.074**	**339.625**	***Total***

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
PPh Pasal 21	6.167	2.870	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 22	2	5	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	178	630	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	--	1	*Income Tax Article 25*
PPh Pasal 26	4.950	41.745	*Income Tax Article 26*
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	354	672	*Value Added Tax (VAT)*
PPh Pasal 4(2)	13	6	*Income Tax Article 4(2)*
Total	**11.664**	**45.929**	***Total***

c. Manfaat pajak

c. Tax benefit

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Pajak tangguhan	(226.666)	(924.009)	*Deferred tax*
Manfaat pajak	**(226.666)**	**(924.009)**	***Tax benefit***

15. Perpajakan (lanjutan)

15. Taxes (continued)

c. Manfaat pajak (lanjutan)

c. Tax benefit (continued)

Rekonsiliasi antara rugi/(laba) sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between loss/(income) before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
(Rugi)/laba sebelum beban pajak	61.722	(5.634.858)	*(Loss)/income before tax expense*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan/(pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif untuk pembiayaan dan piutang dan pembiayaan/piutang syariah	33.559	1.371.395	*Provision for/(reversal of) impairment losses on earning assets for financing and receivables and sharia financing/receivables*
Penyisihan imbalan kerja	(8.586)	59.573	*Provision for employee benefits*
Penyusutan aset tetap	10.026	7.721	*Depreciation of premises and equipment*
Estimasi klaim asuransi	(4.311)	2.176	*Estimated insurance claim*
Estimasi klaim penjaminan	1.983	(7.002)	*Estimated guarantee claim*
Penyisihan/cadangan kerugian piutang pembiayaan garansi	497	1.364	*Provision for/allowance for impairment guarantee financing receivables*
Penyisihan/cadangan kerugian aset lain-lain	--	5.737	*Provision for/allowance for other impairment lossess on assets*
Estimasi klaim penjaminan HSS	(11.069)	10.052	*Estimated guarantee claim HSS*
Penyisihan/cadangan kerugian piutang tresuri	(18.872)	--	*Provision for/allowance for impairment treasury*
Penyisihan/cadangan kerugian piutang akseptasi	(1.628)	--	*Provision for/allowance for impairment acceptance*
	1.599	1.451.016	
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Kenikmatan pegawai	23.476	8.989	*Employees' benefits in kind*
Hubungan masyarakat	2.185	809	*Public relationship*
Aktivitas karyawan	328	4.739	*Employee activities*
Jamuan dan representasi	1.255	660	*Representation and entertainment*
Lain-lain	20.882	5.388	*Others*
	48.126	20.585	
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	(460.368)	(621.412)	*Income subject to final tax*
Taksiran rugi fiskal	(348.921)	(4.784.669)	*Estimated fiscal loss*
Beban pajak kini	--	--	*Current tax expense*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	(75.806)	(93.268)	*Less prepaid taxes Article 25*
Lebih bayar tahun berjalan	(75.806)	(93.268)	*Overpayment current year*
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(348.921)	(4.784.669)	*Estimated fiscal loss during the year*
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya			*Accumulated prior year's fiscal loss*
Tahun 2018	(309.885)	(323.573)	*Year 2018*
Tahun 2019	(4.784.669)	--	*Year 2019*
Akumulasi rugi fiskal	**(5.443.475)**	**(5.108.242)**	***Accumulated fiscal loss***

15. Perpajakan (lanjutan)

c. Manfaat pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak bulan Desember 2020 sebesar Rp169.074,-merupakan kelebihan pembayaran pajak bulan Desember 2020 tahun berjalan sebesar Rp75.806 dan total pengembalian pajak bulan Desember 2019 sebesar Rp93.268 yang belum diterima.

Tarif pajak penghasilan LPEI menggunakan tarif pajak tunggal 22% dan 25% untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Pajak atas laba sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba dalam jumlah sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

c. Tax benefit (continued)

Claims for tax refund as of December 2020 amounting to Rp169,074 are the excess payment of taxes in December 2020 for the year amounting to Rp75,806 and total tax refunds in December 2019 amounting to Rp93,268 due to previous tax refunds in 2019 which has not been received.

LPEI's income tax rate is calculated using single tax rate of 22% & 25% or the fiscal years ended December 31, 2020 and 2019 based on Law No. 36 Year 2008.

The tax on profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
(Rugi)/laba sebelum beban pajak	61.722	(5.634.858)	*(Loss)/income before tax expense*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	(13.579)	1.408.715	*Corporate income tax based on the prevailing tax rate*
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	90.693	150.206	*Effect of tax on permanent differences with prevailing tax rate*
Penyisihan atas aset pajak tangguhan	149.552	(634.912)	*Allowance for deferred tax assets*
Manfaat pajak	**226.666**	**924.009**	***Tax benefit***

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2019 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan LPEI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). LPEI telah melaporkan SPT tahun 2019 kepada KPP pada tanggal 27 April 2020.

Estimated taxable income in 2019 is consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax reported by LPEI to Tax Office (KPP). LPEI has reported its SPT fiscal year 2019 to the tax office on April 27, 2020.

15. Perpajakan (lanjutan)

d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto

15. Taxes (continued)

d. Deferred tax asset (liabilities) net

	31 Desember/ *December 31, 2020*						
	1 Januari/ *January 1*	Saldo Awal PSAK 71/ *Opening Balance SFAS 71*	Penyesuaian tarif pajak dari 25% menjadi 22%/ *Tax rate's adjustments From 25% to 22%*	Dibebankan ke laporan laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive (loss) income*	31 Desember/ *December 31*	
Liabilitas atas imbalan kerja	73.083	--	(14.616)	(1.717)	(20.238)	36.512	*Liability for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	359.515	1.501.753	(223.351)	7.383	--	1.645.300	*Allowance for impairment losses on earning assets*
Estimasi klaim penjaminan	1.713	--	(206)	436	--	1.943	*Estimated guarantee claim*
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	(4.415)	--	--	--	(6.713)	(11.128)	*Unrealized gain on available-for-sale securities - net*
Estimasi klaim asuransi	1.423	--	(171)	(948)	--	304	*Estimated insurance claim*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	2.001	--	(240)	--	--	1.761	*Allowance for impairment losses on other guarantee receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	747	939	(202)	109	--	1.593	*Allowance for impairment losses on guarantee receivables*
Aset tetap	1.284	--	(154)	2.205	--	3.335	*Premises and equipment*
Rugi fiskal	642.148	--	(77.058)	543.768	--	1.108.858	*Fiscal loss*
Cadangan kerugian penurunan nilai tresuri	--	9.300	(1.116)	(4.152)	--	4.032	*Allowance for impairment losses on treasury*
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	--	1.484	(178)	(358)	--	948	*Allowance for impairment losses on acceptacy*
Lain-lain	2.768	--	(333)	(2.435)	--	--	*Others*
Neto	**1.080.267**	**1.513.476**	**(317.625)**	**544.291**	**(26.951)**	**2.793.458**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2019*				
	1 Januari/ *January 1*	Dibebankan ke laporan laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive (loss) income*	31 Desember/ *December 31*	
Liabilitas atas imbalan kerja	57.819	14.893	371	73.083	*Liability for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	16.666	342.849	--	359.515	*Allowance for impairment losses on earning assets*
Estimasi klaim penjaminan	3.463	(1.750)	--	1.713	*Estimated guarantee claim*
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	1.283	--	(5.698)	(4.415)	*Unrealized gain on available-for-sale securities - net*
Estimasi klaim asuransi	879	544	--	1.423	*Estimated insurance claim*
Cadangan kerugian penurunan Nilai piutang lain - lain	567	1.434	--	2.001	*Allowance for impairment losses on other guarantee receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	406	341	--	747	*Allowance for impairment losses on guarantee receivables*
Aset tetap	(646)	1.930	--	1.284	*Premises and equipment*
Rugi fiskal	80.893	561.255	--	642.148	*Fiscal loss*
Lain-lain	255	2.513	--	2.768	*Others*
Neto	**161.585**	**924.009**	**(5.327)**	**1.080.267**	***Net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan seluruhnya dapat dipulihkan.

Management believes that the deferred tax assets are fully realizable.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak

1. Klaim kurang bayar PPN beserta bunga tahun pajak 2009

Pada tanggal 13 April 2011, LPEI telah menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN tahun 2009 dengan total seluruhnya sebesar Rp44.530 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	Denda/ *Penalty (Rp)*	
Tahun pajak 2009			*Fiscal year 2009*
SKP PPN Masa September 2009			*TAL PPN September 2009*
No. 00153/207/09/051/11	7.019	2.667	*No. 00153/207/09/051/11*
SKP PPN Masa Oktober 2009			*TAL PPN October 2009*
No. 00154/207/09/051/11	6.894	2.482	*No. 00154/207/09/051/11*
SKP PPN Masa November 2009			*TAL PPN November 2009*
No. 00155/207/09/051/11	6.502	2.210	*No. 00155/207/09/051/11*
SKP PPN Masa Desember 2009			*TAL PPN December 2009*
No. 00156/207/09/051/11	8.337	2.669	*No. 00156/207/09/051/11*
STP PPN Masa September-Desember 2009			*TCL PPN September-December 2009*
No. 00085/107/09/051/11	--	5.750	*No. 00085/107/09/051/11*
Total	**28.752**	**15.778**	***Total***

Pada tanggal 5 Januari 2015, LPEI menerima lima salinan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN tahun 2009. Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa September 2009, Oktober 2009, November 2009, Desember 2009 dan mengabulkan seluruhnya surat gugatan atas STP PPN masa September sampai dengan Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Putusan	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ *Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court*	Dana yang dikembalikan/ *Tax Refund*	*Tax Court Decision Number*
57515/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa September 2009 No. 00153/207/09/051/11	9.686	*57515/PP/M.IVB/16/2014*
57516/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa Oktober No. 00154/207/09/051/11	9.376	*57516/PP/M.IVB/16/2014*
57517/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa November 2009 No. 00155/207/09/051/11	8.713	*57517/PP/M.IVB/16/2014*
57518/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa Desember 2009 No. 00156/207/09/051/11	11.005	*57518/PP/M.IVB/16/2014*
57519/PP/M.IVB/16/2014	STP PPN Masa September Desember 2009 No. 00085/107/09/051/11	-- 5.750	*57519/PP/M.IVB/16/2014*
Total		**44.530**	***Total***

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment

Claims for tax refund

1. Claims for underpayment of VAT and interest for fiscal year 2009

On April 13, 2011, LPEI has received several Tax Assesment Letters (TAL) and Tax Collection Letters (TCL) for fiscal year 2009 amounting to Rp44,530 with detail as follows:

On January 5, 2015, LPEI has received five copies of the Tax Court decision on VAT tax disputes in 2009. The Tax Court granted the appeal entirely on Tax Assesment period in September 2009, October 2009, November 2009 and December 2009 and granted entirely the tax claims on STP VAT period from September to December 2009, with the following details:

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

1. Klaim kurang bayar PPN beserta bunga tahun pajak 2009 (lanjutan)

Pada tanggal 28 Januari 2015, LPEI menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN Masa September sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp38.780. Pada tanggal 18 Februari 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara atas STP PPN masa September 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp5.750.

Pada tanggal 16 Juni 2016, LPEI menerima empat surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2009 yang terdiri dari:

Nomor Surat/ *Letter Number*	Nomor Surat Peninanjauan Kembali Ditjen Pajak *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak *(Tax Assesment Letter canceled by Tax Court)*	*Letter Number*
MPK-1255T/PAN.Wk/2016	S- 1758/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa September 2009 No. 00153/207/09/051/11	*MPK-1255T/PAN.Wk/2016*
MPK-1254T/PAN.Wk/2016	S- 1756/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Oktober 2009 No. 00154/207/09/051/11	*MPK-1254T/PAN.Wk/2016*
MPK-1256T/PAN.Wk/2016	S- 1762/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Desember 2009 No. 00156/207/09/051/11	*MPK-1256T/PAN.Wk/2016*
MPK-1253T/PAN.Wk/2016	S- 1760/PJ.07/2015	STP PPN Masa September - Desember 2009 No. 00085/107/09/051/11	*MPK-1253T/PAN.Wk/2016*

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali di atas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2016.

Pada tanggal 19 Oktober 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN masa November 2009.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment

Claims for tax refund (continued)

1. Claims for underpayment of VAT and interest for fiscal year 2009 (continued)

On January 28, 2015, LPEI has received tax refund from the state treasury in respect of the cancellation of the tax Assesment from September to December 2009 amounting to Rp38,780. On February 18, 2015, LPEI received tax refund of from the State Treasury because of cancellation VAT sanction (STP PPN) from September 2009 to December 2009 amounting to Rp5,750.

On June 16, 2016, LPEI has received four letters from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of VAT in 2009. The Judicial Review Letter from Directorate General of Tax is consist of:

In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 13, 2016.

On October 19, 2016, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for the period November 2009

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

1. Klaim kurang bayar PPN beserta bunga tahun pajak 2009 (lanjutan)

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

1. Claims for underpayment of VAT and interest for fiscal year 2009 (continued)

Nomor Surat/ *Letter Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Dana yang dikembalikan/ *Tax Refund*	*Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang Dibatalkan oleh Pengadilan/Tax Assesment Letter Cancelled by Tax Court*
MPK 1462T/PAN.Wk/2016	S-1761/PJ.07/2015	8,713	*SKPKB PPN Masa November 2009* No. 00155/207/09/051/11

Pada tanggal 10 September 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Putusan Mahkamah Agung atas perkara sengketa pajak PPN masa November 2009 sebagai berikut:

On September 10, 2019, LPEI has received a letter from Tax Court about Supreme Court Decision on VAT tax dispute case November 2009 as follows:

Nomor Putusan Mahkamah Agung/ *Supreme Court of Indonesia decision Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/*Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court*	Nomor keputusan pengadilan pajak/ *Tax court decision Number*
1578/B/PK/Pjk/2019	S- 1761/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa November 2009 No. 00155/207/09/051/11	57517/PP/M.IVB/16/2014

Putusan Mahkamah Agung No. 1578/B/PK/Pjk/2019 tanggal 19 Juni 2019 memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No.Put-57517/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak November 2009.

Supreme Court of Indonesia Decision number 1578/B/PK/Pjk/2019 dated June 19, 2019 has decided to refuse Judicial Review of Directorate General of Taxation number 57517/PP/M.IVB/16/ 2014 dated November 20, 2014 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period November 2009.

Pada tanggal 9 Januari 2020, LPEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 3719/B/PK/Pjk/2019 tanggal 28 Oktober 2019 memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No. Put-57519/PP/M.IVB/99/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak September sampai Desember 2019.

On January 9, 2020, LPEI received Indonesia Supreme Court Decision number 3719/B/PK/Pjk/2019 dated October 28, 2019 and has decided to refuse Judicial Review Directorate General of Taxation No.Put-57519/PP/M.IVB/99/2014 dated November 20, 2014 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period from September until December 2019.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

2. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun pajak 2010

LPEI mengajukan permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 sebesar Rp124.075. Dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No.00013/406/10/093/12 tanggal 26 April 2012. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengembalian kepada LPEI sebesar Rp52.240.

Selisih antara permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 dengan SKP disebabkan karena koreksi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang tahun pajak 2010 sebesar Rp71.835.

LPEI telah mengajukan permohonan keberatan dan banding sebesar Rp71.835 terkait cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang yang diperbolehkan untuk dibiayakan.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

2. DGT decision letter Income Tax Article 25/29 fiscal year 2010

LPEI submitted the overpayment tax refund for fiscal year 2010 amounting to Rp124,075. In the Tax Assesment Letter No. 00013/406/10/093/12 dated April 26, 2012. The Directorate General of Taxation has decided the tax refund to LPEI amounting to Rp52,240.

The difference in the overpayment of tax refund for fiscal year 2010 with SKP is due to the correction of allowance of impairment losses financing and receivables in fiscal year 2010 amounting to Rp71,835.

LPEI has filed the tax objection and tax appeal amounting to Rp71,835 regarding the correction of allowance of impairment losses financing and receivables.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPh Badan Tahun 2010
nomor Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 yang diumumkan tanggal 5 Maret 2015. Pengadilan Pajak Republik Indonesia mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPLB PPh Badan Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

On March 30, 2015 LPEI has received copies of the Tax Court decision on corporate income tax year 2010 number Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 which was pronounced on March 5, 2015. Tax Court Republic of Indonesia granted the appeal of LPEI entirely on corporate income tax disputes in 2010, with details as follows:

Nomor keputusan Pengadilan pajak	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ *Tax Assesment Letter canceled by Tax Court*	Dana yang dikembalikan/ *Tax Refund*	*Tax Court Decision Number*
Put.59987/PP/M.IVB/15/2015	SKPLB PPh Badan Tahun 2010 Nomor 00013/406/10/093/12	75,508	Put.59987/PP/M.IVB/15/2015

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan Putusan Pengadilan Pajak atas SKPLB PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp75.508 (sebelumnya LPEI mencatat klaim atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp71.835). Selisih sebesar Rp3.673, diakui sebagai penghasilan lain- lain.

On April 27, 2015, LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the Tax Court Decision on overpayment of 2010 Corporate Income Tax amounting to Rp75,508 (previously LPEI recorded Tax Return Claim amounting to Rp71,835). The difference of Rp3,673, has been recognized as other income.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

2. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun pajak 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPh Badan tahun 2010 yang terdiri dari:

Nomor Surat / *Letter Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh *Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court*	Nomor keputusan pengadilan pajak/ *Tax Court Decision Number*
MPK-2119T/PAN.Wk/2016	S- 3566/PJ.07/2015	SKPLB PPh tahun 2010 No. 00013/406/10/093/12	59990/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas. LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2020, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun 2010.

3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010

Pada tanggal 26 April 2012, LPEI telah menerima beberapa SKP dan STP PPN dengan total seluruhnya sebesar Rp34.283 dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment

Claims for tax refund (continued)

2. DGT decision letter Income Tax Article 25/29 fiscal year 2010 (continued)

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of Corporate Income Tax 2010 submitted by Directorat General of Taxes.

In connection with the Judicial Review Letter. LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016.

Until the date of completion of the financial statement as of December 31, 2020, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of Corporate Income Tax 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010

On April 26, 2012, LPEI has received several TALs and TCL of VAT amounting to Rp34,283 as follows:

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

	Pokok/ *Principal* (Rp)	Denda/ *Penalty* (Rp)	
Tahun pajak 2010			*Fiscal year 2010*
SKP PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	7.201	3.457	*TAL PPN January 2010 No. 00068/207/10/093/12*
SKP PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	5.433	2.608	*TAL PPN February 2010 No. 00069/207/10/093/12*
SKP PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	7.772	3.731	*TAL PPN March 2010 No. 00070/207/10/093/12*
STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12	--	1.440	*TCL PPN January 2010 No. 00037/107/10/093/12*
STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12	--	1.087	*TCL PPN February 2010 No. 00038/107/10/093/12*
STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12	--	1.554	*TCL PPN March 2010 No. 00039/107/10/093/12*
Total	**20.406**	**13.877**	***Total***

LPEI mengajukan keberatan dan banding atas penetapan SKPKB PPN tahun pajak 2010, karena atas pendapatan bunga dari pemberian pinjaman kepada debitur tidak terhutang PPN sesuai UU PPN No. 18 tahun 2000.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN masa pajak Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

LPEI appealed against the assesment of underpayment of VAT in fiscal year 2010, because the interest income from financing and receivables to debtors is not subject to VAT according to VAT Law No. 18 year 2000.

On March 30, 2015, LPEI has received the Tax Court decision on the dispute for VAT tax period in January 2010, February 2010 and March 2010 with the decision to approve entirely the appeal of LPEI on the tax Assesment over the period from January to March 2010 with the following details:

Nomor keputusan Pengadilan pajak	Surat Ketetapan yang dibatalkan/ Tax Assesment Letter canceled by Tax Court	Dana yang dikembalikan/ Tax Refund	*Tax court decision number*
59988/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	10.658	*59988/PP/M.IVB/16/2014*
59989/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	8.041	*59989/PP/M.IVB/16/2014*
59990/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	11.503	*59990/PP/M.IVB/16/2014*
Total		**30.202**	***Total***

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN Masa Januari sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp30.202.

Sehubungan perkara sengketa pajak PPN masa Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan pasal 34 Putusan Menteri Keuangan nomor PMK. 8/PMK.03/2013 maka atas STP PPN secara otomatis akan dibatalkan secara jabatan oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 17 September 2015, LPEI menerima Surat Keputusan Pembatalan STP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment

Claims for tax refund (continued)

3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

On April 27, 2015, the LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the cancellation of the tax Assesment period from January to March 2010 amounting to Rp30,202.

In respect of past VAT tax dispute case in January 2010, February 2010 and March 2010 had been granted entirely by the Tax Court, then in accordance with article 34 of Decision of the Minister of Finance number PMK.8/PMK.03/2013, the sanction (STP) of Value Added Tax automatically canceled by the office of the Tax Office.

On September 17, 2015, LPEI has received a Letter of Cancellation of STP PPN from Directorate General of Taxation with the following details:

Nomor Surat / *Letter Number*	Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan Pengadilan Pajak/ *(Tax Assesment Letter canceled by Tax Court)*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	*Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number*
Kep 1673/WPJ.19/2015 Tanggal 15-0902015	STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12	1.440	*59988/PP/M.IVB/16/2014*
Kep-1674/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12	1.087	*59989/PP/M.IVB/16/2014*
Kep-1675/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12	1.554	*59990/PP/M.IVB/16/2014*
		4.081	

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2010 yang terdiri dari:

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case in 2010 of VAT. The Judicial Review from Directorate General of Tax consists of:

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

Nomor Surat / *Letter Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/*Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court*	*Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax court decision Number*
MPK-2116T/PAN.Wk/2016	S- 3563/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	*59987/PP/M.IVB/15/2015*

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak PPh Badan dan PPN tahun 2010 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016. Until the date of the finalization of this financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of Corporate Income Tax and VAT in 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

Pada tanggal 4 September 2017, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Februari 2010.

On September 4, 2017, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period February 2010.

Nomor Surat / *Letter Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/*Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court*	*Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number*
MPK-2118/PAN/2017	S- 3573/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	59989/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

Sampai dengan tanggal tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2020, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPN Masa Februari 2010.

Pada tanggal 28 Januari 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Januari 2010.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued

Claims for tax refund (continued)

3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

Until the date of completion of the final statements as of December 31, 2020, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of VAT February 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

On Januari 28,2019, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period Januari 2010.

Nomor Surat / ***Letter Number***	**No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/** ***No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation***	**Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/*Tax Assesment*** ***Letter cancelled by Tax Court***	***Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number***
MPK-2117/PAN.Wk/2019	S- 3574/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	59988/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPN Masa Januari 2010.

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

Until the date of completion of the financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of VAT January 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2018

SPT Tahunan PPh badan tahun 2018 yang dilaporkan oleh LPEI adalah lebih bayar pajak penghasilan badan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2019, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 17 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun 2018 sebesar Rp246.357. Namun demikian pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak PPh Pasal 22, PPh 4(2) dan PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan jumlah pengurangan total Rp30. sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp246.327. Sedangkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2018 atas PPh Pasal 21, 21 Final 23, 26, PPN dan PPN Pemungut adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 26 Mei 2020, LPEI telah menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2018 sebesar Rp246.327.

Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2018 dan rugi fiskal tahun 2018 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued

Claims for tax refund (continued)

4. The Result of 2018 Corporate Income Tax

The 2018 corporate income tax return reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.

Based on this, on August 7, 2019, LPEI received Tax Audit Warrants for all types of tax for the 2018 tax year from the Directorate General of Taxes.

Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated April 17, 2020, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2018 for the tax overpayment amounting Rp246.357. However the tax overpayment was offset by the underpayment of tax articles 22, 4(2) and VAT on taxable intangible goods and services out of custom area with a total reduction Rp30. So the amount transferred to LPEI Rp246,327. Whereas the results of 2018 tax audits article 21,21 Final, 23, 26, VAT and VAT Collecting Tax are Zero Tax Assesment Letter.

On May 26, 2020, LPEI has received transfer from Government Treasury for 2018 Corporate Income Tax refund amounting to Rp246.327.

The result of 2018 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2018 Fiscal Loss recognized by Directorate General of Taxation as follow:

	Pengembalian Pajak ***Tax Return***	**Rugi Fiskal/** ***Fiscal Loss***	
Tahun Pajak 2018			*Fiscal Year 2018*
SKPLB PPh Badan			*TAL Tax Return*
No. 00025/406/18/093/20	(246.357)	(309.885)	*No. 00025/406/18/093/20*
Total	**(246.357)**	**(309.885)**	***Total***

15. Perpajakan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2018 (lanjutan)

Tahun 2019
Pada tanggal 31 Agustus 2020, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk pemeriksaan seluruh jenis pajak tahun pajak 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini dibuat, LPEI sedang dalam proses pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak oleh kantor pajak dan belum terdapat hasil pemeriksaan.

15. Taxes (continued)

f. Tax assesment (continued

Claims for tax refund (continued)

4. The Result of 2018 Corporate Income Tax (continued)

Year 2019
On August 31,2020, LPEI received Tax Audit Letter from Directorate General of Taxation for 2019 All Taxes Audit.

As of the date of these financial statements, LPEI is in the process of being audited for all types of taxes by the tax office and the result has not been known yet

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan tempat terdaftar adalah sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued

The details of debt securities issued based on listed country location are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Dalam Negeri			***Domestic***
Rupiah	29.471.907	37.710.060	*Rupiah*
Luar negeri			***Overseas***
Dolar Amerika Serikat	7.009.137	6.921.333	*United States Dolar*
Dolar Singapura	--	515.522	*Singapore Dollar*
Total	**36.481.044**	**45.146.915**	***Total***

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan jenis dan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of debt securities issued based on type and currency are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Nilai nominal			*Nominal value*
Rupiah			*Rupiah*
Obligasi berkelanjutan			*Continuous bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase IV*
Eximbank II Tahap IV - 2015			*Shelf Registration Offering II - 2015*
Seri B	--	700.000	*Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase V*
Eximbank II Tahap V - 2015			*Shelf Registration Offering II - 2015*
Seri C	--	2.727.000	*Series C*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase VI*
Eximbank II Tahap VI - 2015			*Shelf Registration Offering II - 2015*
Seri C	--	913.000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase VII*
Eximbank II Tahap VII - 2016			*Shelf Registration Offering II - 2016*
Seri C	1.732.250	1.732.250	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase I*
Eximbank III Tahap I - 2016			*Shelf Registration Offering III - 2016*
Seri C	2.252.000	2.252.000	*Series C*
Medium Term Notes (MTN) I			*Indonesia Eximbank Phase I*
Indonesia Eximbank - 2016	500.000	500.000	*Medium Term Notes (MTN) - 2016*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase II*
Eximbank III Tahap II - 2016			*Shelf Registration Offering III - 2016*
Seri C	1.582.000	1.582.000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase III*
Eximbank III Tahap III - 2016			*Shelf Registration Offering III - 2016*
Seri C	282.000	282.000	*Series C*
Seri D	1.038.000	1.038.000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase IV*
Eximbank III Tahap IV - 2017			*Shelf Registration Offering III - 2017*
Seri B	--	1.339.000	*Series B*
Seri C	748.000	748.000	*Series C*
Seri D	1.007.000	1.007.000	*Series D*
Seri E	1.266.000	1.266.000	*Series E*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase V*
Eximbank III Tahap V - 2017			*Shelf Registration Offering III - 2017*
Seri A	--	1.000.000	*Series A*
Seri B	436.000	436.000	*Series B*
Seri C	1.786.000	1.786.000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase VI*
Eximbank III Tahap VI - 2018			*Shelf Registration Offering III - 2018*
Seri A	610.000	610.000	*Series A*
Seri B	1.650.000	1.650.000	*Series B*
Seri C	206.000	206.000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase I*
Eximbank IV Tahap I - 2018			*Shelf Registration Offering IV - 2018*
Seri A	938.000	938.000	*Series A*
Seri B	35.000	35.000	*Series B*
Seri C	1.756.000	1.756.000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase II*
Eximbank IV Tahap II - 2018			*Shelf Registration Offering IV - 2018*
Seri B	190.000	190.000	*Series B*
Seri C	275.700	275.700	*Series C*
Seri D	1.324.000	1.324.000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			*Indonesia Eximbank Phase III*
Eximbank IV Tahap III - 2018			*Shelf Registration Offering IV - 2018*
Seri B	81.000	81.000	*Series B*
Seri C	28.000	28.000	*Series C*
Seri D	380.000	380.000	*Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan) / *16. Debt Securities Issued (continued)*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019			*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri A	--	147.000	*Series A*
Seri B	935.000	935.000	*Series B*
Seri C	1.523.000	1.523.000	*Series C*
Seri D	278.000	278.000	*Series D*
Seri E	349.000	349.000	*Series E*
Seri F	625.000	625.000	*Series F*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019			*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri A	--	312.000	*Series A*
Seri B	621.000	621.000	*Series B*
Seri C	330.000	330.000	*Series C*
Seri D	737.000	737.000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019			*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri A	--	283.000	*Series A*
Seri B	15.000	15.000	*Series B*
Seri C	6.000	6.000	*Series C*
Seri D	714.500	714.500	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019			*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri A	--	600.000	*Series A*
Seri B	101.300	101.300	*Series B*
Seri C	25.500	25.500	*Series C*
Seri D	112.000	112.000	*Series D*
Seri E	219.750	219.750	*Series E*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019			*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri A	88.000	88.000	*Series A*
Seri B	1.551.000	1.551.000	*Series B*
Seri C	22.500	22.500	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48.000		*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020*
	28.404.500	36.377.500	
Dikurangi:			*Less:*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(27.593)	(42.440)	*Unamortized bonds issuance cost*
	(27.593)	(42.440)	
	28.376.907	36.335.060	
Sukuk Mudharabah			*Sukuk Mudharabah*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018			*Sukuk Mudharabah Phase I Shelf Registration Offering I - 2018*
Seri B	365.000	365.000	*Series B*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018			*Sukuk Mudharabah Phase II Shelf Registration Offering I - 2018*
Seri B	250.000	250.000	*Series B*
Seri C	14.000	14.000	*Series C*
Seri D	155.000	155.000	*Series D*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019			*Sukuk Mudharabah Phase III Shelf Registration Offering I - 2019*
Seri A	--	230.000	*Series A*
Seri B	145.000	145.000	*Series B*
Seri C	66.000	66.000	*Series C*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan) / *16. Debt Securities Issued (continued)*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV - 201	--	150.000	*Sukuk Mudharabah Phase IV Shelf Registration Offering I - 2019*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV - 201	100.000	--	*Sukuk Mudharabah Phase I Shelf Registration Offering II - 2019*
	1.095.000	1.375.000	
Total Rupiah	**29.471.907**	**37.710.060**	***Total Rupiah***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Obligasi berkelanjutan			*Continuous bonds*
EMTN Program IEB - 2017 (USD500.000.000)	7.025.000	6.941.250	*IEB EMTN Programme - 2017 (USD500,000,000)*
Dikurangi:			*Less:*
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(5.666)	(7.086)	*Unamortized bonds discount*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(10.197)	(12.831)	*Unamortized bonds issuance cost*
	(15.863)	(19.917)	
Total Dolar Amerika Serikat	**7.009.137**	**6.921.333**	***Total United States Dollars***
Dolar Singapura			***Singapore Dollars***
EMTN Program IEB - 2015 (SGD50.000.000)	--	515.752	*IEB EMTN Programme - 2015 (SGD50,000,000)*
Dikurangi:			*Less:*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	--	(230)	*Unamortized bonds issuance cost*
Total Dolar Singapura	**--**	**515.522**	***Total Singapore Dollars***
Neto	**36.481.044**	**45.146.915**	***Net***

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan pihak-pihak: / *The details of debt securities issued based on parties:*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Obligasi	7.530.300	9.784.300	*Bonds*
Sukuk Mudharabah	494.000	494.000	*Sukuk Mudharabah*
	8.024.300	10.278.300	
Pihak ketiga			*Third parties*
Obligasi	20.379.866	26.093.200	*Bonds*
Sukuk Mudharabah Indonesia	601.000	881.000	*Sukuk Mudharabah*
Medium Term Notes	500.000	500.000	*Medium Term Notes*
European Medium Term Notes (EMTN)	7.019.334	7.457.002	*European Medium Term Notes (EMTN)*
	28.500.200	34.931.202	
Total	36.524.500	45.209.502	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(5.666)	(7.086)	*Unamortized bonds discount*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(37.790)	(55.501)	*Unamortized bonds issuance cost*
	(43.456)	(62.587)	
Neto	**36.481.044**	**45.146.915**	***Net***

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015

Pada bulan Januari 2015, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.500.000, yang merupakan obligasi berseri A dan B. dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

a. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015

In January 2015, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 with a face value of Rp1,500,000, which is divided into series A and B. with details as follows

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV - 2015				***Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II - 2015***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV - 2015 Seri A	800.000	7 Januari/ *January 2018*	9,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II - 2015 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV - 2015 Seri B	700.000	7 Januari/ *January 2020*	9,75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II - 2015 Series B*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering II targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari 2015. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 7 April 2015.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on January 8, 2015. Interest is payable quarterly starting on April 7, 2015.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Januari 2018 dan 7 Januari 2020.

IEB Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 Series A and B were fully paid upon maturity on January 7, 2018 and January 7, 2020, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 sebesar Rp2.233 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 memiliki peringkat “idAAA” dari PT Pefindo pada pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

16. Debt Securities Issued (continued)

a. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 (continued)

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 amounting to Rp2,233 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 were rated “idAAA” by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV 2015 (lanjutan)

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015

Pada bulan Maret 2015, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.600.000, yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

a. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering II 2015 (continued)

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

b. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015

In March 2015, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 with a face value of Rp4,600,000, which is divided into series A, B, and C with details as follows:

Seri/*Series*	**Jumlah nominal/ *Nominal amount***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date***	**Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	***Obligasi/ Bonds***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V - 2015				***Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II - 2015***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 Seri A	575.000	23 Maret/ *March 2016*	8,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II - 2015 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 Seri B	1.298.000	13 Maret/ *March 2018*	9,00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II - 2015 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 Seri C	2.727.000	13 Maret/ *March 2020*	9,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II - 2015 Series C*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Dana yang berhasil dihimpun dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 adalah sebesar Rp4.600.000, yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2015.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 Seri A, Seri B dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 23 Maret 2016, 13 Maret 2018, dan 13 Maret 2020.

Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 13 Juni 2015. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-245/D.04/2014 tanggal 23 Mei 2014.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 sebesar Rp3.502 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

b. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering II targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

The funds to be raised from Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 amounted to Rp4,600,000, and are listed in Indonesia Stock Exchange on March 16, 2015.

IEB Phase V Shelf Registration Offering II - 2015 Series A, Series B and Series C were fully paid upon maturity on March 23, 2016, March 13, 2018 and March 13, 2020, respectively.

Interest is payable quarterly starting on June 13, 2015, The Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 are listed in the Indonesia Stock Exchange. The offering of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 was declared effective based on the letter No. S-245/D.04/2014 dated May 23, 2014 of the Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor Indonesia Financial Services Authority.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 amounting to Rp3,502 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V 2015 memiliki peringkat "idAAA" dari PT Pefindo pada pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

b. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 (continued)

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering II 2015 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

c. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015

Pada bulan September 2015, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.979.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

c. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015

In September2015, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 with a face value of Rp1,979,000, which is divided into series A, B, and C with details as follows:

Seri/*Series*	**Jumlah nominal/ *Nominal amount***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date***	**Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	***Obligasi/ Bonds***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI - 2015				***Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II - 2015***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 Seri A	757.000	26 September/ *September 2016*	8,40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II - 2015 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 Seri B	309.000	16 September/ *September 2018*	9,20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II - 2015 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 Seri C	913.000	16 September/ *September 2020*	9,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II - 2015 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering II targeted funds to be raised amounted to Rp24,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 September 2015. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015.

These bond are listed in Indonesia Stock Exchange on September 17, 2015. Interest is payable quarterly starting on December 16, 2015.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 Seri A, B, dan C telah jatuh tempo dan masing-masing dilunasi pada tanggal 26 September 2016, 16 September 2018, dan 16 September 2020.

IEB Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on September 26, 2016, September 16, 2018, September 16, 2020, respectively.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI - 2015 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

c. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 sebesar Rp2.651 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI 2015 memiliki peringkat "idAAA" dari PT Pefindo pada pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

d. *Euro Medium Term Note* (EMTN) *Programmme* Indonesia Eximbank 2015

Pada bulan November 2015, LPEI menerbitkan *Euro Medium Term Note* (EMTN) *Programme* Indonesia Eximbank - 2015 dengan nilai nominal sebesar SGD50.000.000 (nilai penuh), dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

c. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 amounting to Rp2,651 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015.

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering II 2015 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

d. Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 2015

In November 2015, LPEI issued the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme -2015 with a face value of SGD50,000,000 (full amount) with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

d. *Euro Medium Term Note* (EMTN) *Programmme* Indonesia Eximbank 2015 (lanjutan)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Euro Medium Term Note (EMTN) *Programme* Indonesia Eximbank 2015 (nilai penuh)	SGD50.000.000	3 November/ *November 2020*	4,135% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2015 (full amount)*

Jadwal pembayaran bunga adalah semesteran dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 3 Mei 2016. EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2015 tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan EMTN Indonesia Eximbank - 2015 telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat dari Singapore Exchange Securities Trading Limited tanggal 4 November 2015.

Bertindak sebagai wali amanat EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2015 adalah The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. Bertindak sebagai penjamin emisi Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank - 2015 adalah Overseas-Chinese Banking Corporation Limited Singapore ("OCBC"). Penerimaan neto dari penerbitan EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2015 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2015 sebesar SGD109.919 (nilai penuh) dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

d. Indonesia Eximbank Eoro Medium Term Note (EMTN) Programme 2015 (continued)

Interest is payable quarterly starting on May 3, 2016. The Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programe - 2015 are listed in the Indonesia Stock Exchange. The offering of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2015 was declared effective based on the letter dated November 4, 2015 of the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

The trustee for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) is The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. The underwriter for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) is Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Singapore ("OCBC"). The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) - 2015 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) amounting to SGD109,919 (full amount) as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

d. Euro Medium Term Note (EMTN) Programmme Indonesia Eximbank 2015 (lanjutan)

EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2015 memiliki peringkat "Baa2" dan "Baa2" berdasarkan Moody's Investor Inc., pada tanggal 31 Desember 2019.

Euro Medium Term Note (EMTN) Programmme Indonesia Eximbank 2015 telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 November 2020.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016

Pada bulan Februari 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.036.250 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

d. Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 2015 (continued)

Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) were rated "Baa2" and "Baa2" by Moody's Investor Inc., as of December 31,2019

Euro Medium Term Note (EMTN) Programmme Indonesia Eximbank 2015 were fully paid upon maturity on November 3, 2020.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

The bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

e. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016

In February 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 with a face value of Rp4,036,250, which is divided into series A, B, and C with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII - 2016				***Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri A	657.000	1 Maret/ *March* 2017	8,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri B	1.647.000	19 Februari/ *February* 2019	9,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri C	1.732.250	19 Februari/ *February* 2021	9,60% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series C*

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2016 dan merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 1 Maret 2017 dan 19 Februari 2019.

Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 2016.

16. Debt Securities Issued (continued)

e. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016

These bonds were listed in Indonesia Stock Exchange on February 22, 2016 and part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering II with targeted fund subscribed of Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

IEB Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 Series A and B were fully paid upon maturity on March 1, 2017 and February 19, 2019.

Interest is payable quarterly starting on May 19, 2016.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 sebesar Rp4.047 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)

e. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 amounting to Rp4,047 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016.

Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 were rated “idAAA” by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama periode efektif PUB II, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VII dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp19.321.250. Adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp4.678.750 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB II pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2016.

f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016

Pada bulan Juni 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.000.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

e. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 (continued)

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia

The bondholders’ right is paripassu without preference offer other LPEI creditors’ rights in compliance with prevailing regulations.

During the Shelf Registration Offering Bond II period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VII with total funds raised amounting to Rp19,321,250. The deficiency of the target amount of funds raised is Rp4,678,750 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond II on LPEI’s official Website and IDX’s official Website on March 7, 2016.

f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016

In June 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering I 2016 with a face value of Rp4,000,000 which is divided into series A, B and C with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I - 2016				***Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri A	688.000	18 Juni/ *June* 2017	7,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri B	1.060.000	8 Juni/ *June* 2019	8,20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri C	2.252.000	8 Juni/ *June* 2021	8,70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juni 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 September 2016.

These bond are listed in Indonesia Stock Exchange on June 9, 2016. Interest is payable quarterly starting on September 8, 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 Juni 2017 dan 8 Juni 2019.

IEB Phase I Shelf Registration Offering III 2016 Series A and B were fully paid upon maturity on June 18, 2017 and June 8, 2019, respectively.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 sebesar Rp4.964 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,964 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The bondholders' right is paripassu without preference offers other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

g. Medium Term Notes (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016

Pada bulan Juli 2016, LPEI menerbitkan Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

g. Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016

In July 2016, LPEI issued the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 with a face value of Rp500,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016	500.000	15 Juli/ *July* 2021	8,65% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) - 2016*

Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2016. Penerbitan Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 telah dinyatakan efektif tanggal 14 Juli 2016 setelah diterimanya seluruh dana hasil Penerbitan MTN masuk ke dalam rekening penerbit dan juga merupakan tanggal distribusi/tanggal pendistribusian secara elektronik MTN oleh KSEI kepada Pemegang MTN.

Interest is payable quarterly starting on October 15, 2016. The offering of the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 was declared effective on July 14, 2016 based on all proceeds from issuance of MTN entered the account issuer and also the distribution date/date of distribution of electronic MTN by KSEI to the MTN Holder.

Bertindak sebagai Agen Pemantau Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai Arranger (Penatalaksana) adalah PT CIMB Securities Indonesia dan PT DBS Vickers Securities Indonesia. Penerimaan neto dari penerbitan Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Arranger for the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 is PT CIMB Securities Indonesia and PT DBS Vickers Securities Indonesia. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI mencatat beban emisi Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank tahun 2016 sebesar Rp901 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu MTN tersebut dengan metode suku bunga efektif.

LPEI recorded the issuance cost on the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 amounting to Rp901 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

g. Medium Term Notes (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 (lanjutan)

MTN I Indonesia Eximbank 2016 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

MTN ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

MTN ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

g. Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 (continued)

Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The MTN are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

The MTN are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016

Pada bulan Agustus 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.331.000, yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

h. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016

In August 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 with a face value of Rp4,331,000, which is divided into series A, B, and C with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II - 2016				***Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri A	1.793.000	5 September/ *September* 2017	7,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri B	956.000	25 Agustus/ *August* 2019	7,95% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri C	1.582.000	25 Agustus/ *August* 2021	8,35% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016 Series C*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Selama tahun 2016, dana yang berhasil dihimpun dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 adalah sebesar Rp4.331.000, yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 5 September 2017 dan 25 Agustus 2019.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 sebesar Rp4.216 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016.

16. Debt Securities Issued (continued)

h. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

During the year 2016, the fund that can be raised from Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III2016 amounted to Rp4,331,000, that are listed in Indonesia Stock Exchange on August 26, 2016.

IEB Phase II Shelf Registration Offering III 2016 Series A and B were fully paid upon maturity on September 5, 2017 and August 25, 2019, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,216 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

h. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016

Pada bulan November 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.532.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C and D dengan rincian sebagai berikut:

i. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016

In November 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 with a face value of Rp2,532,000, which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016				***Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 Seri A	672,000	2 Desember/ *December* 2017	7,15% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 Seri B	540,000	22 November/ *November* 2019	7,85% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 Seri C	282,000	22 November/ *November* 2021	8,20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 Seri D	1,038,000	22 November/ *November* 2023	8,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 2 Desember 2017 dan 22 November 2019.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 sebesar Rp4.093 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)

i. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on November 23, 2016. Interest is payable quarterly starting on February 22, 2017.

IEB Phase III Shelf Registration Offering III 2016 Series A and B were fully paid upon maturity on December 2, 2017 and November 22, 2019, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III -2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,093 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016.

Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 were rated “idAAA” by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

i. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders’ right is paripassu without preference offer other LPEI creditors’ rights in compliance with prevailing regulations.

j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017

Pada bulan Februari 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp5.221.000, yang merupakan obligasi berseri A, B, C, D dan E dengan rincian sebagai berikut:

j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017

In February2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp5,221,000, which is divided into series A, B, C, D and E with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017				***Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A	861.000	3 Maret/ *March* 2018	7,40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri B	1.339.000	23 Februari/ *February* 2020	8,40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri C	748.000	23 Februari/ *February* 2022	8,90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri D	1.007.000	23 Februari/ *February* 2024	9,20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri E	1.266.000	23 Februari/ *February* 2027	9,40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series E*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Maret 2018 dan 23 Februari 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 sebesar Rp6.556 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 24, 2017. Interest is payable quarterly starting on May 23, 2017.

IEB Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 Series A and B were fully paid upon maturity on March 3, 2018 and February 23, 2020, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp6,556 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 were rated “idAAA” by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders’ right is paripassu without preference offer other LPEI creditors’ rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

k. Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017

Pada bulan April 2017, LPEI menerbitkan *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank* - 2017 dengan nilai nominal sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) dengan rincian sebagai berikut:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Euro Medium Term Note (EMTN) *Programme Indonesia Eximbank* 2017 (nilai penuh)	USD500.000.000	6 April/ *April* 2024	3,87% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (full amount)*

EMTN *Programme Indonesia Eximbank* - 2017 ini merupakan bagian dari *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme* dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar USD1.500.000.000 (nilai penuh).

Jadwal pembayaran bunga adalah semesteran dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017. EMTN *Programme Indonesia Eximbank* - 2017 tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan EMTN Indonesia Eximbank - 2017 telah dinyatakan efektif mulai tanggal 7 April 2017.

Bertindak sebagai wali amanat EMTN *Programme* Indonesia Eximbank 2017 adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*. Bertindak sebagai *Join Lead Managers (JLM)* emisi *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank* 2017 adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation dan Mitsubishi UFJ Securities International*. Penerimaan neto dari penerbitan EMTN *Programme* Indonesia Eximbank 2017 digunakan untuk membayar hutang yang telah ada, pembiayaan operasional dan aset produktif dan untuk kegunaan umum perusahaan.

16. Debt Securities Issued (continued)

k. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme 2017

In April 2017, LPEI issued the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 017 with a face value of USD500,000,000 (full amount) with details as follows:

The Indonesia Eximbank EMTN Programme - 2017 are part of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme with fixed interest rate and targeted funds to be raised amounted to USD1,500,000,000 (full amount.

Interest is payable semi-annually starting on October 6, 2017. The Indonesia Eximbank EMTN Programme -2017 is listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The offering of the Indonesia Eximbank EMTN Programme - 2017 was declared effective since April 7, 2017.

The trustee for the Indonesia Eximbank EMTN -2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. The Join Lead Managers (JLM) for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation and Mitsubishi UFJ Securities International. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank EMTN Programme - 2017 were used to refinance existing debt, finance its operations and earning assets and for its general corporate purposes.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

***k. Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017* (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi EMTN *Programme Indonesia Eximbank* -2017 sebesar USD1.405.097 (nilai penuh) dan diskonto sebesar USD860.000 (nilai penuh) yang dikurangkan langsung dari hasil emisi EMTN *Programme Indonesia Eximbank* -2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, EMTN *Programme Indonesia Eximbank* 2017 memiliki peringkat "BBB" dari Fitch dan "Baa2" dari Moody's Investor Inc.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017

Pada bulan Agustus 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.222.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

k. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme 2017 (continued)

LPEI recorded the issuance cost and discount on Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 amounting to USD1,405,097 (full amount) and USD860,000 (full amount), respectively, as a deduction from the proceeds of the Indonesia EMTN Programme 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

As of December 31, 2020 and 2019, Indonesia EMTN Programme 2017 were rated "BBB" by Fitch and "Baa2" by Moody's Investor Inc.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.
'

The bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017

In August 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp3,222,000 which is divided into series A, B, and C with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017				***Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A	1.000.000	15 Agustus/ *August* 2020	7,60% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri B	436.000	15 Agustus/ *August* 2022	7,90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C	1.786.000	15 Agustus/ *August* 2024	8,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 November 2017.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on August 16, 2017. Interest is payable quarterly starting on November 15, 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2020.

IEB Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A was fully paid upon maturity on August 15, 2020.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V -2017 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 sebesar Rp4.333 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

16. Debt Securities Issued (continued)

l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp4,333 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 were rated “idAAA” by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018

Pada bulan Februari 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.466.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018

In February 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 with a face value of Rp2,466,000 which is divided into series A, B, and C with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018				***Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018 Seri A	610.000	14 Februari/ *February* 2021	6,35% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018 Seri B	1.650.000	14 Februari/ *February* 2023	6,70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018 Seri C	206.000	14 Februari/ *February* 2025	6,90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series C*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 sebesar Rp3.783 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan penerbitan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018.

16. Debt Securities Issued (continued)

m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 15, 2018. Interest is payable quarterly starting on May 14, 2018.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 amounting to Rp3,783 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama periode efektif PUB III, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VI dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp21.772.000 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.228.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB III pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018.

16. Debt Securities Issued (continued)

m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 (continued)

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not guaranteed by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not secured by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

During the Shelf Registration Offering Bond III period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VI with total funds raised amounting to Rp21,772,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp2,228,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond III on LPEI's official Website and Indonesian Stock Exchange's (IDX) official Website on February 28, 2018.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.729.000 yang merupakan obligasi berseri A, B dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

n. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018

In June 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,729,000 which is divided into series A, B and C with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018				***Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018 Seri A	938.000	6 Juni/ *June* 2021	7,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018 Seri B	35.000	6 Juni/ *June* 2023	7,70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018 Seri C	1.756.000	6 Juni/ *June* 2025	8,30% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 September 2018.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on June 7, 2018. Interest is payable quarterly starting on September 6, 2018.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 sebesar Rp4.749, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

n. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp4,749, as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018.

Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

o. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp500.000 yang terdiri dari Sukuk Mudharabah seri A dan Seri B, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

o. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018

On June 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I Year 2018 ("Sukuk Mudharabah") amounting to Rp500,000 which is divided into series A and B, with detail as follows:

Seri/*Series*	**Jumlah nominal/ *Nominal amount***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date***	**Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	***Obligasi/ Bonds***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018				***Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018 Seri A	135.000	16 Juni/ *June* 2019	6,15%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018 Seri B	365.000	6 Juni/ *June* 2021	7,50%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series B*

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 16,18% dengan indikatif bagi hasil setara 6,15% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Sedangkan nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 19,74% dengan indikatif bagi hasil setara 7,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 6 Juni 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A is at 16.18% with profit sharing indicative equivalent at 6.15% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. While Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B is at 19.74% with profit sharing indicative equivalent at 7.50% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in June 6, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed on the Indonesian Stock Exchange.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

o. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A dan B akan dilakukan pada tanggal 6 September 2018, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal16 Juni 2019 untuk Seri A dan tanggal 6 Juni 2021 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 Juni 2019.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat “idAAA(sy)”.

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018

16. Debt Securities Issued (continued)

o. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018 (continued)

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A and Series B will be paid on September 6, 2018, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah Series A will be made on June 16, 2019 and Series A on June 6, 2021 for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018 Series A was fully paid upon maturity on June 16, 2019.

As of December 31, 2020 and 2019 Sukuk Mudharabah is rated as “idAAA(sy)” by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

o. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 (lanjutan)

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan asset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018

Pada bulan September 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.514.100 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

o. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018 (continued)

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

p. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018

In September 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,514,100 which is divided into series A, B, C, dan D with details as follows:

Seri/*Series*	**Jumlah nominal/ *Nominal amount***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date***	**Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	***Obligasi/ Bonds***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018				***Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A	724.400	15 September/ *September* 2019	7,00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri B	190.000	5 September/ *September* 2021	7,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri C	275.700	5 September / *September* 2023	8,40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri D	1.324.000	5 September / *September 2025*	*8,75% tetap/fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 September 2019.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 sebesar Rp3.912 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

p. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 6, 2018. Interest is payable quarterly starting on December 5, 2018.

IEB Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 Series A were fully paid upon maturity on September 15, 2019.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp3,912 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

p. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018.

Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

q. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.004.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

q. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018

In November 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp1,004,000 which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018				***Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A	515.000	18 November/ *November* 2019	8,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri B	81.000	8 November/ *November* 2021	8,75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri C	28.000	8 November/ *November* 2023	9,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri D	380.000	8 November/ *November* 2025	9,75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019.

IEB Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A was fully paid upon maturity on November 18, 2019.

Dana yang berhasil dihimpun dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 adalah sebesar Rp1.004.000, yang terdiri dari Obligasi Seri A Rp515.000, Obligasi Seri B Rp81.000, Obligasi Seri C Rp28.000, dan Obligasi Seri D Rp380.000.

The fund that can be raised from Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 amounted to Rp1,004,000, that consists of Bonds Series A Rp515,000, Bonds Series B Rp81,000, Bonds Series C Rp28,000, and Bonds Series D Rp380,000.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

q. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 (lanjutan)

Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/D.04/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 sebesar Rp2.996 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)

q. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

Interest is payable quarterly starting on February 8, 2018. The offering of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 was declared effective based on the letter No. S-56/D.04/2018 dated May 25, 2018 of the Chief Executive of Capital Market Supervisor Indonesia Financial Services Authority.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp2,996 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

IEB Phase III Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on November 18, 2019.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018.

Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 were rated “idAAA” by PT Pefindo As of December 31, 2020 and 2019.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

q. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

q. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

r. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp630.500 yang terdiri dari Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D, dengan rincian sebagai berikut:

r. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018

On November 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II Year 2018 ("Shelf Sukuk Mudharabah") amounting to Rp630,500, which is divided into series A, B, C, and D, with detail as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018				***Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A	211.500	18 November/ *November 2019*	8,25%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri B	250.000	8 November/ *November 2021*	8,75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series B*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri C	14.000	8 November/ *November 2023*	9,25%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri D	155.000	8 November/ *November 2025*	9,75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

r. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 (lanjutan)

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 43,42% dengan indikatif bagi hasil setara 8,25% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 46,05% dengan indikatif bagi hasil setara 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 48,68% dengan indikatif bagi hasil setara 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri D adalah sebesar 51,32% dengan indikatif bagi hasil setara 9,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 18 November 2019 untuk Seri A, tanggal 8 November 2021untuk Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Seri C, dan tanggal 8 November 2025 untuk Seri D yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

16. Debt Securities Issued (continued)

r. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 (continued)

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 43.42% with profit sharing indicative equivalent at 8.25% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 46.05% with profit sharing indicative equivalent at 8.75% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 48.68% with profit sharing indicative equivalent at 9.25% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series D at 51.32% with profit sharing indicative equivalent at 9.75% per annum with 7 (seven) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of SukukMudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A, B, C, and D will be paid on February 8, 2019, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah Series A will be made on November 18, 2019, Series B on November 8, 2021, Series C on November 8, 2023, and Series D on November 8, 2025 for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

r. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 (lanjutan)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

s. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.857.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, D, E dan F dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

r. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 (continued)

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 Series A was fully paid uponmaturity on November 18, 2019.

On December31, 2019 and 2018, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

s. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019

In April 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp3,857,000 which is divided into series A, B, C, D, E and F with details as follows

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

s. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019				***Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri A	147.000	03 Mei/ *May* 2020	7,35% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri B	935.000	23 April/ *April* 2022	8,40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri C	1.523.000	23 April/ *April* 2024	8,90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri D	278.000	23 April/ *April* 2026	9,25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri E	349.000	23 April/ *April* 2029	9,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri F	625.000	23 April/ *April* 2034	9,80% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series F*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on April 24, 2019. Interest is payable quarterly starting on July 23, 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020.

IEB Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A was fully paid upon maturity on May 3, 2020.

Dana yang berhasil dihimpun dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 adalah sebesar Rp3.857.000, yang terdiri dari Obligasi Seri A Rp147.000, Obligasi Seri B Rp935.000, Obligasi Seri C Rp1.523.000, Obligasi Seri D Rp278.000, Seri E Rp349.000 dan Seri E Rp625.000.

The fund that can be raised from Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 amounted to Rp3,857,000, that consists of Bonds Series A Rp147,000, Bonds Series B Rp935,000, Bonds Series C Rp1,523,000, Series D Rp278,000, Series E Rp349,000,and Bonds Series F Rp625,000.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

s. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)

Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/D.04/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 sebesar Rp7.525 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)

s. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Interest is payable quarterly starting on July 23, 2019. The offering of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2018 was declared effective based on the letter No. S-56/D.04/2018 dated May 25, 2018 of the Chief Executive of Capital Market Supervisor Indonesia Financial Services Authority.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp7,525 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 were rated “idAAA” by PT Pefindo as of December 31, 2019.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

s. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

s. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders’ right is paripassu without preference offer other LPEI creditors’ rights in compliance with prevailing regulations.

t. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019 (“Sukuk Mudharabah”) sebesar Rp441.000 yang terdiri dari Sukuk Mudharabah seri A, B dan C, dengan rincian sebagai berikut:

t. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019

On April 2019, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III Year 2019 (“Sukuk Mudharabah”) amounting to Rp441,000, which is divided into series A, B, and C, with detail as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019				***Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A	230.000	03 Mei/ *May 2020*	7,35%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri B	145.000	23 April/ *April 2022*	8,40%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series B*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri C	66.000	23 April/ *April 2024*	8,90%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

t. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 (lanjutan)

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 38,68% dengan indikatif bagi hasil setara 7,35% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 44,21% dengan indikatif bagi hasil setara 8,40% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 46,84% dengan indikatif bagi hasil setara 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, dan C akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020 untuk Seri A, tanggal 23 April 2022 untuk Seri B, dan tanggal 23 April 2024 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat “idAAA(sy)”.

16. Debt Securities Issued (continued)

t. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 (continued)

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer’s nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 38.68% with profit sharing indicative equivalent at 7.35% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer’s nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 44.21% with profit sharing indicative equivalent at 8.40% per annum with 3 (three) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. Customer’s nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 46.84% with profit sharing indicative equivalent at 8.90% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. This Shelf Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Shelf Sukuk Mudharabah Series A, B, and C will be paid on July 23, 2019, while the last profit sharing income payment and due date of Shelf Sukuk Mudharabah Series A will be made on May 3, 2020, Series B on April 23, 2022, and Series C on April 23, 2024 for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 Series A was fully paid uponmaturity on May 3, 2020.

On December 31, 2020 and 2019, Sukuk Mudharabah is rated as “idAAA(sy)” by Pefindo.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

t. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 (lanjutan)

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019.

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, LPEI dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah sebelum tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah. LPEI mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali dengan tujuan sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

u. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019

Pada bulan Juli 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.000.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

t. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 (continued)

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019.

One year after the allotment date, LPEI may repurchase Sukuk Mudharabah partially or fully prior to repayment date of Sukuk Mudharabah principal. The Bank has the right to treat the repurchase to be used as the Sukuk Mudharabah redemption or to be subsequently sold at market price by following the provisions of Trustee Agreements and prevailing regulation.

u. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019

In July 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp2,000,000 which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

u. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

u. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019				***Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A	312.000	19 Juli/ *July* 2020	7,45% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri B	621.000	9 Juli/ *July* 2022	8,45% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C	330.000	9 Juli/ *July* 2024	8,70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri D	737.000	9 Juli/ *July* 2026	9,20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 10, 2019. Interest is payable quarterly starting on October 9, 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juli 2020.

IEB Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on July 19, 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

u. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

u. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 sebesar Rp3.594. yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,594 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 were rated "idAAA" by PT Pefindo As of December 31, 2020 and 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

v. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019

Pada bulan September 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.018.500 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

v. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019

In September 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,018,500 which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019				***Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A	283.000	13 September/ *September* 2020	7,00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri B	15.000	3 September/ *September* 2022	7,80% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri C	6.000	3 September/ *September* 2024	8,10% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri D	714.500	3 September / *September* 2026	8,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 4, 2019. Interest is payable quarterly starting on December 3, 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 September 2020.

IEB Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on September 13, 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

v. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 sebesar Rp3.040 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

v. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,040 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019.

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 were rated “idAAA” by PT Pefindo As of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders’ right is paripassu without preference offer other LPEI creditors’ rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

w. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV 2019

Pada bulan September 2019, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap IV Tahun 2019 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp150.000, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

w. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV 2019

On September, 2019, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV Year 2019 ("Shelf Sukuk Mudharabah") amounting to Rp150,000, as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV - 2019				***Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV - 2019***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV - 2019	150.000	13 September/ *September 2020*	7,00%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV - 2019*

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 36,84% dengan indikatif bagi hasil setara 7,00% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu 3 September 2019. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah at 36.84% with profit sharing indicative equivalent at 7.00% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date in September 3, 2019. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 September 2020 yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah will be paid on December 3, 2019, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah will be made on September 13, 2020, for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV 2019 telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 September 2020.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV 2019 was fully paid upon maturity on September 13, 2020.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

w. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV 2019 (lanjutan)

Pada 31 Desember 2019, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap IV Tahun 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)

w. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV 2019 (continued)

On December 31, 2019, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase IV 2019.

x. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019

Pada bulan Oktober 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.058.550 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, D dan E dengan rincian sebagai berikut:

x. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019

In October 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,058,550 which is divided into series A, B, C, D and E with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019				***Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A	600.000	9 November/ *November* 2020	7,00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri B	101.300	29 Oktober/ *October* 2022	7,80% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri C	25.500	29 Oktober/ *October* 2024	8,10% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri D	112.000	29 Oktober/ *October* 2026	8,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII *2019 Seri E*	219.750	29 Oktober/ *October* 2029	8,75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

x. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 November 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 sebesar Rp4.238 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

x. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on October 30, 2019. Interest is payable quarterly starting on January 29, 2020.

IEB Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on November 9, 2020.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp4,238 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

x. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 memiliki peringkat “idAAA” berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

y. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019

Pada bulan Desember 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.661.500 yang merupakan obligasi berseri A, B dan C dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

x. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds (“Bonds”) and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019.

Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 were rated “idAAA” by PT Pefindo As of December 31, 2020 and 2019.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI’s fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

y. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019

In December 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,661,500 which is divided into series A, B and C with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

y. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

y. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019				***Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A	88.000	6 Desember/ *December* 2022	7,50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri B	1.551.000	6 Desember/ *December* 2024	7,90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII *2019 Seri C*	22.500	6 Desember/ *December* 2026	8,20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on December 9, 2019. Interest is payable quarterly starting on March 6, 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 sebesar Rp3.323, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,323 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortied over the term of the bonds using the effective interest rate method.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

y. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

y. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 were rated "idAAA" by PT Pefindo As of December 31, 2020 and 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

y. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)

Selama periode efektif PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VIII serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp17.564.150 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp14.435.850 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp32.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.

z. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020

Pada bulan Juli 2020, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp48.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020				***Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48.000	8 Juli/ *July* 2023	7,60% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligas Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp22.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

16. Debt Securities Issued (continued)

y. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

During the Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VIII and Sukuk Mudharabah Phase I to Phase IV with total funds raised amounting to Rp17,564,1500, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp14,435,850 from target funds amounting to Rp32,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond III on LPEI's official Website and IDX's official Website on March 27, 2020.

z. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020

In July 2020, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 with a face value of Rp48,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering V with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp22,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

z. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 (lanjutan)

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2020. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 sebesar Rp905 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020.

16. Debt Securities Issued (continued)

z. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 (continued)

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 9, 2020. Interest is payable quarterly starting on October 8, 2020.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 amounting to Rp905 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020.

Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 were rated "idAAA" by PT Pefindo As of December 31, 2020.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

z. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

z. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 (continued)

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

aa. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020

Pada bulan Juli 2020, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2020 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp100.000, dengan rincian sebagai berikut:

aa. Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020

On July 2020, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I Year 2020 ("Sukuk Mudharabah") amounting to Rp100,000, as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020				***Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020	100.000	18 Juli/ *July* 2021	6,75% tetap/*fixed*	*Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020*

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

aa. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020 (lanjutan)

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 47,37% dengan indikatif bagi hasil setara 6,75% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu 8 Juli 2020. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2021 yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Pada 31 Desember 2020, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2020.

16. Debt Securities Issued (continued)

aa. Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020 (continued)

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah at 47.37% with profit sharing indicative equivalent at 6.75% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date in July 8, 2020. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah will be paid on October 8, 2020, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah will be made on July 18, 2021, for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

On December 31, 2020, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Self Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

aa. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020 (lanjutan)

Persyaratan dan kondisi pembatasan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan, kecuali pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI) (POJK No. 40) Pasal 14 ayat (2) perihal pemenuhan terhadap rasio Non PerformingFinancing (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang melampaui ketentuan yang berlaku yaitu di atas 5%. Atas pelampauan tersebut, sesuai dengan POJK No. 40 Pasal 71, LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF bersih oleh OJK.

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap POJK tersebut, LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK melalui surat LPEI kepada OJK pada tanggal 6 Februari dan 18 Februari 2020 dengan surat No. BS.0016/CEO/02/2020 dan Pemenuhan Action Plan Pembiayaan Bermasalah (NPF) melalui surat LPEI kepada OJK No. BS0027/MDI/02/2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan surat Nomor: BS.0039/CEO/02/2019 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Atas surat-surat tersebut, OJK menyatakan tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF bersih yang disampaikan oleh LPEI untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) POJK No. 40 tersebut (Catatan 9h.9).

Selanjutnya LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan secara periodik kepada OJK (Catatan 9h.9).

16. Debt Securities Issued (continued)

aa. Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020 (continued)

Terms and required covenants

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has complied with all the terms and required covenants, except for the fulfillment of the Financial Services Authority Regulations (POJK No.40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI (POJK No. 40) Article 14 paragraph (2) concerning the fulfillment of Non Performing Financing (NPF) net of allowance for impairment losses on financing ratio that exceeds the prevailing provision, i.e. above 5%. For the excess over prevailing provision, in accordance with POJK No. 40 Article 71, LPEI must submit action plan no later than 1 (one) month from the date of OJK determine the incompliance of NPF net.

In relation with the requirement of POJK, LPEI has submitted action plan in fulfilling the compliance with the Non Performing Financing (NPF) requirement to OJK through letter from LPEI to OJK on February 6 and February 18, 2020, No. BS0016/CEO/02/2020 and fulfillment of the Action Plan of Non Performing Financing (NPF) through letter from LPEI No. BS.0027/CEO/02/2020 for the year ended December 31, 2019 and as of February 11, 2019 through letter No. BS.0039/CEO/02/2019 for the year ended December 31, 2018. Through those letters, OJK has communicated that it has no objection to the action plan in fulfilling the compliance with NPF net ratio that LPEI submitted in order to comply with the requirement of Article 14 paragraph 2 POJK No. 40 (Note 9h.9).

Furthermore, LPEI must implement the action plan that has been submitted to OJK and submit progress report of the action plan periodically for OJK (Note 9h.9).

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

aa. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020 (lanjutan)

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh para kreditur perihal pelampauan NPF ini (Catatan 9h.9).

16. Debt Securities Issued (continued)

aa. Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020 (continued)

As of the date of this financial statement, there is no action taken by the creditors regarding exceeding these NPF (Note 9h.9).

17. Pinjaman Yang Diterima / *17. Fund Borrowings*

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Pinjaman			*Borrowings*
Sindikasi	18.959.188	38.375.227	*Syndicated*
Bilateral	9.640.585	3.117.685	*Bilateral*
Total	**28.599.773**	**41.492.912**	***Total***

Di bawah ini adalah rincian pinjaman yang diterima berdasarkan pemberi pinjaman:

Below are the details of fund borrowings based on the lenders:

Pinjaman Sindikasi / ***Borrowings - Syndicated***

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
Facility agent					*with facility agent*
MUFG Bank. Ltd.	249.783.532	3.509.459	24 Mei/ *May 24, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2021*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	84.922.488	1.193.161	23 Agustus/ *Agustus 23, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2021*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	348.132.144	4.891.257	24 Mei/ *May 24, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2023*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	69.620.570	978.169	23 Agustus/ *Agustus 23, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2023*	*MUFG Bank. Ltd.*
		10.572.046			
Chinatrust Banking Corporation Ltd	497.485.345	6.989.669	23 Mei/ *May 23, 2019*	23 Juni/ *June 23, 2022*	*Chinatrust Banking Corporation Ltd*
Chinatrust Banking Corporation Ltd	99.464.271	1.397.473	1 Juli/ *July 1, 2019*	23 Juni/ *June 23, 2022*	*Chinatrust Banking Corporation Ltd*
		8.387.142			
Total		**18.959.188**			***Total***

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

Borrowings – Syndicated (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
Facility agent					*with facility agent*
MUFG Bank. Ltd.	399.191.883	5.541.781	25 Juni/ *June 25, 2015*	26 Juni/ *June 26, 2020*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	49.723.965	690.293	16 Juni/ *June 16, 2016*	16 Juni/ *June 16, 2021*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	174.006.491	2.415.645	11 Agustus/ *August 11, 2016*	16 Juni/ *June 16, 2021*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	249.240.874	3.460.086	24 Mei/ *May 24, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2021*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	347.398.012	4.822.754	24 Mei/ *May 24, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2023*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	84.535.527	1.173.565	23 Agustus/ *Agustus 23, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2021*	*MUFG Bank. Ltd.*
MUFG Bank. Ltd.	69.664.033	967.111	23 Agustus/ *Agustus 23, 2018*	24 Mei/ *May 24, 2023*	*MUFG Bank. Ltd.*
		19.071.235			
PT Bank ICBC Indonesia	198.987.990	2.762.451	29 September/ *September 29, 2015*	29 September/ *September 29, 2020*	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	298.191.912	4.139.649	19 November/ *November 19, 2015*	19 November/ *November 19, 2020*	*PT Bank ICBC Indonesia*
		6.902.100			
Chinatrust Banking Corporation Ltd	495.838.218	6.883.474	23 Mei/ *May 23, 2019*	23 Juni/ *June 23, 2022*	*Chinatrust Banking Corporation Ltd*
Chinatrust Banking Corporation Ltd	298.395.560	4.142.476	1 Juli/ *July 1, 2019*	29 Juli/ *July 29, 2021*	*Chinatrust Banking Corporation Ltd*
Chinatrust Banking Corporation Ltd	99.113.416	1.375.942	1 Juli/ *July 1, 2019*	23 Juni/ *June 23, 2022*	*Chinatrust Banking Corporation Ltd*
		12.401.892			
Total		**38.375.227**			***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Pinjaman Bilateral

Borrowings – Bilateral

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		1.575.000	26 Juni/ *June 26, 2020*	23 Maret/ *March 23, 2021*	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Total mata uang Rupiah		**1.575.000**			***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank ICBC Indonesia	146.915.529	2.064.163	29 September/ *September 29, 2020*	29 September/ *September 29, 2025*	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	127.298.781	1.788.548	19 November/ *November 19, 2020*	17 November/ *November 17, 2023*	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	97.888.071	1.375.327	19 November/ *November 19, 2020*	19 November/ *November 19, 2025*	*PT Bank ICBC Indonesia*
		5.228.038			
China Eximbank	197.702.960	2.777.727	21 Oktober/ *October 21, 2020*	20 Oktober/ *October 20, 2023*	*China Eximbank*
Total Dolar Amerika Serikat		**8.005.765**			***Total Dollar***
Euro Eropa					***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 38)					*Related parties (Note 38)*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	659.178	11.360	4 Juli/ *July 4, 2008*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	826.302	14.241	23 Desember/ *December 23, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	496.178	8.551	30 Desember/ *December 30, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	844.522	14.555	9 Maret/ *March 9, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	644.819	11.113	4 Mei/ *May 4, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Total Euro Eropa		**59.820**			***Total European Euro***
Total mata uang asing		**8.065.585**			***Total foreign currency***
Total Pinjaman Bilateral		**9.640.585**			***Total Bilateral Borrowings***

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

Borrowings Bilateral (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank DKI		997.558	19 Desember / *December 19, 2019*	18 Desember/ *December 18, 2020*	*PT Bank DKI*
PT Bank Central Asia Tbk		1.000.000	20 Desember/ *December 20, 2019*	19 Juni/ *June 19, 2020*	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk		500.000	20 Desember / *December 20, 2019*	19 Juni / *June 19, 2020*	*PT Bank Central Asia Tbk*
		1.500.000			
Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch		550.000	28 Oktober / *October 28, 2019*	28 Januari/ *January 28, 2020*	*Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch*
Total mata uang Rupiah		**3.047.558**			***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
Commerzbank Aktiengesellschaft	428,353	5.947	29 April/ *April 29, 2014*	30 Juni/ *June 30, 2020*	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Commerzbank Aktiengesellschaft	15,226	211	21 Mei/ *May 21, 2014*	30 Juni/ *June 30, 2020*	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Commerzbank Aktiengesellschaft	535,580	7.435	14 November/ *November 14, 2014*	15 Oktober/ *October 15, 2020*	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Commerzbank Aktiengesellschaft	14,421	200	14 November/ *November 14, 2014*	15 Oktober/ *October 15, 2020*	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Total Dolar Amerika Serikat		**13.793**			***Total Dollar***
Euro Eropa					***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 38)					*Related parties (Note 38)*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	687,095	10.698	4 Juli/ *July 4, 2008*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	861,297	13.411	23 Desember/ *December 23, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	517,192	8.053	30 Desember/ *December 30, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	880,288	13.707	9 Maret/ *March 9, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	672,128	10.465	4 Mei/ *May 4, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Total Euro Eropa		**56.334**			***Total European Euro***
Total mata uang asing		**70.127**			***Total foreign currency***
Total Pinjaman Bilateral		**3.117.685**			***Total Bilateral Borrowings***

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Pinjaman Sindikasi

Borrowings Syndicated

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 13 Mei 2015, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing sebesar USD1.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD600.000.000 (nilai penuh) yang telah dilunasi pada tanggal 30 Mei 2018, dan Tranche B sebesar USD400.000.000 (nilai penuh) yang akan dilunasi pada tanggal 31 Maret 2020. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah MUFG Bank, Ltd. dengan rincian per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent

On May 13, 2015, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD1,000,000,000 (full amount) with foreign banks which was divided into Tranche A amounting USD600,000,000 (full amount) which has been repaid on March 31, 2020, Tranche B amounting USD400,000,000 (full amount) which has been repaid on June 26, 2020, Bank acting as the facility agent is MUFG Bank, Ltd. with the details are as of December 31, 2019 as follows:

Tranche B		***Tranche B***
Komposisi sindikasi	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Composition of the syndicate***
Bank peserta:		*Participant banks:*
• Hua Nan Commercial Bank, Ltd.- Offshore Banking Branch	25.000.000	*• Hua Nan Commercial Bank Ltd.- Offshore Banking Branch*
• Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg	25.000.000	*• Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg*
• Metropolitan Bank & Trust Company, Philippines	25.000.000	*• Metropolitan Bank & Trust Company, Philippines*
• Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch	25.000.000	*• Taiwan Cooperative Bank Offshore Banking Branch*
• Aozora Bank Ltd., Tokyo	22.000.000	*• Aozora Bank, Ltd. Tokyo*
• First Abu Dhabi Bank PJSC, Labuan Branch	22.000.000	*• First Abu Dhabi Bank PJSC. Labuan Branch*
• Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura	20.000.000	*• Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch*
• Overseas-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura	20.000.000	*• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore*
• United Overseas Bank Limited, Singapura	20.000.000	*• United Overseas Bank Limited, Singapore*
• Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Offshore Banking Branch	17.000.000	*• Chang Hwa Commercial Bank. Ltd., Offshore Banking Branch*
• Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch	17.000.000	*• Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch*
• E. SUN Commercial Bank Ltd., Cabang Singapura	16.800.000	*• E. SUN Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch*
• CTBC Bank Co. Ltd., Singapura	15.000.000	*• CTBC Bank Co. Ltd.,Singapore*
• Fuyo General Lease (HK) Limited, Hong Kong	14.000.000	*• Fuyo General Lease (HK) Limited, Hong Kong*
• Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	14.000.000	*• Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*
• Erste Group Bank AG, Hong Kong	11.800.000	*• Erste Group Bank AG,Hong Kong*
• First Commercial Bank, Cabang Singapura	11.800.000	*• First Commercial Bank., Singapore Branch*
• Hua Nan Commercial Bank Ltd., Cabang Singapura	11.800.000	*• Hua Nan Commercial Bank Ltd., Singapore Branch*
• Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch	9.500.000	*• Mega International Commercial Bank Co.Ltd.,Offshore Banking Branch*

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

Tranche B / ***Tranche B***

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)	*Composition of the syndicate*
Bank peserta:		*Participant banks:*
• Taiwan Bussiness Bank, Offshore Banking Branch	9.400.000	*Taiwan Bussiness Bank, Offshore Banking Branch* •
• The Tokyo Star Bank Limited,Tokyo	9.400.000	*The Tokyo Star Bank Limited, Tokyo* •
• Bank of Taiwan, Singapura	9.400.000	*Bank of Taiwan, Singapore* •
• MUFG Bank Ltd., Cabang Singapura	5.000.000	*MUFG Bank Ltd., Singapore Branch* •
• Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Labuan Branch	5.000.000	*Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Labuan Branch* •
• Eastspring Investments SICA V-FIS-Asia Pacific Loan Fund	4.900.000	*Eastspring Investments SICA V-FIS-Asia Pacific Loan Fund* •
• Bank Sinopac, Offshore Banking Branch	4.800.000	*Bank Sinopac, Offshore Banking Branch* •
• Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	4.700.000	*Land Bank of Taiwan, Singapore Branch* •
• Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch	4.700.000	*Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch* •
	400.000.000	

Fasilitas pinjaman sindikasi memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu untuk Tranche B pada tanggal 31 Desember 2019.

The syndicated loan facility bear interest rate of LIBOR plus a certain margin for Tranche B as of December 31, 2019.

Pada tanggal 17 Mei 2016, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman Club Deal dari bank-bank asing dan lokal sebesar USD725.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD500.000.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2019 yang telah dilunasi dan Tranche B sebesar USD225.000.000 yang telah dilunasi pada tanggal 20 Maret 2020. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah MUFG Bank Ltd. dengan rincian per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

On May 17, 2016, LPEI signed a Club Deal loan facility amounting to USD725,000,000 (full amount) with foreign and local banks, the loan was divided into Tranche A amounting USD500,000,000 which already mature on May 28, 2019 which already full paid while for Tranche B is amounting USD225,000,000 which has been repaid on March 20, 2021. Bank acting as the facility agent is MUFG Bank Ltd, with the details as of December 31, 2019 are as follows:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent MUFG* Bank, Ltd. (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

Tranche A / ***Tranche A***

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)	*Composition of the syndicate*
Komposisi sindikasi		*Composition of the syndicate*
Bank peserta:		*Participant banks:*
• Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg	71.428.572	*Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg* •
• Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura	71.428.572	*Mizuho Bank Ltd., Singapore Branch* •
• United Overseas Bank Limited, Taipei	71.428.571	*United Overseas Bank Limited, Taipei* •
• MUFG Bank Ltd ., Cabang Jakarta	66.428.571	*MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch* •
• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited., Singapura	48.357.143	*Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore* •
• DBS Bank Ltd., Singapura	23.428.571	*DBS Bank Ltd., Singapore* •
• Shinsei Bank, Limited	12.000.000	*Shinsei Bank, Limited* •
• Sunny Bank Ltd.	12.000.000	*Sunny Bank Ltd.* •
• CMB Wing Lung Bank Limited	12.000.000	*CMB Wing Lung Bank Limited* •
• Jih Sun International Bank	9.000.000	*Jih Sun International Bank* •
• The Korea Development Bank	8.750.000	*The Korea Development Bank* •
• The Korea Development Bank Singapura	8.750.000	*The Korea Development Bank Singapore* •
• Mega International Commercial Bank Co. Ltd OBB	8.500.000	*Mega International Commercial Bank Co. Ltd., OBB* •
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., New York Agency	7.500.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., New York Agency* •
• DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Singapura	7.500.000	*DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Singapore* •
• The Export-Import Bank Of The Republic Of China	7.500.000	*The Export-Import Bank Of The Republic Of China* •
• The Hokkoku Bank Ltd., Singapura	7.500.000	*The Hokkoku Bank Ltd., Singapore* •
• The Minato Bank Ltd.	7.500.000	*The Minato Bank Ltd.* •
• Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd., Singapore	7.500.000	*Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd., Singapore* •
• Taishin International Bank, OBU	7.500.000	*Taishin International Bank, OBU* •
• Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co. Ltd.	7.500.000	*Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co. Ltd.* •
• Fuyo General Lease (HK) Limited	6.500.000	*Fuyo General Lease (HK) Limited* •
• The Gunma Bank Ltd.	5.000.000	*The Gunma Bank Ltd.* •
• Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	5.000.000	*Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore* •
	500.000.000	

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

Tranche B / ***Tranche B***

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)	*Composition of the syndicate*
Komposisi sindikasi		*Composition of the syndicate*
Bank peserta:		*Participant banks:*
• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura	45.500.000	*Oversea-Chinese Banking Corporation • Limited, Singapore*
• CTBC Bank Co. Ltd., Taipei	20.000.000	*CTBC Bank Co. Ltd., Taipei •*
• Far Eastern International Bank Ltd., Taipei	16.250.000	*Far Eastern International Bank Ltd.,• Taipei*
• Cathay United Bank, Labuan Branch	13.000.000	*Cathay United Bank, Labuan Branch •*
• Fuyo General Lease (HK) Limited	13.000.000	*Fuyo General Lease (HK) Limited •*
• Taiwan Business Bank Offshore Banking Branch	13.000.000	*Taiwan Business Bank, • Offshore Banking Branch*
• The Shizuoka Bank Ltd., Cabang Hong Kong	11.500.000	*The Shizuoka Bank Ltd., Hong Kong Branch •*
• Bank of Taiwan, Cabang Singapura	11.500.000	*Bank of Taiwan, Singapore Branch •*
• First Commercial Bank Ltd., Cabang Singapura	11.500.000	*First Commercial Bank Ltd.,• Singapore Branch*
• Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Offshore Banking Branch	10.000.000	*Chang Hwa Commercial Bank Ltd.,• Offshore Banking Branch*
• Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd., Cabang Singapura	9.750.000	*Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd.,• Singapore Branch*
• Taiwan Cooperative Bank Offshore Banking Branch	8.000.000	*Taiwan Cooperative Bank, • Offshore Banking Branch*
• E. SUN Commercial Bank Ltd., Cabang Singapura	8.000.000	*E. SUN Commercial Bank Ltd..• Singapore Branch*
• The Gunma Bank Ltd., Tokyo	8.000.000	*The Gunma Bank Ltd., Tokyo •*
• Hua Nan Commercial Bank Ltd., Offshore Banking Branch	6.500.000	*Hua Nan Commercial Bank Ltd.,• Offshore Banking Branch*
• Hua Nan Commercial Bank Ltd., Cabang Singapura	6.500.000	*Hua Nan Commercial Bank Ltd.,• Singapore Branch*
• The Shanghai Commercial & Savings Bank L Offshore Banking Branch	5.000.000	*he Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd., • Offshore Banking Branch*
• Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch	4.000.000	*Land Bank of Taiwan, • Offshore Banking Branch*
• Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	4.000.000	*Land Bank of Taiwan, Singapore Branch •*
	225.000.000	

Tingkat kisaran suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu untuk Tranche A dan B pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The syndicated loan bear interest rate of LIBOR plus a certain margin for Tranche A and B as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent MUFG* Bank, Ltd. (lanjutan)

Pada tanggal 15 Mei 2018, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing dan lokal sebesar USD950.000.000 (nilai penuh), pada tanggal 23 Juli 2018 diamandemen dan dilakukan peningkatan jumlah pinjaman menjadi sebesar USD1.150.000.000 yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD395.000.000 (nilai penuh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2019 dan telah dilunasi. Tranche B sebesar USD335.000.000 (nilai penuh) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2021. Tranche C sebesar USD420.000.000 (nilai penuh) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2023. Bank yang bertindak sebagai facility agent adalah MUFG Bank Ltd. dengan rincian per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

On May 15, 2018, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD950,000,000 (full amount), with foreign and local banks and was amanded and increasing the loan amounted to USD1,150,000,000 on July 23, 2018 which was divided into Tranche A amounting USD395,000,000 (full amount) which already mature on July 3, 2019 which already full paid. Tranche B amounting USD335,000,000 (full amount) which will mature on May 24, 2021, and Tranche C amounting USD420,000,000 (full amount) which will mature on May 24, 2023. Bank acting as the facility agent is MUFG Bank Ltd. with the details as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Tranche A / ***Tranche A***

Tranche A / ***Tranche A***

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)	*Composition of the syndicate*
• United Overseas Bank Limited, Singapura	56.500.000	*United Overseas Bank Limited, Singapore •*
• PT Bank Mizuho Indonesia	50.000.000	*PT Bank Mizuho Indonesia •*
• Standard Chartered Bank, London	50.000.000	*Standard Chartered Bank, London •*
• Australia and New Zealand Banking. Group Limited. Singapura	48.000.000	*Australia and New Zealand Banking • Group Limited, Singapore*
• Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg	45.250.000	*Commerzbank Aktiengesellschaft,Filiale • Luxemburg*
• MUFG Bank. Ltd., Jakarta Branch	40.000.000	*MUFG Bank. Ltd., Jakarta Branch •*
• First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Cabang Singapura	40.000.000	*First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., • Singapore Branch*
• Bayerische Landesbank	33.250.000	*Bayerische Landesbank •*
• Oversea-Chinese Banking Corporation., Limited, Singapura	32.000.000	*Oversea-Chinese Banking Corporation • Limited, Singapore*
	395.000.000	

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)

Tranche B

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

Tranche B

Tranche B	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Tranche B***
Komposisi sindikasi		***Composition of the syndicate***
Bank peserta:		*Participant banks:*
• United Overseas Bank Limited, Singapura	61.750.000	*United Overseas Bank Limited, Singapore •*
• First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., - Cabang Singapore	35.000.000	*First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. • - Singapore Branch*
• The Bank of Yokohama, Ltd.	28.050.000	*The Bank of Yokohama Ltd. •*
• Oversea-Chinese Banking Corporation., Limited. Singapore	25.000.000	*Oversea-Chinese Banking Corporation • Limited, Singapore*
• Shinsei Bank, Limited	25.000.000	*Shinsei Bank Limited •*
• Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Offshore Banking	20.500.000	*Mega International Commercial • Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch*
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk .	20.000.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk. •*
• Shinkin Central Bank	14.250.000	*Shinkin Central Bank •*
• Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	12.000.000	*Australia and New Zealand Banking. • Group Limited, Singapore*
• PT Bank Mizuho Indonesia	10.000.000	*PT Bank Mizuho Indonesia •*
• Apple Bank for Savings	9.750.000	*Apple Bank for Savings •*
• The Chiba Bank Ltd., Cabang Hong Kong	9.750.000	*The Chiba Bank Ltd., Hong Kong Branch •*
• The Minato Bank Ltd.	9.750.000	*The Minato Bank Ltd.•*
• Bank of Taiwan, Cabang Singapura	9.500.000	*Bank of Taiwan, Singapore Branch •*
• The Gunma Bank Ltd.	9.500.000	*The Gunma Bank Ltd. •*
• The Hachijuni Bank Ltd.	9.500.000	*The Hachijuni Bank Ltd.•*
• The Iyo Bank Ltd.	9.500.000	*The Iyo Bank Ltd.•*
• Standard Chartered Bank, London	8.700.000	*Standard Chartered Bank, London •*
• Bank of Panshin	5.000.000	*Bank of Panshin •*
• The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd., Cabang Offshore Banking	2.500.000	*The Shanghai Commercial & Savings • Bank Ltd., Offshore Banking Branch*
	335.000.000	

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)

Tranche C

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

Tranche C

Tranche C	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Tranche C***
Komposisi sindikasi		***Composition of the syndicate***
Bank peserta:		*Participant banks:*
• National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapore	46.000.000	*National Bank of Kuwait S.A.K.P., • Singapore Branch*
• Shinsei Bank. Limited	30.000.000	*Shinsei Bank Limited •*
• United Overseas Bank Limited, Singapore	30.000.000	*United Overseas Bank Limited, Singapore •*
• First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. - Cabang Singapura	25.000.000	*First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. • -Singapore Branch*
• Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Cabang Offshore Banking	25.000.000	*Mega International Commercial • Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch*
• CTBC Bank Co., Ltd.	19.000.000	*CTBC Bank Co., Ltd. •*
• DZ Bank Ag. Deutsche Zentral - Genossenshaftsbank, Cabang Singapura	19.000.000	*DZ Bank Ag. Deutsche Zentral • - Genossenshaftsbank, Singapore Branch*
• The Chugoku Bank Ltd., Cabang Hong Kong	19.000.000	*The Chugoku Bank Ltd., Hong Kong Branch •*
• The Joyo Bank Ltd.	19.000.000	*The Joyo Bank Ltd. •*
• KGI Bank	14.250.000	*KGI Bank •*
• Land Bank of Taiwan, Cabang Offshore Banking	14.250.000	*Land Bank of Taiwan, Offshore • Banking Branch*
• The Hyakugo Bank Ltd.	14.250.000	*The Hyakugo Bank Ltd. •*
• E.SUN Commercial Bank, Ltd, Cabang Singapura	11.500.000	*E.SUN Commercial Bank, Ltd., • Singapore Branch*
• The Export-Import Bank of The Republic Of China	11.500.000	*The Export-Import Bank of • The Republic Of China*
• PT Bank Mizuho Indonesia	10.000.000	*PT Bank Mizuho Indonesia •*
• Bank of Kaohsiung, Cabang Offshore Banking	9.750.000	*Bank of Kaohsiung, Offshore • Banking Branch*
• Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura	9.750.000	*Hua Nan Commercial Bank, Ltd., • Singapore Branch*
• Taishin International Bank Co. Ltd.	9.750.000	*Taishin International Bank Co. Ltd. •*
• Taiwan Business Bank, Cabang Offshore Banking	9.750.000	*Taiwan Business Bank, • Offshore Banking Branch*
• The Shizuoka Bank, Cabang Hong Kong	9.750.000	*The Shizuoka Bank, • Hong Kong Branch*
• Bank of Taiwan, Cabang Singapura	9.500.000	*Bank of Taiwan, Singapore Branch •*
• The Gunma Bank Ltd.	9.500.000	*The Gunma Bank Ltd. •*
• The Hachijuni Bank Ltd.	9.500.000	*The Hachijuni Bank Ltd. •*
• The Iyo Bank Ltd.	9.500.000	*The Iyo Bank Ltd. •*
• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore	8.000.000	*Oversea-Chinese Banking Corporation • Limited, Singapore*
• Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	5.000.000	*Australia and New Zealand Banking. • Group Limited, Singapore*
• MUFG Bank. Ltd., Jakarta	5.000.000	*MUFG Bank. Ltd., Jakarta •*
• Standard Chartered Bank, London	5.000.000	*Standard Chartered Bank, London •*
• The Shanghai Commercial & Savings	--	*The Shanghai Commercial & Savings •*
• Bank Ltd., Cabang Offshore Banking	2.500.000	*Bank Ltd., Offshore Banking Branch •*
	420.000.000	

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)

Tingkat kisaran suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu untuk Tranche A, B dan C pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

b. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* CTBC Bank Co., Ltd.

Pada tanggal 15 Mei 2019, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing sebesar USD900.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD600.000.000 (nilai penuh) yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2022, dan Tranche B sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) yang telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2020. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah CTBC Bank Co. Ltd, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)

The syndicated loan bear interest rate of LIBOR plus a certain margin for Tranche A, B and C as of December 31, 2020 and 2019.

b. Syndicated loan with CTBC Bank Co., Ltd. as facility agent

On May 15, 2019, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD900,000,000 (full amount) with foreign banks which was divided into Tranche A amounting USD600,000,000 (full amount) which will be mature on June 23, 2022, and Tranche B amounting USD300,000,000 (full amount) which has been repaid on December 17, 2020. Bank acting as the facility agent is CTBC Bank Co. Ltd.,with the details as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

b. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* CTBC Bank Co., Ltd. (lanjutan)

Tranche A

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

b. Syndicated loan with CTBC Bank Co., Ltd. as facility agent (continued)

Tranche A

Tranche A / ***Tranche A***

Komposisi sindikasi	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Composition of the syndicate***
Bank peserta:		*Participant banks:*
China Development Bank, Kantor Cabang Hong Kong	65.000.000	*China Development Bank, Hong Kong Branch*
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Kantor Cabang Singapura	65.000.000	*Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch*
The Norinchukin Bank, Kantor Cabang Singapura	65.000.000	*The Norinchukin Bank, Singapore Branch*
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Kantor Cabang Singapura	50.000.000	*National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapore Branch*
CTBC Bank Co Ltd, Singapura	43.343.750	*CTBC Bank Co Ltd, Singapore*
Standard Chartered Bank	33.750.000	*Standard Chartered Bank*
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Kantor Cabang Singapura	30.000.000	*Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch*
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	24.156.250	*Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore*
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Kantor Cabang Singapura	24.156.250	*First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Singapore Branch*
Mizuho Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	24.156.250	*Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	24.156.250	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
DZ Bank Ag. Deutsche Zentral Genossenshaftsbank, Cabang Singapore	22.500.000	*DZ Bank Ag. Deutsche Zentral Genossenshaftsbank, Singapore Branch*
Shinsei Bank, Limited	20.000.000	*Shinsei Bank, Limited*
MUFG Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	18.312.500	*MUFG Bank, Ltd., Singapore Branch*
United Overseas Bank Limited	17.468.750	*United Overseas Bank Limited*
The Export-Import Bank of The Republic of China	15.000.000	*The Export-Import Bank of The Republic of China*
The Hyakugo Bank, Ltd.	15.000.000	*The Hyakugo Bank, Ltd.*
Cathay United Bank	10.000.000	*Cathay United Bank*
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.	10.000.000	*The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.*
Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund	5.000.000	*Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund*
The Gunma Bank, Ltd.	5.000.000	*The Gunma Bank, Ltd.*
The Hokkoku Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	5.000.000	*The Hokkoku Bank, Ltd., Singapore Branch*
Kexim Bank (UK) Limited	5.000.000	*Kexim Bank (UK) Limited*
Industrial Bank of Korea A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited Hong Kong Branch	3.000.000	*Industrial Bank of Korea A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited Hong Kong Branch*
	600.000.000	

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

b. Pinjaman sindikasi dengan facility agent CTBC Bank Co., Ltd. (lanjutan)

Tranche B

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

b. Syndicated loan with CTBC Bank Co., Ltd. as facility agent (continued)

Tranche B

Tranche B **Komposisi sindikasi**	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Tranche B*** ***Composition of the syndicate***
Bank peserta:		*Participant banks:*
United Overseas Bank Limited	47.531.250	*United Overseas Bank Limited*
MUFG Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	35.031.250	*MUFG Bank, Ltd., Singapore Branch*
The Korea Development Bank	34.500.000	*The Korea Development Bank*
The Korea Development Bank, Kantor Cabang Singapura	30.000.000	*The Korea Development Bank, Singapore Branch*
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	29.187.500	*Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore*
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Kantor Cabang Singapura	29.187.500	*First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch*
Mizuho Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	29.187.500	*Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	29.187.500	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
Standard Chartered Bank	29.187.500	*Standard Chartered Bank*
Kexim Bank (UK) Ltd	5.000.000	*Kexim Bank (UK) Ltd*
Industrial Bank of Korea A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited Hong Kong Branch	2.000.000	*Industrial Bank of Korea A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited Hong Kong Branch*
	300.000.000	

c. Pinjaman Club Deal dengan *Facility Agent* PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 23 September 2015, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman *club deal* dengan Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited dan PT Bank ICBC Indonesia sebesar USD500.000.000 (nilai penuh). Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah PT Bank ICBC Indonesia.

Pada tanggal 29 September 2015, LPEI melakukan penarikan pertama sebesar USD200.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga tetap 3,125% yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 September 2020 dan telah dilunasi.

c. Club Deal loan with PT Bank ICBC Indonesia as a facility agent

On September 23, 2015, LPEI signed a club deal borrowing facility with Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited and PT Bank ICBC Indonesia amounting to USD500,000,000 (full amount). Bank acting as the facility agent is PT Bank ICBC Indonesia.

On September 29, 2015, LPEI made the first withdrawal amounting to USD200,000,000 (full amount) which bear fixed interest rate of 3.125% which mature on September 29, 2020 and already full paid.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

c. Pinjaman Club Deal dengan Facility Agent PT Bank ICBC Indonesia (lanjutan)

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

c. Club Deal loan with PT Bank ICBC Indonesia as a facility agent (continued)

Komposisi *Club Deal*	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Composition of the Club Deal***
Bank peserta:		*Participant banks:*
• PT Bank ICBC Indonesia	150.000.000	*PT Bank ICBC Indonesia •*
• Wing Lung HK	30.000.000	*Wing Lung HK •*
• ICBC (Asia) Limited	20.000.000	*ICBC (Asia) Limited •*
	200.000.000	

Pada tanggal 19 November 2015, LPEI melakukan penarikan kedua sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga tetap 3,125%, pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 19 November 2020 dan telah dilunasi. Adapun rincian pinjaman per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

On November 19, 2015, LPEI made the second withdrawal amounting to USD300,000,000 (full amount) with a fixed interest rate of 3.125%, this loan has been matued on November 19, 2020 and has been repaid. The details of the loans as of December 31, 2019 are as follows:

Komposisi *Club Deal*	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)**	***Composition of the Club Deal***
• PT Bank ICBC Indonesia	270.000.000	*PT Bank ICBC Indonesia •*
• ICBC (Asia) Limited	30.000.000	*ICBC (Asia) Limited •*
	300.000.000	

Pinjaman Bilateral

Borrowings Bilateral

d. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan-Perjanjian Penerusan Pinjaman atas Fasilitas Kredit dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)*

LPEI memperoleh fasilitas kredit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1169/DP3/2004 tanggal 30 Juni 2004. Pinjaman ini berasal dari *Kreditanslat fur Wiederaufbau (KfW)* melalui Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar EUR4.500.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk pembiayaan efisiensi industri dan kontrol fase II terhadap polusi di Indonesia. Jangka waktu pinjaman adalah empat puluh tahun sampai dengan 30 Juni 2044, termasuk masa tenggang sepuluh tahun atas pembayaran pokok. Tingkat suku bunga tetap per tahun adalah 1,25%.

d. Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance Subsidiary Loan Agreement on Credit Facility from Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)

LPEI obtained a credit facility from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance based on Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1169/DP3/2004 dated June 30, 2004. This loan was granted by Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) through the Government with a maximum amount of EUR4,500,000 (full amount) that is intended to be used for financing industrial efficiency and pollution control phase II in Indonesia. The facility has a term of fourty years up to June 30, 2044, including a grace period of ten years for the principal payments. The loan has a fixed interest rate of 1.25%.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

d. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan-Perjanjian Penerusan Pinjaman atas Fasilitas Kredit dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)* (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI memiliki saldo pinjaman masing-masing sebesar EUR3.470.999 dan EUR3.618.000.

Tidak terdapat aset yang dijaminkan oleh LPEI atas seluruh pinjaman yang diterima di atas.

e. Commerzbank AG

Pada tanggal 29 April 2014, LPEI melakukan penarikan sebesar USD5.168.966 (nilai penuh) dari Commerzbank AG dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (6 bulan) ditambah marjin tertentu dan telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 30 Juni 2020.

Pada tanggal 21 Mei 2014, LPEI melakukan penarikan sebesar USD183.871 (nilai penuh) dari Commerzbank AG dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (6 bulan) ditambah marjin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2020.

Pada tanggal 14 November 2014, LPEI melakukan penarikan sebesar USD3.232.060 (nilai penuh) dari Commerzbank AG dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (6 bulan) ditambah marjin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2020.

Pada tanggal 14 November 2014, LPEI melakukan penarikan sebesar USD87.025 (nilai penuh) dari Commerzbank AG dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (6 bulan) ditambah marjin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2020.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

d. Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance Subsidiary Loan Agreement on Credit Facility from Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has a total outstanding borrowings of EUR3,470,999 and EUR3,618,000, respectively.

There are no assets pledged as collateral by LPEI for all of the above fund borrowings.

e. Commerzbank AG

On April 29, 2014, LPEI made a withdrawal amounting to USD5,168,966 (full amount) from Commerzbank AG which bears a certain interest rate of LIBOR (6 months) plus a certain margin and already matured and has been repaid on June 30, 2020.

On May 21, 2014, LPEI made a withdrawal amounting to USD183,871 (full amount) from Commerzbank AG which bears a certain interest rate of LIBOR (6 months) plus a certain margin and already matured and has been repaid on June 30, 2020.

On November 14, 2014, LPEI a withdrawal amounting to USD3,232,600 (full amount) from Commerzbank AG which bears a certain interest rate of LIBOR (6 months) plus a certain margin and already matured and has been repaid on October 15, 2020.

On November 14,2014, LPEI made a withdrawal amounting to USD87,025 (full amount) from Commerzbank AG which bears a certain interest rate of LIBOR (6 months) plus a certain margin and already matured and has been repaid on October 15, 2020.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

f. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 20 Desember 2019, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan telah jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2020. Pinjaman ini telah dilunasi oleh LPEI pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 20 December 2019, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan telah jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2020. Pinjaman ini telah dilunasi oleh LPEI pada tanggal jatuh tempo.

g. Bank of China (Hong Kong) Limited

Pada tanggal 28 Januari 2019, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman Demand Loan Committed dengan Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta sebesar USD50.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 22 Oktober 2019, LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas dengan Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta dimana fasilitas dapat digunakan dalam valuta USD dan IDR.

Pada tanggal 28 Oktober 2019, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp550.000.000.000 (nilai penuh) dari Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta, dengan tingkat suku bunga di sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

f. PT Bank Central Asia Tbk

On December 20, 2019, LPEI made a withdrawal amounting to Rp1,000,000,000,000 (full amount) from PT Bank Central Asia Tbk which bears interest rate of JIBOR (3 months) plus a certain interest rate and already matured on June 19, 2020. This borrowing has been fully paid by LPEI on maturity date.

On December 20, 2019, LPEI made a withdrawal amounting to Rp500,000,000,000 (full amount) from PT Bank Central Asia Tbk which bears interest rate of JIBOR (3 months) plus a certain interest rate and already matured on June 19, 2020.This borrowing has been fully paid by LPEI on maturity date.

g. Bank of China (Hong Kong) Limited

On January 28, 2019, LPEI signed a Demand Loan Committed facility from Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch amounting to USD50,000,000 (full amount).

On October 22, 2019, LPEI signed Amendment to the Facility Agreement from Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch where this facility can be utilized in USD and IDR currencies.

On October 28, 2019, LPEI has withdrawal amounted to Rp550,000,000,000 (full amount) from Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and already mature and has been repaid on January 28, 2020.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

h. PT Bank DKI

Pada tanggal 22 November 2019, LPEI menandatangani perjanjian kredit *committed* dengan PT Bank DKI sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 19 Desember 2019, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank DKI, dengan tingkat suku bunga tetap 8,5% p.a. dan telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020.

i. The Export-Import Bank of China

Pada tanggal 25 September 2020, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan The Export-Import Bank of China sebesar USD200.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 21 Oktober 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD200.000.000 (nilai penuh) dari The Export-Import Bank of China dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2023.

j. PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 24 September 2020, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman *Bilateral Committed Loan Credit* dengan PT Bank ICBC Indonesia sebesar USD380.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 29 September 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD150.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2025.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

h. PT Bank DKI

On November 22, 2019, LPEI signed a committed credit agreement with PT Bank DKI amounting Rp1,000,000,000,000 (full amount).

On December 19, 2019, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,000,000,000,000 (full amount) from PT Bank DKI, which bear fixed interest rate at 8.5% p.a. and already mature and has been repaid on December 18, 2020.

i. The Export-Import Bank of China

On September 25, 2020, LPEI signed a Facility Agreement from The Export-Import Bank of China amounting to USD200,000,000 (full amount).

On October 21, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD200, 000,000 (full amount) from The Export-Import Bank of China, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on October 20, 2023.

j. PT Bank ICBC Indonesia

On September 24, 2020, LPEI signed a Bilateral Committed Loan Credit from PT Bank ICBC Indonesia amounting to USD380,000,000 (full amount).

On September 29, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD150,000,000 (full amount) from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on September 29, 2025.

On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD100, 000,000 (full amount) from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on November 19, 2025.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

k. PT Bank Danamon Indonesia

Pada tanggal 23 Maret 2020, LPEI menandatangani perjanjian kredit *uncommitted* dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.575.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 26 Juni 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.575.000.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR ditambah marjin tertentu tetap dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2021.

Persyaratan dan kondisi pembatasan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan, kecuali pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI) (POJK No. 40) Pasal 14 ayat (2) perihal pemenuhan terhadap rasio *Non Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang melampaui ketentuan yang berlaku yaitu di atas 5%. Atas pelampauan tersebut, sesuai dengan POJK No. 40 Pasal 71, LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF bersih oleh OJK.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

k. PT Bank Danamon Indonesia

On March 24, 2020, LPEI signed a committed credit agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting Rp1,575,000,000,000 (full amount).

On June 26, 2020, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,575,000,000,000 (full amount) from PT Bank Danamon Indonesia Tbk*, which bear interest rate at JIBOR plus a certain margin and will mature on March 23, 2021.*

Terms and required covenants

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has complied with all the terms and required covenants, except for the fulfillment of the Financial Services Authority Regulations (POJK No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI (POJK No. 40) Article 14 paragraph (2) concerning the fulfillment of Non Performing Financing (NPF) net of allowance for impairment losses on financing ratio that exceeds the prevailing provision, i.e. above 5%. For the excess over prevailing provision, in accordance with POJK No. 40 Article 71, LPEI must submit action plan no later than 1 (one) month from the date of OJK determine the incompliance of NPF net.

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)

Persyaratan dan kondisi pembatasan (lanjutan)

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap POJK tersebut, LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK melalui surat LPEI kepada OJK pada tanggal 6 Februari dan 18 Februari 2020 dengan No. BS.0016/CEO/02/2020 dan Pemenuhan Action Plan Pembiayaan Bermasalah (NPF) melalui surat LPEI kepada OJK No. BS0027/MDI/02/2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan surat No. BS.0039/CEO/02/2019. Atas surat-surat tersebut, OJK menyatakan tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF bersih yang disampaikan oleh LPEI untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) POJK No. 40 tersebut (Catatan 9h.9).

Selanjutnya LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan secara periodik kepada OJK (Catatan 9h.9).

Sehubungan dengan pelampauan NPF bersih di atas 5% (POJK Nomor 40 Pasal 14 ayat 2) dan penyampaian rencana pemenuhan (POJK Nomor 40 Pasal 71), LPEI telah melakukan serangkaian diskusi dengan para kreditur terkait pinjaman yang diterima oleh LPEI.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh para kreditur perihal pelampauan NPF ini (Catatan 9h.9).

17. Fund Borrowings (continued)

Terms and required covenants (continued)

In relation with the requirement of POJK, LPEI has submitted action plan in fulfilling the compliance with the Non Performing Financing (NPF) requirement to OJK through letter from LPEI to OJK on February 6 and February 18, 2020, No. BS0016/CEO/02/2020 and fulfillment of the Action Plan of Non Performing Financing (NPF) through letter from LPEI No. BS.0027/CEO/02/2020 for the year ended December 31, 2019 and as of February 11, 2019 through letter. No. BS.0039/CEO/02/2019 for the year ended December 31, 2018. Through those letters, OJK has communicated that it has no objection to the action plan in fulfilling the compliance with NPF net ratio that LPEI submitted in order to comply with the requirement of Article 14 paragraph 2 POJK No. 40. (note 9h.9)

Furthermore, LPEI must implement the action plan that has been submitted to OJK and submit progress report of the action plan periodically for OJK (Note 9h.9).

In relation to the excess of NPF net ratio over 5% (POJK No. 40 Article 14 paragraph 2) and submission of action plan (POJK No. 40 article 71), LPEI has conduct series of discussion with lenders, related to the borrowings by LPEI.

As of the date of this financial statement, there is no action taken by the creditors regarding exceeding these NPF (Note 9h.9).

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi

a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi

18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies

a. The estimated losses on commitments and contingencies

	31 Desember/ *December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 38)							*Related parties (Note 38)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	2.621.741	--	--	--	--	2.621.741	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	307.180	--	--	--	--	307.180	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	5.221	--	--	--	--	5.221	*Outstanding irrevocable L/C*
	2.934.142	--	--	--	--	2.934.142	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1.871.292	1.546	--	2	592.934	2.465.774	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1.659.755	--	--	--	--	1.659.755	*Bank guarantee*
Penjaminan kredit - PEN	817.500	--	--	--	--	817.500	*Credit guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	79.952	--	--	--	--	79.952	*Outstanding irrevocable L/C*
	4.428.499	1.546	--	2	592.934	5.022.981	
Total mata uang Rupiah	7.362.641	1.546	--	2	592.934	7.957.123	*Total Indonesia Rupiah*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Pihak berelasi (Catatan 38)							*Related parties (Note 38)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	184.402	--	--	--	--	184.402	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1.168.460	969.450	--	--	--	2.137.910	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	7.143	--	--	--	--	7.143	*Outstanding irrevocable L/C*
	1.360.005	969.450	--	--	--	2.329.455	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	2.902.026	76.385	--	--	23.694	3.002.105	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	4.635.234	--	--	--	--	4.635.234	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit - PEN	49.175	--	--	--	--	49.175	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	69.847	--	--	--	--	69.847	*Outstanding irrevocable L/C*
	7.656.282	76.385	--	--	23.694	7.756.361	
Sub Total	9.016.287	1.045.835	--	--	23.694	10.085.816	*Sub Total*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Yen Jepang							***Japanese Yen***
Pihak ketiga							*Third parties*
Bank garansi	56.487	--	--	--	--	56.487	*Bank guarantee*
Sub Total	56.487	--	--	--	--	56.487	*Sub Total*
Euro Eropa							***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 38)							*Related parties (Note 38)*
Bank garansi	50.982	--	--	--	--	50.982	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	2.252	--	--	--	--	2.252	*Outstanding irrevocable L/C*
	53.234	--	--	--	--	53.234	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	--	--	--	--	--	--	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	194.769	--	--	--	--	194.769	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	--	--	--	*Outstanding irrevocable L/C*
	194.769	--	--	--	--	194.769	
Sub Total	248.003	--	--	--	--	248.003	*Sub Total*
Total mata uang asing	9.320.777	1.045.835	--	--	23.694	10.390.306	*Total foreign currencies*
Total	**16.683.418**	**1.047.381**	**--**	**2**	**616.628**	**18.347.429**	***Total***

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies (continued)

a. The estimated losses on commitments and contingencies (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 38)							*Related parties (Note 38)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	6.889.589	--	--	--	--	6.889.589	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1.074.693	--	--	--	--	1.074.693	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	61.440	--	--	--	--	61.440	*Outstanding irrevocable L/C*
	8.025.722	--	--	--	--	8.025.722	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	5.142.275	115.329	70.592	1.012	13.536	5.342.744	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	2.146.138	--	--	--	--	2.146.138	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	129.705	--	--	--	--	129.705	*Outstanding irrevocable L/C*
	7.418.118	115.329	70.592	1.012	13.536	7.618.587	
Total mata uang Rupiah	15.443.840	115.329	70.592	1.012	13.536	15.644.309	*Total Indonesia Rupiah*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Pihak berelasi (Catatan 38)							*Related parties (Note 38)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	263.044	--	--	--	--	263.044	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1.188.306	--	--	--	--	1.188.306	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	12.094	--	--	--	--	12.094	*Outstanding irrevocable L/C*
	1.463.444	--	--	--	--	1.463.444	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	3.637.742	90.660	15.917	3.791	23.961	3.772.071	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	5.494.968	--	--	--	--	5.494.968	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	69.700	--	--	--	--	69.700	*Outstanding irrevocable L/C*
	9.202.410	90.660	15.917	3.791	23.961	9.336.739	
Sub Total	10.665.854	90.660	15.917	3.791	23.961	10.800.183	*Sub Total*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Yen Jepang							***Japanese Yen***
Pihak ketiga							*Third parties*
Bank garansi	67.054	--	--	--	--	67.054	*Bank guarantee*
Sub Total	67.054	--	--	--	--	67.054	*Sub Total*
Euro Eropa							***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 38)							*Related parties (Note 38)*
Bank garansi	46.060	--	--	--	--	46.060	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	5.554	--	--	--	--	5.554	*Outstanding irrevocable L/C*
	51.614	--	--	--	--	51.614	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	3	--	--	--	--	3	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	173.164	--	--	--	--	173.164	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	2.164	--	--	--	--	2.164	*Outstanding irrevocable L/C*
	175.331	--	--	--	--	175.331	
Sub Total	226.945	--	--	--	--	226.945	*Sub Total*
Total mata uang asing	10.959.853	90.660	15.917	3.791	23.961	11.094.182	*Total foreign currencies*
Total	**26.403.693**	**205.989**	**86.509**	**4.803**	**37.497**	**26.738.491**	***Total***

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

b. Perubahan estimasi klaim penjaminan

Perubahan estimasi klaim penjaminan adalah sebagai berikut:

18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies (continued)

b. Changes in estimated guarantee claims

The changes in estimated guarantee claims are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*			
	Rupiah	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Total	
Saldo awal	1.818	5.030	6.848	Beginning balance
Pembentukan tahun berjalan penjaminan	(1.995)	49	(1.946)	*Addition during the year of guarantee*
Pembentukan tahun berjalan penjaminan - PEN	34.228	2.060	36.288	*Addition during the year of guarantee - PEN*
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(61)	(61)	*Foreign currency translation during the year*
Saldo akhir	**34.051**	**7.078**	**41.129**	***Ending balance***

	31 Desember/ *December 31, 2019*			
	Rupiah	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Total	
Saldo awal	3.984	9.867	13.851	Beginning balance
Pembentukan tahun berjalan	(2.166)	(4.636)	(6.802)	*Addition during the year*
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(201)	(201)	*Foreign currency translation during the year*
Saldo akhir	**1.818**	**5.030**	**6.848**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim penjaminan yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian klaim penjaminan.

Management believes that the estimated guarantee claims as provided is adequate to cover losses on guarantee claim.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.

19. Liabilitas Sewa

Pembayaran sewa berdasarkan perjanjian sewa pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

19. Lease Liabilities

The payments based on the lease agreements as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo			*Detail of lease liabilities based on maturity*
Sampai dengan 1 tahun	4.398	--	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	8.509	--	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	1.930	--	*More than 3 up to 5 years*
Total	**14.837**	**-**	***Total***

Semua utang sewa di denominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap.

All the lease liabilities are denominated in Rupiah, payable every month at fixed amounts.

Berikut adalah rincian liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2020:

Following is the details of liease liabilities as of December 31, 2020:

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2020/ *Beginning balance 1 January 2020*	Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities*	Beban bunga liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities*	Pembayaran sewa/ *Payments of lease liabilities*	Saldo, 31 Desember 2020/ *Balance, 31 December 2020*	*Detail of lease liabilities*
Kendaraan bermotor	6.062	458	507	(1.483)	5.544	*Vehicles*
Bangunan	5.323	5.108	594	(1.732)	9.293	*Building*
Total	**11.385**	**5.566**	**1.101**	**(3.215)**	**14.837**	***Total***

20. Liabilitas Lain-lain

20. Other Liabilities

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Bunga yang masih harus dibayar	345.289	373.368	*Accrued interest payable*
Rekening penampungan	212.442	463.985	*Suspense accounts*
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	74.823	87.190	*Collateral for L/C and bank guarantee opening*
Tantiem dan jasa poduksi	17.255	--	*Tantiem and accrued bonus*
Lain-lain	68.762	83.519	*Others*
	718.571	1.008.062	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bunga yang masih harus dibayar	93.880	233.749	*Accrued interest payable*
Kewajiban kepada Penjamin Ulang (Catatan 9i)	215.774	205.965	*Liabilities to Reguarantor (Note 9i)*
Rekening penampungan	104.084	414.921	*Suspense accounts*
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	213.644	203.028	*Collateral for L/C and bank guarantee opening*
Lain-lain	4.042	7.576	*Others*
	631.424	1.065.239	
Total	**1.349.995**	**2.073.301**	***Total***

Termasuk dalam rekening penampungan adalah rekening yang digunakan oleh debitur untuk melakukan pembayaran pokok kembali maupun bunga atas pembiayaan dan piutang.

The suspense accounts include accounts used by debtors for the repayment of principal and interest of financing and receivables.

21. Kontribusi Modal Pemerintah

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat (2) dari undang-undang di atas dinyatakan bahwa modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permintaan Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Modal Awal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa saldo laba yang ditahan termasuk dalam pengertian seluruh kekayaan negara yang tertanam di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Dengan demikian, modal saham dan saldo laba direklasifikasikan sebagai Kontribusi Modal Pemerintah yang sebelumnya dalam bentuk modal saham, cadangan umum, cadangan tujuan dan belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp3.000.000, Rp1.088.094, Rp140.470 dan Rp93.022.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000. Dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000. Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 22 Desember 2010, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000. Dengan demikian, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp6.321.586.

21. Government Capital Contribution

Based on the explanation on article 19 paragraph (1) Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, it was stated that LPEI's initial capital is composed of all shares of the state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Furthermore, based on article 19 paragraph (2) of above mentioned law, the paid up capital as specified in paragraph (1) hereof, shall be the state's treasury and is separated and undivided into shares. Based on the letter of the Head of Legal Department of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 dated February 3, 2010 regarding Request for Legal Review Related Legal to the Initial Capital of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, retained earnings included all state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Therefore, the share capital and retained earnings were reclassified as Government Contributed Capital which were previously in the form of capital stocks, general reserve, specific reserve and unappropriated retained earnings amounting to Rp3,000,000, Rp1,088,094, Rp140,470 and Rp93,022, respectively.

Based on Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI's initial capital shall be at least Rp4,000,000. In the event that LPEI's capital becomes less than Rp4,000,000, the Government shall cover such deficiency from the State Budget based on the applicable mechanism. LPEI's additional capital to cover such capital deficiency shall be determined by Government Regulation.

On December 22,2010, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia which amounted to Rp2,000,000. As of December 31, 2013 and 2012, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp6,321,586.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan, Alokasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, perencanaan investasi pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/Lembaga dan untuk tahun anggaran 2014. LPEI telah melakukan permohonan PMN sebesar Rp1.000.000. Permohonan tersebut telah masuk kedalam nota APBN tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan perencanaan pemerintah, maka pada tanggal 30 Desember 2014, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.

Untuk memperkuat struktur permodalan dan berdasarkan pada UU No 2 tahun 2009, atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal, 75% telah dilakukan kapitalisasi modal sebesar Rp54.370 dan 25% sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp18.123. LPEI telah menyetorkan ke Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp18.123 pada bulan Agustus 2014.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2014, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp7.375.956.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Determination, Allocation and Implementation Document Legalization of State General Treasury, the government plans to increase the Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia (PMN) to State Owned Company/Institutions for the year 2014. Hence, LPEI has made a request for Rp1,000,000. The request has been incorporated in APBN year 2014.

Based on Government Regulation No. 86 year 2014 dated October 17, 2014 regarding the Capital Contribution from the State's Treasury into The Capital of Indonesia Eximbank stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000.

Based on the above goverment plan on December 30, 2014, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,000,000.

To strengthen the capital structure and based on Act No. 2 of 2009, the excess of the general reserve and the reserve accumulation of interest has exceeded 25% of the capital, 75% has been capitalized amounting to Rp54,370 and 25% as non-tax revenue amounting to Rp18,123. LPEI has deposited to the Government of the Republic of Indonesia at Rp18,123 in August 2014.

Therefore, as of December 31, 2014, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp7,375,956.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000. Penambahan penyertaan modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 26 November 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 tanggal 12 November 2015, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2013 dan 2014, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2013 dan 2014 sebesar Rp554.586 dan Rp798.046.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp4.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015 ditetapkan bahwa dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal awal LPEI, kelebihannya 75% digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 67 year 2015 dated August 20, 2015 regarding the Capital Contribution from the state's treasury into the capital of Indonesia Eximbank stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000. This increase in capital was received and recorded by LPEI on November 26, 2015.

Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 dated November 12, 2015, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2013 and 2014, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2013 and 2014 surplus amounting to Rp554,586 and 798,046.

Based on Government Regulation No. 81 year 2016 dated December 30, 2016 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp4,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 31, 2016.

In order to strengthen LPEI's capital structure, pursuant to Article 20 paragraph (2) of Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 of Eximbank and Ministry of Finance No. 260/PMK.06/ 2015, if the accumulated general and specific reserves has exceeded 25% of the initial capital of LPEI, the excess of 75% is used for the capitalization of capital and 25% as Tax State Revenue (non-tax).

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 463/KMK.06/2016 tanggal15 Juni 2016, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2015, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2015 sebesar Rp963.600.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.200.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 30 Desember 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 788/KMK.06/2017 tanggal 6 November 2017, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2016, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2016 sebesar Rp951.998.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 620/KMK.06/2018 tanggal 24 September 2018, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2017, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.211.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 463/KMK.06/2016 dated June 15, 2016, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2015, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2015 surplus amounting to Rp963,600.

Based on Government Regulation No. 55 year 2017 dated December 28, 2017 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp3,200,000. The increase in capital is composed of Rp1,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,200,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2017.

Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 788/KMK.06/2017 dated November 6, 2017, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2016, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2016 surplus amounting to Rp951,998.

Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 620/KMK.06/2018 dated September 24, 2018, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2017, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2017 surplus amounting to Rp686,211.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.500.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun2018dan Penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp4.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal Rp4.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Rp1.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 18 Agustus 2020.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 44 year 2019 dated June 26, 2019 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp2,500,000. The increase in capital is composed of Rp1,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on June 28, 2019.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, determination of business from surplus in year 2018, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.

Based on Government Regulation No. 40 year 2020 dated July 21, 2020 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp4,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection amounting Rp4,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 12, 2020 and Rp1,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 18, 2020.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud digunakan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 30 Desember 2020.

Dengan demikian, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI masing-masing sebesar Rp32.146.276 dan Rp22.146.276.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-67/KN.3/2015 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2013, terdapat kekurangan penyetoran PNBP sebesar Rp184.862. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan April 2015.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-284/KN.3/2015 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2014, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp266.015. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Oktober 2015.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-488/MK.06/2016 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2015, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp321.200. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Juli 2016.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. SR-441/MK.06/2017 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2016, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp317.333. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Agustus 2017.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 78 year 2020 dated December 30, 2020 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is to carry Implementation of The National Economic Recovery Program. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2020.

As of December 31, 2020 and 2019, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp32,146,276 and Rp22,146,276, respectively.

Based on the letter of the Ministry of Finance No. S-67/KN.3/2015, regarding the excess of accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2013, there is a shortage of non-tax revenues deposited amounting to Rp184,862. LPEI has deposited the non-tax revenues in April 2015.

Based on the letter of the Ministry of Finance No. S-284/KN.3/2015, regarding the excess of accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2014, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp266,015. LPEI has deposited the non-tax revenues in October 2015.

Based on the letter of the Ministry of Finance No. S-488/MK.06/2016, regarding the excess of accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2015, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp321,200. LPEI has deposited the non-tax revenues in July 2016.

Based on the letter of the Minister of Finance No. SR-441/MK.06/2017 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2016, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp317,333. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2017.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. SR-139/MK.06/2018 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2017, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp228.737. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Juli 2018.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-838/MK.06/2019 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2018, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp38.626. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Desember 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2018 dan Penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the letter of the Minister of Finance No. SR-139/MK.06/2018 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2017, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp228,737. LPEI has deposited the non-tax revenues in July 2018.

Based on the letter of the Minister of Finance No. S-838/MK.06/2019 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2018, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp38,626. LPEI has deposited the non-tax revenues in December 2019.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, determination of business from surplus in year 2018, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.

22. Pembagian Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015. surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

22. Distribution of Income for the Current Year

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding LPEI and Regulation of the Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by LPEI in 1 (one) year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as follows: general reserve and special purpose reserve shall be 90% (ninety percent) of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% (ten percent) of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

22. Pembagian Laba Tahun Berjalan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2018 sebesar Rp171.673 untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp59.788 serta cadangan umum sebesar Rp94.717, dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp17.167.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2018 dan Penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SR-139/MK.06/2018 tanggal 2 Juli 2018, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2017 sebesar Rp1.016.608 untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp272.646 serta cadangan umum sebesar Rp642.302, jasa produksi sebesar Rp38.631, tantiem sebesar Rp16.164 dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp46.865.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SR-139/MK.06/2018 tanggal 2 Juli 2018, tentang Pertanggung jawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2017 ,Penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2017, dan penetapan penyesuaian remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.211.

Jasa produksi, tantiem serta bagian laba Pemerintah tahun buku 2017 telah dibayarkan pada bulan Juli 2018.

22. Distribution of Income for the Current Year (continued)

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2018 amounting to Rp171,673 for the allocation of special purpose reserve amounting to Rp59,788 and general reserve amounting to Rp94,717, and Government's profit share amounting to Rp17,167.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, determination of business from surplus in year 2018, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. SR-139/MK.06/2018 dated July 2, 2018, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2017 amounting to Rp1,016,608 for the allocation of special purpose reserve amounting to Rp272,646 and general reserve amounting to Rp642,302, bonus amounting to Rp38,631, tantiem amounting to Rp16,164 and Government's profit share amounting to Rp46,865.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. SR-139/MK.06/2018 dated July 2, 2018, on Accountability of LPEI Financial Report of 2017, determination of business from surplus in year 2017, and stipulation of remuneration adjustment for Board of Directors and Managing Director of LPEI year 2018, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2017 surplus amounted to Rp686,211.

Bonus, tantiem and Government's profit share for 2017 were paid in July 2018.

22. Pembagian Laba Tahun Berjalan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SR-441/MK.06/2017 tanggal 31 Juli 2017. Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2016 sebesar Rp1.410.368 untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp758.235 serta cadangan umum sebesar Rp511.096, jasa produksi sebesar Rp53.594, tantiem sebesar Rp22.411 dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp65.032.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SR-441/MK.06/2017 tanggal 31 Juli 2017, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2016, penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2016, dan penetapan penyesuaian remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2017. Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2016 sebesar Rp951.998.

Jasa produksi, tantiem serta bagian laba Pemerintah tahun buku 2016 telah dibayarkan pada bulan Agustus 2017.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-488/MK.06/2016 tanggal 15 Juni 2016. Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2015 sebesar Rp1.426.554 untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp758.235 serta cadangan umum sebesar Rp526.563, jasa produksi sebesar Rp52.820, tantiem sebesar Rp32.241 dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp57.695.

22. Distribution of Income for the Current Year (continued)

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. SR-441/MK.06/2017 dated July 31, 2017, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2016 amounting to Rp1,410,368 for the allocation of special purpose reserve amounting to Rp758,235 and general reserve amounting to Rp511,096, bonus amounting to Rp53,594, tantiem amounting to Rp22,411 and Government's profit share amounting to Rp65,032.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. SR-441/MK.06/2017 dated July 31, 2017, on Accountability of LPEI Financial Report of 2016, determination of business from surplus in year 2016, and stipulation of remuneration adjustment for Board of Directors and Managing Director of LPEI year 2017, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2016 surplus amounted to Rp951,998.

Bonus, tantiem and Government's profit share for 2016 were paid in August 2017.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-4884/MK.06/2016 dated June 15, 2016, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year 2015 amounting to Rp1,426,554 for the allocation of special purpose reserve amounting to Rp758,235 and general reserve amounting to Rp526,563, bonus amounting to Rp52,820, tantiem amounting to Rp32,241 and Government's profit share amounting to Rp57,695.

23. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

23. Interest Income and Income From Sharia

a. Pendapatan bunga

a. Interest income

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Penugasan Umum			***General Assignment***
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	1.829.472	2.721.286	*Working capital*
Investasi	1.904.561	2.454.890	*Investment*
Konsumsi	7.319	9.555	*Consumption*
Penempatan pada bank			*Placements with banks*
Deposito berjangka	179.667	382.216	*Time deposit*
Call money	9.666	62.087	*Call money*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	--	33.620	*Securities sold under repurchase agreement*
Efek-efek			*Securities*
Obligasi Pemerintah	26.914	16.641	*Government bonds*
Giro pada bank	634	2.763	*Current accounts with banks*
	3.958.233	5.683.058	
Penugasan Khusus			***National Interest Account***
Deposito berjangka	287.891	262.552	*Time deposit*
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	25.925	36.922	*Working capital*
Giro pada bank	763	384	*Current account with banks*
	314.579	299.858	
Total	**4.272.812**	**5.982.916**	***Total***

Berikut adalah rincian pendapatan bunga berdasarkan klasifikasi aset keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019:

Following is the details of interest income according to the classification of financial assets for year ended December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Pembiayaan dan piutang	3.767.277	5.222.653	*Financing and receivables*
Penempatan pada bank	477.224	706.855	*Placements with banks*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	--	33.620	*Securities sold under repurchased agreement*
Giro pada bank	1.397	3.147	*Current accounts with banks*
Tersedia untuk dijual			*Available for sale*
Efek-efek	26.914	16.641	*Securities*
Total	**4.272.812**	**5.982.916**	***Total***

b. Pendapatan usaha syariah

b. Income from sharia

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Penugasan Umum			***General Assignment***
Rupiah			***Rupiah***
Pembiayaan *musyarakah*	593.166	621.609	*Musyarakah financing*
Marjin piutang *murabahah*	103.727	139.029	*Murabahah receivables margin*
	696.893	760.638	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Pembiayaan *musyarakah*	88.580	214.138	*Murabahah receivables margin*
Marjin piutang *murabahah*	44.596	103.774	*Musyarakah financing*
	133.176	317.912	
Total	**830.069**	**1.078.550**	***Total***

24. Beban Bunga

24. Interest Expense

Akun ini merupakan beban bunga atas

Interest expense was derived from:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Efek-efek utang yang diterbitkan	2.623.468	3.007.468	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	31.440	169.590	*Fund borrowing*
	2.654.908	3.177.058	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Efek-efek utang yang diterbitkan	429.423	466.260	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.178.662	2.002.900	*Fund borrowing*
	1.608.085	2.469.160	
Total	**4.262.993**	**5.646.218**	***Total***

25. Pembentukan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

25. Provision for Impairment Losses on Financial Assets

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Giro pada bank (Catatan 5b)	266	--	*Current accounts with banks (Note 5b)*
Penempatan pada bank (Catatan 6d)	(20.332)	--	*Placements with banks (Note 6d)*
Pembiayaan dan piutang, dan Pembiayaan dan piutang syariah (Catatan 9h)	446.425	6.671.355	*Financing and receivables and financing and sharia receivables (Note 9h)*
Tagihan akseptasi (Catatan 11c)	(1.628)	--	*Acceptance receivables (Note 11c)*
Piutang lainnya	--	5.737	*Other receivables*
Piutang asuransi (Catatan 10a)	(2.069)	2.828	*Insurance receivables (Note 10a)*
Piutang pembiayaan garansi (Catatan 9h)	418	1.421	*Guarantee financing receivables (Note 9h)*
Total	**423.080**	**6.681.341**	***Total***

26. Beban Umum dan Administrasi

26. General and Administrative Expenses

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	110.709	107.704	*Depreciation of premises and equipment (Note 13)*
Jasa profesional	46.573	54.740	*Professional services*
Sewa	26.133	41.425	*Lease*
Perbaikan dan pemeliharaan	13.882	18.334	*Repairs and maintenance*
Komunikasi	10.628	10.913	*Communications*
Iklan dan promosi	4.200	13.571	*Advertising and promotions*
Perjalanan dinas	4.164	25.316	*Travelling*
Listrik dan air	3.584	4.853	*Electricity and water*
Biaya berlangganan	2.785	3.562	*Subscription cost*
Percetakan dan perlengkapan kantor	2.477	6.470	*Printing and office supplies*
Kegiatan perusahaan	972	3.513	*Corporate activities*
Corporate social responsibilities	601	1.892	*Corporate social responsibilities*
Aktivitas pegawai	328	4.739	*Employee activities*
Lain-lain	8.310	3.359	*Others*
Total	**235.346**	**300.391**	***Total***

Termasuk dalam lain-lain adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk transportasi, beban bunga atas liabilitas sewa, donasi, asuransi atas kendaraan dinas, dan bea materai.

Included in others are expenses disbursed for transportation, interest expense of lease liabilities, donation, insurance on official vehicles and stamp duty.

27. Beban Gaji dan Tunjangan

27. Salaries and Benefits

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Beban gaji dan tunjangan	235.930	187.876	*Salaries and benefits expenses*
Imbalan kerja (Catatan 28)	11.360	74.292	*Employee benefits (Note 28)*
Manfaat lain-lain	45.265	20.172	*Other benefits*
Tunjangan hari raya	31.458	19.775	*Religion holiday benefits*
Tunjangan kesehatan	22.038	17.522	*Medical allowance*
Pendidikan dan pelatihan	7.948	16.518	*Training and education*
Asuransi	14.144	11.667	*Insurance*
Lain-lain	27.589	18.458	*Others*
Total	**395.732**	**366.280**	***Total***

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan adalah beban atas perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) sebesar Rp5.436 dan Rp6.897 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 9h).

Termasuk dalam lain-lain adalah honorarium atas staf ahli Dewan Direktur.

Rincian gaji, tunjangan serta jasa produksi dan tantiem atas Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Kepala Divisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Included in salaries and benefits expenses is the amount expensed arising from the difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) which amounted to Rp5,436 and Rp6,897 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 9h).

Included in others are honorarium for technical assistance of the Board of Directors.

The details of salaries, allowances and bonuses and tantiem of the Boards of Directors, Managing Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Head of Divisions for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*					
	Jumlah Pegawai/ Number of *Employees*	Gaji/ *Salaries*	Tunjangan/ *Allowances*	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and *Tantiem*	*Total*	
Dewan Direktur	4	4.183	5.246	--	9.429	*Board of Directors*
Direktur Pelaksana	6	11.104	12.237	--	23.341	*Managing Directors*
Komite Audit	2	435	31	--	466	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	315	31	--	346	*Risk Management Committee*
Dewan Pengawas Syariah	3	571	52	--	623	*Sharia Supervisory Board*
Wakil Ketua Eksekutif Senior	6	6.104	7.314	--	13.418	*Senior Executive Vice President*
Kepala Divisi	36	15.191	27.645	--	42.836	*Head of Divisions*
Total	**59**	**37.903**	**52.556**	**--**	**90.459**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2019*					
	Jumlah Pegawai/ Number of *Employees*	Gaji/ *Salaries*	Tunjangan/ *Allowances*	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and *Tantiem*	*Total*	
Dewan Direktur	4	4.020	4.316	--	8.340	*Board of Directors*
Direktur Pelaksana	6	8.765	6.279	--	15.050	*Managing Directors*
Komite Audit	2	325	22	--	349	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	348	27	--	377	*Risk Management Committee*
Dewan Pengawas Syariah	3	528	36	--	567	*Sharia Supervisory Board*
Wakil Ketua Eksekutif Senior	2	1.387	1.652	--	3.041	*Senior Executive Vice President*
Kepala Divisi	26	10.242	24.109	--	34.377	*Head of Divisions*
Total	**45**	**25.615**	**36.441**	**--**	**62.101**	***Total***

28. Liabilitas Imbalan Kerja

28. Liability For Employee Benefits

Berdasarkan kebijakan LPEI, pegawai memperoleh tunjangan dan manfaat selain gaji berupa tunjangan hari raya (THR), penggantian biaya pengobatan, tunjangan kematian, tunjangan cuti, masa persiapan pensiun, penghargaan masa bakti, dana pensiun, jasa produksi, asuransi dan manfaat lainnya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Pensiun iuran pasti
LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. Jumlah kontribusi LPEI untuk dana pensiun adalah sebesar 6,00% dari gaji pokok pegawai yang disajikan sebagai bagian dari "beban gaji dan tunjangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kontribusi LPEI adalah sebesar Rp5.460 dan Rp4.823 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pensiun manfaat pasti
LPEI menyiapkan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan paska kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta imbalan kerja atas *long-service award.*

LPEI memberikan imbalan tersebut sesuai dengan Peraturan Perusahaan dibandingkan dengan peraturan imbalan pasca kerja Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, dan memberikan mana yang lebih tinggi.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, tertanggal 25 Februari 2021 dan 17 Februari 2020, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Under LPEI's policy, in addition to salaries, the employees are entitled to allowances and benefits, which are religion holiday benefits (THR), medical reimbursements, death allowances, leave allowances, pension preparation period, long service award, pension plan, bonus, insurance and other benefits based on Labor Law No. 13/2003

Defined contribution plan
LPEI implements a defined contribution plan covering all of their permanent employees, which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. LPEI's contribution to the pension plan retirement fund is 6.00% of the employees' basic salaries and is presented as part of "salaries and benefits" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. LPEI's contributions were amounted to Rp5,460 and Rp4,823 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Defined benefit plan
LPEI has provided allowance for employee long-service and post-service benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 which include severance fee, service pay benefits and compensation fees as well as employee benefit long-service award.

LPEI has provided the benefits in accordance with the Collective Labor Agreement as compared with benefits regulation under Labor Law No. 13/2003, and provide whichever is higher.

Liability for employee benefits is computed by an independent actuary, PT Sentra Jasa Aktuaria, dated February 25, 2021 and February 17, 2020, for year ended December 31, 2020 and 2019, respectively:

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Penyisihan imbalan kerja

Penyisihan imbalan kerja terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Program imbalan kerja	130.324	213.476	*Employee benefit plan*
Imbalan jangka panjang lainnya	52.229	78.853	*Other long-term employee benefit*
Saldo akhir	**182.553**	**292.329**	***Ending balance***

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk imbalan kerja adalah:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Program imbalan kerja	30.643	54.430	*Employee benefit plan*
Imbalan jangka panjang lainnya	(19.283)	19.862	*Other long-term employee benefit*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**11.360**	**74.292**	***Expense recognized in the statement of profit or loss***

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Beban gaji dan tunjangan (Catatan 27)	11.360	74.292	*Salaries and benefits expense (Note 27)*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - kerugian/(laba) aktuaria	(103.864)	1.483	*Remeasurement of liability for employee benefits - actuarial loss/(gains)*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	**(92.504)**	**75.775**	***Expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income***

Program imbalan kerja

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris.

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tingkat diskonto pertahun	3.64% - 7.83%	5,42% - 8,19%	*Annual discount rates*
Tingkat kenaikan Gaji per tahun	5,00%	10,00%	*Increase rates Annual salary*
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3,50%	3,50%	*Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46*
Tingkat kematian	TMI 11	TMI 11	*Mortality rate*
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	15,64	15,80	*Average remaining working periods*

28. Liability For Employee Benefits (continued)

Provision for employee benefits

The provision for employee benefits consist of:

The expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the employee benefits are as follows:

The expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows:

Employee benefit plan

The following are the significant items disclosed in the actuarial reports.

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan kerja (lanjutan)

a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Biaya jasa kini dan jasa lalu	14.621	40.342	*Current and past service cost*
Biaya bunga	16.022	14.088	*Interest cost*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**30.643**	**54.430**	***Expense recognized in the statement of profit or loss***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto:			*Remeasurement of the net liability for employee benefits:*
Keuntungan aktuaria dari perubahan asumsi demografis	4	--	*Actuarial gain from changes in demographic assumption*
Keuntungan aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	(40.397)	(12.984)	*Actuarial gain from experience adjustment*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	(63.471)	14.467	*Actuarial (gains)/losses from changes in financial assumption*
Keuntungan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(103.864)	**1.483**	*Gain recognized in other comprehensive income*
Total beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	**(73.221)**	**55.913**	***Total expense recognized in the the statement of profit or loss and other comprehensive income***

b. Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	213.476	164.199	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	30.643	54.429	*Addition during the year*
Nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	(103.864)	1.483	*Amount recognized in other comprehensive income*
Pembayaran tahun berjalan	(9.931)	(6.635)	*Payment during the year*
Saldo akhir	**130.324**	**213.476**	***Ending balance***

28. Liability For Employee Benefits (continued)

Employee benefit plan (continued)

a. Expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for employee benefit plan follows:

b. The movements in the allowance are as follows:

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

28. Liability for Employee Benefits (continued)

Program imbalan kerja (lanjutan)

Employee benefit plan (continued)

c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements for the present value of employee benefit are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Saldo awal tahun	213.476	164.199	*Balance at beginning of the year*
Biaya jasa kini	14.621	27.965	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	--	12.376	*Past service cost*
Biaya bunga	16.022	14.088	*Interest cost*
Pembayaran tahun berjalan	(9.931)	(6.635)	*Payment during the year*
Pengukuran kembali kerugian aktuaria:			*Remeasurement of actuarial losses:*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan asumsi demografis	4	--	*Actuarial (gain)/loss from changes in demographic assumption*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	(63.471)	14.467	*Actuarial (gain)/losses from changes in financial assumption*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	(40.397)	(12.984)	*Actuarial (gain)/losses from experience adjustments*
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan kerja	**130.324**	**213.476**	***Ending balance present value of employee benefit liabilities***

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit):

d. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited):

31 Desember/ *December 31, 2020*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	17.917	-1%	2.435
+1%	(15.092)	+1%	(2.007)

31 Desember/ *December 31, 2019*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	29.638	-1%	4.056
+1%	(25.353)	+1%	(4.079)

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

28. Liability For Employee Benefits (continued)

Program imbalan kerja (lanjutan)

Employee benefit plan (continued)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit)

e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited)

31 Desember/ *December 31, 2020*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	-12.421	-1%	(1.587)
+1%	14.345	+1%	1.872

31 Desember/ *December 31, 2019*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(22.791)	-1%	(3.668)
+1%	25.932	+1%	3.455

f. Jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

f. The maturity of the obligation for post-employment benefits as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/ *31 Desember 2020*				
	Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/*Amount Benefit Payment for Pension*	**Pembayaran Manfaat OLTEB/*Amount of Benefit Payment for OLTEB***	**Pembayaran Manfaat Kesehatan/*Amount of Benefit Payment for Healthcare***	**Total**	
Dibawah 1 tahun	6.839	6.112	2.193	15.144	*Below 1 year*
Antara 1 - 2 tahun	5.668	4.230	1.648	11.546	*Within 1 - 2 years*
Antara 2 - 5 tahun	29.983	22.268	2.834	55.085	*Within 2 - 5 years*
Antara 5 - 10 tahun	79.393	43.170	6.036	128.599	*Within 5 - 10 years*
Diatas 10 tahun	768.415	129.401	383.685	1.281.501	*Up 10 years*

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan kerja (lanjutan)

f. Jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

28. Liability For Employee Benefits (continued)

Employee benefit plan (continued)

f. The maturity of the obligation for post-employment benefits as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2019*			
	Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/*Amount Benefit Payment for Pension*	**Pembayaran Manfaat OLTEB/*Amount of Benefit Payment for OLTEB***	**Total**	
Dibawah 1 tahun	12.270	6.808	19.078	*Below 1 year*
Antara 1 - 2 tahun	7.995	9.451	17.446	*Within 1 - 2 years*
Antara 2 - 5 tahun	31.726	28.045	59.771	*Within 2 - 5 years*
Antara 5 - 10 tahun	130.665	68.847	199.512	*Within 5 - 10 years*
Diatas 10 tahun	2.887.209	338.658	3.225.867	*Up 10 years*

Rata-rata durasi dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah 14,51 dan 16,61 tahun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The average of duration of the obligation for post employment benefits is 14.51 and 16.61 for the years as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis. the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya
Imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari *long-service award (LSA*), masa persiapan pensiun, pemberian logam mulia dan *long leave (LL).*

Asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

28. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits
Other long-term benefits consist of long-service award (LSA), pre-retirement period, gold granting, and long leave (LL).

The assumptions used by the actuary for other long-term benefits calculation are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Tingkat diskonto pertahun	3.64% - 7.83%	5,42% - 8.19%	*Annual discount rates*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10,00%	10,00%	*Annual salary increase rates*
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3,50%	3,50%	*Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46*
Tingkat kematian	TMI 11	TMI 11	*Mortality rate*
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	15,64	15,80	*Average remaining working period*

a. Beban imbalan jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

a. Other long term benefit plan expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
Biaya jasa:			*Service cost:*
Biaya jasa kini dan jasa lalu	1.147	3.549	*Current and past service cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lainnya	(25.947)	10.558	*Remeasurement of other long term benefit*
Beban bunga neto pada liabilitas imbalan yang ditetapkan	5.517	5.755	*Net interest on net defined benefit liability*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(19.283)**	**19.862**	***Expense recognized in the statement of profit or loss***

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

b. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

28. Liability for Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

b. The movements in the provision are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Saldo awal	78.853	67.075	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	(19.283)	19.862	*Addition during the year*
Pembayaran tahun berjalan	(7.341)	(8.084)	*Payments during the year*
Saldo akhir	**52.229**	**78.853**	***Ending balance***

c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

c. The movements for the present value of other long term benefit plan are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Saldo awal tahun	78.853	67.075	*Balance at beginning of the year*
Biaya jasa kini	7.077	12.147	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(5.930)	(8.598)	*Past service cost*
Biaya bunga	5.517	5.755	*Interest cost*
Pembayaran tahun berjalan	(7.341)	(8.084)	*Payments during the year*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan asumsi demografis	(8)	--	*Actuarial (gain)/loss from changes in demographic assumption*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	(12.835)	12.588	*Actuarial (gains)/losses from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuaria dari *experience adjustment*	(13.104)	(2.030)	*Actuarial gains from experience adjustment*
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya	**52.229**	**78.853**	***Ending balance present value of other long term benefit***

d. Saldo imbalan kerja untuk posisi 31 Desember 2020 dan posisi selama empat tahun sebelumnya:

d. Balance of employee benefits as of December 31, 2020 and previous four years are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*					
	2020	2019	2018	2017	2016	
Nilai kini dari liabilitas imbalan kerja	(182.553)	(292.329)	(231.274)	(194.680)	(146.800)	*Present value of employee benefit obligation*
Penyesuaian asumsi pada liabilitas program	53.501	15.015	20.669	3.139	7.648	*Experience adjustments on plan liabilities*

28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit)

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas atas nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini dengan asumsi perubahan atas tingkat diskonto:

28. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

e. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited)

The tables below show the sensitivity analysis ofthe present value of employee benefit liabilities and current service cost in the assumed changes in the discount rate:

31 Desember/ *December 31, 2020*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	3.307	-1%	507
1%	(2.966)	1%	(451)

31 Desember/ *December 31, 2019*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	5.686	-1%	997
1%	(5.053)	1%	(877)

f. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko kenaikan gaji (tidak diaudit):

f. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited):

31 Desember/ *December 31, 2020*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(3.031)	-1%	(461)
1%	3.322	1%	510

31 Desember/ *December 31, 2019*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(4.717)	-1%	(813)
1%	5.208	1%	908

29. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi LPEI adalah sebagai berikut:

29. Commitments and Contingencies

LPEI's commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen			***Commitment liabilities***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	2.621.741	6.889.589	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan *L/C* yang tidak dapat dibatalkan	5.221	61.440	*Outstanding irrevocable L/C*
	2.626.962	6.951.029	
Pihak ketiga			*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	2.465.774	5.342.743	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	79.952	129.705	*Outstanding irrevocable L/C*
	2.545.726	5.472.448	
Total Rupiah	5.172.688	12.423.477	*Total Rupiah*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	184.402	263.044	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan *L/C* yang tidak dapat dibatalkan	9.395	17.648	*Outstanding irrevocable L/C*
	193.797	280.692	
Pihak ketiga			*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	3.002.105	3.772.074	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan *L/C* yang tidak dapat dibatalkan	69.847	71.864	*Outstanding irrevocable L/C*
	3.071.952	3.843.938	
Total mata uang asing	3.265.749	4.124.630	*Total foreign currencies*
Total liabilitas komitmen	**8.438.437**	**16.548.107**	***Total commitment liabilities***
Komitmen	**(8.438.437)**	**(16.548.107)**	***Commitments***

29. Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

29. Commitments and Contingencies (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi			*Related parties*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	143.380	10.611	*Interest income on non-performing loans*
Pihak ketiga			*Third parties*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	3.355.575	4.813.104	*Interest income on non-performing loans*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	122.491	63.161	*Interest income on non-performing loans*
Pihak ketiga			*Third parties*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	1.432.651	1.126.412	*Interest income on non-performing loans*
Total tagihan kontinjensi	**5.054.097**	**6.013.288**	***Total contingent receivables***
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Bank garansi	307.180	1.074.693	*Bank guarantee*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank garansi	1.659.755	2.146.138	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit - PEN	817.500	--	*Credit Guarantee - PEN*
Proteksi piutang dagang	106.505	6.100	*Receivable protection*
	2.583.760	2.152.238	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 38)			*Related parties (Note 38)*
Bank garansi	1.098.731	1.234.366	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit - PEN	49.175	--	*Credit Guarantee - PEN*
Proteksi piutang dagang	48.473	36.789	*Receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	1.053.600	--	*Failure on export insurance*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank garansi	5.976.651	5.735.186	*Bank guarantee*
Asuransi kegagalan ekspor	3.248.140	5.244.936	*Failure on export insurance*
Proteksi piutang dagang	3.652.008	2.890.821	*Receivable protection*
	15.126.778	15.142.098	
Total liabilitas kontinjensi	**18.017.718**	**18.369.029**	***Total contingent liabilities***
Kontinjensi - neto	**(12.963.621)**	**(12.355.741)**	***Contingencies - net***

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.

30. Manajemen Risiko

LPEI menerapkan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI. Cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dimaksud antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko LPEI adalah mengelola risiko agar pelaksanaan kegiatan usaha LPEI tetap berada dalam koridor profil Risiko lembaga yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan melalui institusi Manajemen Risiko yang berfungsi sebagai penyaring dan pemberi peringatan dini *(early warning system).*

LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan mengelola risiko yang baik yang diharapkan tidak hanya meningkatkan *stakeholder value*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin dihadapi di masa mendatang, memelihara tingkat *risk adjusted return* yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat.

30. Risk Management

LPEI implements risk management in accordance with Law No. 2 in 2009 about LPEI Article 17 and Regulation of the Minister of Finance No. 142/PMK.010/2009 dated August 31, 2009 about LPEI Risk Management. The implementation of the management risk stated in the Regulation of the Minister of Finance are as follows:

1. *Active monitoring by the Board of Directors and Managing Directors;*
2. *Adequatepolicies, procedures and indetermining risk barrier;*
3. *Adequate process in identifying, measuring, monitoring, risk control, and system information of risk management; and*
4. *Comprehensive internal control system.*

The target of LPEI Risk Management Implementation is to manage risk so that the implementation of LPEI business activities remains within the corridor of the controlled risk profile, directed, integrated and sustainable institution through Risk Management system that functions as a filter and provider of early warning systems.

LPEI applied ligned e risk management which ligned with target, policy, criteria, complexity and good risk mitigation, which expected to increase stakeholder value and provide a good prediction of potential loss in the upcoming future. This also expected to maintain optimum risk-adjusted-return and also helping on making a good decision.

30. Manajemen Risiko (lanjutan)

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, risiko yang dihadapi LPEI juga berkembang secara luas, antara lain mencangkup risiko kredit, risiko asuransi, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan di LPEI dibanding jenis risiko lainnya. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang.

Pada tahun 2019, LPEI menata kembali penerapan kerangka manajemen risiko, khususnya pada jenis-jenis risiko, risk appetite, alat pengukuran, metodologi, pengukuran ataupun internalisasi risk culture sebagai satu kesatuan dalam penerapan Enterprise Risk Management *Framework* di LPEI. Pada hakikatnya *Enterprise Risk Management* di LPEI telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI. Pengelolaan sembilan risiko diatas juga termasuk pengelolaan risiko penugasan khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI.

Penerapan manajemen risiko dicerminkan dari hasil penilaian Profil Risiko LPEI yang mencakup penilaian risiko inheren, yaitu penilaian atas risiko yang melekat *(inherent*) pada pelaksanaan kegiatan usaha LPEI, yang mencakup pembiayaan, penjaminan dan asuransi dan penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencakup seluruh pilar-pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan. Hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan Profil Risiko secara komposit. Profil risiko LPEI merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/11/2012 tentang Pedoman Tingkat Kesehatan LPEI.

30. Risk Management (continued)

In line with the development of business activities, LPEI also deal with higher risk. This risk are including credit risk, insurance risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk. Credit risk is the most significant among others. Credit risk is a risk that occured because of the failure of the debtor, which causes not fulfilled to pay off debt.

In 2019, LPEI improved the management risk framework, especially on the following section, risk appetite, risk measurement tools, methodology, measurement, and risk culture internalitation as a part on applying Enterprise Risk Management Framework on LPEI. Risk Management Framework on LPEI has been describe on Ministry of Finance Regulation No. 142/PMK.010/2009. The risk management of nine points above also covered special assignment by the Finance Minister Regulation No. 134/PMK.08/2015 on special assignment to LPEI.

Risk management implementation also reflected in LPEI Risk Profile Assesment that consist of Inherent Risk Assesment in all LPEI business activity that include financing activity, guarantee and insurance, and technical assistance that potentially affect LPEI financial position and Risk Control System Assesment covering all risk management pillars as defined in the regulation of the Ministry of Finance. The result of inherent risk Assesment and Risk Control System Assesment is LPEI Risk Profile which is one of the factors in Risk Based Indonesia Eximbank Rating as stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0001/PDD/11/2012 concerning LPEI Risk Based LPEI Rating Guidelines.

30. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam kerangka manajemen risiko terpadu *(enterprise risk* management), LPEI menerapkan konsep *three lines of defense*, yakni:

- *First line of defense* yaitu unit kerja bisnis denganaktivitas fungsional sebagai unit kerja yang mengambil risiko *(risk taking function)* dan sebagai unit yang memasarkan dan memproses pembiayaan. penjaminan dan asuransi dengan merujuk pada kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan direview secara *joint memo* oleh unit kerja Analisa Risiko Bisnis yang bertindak sebagai *dynamic partner* dari unit bisnis.

- *Second line of defense* yakni unit kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan yang bersifat independen yang memantau pemenuhan manajemen risiko di LPEI sesuai toleransi risiko dan merupakan unit kerja yang merumuskan *risk policy* dan membangun *risk modeling* yang digunakan oleh unit bisnis dan unit analisa risiko bisnis *(risk management function)*.

- *Third line of defense* yakni unit kerja Audit Internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada *first and second lines of defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana secara independen *(internal audit function)*.

Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap tingkat risiko yang dihadapi LPEI walaupun tidak secara signifikan. Hal ini tercermin dalam hasil penilaian Tingkat Kesehatan (TK) LPEI posisi triwulan IV 2020 menunjukkan peringkat komposit 3 (PK-3) atau sama bila dibandingkan dengan Tingkat Kesehatan LPEI posisi triwulan IV 2019, beberapa parameter justru mengalami perbaikan peringkat.

30. Risk Management (continued)

In the organizational structure to support the implementation of risk management in business activities. LPEI has implemented the concept of three lines of defense:

- *First line of defense is a business unit withfunctional activity as a unit which markets and processes financing, guarantees and insurance with reference to the policy, procedures and limits which has been determined and reviewed as a joint memo by Business Risk Analysis Unit that acts as a dynamic business partner of the business unit.*

- *Second line of defense is Risk Management and Strategic Planning Unit to independently monitor risk management implementation in LPEI regarding to risk tolerance, besides acting as a unit that formulates risk policy and constructs also risk model that is used by Business Unit and Business Risk Analyst Unit.*

- *Third line of defense is Internal Audit Unit function as controller through the evaluation of the first and second lines of defense and provides a report to the Executive Director and Managing Director independently.*

Risk Management During Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic has affected the level of risk that LPEI faced, albeit not significantly. This is reflected in the outcome of LPEI's Soundness Level (TK) assessment as of 31 December 2020, which resulted in Rank 3 (PK-3) or relatively stable compared to the results of LPEI's Soundness Level (TK) assessment as of 31 December 2019. Some of the parameters even showed improvements in terms of ranks.

30. Manajemen Risiko (lanjutan)

Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19 (lanjutan)

Penilaian tersebut mencerminkan kondisi LPEI secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, dan permodalan yang secara umum cukup baik.

Penilaian pada triwulan IV 2020 untuk parameter Rentabilitas dan Permodalan mengalami perbaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh faktor kinerja LPEI dalam menghasilkan laba yang mencapai target dan perbaikan kualitas portfolio pembiayaan serta adanya dukungan dari Pemerintaah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dampak Pandemi Covid-19 pada parameter Tingkat Kesehatan LPEI posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Profil risiko

   Profil Risiko LPEI posisi 31 Desember 2020 menunjukkan peringkat komposit 3 atau sama bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019. Telah terjadi perbaikan rasio kualitas aset, namun masih terdapat beberapa kendala akibat dampak Covid-19, seperti skema restrukturisasi mengalami kendala dikarenakan keadaan ekonomi yang belum mendukung, klaim penjaminan yang dibayarkan tergolong tinggi serta *default* yang meningkat disebabkan operasional debitur terdampak Covid-19 dan pencapaian pembiayaan dibawah 95% dari target RKAT dikarenakan fokus unit bisnis adalah pada restrukturisasi dan *maintaining* debitur eksisting. Dari segi Risiko Reputasi, tidak terdapat pemberitaan terkait LPEI dengan *tone* negatif, namun berita negatif terkait dengan kondisi makro ekonomi berupa ekspor yang menurun dan penjualan komoditas ekspor yang mengalami penurunan dampak dari pandemi Covid-19 terbilang cukup banyak.

30. Risk Management (continued)

Risk Management During Covid-19 Pandemic (continued)

These results show that in general, LPEI's level of soundness is relatively good and could withstand negative impacts from the changes of business conditions and other external factors, as shown in the ranks of some of the parameters, namely risk profile, good corporate governance and capital aspect.

The Q4 assessment results for the Rentability and Capital parameters showed significant improvements, which were mainly caused by LPEI's better performance in generating profits, improvement of the loan portfolio and Government's supports in the form of "Penyertaan Modal Negara" (PMN).

Impacts of the Covid-19 pandemic on the parameters of LPEI's Soundness Level (TK) Assessment as of 31 December 2020 are the following:

1. *Risk Profile*

   The result of LPEI's risk profile assessment as of 31 December 2020 was Rank 3, or not changing compared to that of 31 December 2019. There were some improvements in terms of asset quality ratios, although some setbacks caused by the Covid-19 pandemic were still apparent, e.g., some hindrances in the restructuration scheme, a relatively high amount of guarantee claims being paid and increasing defaults caused by disturbances in debtors' operational activities after Covid-19 and the achievement of the loan portfolio below 95% compared to the target because the focus of business units were on restructuring and maintaining existing debtors. In terms of Reputational Risk, there were no news regarding LPEI with negative sentiments, but news talking about the worsening macroeconomic conditions regarding export performances were everywhere.

30. Manajemen Risiko (lanjutan)

Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19 (lanjutan)

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Hasil *self-assessment* atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada tahun 2019 dari 11 (sebelas) indikator dengan hasil Predikat Komposit "Baik".

3. Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas posisi Desember 2020 memiliki peringkat 4, atau membaik dibandingkan dengan posisi Desember 2019 (peringkat 5). Secara analisis rentabilitas kurang memadai, laba telah memenuhi target, namun untuk parameter rasio-rasio rentabilitas lainya masih belum memadai. Hal-hal yang mendukung perbaikan pada peringkat faktor Rentabillitas disebabkan oleh adanya perbaikan dalam pencapain laba LPEI yang mencapai 150,28% dan prospek rentabilitas yang sudah positif. Namun beberapa hal yang menjadi perhatian adalah perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan kualitas aktiva produktif serta pengelolaan sumber dana yang optimal dan efisien agar dapat mendukung rentabiltasi melalui operasional bisnis.

4. Permodalan

Peringkat Permodalan posisi Desember 2020 memiliki peringkat 2, atau membaik dibandingkan dengan posisi Desember 2019 (peringkat 3). Secara analisis permodalan LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.

30. Risk Management (continued)

Risk Management During The Covid-19 Pandemic (continued)

2. Good Corporate Governance (GCG)

The results of the self-assessment on the application of the principles of Good Governance in 2019 from 11 (eleven) indicators with the results of the Composite Predicate "Good".

3. Rentability

The assessment result of the Rentability parameter as of December 2020 was Rank 4, which was an improvement compared to the result as of December 2019 (Rank 5). Based on analysis, LPEI managed to achieve the targeted profit, although there were still some other rentability ratios that were still insufficient. Several factors that supported this improvement were LPEI's 150,28% profit achievement and a positive trend in regards of rentability prospects. On the other hand, LPEI still needs to ensure that it has the steps needed towards asset quality improvement and an optimum and efficient way of managing the capital.

4. Capital

The assessment result of the Capital parameter as of December 2020 was Rank 2, which was an improvement compared to the result as of December 2019 (Rank 3). Analysis showed that LPEI has an adequate capital level relative to its risk profile, accompanied by a strong capital management in accordance with its characteristics and scale and complexity of business.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

30. Manajemen Risiko (lanjutan)

Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19 (lanjutan)

4. Permodalan (lanjutan)

Hal-hal yang mendukung perbaikan pada peringkat faktor Permodalan disebabkan oleh adanya perbaikan dalam aset produktif bermasalah dikurangi CKPN yang membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun beberapa hal yang menjadi perhatian LPEI adalah dengan terus mengupayakan penguatan modal, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari akumulasi laba ditahan. Untuk tahun Desember 2020 LPEI menerima PMN sebesar Rp5 Triliun dan ini sesuai dengan yang ditargetkan.

Dari segi kebijakan, LPEI telah menyusun kebijakan terkait debitur terdampak pandemi Covid-19 melalui Memorandum Prosedur Nomor MPO.0030/CEO/05/2020 perihal Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur Terdampak Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2020 dan Memorandum Prosedur Nomor MPO.0032/CEO/06/2020 perihal Adendum Memorandum Prosedur Nomor MPO.0030/CEO/05/2020 perihal Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur Terdampak Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2020.

Kebijakan ini disusun sesuai dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" serta sebagai pedoman dan panduan bagi unit-unit kerja terkait dalam penetapan tindak lanjut bagi debitur LPEI yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko dan prinsip mengenal nasabah.

30. Risk Management (continued)

Risk Management During The Covid-19 Pandemic (continued)

4. Capital (continued)

An improvement in terms of the value of adversely classified assets minus its provisions was what caused the better result of this parameter assessment. On the other hand, LPEI still needs to strengthen its capital, be it the capital from the Government or the accumulations of retained earnings. In December 2020, LPEI has received PMN of Rp5 Trillion, which was according to the target.

In terms of policy, LPEI has established a regulation regarding debtors being impacted with the Covid-19 pandemic by ratifying the Procedure Memorandum (MPO) No. MPO.0030/CEO/05/2020 about "Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur Terdampak Covid-19" on 12 May 2020 and MPO No. MPO.0032/CEO/06/2020 about "Adendum Memorandum Prosedur Nomor MPO.0030/CEO/05/2020 perihal Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur Terdampak Covid-19" on 25 June 2020.

This policy was constructed based on The Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 14/POJK.05/2020 about "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" which were revised by POJK No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 about "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank", and serves as a guidance for related units to manage debtors being impacted by the Covid-19 pandemic so that the practices of good corporate governance, risk management and know your customer are carried out accordingly.

30. Manajemen Risiko (lanjutan)

Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19 (lanjutan)

4. Permodalan (lanjutan)

Kebijakan ini mengatur kriteria sektor usaha dan debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, kriteria restrukturisasi debitur terdampak Covid-19, bentuk restrukturisasi pembiayaan, penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur terdampak Covid-19 dan ketentuan lain terkait tindak lanjut pengelolaan debitur terdampak Covid-19. Pengambilan keputusan atas restrukturisasi dilakukan oleh Komite Pembiayaan dan dengan mekanisme proses persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan debitur-debitur terdampak penyebaran Covid-19 dapat terbantu dan kualitas portofolio tetap terjaga.

Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, LPEI telah melakukan kajian maupun *backtesting* pada beberapa alat pengukuran risiko yaitu pelaksanaan *Stress Testing* pada bulan Maret 2020 dan Oktober 2020, *backtesting* terhadap *forward looking model* PD yang telah diimplementasikan saat ini serta permodelan kembali atas komponen historis dan *forward looking* untuk perhitungan ECL (PD, LGD dan EAD) untuk mengakomodasi dampak pandemi Covid-19.

30. Risk Management (continued)

Risk Management During The Covid-19 Pandemic (continued)

4. Capital (continued)

This policy states the criteria of which economic sectors and debtors are categorized of being impacted by Covid-19, restructuration criteria of impacted debtors, forms of restructuration, stipulation of impacted debtors' loan qualities and other related regulations regarding the management of debtors being impacted by the Covid-19 pandemic. All decision making processes are carried out by the Financing Committee in accordance to the applicable regulations. By ratifying this policy, debtors being impacted by the Covid-19 pandemic could hopefully be eased of their burdens and LPEI could maintain its portfolio quality.

Still on the topic of the ongoing Covid-19 pandemic, LPEI has conducted studies and back-testing processes on several risk measurement tools, namely Stress Testing on March 2020 and October 2020, back-testing on the current forward looking PD model and re-modeling of the historical and forward looking ECL components (i.e., PD, LGD and EAD) to accommodate the impact of the Covid-19 pandemic.

31. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur atau *counterparties* melakukan pembayaran kembali kepada LPEI (*counterparties default*). Jenis risiko ini merupakan risikoterbesar yang dihadapi LPEI. LPEI menerapkan manajemen risiko kredit melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko kredit baik secara individual maupun secara portofolio. Pembiayaan posisi 31 Desember 2020 memiliki rasio NPF Gross sebesar 26,08% meningkat terhadap posisi 31 Desember 2019 sebelumnya yang sebesar 23,39%. Rasio NPF Net posisi 31 Desember 2020 sebesar 11,49% menurun terhadap posisi 31 Desember 2019 yang sebesar 13,96%. Atas hal ini harus menjadi perhatian utama mengenai masalah NPF. Atas peningkatan rasio NPF tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan risiko kredit lebih mendalam. Pengelolaan risiko kredit diantaranya dilakukan dengan pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu debitur, pengelolaan limit pada batasan geografis tertentu, pengelolaan limit konsentrasi per industri dan sektor ekonomi tertentu. Penetapan limit juga dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individual debitur. Rating risiko kredit dikinikan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko kredit akibat ekspansi pembiayaan dan penentuan tindak lanjut perbaikan. Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulator, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktek di lembaga keuangan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha LPEI.

Proses analisa dan persetujuan pembiayaan diawali dengan proses pengenalan calon debitur melalui penilaian tingkat risiko masing-masing calon debitur dengan menggunakan IEB *Credit Risk Rating System* untuk pembiayaan korporasi. Hasil rating dimaksud dipergunakan pula untuk penerapan *risk based pricing* dalam *Asset Liabilities Committee (ALCO).*

31. Credit Risk

Credit risk is defined as the risk of the inability of debtors or counterparties to fulfill its obligation to LPEI (counterparties default). This type of risk is the biggest risk which is faced by LPEI. LPEI implements credit risk management through the stages of identification, measurement, control and monitoring of credit risk either individually or as a portfolio. Financing position December 31, 2020 has a Gross NPF ratio at 26.08%, an increase from the December 31, 2019 position of 23.39%. Net NPF ratio of December 31, 2020 was 11.49%, an increase from December 31, 2019 position at 13.96%. This must be a major concern regarding the NPF problem. For the increase in the NPF ratio, credit risk management is necessary Credit risk management implemented by managing risk exposure at acceptable limit for individual borrowers, specific geographic boundaries, concentration limit per industry and economic sectors. Set-up limit is also done through the classification of credit risk (rating) per individual debtor. Credit risk ratings are periodically updated to estimate potential losses (as credit risk) as a result of financing expansion and determining follow-up improvement. Credit risk management is not only intended to comply with regulator, but also Management's intention to implement credit risk management system at the optimum risk and return and commonly practiced in financial institutions, so that is expected to encourage LPEI's business activities.

Loan analysis and approval process begins with the introduction of the applicants through risk evaluation of each prospective borrower by using the IEB Credit Risk Rating System for corporate funding. Rating result is also used by the Asset Liabilities Committee (ALCO) to set risk-based pricing.

31. Risiko Kredit (lanjutan)

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh unit bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak pembiayaan dimaksud diberikan sampai dengan pelunasannya. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas pembiayaan untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) termasuk memantau ada atau tidaknya bukti obyektif penurunan nilai serta perhitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) baik secara kolektif maupun secara individual.

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap kondisi perkembangan debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mendukung pembiayaan ekspor nasional.

Pengelolaan risiko kredit di LPEI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan LPEI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan.

a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya.

Nilai tercatat aset keuangan LPEI selain pembiayaan dan piutang merupakan eksposur maksimum risiko kredit per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pembiayaan dan piutang LPEI dijamin dengan agunan (misalnya piutang, persediaan, mesin dan lain-lain). LPEI menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent* dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian.

31. Credit Risk (continued)

In granting its financing, the business unit has considered credit risk since loan being drawdowned up until the said facility is settled. Monitoring of loan quality is conducted periodically to prevent non-performing loans (NPL), including to monitor any objective evidence of impairment, as well as to calculate the allowance for impairment losses, both collectively and individually.

Through the implementation of Early Warning System (EWS) in monitoring debtors, LPEI could enhance the effectiveness of credit risk management and eventually minimize potential loss as well as optimize capital utilization to support national export programme.

The purpose of LPEI's credit risk management is to manage the possible losses on loan and other financial contracts default at minimum level, both as individual and as loan portofolio. Besides, credit risk management also intended to comply with regulations including the Regulation of the Minister of Finance.

a. Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement.

As of December 31, 2020 and 2019, the carrying value of LPEI's financial assets other than financing and receivables represents the maximum exposure to credit risk.

LPEI's financing and receivables are secured by collateral (e.g. receivables, inventories, machineries and etc.). LPEI uses the fair value of collateral as a basis of future cash flows for impairment purposes if financing and receivables are collateral dependent and foreclosure of collateral is most likely to occur based on the agreement.

31. Risiko Kredit (lanjutan)

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang diserahkan oleh debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada LPEI sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan hutang debitur, apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya. Objek agunan yang dibiayai berupa:

- Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan.
- Fungsi agunan berupa objek yang dibiayai tersebut tidak hanya sebagai bukti penggunaan pembiayaan, keseriusan/ kesungguhan debitur atau calon debitur, tetapi juga sebagai faktor pengurang risiko pembiayaan dikemudian hari jika fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut mengalami macet.

Untuk meminimalkan risiko, LPEI mengutamakan untuk memperoleh aset tetap sebagai agunan.

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- LPEI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses pembiayaan dan piutang yang mencakup seluruh aspek pemberian pembiayaan dan piutang yang dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan dan piutang harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- LPEI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system"* dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh pembiayaan dan piutang diberikan dengan agunan, kecuali untuk jenis pembiayaan dan piutang tertentu seperti fasilitas antar bank (pinjaman yang diberikan).

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

31. Credit Risk (continued)

Collateral is the right and power over tangible and/or intangible assets submitted by the debtor and the owner or a third party as collateral to LPEI as a second way out to ensure repayment of a debt of the debtor, if financing cannot be paid based on receipt of the financing agreement time or its addendum. Object of financed collateral is follows:

- *Moveable and immoveable goods fundedby financing.*
- *Function of object collateral not only asevidence of financing, seriousness/ earnestness debtor, but also as a risk-reducing financing in the future if the financing facilities cannot be paid.*

To minimize the risk, LPEI prioritizes to acquire fixed assets as collateral.

Management believes on LPEI's ability to control and sustain minimal exposure on credit risk of LPEI resulting from its financing and receivables based on the following:

- *LPEI has written financing and receivables policy and manual procedures that covers all aspects of LPEI's lending activities. At all times, the financing and receivables must adhere to the requirements of LPEI's policy.*
- *LPEI has an early problem detection system through "early warning system" and a disciplined monitoring practice.*
- *All financing and receivables are secured by collateral, except for certain financing and receivables such as interbank financing (i.e. loan).*

b. Concentration of financial assets risk with credit risk exposure

31. Risiko Kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

31. Credit Risk (continued)

a) Geographical sectors, net of allowance for impairment losses

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other financing and receivables support), categorized by geographical region as of December 31, 2020 and 2019.

	31 Desember/ *December 31, 2020*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	17.913	--	--	--	--	--	--	--	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	5.180.544	504	--	--	--	--	--	339.795	5.520.843	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	5.961.663	1.561.401	--	64.478	--	--	--	393.126	7.980.668	*Placements with banks*
Efek-efek	572.273	--	--	--	--	--	--	--	572.273	*Securities*
Pembiayaan dan piutang										*Financing and receivables*
Modal kerja	11.255.101	4.116.759	4.300.547	11.222.766	1.585.984	1.188.114	966.570	202.615	34.838.456	*Working capital*
Investasi	20.322.223	2.558.220	1.461.494	2.704.622	4.311.951	4.791.423	1.172.354	472.628	37.794.915	*Investment*
Konsumsi	98.200	4.338	--	--	--	--	--	--	102.538	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	295.812	--	--	--	--	--	--	--	295.812	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	34.631	--	--	--	--	--	--	--	34.631	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	470.802	57.189	--	30.426	--	--	--	--	558.417	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	33.056	--	--	--	--	--	--	--	33.056	*Other assets - net *)*
Neto	**44.242.218**	**8.298.411**	**5.762.041**	**14.022.292**	**5.897.935**	**5.979.537**	**2.138.924**	**1.408.164**	**87.749.522**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2019*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.090	--	--	--	--	--	--	311.971	327.061	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	23.265	498	--	--	--	--	--	541.418	565.181	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	13.309.116	2.078.135	150.000	90.000	810.000	560.000	--	--	16.997.251	*Placements with banks*
Efek-efek	576.543	--	--	--	--	--	--	--	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	1.410	--	--	--	--	--	--		1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang									187.131	*Financing and receivables*
Modal kerja	14.098.214	5.905.514	3.459.932	13.154.805	2.136.632	2.481.632	974.145	187.131	42.887.384	*Working capital*
Investasi	16.979.446	3.971.032	3.491.446	3.460.835	5.325.141	8.306.119	1.799.160	676.510	43.333.179	*Investment*
Konsumsi	117.736	--	--	--	--	--	--		117.736	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	287.598	--	--	--	--	--	--	--	287.598	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	1.400	--	--	--	--	--	--	--	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	494.182	95.869	--	68.238	--	--	--	--	658.289	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	53.220	--	--	--	--	--	--	--	53.220	*Other assets - net *)*
Neto	**45.957.220**	**12.051.048**	**7.101.378**	**16.773.878**	**8.271.773**	**11.347.751**	**2.773.305**	**1.717.030**	**105.993.383**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

31. Risiko Kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif *gross* adalah sebagai berikut:

31. Credit Risk (continued)

a) Geographical sectors, net of allowance for impairment losses (continued)

Credit risk exposure related to gross administrative accounts items are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Bank garansi	5.091.059	2.299.682	9.858	62.122	977.999	68.491	25.382	507.724	9.042.317	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	55.521	73.326	--	22.368	--	13.200	--	--	164.415	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**5.146.580**	**2.373.008**	**9.858**	**84.490**	**977.999**	**81.691**	**25.382**	**507.724**	**9.206.732**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(41.129)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**9.165.603**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2019*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Bank garansi	6.452.820	2.457.237	41.747	233.614	415.256	136.551	39.794	413.364	10.190.383	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	83.153	114.353	11.364	64.032	--	7.755	--	--	280.657	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**6.535.973**	**2.571.590**	**53.111**	**297.646**	**415.256**	**144.306**	**39.794**	**413.364**	**10.471.040**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(6.848)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**10.464.192**	***Total***

31. Risiko Kredit (lanjutan)

b) Jenis counterparties
Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan jenis *counterparties* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

31. Credit Risk (continued)

b) Type of counterparties
The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or financing and receivables support), as categorized based on type of counterparties as of December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ *December 31, 2020*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	17.913	--	--	--	--	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	5.520.843	--	--	--	5.520.843	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	7.980.668	--	--	--	7.980.668	*Placements with banks*
Efek-efek	572.273	--	--	--	--	572.273	*Securities*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	3.888.271	46.568	347.645	30.547.596	8.376	34.838.456	*Working capital*
Investasi	10.142.406	--	--	27.652.509	-	37.794.915	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	102.538	102.538	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	295.812	--	295.812	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	34.631	--	34.631	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	558.417	--	558.417	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	33.056	--	33.056	*Other assets *)*
Neto	**14.620.863**	**13.548.079**	**347.645**	**59.122.021**	**110.914**	**87.749.522**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2019*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.090	--	--	--	--	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	335.734	--	--	--	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	17.538.669	--	--	--	17.538.669	*Placements with banks*
Efek-efek	576.543	--	--	--	--	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	--	1.410	--	--	--	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	6.313.230	4.650	1.079.182	34.991.862	9.081	42.398.005	*Working capital*
Investasi	10.187.799	--	--	33.821.456	434	44.009.689	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	117.736	117.736	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	287.598	--	287.598	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	1.400	--	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	658.289	--	658.289	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	53.220	--	53.220	*Other assets *)*
Neto	**17.092.662**	**17.880.463**	**1.079.182**	**69.813.825**	**127.251**	**105.993.383**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

31. Risiko Kredit (lanjutan)

b) Jenis *counterparties* (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI yang dikategorikan berdasarkan jenis counterparties terhadap rekening administratif:

31. Credit Risk (continued)

b) Type of counterparties (continued)

The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure as categorized based on type of counterparties to administrative accounts items:

	31 Desember/ December 31, 2020						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Bank garansi	--	--	--	--	--	--	*Bank Guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	9.042.317	--	9.042.317	*Outstanding irrevocable L/C*
	--	--	--	164.415	--	164.415	
Total	**--**	**--**	**--**	**9.206.732**	**--**	**9.206.732**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan						(41.129)	*Estimated guarantee claim*
Neto						**9.165.603**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2019*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Bank garansi	--	--	--	--	--	--	*Bank Guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	10.190.383	--	10.190.383	*Outstanding irrevocable L/C*
	--	--	--	280.657	--	280.657	
Total	**--**	**--**	**--**	**10.471.040**	**--**	**10.471.040**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan						(6.848)	*Estimated guarantee claim*
Neto						**10.464.192**	***Net***

31. Risiko Kredit (lanjutan)

c) Sektor industri
Tabel di bawah menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri

31. Credit Risk (continued)

c) Industrial sectors
The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors.

	31 Desember/ December 31, 2020											
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang-kutan umum-laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang-kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam-bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.913	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.520.843	5.520.843	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.980.668	7.980.668	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	572.273	572.273	*Securities*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang												*Financing and receivables*
Pembiayaan												*Financing*
Modal kerja	3.890.534	1.966.817	1.477.562	138253	359.673	946305	1.580.070	1.790.219	2.140.968	20.548.055	34.838.456	*Working capital*
Investasi	474.400	2.637.815	11.308.776	1.722.338	80.833	1.271.327	15.237	1.556.937	514.614	18.212.638	37.794.915	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102.538	102.538	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	295.812	295.812	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34.631	34.631	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	13.726	--	--	--	57.189	--	--	--	--	487.502	558.417	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33.056	33.056	*Other assets - net *)*
Neto	**4.378.660**	**4.604.632**	**12.786.338**	**1.860.591**	**497.695**	**2.217.632**	**1.595.307**	**3.347.156**	**2.655.582**	**53.805.929**	**87.749.523**	***Net***

	31 Desember/ December 31, 2019											
	Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang-kutan umum-laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang-kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam-bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15.090	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	335.734	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.538.669	17.538.669	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	576.543	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.410	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang												*Financing and receivables*
Pembiayaan												*Financing*
Modal kerja	3.286.852	3.760.655	851107	164163	394089	10503	1.602.671	2.159.140	2.295.495	27.873.330	42.398.005	*Working capital*
Investasi	1.170.715	3.390.709	12.956.217	2.253.846	85320,000	2.151.989	19867	1.610.416	829139	19.541.471	44.009.689	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117.736	117.736	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	287.598	287.598	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.400	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	41622	--	--	--	--	--	--	--	--	616.667	658.289	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53.220	53.220	*Other assets - net *)*
Neto	**4.499.189**	**7.151.364**	**13.807.324**	**2.418.009**	**479.409**	**2.162.492**	**1.622.538**	**3.769.556**	**3.124.634**	**66.958.868**	**105.993.383**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

31. Risiko Kredit (lanjutan)

c) Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri terhadap rekening administratif.

31. Credit Risk (continued)

c) Industrial sectors (continued)

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors to administrative accounts items.

	31 Desember/ December 31, 2020											
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude *palm oil industry*	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ *Palm oil - plantation industry*	Pengang-kutan umum-laut/ *General transport sea*	Industri crumb rubber/ *Crumb rubber industry*	Pengang-kutan umum udara/ *General transport air*	Industri perabot/ *Furniture industry*	Industri logam dasar/ *Basic metal industry*	Pertam-bangan batubara/ *Coal mining*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	--	260	--	1.552.171	--	7.500	--	969.450	63.451	6.449.485	9.042.317	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	--	--	--	6.503	--	13.200	144.712	164.415	*Current account Outstanding Irrevocable L/C*
Total	**--**	**260**	**--**	**1.552.171**	**--**	**7.500**	**6.503**	**969.450**	**76.651**	**6.594.197**	**9.206.732**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan											(41.129)	*Estimated guarantee claim*
Neto											**9.165.603**	***Net***

	31 Desember/ December 31, 2019											
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude *palm oil industry*	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ *Palm oil - plantation industry*	Pengang-kutan umum-laut/ *General transport sea*	Industri crumb rubber/ *Crumb rubber industry*	Pengang-kutan umum udara/ *General transport air*	Industri perabot/ *Furniture industry*	Industri logam dasar/ *Basic metal industry*	Pertam-bangan batubara/ *Coal mining*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	--	355.251	--	1.715.590	--	5.521	--	957.893	71.601	7.081.227	10.190.383	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	11.364	--	--	--	--	--	1.413	--	--	267.880	280.657	*Current account Outstanding Irrevocable L/C*
Total	**11.364**	**355.251**	**--**	**1.715.590**	**--**	**5.521**	**1.413**	**957.893**	**71.601**	**7.349.107**	**10.471.040**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan											(6.848)	*Estimated guarantee claim*
Neto											**10.464.192**	***Net***

d) Sektor ekonomi
Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit berdasarkan sektor ekonomi.

d) Economic sectors
The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures by economic sectors.

	31 Desember/ December 31, 2020									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	17.913	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	5.520.843	5.520.843	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	7.980.668	7.980.668	*Placements with Banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	572.273	572.273	*Securities*
Pembiayaan dan piutang								--		*Financing and receivables*
Pembiayaan										*Financing*
Modal kerja	20.428.643	2.866.631	2.026.305	1.185.320	4.058.855	2.316.962	1.779.224	176.516	34.838.456	*Working Capital*
Investasi	11.525.901	12.961.015	1.460.406	3.739.042	4.857.513	345.019	2.689.462	216.557	37.794.915	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	102.538	102.538	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	295.812	--	--	--	--	--	--	--	295.812	*Guarantee financing Receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	34.631	34.631	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	347.536	21.619	--	--	--	107.297	81.965	--	558.417	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	--	33.056	33.056	*Other assets - net *)*
Neto	**32.597.892**	**15.849.265**	**3.486.711**	**4.924.362**	**8.916.368**	**2.769.278**	**4.550.651**	**14.654.995**	**87.749.522**	*Net*

31. Risiko Kredit (lanjutan)

d) Sektor ekonomi (lanjutan)

31. Credit Risk (continued)

d) Economic sectors (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	15.090	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	335.734	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	17.538.669	17.538.669	*Placements with Banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	576.543	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	1.410	1.410	*Derivative receivable*
Pembiayaan dan piutang										*Financing and receivables*
Pembiayaan										*Financing*
Modal kerja	25.048.584	2.611.029	2.815.876	283.088	4.487.236	2.768.450	3.835.718	548.024	42.398.005	*Working Capital*
Investasi	14.649.204	14.743.623	789.616	4.423.214	5.909.911	85.605	3.167.937	240.579	44.009.689	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	117.736	117.736	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	287.598	--	--	--	--	--	--		287.598	*Guarantee financing Receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	1.400	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	534.706	27.066	--	--	--	84.712	11.805	--	658.289	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	--	53.220	53.220	*Other assets - net *)*
Neto	**40.520.092**	**17.381.718**	**3.605.492**	**4.706.302**	**10.397.147**	**2.938.767**	**7.015.460**	**19.428.405**	**105.993.383**	*Net*

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif berdasarkan sektor ekonomi terhadap rekening administratif.

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures relating to administrative accounts items by economic sectors to administrative accounts.

	31 Desember/ *December 31, 2020*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	993.806	927	1.940.340	1.789.460	1.040.264	645.935	776.072	1.855.513	9.042.317	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	124.782	9.696	--	--	15.724	11.826	2.387	--	164.415	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**1.118.588**	**10.623**	**1.940.340**	**1.789.460**	**1.055.988**	**657.761**	**778.459**	**1.855.513**	**9.206.732**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(41.129)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**9.165.603**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2019*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	1.340.283	4.468	2.611.673	2.070.893	228.868	523.393	1.625.884	1.784.921	10.190.383	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	198.354	14.896	--	--	1.140	11.685	54.582	--	280.657	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**1.538.637**	**19.364**	**2.611.673**	**2.070.893**	**230.008**	**535.078**	**1.680.466**	**1.784.921**	**10.471.040**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(6.848)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**10.464.192**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

31. Risiko Kredit (lanjutan)

e) Kualitas kredit dari aset keuangan

Informasi kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31. Credit Risk (continued)

e) Credit quality of financial assets

The information on the credit quality of neither past due nor impaired financial assets as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*							
	Belum jatuh tempo dan *tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired*				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*	Tingkat sub standar/ *Sub-standard grade*	Tidak diperingkat/ *Unrated*				
Giro pada Bank Indonesia	--	17.913	--	--	--	--	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	5.180.121	340.722	--	--	--	--	5.520.843	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	5.716.679	2.263.989	--	--	--	--	7.980.668	*Placements with banks*
Efek-efek	--	572.273	--	--	--	--	572.273	*Securities*
Pembiayaan dan piutang								*Financing and receivables*
Pembiayaan								*Financing*
Modal kerja	69.869	10.877.587	256.080	8.065.497	678.417	14.891.006	34.838.456	*Working capital*
Investasi	41.880	7.717.305	1.391.272	19.204.450	2.076.310	7.363.698	37.794.915	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	102.538	--	--	102.538	*Consumption*
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	295.812	--	--	295.812	*Financing guarantee receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	34.631	--	--	34.631	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	449.347	--	109.070	--	--	558.417	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	33.056	--	--	33.056	*Other assets - net *)*
Neto	**11.008.549**	**22.239.136**	**1.647.352**	**27.845.054**	**2.754.727**	**22.254.704**	**87.749.522**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2019*							
	Belum jatuh tempo dan *tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired*				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*	Tingkat sub standar/ *Sub-standard grade*	Tidak diperingkat/ *Unrated*				
Giro pada Bank Indonesia	--	15.090	--	--	--	--	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	1.989	333.745	--	--	--	--	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	7.677.675	9.860.994	--	--	--	--	17.538.669	*Placements with banks*
Efek-efek	--	576.543	--	--	--	--	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	--	1.410	--	--	--	--	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang								*Financing and receivables*
Pembiayaan								*Financing*
Modal kerja	785.460	13.496.998	387.811	13.889.134	1.422.037	12.416.565	42.398.005	*Working capital*
Investasi	159.543	7.495.813	2.124.913	25.175.094	2.090.946	6.963.380	44.009.689	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	117.736	--	--	117.736	*Consumption*
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	287.598	--	--	287.598	*Financing guarantee receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	1.400	--	--	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	658.289	--	--	658.289	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	53.220	--	--	53.220	*Other assets - net *)*
Neto	**8.624.667**	**31.780.593**	**2.512.724**	**40.182.471**	**3.512.983**	**19.379.945**	**105.993.383**	*Net*

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

31. Risiko Kredit (lanjutan)

e) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan LPEI dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat eksternal dan internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan sistem peringkat IEB *Credit Rating System*. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala dan peringkat risiko debitur individual divalidasi untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit berdasarkan sistem peringkat IEB Credit Rating System dinilai sebagai berikut:

- Tingkat tinggi

  Luar biasa

  Debitur diberi peringkat luar biasa (nilai 'AAA') jika memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat. Debitur 'AAA' dinilai dapat memiliki sebuah kualitas outlook kualitas kredit yang tinggi dalam segala kondisi ekonomi. 'AAA' adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada debitur berdasarkan IEB *Credit Rating System*.

- Tingkat standar

  Kuat
  Debitur yang diberi peringkat kuat (nilai 'AA') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat dan probabilitas yang rendah pinjamannya akan gagal bayar. Terdapat perbedaan yang kecil antara debitur dengan peringkat 'AA' dan debitur dengan nilai tertinggi.

  Baik

  Debitur yang diberi peringkat baik (nilai 'A') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang kuat. Walaupun probabilitas gagal bayar rendah, debitur dengan peringkat 'A' dinilai lebih rentan terhadap efek yang merugikan perubahan kondisi ekonomi.

31. Credit Risk (continued)

e) Credit quality of financial assets (continued)

The credit quality of LPEI's financial assets is assessed and managed using external and internal ratings.

The credit quality is monitored using IEB Credit Rating System. The rating system is assessed and updated regularly and individual borrower risk rating is validated to maintain accuracy and consistency of risk rating. The credit quality and the corresponding
IEB Credit Rating System grade are as follows:

- *High grade*

  Outstanding

  A borrower given an outstanding outlook (rated 'AAA') if it has an extremely strong debt service capacity. 'AAA' rated borrowers are viewed to possess a high credit quality outlook under all economic conditions. 'AAA' is the highest rating provided to a borrower under the IEB Credit Rating System.

- *Standard grade*

  Strong
  A borrower given a strong outlook (rated 'AA') is deemed to have a very strong debt service capacity and a low probability of going into default. An 'AA' rated borrower differs from the highest rated borrowers in a small degree.

  Good

  A borrower given a good outlook (rated 'A') is deemed to have a strong debt service capacity. While the probability of default is low, 'A' rated borrowers are more susceptible to the adverse effects of changes in economic conditions.

31. Risiko Kredit (lanjutan)

e) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Rata-rata

Debitur yang diberi peringkat rata-rata (nilai 'BBB') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang memadai. Namun, kondisi ekonomi yang buruk atau perubahan keadaan yang akan cenderung membuat *debt service capacity* melemah.

- Tingkat sub standar

  Dapat diterima

  Debitur diberi peringkat rata-rata (nilai 'BB') adalah debitur yang dalam jangka pendek dianggap lebih tidak rentan daripada debitur pada peringkat yang lebih rendah lain. Namun, debitur ini menghadapi ketidakpastian yang besar dan terpapar kondisi bisnis yang rugi, kondisi keuangan atau kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

  Risiko tinggi

  Debitur diberi peringkat berisiko tinggi (nilai 'BB-' sampai 'B+') adalah debitur yang dianggap kurang rentan daripada debitur dengan peringkat yang lebih rendah lain. Namun, kondisi bisnis yang merugikan, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi kemungkinan akan menurunkan kemampuan debitur atau menurunkan kesediaan debitur untuk memenuhi komitmen keuangannya.

  Dalam perhatian

  Eksposur kredit bagi debitur diberi peringkat dalam perhatian (nilai 'B') adalah debitur yang untuk sementara waktu dianggap tidak berisiko tetapi kinerja debitur telah melemah dan kecuali tren berubah, dapat menyebabkan kerugian.

31. Credit Risk (continued)

e) Credit quality of financial assets (continued)

Average

A borrower given an average outlook (rated 'BBB') is deemed to have an adequate debt service capacity. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened debt service capacity.

- *Sub-standard grade*

  Acceptable

  A borrower given an acceptable outlook (rated 'BB') is deemed to be less vulnerable in the near term than other lower rated borrowers. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the borrower being unable to meet its financial obligations.

  High risk

  A borrower given a high risk outlook (rated 'BB-' to 'B+') is deemed to be less vulnerable than lower rated borrowers. However, adverse business, financial or economic conditions will likely impair the borrowers capacity or willingness to meet its financial commitments.

  Watch list

  Credit exposures for a borrower given a watch list outlook (rated 'B') is deemed to be not at risk for the moment but the borrower's performance has already weakened and unless present trends are reversed, could lead to losses.

31. Risiko Kredit (lanjutan)

e) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

- Tidak diperingkat

Aset keuangan yang tidak diperingkat adalah aset yang tidak dinilai dengan Sistem Penilaian IEB atau *provider* peringkat kredit eksternal.

Transaksi tresuri

Untuk memastikan kualitas portofolio investasi LPEI, LPEI menggunakan peringkat kredit eksternal dari *provider* Moody's.

f) Efek-efek

Cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan akun ini disebabkan karena investasi divisi Syariah LPEI yang tidak dihitung dan dilaporkan menurut PSAK 55 (Revisi 2014).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh efek-efek tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar sehingga tidak terdapat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terkait akun tersebut.

g) Pembiayaan dan piutang dan piutang pembiayaan garansi

Aset keuangan yang signifikan dianalisa berdasarkan bukti obyektif secara individual per debitur. Selanjutnya nasabah signifikan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan secara individual berdasarkan arus kas masing-masing debitur, sedangkan debitur yang tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai, perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

31. Credit Risk (continued)

e) Credit quality of financial assets (continued)

- *Unrated*

Unrated financial assets are those who have not been assessed under the IEB Rating System or by external rating agencies.

Treasury transaction

To ensure the quality of LPEI's investment portfolio, LPEI uses the credit risk rating of external provider Moody's.

f) Securities

The allowance for impairment losses related to this account pertains to the investment of LPEI's Sharia division that is not measured and reported under SFAS 55 (Revised 2014).

As of December 31, 2020 and 2019, all securities are not impaired and are classified as current and there is no allowance for impairment losses related to this account.

g) Financing and receivables and guarantee financing receivables

Individually significant financial asset is analyzed if objective evidence of impairment exist. For significant debtors with objective evidence of impairment, the allowance for impairment losses is calculated individually based on the cash flow while for debtors with no objective evidence of impairment, the allowance for impairment losses is calculated collectively.

31. Risiko Kredit (lanjutan)

g) Pembiayaan dan piutang dan piutang pembiayaan garansi (lanjutan)

Ikhtisar pembiayaan dan piutang yang diberikan dan piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut:

31. Credit Risk (continued)

g) Financing and receivables and guarantee financing receivables (continued)

Financing and receivables and guarantee financing receivables are summarized are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*				
		Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	**Individual**	**Kolektif/ *Collective***	**Total**	
Rupiah					***Rupiah***
Perindustrian	8.969.740	7.167.496	157.929	16.295.165	*Manufacturing*
Pertanian	9.400.025	1.699.097	1.175.330	12.274.452	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	2.355.243	58.398	--	2.413.641	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	660.748	877.883	--	1.538.631	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	3.501.461	506.551	--	4.008.012	*Transportation*
Konstruksi	3.134.578	56.003	--	3.190.581	*Construction*
Pertambangan	3.039.468	995.130	114.463	4.149.061	*Mining*
Lain-lain	265.679	--	--	265.679	*Others*
Total Rupiah	**31.326.942**	**11.360.558**	**1.447.722**	**44.135.222**	***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Perindustrian	8.989.177	6.647.330	22.873	15.659.380	*Manufacturing*
Pertanian	3.383.719	169.474	--	3.553.193	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	919.851	153.220	--	1.073.071	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	835.048	288.303	--	1.123.351	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	624.717	291.632	--	916.349	*Transportation*
Konstruksi	1.248.001	30104,0	--	1.278.105	*Construction*
Pertambangan	2.923.818	1.843.488	--	4.767.306	*Mining*
Lain-lain	525.744	--	--	525.744	*Others*
Total mata uang asing	**19.450.075**	**9.423.551**	**22.873**	**28.896.499**	***Total foreign currencies***
Total	**50.777.017**	**20.784.109**	**1.470.595**	**73.031.721**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2019*				
		Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	**Individual**	**Kolektif/ *Collective***	**Total**	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Rupiah					***Rupiah***
Perindustrian	14.009.667	5.934.017	690.050	20.633.734	*Manufacturing*
Pertanian	12.276.782	1.626.567	133.098	14.036.447	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	1.965.912	82.163	--	2.048.075	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	927.404	819.540	--	1.746.944	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	2.795.429	474.644	--	3.270.073	*Transportation*
Konstruksi	5.127.646	21.205	--	5.148.851	*Construction*
Pertambangan	3.674.645	709.110	31.090	4.414.845	*Mining*
Lain-lain	663.014	5.278	--	668.292	*Others*
Total Rupiah	**41.440.499**	**9.672.524**	**854.238**	**51.967.261**	***Total Rupiah***
Perindustrian	13.520.968	5.798.662	32.022	19.351.652	*Manufacturing*
Pertanian	2.866.215	451.990	--	3.318.205	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	1.010.116	547.301	--	1.557.417	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	648.698	458.413	--	1.107.111	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	1.009.689	426.540	--	1.436.229	*Transportation*
Konstruksi	1.854.804	--	--	1.854.804	*Construction*
Pertambangan	3.932.103	2.020.799	29.400	5.982.302	*Mining*
Lain-lain	234.329	3.718	--	238.047	*Others*
Total mata uang asing	**25.076.922**	**9.707.423**	**61.422**	**34.845.767**	***Total foreign currencies***
Total	**66.517.421**	**19.379.947**	**915.660**	**86.813.028**	***Total***

31. Risiko Kredit (lanjutan)

h) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

31. Credit Risk (continued)

h) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ December 31, 2020			
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	31 sampai 90 hari/ *31 to 90 days*	Total	
Modal kerja	504.039	174.378	678.417	*Working capital*
Investasi	1.143.425	932.885	2.076.310	*Investment*
Neto	**1.647.464**	**1.107.263**	**2.754.727**	***Net***

	31 Desember/ December 31, 2019			
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	31 sampai 90 hari/ *31 to 90 days*	Total	
Modal kerja	1.043.265	378.772	1.422.037	*Working capital*
Investasi	778.375	1.312.571	2.090.946	*Investment*
Neto	**1.821.640**	**1.691.343**	**3.512.983**	***Net***

i) Komitmen dan Kontijensi

i) Commitments and contingencies

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			***Rupiah***
Bank garansi	1.935.103	3.220.831	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	85.173	191.145	*Outstanding irrevocable L/C*
	2.020.276	3.411.976	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank garansi	7.075.383	6.969.552	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	79.242	89.512	*Outstanding irrevocable L/C*
	7.154.625	7.059.064	
Total	**9.174.901**	**10.471.040**	***Total***

32. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa LPEI tidak akan mampu memenuhi liabilitas pembayaran pada saat jatuh tempo dalam keadaan normal ataupun tertekan (*distress*). LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk membatasi risiko ini, manajemen telah mengatur diversifikasi sumber dana selain dasar modal intinya, mengelola aset yang terkait likuiditas dan memonitor arus kas dan likuiditas masa depan setiap hari. Hal ini menggabungkan penilaian atas arus kas yang masa depan dan ketersediaan jaminan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk mengamankan dana tambahan jika diperlukan.

LPEI telah merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, diantaranya:

- Menjaga stabilitas dan kontinuitas sumber dan dengan melakukan pengelolaan Aset-Liabilitas secara hati-hati dan terencana.
- Menjaga ketersediaan fasilitas pinjaman *moneymarket line* dari berbagai bank, baik di dalam maupun di luar negeri.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows*

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi LPEI di masa mendatang diukur melalui Liquidity *Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di LPEI.

32. Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as the inability to meet debt obligations at maturity in normal condition or under distressed condition. LPEI manages liquidity risk to meet every obligation in time and maintain optimum liquidity ratio at the same time.

To limit this risk, management has arranged diversified funding sources in addition to its core capital base, manages assets with liquidity in mind, and monitors future cash flows and liquidity on a daily basis. This incorporates an assesment of expected cash flows and the availability of high grade collateral which could be used to secure additional funding if required.

LPEI has planned step to overcome the maturity gap between assets and liabilities, among others by:

- *Maintaining the stability and continuity of funding sources by managing the Assets - Liabilities carefully and proper planning.*
- *Maintaining the sufficiency of money market linecredit facility from several banks, either on-shore or off-shore*

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows

The potential liquidity risk that LPEI may be exposed in the future is measured through Liquidity Gap Analysis, which is the projection of excess or shortage of liquidity base on maturity of assets and liabilities, after taking into account the need for business expansion. This information is also used as a base consideration when planning and managing liquidity as well as business expansion plan. By implementing effective liquidity management, it is expected to minimize liquidity risk at LPEI.

32. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows* (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan-neto dalam skala waktu tertentu *(maturity bucket)* berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo *(remaining maturity).*

32. Liquidity Risk (continued)

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)

The tables below present the mapping of net financial assets and liabilities undiscounted cash flows in a specific timescale (maturity bucket) remaining maturity.

31 Desember/*December 31,2020*

	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	17.913	--	--	--	--	--	--	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	5.521.119	--	--	--	--	--	--	5.521.119	*Current accounts with Bank*
Penempatan pada Bank	7.219.597	761.914	--	--	--	--	--	7.981.511	*Placements with Bank*
Efek-efek	6.608	4.554	15.045	26.429	185.519	196.678	745.033	1.179.866	*Securities*
Pembiayaan dan piutang									*Financing and receivables*
Modal Kerja	1.398.688	4.809.012	3.572.978	5.150.114	8.475.926	5.677.858	23.558.679	52.643.255	*Working Capital*
Investasi	47.518	52.531	188.956	353.775	8.390.490	12.830.274	31.913.865	53.777.409	*Investment*
Konsumsi	1	19	42	256	6.907	11.683	134.262	153.170	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	34.631	--	--	--	--	--	--	34.631	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	125.975	321.554	115.595	-	-	--	--	563.124	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	75.365	--	--	--	--	--	--	75.365	*Other assets *)*
Sub total	14.447.416	5.949.583	3.892.616	5.530.574	17.058.842	18.716.493	56.351.839	121.947.363	*Sub total*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	37.936	--	--	--	--	--	--	37.936	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	125.975	321.554	115.595	--	--	--	--	563.124	*Acceptances payable*
Efek-efek hutang yang Diterbitkan	550.362	4.044.197	5.787.552	6.323.116	19.026.305	24.060.106	7.859.181	67.650.819	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	--	1.575.000	4.752.328	-	20.549.648	4.205.890	210.896	31.293.762	*Fund borrowings*
Utang asuransi dan penjaminan	3.123	--	--	--	--	--	--	3.123	*Insurance and guarantee payables*
Liabilitas asuransi	1.850	--	--	--	--	--	--	1.850	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain**	1.134.221	--	--	-	--	--	--	1.134.221	*Other liabilities**
Sub total	1.853.468	5.940.751	10.655.475	6.323.116	39.575.953	28.265.996	8.070.077	100.684.835	*Sub total*
Maturity gap	**12.593.948**	**8.833**	**(6.762.859)**	**(792.542)**	**(22.517.111)**	**-9.549.503**	**48.281.762**	**21.262.528**	***Maturity gap***

31 Desember/*December 31,2019*

	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	15.090	--	--	--	--	--	--	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	335.734	--	--	--	--	--	--	335.734	*Current accounts with Bank*
Penempatan pada Bank	19.089.594	3.182.806	--	--	--	--	--	22.272.400	*Placements with Bank*
Efek-efek	6.364	15.000	20.000	--	34.058	121.370	1.079.447	1.276.239	*Securities*
Tagihan akseptasi	174.839	275.706	166.820	26.924	13.012	--	--	657.301	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	1.410	--	--	--	--	--	--	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang									*Financing and receivables*
Modal Kerja	5.374.998	7.785.286	6.378.726	5.818.395	3.307.922	5.572.329	22.872.166	57.109.822	*Working Capital*
Investasi	1.291	15.275	38.184	498.434	5.599.827	16.376.239	40.367.444	62.896.694	*Investment*
Konsumsi	15	26	93	219	6.610	16.567	150.934	174.464	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	1.400	--	--	--	--	--	--	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Aset lain-lain - neto *)	50.465	--	--	--	--	--	--	50.465	*Other assets *)*
Sub total	25.051.200	11.274.099	6.603.823	6.343.972	8.961.429	22.086.505	64.469.991	144.791.019	*Sub total*

32. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows* (lanjutan)

32. Liquidity Risk (continued)

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)

31 Desember/*December 31,2019*

	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	35.030	--	--	--	--	--	--	35.030	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	174.839	275.706	166.820	26.924	13.012	--	--	657.301	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	2.258	--	--	--	--	--	--	2.258	*Derivatives payable*
Efek-efek hutang yang Diterbitkan	700.000	4.066.000	404.710	4.353.657	18.051.563	28.639.229	32.208.899	88.424.058	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	560.148	--	7.205.232	8.369.197	22.947.874	7.299.987	212.384	46.594.822	*Fund borrowings*
Utang asuransi dan penjaminan	2.647	--	--	--	--	--	--	2.647	*Insurance and guarantee payables*
Liabilitas asuransi	6.515	--	--	--	--	--	--	6.515	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain**	607.117	--	--	205.965	--	--	--	813.082	*Other liabilities**
Sub total	2.088.554	4.341.706	7.776.762	12.955.743	41.012.449	35.939.216	32.421.283	136.535.713	*Sub total*
Maturity gap	**22.962.646**	**6.932.393**	**(1.172.939)**	**(6.611.771)**	**(32.051.020)**	**(13.852.711)**	**32.048.708**	**8.255.306**	***Maturity gap***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masihakan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar dan tantiem dan jasa produksi.

Untuk aset keuangan, analisis pengelompokan jatuh tempo didasarkan pada sisa periode dari akhir periode pelaporan ke tanggal jatuh tempo kontraktual atau jika lebih awal tanggal perkiraan aset akan direalisasi.

Untuk liabilitas keuangan, analisis jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang lebih awal dimana LPEI disyaratkan untuk membayar.

Termasuk di tabel di atas adalah arus kas bunga dan pokok. Sepanjang bunga adalah suku bunga mengambang, jumlah yang tidak didiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskonto ditranslasi dengan kurva nilai tukar forward yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Tabel selanjutnya menyajikan mengenai pemetaan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivablesand refundable deposits.*
***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payableand tantiem and accrued bonus.*

For financial assets, the analysis into maturity buckets is based on the remaining period from the end of the reporting period to the contractual maturity date or if earlier the expected date the assets will be realized.

For financial liabilities, the maturity analysis is based on the earliest date on which LPEI may be required to pay.

The tables above include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial instruments, the undiscounted amount is translated by the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

The following tables present the mapping of commitment and contingent liabilities in a specific timescale (maturity bucket) based on remaining maturity.

32. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows* (lanjutan)

32. Liquidity Risk (continued)

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)

	31 Desember/*December 31, 2020*								
	Sampai dengan 1 bulan/ ***Up to 1 month***	**Lebih dari 1-3 bulan/** ***More than 1-3 months***	**Lebih dari 3-6 bulan/** ***More than 3-6 months***	**Lebih dari 6-12 bulan/** ***More than 6-12 months***	**Lebih dari 1-3 tahun/** ***More than 1-3 years***	**Lebih dari 3-5 tahun/** ***More than 3-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years***	***Total***	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									*Commitment and contingent liabilities*
Bank garansi	747.866	7.713.148	2.019.921	1.670.683	16.218.883	1.432.950	781.890	30.585.341	*Bank guarantee*
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	38.633	104.892	4.417	4.843	12.623	--	--	165.408	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**786.499**	**7.818.040**	**2.024.338**	**1.675.526**	**16.231.506**	**1.432.950**	**781.890**	**30.750.749**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2019*								
	Sampai dengan 1 bulan/ ***Up to 1 month***	**Lebih dari 1-3 bulan/** ***More than 1-3 months***	**Lebih dari 3-6 bulan/** ***More than 3-6 months***	**Lebih dari 6-12 bulan/** ***More than 6-12 months***	**Lebih dari 1-3 tahun/** ***More than 1-3 years***	**Lebih dari 3-5 tahun/** ***More than 3-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years***	***Total***	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									*Commitment and contingent liabilities*
Bank garansi	959.722	807.384	2.027.182	1.806.558	2.374.788	2.530.145	10.182	10.515.961	*Bank guarantee*
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	143.987	89.251	14.851	31.367	--	--	--	279.456	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**1.103.709**	**896.635**	**2.042.033**	**1.837.925**	**2.374.788**	**2.530.145**	**10.182**	**10.795.417**	***Total***

33. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

LPEI telah memiliki sistem aplikasi treasuri untuk mengukur risiko pasar *(Opics Plus* dan *Opics Risk Plus*) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi front office, middle office dan back office untuk portofolio *treasury*. Penggunaan aplikasi tersebut saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih terkendala dengan ketersediaan data dan terbatas hanya untuk portofolio treasuri.

33. Market Risk

Market risk is the risk caused by changes of market factor. such as interest rate and exchange rate that is contrary with LPEI's position, both on statements of financial position and administrative accounts. The position is in trading book and banking book.

LPEI has a treasury application system to measure market risk (Opics Plus and Opics Risk Plus) which is an integrated system, and is used by front office, middle office and back office for treasury portfolios functions. The use of this application cannot be implemented optimally because it is still constrained by data availability and is limited to treasury portfolios.

33. Risiko Pasar

Selain melakukan monitoring eksposur risiko instrumen, LPEI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit* dan *stop loss limit*. Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk kedalam klasifikasi diperdagangkan *(trading).*

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.

(i) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki LPEI yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) LPEI baik secara keseluruhan ataupun laporan posisi keuangan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* dan *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009.

33. Market Risk

In addition to monitoring of instrument's risk exposure, LPEI also monitors market risk limit and transaction limit, i.e. dealer transaction limit, cut loss limit and stop loss limit. Monitoring is done on a daily basis to provide updated information for a better desicion making by management, particularly for instrument classified as trading instrument.

Included in the market risk is the risk of the changes of financial instruments price due to the changes in market factors, such as exchange rate and interest rate changes

(i) Currency risk

Exchange rate risk is the risk of foreign exchange positions gap held by LPEI and reflected in Net Open Position (NOP) either on or off balance sheet. Included in the NOP is trading book and banking book.

As of December 31, 2020 and 2019, the calculation of Net Open Position (NOP) is based on the Minister of Finance Regulation No. 140/PMK.010/2009.

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

PDN untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

PDN secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

Berdasarkan peraturan tersebut, LPEI wajib memelihara rasio PDN secara keseluruhan dan laporan posisi keuangan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal.

Berikut ini adalah Posisi Devisa Neto LPEI:

33. Market Risk (continued)

(i) Currency risk (continued)

The NOP for the statement of financial position is the net difference of total assets and total liabilities in each foreign currency which are stated in Rupiah.

The overall NOP is the total of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency which are stated in Rupiah.

Based on the regulation, LPEI has to maintain the overall NOP at a maximum of 20% of the total capital.

The following is LPEI's Net Open Position:

	31 Desember/*December 31,2020*			
	Aset/ *Assets*	**Kewajiban/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				***Overall (Statement of Financial Position and Administrative Accounts)***
Dolar Amerika Serikat	30.509.094	34.819.312	4.310.218	*United States Dollars*
Euro Eropa	66.401	82.028	15.627	*European Euro*
Yen Jepang	21.475	195	21.280	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	105	1.081	976	*Singapore Dollars*
Total			4.348.101	*Total*
Laporan Posisi keuangan				***Statement of Financial Position***
Dolar Amerika Serikat	30.432.105	34.742.323	4.310.218	*United States Dollars*
Euro Eropa	64.149	79.776	15.627	*European Euro*
Yen Jepang	21.475	195	21.280	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	105	1.081	976	*Singapore Dollars*
Total			4.348.101	*Total*
Modal (Catatan 21)			25.636.858	*Capital (Note 21)*
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)			**16,96%**	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position)***
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			**16,96%**	***Overall Net Open Position Ratio***

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan rincian sensitivitas perubahan eksposur LPEI atas perubahan nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas hanya termasuk pos moneter yang didenominasi dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode atas perubahan nilai tukar mata uang asing yang relevan. Persentase kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian LPEI atas perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing setelah memperhatikan kondisi ekonomi saat ini.

Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan nilai tukar. Pada tanggal 31 Desember 2020, analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan nilai tukar untuk portofolio terhadap IDR yaitu USD +/-3,46%; EUR +/-3,30%; JPY +/-3,54% dan SGD +/-9,75%. Pada tanggal 31 Desember 2019, analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan nilai tukar untuk portofolio terhadap IDR yaitu USD +/-2,20%; EUR +/-3,28%; JPY +/-2,46% dan SGD +/-2,63%.

33. Market Risk (continued)

(i) Currency risk (continued)

	31 Desember/*December 31,2019*			
	Aset/ *Assets*	**Kewajiban/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				***Overall (Statement of Financial Position and Administrative Accounts)***
Dolar Amerika Serikat	44.828.660	46.691.349	1.862.689	*United States Dollars*
Euro Eropa	83.820	92.271	8.451	*European Euro*
Yen Jepang	48.582	28.638	19.944	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	527.583	519.905	7.678	*Singapore Dollars*
Total			1.898.762	*Total*
Laporan Posisi keuangan				***Statement of Financial Position***
Dolar Amerika Serikat	44.747.063	46.540.298	1.793.235	*United States Dollars*
Euro Eropa	76.194	84.669	8.475	*European Euro*
Yen Jepang	48.677	28.595	20.082	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	11.831	520.029	508.198	*Singapore Dollars*
Total			2.329.990	*Total*
Modal (Catatan 21)			19.566.555	*Capital (Note 21)*
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)			**11,91%**	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position)***
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			**9,70%**	***Overall Net Open Position Ratio***

The following tables detail the sensitivity of LPEI's exposure to changes in foreign exchange rate. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a change in the relevant foreign currency rates. The percentage increase or decrease represents LPEI's assesment of the reasonably possible change in the relevant foreign exchange rates after considering the current economic conditions.

The level of sensitivity is used to analyze the possibility of changes in exchange rates. As of December 31, 2020, sensitivity analysis uses the assumption of exchange rate changes to its portfolio against IDR, which is USD +/-3,46%; EUR +/-3,30%; JPY +/-3,54% dan SGD +/-9,75%. As of December 31, 2019, sensitivity analysis uses the assumption of exchange rate changes to its portfolio against IDR, which is USD +/-2,20%; EUR +/-3,28%; JPY +/-2,46% dan SGD +/-2,63%

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

33. Market Risk (continued)

(i) Currency risk (continued)

	31 Desember/*December 31,2020*								
	USD		EUR		JPY		SGD		
	3,46%	-3,46%	3,30%	-3,30%	3,54%	-3,54%	9,75%	-9,75%	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada bank	13.236	(13.236)	1.660	(1.660)	761	(761)	10	(10)	*Current accounts with banks*
Efek-efek	11.948	(11.948)	--	--	--	--	--	--	*Securities*
Tagihan akseptasi	4.495	(4.495)	--	--	--	--	--	--	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang	889.625	(889.625)	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Piutang asuransi	133	(133)	0	--	--	--	--	--	*Insurance receivables*
Aset reasuransi	31	(31)	6	(6)	--	--	--	--	*Reinsurance assets*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	*Guarantee financing receivables*
Aset lain-lain - bersih *)	713	(713)	--	--	--	--	--	--	*Other assets - net *)*
Total - neto	920.181	(920.181)	1.666	(1.666)	761	(761)	10	(10)	*Total - net*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas akseptasi	(4.495)	4.495	--	--	--	--	--	--	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--			--	--	--	--	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	(244.616)	244.616	--	--	--	--	--	--	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	(947.513)	947.513	(2.000)	2.000	--	--	--	--	*Fund borrowings*
Liabilitas asuransi	(80)	80	(16,484)	16,484	--	--	--	--	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(7.327)	7.327	(16)	16	(5,173)	5,173	(105)	105	*Other liabilities-net **)*
Total - neto	**(1.204.031)**	**1.204.031**	**(2.033)**	**2.033**	**(5)**	**5**	**(105)**	**105**	***Total - net***

	31 Desember/*December 31,2019*								
	USD		EUR		JPY		SGD		
	2,20%	-2,20%	3,28%	-3,28%	2,46%	-2,46%	2,63%	-2,63%	
Aset Keuangan									*Financial Assets*
Giro pada bank	5.068	(5.068)	1.645	(1.645)	497	(497)	311	(311)	*Current accounts with banks*
Efek-efek	7.885	(7.885)	--	--	--	--	--	--	*Securities*
Tagihan akseptasi	3.456	(3.456)	855	(855)	700	(700)	--	--	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang	745.451	(745.451)	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Piutang asuransi	77	(77)	--	--	--	--	--	--	*Insurance receivables*
Aset reasuransi	75	(75)	--	--	--	--	--	--	*Reinsurance assets*
Piutang pembiayaan garansi	6.321	(6.321)	--	--	--	--	--	--	*Guarantee financing receivables*
Aset lain-lain - bersih *)	406	(406)	--	--	--	--	--	--	*Other assets - net *)*
Total - neto	**768.739**	**(768.739)**	**2.500**	**(2.500)**	**1.197**	**(1.197)**	**311**	**(311)**	***Total - net***
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas akseptasi	(3.456)	3.456	(855)	855	(700)	700	--	--	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	(153.667)	153.667	--	--	--	--	(13.649)	13.649	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	(873.698)	873.698	(1.871)	1.871	--	--	--	--	*Fund borrowings*
Liabilitas asuransi	(114)	114	--	--	--	--	--	--	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(8.790)	8.790	(16)	16	--	--	(28)	28	*Other liabilities-net **)*
Total - neto	**(1.039.725)**	**1.039.725**	**(2.742)**	**2.742**	**(700)**	**700**	**(13.677)**	**13.677**	***Total - net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivablesand refundable deposits.*

***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

(ii) Risiko suku bunga

LPEI terekspos risiko tingkat suku bunga karena meminjamkan dananya atas dasar bunga tetap dan mengambang. LPEI menerapkan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan eksposur atas fluktuasi suku bunga dalam batasan yang dapat diterima.

(ii) Interest rate risk

LPEI is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. LPEI follows a prudent policy on managing its assets and liabilities to ensure that exposure to fluctuations in interest rates are kept within acceptable limits

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini merangkum perbedaan sensitivitas tingkat suku bunga LPEI. Tabel menunjukkan penyesuaian nilai kontraktual untuk setiap kategori aset liabilitas dan item rekening administratif pada pembukuan LPEI. Posisi negatif gap *(short position)* muncul ketika liabilitas menyesuaikan nilai lebih cepat atau pada proporsi yang lebih besar daripada aset sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga menurun. Posisi positif gap *(long position)* muncul ketika aset menyesuaikan nilai lebih cepat atau berada pada proporsi yang lebih besar daripada liabilitas sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga meningkat. Syarat penyesuaian nilai kontraktual tidak merefleksikan dampak potensial dari pembayaran kembali awal atau penarikan. Posisi dapat tidak merepresentasikan posisi pada periode tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan besar pada posisi dapat dibuat saat terjadi perubahan potensi pasar. Sebagai tambahan, variasi signifikan pada sensitivitas tingkat suku bunga dapat muncul pada periode penyesuaian nilai dan diantara mata uang dimana LPEI memiliki posisi tingkat suku bunga.

33. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

The following tables summarize the interest rate sensitivity gap of LPEI. The tables show the contractual repricing for each category of asset liability and administrative accounts items in LPEI's book. A liability (or negative) gap position exists when liabilities reprice more quickly or in greater proportion than assets during a given period and tends to benefit net interest income in a declining interest rate environment. An asset (or positive) gap position exists when assets reprice more quickly or in greater proportion than liabilities during a given period and tends to benefit net interest income in a rising interest rate environment. Contractual repricing terms do not reflect the potential impact of early repayment or withdrawal. Positions may not be reflective of those in subsequent periods. Major changes in positions can be made promptly as market outlooks change. In addition, significant variations in interest rate sensitivity may exist within the repricing periods presented and among the currencies in which LPEI has interest rate positions.

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

33. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

	31 Desember/*December 31,2020*						
	Suku bunga mengambang/*Floating interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	*Total*	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	17.913	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	5.520.843	--	--	--	--	5.520.843	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	--	--	7.980.668	--	7.980.668	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	572.273	--	572.273	*Securities*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	8.227.265	8.104.977	18.506.214	--	--	34.838.456	*Working capital*
Investasi	233.280	1.696.889	35.864.746	--	--	37.794.915	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	97.560	4.978	102.538	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	35.540	35.540	*Insurance and guaranteee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	558.417	558.417	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	75.365	75.365	*Other assets *)*
Total aset keuangan	13.981.388	9.801.866	54.370.960	8.650.501	692.213	87.496.928	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	--	--	--	--	37.936	37.936	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	562.727	562.727	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	36.481.044	--	36.481.044	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.575.000	4.702.620	22.322.153	--	--	28.599.773	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	--	--	--	2.563	2.563	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	--	--	--	560	560	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	1.134.221	1.134.221	*Other liabilities**)*
Total liabilitas keuangan	1.575.000	4.702.620	22.322.153	36.481.044	1.738.007	66.818.824	*Total financial liabilities*
Interest Gap	**12.406.388**	**5.099.246**	**32.048.807**	**(27.830.543)**	**(1.045.794)**	**20.678.104**	***Interest Gap***

	31 Desember/*December 31,2019*						
	Suku bunga mengambang/*Floating interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	*Total*	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	15.090	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	335.734	--	--	--	--	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	--	--	17.538.669	--	17.538.669	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	576.543	--	576.543	*Securities*
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	658.289	658.289	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	1.410	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	15.747.060	11.138.174	15.512.771	--	--	42.398.005	*Working capital*
Investasi	321.610	467.400	43.220.679	--	--	44.009.689	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	110.836	6.900	117.736	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	1.400	1.400	*Insurance and guaranteee receivables*
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	50.465	50.465	*Other assets *)*
Total aset keuangan	16.404.404	11.605.574	58.733.450	18.226.048	733.554	105.703.030	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	--	--	--	--	35.030	35.030	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	658.289	658.289	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	2.258	2.258	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	45.146.915	--	45.146.915	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	550.000	15.008.122	25.934.790	--	--	41.492.912	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	--	--	--	2.150	2.150	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	--	--	--	497	497	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	813.082	813.082	*Other liabilities**)*
Total liabilitas keuangan	550.000	15.008.122	25.934.790	45.146.915	1.511.306	88.151.133	*Total financial liabilities*
Interest Gap	**15.854.404**	**(3.402.548)**	**32.798.660**	**(26.920.867)**	**(777.752)**	**17.551.897**	***Interest Gap***

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tabel di bawah ini menunjukkan suku bunga efektif dari mata uang utama untuk instrumen keuangan moneter yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

33. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

The tables below summarize the effectiveinterest rate by major currencies for monetary financial instruments not carried at fair valuethrough profit or loss.

	31 Desember/*December 31,2020*				
	Suku Bunga Efektif/ *Effective Interest Rate*		Suku Bunga Kontraktual/ *Contractual Interest Rate*		
	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	
ASET					***ASSETS***
Giro pada bank	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	2,75 - 5,30	0,10 - 6,40	2,75 - 5,30	0,10 - 6,40	*Placements with banks*
Efek-efek	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	0,00 - 26,53	0,00 - 13,62	0,00 - 14,50	0,00 - 10,75	*Financing and receivables*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Efek-efek utang yang diterbitkan	6,35 - 9,80	3,88 - 3,88	6,35 - 9,80	3,88 - 3,88	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	6,50 - 6,50	0,98 - 3,03	6,50 - 6,50	0,98 - 3,03	*Fund borrowings*

	31 Desember/*December 31,2019*				
	Suku Bunga Efektif/ *Effective Interest Rate*		Suku Bunga Kontraktual/ *Contractual Interest Rate*		
	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	
ASET					***ASSETS***
Giro pada bank	0,00 - 1,00	0,00 - 1,90	0,00 -1,00	0,00 - 1,90	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	4,80 - 4,85	1,51 - 1,87	4,80 - 4,85	1,51 - 1,87	*Placements with banks*
Efek-efek	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	0,00 - 14,50	0,00 - 10,75	0,00 - 14,50	0,00 - 10,75	*Financing and receivables*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Efek-efek utang yang diterbitkan	6,35 - 9,80	3,88 - 4,14	6,35 - 9,80	3,88 - 4,14	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	6,40 - 8,50	0,65 - 2,49	6,40 - 8,50	0,65 - 2,49	*Fund borrowings*

33. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel selanjutnya menunjukkan rincian sensitivitas laba dan ekuitas LPEI terhadap perubahan tingkat suku bunga. Analisis disusun dengan menggunakan asumsi atas saldo instrumen keuangan dengan bunga mengambang pada tanggal pelaporan telah beredar sepanjang tahun, dengan memperhatikan pergerakan aktual atas pokok selama tahun berjalan. Basis poin kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian manajemen atas perubahan yang mungkin terjadi atas suku bunga yang relevan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Tingkat sensitivitas yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio banking book. Pada analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan suku bunga untuk portofolio banking book dengan basis IDR+/17 bp, USD+/-17 bp, EUR +/-17 bp, JPY +/-10 bp dan SGD +/-29 bp pada tanggal 31 Desember 2020 dan IDR+/47bp, USD+/-52 bp, EUR +/-6 bp, JPY +/-13 bp dan SGD +/-34 bp pada tanggal 31 Desember 2019

33. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

The following tables detail the sensitivity of LPEI's profit and equity to changes in interest rate. The analysis is prepared assuming the amount of floating rate financial instrument outstanding at the reporting date was outstanding for the whole year, taking into account actual principal movements during the year. The basis point increase and decrease represents the management's assesment of the reasonably possible change in the relevant interest rates after considering the current economic conditions.

The level of sensitivity that is used to analyze possible changes in interest rates which affect the profit and loss portfolio of banking book. Sensitivity analysis using assumptions of interest rates changes for banking book portfolio with base IDR+/17bp, USD+/-17 bp, EUR +/-17bp, JPY +/-10 bp and SGD +/-29 bp as of December 31, 2020 and IDR+/47bp, USD+/-52 bp, EUR +/-6bp, JPY +/-13 bp and SGD +/-34 bp as of December 31, 2019.

31 Desember/*December 31,2020*

	Efek pada laba rugi/ *Impact to profit or loss*						Efek pada laba rugi komprehensif/ *Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income*						
	IDR		IDR		Lain-lain/Others		IDR		USD		EUR		
	+17bp	-17bp	+17bp	-17bp			+17bp	-17bp	+17bp	-17bp	+17bp	-17bp	
Aset Keuangan													***Financial Assets***
Penempatan pada bank	19.343	(19.343)	8.161	(8.161)	377	(377)	--	--	--	--	--	--	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	(2.870)	2.926	(368.408)	376.581	--	--	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	92.748	(92.748)	64.671	(64.671)	--	--	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Neto	**112.091**	**(112.091)**	**72.832**	**(72.832)**	**377**	**(377)**	**(2.870)**	**2.926**	**(368.408)**	**376.581**	**--**	**--**	***Net***

31 Desember/*December 31,2019*

	Efek pada laba rugi/ *Impact to profit or loss*						Efek pada laba rugi komprehensif/ *Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income*						
	IDR		IDR		Lain-lain/Others		IDR		USD		EUR		
	+47bp	-47bp	+47bp	-47bp			+47bp	-47bp	+52bp	-52bp	+6bp	-6bp	
Aset Keuangan													***Financial Assets***
Penempatan pada bank	79.564	(79.564)	81.398	(81.398)	303	(303)	--	--	--	--	--	--	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	(7.208)	7.586	(1.031.624)	1.101.501	--	--	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	276.444	(276.444)	6.390	(6.390)	--	--	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Neto	**356.008**	**(356.008)**	**87.788**	**(87.788)**	**303**	**(303)**	**(7.208)**	**7.586**	**(1.031.624)**	**1.101.501**	**--**	**--**	***Net***

34. Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko No. 006/PDD/07/2018 Kebijakan Manajemen Risiko *(Enterprise Risk Management)* LPEI dan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0038/PDE/11/2018 tentang Manual Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional LPEI. Identifikasi dan analisa risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi dan permodalan LPEI. Kerangka kerja identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor-faktor penyebab (*causes*), kejadian (*event*) dan akibat (*impact*).

Identifikasi terhadap risiko operasional di LPEI menggunakan perangkat sebagai berikut:

a. *Risk and Control Self Assesment (RCSA*)
RSCA adalah salah satu modul yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (SIMRO) yang berfungsi untuk menilai risiko operasional dan kualitas kontrol pada saat ini dan perbaikan kualitas kontrol di masa yang akan datang.

Unit kerja dapat mengidentifikasi dan menilai/ mengukur risiko operasional menggunakan modul RCSA serta membuat *action plan*/rencana mitigasi risiko. RCSA menilai risiko operasional dan risiko lainnya secara kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Hasil penilaian RCSA adalah identifikasi dan deteksi sumber-sumber risiko operasionalserta kecukupan kontrol internal LPEI. Penilaian RCSA antara lain dengan mempertimbangkan data kerugian pada catatan Manajemen Insiden/*Loss Event Database (LED)* dan *Key Risk Indikator (KRI)*.

b. *Key Operational Risk Control (KORC)*
KORC adalah kontrol utama yang melekat di setiap aktivitas operasional unit kerja guna memitigasi risiko operasional.

34. Operational Risk

Operational Risk Management based on the Risk Management Policy No. 006/PDD/07/2018 LPEI and Excecutive Director policy No. 0038/PDE/11/2018 Operational Risk Management Information System Manual. Operational risk is identified and analyzed through risk factor inherent in all business activities, products, process, and information system, either external or internal factor, that might cause negative impact on objectives and equity of LPEI. The framework of operational risk identification is based on cause, event, and impact.

Operational risk in LPEI is identified with certain method as follows:

a. Risk and Control Self Assesment (RCSA)
RCSA is a module in Operational Risk Management Information System (SIMRO) function of which is to assess operational risk current quality control and future improvements.

With RCSA, each unit can identifiy and measure operational risk and thus preparing action plan/risk mitigation planning. RCSA assesses operational risk and other risks qualitatively and predictive by using impact and likelihood of occurrence factor. The result of RCSA is the identification of operational risk sources and the internal control of LPEI. The Assesment of RCSA is considering loss data in the Loss Event Database (LED) and Key Risk Indicators (KRI).

b. Key Operational Risk Control (KORC)
KORC is the main control in each Unit to mitigate operational risk.

34. Risiko Operasional (lanjutan)

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur *impact* dan *likelihood* pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber pada pendapat atau diperoleh dari manajemen unit kerja *(Business Expert),* sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis kerugian risiko operasional di masa lalu. Untuk mengukur risiko operasional digunakan perangkat SIMRO yaitu perangkat yang digunakan untuk mencatat data kerugian risiko operasional pada setiap unit kerja.

34. Operational Risk (continued)

The measurement of parameters that affect operational risk exposure is based on the operational risk identification by measuring impact and likelihood of inherent risk. Operational risk is measured both qualitatively and quantitatively. Qualitative approach is based on judgment or from business expert opinion dan quantitative approach is derived from historical data of loss event. To measure operational riskx SIMRO record data of operational risk losses on each unit.

35. Risiko Asuransi

Risiko utama yang dihadapi LPEI dalam kontrak asuransi adalah klaim aktual dan pembayaran manfaat atau waktu terkait dengan hal tersebut, berbeda dengan yang diperkirakan. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi klaim, besarnya klaim, manfaat klaim yang dibayarkan dan perkembangan selanjutnya atas klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan LPEI adalah untuk memastikan terdapat cadangan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

Aktivitas pengelolaan risiko asuransi LPEI dilakukan pada tingkat transaksi dan portofolio. Pada tingkatan transaksi, LPEI membuat batasan risiko atas jumlah yang diasuransikan. Pada tingkatan portofolio, LPEI memastikan bahwa strategi besarnya asuransi dalam sektor ekonomi/industri merefleksikan seluruh struktur ekonomi/ industri nasional. Sebagai tambahan LPEI juga mengalihkan risiko asuransi kepada pihak lain melalui reasuransi atau koasuransi.

35. Insurance Risk

The principal risk that LPEI faces under insurance contracts is that the actual claims and benefit payments or the timing thereof, differ from expectations. This is influenced by the frequency of claims, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, LPEI's objective is to ensure that sufficient reserves are available to cover these liabilities.

LPEI's insurance risk management activities are carried out on a transaction and portfolio level. At the transaction level, LPEI establishes risk limits on the the insured amount. At the portfolio level, LPEI ensures that insurance coverage strategy in the economic/industry sector reflects the overall national economic/ industry structure. Additionally, LPEI also transfers insurance risk to other parties through the use of reinsurance or coinsurance.

36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities. The fair values disclosed are based on relevant information available and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

	31 Desember/ ***December 31, 2020***		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	17.913	17.913	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	5.521.119	5.521.119	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	7.998.721	7.998.721	*Placements with banks*
Efek-efek	572.273	572.273	*Securities*
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	47.542.043	35.687.906	*Working capital*
Investasi	42.763.042	42.006.352	*Investment*
Konsumsi	102.988	97.021	*Consumption*
Piutang asuransi	35.540	35.540	*Insurance receivables*
Tagihan akseptasi	562.727	562.727	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain*)	75.365	75.365	*Other assets*)*
	105.191.731	**92.574.937**	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	37.938	37.938	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	562.727	562.727	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	36.481.044	33.380.393	*Debt securities issued*
Liabilitas derivatif	--	--	*Derivatives payables*
Pinjaman yang diterima	28.599.773	32.136.421	*Fund borrowings*
Utang asuransi	2.563	2.563	*Insurance payable*
Utang penjaminan	560	560	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain**)	1.134.221	1.134.221	*Other liabilities**)*
	66.818.826	**67.254.823**	

36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	15.090	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	335.734	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	17.538.669	17.538.669	*Placements with banks*
Efek-efek	576.543	576.543	*Securities*
Tagihan akseptasi	658.289	658.289	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	1.410	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	50.704.200	43.146.385	*Working capital*
Investasi	46.983.710	46.580.398	*Investment*
Konsumsi	118.695	104.489	*Consumption*
Piutang asuransi	1.400	1.400	*Insurance receivables*
Aset lain-lain*)	50.465	50.465	*Other assets*)*
	116.984.205	**109.008.872**	
Liabilitas Keuangan			*Financial Liabilities*
Liabilitas segera	35.030	35.030	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	658.289	658.289	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	45.146.915	38.418.783	*Debt securities issued*
Liabilitas derivatif	2.258	2.258	*Derivatives payables*
Pinjaman yang diterima	41.492.912	39.868.657	*Fund borrowings*
Utang asuransi	2.150	2.150	*Insurance payable*
Utang penjaminan	497	497	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain**)	813.082	813.082	*Other liabilities***)*
	88.151.133	**79.798.746**	

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

Metode dan asumsi yang digunakan oleh LPEI dalam mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

(i) Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank dengan suku bunga tetap, kas, piutang pembiayaan garansi, tagihan dan liabilitas akseptasi, piutang asuransi, aset reasuransi, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas asuransi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

The methods and assumptions used by LPEI in estimating the fair value of the financial instruments are as follows:

(i) The carrying value of fixed rate current accounts with Bank Indonesia, current accounts withbanks, fixed rates placements with banks, cash, guarantee financing receivable, acceptances receivables and payable, insurances receivable, reinsurance assets, insurances payable, guarantee payable, insurance liabilities and other assets were the reasonable approximation of its fair values since the maturity is below one year.

36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Pembiayaan dan piutang LPEI secara umum terdiri dari pembiayaan dan piutang yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Pembiayaan dan piutang yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari pembiayaan dan piutang yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh LPEI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

(iii) Nilai wajar atas instrumen derivativ yang didapatkan dari teknik penilaian dengan menggunakan masukan yang dapat diamati di pasar terutama adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

(iv) Estimasi nilai wajar liabilitas segera adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

(v) Nilai wajar untuk efek-efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek *(dealer).* Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

(vi) Nilai wajar agregat untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga tetap didasarkan pada arus kas diskonto model yang menggunakan kurva yield terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya. Untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

(ii) Financing and receivables of LPEI generally consists of financing and receivables granted ata floating rate and fixed rate. Financing and receivables granted are stated at carrying amount. The fair value of financing and credit extended show discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by LPEI. These discounted cash flows use market rates to determine fair value.

(iii) The fair values of derivative instruments are obtained from valuation techniques by usinginputs that can be observed in the market such as interest rate and foreign currency exchange rate.

(iv) The estimated fair values of current liabilities are the amounts repayable on demand.

(v) The fair values of securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

(vi) The aggregate fair values for debt securities issued and fund borrowings with fixed interestrate are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity. For debt securities issued and fund borrowings with floating interest rate the carrying value approximates its fair value.

36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

LPEI menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga pasar aktif *(unadjusted)* di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

(ii) Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari input selain dari kuotasi harga pasar yang termasuk dalam Tingkat yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) maupun tidak langsung (diperoleh dari harga);

(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menunjukan suatu analisa instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki:

36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

LPEI adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: fair values derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

(ii) Level 2: fair value measurements derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices);

(iii) Level 3: fair value measurements derived from valuation techniques that include inputs for theasset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the hierarchy:

	31 Desember/ *December 31,2020*			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset yang diukur pada nilai wajar				*Assets measured at fair value*
Tersedia untuk dijual				*Available-for-sale*
Efek-efek	572.273	--	--	*Securities*
Aset keuangan pada FVTPL				*Financial assets at FVTPL*
Tagihan derivatif	--	--	--	*Derivatives receivable*
	572.273	--	--	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				*Assets for which fair value are disclosed*
Giro pada			--	*Current account with*
Bank Indonesia	--	17.913	--	*Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	5.521.119	--	*Currenct account with bank*
Penempatan pada bank	--	7.998.721	--	*Placement with bank*
Pembiayaan dan piutang	--			*Financing and receivables*
Modal kerja	--	21.071.725	14.616.181	*Working capital*
Investasi	--	35.838.423	6.167.929	*Investment*
Konsumsi	--	97.021	--	*Consumption*
Piutang asuransi	--	35.540	--	*Insurance receivables*
Tagihan akseptasi	--	562.727	--	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain*)	--	75.365	--	*Other assets*)*
	--	71.218.554	20.784.110	
Total	**572.273**	**71.218.554**	**20.784.110**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

	31 Desember/ *December 31,2020*			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				*Liabilities measured at fair value*
Liabilitas derivatif	--	--	--	*Derivatives payable*
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan				*Liabilities for which fair value are disclosed*
Liabilitas segera	--	37.938	--	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	562.727	--	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	33.380.393	--	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	--	32.136.421	--	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	2.563	--	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	560	--	*Guarantess payable*
Liabilitas lain-lain**)	--	1.134.221	--	*Other liabilities**)*
	--	67.254.823	--	
Total	--	**67.254.823**	--	***Total***

	31 Desember/ *December 31,2019*			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset yang diukur pada nilai wajar				*Assets measured at fair value*
Tersedia untuk dijual				*Available-for-sale*
Efek-efek	576.543	--	--	*Securities*
Aset keuangan pada FVTPL				*Financial assets at FVTPL*
Tagihan derivatif	--	1.410	--	*Derivatives receivable*
	576.543	1.410	--	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				*Assets for which fair value are disclosed*
Giro pada			--	*Current account with*
Bank Indonesia	--	15.090	--	*Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	335.734	--	*Currenct account with bank*
Penempatan pada bank	--	17.538.669	--	*Placement with bank*
Tagihan akseptasi	--	658.289	--	*Acceptances receivable*
Pembiayaan dan piutang	--			*Financing and receivables*
Modal kerja	--	30.729.820	12.416.565	*Working capital*
Investasi	--	38.617.018	6.963.380	*Investment*
Konsumsi	--	104.489	--	*Consumption*
Piutang asuransi	--	1.400	--	*Insurance receivables*
Aset lain-lain*)	--	50.465	--	*Other assets*)*
	--	88.050.974	19.379.945	
Total	**576.543**	**88.052.384**	**19.379.945**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				*Liabilities measured at fair value*
Liabilitas derivatif	--	2.258	--	*Derivatives payable*
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan				*Liabilities for which fair value are disclosed*
Liabilitas segera	--	35.030	--	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	658.289	--	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	38.418.783	--	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	--	39.868.657	--	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	2.150	--	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	497	--	*Guarantess payable*
Liabilitas lain-lain**)	--	813.082	--	*Other liabilities**)*
	--	79.798.746	--	
Total	--	**79.801.004**	--	***Total***

36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tidak terdapat perpindahan level untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

There were no transfers between levels for the years ended December 31, 2020 and 2019.

37. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Manajemen modal
Tujuan utama dari kebijakan LPEI atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan LPEI memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi ekspansi usaha LPEI dan memenuhi ketentuan kecukupan permodalan oleh regulator. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Perhitungan rasio KPMM LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK/010/2009 Pasal 58, dimana LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8,00%.

37. Minimum Required Capital Adequacy Ratio

Capital management
The main purpose of LPEI's policy on capital management policies is to ensure that LPEI has strong capital to support expansive business strategy and to comply with provisions from the regulator. The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of capital to asset based on its risk (ATMR).

The CAR calculation of LPEI As of December 31, 2020 and 2019, are based on Minister of Finance Regulation No. 140/PMK/010/2009 Article 58, wherein LPEI is required to maintain the capital adequacy ratio of at least 8.00%.

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
ATMR (tanpa memperhitungkan risiko pasar)	87.000.665	111.064.412	*Risk Weighted Assets (RWA) (without market risk charge)*
ATMR (dengan memperhitungkan risiko pasar)	91.348.831	112.963.175	*RWA (with market risk charge)*
Modal			*Capital*
Modal inti	24.560.709	18.930.733	*Core capital*
Modal pelengkap	1.078.559	636	*Supplementary capital*
Total modal	**25.639.268**	**19.566.555**	***Total capital***
Rasio KPMM (tanpa memperhitungkan risiko pasar)	29,47%	17,62%	*CAR (without market risk charge)*
Rasio KPMM (dengan memperhitungkan risiko pasar)	28,07%	17,32%	*CAR (with market risk charge)*
Rasio KPMM minimum	8,00%	8,00%	*Minimum CAR*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, LPEI telah memenuhi ketentuan rasio KPMM.

As of December 31, 2020 and 2019, LPEI has complied with the required capital adequacy ratio.

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

38. Information of Transaction With Related Parties

In the normal course of business, LPEI enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties

The amounts and transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/*Related parties*	**Sifat dari hubungan/*Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/*Nature of transactions***
1. Personel manajemen kunci/ *Key management personnel*	Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit, dewan pengawas syariah dan kepala divisi/*Board of directors, managing directors, audit committee, sharia supervisory board and head of divisions*	Pembiayaan dan piutang dan penyisihan imbalan kerja/ *Financing and receivables, provision for employee benefits*
2. Kementerian Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ *Government of the Republic Indonesia Through the Ministry of Finance*	Pemilik/*Owner*	Efek-efek dan pinjaman yang diterima/*Securities and fund borrowings*
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank dan penempatan pada bank/ *Current accounts with banks and placements with banks*
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank, penempatan pada bank/ *Current account with banks, placements with banks*
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank dan penempatan pada bank/ *Current account with banks and placements with banks*

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan pada bank/*Placements with banks*
7. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan pada bank/ *Placements with banks*
8.PT BNI Multifinance	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
9.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/ *Financing and receivables*
10.PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
11. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
12. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
13.PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
14. PT PAL Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
15. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
16. PT Pindad (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
17. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
18. Pengembangan Pariwisata Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
19. PT Nindya Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
20. INKA Multi Solusi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
21. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
22. PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
23. PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
24. PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
25. PT Hutama Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
26. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
27. PT Petro Jordan Abadi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
28. PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
29. PT Hakaaston	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
30. PT Indofarma (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
31. PT Industri Gula Glenmore	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
32. PT Industri Kereta Api (Persero)	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
33. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
34. PT Nusantara Turbin dan Propulsi	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
35. PT Brantas Abipraya (Persero)	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
36. PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
37.PT Pejagan Pemalang Tol Road	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
38.PT Kimia Farma Tbk.	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
39.PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
40.PT Jasamarga Pandaan Malang	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
41.PT Jasamarga Solo Ngawi	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
42.PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
43.PT Jasamarga Manado Bitung	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
44.PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
45.PT Indah Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
46.PT Bio Farma (Persero)	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
47. PT Bank Negara Indonesia (Persero) - Seoul Tbk	Pengendalian melalui Pemer*intah* Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan pada bank/*Placements with bank*

ASET

ASSETS

a. Giro pada bank (Catatan 5a)

a. Current accounts with banks (Note 5a)

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.876	20.868	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.351	1.846	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.037.126	77	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**5.067.353**	**22.791**	***Total***

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

ASET (lanjutan)

ASSETS (continued)

b. Penempatan pada bank (Catatan 6a)

b. Placements with Banks (Note 6a)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.508.000	2.847.960	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.220.100	2.648.767	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	1.555.450	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	1.256.498	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	--	971.775	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Seoul	--	138.825	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Seoul*
Total	**5.728.100**	**9.419.275**	*Total*

c. Efek-efek (Catatan 7a)

c. Securities (Note 7a)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia	572.273	576.543	*The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9c)

d. Financing and receivables (Note 9c)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.786.000	3.241.164	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Angkasa Pura II (Persero)	1.313.596	1.375.215	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.145.595	1.147.389	*PT Krakatau Steel Persero (Tbk)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	400.836	850.927	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Pejagan Pemalang Tol Road	808.003	820.017	*PT Pejagan Pemalang Tol Road*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	816.835	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	806.228	809.482	*PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	661.755	650.940	*PT Perkebunan Nusantara V (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	557.353	596.870	*PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	185.393	503.082	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Jasamarga Solo Ngawi	410.993	412.126	*PT Jasamarga Solo Ngawi*
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	370.846	390.138	*PT Perkebunan Nusantara I (Persero)*
PT Jasamarga Pandaan Malang	431.935	376.821	*PT Jasamarga Pandaan Malang*
PT Industri Kereta Api (Persero)	--	370.405	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	226.078	365.494	*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Jasamarga Ngawi Kertasono Kediri	315.213	315.659	*PT Jasamarga Ngawi Kertasono Kediri*
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	112.136	306.790	*PT Dirgantara Indonesia (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	284.226	301.264	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT PAL Indonesia (Persero)	297.934	300.164	*PT PAL Indonesia (Persero)*
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	422.606	290.271	*PT Jasamarga Balikpapan Samarinda*
PT Industri Gula Glenmore	274.452	274.778	*PT Industri Gula Glenmore*

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

ASET (lanjutan)

ASSETS (continued)

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9c) (Lanjutan)

d. Financing and receivables (Note 9c) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
PT Petro Jordan Abadi	198.432	212.659	*PT Petro Jordan Abadi*
PT Pindad (Persero)	140.258	190.331	*PT Pindad (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	361.022	185.106	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Kharisma Pemasaran Bersama	--		*PT Kharisma Pemasaran Bersama*
Nusantara	--	143.371	*Nusantara*
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	132.763	132.976	*PT Jasamarga Surabaya Mojokerto*
PT Brantas Abipraya (Persero)	85.179	125.227	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan	0		*PT Pembangunan Perumahan*
Presisi Tbk	8.079	96.677	*Presisi Tbk*
INKA Multi Solusi	20.754	83.865	*Inka Multi Solusi*
PT Jasamarga Manado Bitung	136.943	80.556	*PT Jasamarga Manado Bitung*
PT Indofarma (Persero) Tbk	4.665	55.777	*PT Indofarma (Persero) Tbk*
PT Nusantara Turbin dan Propulsi	29.640	54.219	*PT Nusantara Turbin dan Propulsi*
PT Hakaaston	--	27.764	*PT Hakaaston*
PT BNI Multifinance	8.584	23.210	*PT BNI Multifinance*
PT Nindya Karya (Persero)	166.846	25.033	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Indah Karya (Persero)	21.077	21.008	*PT Indah Karya (Persero)*
PT Biofarma (Persero) Tbk	6.352	6.303	*PT Biofarma (Persero) Tbk*
PT Garuda Indonesia (Persero)	973.076	--	*PT Garuda Indonesia (Persero)*
Pengembangan Pariwisata Indonesia	487.706	--	*Pengembangan Pariwisata Indonesia*
Personel manajemen kunci	12.804	13.098	*Key management personnel*
Total	14.605.358	15.993.011	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian			*Less allowance for*
penurunan nilai	(553.436)	(336.150)	*impairment losses*
Neto	**14.051.922**	**15.656.861**	***Net***

LIABILITAS

LIABILITIES

e. Pinjaman yang diterima (Catatan 17)

e. Fund borrowings (Note 17)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pengendalian melalui			*Controlling through the Government of*
Pemerintah RI	--	--	*Republic of Indonesia*
Kementerian keuangan			*Government of the Republic*
atas nama Pemerintah			*Indonesia through Ministry*
Republik Indonesia	59.820	56.334	*of Finance*
Total	**59.820**	**56.334**	***Total***

f. Penyisihan imbalan kerja (Catatan 28)

f. Provision for employee benefits (Note 28)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Personel manajemen kunci	43.240	64.578	*Key management personnel*

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

LIABILITAS (lanjutan)

LIABILITIES (continued)

g. Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 18)

g. Unused loan facilities to debtors (Note 18)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	2.806.143	7.152.633	*Government entities and institutions*

h. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (Catatan 18)

h. Outstanding irrevocable L/C (Note 18)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	14.616	79.088	*Government entities and institutions*

i. Pendapatan Bunga Kredit Bermasalah (Catatan 18)

i. Interest income on non-performing loans (Note 18)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	265.871	73.772	*Government entities and institutions*

j. Bank garansi (Catatan 18)

j. Bank guarantee (Note 18)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	1.405.911	2.309.059	*Government entities and institutions*

k. Proteksi piutang dagang (Catatan 18)

k. Receivable protection (Note 18)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	48.473	36.789	*Government entities and institutions*

l. Tagihan dan liabilitas akseptasi (Catatan 11a)

l. Acceptances payable and receivable (Note 11a)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	--	7.091	*Government entities and institutions*

38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Information of Transaction With Related Parties (continued)

LIABILITAS (lanjutan)

LIABILITIES (continued)

m. Efek-efek utang yang diterbitkan (Catatan 16)

m. Debt securities issued (Note 16)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Entitas dan lembaga Pemerintah	8.024.300	10.278.300	*Government entities and institutions*

Suku bunga untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Interest rate for financing and receivables in Rupiahand United States Dollar with related parties are asfollow:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Suku bunga kontrak			***Contractual interest rate***
Rupiah	3,90 - 11,00	4,00 - 11,00	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,00 - 6.20	4,00 - 6.20	*United States Dollar*
Suku bunga efektif			***Effective interest rate***
Rupiah	3,92 - 20,16	4,06 - 22,74	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,00 - 6,62	3,60 - 890	*United States Dollar*

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas LPEI adalah sebagai berikut:

Percentage of transactions with related parties to total assets and liabilities of LPEI are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Aset			***Asset***
Giro pada bank	5,50%	0,12%	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	6,22%	8,67%	*Placements with banks*
Efek-efek	0,62%	0,51%	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	15,26%	14,40%	*Financing and receivables*
Tagihan akseptasi	0,00%	0,01%	*Acceptances receivable*
Total	**27,60%**	**23,71%**	*Total*
Liabilitas			***Liabilities***
Pinjaman yang diterima	0,09%	0,06%	*Fund borrowings*
Penyisihan imbalan kerja	0,06%	0,04%	*Liability for employee benefits*
Liabilitas akseptasi	0,00%	0,01%	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	11,93%	11,45%	*Debt securities issued*
Total	**12,08%**	**11,56%**	***Total***

39. Informasi Tambahan

Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap total aset produktif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 17,92% dan 15,07%.

39. Additional Information

As of December 31, 2020 and 2019, the non-performing assets to total earning assets ratios were 17.92% and 15.07%, respectively.

40. Informasi Segmen Usaha

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

40. Business Segment Information

Segment information based on business type is as follows:

	31 Desember/*December 31, 2020*						
	Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	3.958.233	830.069	314.579	--	--	5.102.881	*Segment income*
Beban segmen						(4.262.993)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto						839.888	*Segment income - net*
Pendapatan operasional lainnya						317.595	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	446.709	(821.364)	(48.425)	--	--	(423.080)	*Provision for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan						(1.946)	*Provision for impairment Losses on estimated guarantee claim*
Beban operasional lainnya						(676.887)	*Other operating expenses*
Laba operasional						55.570	*Income from operations*
Pendapatan bukan operasional - neto						6.152	*Non-operating income - net*
Pendapatan (Beban) pajak						226.666	*Tax Income (expense)*
Laba tahun berjalan						288.388	*Income for the year*
Aset	**98.735.902**	**13.295.412**	**12.227.029**	**--**	**(32.173.783)**	**92.084.560**	***Assets***
Liabilitas	**74.676.154**	**13.518.419**	**11.320.914**	**(528)**	**(32.226.948)**	**67.288.011**	***Liabilities***

	31 Desember/*December 31, 2019*						
	Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	5.683.058	1.078.550	300	--	--	7.061.466	*Segment income*
Beban segmen						(5.646.218)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto						1.415.248	*Segment income - net*
Pendapatan operasional lainnya						294.479	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(6.053.178)	(625.579)	(2.584)	--	--	(6.681.341)	*Provision for impairment losses on financial financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan						6.802	*Provision for impairment Losses on estimated guarantee claim*
Beban operasional lainnya						(691.234)	*Other operating expenses*
Laba operasional						(5.656.046)	*Income from operations*
Pendapatan bukan operasional - neto						21.188	*Non-operating income - net*
Pendapatan (Beban) pajak						924.009	*Tax Income (expense)*
Laba tahun berjalan						(4.710.849)	*Income for the year*
Aset	115.900.669	14.751.352	5.849.171	--	(27.799.467)	108.701.725	***Assets***
Liabilitas	**97.007.479**	**97.007.479**	**5.202.365**	**(528)**	**(25.546.384)**	**89.762.973**	***Liabilities***

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas

41. Maturity Analysis of Assets and Liabilities

	31 Desember/ *December 31,2020*			31 Desember/ *December 31,2019*			
	Jatuh tempo dalam satu tahun/ *One year And below*	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ *Due beyond one year*	Total	Jatuh tempo dalam satu tahun/ *One year And below*	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ *Due beyond one year*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Giro pada							*Current accounts with*
Bank Indonesia	17.913	--	17.913	15.090	--	15.090	*Bank Indonesia*
Giro pada bank	5.521.119	--	5.521.119	335.734	--	335.734	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	7.998.721	--	7.998.721	17.538.669	--	17.538.669	*Placements with banks*
Efek-efek	--	572.273	572.273	--	576.543	576.543	*Securities*
Tagihan akseptasi	562.727	--	562.727	556.668	101.621	658.289	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	--	--	--	1.410	--	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang syariah	22.942.640	67.465.433	90.408.073	32.510.394	65.296.212	97.806.606	*Financing and sharia receivables*
Piutang pembiayaan garansi lainnya	303.054	--	303.054	290.587	--	290.587	*Other guarantee receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	35.540	--	35.540	1.400	--	1.400	*Insurance and guarantee receivables*
Aset lain-lain	187.207	--	187.207	53.219	--	53.219	*Other assets*
Total aset keuangan	37.568.921	68.037.706	105.606.627	51.303.171	65.974.376	117.277.547	*Total financial assets*

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas (Lanjutan)

41. Maturity Analysis of Assets and Liabilities (Continued)

	31 Desember/ *December 31,2020*			31 Desember/ *December 31,2019*			
	Jatuh tempo dalam satu tahun/ *One year And below*	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ *Due beyond one year*	Total	Jatuh tempo dalam satu tahun/ *One year And below*	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ *Due beyond one year*	Total	
Aset Non Keuangan							***Non-financial Assets***
Kas	1.099	--	1.099	1.350	--	1.350	*Cash*
Biaya dibayar dimuka	--	12.068	12.068	--	14.582	14.582	*Prepaid expenses*
Klaim atas kelebihan pembayaran Pajak	--	169.074	169.074	--	339.625	339.625	*Claim for tax refund*
Aset pajak tangguhan-neto	--	2.798.015	2.793.456	--	1.080.267	1.080.267	*Deferred tax assets-net*
Aset tetap	--	1.532.395	1.532.395	--	1.508.693	1.508.693	*Premises and equipment*
Aset reasuransi	1.284	--	1.284	4.853	--	4.853	*Reinsurance assets*
Aset lain-lain	37.558	--	37.558	14.311	--	14.311	*Other assets*
Total aset non keuangan	39.941	4.511.552	4.546.934	20.514	2.943.167	2.963.681	*Total non-financial assets*
	37.608.862	72.549.258	110.153.561	51.323.685	68.917.543	120.241.228	
Akumulasi penyusutan			(366.047)			(255.338)	*Accumulated depreciation*
Cadangan kerugian penurunan nilai			(17.702.954)			(11.284.165)	*Allowance for impairment losses*
Total			**92.084.560**			**108.701.725**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilties***
Liabilitas segera	37.936	--	37.936	35.030	--	35.030	*Current liabilities*
Efek-efek utang yang diterbitkan	8.880.461	27.600.583	36.481.044	8.912.276	36.234.639	45.146.915	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	6.277.620	22.322.153	28.599.773	15.505.232	25.987.680	41.492.912	*Fund borrowings*
Liabilitas akseptasi	562.727	--	562.727	556.668	101.621	658.289	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	2.258	--	2.258	*Derivatives payable*
Utang asuransi	2.563	--	2.563	2.150	--	2.150	*Insurance payable*
Utang penjaminan	560	--	560	497	--	497	*Guarantee payable*
Liabilitas sewa guna usaha	4.398	10.439	14.837	--	--	--	*Lease payable*
Liabilitas lain-lain	439.169	--	439.169	607.117	--	607.117	*Other liabilities*
Total liabilitas keuangan	16.205.434	49.933.175	66.138.609	25.621.228	25.621.228	87.945.168	*Total financial liabilities*
Liabilitas Non Keuangan							***Non-financial Liabilities***
Utang pajak	11.664	--	11.664	45.929	--	45.929	*Taxes payable*
Penyisihan imbalan kerja	--	182.553	182.553	--	292.329	292.329	*Provision for employee benefits*
Estimasi klaim	41.129	--	41.129	6.848	--	6.848	*Estimated claims*
Liabilitas asuransi	3.230	--	3.230	6.515	--	6.515	*Insurances liabilities*
Liabilitas lain-lain	910.826	--	910.826	1.466.184	--	1.466.184	*Other liabilities*
Total liabilitas non keuangan	966.849	182.553	1.149.402	1.525.476	292.329	1.817.805	*Total non-financial liabilities*
Total	**17.172.283**	**50.115.728**	**67.288.011**	**27.146.704**	**25.913.557**	**89.762.973**	***Total***

42. Tambahan Informasi Arus Kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

42. Additional Cash Flow Information

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

			Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*			
	31 Desember/ *December 31, 2019*	Arus kas/ *Cash flow*	Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange Rate*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31, 2020*	
Rupiah						***Rupiah***
Liabilitas sewa	--	(3.215)	--	18.052	14.837	*Lease liabilities*
Pinjaman yang diterima	41.492.912	(12.927.162)	34.023	--	28.599.773	*Fund borrowing*
Efek-efek yang diterbitkan	45.146.915	(8.685.002)	--	19.131	36.481.044	*Debt securities issued*
Total	**86.639.827**	**(21.615.379)**	**34.023**	**37.183**	**65.080.817**	***Total***

			Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*			
	31 Desember/ *December 31, 2018*	Arus kas/ *Cash flow*	Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange Rate*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Rupiah						***Rupiah***
Pinjaman yang diterima	49.858.784	(8.365.872)	--	--	41.492.912	*Fund borrowing*
Efek-efek yang diterbitkan	44.113.667	1.039.907	(6.659)	--	45.146.915	*Debt securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.504.655	(1.504.655)	--	--	--	*Securities sold under repurchase agreement*
Total	**93.972.451**	**(7.325.965)**		**--**	**86.639.827**	***Total***

43. Standar Akuntansi Baru

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Berlaku efektif 1 Januari 2020

a. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK No 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2". Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase* 2.

b. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 *Business Combinations: Definition of Business* merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *US Financial Accounting Standards Board (FASB)*. Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.

c. PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk", efektif 1 Januari 2021. PSAK ini memberikan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi pada sukuk.

d. PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. PSAK ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi wakaf dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi.

43. New Prospective Accounting Standards

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

Effective from January 1, 2020

a. Amendment to SFAS No. 71, "Financial Instruments", Amendment to SFAS No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendment to SFAS No. 60: "Financial Instruments, Disclosure", Amendment to SFAS No. 62: "Insurance Contracts", and Amendment to SFAS No. 73: "Lease" regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2. This amendment describes Interest Rate Reference Reform - Phase 2 *adopted from IFRS regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase* 2.

b. SFAS22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business", this amendment adopted from the IFRS Amendment 3: "Business Combinations: Definition of Business" is the result of a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board (FASB). This amendment clarifies the definition of business with the aim of assisting the entity in determining whether a transaction should be recorded as a business combination or an asset acquisition.

c. SFAS110, "Accounting for Sukuk", effective January 1, 2021. This PSAK clarifies the initial recognition of investments in sukuk

d. SFAS112, Accounting for Endowments", effective January 1, 2021, and earlier application is permitted. This SFAS describes the accounting treatment of waqf from corporate donors to individual and corporate recipients

44. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020

Catatan berikut menunjukkan dampak atas adopsi PSAK 71 pada laporan keuangan yaitu efek atas perubahan klasifikasi dan efek yang timbul dari pergantian atas perhitungan kerugian kredit pada saat terjadinya (*incurred loss*) berdasarkan PSAK 55 dengan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) berdasarkan PSAK 71.

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat dengan klasifikasi berdasarkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

44. Classification of Financial Assets and Liabilities based on SFAS 71 and SFAS 73 on January 1, 2020

The following notes show the impact of adoption of SFAS 71 on the effect of financial statements on changes in classification and the effects arising from changes in the calculation of credit losses incurred (loss based on SFAS 55) with expected credit losses based on SFAS 71.

The following table shows the carrying values with classification based on SFAS 71 on January 1, 2020:

	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ *Classification under SFAS 55*	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ *Classification under SFAS 71*	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55/ *Carrying amount under SFAS 55* 31 Desember/ *December* 2019	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71/ *Carrying amount under SFAS 71* 1 Januari/ *January* 2020
Aset Keuangan/*Financial Assets*				
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	15.090	15.090
Giro pada bank/ *Current accounts with banks*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	335.734	335.725
Penempatan pada bank/*Placements with banks*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	17.538.669	17.501.477
Efek-efek/ *Securities*	Tersedia untuk dijual/*Available for sale*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Fair value through other comprehensive income*	576.543	576.543
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Reverse repos*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	--	-
Tagihan akseptasi/ *Acceptances receivable*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	658.289	652.351
Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable*	Nilai wajar melalui laba rugI/*Fair value through profit or loss*	Nilai wajar melalui laba rugI/*Fair value through profit or loss*	1.410	1.410
Pembiayaan dan piutang syariah/ *Financing and sharia receivables*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	86.525.430	80.518.421
Piutang pembiayaan garansi lainnya/ *Other guarantee* receivables	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	287.598	283.842
Piutang asuransi dan penjaminan/ *Insurance and guarantee receivables*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	1.400	1.400
Aset lain-lain/ *Other assets*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	67.530	67.530
Total aset keuangan/ *Total financial assets*			**106.007.693**	**99.953.789**

44. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)

44. Classification of Financial Assets and Liabilities based on SFAS 71 and SFAS 73 on January 1, 2020 (continued)

	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ *Classification under SFAS 55*	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ *Classification under SFAS 71*	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55/ *Carrying amount under SFAS 55* 31 Desember/ *December* 2019	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71/ *Carrying amount under SFAS 71* 1 Januari/ *January* 2020
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilties*				
Liabilitas segera/ *Current liabilities*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	35.030	35.030
Efek-efek utang yang diterbitkan/*Debt securities issued*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	45.146.915	45.146.915
Pinjaman yang diterima/ *Fund borrowings*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	41.492.912	41.492.912
Liabilitas terkait dengan traksaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Liability related to reverse repos*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	--	-
Liabilitas akseptasi/ *Acceptances payable*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	658.289	658.289
Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable*	Nilai wajar melalui laba rugl/*Fair value through profit or loss*	Nilai wajar melalui laba rugl/*Fair value through profit or loss*	2.258	2.258
Utang asuransi/ *Insurance payable*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	2.150	2.150
Utang penjaminan/ *Guarantee payable*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	497	497
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	--	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	Kredit yang diberikan dan piutang/*Loans & receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/*Amortized cost*	2.073.301	2.073.301
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*			**89.411.352**	**89.411.352**

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

44. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71, neto setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada komponen ekuitas :

44. Classification of Financial Assets and Liabilities based on SFAS 71 and SFAS 73 on January 1, 2020 (continued)

The following table analyze the impact of the adoption of SFAS 71, net after tax, during the transition on 1 January 2020 in the following equity components:

	Dampak penerapan PSAK 71/ *Impact of adopting SFAS 71*
Laba ditahan/*Retained earnings*	
Saldo 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55/ *Balance under SFAS 55 at December 31, 2019*	(3.228.788)
Reklasifikasi berdasarkan PSAK 71/ *Reclassification under SFAS 71*	-
Pengakuan kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71 setelah pajak/ *Recognition of expected credit losses under SFAS 71 net tax*	(4.540.428)
Saldo 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71/ *Balance under SFAS 71 at January 1, 2020*	**(7.769.216)**

Tabel berikut adalah rekonsiliasi atas keseluruhan nilai tercatat instrumen keuangan atas klasifikasi dan pengukuran serta perhitungan kerugian kredit pada saat terjadinya (*incurred loss*) berdasarkan PSAK 55 dengan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) berdasarkan PSAK 71:

The following table is a reconciliation of the carrying amount of financial instruments in the classification and measurement and calculation of credit losses incurred (loss based on SFAS 55) with expected credit losses based on SFAS 71:

	1 Januari/*January 2020*			
	Sebelum penyesuaian/ *Before Adjustment*	Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 71/ *Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 71*	Setelah penyesuaian/ *After Adjustment*	
ASET				***ASSETS***
Kas	1.350	--	1.350	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	15.090	--	15.090	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	335.734	(9)	335.725	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	17.538.669	(37.192)	17.501.477	*Placements with banks*
Efek-efek	576.543	--	576.543	*Securities*
Tagihan derivatif	1.410	--	1.410	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah	86.525.430	(6.007.009)	80.518.421	*Financing and receivables, and financing and sharia receivables*
Piutang pembiayaan garansi	287.598	(3.756)	283.842	*Guarantee financing receivables*
Pajak dibayar dimuka	339.625	--	339.625	*Prepaid tax*
Biaya dibayar dimuka	14.582	--	14.582	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan	1.400	--	1.400	*guarantee receivables*
Aset reasuransi	4.853	--	4.853	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi	658.289	(5.938)	652.351	*Acceptances receivable*
Aset tetap-neto	1.253.355	--	1.253.355	*Premises and equipment-net*
Aset pajak tangguhan - neto	1.080.267	1.513.476	2.593.743	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	67.530	--	67.530	*Other assets*
TOTAL ASET	**108.701.725**	**(4.540.428)**	**104.161.297**	***TOTAL ASSETS***

44. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)

44. Classification of Financial Assets and Liabilities based on SFAS 71 and SFAS 73 on January 1, 2020 (continued)

	1 Januari/*January 2020*			
	Sebelum penyesuaian/ *Before Adjustment*	Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 71/ *Impact from transitional adjustment on implemantation SFAS 71*	Setelah penyesuaian/ *After Adjustment*	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	35.030	--	35.030	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	658.289	--	658.289	*Acceptances payable*
Utang pajak	45.929	--	45.929	*Taxes payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	45.146.915	--	45.146.915	*Debt securities issued*
Liabilitas derivatif	2.258	--	2.258	*Derivatives payable*
Pinjaman yang diterima	41.492.912	--	41.492.912	*Fund borrowings*
Utang asuransi	2.150	--	2.150	*Insurance payable*
Utang penjaminan	497	--	497	*Guarantee payable*
Liabilitas asuransi	6.515	--	6.515	*Insurance liabilities*
Estimasi klaim penjaminan	6.848	--	6.848	*Estimated guarantee claim*
Liabilitas imbalan kerja	292.329	--	292.329	*Liability for employee benefits*
Liabilitas lain-lain	2.073.301	--	2.073.301	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**89.762.973**	**--**	**89.762.973**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				
Kontribusi modal Pemerintah				***EQUITY***
Penugasan Umum	16.946.276	--	16.946.276	*Government capital contribution*
Penugasan Khusus	5.200.000	--	5.200.000	*General Assignment*
	22.146.276		22.146.276	*National Interest Account*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	13.245	--	13.245	*Unrealized gain on available-for-sale securities, net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	8.019	--	8.019	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya:				*Appropriated:*
Cadangan umum	322.161	--	322.161	*General reserve*
Cadangan tujuan	758.235	--	758.235	*Specific reserve*
	1.080.396		1.080.396	
Belum ditentukan penggunaannya	(4.309.184)	(4.540.428)	(8.849.612)	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**18.938.752**	**(4.540.428)**	**14.398.324**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**108.701.725**	**(4.540.428)**	**104.161.297**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For the Year Ended
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

44. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 73 pada posisi laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

44. Classification of Financial Assets and Liabilities based on SFAS 71 and SFAS 73 on January 1, 2020 (continued)

The following table analyze the impact of the adoption of PSAK 73 on financial statement position at 1 January 2020:

	1 Januari/*January 1*, 2020			
	Sebelum penyesuaian /*Before adjustment*	**Penyesuaian PSAK *PSAK 73 adjustement***	**Setelah penyesuaian /*After adjustment***	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET				***ASSET***
Biaya dibayar dimuka	4.923	(3.537)	1.386	*Prepaid expenses*
Aset tetap - Aset hak guna	-	14.922	14.922	*Fixed asset - except for-right Fixed asset - Right of use*
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas sewa		(11.385)	(11.385)	*Lease liabilities*

45. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standarbaru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namunbelum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021:

a. Amendemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”. Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
b. Amendemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian “10 per sen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan”. Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

45. Accounting Standards and Standard Interpretations which Has Issued But Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several newstandards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

Effective from January 1, 2021:

a. Amendment to SFAS No. 22, “Business Combinations on Reference to Conceptual Frameworks”. This amendment clarifies the interaction between SFAS No. 22, SFAS No. 57, IFAS No. 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.
b. Amendment to SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs". This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.
c. Annual Adjustment 2020 - SFAS No. 71, “Financial Instruments - Fee under test “10 per cent” for derecognition of a financial liability”. The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

45. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, yaitu amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025, yaitu PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

LPEI masih dalam proses melakukan evaluasi atas dampak dari amandemen dan PSAK baru tersebut diatas terhadap laporan keuangan.

45. Accounting Standards and Standard Interpretations which Has Issued But Not Yet Effective (continued)

Effective from January 1, 2023, Amendments to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements regarding the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term", effective January 1, 2021, and earlier application is permitted. The amendments specify the requirements for classifying a liability as current or noncurrent.

Effective from January 1, 2025, SFAS No. 74, "Insurance Contract", adopted from IFRS 17, effective January 1, 2025, with earlier application permitted for entities that have also applied SFAS 71 and SFAS 72.

LPEI is still in the process of evaluating the impact of the amendments and new PSAK mentioned above on the financial statements.

46. Perkembangan Kondisi Ekonomi di Indonesia

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

46. Development in Indonesia economic conditon

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders. The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

47. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Memorandum Prosedur No. MPO.0003/CEO/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mulai berlaku tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembidangan Unit Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah sebagai berikut:

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana I, Direktur Pelaksana II, Direktur Pelaksana III, Direktur Pelaksana IV Direktur Pelaksana V, *Head of Compliance*, HR & TO, dan *Head of Internal Audit*.
- Direktur Pelaksana I membawahi Head of Penjaminan, Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Bisnis BUMN, Divisi *Trade Finance*, Divisi Asuransi, *Corporate Desk* Surabaya, dan *Decision Support*.
- Direktur Pelaksana II membawahi Divisi Bisnis Syariah & *Special Mention*, Divisi Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial, Divisi Jasa Konsultasi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, Divisi Penugasan Khusus, Divisi Program Investasi Pemerintah, dan *Decision Support*.
- Direktur Pelaksana III membawahi *Head of Finance & Strategic Planning*, Divisi *Communicatoin & Stakeholder Engagement*, Divisi *Office of The Board*, Divisi *IEB Institute*, Divisi Financial *Institution & Treasury*, Divisi Pengadaan dan Umum, dan Divisi Hukum.
- Direktur Pelaksana IV membawahi *Head of Credit & Risk*, Divisi *Credit Reviewer*, Divisi Restrukturisasi Aset Konvensional dan Syariah, Divisi Litigasi, dan *Decision Support*.

47. Subsequent Events

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Memorandum of Procedure No. MPO.0003/CEO/02/2021 dated February 8, 2021 which is an inseparable part of Executive Director Regulation No. 0065/PDE/11/2019 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Indonesian Export Financing Institutions which came into force on January 20, 2020, regarding the Work Unit Structure of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia are as follows :

- *Executive Director is responsible for Managing Director I, Managing Director II, Managing Director III, Managing Director IV, Managing Director V, Head of Compliance, HR & TO, and Head of Internal Audit.*
- *Managing Director I is responsible for Head of Guarantee, Corporation Financing, State-Owned Enterprise Financing, Trade Finance, Insurance, Corporate Desk Surabaya, and Decision Support.*
- *Managing Director II is responsible for Sharia & Special Mention, Small Medium Enterprise Financing and Commercial, Consultation, Regional Offices and Branch Offices, Special Assignment, Government Investment Program, and Decision Support.*
- *Managing Director III is responsible for Head of Finance & Strategic Planning, Communication & Stakeholder Engagement, Office of The Board, IEB Institute, Financial Institution & Treasury, Procurement and General Affairs, and Legal.*
- *Managing Director IV is responsible for Head of Credit & Risk, Divisi Credit Reviewer, Asset Restructuring Conventional and Sharia, Recovery Conventional and Sharia, Litigation, and Decision Support.*

47. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (lanjutan)

- Direktur Pelaksana V membawahi *Head of Operation & IT*, Divisi *Policy and Procedure*, Divisi *Product Development*, dan Divisi *Credit Operation* and *Supervision*.
- Head of Penjaminan membawahi Divisi Penjaminan, Divisi *Reviewer* Penjaminan dan Divisi *Operatio*n Penjaminan.
- Head of Operation & IT membawahi Divisi Teknologi Sistem Informasi, dan Divisi Operasional.
- *Head of Finance & Strategic Planning* membawahi Divisi *Finance*, Divisi *Strategic & Corporate Planning*, Divisi MIS & *Business Finance*, dan *Divisi Middle Office Treasury*.
- *Head of Compliance*, HR & TO membawahi Divisi *Human Resources Business Partner*, *Organization & Recruitment*, Divisi *Human Resources Services & People Development,* Divisi Kepatuhan, *dan Divisi Transformation Office & Culture*.
- Head of Internal Audit membawahi Divisi Reguler Audit, Divisi Special Audit, dan Departemen QA, *Follow Up & Methodology*.
- Head of Credit & Risk membawahi Divisi *Credit Reviewer*, Divisi *Risk & Portofolio Management* dan Pemegang Limit Individu.

47. Subsequent Events (continued)

- *Managing Director V is responsible for Head of Operation & IT, Divisi Policy and Procedure, Product Development, and Credit Operation and Supervision.*
- *Head of Guarantee is responsible for Guarantees, Guarantee Reviewer, Guarantee Operations..*
- *Senior Executive Vice President II is responsible for Information Systems, and Operations.*
- *Head of Finance & Strategic Planning is responsible for Finance, Strategic & Corporate Planning, MIS & Business Finance, and Middle Office Treasury.*
- *Head of Compliance, HR & TO is responsible for Human Resources Business Partner, Organization & Recruitment, Human Resources Services & People Development, Compliance, and Transformation Office & Culture*
- *Head of Internal Audit is responsible for Reguler Audit, Special Audit, dan QA, Follow Up & Methodology.*
- *Head of Credit & Risk is responsible for Credit Reviewer, Risk & Portofolio Management, and Individual Limit Holders.*

48. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen LPEI pada tanggal 12 April 2021.

48. Completion of The Financial Statements

The management is responsible for the preparation of financial statements which are completed and authorized for issue on April 12, 2021.